BUMN UNTUK INDONESIA

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia



TUMBUH CERDAS DI TENGAH PERUBAHAN

GROW SMART AMID CHANGES

LAPORAN TAHUNAN 2019 ANNUAL REPORT

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia

TEMA
Theme



TUMBUH CERDAS DI TENGAH PERUBAHAN
GROW SMART AMID CHANGES

Sepanjang tahun 2019 Perum Jamkrindo mampu tampil dengan kinerja operasional dan keuangan yang sehat dan prima. Perolehan kinerja keuangan ditandai Pendapatan Penjaminan 2019 sebesar Rp 2,10 triliun dan meningkat 68,59% dari tahun sebelumnya. Laba Tahun Berjalan pada 2019 sebesar Rp 625,78 miliar meningkat 57,41% jika dibanding tahun sebelumnya. Raihan kinerja positif mencerminkan suatu gambaran pertumbuhan yang cerdas di tengah perubahan di era penuh ketidakpastian dan tuntutan *Disruptive Innovation*.

Dengan bekal raihan yang prima, insan Jamkrindo yakin mampu bersaing melalui serangkaian adaptasi dan inovasi produk dan layanan sehingga selalu mampu mencapai ekspektasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan bekal pertumbuhan yang cerdas diharapkan akan mampu membangun internal *confidence* dan secara agregat mampu membangun suatu kedayatahanan sistemik; suatu parameter yang sangat fundamental dibutuhkan oleh sebuah perusahaan saat ini.

Dengan misi "Meningkatkan aksesibilitas finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif dan efisien secara berkelanjutan". Dengan demikian Perum Jamkrindo tumbuh cerdas di tengah perubahan serta mampu meraih keunggulan daya saing berkelanjutan.

Throughout 2019 Perum Jamkrindo was able to perform with sound and excellent operational and financial performance. Financial performance acquisition in 2019 marked by Guarantee Income of Rp 2.10 trillion and an increase of 68.59% from the previous year. The Current Year Income in 2019 of Rp 625.78 billion, an increase of 57.41% compared to the previous year. This positive performance reflects a picture of smart growth amid changes in an era of uncertainty and the demands of Disruptive Innovation.

With excellent achievements, Jamkrindo's personnel are confident of being able to compete through a series of adaptations and innovations in products and services so that they are always able to meet the expectations of all stakeholders. With smart growth capital, it is expected to build internal confidence and, in the aggregate, build a systemic resilience, a fundamental parameter needed by a company nowadays.

With the mission "Increasing financial accessibility of Micro Small Medium Enterprises and Cooperatives through the provision of guarantees that are innovative, competitive with the services that are professional, effective, and efficient in a sustainable manner." Thus Perum Jamkrindo is growing smart amid changes and able to achieve sustainable competitive advantage.

KESINAMBUNGAN TEMA
Theme Continuity

BERSINERGI MENGUATKAN EKONOMI NEGERI

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tentang Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia memberikan peluang kepada Jamkrindo untuk merambah ke segmen pasar baru yang berada di bawah koridor sinergi BUMN. Hal ini menjadikan potensi pasar yang dapat digarap oleh Jamkrindo menjadi semakin besar. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Jamkrindo mengambil langkah yang cepat untuk melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perusahaan agar pengembangan usaha yang dilakukan memiliki payung hukum yang jelas. Perluasan pasar ini juga memberikan peluang bagi Jamkrindo untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi bangsa dengan melakukan sinergi bersama BUMN lainnya.

Tahun 2018, Jamkrindo juga terus bersinergi dalam memberikan dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi (UMKM dan Koperasi) agar dapat menikmati kredit perbankan, walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan, sebagai upaya mendukung penguatan ekonomi negeri.



2018

SYNERGY TO EMPOWER THE NATION'S ECONOMY

The issuance of Government Regulation (PP) Number 35 concerning the Public Corporation of Indonesian Credit Guarantee (Perum Jamkrindo) provides an opportunity for Jamkrindo to penetrate into new market segments that are under the corridor of SOEs synergy. This makes the market potential that can be worked on by Jamkrindo to be even greater. To optimize this potential, Jamkrindo took a quick step to make adjustments to the Company's Articles of Association so that the business development carried out had a clear legal basis. The expansion of this market also provides an opportunity for Jamkrindo to make a greater contribution to the development of the nation's economy through synergizing with other SOEs.

In 2018, Jamkrindo also continues to synergize in providing support for Micro, Small, and Medium Enterprises as well as Cooperatives (MSMEs and Cooperatives) to enjoy bank credit, even though they cannot fulfill some of the requirements set by banks. This is conducted in an effort to support the country's economic strengthening.

TUMBUH & BERKEMBANG BERSAMA UMKMK

Perum Jamkrindo mengemban misi untuk mendukung kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi (UMKM dan Koperasi). Dengan adanya penjaminan, maka UMKM dan Koperasi tetap dapat menikmati kredit perbankan, walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan.

Perum Jamkrindo terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk penjaminan bagi UMKM dan Koperasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Perum Jamkrindo ingin terus tumbuh dan berkembang bersama UMKM dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.



2017

GROW AND DEVELOP TOGETHER WITH MSMES

Perum Jamkrindo has a mission to support Government policies and programs in the field of economy and national development, especially on Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (UMKM and Koperasi). With the existence of guarantee, MSMEs and Cooperatives can still enjoy banking credit, even though some of the requirements set by banks cannot be met.

Perum Jamkrindo continuously strives to improve the quality of service and product guarantee for MSMEs and Cooperatives to encourage the growth of people based economy. Perum Jamkrindo wants to grow and develop together with UMKM and contribute to national development.

KERJA NYATA BERSAMA UMKMK, MEMAJUKAN EKONOMI KERAKYATAN

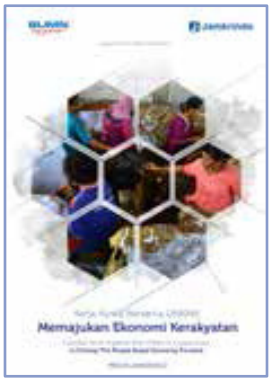

2016

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) hadir dan terfokus pada kegiatan penjaminan kredit untuk mendukung pengembangan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), yang berperan sangat penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Penjaminan perlu diberikan karena banyak UMKMK yang mengalami kesulitan mendapatkan tambahan modal. Walau mempunyai prospek usaha yang bagus, namun banyak di antara mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank.

Dengan adanya penjaminan, maka UMKMK tetap dapat menikmati kredit perbankan, walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan. Kerja nyata itu berbuah manis. Sejalan dengan UMKMK yang terus berkembang dan menggerakkan ekonomi kerakyatan, kinerja Perum Jamkrindo pun mencatatkan kinerja positif dari tahun ke tahun.

CONCRETE WORK TOGETHER WITH MSMES & COOPERATIVES, TO DRIVING THE PEOPLE-BASED ECONOMY FORWARD

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) is present and focus on credit guarantee activities to support the development of Micro, Small, Medium and Cooperative Enterprise (MSMEs & Cooperatives) activities, which play an important role in driving the people's economy. Guarantee is a necessity to be given because many MSMEs & Cooperatives are having difficulty getting additional capital. Despite having good business prospects, many of them are unable to meet the requirements set by the bank.

With the guarantee, MSMEs & Cooperatives can still utilize banking credit, even though it cannot meet some of the requirements set by banks. Concrete work generates satisfaction outcome. In line with MSMEs & Cooperatives continuous growth and driving the people based economy, Perum Jamkrindo performance also recorded positive performance from year to year.

MEMBANGUN UMKMK & KOPERASI YANG KUAT UNTUK INDONESIA SEJAHTERA

Sebagai perusahaan BUMN, Perum Jamkrindo ingin memberikan kontribusi nyata untuk menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya pada segmen UMKMK dan Koperasi.



2015

BUILDING STRONG MSMES & COOPERATIVE FOR A PROSPEROUS INDONESIA

As a state-owned enterprise, Perum Jamkrindo has a desire to make a real contribution to the success of national economic development, especially in the segment of MSMEs and Cooperatives.

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

TABLE OF CONTENTS

DAFTAR ISI



Performa 2019
2019 Performance

8 Kilas Kinerja 2019
Performance Highlights in 2019

9 Ikhtisar Keuangan Penting Tahun 2015-2019
Financial Highlights 2015-2019

Laporan Manajemen
Management Report

14 Laporan Dewan Pengawas
Board of Supervisor Council Report

22 Laporan Direksi
Board of Directors Report

32 Surat Pernyataan Dewan Pengawas dan Direksi
Statement Letter of Board of Supervisor Council and Directors

Profil Perusahaan
Company Profile

36 Profil Perusahaan
Company Profile

41 Bidang Usaha
Line of Business

51 Kompetensi Inti
Core Competence

52 Struktur Organisasi
Organizational Structure

54 Visi, Misi Dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission and Corporate Culture

56 Makna *Branding* Logo
The Meaning Behind Logo Branding

57 Profil Dewan Pengawas
Profile of The Supervisory Board

65 Profil Direksi
Profile of The Directors

71 Profil Pejabat Eksekutif
Profile of Executive Officers

76 Demografi Karyawan
Employee Demographics

77 Komposisi Pemegang Saham/Pemilik Modal
Composition of Shareholders/Capital Owner

78 Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi *Joint Venture* (JV) / *Special Purpose Vehicle* (SPV)
List of Subsidiaries and Association /Joint Venture (JV)/Special Purpose Vehicle(SPV)

80 Struktur Grup
Group Structure

81 Kronologis Penerbitan Saham
Chronology of Share Issuance

81 Kronologis Penerbitan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities Issuance

82 Lembaga dan Profesi Penunjang
Supporting Institutions and Professionals

83 Penghargaan Dan Sertifikasi
Awards and Certifications

86 Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang / Kantor Perwakilan
List of Addresses of Subsidiaries and Branch Offices/Representative Offices

91 Informasi pada Situs Web Perusahaan
Information on the Company's Website

92 Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal
Education and/or Training of The Board of Supervisor Council, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

Analisis & Pembahasan Manajemen
Management Discussion & Analysist

106 Tinjauan Perekonomian
Economic Review

118 Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Operating Overview per Business Segment

132 Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Entitas Anak)
Performance of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (the Subsidiary)

135 Tinjauan Keuangan
Financial Review

162 Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

172 Laporan Arus Kas
Statements of Cash Flows

176 Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang
The Ability to Pay Debt and Receivable Collectibility

182 Struktur Modal
Capital Structure

184 Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2019, dan Target Tahun 2020
Comparison between the 2019 Target and Realization, and the 2020 Target

186 Prospek Usaha, Kondisi Industri dan Kondisi Ekonomi
Business Prospects, Industrial Conditions, and Economic Conditions

194 Pemasaran
Marketing

198 Kebijakan Dividen
Dividend Policy

198 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP / MSOP)
Employee and/or Management Shares Ownership Program (ESOP / MSOP)



198 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of the Use of Public Offering Funds

199 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Material Transaction Information that Contains Conflicts of Interest or Transactions with Affiliates

201 Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan
Amendments to the Laws and Regulations which have Significant Impacts

203 Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies

204 Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information

Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Functions

208 Sumber Daya Manusia
Human Capital

209 Perencanaan dan Strategi Pengembangan SDM
HR Development Planning and Strategy

212 Profil dan Data Statisitik SDM
Hr Profile And Data Statistics

215 Rekrutmen Karyawan
Employee Recruitment

217 Pengembangan Karir
Career Development

219 Survei Kepuasan Karyawan
Employee Satisfaction Survey

225 Pendidikan dan Pelatihan
Education And Training

240 Pengembangan Teknologi Informasi
Development of Information Technology

240 Visi dan Misi Penerapan Teknologi Informasi Perum Jamkrindo
Vision and Mission of Perum Jamkrindo's Information Technology Implementation

241 Penerapan Sistem Teknologi Informasi di Lingkup Perum Jamkrindo
Application of Information Technology Systems in Perum Jamkrindo

254 Investasi Teknologi Informasi
Information Technology Investment

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

262 Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
General Principles of Good Corporate Governance

264 Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Di Lingkup Perum Jamkrindo
The Development of Good Corporate Governance Implementation In Perum Jamkrindo

325 Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Organization Structure

446 Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama Dan Pengendali, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung, Sampai Kepada Pemilik Individu
Information About Major And Controlling Shareholders, Whether Direct Or Indirect, Until The Individual Owner

447 Manajemen Risiko
Risk Management

492 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

493 Perkara Penting
Significant Cases

494 Akses Informasi Dan Data Perusahaan
Access To Company Information and Data

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Corporate Social and Environmental Responsibility

546 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Corporate Social and Environmental Responsibility

549 Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibility Governance

554 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup
Corporate Social and Environmental Responsibility in The Scope of Environment

556 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Corporate Social and Environmental Responsibility in The Scope of Employment, Occupational Health and Safety

505 Kode Etik
Code of Conduct

515 Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control

516 Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policies

516 Informasi Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik
Information on Funding for Political Activities

517 *Whistleblowing System*
Whistleblowing System

196 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of the Use of Public Offering Funds

197 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Material Transaction Information that Contains Conflicts of Interest or Transactions with Affiliates

199 Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan
Amendments to the Laws and Regulations which have Significant Impacts

201 Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies

202 Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information

557 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terkait dengan Hak Asasi Manusia
Corporate Social and Environmental Responsibilities in The Scope of Human Rights

558 Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Terkait dengan Operasi Yang Adil
Corporate Social and Environmental Responsibility in The Scope of Fair Operations

559 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Corporate Social and Environmental Responsibilities in The Scope of Social and Community Development

Jamkrindo

Jamkrindo

Jaminan Kredit Indonesia



LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT
2019



PERFORMA 2019

2019 PERFORMANCE

8 Kilas Kinerja 2019
Performance Highlights in 2019

9 Ikhtisar Keuangan Penting Tahun 2015-2019
Financial Highlights 2015-2019

KILAS KINERJA 2019
Performance Highlights in 2019

Total Aset Jamkrindo posisi 31 Desember 2019 mencapai Rp 17,54 triliun, tumbuh sebesar Rp 1,30 triliun atau 8,02% jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 16,24 triliun

The total assets of Jamkrindo at the position on December 31, 2019, reached Rp 17.54 trillion, growing by Rp 1.30 trillion or 8.02% compared to the position on December 31, 2018, of Rp 16.24 trillion.

Imbal Jasa Penjaminan bersih selama tahun 2019 mencapai Rp 2,10 triliun, meningkat sebesar Rp 856,02 miliar atau 68,55% dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 1,25 triliun

Net guarantee revenues in 2019 reached Rp 2.10 trillion, an increase of Rp 856.02 billion or 68.55% compared to 2018 in the amount of Rp 1.25 trillion.

Skor *Assessment* Penerapan GCG Jamkrindo untuk tahun 2019 mencapai 95,80 dengan predikat "Sangat Baik", meningkat jika dibandingkan raihan tahun 2018 yaitu sebesar 95,72 dengan predikat "Sangat Baik"

Jamkrindo's GCG Implementation Assessment Score for 2019 reached 95,80 with the title "Very Good," It increased when compared to the achievement in 2018, which was equal to 95.72 with the title "Very Good."

Realisasi jumlah kredit yang dijamin oleh Jamkrindo tahun 2019 mencapai Rp203,99 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp8,48 triliun atau 16,74% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 174,74 triliun. Jumlah kredit yang dijamin pada tahun 2019 tersebut terdiri dari Rp 59,01 triliun berupa Kredit Usaha Rakyat ("KUR") dan sebesar Rp 144,98 triliun untuk Kredit Non-KUR.

The realization of the total credit guarantee by Jamkrindo 2019 reached Rp203.99 trillion, experiencing an increase of Rp8.48 trillion or 16.74% compared to 2018, which was Rp 174.74 trillion. The number of credit guarantee in 2019 consisted of Rp. 59.01 trillion in the form of People's Business Credit ("KUR") and the amount of Rp. 144.98 trillion for Non-KUR Credit.



IKHTISAR KEUANGAN PENTING TAHUN 2015-2019
Financial Highlights 2015-2019

(dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain / in million Rupiah, unless otherwise stated)

LAPORAN POSISI KEUANGAN	2019	2018	2017	2016	2015	STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Total Aset	17.543.697	16.240.997	14.678.143	13.408.418	11.642.993	Total Assets
Total Liabilitas	5.589.811	4.945.317	3.554.268	3.108.849	2.166.792	Total Liabilities
Total Ekuitas	11.953.885	11.295.680	11.123.875	10.299.569	9.476.201	Total Equity

LABA RUGI KOMPREHENSIF	2019	2018	2017	2016	2015	COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pendapatan Penjaminan	2.104.732	1.248.710	1.805.686	1.588.441	1.277.488	Guarantee Revenues
Beban Klaim	(1.309.531)	(723.274)	(1.004.610)	(871.583)	(922.662)	Claim Expenses
Penjaminan Bersih	795.201	525.437	801.076	716.858	354.826	Guarantee Fee Net
Pendapatan Investasi Bersih	782.810	684.108	601.634	587.678	599.525	Investment Income - Net
Beban Usaha	(809.813)	(693.236)	(708.169)	(657.151)	(470.528)	Operating Expenses
Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih	(2.484)	(8.025)	328.679	294.070	307.230	Other Income (Expenses) Net
Laba Sebelum Pajak	765.714	508.284	1.023.221	941.454	790.448	Income Before Tax
Beban Pajak	(139.935)	(110.740)	(221.375)	(249.409)	(193.669)	Income Tax Expenses
Laba Tahun Berjalan	625.779	397.544	801.846	692.045	596.779	Current Year Income
Penghasilan Komprehensif Lain	59.820	(135.957)	57.831	(118.710)	34.094	Other Comprehensive Income
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	685.599	261.587	859.677	573.335	630.873	Comprehensive Income for the Current Year
RASIO KEUANGAN						**FINANCIAL RATIOS**
Rasio Likuiditas						**Liquidity Ratio**
- *Current Ratio*	378,50%	450,89%	769,09%	712,07%	755,22%	Current Ratio -
Rasio Solvabilitas						**Solvency Ratio**
- *Debt to Equity Ratio*	46,76%	43,78%	31,95%	30,18%	22,87%	Debt to Equity Ratio -
Rasio Rentabilitas						**Profitability Ratio**
- *Gross Profit Margin*	26,60%	-0,14%	28,85%	29,75%	25,78%	Gross Profit Margin -
- *Profit Margin on Sales*	26,52%	25,10%	42,50%	43,26%	42,14%	Profit Margin on Sales -
- *Return on Assets*	4,53%	3,29%	7,29%	7,52%	7,30%	Return on Assets -
- *Return on Equity*	3,70%	3,50%	7,49%	6,72%	6,60%	Return on Equity -
Rasio Aktivitas						**Activity Ratio**
Perputaran Aset (kali)	17,09	13,11	17,14	17,37	17,32	Asset Turnover (times)

ASET / ASSETS

(dalam triliun Rupiah / in trillion of Rupiah)

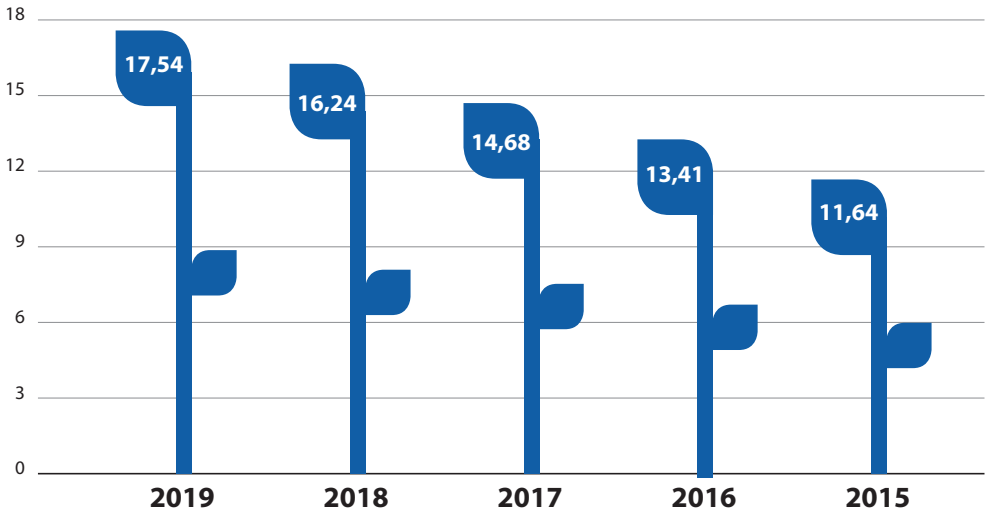

EKUITAS / EQUITY

(dalam triliun Rupiah / in trillion of Rupiah)

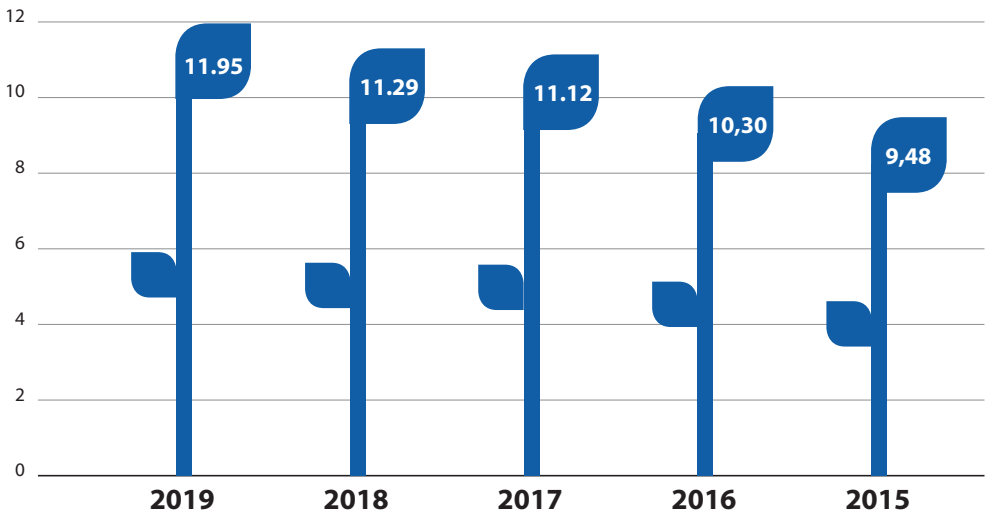

LABA TAHUN BERJALAN / CURRENT YEAR INCOME

(dalam milyar Rupiah / in billion of Rupiah)

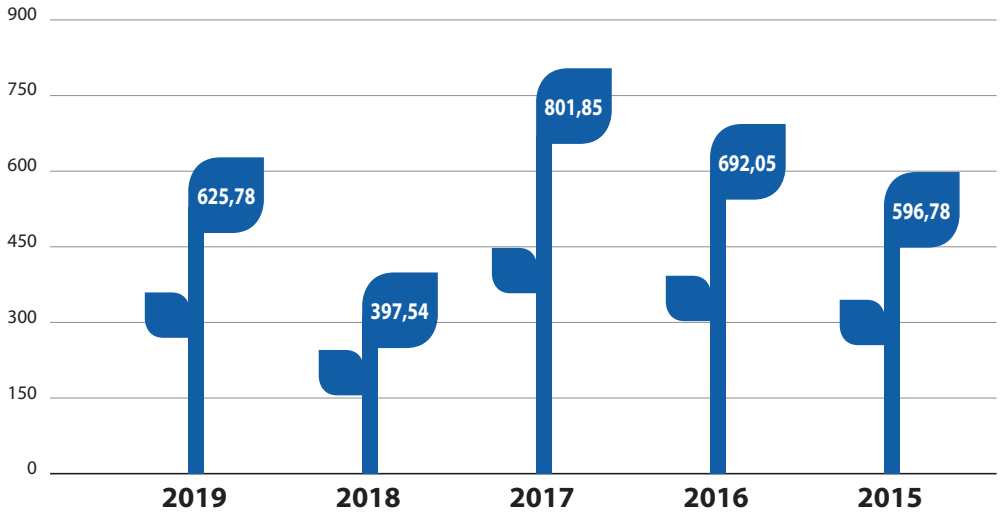

LIABILITAS / LIABILITIES

(dalam triliun Rupiah / in trillion of Rupiah)

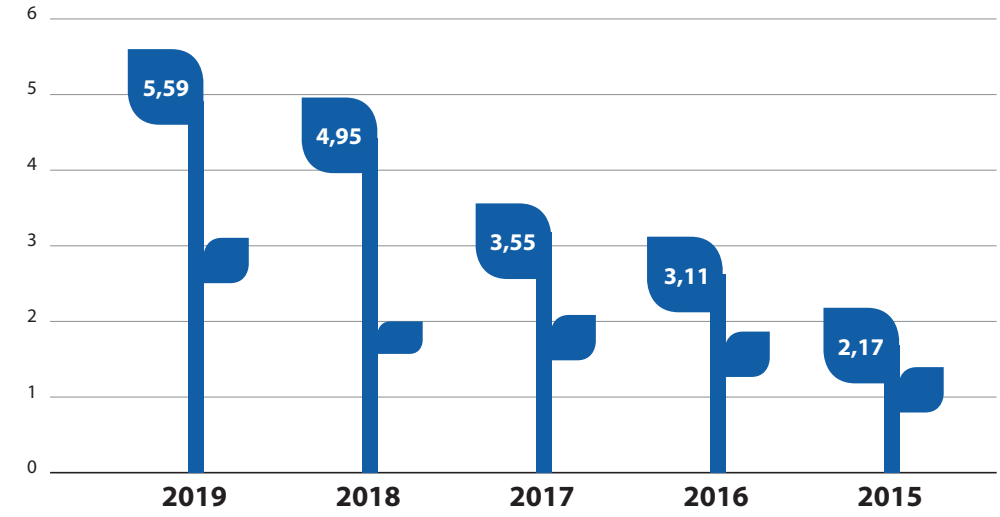

Jamkrindo

Jamkrindo

Jaminan Kredit Indonesia



LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT
2019



LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

14 Laporan Dewan Pengawas
Board of Supervisor Council Report

22 Laporan Direksi
Board of Directors Report

32 Surat Pernyataan Dewan Pengawas dan Direksi
Statement Letter of Board of Supervisor Council and Directors

LAPORAN DEWAN PENGAWAS
Board of Supervisor Council Report



Pencapaian kinerja yang telah dicapai di tahun 2019 diharapkan dapat menjadi modal bagi kesinambungan atas proses pencapaian yang akan membentuk kedayatahanan sistemik sehingga perusahaan tumbuh sehat dan kokoh menuju pertumbuhan berkelanjutan. Fungsi pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi oleh Dewan Pengawas telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan efektif. Hal ini berdampak pada kinerja operasional, keuangan, dan tata kelola. Jamkrindo mampu meraih pencapaian kinerja keuangan yang tercermin dari Pendapatan Penjaminan dan Laba Tahun Berjalan. Selain itu pencapaian tata kelola, dari ukuran asesmen tata kelola, manamen risiko, internal control, dan kinerja kepatuhan. Kesemuanya berdampak pada kedayatahanan dan reputasi Perum Jamkrindo. Ke depan Dewan Pengawas terus mendorong dan memantau agar pencapain bisnis berlangsung secara terukur, akuntabel serta kredibel.

Sri Mulyanto
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of The Supervisory Board

The achievement of performance achieved in 2019 was expected to be a capital for the sustainability of the achievement process that would form systemic resilience so that the Company grew healthy and robust towards sustainable growth. The supervisory function and the provision of advice to the Board of Directors by the Board of Supervisor Council have been carried out well and were running effectively. It had an impact on operational, financial, and governance performance. The Jamkrindo was able to achieve financial performance achievements as reflected in the Guarantee Revenues and the Current Year Income. Besides, the achievements of governance, from the size of governance assessment, risk management, internal control, and compliance performance. All of which had an impact on the resilience and reputation of Perum Jamkrindo. In the future, the Board of Supervisor Council continues to encourage and monitor so that the achievement of a business is measurable, accountable, and credible.

Para Pemegang Saham dan Stakeholders yang terhormat

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan limpahan rahmat Nya, sepanjang tahun 2019, Dewan Pengawas mampu melaksanakan perannya dengan baik dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada Direksi. Suatu kehormatan bagi saya mewakili Dewan Pengawas untuk menyajikan laporan pengawasan terhadap kinerja Perusahaan untuk Tahun Buku 2019 khususnya aspek pengawasan Direksi. Dengan visi perusahaan "Menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional" dan misi perusahaan "Meningkatkan aksesibilitas finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif dan efisien secara berkelanjutan".

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI TAHUN 2019

Dewan Pengawas memandang bahwa Direksi telah berkomitmen dan berinisiatif dengan baik dan mampu menunjukkan kinerja positif sebagai bekal menyongsong tahun-tahun depan yang penuh tantangan. Di tengah berbagai tantangan eksternal dan internal, Perum Jamkrindo mampu meraih kinerja keuangan dengan kondisi sangat baik.

Pendapatan operasional (pendapatan penjaminan dan pendapatan investasi) tahun 2019 sebesar Rp2,887 trilyun atau mencapai 122,23% dari RKAP 2019 sebesar Rp2,362 trilyun dan mencapai 149,40% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp1,932 trilyun. Beban operasional (beban klaim dan beban usaha) meningkat menjadi sebesar Rp2,119 trilyun atau mencapai 125,71% dari RKAP tahun 2019 dan mencapai 149,62% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp1,416 trilyun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan beban klaim dan beban usaha dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan non operasional bersih mencapai -6,63% dibandingkan dengan target 2019 atau mencapai 30,95% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Akibatnya, tahun 2019 Perusahaan memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp765,714 milyar atau mencapai 107,24% dari RKAP tahun 2019 dan 150,65% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp508,284 milyar.

Pendapatan penjaminan terdiri dari pendapatan penjaminan KUR dan Non KUR. Selama tahun 2019 realisasi pendapatan penjaminan sebesar Rp2,529 trilyun atau mencapai 121,85% dari RKAP tahun 2019 dan mencapai 154,04% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp1,642 trilyun.

Pendapatan Penjaminan pada tahun 2019 mencapai Rp 2,10 triliun mengalami peningkatan sebesar 68,59% jika dibanding Pendapatan Penjaminan 2018 yaitu sebesar Rp 1,25 triliun. Laba Tahun Berjalan untuk tahun 2019 sebesar Rp

Dear Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Praise and Gratitude to Allah SWT, the Almighty God, upon His grace and blessing, throughout 2019, the Board of Supervisor Council was able to carry out its role properly in overseeing and providing direction to the Board of Directors. It is an honor for me to represent the Board of Supervisor Council to present a supervisory report on the Company's performance for the Fiscal Year 2019, in particular the supervisory aspects of the Board of Directors. With the Company's Vision "To be the first choice of business players in guarantee services to support the growth and equitable distribution of the national economy" and the Company's Mission "To improve the financial accessibility of MSMEs and Cooperative through the provision of innovative and competitive guarantees with professional, effective, and efficient services in a sustainable manner."

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN 2019

The Board of Supervisor Council considered that the Board of Directors has committed and initiated well and could show positive performance in preparation for facing challenging years ahead. Amid various external and internal challenges, Perum Jamkrindo was able to achieve financial performance in excellent condition.

Operating Revenues (Guarantee Revenues and Investment Income) in 2019 was Rp2.887 trillion or reached 122.23% of the 2019 RKAP of Rp2.362 trillion and 149.40% compared to the realization in 2018 of Rp1.932 trillion. Operational expenses (claims expenses and operating expenses) increased to Rp2.119 trillion or reached 125.71% of the 2019 RKAP and reached 149.62% compared to the realization in 2018 of Rp1.416 trillion. The increase was mainly due to an increase in claim expenses and operating expenses compared to the previous year. Net Non-Operating Revenues reached -6.63% compared to the 2019 target or reached 30.95% compared to the 2018 realization. As a result, in 2019 the Company made Income Before Tax of Rp765.714 billion or reached of 107.24% of the 2019 RKAP and 150.65% compared to the realization in 2018 of Rp508.284 billion.

Guarantee Revenues consists of KUR and Non-KUR Guarantee Revenues. During the year 2019, the realization of Guarantee Revenues was Rp 2.529 trillion or 121.85% of the 2019 RKAP and reached 154.04% compared to the 2018 realization of Rp 1.642 trillion.

The Net Guarantee Revenues in 2019 reached Rp 2.10 trillion, an increase of 68.59% compared to the 2018 Net Guarantee Revenues of Rp 1.25 trillion. The Current Year Income for 2019 amounted to Rp 625.78 billion and increased by 57.41% when

625,78 miliar dan mengalami peningkatan sebesar 57,41% jika dibandingkan dengan raihan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 397,54 miliar. Jumlah Aset tahun 2019 mencapai sebesar Rp 17,54 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 8,02% jika dibanding raihan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 16,24 triliun.

Dewan Pengawas telah melakukan monitoring tindak lanjut atas masalah-masalah penting di perusahaan, serta berupaya aktif dalam membantu direksi untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dengan memberikan saran dan masukan. Perkembangan tindak lanjut permasalahan strategis dibahas secara insentif dalam kesempatan rapat bulanan Dewan Pengawas.

Hasil pengukuran terhadap pelaksanaan tugas pengawasan menunjukan bahwa capaian kinerja dari program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2019 secara umum dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian KPI (*Key Performance indicator*) Dewan Pengawas tahun 2019 sebesar 100 persen. Ke depan, Dewan Pengawas akan terus melakukan penyempurnaan dan peningkatan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan perusahaan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Selama tahun 2019, Dewan Pengawas telah 12 (lima belas) Rapat Internal, 12 (tiga belas) Rapat Gabungan dengan Direksi, dan 2 (dua) Rapat Pembahasan Bersama dengan Pemilik Modal (Kementerian BUMN) serta 39 (tiga puluh sembilan) Rapat Teknis yang dilakukan secara intenal maupun dengan mengundang Direktur Teknis.

Pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Pengawas dapat tergambar dari produk hukum yang dikeluarkan dan selama tahun 2019 telah diterbitkan 42 surat dan 7 Keputusan. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan wawasan, Dewan Pengawas telah mengikuti atau menghadiri 7 kegiatan Pelatihan/ Seminar/*Workshop*/Pertemuan Ilmiah.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Dewan Pengawas memandang Prospek usaha yang disusun oleh Direksi sudah cukup realistis. Optimisme pada pertumbuhan bisnis Perusahaan di masa depan dapat diterima. Dewan Pengawas meyakini, dengan manajemen bisnis yang baik, didukung berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional akan memberikan dampak positif bagi prospek usaha Perusahaan. Sejalan dengan maksud dan tujuan Perum Jamkrindo sebagai institusi yang turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan Program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dengan melaksanakan kegiatan usaha penjaminan kredit bagi UMKMK, penjaminan dalam rangka Sinergi BUMN, penjaminan sistem resi gudang, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik terdapat perubahan visi dan misi dari Perum Jamkrindo.

compared with the achievement in 2018, which amounted to Rp 397.54 billion. Total Assets in 2019 reached Rp 17.54 trillion, or an increase of 8.02% compared to the achievement in 2018, which amounted to Rp 16.24 trillion.

The Board of Supervisor Council has monitored the follow-up on important issues in the Company, as well as actively working to assist the Board of Directors in resolving any problems that occur by providing advice and input. The development of the follow-up on strategic issues was discussed on an incentive basis during the Board of Supervisor Council's monthly meeting.

The results of measurements of the implementation of supervisory duties indicate that the performance achievements of the work programs and activities carried out during 2019, in general, can be categorized very well. It can be seen from the achievement of the KPI (Key Performance indicator) of the Board of Supervisor Council in 2019 amounted to 100%. Going forward, the Board of Supervisor Council will continue to make refinements and improvements to carry out the Company's supervisory duties more effectively, efficiently, and accountably.

During 2019, the Board of Supervisor Council had 12 (twelve) Internal Meetings, 12 (twelve) Joint Meetings with the Board of Directors, and 2 (two) Joint Discussion Meetings with the Capital Owners (the Ministry of SOEs) and 39 (thirty-nine) Technical Meetings carried out internally or by inviting the Technical Director.

The implementation of the duties and obligations of the Board of Supervisor Council can be drawn from the legal products issued, and during 2019 42 letters and 7 (seven) decrees were issued. To increase knowledge, competence, and insight of the Board of Supervisor Council has participated in or attended 7 Training/ Seminar/ Workshop/ Scientific Meetings.

VIEW OF BUSINESS PROSPECTS

The Board of Supervisor Council considers the business prospects drawn up by the Board of Directors to be quite realistic. Optimism in the Company's business growth in the future is acceptable. The Board of Supervisor Council believes, with good business management, supported by various national economic and development policies will have a positive impact on the Company's business prospects. In line with the purpose and objectives of Perum Jamkrindo as an institution that participates in implementing and supporting Government policies and programs in the economy and national development field by carrying out credit guarantee business activities for MSMEs and Cooperative, guarantees in the framework of BUMN Synergy, warehouse receipt systems guarantee, and optimization of the Company's resources utilization based on the principles of Good Corporate Governance, there is a change in the Vision and Mission of Perum Jamkrindo.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Pengawas dalam kapasitas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, sepenuhnya menyadari pentingnya implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perum Jamkrindo. Dengan penerapan GCG, Perusahaan memiliki fondasi untuk menjaga kualitas kinerja operasional, kinerja keuangan dan kemampuan untuk menjaga serta melindungi kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dewan Pengawas sepenuhnya mendukung komitmen dan program kerja yang dilaksanakan Direksi terkait dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Etika Bisnis termasuk mendukung upaya-upaya agar GCG berjalan secara efektif seperti upaya menghindari benturan kepentingan, penerapan pelaporan LHKPN, pelaporan dugaan pelanggaran (WBS) dan lain-lain.

Guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan GCG (*Good Corporate Governance*), selama tahun 2019, telah dilakukan Sosialisasi Peraturan Direksi *Whistle Blowing System* (WBS) Nomor: 04/Per-Dir/IV/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistle Blowing System* (WBS) oleh SPI, 54 (lima puluh empat) Kantor Cabang, 9 (sembilan) Kantor Wilayah bersamaan dengan pelaksanaan general audit serta melakukan *Assessment* GCG Tahun 2019 yang dilakukan secara Internal berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 767/SPT/1/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 perihal pelaksanaan *Review* dan *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance*) Perum Jamkrindo Tahun 2019.

Dewan Pengawas mendukung seluruh upaya manajemen untuk melakukan sosialisasi dan internalisasi GCG kepada seluruh jajaran insan Perum Jamkrido dan pemangku kepentingan. Ke depan, secara terencana dan bertahap, manajemen Perum Jamkrindo diharapkan mampu mengagendakan kelengkapan infrastuktur GCG perusahaan.

PENERAPAN WBS

Whistleblowing System (WBS) adalah infrastruktur penerapan GCG yang memfasilitasi laporan pihak luar perusahaan dan pihak internal atas berbagai dugaan pelanggaran. *Whistleblowing System* (WBS) yang efektif akan mendorong terbentuknya kultur perusahaan berbasis prinsip-prinsip GCG dan penerapan bisnis beretika. Sistem ini memfasilitasi semua pihak baik pimpinan, karyawan, maupun pihak luar yang terkait dengan Perusahaan untuk melakukan pelaporan dugaan pelanggaran.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Supervisor Council, in its supervisory and advisory function capacity, is fully aware of the importance of the Good Corporate Governance (GCG) implementation for Perum Jamkrindo. With the GCG implementation, the Company has a foundation to maintain the quality of operational performance, financial performance, and the ability to maintain and protect the interests of shareholders and all stakeholders.

The Board of Supervisor Council fully supports the commitments and work programs implemented by the Board of Directors related to the implementation of the Good Corporate Governance principles and Code of Conduct including supporting efforts to implement GCG effectively such as avoiding conflicts of interest, applying LHKPN reporting, reporting of alleged violation (WBS) and others.

In order to increase the effectiveness of GCG (Good Corporate Governance) implementation, during the year 2019, the socialization of the Board of Directors' Regulation Number: 04 / Per-Dir / IV / 2018 dated April 10, 2018, concerning Guidelines for Management of Violation Reporting System of Whistleblowing System (WBS) by SPI, 54 (fifty-four) Branch Offices, 9 (nine) Regional Offices in conjunction with conducting general audits and GCG Assessment for the Year 2019, conducted internally based on the Task Order Number: 767 / SPT / 1 / XII / 2019 dated December 3, 2019, concerning the implementation of the 2019 Review and Self-Assessment of the Good Corporate Governance Implementation of Perum Jamkrindo.

The Board of Supervisor Council supports all management's efforts to disseminate and internalize GCG to all employees of Perum Jamkrido and stakeholders. In the future, the management of Perum Jamkrindo is expected to be able to schedule the completeness of the Company's GCG infrastructure in a planned and gradual manner.

WBS IMPLEMENTATION

Whistleblowing System (WBS) is a GCG implementation infrastructure that facilitates reports from outside the Company and internal parties on various alleged violations. An effective Whistleblowing System (WBS) will encourage the formation of a corporate culture based on GCG principles and ethical business implementation. This system facilitates all parties, including leaders, employees, and external parties related to the Company to report alleged violations.

Dewan Pengawas tentu saja berkomitmen untuk membangun dan mengawasi perusahaan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) termasuk penerapan fungsi dan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran (WBS). Jamkrindo telah memiliki secara khusus kebijakan dan infrastruktur penerapan WBS yang mengacu kepada kebijakan, mekanisme dan infrastruktur sesuai dengan praktik-praktik terbaik.

PENILAIAN KOMITE DEWAN PENGAWAS

Dalam rangka efektivitas peran, fungsi dan kewajiban yang dijalankannya Dewan Pengawas telah membentuk 2 komite yaitu Komite Audit dan Komite Investasi dan Manajemen Risiko Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.

Komite Audit merupakan komite yang mendukung Dewan Pengawas dalam menilai pelaksanaan pengendalian internal termasuk aspek keuangan, tata kelola perusahaan.

Komite Investasi dan Manajemen Risiko sebagai organ Dewan Pengawas yang bertugas menilai penerapan aspek investasi dan manajemen risiko Perum Jamkrindo.

Menurut Dewan Pengawas, kedua komite secara periodik melakukan rapat dan *review* tentang penerapan, efektivitas dan kualitas penerapan sesuai dengan bidang yang diawasi.

Dewan Pengawas berpendapat bahwa Komite Audit dan Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah menjalankan peran dan fungsi nya dengan baik sehingga mampu memberikan masukan yang efektif bagi Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat bagi Direksi.

Selama tahun 2019, Komite Audit telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Januari 2019.
2. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Februari 2019.
3. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Maret 2019.
4. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan April 2019.
5. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Mei 2019.
6. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Juni 2019.

The Board of Supervisor Council is committed to building and overseeing the Company by implementing the Good Corporate Governance (GCG) principles, including the application of functions and mechanisms for reporting of alleged violation (WBS). Jamkrindo has a specific policy and infrastructure for implementing WBS that refers to policies, mechanisms, and infrastructure according to best practices.

THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL'S ASSESSMENT

In the context of the effectiveness of the roles, functions, and obligations carried out by The Board of Supervisor Council, two committees have been formed, namely the Audit Committee and the Investment and Risk Management Committee of Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.

The Audit Committee is a committee that supports the Board of Supervisor Council in assessing the implementation of internal controls, including financial, corporate governance aspects.

The Investment and Risk Management Committee, as the organ of the Board of Supervisor Council, is tasked with assessing the implementation of investment and risk management aspects of Perum Jamkrindo.

According to the Board of Supervisor Council, the two committees periodically hold meetings and review the implementation, effectiveness, and quality of the implementation according to the area being monitored.

The Board of Supervisor Council thinks that the Audit Committee and the Investment and Risk Management Committee have carried out their roles and functions properly to be able to provide effective input for the Board of Supervisor Council in carrying out the supervisory function and the advice provision to the Board of Directors.

During 2019, the Audit Committee performed its duties according to applicable regulations, including the following activities:

1. Preparing a review and materials for the Board of Supervisor Council meeting in January 2019.
2. Preparing a review and materials for the Board of Supervisor Council meeting in February 2019.
3. Preparing a review and materials for the Board of Supervisor Council meeting in March 2019.
4. Preparing a review and materials for the Board of Supervisor Council meeting in April 2019.
5. Preparing a review and materials for the Board of Supervisor Council meeting in May 2019.
6. Preparing a review and materials for the Board of Supervisor Council meeting in June 2019.

7. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Juli 2019.
8. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Agustus 2019.
9. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan September 2019.
10. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Oktober 2019.
11. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan November 2019.
12. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Desember 2019.
13. Melakukan pendampingan atas kunjungan Dewan Pengawas ke lapangan.
14. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2019 yang dilaksanakan oleh KAP Hertanto, Grace dan Karunawan.
15. Membantu Dewan Pengawas dalam proses pengadaan dan pengusulan KAP audit tahun buku 2019 untuk ditetapkan oleh Menteri BUMN.
16. Melakukan *review* terhadap kegiatan pengendalian internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern serta memberi tanggapan/masukan terkait temuantemuan penting SPI dan temuan-temuan dari pihak eksternal seperti BPK-RI, OJK, dan lainnya.
17. Melakukan telaahan atas Laporan Manajemen Triwulan IV Tahun 2018 Perum Jamkrindo. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo Tahun 2019
18. Melakukan telaahan atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2019 Perum Jamkrindo.
19. Melakukan telaahan atas Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2019 Perum Jamkrindo.
20. Melakukan telaahan atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2019 Perum Jamkrindo.
21. Melakukan telaahan atas *Assesment Good Corporate Governance*, dan Pedoman Perilaku Perusahaan.
22. Melakukan telaahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum Jamkrindo Tahun 2019.

Seperti halnya Komite audit, Komite Investasi dan Risiko Usaha telah memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Pengawas terkait dengan potensi risiko usaha yang dihadapi Perusahaan serta melakukan pemantauan terhadap transaksi, pengelolaan, kebijakan dan pedoman keuangan dan investasi Perusahaan. Selama tahun 2019, Komite Manajemen Risiko telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Januari 2019.
2. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas

7. Preparing a review and materials for the Board of Supervisor Council meeting in July 2019.
8. Preparing a review and materials for the Board of Supervisor Council meeting in August 2019.
9. Preparing a review and materials for the Board of Supervisor Council meeting in September 2019.
10. Preparing a review and materials for the Board of Supervisor Council meeting in October 2019.
11. Preparing a review and materials for the Board of Supervisor Council meeting in November 2019.
12. Preparing a review and materials for the Board of Supervisor Council meeting in December 2019.
13. Assisting the Board of Supervisor Council's visit to the field.
14. Monitoring and evaluating the implementation of the audit of financial statements for the 2019 fiscal year carried out by KAP Hertanto, Grace, and Karunawan.
15. Assisting the Board of Supervisor Council in the procurement process and proposing the Public Accounting Firm for the fiscal year 2019 to be determined by the Minister of SOEs.
16. Conducting a review of internal control activities carried out by the Internal Control Unit and providing feedback/input related to important SPI findings and findings from external parties such as BPK-RI, OJK, and others.
17. Conducting a review of Perum Jamkrindo's Management Report for Quarter IV 2018 and Perum Jamkrindo's Supervisory Report of the Board of Supervisor Council for 2019.
18. Conducting a review of Perum Jamkrindo's Management Report for Quarter I 2019.
19. Conducting a review of Perum Jamkrindo's Management Report for Quarter II 2019.
20. Conducting a review of Perum Jamkrindo's Management Report for Quarter III 2019.
21. Conducting a review of Good Corporate Governance Assessment and the Company's Code of Conduct.
22. Conducting a review of Perum Jamkrindo's Corporate Work Plan and Budget 2019.

Like the Audit Committee, the Investment and Business Risk Committee has provided input and recommendations to the Board of Supervisor Council related to business risk potential faced by the Company and monitored the transaction, management, policy, and the Company's financial and investment guidelines. During 2019, the Risk Management Committee carried out its duties in accordance with applicable regulations, including the following activities:

1. Preparing a review and materials for the Board of Supervisor Council meeting in January 2019.
2. Preparing a review and materials for the Board of

bulan Februari 2019.
3. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Maret 2019.
4. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan April 2019.
5. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Mei 2019.
6. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Juni 2019.
7. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Juli 2019.
8. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Agustus 2019.
9. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan September 2019.
10. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Oktober 2019.
11. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan November 2019.
12. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Desember 2019.
13. Melakukan pendampingan atas kunjungan Dewan Pengawas ke lapangan.
14. Melakukan telaahan atas Penilaian/*Assessment* GCG di Perum Jamkrindo.
15. Melakukan telaahan atas *Review Board Manual, Code of Governance* dan Pedoman Perilaku Perusahaan.
16. Melakukan telaahan atas reviu SOP dan pelaksanaan kegiatan investasi pada Perum Jamkrindo.
17. Melakukan telaahan atas pelaksanaan dan reviu atas laporan berkala manajemen risiko.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Selama tahun 2019 terjadi perubahan susunan Dewan Pengawas, yaitu:

a. Melalui Keputusan Menteri BUMN No SK-02/MBU/01/2019 tanggal 3 Januari 2019, Menteri BUMN secara definitif memberhentikan dengan hormat Sdr. Dahlan Siamat sebagai Dewan Pengawas Perum Jamkrindo dan mengangkat Sdri. Ari Wahyuni sebagai anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Masa jabatan Sdr. Dahlan Siamat telah berakhir pada 28 Juni 2018 setelah genap menjalani masa jabatan selama 5 (lima tahun).

b. Melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-241/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019, Menteri BUMN secara definitif memberhentikan dengan hormat Sdr. Subandriyo sebagai anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo, dan mengangkat Sdr. Muhammad Muchlas Rowi sebagai anggota Dewan Pengawas Independen

Supervisor Council meeting in February 2019.
3. Preparing a review and materials for the Board of Supervisor Council meeting in March 2019.
4. Preparing a review and materials for the Board of Supervisor Council meeting in April 2019.
5. Preparing a review and materials for the Board of Supervisor Council meeting in May 2019.
6. Preparing a review and materials for the Board of Supervisor Council meeting in June 2019.
7. Preparing a review and materials for the Board of Supervisor Council meeting in July 2019.
8. Prepare the review and materials of the Board of Trustees meeting in August 2019.
9. Preparing a review and materials for the Board of Supervisor Council meeting in September 2019.
10. Preparing a review and materials for the Board of Supervisor Council meeting in October 2019.
11. Preparing a review and materials for the Board of Supervisor Council meeting in November 2019.
12. Preparing a review and materials for the Board of Supervisor Council meeting in December 2019.
13. Assisting the Board of Supervisor Council's visit to the field.
14. Conducting a review of the GCG Assessment at Perum Jamkrindo.
15. Conducting a review of the Company's Board Manual, Code of Governance, and Code of Conduct.
16. Conducting a review of SOP and the investment activities implementation at Perum Jamkrindo.
17. Conducting a review of the implementation and review of periodic risk management reports.

CHANGES TO THE COMPOSITION OF THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL

During 2019 there was a change in the composition of the Board of Supervisor Council, namely:

a. Through the Decree of the Minister of SOEs No. SK-02 / MBU / 01/2019 dated January 3, 2019, the Minister of BUMN dismissed definitively with respect Mr. Dahlan Siamat as the Board of Supervisor Council of Perum Jamkrindo and appointed Ms. Ari Wahyuni as a member of Perum Jamkrindo Board of Supervisor Council. The term of office Mr. Dahlan Siamat ended on June 28, 2018, after serving a term of office for 5 (five years).

b. Through the Minister of SOEs Decree No. SK-241 / MBU / 10/2019 dated October 17, 2019, the Minister of SOEs dismissed definitively with respect Mr. Subandriyo as a member of Perum Jamkrindo's Board of Supervisor Council after having served a term of office for 5 (five years), and appointed Mr. Muhammad Muchlas Rowi as a member of

Perum Jamkrindo. Masa jabatan Sdr. Subandriyo telah berakhir pada 31 Desember 2018 setelah genap menjalani masa jabatan selama 5 (lima tahun).

Perum Jamkrindo's Independent Board of Supervisor Council. The term of office of Mr. Subandriyo expired on December 31, 2018, after serving a term of office for 5 (five years).

Dengan demikian komposisi Dewan Pengawas per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Therefore, the Board of Supervisor Council's composition as of December 31, 2019, was as follows:

Ketua Dewan Pengawas merangkap Dewan Pengawas Independen	Sri Mulyanto	Chairman concurrently Independent Board of Supervisor Council
Anggota Dewan Pengawas	Ari Wahyuni	Member of Board of Supervisor Council
Anggota Dewan Pengawas	Diah Natalisa	Member of Board of Supervisor Council
Anggota Dewan Pengawas	Noor Ida Khomsiyati	Member of Board of Supervisor Council
Dewan Pengawas Independen	M. Muchlas Rowi	Independent Board of Supervisor Council

APRESIASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Atas nama Dewan Pengawas, kami menyampaikan penghargaan kepada pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada Perum Jamkrindo. Kepada Direksi dan seluruh pegawai Perum Jamkrindo, kami menyampaikan penghargaan yang setingginya-tingginya atas keuletan, semangat, kerja keras dan memberikan komitmen baik secara individu maupun secara bersama-sama melaksanakan dan memastikan terselenggaranya pelayanan jasa Perum Jamkrindo.

Bagi para mitra kerja, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya untuk kepercayaan yang diberikan selama ini dan kami berharap untuk dapat terus meningkatkan pelayanan agar dapat memenuhi eskpektasi para pengguna jasa. Kepada mitra usaha, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya yang terus menerus, dalam masa yang baik maupun yang sulit. Penghargaan juga kami sampaikan kepada para pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai penutup, Dewan Pengawas mengajak kepada semua jajaran Perusahaan untuk tetap optimis dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kami yakin bahwa dengan kerjasama yang baik, saling bahu-membahu, dan bergandeng tangan seraya menjaga kekompakan di antara kita, semua kesulitan dan tantangan yang berat Insya Allah akan dapat kita lalui dengan baik. Semoga hubungan dan kerjasama yang harmonis di antara seluruh Pemangku Kepentingan senantiasa tercipta di masa yang akan datang.

STAKEHOLDERS APPRECIATION,

On behalf of the Board of Supervisor Council, we would like to express our gratitude to shareholders who have given trust and support to Perum Jamkrindo. To the Board of Directors and all employees of Perum Jamkrindo, we extend our highest appreciation for tenacity, enthusiasm, hard work, and commitment both individually and jointly to carry out and ensure the implementation of Perum Jamkrindo's services.

For our partners, we would like to express our sincere gratitude for the trust given so far, and we hope to continue to improve services to meet the expectations of service users. To our business partners, we thank you for your continued support in both good and difficult times. We also convey our appreciation to other stakeholders.

In closing, the Board of Supervisor Council would like to encourage all levels of the Company to remain optimistic in facing challenges in the future. We believe that with good collaboration, synergy, and teamwork as well as maintaining harmonious relationship among us, with God's wills, we will be able to go through well all difficulties and severe challenges. Hopefully, the harmonious relationships and cooperation among all Stakeholders will remain to maintain in the future.

Jakarta , Juni 2020 / Jakarta, June, 2020
Atas Nama Dewan Pengawas / On Behalf of the Board of Supervisor Council,

Sri Mulyanto
Ketua Dewan Pengawas / Chairman of The Supervisory Board

LAPORAN DIREKSI
Board of Directors Report



Tahun 2019 merupakan tahun penuh tantangan dan dinamika bisnis yang terus berkembang dimana Direksi penuh komitmen untuk menyongsong perubahan dan dinamika bisnis tersebut.

Perolehan kinerja keuangan tahun 2019 ditandai Pendapatan Penjaminan 2019 sebesar Rp 2,10 triliun dan meningkat 68,59% dari tahun sebelumnya. Laba Tahun Berjalan pada 2019 sebesar Rp 625,78 miliar meningkat 57,41% jika dibanding tahun sebelumnya. Raihan kinerja positif diharapkan akan membangun internal confidence serta secara agregat mampu membangun suatu kedayatahanan sistemik; suatu parameter yang sangat fundamental dibutuhkan oleh sebuah perusahaan saat ini.

Randi Anto
Direktur Utama
President Director

2019 is a year full of challenges and business dynamics that continue to grow where the Board of Directors is full of commitment to meet these changes and business dynamics.

The acquisition of financial performance in 2019 was marked by the 2019 Guarantee Income of Rp 2.10 trillion and an increase of 68.59% from the previous year. Profit for the Current Year in 2019 of Rp 625.78 billion, an increase of 57.41% compared to the previous year. Positive performance gains are expected to build internal confidence and in the aggregate able to build a systemic survival; a very fundamental parameter needed by a company today.

Para Pemegang Saham dan *Stakeholders* yang terhormat

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Perusahaan berhasil melewati tahun buku 2019. Pada kesempatan yang baik ini atas nama Direksi izinkan kami melaporkan hasil pengelolaan dan kinerja Perusahaan selama tahun buku 2019.

TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI

Kondisi ketidakpastian perekonomian global masih berlanjut dengan tingkat pertumbuhan di kisaran 3,0% yang merupakan pertumbuhan terendah sejak krisis tahun 2008. Melambatnya pertumbuhan ekonomi global sepanjang tahun 2019 turut berdampak kepada permintaan komoditas global yang menjadi andalan bagi Indonesia, yaitu batu bara dan minyak kelapa sawit melemah. Namun demikian di sisi lain, kondisi ekonomi global yang melambat menyebabkan bank sentral-bank sentral di berbagai belahan dunia, terutama Amerika Serikat (*The Fed*) menurunkan suku bunga kebijakan. The Fed telah menurunkan *Fed Fund Rat*e (FFR) sebesar 75 bps menjadi 1,50-1,75% di akhir Tahun 2019 dimana sebelumnya Tahun 2018, The Fed melanjutkan normalisasi suku bunga acuan dengan meningkatkan suku bunga sebanyak empat kali menjadi 2,25- 2,50%.

Ditengah tekanan ekonomi Dunia pada tahun 2019, walaupun lebih rendah dari Tingkat Pertumbuhan Tahun 2018 yang sebesar 5,17%, pertumbuhan ekonomi domestik masih dapat terjaga dan diperkirakan tumbuh sekitar 5%. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung dengan Inflasi terendah sejak 10 tahun terakhir, yaitu di level 2,72%. Disisi lain, tekanan pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2019 berasal dari Neraca Perdagangan (*Trade Balance*). Belum membaiknya kondisi ekonomi Dunia yang menekan *Volume* Perdagangan internasional, turut menekan perdagangan Ekspor dan Impor Indonesia. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekspor yang tercatat -6,9% (yoy) dan pertumbuhan impor menurun lebih dalam yaitu -9,5% (yoy). Akibatnya Defisit Neraca Pembayaran (*Balance of payment*) dan Neraca Berjalan (*Current Account*) masih berlanjut di Tahun 2019.

Sejalan dengan Bank Sentral di Dunia, yaitu melakukan *stance moneter* yang ekspansif dan konsisten untuk *pre-emptive* serta *ahead of the curve*, Bank Indonesia (BI) selama Tahun 2019 telah menurunkan suku bunga acuan (BI 7 *Day Repo Rate*/BI7DRR) sebesar 100 bps menjadi 5% dan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 100 bps menjadi 5,5%. Tahun 2019, meskipun fungsi intermediasi perbankan nasional terlihat mengalami tekanan. Stabilitas

Dear Shareholders and Stakeholders

Praise the presence of Allah SWT, Almighty God, for the abundance of His grace and gifts, so that the Company successfully passed the 2019 book year. On this good opportunity on behalf of the Board of Directors, let us report the results of the management and performance of the Company during 2019.

ECONOMIC AND INDUSTRIAL OUTLOOK

The global economy's uncertainty continued with the growth rate in the range of 3.0%, which was the lowest growth since the 2008 crisis. Slowing global economic growth throughout 2019 had an impact on global commodity demand that was a mainstay for Indonesia, namely coal and palm oil. On the other hand, slowing global economic conditions caused central banks in various parts of the world, especially the United States (The Fed) to reduce policy rates. The Fed has reduced the Fed Funds Rate (FFR) by 75 bps to 1.50-1.75% at the end of 2019, where previously in 2018, the Fed continued normalization of the benchmark interest rate by raising interest rates four times to 2.25- 2.50%.

Amid world economic pressures in 2019, although lower than the 2018 Growth Rate of 5.17%, domestic economic growth could still be maintained and was estimated to grow around 5%. This economic growth was supported by the lowest inflation for the last 10 (ten) years, at 2.72%. On the other hand, the pressure of Indonesia's economic growth in 2019 would come from the Trade Balance. The global economic conditions that have not yet improved, which have pressured the volume of international trade, have also contributed to the pressure on Indonesia's export and import trade. It could be seen from the export growth recorded -6.9% (YoY), and import growth decreased deeper, namely -9.5% (YoY). As a result, the Balance of Payment Deficit (Balance of payment) and Current Account continued in 2019.

In line with the Central Bank in the world, which was conducting an expansive and consistent monetary stance for pre-emptive and ahead of the curve, Bank Indonesia (BI) during 2019 has reduced the benchmark interest rate (BI 7 Day Repo Rate / BI7DRR) by 100 bps to 5% and reduced the Statutory Reserves (GWM) by 100 bps to 5.5%. In 2019, although the intermediary function of the national banking system would appear to be under pressure. Financial system

sistem keuangan tetap terjaga tercermin dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) perbankan yang tinggi sekitar 23,3% dan kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) yang tetap rendah di 2,5% (*gross*) atau 1,2% (*net*).

Sementara, Pertumbuhan kredit industri perbankan tercatat turun menjadi 6,1% (yoy) di Tahun 2019 dari sebelumnya 11,8% (yoy) di Tahun 2018. Disisi lain, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) stagnan di 6,6% (yoy) dimana sebelumnya juga tumbuh sebesar 6,5% (yoy) di Tahun 2018. Akibat pertumbuhan DPK diatas pertumbuhan Kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan (*Loan to Deposit Ratio*/LDR) dapat turun menjadi ke 93,6% dari sebelumnya di tahun 2018 sebesar 94,0%.

Di tengah kondisi ekonomi yang cukup menantang, Jamkrindo juga menghadapi sejumlah tantangan yang tidak dapat dikatakan ringan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Jamkrindo tahun 2018 adalah adanya potensi klaim dari *Non Performing Loan* (NPL) di industri perbankan.

Sebagaimana diketahui, munculnya kredit macet terhadap kredit yang dijamin oleh Jamkrindo akan berakibat pada munculnya klaim. Karena itu, Jamkrindo berupaya untuk mempertajam analisa sebelum melakukan penjaminan. Selain itu, Perusahaan juga dihadapkan pada fakta bahwa daya tawar pihak perbankan terhadap industri penjaminan masih relatif tinggi, sehingga margin yang diperoleh industri penjaminan menjadi lebih terbatas. Untuk itu, Jamkrindo berupaya mengembangkan solusi yang bersifat *win-win* dengan industri perbankan.

Tantangan lain yang dihadapi Jamkrindo adalah masih rendahnya *awareness* masyarakat, khususnya pelaku usaha Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) terhadap industri penjaminan. Karena itu, Jamkrindo terus mendorong upaya sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKMK.

KINERJA PERUSAHAAN 2019

Secara keseluruhan kinerja keuangan pada tahun 2019 tampil dan tumbuh secara meyakinkan. Hal ini terlihat dari indikator-indikator berkaitan dengan laba, potret neraca serta pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI).

Pendapatan operasional (pendapatan penjaminan dan pendapatan investasi) tahun 2019 sebesar Rp2,887 trilyun atau mencapai 122,23% dari RKAP 2019 sebesar Rp2,362 trilyun dan mencapai 149,40% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp1,932 trilyun.

stability was maintained as reflected in the high banking Capital Adequacy Ratio (Capital Adequacy Ratio / CAR) of around 23.3% and Non-Performing Loans (NPLs), which remained low at 2.5% (gross) or 1.2 % (net).

Meanwhile, credit growth in the banking industry was recorded to decline to 6.1% (YoY) in 2019 from 11.8% (YoY) in 2018. On the other hand, growth in Third Party Funds (DPK) was stagnant at 6.6% (YoY)) which previously also grew by 6.5% (YoY) in 2018. As a result of TPF growth above loan growth, the Loan-to-Deposit Ratio (LDR) might drop to 93.6% from 2018 in the previous year, 94.0%.

Amid quite challenging economic conditions, Jamkrindo also faced several challenges that could not be considered minor. One of the main challenges faced by Jamkrindo in 2019 was the potential for claims from Non-Performing Loans (NPLs) in the banking industry.

As was known, the emergence of bad loans against guaranteed loans by Jamkrindo would result in claims. Therefore, Jamkrindo sought to sharpen the analysis before making guarantees. Besides, the Company was also faced with the fact that the bargaining power of the banking sector towards the guarantee industry was still relatively high so that the margin was more limited obtained by the guarantee industry. For this reason, Jamkrindo sought to develop win-win solutions with the banking industry.

Another challenge faced by Jamkrindo was the low awareness of the community, especially micro, small and medium enterprises and cooperatives (UMKMK) towards the guarantee industry. Therefore, Jamkrindo continued to encourage efforts to disseminate and educate MSMEs and Cooperatives.

COMPANY PERFORMANCE 2019

Overall financial performance in 2019 appeared and grew convincingly. This could be seen from the indicators related to earnings, balance sheet portrait, and achievement of Key Performance Indicators (KPI).

Operating revenues (guarantee revenues and investment income) in 2019 amounted to Rp2,887 trillion or reached 122.23% of the 2019 RKAP of Rp2,362 trillion and reached 149.40% compared to the realization in 2018 of Rp1,932 trillion.

Pendapatan penjaminan terdiri dari pendapatan penjaminan KUR dan Non KUR. Selama tahun 2019 realisasi pendapatan penjaminan sebesar Rp2,529 trilyun atau mencapai 121,85% dari RKAP tahun 2019 dan mencapai 154,04% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp1,642 trilyun.

Guarantee revenues consisted of KUR and Non-KUR guarantee revenues. During 2019 the realization of guarantee revenues amounted to Rp2,529 trillion or 121.85% of the 2019 RKAP and reached 154.04% compared to the realization of 2018 of Rp1.642 trillion.

Total realisasi investasi (belanja modal) tahun 2019 sebesar Rp113,885 milyar atau 87,27% dari RKAP tahun 2019. Kondisi tersebut disebabkan realisasi investasi perusahaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan operasional tahun berjalan, dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mencapai 400,38%.

Total investment realization (capital expenditure) in 2019 was Rp.113,885 billion or 87.27% of the 2019 RKAP. The condition was due to the realization of the Company's investment adjusted to the conditions and operational needs of the current year, and when compared with the realization in 2018, it reached 400.38 %.

Laba bersih KUR sebesar Rp492,708 milyar atau 71,87% terhadap laba bersih termasuk Beban Komprehensif Lainnya Perusahaan tahun 2019 sebesar Rp685,599 milyar dan mencapai 122,10% terhadap target yang ditetapkan tahun 2019 sebesar Rp403,541 milyar.

KUR's net income was Rp492,708 billion or 71.87% of net income, including the Company's Other Comprehensive Expenses in 2019, amounting to Rp 685,599 billion and reached 122.10% of the target set in 2019 of Rp 403,541 billion.

Jumlah Aset pada tahun 2019 sebesar Rp 17,54 triliun meningkat sebesar 8,02% jika dibandingkan dengan Jumlah Aset 2018 yang sebesar Rp 16,24 triliun. Laba Tahun Berjalan pada tahun 2019 mencapai Rp 625,78 miliar naik sebesar 57,41% jika dibandingkan perolehan Laba Tahun Berjalan pada 2018 yang sebesar Rp 397,54 miliar, sedangkan Laba Komprehensif Tahun Berjalan 2019 sebesar Rp 685,59 miliar atau meningkat 162,09% jika dibandingkan Laba Komprehensif Tahun Berjalan 2018 sebesar Rp 261,58 miliar.

Total Assets in 2019 amounted to Rp 17.54 trillion, an increase of 8.02% compared to total Assets 2018 amounting to Rp 16.24 trillion. The Current Year Income in 2019 reached Rp 625.78 billion, an increase of 57.41% compared to the acquisition of the Current Year Income in 2018 which was Rp 397.54 billion, while Comprehensive Income for the Current Year 2019 amounted to Rp 685.59 billion or an increase of 162.09% compared to the Comprehensive Income for the Current Year 2018 amounted to Rp. 261.58 billion.

Adapun pencapaian *Key Performance Indikator* (KPI) Tahun 2019 adalah sebesar 88,59, dimana Aspek yang mencapai target tahun 2019 adalah perspektif Keuangan, perspektif Pelanggan dan Pasar; Efektifitas Produk Proses, dan Kepemimpinan, Tata Kelola dan Kemasyarakatan.

The achievement of Key Performance Indicators (KPI) for 2019 was 88.59, where the aspects that reached the 2019 target were the Financial perspective, Customer and Market perspective; Effectiveness of Process Products, and Leadership, Governance and Society.

KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN

Pada tahun 2019, Perum Jamkrindo akan terus berusaha menjaga *sustainability* perusahaan dengan berfokus mempertahankan dan memantapkan akselerasi pertumbuhan yang telah dicapai pada periode tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, RKAP Perum Jamkrindo tahun buku 2019 ini bertema "*to Synergize, to Strengthen People & to Strengthen Process*". Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo telah menetapkan 3 (tiga) strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Sinergi BUMN perluasan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 35 tahun 2018
2. Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia,
3. Penguatan Proses Bisnis.

COMPANY STRATEGIC POLICY

In 2019, Perum Jamkrindo would continue to maintain its sustainability by focusing on preserving and strengthening the acceleration of growth that has been achieved in the previous years. Therefore, Perum Jamkrindo's RKAP for the 2019 fiscal year had the theme "to Synergize, to Strengthen People & to Strengthen Process". The Board of Directors and Board of Supervisor Council of Perum Jamkrindo have set 3 (three) strategies that would be implemented in 2019, formulated as follows:

1. BUMN Synergy of business expansion according to Government Regulation Number: 35 of 2018
2. Strengthening Human Resources Competence
3. Strengthening Business Processes

Sejalan dengan hal tersebut juga dilakukan evaluasi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan tetap relevan dalam menghadapi tantangan di masa depan.

In line with this, an evaluation of the Company's Vision, Mission, and Values was carried out to ensure the Company's Vision, Mission, and Values remained relevant in facing future challenges.

Visi Perum Jamkrindo saat ini adalah "Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional" dengan misi "Meningkatkan aksesibilitas finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif dan efisien secara berkelanjutan".

The Perum Jamkrindo's Vision now is "Become the Leading Guarantee Company that Supports National Economic Development" with the Mission "Increase the financial accessibility of MSMEs and Cooperatives through providing innovative, competitive guarantees with professional, effective, and efficient services sustainable."

Sebagai tindak lanjut dari strategi "*To Synergize, To Strengthen People & To Strengthen Process*", Dari aspek SDM dan organisasi, perusahaan telah melakukan konsolidasi organisasi dan akselarasi kompetensi SDM untuk menyongsong masa depan perusahaan dimana persaingan bisnis yang ada menjadi semakin ketat. Konsolidasi organisasi dan akselerasi kompetensi SDM dimaksud diperlukan guna menghasilkan dan membentuk sumber daya manusia yang merupakan *Human Capital* perusahaan menjadi lebih berkualitas dan profesional. Dalam hal ini perusahaan secara terus menerus mengikutsertakan secara aktif seluruh SDM perusahaan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri serta melakukan sertifikasi kompetensi.

As a follow-up to the strategy "To Synergize, To Strengthen People & To Strengthen Process", from the aspect of HR and organization, the Company has consolidated the organization and accelerated HR competencies to meet the Company's future where business competition becomes tighter. Organizational consolidation and HR competencies acceleration needed to produce and shape human resources, which is the Company's Human Capital, to become more qualified and professional. In this case, the Company continually involves all Company human resources in various education and training, both domestically and abroad, and conducting competency certification.

Dari segi proses bisnis, banyak dilakukan peningkatan dukungan sistem informasi, diantaranya seperti mengkaji dan mengevaluasi *online* sistem penjaminan KUR yang telah berjalan, sehingga proses penjaminan, penyelesaian klaim dan penagihan subrogasi lebih akurat. Tak hanya itu berbagai inisiatif lainnya juga dilakukan antara lain, pembenahan proses bisnis melalui implementasi *Surety Bond Online* baik *Web Base* maupun *Mobile Apps*, pengembangan Aplikasi *Core* Penjaminan dan Akuntansi dan lain-lain. Perusahaan juga melakuakn *review* SOP dan peraturan internal tentang penjaminan kredit, penyempurnaan pada Sistem Informasi Manajemen operasional perusahaan melalui program aplikasi operasional yang terintegrasi.

There has been much improvement in information system support in terms of business processes, such as reviewing and evaluating the online KUR guarantee system that has been running, so that the guarantee process, settlement of claims, and subrogation billing are more accurate. Various other initiatives were also carried out between others, revamping business processes through the implementation of Surety Bond Online, both Web Base and Mobile Apps, the development of Core Guarantee and Accounting Applications, and others. The Company also conducts reviews on SOP and internal regulations regarding credit guarantee, the improvements to the Company's Operational Management Information System through an integrated operational application program.

Untuk mencapai sasaran perusahaan sebagaimana telah ditetapkan, maka perusahaan merumuskan strategi-strategi sebagai berikut :

To achieve the Company's targets as specified, the Company formulates the following strategies:

a. Mempertahankan akselerasi pertumbuhan yang telah dicapai
b. Pengembangan kompetensi baru untuk memenangkan persaingan pasar
c. Pengelolaan portofolio produk *existing*, baru, dan sinergi BUMN berorientasi pada profitabilitas

a. Maintaining the accelerated growth that has been achieved.
b. Developing of new competencies to win the market competition.
c. Managing a portfolio of the existing products, new products, and profitability-oriented BUMN synergy.

d. Melakukan penjaminan dalam rangka sinergi
e. Pengelolaan portofolio bisnis anak usaha
f. Penguatan dan pengembangan jejaring kemitraan untuk penetrasi & perluasan pasar
g. Otomasi dan integrasi proses internal dan proses dengan perbankan
h. Mengelola risiko penjaminan
i. Meningkatkan pertumbuhan pasar baru dan jumlah pelanggan
j. Meningkatkan produktifitas dan kualitas SDM
k. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik

PROSPEK USAHA

Pertumbuhan ekonomi global di proyeksi kembali bertumbuh pada 2020. IMF memprakirakan ekonomi dunia 2020 tumbuh 3,4%, atau lebih baik dibandingkan 2019 yang diprediksi mencapai 3,0%. Sinyal positif dimaksud antara lain meredanya ketegangan perdagangan dunia, berlanjutnya kebijakan moneter yang akomodatif, penyelesaian *Brexit* yang *orderly*, serta stabilnya kondisi ekonomi negara berkembang yang mengalami tekanan. Sedangkan Otoritas fiskal dan moneter Indonesia memperkirakan perekonomian nasional meningkat dalam rentang 5,1-5,5% pada tahun 2020. Beberapa sentimen positif yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 antara lain kurs Rupiah diperkirakan stabil sesuai dengan fundamentalnya, inflasi terkendali di kisaran sasaran 3,0±1%, kondisi NPI tetap baik seiring berlanjutnya aliran masuk modal asing, pelonggaran kebijakan moneter negara maju berdampak positif, serta likuiditas di pasar uang dan perbankan Indonesia tetap memadai.

Dengan proyeksi stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di 2020, kinerja perbankan nasional diyakini masih dapat tumbuh positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkirakan pertumbuhan kredit dan DPK tumbuh moderat. Hal ini sejalan dengan penurunan suku bunga, cukupnya likuiditas, dan pelonggaran kebijakan makroprudensial.

Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2020 yang diproyeksikan lebih baik dibandingkan tahun 2019, diharapkan berdampak positif pada sektor konsumsi rumah tangga domestik seiring peningkatan daya beli masyarakat. Dari sisi domestik, stabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik serta keberhasilan program paket kebijakan ekonomi merupakan faktor pendorong pertumbuhan perekonomian nasional yang lebih adil

d. Performing guarantees in the context of synergy.
e. Managing a subsidiary's business portfolio.
f. Strengthening and developing partnership networks for market penetration & expansion.
g. Automation and integration of internal processes and processes with banking.
h. Managing guarantee risks.
i. Increasing the growth of new markets and the number of customers.
j. Increasing the productivity and quality of human resources.
k. Implementing Good Corporate Governance.

BUSINESS PROSPECT

Global economic growth is projected to grow again in 2020. The IMF predicts that the world economy in 2020 will grow 3.4% or better than 2019, which is predicted to reach 3.0%. These positive signals include easing world trade tensions, continuing accommodative monetary policy, orderly Brexit settlement, and stable economic conditions in developing countries under pressure. Meanwhile, Indonesia's fiscal and monetary authorities estimate the national economy to increase in the range of 5.1-5.5% in 2020. Some positive sentiments that underpin Indonesia's economic growth in 2020 include the estimated exchange rate of Rupiah stable in line with its fundamentals, controlled inflation in the target range of 3.0 ± 1%, the condition of the balance of payments remained good as foreign capital inflows continued, easing monetary policy in developed countries had a positive impact. The liquidity on the Indonesian money market and banking remained adequate.

With the projected financial system stability maintained in 2020, national banking performance is believed to be able to grow positively. The Financial Services Authority (OJK), BI, and the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) estimate credit growth and Third-Party Funds (DPK) to moderate growth. It is in line with the decline in interest rates, enough liquidity, and easing macroprudential policy.

Indonesia's GDP growth in 2020, which is projected to be better than in 2019, is expected to positively impact the domestic household consumption sector as the purchasing power of the people increases. From the domestic side, macroeconomic stability that is well-maintained and the success of the economic policy package program are factors that drive national economic growth which is more equitable throughout Indonesia not only in the field of infrastructure

dan merata di seluruh Indonesia tidak hanya dibidang pembangunan infrastruktur tetapi juga pengembangan bidang industri dan peningkatan kualitas hidup melalui rumah murah untuk rakyat.

development but also in the development of industry and improving the quality of life through low-cost housing for the people.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan, strategi kebijakan umum pembiayaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah akan diarahkan pada beberapa kebijakan utama, antara lain: Pertama, mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif. Kedua, memberdayakan peran swasta, BUMN dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Ketiga, melakukan inovasi kreatif pada instrumen pembiayaan. Keempat, memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif sehingga bersifat tidak mengikat dan dengan biaya yang lebih rendah.

Concerning financing, the general financing policy strategy to be implemented by the government will be directed to several main policies, including First, directing the use of debt for productive activities. Second, empowering the role of the private sector, SOEs, and regional governments in accelerating infrastructure development. Third, creative innovation in financing instruments. Fourth, use foreign loans selectively so that they are not binding and at lower costs.

Terkait dengan kebijakan pembiayaan, sasaran yang ingin dicapai khususnya untuk UMKMK antara lain; (1) Meningkatnya kontribusi UMKMK dalam perekonomian; dan (2) Meningkatnya daya saing UMKMK, dengan arah kebijakan antara lain berupa peningkatan kompetensi sumber daya manusia UMKMK dan perluasan akses UMKMK ke pembiayaan.

Related to financing policies, the targets to be achieved specifically for MSMEs and Cooperatives include; (1) Increased contribution of MSMEs and Cooperatives in the economy; and (2) Increased competitiveness of MSMEs and Cooperatives, with policy directions including increasing human resource competencies of MSMEs and Cooperatives and expanding MSMEs and Cooperatives access to finance.

Kebijakan pemerintah untuk terus memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK) disambut kalangan perbankan dengan meningkatkan penyaluran kredit kepada UKMK. Namun disisi lain pihak perbankan berupaya memitigasi (mengalihkan) risiko kreditnya dengan melakukan kerjasama penjaminan kredit. Hal ini merupakan suatu peluang bagi perusahaan dalam merebut pangsa pasar untuk meningkatkan kinerja.

The banking community welcomes the government's policy to empower small, medium, and cooperative businesses (UKMK) by increasing lending to UKMK. On the other hand, the banking sector is trying to mitigate (transfer) its credit risk by conducting credit guarantee cooperation. This matter is an opportunity for the Company to capture market share to improve performance.

Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit dapat meningkatkan kapasitas penjaminannya kepada UMKMK dan meningkatkan perluasan akses UMKMK ke pembiayaan baik pembiayaan Bank maupun pembiayaan Lembaga Non Bank. Tak Hanya itu Perum Jamkrindo dapat pula mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur dengan melakukan penjaminan proyek-proyek yang dibiayai oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah. Namun demikian dengan semakin banyaknya pesaing yang terjun ke dalam bisnis penjaminan kredit merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Perum Jamkrindo. Oleh karena itu Perum Jamkrindo akan berusaha memperluas cakupan program berbasis masyarakat dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan juga lembaga keuangan. Program ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah pembinaan/konsultasi manajemen dan pemeringkatan UMKM, penjaminan KUR, Penjaminan Kredit Program lainnya seperti KKPE dan SRG.

Perum Jamkrindo, as a Credit Guarantee Company, can increase its guarantee capacity to MSMEs and Cooperatives and increase the expansion of MSMEs and Cooperatives access to financing both bank financing and Non-Bank Institution financing. Not only that, but Perum Jamkrindo can also support government policies in accelerating infrastructure development by guaranteeing projects funded by the central and regional governments. However, with the increasing number of competitors entering the credit guarantee business is a challenge that must be faced by Perum Jamkrindo. Therefore Perum Jamkrindo will try to broaden the scope of community-based programs and increase poor people's access to basic services and financial institutions. This program is an opportunity that can be utilized by the Company. Some of the activities that have been carried out are coaching (fostering)/management consultancy and UMKM scoring, KUR guarantee, credit guarantee on other programs such as KKPE and SRG.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Direksi menyadari bahwa dewasa ini bahwa kinerja perusahaan tidak semata-mata diukur dari kinerja operasional dan keuangan bahkan harga saham semata, melainkan secara seimbang diukur pula dari kinerja tata kelola perusahaan.

Dalam rangka terus meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dapat dilaksanakan secara konsisten. Pengelolaan Perusahaan senantiasa dilandasi dengan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Agar tetap selaras dengan perkembangan industri dan perubahan lingkungan usaha dengan tetap menjunjung komitmen terhadap pelaksanaan GCG maka Perusahaan pada tahun 2019 telah melakukan evaluasi dan revisi *Soft Structure* GCG seperti *Board Manual, Code of Conduct* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku serta telah melaksanakan evaluasi penilaian implementasi GCG. Disamping itu, sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perusahaan telah menyampaikan informasi secara tepat waktu, akurat dan lengkap kepada Pemegang Saham dan Stakeholders sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga telah melakukan Penandatangan komitmen bersama dalam hal implementasi penerapan manajemen risiko di seluruh jajaran manajemen.

Perusahaan akan terus mengambangkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, termasuk mengacu pada praktek terbaik sepanjang masih dalam koridor regulasi, demi terciptanya kepatuhan dan kegiatan bisnis berkesinambungan.

Guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan GCG (*Good Corporate Governance*), selama tahun 2019, telah dilakukan Sosialisasi Peraturan Direksi *Whistle Blowing System* (WBS) Nomor: 04/Per-Dir/IV/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistle Blowing System* (WBS) oleh SPI, 54 (lima puluh empat) Kantor Cabang, 9 (sembilan) Kantor Wilayah bersamaan dengan pelaksanaan general audit serta melakukan *Assessment* GCG Tahun 2019 yang dilakukan secara Internal berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 767/SPT/1/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 perihal pelaksanaan *Review* dan *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Perum Jamkrindo Tahun 2019.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Board of Directors realizes that today the Company's performance is measured not only by operational and financial performance and even share price but also in a balanced manner from the performance of corporate governance.

To continuously improve the quality of the implementation of good corporate governance, the Company has made various efforts to ensure the implementation of corporate governance can be carried out consistently. Management of the Company is always based on implementing the Good Corporate Governance principles according to applicable regulations.

To remain in line with industry developments and changes in the business environment by upholding commitments to the GCG implementation, the Company in 2019 has evaluated and revised the GCG Soft Structure such as Board Manual, Code of Conduct according to the applicable laws and regulations and has evaluated GCG implementation assessment. Besides, as a form of the Company's commitment to implementing Good Corporate Governance, the Company has delivered information in a timely, accurate and complete manner to Shareholders and Stakeholders according to applicable laws and regulations. The Company has also signed a joint commitment to implement risk management in all levels of management.

The Company will continue to develop Good Corporate Governance, including referring to best practices as long as they are still in the corridor of regulation for the sake of creating compliance and sustainable business activities.

To increase the effectiveness of GCG (Good Corporate Governance) implementation, during 2019, the Board of Directors' regulation on Whistleblowing System (WBS) Number: 04 / Per-Dir / IV / 2018 dated April 10, 2018, concerning Guidelines for Management of the Violation Reporting System of Whistleblowing System (WBS), has been socialized by SPI to 54 (fifty-four) Branch Offices, 9 (nine) Regional Offices together with the implementation of general audits and GCG Assessment in 2019 conducted internally based on Task Order Letter Number: 767 / SPT / 1 / XII / 2019 dated December 3, 2019, regarding the implementation of the Review and Self Assessment of Perum Jamkrindo's Good Corporate Governance Implementation in 2019.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DIREKSI

Sampai dengan akhir tahun 2019, Perusahaan belum memiliki Komite di bawah Direksi sehingga tidak terdapat informasi mengenai penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi beserta dasar penilaiannya. Secara efektif peran komite-komite telah dijalankan fungsi-fungsi yang terbagi atas per Direktorat yang sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsi secara terukur dan terarah berdasarkan RKAP.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

As of the end of 2019, the Company did not have a Committee under the Board of Directors, so there was no information on the committee's performance assessment and the basis of its assessment. Effectively the roles of the committees have been carried out functions that are divided per Directorate, which fully carry out the measured and directed duties and functions based on the RKAP.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2019 tidak terdapat perubahan komposisi Direksi Perusahaan. Per 31 Desember 2019, komposisi Direksi adalah sebagai berikut:

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

In 2019 there was no change in the composition of the Company's Board of Directors. As of December 31, 2019, the composition of the Board of Directors was as follows:

Direktur Utama	Randi Anto	President Director
Direktur Bisnis Penjaminan	Amin Mas'udi	Director of Business Guarantee
Direktur Operasional dan Jaringan	Kadar Wisnuwarman	Director of Operations and Networks
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan	Sulis Usdoko	Director of HRM, General Affairs, and Compliance
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajen Risiko	I Rusdonobanu	Director of Finance, Investment, and Risk Management

APRESIASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Atas nama Direksi, kami menyampaikan penghargaan kepada pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada Perum Jamkrindo. Kepada Dewan Pengawas atas arahan dan pengawasan yang diberikan kepada kami. Kepada seluruh pegawai Perum Jamkrindo, kami menyampaikan penghargaan yang setingginya-tingginya atas keuletan, semangat, kerja keras dan memberikan komitmen baik secara individu maupun secara bersama-sama melaksanakan dan memastikan terselenggaranya pelayanan jasa Perum Jamkrindo.

Bagi para mitra kerja, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya untuk kepercayaan yang diberikan selama ini dan kami berharap untuk dapat terus meningkatkan pelayanan agar dapat memenuhi eskpektasi para pengguna jasa. Kepada mitra usaha, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya yang terus menerus, dalam masa yang baik maupun yang sulit. Penghargaan juga kami sampaikan kepada seluruh para pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai penutup, Direksi mengajak kepada semua jajaran Perusahaan untuk tetap optimis dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kami yakin bahwa dengan

STAKEHOLDER APPRECIATION

On behalf of the Directors, we express our appreciation to shareholders who have given trust and support to Perum Jamkrindo. To the Board of Supervisor Council for the direction and supervision given to us. To all employees of Perum Jamkrindo, we extend our highest appreciation for tenacity, enthusiasm, hard work and commitment both individually and jointly implementing and ensuring the implementation of Perum Jamkrindo's services.

For our partners, we would like to express our sincere thanks for the trust given so far and we hope to continue to improve services in order to meet the expectations of service users. To our business partners, we thank you for your continued support, in both good and difficult times. Our appreciation also goes to all other stakeholders.

In closing, the Board of Directors invites all levels of the Company to remain optimistic in facing future challenges. We are sure that with good cooperation, shoulder to shoulder,

kerjasama yang baik, saling bahu-membahu, dan bergandeng tangan seraya menjaga kekompakan di antara kita, semua kesulitan dan tantangan yang berat Insya Allah akan dapat kita lalui dengan baik. Semoga hubungan dan kerjasama yang harmonis di antara seluruh Pemangku Kepentingan senantiasa tercipta di masa yang akan datang.

and holding hands while maintaining cohesiveness between us, all the difficulties and severe challenges God willing, we can go through well. We hope that harmonious relations and cooperation among all the Stakeholders will always be created in the future.

Jakarta , Juni 2020 / Jakarta, June, 2020

Atas Nama Direksi / On Behalf of Directors



Randi Anto
Direktur Utama / President Director

SURAT PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS
Statement Letter of Board of Supervisor Council

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perum Jamkrindo tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, testify that all information in the Annual Report of Perum Jamkrindo tahun 2019 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report and Financial Report of the Company.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta , Juni 2020 / Jakarta, June, 2020

Sri Mulyanto
Ketua Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Independen
Chairman of Board of Supervisor Council/ Independent Board of Supervisor Council

Noor Ida Khomsiyati
Anggota Dewan Pengawas
Member of Board of Supervisor Council

Diah Natalisa
Anggota Dewan Pengawas
Member of Board of Supervisor Council

Ari Wahyuni
Anggota Dewan Pengawas
Member of Board of Supervisor Council

Muhammad Muchlas Rowi
Dewan Pengawas Independen
Independent Supervisory Board

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
Statement Letter of Board of Directors

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perum Jamkrindo tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, testify that all information in the Annual Report of Perum Jamkrindo tahun 2019 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report and Financial Report of the Company.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta , Juni 2020 / Jakarta, June, 2020

Randi Anto
Direktur Utama
President Director

Amin Mas'udi
Direktur Bisnis Penjaminan
Director of Business of Guarantee

Kadar Wisnuwarman
Direktur Operasional dan Jaringan
Director of Operations and Network

Sulis Usdoko
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan
Director of Human Resources Management, General Affairs and Compliance

I. Rusdonobanu
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Investment and Risk Management

Jamkrindo

Jamkrindo

Jaminan Kredit Indonesia



LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT
2019



PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

36 Profil Perusahaan
Company Profile

41 Bidang Usaha
Line of Business

51 Kompetensi Inti
Core Competence

52 Struktur Organisasi
Organizational Structure

54 Visi, Misi Dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission and Corporate Culture

56 Makna Branding Logo
The Meaning Behind Logo Branding

57 Profil Dewan Pengawas
Profile of The Supervisory Board

65 Profil Direksi
Profile of The Directors

71 Profil Pejabat Eksekutif
Profile of Executive Officers

76 Demografi Karyawan
Employee Demographics

77 Komposisi Pemegang Saham/Pemilik Modal
Composition of Shareholders/Capital Owner

78 Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi *Joint Venture* (JV) / *Special Purpose Vehicle* (SPV)
List of Subsidiaries and Association / Joint Venture (JV)/Special Purpose Vehicle(SPV)

80 Struktur Grup
Group Structure

81 Kronologis Penerbitan Saham
Chronology of Share Issuance

81 Kronologis Penerbitan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities Issuance

82 Lembaga dan Profesi Penunjang
Supporting Institutions and Professionals

83 Penghargaan Dan Sertifikasi
Awards and Certifications

86 Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang / Kantor Perwakilan
List of Addresses of Subsidiaries and Branch Offices/Representative Offices

91 Informasi pada Situs Web Perusahaan
Information on the Company's Website

92 Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal
Education and/or Training of The Board of Supervisor Council, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile

Perum Jamkrindo melakukan pengembangan dengan menambah kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, untuk menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Perum Jamkrindo made development by adding Company's business activities in accordance with current developments and needs, to support Government policies and programs in the field of national economy and development.

INFORMASI UMUM TENTANG JAMKRINDO
GENERAL INFORMATION ABOUT JAMKRINDO

NAMA PERUSAHAAN

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)

COMPANY NAME

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)

BENTUK DAN STATUS BADAN USAHA

Perusahaan Umum (Perum)

FORM AND STATUS OF BUSINESS ENTITY

Public Corporation

TANGGAL PENDIRIAN

1 Juli 1970

DATE OF ESTABLISHMENT

July 1, 1970

DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia tanggal 20 Juli 2018

Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009

LEGAL BASIS

Government Regulation No. 35 of 2018 concerning the Perum Jamkrindo dated July 20, 2018

Decree of the Minister of Finance No. KEP-77 / KM.10 / 2009 dated April 22, 2009

DASAR HUKUM PELAKSANAAN USAHA PENJAMINAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/ POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Perizinan Usaha dan Lembaga Penjaminan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/ POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/ POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/ POJK.05/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tanggal tentang Perubahan Kedua Atas POJK No. 1/ POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

LEGAL BASIS OF BUSINESS GUARANTEE PRACTICE

Law No. 1 of 2016 concerning Guarantees

Government Regulation No. 1 of 2016 concerning the Implementing Agency for Guarantee of Warehouse Receipt System

Financial Services Authority Regulation Number 1 / POJK.05 / 2017 dated January 11, 2017, concerning Business Licensing and Guarantee Institutions

Financial Services Authority Regulation Number 2 / POJK.05 / 2017 dated January 11, 2017, concerning Business Implementation of the Guarantee Institutions

Financial Services Authority Regulation Number 3 / POJK.05 / 2017 dated January 11, 2017, concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions

Financial Services Authority Regulation Number 56 / POJK.05 / 2017 dated August 28, 2017, concerning the Second Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 1 / POJK.05 / 2016 concerning Investment in Government Securities for Non-Bank Financial Services Institutions



KANTOR PUSAT
HEAD OFFICE

Gedung Jamkrindo | **Jamkrindo Building**
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, Indonesia

KONTAK
CONTACT

+62 21 6540335
+62 21 6540344, 6540348
contact@jamkrindo.co.id
www.jamkrindo.co.id

MEDIA SOSIAL
SOCIAL MEDIA

perum_jamkrindo
perum_jamkrindo
Perum Jamkrindo
Perum Jamkrindo

BIDANG USAHA

Penjaminan kredit baik bersifat langsung maupun tidak langsung yang diberikan kepada bank atau Badan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

JARINGAN USAHA

9 Kantor Wilayah, 56 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia

KEPEMILIKAN

100% Negara Republik Indonesia, melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian Badan Usaha Milik Negara

PENYERTAAN MODAL NEGARA

Rp7.638.733.365.160,-

JUMLAH KARYAWAN

965 orang di 2019

LINE OF BUSINESS

Direct and indirect credit guarantees given to banks or Micro, Small, Medium Enterprises (MSMEs) and Cooperatives

BUSINESS NETWORK

9 Regional Offices, 56 Branch Offices and 16 Service Unit Offices (KUP) spread throughout Indonesia

OWNERSHIP

100% belong to the Republic of Indonesia, under the care of the Government of the Republic of Indonesia / Ministry of State-Owned Enterprises

STATE EQUITY PARTICIPATION

IDR7,638,733,365,160,-

NUMBER OF EMPLOYEES

965 people in 2019

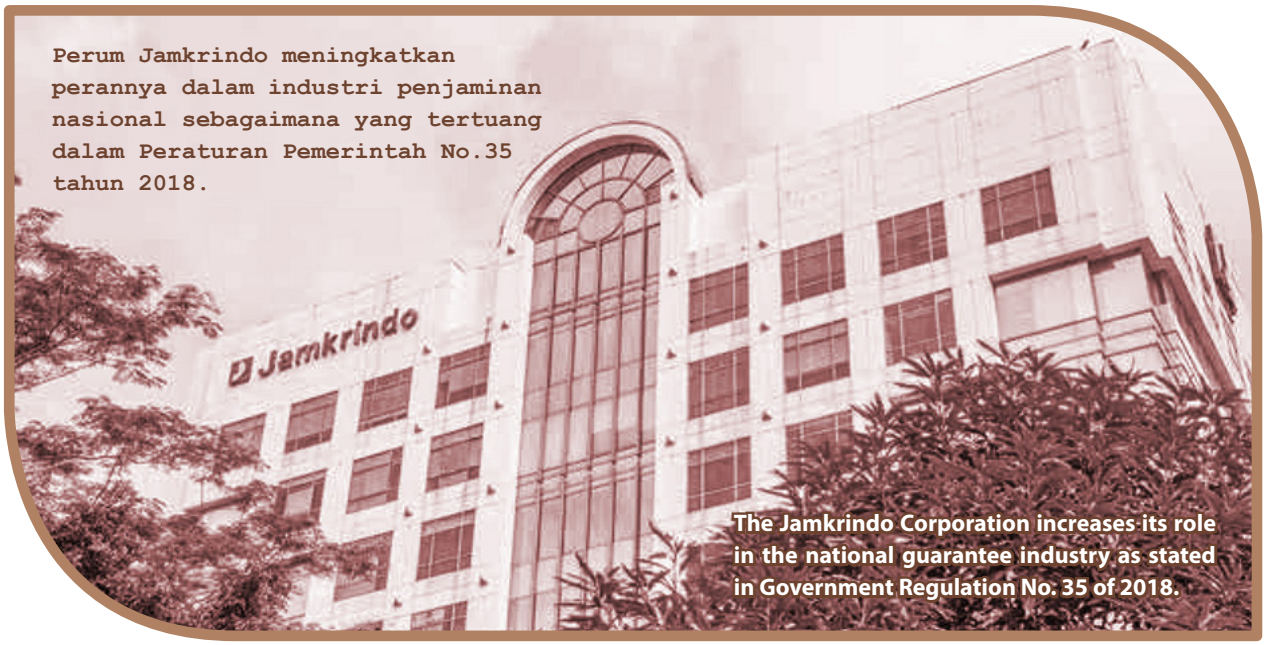

SELAYANG PANDANG SEJARAH PERUM JAMKRINDO

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, atau disebut juga dengan "Perum Jamkrindo" atau "Perusahaan" merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fokus kegiatan usaha pada bidang penjaminan kredit, baik konvensional maupun syariah.

Sebagai perusahaan BUMN, Perum Jamkrindo berkomitmen secara penuh dalam melaksanakan dan menunjang kebijakan maupun program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dalam upaya menyejahterahkan kehidupan bangsa. Implementasi komitmen tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pemberian bantuan konsultasi manajemen berupa pemberian jaminan kredit bersifat tunai dan non-tunai, yang diberikan oleh bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM dan Koperasi). Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat secara merata dan memudahkan aksesibilitas, Perum Jamkrindo terus melakukan pengembangan jaringan kerja hingga ke pelosok negeri serta melakukan perbaikan dan pengembangan pada kualitas layanan.

Jamkrindo didirikan pada pertengahan tahun 1970 sebagai Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). Pada masa itu perkembangan koperasi masih tertinggal dibandingkan dengan perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Dalam perkembangannya, LJKK kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1981

HISTORY OF PERUM JAMKRINDO AT A GLANCE

The Indonesian Credit Guarantee Public Corporation, also called "Perum Jamkrindo" or "Company" is a State-Owned Enterprise (SOE) that has a focus on business activities in the field of both conventional and sharia credit guarantee.

As an SOE, Perum Jamkrindo is fully committed to implementing and supporting Government policies and programs in the field of national economy and development in an effort to improve the life of the nation. The implementation of these commitments was carried out through the activities of providing management consulting assistance in the form of providing cash and noncash credit guarantees provided by banks or business entities to Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs and Cooperatives). In an effort to improve the economy of the community evenly and facilitate accessibility, Perum Jamkrindo continues to develop its work network to all corners of the country as well as make improvements and development on service quality.

Jamkrindo was established in the mid-1970s as the Cooperative Credit Guarantee Agency (LJKK). At that time, the development of cooperatives was still behind compared to state-owned enterprises and private companies. In its development, LJKK was later changed to a Cooperative Financial Development Public Corporation (Perum PKK) through Government Regulation No. 51 of

tanggal 23 Desember 1981 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985 tanggal 31 Mei 1985 tentang Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi.

Keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan penjaminan kredit, membuat Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK menjadi tidak hanya terbatas pada koperasi, tetapi juga mencakup UMKM. Atas usaha tersebut, Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat peran Perum PKK melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2000 tanggal 7 November 2000 yang sekaligus mengubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU).

Pada tahun 2008, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Terkait dengan perubahan bisnis Perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKM dan Koperasi melalui pola bagi hasil, tetapi berfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKM dan Koperasi, Perum SPU diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah melalui Departemen Keuangan memperkuat dasar hukum pendirian Perusahaan serta perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Melalui regulasi tersebut, Perum Jamkrindo wajib memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti aturan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan (KMK) No. KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit.

Di tahun 2016, Pemerintah meluncurkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Penjaminan, sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dalam memayungi dan melembagakan industri penjaminan yang terus mengalami perkembangan sejalan dengan pertumbuhan jasa keuangan di Indonesia.

Pada tahun 2018, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, peraturan ini diterbitkan

1981 dated December 23, 1981, which was perfected by Government Regulation No. 27 of 1985 dated 31 May 1985 concerning the Public Corporation for Cooperative Financial Development.

The successful implementation of the functions and duties of Perum PKK in developing cooperatives through credit guarantee activities has made the Government expand the service coverage of Perum PKK to not only be limited to cooperatives but also includes MSMEs. For this effort, the Government again issued a policy aimed at strengthening the role of Perum PKK through the issuance of Government Regulation No. 95 of 2000 dated 7 November 2000 which at the same time changed the name of Perum PKK to become a Public Business Facility Development Company (Perum SPU).

In 2008, the Government issued Presidential Regulation No. 2 of 2008 dated January 26, 2008, concerning the Guarantee Institution. With regard to business changes, the Company no longer provides loans directly to MSMEs and Cooperatives through profit sharing patterns, but focuses on the MSME and Cooperative credit guarantee business, Perum SPU was renamed the Indonesian Credit Guarantee Public Corporation (Perum Jamkrindo) based on Government Regulation No. 41 of 2008 dated May 19, 2008.

As a follow up to the implementation of the Presidential Regulation, the Government through the Ministry of Finance strengthened the legal basis for the establishment of the Company and other companies with similar line of business through the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 222 / PMK.010 / 2008 dated December 16, 2008 as amended in Minister of Finance Regulation No. 99 / PMK.010 / 2011 dated July 8, 2011 concerning Credit Guarantee Companies and Credit Re-Guarantee Companies. Through the regulation, Perum Jamkrindo is required to have a business license as a Credit Guarantee Company. Following up on the regulation, the Minister of Finance issued a Decree (KMK) No. KEP-77 / KM.10 / 2009 dated 22 April 2009 which stipulates the business permit of Perum Jamkrindo as a Credit Guarantee Company.

In 2016, the Government launched Law No. 1 of 2016 dated January 19, 2016 concerning Guarantees, as a form of the Government's seriousness in covering and institutionalizing the guarantee industry that continues to develop in line with the growth of financial services in Indonesia.

In 2018, the Government issued Government Regulation No. 35 of 2018 concerning the Indonesian Credit Public Corporation (Perum). This regulation was issued in order to

guna meningkatkan peran Perum Jamkrindo dalam industri penjaminan nasional sebagai upaya untuk mensukseskan kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pemerintah memandang Jamkrindo perlu melakukan pengembangan usaha dengan menambah kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, untuk menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

increase the role of Perum Jamkrindo in the national guarantee industry in an effort to succeed Government policies and programs in the national economy and development sector. The Government views Jamkrindo as necessary to develop its business by increasing the Company's business activities in accordance with current developments and needs, to support Government policies and programs in the field of national economy and development.

PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

Kronologi proses perubahan nama Perum Jamkrindo sejak awal berdiri hingga saat ini seperti yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- Perusahaan pada awalnya didirikan dengan nama Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1981 yang merupakan peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985.
- Nama Perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2000.
- Nama Perusahaan kembali diubah, menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) seperti yang dikenal saat ini, melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008.

THE CHANGE OF COMPANY'S NAME

The chronology of the name change process of Perum Jamkrindo since its inception until now as described above is as follows:

- The company was originally established under the name of the Cooperative Financial Development Public Corporation (Perum PKK), established in accordance with Government Regulation No. 51 of 1981 which was a merger of the Cooperative Credit Guarantee Institution (LJKK) which was formed in 1970. The Government Regulation was then refined through Government Regulation No. 27 of 1985.
- The Company name was changed to the Public Business Development Facility Company (Perum SPU) based on Government Regulation No. 95 of 2000.
- The company name was changed again, becoming the Indonesian Credit Guarantee Public Corporation (Perum Jamkrindo) as it is known today, through the issuance of Government Regulation No. 41 of 2008.

Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK)

peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970

1981

Public Corporation for Cooperative Financial Development (Perum PKK)

which was a fusion of the Cooperative Credit Guarantee Institution (LJKK) formed in 1970

Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU)

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2000

2000

Public Business Development Facility Company (Perum SPU)

based on Government Regulation No. 95 of 2000

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008

2008

Indonesian Credit Guarantee Public Corporation (Perum Jamkrindo)

based on Government Regulation No. 41 of 2008

BIDANG USAHA
Line of Business

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR: PENERIMA JAMINAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang menjadi anggaran dasar perusahaan, dalam pasal 6 disebutkan bahwa Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki maksud dan tujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi, Penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, Penjaminan sistem resi gudang, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan melakukan kegiatan usaha yaitu:
   a. Penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
   b. Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi simpan pinjam atau Koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya;
   c. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan;
   d. Penjaminan surat utang kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
   e. Penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
   f. Penjaminan transaksi dagang yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
   g. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa *surety bond* yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
   h. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON ARTICLES OF ASSOCIATION: GUARANTEE RECIPIENTS

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 35 of 2018 concerning Public Corporation (Perum) Indonesian Credit Guarantees (Jamkrindo) which are the Company's articles of association, in Article 6 it is stated that the Company's Purpose, Objectives, and Business Activities are as follows:

1. The Company has the intent and purpose to participate in implementing and supporting Government policies and programs in the field of national economy and development, by conducting business guarantees for Micro, Small and Medium Enterprises, as well as Cooperatives, Guarantee for state-owned enterprises, Guarantee receipt systems warehouse, and optimizing the utilization of Company resources based on the principles of good corporate governance.
2. In carrying out the aims and objectives as referred to in paragraph (1), the Company carries out business activities for the following:
   a. Credit guarantee, conservative financing, or financing based on Sharia Principles provided by financial institutions to Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives;
   b. Loan guarantees channeled by savings and loan cooperatives or cooperatives that have a savings and loan business unit to its members;
   c. Credit guarantee and/or partnership program loans distributed by state-owned enterprises in the context of partnership and community development programs;
   d. Guarantee of debt securities for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;
   e. Guarantee of purchase of goods in installments made to Micro Enterprises, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives;
   f. Guarantee of trade transactions carried out for Micro Businesses, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives;
   g. Guarantee of the procurement of surety bond goods and/or services carried out for Micro, Small Business, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives;
   h. Guarantee of bank guarantees (counter bank guarantees) made to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;

i. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;

j. Penjaminan *letter of credit* yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;

k. Penjaminan kepabeanan (*Custom bond*) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;

l. Penjaminan cukai yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;

m. Penjaminan pembiayaan kepada usaha rintisan (*start up business*) yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;

n. Penjaminan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;

o. Penjaminan dalam rangka sinergi antara Perusahaan dengan badan usaha milik negara lain;

p. Penjaminan sistem resi gudang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

q. Penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;

r. Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan;

s. Pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi; dan

t. Kegiatan usaha utama lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

3. Kegiatan usaha utama Perusahaan dapat dilakukan dalam bentuk Penjaminan bersama (*co-guarantee*) kecuali kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r dan huruf s.

4. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang mendukung secara finansial terhadap kegiatan usaha utama, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai Perusahaan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

i. Guarantee of domestic documented letters of credit for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;

j. Guarantee of letters of credit made to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;

k. Customs guarantees (Custom bonds) carried out for Micro Businesses, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives;

l. Excise guarantees carried out on Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;

m. Financing guarantees for start-up businesses that meet the criteria of Micro Business, Small Business, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives;

n. The guarantee of IT-based money lending services provided to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;

o. Guarantee in the context of synergy between the Company and other state-owned enterprises;

p. Guarantee of warehouse receipt system in accordance with the provisions of legislation;

q. Credit guarantee or financing based on Sharia Principles to individuals in accordance with the purposes and objectives of the Company;

r. Provision of management consulting services related to Guarantee business activities;

s. Ranking, management consulting, management services, assistance/empowerment, as well as other services for Micro Businesses, Small Businesses, and Medium Enterprises, and Cooperatives; and

t. Other main business activities after obtaining approval from the Financial Services Authority and/or related institutions in accordance with their authority.

3. The main business activities of the Company can be carried out in the form of joint guarantee (co-guarantee) except for the main business activities as referred to in paragraph (2) point r and s.

4. In addition to the main business activities as referred to in paragraph (2), as long as financially supporting the main business activities, the Company can carry out business activities in order to optimize the utilization of potential resources that are owned and/or controlled by the Company as determined by the Minister.

Dalam upaya mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat menyelenggarakan beberapa kegiatan usaha dan kebijakan pengembangan usaha untuk mendukung pembiayaan. Berikut disampaikan pelaksanaan kegiatan usaha dan kebijakan pengembangan usaha yang telah dilakukan.

In an effort to achieve these aims and objectives, the Company can conduct several business activities and business development policies to support financing. The following is the implementation of business activities and business development policies that have been carried out.

No	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on Articles of Association	Telah/Belum Dijalankan Has or has not been performed	Keterangan Description
1	Penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Credit guarantee, conservative financing, or financing based on Sharia Principles provided by financial institutions to Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives	√	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Umum, Penjaminan Kredit Mikro, Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Available on General Credit Guarantee products, Micro Credit Guarantee, People's Business Credit Guarantee
2	Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi simpan pinjam atau Koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya Loan guarantees channeled by savings and loan cooperatives or cooperatives that have a savings and loan business unit to its members	√	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Multiguna KKLK Available on the KKLK Multipurpose Credit Guarantee product
3	Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan Credit guarantee and/or partnership program loans distributed by state-owned enterprises in the context of partnership and community development programs	√	Penyaluran program kemitraan Distribution of partnership programs
4	Penjaminan surat utang kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantee of debt securities for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives	-	-
5	Penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantee of purchase of goods in installments made to Micro Enterprises, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives	√	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit OTO Available on OTO Credit Guarantee products
6	Penjaminan transaksi dagang yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantee of trade transactions carried out for Micro Businesses, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives	√	Terdapat dalam produk Penjaminan Distribusi Barang Available on Goods Distribution Guarantee products
7	Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa *surety bond* yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantee of the procurement of surety bond goods and/or services carried out for Micro, Small Business, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives;	√	Terdapat pada produk *Surety Bond, Surety Bond Co-Guarantee*, Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/ Jasa. Available on Surety Bond products, Surety Bond Co-Guarantee, Guarantee of Construction Loans and Procurement of Goods / Services.

No	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on Articles of Association	Telah/Belum Dijalankan Has or has not been performed	Keterangan Description
8	Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantee of bank guarantees (counter bank guarantees) made to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;	√	Terdapat dalam produk Penjaminan Kredit Kontra Bank Garansi, Penjaminan Kredit Kontra Bank Garansi *Co-Guarantee* Available on Counter Guarantee Bank Credit Guarantee and Co-Guarantee Counter Guarantee Bank Credit Guarantee products
9	Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantee of domestic documented letters of credit for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives	-	-
10	Penjaminan letter of credit yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantee of letters of credit made to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;	-	-
11	Penjaminan kepabeanan (*Custom bond*) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Customs guarantees (Custom bonds) carried out for Micro Businesses, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives;	√	Terdapat pada *Customs Bond* Available on Customs Bond
12	Penjaminan cukai yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Excise guarantees carried out on Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;	√	Terdapat pada produk *Customs Bond* Available on Customs Bond
13	Penjaminan pembiayaan kepada usaha rintisan (*start up business*) yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Financing guarantees for start-up businesses that meet the criteria of Micro Business, Small Business, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives;	√	Terdapat pada produk penjaminan Kredit Umum, dan Penjaminan Kredit Mikro Available on General Credit guarantee products, and Micro Credit Guarantees
14	Penjaminan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi The guarantee of IT-based money lending services provided to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives	√	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Mikro Available on Micro Credit Guarantee products
15	Penjaminan dalam rangka sinergi antara Perusahaan dengan badan usaha milik negara lain Guarantee in the context of synergy between the Company and other state-owned enterprises;	√	Terdapat dalam produk *Surety Bond*, Penjaminan Bersama KUR, Penjaminan Pembiayaan *Invoice* Available in Surety Bond products, KUR Joint Guarantee, Invoice Financing Guarantee
16	Penjaminan sistem resi gudang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Guarantee of warehouse receipt system in accordance with the provisions of legislation;	√	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Subsidi Resi Gudang Available on the Warehouse Receipt Credit Guarantee Subsidy product

No	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on Articles of Association	Telah/Belum Dijalankan Has or has not been performed	Keterangan Description
17	Penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; Credit guarantee or financing based on Sharia Principles to individuals in accordance with the purposes and objectives of the Company	√	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Multiguna, Penjaminan Kredit Arrum Available on Multipurpose Credit Guarantee products, Arrum Credit Guarantee
18	Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan Provision of management consulting services related to Guarantee business activities;	√	Dilakukan oleh korporasi Conducted by the corporation
19	Pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi, dan Ranking, management consulting, management services, assistance / empowerment, as well as other services for Micro Businesses, Small Businesses, and Medium Enterprises, and Cooperatives; and	√	Dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan PUKM Conducted by the Risk Management Division and PUKM
20	Kegiatan usaha utama lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya Other main business activities after obtaining approval from the Financial Services Authority and/or related institutions in accordance with their authority	√	Penjaminan Bersama KUR KUR Collateral Guarantee

√ = telah dijalankan / Has been performed x = belum/tidak dijalankan / Has not been performed

PRODUK USAHA PENJAMINAN

Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit (Terjamin) kepada Penerima Jaminan. Proses Penjaminan Kredit melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pihak, yaitu badan usaha pemberi kredit yang disebut Penerima Jaminan, debitur kredit yang disebut Terjamin, dan Perusahaan Penjamin kredit yang disebut Penjamin.

GUARANTEE BUSINESS PRODUCTS

Credit Guarantee is the activity of providing guarantees for the fulfillment of the Credit Recipient's financial obligations (Guaranteed) to the Guarantee Recipient. The Credit Guarantee Process involves at least 3 (three) parties, namely the credit giving business entity called the Guarantee Receiver, the credit debtor called the Guaranteed, and the Credit Guarantee Company called the Guarantor.

PROSES PENJAMINAN KREDIT
CREDIT GUARANTEE PROCESS

Proses Penjaminan Kredit

Credit Guarantee Process

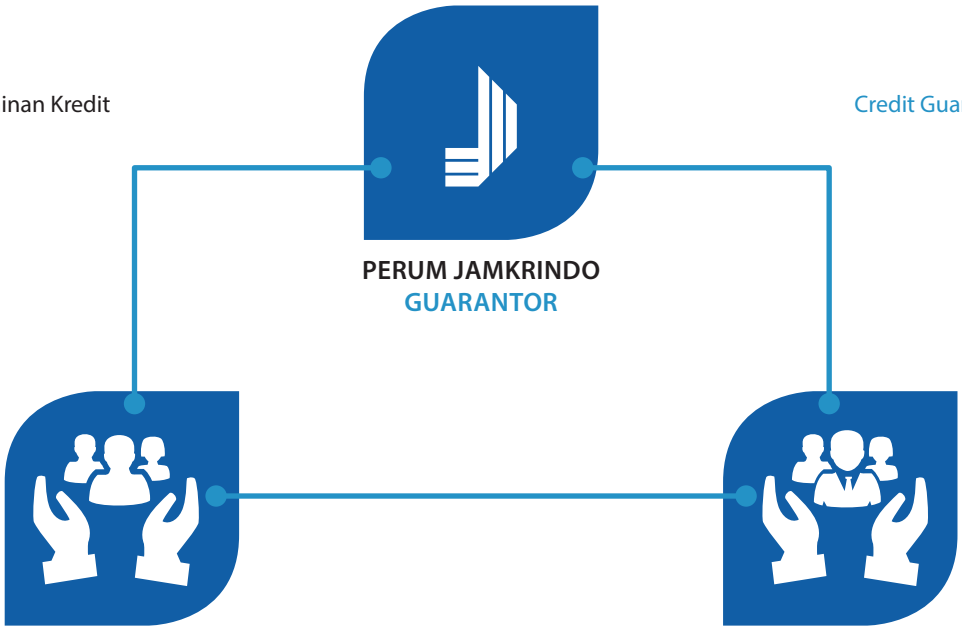

Lembaga Keuangan atau diluar Lembaga Keuangan
Financial Institutions or Other aside from Financial Institutions

Prinsip dasar Penjaminan Kredit adalah pengambilalihan atas risiko kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan, namun tidak menghilangkan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan sampai Penerima Jaminan menyatakan Kredit Terjamin tersebut lunas.

Penjaminan Kredit diperlukan oleh Penerima Jaminan pada saat permohonan kredit dari Terjamin dinyatakan layak oleh Penerima Jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi perkreditan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan kecukupan agunan *(unbankable)*.

The basic principle of Credit Guarantee is the takeover of the risk of the guaranteed's failure in fulfilling its financial obligations to the Recipient of Guarantee but does not eliminate guaranteed financial obligations to the Recipient of Guarantee until the Recipient of Guarantee states the Guaranteed Credit is paid off.

Credit Guarantee is required by the Guarantee Receiver when the loan application from Guaranteed is declared feasible by the Guarantee Receiver but has not met the banking credit administration requirements, especially in terms of unbankable fulfillment of collateral.

Jenis-jenis Produk usaha Penjaminan antara lain sebagai berikut:

The types of guarantee business products include the following:

Kegiatan Activities	Keterangan Description
Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak,namun belum *bankable* yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif.
Guarantee of People's Business Credit	Venture Capital Credit/Financing and/or investment to MSMEs in a productive and feasible, but not yet bankable business field which is guaranteed by the Guarantee Company. KUR distribution is expected to help develop productive businesses
Penjaminan KPR Sejahtera FLPP	Penjaminan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah yang merupakan program kerjasama antara Pihak Perbankan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
KPR Sejahtera Guarantee-Housing Financing Liquidity Facility	Guarantee on housing loan disbursement which is a collaboration program between the Bank and the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia. This guarantee is given with low-interest rates and mild and fixed installments throughout the period of credit and is intended for low-income communities.
Penjaminan Sistem Resi Gudang	Kegiatan pemberian jaminan kepada Pengelola Gudang atas Kewajibannya kepada petani dalam melakukan pengelolaan barang komoditas.
Guarantee on the Warehouse Receipt System	Guarantee activities to Warehouse Managers for their Obligations to farmers in managing commodity goods.
Penjaminan Kredit Umum	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan Lembaga Keuangan Lainya (*Non Bank*) kepada Terjamin untuk keperluan tambahan Modal Kerja dan/atau Investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin,yang proses penjaminannya dilakukan secara kasus per kasus
Guarantee on General Credit	Guarantee on credit/financing provided by the Recipient of the Other Financial Institution Guarantee (Non-Bank) to the Guaranteed for the purposes of additional Working Capital and/or Investment in the context of guaranteed business development and improvement, in which the guarantee process is carried out on a case-by-case basis
Penjaminan Kredit Mikro	Penjaminan atas kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin Pengusaha Mikro dan Kecil, untuk keperluan Modal Kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Produktif, yang jumlah plafond kredit sesuai dengan ketentuan kredit mikro di Penerima Jaminan, yang proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara otomatis bersyarat *(Conditional Automatic Cover/CAC)*.
Micro Credit Guarantee	Guarantee of the credit given by the Recipient of Guarantee to the Guaranteed Micro and Small Entrepreneurs, for Working Capital needs and/or investment in the framework of increasing and developing productive businesses, in which the credit limit is in accordance with the microcredit provisions in the Guarantee Recipient. The guarantee process of which is automatic conditional (Conditional Automatic Cover/CAC).

Kegiatan Activities	Keterangan Description
Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin dengan *Bowheer* (pemilik proyek), yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional.
Guarantee of Construction Credit & Procurement of Goods/ Services	Guarantee on credit/financing provided by the Guarantee Recipient to the Guaranteed for additional working capital for the construction and procurement of goods/services in accordance with the employment contract between the Guaranteed and Bowheer (the project owner), the source of which is from the State/Regional Budget, or State-owned Enterprises, or national private expenditure.
Penjaminan Kredit Multiguna	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan untuk Lembaga Keuangan lainnya (Non Bank) kepada Terjamin, perorangan (pegawai tetap suatu Perusahaan/ instansi Pemerintah) baik yang penyalurnya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga lainya, yang sumber pengembaliannya dengan cara memotong gaji Terjamin dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif.
Multipurpose Credit Guarantee	Guarantee on credit/financing provided by the Guarantee Recipient of Other (Non-bank) Financial Institutions to the Guaranteed individuals (permanent employees of a Company/Government agency) whose distribution is done directly or through other institutions, and the source of return is deducted from guaranteed wages. The guarantee application process is done collectively.
Penjaminan Distribusi Barang	Penjaminan kredit untuk kredit/pembiayaan distribusi yang diberikan oleh perusahaan fabrikan (manufaktur) kepada distributor yang mendistribusikan barang. (analisa penjaminan dilakukan dengan *case by case*)
Goods Distribution Guarantee	Credit guarantees for credit/financing of distribution which is given provided by manufacturing companies to distributors who distribute goods. (guarantee analysis is done on case basis)
Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi	Penjaminan yang diberikan Penjamin (Perum Jamkrindo) kepada Penerima Jaminan (Bank) yang bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan Penjamin akan membayar ganti rugi kepada Penerima Jaminan atas tuntutan pencairan Bank Garansi (BG) yang diajukan *Obligee* ketika Terjamin wanprestasi.
Guarantee on Guarantee/Counter Guarantee Bank	A guarantee given by the Guarantor (Perum Jamkrindo) to the Guarantee Recipient (Bank) that is unconditional and the Guarantor will pay compensation to the Guarantee Recipient for the Bank Guarantee (BG) disbursement claim submitted by the Obligee when the Guaranteed has defaulted
Surety Bond	Suatu perjanjian 3 pihak antara Penjamin atas dasar keyakinan kepada Terjamin secara bersama-sama berjanji kepada *Obligee* bahwa apabila Terjamin oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan *Obligee*, maka Penjamin akan bertanggung jawab terhadap *Obligee* untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Terjamin tersebut A 3-party agreement between the Guarantor and the Guaranteed on the basis of confidence jointly pledged to the Bondee that if due to any circumstances the Guaranteed has become negligent or fail to carry out work in accordance with the Obligee's demand, the Guarantor will be responsible to the Obligee to settle the Guaranteed's obligations
Payment Bond	Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin untuk menjamin Terjamin melakukan pembayaran kepada Penerima Jaminan atas fasilitas dana talangan Penerima Jaminan baik yang berasal dari Penerima Jaminan atau sumber pembiayaan lain yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan. Guarantee issued by the Guarantor to guarantee the Guaranteed's payment to the Guarantee Recipient for the bailout facility given to the Guarantee Recipients whose funding source is from the Guarantee Receiver or other funding source designated by the Guarantee Receiver

Kegiatan Activities	Keterangan Description
Customs Bond	Jaminan atas fasilitas kepabeanan, fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang & *import* dan pemungutan bea masuk barang lainnya kepada *Obligee* (Direktorat Jenderal Bea Cukai) apabila Terjamin (importir/produsen eksportir) tidak menyelesaikan kewajibannya. Guarantee on customs facilities, facilities for suspension/exemption of goods import duty and collection of other goods import duty to the Obligee (Directorate General of Customs and Excise) if the Guaranteed (importer/producer of exporters) does not complete its obligations
Penjaminan Keagenan Kargo	Penjaminan yang diberikan kepada Penerima Jaminan (Perusahaan Penyedia Jasa Pengangkutan) atas kewajiban terjamin (Agen Kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada Penerima Jaminan. A guarantee that is given to the Recipient of the Guarantee (The Transportation Service Provider) for guaranteed obligations (Cargo Agent) in making payment of freight costs to the Recipient of Guarantee
Penjaminan *Invoice Financing*	Penjaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran terjamin berdasarkan pada *invoice* yang diterbitkan oleh penerima jaminan. Guarantee to guarantee the Guaranteed payment obligations based on invoices issued by Guarantee Recipients
Penjaminan Pembiayaan Syariah	Penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 74/DSN-MUI/I/2009. Guarantee between the parties based on sharia principles as stipulated in the MUI DSN Fatwa No. 74 / DSN-MUI / I / 2009
Penjaminan *Supply Chain Financing*	Penjaminan atas Kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin dalam rangka pengerjaan/penyelesaian proyek, pengambilalihan piutang/tagihan, pengadaan barang dan/atau jasa, pembelian barang dan/atau jasa, berdasarkan kontrak atau dokumen sejenis dari PERUSAHAAN INTI tertentu berupa KMK *pre Financing*, KMK *Post Financing* dan KMK Distributor. Guarantee on Credit given by the Guarantee Recipient to the Guaranteed in the context of Workmanship / project completion, acquisition of receivables/bills, procurement of goods and/or services, purchase of goods and/or services, based on contracts or similar documents from certain CORE COMPANIES in the form of KMK Financing, KMK Post Financing, and KMK Distributor.
Penjaminan Kemaritiman /Jaring	Penjaminan atas pembiayaan untuk modal kerja dan investasi yang dipergunakan untuk kegiatan dibidang Kelautan dan Perikanan. Guarantee on financing for working capital and investment used for activities in the field of Marine and Fisheries
Penjaminan Pembiayaan Otomotif	Penjaminan atas kredit/pembiayaan guna memiliki kendaraan bermotor yang diberikan oleh lembaga keuangan lainya dengan tujuan modal kerja dan/atau investasi atau multiguna. Guarantee of credit/financing to own motorized vehicles provided by other financial institutions for the purpose of working capital and/or investment or multipurpose
Penjaminan Kredit Skema Subsidi Resi Gudang	Kegiatan pemberian jaminan kepada terjamin (Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi) atas fasilitas kredit Skema Subsidi Resi Gudang yang disalurkan oleh penerima jaminan (Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank Penyalur Kredit SSRG) dengan agunan resi gudang yang diterbitkan Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-undang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya. The activity of giving guarantee with the Warehouse Receipt Subsidy Scheme credit facilities to the guaranteed (such as Farmers, Farmer Groups, Combined Farmer Groups, and Cooperatives) which is distributed by recipients of guarantee (Executing Banks / Non-Bank Financial Institutions Providing Credit) with warehouse receipts issued through the Warehouse Receipt System as a collateral. This is in accordance with Law No. 9 of 2011 concerning the Warehouse Receipt System and its amendments

Kegiatan Activities	Keterangan Description
Penjaminan Kredit Resi Gudang	Penjaminan yang diberikan kepada Terjamin atas Kredit Resi Gudang yang disalurkan oleh Penerima Jaminan dengan agunan resi gudang yang diterbitkan: Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-undang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya; atau oleh Pengelola Agunan melalui perjanjian kerja sama pengelolaan agunan antara Terjamin, Penerima Jaminan dan Pengelola Gudang *(Collateral Management Agreement/ CMA)*.
Warehouse Receipt Credit Guarantee	Guarantee of Warehouse Receipt Credit given to the Guaranteed channeled by the Guarantee Recipient with warehouse receipt issued through the Warehouse Receipt System (SRG) as collateral in accordance with Law No. 9 of 2011 concerning Warehouse Receipt System and its amendments. This type of guarantee can also be given by the Collateral Manager through a collateral management agreement (CMA) between Guaranteed, Guarantee Recipient, and Warehouse Management (CMA).
Penjaminan *Fintech*	Penjaminan atas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disalurkan oleh *lender* melalui penyelenggara *(peer to peer landing)* kepada *borrower*.
Fintech Guarantee	Guarantee on information technology-based money lending services that are channeled by lenders through the organizer (peer to peer landing) to the borrower.
Penjaminan KPR	Penjaminan terhadap penyalur Kredit Pemilikan Rumah yang diberikan oleh Penerima Jaminan Lembaga Keuangan Lainnya (*Non Bank*) kepada Terjamin yang fasilitas pembiayaannya digunakan untuk membeli rumah, rumah susun/apartemen, rumah kantor, rumah toko atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah, rumah susun/ apartemen, rumah kantor, rumah toko.
Guarantee of Home Ownership Loans	Guarantee of the Home Ownership Loan given by Other (Non-Bank) Financial Institutions Guarantee Recipient to the Guaranteed whose financing facilities are used to buy houses, flats/ apartments, home offices, shop houses or other consumptive needs with collateral in the form of houses, apartment, home office, or shophouse.
Penjaminan *Capital Management Guarantee* (CMG)	Penjaminan atas portofolio kredit dalam 1 (satu) *coverage* penjaminan sebagai salah satu bentuk Mitigasi Risiko Kredit (MRK) Bank.
Guarantee on Capital Management Guarantee (CMG)	Guarantee on the loan portfolio in 1 (one) guarantee coverage as one of the Bank's Credit Risk Mitigation.

KOMPETENSI INTI
Core Competence

Kompetensi inti berpotensi besar dalam memperkuat *competitive advantage*. Namun demikian, *competitive advantage* yang kuat masih dapat terhalangi oleh faktor-faktor dinamis dalam persaingan pasar, seperti kurangnya kesetiaan pelanggan dan tidak adanya customer relationship. Saat ini dan masa yang akan datang, Perusahaan memiliki beberapa tantangan strategis berkaitan dengan faktor-faktor dinamika persaingan pasar yang terkait dengan potensi moral *hazard* pada *customer*.

Core competencies have a great potential in strengthening competitive advantage. However, strong competitive advantage can still be hampered by dynamic factors in market competition, such as lack of customer loyalty and lack of customer relationships. At present and in the future, the Company has several strategic challenges related to the dynamics of market competition factors related to the moral hazard potential of the customer.

Kriteria Identifikasi **Identification Criteria**	*Accessibility*	Kemampuan mengakses berbagai pasar potensial Ability to access various potential markets
	Unik/Langka Unique/Rare	Peniruan oleh kompetitor sulit dilakukan Imitation by competitors is difficult
	Value Creation	Memberi kontribusi besar terhadap manfaat produk, terutama dari perspektif pelanggan Give a large contribution to the benefits of the product, especially from the customer's perspective
Risiko **Risk**	1. Peluang untuk pertumbuhan terabaikan Opportunities for growth are neglected 2. Re-organisasi perusahaan menjadi unit-unit bisnis yang lebih kecil dapat mengakibatkan kompetensi terpecah dan lemah The re-organization of a company into smaller business units can lead to fragmented and weak competencies 3. Kurangnya sensitifitas terhadap tumbuhnya peluang lain yang terkait Lack of sensitivity to the growth of other related opportunities 4. Investasi dapat menjadi kurang optimal Investment can be less than optimal 5. Terlalu fokus kepada kinerja periodik, yang sangat dipengaruhi oleh harga jual dan kompetisi pasar. Akibatnya, core competency kurang mendapatkan perhatian Too focused on periodic performance, which is strongly influenced by selling prices and market competition. As a result, core competency gets less attention	
Kendala **Obstacles**	1. Kerugian akibat melemahnya *core competency* hanya sebagian kecil saja yang dapat dihitung di muka Losses due to weaker core competencies are only a small portion that can be calculated upfront 2. Tingginya pertumbuhan pasar menimbulkan kinerja cukup bagus yang dapat mengaburkan potensi yang lebih besar jika *core competency* diperhatikan sepenuhnya The high growth of the market raises quite good performance which can obscure the greater potential if full core competency is taken into account	

Sesuai kriteria identifikasi di atas dan hasil pengembangan model bisnis Perusahaan, kompetensi inti Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki keahlian dan reputasi yang baik dalam bidang penjaminan kredit UMKM dan Koperasi.
   - Kecepatan pembayaran klaim penjaminan kredit.
   - Melayani produk sesuai dengan kebutuhan mitra kerja (*customized product*).
2. Sistem informasi yang reintegrasi secara internal maupun eksternal dengan mitra kerja.
3. Memiliki modal yang besar dan dukungan yang besar dari Pemerintah.

In accordance with the above identification criteria and the results of the development of the Company's business model, the Company's core competencies are as follows:

1. Having good expertise and reputation in the field of MSMEs and Cooperative credit guarantee.
   - Speed of payment of credit guarantee claims.
   - Serving products according to the needs of partners (customized products).
2. Information systems that reintegrate internally and externally with work partners.
3. Having large capital and great support from the Government

STRUKTUR ORGANISASI
Organizational Structure

Struktur organisasi Perusahaan telah disahkan melalui Ketetapan Direksi No. 01/KD/1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Berikut struktur organisasi Perusahaan per 31 Desember 2018.

The Company's organizational structure has been ratified through the Directors Decree No. 01 / KD / 1 / V /2018 dated 30 May 2018 concerning Organizational Structure of Public Corporations (Perum) for Indonesian Credit Guarantees. The following is the Company's organizational structure as of December 31, 2018.

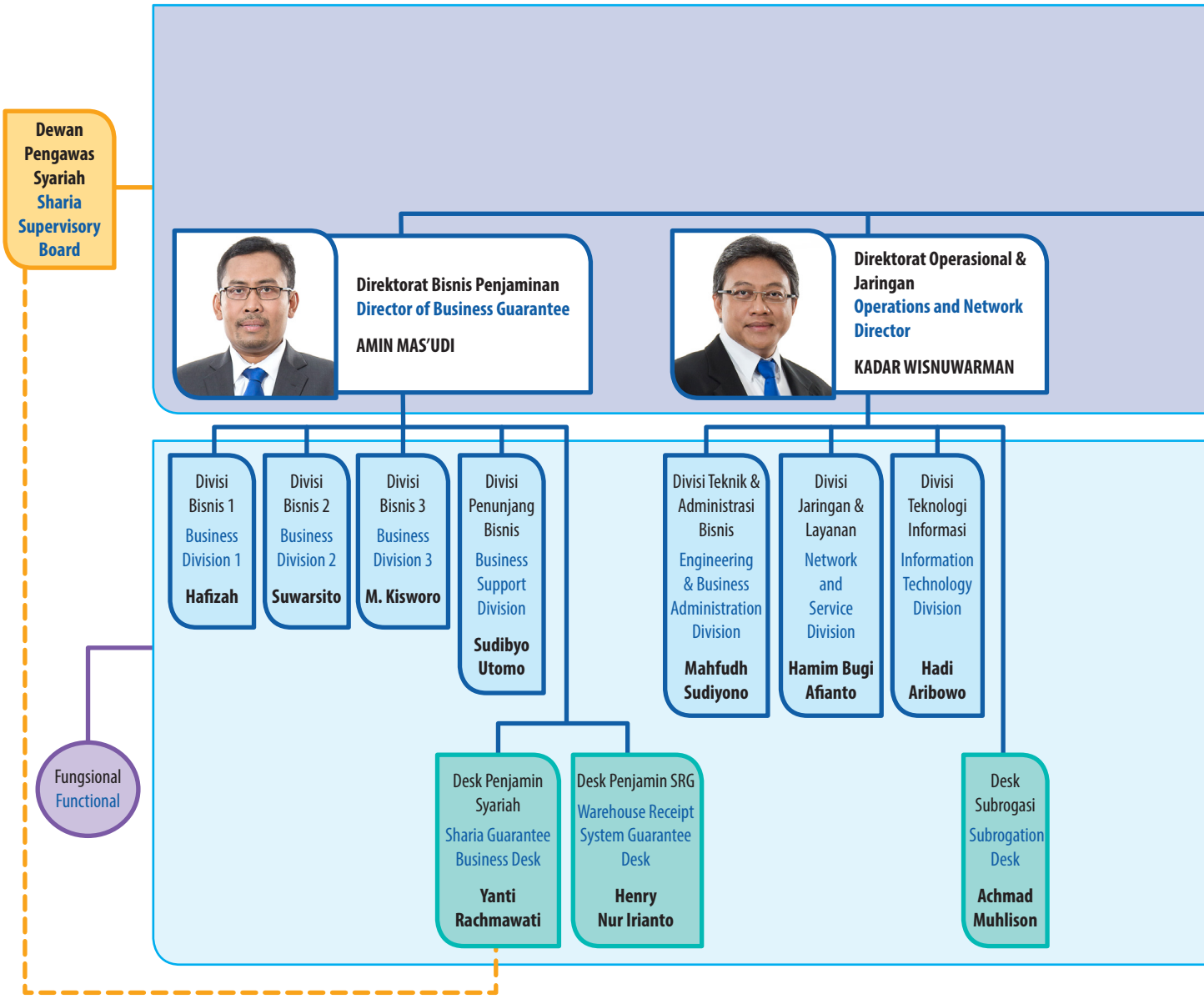

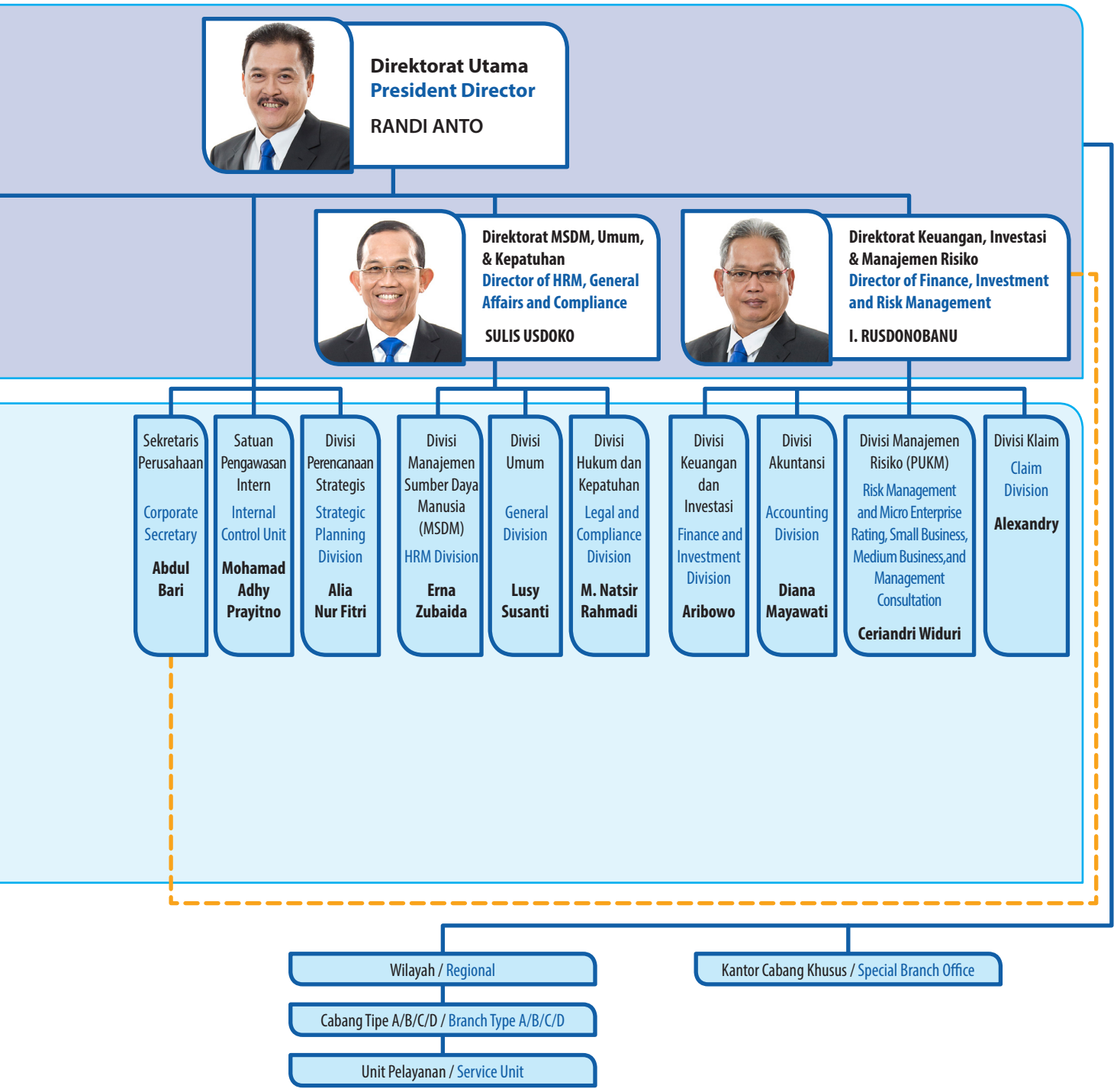
Direktorat Utama
President Director
RANDI ANTO
Direktorat MSDM, Umum, & Kepatuhan
Director of HRM, General Affairs and Compliance
SULIS USDOKO
Direktorat Keuangan, Investasi & Manajemen Risiko
Director of Finance, Investment and Risk Management
I. RUSDONOBANU
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
Abdul Bari
Satuan Pengawasan Intern
Internal Control Unit
Mohamad Adhy Prayitno
Divisi Perencanaan Strategis
Strategic Planning Division
Alia Nur Fitri
Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
HRM Division
Erna Zubaida
Divisi Umum
General Division
Lusy Susanti
Divisi Hukum dan Kepatuhan
Legal and Compliance Division
M. Natsir Rahmadi
Divisi Keuangan dan Investasi
Finance and Investment Division
Aribowo
Divisi Akuntansi
Accounting Division
Diana Mayawati
Divisi Manajemen Risiko (PUKM)
Risk Management and Micro Enterprise Rating, Small Business, Medium Business,and Management Consultation
Ceriandri Widuri
Divisi Klaim
Claim Division
Alexandry
Wilayah / Regional
Cabang Tipe A/B/C/D / Branch Type A/B/C/D
Unit Pelayanan / Service Unit
Kantor Cabang Khusus / Special Branch Office

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN
Vision, Mission and Corporate Culture

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan usaha yang profesional berdasarkan Surat Pengesahan dari Kementerian BUMN No: S-286/MBU/05/2019 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), maka Visi dan Misi Jamkrindo sebagai berikut:

In order to guarantee the implementation of professional business activities based on the Approval Letter from the Ministry of SOEs No. S-286 /MBU /05/2019 concerning the Approval and Ratification of the Company's Long-Term Plan (RJPP), then the Vision, and Mission of Jamkrindo are as follows:

PERSETUJUAN MANAJEMEN KUNCI ATAS VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Visi, Misi & Nilai Perusahaan telah mendapatkan dukungan dan persetujuan bersama dari Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan, berdasarkan Surat Pengesahan dari Kementerian BUMN No: S-286/MBU/05/2019 tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Jamkrindo Tahun Buku 2019-2023.

VISI VISION

Menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional.

Becoming the First Choice of Business Players in Guarantee Services to Support Growth and Equalization of National Economy.

MISSION MISI

Meningkatkan aksesibilitas finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif dan efisien secara berkelanjutan

Improving MSMEs' and Cooperatives' Financial Accessibilities through the provision of Guarantee, which is Innovative, Competitive with a Professional, Effective, and Efficient Services sustainably.

THE KEY MANAGEMENT APPROVAL OF THE COMPANY'S VISION AND MISSION

The Company's Vision, Mission & Values have received support and joint approval from the Board of Supervisor Council and Board of Directors of the Company, based on the Approval Letter from the Ministry of SOEs No: S-286 / MBU / 05/2019 concerning the Corporate Long-Term Plan (RJPP) of Jamkrindo for the 2019-2023 Fiscal Year.

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

KREDO PERUSAHAAN
COMPANY CREED

Kredo perusahaan Perum Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir, sebagai berikut:

Perum Jamkrindo's company creed consists of 5 (five) items, as follows:

BUDAYA PERUSAHAAN
CORPORATE CULTURE

Budaya perusahaan Perum Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir nilai-nilai budaya yang dianut Perusahaan, yaitu budaya "**TRUST**".

The company culture of Perum Jamkrindo consists of 5 (five) items of cultural values adopted by the Company, namely the culture of "**TRUST**".

Terpercaya
dalam melaksanakan usaha penjaminan
Trusted in carrying out a business of guarantee.

T

Terpercaya / Trusted
Bekerja jujur dengan integritas tinggi
Work honestly with high integrity

Responsif
terhadap perubahan lingkungan bisnis
Responsive to changes in the business environment.

R

Responsif / Responsive
Tanggap menghadapi kebutuhan mitra usaha dan segenap *stakeholder*
Responsive to the needs of business partners and all stakeholders

Unggul
dan **Profesional** dalam pelayanan
Excellent and **Professional** in services.

U

Unggul / Excellent
Selalu meningkatkan profesionalisme demi pencapaian nilai tambah bagi perusahaan
Always improve professionalism for the achievement of added value for the company

Sehat
dalam tata kelola perusahaan
Healthy in corporate governance.

S

Sehat / Healthy
Selalu bekerja dengan tekun untuk mendukung tata kelola perusahaan yang sehat
Always work diligently to support healthy corporate governance

Terkemuka
dalam memberikan kepuasaan pelanggan
Leading in providing customer satisfaction.

T

Terkemuka / Leading
Selalu terdepan dalam memberikan pelayanan dan kinerja untuk menjadi pemimpin dalam industri penjaminan
Always at the forefront in providing service and performance to become a leader in the guarantee industry

Substansi yang terkandung di dalam visi, misi, kredo dan budaya Perusahaan telah diketahui dan disetujui oleh Dewan Pengawas dan Direktur Utama Perusahaan.

The substance contained in the Company's vision, mission, creed, and culture has been acknowledged and app roved by the Board of Supervisor Council and the President Director of the Company.

MAKNA BRANDING LOGO
The Meaning Behind Logo Branding

Akronim Perusahaan yaitu "JAMKRINDO" merupakan singkatan dari Jaminan Kredit Indonesia. Akronim ini terucap sangat familiar, dengan tujuan membangun *"Brand Awareness"* dan identitas melalui pengucapannya, yang secara psikologis akan terekam dalam otak manusia dan memungkinkan adanya pengucapan berulang-ulang.

The Company's acronym, "JAMKRINDO" stands for 'Jaminan Kredit Indonesia' (Indonesian Credit Guarantee). This acronym sounds very familiar, which is appropriate with the aim of building "Brand Awareness" and identity through its pronunciation. The expectation of using this acronym is that it psychologically will be recorded in the human brain and allow for repeated pronunciation.

Ikon grafis pada logo membentuk konfigurasi huruf "J" yang tegas dan bersudut, yang melambangkan ketegasan Perusahaan, orientasi yang fokus pada tujuan, serta konsistensi pada visi.

The graphic icon on the logo forms a strict and angular "J" letter configuration, which symbolizes firmness, an orientation that focuses on goals, and consistency in vision.

Huruf "J" tersebut membentuk sebuah kunci berwarna putih, yang bermakna dasar dari motto Perusahaan yaitu "kunci Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) menuju sukses". Huruf "J" pada logo terbentuk dari 3 (tiga) garis tegas berwarna putih, yang melambangkan kesatuan dari inti pelayanan Perusahaan, yaitu Jaminan terhadap UMKMK.

The letter "J" forms a white key, which means the basis of the Company's motto is "the key to Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs) towards success". The letter "J" in the logo is formed from 3 (three) white lines, which symbolize the unity of the core of the Company's service, namely the guarantee for micro, small and medium enterprises, and cooperatives.

Pemilihan huruf yang tegas, jelas, kokoh, namun sederhana dan dinamis didasari pada visi Perusahaan, yang melambangkan kepemimpinan dengan ketangguhan dan ketegasan. Jenis *bold* atau cetak tebal bertujuan memperkuat makna simbolisasi nama Perusahaan dan konotasi yang relevan terhadap *core* bisnis Perusahaan.

The choice of letters that are firm, clear, sturdy, yet simple and dynamic is based on the Company's vision, which symbolizes leadership with toughness and firmness. Bold type lettering aims to strengthen the meaning of the company name and the connotations relevant to the core business of the Company.

IKON GRAFIS
THE GRAPHIC ICON

AKRONIM PERUSAHAAN
THE COMPANY'S ACRONYM

Logo Perusahaan terdiri dari akronim nama Perusahaan dan ikon grafis berbentuk bujur sangkar.

The Company logo consists of an acronym of the Company name and a square graphic icon

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

Jamkrindo

Logo Perusahaan dibangun dari 2 (dua) warna, yaitu Biru dan Putih.

The Company logo is designed using 2 (two) colors, namely Blue and White.

BLUE COLOR
WARNA BIRU

WHITE COLOR
WARNA PUTIH

Warna Biru melambangkan konsentrasi, ketenangan, bekerja sama, dapat menerima segala masukan, peka, cerdas dan bersatu; hal ini sejalan dengan bidang usaha Perusahaan yaitu pelayanan dan kemitraan

Blue symbolizes concentration, calmness, cooperation, the ability to receive all input, sensitivity, smart, and unity; this is in line with the Company's business sector, namely service and partnership.

Putih merupakan lambang kesucian, kebersihan, dan ketepatan dari Perusahaan untuk mewujudkan visinya.

the color White is a symbol of holiness, cleanliness, and accuracy of the Company to realize its vision. The composition of the colors provides a nuance of calm and maturity in the service that

Komposisi kedua warna tersebut memberikan nuansa ketenangan dan kematangan jasa pelayanan yang terbentuk karena keteguhan memegang budaya Perusahaan.

The composition of the colors provides a nuance of calm and maturity in the service that is formed because of the firmness in holding on to the Company's culture

PROFIL DEWAN PENGAWAS
Profile of The Supervisory Board





Sri Mulyanto

Ketua Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Independen
Chairman of Board of Supervisor Council/ Independent Board of Supervisor Council

Periode Jabatan: 27 Oktober 2017 – 26 Oktober 2022, Periode Pertama
Term of Office: October 27, 2017 - October 26, 2022, First Period

61 tahun years old
KLATEN
8 Oktober October 8, **1958**

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Keahlian / Expertise
Ekonomi / Economy

RIWAYAT PENUNJUKAN

Jabatan Ketua Dewan Pengawas diemban sejak 27 Oktober 2017 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK-233/MBU/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Ketua Dewan Pengawas ini merupakan periode pertama.

PENDIDIKAN

- (S2) *Master of Economic Policy and Planning*, Northeastern University, Boston, Amerika Serikat (1993)
- (S1) Sarjana Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1983)

PENGALAMAN KERJA

Direktur Umum dan SDM PT Pegadaian (Persero) (2012-2017), Komisaris PT Antam (2011-2012), Komisaris PT Jasa Raharja (2008-2012), Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa III, Kementrian BUMN (2010), Asisten Deputi Urusan Usaha Asuransi, Kementrian BUMN (2006), Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Konstruksi, Kementrian BUMN (2002).

SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019

- *Full Day Seminar Auditor's Talk* untuk penguatan peran Satuan Pengawas Internal (SPI) BUMN, 9 Mei 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- *Innovation and Cooperation in Financing SME'S*, 26 - 27 September 2019, Forum ke - XXIV Ibero-American *Forum on Guarantee and Financing System for SME*
- Penyusunan *Key Performance Indicators* (KPI) RKAP Tahun 2020, 5 November 2019, Kementrian BUMN
- Komisaris Profesional, 20 - 21 November 2019, Inti Pesan Pariwara

RANGKAP JABATAN PADA PERUSAHAAN LAIN/LEMBAGA

Sri Mulyanto tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/ lembaga lain.

HUBUNGAN AFILIASI

Sri Mulyanto tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Pengawas lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

KEPEMILIKAN SAHAM JAMKRINDO

Sri Mulyanto tidak memiliki saham Perusahaan

APPOINTMENT HISTORY

The position of the Chairman of the Board of Supervisor Council has been carried out since October 27, 2017, through the Decree of the State Minister of SOEs No. SK-233 / MBU / 10/2017 dated October 27, 2017, concerning the Dismissal and Appointment of Chairman of the Board of Supervisor Council of Perum Jamkrindo. This was his first period serving as Chairman of the Board of Supervisor Council.

EDUCATION

- Master of Economic Policy and Planning, Northeastern University, Boston, United States of America (1993)
- Bachelor of Economics of Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1983)

WORK EXPERIENCES

Director of General Affairs and HR of PT Pegadaian (Persero) (2012-2017), Commissioner of PT Antam (2011-2012), Commissioner of PT Jasa Raharja (2008-2012), Assistant Deputy for Services Business III, the Ministry of SOEs (2010), Assistant Deputy for Insurance Business Affairs, the Ministry of SOEs (2006), Assistant Deputy of Construction Services Business Affairs, the Ministry of SOEs (2002).

PROFESSIONAL CERTIFICATION AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2019

- Full-Day Seminar of Auditor's Talk to strengthen the role of the Internal Control Unit (SPI) of SOEs, Jakarta, May 9, 2019, the Ministry of SOEs.
- SME's Innovation and Cooperation in Financing, September 26-27, 2019, the XXIV Ibero-American Forum on Guarantee and Financing System for SME
- Formulation of the Key Performance Indicators (KPI) of the 2020 RKAP, November 5, 2019, the Ministry of SOEs
- Professional Commissioners, November 20-21, 2019, Inti Pesan Pariwara

CONCURRENT POSITION IN OTHER COMPANIES / INSTITUTIONS

Sri Mulyanto does not have a concurrent position at other companies / institutions.

AFFILIATION

Sri Mulyanto does not have affiliation with other members of the Board of Supervisor Council or the Board of Sharia Supervisor Council, the Board of Directors, and with major shareholders..

JAMKRINDO SHARE OWNERSHIP

Sri Mulyanto does not own the Company's shares



Noor Ida Khomsiyati

Anggota Dewan Pengawas
Member of Board of Supervisor Council

Periode Jabatan: 12 April 2016 – 11 April 2021, Periode Pertama
Term of Office: April 12, 2016 – April 11, 2021, First Period

48 tahun years old
PATI
8 Mei May 8, **1971**

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Keahlian / Expertise
Manajemen SDM / HR Management.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Jabatan Anggota Dewan Pengawas diemban sejak 12 April 2016 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-76/MBU/4/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas ini merupakan periode pertama.

PENDIDIKAN

(S2) Magister jurusan Manajemen SDM Universitas Bhayangkara (2006); (S1) Sarjana Hukum Universitas Diponegoro Semarang (1995).

PENGALAMAN KERJA

Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Kementerian BUMN (2014-sekarang); Kepala Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum I Kementerian BUMN (2012-2014); Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) (2013-2015); Kepala Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum II C Kementerian BUMN (2010-2012); Kepala Subbagian Pelayanan Hukum Kementerian BUMN (2006-2010).

SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019

- Refleksi Konstitusi di Era 4.0 dalam Penguatan Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi, 24 April 2019, Universitas Brawijaya
- *Innovation and Cooperation in Financing SME'S*, 26 - 27 September 2019, Forum ke - XXIV Ibero-American *Forum on Guarantee and Financing System for SME*
- Penyusunan *Key Performance Indicators* (KPI) RKAP Tahun 2020, 5 November 2019, Kementrian BUMN
- Komisaris Profesional, 20 - 21 November 2019, Inti Pesan Pariwara

RANGKAP JABATAN PADA PERUSAHAAN LAIN/LEMBAGA

Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Kementerian BUMN (2014-sekarang)

HUBUNGAN AFILIASI

Noor Ida Khomsiyati tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Pengawas lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

KEPEMILIKAN SAHAM JAMKRINDO

Noor Ida Khomsiyati tidak memiliki saham Perusahaan.

APPOINTMENT HISTORY

The position of Member of Board of Supervisor Council has been carried out since April 12, 2016, through the Decree of the State Minister of State-Owned Enterprises as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-76 / MBU / 4/2016 dated April 12, 2016, concerning the Dismissal and Appointment of Members of Board of Supervisor Council of Perum Jamkrindo. This was her first period serving as Member of Board of Supervisor Council.

EDUCATION

Masters of HR Management of Universitas Bhayangkara (2006); Bachelor of Law of Diponegoro University, Semarang (1995).

WORK EXPERIENCES

Head Division of Legal Assistance of Legal Bureau, Secretariat of the Ministry of SOEs (2014-present); Head Division of Service and Legal Assistance 1 of the Ministry of SOEs (2012-2014); Member of the Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero) (2013-2015); Subdivision Head of Services and Legal Assistance II C of the Ministry of SOEs (2010-2012); Subdivision Head of Legal Services of the Ministry of SOEs (2006-2010).

PROFESSIONAL CERTIFICATION AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2019

- Reflections on the Constitution in Era 4.0 in Strengthening Law Enforcement of Corporate Criminal Liability in Corruption, April 24, 2019, Universitas Brawijaya
- SME's Innovation and Cooperation in Financing, September 26-27, 2019, the XXIV Ibero-American Forum on Guarantee and Financing System for SME
- Formulation of the Key Performance Indicators (KPI) of the 2020 RKAP, November 5, 2019, the Ministry of SOEs
- Professional Commissioners, November 20-21, 2019, Inti Pesan Pariwara

CONCURRENT POSITION IN OTHER COMPANIES / INSTITUTIONS

Division Head of Legal Assistance of the Secretariat of the Ministry of SOEs (2014-present)

AFFILIATION

Noor Ida Khomsiyati does not have affiliation with other members of the Board of Supervisor Council or the Board of Sharia Supervisor Council, the Board of Directors, and with major shareholders.

JAMKRINDO SHARE OWNERSHIP

Noor Ida Khomsiyati does not own the Company's shares.



Diah Natalisa

Anggota Dewan Pengawas
Member of Board of Supervisor Council

Periode Jabatan: 3 Mei 2017 – 2 Mei 2022, Periode Pertama
Term of Office: May 3, 2017 – May 2, 2022, First Period

56 tahun years old
PALEMBANG
15 November November 15, **1963**

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Keahlian / Expertise
Manajemen dan ilmu Ekonomi / Management and Economics

RIWAYAT PENUNJUKAN

Jabatan Anggota Dewan Pengawas diemban sejak 3 Mei 2017 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-88/MBU/05/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas ini merupakan periode pertama.

PENDIDIKAN

- Profesor dan (S3) Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga (1999);
- Magister Manajemen, University of Kentucky (1992)
- (S1) jurusan Manajemen Universitas Sriwijaya (1987).

PENGALAMAN KERJA

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian PANRB (2016-Sekarang), Koordinator KOPERTIS Wilayah II Kemdikbud RI (2008-2016), Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Sriwijaya (2005-2008).

SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019

Komisaris Profesional, 20 - 21 November 2019, Inti Pesan Pariwara

RANGKAP JABATAN PADA PERUSAHAAN LAIN/LEMBAGA

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian PANRB (2016-Sekarang)

HUBUNGAN AFILIASI

Diah Natalisa tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Pengawas lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

KEPEMILIKAN SAHAM JAMKRINDO

Diah Natalisa tidak memiliki saham Perusahaan

APPOINTMENT HISTORY

The position of Member of Board of Supervisor Council has been carried out since May 3, 2017, through the Decree of the State Minister of State-Owned Enterprises as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-88 / MBU / 05/2017 dated May 3, 2017, concerning the Dismissal and Appointment of Members of Board of Supervisor Council of Perum Jamkrindo. This was her first period serving as Member of Board of Supervisor Council.

EDUCATION

- Professor and Doctor of Economics, Universitas Airlangga (1999);
- Master of Management, University of Kentucky (1992)
- Bachelor of Management of Universitas Sriwijaya (1987).

WORK EXPERIENCES

Deputy Minister of Public Services of the Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform/PANRB (2016-Present), KOPERTIS Region II Coordinator of the Ministry of Education and Culture (2008-2016), Head of Master of Management Study Program of Universitas Sriwijaya (2005-2008).

PROFESSIONAL CERTIFICATION AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2019

Professional Commissioners, November 20-21, 2019, Inti Pesan Pariwara

CONCURRENT POSITION IN OTHER COMPANIES/INSTITUTIONS

Deputy Minister of Public Services of the Ministry of PANRB (2016-Present)

AFFILIATION

Diah Natalisa does not have affiliation with other members of the Board of Supervisor Council or the Board of Sharia Supervisor Council, the Board of Directors, and with major shareholders.

JAMKRINDO SHARE OWNERSHIP

Diah Natalisa does not own the Company's shares



Ari Wahyuni

Anggota Dewan Pengawas
Member of Board of Supervisor Council

Periode Jabatan: 3 Januari 2019 - 2 Januari 2024, Periode Pertama
Term of Office: January 3, 2019 – January 2, 2024, First Period

53 tahun / years old
SURABAYA
9 November / November 9, **1966**

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bogor, West Java, Indonesia

Keahlian / Expertise
Keuangan dan Manajemen / Finance and Management

RIWAYAT PENUNJUKAN

Jabatan Anggota Dewan Pengawas diemban sejak 3 Januari 2019 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK- 02/MBU/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas ini merupakan periode pertama.

PENDIDIKAN

(S2) Master of Public Management Carnigie- Mellon University (1994), (S1) Ilmu Hukum (keperdataan) Universitas Diponogoro (1990)

PENGALAMAN KERJA

Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia (September 2018 – sekarang), Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2013 – September 2018), Dewan Pengawas PERURI (2013-2018), Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2009-2013), Dewan Komisaris PT PANN (2010-2013), Kepala Pusdiklat Keuangan Umum BPPK (2008-2009), Kepala Bagian Pengawasan Kebijakan Investasi, Biro Pengelolaan Investasi dan Riset BAPEPAM (2004-2006), Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro Perundangan-undangan dan Bantuan Hukum BAPPEPAM (1990-2000).

SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019

- *Credit Risk Management* Profesional (Level III), 9-13 Desember 2019, Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko
- *From Evolution to Revolution*, 13 - 15 November 2019, *Sustainable and Responsible Investing* (SRI)
- Komisaris Profesional, 20 - 21 November 2019, Inti Pesan Pariwara

RANGKAP JABATAN PADA PERUSAHAAN LAIN/LEMBAGA

Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia (September 2018 – sekarang)

HUBUNGAN AFILIASI

Ari Wahyuni tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Pengawas lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

KEPEMILIKAN SAHAM JAMKRINDO

Ari Wahyuni tidak memiliki saham Perusahaan.

APPOINTMENT HISTORY

The position of Member of Board of Supervisor Council has been carried out since January 3, 2019, through the Decree of the State Minister of State-Owned Enterprises as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-02 / MBU / 01/2019 dated January 3, 2019, concerning the Dismissal and Appointment of Members of Board of Supervisor Council of Perum Jamkrindo. This was her first period serving as Member of Board of Supervisor Council.

EDUCATION

Master of Public Management of Carnigie-Mellon University (1994), Bachelor of Civil Law of Diponegoro University (1990)

WORK EXPERIENCES

Director of Financial Management Development of the Public Service Agency of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (September 2018 - present), Director of Investment Management System of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2013 - September 2018), PERURI Supervisory Board (2013-2018), Secretary of the Directorate General of Budget of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2009-2013), Board of Commissioners Member of PT PANN (2010-2013), Head of BPPK General Finance Education and Training Center (2008-2009), Division Head of Investment Policy Supervision, Investment Management and Research Bureau of BAPEPAM (2004-2006), Division Head of Legislation, Legislation, and Legal Assistance Bureau of BAPPEPAM (1990-2000).

PROFESSIONAL CERTIFICATION AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2019

- Professional Credit Risk Management (Level III), Jakarta, December 9-13, 2019, Professional Risk Management Certification Institute
- From Evolution to Revolution, November 13 - 15, 2019, Sustainable and Responsible Investing (SRI)
- Professional Commissioners, November 20-21, 2019, Inti Pesan Pariwara

CONCURRENT POSITION IN OTHER COMPANIES / INSTITUTIONS

Director of Financial Management Development of the Public Service Agency of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (September 2018 - present)

AFFILIATION

Ari Wahyuni does not have affiliation with other members of the Board of Supervisor Council or the Board of Sharia Supervisor Council, the Board of Directors, and with major shareholders.

JAMKRINDO SHARE OWNERSHIP

Ari Wahyuni does not own the Company's shares.



Muhammad Muchlas Rowi

Dewan Pengawas Independen
Independent Supervisory Board

Periode Jabatan: 17 Oktober 2019 - 16 Oktober 2024, Periode Pertama
Term of Office: October 17, 2019 - October 16, 2024, First Period

47 tahun / years old
GARUT
31 Agustus / August 31, **1972**

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Keahlian / Expertise
Filsafat / Philosophy

RIWAYAT PENUNJUKAN

- Jabatan Anggota Dewan Pengawas diemban sejak 17 Oktober 2019 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-241/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas Independen ini merupakan periode pertama.

PENDIDIKAN

(S1) Sarjana Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada (1998)

PENGALAMAN KERJA

Bendahara Badan Pembina Harian (BPH) Institut Bisnis Muhammadiyah (2019-sekarang); Pemilik Rosbuck Milk & Coffee (2018-sekarang); General Manager Marketing PT Intan Sejati Klaten (2016-2018); Pimpinan Umum Monday Media Group (2015-sekarang), Komisaris PT Fantasi Megah Bersama (2014-sekarang).

SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019

- Penyusunan Key Performance Indicators (KPI) RKAP Tahun 2020, 5 November 2019, Kementrian BUMN
- Komisaris Profesional, 20 - 21 November 2019, Inti Pesan Pariwara

RANGKAP JABATAN PADA PERUSAHAAN LAIN/LEMBAGA

Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia (September 2018 – sekarang

HUBUNGAN AFILIASI

Muhammad Muchlas Rowi tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

KEPEMILIKAN SAHAM JAMKRINDO

Muhammad Muchlas Rowi tidak memiliki saham Perusahaan.

APPOINTMENT HISTORY

- The position of Member of the Board of Supervisor Council was carried out since January 3, 2019, through the Decree of the State Minister of SOEs No.SK-02/MBU/01/2019 dated January 3, 2017, concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Supervisor Council of Perum Jamkrindo. This was her first period serving as a Member of the Board of Supervisor Council.

EDUCATION

Bachelor of Philosophy of Gadjah Mada University (1998)

WORK EXPERIENCES

Treasurer of Daily Development Board of Muhammadiyah Business Institute (2019-present), Rosbuck Milk & Coffee's owner (2018-present), General Manager of Marketing of PT Intan Sejati Klaten (2016-2018), Managing Director of Monday Media Group (2015-present), Commissioner of PT Fantasi Megah Bersama (2014-present)

PROFESSIONAL CERTIFICATION AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2019

- Formulation of the Key Performance Indicators (KPI) of the 2020 RKAP, November 5, 2019, the Ministry of SOEs
- Professional Commissioners, November 20-21, 2019, Inti Pesan Pariwara

CONCURRENT POSITION IN OTHER COMPANIES/INSTITUTIONS

Director of Financial Management of Public Service Agency Ministry of Finance Republic of Indonesia (September 2018-present)

AFFILIATION

Muhammad Muchlas Rowi does not have affiliation with other members of the Board of Supervisor Council, the Board of Directors, and with major shareholders.

JAMKRINDO SHARE OWNERSHIP

Muhammad Muchlas Rowi does not own the Company's shares

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Profile of The Sharia Supervisory Board



Hasanudin

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairperson of the Sharia Supervisory Board

Periode Jabatan: 1 Juli 2016-30 Juni 2019
Term of Office: July 1, 2016 - June 30, 2019

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
South Tangerang Region, Banten, Indonesia

Keahlian / Expertise
Asuransi Syariah/ Sharia Insurance.

74 tahun / years old
MAJALENGKA
18 Juli / July 18, **1945**

RIWAYAT PENUNJUKAN

Jabatan Ketua Dewan Pengawas Syariah diemban sejak tahun 2006, dan diangkat kembali pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Direksi No. 123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

PENDIDIKAN

(S3) Doktor bidang Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1994); (S2) Magister bidang Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1989); (S1) Sarjana jurusan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1974).

PENGALAMAN KERJA

Anggota BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) (2004 – 2007), Dekan Fakultas Syariah UIN Jakarta (2002 – 2006), Dosen Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI DKI Jakarta.

SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019

Selama tahun 2019 tidak mengikuti Sertifikasi Profesi atau Program Pengembangan Kompetensi.

RANGKAP JABATAN PADA PERUSAHAAN LAIN/LEMBAGA

- Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Victoria Syariah (1998-sekarang); Ketua Dewan Pengawas Syariah Asuransi Asei Syariah; Anggota Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syariah Kementrian Kesehatan RI;
- Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2000-sekarang); Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat (2010-sekarang)

HUBUNGAN AFILIASI

Hasanudin tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya maupun Dewan Pengawas, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

KEPEMILIKAN SAHAM JAMKRINDO

Hasanudin tidak memiliki saham Perusahaan.

APPOINTMENT HISTORY

The position of Chairperson of the Sharia Supervisory Board has been carried out since 2006, and was reappointed in 2016 through the Directors Decree No. 123/Kep-Dir/X/2016 dated October 14, 2016.

EDUCATION

(S3) Doctor of Sharia from UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1994); (S2) Master of Sharia from UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1989); (S1) Bachelor degree in Sharia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1974).

WORK EXPERIENCES

Member of BPKN (National Consumer Protection Agency) (2004 - 2007), Dean of the Faculty of Sharia UIN Jakarta (2002 - 2006), Lecturer in Ulema Cadre Education (PKU) of Indonesia Council of Ulema (MUI) DKI Jakarta.

PROFESSIONAL CERTIFICATION AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2019

During 2019 there was no Professional Certification or Competency Development Program.

CONCURRENT POSITION IN OTHER COMPANIES / INSTITUTIONS

- Chairman of the Victoria Syariah Bank Supervisory Board (1998-present); Chair of the Asuransi Asei Syariah's Supervisory Board; Member of the Health and Sharia Advisory Council of the Indonesian Ministry of Health;
- Member of the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulema (2000-present); Chairperson of the Central Commission of Indonesian Council of Ulema's Fatwa (2010-present)

AFFILIATION

Hasanudin does not have an affiliate relationship with other members of the Sharia Supervisory Board or the Supervisory Board, the Board of Directors, and major shareholders.

JAMKRINDO SHARE OWNERSHIP

Hasanudin does not own the Company's shares.



Muhammad Syakir Sula

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of the Sharia Supervisory Board

Periode Jabatan: 1 Juli 2016-30 Juni 2019
Term of Office: July 1, 2016 - June 30, 2019

55 tahun years old
POSO
12 Februari February 12, **1964**

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
Jakarta DKI Jakarta Province, Indonesia

Keahlian / Expertise
Asuransi Syariah/ Sharia Insurance.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah diemban sejak tahun 2009, dan diangkat kembali pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Direksi No. 123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

PENDIDIKAN

(S1) Sarjana Pertanian di Universitas Padjadjaran, Bandung (1989)

PENGALAMAN KERJA

Anggota Komite Perbankan Syariah Bank Indonesia (2008-2012); Deputi Humas Badan Wakaf Indonesia (2008-2014); Staff Ahli Direksi ICDIF-LPPI (2008-2015); Dewan Pengawas Syariah Bank Tabungan Negara-Unit Syariah (2010-2017); Anggota Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (2015-2017); Dewan Pengawas Syariah PT Central Asia Raya (2005-2016).

SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019

Selama tahun 2019 tidak mengikuti Sertifikasi Profesi atau Program Pengembangan Kompetensi.

RANGKAP JABATAN PADA PERUSAHAAN LAIN/LEMBAGA

- Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014-sekarang); Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Panin Daichi Life (2015-sekarang);
- Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Reasuransi Nasional Indonesia (2013-sekarang)

HUBUNGAN AFILIASI

Muhammad Syakir Sula tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya maupun Dewan Pengawas, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

KEPEMILIKAN SAHAM JAMKRINDO

Muhammad Syakir Sula tidak memiliki saham Perusahaan.

APPOINTMENT HISTORY

The position of Member of the Sharia Supervisory Board has been carried out since 2009, and was reappointed in 2016 through the Directors Decree No. 123 / Kep-Dir / X / 2016 dated October 14, 2016.

EDUCATION

Bachelor of Agriculture from Universitas Padjadjaran, Bandung (1989)

WORK EXPERIENCES

Member of the Bank Indonesia Sharia Banking Committee (2008-2012); Indonesian Waqf Agency Deputy Public Relations (2008-2014); Expert Staff of ICDIF-LPPI Directors (2008-2015); Sharia Supervisory Board of the Bank Tabungan Negara - Sharia Unit (2010-2017); Member of the Financial Services Authority Sharia Financial Services Development Committee (2015-2017); PT Central Asia Raya Sharia Supervisory Board (2005-2016).

PROFESSIONAL CERTIFICATION AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2019

During 2019 there was no Professional Certification or Competency Development Program.

CONCURRENT POSITION IN OTHER COMPANIES / INSTITUTIONS

- Commissioner of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014 - Now); Chairperson of the Panin Daichi Life Sharia Supervisory Board (2015 - Now);
- Chairperson of PT Reasuransi Nasional Indonesia Sharia Supervisory Board (2013 - Now)

AFFILIATION

Muhammad Syakir Sula does not have affiliation with other members of the Sharia Supervisory Board or the Supervisory Board, the Board of Directors, and with major shareholders.

JAMKRINDO SHARE OWNERSHIP

Muhammad Syakir Sula does not own the Company's shares

PROFIL DIREKSI
Profile of The Directors





Randi Anto

Direktur Utama
President Director

Periode Jabatan: 21 November 2017 – 20 November 2022, Periode Pertama
Term of Office: November 21, 2017 – November 22, 2022, First Period

58 tahun years old
SEMARANG
12 April April 12 **1961**

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Keahlian / Expertise
Ekonomi dan Perbankan / Economics and Banking

RIWAYAT PENUNJUKAN

Jabatan Direktur Utama diemban sejak 21 November 2017 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-249/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo. Jabatan Direktur Utama ini merupakan periode pertama.

PENDIDIKAN

(S2) Perbankan, St Louis University, Amerika Serikat (1994), (S1) Ekonomi Jurusan Ekonomi Perusahaan, Universitas Diponegoro, Semarang (1984)

PENGALAMAN KERJA

Direktur Konsumer Bank BRI (2017), Direktur Human Capital & Asset Management Bank BRI (2016), Direktur Credit Risk & Asset Management Bank BRI (2015), Direktur Kepatuhan Bank BRI (2011-2015), Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia Kantor Pusat Bank BRI (2009-2011), Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah Palembang Bank BRI (2007-2009), Kepala Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat Bank BRI (2006-2007), Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Kantor Pusat Bank BRI (2004-2006), Pj. Wakadiv Divisi Analisis Risiko Kredit Kantor Pusat Bank BRI (2001-2004), Ka.Desk Stk. Pj.Wakadiv Desk Administrasi Kredit Kantor Pusat Bank BRI (2000-2001)

SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019

- *Full Day Seminar Auditor's Talk* untuk penguatan peran Satuan Pengawas Internal (SPI) BUMN, Jakarta, 9 Mei 2019, Kementrian BUMN.
- Indonesia *Risk Management Outlook*, Bali, 12 November 2019, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.

RANGKAP JABATAN PADA PERUSAHAAN LAIN/LEMBAGA

Randi Anto tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain/ lembaga.

HUBUNGAN AFILIASI

Randi Anto tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Pengawas maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.

KEPEMILIKAN SAHAM JAMKRINDO

Randi Anto tidak memiliki saham Perusahaan.

APPOINTMENT HISTORY

The position of President Director has been carried out since November 21, 2017 through the Decree of the State Minister of SOEs as the Owner of the Capital of Perum Jamkrindo No. SK-249 / MBU / 11/2017 November 21, 2017 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo. This is his first period serving as President Director.

EDUCATION

Master of Banking, St. Louis University, USA (1994), Bachelor of Economics of Corporate Economics Department, Diponegoro University, Semarang (1984)

WORK EXPERIENCES

Consumer Director of Bank BRI (2017), Human Capital & Asset Management Director of Bank BRI (2016), Credit Risk & Asset Management Director of Bank BRI (2015), Compliance Director of Bank BRI (2011-2015), Head of Human Resources Management Division at Bank BRI Head Office (2009-2011), Head of Palembang Regional Office of Bank BRI (2007-2009), Head of Credit Administration Division at Bank BRI Head Office (2006-2007), Head of Compliance and Risk Management at Bank BRI Head Office (2004-2006), Acting Deputy Head of Credit Risk Analysis Division at Bank BRI Head Office (2001-2004), Head of Desk at the same level of Acting Deputy Head of Credit Administration Division at Bank BRI Head Office (2000-2001)

PROFESSIONAL CERTIFICATION AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2019

- Full-Day Seminar of Auditor's Talk to strengthen the role of the Internal Control Unit (SPI) of SOEs, Jakarta, May 9, 2019, the Ministry of SOEs.
- Indonesia Risk Management Outlook, Bali, November 12, 2019, Indonesian Banking Development Institute.

CONCURRENT POSITION IN OTHER COMPANIES/INSTITUTIONS

Randi Anto does not have concurrent positions in other companies / institutions.

AFFILIATION

Randi Anto does not have affiliation with does not have affiliation with other members of the Board Directors, the Supervisory Board or the Sharia Supervisory Board, as well as with major shareholders.

JAMKRINDO SHARE OWNERSHIP

Randi Anto does not own the Company's shares.



Amin Mas'udi

Direktur Bisnis Penjaminan
Director of Business of Guarantee

Periode Jabatan: 7 September 2017 – 6 September 2022, Periode Pertama
Term of Office: September 7, 2017 – September 6, 2022, First Period

46 tahun years old
BLORA
24 Juni June 24, **1973**

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bogor, West Java, Indonesia

Keahlian / Expertise
Manajemen Agribisnis. / Agribusiness Management

RIWAYAT PENUNJUKAN

Jabatan Direktur diemban sejak 7 September 2017 sebagai Direktur Bisnis Penjaminan melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-187/MBU/09/2017 tanggal 7 September 2017. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama.

PENDIDIKAN

(S2) Magister Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (2011); (S1) Manajemen, Universitas Islam Bandung (1996).

PENGALAMAN KERJA

Kepala Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan Non Bank, Perum Jamkrindo (2013-2017), Kepala Divisi Penjaminan Komersial, Perum Jamkrindo (2013), Kepala Divisi Teknologi Informasi, Perum Jamkrindo (2012-2013), Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi, Perum Jamkrindo (2012), Kepala Kantor Cabang Samarinda, Perum Jamkrindo (2010-2012), Kepala Bagian Penjaminan Perum Jamkrindo (2008-2010), Kepala Bagian Pengembangan Usaha, Perum Jamkrindo (2003-2008), Kepala Bagian Pengendalian Penjaminan, Perum Jamkrindo (2002-2003).

SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019

- *Workshop* Perumusan Peta Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Penjaminan, Jakarta, 21 Maret 2019, OJK.
- *The 5th International Certified Wealth Manager* (CWM) & *Continuing Professional Development* (CDP) *Executive Program* 2019, Rusia, 14-21 September 2019, *Certified Wealth Managers' Association*

RANGKAP JABATAN PADA PERUSAHAAN LAIN/LEMBAGA

Amin Mas'udi tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain/ lembaga.

HUBUNGAN AFILIASI

Amin Mas'udi tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Pengawas maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.

KEPEMILIKAN SAHAM JAMKRINDO

Amin Mas'udi tidak memiliki saham Perusahaan.

APPOINTMENT HISTORY

The position of Director of Guarantee Business has been carried out since September 7, 2017 through the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the Owner of the Capital of Perum Jamkrindo No. SK-187/MBU/09/2017 September 7, 2017. This is his first period serving as a Director .

EDUCATION

Master of Agribusiness Management, Bogor Agricultural University (2011); Bachelor of Management, Bandung Islamic University (1996).

WORK EXPERIENCES

Head of Non-Bank Suretyship and Guarantee Business Division, Perum Jamkrindo (2013-2017), Head of Commercial Guarantee Division, Perum Jamkrindo (2013), Head of Information Technology Division, Perum Jamkrindo (2012-2013), Head of Risk Management and Information Technology Division, Perum Jamkrindo (2012) , Head of Samarinda Branch Office, Perum Jamkrindo (2010-2012), Section Head of Guarantee Division of Perum Jamkrindo (2008-2010), Section Head of Business Development , Perum Jamkrindo (2003-2008), Section Head of Guarantee Control, Perum Jamkrindo (2002-2003).

PROFESSIONAL CERTIFICATION AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2019

- Workshop on Formulation of Competency Maps for the Design of Indonesian National Work Competency Standards (RSKKNI) of the Guarantee field, Jakarta, March 21, 2019, OJK.
- The 5th International Certified Wealth Manager (CWM) & Continuing Professional Development (CDP) Executive Program 2019, Russia, September 14-21, 2019, Certified Wealth Managers' Association..

CONCURRENT POSITION IN OTHER COMPANIES / INSTITUTIONS

Amin Mas'udi does not have concurrent positions in other companies / institutions.

AFFILIATION

Amin Masudi does not have affiliation does not have affiliation with other members of the Board Directors, the Supervisory Board or the Sharia Supervisory Board, as well as with major shareholders.

JAMKRINDO SHARE OWNERSHIP

Amin Mas'udi does not own the Company's shares.



Kadar Wisnuwarman

Direktur Operasional dan Jaringan
Director of Operations and Network

Periode Jabatan: 21 November 2017 – 20 November 2022, Periode Pertama
Term of Office: November 21, 2017 – November 20, 2022, First Period

48 tahun years old
MALANG
31 Oktober October 31 **1971**

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Cibubur, Jawa Barat, Indonesia
Cibubur, West Java, Indonesia

Keahlian / Expertise
Manajemen / Management

RIWAYAT PENUNJUKAN

Jabatan Direktur diemban sejak 21 November 2017 melalui Keputusan Menteri Negara Bumn selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-249/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama.

PENDIDIKAN

(S2) Magister Manajemen, Universitas Hasanuddin (2002); (S1) Manajemen, Universitas Airlangga (1996)

PENGALAMAN KERJA

Pranata Utama Perum Jamkrindo untuk ditugaskan sebagai Direktur Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014-2017), Kepala Kantor Cabang Jakarta Khusus, Perum Jamkrindo (2013-2014), Kepala Divisi Penjaminan Komersial, Perum Jamkrindo (2013), Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi, Perum Jamkrindo (2013), Sekretaris Perusahaan Perum Jamkrindo (2012-2013), Kepala Kantor Cabang Denpasar, Perum Jamkrindo (2011-2012), Kepala Kantor Cabang Pontianak, Perum Jamkrindo (2010-2011), Kepala Bagian Penjaminan Kantor Pusat, Perum Jamkrindo (2006-2010), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Jakarta, Perum Jamkrindo (2004-2006), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Bandung, Perum Jamkrindo (2004), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Pontianak, Perum Jamkrindo (2003-2004).

SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019

- *Workshop* Perumusan Peta Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Penjaminan, Jakarta, 21 Maret 2019, OJK.
- *The 5th International Certified Wealth Manager* (CWM) & *Continuing Professional Development* (CDP) *Executive Program* 2019, Rusia, 14-21 September 2019, *Certified Wealth Managers' Association.*

RANGKAP JABATAN PADA PERUSAHAAN LAIN/LEMBAGA

Kadar Wisnuwarman tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain.

HUBUNGAN AFILIASI

Kadar Wisnuwarman tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Pengawas maupun Dewan Pengawas Syariah, sertadengan pemegang saham utama

KEPEMILIKAN SAHAM JAMKRINDO

Kadar Wisnuwarman tidak memiliki saham Perusahaan.

APPOINTMENT HISTORY

The position of Director has been carried out since November 21, 2017 through the Decree of the State Minister of SOEs as the Owner of the Capital of Perum Jamkrindo No. SK-249 / MBU / 11/2017 dated November 21, 2017, concerning the Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo. This is his first period serving as a Director

EDUCATION

Master of Management, Hasanuddin University (2002); Bachelor of Management, Universitas Airlangga (1996)

WORK EXPERIENCES

Main Institution's Officer of Perum Jamkrindo to be assigned as President Director of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014-2017), Head of Jakarta Special Branch Office, Perum Jamkrindo (2013-2014), Head of the Commercial Guarantee Division, Perum Jamkrindo (2013), Head of Claims and Subrogation Division, Perum Jamkrindo (2013), Corporate Secretary of Perum Jamkrindo (2012-2013), Head of Denpasar Branch Office, Perum Jamkrindo (2011-2012), Head of Pontianak Branch Office, Perum Jamkrindo (2010-2011), Section Head of Guarantee of the Head Office, Perum Jamkrindo (2006-2010), Section Head of Operations of Jakarta Branch Office, Perum Jamkrindo (2004-2006), Section Head of Operations of Bandung Branch Office, Perum Jamkrindo (2004), Section Head of Operations of Pontianak Branch Office, Perum Jamkrindo (2003-2004).

PROFESSIONAL CERTIFICATION AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2019

- Workshop on Formulation of Competency Maps for the Design of Indonesian National Work Competency Standards (RSKKNI) of the Guarantee field, Jakarta, March 21, 2019, OJK.
- The 5th International Certified Wealth Manager (CWM) & Continuing Professional Development (CDP) Executive Program 2019, Russia, September 14-21, 2019, Certified Wealth Managers' Association

CONCURRENT POSITION IN OTHER COMPANIES/INSTITUTIONS

Kadar Wisnuwarman does not have concurrent position in other companies / institutions.

AFFILIATION

Kadar Wisnuwarman does not have an affiliate relationship to other members of the Board of Directors, the Supervisory Board or the Sharia Supervisory Board, as well as major shareholders

JAMKRINDO SHARE OWNERSHIP

Kadar Wisnuwarman does not own the Company's shares.



Sulis Usdoko

Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan
Director of Human Resources Management, General Affairs and Compliance

Periode Jabatan: 7 September 2017 – 6 September 2022, Periode Pertama
Term of Office: September 7, 2017 – September 6, 2022, First Period

59 tahun / years old
SEMARANG
5 September / September 5, **1960**

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Keahlian / Expertise
Ekonomi dan Manajemen / Economics and Management

RIWAYAT PENUNJUKAN

Jabatan Direktur diemban sejak 7 September 2017 melalui Keputusan Menteri Negara Bumn selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-187/ MBU/09/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama. Sebelum pengangkatannya di tahun 2017, Sulis Usdoko belum pernah menjabat pada jajaran Direksi Perum Jamkrindo.

PENDIDIKAN

(S2) Ekonomi Manajemen, Universitas Brawijaya (2003); (S1) Teknik Sipil, Universitas Brawijaya (1985).

PENGALAMAN KERJA

Direktur Bidang Collection Management, Asset Management, Legal dan Dokumen Perkreditan, Bank BTN (2015-2017), Kepala Divisi Bidang Dana Pihak Ketiga Retail dan Jasa-jasa, Bank BTN (2011-2015), Kepala Divisi Teknologi Informasi, Bank BTN (2008-2011), Kepala Kantor Cabang Kelas 1, Kelas 1, dan Kepala Kantor Cabang Utama, Bank BTN (1997-2010), Staf hingga Kepala Bagian, Bank BTN (1986-1995).

SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019

- *Peter Drucker Forum "The Power of Ecosystem",* Austria, 20-22 November 2019 *Peter Drucker Forum.*
- Seminar *Winning in The Digital Age, Building Digital and Agile Organization Capabilities,* Jakarta, 24-25 Oktober 2019, GML *Performance Consulting*
- Seminar *Digital Transformation in Insurance Industry to Win Market*, Jakarta, 15 Agustus 2019, National-Re.
- *HR Director* 2019, Jakarta, 19 Februari 2019, PT. Intipesan Pariwara.

RANGKAP JABATAN PADA PERUSAHAAN LAIN/LEMBAGA

Sulis Usdoko tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/ lembaga lain.

HUBUNGAN AFILIASI

Sulis Usdoko tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi lainnya, Dewan Pengawas maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.

KEPEMILIKAN SAHAM JAMKRINDO

Sulis Usdoko tidak memiliki saham Perusahaan.

APPOINTMENT HISTORY

The position of Director has been carried out since September 7, 2017 through the Decree of the Minister of SOEs, as the Owner of the Capital of Perum Jamkrindo No. SK-187 / MBU / 09/2017 dated September 7, 2017 regarding the Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo. This is his first period serving as a Director. Prior to his appointment in 2017, Sulis Usdoko had never served on the Board of Directors of Perum Jamkrindo.

EDUCATION

Master of Management Economics, Universitas Brawijaya (2003); Bachelor of Civil Engineering, Universitas Brawijaya (1985).

WORK EXPERIENCES

Director of Collection Management, Asset Management, Legal and Credit Documents, Bank BTN (2015-2017), Head of Third Party Funds Retail and Services Division, BTN Bank (2011-2015), Head of Information Technology Division, Bank BTN (2008 -2011), Head of Branch Office Class 1, and Head of Main Branch Offices, BTN Bank (1997-2010), Staff to Head of Section, Bank BTN (1986-1995).

PROFESSIONAL CERTIFICATION AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2019

- Peter Drucker Forum "The Power of Ecosystem", Austria, November 20-22, 2019, Peter Drucker Forum.
- Seminar on Winning in The Digital Age, Digital Building and Agile Organization Capabilities, Jakarta, October 24-25, 2019, GML Performance Consulting
- Seminar on Digital Transformation in Insurance Industry to Win Market, Jakarta, August 15, 2019, National-Re.
- HR Director 2019, Jakarta, February 19, 2019, PT. Inti Pesan Pariwara

CONCURRENT POSITION IN OTHER COMPANIES / INSTITUTIONS

Sulis Usdoko does not have concurrent positions in other companies / institutions.

AFFILIATION

Sulis Usdoko does not have affiliation with other members of the Board of Directors, the Supervisory Board or the Sharia Supervisory Board, as well as with major shareholders.

JAMKRINDO SHARE OWNERSHIP

Sulis Usdoko does not own the Company's shares.



I. Rusdonobanu

Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Investment and Risk Management

Periode Jabatan: 15 Januari 2018 – 14 Januari 2023, Periode Kedua
Term of Office: January 15, 2018 – January 14, 2023, Second Period

60 tahun / years old
BALIKPAPAN
26 Februari / February 26, 1959

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Keahlian / Expertise
Ekonomi dan Manajemen / Economics and Management

RIWAYAT PENUNJUKAN

Jabatan Direktur diemban sejak 15 Januari 2013 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-12/MBU/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama. Kemudian diangkat kembali berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-22/MBU/01/2018, untuk periode kedua.

PENDIDIKAN

(S2) Master Of Science Jurusan Ekonomi *Northeastern University* Boston, Amerika Serikat (1995); (S1) Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Perusahaan Universitas Pancasila (1988); (S1) Sarjana Muda Akuntansi STAN Jakarta (1981).

PENGALAMAN KERJA

Plt Direktur Utama Perum Jamkrindo (7 September 2017 – 21 November 2017), Asisten Deputi Usaha Jasa II Kementerian BUMN (2010-sekarang); Anggota Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2011); Anggota Komisaris PT Perkebunan Nusantara X (Persero) (2008-2011); Anggota Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2007-2011); Anggota Komisaris PT Sang Hyang Seri (Persero) (2003-2009); Asisten Deputi Usaha Perkebunan II Kementerian BUMN (2006-2010); Kepala Bidang Usaha Perkebunan IIA Kementerian BUMN (2006); Pj. Kepala Bidang Usaha Sarana Produksi Pertanian Kementerian BUMN (2002-2006).

SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019

- *Workshop* Penyusunan KPI RKAP 2020, Jakarta, 5 November 2019, Kementrian BUMN.
- *The 1st ASEAN CPA Conference* 2019, Bali, 16-17 Oktober 2019, CPA ASEAN.
- *Innovation and Cooperation in Financing SMEs*, 26 - 27 September 2019, Forum ke - XXIV Ibero-American *Forum on Guarantee and Financing System for SME*

RANGKAP JABATAN PADA PERUSAHAAN LAIN/LEMBAGA

I. Rusdonobanu tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/ lembaga lain.

HUBUNGAN AFILIASI

I. Rusdonobanu tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Pengawas maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.

KEPEMILIKAN SAHAM JAMKRINDO

I. Rusdonobanu tidak memiliki saham Perusahaan.

APPOINTMENT HISTORY

The position of Director has been carried out since January 15, 2013 through the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the Owner of Capital of Perum Jamkrindo No. SK-12/MBU/2013 dated January 15, 2013 concerning Dismissal, Change of Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo, j.o Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the Owner of Capital of Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014 concerning Changes in Nomenclature of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo. He has served one priod as a director. He wasreappointed based on the Decree of the State Minister of SOEs as the Owner of the Capital of Perum Jamkrindo No. SK-22/MBU/01/2018.

EDUCATION

Master of Science, Department of Economics, Northeastern University Boston, USA (1995); Bachelor of Economics majoring in Corporate Management, University of Pancasila (1988); Diploma of Accounting of STAN Jakarta (1981).

WORK EXPERIENCES

Acting President Director of Perum Jamkrindo (September 7, 2017 - November 21, 2017), Assistant Deputy for Services Business II, the Ministry of SOEs (2010-present); Member of the Board of Commissioners of PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2011); Member of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara X (Persero) (2008-2011); Member of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2007-2011); Member of the Board of Commissioners of PT Sang Hyang Seri (Persero) (2003-2009); Assistant Deputy of Plantation Business II, the Ministry of SOEs (2006-2010); Head of Plantation Business Division IIA, the Ministry of SOEs (2006); Acting Head of Agriculture Production Facility Business Division of the Ministry of SOEs (2002-2006).

PROFESSIONAL CERTIFICATION AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2019

- Workshop on Preparation of the 2020 RKAP KPI, Jakarta, November 5, 2019, the Ministry of SOEs.
- The 1st ASEAN CPA Conference 2019, Bali, October 16-17, 2019, ASEAN CPA.
- Innovation and Cooperation in Financing the SMEs, September 26-27, 2019, the XXIV Ibero-American Forum on Guarantee and Financing System for SME

CONCURRENT POSITION IN OTHER COMPANIES / INSTITUTIONS

I. Rusdonobanu does not have a concurrent position in other companies / institutions.

AFFILIATION

I. Rusdonobanu does not have affiliation with other members of the Board Directors, the Supervisory Board or the Sharia Supervisory Board, as well as with major shareholders.

JAMKRINDO SHARE OWNERSHIP

I. Rusdonobanu does not own the Company's shares.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
Profile of Executive Officers



Abdul Bari

Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

Menjabat sejak: 3 Februari 2017
Serving the position since: February 3, 2017

Bergabung di Jamkrindo: 21 Agustus 2015
Joined Jamkrindo: August 21, 2015

Riwayat Pendidikan / Education:
S3 Manajemen SDM Universitas Negeri Jakarta, 2014
Doctor of HR Management, State University of Jakarta, 2014

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia



Mohamad Adhy Prayitno

Kepala Satuan Pengawasan Intern / Head of Internal Control Unit

Menjabat sejak: 12 November 2018
Serving the position since: November 12, 2018

Bergabung di Jamkrindo: 15 Oktober 2018
Joined Jamkrindo: October 15, 2018

Riwayat Pendidikan / Education:
S2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, 2003
Master of Management of Gadjah Mada University, 2003

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Sleman, Yogyakarta, Indonesia
Sleman, Yogyakarta, Indonesia



Dadang Ary Aviyanto

Wakil Satuan Pengawasan Intern / Deputy Head of Internal Control Unit

Menjabat sejak: 2 Mei 2019
Serving the position since: May 2, 2019

Bergabung di Jamkrindo: 2 Januari 1997
Joined Jamkrindo: January 2, 1997

Riwayat Pendidikan / Education:
S1 Manajemen Universitas Brawijaya
Bachelor of Manajemen of Brawijaya University

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Mojokerto, East Java, Indonesia
Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia



Alia Nur Fitri

Kepala Divisi Perencanaan Strategis / Head of Strategic Planning Division

Menjabat sejak: 19 september 2017
Serving the position since: February 3, 2017

Bergabung di Jamkrindo: 3 September 2014
Joined Jamkrindo: September 3, 2014

Riwayat Pendidikan / Education:
S2 Manajemen Universitas Gadjah Mada, 1997/
Master of Management of Gadjah Mada University, 1997

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia



Hafizah

Kepala Divisi Bisnis 1 / Head of Business 1 Division

Menjabat sejak: 31 Agustus 2018
Serving the position since: August 31, 2018

Bergabung di Jamkrindo: 3 September 2014
Joined Jamkrindo: September 3, 2014

Riwayat Pendidikan / Education:
M.M, Manajemen, Universitas Persada Indonesia, 2002/
Master of Management of Universitas Persada Indonesia/Persada Indonesia University, 2002

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia



Suwarsito

Kepala Divisi Bisnis 2 / Head of Business 2 Division

Menjabat sejak: 30 Agustus 2016
Serving the position since: AUgust 30, 2016

Bergabung di Jamkrindo: 2 Januarl, 1998
Joined Jamkrindo: January 2, 1998

Riwayat Pendidikan / Education:
Pendidikan: S.E, M.M, Manajemen, Universitas Hasanuddin, 2007
Master of Management of Hasanuddin University, 2007

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia



Muchamad Kisworo

Kepala Divisi Bisnis 3 / Head of Business 3 Division

Menjabat sejak: 19 September 2017
Serving the position since: September 19, 2017

Bergabung di Jamkrindo: 2 February 2000
Joined Jamkrindo: February 2, 2000

Riwayat Pendidikan / Education:
S.E, M.M, Manajemen, Universitas Sumatera Utara, 2010
Master of Management of Universitas Sumatera Utara, 2010

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bogor, West Java, Indonesia



Sudibyo Utomo

Kepala Divisi Penunjang Bisnis / Head of Business Support Division

Menjabat sejak: 31 Agustus 2018
Serving the position since: August 31, 2018

Bergabung di Jamkrindo: 21 January 1998
Joined Jamkrindo: January 21, 1998

Riwayat Pendidikan / Education:
M.M, Manajemen, Universitas Padjajdaran, 2012/
Master of Management, Padjadjaran University, 2012

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bogor, West Java, Indonesia



Yanti Rachmawati

Kepala Desk Bisnis Penjaminan Syariah / Head of Sharia Guarantee Business Desk

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Bandung, Jawa Barat, Indonesi
Bandung, West Java, Indonesa

Menjabat sejak: 31 Agustus 2018
Serving the position since: August 31, 2018

Bergabung di Jamkrindo: 21 Januari 1998
Joined Jamkrindo: January 21, 1998

Riwayat Pendidikan / Education:
M.M, Manajemen, Universitas Padjadjaran, 2012/
Master of Management of Padjadjaran University, 2012



Henry Nur Irianto

Kepala Desk Penjaminan Sistem Resi Gudang /
Head of Warehouse Receipt System Guarantee Desk

Menjabat sejak: 2 Mei 2019
Serving the position since: May 2, 2019

Bergabung di Jamkrindo: 1 Januari 1991
Joined Jamkrindo:January 1, 1991

Riwayat Pendidikan / Education:
M.M, Manajemen, STM Labora, 1999
Master of Management, STM Labora, 1999

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bogor, West Java, Indonesia



Mahfudh Sudiyono

Kepala Divisi Teknik & Administrasi Bisnis/
Head of Engineering & Business Administration Division

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bogor, West Java, Indonesia

Menjabat sejak: 10 Desember 2015
Serving the position since: December 10, 2015

Bergabung di Jamkrindo: 2 Januari 1997
Joined Jamkrindo: NJanuary 2, 1997

Riwayat Pendidikan / Education:
S.E, Manajemen, Universitas Brawijaya, 1998
Bachelor of Management of Brawijaya University, 1998



Hamim Bugi Afianto

Kepala Divisi Jaringan dan Layanan / Head of Network and Service Division

Menjabat sejak: 2 Mei 2019
Serving the position since: May 2, 2019

Bergabung di Jamkrindo: 1 April 1996
Joined Jamkrindo: April 1, 1996

Riwayat Pendidikan / Education:
S1 Manajemen Universitas Brawijaya
Bachelor of Management of Brawijaya University

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Surabaya, East Java, Indonesia



41 tahun years old

Hadi Ariwibowo

Kepala Divisi Teknologi Informasi / Head of Technology Information Division

Menjabat sejak: 10 Desember 2015
Serving the position since: December 10, 2015

Bergabung di Jamkrindo: 26 September 2008
Joined Jamkrindo: September 26, 2008

Riwayat Pendidikan / Education:
S.T, Teknik Sipil, Universitas Indonesia, 2002/
Bachelor of Civil Engineering of University of Indonesia, 2002

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia



46 tahun years old

Achmad Muhlison

Kepala Desk Subrogasi / Head of Subrogation Desk

Menjabat sejak: 31 Agustus 2018
Serving the position since: August 31, 2018

Bergabung di Jamkrindo: 21 Agustus 2015
Joined Jamkrindo: August 21, 2015

Riwayat Pendidikan / Education:
M.M, Manajemen Keuangan, Universitas Andalas, 2002
Education: Master of Financial Management of Andalas University, 2002

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Bandung, West Java, Indonesia



47 tahun years old

Erna Zubaida

Kepala Divisi MSDM / Head of HR Management Division

Menjabat sejak: 19 September 2017
Serving the position since: September 19, 2017

Bergabung di Jamkrindo: 2 Juli 1996
Joined Jamkrindo: July 2, 1996

Riwayat Pendidikan / Education:
S.E, Manajemen Ekonomi, Universitas Diponegoro, 1995
Bachelor of Economic Management of Diponegoro University, 1995

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bogor, Jawa Barat, Indonesia



41 tahun years old

Lusy Susanti

Kepala Divisi Umum/ Head of General Division

Menjabat sejak: 2 Mei 2019
Serving the position since: May 2, 2019

Bergabung di Jamkrindo: 11 Januari 2000
Joined Jamkrindo: January 11, 2000

Riwayat Pendidikan / Education:
S.E, Akuntansi, Universitas Andalas, 1999
Bachelor of Accounting, Andalas University, 1999

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Pekanbaru, Riau, Indonesia
Pekanbaru, Riau, Indonesia



46 tahun years old

M. Natsir Rahmadi

Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan/ Head of Legal and Compliance Division

Menjabat sejak: 1 Agustus 2016
Serving the position since: August 1, 2016

Bergabung di Jamkrindo: 1 Juli 2003
Joined Jamkrindo: July 1, 2003

Riwayat Pendidikan / Education:
S.H, Hukum, Universitas Brawijaya, 1999/
Bachelor of Law of Brawijaya University, 1999

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia



Aribowo

Kepala Divisi Keuangan dan Investasi / Head of Finance and Investment Division

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia
Sidoarjo, East Java, Indonesia

Menjabat sejak: 1 Agustus 2016
Serving the position since: August 1, 2016

Bergabung di Jamkrindo: 2 Januari 1991
Joined Jamkrindo: January 2, 1991

Riwayat Pendidikan / Education:
Drs. AK. M.M, Manajemen, Universitas Andalas, 2002/
Master of Management of Andalas University, 2002



Diana Mayawati

Kepala Divisi Akuntansi (d/h Divisi Akuntansi & PKBL)
Head of Accounting Division (previously Accounting & PKBL Division)

Menjabat sejak: 10 Desember 2015
Serving the position since: December 10, 2015

Bergabung di Jamkrindo: 4 Mei 2015
Joined Jamkrindo: May 4, 2015

Riwayat Pendidikan / Education:
S.E, Akuntansi, Universitas Trisakti, 1998
Bachelor of Economics, Accounting of Trisakti University, 1998

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia



Ceriandri Widuri

Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Pemeringkatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Konsultasi Manajemen (PUKM) (d/h Divisi Manajemen Risiko)
Head of Risk Management and Micro, Small, Medium Business Rating, and Management Consulting (PUKM) Division (previously Risk Management Division)

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Menjabat sejak: 3 Februari 2017
Serving the position since: February 3, 2017

Bergabung di Jamkrindo: 2 Januari 1997
Joined Jamkrindo: January 2, 1997

Riwayat Pendidikan / Education:
S.E, MBA, Manajemen Strategic, Universitas Gadjah Mada, 2009
MBA of Strategic Management of Gadjah Mada University, 2009



Alexandry

Kepala Divisi Klaim / Head of Claim Division

Menjabat sejak: 31 Agustus 2018
Serving the position since: August 31, 2018

Bergabung di Jamkrindo: 1 Juli 2003
Joined Jamkrindo: August July 1, 2003

Riwayat Pendidikan / Education:
S.E, S1 Akuntansi, Universitas Muhammadiyah, 2001/
Education: Bachelor of Accounting of Muhammadiyah University, 2001

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
Palembang, South Sumatera, Indonesia

DEMOGRAFI KARYAWAN
Employee Demographics

PERKEMBANGAN JUMLAH KARYAWAN TAHUN 2017-2020 (ORANG)
DEVELOPMENT OF NUMBER OF EMPLOYEES IN 2017-2020 (PEOPLE)

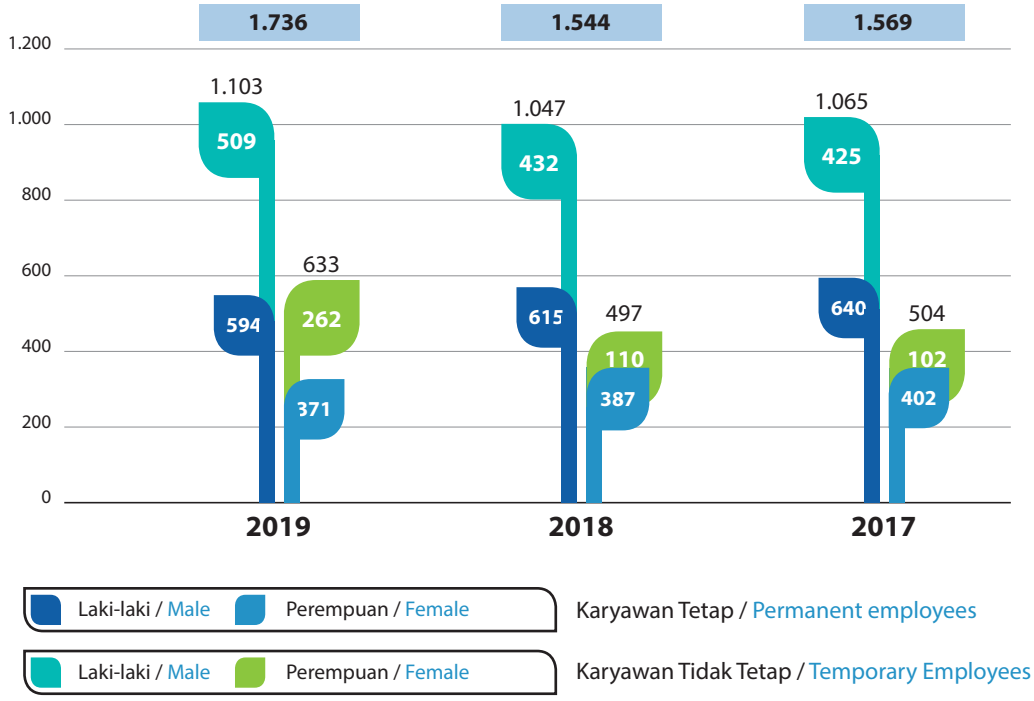

"1.736 karyawan yang tercatat per 2019*,berkarya di Perusahaan dengan mendedikasikan diri kepada dunia UMKM dan Koperasi melalui 9 Kantor Wilayah, 56 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) Perum Jamkrindo yang tersebar di seluruh Indonesia"

Keterangan :
* : Jumlah karyawan termasuk Karyawan Tetap, Penugasan LSPP & Jamsyar, *Outsource*, Magang, *ProHire*, dan KKWT.

"As much as 1,736 employees are registered as of 2019*. They work in the Company by dedicating themselves to the world of MSMEs and Cooperatives through 9 Regional Offices, 56 Branch Offices and 16 Service Unit Offices (KUP) of Perum Jamkrindo which are spread throughout Indonesia".

Information :
*: The number of employees includes Permanent Employees, LSPP & Jamsyar Assignments, Outsourced, Internships, ProHire, and KKWT.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL
Composition of Shareholders/Capital Owner

RINCIAN PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

Perusahaan memiliki bentuk Perusahaan Umum (Perum) yang tidak mengenal saham dalam sistem kepemilikannya. Namun demikian, kepemilikan dalam bentuk penyertaan modal dapat disampaikan sebagai berikut:

DETAILS OF SHAREHOLDERS / CAPITAL OWNERS

The Company is a Public Corporation; the ownership of its shares is 100% belong to the Republic of Indonesia. However, ownership in the form of equity participation can be conveyed as follows:

PENYERTAAN MODAL PADA PERUM JAMKRINDO PER 31 DESEMBER 2019
EQUITY PARTICIPATION AT PERUM JAMKRINDO AS OF DECEMBER 31, 2019

Pemilik Modal Capital Owner	Nominal Nominal Value (Rp/IDR)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
Negara Republik Indonesia (Penyertaan Modal Negara) The Republic of Indonesia (State Equity Participation)	7.638.733.365.160	100,00%

KOMPOSISI KEPEMILIKAN PERUM JAMKRINDO
PERUM JAMKRINDO'S OWNERSHIP COMPOSITION

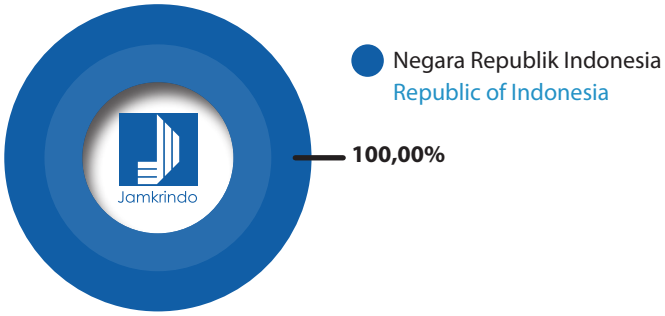

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA

Pemegang saham utama Perusahaan dalam hal ini adalah Pemilik Modal seluruhnya sebesar 100,00% adalah Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Melalui kepemilikan tunggal tersebut, Perusahaan memiliki status hukum Perusahaan Umum dan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

INFORMATION ABOUT MAJOR SHAREHOLDERS

The major shareholders of the Company in this case are the owners of the total capital of 100.00%, namely the Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia / Ministry of State Owned Enterprises. Through sole ownership, the Company has the legal status of a Public Corporation and becomes a State-Owned Enterprise (BUMN).

INFORMASI TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN KELOMPOK PEMEGANG SAHAM MASING - MASING DI BAWAH 5 (LIMA) PERSEN

Hingga 31 Desember 2019, Perusahaan tidak memiliki kebijakan Program Kepemilikan Saham Karyawan, dan Program Kepemilikan Saham Manajemen. Perusahaan juga tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang memungkinkan kepemilikan saham Perusahaan oleh publik. Seluruh kepemilikan modal sesuai dengan penjelasan di atas. Untuk itu, hingga 31 Desember 2019, tidak ada pejabat Perusahaan ataupun karyawan yang memiliki saham Perusahaan.

INFORMATION ABOUT SHARE OWNERSHIP BY MANAGEMENT AND GROUP OF SHAREHOLDERS - EACH UNDER 5 (FIVE) PERCENT

As of December 31, 2019, the Company does not have an Employee Share Ownership Program policy, and a Management Share Ownership Program. The Company also does not conduct Initial Public Offering which allows the Company's share to be owned by the public. All capital ownership is in accordance with the previous explanation. For this reason, as of December 31, 2019, there were no Company officials or employees who owned the Company's shares.

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI *JOINT VENTURE* (JV) / *SPECIAL PURPOSE VEHICLE* (SPV)
List of Subsidiaries and Association /Joint Venture (JV)/Special Purpose Vehicle(SPV)

Entitas Anak Subsidiaries	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Pendirian Year of Establishmen	Tahun Beroperasi Year of Operation	Kepemilikan Saham Share Ownership (%)		Jumlah Aset (Rp-juta) Total Assets (in million IDR)		Status Operasi Operational Status
					2019	2018	2019	2018	
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Jasa Penjaminan Syariah	Jakarta	2014	2014	99,997%	99,996%	1.059.614	799.975	Beroperasi Operation

Selain daftar entitas anak di atas, Perum Jamkrindo tidak memiliki entitas asosiasi dan/atau penyertaan saham kepada entitas manapun.

Besides the subsidiaries listed above, Perum Jamkrindo does not associate with and/or has equity participation in any entity.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH ("JAMSYAR")

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar") didirikan pada tanggal 16 September 2014 dan mendapatkan izin operasional pada tanggal 7 November 2014. Jamsyar dibentuk melalui Akta Notaris No. 68 oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. tanggal 19 September 2014 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-26462.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 24 September 2014; kemudian mendapatkan izin operasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. KEP-134/d.05/2014 tanggal 7 November 2014 tentang Pemberian Izin usaha Perusahaan Penjaminan Syariah Kepada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, serta Surat OJK No. S-34/nB.223/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pencatatan Produk Baru PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar bergerak dalam bidang usaha Jasa Penjaminan Syariah, dengan mengusung tagline "Jamsyar Progresif: Profesional, Gesit, responsif, dan Inovatif". Informasi tentang kepemilikan, kinerja, dan manajemen Jamsyar adalah sebagai berikut:

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH ("JAMSYAR")

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar") was established on September 16, 2014 and obtained an operational permit on November 7, 2014. Jamsyar was formed through Notarial Deed No. 68 made by the Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. dated September 19, 2014 which was registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-26462.40.10.2014 concerning Ratification of the Establishment of Legal Entity of PT Jamkrindo Syariah dated September 24, 2014; It received an operation permit from the Financial Services Authority (FSA) through the FSA letter No. KEP-134 / d.05 / 2014 November 7, 2014 concerning the Granting of a Sharia Guarantee Company Business License to PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, and FSA Letter No. S-34 / nB.223 / 2015 January 15, 2015 concerning the Listing of New Products of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar is engaged in the Sharia Guarantee Services business, with the tagline "Progressive Jamsyar: Professional, Agile, Responsive, and Innovative". Information about Jamsyar's ownership, performance and management is as follows:

KEPEMILIKAN SAHAM JAMSYAR
JAMSYAR SHARE OWNERSHIP

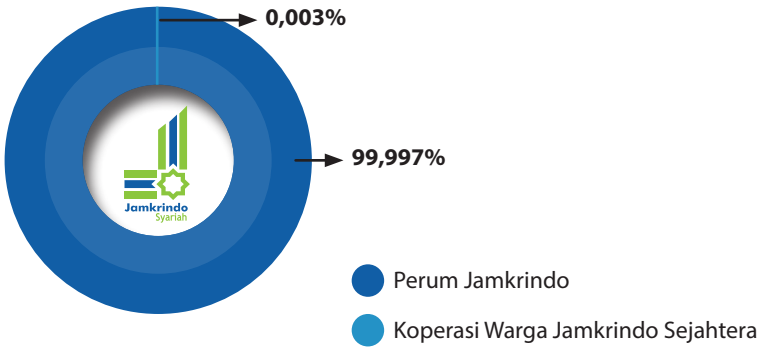

IKHTISAR KINERJA KEUANGAN JAMSYAR
JAMSYAR FINANCIAL PERFORMANCE OVERVIEW

Rp-juta	2019 (Rp) (IDR)	2018 (Rp) (IDR)	In million IDR
Pendapatan	229.921.832.177	160.862.271.701	Income
Beban Usaha	55.384.455.332	60.463.493.198	Operating Expenses
Laba Bersih	36.576.462.717	22.543.355.454	Net Profit
Laba Komprehensif	42.231.845.603	16.634.047.541	Comprehensive Profit
Aset	1.059.614.274.453	746.638.381.732	Assets
Liabilitas	501.889.009.381	406.145.052.263	Liabilities
Ekuitas	557.725.175.072	340.493.329.469	Equity

MANAJEMEN JAMSYAR
JAMSYAR MANAGEMENT

Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Komisaris Utama	Drs. Aribowo, AK	President Commissioner
Komisaris Independen	Drs. Wildan, AK	Independent Commissioner
Komisaris	Ir. H. M. Syakir Sula, AAJ,FIIS, CRGP	Commissioner
Direksi Board of Directors		
Direktur Utama	Gatot Suprabowo	President Director
Direktur Operasional	Achmad Sonhadji	Director of Operations
Direktur Keuangan, SDM & Umum	Endang Sri Winarni	Director of Finance, HR & General Affairs
Dewan Pengawas Syariah Board of Directors		
Ketua Dewan Pengawas Syariah	Prof. Dr. Hasannudin, AF. MA	Chairperson of the Sharia Supervisory Board
Anggota Dewan Pengawas Syariah	H. Abdul Aziem, SH. M.Pd	Member of the Sharia Supervisory Board

STRUKTUR GRUP
Group Structure



KRONOLOGIS PENERBITAN SAHAM
Chronology of Share Issuance

Perusahaan tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa saham manapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), dan nama bursa di mana saham Perusahaan dicatatkan.

The Company does not conduct an Initial Public Offering and does not trade its shares on any stock exchange. Therefore, there is no information related to the year of shares issuance, number of shares, nominal value of shares, share offering price for each corporate action, number of shares listed after each corporate action, and the name of the stock exchange on which Company shares are listed.

KRONOLOGIS PENERBITAN EFEK LAINNYA
Chronology of Other Securities Issuance

Hingga tanggal 31 Desember 2019 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, Perusahaan tidak menerbitkan efek apapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; nilai penawaran efek lainnya; nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan; dan peringkat efek.

As of December 31, 2019 and the date of submission of this data/information, the Company does not issue any securities. Therefore, there is no information regarding the name of other securities, the year of other securities issuance, the interest rate/reward of other securities, and other securities maturity dates; value of other securities; name of the exchange in which other securities are listed; and securities ratings.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
Supporting Institutions and Professionals

Lembaga/Profesi Penunjang Supporting Institutions / Professionals	Alamat Address	Jenis dan Bentuk Jasa Types and Forms of Services	Biaya Costs	Periode Penugasan Assignment Period
PT Sharing Vision Indonesia	Jl. Anggrek No.47, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114	Jasa Konsultan Retainer TI IT Retainer Consultant Services	Rp660.000.000,00	s.d 10 Januari 2019 until January 10, 2019

DAFTAR KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR 2015-2019
LIST OF PUBLIC ACCOUNTING FIRMS AND ACCOUNTANTS FOR THE LAST 5 (FIVE) YEARS - 2015-2019

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firms	Akuntan Accountants	Jasa Services	Jasa Lainnya Other Services	Opini Opinion	Biaya Costs (Rp/IDR)
2019	KAP Hertanto Grace Karunawan (HGK)	Bambang Karunawan	Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2019 Public Accounting Firm Services for the Examination of the Consolidated Financial Statements of Perum Jamkrindo for 2019 Fiscal Year	-	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Fair in all material aspects (Unqualified Opinion)	458.850.000,00
2018	KAP Hertanto Grace Karunawan (HGK)	Bambang Karunawan	Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2018 Public Accounting Firm Services for the Examination of the Consolidated Financial Statements of Perum Jamkrindo for 2018 Fiscal Year	-	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Fair in all material aspects (Unqualified Opinion)	424.550.000,00
2017	KAP Hertanto Grace Karunawan (HGK)	Drs. Hertanto	Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2017 Public Accounting Firm Services for the Examination of the Consolidated Financial Statements of Perum Jamkrindo for Fiscal Year 2017	-	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Fair in all material aspects (Unqualified Opinion)	386.000.000,00
2016	KAP Hertanto Grace Karunawan (HGK)	Drs. Hertanto	Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2016 Public Accounting Firm Services for the Examination of the Consolidated Financial Statements of Perum Jamkrindo for Fiscal Year 2016	-	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Fair in all material aspects (Unqualified Opinion)	387.612.500,00
2015	KAP Hertanto Grace Karunawan (HGK)	Drs. Hertanto	Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Pemeriksaan Konsolidasian Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2015 Public Accounting Firm Services for the Examination of the Consolidated Financial Statements of Perum Jamkrindo for Fiscal Year 2015	-	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Fair in all material aspects (Unqualified Opinion)	389.565.000,00

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
Awards and Certifications

28 Maret | March

Juara III
Kategori Tata Kelola Terbaik
Emerging Corporate

The Third Place in the Emerging Corporate Governance Category

Acara / Event :
8th Anugerah BUMN 2019

oleh/by: BUMN Track



24 April | April

Silver Winning the Most Promising Company in Marketing 3.0 Kategori Perusahaan

Silver Winning the Most Promising Company in Marketing 3.0 in the Company Category

Acara / Event :
BUMN Markeeters Awards 2019

oleh/by: Majalah Markeeters
Markeeters Magazine





13 Juli | July

Rekor Muri atas Rekor Pemberian Paket Alat Sekolah kepada Pelajar Terbanyak (49.000 Paket)

Muri Record for the Record of Giving School Equipment Packages to Students at Most (49,000 Packages)

Acara / Event :
Pemecahan Rekor Muri pada HUT ke-49 Jamkrindo / Breaking Muri Records at Jamkrindo's 49th Anniversary

oleh/by: MURI



Silver Winner Kategori Best Leader Supporting PR & Comunnication Sub Kategori BUMN untuk Bapak Randi Anto

Silver Winner for Best Leader Supporting PR & Communication Category, SOEs Sub Category, for Mr. Randi Anto

Acara / Event :
Anugerah Humas Indonesia 2019

oleh/by: PR Indonesia

30 Agustus | August



30 Agustus | August

Kategori Terpopuler di Media Online Sub Kategori BUMN non Tbk.

The Most Popular Category in Online Media Sub Category of Non-Public BUMN

Acara / Event :
Anugerah Humas Indonesia 2019

oleh/by: PR Indonesia

8 Oktober | October

Program BHUN Terbaik II sebagai PIC di Provinsi Gorontalo

The Second Place for BHUN Program as a PIC in Gorontalo Province

Acara / Event :
BHUN Award 2019

oleh/by: Kementerian BUMN
The Ministry of SOE



15 **Oktober** | October



APQO President Award for Demonstrated Excellence 2019 untuk Bapak Randi Anto (APQO)

APQO President Award for Demonstrated Excellence 2019 for Mr. Randi Anto (APQO)

Acara / Event : Global Performance Excellence Award 2019

oleh/by: Asia Pacific Quality Organization (APQO)

15 **Oktober** | October

Best in Class Global Performance Excellence Award 2019 (APQO)

Best in Class Global Performance Excellence Award 2019 (APQO)

Acara / Event :
Global Performance Excellence Award 2019

oleh/by: Asia Pacific Quality Organization (APQO)





Commitment to Excellence / 3 Star Recognition untuk Tim SIMR dan SIPP

Commitment to Excellence / 3 Star Recognition for the SIMR and SIPP Teams

Acara / Event :
APQO International ACE Award 2019

oleh/by: Asia Pacific Quality Organization (APQO)

15 **Oktober** | October

25 **Oktober** | October



The Most Outstanding Guarantee Company in 2019

The Most Outstanding Guarantee Company in 2019

Acara / Event : Infobank Award

oleh/by: Infobank

5 **November** | November

Brand Communication Terbaik Corporate Branding BUMN bidang Jasa keuangan, jasa Survei dan Konsultan Bidang Rekstrukturisasi dan Pengembangan Usaha

The Best Brand Communication for Corporate Branding of SOEs in the field of Financial Services, Survey and Consultant Services in the Field of Reconstruction and Business Development

Acara / Event :
7th BUMN Branding & Marketing Award 2019
oleh/by: **BUMN Track**



November | November **5**

International Sales dan Marketing Terbaik Corporate Marketing BUMN bidang Jasa keuangan, jasa Survei dan Konsultan Bidang Rekstrukturisasi dan Pengembangan Usah

Best International Sales and Marketing for SOEs Corporate Marketing in the field of Financial Services, Survey and Consultant Services in the Field of Reconstruction and Business Development

Acara / Event :
7th BUMN Branding & Marketing Award 2019
oleh/by: **BUMN Track**





1st Best Risk Management
Kategori SOEs Company (Warta Ekonomi)

1st Best Risk Management
Category of SOEs Company (Warta Ekonomi)

Acara / Event :
Piagam Economic Review
oleh/by: **Warta Ekonomi**

6 **Desember** | December



Indonesia Top Leader Award untuk Bapak Randi Anto kategori Lembaga Penjamin (Warta Ekonomi)

Indonesia Top Leader Award for Mr. Randi Anto in the Guarantee Institutions Category (Warta Ekonomi)

Acara / Event :
Piagam Economic Review
oleh/by: **Warta Ekonomi**

Desember | December **6**

SERTIFIKASI YANG BERLAKU DI TAHUN 2019 CERTIFICATION THAT APPLIES IN 2019

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Date of Certification Issued	Jenis Sertifikat Certificate Type	Dikeluarkan Oleh Issued by	Masa Berlaku Hingga Validity Period Until
2 Mei 2018 May 2, 2018	Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015 ISO 9001: 2015 Quality Management Certification	Sucofindo	1 Mei 2021 May 1, 2021

DAFTAR ALAMAT ENTITAS ANAK DAN KANTOR CABANG / KANTOR PERWAKILAN
List of Addresses of Subsidiaries and Branch Offices/Representative Offices



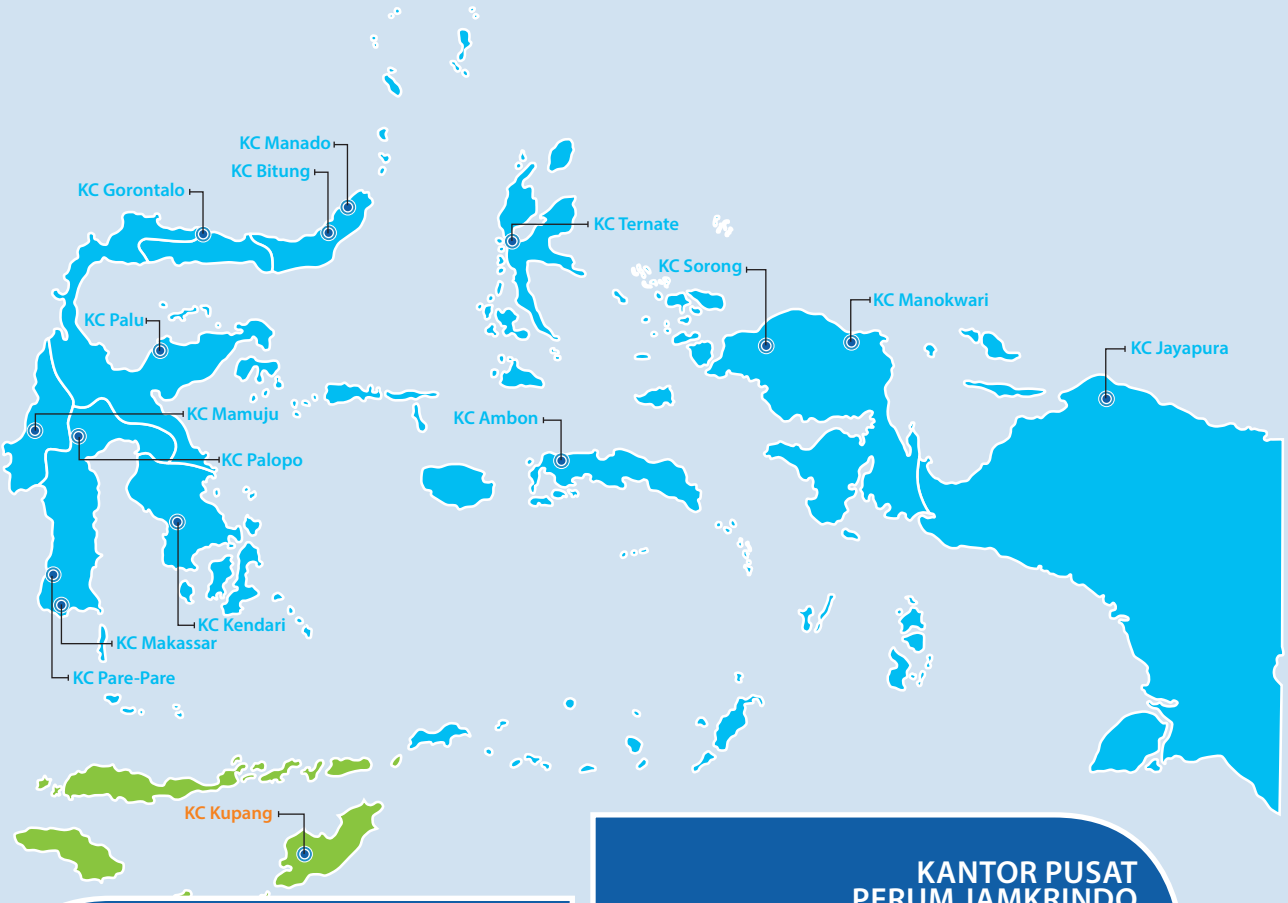

KANTOR PUSAT PERUM JAMKRINDO
PERUM JAMKRINDO HEAD OFFICE

GEDUNG JAMKRINDO
Jamkrindo Building

Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610
Indonesia

KONTAK
CONTACT

+62 21 6540335
+62 21 6540344, 6540348
contact@jamkrindo.co.id
www.jamkrindo.co.id

ENTITAS ANAK
SUBSIDIARIES

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

GEDUNG JAMKRINDO
Jamkrindo Building

Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6, **Lantai 7**
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610
Indonesia

KONTAK
CONTACT

+62 21 6540386
+62 21 6540389
info@jamkrindosyariah.co.id
www.jamkrindosyariah.co.id

KANTOR WILAYAH (KANWIL)
REGIONAL OFFICES

Kanwil Regional Offices		Alamat Address
I	Medan	Jl. Bukit Barisan No. 03 Medan – 20111; Telp: (061) 88813219 Fax: (061) 88741192
II	Palembang	Jl. Basuki Rahmat Ruko No. 4 (Depan BLPT), Kec. Kemuning, Palembang 30127, Sumatera Selatan; Telp: (0711) 5556582 Fax: (0711) 5556589
III	Jakarta	Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, DKI Jakarta; Telp (021) 6540335 Fax (021) 6540387
IV	Bandung	Jl. Soekarno Hatta Km. 12 No. 722, Gedebage, Bandung, Jawa Barat; Telp: (022) 7815088 Fax: (022) 7800891
V	Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A, Semarang, Jawa Tengah; Telp: (024) 7601797; Fax: (024)7614138
VI	Surabaya	GEDUNG JAMKRINDO, Jl. Raya Bandara Juanda Km. 2 - 3 Surabaya; Telp: (031) 8685567 Fax: (031) 8670568
VII	Denpasar	Pertokoan Dewata Square Blok A12 Jl. Letda Tantular, Renon. Denpasar -80232; Telp: (0361) 286854 Fax: (0361) 286267
VIII	Banjarmasin	Jl. Ahmad Yani Km. 3.5 No.210-B, Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Telp: (0511) 6744706 Fax: (0511) 3273435
IX	Makassar	Jl. Lamadukelleng No.25 B, Makassar 90112, Sulawesi Selatan; Telp: (0411) 875836 Fax: (0411) 8099005

KANTOR CABANG KHUSUS
SPECIAL BRANCH OFFICE

Kantor Cabang Khusus Special Branch Office	Alamat Address
Kantor Cabang Khusus Jakarta	Gedung Jamkrindo Lt.Dasar Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610, Indonesia

KANTOR CABANG
BRANCH OFFICES

Kanwil Regional Offices	Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
I	Medan	Jl. Sei Serayu No. 40, Medan, Sumatera Utara; Telp: (061) 4152827 / 4155767 Fax: (061) 4156775
	Pekan Baru	Jl. Jend. Sudirman No.150 – Pekanbaru; Telp: (0761) 854311, 854870 Fax: (0761) 848801
	Banda Aceh	Jl. Syiah Kuala No.10 A-B Kel. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh 23126; Telp: (0651) 8016790 Fax: (0651) 8011094
	Padang	Jl. Khatib Sulaiman No. 47 C, Padang, Sumatera Barat; Telp: (0751) 7050598 Fax: (0751) 447165
	Tanjung Pinang	Komp. Ruko Pamedan, Jl. Raja Ali Haji No. 6, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Telp: (0771) 316919 Fax: (0771) 316074
	Batam	Komp Ruko Mahkota Raya Blok G No.9 Jl.Raja Ali Haji Fisabilillah, Batam Center. Batam; Telp: (0778) 7495993 Fax: (0778) 469019
	Balige	Jl. Siliwangi No. 08 Balige, Tobasa, Sumatera Utara; Telp: (0632) 21501 Fax: (0632) 21722
II	Palembang	Jl. Residen abdul rozak no.188-189 kelurahan kalidoni Palembang; Telp: (0711) 7826393 Fax: (0711) 7826398
	Jambi	Jl. Sumantri Brojonegoro No. 23 RT 11 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Telp: (0741) 668707 Fax: (0741) 668115
	Bengkulu	Jl. Ahmad Yani Rt. 004 / Rw 001 No.28 Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu-38119; Telp: (0736) 344541 Fax: (0736) 344249
	Lampung	Jl. Jend Sudirman No.128 RT.001 RW 001, Rawa Laut, Enggal. Bandar Lampung; Telp: (0721) 778511 Fax: (0721) 778513
	Pangkal Pinang	Jl. A Yani No. 11 H Pangkal Pinang – 33136; Telp: (0717) 432837 Fax: (0717) 436816

Kanwil Regional Offices	Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
III	Jakarta	Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, DKI Jakarta; Telp: (021) 6540409 Fax: (021) 6540410
	Pontianak	Perkantoran Pontianak Mall Blok A 18-19 Jl. Teuku Umar. Pontianak; Telp: (0561) 749095 Fax: (0561) 746148
	Serang	Ruko Cipare Blok A.1 Jl. Ahmad Yani No. 34 , Serang-Banten 42117; Telp: (0254) 228999 Fax: (0254) 229247
	Tangerang	Ruko Golden Boulevard Blok C No.1, Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan 15322, Banten; Telp: (021) 53160672 Fax: (021) 53160672
IV	Bandung	Jl. Soekarno Hatta Km. 12 No. 722, Gedebage, Bandung, Jawa Barat; Telp: (022) 7816267 Fax: (022) 7801890
	Cirebon	Jl. Dr Sudarsono No. 10 B rt.004 Rw005, Kesambi- Kota Cirebon, Jawa Barat; Telp: (0231) 8336851 Fax: (0231) 8336850
	Purwakarta	Jl.Terusan Ibrahim Singadilaga No.55 Kel. Purwamekar, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta Jawa Barat; Telp: (0264) 8304002 Fax: (0264) 8304002
	Sukabumi	Komplek Ruko Bounty Jl. Siliwangi Blok E No.90 Rt.05/02 Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi 43113; Telp: (0266) 6223811 Fax: (022) 6223868
	Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 199 A Ruko No. 6 F Kel. Lengkongsari Tawang-Tasikmalaya; Telp: (0265) 2354445 Fax: (0265) 314169
V	Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A Semarang; Telp: (024) 7614136/ 7610129 Fax: (024) 7614138
	Yogyakarta	Jl. HOS Cokroaminoto No.161 A, Tegalrejo Kota Yogyakarta - 55244; Telp: (0274) 5012288 / 5012323 Fax: (0274) 5012545
	Solo	Jl. Dr. Rajiman No.531 A, Kelurahan Laweyan, Kec Laweyan – Surakarta; Telp: (0271) 719807 Fax: (0271) 723564
	Purwokerto	Ruko Centrum Unit A Jl. Komisaris Bambang Suprapto No. 21-23 Kel. Purwokerto Lor, Kec.Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Jawa Tengah; Telp: (0281) 6572555 Fax: (0281) 6574755
	Kudus	Jl. Jend. Sudirman Ruko Sudirman Square No. 12-14 Kel. Nganguk, Kec Kota Kudus. Jawa Tengah – 59312; Telp: (0291) 430757 Fax: (0291) 430758
	Pekalongan	Komplek Ruko Diponegoro Jl. Diponegoro No.38,Dukuh, Pekalongan Utara. Pekalongan – 51146; Telp: (0285) 4420770 Fax: (0285) 4420777
VI	Surabaya	Jl. Diponegoro No. 171. Surabaya, Telp: (031) 5679848 Fax: (031) 5679592
	Kediri	Jl. Kilisuci No.85 Kota Kediri; Telp: (0354) 7418826Fax: (0354) 680881
	Banyuwangi	Jl. Letjend S. Parman No. 116, Kel. Sumberrejo, Kec Banyuwangi, Kab Banyuwangi – 68419; Telp: (0333) 418140 Fax: (0333) 425804
	Malang	Jl. Letjend S. Parman No. 56 Blok A-4 Malang; Telp: (0341) 4377377 Fax: (0341) 4378177
	Madiun	Jl. Thamrin No. 38, Madiun – 63117; Telp: (0351) 4472250 Fax: (0351) 4472249
VII	Denpasar	Jl. Hangtuah No. 76 Denpasar; Telp: (0361) 286854 Fax: (0361) 286709
	Mataram	Ruko 4 Jl. Sriwijaya No. 179. Mataram; Telp: (0370) 644573/ 644747 Fax: (0370) 644572
	Sumbawa Besar	Jl. Hasanuddin No. 82 kec. Sumbawa Besar NTB; Telp: (0371) 2629239 Fax: (0371) 24525
	Kupang	Jl. Jenderal Soeharto No.110 Blok.A, RT 20, RW 008, Kel Naikolan, Kec Maulafa, Kota Kupang-NTT 85111; Telp: (0380) 8553899 Fax: (0380) 8554088
VIII	Samarinda	Jl. A Yani No. 37 Kec. Sungai Pinang, Kel. Sungai Pinang Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur 75117; Telp: (0541) 747608 Fax: (0541) 206578
	Banjarmasin	Jl. Gatot Subroto No.17 B Kuripan Banjarmasin-70236; Telp: (0511) 3273345 Fax: (0511) 3273435
	Palangkaraya	Jl. Christopel Mihing No. 31 Palangkaraya; Telp: (0536) 3226895 Fax: (0536) 3242394
	Tarakan	Jl. Jend Sudirman RT.04 Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Tarakan - 77113; Telp: (0551) 30448 Fax: (0551) 30494
	Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No.11. Balikpapan - 76114; Telp: (0542) 8504032 Fax: (0542) 8504033

Kanwil Regional Offices	Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
IX	Makassar	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140, Makassar, Sulawesi Selatan; Telp: (0411) 873031
	Gorontalo	Jl. HB Jassin No.218, Kel. Libuo Kec. Dungingi. Kota Gorontalo; Telp: (0435) 828003 Fax: (0435) 828002
	Mamuju	Jl. Marthadinata No.11. Mamuju; (0426) 2324979
	Ambon	Jl Philip Latumahina No.16 Ruko 1 Ambon 97126; Telp: (0911) 351770
	Ternate	Jl. Inpres No. 7 Ubo – Ubo Kel. Tabona, Ternate Selatan; (0921) 3122793 Fax: (0921) 3122739
	Jayapura	Pusat Bisnis Jayapura Ruko Pasifik Permai Blok H No. 17 Kel. Bhayangkara, Kec. Jayapura Utara; Telp: (0967) 524424 Fax: (0967) 524423
	Manokwari	Jl. Trikora, Wosi Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, Papua Barat; Telp: (0986) 214184 Fax: (0986) 214185
	Palu	Jl. Dewi Sartika No. 58 C, Palu 94121, Sulawesi Tengah; Telp: (0451) 488266 Fax: (0451) 488266
	Kendari	Jl. La Ode Hadi No 56 B, Kendari 93118, Sulawesi Tenggara; Telp (0401) 3196780 Fax: (0401) 3196764
	Manado	Jl. R.E. Marthadinata No. 43, Manado, Sulawesi Utara; Telp: (0431) 865194/ 865198 Fax: (0431) 873758
	Bitung	Jl. Sam Ratulangi No. 1, Bitung, Sulawesi Utara; Telp: (0438) 35939 Fax: (0438) 35939
	Pare-pare	Jl. Andi Mappatola No. 30-C, Parepare, Sulawesi Selatan; Telp: (0421) 2914592 Fax: (0421) 2914592
	Palopo	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 90 Kec. Wara Utara, Kota Palopo. Provinsi Sulawesi Selatan - 91911; Telp: (0471) 23006 Fax: (0471) 326925
	Sorong	Jl. Basuki Rahmat Km. 9, Sorong, Papua Barat; Telp: (0951) 329081 Fax: (0951) 329070

KANTOR UNIT PELAYANAN (KUP)
SERVICE UNIT OFFICES

Kanwil Regional Offices	KUP Service Unit Offices	Alamat Address
I	Rantau Prapat	Jl. MH Thamrin No. 04 Rantau Prapat, Sumatera Utara; Telp: 0624-326333 Fax: 0624-326222
	Mandailing Natal	Jl. Willem Iskandar No. 81 Panyabungan – 22913; Telp: 0636-3221148 Fax: 0636-3221774
	Dumai	Jl. Jendral Sudirman No.391. Dumai Kota; Telp: 0765-439037 Fax: (0765) 439037
II	Lubuk Linggau	Jl. Yos Sudarso RT 001 No. 366, Kel. Majapahit, Kec. Lubuk Linggau Timur 1, Sumatra Selatan; Telp: (0733) 3281182 Fax: (0733) 3281182
III	Bogor	Jl. Pajajaran No. 28, Warung Jambu, Bogor, Jawa Barat; Telp: (0251) 7564211, Fax: (0251) 7559121
	Cibinong	Ruko Cibinong City Center, Jl. Tegar Beriman 1 Blok A No. 29, Cibinong, Bogor, Jawa Barat; Telp: (021) 29335250; Telp: (021) 82691292
	Bekasi	Komplek Ruko Sentra Bisnis Bekasi Mustika Pura Blok A Nomor 7Jl. Insinyur Haji Juanda No.137 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Bekasi
IV	Cimahi	Jl. Amir Mahmud No. 572B-C, RT02/RW02, Padasuka, Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat, Telp: (022) 20661506 Fax: (022) 20661522
V	Magelang	Ruko Metro Square - Mertoyudan, Jl. Raya Magelang-Yogyakarta, Magelang, Jawa Tengah; Telp: (0293) 3201767 Fax: (0293) 3201770
	Cilacap	Jl Jend. Sudirman No 17, Cilacap, Telp: (0282) 531194/ 532010 Fax: (0282) 531115
VI	Surabaya Kota	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 360 b. Surabaya; Telp: (031) 87858114 Fax: (031) 87858114
	Pamekasan	Jl. Jokotole No.26, Barurambat Kota, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan; Telp: (0324) 3510118 Fax: (0324) 3510118
	Jember	Ruko Gajah Mada Square Blok A-22 Jl. Gajah Mada No. 187. Jember; Telp: (0331) 4431044 Fax: (0331) 4431044
	Bojonegoro	Jl. WR. Supratman No.15, Bojonegoro – 62111; Telp: (0353) 2898420 Fax: (0353) 2899525
VIII	Pangkalan Bun	Jl. Iskandar Kec.Arut Selatan, Kab Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74113, Telp: (0532) 2074989 Fax: (0532) 2074992
IX	Watampone	Jl. Ahmad Yani No. 29 B, Kel. Jeppe'e, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Watampone, Sulawesi Selatan; Telp: (0481) 2921375 Fax: (0481) 2921479

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN
Information on the Company's Website



Perusahaan memiliki situs web resmi dengan alamat www.jamkrindo.co.id. Situs Web ini berisi informasi seputar korporasi Perusahaan. Situs web ini menjadi portal yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perusahaan kepada khalayak luas.

The company has an official website with the address www.jamkrindo.co.id. This Website contains information about the Company. This website is a portal that can be accessed openly, with the aim of providing comprehensive information about the Company to a broad audience.

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Information
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu Shareholder information up to the individual final owner	√	Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu telah tersedia di situs web Perusahaan. Shareholder information up to individual final owners is available on the Company's website.
Isi Kode Etik Code of Conduct	√	Informasi terkait isi Kode Etik telah tersedia di situs web Perusahaan. Information regarding the contents of the Code of Conduct is available on the Company's website.
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) Separate annual financial statements (for the last 5 years)	√	Informasi laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) telah tersedia di situs web Perusahaan. Information on separate annual financial statements (for the last 5 years) are available on the Company's website.
Profil Dewan Pengawas dan Direksi Profile of the Board of Supervisor Council and Board of Directors	√	Profil Dewan Pengawas dan Direksi telah tersedia di situs web Perusahaan. The profiles of the Board of Supervisor Council and the Board of Directors are available on the Company's website.

√: tersedia pada situs web Perusahaan / available on the Company's website
x: belum tersedia pada situs web Perusahaan / not yet available on the Company's website

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNAL

Education and/or Training of The Board of Supervisor Council, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

Perusahaan memberikan kesempatan yang sebesarbesarnya bagi semua insan Jamkrindo, tak terkecuali Dewan Pengawas, Direksi, Anggota Komite-Komite, dan satuan kerja lainnya untuk selalu dapat mengikuti perkembangan hal-hal terkait dunia usaha, industri penjaminan, serta peraturan dan perundang-undangan terkait. Perusahaan pun memfasilitasinya melalui kegiatan program pengembangan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi masing-masing.

The company provides a great opportunity for all Jamkrindo personnel, including the Board of Supervisor Council, Board of Directors, Members of Committees, and other work units to always be able to keep abreast of matters related to the business world, the guarantee industry, and related laws and regulations. The company also facilitates it through the activities of competency development programs in the form of seminars, workshops, or other activities that can improve their knowledge and competencies.

Nama dan Jabatan Names and Positions	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place / Date	Penyelenggara Organizer
Dewan Pengawas / Board of Supervisor Council				
Sri Mulyanto Ketua/Chairman	Diklat fungsional Functional training	*Full Day Seminar Auditor's Talk* untuk pengutuatan peran Satuan Pengawas Internal (SPI) BUMN Auditor's Talk Full Day Seminar to Strengthen the Role of SOEs Internal Control Unit	Jakarta, 9 Mei 2019 Jakarta, May 9, 2019	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Corruption Eradication Commission
	Diklat Teknis Technical Training	*Innovation and Cooperation in Financing SMEs* Innovation and Cooperation in Financing SMEs	Brazil, 26 - 27 September 2019 Brazil, September 26-27, 2019	Forum ke - XXIV Ibero-American Forum on Guarantee and Financing System for SME The XXIV Ibero-American Forum on Guarantee and Financing System for SMEs
	Diklat fungsional Functional training	Penyusunan *Key Performance Indicators* (KPI) RKAP Tahun 2020 Preparation of the 2020 RKAP Key Performance Indicators (KPI)	Jakarta, 5 November 2019 Jakarta, November 5, 2019	Kementrian BUMN The Ministry of SOEs
	Diklat fungsional Functional training	Komisaris Profesional Professional Commissioners	Jakarta, 20 - 21 November 2019 Jakarta, November 20-21, 2019	Inti Pesan Pariwara
Diah Natalisa Anggota Dewan Pengawas/ Member of Board of Supervisor Council	Diklat fungsional Functional training	Komisaris Profesional Professional Commissioners	Jakarta, 20 - 21 November 2019 Jakarta, November 20-21, 2019	Inti Pesan Pariwara
Ari Wahyuni Anggota Dewan Pengawas/ Member of Board of Supervisor Council	Diklat *Leadership* Leadership Training	Digital Leadership	Jakarta, 3 - 4 Oktober 2019 Jakarta, October 3 – 4, 2019	PT Pertamina Training & Consulting
	Diklat *Leadership* Leadership Training	From Evolution to Revolution	Jakarta, 13 - 15 November 2019 Jakarta, November 13-15, 2019	Sustainable and Respomsible Investing (SRI)
	Diklat fungsional Functional training	Komisaris Profesional Professional Commissioners	20 - 21 November 2019 November 20-21, 2019	Inti Pesan Pariwara

Nama dan Jabatan Names and Positions	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place / Date	Penyelenggara Organizer
Noor Ida Khomsiyati Anggota Dewan Pengawas/ Member of Board of Supervisor Council	Diklat Teknis/ Functional training	Refleksi Konstitusi di Era 4.0 dalam Penguatan Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi Reflections on the Constitution in Era 4.0 in Strengthening Law Enforcement of Corporate Criminal Liability in Corruption	Jakarta, 24-04-2019 Jakarta, April 24, 2019	Universitas Brawijaya Brawijaya University
	Diklat Teknis/ Functional training	Innovation and Cooperation in Financing SMEs	Brazil, 26 - 27 September 2019 Brazil, September 26-27, 2019	Forum ke - XXIV Ibero-American Forum on Guarantee and Financing System for SME The XXIV Ibero-American Forum on Guarantee and Financing System for SMEs
	Diklat fungsional/ Functional training	Penyusunan *Key Performance Indicators* (KPI) RKAP Tahun 2020 Preparation of the 2020 RKAP Key Performance Indicators (KPI)	Jakarta, 5 November 2019 Jakarta, November 5, 2019	Kementrian BUMN The Ministry of SOEs
	Diklat fungsional/ Functional training	Komisaris Profesional Professional Commissioners	Jakarta, 20 - 21 November 2019 Jakarta, November 20-21, 2019	Inti Pesan Pariwara
M Muchlas Rowi Anggota Dewan Pengawas/ Member of Board of Supervisor Council	Diklat fungsional/ Functional training	Penyusunan *Key Performance Indicators* (KPI) RKAP Tahun 2020 Preparation of the 2020 RKAP Key Performance Indicators (KPI)	Jakarta, 5 November 2019 Jakarta, November 5, 2019	Kementrian BUMN The Ministry of SOEs
	Diklat fungsional/ Functional training	Komisaris Profesional Professional Commissioners	20 - 21 November 2019 November 20-21, 2019	Inti Pesan Pariwara
Direksi / Board of Directors				
Randi Anto Direktur Utama/ President Director	Diklat fungsional/ Functional training	*Full Day Seminar Auditor's Talk* untuk penguatan peran Satuan Pengawas Internal (SPI) BUMN". Full-Day Seminar on Auditor's Talk to Strengthen the Role of SOEs' Internal Control Unit (SPI) ".	Jakarta, 9 Mei 2019 Jakarta, May 9, 2019	Kementrian BUMN The Ministry of SOEs
	Diklat fungsional/ Functional training	Indonesia Risk Management Outlook	Bali, 12 November 2019 Bali, November 12, 2019	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Indonesian Banking Development Institute
Amin Mas'udi Direktur Bisnis Penjaminan/ Director of Business of Guarantee	Diklat fungsional/ Functional training	*Workshop* Perumusan Peta Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Penjaminan Workshop on Formulation of Competency Maps for the Design of Indonesian National Work Competency Standards (RSKKNI) of the Guarantee Field	Jakarta, 21 Maret 2019 Jakarta, March 21, 2019	OJK/FSA
	Diklat fungsional/ Functional training	The 5th International Certified Wealth Manager (CWM) & Continuing Professional Development (CDP) Executive Program 2019	Rusia, 14-21 September 2019 Russia, September 14-21, 2019	Certified Wealth Managers' Association
Kadar Wisnuwarman Direktur Operasional dan Jaringan/Director of Opeerations and Network	Diklat fungsional/ Functional training	*Workshop* Perumusan Peta Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Penjaminan Workshop on Formulation of Competency Maps for the Design of Indonesian National Work Competency Standards (RSKKNI) of the Guarantee Field	Jakarta, 21 Maret 2019 Jakarta, March 21, 2019	OJK/FSA
	Diklat fungsional/ Functional training	The 5th International Certified Wealth Manager (CWM) & Continuing Professional Development (CDP) Executive Program 2019	Rusia, 14-21 September 2019 Russia, September 14-21, 2019	Certified Wealth Managers' Association

Nama dan Jabatan Names and Positions	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place / Date	Penyelenggara Organizer
Sulis Usdoko Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan/ Director of HR Management, General Affairs and Compliance	Diklat fungsional/ Functional training	*Workshop* Perumusan Peta Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Penjaminan Workshop on Formulation of Competency Maps for the Design of Indonesian National Work Competency Standards (RSKKNI) of the Guarantee Field	Jakarta, 21 Maret 2019 Jakarta, March 21, 2019	OJK/FSA
	Diklat Kepemimpinan Leadership Training	HR Director 2019	Jakarta, 19 Februari 2019 Jakarta, February 19, 2019	PT. Intipesan Pariwara
	Diklat fungsional/ Functional training	Membangun Bangsa Melalui Penguatan Sinergi & Solidaritas BUMN Building the Nation through Strengthening Synergy & Solidarity of SOEs	Jakarta, 26 Maret 2019 Jakarta, March 26, 2019	FHCI BUMN
	Diklat fungsional/ Functional training	Seminar *Digital Transformation in Insurance Industry to Win Market* Seminar on Digital Transformation in the Insurance Industry to Win Market	Jakarta, 15 Agustus 2019 Jakarta, August 15, 2019	National-Re
	Diklat fungsional/ Functional training	Seminar *Winning in The Digital Age, Building Digital and Agile Organization Capabilities* Seminar on Winning in The Digital Age, Digital Building and Agile Organization Capabilities	Jakarta, 24-25 Oktober 2019 Jakarta, October 24-25, 2019	GML Performance Consulting
	Diklat Leadership Leadership Training	Peter Drucker Forum "The Power of Ecosystem"	Austria, 20-22 November 2019 Austria, November 2-22, 2019	Peter Drucker Forum
I. Rusdonobanu Direktur Keuangan, Investasi & Manajemen Risiko/Director of Finance, Investment and Risk Management)	Diklat fungsional/ Functional training	*Workshop* Program PKBL BUMN Tahun 2019 Workshop on SOEs PKBL Program 2019	15 Maret 2019 March 15, 2019	Kementrian BUMN The Ministry of SOEs
	Diklat fungsional/ Functional training	Innovation and Cooperation in Financing SMEs	26 - 27 September 2019 September 26-27, 2019	Forum ke - XXIV Ibero-American Forum on Guarantee and Financing System for SME The XXIV Ibero-American Forum on Guarantee and Financing System for SMEs
	Diklat fungsional/ Functional training	The 1st ASEAN CPA Conference 2019	Bali, 16-17 Oktober 2019 Bali, October 16-17, 2019	CPA Asean
	Diklat fungsional/ Functional training	*Workshop* Penyusunan KPI RKAP 2020 oleh BUMN Workshop on Preparation of the 2020 RKAP KPI by SOEs	Jakarta, 5 November 2019 Jakarta, November 5, 2019	Kementrian BUMN The Ministry of SOEs
	Diklat Kepemimpinan Leadership Training	Seminar Economic Outlook 2020 "Strategi Penguatan Kapabilitas SDM UMKM di Era Digital Dalam Menghadapi Persaingan Global Economic Outlook 2020 Seminar "Strategy for Strengthening the Capability of MSME Capabilities in the Digital Era in Facing Global Competition	Jakarta, 29 November 2019 Jakarta, November 29, 2019	Jamkrindo
Komite / Committees				
Alvin Nur Widjajanti Sekretaris Komite/ Secretary of the Committee	Diklat Teknis/ Functional training	Digital Leadership	Jakarta, 3-4 Oktober 2019 Jakarta, October 3-4, 2019	Pertamina Training & Consulting

Nama dan Jabatan Names and Positions	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place / Date	Penyelenggara Organizer
Safari Mirza Komite Manajemen Risiko/Risk Management Committee	Diklat fungsional/ Functional training	Certification in Audit Committee Practices	Jakarta, 5-7 November 2019 Jakarta, November 5-7, 2019	Indonesian Institute of Audit Committee
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary				
Abdul Bari Sekretaris Perusahaan) / (*Corporate Secretary)*		"Business Coaching & Strategic Leadership"	Balai Pustaka, 14 - 15 Februari 2020 Balai Pustaka, February 14-15, 2020	Perum Jamkrindo
		Workshop PSAK 71 PSAK 71 Workshop	Kantor Pusat, 26 September 2019 Head Office, September 26, 2019	Perum Jamkrindo
		Pembekalan Manajemen Risiko level 3 Kadiv, Pinwil, Pinca Level 3 Risk Management Briefing for Division Heads, Regional Leaders, Branch Managers	Kantor Pusat, 14 - 15 November 2019 Head Office, November 14-15, 2019	Perum Jamkrindo
		Uji Sertifikasi Manajemen Risiko level 3 Kadiv, Pinwil, Pinca Level 3 Risk Management Certification Test for Division Heads, Regional Leaders, Branch Managers	Kantor Pusat, 16 November 2019 Head Office, November 16, 2019	Perum Jamkrindo
Anggit Murdiwibowo Kepala Bagian Kesekretariatan)/ *(Head of Secretariat Section)*		Professional Communication Batch I	Kantor Pusat, 5 - 6 Maret 2020 Head Office, March 5-6, 2019	Perum Jamkrindo
		Hari Mutu *HR Director Summit* Quality Day of HR Director Summit	Kantor Pusat, 22 Februari 2019 Head Office, February 22, 2019	Perum Jamkrindo
		Uji Sertifikasi Manajemen Risiko level 1 Kabag Level 1 Risk Management Certification Test for Section Heads	Kantor Pusat, 16 November 2019 Head Office, November 16, 2019	Perum Jamkrindo
Wildan Ramadhan Firdaus		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 Level 2 Risk Management Certification Briefing	Kantor Pusat, 1-2 Agustus 2019 Head Office, August 1-2, 2019	Perum Jamkrindo
		Uji Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 Level 2 Risk Management Certification Test	Kantor Pusat, 24 Agustus 2019 Head Office, August 24, 2019	Perum Jamkrindo
		Professional Communication Umum & Hukum General & Legal Professional Communication	Kantor Pusat, 25 - 26 Januari 2020 Head Office, January 25-26, 2020	Perum Jamkrindo
		Hari Mutu *Consultative Marketing* The Quality Day of Consultative Marketing	Kantor Pusat, 11 January 2019 Head Office, January 11, 2019	Perum Jamkrindo
		Healthy Lifestyle	Kantor Pusat, 4 January 2019 Head Office, January 4, 2019	Perum Jamkrindo

Nama dan Jabatan Names and Positions	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place / Date	Penyelenggara Organizer
Anzil Firdausi Nuzula		Hari Mutu *Review* Temuan SPI The Quality Day of the SPI Findings Review	5 Juli 2019 July 5, 2019	Perum Jamkrindo
		Menjadi Humas BUMN Handal Become Reliable SOEs Public Relations	Bandung, 21 - 22 Februari 2020 Bandung, February 21-22, 2020	Intrinsics
		Pelatihan Penulisan & Kehumasan Writing & Public Relations Training	Balai Pustaka, 26 Januari 2019 Balai Pustaka, January 26, 2019	Perum Jamkrindo
		Healthy Lifestyle	Kantor Pusat, 4 Januari 2019 Head Office, January 4, 2019	Perum Jamkrindo
Dzikri Maulana		Manajemen Perkantoran Modern 4.0 Office Management of Modern 4.0	Jakarta, 26 April 2019 Jakarta, April 26, 2019	F2N Human Development Centre dan PT Swandra Mitra Konsultan F2N Human Development Centre and PT Swandra Mitra Konsultan
Cahyadi Haryo Pratomo		Manajemen Perkantoran Modern 4.0 Office Management of Modern 4.0	Jakarta, 26 April 2019 Jakarta, April 26, 2019	F2N Human Development Centre dan PT Swandra Mitra Konsultan F2N Human Development Centre and PT Swandra Mitra Konsultan
		Healthy Lifestyle	Kantor Pusat, 4 Januari 2019 Head Office, January 4, 2019	Perum Jamkrindo
Levinda Juliana		Manajemen Perkantoran Modern 4.0 Office Management of Modern 4.0	Jakarta, 26 April 2019 Jakarta, April 26, 2019	F2N Human Development Centre dan PT Swandra Mitra Konsultan F2N Human Development Centre and PT Swandra Mitra Konsultan
		Healthy Lifestyle	Kantor Pusat, 4 Januari 2019 Head Office, January 4, 2019	Perum Jamkrindo
Rully Arieffandy		Hari Mutu Sosialisasi Aplikasi SIPP The Quality Day of the SIPP Application Socialization	Kantor Pusat, 22 Maret 2019 Head Office, March 22, 2019	Perum Jamkrindo
		Hari Mutu Pengenalan produk-produk Asuransi dan Potensi Sinergi Bisnis Penjaminan The Quality Day for Introduction of Insurance products and the Guarantee Business Synergy Potential	Kantor Pusat, 25 Januari 2019 Head Office, January 25, 2019	Perum Jamkrindo
		Healthy Lifestyle	Kantor Pusat, 4 Januari 2019 Head Office, January 4, 2019	Perum Jamkrindo
Lulu Drusyita		Healthy Lifestyle	Kantor Pusat, 4 Januari 2019 Head Office, January 4, 2019	Perum Jamkrindo

Nama dan Jabatan Names and Positions	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place / Date	Penyelenggara Organizer
Audit Internal/Satuan Pengawasan Intern / Internal Audit/Internal Control Unit				
Karinu Aji Wira Kusuma		Pembekalan Sertifikasi Manajamen Risiko Level 1 Level 1 Risk Management Certification Briefing	Kantor Pusat, 2-3 Mei 2019 Head Office, May 2-3, 2019	LSPP
		Ujian Sertifikasi Manajamen Risiko Level 1 Level 1 Risk Management Certification Test	Kantor Pusat, 4 Mei 2019 Head Office, May 4, 2019	LSPP
		Professional Communication Batch IV	Kantor Pusat, 25 - 26 Maret 2019 Head Office, March 25-26, 2019	Perum Jamkrindo
		Uji Sertifikasi Manajemen Risiko level 1 Kabag Level 1 Risk Management Certification Test for Section Heads	Kantor Pusat, 7 Desember 2019 Head Office, December 7, 2019	Perum Jamkrindo
Faisal Arief Sentosa		Hari Mutu Perdir SMK 3 No.3 Perdir 4 VIII 2018 The Quality Day of Directors' Regulation No. 3 on Occupational Health and Safety Management System, Directors' Regulation 4 VIII 2018	Kantor Pusat, 28 Juni - 28 Juli 2019 Head Office, June 28-July 28, 2019	Perum Jamkrindo
		QIA Manajerial Managerial QIA	Jakarta, 18 - 27 Maret 2019 Jakarta, March 18-27, 2019	YPIA
Laila Wijayanti		Hari Mutu Perdir SMK 3 No.3 Perdir 4 VIII 2018 The Quality Day of Directors' Regulation No. 3 on Occupational Health and Safety Management System, Directors' Regulation 4 VIII 2018	Kantor Pusat, 28 Juni - 28 Juli 2019 Head Office, June 28-July 28, 2019	Perum Jamkrindo
		Hari Mutu Produk Pegadaian The Quality Day of Pawnshop Product	Kantor Pusat, 16 Juni 2019 Head Office, June 16, 2019	Perum Jamkrindo
Dadang Ary Aviyanto		2019 II A Indonesia National Conference	Jawa Tengah, 24 - 25 Juli 2019 Central Java, July 24-25, 2019	The Institute of Internal Auditors Indonesia
		Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 Pinca Level 2 Risk Management Certification for Branch Managers	Kantor Pusat, 7 September 2019 Head Office, September 7, 2019	Perum Jamkrindo
		In House Training Workshop Strategi Penyusunan RKAP In House Training, Workshop on RKAP Preparation Strategy	Kantor Pusat, 17 - 18 September 2019 Head Office, September 17-18, 2019	Perum Jamkrindo
		Workshop PSAK 71 PSAK 71 Workshop	Kantor Pusat, 26 September 2019 Head Office, September 26, 2019	Perum Jamkrindo

Nama dan Jabatan Names and Positions	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place / Date	Penyelenggara Organizer
Aditya Putra Darmawan		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 Kabag pusat Level 2 Risk Management Certification Briefing for Head Office's Section Heads	Kantor Pusat, 23 - 24 Mei 2019 Head Office, May 23-24, 2019	Perum Jamkrindo
		Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 Kabag pusat Level 2 Risk Management Certification Test for Central Section Heads	Kantor Pusat, 21 Juni 2019 Head Office, June 21, 2019	Perum Jamkrindo
		Pelantikan QIA dan Seminar Nasional Internal Audit 2019 Inauguration of QIA and the 2019 Internal Audit National Seminar	Palembang, 24 - 25 April 2019 Palembang, April 24-25, 2019	YPIA
		Professional Communication Batch II	Kantor Pusat, 8 - 9 Maret 2019 Head Office, March 8-9, 2019	Perum Jamkrindo
Michael Ranap Simanjuntak		QIA Manajerial Managerial QIA	Jakarta, 18 - 27 Maret 2019 Jakarta, March 18-27, 2019	YPIA
		Hari Mutu *Consultative Marketing* The Quality Day of Consultative Marketing	Kantor Pusat, 11 Januari 2019 Head Office, January 11, 2019	Perum Jamkrindo
		Healthy Lifestyle	Kantor Pusat, 4 Januari 2019 Head Office, January 4, 2019	Perum Jamkrindo
Agus Mirazul Fajar		Pelatihan *Awareness & Audit Internal* Awareness & Internal Audit Training	Jakarta, 13 - 15 Maret 2019 Jakarta, March 13-15, 2019	Sucofindo
		Professional Communication Batch I	Kantor Pusat, 5 - 6 Maret 2019 Head Office, March 5-6, 2019	Perum Jamkrindo
		Healthy Lifestyle	Kantor Pusat, 4 Januari 2019 Head Office, January 4, 2019	Perum Jamkrindo
		In House Training Workshop Strategi Penyusunan RKAP In House Training, Workshop on RKAP Preparation Strategy	Kantor Pusat, 17 - 18 September 2019 Head Office, September 17-18, 2019	Perum Jamkrindo
		Uji Sertifikasi Manajemen Risiko level 1 Kabag Level 1 Risk Management Certification Test for Section Heads	Kantor Pusat, 16 November 2019 Head Office, November 16, 2019	Perum Jamkrindo
Irmatati		Professional Communication Batch I	Kantor Pusat, 5 - 6 Maret 2019 Head Office, March 5-6, 2019	Perum Jamkrindo
		Uji Sertifikasi Manajemen Risiko level 1 Kabag Level 1 Risk Management Certification Test for Section Heads	Kantor Pusat 30 November 2019 Head Office, November 30, 2019	Perum Jamkrindo

Nama dan Jabatan Names and Positions	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place / Date	Penyelenggara Organizer
Andik Sugiarto		Hari Mutu Klaim Asuransi The Quality Day of Insurance Claims	Kantor Pusat, 15 Februari 2019 Head Office, February 15, 2019	Perum Jamkrindo
Aldhy Haryono Fachrial		Hari Mutu Audit & Auditor Hukum The Quality Day of the Legal audit and Auditor	Kantor Pusat, 1 Februari 2019 Head Office, February 1, 2019	Perum Jamkrindo
Muhammad Ilham		Hari Mutu Audit & Auditor Hukum The Quality Day of the Legal audit and Auditor	Kantor Pusat, 1 Februari 2019 Head Office, February 1, 2019	Perum Jamkrindo
Arif Syachroni		Healthy Lifestyle	Kantor Pusat, 4 Januari 2019 Head Office, January 4, 2019	Perum Jamkrindo
Manajemen Risiko / Risk Management				
Ceriandri Widuri		Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Level 2 Risk Management Certification Test	Kantor Pusat, 23 April 2019 Head Office, April 23, 2019	LSPP
		"Business Coaching & Strategic Leadership"	Kantor Pusat, 14 - 15 Februari 2019 Head Office, February 14-15, 2019	Perum Jamkrindo
		In House Training Workshop Strategi Penyusunan RKAP In House Training, Workshop on RKAP Preparation Strategy	Kantor Pusat, 17 - 18 September 2019 Head Office, September 17-18, 2019	Perum Jamkrindo
		Workshop PSAK 71 PSAK 71 Workshop	Kantor Pusat, 26 September 2019 Head Office, September 26, 2019	Perum Jamkrindo
		Pembekalan & Uji Sertifikasi Manajemen Risiko level 3 Kadiv, Pinwil, Pinca Level 3 Risk Management Certification Test for Division Heads, Regional Leaders, Branch Managers	Kantor Pusat, 14 - 16 November 2019 Head Office, November 14-16, 2019	Perum Jamkrindo

Nama dan Jabatan Names and Positions	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place / Date	Penyelenggara Organizer
Iwan Hermanto		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 Level 2 Risk Management Certification Briefing	Kantor Pusat, 1 - 2 Agustus 2019 Head Office, August 1-2, 2019	Perum Jamkrindo
		Uji Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 Level 2 Risk Management Certification Test	Kantor Pusat, 24 Agustus 2019 Head Office, August 24, 2019	Perum Jamkrindo
		Professional Communication Batch I	Kantor Pusat, 5 - 6 Maret 2019 Head Office, August 1-2, 2019	Perum Jamkrindo
		Healthy Lifestyle	Kantor Pusat, 4 Januari 2019 Head Office, January 4, 2019	Perum Jamkrindo
		Pelatihan dan Sertifikasi Pendamping UMKM MSME Companion Training and Certification	29 - 30 Agustus 2019 August 29-30, 2019	Global Entrepreneur Proffesional
		Uji Kompetensi Pendamping UMKM MSME Companion Competency Test	31 Agustus 2019 August 31, 2019	Global Entrepreneur Proffesional
Temy Uswatun Hasanah		Hari Mutu *Review* Temuan SPI The Quality Day of the SPI Findings Review	Kantor Pusat, 5 Juli 2019 Head Office, July 5, 2019	Perum Jamkrindo
		Hari Mutu *Consultative Marketing* The Quality Day of Consultative Marketing	Kantor Pusat, 11 Januari 2019 Head Office, January 11, 2019	Perum Jamkrindo
		Mengelola dan Mengukur Resiko Kredit (*Credit Scoring, Migration Analysis, Credit Portfolio*) Managing and Measuring Credit Risk (Credit Scoring, Migration Analysis, Credit Portfolio)	16 - 17 Mei 2019 May 16-17, 2019	Nayottama
Tito Tetrasuta		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 Kabag pusat Level 2 Risk Management Certification Briefing for Head Office's Section Heads	Kantor Pusat, 23 - 24 Mei 2019 Head Office, May 23-24, 2019	Perum Jamkrindo
		Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 Kabag pusat Level 2 Risk Management Certification Test for Central Section Heads	Kantor Pusat, 21 Juni 2019 Head Office, June 21, 2019	Perum Jamkrindo
		Healthy Lifestyle	Kantor Pusat, 4 Januari 2019 Head Office, January 4, 2019	Perum Jamkrindo
		Pelatihan dan Sertifikasi Pendamping UMKM MSME Companion Training and Certification	29-30 Agustus 2019 August 29-30, 2019	Global Entrepreneur Proffesional
		Uji Kompetensi Pendamping UMKM MSME Companion Competency Test	31 Agustus 2019 August 31, 2019	Global Entrepreneur Proffesional
Woro Sulistyo Wulandari		Hari Mutu Produk Pegadaian The Quality Day of Pawnshop Product	Kantor Pusat, 16 Juni 2019 Head Office, June 16, 2019	Perum Jamkrindo

Nama dan Jabatan Names and Positions	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place / Date	Penyelenggara Organizer
Doni Nugroho		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 Level 2 Risk Management Certification Briefing	Kantor Pusat, 1 - 2 Agustus 2019 Head Office, August 1-2, 2019	Perum Jamkrindo
		Uji Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 Level 2 Risk Management Certification Test	Kantor Pusat, 24 Agustus 2019 Head Office, August 24, 2019	Perum Jamkrindo
		Hari Mutu *Review* Temuan SPI The Quality Day of the SPI Findings Review	Kantor Pusat, 5 Juli 2019 Head Office, July 5, 2019	Perum Jamkrindo
		Mengelola dan Mengukur Resiko Kredit (*Credit Scoring, Migration Analysis, Credit Portfolio*) Managing and Measuring Credit Risk (Credit Scoring, Migration Analysis, Credit Portfolio)	16 - 17 Mei 2019 May 16-17, 2019	Nayottama
		Mengukur Resiko Operasional Perbankan (*Risk Tolerance & Risk Appetite,Risk Lost Event Database, Control Self Assessment, Key Operasional Risk Indicator*) Measuring Banking Operational Risk (Risk Tolerance & Risk Appetite, Risk Lost Event Database, Control Self Assessment, Key Operational Risk Indicators)	Hotel Ashley, 2 - 3 Mei 2019 Ashley Hotel, May 2-3, 2019	Nayottama
		Hari Mutu Transformasi VUCA The Quality Day of VUCA Transformation	Kantor Pusat, 5 April 2019 Head Office, April 5, 2019	Perum Jamkrindo
		Professional Communication Batch I	Kantor Pusat, 5 - 6 Maret 2019 Head Office, March 5-6, 2019	Perum Jamkrindo
		Hari Mutu *HR Director Summit* The Quality Day of HR Director Summit	Kantor Pusat, 22 Februari 2019 Head Office, February 22, 2019	Perum Jamkrindo
		Hari Mutu Pengenalan produk-produk Asuransi dan Potensi Sinergi Bisnis Penjaminan The Quality Day for Introduction of Insurance products and the Guarantee Business Synergy Potential	Kantor Pusat, 25 Januari 2019 Head Office, January 25, 2019	Perum Jamkrindo
		Pelatihan 2 *Days Workshop* IFRS 9 (PSAK 71) *Credit Risk Modelling* 2 Days Workshop of IFRS 9 (PSAK 71) of Credit Risk Modeling	3 - 4 Juli 2019 July 3-4, 2019	Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Indonesian Economists Association
Danang Agus Wahyudi		Hari Mutu Perdir SMK 3 No.3 Perdir 4 VIII 2021 The Quality Day of Directors' Regulation No. 3 on Occupational Health and Safety Management System, Directors' Regulation 4 VIII 2021	Kantor Pusat, 28 Juli 2019 Head Office, July 28, 2019	Perum Jamkrindo
		Hari Mutu Klaim Asuransi The Quality Day of Insurance Claims	Kantor Pusat, 15 Februari 2019 Head Office, February 15, 2019	Perum Jamkrindo
		Healthy Lifestyle	Kantor Pusat, 4 Januari 2019 Head Office, April 23, 2019	Perum Jamkrindo

Nama dan Jabatan Names and Positions	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place / Date	Penyelenggara Organizer
Tito Tetrasuta		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 Kabag pusat Level 2 Risk Management Certification Briefing for Head Office's Section Heads	Kantor Pusat, 23 - 24 Mei 2019 Head Office, May 23-24, 2019	Perum Jamkrindo
		Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 Kabag pusat Level 2 Risk Management Certification Test for Central Section Heads	Kantor Pusat, 21 Juni 2019 Head Office, June 21, 2019	Perum Jamkrindo
		Healthy Lifestyle	Kantor Pusat, 4 Januari 2019 Head Office, January 4, 2019	Perum Jamkrindo
		Pelatihan dan Sertifikasi Pendamping UMKM MSME Companion Training and Certification	29-30 Agustus 2019 August 29-30, 2019	Global Entrepreneur Proffesional
		Uji Kompetensi Pendamping UMKM MSME Companion Competency Test	31 Agustus 2019 August 31, 2019	Global Entrepreneur Proffesional
Woro Sulistyo Wulandari		Hari Mutu Produk Pegadaian The Quality Day of Pawnshop Product	Kantor Pusat, 16 Juni 2019 Head Office, June 16, 2019	Perum Jamkrindo
Aneka Prasyanti Wahyu Sejati		Mengelola dan Mengukur Resiko Kredit (*Credit Scoring, Migration Analysis, Credit Portfolio*) Managing and Measuring Credit Risk (Credit Scoring, Migration Analysis, Credit Portfolio)	Hotel Ashley, 2 - 3 Mei 2019 Ashley Hotel, MAY 2-3, 2019	Nayottama
		Hari Mutu Sosialisasi Aplikasi SIPP The Quality Day of the SIPP Application Socialization	Kantor Pusat, 22 Maret 2019 Head Office, March 22, 2019	Perum Jamkrindo
		In House Training Workshop Strategi Penyusunan RKAP In House Training, Workshop on RKAP Preparation Strategy	Kantor Pusat, 17 - 18 September 2019 Head Office, September 17-18, 2019	Perum Jamkrindo
Benny Satria		Powering Indonesian SMEs with Technology	Jakarta, 25 April 2019 Jakarta, April 25, 2019	Mekari Confrence
		Hari Mutu *Audit & Auditor* Hukum The Quality Day of the Legal audit and Auditor	Kantor Pusat, 1 Februari 2019 Head Office, February 1, 2019	Perum Jamkrindo
		Hari Mutu *Consultative Marketing* The Quality Day of Consultative Marketing	Kantor Pusat, 11 Januari 2019 Head Office, January 11, 2019	Perum Jamkrindo
		Healthy Lifestyle	Kantor Pusat, 4 Januari 2019 Head Office, January 4, 2019	Perum Jamkrindo
		Pelatihan dan Sertifikasi Pendamping UMKM MSME Companion Training and Certification	29 - 30 Agustus 2019 August 29-30, 2019	Global Entrepreneur Proffesional
		Uji Kompetensi Pendamping UMKM MSME Companion Competency Test	31 Agustus 2019 August 31, 2019	Global Entrepreneur Proffesional

Nama dan Jabatan Names and Positions	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place / Date	Penyelenggara Organizer
Fajar Pratama Damopolii		Powering Indonesian SMEs with Technology	Jakarta, 25 April 2019 Jakarta, April 25, 2019	Mekari Confrence
		Hari Mutu Transformasi VUCA The Quality Day of VUCA Transformation	Kantor Pusat, 5 April 2019 Head Office, April 5, 2019	Perum Jamkrindo
		Hari Mutu Klaim Asuransi The Quality Day of Insurance Claims	Kantor Pusat, 15 Februari 2019 Head Office, February 15, 2019	Perum Jamkrindo
		Hari Mutu *Three Lines of Defense* The Quality Day of Three Lines of Defense	Kantor Pusat, 1 Januari 2019 Head Office, January 1, 2019	Perum Jamkrindo
		Pelatihan dan Sertifikasi Pendamping UMKM MSME Companion Training and Certification	29 - 30 Agustus 2019 August 29-30, 2019	Global Entrepreneur Proffesional
		Uji Kompetensi Pendamping UMKM MSME Companion Competency Test	31 Agustus 2019 August 31, 2019	Global Entrepreneur Proffesional
Wulanita Kuswotanti		Hari Mutu Transformasi VUCA The Quality Day of VUCA Transformation	Kantor Pusat, 5 April 2019 Head Office, April 5, 2019	Perum Jamkrindo
		Hari Mutu *Three Lines of Defense* The Quality Day of Three Lines of Defense	Kantor Pusat, 1 Januari 2019 Head Office, January 1, 2019	Perum Jamkrindo
		Pelatihan dan Sertifikasi Pendamping UMKM MSME Companion Training and Certification	29 - 30 Agustus 2019 August 29-30, 2019	Global Entrepreneur Proffesional
		Uji Kompetensi Pendamping UMKM MSME Companion Competency Test	31 Agustus 2019 August 31, 2019	Global Entrepreneur Proffesional
Adha Nur Syukur		Hari Mutu Klaim Asuransi The Quality Day of Insurance Claims	Kantor Pusat, 15 Februari 2019 Head Office, February 15, 2019	Perum Jamkrindo
		Healthy Lifestyle	Kantor Pusat, 4 Januari 2019 Head Office, January 4, 2019	Perum Jamkrindo
Iwan Hermanto		*In House Training Workshop* Strategi Penyusunan RKAP In House Training, Workshop on RKAP Preparation Strategy	Kantor Pusat, 17 - 18 September 2019 Head Office, September 17-18, 2019	Perum Jamkrindo

Jamkrindo

Jaminan Kredit Indonesia



LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT
2019



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIST

106 Tinjauan Perekonomian
Economic Review

118 Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Operating Overview per Business Segment

132 Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Entitas Anak)
Performance of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (the Subsidiary)

135 Tinjauan Keuangan
Financial Review

162 Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

172 Laporan Arus Kas
Statements of Cash Flows

176 Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang
The Ability to Pay Debt and Receivable Collectibility

182 Struktur Modal
Capital Structure

184 Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2019, dan Target Tahun 2020
Comparison between the 2019 Target and Realization, and the 2020 Target

186 Prospek Usaha, Kondisi Industri dan Kondisi Ekonomi
Business Prospects, Industrial Conditions, and Economic Conditions

194 Pemasaran
Marketing

198 Kebijakan Dividen
Dividend Policy

198 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP / MSOP)
Employee and/or Management Shares Ownership Program (ESOP / MSOP)

198 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of the Use of Public Offering Funds

199 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Material Transaction Information that Contains Conflicts of Interest or Transactions with Affiliates

201 Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan
Amendments to the Laws and Regulations which have Significant Impacts

203 Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies

204 Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information

TINJAUAN PEREKONOMIAN
Economic Review

ANALISIS PEREKONOMIAN GLOBAL

Sepanjang tahun 2019 perekonomian global masih diwarnai oleh berbagai dinamika, terutama mengenai perlambatan ekonomi global, Bank Indonesia ("BI") melaporkan bahwa meskipun ketidakpastian pasar keuangan global sedikit mereda, ketegangan hubungan dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang masih berlangsung menurunkan volume perdagangan dunia dan menekan harga komoditas. Namun demikian, aliran modal asing ke Negara berkembang terus berlanjut sejalan dengan respons kebijakan moneter longgar di beberapa bank sentral dunia, serta penurunan risiko di Negara berkembang. Sekalipun pada penghujung tahun 2019 terdapat kabar baik yang datang dari Amerika Serikat dan Tiongkok yang telah melakukan sjumlah langkah rujuk, namun kesepakatan yang telah dirancang tersebut belum ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pada bulan Juni 2019, Bank Dunia telah merevisi prakiraan pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 dan 2020 menjadi 2,6% dan 2,7% dari proyeksi yang dibuat pada bulan Januari 2019 sebesar 2,9% dan 2,8%. Dasar pertimbangan perubahan ini, adalah karena melambatnya laju ekonomi global yang disebabkan oleh lesunya perdagangan internasional. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang tertahan oleh lambatnya investasi dan berbagai risiko yang menghambat pertumbuhan. Risiko-risiko itu termasuk meningkatnya halangan perdagangan, tekanan keuangan yang muncul kembali, dan perlambatan di beberapa ekonomi besar yang lebih lambat dari perkiraan. Menurut Presiden Bank Dunia David Malpass dalam keterangan resminya, "Momentum ekonomi tetap lemah saat ini sementara tingkat utang yang makin tinggi dan pertumbuhan investasi yang lemah di negara-negara berkembang menahan mereka mencapai potensinya,"

Sementara itu, pada bulan Oktober 2019, *International Monetary Fund* ("IMF") kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 menjadi 3%, setelah menurunkan target pertumbuhan ekonomi global pada bulan Juli 2019 menjadi sebesar 3,2%. Proyeksi tingkat pertumbuhan tersebut jauh di bawah pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2017 yang mencapai 3,3%. Ketidakpastian Brexit, perang dagang dan kondisi geopolitik di beberapa Negara di dunia menjadi dasar pertimbangan utama atas koreksi pertumbuhan ekonomi global tersebut. Menurut IMF, bank sentral dapat menahan penurunan pertumbuhan ekenomi dengan melaksanakan stimulus bunga rendah.

Di dalam laporannya OJK menyampaikan bahwa dalam menyikapi kondisi tersebut, otoritas di banyak negara mengambil kebijakan yang bersifat *countercyclical*. Otoritas moneter misalnya mencoba meningkatkan likuiditas dengan

GLOBAL ECONOMIC ANALYSIS

Throughout 2019 the global economy was still colored by various dynamics, especially regarding the global economic slowdown. Bank Indonesia ("BI") reported that although the uncertainty of the global financial markets has eased a little, the ongoing tensions in trade relations between the United States and China reduced the volume of world trade and suppressed the commodity prices. Nevertheless, the flow of foreign capital into developing countries continued in line with the response of loose monetary policy in several central banks in the world, as well as risk reduction in developing countries. Even though at the end of 2019, there was good news coming from the United States and China that have taken several reconciliation steps, but both parties have not yet signed the agreement that has been drafted.

In June 2019, the World Bank revised its forecast for global economic growth in 2019 and 2020 to 2.6% and 2.7% of the projections made in January 2019 at 2.9% and 2.8%. The basic consideration of this change was due to the slowing pace of the global economy caused by the sluggish international trade. Meanwhile, the economic growth of developing countries was restrained by slow investment and various risks that impeded growth. These risks included increased trade barriers, resurgent financial pressures, and a slowdown in some large economies that were slower than expected. According to World Bank President David Malpass in his official statement, "Economic momentum remains weak at the moment while higher debt levels and weak investment growth in developing countries hold them from reaching their potential,"

Meanwhile, in October 2019, the International Monetary Fund ("IMF") again cut its forecast for global economic growth in 2019 to 3% after reducing its global economic growth target in July 2019 to 3.2%. The growth rate projection was far below the global economic growth in 2017, which reached 3.3%. Uncertainty of Brexit, trade war and geopolitical conditions in several countries in the world was the main consideration for the correction of global economic growth. According to the IMF, the central bank could withstand the decline in economic growth by implementing a low-interest stimulus.

In its report, the OJK said that in responding to these conditions, authorities in many countries adopted counter-cyclical policies. For example, monetary authorities try to increase liquidity by lowering the benchmark interest rate,

menurunkan tingkat bunga acuan, menurunkan Giro Wajib Minimum, dan meningkatkan daya beli melalui upaya menjaga tingkat inflasi. Kebijakan bank sentral dunia cenderung akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. The Fed menurunkan *Federal Funds Rate* (FFR), European Central Bank (ECB) menurunkan *deposit facility rate*, sedangkan Bank of Japan (BoJ) menyatakan akan tetap mempertahankan kebijakan moneternya yang akomodatif. Memasuki Desember 2019, nilai tukar global menguat terhadap USD seiring keputusan the Fed untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan pada rentang 1,50% - 1,75%. Sementara itu, sentimen positif dari kesepakatan dagang fase I AS-Tiongkok mendorong peningkatan kinerja bursa saham global di bulan Desember 2019. Tekanan hanya terjadi pada indeks saham beberapa negara-negara Asia Tenggara akibat rilis data ekonomi yang masih belum cukup positif.

Di dalam buku Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2019, Bank Indonesia terdapat beberapa pergeseran yang saling berkait dalam perekonomian global berlanjut dan memengaruhi dinamika ekonomi dunia tahun 2019. Pergeseran tersebut dipicu empat hal yang saling terkait, dimulai dari kebijakan banyak negara yang lebih berorientasi *domestic* (*inward looking orientation*) dan volatilitas arus modal dunia yang meningkat, hingga kepada digitalisasi ekonomi yang naik pesat dan perilaku agen ekonomi yang berubah sebagai respons atas perkembangan digital tersebut. Pergeseran ini menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan makroekonomi, sehingga berimplikasi pada pergeseran lain dari aspek kebijakan. Perubahan perilaku ekonomi sejalan dengan perkembangan digitalisasi yang menguat berimplikasi pada berubahnya efektivitas kebijakan yang sebelumnya pernah ditempuh. Strategi kebijakan tidak hanya dapat bertumpu pada satu kebijakan dan satu instrumen, namun perlu didukung kebijakan lain sehingga menjadi satu bauran kebijakan yang terintegrasi.

ANALISIS PEREKONOMIAN NASIONAL

Sebagaimana yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik ("BPS"), Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 yaitu sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,62.

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 59,00%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32%, dan Pulau Kalimantan 8,05%.

reducing the Statutory Reserves, and increasing purchasing power through efforts to maintain the inflation rate. World Central Bank policies tended to be accommodative to encourage economic growth. The Fed lowered the Federal Funds Rate (FFR), the European Central Bank (ECB) lowered the deposit facility rate, while the Bank of Japan (BoJ) said it would continue to maintain its accommodative monetary policy. Entering December 2019, the global exchange rate strengthened against the USD as the Fed's decision to keep the benchmark interest rate in the range of 1.50% - 1.75%. Meanwhile, positive sentiment from the US-China trade agreement phase I pushed for an increase in the performance of global stock markets in December 2019. The pressure only occurred on the stock indexes of some Southeast Asian countries due to the economic data being still not positive enough.

In the book 2019 of the Indonesia Economic Report, Bank Indonesia, there were several interrelated shifts in the global economy that continued and affected the dynamics of the world economy in 2019. Four interrelated things triggered the shift. Start from the policies of many countries that were more domestic-oriented (inward-looking orientation). Besides, the increasing volatility of world capital flows to the digitalization of a rapidly rising economy and the changing behavior of economic agents in response to these digital developments. This shift created complexity in macroeconomic management so that it had implications for other shifts in policy aspects. Changes in economic behavior in line with the strong digitalization development that had implications for changes in the effectiveness of policies that previously have been taken. Policy strategies could not only rely on one policy and one instrument but also needed to be supported by other policies to become an integrated policy mix.

NATIONAL ECONOMIC ANALYSIS

As reported by the BPS-Statistics Indonesia ("BPS"), Indonesia's economy in 2019 grew 5.02%, lower than the achievements in 2018, which amounted to 5.17%. From the production side, the highest growth was achieved by Industry of Other Services Activities at 10.55%. In terms of expenditure, the highest growth was achieved by the Non-Profit Institution Serving Households Expenditure (NPISH/PK-LNPRT) by 10.62%.

Indonesia's economic structure spatially in 2019 was dominated by provincial groups on Java and Sumatera islands. Java Island contributed the most to Gross Domestic Product, which amounted to 59,00%, followed by Sumatera Island at 21.32%, and Kalimantan Island 8.05%.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan perlambatan ekonomi sepanjang 2019 terutama disebabkan oleh capaian pertumbuhan kuartal IV 2019 yang melambat menjadi hanya 4,97%. Kondisi perlambatan perekonomian global menjadi salah satu faktor utama perlambatan ekonomi Indonesia, terutama dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Realisasi pertumbuhan ekonomi ini juga lebih rendah dari target APBN 2019 yaitu sebesar 5,03%.

BPS Chief Suhariyanto explained the economic slowdown during 2019 was mainly due to the achievement of growth in the fourth quarter of 2019, which slowed to only 4.97%. The condition of the global economic slowdown was one of the main factors of Indonesia's economic downturn, especially the impact of the trade war between the United States and China. The realization of economic growth was also lower than the 2019 state budget target of 5.03%.

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULAN IV - 2019
INDONESIA ECONOMIC GROWTH FOR QUARTER IV OF 2019

Berita Resmi Statistik No. 17/02/Th.XXIV, 5 Februari 2020 / Official Gazette of Statistics No. 17/02/Th.XXIV, February 5, 2020

C-TO-C	Y-ON-Y	Q-TO-Q	PDB ADHB 2019 GDP Based on Applicable Prices 2019	PDB per Kapita/Capita 2019
5,02%	4,97%	-1,74%	Rp15.833,9 trilliun	Rp59.065.349 / US $ 4.174,9

PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) 2014-2019
GROWTH OF GROSS DOMESTIC PRODUCTS (GDP) 2014-2019

(dalam persen / in percent)

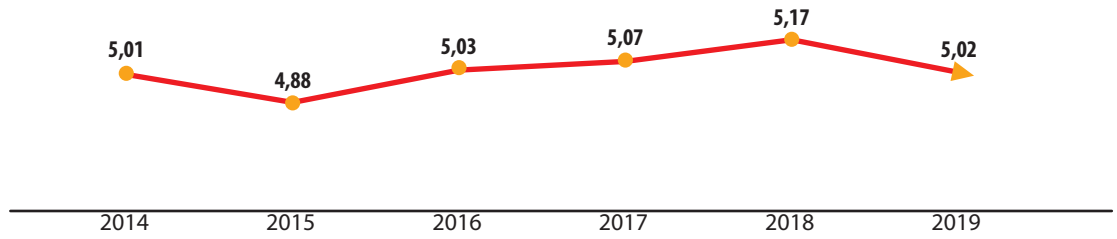

PERTUMBUHAN PDB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2019 (%)
GROWTH OF GDP ACCORDING TO BUSINESS FIELDS IN 2019 (%)

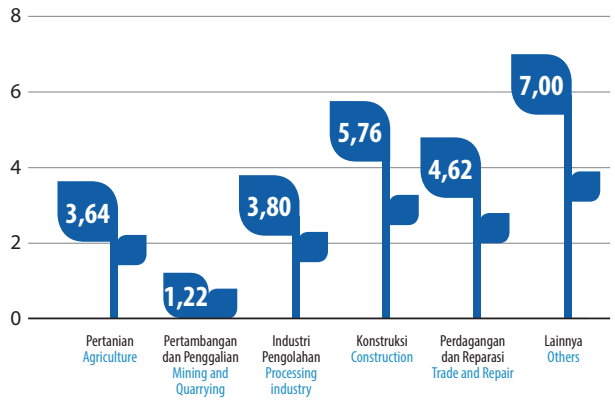

PERTUMBUHAN PDB MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2019 (%)
GROWTH OF GDP ACCORDING TO EXPENDITURE IN 2019 (%)

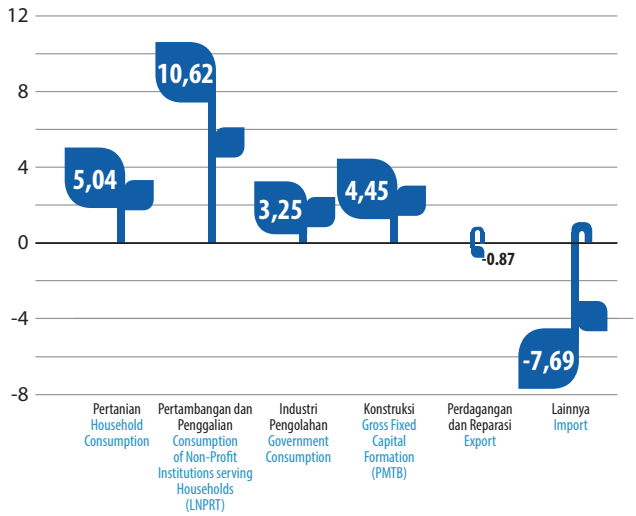

Sumber : Badan Pusat Statistik
Source: BPS-Statistics Indonesia ("BPS")

PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PDRB MENURUT WILAYAH
GROWTH AND CONTRIBUTION OF GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT (PDRB) ACCORDING TO THE REGION

Tahun 2019 Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 59,00% dengan pertumbuhan 5,52%

In 2019 Java Island contributed 59.00% to the Indonesian economy with a growth of 5.52%.

▲ Kontribusi / Contribution
▲ Pertumbuhan / Growth

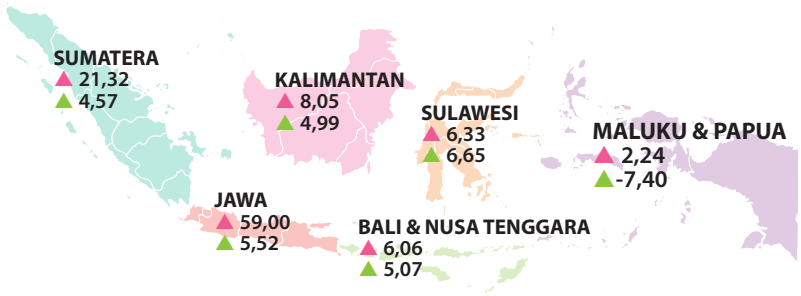

Sumber : Badan Pusat Statistik
Source: BPS-Statistics Indonesia ("BPS")

Dalam keterangan persnya pada awal tahun 2020, Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2019 berhasil tumbuh positif di tengah perlambatan ekonomi global yang terjadi sebagai akibat perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, kondisi geopolitik seperti yang terjadi di Hongkong, penurunan harga komoditi, serta perlambatan ekonomi di banyak Negara. Diperkirakan pereonomian Indonesia masih mampu tumbuh di atas 5% karena terjaganya permintaan domestik, konsumsi pemerintah, serta investasi. Kinerja perekonomian yang terjaga serta pelaksanaan program pembangunan juga telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran, mengurangi ketimpangan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat.

In her press briefing at the beginning of 2020, the Ministry of Finance said that the Indonesian economy in 2019 managed to grow positively amid the global economic slowdown. That occurred as a result of the trade war between the United States and China, geopolitical conditions such as those in Hong Kong, falling commodity prices, and an economic slowdown in many countries. It was estimated that Indonesia's economy was still able to grow above 5% due to maintained domestic demand, government consumption, and investment. The continued economic performance and the implementation of development programs have also succeeded in reducing unemployment rates, reducing inequality, and maintaining public welfare.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global di banyak negara, APBN tahun 2019 didorong ekspansif dan *countercyclical* untuk menjalankan peran strategis dalam menjaga stabilitas makroekonomi, mempertahankan momentum pertumbuhan perekonomian domestik, dan mendorong laju kegiatan dunia usaha, serta tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat. Realisasi defisit APBN tahun 2019 sementara berkisar pada 2,2% dari PDB, dibandingkan dengan target awal 1,84% dari PDB. Pelebaran defisit tersebut dilakukan secara terukur dengan memperhitungkan risiko dan manfaatnya, serta kredibilitas fiskal.

Amid global economic uncertainty in many countries, the 2019 state budget was driven expansively and countercyclically. It played a strategic role in maintaining macroeconomic stability, maintaining the momentum of domestic economic growth, and encouraging the pace of business activities while continuing to protect the public. The realization of the 2019 state budget deficit in the temporary was around 2.2% of GDP, compared to the initial target of 1.84% of GDP. The widening of deficit was carried out measurably by taking into account the risks and benefits, as well as fiscal credibility.

Bank Indonesia menggambarkan dinamika perekonomian Indonesia tahun 2019 dalam tiga elemen strategis yang mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi yakni Sinergi, Transformasi, dan Inovasi. Ketiga elemen strategis tersebut menjadi penting guna merespons pergeseran struktural di perekonomian global yang terus menguat.

Bank Indonesia described the dynamics of the Indonesian economy in 2019 in three strategic elements that supported sustainable economic growth, namely Synergy, Transformation, and Innovation. These three strategic elements were essential to respond to structural shifts in the global economy that continued to strengthen.

Elemen sinergi mengemuka setelah melihat peran kuat sinergi antar pemangku kebijakan dalam merespons berbagai tantangan dari global yang berdampak kurang menguntungkan kepada perekonomian Indonesia. Sinergi yang makin kuat dapat membawa perekonomian Indonesia 2019 tetap berdaya tahan, ditopang oleh stabilitas yang terjaga dan pertumbuhan ekonomi yang tetap baik, meskipun melambat dibandingkan dengan kondisi 2018. Elemen sinergi kebijakan juga menjadi penting karena mendukung percepatan transformasi ekonomi Indonesia dengan struktur dan sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Selain itu, sinergi kebijakan juga diarahkan untuk terus menumbuhkembangkan inovasi, termasuk inovasi ekonomi-keuangan digital, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Di dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2019, Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa ekspor 2019 terkontraksi 0,87%, berbalik arah dari kinerja 2018 yang tumbuh 6,55%. Penurunan ekspor tercatat cukup dalam pada semester I 2019, sebelum sedikit berkurang pada semester II 2019 ditopang oleh peningkatan permintaan beberapa produk ekspor, seperti *crude palm oil* (CPO) dan batu bara. Perbaikan ekspor di beberapa komoditas merupakan dampak diversifikasi produk dan tujuan ekspor, serta beberapa kebijakan domestik. Diversifikasi produk ekspor didukung daya saing yang membaik sehingga menopang kinerja positif beberapa produk ekspor seperti produk besi baja, otomotif, pulp dan waste paper, emas, dan serat tekstil. Tujuan ekspor juga meluas seperti ke pasar ASEAN dan Arab Saudi, khususnya untuk produk besi baja. Sementara itu, beberapa kebijakan domestic memengaruhi perbaikan kinerja ekspor komoditas nikel dan tembaga.

The synergy element arose after seeing the strong role of synergy between policymakers in responding to various challenges from the global that had unfavorable impacts on the Indonesian economy. More substantial synergies could bring Indonesia's economy in 2019 to remain resilient, supported by maintained stability and sustained economic growth, although slowing compared to 2018 conditions. Policy synergy elements were also vital because they supported the acceleration of Indonesia's economic transformation with the structure and sources of more robust economic growth. Besides, policy synergies were also directed to continue to develop innovation, including digital financial-economic innovation, which could support quality and inclusive economic growth.

In the 2019 Indonesia Economic Report, Bank Indonesia also said that 2019 exports contracted 0.87%, reversing the direction of the 2018 performance, which grew 6.55%. The decline in exports was recorded quite deep in the first semester of 2019, before it was slightly reduced in the second semester of 2019, supported by increased demand for some export products, such as crude palm oil (CPO) and coal. The improvement in exports in several commodities was the impact of product diversification and export destinations, as well as several domestic policies. Diversification of export products was supported by improved competitiveness that supported the positive performance of several export products such as steel, automotive products, pulp, and waste paper, gold, and textile fibers. The export destination was also expanding as to the ASEAN and Saudi Arabia markets, especially for steel products. Meanwhile, some domestic policies influenced the improvement in nickel and copper commodity export performance.

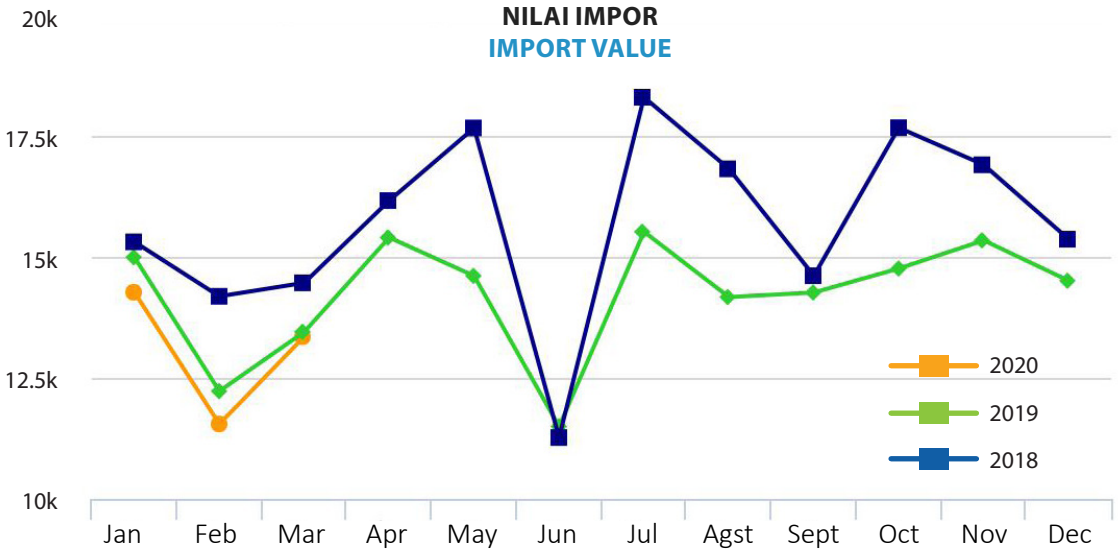

NILAI EKSPOR
/EXPORT VALUE

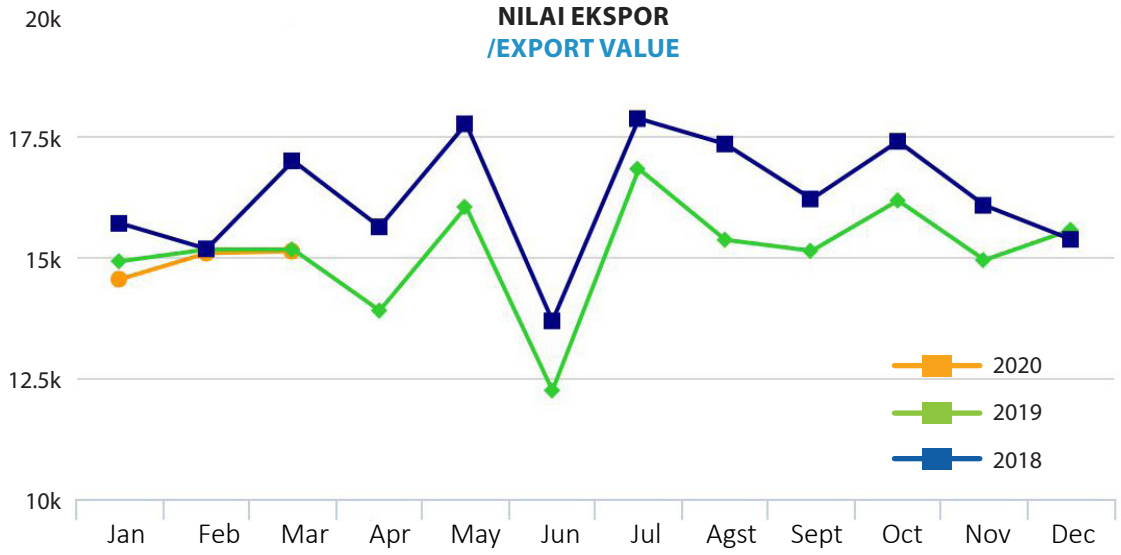

Di tengah kinerja sektor eksternal yang kurang menguntungkan, permintaan domestik tetap kuat sehingga menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 tetap baik yakni 5,02%. Konsumsi swasta sedikit meningkat didukung oleh daya beli yang terpelihara sejalan dengan pendapatan yang terjaga dan inflasi yang rendah, serta keyakinan konsumen yang baik. Konsumsi swasta juga didukung oleh dampak penyelenggaraan Pemilu 2019 sehingga meningkatkan pertumbuhan konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). Kinerja investasi tetap baik, terutama didukung investasi bangunan yang tetap tinggi didorong oleh pembangunan infrastruktur dan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta kinerja konstruksi swasta yang meningkat. Sementara itu, investasi nonbangunan menurun dipengaruhi kontraksi ekspor dan permintaan domestik yang tidak sekuat tahun sebelumnya. Daya tahan perekonomian yang tetap baik juga dipengaruhi proses penyesuaian ekonomi domestik terhadap gejolak eksternal sehingga mendorong penurunan impor. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi domestik yang terjaga pada 2019 berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, tercermin pada menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Amid unfavorable external sector performance, domestic demand remained strong to sustain Indonesia's economic growth in 2019 to stay good at 5.02%. Private consumption increased slightly supported by maintained purchasing power in line with maintained income and low inflation, and reasonable consumer confidence. Private consumption was also supported by the impact of the holding of the 2019 General Elections, thereby increasing the consumption growth of Non-Profit Institution Serving Households (LNPRT). Investment performance remained good, mainly supported by building investment that remained high driven by infrastructure development and the construction of the National Strategic Project (PSN), as well as improved private construction performance. Meanwhile, non-building investment declined due to contraction in exports and domestic demand, which was not as strong as the previous year. The resilience of the economy that remains good was also influenced by the process of adjusting the domestic economy to external shocks, thereby driving down imports. Overall, the maintained domestic economic growth in 2019 has a positive impact on the welfare of society, reflected in the reduction in poverty and unemployment.

Inflasi juga tetap rendah dan terkendali sehingga mendukung stabilitas makroekonomi. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2019 tercatat 2,72%, menurun dibandingkan dengan capaian 2018 yang mencapai 3,13%. Perkembangan ini membawa inflasi IHK kembali berada dalam kisaran sasaran 3,5±1%, melanjutkan pencapaian 3 tahun terakhir yang juga konsisten berada dalam kisaran sasarannya. Inflasi 2019 yang rendah dipengaruhi faktor siklikal permintaan

Inflation also remained low and under control so that it supported macroeconomic stability. Consumer Price Index (CPI) inflation in 2019 recorded 2.72%, down compared with 2018 achievements, which reached 3.13%. This development brought CPI inflation back into the target range of 3.5 ± 1%, continuing the accomplishment of the last 3 (three) years, which was also consistently within its target range. The low inflation in 2019 was influenced by the cyclical factors of

domestik yang terjaga dan nilai tukar yang terapresiasi, serta inflasi kelompok *Administered Prices* yang rendah. Selain itu, inflasi yang tetap rendah juga dipengaruhi oleh perbaikan struktural seperti peran ekspektasi inflasi dalam pembentukan inflasi yang makin besar dan terjangkar, dampak nilai tukar ke inflasi yang menurun, serta dampak positif sinergi koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi pangan.

maintained domestic demand and the appreciation of the exchange rate, as well as low inflation in the Administered Prices group. Besides, inflation that remained low was also affected by structural improvements such as the role of inflation expectations in the formation of increasingly significant and anchored inflation, the impact of the exchange rate to declining inflation, and the positive impact of the synergy of the Government and Bank Indonesia coordination in controlling food inflation.

INFLASI DI INDONESIA DALAM 3 TAHUN TERAKHIRI
INDONESIA IN THE PAST 3 YEARS

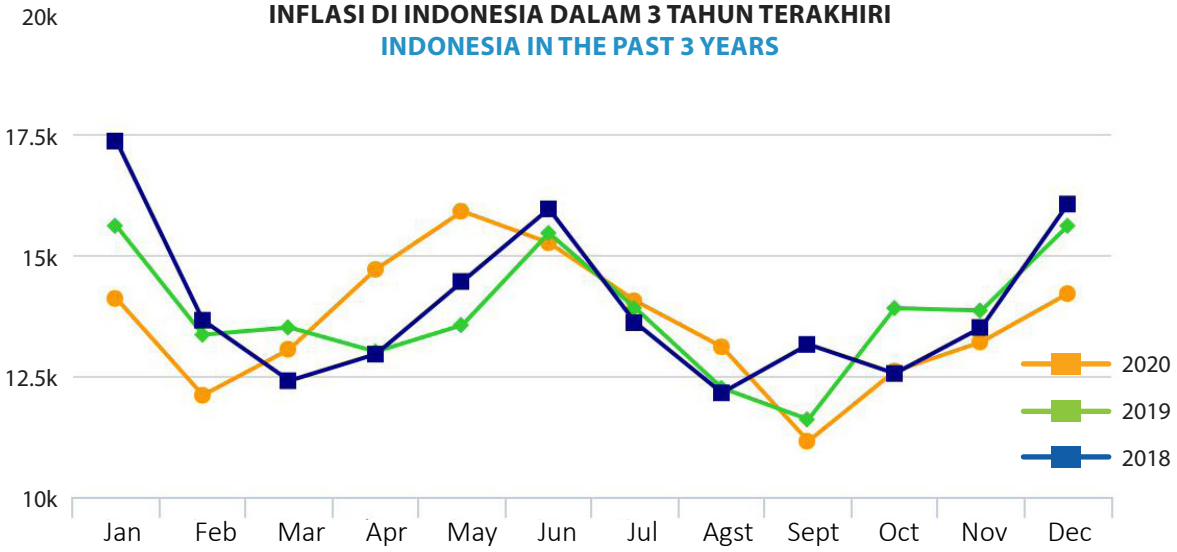

Dalam Laporan Kinerja nya Tahun 2019, OJK menyampaikan bahwa persepsi pelaku bisnis terhadap prospek ekonomi Indonesia juga semakin baik tercermin dari opini positif dari Lembaga Pemeringkat *Sovereign Credit Rating*, tingginya *market confidence,* berdasarkan survei Bloomberg yang menempatkan Indonesia di peringkat tertinggi di antara negara-negara *emerging market* untuk tujuan investasi di instrumen saham dan surat utang. Sejalan dengan itu, stabilitas Sektor Jasa Keuangan domestik tetap terjaga dan masih mencatatkan perkembangan positif. Pasar Modal domestik melanjutkan kecenderungan menguat tercermin dari IHSG yang mencatatkan pertumbuhan positif yaitu 1,70% yoy yang ditutup di level 6.299,5, dengan arus modal masuk bersih investor asing di pasar saham meningkat signifikan yaitu net buy Rp49,2 triliun dari sebelumnya net sell Rp50,7 triliun. Penawaran umum juga terbilang cukup baik dengan nilai emisi yang relatif tinggi sebesar Rp166,85 triliun serta jumlah emiten baru di pasar modal mencapai 60 emiten. Industri keuangan non-bank juga masih membukukan capaian yang positif. Premi asuransi komersial yang dikumpulkan mencapai Rp234,6 triliun atau tumbuh sebesar 3,9% yoy, dengan premi asuransi jiwa sebesar Rp152,4 triliun serta premi asuransi umum/reasuransi sebesar Rp82,2 triliun.

In its 2019 Performance Report, OJK said that business perceptions of Indonesia's economic prospects were also better reflected in the positive opinion of the Sovereign Credit Rating Agency, high market confidence, based on a Bloomberg survey which ranked Indonesia among the highest ranking among emerging market countries for investment purposes in stock and debt instruments. In line with that, the stability of the domestic Financial Services Sector was maintained and still recorded positive developments. The domestic capital market continued the upward trend reflected in the CSPI which recorded positive growth of 1.70% YoY which closed at 6,299.5, with net inflows of foreign investors in the stock market increasing significantly namely a net buy of Rp49.2 trillion from the previous net sell of Rp50.7 trillion. The public offering was also quite good with a relatively high emission value of Rp166.85 trillion and the number of new issuers on the capital market reached 60 issuers. The non-bank financial industry also posted positive results. Commercial insurance premiums collected amounted to Rp234.6 trillion or grew by 3.9% YoY, with life insurance premiums of Rp152.4 trillion and general insurance/reinsurance premiums of Rp82.2 trillion.

Berbagai perkembangan tersebut didukung dengan permodalan Lembaga Jasa Keuangan yang sangat memadai. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan tercatat sebesar 23,81%, sedangkan *Risk- Based Capital* industri asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing sebesar 329,3% dan 725,4%, lebih tinggi dari *threshold* 120%. *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,63 kali, jauh di bawah *threshold* maksimal sebesar 10 kali. Di bidang pengaturan, OJK sepanjang tahun 2019 menerbitkan 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan 316 Laporan Kinerja OJK 2019 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) untuk mengatur sektor jasa keuangan.

ANALISIS INDUSTRI KEUANGAN DAN PENJAMINAN KREDIT

Di dalam Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2019, Bank Indonesia menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2019, Indeks Stabilitas Sistem Keuangan ("ISSK") berada dalam zona normal didukung oleh kinerja institusi keuangan dan pasar keuangan yang baik. Risiko kredit bermasalah, *Non-Performing Loans* ("NPL"), juga berada dalam batas aman, yaitu 2,53% (NPL gross) dan 1,18% (NPL net), Sementara dari sisi likuiditas, perbankan mampu memelihara kecukupan likuiditas dengan baik dengan rasio alat likuid bank terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) mencapai 20,86%. Keberhasilan perbankan dalam mempertahankan kinerja positif di tengah ketidakpastian global, disertai dengan upaya menjaga tingkat efisiensi dan profitabilitas yang baik. Hal ini tercermin dari indikator efisiensi, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional ("BOPO"), dan indikator profitabilitas, rasio *return on assets* ("ROA"), yang terjaga di level 79,58% dan 2,44%. Likuiditas di pasar uang dan perbankan tetap memadai, tercermin pada rerata harian volume Pasar Uang Antar Bank ("PUAB") yang tetap tinggi, yaitu sebesar Rp19,0 triliun. Kondisi tersebut kemudian mendukung cukup baiknya transmisi suku bunga di pasar uang, yaitu pada penurunan suku bunga PUAB tenor 1 (satu) minggu sebesar 115 bps menjadi 5,03% dan suku bunga Jakarta *Interbank Offered Rate* (JIBOR) tenor 1 (satu) minggu sebesar 119 bps menjadi 5,05% sejak Juli 2019. Transmisi kepada suku bunga perbankan juga berlanjut, meskipun belum optimal. Rerata tertimbang suku bunga deposito pada Desember 2019 tercatat 6,31%, turun 52 bps sejak akhir Juni 2019 sebelum *BI-7 Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) mulai diturunkan pada Juli 2019. Suku bunga kredit modal kerja turun 18 bps sejak Juni 2019 menjadi 10,09% pada Desember 2019.

These various developments were supported by the very adequate capital of Financial Services Institution. Banking Capital Adequacy Ratio (CAR) was recorded at 23.81%, while the Risk-Based Capital of the general insurance and life insurance industries were 329.3% and 725.4%, higher than the 120% threshold. Financing company's gearing ratio was 2.63 times, far below the maximum threshold of 10 times. In the area of regulation, the OJK throughout 2019 issued 42 Financial Services Authority Regulations (POJK) and 3161 OJK Performance Report in 2019 of Financial Services Authority Circular Letters (SEOJK) to regulate the financial services sector.

ANALYSIS OF THE FINANCIAL INDUSTRY AND CREDIT GUARANTEE

In the 2019 Indonesian Economic Report, Bank Indonesia said that throughout 2019, the Financial System Stability Index ("ISSK") was in the normal zone. It was supported by the good performance of financial institutions and financial markets. Non-Performing Loans ("NPL") risk was also within the safe limit of 2.53% (NPL gross) and 1.18% (NPL net). While in terms of liquidity, banks were able to maintain adequate liquidity, with both with the ratio of bank liquid assets to third party funds (AL / DPK) reaching 20.86%. The success of banks in maintaining positive performance amid global uncertainty, accompanied by efforts to maintain a good level of efficiency and profitability. It was reflected in the efficiency indicators. Besides, the ratio of operating costs to operating income ("BOPO"), and indicators of profitability. Also, the ratio of Return on Assets ("ROA") was maintained at 79.58% and 2.44%. Liquidity on the money market and banking remained adequate, reflected in the daily average volume of the Interbank Money Market ("PUAB"), which remained high at Rp19.0 trillion. This condition subsequently supported the quite good transmission of interest rates on the interbank money market, namely in the tenor of 1 (one) week cut of 115 bps to 5.03% and the Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) in the tenor of one-week cut of 119 bps to 5.05% since July 2019. Transmission to bank interest rates also continued, although not yet optimal. The weighted average deposit rate in December 2019 was recorded at 6.31%, down 52 bps since the end of June 2019 before the BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) began to be lowered in July 2019. Working capital loan interest rates dropped 18 bps since June 2019 to 10.09% in December 2019.

Namun demikian, pertumbuhan kredit perbankan ada tahun 2019 tercatat sebesar 6,08%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 sebesar 11,75%. yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Dari sisi permintaan, korporasi cenderung menahan permintaan kredit sejalan dengan kinerja ekspor dan kegiatan investasi nonbangunan yang menurun. Sementara dari sisi penawaran, perbankan lebih berhati-hati menyalurkan kredit dengan mempertimbangkan perkembangan ketidakpastian global yang dapat memengaruhi kinerja korporasi domestik. Penurunan kredit lebih dalam dapat ditahan oleh pembiayaan perbankan ke sektor usaha mikro kecil dan menengah ("UMKM") yang tercatat 7,6%, terutama ke sektor pertanian dan industri pengolahan yang berorientasi domestik. Sejalan dengan perkembangan kredit perbankan tersebut, dana pihak ketiga (DPK) sebagai sumber dana utama bank juga tumbuh melambat sebesar 6,54%.

However, bank credit growth in 2019 was recorded at 6.08%. Far lower than the 2018 increase of 11.75%, which was influenced by several factors, both in terms of demand and supply. On the demand side, corporations tended to hold credit demand in line with declining export performance and non-construction investment activities. Meanwhile, from the supply side, banks were more careful in extending credit by considering the development of global uncertainties that could affect the performance of domestic corporations. The decline in more profound credit could be restrained by bank financing to the micro and small business sector ("MSME"), which recorded 7.6%, mainly to the agriculture sector and the domestic-oriented manufacturing industry. In line with the development of bank credit, third party funds (DPK) as the primary source of bank funds grew at a slower pace of 6.54%.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pertumbuhan industri penjaminan kredit akan sangat tergantung pada pertumbuhan penyaluran kredit oleh Lembaga Keuangan. Selain itu, bisnis penjaminan kredit juga dipengaruhi oleh faktor kebijakan dari lembanga keuangan dalam hal memenuhi kebutuhan untuk melakukan pengalihan risiko (*shifting risk*), serta kemampuan dari perusahaan penjaminan itu sendiri dalam menawarkan benefit produk pada tingkat harga yang efisien.

The general event could be said that the growth of the credit guarantee industry depended on the growth of lending by financial institutions. Besides, the credit guarantee business was also influenced by the policy factors of the financial institution in terms of meeting the need for shifting risk, as well as the ability of the guarantee company itself to offer product benefits at an adequate price level.

Berdasarkan data OJK, jumlah perusahaan penjaminan per posisi 2019 adalah sebanyak 20 perusahaan, dengan gambaran posisi keuangan sebagaimana dalam tabel berikut :

Based on OJK data, the number of guarantee companies per position in 2019 was 20, with the overview of the financial position as in the following table:

OVERVIEW PERUSAHAAN PENJAMINAN PER DESEMBER 2019
GUARANTEE COMPANIES OVERVIEW AS OF DECEMBER 2019

Keterangan	Jumlah Industri (Unit) Total Industries (Unit)	Aset (miliar Rp) Assets (billion Rp)	Liabilitas (miliar Rp) Liabilities (billion Rp)	Ekuitas (miliar Rp) Equity (billion Rp)	Description
1. Perusahaan Umum (Perum)	1	16,997	5,107	11,890	1. Public Corporation
2. Perusahaan Penjaminan Daerah	18	2,682	924	1,758	2. Regional Guarantee Companies
3. Perusahaan Penjaminan Swasta	1	2	0	2	3. Private Guarantee Companies
JUMLAH	20	19,682	6,031	13,651	TOTAL

Sumber : Data Statistik OJK / Source: OJK Statistics Data

Sedangkan kinerja operasional perusahaan penjaminan selama tahun 2019 dan bulan Desember 2018 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

While the operational performance of the guarantee company during 2019 and December 2018 could be described in the following table:

KINERJA OPERASIONAL PERUSAHAAN PENJAMINAN (MILIAR RP)

OPERATIONAL PERFORMANCE OF GUARANTEE COMPANIES (BILLION RP)

Keterangan Description	Des-18 Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	Mei-19 May-19	Jun-19	Jul-19	Agst-19 Aug-19	Sep-19	Okt-19 Oct-19	Nov-19	Des-18 Dec-18
1. *Outstanding* penjaminan - usaha produktif *Outstanding guarantee - productive*	115,139	115,723	117,410	123,429	122,441	126,300	124,378	126,762	128,712	130,383	130,816	134,179	132,890
2. *Outstanding* penjaminan - usaha non produktif *Outstanding guarantee - non productive*	89,672	96,521	99,404	101,781	100,238	102,954	104,627	103,871	103,405	104,078	105,016	105,032	105,109
3. Total *Outstanding* Penjaminan ***Total Outstanding Guarantee***	204,811	212,244	216,815	225,210	222,679	229,254	229,006	230,633	232,118	234,461	235,832	239,211	238,000
4. *Gearing ratio* - usaha produktif (kali) *Gearing ratio - productive (x)*	9	9	9	9	9	10	9	9	10	10	10	10	10
5. *Gearing ratio* - usaha non produktif (kali) *Gearing ratio - non productive (x)*	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6. *Gearing ratio* total (kali) *Gearing ratio total (x)*	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	17
7. Imbal jasa penjaminan *Guarantee Fee*	1,411	152	308	471	627	803	978	1,161	1,333	1,529	1,739	1,956	2,205
8. Klaim dibayar *Claims paid*	975	109	220	343	477	627	713	915	1,000	1,123	1,130	1,545	1,877
9. Jumlah terjamin (ribu orang) *Number of guaranteed (thousand people)*	11,842	12,235	12,165	12,464	12,538	12,860	13,076	12,986	13,144	13,146	13,193	13,560	13,460

Sumber : Data Statistik OJK / Source: OJK Statistics Data

PERKEMBANGAN UMKM DAN PENYALURAN KUR DI INDONESIA

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha ini dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar serta memenuhi kriteria lain.

Dalam salah satu pemaparannya, Bappenas menyampaikan bahwa UMKM tidak saja menjadi tulang punggung dalam menggerakkan roda ekonomi di Indonesia, juga memainkan peranan penting dalam penciptaan peluang kerja di seluruh Indonesia dan menjadi kunci untuk rancang bangun

MSMES DEVELOPMENT AND PEOPLE'S BUSINESS CREDIT (KUR) DISTRIBUTION IN INDONESIA

In one of its presentations, Bappenas said that MSMEs are not only the backbone of moving the economic wheel in Indonesia, they also play an important role in creating employment opportunities throughout Indonesia. Besides, they are the key to building inclusive development plans by bringing together big businesses and small businesses so that economic equality can touch all levels of society.

According to Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), small businesses are defined as productive economic activities that stand alone. This business is carried out by individuals or business entities that are not subsidiaries or a branch of the company

pembangunan yang inklusif, dengan mempertemukan bisnis besar dengan bisnis kecil agar pemerataan ekonomi dapat menyentuh semua lapisan masyarakat.

Di dalam situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah menegaskan bahwa UMKM memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan strategis UMKM tersebut dalam perekonomian nasional tercermin dari total unit usaha UMKM mencapai 99,9% dari total unit usaha dan kontribusi penyerapan tenaga kerja di UMKM sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja serta kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,34% (BPS, 2017). Strategisnya peranan UMKM dalam perekonomian nasional mendorong Pemerintah untuk terus menerus mengembangkan UMKM. Salah satu program pemerintah dalam pengembangan UMKM adalah meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada layanan keuangan formal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007.

Dukungan Pemerintah Indonesia untuk terus mengembangkan UMKM tercermin dari berbagai kebijakan yang telah diambil, seperti di sektor perpajakan berupa penurunan tarif PPh Final UMKM dari 1% menjadi 0,5%, sehingga diharapkan para pelaku UMKM dapat menggunakan keuntungannya untuk ekspansi usaha. Selain itu , pemerintah juga mempercepat perizinan dalam berusaha dengan meluncurkan *single submission*, melalui aplikasi tersebut diberikan kemudahan berinvestasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kebijakan lain yang tak kalah penting adalah bunga murah ini bisa dinikmati melalui jenis pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan oleh perbankan nasional yang saat ini mencapai 7%.

Namun, UMKM juga diharapkan dapat berusaha membuat rencana bisnis yang baik dan lengkap. Hal ini dikarenakan bank juga harus memiliki kehati-hatian dalam memberikan pinjaman sehingga pemberian pinjaman ini dapat terjamin keberlangsungannya.

Penyaluran KUR yang merupakan salah satu bentuk dukungan Pemerintah terhadap penguatan dan pertumbukan UMKM di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut

that is owned, controlled, or becomes a part either directly or indirectly from medium or large businesses and meets other criteria.

On the website of the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the Government emphasized that MSMEs have an essential role and contribution to the Indonesian economy. The strategic role of MSMEs in the national economy is reflected in the total business units of MSMEs reaching 99.9% of the whole business units and the employment contribution of in MSMEs which is 96.9% of the total employment and the contribution of MSMEs to GDP at 60.34% (BPS, 2017). The strategic role of MSMEs in the national economy encourages the Government to develop MSMEs continuously. One of the Government's programs in developing MSMEs is to increase access to MSME financing for formal financial services in the form of People's Business Credit (KUR) launched in November 2007.

The Indonesian Government's support in continuing to develop MSMEs is reflected in various policies that have been taken. Such as in the taxation sector in the form of reducing MSME Final PPh tariffs from 1% to 0.5%, so that MSMEs are expected to be able to use their profits for business expansion. Besides, the Government also accelerates licensing in doing business by launching a single submission. Through the application, it is given the ease of investing through the application of a licensing system trying to be integrated electronically. Another policy that is no less important is that cheap interest can be enjoyed through the type of People's Business Credit (KUR) provided by national banks, which currently reaches 7%.

However, SMEs are also expected to try to make a good and complete business plan. It is because banks must also be careful in providing loans so that the provision of these loans can be guaranteed its sustainability.

The distribution of KUR, which is one form of Government support for the strengthening and growth of MSMEs in Indonesia, can be described as follows.

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal	Persentase Percentage
Realisasi Penyaluran (miliar Rupiah / plafond)/ Realization of distribution (billion Rp/plafond)	140.120	120.349	19.772	16,43%
Jumlah Debitur/Total debtors	4.729.876	4.945.317	(215.441)	-4,36%

Sumber : Diolah dari data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Source: Processed from the data of the Coordinating Ministry for Economic Affairs

PENYALURAN KUR
KUR DISTRIBUTION

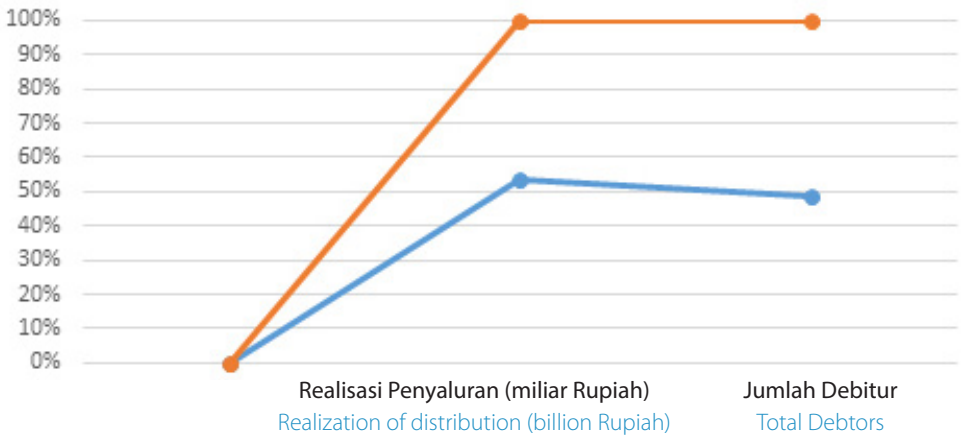

Sumber : Diolah dari data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Source: Processed from the data of the Coordinating Ministry for Economic Affairs

Realisasi penyaluran KUR per 31 Desember 2019 mencapai sebesar Rp 140,12 triliun, mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 19.77 triliun atau 16,43% jika dibandkingkan dengan capaian 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 120,35 triliun.

Adapun penyalur KUR terbesar adalah Bank BRi yaitu sebesar Rp 87,90 triliun pada tanggal 31 Desember 2019, meningkat sebesar Rp7,72triliun atau 9,63% jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 80,18 triliun.

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia ("Perum Jamkrindo") yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Pada tahun 2019 berhasil mencapai volume penjaminan sebesar Rp 203,99 triliun atau 86% dari total *outstanding* penjaminan di industri. Volume penjaminan Perum Jamkrindo tersebut terdiri dari volume penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp59,01 triliun dan penjaminan non KUR Rp 144,98 triliun.

Faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan antara lain adanya kebijakan pemerintah untuk terus memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK) disambut kalangan perbankan dengan meningkatkan penyaluran kredit kepada UKMK. Namun di sisi lain pihak perbankan berupaya memitigasi (mengalihkan) risiko kreditnya dengan melakukan kerjasama penjaminan kredit. Hal ini merupakan suatu peluang bagi perusahaan dalam merebut pangsa pasar untuk meningkatkan kinerja.

The realization of KUR distribution as of December 31, 2019, reached Rp 140.12 trillion, experiencing a significant increase of Rp. 19.77 trillion or 16.43% if compared to the achievements on December 31, 2018, amounting to Rp. 120.35 trillion.

The biggest KUR distributor was Bank BRI, which was Rp. 87.90 trillion as of December 31, 2019, an increase of Rp. 7.72 trillion or 9.63% compared to the position on December 31, 2018, which was Rp. 80.18 trillion.

The Indonesian Credit Guarantee Public Corporation ("Perum Jamkrindo"), which is a State-Owned Enterprise (BUMN), has the duty and authority to carry out business activities in the field of developing Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK). In 2019, the guaranteed volume reached Rp 203.99 trillion or 86% of the total outstanding guarantees in the industry. The volume of guarantees of PT Jamkrindo consisted of the volume of People's Business Credit (KUR) guarantees of Rp59.01 trillion and non-KUR guarantees of Rp 144.98 trillion.

External factors that affect company performance include government policies to continue to empower small, medium, and cooperative businesses (UKMK) welcomed by the banking community by increasing lending to UKMK. But on the other hand, the banking sector is trying to mitigate (transfer) its credit risk by conducting credit guarantee cooperation. This is an opportunity for companies to capture market share to improve performance.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
Operating Overview per Business Segment

Hingga akhir tahun 2019, di dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan Perusahaan belum menerapkan PSAK No. 5 tentang Segmen, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Perusahaan memiliki segmen operasi tunggal. Pembahasan segmen usaha dalam laporan ini dipisahkan berdasarkan sumber pendapatan Perusahaan yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu pendapatan imbal jasa penjaminan, pendapatan investasi dan pendapatan lain-lain.

Komposisi pendapatan tahun 2019 dan 2018 dapat digambarkan sebagai berikut

Until the end of 2019, in the financial statements that have been audited by Public Accounting Firm Hertanto, Grace, Karunawan, the Company had not applied PSAK No. 5 about Segments. Therefore, it can be said that the Company has a single operating segment. The business segment's discussion is separated based on the Company's revenue sources, which are divided into 3 (three) major groups, namely, guarantee fee, investment income, and other income.

The composition of revenues in 2019 and 2018 could be described as follows.

KOMPOSISI PENDAPATAN / REVENUES COMPOSITION

(juta Rupiah / in millions rupiah)

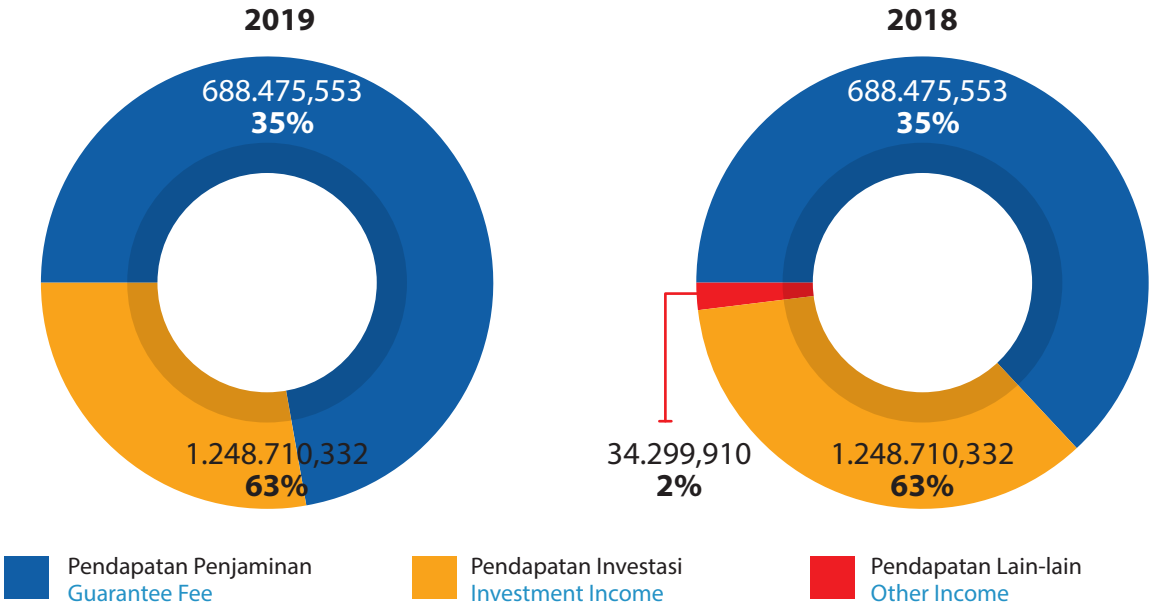

Dari gambaran tersebut di atas terlihat bahwa sebagian besar pendapatan yang diperoleh Perum Jamkrindo berasal dari imbalan jasa penjaminan yang pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp 2,10 triliun atau 72% dari total pendapatan, sedangkan pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp 1,25 triliun atau 63% dari total pendapatan.

From the description above, it can be seen that the majority of revenue obtained by Perum Jamkrindo comes from the guarantee fee, which in 2019 amounted to Rp 2.10 trillion or 72% of total revenue, while in 2018 it was recorded at Rp 1.25 trillion or 63 % of total revenue.

IMBALAN JASA PENJAMINAN

Merupakan sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Sesuai dengan POJK No. 2 Tahun 2017, Besarnya tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP) ditetapkan dengan pertimbangan paling sedikit :

1. Risiko yang dijamin, yang paling sedikit dihitung berdasarkan:

GUARANTEE FEE

Represents an amount of money received by the Guarantee Company from the Guaranteed in the framework of Guarantee activities as referred to in Law Number 1 of 2016 concerning the Guarantees. In accordance with POJK No. 2 of 2017, the amount of the Guaranteed Fee (IJP) is determined with the least consideration:

1. Guaranteed risks, at least calculated based on:

a. Rasio Klaim;
b. Jenis Kredit atau Pembiayaan;
c. Cakupan penjaminan; dan
d. Jangka waktu penjaminan;

2. Biaya administrasi umum, operasional, dan pemasaran; dan
3. Keuntungan.

Dalam melaksanakan maksud dan tujuan pembentukannya, Jamkrindo telah menjalankan kegiatan penjaminan kredit baik berupa KUR maupun non KUR, yang disalurkan oleh perbankan (penjaminan bank), baik bank konvensional maupun bank syariah dan lembaga non bank (penjaminan non bank) yang diproses secara *case by case* maupun *conditional automatic cover*.

Berikut adalah gambaran jumlah kredit yang dijamin oleh Jamkrindo pada tahun 2018 serta RKAP dan realisasi tahun 2019 :

a. Claim Ratio;
b. Type of Credit or Financing;
c. Coverage of guarantees; and
d. Period of guarantee;

2. General administrative, operational and marketing costs; and
3. Advantages.

In carrying out the purpose and objectives of its establishment, Jamkrindo has carried out credit guarantee activities in the form of People's Business Credit (KUR) and non-KUR. The banks (bank guarantees) distributed both conventional and Islamic banks and non-bank institutions (non-bank guarantees). They are processed on a case-by-case basis and conditional automatic cover.

The following was an illustration of the number of credits guaranteed by Jamkrindo in 2018 and the 2019 RKAP and realization:

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) / (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	Realisasi Realization		RKAP	Persentase Percentage	
	Tahun 2018 Year 2018	Tahun 2019 Year 2019	Tahun 2019 2019 RKAP	Capaian RKAP 2019 2019 RKAP Achievement	Pertumbuhan Growth
KUR	50.529.001	59.012.203	60.000.000	98,35%	16,79%
Non KUR	124.212.970	144.978.670	122.360.191	118,49%	16,72%
Total Kredit/Total Credit	174.741.971	203.990.873	182.360.191	111,86%	16,74%

JUMLAH KREDIT YANG DIJAMIN (JUTA RUPIAH)
GUARANTEED CREDIT (MILLION RUPIAH)

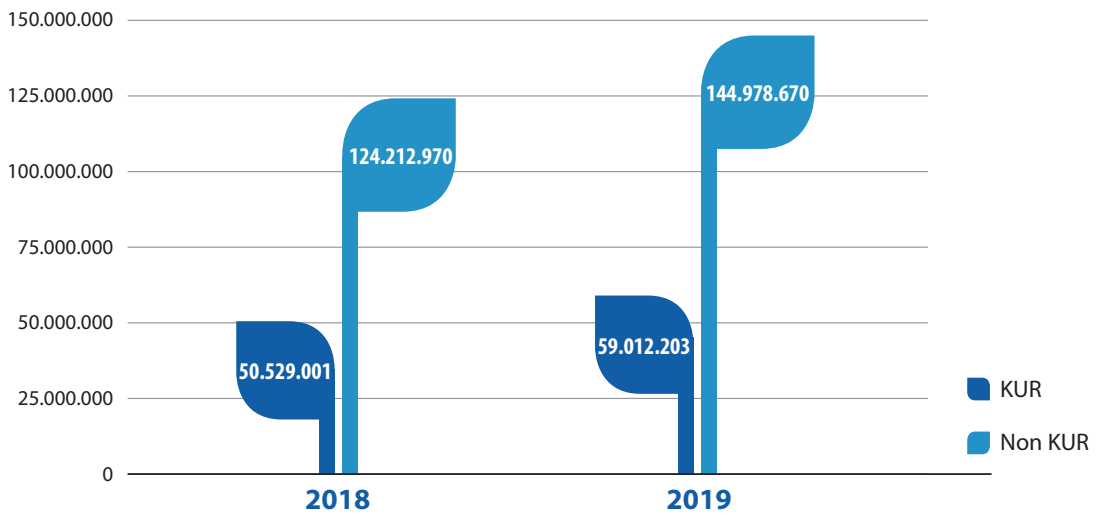

Jumlah kredit yang dijamin tahun 2019 mencapai Rp 203,99 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp8,48triliun atau 16,74% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 174,74 triliun. Peningkatan terbesar berasal dari Kredit Non KUR yaitu 20,77 miliar atau 16,74% dari sebesar Rp 124,21 triliun pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp 144,98 triliun pada tahun 2019.

The number of the guaranteed credit in 2019 reached Rp 203.99 trillion, an increase of Rp8.48 trillion or 16.74% compared to 2018, which amounted to Rp 174.74 trillion. The largest increase came from Non-KUR Credit, which was 20.77 billion or 16.74% from Rp 124.21 trillion in 2018 to Rp 144.98 trillion in 2019.

Realisasi jumlah kredit yang dijamin pada tahun 2019 tersebut mencapai 111,86% dari target yang ditetapkan dalam RKAP 2019, terutama untuk kredit Non KUR yang mencapai 118,49% sedangkan realisasi penjaminan untuk KUR sedikit di bawah target yang ditetapkan dalam RKAP 2019.

The realization of guaranteed credit in 2019 reached 111.86% of the target set in the 2019 RKAP, especially for Non-KUR credit, which reached 118.49% while the realization of guarantees for KUR was slightly below the target set in the 2019 RKAP.

Berikut adalah gambaran imbal jasa penjaminan ("IJP") pada tahun 2018 serta RKAP dan realisasi tahun 2019 :

The following is a description of the guarantee fee ("IJP") in 2018 and the 2019 RKAP and realization:

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) *(in millions of Rupiah unless otherwise stated)*

Uraian Description	Realisasi Realization		RKAP	Persentase Percentage	
	Tahun 2018 Year 2018	Tahun 2019 Year 2019	Tahun 2019 2019 RKAP	Capaian RKAP 2019 2019 RKAP Achievement	Pertumbuhan Growth
KUR	744.684	1.514.032	1.099.425	137,71%	103,31%
Non KUR	897.218	1.015.202	976.228	103,99%	13,15%
Total Kredit/Total Credit	1.641.902	2.529.234	2.075.653	121,85%	54,04%

IMBALAN JASA PENJAMINAN BRUTO (JUTA RUPIAH)
GROSS GUARANTEE FEE (MILLION RUPIAH)

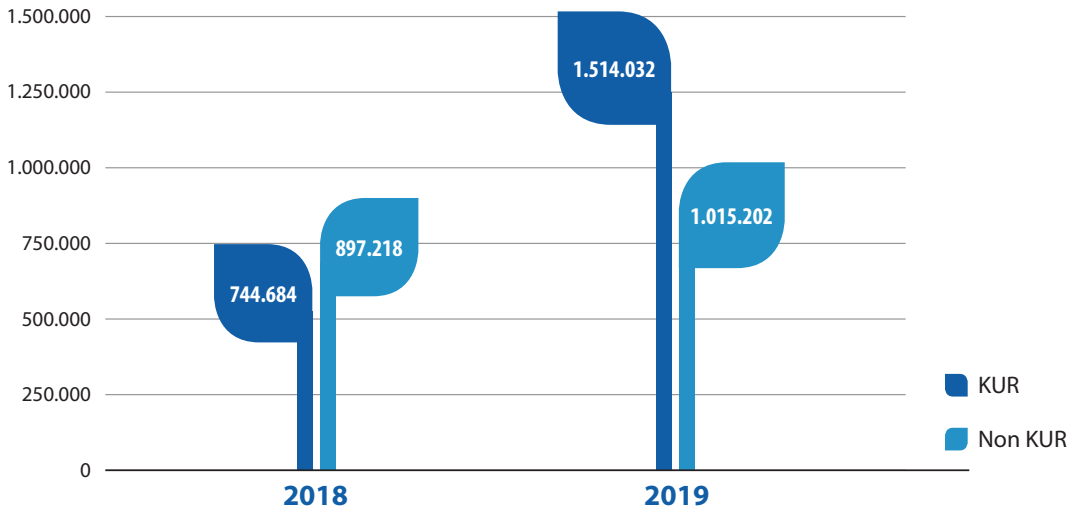

Pada tahun 2019, tercatat perolehan IJP bruto sebesar Rp 2,53 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp887,33 miliar atau 54,04% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 1,64 triliun. Peningkatan terbesar berasal dari penjaminan KUR yaitu sebesar Rp 769,35 miliar atau 103,31% dari sebesar Rp 744,68 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp 1,51 triliun pada tahun 2019.

Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian target-target dalam RKAP 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pangsa pasar penjaminan KUR dan KPRS serta penjaminan produk dari BNI dan Bank Mandiri untuk produk selain KUR dan KPRS.
2. Meningkatkan kualitas layanan (*support*) dan efektifitas *monitoring* terhadap Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
3. Melakukan market mapping terhadap mitra kerja dan memperbaiki tarif IJP KPRS.
4. Mendorong terpenuhinya SLA informasi *Tracking* system S/P/R.
5. Sosialisasi dengan pihak internal dan eksternal tentang ketentuan KUR dan KPRS yang terbaru untuk percepatan *transfer knowledge*

Dalam rangka mendukung strategi untuk mencapai sasaran pada RKAP 2019, Perusahaan menetapkan rencana kerja sebagai berikut:

1. Mengkaji dan mengevaluasi *online system* penjaminan KUR yang telah berjalan, sehingga proses penjaminan, penyelesaian klaim dan penagihan subrogasi lebih akurat. Melakukan rekonsiliasi secara periodik bersama Mitra Penyalur KUR merupakan salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan.
2. Untuk meningkatkan pelayanan kepada mitra kerja seiring terdapatnya regulasi KUR terbaru yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ("Permenko") Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, maka dilakukan perubahan dan pembaharuan Perjanjian Kerjasama (PKS) KUR dengan Bank Penyalur KUR Tahun 2019.
3. Meningkatkan jumlah Perjanjian Kerjasama ("PKS") yang dikerjasamakan dengan mitra dalam penyaluran KUR maupun KPRS. Adapun PKS KUR yang telah ditandatangani selama triwulan III 2019 yaitu PKS KUR

In 2019, gross Guarantee Fee (IJP) was recorded of Rp 2.53 trillion, an increase of Rp 887.33 billion or 54.04% compared to 2018, which was Rp 1.64 trillion. The largest increase came from the KUR guarantee, namely Rp. 769.35 billion or 103.31% from Rp. 744.68 billion in 2018 to Rp. 1.51 trillion in 2019.

The strategies set out in the context of achieving targets in the 2019 RKAP were as follows:

1. Increasing the market share of KUR and KPRS guarantees and product guarantees from BNI and Bank Mandiri for products other than KUR and KPRS.
2. Improving the quality of service (support) and effectiveness of monitoring of Regional Offices and Branch Offices
3. Conducting market mapping of business partners and improving the IJP KPRS rate.
4. Encouraging the fulfillment of the SLA of tracking system S/P/R information.
5. Socialization with internal and external parties regarding the latest KUR and KPRS provisions to accelerate transfer knowledge

To support the strategy to achieve the 2019 RKAP targets, the Company sets the following work plans:

1. Reviewing and evaluating the online system of the KUR guarantee has been running, so that the guarantee, claims settlement, and subrogation billing processes are more accurate. Conducting reconciliation periodically with KUR distributors partners is one of the evaluation forms conducted.
2. For improving services to business partners along with the latest KUR regulations namely the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia Regulation Number 6 the Year 2019, the second Amendment to the Coordinating Minister for Economic Affairs as the Chairman of the Financing Policy Committee for Micro, Small and Medium Enterprises Number 11 of 2017 concerning the KUR Implementation Guidelines, then an amendment, and a renewal made for KUR Cooperation Agreement (PKS) with the KUR Distributor Banks in 2019.
3. Increasing the number of Cooperation Agreements ("PKS") with partners in the KUR and KPRS distribution. The KUR Cooperation Agreements that have been signed during the third quarter of 2019 were KUR Cooperation

dan KUR ONLINE SULUT GO, PKS Pembaharuan PKS KUR BRI, PKS KUR ONLINE DIY, PKS KUR ONLINE BTPN. Selain itu, masih terdapat beberapa mitra yang masih dalam proses untuk melakukan kerja sama baik untuk produk KUR ataupun KPRS serta Produk dari BNI dan Bank Mandiri untuk produk selain KUR dan KPRS.

4. Memberikan *problem solving* dan meningkatkan komunikasi dengan Kantor Wilayah / Kantor Cabang Perum Jamkrindo sehubungan dengan pelaksanaan dan proses penjaminan KUR dan KPRS. Komunikasi yang dilakukan adalah memberikan informasi terbaru mengenai regulasi terkait penjaminan KUR, PKS terbaru dan ketentuan PKS dengan mitra penyalur KUR, baik melalui surat ataupun email yang dapat di akses oleh semua pihak, proses percepatan pelayanan penjaminan kepada mitra.
5. Mempercepat pelaksanaan penandatanganan PKS dengan lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Penyalur KUR.
6. Fokus dan meningkatkan *market share* terhadap 10 (sepuluh) besar pasar potensial KUR. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu mengadakan sosialisasi dan pembinaan dengan mitra penyalur KUR serta melakukan business gathering, optimalisasi pelayanan penjaminan melalui KUR online.
7. Melakukan penawaran kerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. untuk produk FLPP, SME BANKING, KSM.
8. Selain itu juga melakukan Penawaran untuk Produk *Supply Chain Financing*, SPAN dan BWU.

Kontribusi penjaminan KUR dan Non Kur terhadap Laba

Agreements, and SULUT GO KUR ONLINE Cooperation Agreement, the Renewal Cooperation Agreement of KUR BRI, DIY KUR ONLINE Cooperation Agreement, BTPN KUR ONLINE Cooperation Agreement. Besides, there were still several partners who were still collaborating for KUR or KPRS products as well as products from BNI and Bank Mandiri for products other than KUR and KPRS.

4. Providing problem-solving and improving communication with Regional Offices / Branch Offices of Perum Jamkrindo in connection with the implementation and guarantee process of KUR and KPRS. The communication is to provide the latest information on regulations related to KUR guarantee, the latest Cooperation Agreement, and Cooperation Agreement provisions with KUR distributor partners, either through letters or emails that can be accessed by all parties, the acceleration process of guarantee services to partners.
5. Accelerating the implementation of Cooperation Agreement signing with financial institutions appointed by the Government as KUR Distributors.
6. Focusing and increasing market share against 10 (ten) large potential KUR markets. One form of activities carried out is conducting socialization and coaching with KUR distributor partners and conducting business gatherings and optimizing guaranteed services through online KUR.
7. Offering cooperation with PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. for FLPP, SME BANKING, KSM products.
8. Besides that, conducting offering for Supply Chain Financing, SPAN, and BWU Products.

The contribution of KUR and Non-Kur guarantees to the 2019

(Rugi) Konsolidasi Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

Consolidated Profit (Loss) could be described as follows:

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	Konsolidasi Consolidated	Eksisting Existing	KUR KUR	Persentase Kontribusi Contribution Percentage	
				Eksisting Existing	KUR KUR
	1	2	3	4 = 2/1	5 = 3/1
Imbal Jasa Penjaminan Bersih/ Net Guarantee Revenues	2.104.732	601.930	1.502.802	28,60%	71,40%
Beban Klaim/Claim Expenses	(1.309.531)	(343.078)	(966.453)	26,20%	73,80%
Penjaminan Bersih/Guarantee Fee Net	795.201	258.852	536.349	32,55%	67,45%
Pendapatan Investasi Bersih/ Investment Income - Net	782.810	173.878	608.932	22,21%	77,79%
Beban Usaha/Operating Expenses	(809.813)	(200.945)	(608.868)	24,81%	75,19%
Pendapatan (Beban) Lain-lain/ Other Income (Expenses)	(2.484)	(281)	(2.203)	11,32%	88,68%
Laba Sebelum Pajak/ Earnings Before Tax	765.714	231.504	534.210	30,23%	69,77%
Pajak Kini/Current Income Tax	(143.168)	(22.914)	(120.254)	16,01%	83,99%
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan/ Tax Benefit (Deferred) Income Tax	3.234	3.234	-	100,00%	0,00%
Laba Tahun Berjalan/ Current Year Net Income	625.779	211.823	413.956	33,85%	66,15%

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 sebaian besar laba tahun berjalan merupakan kontribusi dari penjaminan untuk KUR yaitu sebesar Rp 413,96 miliar atau 65% dari total laba tahun berjalan Konsolidasian. Hal tersebut terutama berasal dari penjaminan bersih maupun pendapatan investasi yang cukup tinggi.

It could be seen that in 2019 most of the current year net income was a contribution from the KUR guarantee. It was Rp 413.96 billion or 65% of the total consolidated current year net income. It was mainly derived from the guarantee fee net as well as high investment income.

KINERJA PENJAMINAN KUR

Penjaminan Kredit dengan dana PMN atau disebut Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan oleh Perum Jamkrindo sejak tahun 2007 sesuai dengan Inpres No. 6 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: 170 tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat. Perum Jamkrindo yang terpilih sebagai Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat. Program Penjaminan KUR tersebut bekerja sama dengan beberapa bank pelaksana yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN serta Bank BPD, Multifinance dan Koperasi yang mendapat penugasan untuk penyaluran KUR.

KUR GUARANTEE PERFORMANCE

Credit guarantee with PMN funds or called People's Business Credit Guarantee (KUR) has been carried out by Perum Jamkrindo since 2007 in accordance with President Instruction No. 6 of 2007, and Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia Number: 170 of 2015 concerning Implementing Banks and People's Business Credit Guarantee Corporation. Perum Jamkrindo selected as the People's Business Credit Guarantee Corporation. The KUR Guarantee Program cooperates with several implementing banks, namely Bank Mandiri, BRI, BNI, and BTN, as well as Bank BPD, Multifinance, and Cooperative, that are assigned to distribute KUR.

Penjaminan KUR diperuntukkan bagi UMKM untuk jenis KUR Mikro (maksimal 25 juta), KUR Kecil/Khusus (maksimal sebesar Rp 500 juta), KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ('TKI") ditetapkan maksimal sebesar Rp 25 juta dengan sistem penjaminan secara *conditional automatic cover* (CAC), dengan Imbal Jasa Penjaminan ("IJP") yang ditanggung oleh pemerintah.

KUR guarantee is intended for MSMEs for Micro KUR types (maximum of Rp 25 million), Small / Special KUR (maximum of Rp 500 million), KUR of Indonesian Migrant Workers (TKI) Placement is set to a maximum of Rp 25 million with a conditional automatic cover (CAC) guarantee system, with Guaranteed Fee ("IJP") that are borne by the government.

Pendapatan IJP atas penjaminan KUR dicatat sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dan Nomor 22/PMK.05/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang Perubahan kedua atas PMK Nomor 135/OMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan KUR, tarif IJP disesuaikan menjadi 3,25% X *plafond* kredit / pembiayaan X 70% atau sebesar 2,275%.

IJP income from KUR guarantee is recorded according to Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 135 / PMK.05 / 2008 dated September 24, 2008, concerning the Facility for People's Business Credit Guarantee, and Number 22 / PMK.05 / 2010 dated February 12, 2010, concerning the Second Amendment to PMK Number 135 / OMK .05 / 2008 concerning KUR guarantee facilities, the IJP rate is adjusted to 3.25% x credit/financing limit x 70% or 2.275%.

IJP KUR selanjutnya diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 105/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro yang diundangkan pada tanggal 29 Mei 2015. Pada tahun 2017 berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: S-46/D.I.M.EKON/2/2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal Kebijakan KUR Tahun 2017 terdapat kenaikan besaran IJP KUR Mikro menjadi 1,75%. Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pasal 11 ayat (2) bahwa dijelaskan Imbal Jasa Penjaminan bagi penjamin KUR berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KUR, dan pada ayat (3) imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian komponon dalam Subsidi Bunga/Marjin.

KUR Guarantee Fee is further regulated in Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 105 / PMK.05 / 2015 concerning Procedures for Implementing Micro People's Business Credit Guarantee Fee promulgated on May 29, 2015. In 2017, based on the Letter of the Coordinating Ministry for Economic Affairs Number: S -46 / DIMEKON / 2/2017 dated February 22, 2017, regarding the KUR Policy in 2017, there was an increase in the amount of Micro KUR Guarantee Fee to 1.75%. Through the Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia Number: 11 of 2017 concerning Guidelines for the Implementation of People's Business Credit Article 11 paragraph (2), it is explained that the Guarantee Fee for KUR guarantors is based on the results of an agreement with KUR Distributors. And in paragraph (3), Guarantee Fee, as stated referred to in paragraph (2), becomes part of the component in the interest subsidies/margin.

Berikut adalah gambaran jumlah kredit yang dijamin oleh Jamkrindo dan IJP KUR pada tahun 2018 serta RKAP dan realisasi tahun 2019 :

The following was an illustration of the amount of credit guaranteed by Jamkrindo and KUR Guarantee Fee in 2018 and the 2019 RKAP and realization:

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	Realisasi Realuzation		RKAP	Persentase Percentage	
	Tahun 2018 Year 2018	Tahun 2019 Year 2019	Tahun 2019 2019 RKAP	Capaian RKAP 2019 2019 RKAP Achievement	Pertumbuhan Growth
Penjaminan KUR/ KUR Guarantee	50.529.001	59.012.203	60.000.000	98,35%	16,79%
IJP KUR/ KUR Guanrantee Fee	744.684	1.514.032	1.099.425	137,71%	103,31%

Realisasi penjaminan KUR pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 59,01 triliun atau mencapai 98,35% dari anggaran dalam RKAP 2019 yaitu sebesar Rp 60 triliun. Realisasi penjaminan

The realization of KUR guarantees in 2019 was Rp 59.01 trillion or reached 98.35% of the budget in the 2019 RKAP, which was Rp 60 trillion. The realization of the 2019 KUR guarantee was

KUR tahun 2019 tersebut merupakan penjaminan atas perpanjangan, restrukturisasi, suplesi kredit, penerbitan SP KUR atas permohonan penjaminan akhir tahun 2015 dan penerbitan SP KUR baru. Sedangkan pendapatan IJP KUR adalah sebesar Rp1,51 triliun atau 137,71% dari target yang ditetapkan dalam RKAP 2019 yaitu sebesar Rp1.10 triliun.

a guarantee for the extension, restructuring, credit overlay, issuance of the KUR Guarantee Certificate (SP) on the request for guarantee at the end of 2015, and the issuance of the new KUR Guarantee Certificate (SP). Meanwhile, IJP KUR revenue was Rp1.51 trillion or 137.71% of the target set in the 2019 RKAP, which was Rp1.10 trillion.

LABA (RUGI) KUR
KUR PROFIT (LOSS)

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Imbal Jasa Penjaminan Bersih/ Net Guarantee Revenues	1.502.802	744.684	758.118	101,80%
Beban Klaim/ Claim Expenses	(966.453)	(465.348)	(501.105)	107,68%
Penjaminan Bersih/ Guarantee Fee Net	536.349	279.336	257.013	92,01%
Pendapatan Investasi Bersih/ Investment Income - Net	608.932	587.008	21.924	3,73%
Beban Usaha/ Operating Expenses	(608.868)	(530.479)	(78.389)	14,78%
Pendapatan (Beban) Lain-lain/ Other Income (Expenses)	(2.203)	(29.113)	26.910	-92,43%
Laba Sebelum Pajak/ Income Before Tax	534.210	306.752	227.458	74,15%
Pajak Kini/ Current Income Tax	(120.254)	(89.654)	(30.600)	34,13%
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan/ Tax Benefit (Deferred) Income Tax	-	-	-	-
Laba Tahun Berjalan/ Current Year Income	413.956	217.098	196.858	90,68%

Dari penjaminan KUR, pada tahun 2019 Perusahaan memperoleh imbal jasa penjaminan bersih sebesar Rp1,50triliun dan mencatat beban klaim sebesar Rp 966,45 miliar, sehingga Peerusahaan mampu membukukan penjaminan bersih sebesar Rp 536,35 miliar, mengalami peninkatan sebesar Rp 257,01 miliar atau 92,01% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 279,34 miliar.

From the KUR guarantee, in 2019 the Company obtained Net Guarantee Revenues of Rp1.50 trillion and recorded claim expenses of Rp 966.45 billion so that the Company was able to book a guarantee fee net of Rp 536.35 billion, experiencing an increase of Rp 257.01 billion or 92.01% compared to 2018 which amounted to Rp 279.34 billion.

Dengan perolehan pendapatan investasi bersih sebesar Rp 608,93 miliar, membukukan beban usaha sebesar Rp 608,87 miliar, dan beban lain-lain berih sebesar Rp 2,20 miliar, pada tahun 2019 Perusahaan membukukan laba sebelum pajak dari penjaminan KUR sebesar Rp 534,21 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 227,46 miliar atau 74,15% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 306,75 miliar.

With investment income - net of Rp 608.93 billion, operating expenses of Rp 608.87 billion, and net other expenses of Rp 2.20 billion, in 2019 the Company posted income before tax from KUR guarantee of Rp 534, 21 billion, an increase of Rp 227.46 billion or 74.15% compared to 2018 which amounted to Rp 306.75 billion.

Setelah membukukan pajak kini sebesar Rp 120,25 miliar , pada tahun 2019 berhasil membukukan laba tahun berjalan dari penjaminan KUR sebesar Rp 413,96 miliar, meningkat sebesar Rp 196,86 miliar atau 90,68% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 217,10 miliar.

After posting the current income tax of Rp 120.25 billion, in 2019, the Company managed to record current year income from KUR guarantee amounting to Rp 413.96 billion, an increase of Rp 196.86 billion or 90.68% compared to 2018 which amounted to Rp 217.10 billion.

KINERJA PENJAMINAN NON KUR

Berikut adalah gambaran realisasi penjaminan Non KUR per produk tahun 2018 serta RKAP dan realisasi tahun 2019 :

NON-KUR GUARANTEE PERFORMANCE

The following was an illustration of the realization of Non-KUR guarantee per product in 2018 and the 2019 RKAP and realization:

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian / Description	Realisasi / Realization		RKAP	Persentase / Percentage	
	Tahun 2018 / Year 2018	Tahun 2019 / Year 2019	Tahun 2019 / 2019 RKAP	Capaian RKAP 2019 / 2019 RKAP Achievement	Pertumbuhan / Growth
Penjaminan Kredit Umum/General Credit Guanrantee	13.893.819	1.992.095	16.375.700	12,16%	-85,66%
Penjaminan Kredit Mikro/Micro Credit Guarantee	9.400.146	34.049.255	18.064.871	188,48%	262,22%
Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang & Jasa/Construction Credit Guarantee and Products & Services Procurement	2.200.969	2.057.024	2.849.852	72,18%	-6,54%
Penjaminan Kredit Multiguna dan Lainnya/Multipurpose Credit Guarantee and Others	29.194.562	42.099.931	21.752.493	193,54%	44,20%
Penjaminan Bank Garansi/KBG/Assurance of Bank Guarantee	11.036.808	10.561.439	14.779.447	71,46%	-4,31%
Penjaminan KPR/KPR Guarantee	59.791	48.301	4.019.255	1,20%	-19,22%
Penjaminan Pembiayaan OTO/OTO Financing Guarantee	6.137.202	593.259	4.220.000	14,06%	-90,33%
Penjaminan Supply Chain/Supply Chain Guarantee	2.074.671	4.065.355	2.586.301	157,19%	95,95%
Penjaminan Kredit FLPP/FLPP Credit Guarantee	37.305.487	35.028.370	20.979.006	166,97%	-6,10%
Penjaminan Keagenan Cargo/ Cargo Agency Guarantee	107.810	53.485	129.768	41,22%	-50,39%
Penjaminan Suretyship/ Suretyship Guarantee	12.799.807	14.429.425	16.523.497	87,33%	12,73%
Penjaminan Kredit Resi Gudang/ Warehouse Receipt Credit Guarantee	1.898	731	80.000	0,91%	-61,49%
Total Kredit/Total Credit	124.212.970	144.978.670	122.360.190	118,49%	16,72%

Pada tahun 2019, Perusahaan mencatat nilai penjaminan Non KUR adalah sebesar Rp 144,98 triliun, meningkat sebesar Rp 20,77 triliun atau 16,72% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 124,21 triliun. Peningkatan terbesar berasal dari penjaminan kredit mikro yaitu sebesar Rp 24,65 triliun atau 262,22% dari sebesar Rp 9,40 triliun pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp 34,05 triliun pada tahun 2019.

In 2019, the Company recorded a Non-KUR guarantee value of Rp 144.98 trillion, an increase of Rp 20.77 trillion or 16.72% compared to 2018, which was Rp 124.21 trillion. The largest increase came from micro-credit guarantees, amounting to Rp 24.65 trillion, 262.22% from Rp 9.40 trillion in 2018, and Rp 34.05 trillion in 2019.

Sedangkan komponen penjaminan terbesar berasal dari pinjaman kredit multiguna dan lainnya yaitu 29,04% dari total penjaminan Non KUR Tahun 2019.

While the largest guarantee component came from multipurpose credit guarantee and others, namely 29.04% of the total Non-KUR guarantee in 2019.

Berikut adalah gambaran realisasi IJP Bruto Non KUR per produk tahun 2018 serta RKAP dan realisasi tahun 2019:

The following is a description of the realization of Non-KUR Gross Guarantee Fee per product in 2018 and the 2019 RKAP and realization:

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian / Description	Realisasi / Realization		RKAP	Persentase / Perecentage	
	Tahun 2018 / Year 2018	Tahun 2019 / Year 2019	Tahun 2019 / 2019 RKAP	Capaian RKAP 2019 / 2019 RKAP Achievement	Pertumbuhan / Growth
Penjaminan Kredit Umum/General Credit Guanrantee	63.934	54.813	101.640	53,93%	-14,27%
Penjaminan Kredit Mikro/Micro Credit Guarantee	194.006	274.086	200.051	137,01%	41,28%
Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang & Jasa/Construction Credit Guarantee and Products & Services Procurement	24.178	19.135	30.734	62,26%	-20,86%
Penjaminan Kredit Multiguna dan Lainnya/Multipurpose Credit Guarantee and Others	319.805	348.921	416.811	83,71%	9,10%
Penjaminan Bank Garansi/KBG/ Assurance of Bank Guarantee	111.306	113.807	88.305	128,88%	2,25%
Penjaminan KPR/KPR Guarantee	301	245	2.981	8,22%	-18,60%
Penjaminan Pembiayaan OTO/OTO Financing Guarantee	40.237	45.401	69.569	65,26%	12,83%
Penjaminan Supply Chain/Supply Chain Guarantee	8.455	18.235	7.105	256,65%	115,67%
Penjaminan Kredit FLPP/FLPP Credit Guarantee	78.055	78.134	19.947	391,71%	0,10%
Penjaminan Keagenan Cargo/ Cargo Agency Guarantee	1.730	1.815	1.853	97,95%	4,91%
Penjaminan Suretyship/ Suretyship Guarantee	55.202	60.599	36.611	165,52%	9,78%
Penjaminan Kredit Resi Gudang/ Warehouse Receipt Credit Guarantee	8	10	621	1,61%	25,00%
Total Kredit/Total Credit	897.217	1.015.201	976.228	103,99%	13,15%

Pada tahun 2019, Perusahaan membukukan IJP Bruto Non KUR sebesar Rp 1.02 triliun, meningkat sebesar Rp 117,98 miliar atau 13,15% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 897,22 miliar. Peningkatan terbesar berasal dari penjaminan kredit mikro yaitu sebesar Rp 80,08 miliar atau 41,26% dari sebesar Rp194,01miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp 274,09 miliar pada tahun 2019. Sedangkan IJP Bruto dari penjaminan kredit multiguna dan lainnya merupakan komponen terbesar yaitu 34,37% dari total IJP Bruto Non KUR tahun 2019.

In 2019, the Company recorded a Non-KUR Gross Guarantee Fee of Rp 1.02 trillion, an increase of Rp 117.98 billion or 13.15% compared to 2018, which was Rp 897.22 billion. The largest increase came from micro-credit guarantees, amounting to Rp 80.08 billion or 41.26% from Rp194.01 billion in 2018 to Rp 274.09 billion in 2019 while the Gross Guarantee Fee of multipurpose credit guarantees and others was the largest component, namely 34.37% of the total 2019 Non-KUR Gross Guarantee Fee.

LABA (RUGI) NON KUR
NON-KUR PROFIT (LOSS)

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Imbal Jasa Penjaminan Bersih/ Net Guarantee Revenues	601.930	504.027	97.903	19,42%
Beban Klaim/ Claim Expenses	(343.078)	(257.926)	(85.152)	33,01%
Penjaminan Bersih/ Guarantee Fee Net	**258.852**	**246.101**	**12.751**	**5,18%**
Pendapatan Investasi Bersih/ Investment Income - Net	173.878	97.100	76.778	79,07%
Beban Usaha/ Operating Expenses	(200.945)	(162.757)	(38.188)	23,46%
Pendapatan (Beban) Lain-lain/ Other Income (Expenses	(281)	21.088	(21.369)	-101,33%
Laba Sebelum Pajak/ Earnings Before Tax	**231.504**	**201.532**	**29.972**	**14,87%**
Pajak Kini/ Current Income Tax	(22.914)	(27.620)	4.706	-17,04%
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan/ Tax Benefit (Deferred) Income Tax	3.234	6.533	(3.300)	-
Laba Tahun Berjalan/Current Year Net Income	**211.823**	**180.445**	**31.378**	**17,39%**

Dari penjaminan Non KUR, pada tahun 2019 Perusahaan memperoleh imbal jasa penjaminan bersih sebesar Rp 601,93 miliar dan mencatat beban klaim sebesar Rp 343,08miliar, sehingga Perusahaan mampu membukukan penjaminan bersih sebesar Rp 258,85 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 12,75 miliar atau 5,18% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 246,10 miliar.

Dengan perolehan pendapatan investasi bersih sebesar Rp 173,88 miliar, membukukan beban usaha sebesar Rp 200,95 miliar, dan beban lain-lain berih sebesar Rp 281 juta, pada tahun 2019 Perusahaan membukukan laba sebelum pajak dari penjaminan Non KUR sebesar Rp 231,50 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 29.97 miliar atau 14,87% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 201,55 miliar.

Setelah membukukan pajak kini sebesar Rp 22,91 miliar dan adanya manfaat pajak tangguhan sebesar Rp3,23 miliar, pada tahun 2019 berhasil membukukan laba tahun berjalan dari penjaminan Non KUR sebesar Rp 211,82 miliar, meningkat sebesar Rp 31,38 miliar atau 17,39% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 180,45 miliar.

From the Non-KUR guarantee in 2019, the Company obtained net guarantee revenues of Rp 601.93 billion and recorded claim expenses of Rp 343.08 billion, so that the Company was able to book guarantee fee net of Rp 258.85 billion, experiencing an increase of Rp 12.75 billion or 5.18% compared to 2018 in the amount of Rp 246.10 billion.

With the acquisition of investment income - net amounted to Rp 173.88 billion, booked operating expenses of Rp 200.95 billion, and other expenses totaling Rp 281 million, in 2019, the Company posted Earnings Before Tax from Non-KUR guarantees of Rp 231.50 billion, an increase of Rp 29.97 billion or 14.87% compared to 2018 which amounted to Rp 201.55 billion.

After recording the current income tax of Rp. 22.91 billion and the existence of Tax Benefit (Deferred) Income Tax of Rp. 3.23 billion, in 2019, managed to record current year net income from Non-KUR guarantees amounted to Rp 211.82 billion, an increase of 31.38 billion or 17.39% compared to 2018, which amounted to Rp 180.45 billion.

PENDAPATAN INVESTASI

Perusahaan melakukan investasi pada instrumen-instrumen keuangan yang tersedia di pasar, baik pasar modal maupun perbankan. Investasi yan dilakukan dalam bentuk surat berharga terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu yang dimiliki hingga jatuh tempo dan yang tersedia di jual.

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau tersedia untuk dijual.

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.

Dalam rangka mengupayakan pembentukan struktur pendapatan yang berimbang yaitu hasil investasi dapat menutupi biaya operasional, maka dilakukan beberapa strategi investasi antara lain: Pembelian obligasi korporasi, RDT dan RDPT yang memiliki tingkat imbal hasil minimal 8,5% gross, profit taking instrument saham serta optimalisasi dana giro mingguan dan bulanan. Perusahaan juga melakukan profit taking di beberapa reksa dana saham dan menempatkan kembali reksa dana yang bersifat recurring income (fixed income) dan/atau reksa dana indeks, serta memperoleh dividen dari reksa dana open end yang dimiliki dan juga melakukan trading SBN dan saham secara prudent

Pada tanggal 31 Desember 2019, tercatat jumlah investasi dalam bentuk surat berharga total sebesar Rp4,66triliun, yang terdiri dari surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp 2,17 triliun dan yang termasuk kategori tersedia untuk dijual senilai Rp 2,49 triliun. Adapun sebaran investasi tersebut dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut

SURAT BERHARGA DIMILIKI HINGGA JATUH TEMPO
HELD-TO-MATURITY MARKETABLE SECURITIES

- Investasi Deposito
  Time Deposits Investment
- Sukuk
  Sukuk
- Efek Beragun Aset ("EBA")
  Security (Asset Underlying)
- Obligasi
  Bonds
- Reksadana
  Mutul Funds

INVESTMENT INCOME

The Company invests in financial instruments available in the market, both capital markets and banking. Investments made in the form of marketable securities are divided into 2 (two) categories: those held to maturity and those that are available for sale.

Held-to-maturity investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and have fixed maturities, which is the Company has a positive intention and ability to hold to maturity, and are not specified at fair value through profit loss or available for sale.

The available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets designated as available for sale or are not classified in one of the other categories of financial assets.

To establish a balanced income structure, namely investment returns, can cover operational costs. Several investment strategies have been carried out, including Purchasing corporate bonds, RDT, and RDPT that have a minimum yield of 8.5% gross, profit-taking of share instruments, and optimizing the current account funds weekly and monthly. The Company also makes profit-taking in several equity funds, re-places mutual funds that are recurring income (fixed income) and/or index mutual funds, and obtains dividends from open-end mutual funds that are owned and trades SBN and shares prudently.

As of December 31, 2019, total investment in marketable securities was recorded at Rp4.66 trillion, consisting of held-to-maturity marketable securities of Rp 2.17 trillion and included in the category of available-for-sale valued at Rp 2.49 trillion. The investment distribution could be illustrated in the following diagram.

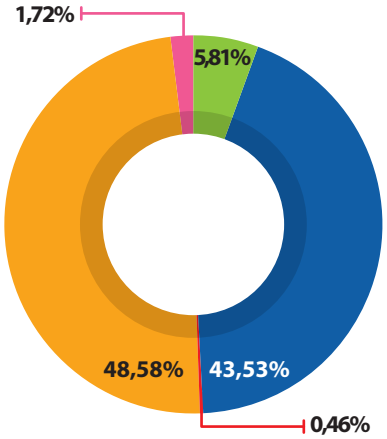

SURAT BERHARGA TERSEDIA UNTUK DIJUAL
AVAILABLE-FOR-SALE MARKETABLE SECURITIES

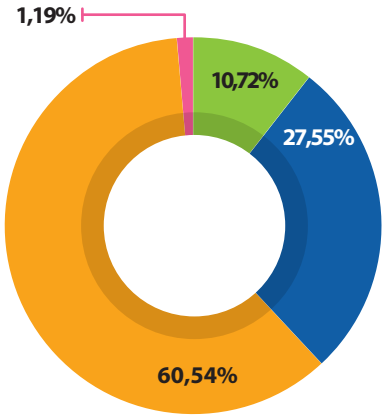

Saham
Stock

Reksadana
Mutul Funds

Obligasi
Bonds

Efek Beragun Aset ("EBA")
Security (Asset Underlying)

Terhadap investasi yang telah dilakukan Perusahaan, pada tahun 2019 telah diperoleh pendapatan hasil investasi bruto (sebelum dikurangi dengan beban investasi) sebesar Rp 806,55 miliar yang mengalami peningkatan sebesar Rp 118,08 miliar atau 17,15% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yaitu sebesar Rp 688,48 miliar.

Mayoritas pendapatan investasi dalam bentuk bunga deposito yaitu sebesar Rp 486,67 miliar atau 60,34% dari total pendapatan investasi bruto. Adapun komposisi pendapatan investasi dapat digambarkan dalam diagram berikut

Concerning investments made by the Company, in 2019, gross investment income (before deducting investment costs) was obtained at Rp 806.55 billion, an increase of Rp 118.08 billion, or 17.15% compared to the same period in 2018, namely in the amount of Rp. 688.48 billion.

The majority of investment income in the form of Time Deposit Interest was Rp 486.67 billion or 60.34% of the total gross investment income. The composition of investment income could be illustrated in the following diagram.

PENDAPATAN INVESTASI BRUTO TAHUN 2019
GROSS INVESTMENT INCOME IN 2019

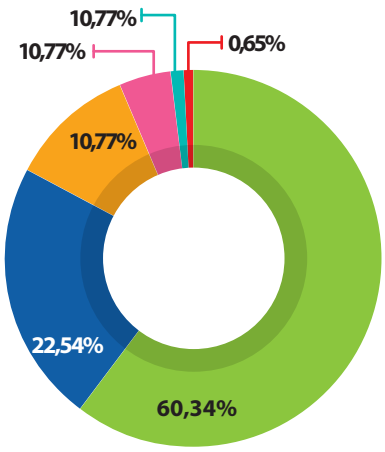

Bunga Deposito
Time Deposit Interest

Bunga Obligasi
Bond Interest

Pendapatan Reksadana
Mutual Fund Income

Pendapatan Capital Gain Saham
Capital Gain Share Interest

Dividen
Dividend

Efek Beragun Aset
Security (Assets Underlying

PENDAPATAN LAIN-LAIN

Selain IJP dan Pendapatan Investasi, Perusahaan juga membukukan Pendapatan Lain-lain yang merupakan pendapatan diluar usaha.

Pendapatan lain-lain selama tahun 2019 adalah sebesar Rp 12,96 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp21,34miliar atau 62,22% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yaitu sebesar Rp34,30miliar. Sebagian besar pendapatan lain-lain bruto berasal dari pendapatan jasa giro yaitu sebesar Rp5,12miliar atau 39,49%. Adapun komposisi pendapatan lain-lain dapat digambarkan dalam diagram berikut

OTHER INCOME

In addition to Guarantee Fee (IJP) and Investment Income, the Company also booked Other Income, which is income besides operating revenue.

Other income during 2019 was Rp 12.96 billion, a decrease of Rp 21.34 billion or 62.22% compared to the same period in 2018, which was Rp 34.30 billion. Most of the gross other income came from Interest Income, which was Rp 5.12 billion or 39.49%. The composition of other income could be illustrated in the following diagram.

PENDAPATAN LAIN-LAIN TAHUN 2019
OTHER INCOME IN 2019

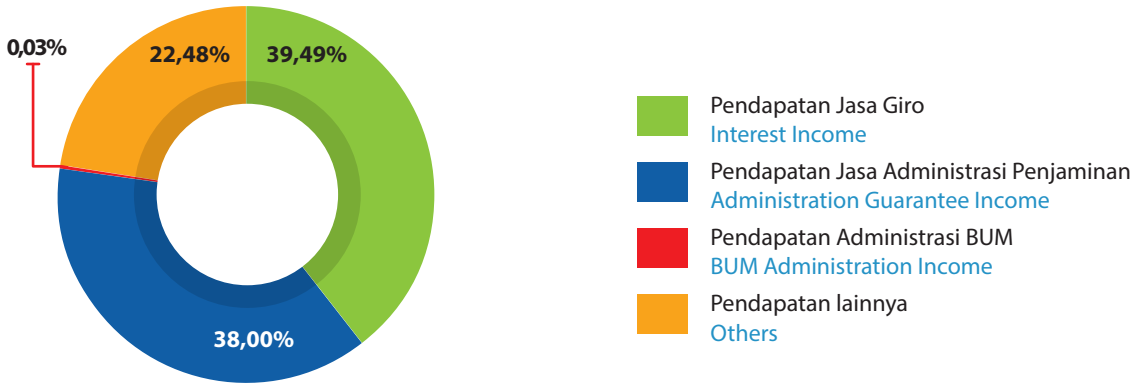

KINERJA PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH (ENTITAS ANAK)
Performance of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (the Subsidiary)

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamkrindo Syariah"), adalah Perusahaan Penjaminan yang berbasis syariah yang merupakan anak perusahaan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), BUMN Penjamin Kredit terbesar di Indonesia. Pada awalnya, Perum Jamkrindo mendirikan unit usaha syariah yang berbentuk Divisi Penjaminan Syariah berdasarkan Rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: U-217/DSN-MUI/IX/2006 tanggal 15 September 2006yang diresmikan pada 13 Februari tahun 2007.

Dari tahun ke tahun, bisnis Penjaminan Syariah semakin berkembang dengan tingkat pertumbuhan volume penjaminan selama 7 tahun terakhir rata-rata sebesar 17,39%per tahun. Di samping itu, mitra kerja Penjaminan Syariah juga makin bertambah, dimana pada tahun 2014 telah mencapai 26 mitra kerja, yang terdiri dari bank syariah, institusi keuangan syariah non bank, UUS lembaga keuangan syariah, BPR Syariah dan lembaga lainnya.

Karena perkembangan bisnis tersebut, maka PT Jamkrindo Syariah didirikan pada tanggal 19 September 2014 dengan visi "menjadi perusahaan penjaminan syariah terdepan yang mendukung perkembangan perekonomian nasional"

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamkrindo Syariah"), is a sharia-based Guarantee Company which is a subsidiary of Perum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), the largest SOEs Credit Guarantee in Indonesia. Initially, Perum Jamkrindo established a sharia business unit in the form of a Sharia Guarantee Division based on the MUI National Sharia Board Recommendation Number: U-217 / DSN-MUI / IX / 2006 dated September 15, 2006, which was formalized on February 13, 2007.

From year to year, the Sharia Guarantee business is growing with the guaranteed volume over the past 7 (seven) years averaging 17.39% per year. Besides, Sharia Guarantee partners also increased, wherein 2014 there were 26 business partners, consisting of sharia banks, non-bank sharia financial institutions, Sharia Business Unit of Sharia financial institutions, Sharia People's Credit Banks, and other institutions.

Due to business development, PT Jamkrindo Syariah was established on September 19, 2014, with the vision of "becoming a leading sharia guarantee company that supports the national economy development."

KINERJA JAMKRINDO SYARIAH

JAMKRINDO SYARIAH PERFORMANCE

LAPORAN POSISI KEUANGAN
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain / in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	Realisasi Tahun 2018 Year 2018 Realization	Tahun 2019 Year 2019		Persentase Percentage	
		Realisasi Realization	RKAP RKAP	Capaian RKAP 2019 2019 RKAP Achievement	Pertumbuhan Growth
ASET/ASSETS					
Kas dan Setara Kas/Cash and Cash Equivalent	372.009	502.748	566.594	88,73%	35,14%
Surat Berharga/Marketable Securities	87.022	163.652	96.491	169,60%	88,06%
Piutang Penjaminan Ulang/Reguarantee Receivables	16.934	41.329	3.524	1172,76%	144,06%
Piutang Lain-Lain/Other Receivable	4.906	7.130	2.186	326,13%	45,35%
Beban Dibayar Dimuka/Prepaid Expenses	165.216	194.029	262.861	73,81%	17,44%
Aset tetap/Fixed assets	2.617	3.020	58.491	5,16%	15,40%
Aset Tidak Berwujud/Intangible Assets	137	146	-	-	6,28%
Aset Pajak Tangguhan/Deferred Tax Assets	4.559	3.628	1.146	316,65%	-20,43%
Aset Lain-lain/Other Assets	93.239	143.932	51.101	281,66%	54,37%
Jumlah Aset/Total Assets	**746.638**	**1.059.614**	**1.042.395**	**101,65%**	**41,92%**
LIABILITAS/LIABILITIES					

Uraian Description	Realisasi Tahun 2018 Year 2018 Realization	Tahun 2019 Year 2019		Persentase Percentage	
		Realisasi Realization	RKAP RKAP	Capaian RKAP 2019 2019 RKAP Achievement	Pertumbuhan Growth
Utang Klaim/Claim Payable	1.060	1.329	634	209,49%	25,30%
Utang Pajak/Tax Payable	813	641	315	203,66%	-21,22%
Utang Penjaminan Ulang/Co-Guarantee Payable	12.639	11.290	14.754	76,52%	-10,67%
Pendapatan Ditangguhkan/Deferred Income	361.556	448.827	520.465	86,24%	24,14%
Cadangan Klaim/Claims Reserve	11.583	15.397	12.234	125,85%	32,92%
Utang Lain-Lain/Other Payable	18.258	23.941	18.822	127,20%	31,12%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja/ Employee Benefits Liabilities	234	465	199	233,15%	98,17%
Jumlah Liabilitas/Total Liabilities	**406.145**	**501.889**	**567.424**	**88,45%**	**23,57%**
EKUITAS/EQUITY					
Penyertaan Modal/Share Capital	300.000	475.000	400.000	118,75%	58,33%
Cadangan – Cadangan/Reserves	22.281	44.825	44.293	101,20%	101,18%
Komponen Ekuitas Lainnya/Other Equity Component	(4.360)	1.338	504	265,14%	-130,68%
Saldo Laba Tahun Lalu/ Last year Retained Earning	-	-	-	-	-
Saldo Laba/Retained Earning	22.572	36.563	30.174	121,18%	61,99%
Total Ekuitas/Total Equity	**340.493**	**557.725**	**474.971**	**117,42%**	**63,80%**
Total Liabilitas dan Ekuitas/Total Liabilities and Equity	**746.638**	**1.059.614**	**1.042.395**	**101,65%**	**41,92%**

ASET

Pada tanggal 31 Desember 2019, total aset tercatat sebesar Rp 1,06 triliun, meningkat sebesar Rp312,98miliar atau 41,92% dibandingkan posisi 31 Desember 208 yaitu sebesar Rp 746,64 miliar.Peningkatan terbesar berasal dari jumlah kas dan setara kas yang meningkat sebesar Rp130,74miliar atau 35,14% dari sebesar Rp 372,01 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 502,75 miliar pada tanggal 31 Desember 2019. Realisasi total aset tanggal 31 Desember 2019 tersebut mencapai 101,65% dari target dalam RKAP 2019 terutama karena realisasi piutang penjaminan ulang yang menapai 1.172,76% dari target.

ASSETS

As of December 31, 2019, total assets were recorded at Rp 1.06 trillion, an increase of Rp312.98 billion, or 41.92% compared to the position on December 31, 208 of Rp 746.64 billion. The largest increase came from the cash and cash equivalents that increased to Rp130.74 billion or 35.14% from Rp 372.01 billion as of December 31, 2018, to Rp 502.75 billion as of December 31, 2019. Total assets realization as of December 31, 2019, reached 101.65% of the 2019 RKAP target, mainly due to the realization of Reguarantee Receivables, which reached 1,172.76% of the target.

LIABILITAS

Pada tanggal 31 Desember 2019, total liabilitas tercatat sebesar Rp 501,89 miliar, meningkat sebesar Rp95,74miliar atau 23,57% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp406,15miliar.Peningkatan terbesar berasal dari pendapatan yang ditangguhkan yang meningkat sebesar Rp82,27miliar atau 24,14% dari sebesar Rp 361,56 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 448,83 miliar pada tanggal 31 Desember 2019. Realisasi total liabilitas tanggal 31 Desember 2019 tersebut mencapai 88,45% dari target dalam RKAP 2019 terutama karena realisasi utang penjaminan ulang dan pendapatan yang ditangguhkan di bawah target dalam RKAP 2019 yaitu masing-masing mencapai 76,52% dan 86,24%.

LIABILITIES

As of December 31, 2019, total liabilities were recorded at Rp 501.89 billion, an increase of Rp 95.74 billion, or 23.57% compared to the position on December 31, 2018, of Rp 406.15 billion. The largest increase came from deferred income, which increased by Rp 82.27 billion or 24.14% from Rp 361.56 billion as of December 31, 2018, to Rp 448.83 billion as of December 31, 2019. Total liabilities realization as of December 31, 2019, reached 88.45% of the target in 2019 RKAP, mainly due to the realization of Co-Guarantee Payable and Deferred Income below the target in the 2019 RKAP, namely 76.52%, and 86.24%, respectively.

EKUITAS

Pada tanggal 31 Desember 2019, total ekuitas tercatat sebesar Rp 557,73 miliar, meningkat sebesar Rp217,23miliar atau 63,80% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp340,49miliar. Peningkatan terbesar berasal dari penambahan penyertaan modal yaitu sebesar Rp 175,00 miliar atau 58,33% dari sebesar Rp 300,00 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 475,00 miliar pada tanggal 31 Desember 2019. Realisasi total liabilitas tanggal 31 Desember 2019 tersebut mencapai 117,42% dari target dalam RKAP 2019 terutama karena realisasi komponen ekuitas lainnya yang mencapai 265,14% dari target.

EQUITY

As of December 31, 2019, total equity was recorded at Rp 557.73 billion, with an increase of Rp217.23 billion, or 63.80% compared to the position on December 31, 2018, Rp340.49 billion. The largest increase came from additional share capital, which was Rp 175.00 billion or 58.33% from Rp 300.00 billion as of December 31, 2018, to Rp 475.00 billion as of December 31, 2019. Total liabilities realization as of December 31, 2019, reached 117.42% of the target in 2019 RKAP, mainly due to the realization of other equity components, which reached 265.14% of the target.

LAPORAN LABA (RUGI) / STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	Realisasi Tahun 2018 Year 2018 Realization	Tahun 2019 Year 2019		Persentase Percentage	
		Realisasi Realization	RKAP RKAP	Capaian RKAP 2019 2019 RKAP Achievement	Pertumbuhan Growth
Imbal Jasa Penjaminan Bersih/Net Guarantee Revenues	75.482	110.679	97.672	113,32%	46,63%
Beban Klaim/Claim Expenses	(31.003)	(57.821)	(29.515)	195,90%	86,50%
Penjaminan Bersih//Guarantee Fee Net	44.479	52.859	68.157	77,55%	18,84%
Pendapatan Investasi Bruto/ Gross Investment Income	24.582	44.872	36.064	124,42%	82,54%
Beban Usaha/ Operating Expenses	(45.338)	(55.384)	(62.972)	87,95%	22,16%
Pendapatan (Beban) Lain-lain/ Other Income (Expenses)	1.165	1.691	2.192	77,14%	45,19%
Laba Sebelum Pajak/ Income Before Tax	24.887	44.037	43.440	101,37%	76,95%
Pajak Kini/ Current income tax	(4.630)	(8.414)	(7.213)	-	81,73%
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan/ Tax Benefit (Deferred) Income Tax	2.287	954	-	-	-58,29%
Jumlah Beban Pajak Penhasilan/ Total Income Tax Expenses	(2.344)	(7.461)	(7.213)	103,44%	218,33%
Laba Tahun Berjalan/Current Year Net Income	22.543	36.576	36.228	100,96%	62,25%

Pada tahun 2019, Perusahaan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp 36,23 miliar, meningkat sebesar Rp14,03miliar atau 62,25% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yaitu sebesar Rp22,54miliar. Peningkatan terbesar berasal dari peingkatan imbal jasa penjaminan bersih yaitu sebesar Rp 35,20 miliar atau 113,32% dari sebesar Rp 75,48 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp 110,68 miliar pada tahun 2019. Realisasi laba tahun berjalan tahun 2019 tersebut mencapai 100,96% dari target dalam RKAP 2019 terutama karena realisasi pendapatan investasi bruto yang mencapai 124,42% dari target.

In 2019, the Company booked Current Year Net Income of Rp 36.23 billion, an increase of Rp 14.03 billion or 62.25% compared to the same period in 2018, which was Rp 22.54 billion. The largest increase came from the increase in Net Guarantee Revenues, which was Rp 35.20 billion or 113.32% from Rp 75.48 billion in 2018 to Rp 110.68 billion in 2019. Realization of the Current Year Net Income in 2019 reached 100.96% of the target in 2019 RKAP. It was mainly due to the realization of gross investment income, which reached 124.42% of the target.

TINJAUAN KEUANGAN
Financial Review

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hartanto, Grace, Karunawan dalam laporan Nomor : 00012/2.1000/AU.1/08/0912-2/1/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dan mendapat opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pemahaman atas uraian tinjauan keuangan ini tetap memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Dalam tahun berjalan, Entitas telah menerapkan standar akuntansi keuangan ("SAK") dan intrepretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan mempengaruhi laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019.

KINERJA KEUANGAN

Kinerja keuangan Perum Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo") terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta Laporan Arus Kas disajikan sebagai berikut.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan Jamkrindo pada 31 Desember 2019 menunjukkan kinerja yang meningkat, dengan mencatat jumlah aset sebesar Rp 17,54 triliun, meningkat sebesar Rp 1,30 triliun atau 8,02% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 16,24 triliun. Peningkatan Aset tersebut dibiayai dari ekuitas yang meningkat sebesar Rp 658,21 miliar yaitu dari sebesar Rp 11,30 triliun pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 11,95 triliun pada tanggal 31 Desember 2019, dan dari liabilitas yang meningkat sebesar Rp 644,50 miliar yaitu dari sebesar Rp 4,95 triliun pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 5,59 pada tanggal 31 Desember 2019.

The financial reviews described below referred to the Consolidated Financial Statements for the years ended December 31, 2019, and 2018 presented in this Annual Report. The Financial Statements have been audited by Hartanto, Grace, Karunawan Public Accounting Firm in the report Number: 00012 / 2.1000 / AU.1 / 08 / 0912-2 / 1 / II / 2020 dated February 10, 2020, and received an unqualified opinion, in all material respects, the consolidated financial position of Perum Jaminan Kredit Indonesia and its subsidiaries as of December 31, 2019, and the financial performance and consolidated cash flows for the year ended on that date, according to Indonesian Financial Accounting Standards.

Understanding the description of this financial review still pays attention to the explanation in the notes of the Consolidated Financial Statements as an inseparable part of this Annual Report.

In the current year, the Entity has adopted financial accounting standards ("SAK") and interpretations of new and revised financial accounting standards ("ISAK") issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board - Indonesian Institute of Accountants (DSAK - IAI), which were considered relevant to their operations and affected financial statements as of December 31, 2019.

FINANCIAL PERFORMANCE

The financial performance of Perum Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo") consists of the performance of the Statements of Financial Position, Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, as well as the Statement of Cash Flows, presented as follows.

FINANCIAL POSITION REPORT

Jamkrindo's financial position on December 31, 2019, showed improved performance by recording total assets of Rp 17.54 trillion, an increase of Rp 1.30 trillion or 8.02% compared to the position on December 31, 2018, which was Rp 16.24 trillion. The increase in Assets was funded from equity, which increased by Rp. 658.21 billion from Rp. 11.30 trillion as of December 31, 2018, to Rp. 11.95 trillion as of December 31, 2019, and from liabilities, which increased by Rp. 644.50 billion, from Rp. 4.95 trillion as of December 31, 2018, to as much as Rp. 5.59 as of December 31, 2019.

TABEL IKHTISAR POSISI KEUANGAN
TABLE OF FINANCIAL POSITION OVERVIEW

(angka dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (figures in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal	Persentase Percentage
Jumlah Aset/Total Assets	17.543.697	16.240.997	1.302.700	8,02%
Jumlah Liabilitas/Total Liabilities	5.589.811	4.945.317	644.495	13,03%
Jumlah Ekuitas/Total Equity	11.953.885	11.295.680	658.205	5,83%

GRAFIK POSISI KEUANGAN
GRAPH OF FINANCIAL POSITION

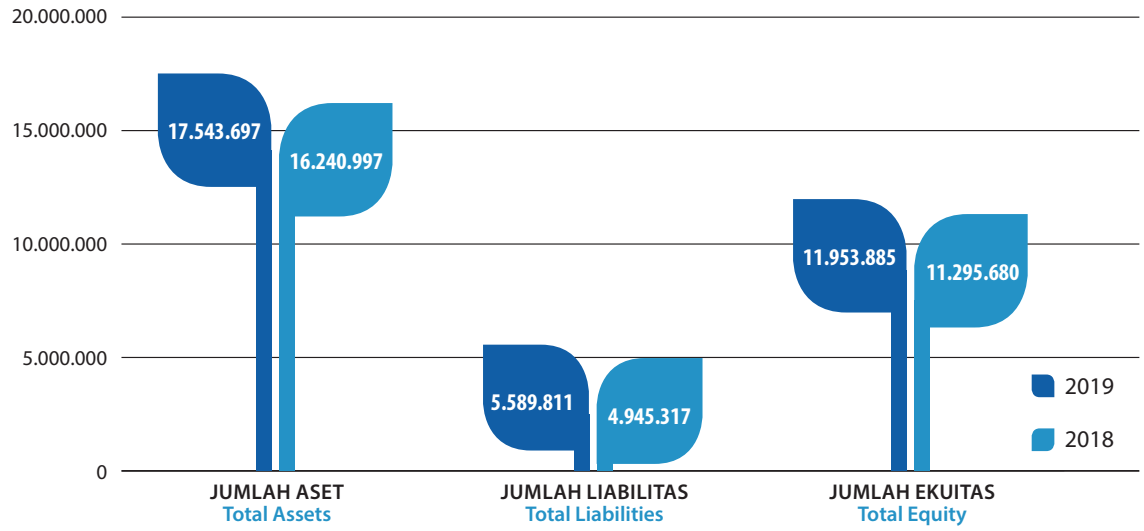

Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diperkirakan akan diperoleh perusahaan.

Assets

Assets are resources that are controlled by the company as a result of past events and from which future economic benefits are expected to be obtained by the company.

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal	Persentase Percentage
Kas dan Setara Kas/*Cash and Cash Equivalents*	6.140.958	6.190.307	(49.349)	-0,80%
Surat Berharga/*Marketable Securities*	4.656.678	4.124.057	532.620	12,91%
Piutang Imbal Jasa Penjaminan-Bersih/*Guarantee Receivables - Net*	2.890.970	2.666.853	224.118	8,40%
Piutang Penjaminan Ulang – Bersih/*Reguarantee Receivables - Net*	421.760	254.607	167.154	65,65%
Pinjaman yang Diberikan-Bersih/*Loans -Net*	413	656	(244)	-37,10%
Piutang Lain-Lain/*Other Receivables*	215.878	104.901	110.977	105,79%
Premi dan Fee Dibayar Dimuka/*Prepaid Premium and Fees*	1.608.933	1.384.677	224.256	16,20%
Beban Dibayar Dimuka/*Prepaid Expenses*	33.324	27,806	5.518	19,84%
Aset tetap – Bersih/*Fixed assets - Net*	517.865	477.067	40.798	8,55%
Aset Tidak Berwujud – Bersih/*Intangible Assets - Net*	40.141	137	40.004	29099,53%
Aset Pajak Tangguhan/*Deferred Tax Assets*	211.344	231.563	(20.219)	-8,73%
Aset Lain-lain/*Other Assets*	805.431	778.365	27.067	3,48%
Jumlah Aset/Total Assets	**17.543.697**	**16.240.997**	**1.302.700**	**8,02%**

Pada tangga 31 Desember 2019, Jamkrindo mencatat jumlah aset sebesar Rp 17,54 triliun, meningkat sebesar Rp 1,30 triliun atau 8,02% jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2018 Peningkatan terbesar berasal dari komponen surat berharga yang meningkat sebesar Rp 532,62 miliar atau 12,91%, yaitu dari sebesar Rp 4,12 triliun pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 4,66 triliun pada tanggal 31 Desember 2019. Sedangkan kas dan setara kas merupakan komponen terbesar yaitu 35% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019.

On December 31, 2019, Jamkrindo recorded total assets of Rp. 17.54 trillion, an increase of Rp. 1.30 trillion or 8.02% compared to the position on December 31, 2018. The largest increase came from the marketable securities component, which increased by Rp. 532.62 billion or 12.91%, from Rp 4.12 trillion as of December 31, 2018, to Rp 4.66 trillion as of December 31, 2019, while cash and cash equivalents were the largest components, 35% of total assets as of December 31, 2019.

JUMLAH ASET (JUTA RUPIAH)
TOTAL ASSETS (MILLION RUPIAH)

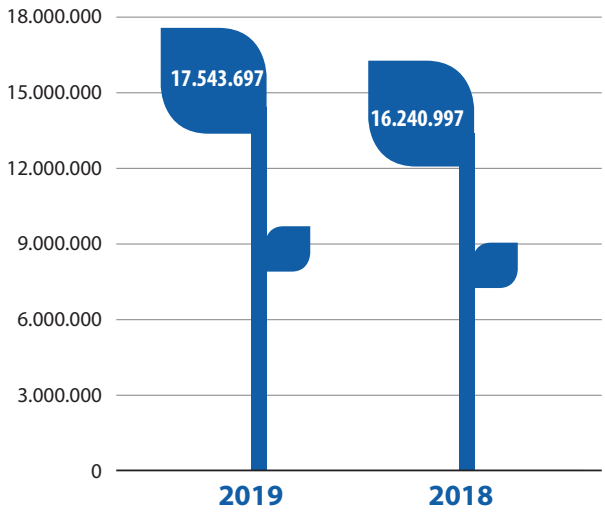

KAS DAN SETARA KAS
CASH AND CASH EQUIVALENTS

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal	Persentase Percentage
Kas/ *Cash on hand*	1.337	8.639	(7.302)	-84,52%
Giro/ *Bank Account*				
- Pihak Berelasi/ *Related Parties*	57.656	161.979	(104.323)	-64,41%
- Pihak Ketiga/ *Third Parties*	29.621	64.753	(35.131)	-54,25%
Jumlah Giro/ *Total Bank Account*	87.277	226.731	(139.455)	-61,51%
Deposito/ *Time Deposits*				
- Pihak Berelasi/ *Related Parties*	4.721.620	4.232.046	489.574	11,57%
- Pihak Ketiga/ *Third Parties*	1.330.724	1.722.891	(392.167)	-22,76%
Jumlah Deposito/ *Total Time Deposits*	6.052.344	5.954.937	97.407	1,64%
Jumlah Kas da Setara Kas/ Total Cash and Cash Equivalents	**6.140.958**	**6.190.307**	**(49.349)**	**-0,80%**

KAS DAN SETARA KAS (JUTA RUPIAH)
CASH AND CASH EQUIVALENTS (MILLION RUPIAH

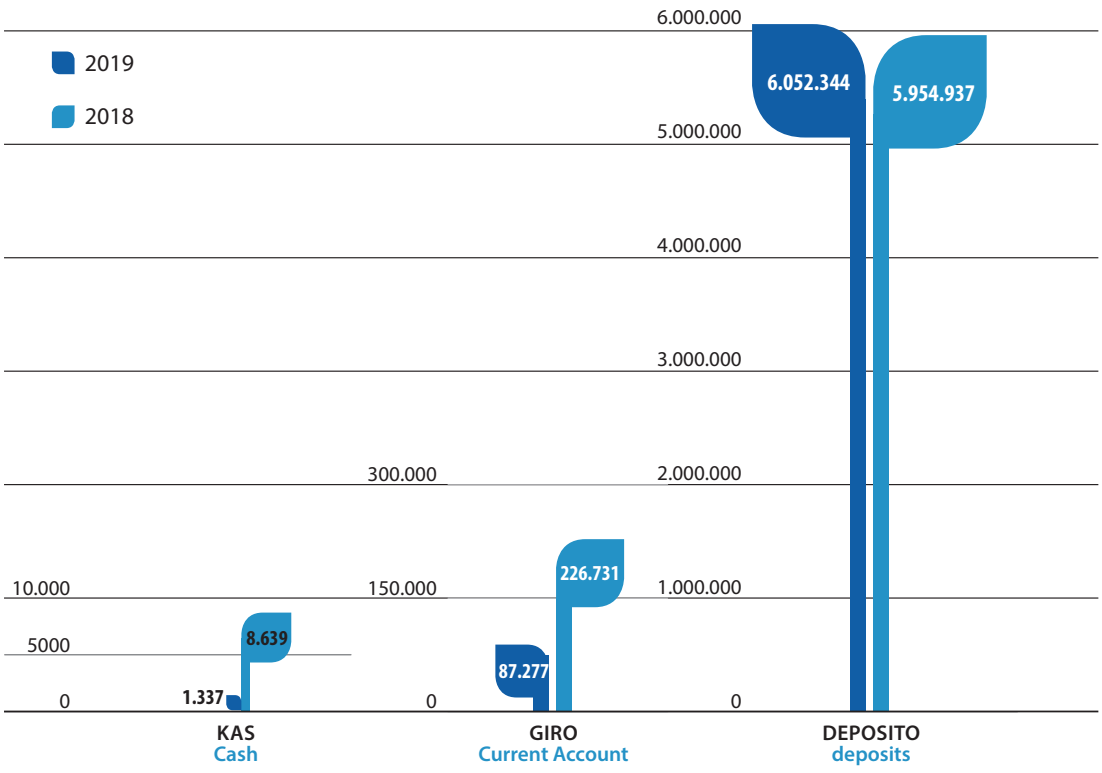

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah kas dan setara kas sebesar Rp 6,14 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp 49,35 miliar atau 0,80% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 6,19 triliun. Penurunan terbesar berasal dari penempatan dalam bentuk giro, sebesar Rp 139,46 miliar atau 61,51%, yaitu dari sebesar Rp 226,73 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 87,28 miliar pada tanggal 31 Desember 2019.

Penempatan dalam bentuk deposito merupakan komponen terbesar yaitu 98,56% dari jumlah kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2019.

As of December 31, 2019, the amount of cash and cash equivalents was Rp 6.14 trillion, a decrease of Rp 49.35 billion or 0.80% compared to the position on December 31, 2018, of Rp 6.19 trillion. The largest decrease came from placements in the form of Bank Account, amounting to Rp 139.46 billion or 61.51%, from Rp 226.73 billion as of December 31, 2018, to Rp 87.28 billion as of December 31, 2019.

Placement in the form of time deposits was the largest component, namely 98.56% of the total cash and cash equivalents as of December 31, 2019.

SURAT BERHARGA

MARKETABLE SECURITIES

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal	Persentase Percentage
Dimiliki hingga jatuh tempo/ Held-To-Maturity:				
- Investasi Deposito/ Time Deposits Investment	126.250	129.000	(2.750)	-2,13%
- Obligasi/ Bonds	943.008	816.886	126.122	15,44%
- Sukuk/ Sukuk	10.000	-	10.000	100,00%
- Reksadana/ Mutual Funds	1.054.851	705.513	349.338	49,52%
- Efek Beragun Aset ("EBA")/ Security (Asset Underlying)	37.394	22.389	15.005	67,02%
Jumlah Surat Berharga Dimiliki hingga jatuh tempo/ Total Held-To-Maturity Marketable Securities	2.171.502	1.673.787	497.715	29,74%
Tersedia untuk dijual/ Available For Sale				
- Saham/ Shares	266.523	288.624	(22.101)	-7,66%
- Reksadana/ Mutual Funds	684.577	810.241	(125.664)	-15,51%
- Obligasi/ Bonds	1.504.506	1.315.818	188.687	14,34%
- Efek Beragun Aset ("EBA")/ Security (Asset Underlying)	29.570	35.587	(6.017)	-16,91%
Jumlah Surat Berharga Tersedia Untuk Dijual/ Total Marketable Securities Available for Sale	2.485.175	2.450.270	34.905	1,42%
Jumlah Surat Berharga/ Total Marketable Securities	**4.656.678**	**4.124.057**	**532.620**	**12,91%**

SURAT BERHARGA (JUTA RUPIAH)
MARKETABLE SECURITIES (MILLION RUPIAH)

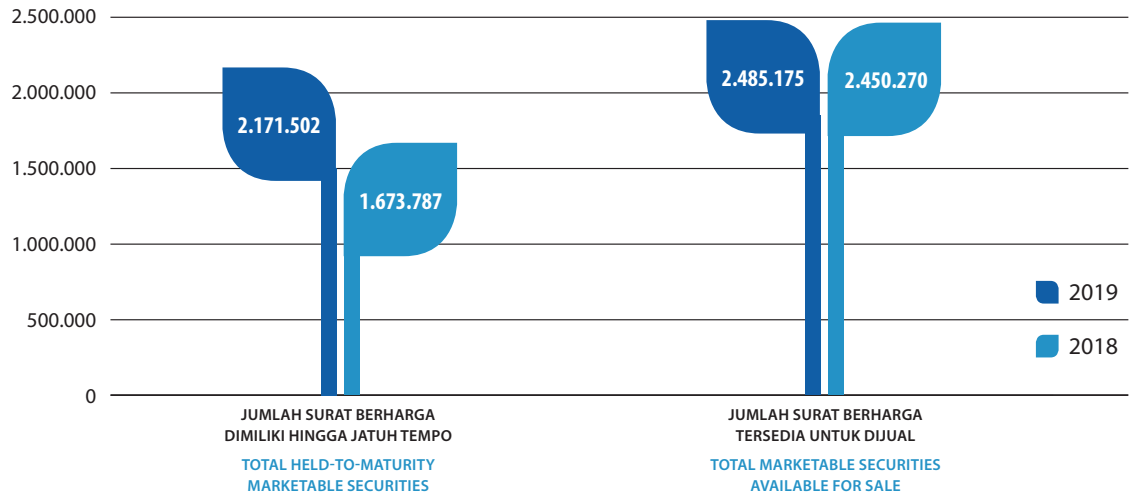

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah surat berharga adalah sebesar Rp 4,66 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 532,62 miliar atau 12,91% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 4,12 triliun. Peningkatan terbesar berasal dari komponen surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo khususnya dalam bentuk reksadana yang meningkat sebesar Rp 348,34 miliar atau 49,52% yaitu dari sebesar Rp 705,51 miliar pada tanggal 31 Desember 2018.

Untuk menjaga agar investasi dalam surat berharga dapat segera dicairkan maka sebagian besar ditempatkan pada surat berharga yang tersedia untuk dijual yaitu 53,37% dari total surat berharga tahun 2019.

As of December 31, 2019, the number of marketable securities was Rp. 4.66 trillion, an increase of Rp. 532.62 billion or 12.91% compared to the position on December 31, 2018, which was Rp. 4.12 trillion. The largest increase came from held-to-maturity marketable securities, especially in the form of mutual funds, which increased by Rp 348.34 billion or 49.52%, from Rp 705.51 billion as of December 31, 2018.

To ensure that investments in marketable securities could be immediately disbursed, most of them were placed in marketable securities available for sale, which was 53.37% of the total marketable securities in 2019.

PIUTANG IMBAL JASA PENJAMINAN / GUARANTEE RECEIVABLES

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian / Description	2019	2018	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase / Percentage
Piutang IJP/IJK KUR/KUR Guarantee Receivables				
- Piutang IJP/ IJK KUR Kepada Bank/Guarantee Receivables - KUR to Bank	1.470.253	1.307.161	163.092	12,48%
- Piutang IJP/IJK KUR Kepada Pemerintah/Guarantee Receivables - KUR to Government	1.432.589	1.328.036	104.553	7,87%
- Piutang IJP/IJK KUR Kepada Non Bank/Guarantee Receivables - KUR to Non-Bank	99	-	99	100,00%
Jumlah Piutang IJP / IJK KUR/Total KUR Guarantee Receivables	2.902.941	2.635.197	267.744	10,16%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/Allowance for Impairment Losess	(73.569)	(43.658)	(29.911)	68,51%
Jumlah Piutang IJP / IJK KUR – Bersih/Total KUR Guarantee Receivables - Net	2.829.372	2.591.539	237.833	9,18%
Piutang IJP / IJK Eksisting/Existing Guarantee Receivables	61.598	75.314	(13.715)	-18,21%
Jumlah Piutang Jasa Penjaminan/Total Guarantee Receivables	2.890.970	2.666.853	224.118	8,40%

PIUTANG IMBAL JASA PENJAMINAN (JUTA RUPIAH)
GUARANTEE RECEIVABLES (MILLION RUPIAH)

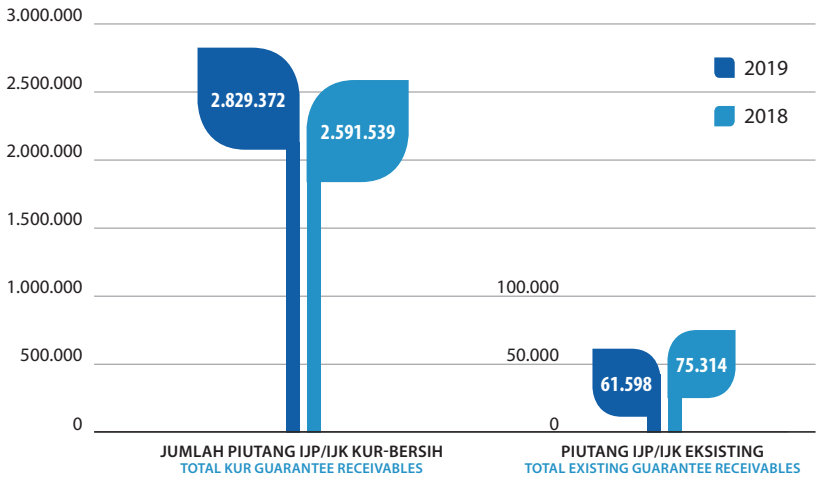

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah piutang imbal jasa penjaminan ("IJP") adalah sebesar Rp 2,89 triliun, meningkat Rp 224,12 miliar atau 8,4% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp2,67triliun. Peningkatan terbesar berasal dari piutang IJP / IJK KUR bersih (setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai) yaitu Rp 237,83 miliar atau 9,18% dari sebesar Rp 2,59 triliun pada posisi 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 2,83 triliun pada tanggal 31 Desember 2019.

Piutang IJP KUR merupakan tagihan Perusahaan atas jasa kegiatan penjaminan produk KUR yang telah diberikan kepada terjamin dan terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu Piutang Subsidi IJP KUR dan Piutang IJP KUR Subsidi Bunga.

Piutang IJP KUR merupakan tagihan Perusahaan kepada Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008. Imbal Jasa Penjaminan dibayar oleh Pemerintah dengan tarif imbal jasa penjaminan sebesar 1,5% dan *coverage* sebesar 70% untuk kredit yang akadnya sebelum 14 Februari 2010. Untuk kredit yang akadnya setelah 14 Februari 2010 tarif imbal jasa penjaminan sebesar 3,25% pertahun dengan *coverage* sebesar 70%-80% sesuai PMK No.189/PMK.05/2010 tanggal 2 November 2010.

Piutang IJP KUR Subsidi Bunga merupakan tagihan Perusahaan kepada Penerima Jaminan atas jasa kegiatan penjaminan KUR yang telah diberikan kepada terjamin sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015. Imbal Jasa Penjaminan termasuk dalam Subsidi Bunga yang dibayarkan Pemerintah yang nilainya hasil dari kesepakatan antara Penjamin dan Penerima Jaminan.

As of December 31, 2019, total guarantee receivables ("IJP") amounted to Rp 2.89 trillion, an increase of Rp 224.12 billion or 8.4% compared to the position on December 31, 2018, which was Rp2.67 trillion. The largest increase came from KUR Guarantee Receivables - Net (after deducting Allowance for Impairment Losses) of Rp 237.83 billion or 9.18% from Rp 2.59 trillion as of December 31, 2018, to Rp 2.83 trillion on December 31, 2019.

Guaranteed Service Credit Receivables (IJP) People's Business Credit (KUR) is the Company's bill for services guarantee activities of KUR products that have been given to guaranteed and is divided into 2 (two) categories, namely KUR IJP Subsidies and KUR IJP KUR Interest Subsidies.

IJP KUR receivables represent Company bills to the Government in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 135 / PMK.05 / 2008 dated September 24, 2008. Guaranteed Service Payments are paid by the Government with a guarantee fee of 1.5% and coverage of 70% for loans the contract before February 14, 2010. For loans with agreements after February 14, 2010, the guarantee fee will be 3.25% per year with coverage of 70% -80% according to PMK No.189 / PMK.05 / 2010 dated November 2, 2010.

KUR IJP Receivables Interest Subsidies represent the Company's bills to Guarantee Recipients for the services of KUR guarantee activities that have been provided to be guaranteed in accordance with the Regulation of the Coordinating Minister for the Economy Number 8 of 2015 dated October 19, 2015. Guaranteed Service Fees are included in Interest Subsidies paid by the Government, the value of which results from an agreement between the Guarantor and the Recipient of the Guarantee.

PIUTANG PENJAMINAN ULANG
REGUARANTEE RECEIVABLES

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal	Persentase Percentage
Piutang Co-Guarantee dan Co-Insurance/ Co-Guarantee and Co-Insurance Receivable	145.391	121.033	24.357	20,12%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	(92.266)	(76.822)	(15.444)	20,10%
Jumlah Piutang Co-Guarantee – Bersih/ Total Co-Guarantee Receivable - Net	53.125	44.211	8.914	100,00%
Piutang Re-Asuransi/ Re-Insurance Receivable :	368.636	210.396	158.240	75,21%
Jumlah Piutang Penjaminan Ulang/ Total Reguarantee Receivables	421.760	254.607	167.154	65,65%

PIUTANG PENJAMINAN ULANG (JUTA RUPIAH)
REGUARANTEE RECEIVABLES (MILLION RUPIAH)

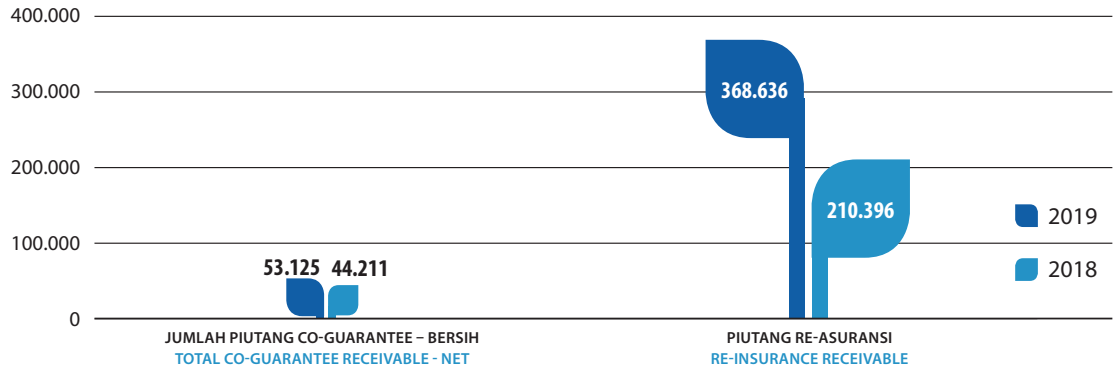

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah piutang penjaminan ulang tercatat sebesar Rp421,76 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 167,15 miliar atau 65,65% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 254,61 miliar. Peningkatan terbesar berasal dari piutang reasuransi yaitu sebesar Rp158,24 miliar atau 75,21%, dari sebesar Rp 210,40 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp421,76 miliar pada tanggal 31 Desember 2019.

Piutang Reasuransi juga merupakan komponen terbesar, yaitu 87,40% dari total piutang penjaminan ulang tanggal 31 Desember 2019.

Perusahaan bekerjasama dengan mitra *Co-Guarantee* untuk kredit multiguna dan mikro untuk mengalihkan risiko klaim yang diakibatkan meninggalnya terjamin. Untuk menghindari tertunggaknya pembayaran Piutang dari

As of December 31, 2019, total reguarantee receivables were recorded of Rp 421.76 billion, an increase of Rp 167.15 billion, or 65.65% compared to the position on December 31, 2018, of Rp 254.61 billion. The largest increase came from re-insurance receivables in the amount of Rp 158.24 billion or 75.21%, from Rp 210.40 billion as of December 31, 2018, to Rp 421.76 billion as of December 31, 2019.

Re-insurance Receivables were also the largest components, which were 87.40% of the total reguarantee receivables as of December 31, 2019.

The company cooperates with Co-Guarantee partners for a multipurpose and microcredit to transfer the risk of claims resulting from the death of the assured. To avoid the payment of delinquent receivables from Co-Guarantee partners, since

mitra *Co- Guarantee*, sejak tahun 2011 telah ditambahkan ketentuan baru dalam perjanjian kerja sama dengan mitra *Co-Guarantee* yaitu perusahaan akan memotong pembayaran premi *Co-Guarantee* maksimal sebesar 55% dari premi *Co-Guarantee* sebesar 45% dari IJP/IJK yang menjadi hak mitra *Co- Guarantee* apabila saldo Piutang *Co-Guarantee* di atas kewajaran, yang dihitung 3 kali dari rata-rata pengajuan pembayaran klaim dalam 1 tahun terakhir atau dengan perhitungan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan mitra *Co-Guarantee*.

2011 has been added a new provision in the agreement of cooperation with Co-Guarantee partners that the company will cut off the premium Co-Guarantee a maximum of 50% of the premium Co. Guarantee for 60% of the IJP / IJK the Guarantee Co partner right when the balance in the Accounts Receivable Guarantee Co. fairness, which is calculated 3 (three) times of the average filing claims payments in the last 1 (one) year or with other calculations agreed by the company and partner Co-Guarantee.

Pada 31 Desember 2019 perusahaan mencadangkan kerugian penurunan nilai Piutang PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin sebesar Rp12,91 miliar, yang merupakan kerugian penurunan nilai piutang atas PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin.

As of December 31, 2019, the Company provided an impairment loss of PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Receivables amounting to Rp12.91 billion, which was an impairment loss from PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin.

Piutang Re-Asuransi kepada Perusahaan Re-asuransi adalah penggantian pembayaran klaim yang ditagihkan kepada mitra Re-Asuransi atas pembayaran klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan. Perusahaan bekerjasama dengan mitra Re-asuransi untuk semua jenis kredit untuk mengalihkan sebagian risiko klaim.

Re-Insurance Receivable to Company Indonesian National Re-insurance is reimbursement payments charged to the partners' claim for payment of Re-Insurance claims paid by the Company. Re-insurance companies collaborate with partners for all types of credit to shift some of the risks of claims.

Dalam kerja sama dengan re-asuransi digunakan metode *treaty*, merupakan perjanjian pertanggungan ulang otomatis secara tahunan antara Perusahaan Penjamin dan Re-asuransi dengan kondisi yang disepakati bersama dalam negosiasi *treaty* .

In cooperation with the insurance partner, treaty methods are being used. Treaty method is an annually automatic re-guarantee agreement, and re-insurance partner with the condition agreed concerning treaty negotiation.

PINJAMAN YANG DIBERIKAN – BERSIH / LOANS - NET

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal	Persentase Percentage
Piutang pinjaman bagi hasil/ Profit Sharing Loan receivable				
- Pihak Ketiga/ Third Parties	16.991	16.995	(4)	-0,02%
- Pihak Berelasi/ Related Parties	132	132	-	0,00%
Jumlah pinjaman bagi hasil/Total profit sharing loan	17.124	17.127	(4)	-0,02%
Penyisihan kerugian nilai pinjaman bagi hasil/ Profit Sharing Loan for Impairment Losses	(16.840)	(16.840)	-	0,00%
Jumlah piutang pinjaman bagi hasil – bersih/ Total Profit Sharing Loan receivable - Net	284	288	(4)	-1,22%
Piutang kepada Koperasi Pegawai/ Employee Cooperative Receivable	455	695	(240)	-34,55%
Penyisihan kerugian nilai pinjaman koperasi pegawai/ Employee Cooperative Receivable for Impairment Losses	(326)	(326)	-	0,00%
Jumlah piutang pada koperasi pegawai – bersih/ Total Employee Cooperative Receivable - Net	129	369	(240)	-65,10%
Jumlah Pinjaman yang Diberikan/Total Loans	413	656	(244)	-37,10%

PINJAMAN YANG DIBERIKAN – BERSIH (JUTAAN RUPIAH)
LOANS - NET

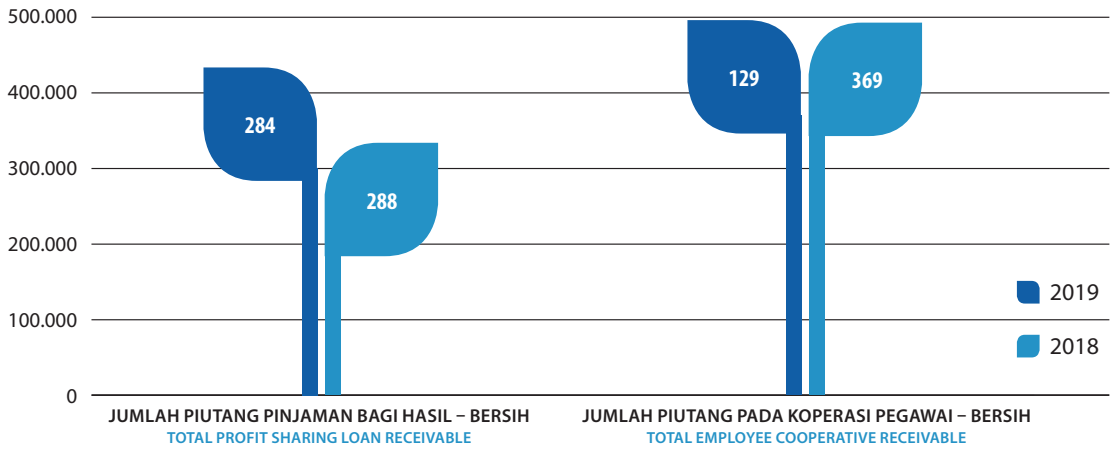

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 413 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 244 juta atau 37,10% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp656juta. Penurunan terbesar berasal dari turunnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada Koperasi Pegawai yaitu sebesar Rp 240 juta, dari sebesar Rp 695 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp455juta pada tanggal 31 Desember 2019

Pinjaman yang diberikan bersih sebagian besar diberikan dalam bentuk pinjaman bagi hasil yaitu 68,83% dari total jumlah pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2019. Piutang pinjaman bagi hasil adalah penyediaan uang/dana oleh Perusahaan kepada nasabah berdasarkan perjanjian pinjaman bagi hasil antara Perusahaan dengan nasabah yang mewajibkan pihak nasabah untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan imbalan bagi hasil yang dihitung dari nilai nominal atau target IRR tertentu. Piutang pinjaman bagi hasil diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan No. 42/DIR/IX/2001. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 Perum Jamkrindo tidak lagi menyalurkan pinjaman bagi hasil baru.

Pinjaman bagi hasil dengan kategori lancar ditetapkan sebagai pinjaman yang tidak mengalami penurunan nilai dan tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai. Terhadap Piutang bagi hasil yang mengalami penurunan nilai namun Perusahaan tidak dapat memperoleh komitmen pembayaran dari para debitur, maka nilai wajar Piutang bagi hasil ditetapkan nihil. Dengan demikian CKPN yang dibentuk sebesar 100% dari nilai tercatat.

As of December 31, 2019, the number of loans was Rp 413 million, a decrease of Rp 244 million or 37.10% compared to the position on December 31, 2018, which was Rp 656 million. The largest decrease came from the decrease in the number of Employee Cooperative Receivable, which was Rp 240 million, from Rp 695 million as of December 31, 2018, to Rp 455 million as of December 31, 2019.

Net loans were mostly provided in the form of profit-sharing loans, which was 68.83% of the total loans as of December 31, 2019. Profit-Sharing Loan Receivable is the provision of money/funds by the Company to customers under Profit Sharing Loan agreements between the Company with customers who require the customer to repay the debt after a certain period in return for taking into account the results calculated from the nominal value or a specific target IRR. Profit-Sharing Loan Receivable regulated in The Decree of Company's Board of Directors No.42/DIR/IX/2001. Based on Government Regulation Number 41 of 2008 Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia are not distributed new Profit-Sharing Loan.

Profit-Sharing Loan with the current category is defined as loans that are not impaired, and no impairment loss reserves established. For profit-sharing loan, receivables are impaired, but the Company can not obtain payment from the debtor's commitments, the fair values of accounts receivable is set to nihil. Thus, allowance for impairment losses formed at 100% of the carrying value.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya pinjaman tersebut.

Management considers that allowance for impairment losses have been adequate to cover losses that may arise from uncollectible loans.

PIUTANG LAIN-LAIN/ OTHER RECEIVABLES

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal	Persentase Percentage
Piutang Pendapatan Komisi/ Comission Income Receivable	46.744	35.768	10.976	30,69%
Piutang Pendapatan Bunga Reksadana/ Mutual Fund Interest Income Receivable	35.569	25.154	10.416	41,41%
Piutang Pendapatan Bunga Obligasi/ Bonds Interest Income Receivable	15.706	18.339	(2.634)	-14,36%
Piutang Pendapatan Bunga Deposito/ Time Deposit Interest Income Receivable	12.594	4.923	7.671	155,83%
Piutang Pendapatan Fee Based Co Insurance/ Fee Based Income Receivable	5.817	-	5.817	100,00%
Piutang kepada Pegawai/ Receivable to Employee	1.912	319	1.594	500,00%
Piutang Pendapatan EBA/ Security (Asset Underlying) Income Receivable	508	479	29	5,98%
Piutang Lainnya/ Others Receivable	97.027	19.920	77.108	387,10%
Jumlah Piutang Lain-lain/Total Other Receivables	215.878	104.901	110.977	105,79%

JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN (JUTA RUPIAH)
TOTAL OTHER RECEIVABLES (MILLION RUPIAH)

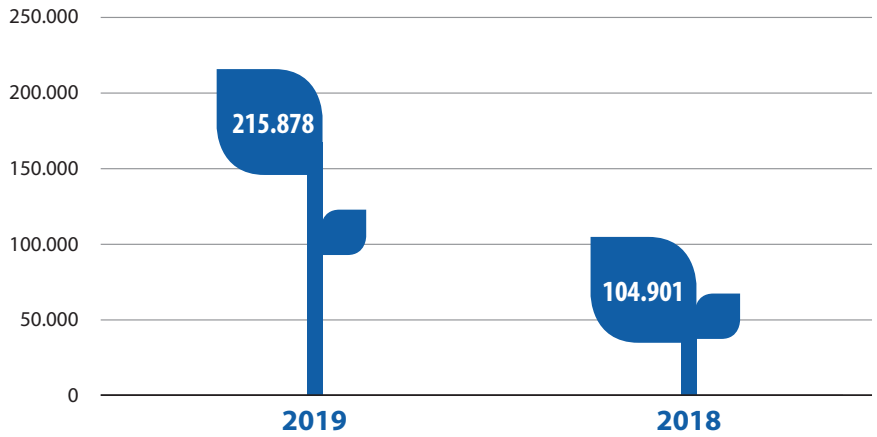

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah piutang lain-lain sebesar Rp 215,88 miliar, meningkat sebesar Rp110,98miliar atau 105,79% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 110,90 miliar. Peningkatan terbesar berasal dari komponen piutang lainnya yaitu sebesar Rp 77,11 miliar atau 387,10% dari sebesar Rp 19,92 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 97,03 miliar pada tanggal 31 Desember 2019. Piutang lainnya juga merupakan komponen terbesar, yaitu 44,95% dari total piutang lainnya tanggal 31 Desember 2019.

As of December 31, 2019, the number of other receivables amounted to Rp 215.88 billion, an increase of Rp110.98 billion, or 105.79% compared to the position on December 31, 2018, of Rp 110.90 billion. The largest increase came from other receivable components, amounting to Rp 77.11 billion or 387.10% from Rp 19.92 billion as of December 31, 2018, to Rp 97.03 billion as of December 31, 2019. Others receivable was also the largest component, which was 44.95% of the total other receivables as of December 31, 2019.

Piutang lainnya merupakan rincian Piutang cabang-cabang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai piutang pendapatan komisi, piutang pendapatan bunga reksadana, piutang pendapatan bunga obligasi, piutang pendapatan bunga deposito, piutang pendapatan *fee based Co Insurance*, piutang kepada pegawai, dan piutang pendapatan EBA.

Pada tahun 2019 perusahaan melakukan reklasifikasi atas klaim dalam proses sebesar Rp60,50 miliar ke piutang lain-lain. Piutang tersebut merupakan piutang atas pembayaran klaim kupra yang masih dalam proses administrasi.

Other receivables are detailed receivables of the branches that can not be classified as Commission Income Receivable, Mutual Fund Interest Income Receivable, Bonds Interest Income Receivable, Time Deposit Interest Income Receivable, Fee-Based Income Receivable, Receivable to Employee, and Security (Asset Underlying) Income Receivable.

In 2019 the company reclassified claims in the process of Rp.60.50 billion to other receivables. The receivables are receivables from the payment of kupra claims, which are still in the administrative process.

PREMI DAN FEE DIBAYAR DI MUKA
PREPAID PREMIUM AND FEES

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal	Persentase Percentage
Premi Re-Asuransi/ *Re-Insurance Premium*	768.436	546.855	221.581	40,52%
Premi *Co-Guarantee*/ *Co-Guarantee Premium*	489.804	519.521	(29.717)	-5,72%
Fee Based Income/ *Premium Fee Based Income*	196.461	156.523	39.938	25,52%
Fee Agen/ *Agent Fee*	154.232	161.778	(7.545)	-4,66%
Jumlah Premi dan *Fee* Dibayar di Muka/ *Total Prepaid Premium and Fees*	1.608.933	1.384.677	224.256	16,20%

PREMI DAN FEE DIBAYAR DI MUKA (JUTA RUPIAH)
PREPAID PREMIUM AND FEES (MILLION RUPIAH)

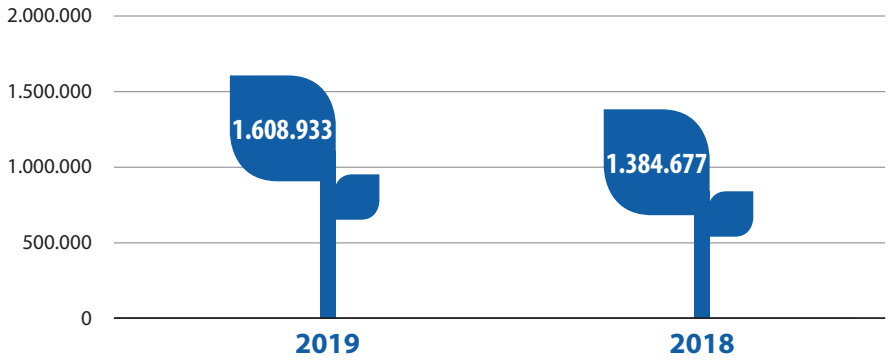

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah premi dan *fee* dibayar di muka sebesar Rp 1,61 triliun, meningkat sebesar Rp 224,26 miliar atau 16,20% dibandingkan posisi 31 Desember 2018. Peningkatan tersebut terutama berasal dari premi reasuransi yaitu sebesar Rp 221,58 miliar atau 40,52% , yaitu dari sebesar Rp546,86miliar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 768,44 miliar pada tanggal 31 Desember 2019. Premi re-asuransi dibayar

As of December 31, 2019, total prepaid premiums and fees of Rp 1.61 trillion, an increase of Rp 224.26 billion, or 16.20% compared to December 31, 2018. The increase mainly came from Re-Insurance Premium of Rp 221, 58 billion, or 40.52%, from Rp546.86 billion as of December 31, 2018, to Rp 768.44 billion as of December 31, 2019. The Prepaid Re-Insurance Premium was also the largest component, which was

di muka juga merupakan komponen terbesar, yaitu 47,76% dari total premi dan fee dibayar di muka tanggal 31 Desember 2019.

Beban Premi *Co-Guarantee* dan *Fee Based Income* dibayar di muka diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP).

Beban dibayar dimuka *co-guarantee* merupakan Pembayaran Premi tahun berjalan dan tahun-tahun lalu kepada mitra *co-guarantee* yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang. Beban dibayar dimuka re-asuransi merupakan Pembayaran Premi tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra re-asuransi yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang. Beban dibayar dimuka *fee bank* (*fee based income*) merupakan pembayaran *fee bank* tahun berjalan dan tahun-tahun lalu penerima jaminan yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang. Beban dibayar dimuka *fee* agen merupakan pembayaran *fee* agen tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra agen yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.

47.76% of total prepaid premiums and fees on December 31, 2019.

Premiums Co-Guarantee Expenses and Prepaid Fee-Based Income are recognized over the term of the guarantee and allocated by month issuance of Guarantee Certificate (SP).

Prepaid expenses co-guarantee is premium payments of the current year and years ago to co-guarantee partners that will be due in the coming years. Prepaid expenses re-insurance is premium payments of the current year and years ago to re-insurance partners that will be due in the coming years. Prepaid expenses fee bank (fee-based income) is fee bank payments of the current year and years ago to the insured partners that will be due in the coming years. Prepaid expenses agent fee is agent fee payments of the current year and years ago to the agent partners that will be due in the coming years.

BEBAN DIBAYAR DI MUKA
PREPAID EXPENSES

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal	Persentase Percentage
Beban Operasi/ *Operating Expense*	18.230	19.081	(851)	-4,46%
Uang Muka Pihak Ketiga/ *Advanced Third Parties*	10.445	6.497	3.947	60,75%
Beban SDM/ *Human Resource Expense*	2.920	2.067	853	41,26%
Beban Umum/ *General Expense*	1.729	161	1.569	977,34%
Jumlah Beban Dibayar di Muka/ *Total Prepaid Expense*	33.324	27.806	5.518	19,84%

BEBAN DIBAYAR DI MUKA (JUTA RUPIAH
PREPAID EXPENSES (MILLION RUPIAH)

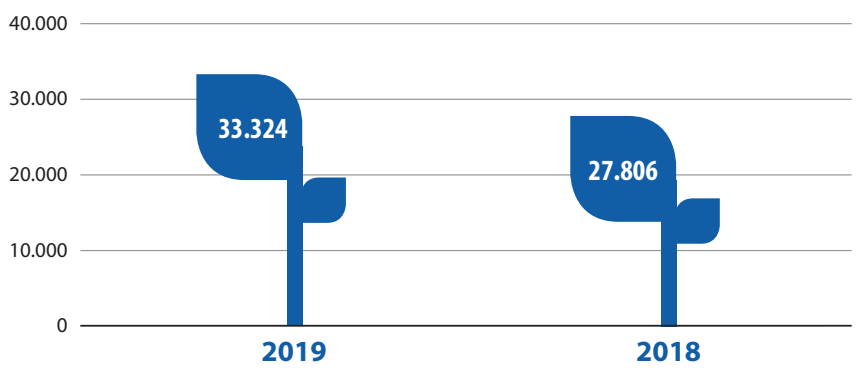

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah beban dibayar di muka sebesar Rp 33,32 miliar, meningkat sebesar Rp 5,52 miliar atau 19,84% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 27,81 miliar. Peningkatan terbesar berasal dari uang muka pihak ketiga yaitu sebesar Rp 3,95 miliar atau 60,75%, dari sebesar Rp 6,50 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 10,45 miliar pada tanggal 31 Desember 2019. Sedangkan komponen terbesar adalah beban operasi dibayar dimuka yaitu 54,70% dari total beban dibayar dimuka tanggal 31 Desember 2019.

As of December 31, 2019, total prepaid expenses amounted to Rp.33.32 billion, an increase of Rp.5.52 billion or 19.84% compared to the position on December 31, 2018, Rp.27.81 billion. The largest increase came from Advanced Third Parties of Rp 3.95 billion or 60.75%, from Rp 6.50 billion as of December 31, 2018, to Rp 10.45 billion as of December 31, 2019. While the largest component was Prepaid operating expenses were 54.70% of the total prepaid expenses as of December 31, 2019.

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Masa manfaat sewa bangunan, asuransi dan premi pensiun sesuai dengan jangka waktu kontrak atau polis.

Expenses are allocated according to the useful life of each cost with a straight-line method. The useful life of building rent, insurance, and pension premiums are in accordance with the term of the contract or policy.

Beban Operasi merupakan beban atas pembayaran sewa dibayar dimuka untuk kendaraan, rumah dinas, gedung kantor. Uang Muka Pihak Ketiga adalah uang muka yang dibayarkan kepada pihak ketiga atas transaksi pengadaan barang dan jasa. Beban SDM merupakan beban atas pembayaran asuransi karyawan yang meliputi asuransi kesehatan. Beban Umum merupakan beban atas pembayaran asuransi kendaraan, rumah dinas, gedung kantor, dan inventaris kantor, serta pembayaran atas renovasi bangunan.

Operating Expense as represent expenses for prepaid rent for vehicles, official homes, office buildings. Third Parties Prepaid Expense as represent advances paid to third parties for goods and services procurement transactions. Human Resource Expenses represent expenses for employee insurance payments, which include health insurance. General Expense represents expenses for vehicle insurance, official residence, office building, and office inventory payments, and payments for building renovations.

ASET TETAP/FIXED ASSETS

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian / Description	2019	2018	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase / Percentage
Harga Perolehan/ Acquisition Cost				
- Tanah/ Land	302.730	302.730	0	0,00%
- Bangunan Kantor/ Buildings	158.659	114.114	44.545	39,04%
- Perumahan Dinas/ Houses	7.509	5.985	1.524	25,46%
- Inventaris Kantor/ Office Equipment	115.010	97.598	17.412	17,84%
- Inventaris Rumah Dinas/ Houses Equipment	3.556	2.694	862	32,00%
- Kendaraan Bermotor/ Vehicles	43.517	43.517	-	0,00%
Jumlah Harga Perolehan/ Total Acquisition Cost	630.980	566.637	64.343	11,36%
Akumulasi Penyusutan/ Accumulated Depreciation				
- Bangunan Kantor/ Buildings	(8.865)	(6.556)	(2.309)	35,23%
- Perumahan Dinas/ Houses	(1.059)	(963)	(96)	9,97%
- Inventaris Kantor/ Office Equipment	(72.760)	(57.114)	(15.646)	27,39%
- Inventaris Rumah Dinas/ Houses Equipment	(2.259)	(1.796)	(463)	25,78%
- Kendaraan Bermotor/ Vehicles	(28.172)	(23.141)	(5.031)	21,74%
Jumlah Akumulasi Penyusutan/ Total Acculumated Depreciation	(113.115)	(89.570)	(23.545)	26,29%
Jumlah Aset Tetap – Bersih/Total Fixed Assets - Net	517.865	477.067	40.798	8,55%

ASET TETAP (JUTAAN RUPIAH)
FIXED ASSETS (MILLION RUPIAH)

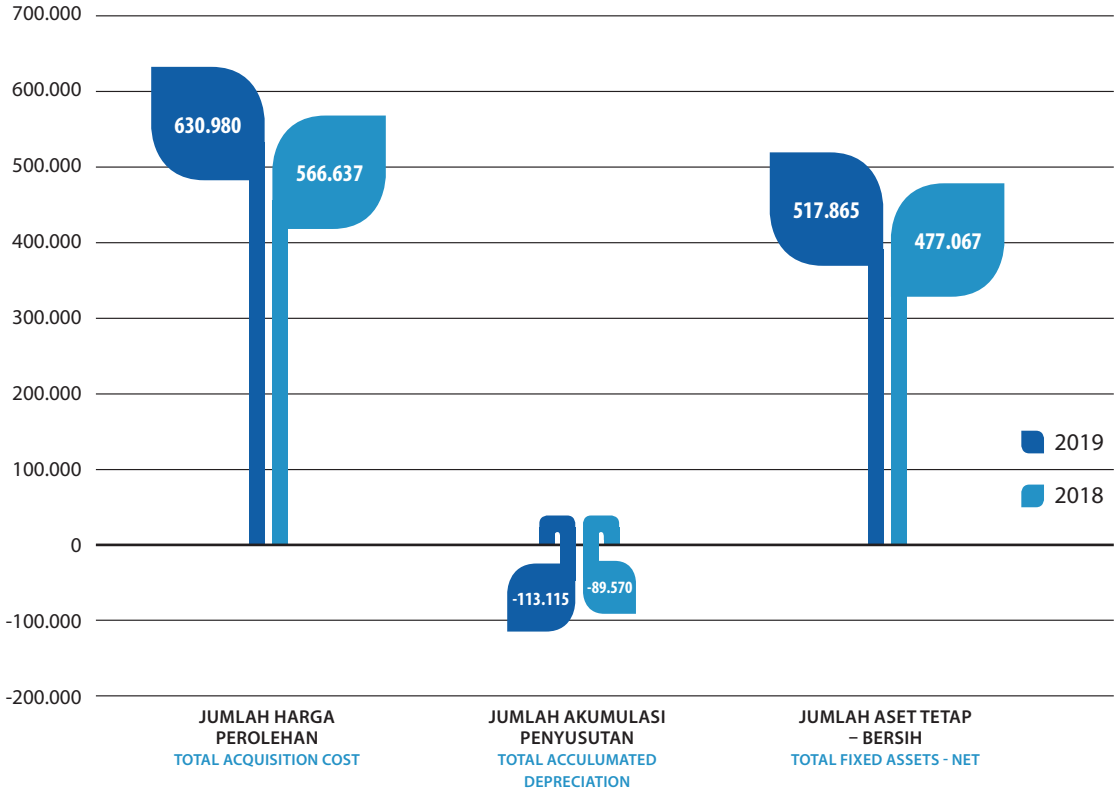

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah harga perolehan aset tetap sebesar Rp 630,98 miliar, meningkat sebesar Rp 64,34 miliar atau 11,36% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2018. Sedangkan Akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp 113,12 miliar, meningkat sebesar Rp 23,55 miliar atau 26,29% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2018. Dengan demikian jumlah aset tetap bersih pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 517,87 miliar, meningkat sebesar Rp 40,80 miliar atau 8,55% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 477,07 miliar.

Peningkatan tertinggi dari harga perolehan aktiva tetap terutama berasal dari bangunan kantor sebesar Rp44,55 miliar atau 39,04%, yaitu dari sebesar Rp 114,11 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 158,66 miliar pada tanggal 31 Desember 2019. Sedangkan peningkatan akumulasi penyusutan tertinggi berasal dari inventaris kantor sebesar Rp 15,65 miliar atau 27,39%, yaitu dari sebesar Rp 57,11miliar pada tanggal 31 Desember 2018, menjadi sebesar Rp 72,76 miliar pada tanggal 31 Desember 2019.

As of December 31, 2019, the total acquisition cost of fixed assets was Rp. 630.98 billion, an increase of Rp. 64.34 billion or 11.36% compared to the position on December 31, 2018. While the accumulated depreciation as of December 31, 2019, was recorded at Rp. 113,12 billion, an increase of Rp 23.55 billion or 26.29% compared to the position on December 31, 2018. Therefore, the total net fixed assets as of December 31, 2019, were Rp 517.87 billion, an increase of Rp 40.80 billion or 8,55% compared to the position on December 31, 2018, which was Rp 477.07 billion.

The highest increase in the acquisition cost of fixed assets mainly came from buildings amounting to Rp44.55 billion or 39.04%, from Rp 114.11 billion as of December 31, 2018, to Rp 158.66 billion as of December 31, 2019. Whereas the highest increase in accumulated depreciation came from Office Equipment of Rp. 15.65 billion or 27.39%, from Rp. 57.11 billion as of December 31, 2018, to Rp. 72.76 billion as of December 31, 2019.

Jumlah beban penyusutan aset tetap sebesar Rp23,54 miliar dan Rp 21,52 miliar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31Desember 2018.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Perum Jamkrindo dan Entitas Anak selama tahun berjalan karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan.

Total accumulated depreciation of fixed assets amounted to Rp.23.54 billion and Rp.21.52 billion as of December 31, 2019, and December 31, 2018, respectively.

Management believes that there is no impairment in the value of fixed assets owned by the Perum Jamkrindo and Subsidiary during the year because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.

As of December 31, 2019, and 2018, there were no fixed assets pledged as collateral.

ASET TAK BERWUJUD
INTANGIBLE ASSETS

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal	Persentase Percentage
Perangkat Lunak/ Computer Software				
- Harga Perolehan/ Acquisition Cost	50.854	1.312	49.542	3775,75%
- Akumulasi Penyusutan/ Accumulation Amortization	(10.713)	(1.175)	(9.538)	811,99%
Nilai Buku Aset Tak Berwujud/ Book Value of Intangible Assets	40.141	137	40.004	29.099,53%

ASET TAK BERWUJUD (JUTA RUPIAH)
INTANGIBLE ASSETS (MILLION RUPIAH)

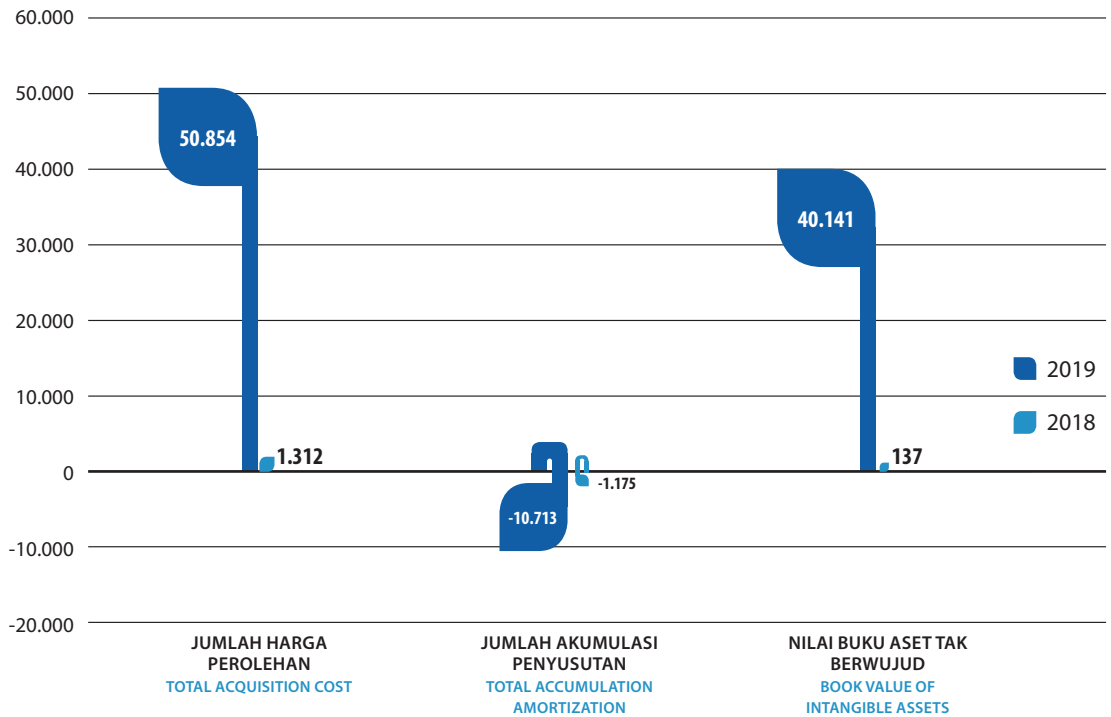

Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai buku aset tak berwujud yang merupakan perangkat lunak sebesar Rp40,14miliar meningkat sebesar Rp 40,00 miliar atau 29.099,53% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 127 juta. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan harga perolehan perangkat lunak sebesar Rp 49,54 miliar atau 3.775,75%, yaitu dari sebesar Rp 1,31 miliar pada tanggal 31 Desembr 2018 menjadi sebesar Rp 50,85 miliar pada posisi 31 Desember 2019.

As of December 31, 2019, the book value of intangible assets, which was computer software amounted to Rp.40.14 billion, an increase of Rp. 40.00 billion or 29,099.53% compared to the position on December 31, 2018, which was Rp. 127 million. The increase was due to the computer software acquisition cost's increase of Rp.49.54 billion or 3,775.75%, from Rp.1.11 billion as of December 31, 2018, to Rp50.85 billion on December 31, 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat aset tak berwujud yang dijaminkan.

As of December 31, 2019, and 2018, there were no intangible assets pledged as collateral.

ASET LAIN-LAIN
OTHER ASSETS

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal	Persentase Percentage
Deposito yang Dibatasi Penggunaannya/ Restricted Deposit	716.072	479.879	236.194	49,22%
Piutang Penjaminan Ulang Dalam Proses/ Reguarantee Receivable in Process	59.462	115.173	(55.710)	-48,37%
Klaim Dalam Proses/ Claim in Process	25.561	146.385	(120.824)	-82,54%
Uang Jaminan/ Cash Collateral	1.077	-	1.077	100,00%
Sediaan Cetakan/ Printing Supplies	549	331	218	65,82%
Aset Lainnya/ Other Assets	2.711	36.597	(33.887)	-92,59%
Jumlah Aset Lain-lain/ Total Other Assets	805.431	778.365	27.067	3,48%

ASET LAIN-LAIN (JUTA RUPIAH)
OTHER ASSETS (MILLION RUPIAH)

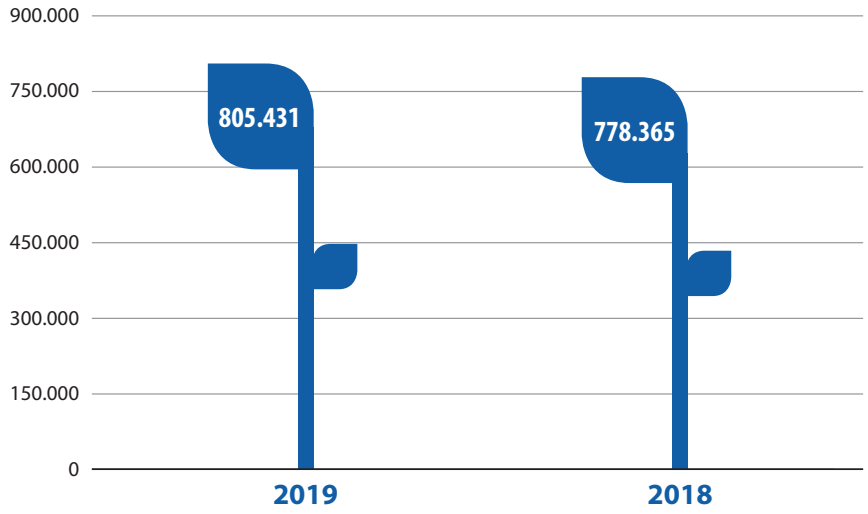

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah aset lain-lain sebesar Rp 805,43 miliar, meningkat sebesar Rp27,07miliar atau 3,48%dibandingkan posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 778,37 miliar. Peningkatan terbesar berasal dari komponen deposito yang dibatasi penggunaannya yaitu sebesar Rp236,19miliar atau 49,22% yaitu dari sebesar Rp 479,88 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 716,07 miliar pada tanggal 31 Desember 2019. Deposito yang dibatasi penggunaannya juga merupakan komponen terbesar yaitu 88,91% dari total aset lain-lain posisi 31 Desember 2019.

Deposito yang dimiliki entitas tetapi dibatasi penggunaannya sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan mitra bank. Piutang Dalam Proses merupakan Piutang *Co-Guarantee* dan Re-Asuransi yang belum ada persetujuan klaim dari mitra *Co-Guarantee* dan Re-Asuransi. Klaim dalam proses adalah klaim yang sudah diajukan ke Perum Jamkrindo akan tetapi belum ada persetujuan atas klaim tersebut. Aset lainnya merupakan saldo jaminan listrik PLN, dan jaminan telepon.

As of December 31, 2019, the number of other assets was Rp. 805.43 billion, an increase of Rp. 27.07 billion or 3.48% compared to the position on December 31, 2018, which was Rp. 778.37 billion. The largest increase came from the Restricted Deposit, which was Rp236.19 billion or 49.22%, from Rp 479.88 billion as of December 31, 2018, to Rp 716.07 billion as of December 31, 2019. The restricted deposit was also the largest component, namely 88.91% of the total other assets as of December 31, 2019.

Time deposit owned entity but are restricted in accordance with an agreement with bank partners. Receivable in the process is co-guarantees and reinsurance receivables that yet any claim approval from co-guarantee and reinsurance partners. Claims in the process are claims submitted to Perum Jamkrindo, but no agreement has been reached. Other assets are electricity, telephone deposit fund, and deferred expenses.

LIABILITAS
LIABILITIES

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal	Persentase Percentage
Utang Klaim/ Claim Payable	14.127	85.804	(71.677)	-83,54%
Utang Pajak/ Tax Payable	21.438	7.594	13.844	182,30%
Utang Penjaminan Ulang/ Co-Guarantee Payable	250.113	188.053	62.060	33,00%
Pendapatan Ditangguhkan/ Deferred Income	4.471.914	3.908.675	563.239	14,41%
Cadangan Klaim/ Claims Reserve	445.478	456.690	(11.212)	-2,46%
Utang Lain-Lain/ Other Payable	359.995	279.614	80.381	28,75%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja/ Employee Benefits Liabilities	26.746	18.887	7.859	41,61%
Jumlah Liabilitas/ Total Liabilities	5.589.811	4.945.317	644.495	13,03%

JUMLAH LIABILITAS (JUTA RUPIAH)
TOTAL LIABILITIES (MILLION RUPIAH)

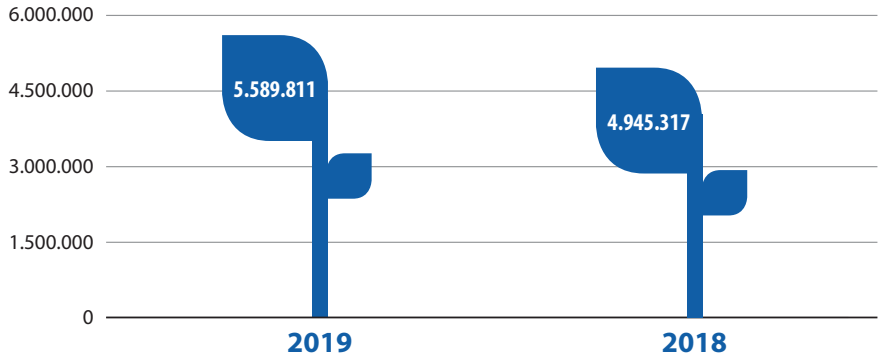

Pada tanggal 31 Desembe 2019, jumlah Liabilitas sebesar Rp 5,59 triliun, meningkat sebesar Rp644,50miliar atau 13,03% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 4,95 triliun. Peningkatan terbesar berasal dari pendapatan yang ditangguhkan yaitu sebesar Rp 563,24 miliar atau 14,41%, dari sebesar Rp3,91triliun pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 4,47 triliun pada tanggal 31 Desember 2019. Pendapatan yang ditangguhkan juga merupakan komponen terbesar yaitu 80,00% dari total Liabilitas posisi 31 Desember 2019.

As of December 31, 2019, total liabilities amounted to Rp.5.59 trillion, an increase of Rp644.50 billion or 13.03% compared to the position on December 31, 2018, which was Rp4.95 trillion. The largest increase came from the deferred income of Rp 563.24 billion or 14.41%, from Rp 3.91 trillion on December 31, 2018, to Rp 4.47 trillion as of December 31, 2019. Deferred income was also the largest component that was 80.00% of the total liabilities as of December 31, 2019.

UTANG KLAIM
CLAIM PAYABLE

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal	Persentase Percentage
Utang Klaim - Kredit Usaha Rakyat Claim Liability - Kredit Usaha Rakyat	12.657	59.736	(47.079)	-78,81%
Utang Klaim - Kredit Eksisting Claim Liability – Existing Credit	1.470	26.068	(24.598)	-94,36%
Jumlah Utang Klaim/ Total Claim Payable	**14.127**	**85.804**	**(71.677)**	**-83,54%**

UTANG KLAIM (JUTA RUPIAH)/
CLAIM PAYABLE (MILLION RUPIAH)

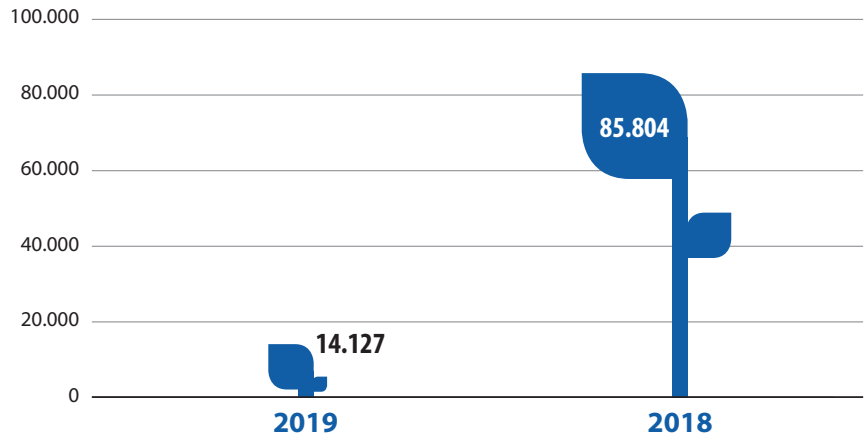

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah utang klaim sebesar Rp 14,13 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp 71,68 miliar atau 83,54% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 85,80 miliar. Penurunan terbesar berasal dari komponen utang klaim KUR sebesar Rp 47,08 miliar atau 78,81% yaitu dari sebesar Rp 59,74 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 12,66 miliar.

Utang klaim merupakan utang Perusahaan kepada Bank pemberi pinjaman yang dijamin oleh Perusahaan. Utang klaim yang tercatat adalah Utang yang telah disetujui namun belum dibayar. Utang klaim dinyatakan sebesar persentase penjaminan atas baki debit pinjaman yang disetujui.

As of December 31, 2019, the total claim payable was Rp 14.13 billion, a decrease of Rp 71.68 billion, or 83.54% compared to the position on December 31, 2018, of Rp 85.80 billion. The largest decrease came from Claim Liability - Kredit Usaha Rakyat component of Rp. 47.08 billion or 78.81%, from Rp. 59.74 billion as of December 31, 2018, to Rp. 12.66 billion.

Claims payable is payable to the lender Bank guaranteed by the Company. Recorded claims payable are debts that have been approved but not yet paid. Claims payable are stated at the percentage of underwriting the loans approved discharge tray.

CADANGAN KLAIM
CLAIM RESERVE

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal	Persentase Percentage
Cadangan Klaim KUR Claim Reserve KUR	388.433	353.892	34.541	9,76%
Cadangan Klaim - Kredit Eksisting Claim Reserve – Existing Credit	49.630	96.128	(46.498)	-48,37%
Provisi Kerugian Atas Klaim *Co-Guarantee* Provision for Claim Losses Co-Guarantee	7.415	6.671	744	11,16%
Jumlah Cadangan Klaim Total Claim Reserve	445.478	456.690	(11.212)	-2,46%

CADANGAN KLAIM (JUTA RUPIAH)
CLAIM RESERVE (MILLION RUPIAH)

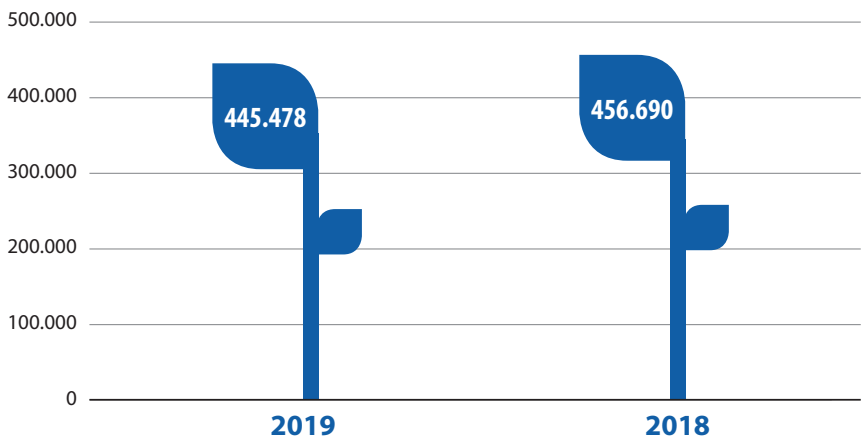

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah cadangan klaim sebesar Rp 445,48 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp 11,21 miliar atau 2,46% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 456,69 miliar. Penurunan terbesar berasal dari cadangan klaim kredit eksisting sebesar Rp 46,50 miliar atau 48,37% yaitu dari sebesar Rp 96,13 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 49,63 miliar posisi tanggal 31 Desember 2019. Sedangkan komponen cadangan klaim terbesar adalah cadangan klaim KUR yaitu 87,19%.

Cadangan Klaim merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo. Cadangan klaim ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Berdasarkan ketentuan tersebut pembentukan cadangan klaim dibagi dua metode, 1) Cadangan klaim yang wajib dibentuk minimal sebesar 0,01% dari total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri, 2) penjumlahan dari 100% klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan. Perusahaan menggunakan metode yang lebih besar dalam penjumlahan.

Perusahaan membentuk provisi untuk mengantisipasi bahwa kemungkinan akan tertagihnya/terpulihnya Piutang *co-guarantee* serta potensi klaim di masa yang akan datang yang menjadi tanggungan PT Asuransi Syariah Mubarakah sangat kecil. Provisi dibentuk berdasarkan *Default Rate* (DR) rata-rata ditambah dengan standar deviasi dikalikan dengan outstanding kredit.

As of December 31, 2019, the claim reserve amounted to Rp 445.48 billion, a decrease of Rp 11.21 billion or 2.46% compared to the position on December 31, 2018, of Rp 456.69 billion. The largest decrease came from the Claim Reserve – Existing Credit of Rp 46.50 billion or 48.37%, from Rp 96.13 billion as of December 31, 2018, to Rp 49.63 billion as of December 31, 2019, while the largest claim reserve component was Claim Reserve KUR, namely 87.19%.

The claim reserve established by the Regulation of the Financial Services Authority Number 2 / POJK.05 / 2017 on the Guarantee Institution Business Implementation. Under this provision, the methods of claim reserves shall be divided into two methods, 1) The required reserve reserves shall be at least 0.01% of the total value of the underwriting, 2) the sum of 100% of claims already incurred but not yet reported. Companies use more significant methods in addition.

The company establishes provisions to anticipate the uncollectible co-guarantee receivables and also potential future claims dependent on PT Asuransi Syariah Mubarakah is very low. Provisions set based on average Default Rate plus deviation standard and multiplied with credit outstanding.

UTANG PENJAMINAN ULANG
RE-GUARANTEE PAYABLE

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal	Persentase Percentage
Utang Co-Guarantee Co-Guarantee Payable	14.466	21.258	(6.792)	-31,95%
Utang Re-Asuransi Re-Insurance Payable	235.647	166.795	68.851	41,28%
Jumlah Utang Penjaminan Ulang Total Re-Guarantee Payable	250.113	188.053	62.060	33,00%

UTANG PENJAMINAN ULANG (JUTA RUPIAH)
RE-GUARANTEE PAYABLE (MILLION RUPIAH)

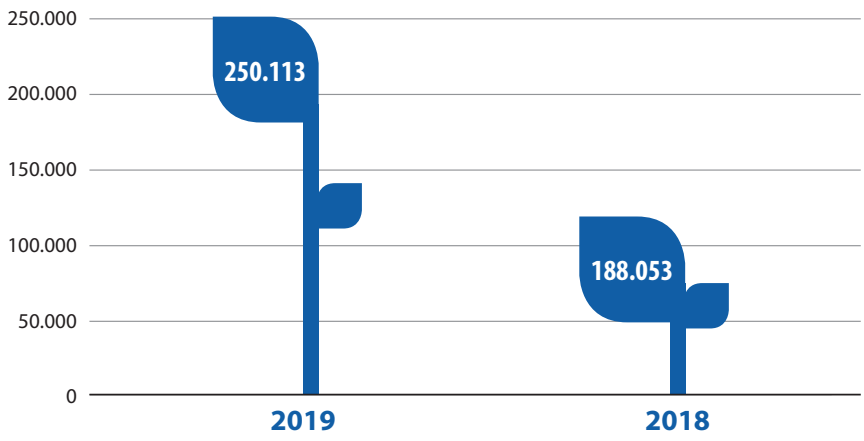

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah utang penjaminan ulang sebesar Rp 250,11 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 62,01 miliar atau 33,00% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp188,05miliar. Peningkatan berasal dari utang re-asuransi yaitu sebesar Rp 68,85 miliar, dari sebesar Rp166,80 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 235,65 miliar pada tanggal 31 Desember 2019. Utang re-asuransi juga merupakan komponen terbesar yaitu 84,22% dari total utang penjaminan ulang tanggal 31 Desember 2019.

Utang *co-guarantee* dan re-asuransi merupakan utang premi yang harus dibayarkan perusahaan untuk mengalihkan risiko klaim.

As of December 31, 2019, the Re-Guarantee Payable amounted to Rp 250.11 billion, an increase of Rp 62.01 billion or 33.00% compared to the position on December 31, 2018, which was Rp188.05 billion. The growth came from Re-Insurance Payable amounting to Rp 68.85 billion, from Rp166.80 billion as of December 31, 2018, to Rp 235.65 billion as of December 31, 2019. Re-Insurance Payable was also the largest component, namely 84.22% of the total Re-Guarantee Payable dated December 31, 2019.

Re-guarantee and re-insurance payables are an insurance premium payable that must be paid by the company to transfer the risk of claim.

PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN
DEFERRED INCOME

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal	Persentase Percentage
Pihak Berelasi/ Related Parties	3.592.693	3.069.542	523.152	17,04%
Pihak Ketiga/ Third Parties	879.221	839.133	40.088	4,78%
Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan/ Total Deferred Income	4.471.914	3.908.675	563.239	14,41%

PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN (JUTA RUPIAH)
DEFERRED INCOME (MILLION RUPIAH)

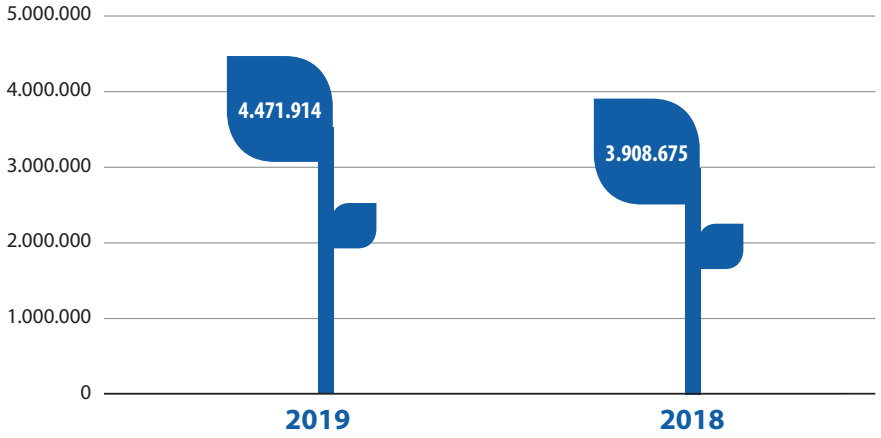

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp 4,47 triliun, meningkat sebesar Rp 563,24 miliar atau 14,41% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 3,91 triliun. Peningkatan terbesar berasal dari pendapatan yang ditangguhkan pihak berelasi yaitu sebesar Rp523,15miliar atau 17,04% dari sebesar Rp 1,07 triliun pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 3,59 triliun. Pendapatan yang ditangguhkan pihak berelasi juga merupakan komponen terbesar yaitu 80,34% dari total pendapatan yang ditangguhkan tanggal 31 Desember 2019.

Komponen pendapatan ditangguhkan terdiri dari imbal jasa penjaminan ditangguhkan yang merupakan pembayaran imbal penjaminan tahun berjalan dan tahun-tahun lalu dari terjamin kepada Perusahaan yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang, dan komisi penjaminan ditangguhkan yang merupakan penerimaan komisi dari *co-guarentee* dan re-asuransi tahun berjalan yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Pendapatan ditangguhkan akan diakui sebagai pendapatan selama sisa jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP). Dengan mempertimbangkan banyaknya kredit yang dipercepat pelunasannya, manajemen menetapkan batas waktu maksimal alokasi Imbal Jasa Penjaminan diterima dimuka adalah sesuai jangka waktu.

As of December 31, 2019, the total deferred income was Rp 4.47 trillion, an increase of Rp 563.24 billion or 14.41% compared to the position on December 31, 2018, of Rp 3.91 trillion. The largest increase came from the deferred income by related parties, amounting to Rp523.15 billion or 17.04% from Rp 1.07 trillion as of December 31, 2018, to Rp 3.59 trillion. Deferred income by related parties was also the largest component, namely 80.34% of the total deferred income as of December 31, 2019.

The deferred income component consists of the Deferred guarantee fee, which is a guarantee fee payments for the current year and previous years from the guaranteed to Perum Jamkrindo, which will become income in the coming years, and Deferred guarantee commission is an acceptance of a commission from co-guarantee and re-insurance in the current year that will become income in the coming years.

Deferred income will be recognized as income during the remaining period of guarantee and allocated based on the issuance month of the Guarantee Certificate (SP). By considering the number of accelerated payment credits, management establishes a maximum time limit of the unearned guarantee fee allocation, which is due to the time limit.

UTANG PAJAK / TAX PAYABLE

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal	Persentase Percentage
Entitas Induk/ Parent Company	20.798	6.781	14.017	206,72%
Entitas Anak/ Subsidiary	641	813	(173)	-21,22%
Jumlah Utang Pajak/ Total Tax Payable	21.438	7.594	13.844	182,30%

UTANG PAJAK (JUTA RUPIAH)
TAX PAYABLE (MILLION RUPIAH)

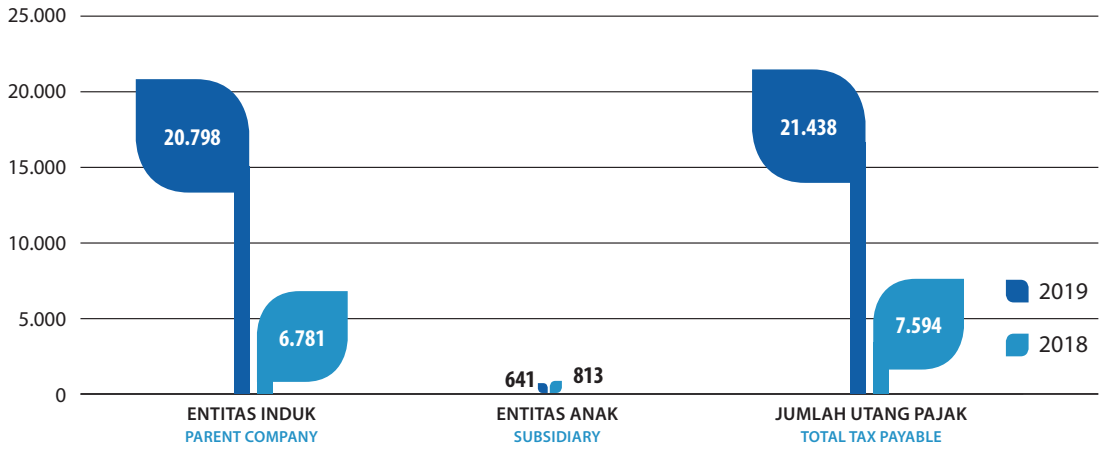

Jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 21,44 miliar, meningkat sebesar Rp13,84 miliar atau 182,30% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 7,59 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari Entitas Induk yaitu sebesar Rp 14,02 miliar atau 206,72% dari sebesar Rp6,78miliar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 20,80 miliar pada tanggal 31 Desember 2019.

The amount of Tax Payable as of December 31, 2019, was Rp 21.44 billion, an increase of Rp 13.84 billion or 182.30% compared to the position of December 31, 2018, which was Rp 7.59 billion. The increase came from the Parent Company, amounting to Rp. 14.02 billion or 206.72% from Rp. 6.78 billion as of December 31, 2018, to Rp. 20.80 billion as of December 31, 2019.

LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA
EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal	Persentase Percentage
Entitas Induk/ Parent Company	26.281	18.653	7.629	40,90%
Entitas Anak/ Subsidiary	465	234	230	98,17%
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja/ Total Employee Benefits Liabilities	26.746	18.887	7.859	41,61%

LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (JUTA RUPIAH)
EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (MILLION RUPIAH)

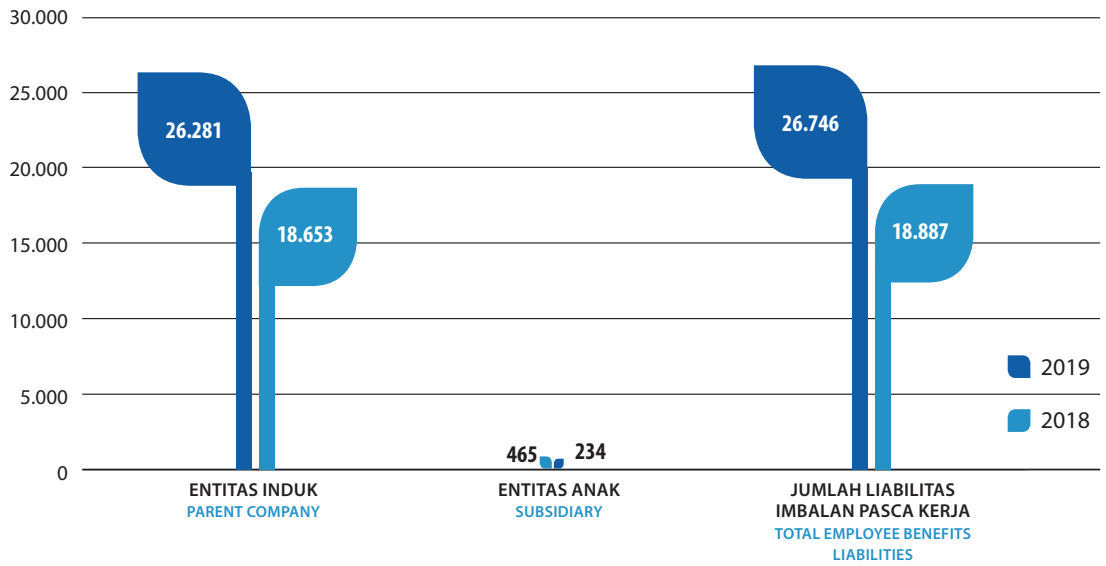

Jumlah liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 26,75 miliar, meningkat sebesar Rp 7,86 miliar atau 41,61% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 18,89 miliar. Peningkatan tersebut terutama dari komponen liabilitas imbalan pasca kerja entitas induk yaitu sebesr Rp7,63miliar atau 40,90% dari sebesar Rp 18,65 miliar menjadi sebesar Rp 26,28 miliar pada tanggal 31 Desember 2019.

Perusahaan telah menyelenggarakan program manfaat pasti (JHT dan THT) maupun program iuran pasti (DPLK) untuk seluruh karyawan tetapnya. Aset program manfaat pasti dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan RI. Program tersebut memberikan manfaat JHT dan THT yang akan dibayarkan kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan pensiun atau berhenti, sesuai dengan peraturan dana pensiun yang bersangkutan.

UTANG LAIN-LAIN

Jumlah utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 360 miliar, meningkat sebesar Rp80,38miliar atau 28,75% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 279,61 miliar. Peningkatan terbesar berasal dari komponen beban pegawai yang masih harus dibayar yaitu sebesar Rp80,38miliar atau 41,30% dari sebesar Rp 125,85 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 177,83 miliar pada tanggal 31 Desember 2019. Beban pegawai yang masih harus dibayar merupakan komponen terbesar yaitu 49,40% dari total utang lain-lain.

The total Employee Benefits Liabilities as of December 31, 2019, was Rp 26.75 billion, an increase of Rp 7.86 billion or 41.61% compared to the position on December 31, 2018, of Rp 18.89 billion. The increase was mainly from the Employee Benefits Liabilities of the Parent Company component, which was Rp7.63 billion or 40.90% from Rp.18.65 billion to Rp.22.28 billion as of December 31, 2019.

The company has carried out a defined benefit plan (JHT) and THT and also defined contribution program (DPLK) for all permanent employees. This defined benefit asset program managed by PT Asuransi Jiwasraya, which the founding have got an endorsement from The Finance Minister RI. The program gives JHT and THT benefits that will be paid to employees at the time of employees' pension or desist, according to the regulation of the pension fund.

OTHER LIABILITIES

The number of Other Liabilities as of December 31, 2019, was Rp 360 billion, an increase of Rp 80.38 billion or 28.75% compared to the position on December 31, 2018, which was Rp 279.61 billion. The largest increase came from the Accrued Employee Expenses component of Rp 80.38 billion or 41.30% from Rp 125.85 billion as of December 31, 2018, to Rp 177.83 billion as of December 31, 2019. Accrued Employee Expenses was the largest component, namely 49.40% of total Other Liabilities.

EKUITAS / EQUITY

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal	Persentase Percentage
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Net Equity Attributable to Owners of the Parent				
Penyertaan Modal Negara Government Paid-in Capital	7.638.733	7.638.733	-	0,00%
Cadangan – Cadangan/ Reserves	3.553.208	3.193.598	359.610	11,26%
Saldo Laba/ Current Year Net income	621.898	397.321	224.577	56,52%
Komponen Ekuitas Lainnya Other Components Of Equity	140.030	66.013	74.017	112,13%
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Net Equity Attributable to Owners of the Parent	11.953.869	11.295.665	658.204	5,83%
Kepentingan Non-pengendali Non - Controlling Interest	16	15	1	6,53%
Total Ekuitas/ Total Equity	11.953.885	11.295.680	658.205	5,83%

EKUITAS (JUTA RUPIAH)
EQUITY (MILLION RUPIAH)

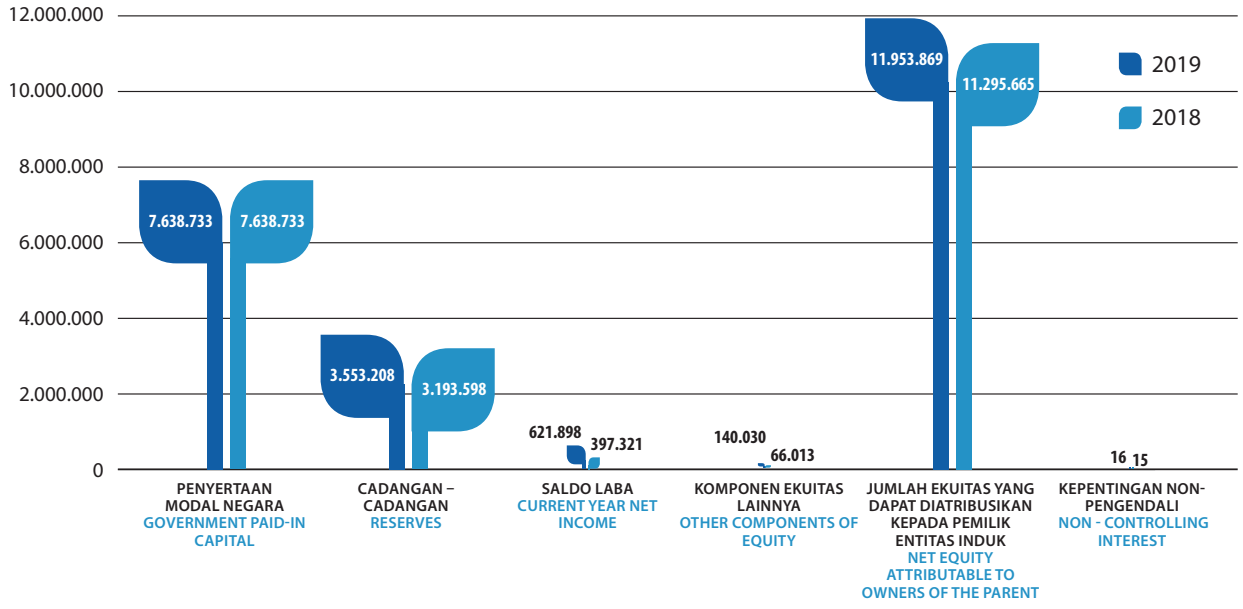

Jumlah ekuitas tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 11,95 triliun, meningkat sebesar Rp658,21miliar atau 5,83% dibandingkan posisi 31 Desember 2018. Peningkatan terbesar berasal dari cadangan umum yaitu sebesar Rp 359,61 miliar atau 12,77% dari sebesar Rp 2,82 triliun pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 3,18 triliun pada tanggal 31 Desember 2019.

Seluruh modal yang dimiliki Perusahaan merupakan Penyertaan Modal Negara dengan Menteri Keuangan selaku pemilik modal, dengan modal awal sebesar Rp21miliar. Selanjutnya Negara secara konsisten memperkuat

The total equity as of December 31, 2019, was Rp 11.95 trillion, an increase of Rp 658.21 billion or 5.83% compared to the position on December 31, 2018. The largest increase came from the General Reserve of Rp 359.61 billion or 12.77% of Rp 2.82 trillion as of December 31, 2018, to Rp 3.18 trillion as of December 31, 2019.

All of the capital owned by the Company is an additional State Capital with the Minister of Finance as the capital owner, with the beginning capital of Rp21 billion. Furthermore, the State has consistently strengthened the

permodalan Perum Jamkrindo dengan melakukan penambahan Pernyertaan Modal Negara ("PMN") hingga terakhir dilakukan penambahan pada tahun 2016. Penambahan modal tersebut dimaksudkan untuk untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Perusahaan terkait dengan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

capital of Perum Jamkrindo by doing the additional State Capital ("PMN") until the last addition in 2016. That capital increase is intended to increase the capacity of the business and to strengthen the Company's capital structure related to KUR Guarantee.

Cadangan-cadangan terdiri dari saldo cadangan modal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 383/KMK/011/1982 tanggal 15 September 1982 tentang penetapan modal awal Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, cadangan umum merupakan saldo pencadangan untuk pemupukan modal kegiatan operasional, dan cadangan tujuan merupakan saldo pencadangan untuk digunakan sebagai sumber dana pembiayaan investasi dan saldo cadangan teknis merupakan saldo pencadangan untuk digunakan sebagai sumber pendanaan jika terjadi klaim.

Reserves consist of Capital reserve balance that represents capital reserve balance, which specified based on Finance Minister decree No. 383/KMK/011/1982 dated September 15, 1982, concerning pegging of start-up capital of Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, General reserve represent reservation balance for capital accumulating of operational activity, and the Purposed reserve is reservation balance to be used as the source of fund of investment financing, and the technical reserve is reservation balance to be used as the source of funding in case of the claim happened.

Komponen ekuitas lainnya merupakan laba rugi belum direalisir atas efek tersedia untuk dijual.

Other Components of Equity Is unrealized profit or loss on securities available for sale.

Bagian yang menjadi hak (beban) pengaruh non-pengendali atas laba Entitas Anak yaitu PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pada tahun 2019 sebesar Rp 15,70 juta yaitu 0,003% dari aset bersih posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp 557, 73 miliar, mengalami peningkatan Rp 962,54 ribu dibandingkan posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 14,74 miliar (0,004% dari aset bersih posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp340,49miliar).

The rights part (expense) non-controlling influence on subsidiaries, namely PT Penjaminan Jamkrindo Syariah in 2019 amounting to Rp 15.70 million, 0.003% of the net assets as of December 31, 2019, amounting to Rp 557.73 billion, an increase of Rp 962.54 thousand compared to the position on December 31, 2018, in the amount of Rp 14.74 billion (0.004% of the net assets as of December 31, 2018, amounting to Rp340.49 billion).

GEARING RATIO

GEARING RATIO

Sesuai dengan POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaran Usaha Lembaga Penjamin. *Gearing Ratio* adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Penjamin dalam melakukan kegiatan Penjaminan.

In accordance with POJK No 2/POJK.05/2017, about the Company Corporate Credit Guarantee. Gearing Ratio is the limit set to measure the ability of the Guarantor in the Guarantee activities.

Gearing Ratio merupakan perbandingan antara total nilai *outstanding* Penjaminan yang ditanggung sendiri dengan modal sendiri bersih Penjamin pada waktu tertentu. Modal sendiri bersih terdiri dari penempatan modal Pemerintah, cadangan-cadangan, saldo laba, dan komponen ekuitas lainnya dikurangi kerugian.

Gearing Ratio is the ratio between the total outstanding value of self-assurance with a net worth of Guarantor at any given time. Net worth is total assets minus total liabilities consist of the placement of government capital, reserves, retained earnings, and other equity components of net losses.

Gearing Ratio Penjaminan untuk Usaha Produktif ditetapkan paling tinggi dua puluh kali dari ekuitas Perusahaan dan total *Gearing Ratio* ditetapkan paling tinggi empat puluh kali dari ekuitas Perusahaan.

Gearing Ratio Guarantee for Productive Enterprises is set at a high often the Company's equity, and the total gearing ratio is set at a high forty times the equity of the Company.

Pada posisi 31 Desember 2019, *Gearing Ratio Produktif* Perum Jamkrindo adalah 10,87 kali, sedangkan jumlah *Gearing Ratio* adalah sebesar 18,43 kali. Karena *Gearing Ratio* masih berada di bawah ketentuan maksimal yang diperkenankan, maka Perum Jamkrindo masih mempunyai kelonggaran kapasitas untuk melakukan penjaminan. Untuk penjaminan kredit produktif, kelonggaran penjaminan adalah sebesar Rp 109,117 triliun tanpa memperhitungkan pelunasan dari *outstanding* tahun berjalan. Untuk penjaminan kredit secara total, kelonggaran penjaminan adalah sebesar Rp257,789 Triliun tanpa memperhitungkan pelunasan dari *outstanding* tahun berjalan,

On December 31, 2019, the gearing ratio of Perum Jamkrindo was productive to 10.87 times, while the total gearing ratio is to 18.43 times. Because Gearing Ratio is still below the allowed maximum terms, the Perum Jamkrindo still has given the capacity to do the guarantee. To guarantee the productive credit, guarantee concessions amounted to Rp109,117 trillion without taking into account the repayment of the outstanding current year. For a total credit guarantee, the guarantee allowance amounted to Rp257.789 trillion without taking into account the repayment of the outstanding current year.

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Dalam kondisi peekonomian yang masih menghadapi tantangan pada tahun 2019, Perum Jamkrindo mampu mencatatkan kinerja keuangan yang sangat baik, tercermin dari perolehan pendapatan penjaminan sebesar Rp 2,10 triliun, mengalami peningkatan cukup signifikan 68,55% dibandingkan pendapatan tahun 2018. Sedangkan laba tahun berjalan tahun 2019 yang dibukukan meningkat 57,41% dibandingkan tahun 2018.

In an economic condition that was still facing challenges in 2019, Perum Jamkrindo was able to record excellent financial performance, reflected in the guarantee income of Rp 2.10 trillion, experiencing a significant increase of 68.55% compared to income in 2018 while the current year's income in 2019 recorded increased by 57.41% compared to 2018.

TABEL LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
TABLE OF CONSOLIDATED PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase Percentage
Pendapatan Penjaminan/ Guarantee Income	2.104.732	1.248.710	856.022	68,55%
Beban Klaim/ Claim Expenses	(1.309.531)	(723.274)	(586.257)	81,06%
Penjaminan Bersih/ Guarantee Fee Net	795.201	525.437	269.764	51,34%
Pendapatan Investasi Bersih/ Investment Income - Net	782.810	684.108	98.702	14,43%
Beban Usaha/ Operating Expenses	(809.813)	(693.236)	(116.577)	16,82%
Pendapatan (Beban) Lain-lain/ Others Income (Expenses)	(2.484)	(8.025)	5.541	-69,05%
Laba Sebelum Pajak/ Income Before Tax	765.714	508.284	257.430	50,65%
Pajak Kini/ Current income tax	(143.168)	(117.274)	(25.894)	22,08%
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan/ Tax Benefit (Deferred) income tax	3.234	6.533	(3.300)	-50,51%
Laba Tahun Berjalan/ Current Year Income	625.779	397.543	228.236	57,41%
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain Bersih/ Other Comprehensive Income (Expense) - Net	59.820	(135.957)	195.778	-144,00%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/ Comprehensive Income for the Current Year	685.599	261.586	424.013	162,09%
Laba Tahun Berjalan Diatribusikan Kepada/ Income for the Year Attributable to:				
- Pemilik Entitas Induk/ Equity Holders of the Parent Entity	625.778	397.542	228.236	57,41%
- Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	1	1	0	2,39%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Diatribusikan Kepada/ Comprehensive Income the Year Attributable to :				
- Pemilik Entitas Induk/ Equity Holders of the Parent Entity	685.598	261.585	424.013	162,09%
- Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	1	1	0	2,39%

IKHTISAR LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
SUMMARY OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

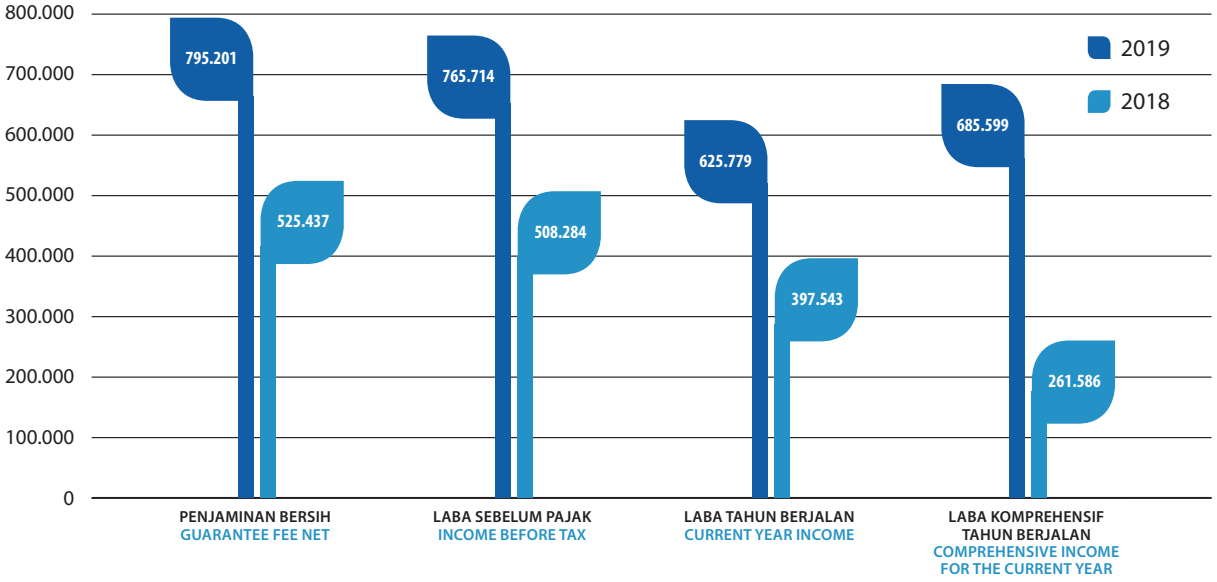

IMBAL JASA (PENDAPATAN) PENJAMINAN ("IJP") BERSIH
GUARANTEE FEE - NET

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase Percentage
IJP Bruto/ Gross Guarantee Fee :				
- IJP Kredit Usaha Rakyat/ Guarantee Fee – KUR	1.514.032	744.684	769.349	103,31%
- IJP Kredit Eksisting/ Guarantee Fee – Existing Credit	1.015.202	897.218	117.984	13,15%
- Pendapatan Komisi Re-Asuransi/ Re-insurance Commission	27.086	31.110	(4.024)	-12,93%
- Pendapatan Komisi *Co-Guarantee*/ Co-Guarantee Commission	15.470	5.313	10.156	191,14%
Jumlah IJP Bruto/ Total Gross Guarantee Fee	2.571.790	1.678.325	893.465	53,24%
Premi Re-Asuransi/ Re-Insurance Premium	(257.436)	(215.349)	(42.087)	19,54%
Premi *Co-Guarantee*/ Co-Guarantee Premium	(103.506)	(116.765)	13.259	-11,36%
Beban *Fee* Agen/ Guarantee Restitution	(65.441)	(65.286)	(155)	0,24%
Beban *Fee Based*/ Re-Insurance Premium	(34.743)	(27.212)	(7.531)	27,68%
Restitusi IJP/ Guarantee Restitution	(5.932)	(5.003)	(928)	18,56%
Jumlah IJP Bersih/ Total Net Guarantee Fee	2.104.732	1.248.710	856.022	68,55%

IJP BERSIH (JUTA RUPIAH)
NET GUARANTEE FEE (MILLION RUPIAH)

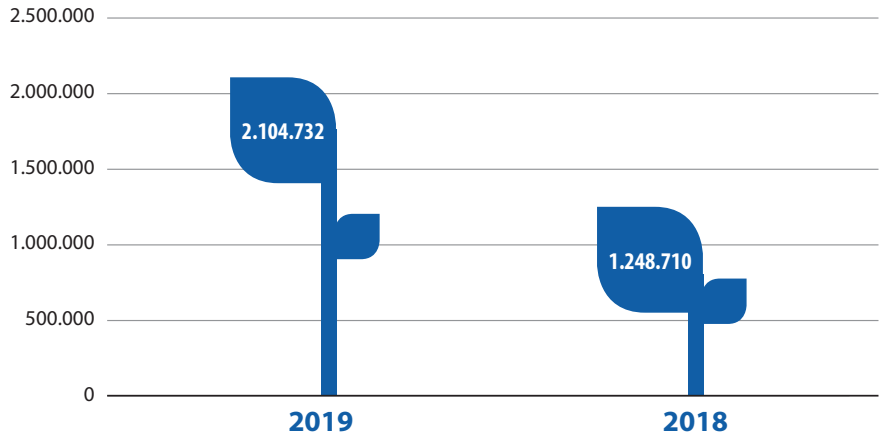

Jumlah IJP bersih selama tahun 2019 adalah sebesar Rp 2,10 triliun, meningkat sebesar Rp 856,02 miliar atau 68,55% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yaitu sebesar Rp 1,25 triliun. Peningkatan terbesar berasal dari peningkatan IJP KUR sebesar Rp 769,35 miliar atau 103,31% yaitu dari sebesar Rp744,68miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp 1,51 triliun. IJP KUR juga merupakan komponen terbesar yaitu 58,87% dari total IJP Bruto tahun 2019.

Peningkatan IJP selama tahun 2019 tersebut tidak terlepas dari peningkatan *volume* penjaminan kredit Jamkrindo yang berkisar di angka 16,74%, yaitu dari sebesar Rp 174,74 triliun pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp 203,99 triliun pada tahun 2019.

Pendapatan Imbal Jasa penjaminan (IJP) adalah premi yang diterima oleh perusahaan dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya IJP dihitung dari tarif IJP, plafond kredit dan jangka waktu kredit.

Untuk kredit eksisting, besarnya tarif IJP ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: produk penjaminan, risiko yang dijamin dan jangka waktu penjaminan, IJP dibayar sekaligus di muka. Sedangkan Tarif IJP Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2014 tanggal 1 Oktober 2014 mengatur IJP KUR dibayarkan per tahun oleh pemerintah dengan periode penagihan pada bulan April dan Oktober.

Total Net Guarantee Fee (IJP) in 2019 was Rp 2.10 trillion, an increase of Rp 856.02 billion or 68.55% compared to the same period in 2018, which was Rp 1.25 trillion. The largest increase came from the increase in Guarantee Fee – KUR (IJP - KUR) of Rp 769.35 billion or 103.31%, from Rp744.68 billion in 2018 to Rp 1.51 trillion. IJP - KUR was also the largest component, namely 58.87% of the total Gross Guarantee Fee (IJP) in 2019.

The increase in IJP during 2019 could not be separated from the increase in the volume of Jamkrindo's credit guarantees, which ranged at 16.74%, namely from Rp 174.74 trillion in 2018 to Rp 203.99 trillion in 2019.

Guarantee Fee (IJP) is the premium received by the company to secure credit activities. The amount of IJP is measure from the IJP rate, credit limit, and credit period.

The amount of the IJP rate is determined by considering such a product of guarantee, guarantee risk, and guarantee period for existing credits. IJP is paid in advance. While rates of KUR Guarantee Fee is regulated in Minister of Finance Regulation Number 135/PMK.05/2008 dated September 24, 2008, concerning KUR Guarantee facility and Ministry of Finance Regulation No.190/PMK.05/2014 dated October 1, 2014, regulated IJP KUR paid once a year by the government with billing period in April and October.

BEBAN KLAIM
CLAIM EXPENSES

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase Percentage
Beban Klaim Kredit Usaha Rakyat/ KUR's Claim Expenses	1.249.014	670.157	578.857	86,38%
Beban Klaim Kredit Eksisting/ Claim Expenses - Exsisting Credit	577.280	493.828	83.452	16,90%
Jumlah Beban Klaim/ Total Claim Expenses	1.826.293	1.163.985	662.309	56,90%
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim/ Increase (Decrease) Claim Reserves	(11.957)	31.048	(43.005)	-138,51%
Pendapatan Subrogasi/ Subrogation Income	(521.487)	(476.799)	(44.689)	9,37%
Beban Penagihan Subrogasi/ Collecting Subrogation Expense	16.681	5.039	11.642	231,03%
Pendapatan Subrogasi – Bersih/ Subrogation Income - Net	(504.806)	(471.759)	(33.047)	7,00%
Jumlah Beban Klaim/ Total Claim Expenses	1.309.531	723.274	586.257	81,06%

BEBAN KLAIM (JUTA RUPIAH)
CLAIM EXPENSES (MILLION RUPIAH)

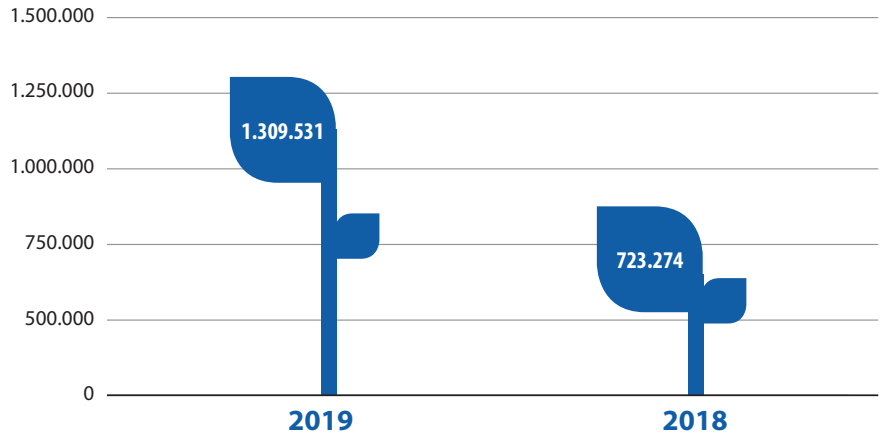

Jumlah beban klaim selama tahun 2019 adalah sebesar Rp 1,31 triliun, meningkat sebesar Rp 586,26 miliar atau 81,06% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yaitu sebesar Rp 723,27 miliar. Pningkatan terbesar berasal dari beban klaim KUR yaitu Rp 578,86 miliar atau 86,38%, dari sebesar Rp 670,16 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp 1,25 triliun pada tahun 2019.

Beban klaim adalah beban yang timbul sebagai akibat macetnya kredit akibat risiko yang ditanggung Perusahaan. Jumlah klaim yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan kepada Penerima Jaminan terdiri dari hutang pokok, hutang bunga dan denda yang tidak dapat dipenuhi oleh terjamin pada saat kredit jatuh tempo dan kredit tidak dapat diperpanjang lagi atau sebelum kredit jatuh tempo sesuai kesepakatan yang ada.

The total claim expenses for 2019 were Rp 1.31 trillion, an increase of Rp 586.26 billion, or 81.06% compared to the same period in 2018, which was Rp 723.27 billion. The largest increase came from KUR's Claim Expenses, which was Rp 578.86 billion or 86.38%, from Rp 670.16 billion in 2018 to Rp 1.25 trillion in 2019.

Claim expenses are expenses incurred as a result of credit loss due to the risks covered by the company. The number of claims that can be paid by the company to the Recipient of Guarantee includes of principal payable, interest payable and penalties that can not be met by the Guaranteed at the time of loan maturity and the credit can not be extended again or before the due credit according to existing agreements.

Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim merupakan selisih Cadangan Klaim tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

Increase (Decrease) of Claim Reserves represents the difference of the current year with the previous year.

PENJAMINAN BERSIH

Selama tahun 2019, Perusahaan mencatat penjaminan bersih sebesar Rp 795,20 miliar, meningkat sebesar Rp 269,76 miliar atau 51,34% dibandingkan periode yang sama tahun 2018, peningkatan tersebut terutama karena adanya peningkatan imbalan jasa (pendapatan) penjaminan.

GUARANTEE FEE NET

During 2019, the Company recorded Guarantee Fee Net of Rp 795.20 billion, an increase of Rp 269.76 billion, or 51.34% compared to the same period in 2018. The increase was mainly due to an increase in Guarantee Revenues.

PENDAPATAN INVESTASI BERSIH
INVESTMENT INCOME - NET

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase Percentage
Bunga Deposito/ Time Deposit Interest	486.672	379.488	107.184	28,24%
Bunga Obligasi/ Bond Interest	181.757	166.592	15.166	9,10%
Pendapatan Reksadana/ Mutual Fund Income	86.864	106.616	(19.751)	-18,53%
Pendapatan Capital Gain Saham/ Capital Gain Share Interest	37.629	23.738	13.891	58,52%
Dividen/ Dividend	8.360	6.855	1.505	21,95%
Efek Beragunan Aset/ Security (Assets Underlying)	5.270	5.188	82	1,59%
Jumlah Pendapatan Investasi/ Total Investment Income	806.552	688.476	118.076	17,15%
Beban Investasi/ Investment Expense	(23.742)	(4.367)	(19.374)	443,64%
Jumlah Pendapatan Investasi Bersih/ Total Investment Income - Net	782.810	684.108	98.702	14,43%

PENDAPATAN INVESTASI BERSIH (JUTA RUPIAH)
INVESTMENT INCOME - NET (MILLION RUPIAH)

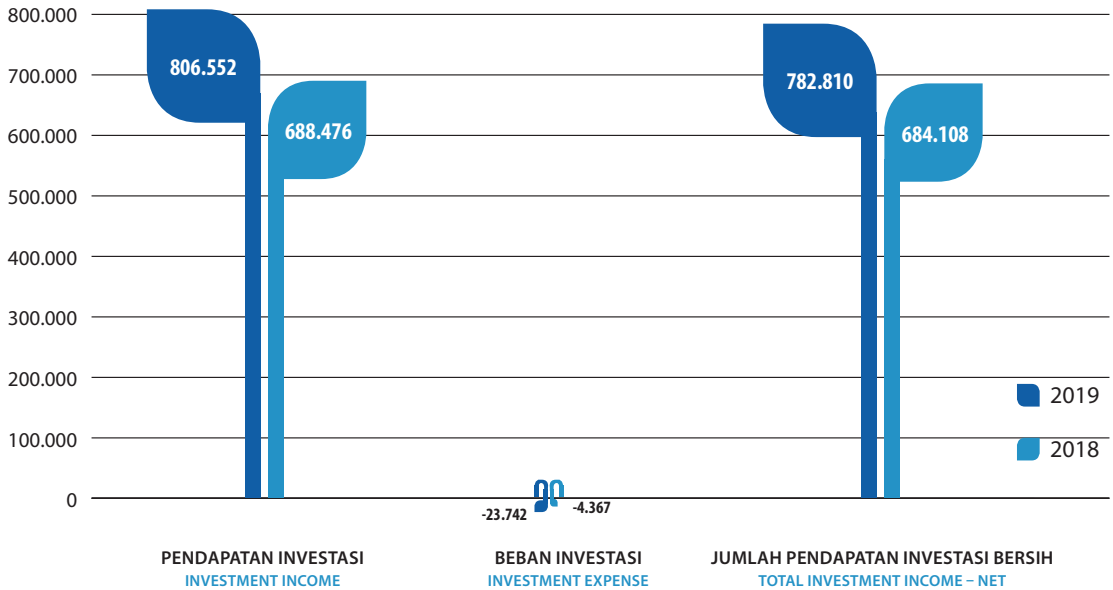

Jumlah pendapatan investasi selama periode tahun 2019 adalah sebesar Rp 806,55 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 118,08 miliar atau 17,15% dibandingkan periode sebelumnya tahun 2018 yaitu sebesar Rp 688,48 miliar. Sedangkan beban investasi selama periode tahun 2019 adalah sebesar Rp23,74miliar, meningkat sebesar Rp 19,37 miliar atau 443,64% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yaitu sebesar Rp 4,37 miliar. Dengan demikian, pendapatan investasi bersih tahun 2019 tercatat sebesar Rp 782,81 miliar, meningkat sebesar Rp 98,70 miliar atau 14,43% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018.

The total investment income during the 2019 period was Rp 806.55 billion. An increase of Rp 118.08 billion or 17.15% compared to the previous period in 2018, which was Rp 688.48 billion, while the investment expense for the 2019 period was Rp 23.74 billion, an increase of Rp 19.37 billion or 443.64% compared to the same period in 2018, which was Rp 4.37 billion. Therefore, Investment Income - Net in 2019 was recorded at Rp 782.81 billion, an increase of Rp 98.70 billion or 14.43% compared to the same period in 2018.

Peningkatan terbesar berasal dari bunga deposito yaitu Rp 107,18 miliar atau 28,24%, dari Rp 379,49 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp 486,67 miliar pada tahun 2019. Bunga deposito juga merupakan komponen terbesar yaitu 60,34% dari total pendapatan investasi tahun 2019.

The largest increase came from Time Deposit Interest, namely Rp. 107.18 billion or 28.24%, from Rp. 379.49 billion in 2018 to Rp. 486.67 billion in 2019. Time Deposit Interest was also the largest component, namely 60.34% of the total investment income in 2019.

BEBAN USAHA / OPERATING EXPENSES

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase Percentage
Beban Operasional/Operating Expenses	188.919	144.613	44.306	30,64%
Beban Sumber Daya Manusia/Human Resources Expenses	438.636	383.172	55.463	14,47%
Beban Administrasi Kantor dan Umum/General and Administrative Expenses	150.570	138.965	11.604	8,35%
Beban Sistem, Teknologi dan Pengembangan Usaha/ Technology, System and Development Expense	31.689	26.485	5.204	19,65%
Jumlah Beban Usaha/Total Operating Expenses	809.813	693.236	116.577	16,82%

BEBAN USAHA (JUTA RUPIAH)
OPERATING EXPENSES (MILLION RUPIAH)

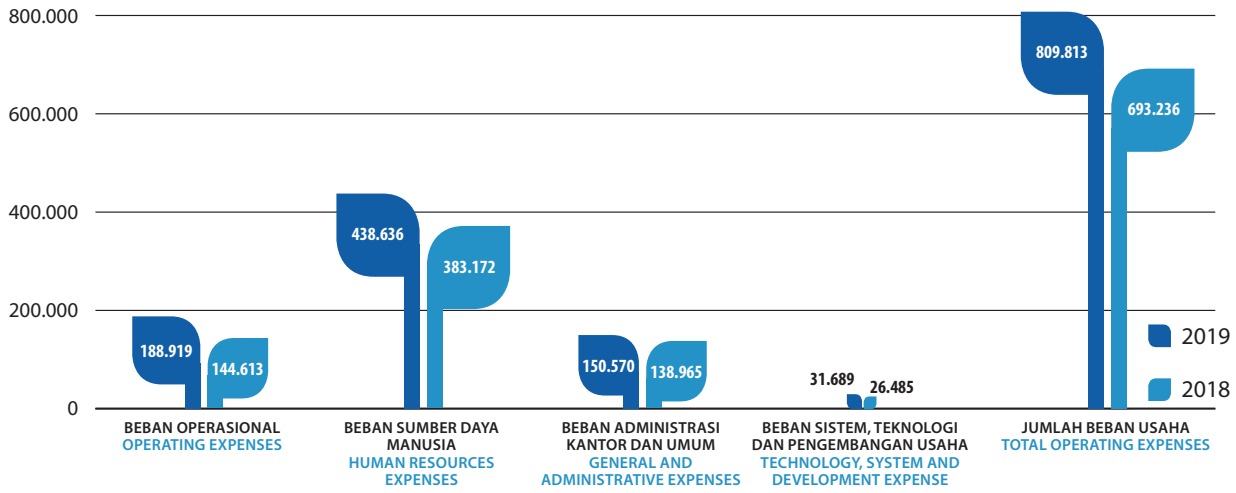

Jumlah beban usaha selama tahun 2019 adalah sebesar Rp 809,81 miliar, meningkat sebesar Rp116,58miliar atau 16,82% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yaitu Rp 693,24 miliar. Peningkatan terbesar berasal dari beban sumber daya manusia yaitu ("SDM") Rp 55,46 miliar atau 14,47% dari sebesar Rp 383,12 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp 438,64 miliar. Beban SDM juga merupakan komponen terbesar yaitu 54,17% dari total beban usaha tahun 2019.

Total operating expenses in 2019 were Rp 809.81 billion, an increase of Rp 116.58 billion, or 16.82% compared to the same period in 2018, which was Rp 693.24 billion. The largest increase came from the Human Resources Expenses ("HR") of Rp. 55.46 billion or 14.47% from Rp. 383.12 billion in 2018 to Rp. 438.64 billion. Human Resources Expenses were also the largest component, which was 54.17% of the total operating expenses in 2019.

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN BERSIH
OTHER INCOME (EXPENSES) - NET

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase Percentage
Pendapatan Jasa Giro/ Interest Income	5.117	5.204	(87)	-1,67%
Pendapatan Jasa Administrasi Penjaminan/ Administration Guarantee Income	4.925	4.767	158	3,31%
Pendapatan Administrasi BUM/ BUM Administration Income	4	150	(146)	-97,45%
Pendapatan Lainnya/ Others	2.914	24.179	(21.265)	-87,95%
Jumlah Pendapatan Lain-lain/ Total Other Income	12.960	34.300	(21.340)	-62,22%
Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Impairment Losses of Receivables	(15.444)	(42.325)	26.881	-63,51%
Jumlah Beban Lain-lain/ Total Other Expenses	(15.444)	(42.325)	26.881	-63,51%
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih/ Total Other Income (Expenses) - Net	(2.484)	(8.025)	5.541	-69,05%

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN BERSIH (JUTA RUPIAH)
OTHER INCOME (EXPENSES) – NET (MILLION RUPIAH)

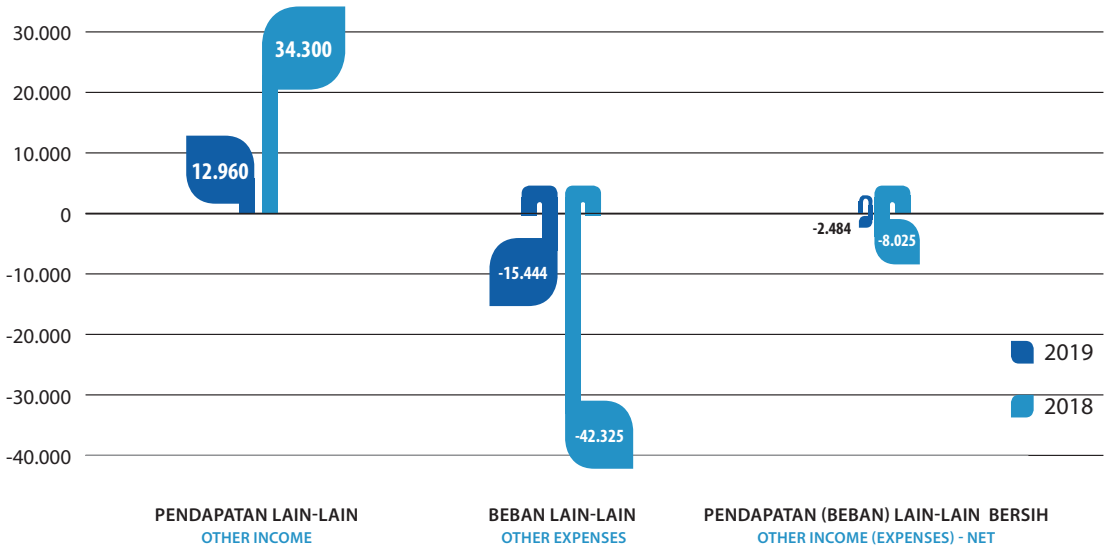

Pendapatan lain-lain selama tahun 2019 adalah sebesar Rp 12,96 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp21,34miliar atau 62,22% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yaitu sebesar Rp 34,30 miliar. Penurunan terbesar berasal dari komponen pendapatan lainnya yaitu sebesar Rp 21,27 miliar atau 87,95% dari sebesar Rp 24,18 miliar pada taun 2018 menjadi sebesar Rp 2,91 miliar pada tahun 2019.

Other income during 2019 was Rp 12.96 billion, a decrease of Rp 21.34 billion or 62.22% compared to the same period in 2018, which was Rp 34.30 billion. The largest decrease came from other components, namely Rp.21.27 billion or 87.95%, from Rp.24.18 billion in 2018 to Rp2.91 billion in 2019.

Beban lain-lain adalah kerugian penurunan nilai piutang, selama tahun 2019 tercatat sebesar Rp 15,44 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp 26,88 miliar atau 63, 51% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yaitu sebesar Rp 42,33 miliar.

Other expenses were impairment losses of receivables, during 2019 amounting to Rp 15.44 billion, experiencing a decrease of Rp 26.88 billion or 63.51% compared to the same period in 2018, which amounted to Rp 42.33 billion.

Dengan demikian pada tahun 2019, Perusahaan mencatat beban lain-lain bersih sebesar Rp 2,48 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp 5,54 miliar atau 69,05% dibandingkan beban lain-lain tahun 2018, yaitu sebesar Rp 8,03 miliar.

Therefore, in 2019, the Company recorded the Other Expenses - Net of Rp 2.48 billion, a decrease of Rp 5.54 billion or 69.05% compared to Other Expenses in 2018, amounting to Rp 8.03 billion.

LABA SEBELUM PAJAK

Pada tahun 2019, Perusahaan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 765,71 miliar, meningkat sebesar Rp 257,43 miliar atau 50,65% dibandingkan tahun 2018. Peningkatan tersebut terutama karena peningkatan penjaminan bersih pada tahun 2019.

EARNINGS BEFORE TAX

In 2019, the Company recorded Earnings Before Tax of Rp 765.71 billion, an increase of Rp 257.43 billion, or 50.65% compared to 2018. The increase was mainly due to an increase in Guarantee Fee Net in 2019.

BEBAN PAJAK PENGHASILAN BERSIH

Beban pajak penghasilan bersih tahun 2019 adalah sebesar Rp 139,34 miliar, meningkat sebesar Rp29,19miliar atau 26,36% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 110,74 miliar.

CLAIM EXPENSES - NET

The Claim Expenses - Net in 2019 was Rp 139.34 billion, an increase of Rp 29.19 billion or 26.36% compared to 2018, which was Rp 110.74 billion.

LABA TAHUN BERJALAN

Pada tahun 2019, Perusahaan berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp 625,78 miliar, meningkat sebesar Rp 228,24 miliar atau 57,41% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 397,54 miliar.

CURRENT YEAR INCOME

In 2019, the Company recorded a Current Year Income of Rp 625.78 billion, an increase of Rp 228.24 billion or 57.41% compared to 2018, which was Rp 397.54 billion.

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 625,78 miliar, meningkat sebesar Rp 228,24 miliar atau 57,41% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 397,54 miliar. Sedangkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali adalah sebesar Rp 962,54 ribu, meningkat Rp 22,48 ribu atau 2,39% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 940,06 ribu.

Income for the Year Attributable to Equity Holders of the Parent Entity in 2019 was Rp 625.78 billion, an increase of Rp 228.24 billion or 57.41% compared to 2018, which was Rp 397.54 billion while the Income for the Year Attributable to Non-controlling Interest was Rp 962.54 thousand, an increase of Rp 22.48 thousand or 2.39% compared to 2018, which was Rp 940.06 thousand.

PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE)

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase Percentage
Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut ke Laba Rugi/ Items that will not be Reclassified to Profit and Loss:				
- Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja/ Remeasurement of Post Employment Benefit	(4.878)	25.994	(30.872)	-118,77%
- Pajak Tangguhan Terkait Pengukuran Kembali Kewajiiban Imbalan Pasti/ Related Deffered Tax Restatement on Defined Benefits Obligation	1.220	(6.191)	7.410	-119,70%
Jumlah Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut ke Laba Rugi/ Total Items that will not be Reclassified to Profit and Loss	(3.659)	19.803	(23.462)	-118,47%
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim/ Increase (decrease) in claim reserve				
Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut ke Laba Rugi Ketika Kondisi Tertentu Terpenuhi/ Items that will be Reclassified to Profit and Loss due to Certain Conditions:				
- Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan yang Tersedia Untuk Dijual/ Gain (Loss) Financial Assets Available for Sale	88.151	(210.037)	298.188	-141,97%
- Pajak Tangguhan Terkait Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual/ Related Deferred Tax Financial Instrument of Available for Sale	(24.672)	54.276	(78.948)	-145,46%
Jumlah Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut ke Laba Rugi Ketika Kondisi Tertentu Terpenuhi/ Total Items that will be Reclassified to Profit and Loss due to Certain Conditions	63.479	(155.761)	219.239	-140,75%
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain Bersih/ Other Comprehensive Income (Expense) - Net	59.820	(135.957)	195.778	-144,00%

PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN (JUTA RUPIAH)
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) (MILLION RUPIAH)

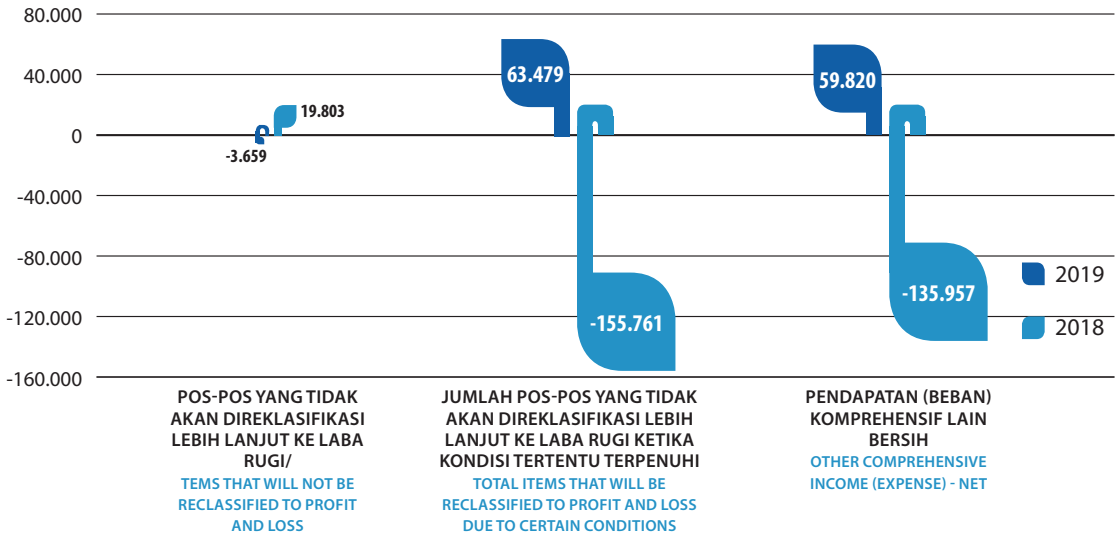

Pada tahun 2019, Perusahaan mencatat pendapatan komprehensif lain bersih sebesar Rp 59,82 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 195,78 miliar karena pada tahun 2018 tercatat beban komprehensif lain bersih sebesar Rp 135,96 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari keuntungan aset keuangan yang tersedia untuk dijual sebesar Rp 298,19 miliar, sedangkan pada tahun 2018 tercatat adanya kerugian aset keuangan yang tersedia untuk dijual sebesar Rp 210,04 miliar.

In 2019, the Company recorded Other Comprehensive Income - Net of Rp 59.82 billion, an increase of Rp 195.78 billion due to in 2018, Other Comprehensive Expense - Net was recorded at Rp 135.96 billion. The increase came from the Gain Financial Assets Available for Sale of Rp 298.19 billion, while in 2018, there were Loss Financial Assets Available for Sale of Rp 210.04 billion.

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pada tahun 2019, Perusahaan membukukan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 685,60 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 424,01 miliar atau 162,09% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp261,59 miliar.

Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 685,60 miliar, meningkat sebesar Rp 424,01 miliar atau 162,09% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 261,59 miliar. Sedangkan laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali adalah sebesar Rp 962,54 ribu, meningkat Rp 22,48 ribu atau 2,39% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 940,06 ribu.

COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR

In 2019, the Company posted a Comprehensive Income for the Current Year of Rp 685.60 billion, an increase of Rp 424.01 billion or 162.09% compared to 2018, which amounted to Rp261.59 billion.

Comprehensive Income the Year Attributable to Equity Holders of The Parent Entity in 2019 was Rp 685.60 billion, an increase of Rp 424.01 billion or 162.09% compared to 2018, was Rp 261.59 billion. While Comprehensive Income the Year Attributable to Non-controlling Interest was Rp 962.54 thousand, an increase of Rp 22.48 thousand or 2.39% compared to 2018, Rp 940.06 thousand.

LAPORAN ARUS KAS
Statements of Cash Flows

Laporan arus kas adalah komponen laporan keuangan yang menunjukan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

The statement of cash flows is a component of financial statements showing the receipts and disbursements of cash and cash equivalents during certain periods categorized into operating, investing, and financing activities.

IKHTISAR ARUS KAS

CASH FLOWS OVERVIEW

(dalam juta Rupiah kecusali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase Percentage
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi/ Net cash used in operating activities	(244.589)	491.688	(736.277)	-149,74%
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi/ Net cash used in investment activities	234.994	360.876	(125.881)	-34,88%
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan/ Net cash provided from financing activities	(39.754)	(80.185)	40.431	-50,42%
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas/ Increase (Decreased) in Cash and Cash Equivalents - Net	(49.349)	772.379	(821.728)	-106,39%
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun/ Cash and Equivalents at The Beginning of Year	6.190.307	5.417.929	772.379	14,26%
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun/ Cash and Equivalents at The End of Year	6.140.958	6.190.307	(49.349)	-0,80%

ARUS KAS (JUTA RUPIAH)
CASH FLOWS (MILLION RUPIAH)

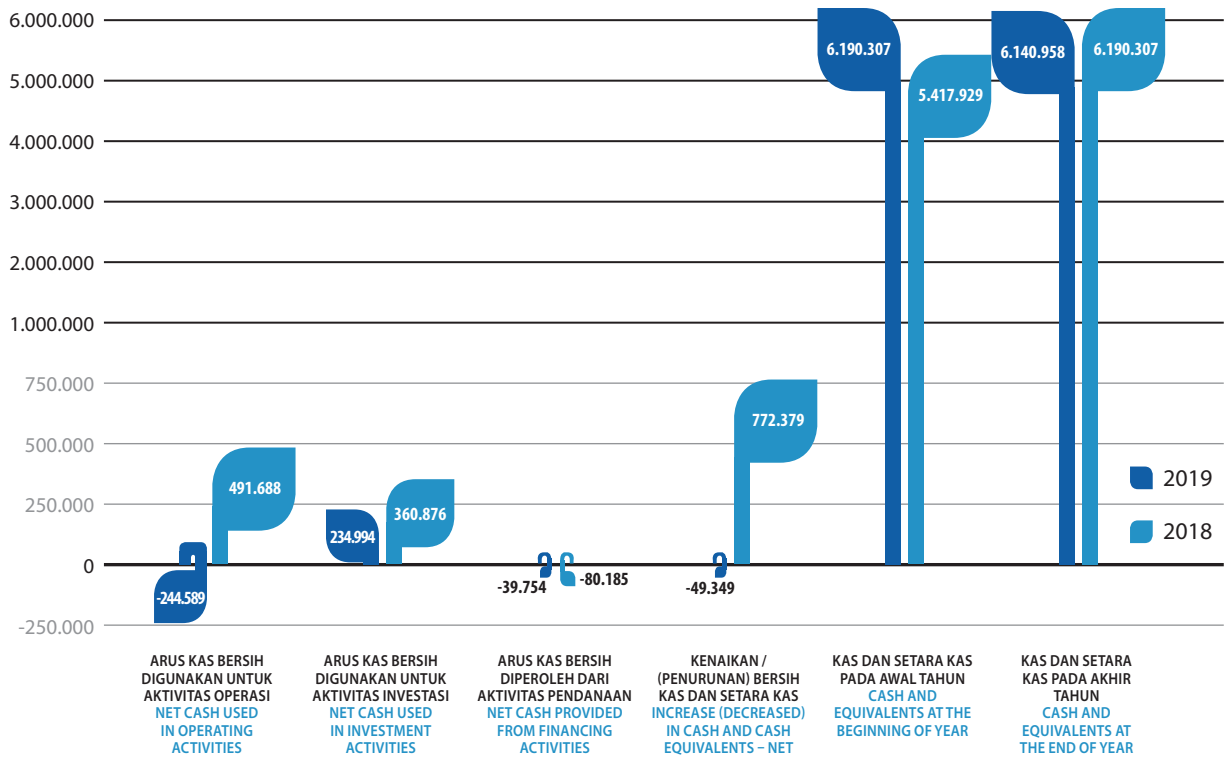

Pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat jumlah kas dan setara kas sebesar Rp 6,14 triliun mengalami penurunan sebesar Rp 49,35 miliar atau 0,80% dibandingkan posisi 31 Desember 2018, karena adanya pengunaan arus kas bersih untuk aktivitas operasi sebesar Rp 244,59 miliar, penggunaan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 39,75 miliar, dan arus kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar Rp 234,99 miliar.

As of December 31, 2019, the amount of cash and cash equivalents was Rp. 6.14 trillion, decreased by Rp.49.35 billion or 0.80% compared to the position on December 31, 2018, due to the Net cash used in operating activities of Rp. 244.59 billion, the Net cash provided from financing activities was Rp 39.75 billion, and the net cash used in the investment activities amounted to Rp 234.99 billion.

ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

(dalam juta Rupiah kecusali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase Percentage
Penerimaan Imbalan Jasa Penjaminan/ Receipt from Guarantee Fee	2.875.069	2.644.530	230.539	8,72%
Pembayaraan Klaim dari Mitra *Co Guarantee*/ Payment to Co Guarantee Partners	(103.506)	(132.248)	28.742	-21,73%
Penerimaan Aktivitas Operasi Lainnya/ Receipt from Other Operating Activities	504.806	551.742	(46.936)	-8,51%
Pembayaran Imbalan Jasa *Co Guarantee*/ Payment of Fee Co Guarantee	(478.158)	(515.545)	37.387	-7,25%
Pembayaran Klaim/ Payment of Claims	(1.867.314)	(1.157.327)	(709.987)	61,35%
Pembayaran Biaya/ Payment of Expenses	(758.969)	(596.627)	(162.342)	27,21%
Pembayaran Pajak Penghasilan/ Payment of Income Tax	(143.168)	(117.274)	(25.894)	22,08%
Pembayaran Aktivitas Lainnya/ Payment of Other Activities	(273.347)	(185.563)	(87.784)	47,31%
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi/ Net cash used in operating activities	(244.587)	491.688	(736.275)	-149,74%

Pada tahun 2019, Perusahaan mencatat pengeluaran kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp 244,59 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp 736,28 miliar dibandingkan tahun 2018, yang mencatat penerimaan bersih sebesar Rp 491,69 miliar. Penurunan tersebut terutama karena peningkatan pembayaran klaim sebesar Rp 709,99 miliar atau 61,35% yaitu dari sebesar Rp 1,16 triliun pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp 1,87 triliun pada tahun 2019.

In 2019, the Company recorded the expenditure of Net cash used in operating activities of Rp 244.59 billion, a decrease of Rp 736.28 billion compared to 2018, which recorded net cash of Rp 491.69 billion. The decrease was mainly due to an increase in the Payment of Claims of Rp. 709.99 billion or 61.35%, from Rp. 1.16 trillion in 2018 to Rp. 1.87 trillion in 2019.

ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI

CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITIES

(dalam juta Rupiah kecusali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase Percentage
Penerimaan Hasil Investasi/ Receipt from Return of Investment	782.810	649.002	133.808	20,62%
Penerimaan Aktivitas Investasi Lainnya/ Receipt from Other Investment	10.538	23.741	(13.203)	-55,61%
Penempatan Investasi yang Diperkenankan/ Placement of Allowed Investment	(444.469)	(280.086)	(164.384)	58,69%
Pembelian Aset Tetap/ Acquisition of Fixed Assets	(64.343)	(27.415)	(36.928)	134,70%
Pembayaran Aktivitas Investasi Lainnya/ Payment of Other Investment Activities	(49.542)	(4.367)	(45.174)	1034,42%
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi/ Net cash used in investment activities	234.994	360.876	(125.881)	-34,88%

Pada tahun 2019, Perusahaan mencatat penerimaan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 234,99 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp 125,88 miliar dibandingkan tahun 2018, yang mencatat penerimaan bersih sebesar Rp 360,88 miliar. Penurunan tersebut terutama karena adanya peningkatan penempatan investasi yang diperkenankan sebesar Rp 164,38 miliar atau 58,69% yaitu dari sebesar Rp 280,09 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp 444,47 miliar pada tahun 2019.

In 2019, the Company recorded Net cash used in the investment activities of Rp 234.99 billion, a decrease of Rp 125.88 billion compared to 2018, which recorded net cash of Rp 360.88 billion. The decrease was mainly due to an increase in Placement of Allowed Investment by Rp 164.38 billion or 58.69%, from Rp 280.09 billion in 2018 to Rp 444.47 billion in 2019.

ARUS KAS PENDANAAN

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

(dalam juta Rupiah kecusali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase Percentage
Dividen/ Dividend	(39.754)	(80.185)	40.431	-50,42%
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan/ Net cash provided from financing activities	(39.754)	(80.185)	40.431	-50,42%

Pada tahun 2019, Perusahaan mencatat kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan yaitu pembayaran dividen sebesar Rp 39,75 miliar, angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp40,43miliar dibandingkan tahun 2018, yang mencatat pengeluaran untuk pembayaran dividen sebesar Rp 80,19 miliar.

In 2019, the Company recorded Net cash provided from financing activities, namely payment of the dividend of Rp 39.75 billion, a decrease of Rp40.43 billion compared to 2018, which recorded payment of the dividend of Rp 80.19 billion.

REKENING ADMINISTRATIF

Rekening administratif yang dikelola oleh Perusahaan adalah piutang subrogasi yang merupakan tagihan kepada instansi/ nasabah yang tidak dapat membayar kredit dan sudah dibayarkan klaimnya kepada bank oleh Perum Jamkrindo.

ADMINISTRATIVE ACCOUNT

The Administrative Account managed by the Company is Subrogation receivables represent receivables from agencies/customers who can not pay the loan, and the bank claims have been paid by the Corporation Jamkrindo.

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Saldo awal tahun/ Beginning Balance of The Year	5.713.508	5.026.322	687.186	13,67%
Pembayaran Klaim Tahun Berjalan/ Claims Payments Current Year	1.826.293	1.163.985	662.309	56,90%
Pendapatan Subrogasi Tahun Berjalan/ Subrogation Revenue Current Year	(521.487)	(476.799)	(44.689)	9,37%
Saldo akhir Tahun/ Ending Balance	7.018.314	5.713.508	1.304.806	22,84%

Saldo akhir tahun 2019 tercatat sebesar Rp 7,02 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.30 triiun atau 22,84%, terutama karena adanya peningkatan pembayaran klaim tahun berjalan yaitu sebesar Rp662,31miliar atau 56,90% dibandingkan tahun 2018. Di sisi lain pendapatan subrogasi tahun 2019 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 44,69 miliar atau 9,37% dibandingkan pada tahun 2018.

The ending balance of 2019 was recorded at Rp 7.02 trillion, an increase of Rp 1.30 trillion or 22.84%, mainly due to an increase in Claims Payments Current Year of Rp.662.31 billion or 56.90% compared to 2018. On the other hand, Subrogation Revenue Current Year in 2019 also experienced an increase of Rp 44.69 billion or 9.37% compared to 2018.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG
The Ability to Pay Debt and Receivable Collectibility

Kemampuan membayar utang perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya dipengaruhi oleh tingkat likuiditas dan solvabilitas Perusahaan yang tercermin pada rasio-rasio berikut :

The ability to pay a company's debt, to pay its obligations is influenced by the level of liquidity and solvency of the Company, as reflected in the following ratios:

RASIO LIKUIDITAS / LIQUIDITY RATIO

Uraian / Description	2019	2018	Pertumbuhan / Growth
Rasio Lancar/Current Ratio	378,50%	450,89%	-72,39%
Rasio *Cash Flow to Debt*/ Cash Flow to Debt Ratio	549,33%	597,15%	-47,82%

Sesuai dengan POJK No. 2/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelanggaraan Lembaga Usaha Penjamin Pasal 43 ayat (2), rasio likuiditas penjamin ditetapkan paling rendah 120% (seratus dua puluh per seratus).

Based on POJK No. 2 / POJK.05 / 2017, dated January 11, 2017, concerning the Execution of Guarantor Business Institutions, the guarantor's liquidity ratio is set at a minimum of 120% (one hundred twenty per hundred).

Rasio lancar menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Sekalipun mengalami penurunan, terlihat bahwa pada posisi 31 Desember 2019 Perusahaan masih dalam kondisi likuid dengan tingkat likuiditas yang masih berada jauh di atas ambang batas minimal yang ditetapkan dalam Peraturan OJK sebagaimana tersebut di atas.

The current ratio illustrates the Company's ability to pay current liabilities or debt that are due immediately when billed as a whole. Even though it has decreased, it could be seen that as of December 31, 2019, the Company was still in a liquid condition with a liquidity level that was still far above the minimum threshold stipulated in the OJK Regulations as mentioned above.

Selain menggunakan rasio lancar, Perusahaan menggunakan rasio *cash flow to debt* untuk mengukur tingkat risiko likuiditasnya yaitu dengan membandingkan jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas dikurangi dengan pendapatan ditangguhkan.

In addition to using the current ratio, the Company uses cash flow to debt ratio to measure the level of liquidity risk by comparing the amount of cash and cash equivalents with the number of liabilities minus deferred income.

Risiko likuiditas perusahaan pada posisi 31 Desember 2019 sejumlah 549,33% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 597,15%. Hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan ditangguhkan Perusahaan ± sebesar Rp563 miliar, tetapi kenaikan tersebut beriringan dengan kenaikan liabilitas Perusahan ± Rp650 miliar serta penurunan kas dan setara kas sebesar Rp49 miliar. Namun, risiko likuiditas Perum Jamkrindo masuk dalam kategori major dan masih di atas ketentuan yang dipersyaratkan dalam POJK No. 2/POJK.05/2017.

The Company's liquidity risk as of December 31, 2019, was 549.33% decreased compared to 2018, which amounted to 597.15%. This was influenced by the increase in deferred income of the Company ± by Rp.563 billion, but the increase was in line with the increase in company liabilities ± Rp650 billion and a decrease in cash and cash equivalents by Rp49 billion. However, based on the indicators above, Perum Jamkrindo's liquidity risk is in a major category and is still above the provisions required in POJK No.2 / POJK.05 / 2017. per hundred).

RASIO SOLVABILITAS / SOLVENCY RATIO

Uraian / Description	2019	2018	Pertumbuhan / Growth
Rasio Debt to Equity ("DER")	46,76%	43,78%	2,98%

Dalam mengukur tingkat solvabilitas Perusahaan digunakan rasio hutang terhadap modal (*debt to equity ratio*) yang menunjukkan kemampuan Perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai BUMN yang bergerak di bidang jasa penjaminan, rasio terseut dapat dilihat dari tingkat kesehatan Perusahaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 rasio DER Perum Jamkrindo adalah sebesar 46,76%, menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan memenuhi kewajibannya cukup baik, sekalipun terdapat sedikit peningkatan angka DER yaitu 2,98% dibandingkan posisi 31 Desember 2018.

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Definisi piutang secara luas adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berutang pada seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut.

PIUTANG IMBAL JASA PENJAMINAN ("IJP")

1. Piutang IJP Kredit Usaha Rakyat ("KUR")

   Piutang IJP KUR merupakan tagihan Perusahaan atas jasa kegiatan penjaminan produk KUR yang telah diberikan kepada terjamin dan terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu Piutang Subsidi IJP KUR dan Piutang IJP KUR Subsidi Bunga.

   a. Piutang Subsidi IJP KUR

      Merupakan tagihan Perusahaan kepada Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008. Imbal Jasa Penjaminan dibayar oleh Pemerintah dengan tarif imbal jasa penjaminan sebesar 1,5% dan *coverage* sebesar 70% untuk kredit yang akadnya sebelum 14 Februari 2010. Untuk kredit yang akadnya setelah 14 Februari 2010 tarif imbal jasa penjaminan sebesar 3,25% pertahun dengan *coverage* sebesar 70%-80% sesuai PMK No.189/PMK.05/2010 tanggal 2 November 2010.

   b. Piutang IJP KUR Subsidi Bunga

      Merupakan tagihan Perusahaan kepada Penerima Jaminan atas jasa kegiatan penjaminan KUR

In measuring the Company's solvency level, the debt to equity ratio is used that shows the ability of the Company to pay all of its obligations both short and long term. As a state-owned company engaged in guarantee services, the ratio can be seen from the Company's health level as stipulated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-10 / MBU / 2014 dated July 25, 2014, concerning Indicators for the Health Level Assessment of State-Owned Enterprises of Financial Services in Insurance and Guarantee Services business filed.

As of December 31, 2019, the DER ratio of Perum Jamkrindo was 46.76%, indicating that the Company's ability to meet its obligations was quite good. However, there was a slight increase in the DER figure of 2.98% compared to the position on December 31, 2018.

RECEIVABLES COLLECTIBILITY

The broad definition of accounts receivable is one type of accounting transaction that deals with the collection of consumers who owe a person, a company, or an organization for goods and services provided to those consumers.

GUARANTEE RECEIVABLES ("IJP")

1. Guaranteed Service Credit Receivables (IJP) of People's Business Credit (KUR) (KUR Guarantee Receivables)

   Guaranteed Service Credit Receivables (IJP) of People's Business Credit (KUR) is the Company's bill for services guarantee activities of KUR products that have been given to guaranteed and is divided into 2 (two) categories, namely KUR IJP Subsidies and KUR IJP KUR Interest Subsidies.

   a. KUR IJP Receivables Subsidies

      Represent Company bills to the Government in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 135 / PMK.05 / 2008 dated September 24, 2008. Guaranteed Service Payments are paid by the Government with a guarantee fee of 1.5% and coverage of 70% for loans the contract before February 14, 2010. For loans with agreements after February 14, 2010, the guarantee fee will be 3.25% per year, with coverage of 70% -80%, according to PMK No.189 / PMK.05 / 2010 dated November 2, 2010.

   b. KUR IJP Receivables Interest Subsidies

      represent the Company's bills to Guarantee Recipients for the services of KUR guarantee activities

yang telah diberikan kepada terjamin sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015. Imbal Jasa Penjaminan termasuk dalam Subsidi Bunga yang dibayarkan Pemerintah yang nilainya hasil dari kesepakatan antara Penjamin dan Penerima Jaminan.

that have been provided to be guaranteed according to the Regulation of the Coordinating Minister for the Economy Number 8 of 2015 dated October 19, 2015. Guaranteed Service Fees are included in Interest Subsidies paid by the Government, the value of which results from an agreement between the Guarantor and the Recipient of the Guarantee.

TABEL PIUTANG IJP KUR
TABLE OF IJP KUR RECEIVABLES

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Piutang IJP KUR Kepada Pemerintah/ Guarantee Receivables - KUR to Government	1.432.589	1.328.036	104.553	7,87%
Piutang IJP KUR Subsidi Bunga/ KUR IJP Receivables Interest Subsidies	1.470.352	1.307.161	163.192	12,48%
Jumlah Piutang IJP KUR/ Total KUR Guarantee Receivables	2.902.941	2.635.197	267.744	10,16%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losess	(73.569)	(43.658)	(29.911)	68,51%
Jumlah Piutang IJP KUR Bersih/ Total KUR Guarantee Receivables - Net	**2.829.372**	**2.591.539**	**237.833**	**9,18%**

Perubahan penyisihan penurunan nilai atas Piutang IJP KUR Kepada Pemerintah adalah sebagai berikut ;

The changes in allowance of impairment loss for Guarantee Receivables to Government is as follows:

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018
Saldo Awal Tahun/ Beginning Balance of The Year	43.658	11.772
Pembentukan Cadangan/ Establishment of Allowance	29.911	31.886
Pemulihan Cadangan/ Recovery of Allowance	-	-
Saldo Akhir Tahun/ Ending Balance	**73.569**	**43.658**

2. Piutang IJP Non KUR / Eksisting

Tagihan IJP produk Non KUR kepada Penerima Jaminan/ Bank atas jasa kegiatan penjaminan yang telah diberikan kepada terjamin. Piutang yang terdapat piutang IJP antara lain penjaminan FLPP, Kupedes Rakyat dan Syariah.

Besaran nilai piutang IJP Non KUR adalah sebagai berikut

2. Non-KUR Guarantee Receivables/ Existing

Non-KUR Guarantee Receivables to Guarantee Recipients/ Banks for the services of guarantee activities that have been provided to the guaranteed. Receivables that have Guarantee Receivables include the guarantees of FLPP, People's Rural General Credit (Kupedes), and Sharia.

The amount of the Non-KUR Guarantee Receivables value is as follows.

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Piutang IJP Eksisting/ Existing Guarantee Receivables	61.598	75.314	(13.715)	-18,21%

PIUTANG PENJAMINAN ULANG

1. Piutang *Co-Guarantee*

Piutang *Co-Guarantee* adalah penggantian pembayaran klaim yang ditagihkan kepada mitra *Co-Guarantee* atas pembayaran klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan.

Perusahaan bekerjasama dengan mitra *Co-Guarantee* untuk kredit multiguna dan mikro guna mengalihkan risiko klaim yang diakibatkan meninggalnya terjamin.

Untuk menghindari tertunggaknya pembayaran Piutang dari mitra *Co-Guarantee* , sejak tahun 2011 telah ditambahkan ketentuan baru dalam Perjanjian Kerja Sama ("PKS") dengan mitra *Co-Guarantee* yaitu Perusahaan akan memotong pembayaran premi *Co-Guarantee* maksimal sebesar 55% dari premi *Co-Guarantee* sebesar 45% dari IJP/IJK yang menjadi hak mitra *Co-Guarantee* apabila saldo Piutang *Co-Guarantee* di atas kewajaran, yang dihitung 3 (tiga) kali dari rata-rata pengajuan pembayaran klaim dalam 1 (satu) tahun terakhir atau dengan perhitungan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan mitra *Co-Guarantee.*

Berikut adalah jumlah piutang *Co-Guarantee*

REGUARANTEE RECEIVABLES

1. Co-guarantee receivables

Co-guarantee receivables are reimbursement of claims billed to Co-Guarantee partners for the payment of claims that have been paid by the Company.

The Company cooperates with Co-Guarantee partners for a multipurpose and microcredit to transfer the risk of claims resulting from the death of the assured.

To avoid the payment of delinquent receivables from Co-Guarantee partners, since 2011 has been added a new provision in the agreement of cooperation with Co-Guarantee partners that the company will cutoff the premium Co. Guarantee a maximum of 50% of the premium Co. Guarantee for 60% of the IJP / IJK the Guarantee Co partner right when the balance in the Accounts Receivable Guarantee Co. fairness, which is calculated 3 (three) times of the average filing claims payments in the last 1 (one) year or with other calculations agreed by the company and partner Co-Guarantee.

The following are Co-guarantee receivables

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Piutang *Co-Guarantee* dan *Co-Insurance*/ Co-Guarantee and Co-Insurance Receivable	145.391	121.033	24.357	20,12%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	(92.266)	(76.822)	(15.444)	20,10%
Jumlah Piutang *Co-Guarantee* – Bersih/ Total Co-Guarantee Receivable - Net	53.125	44.211	8.914	20,16%

Sedangkan perubahan penyisihan penurunan nilai atas piutang *co-guarantee* adalah sebagai berikut ;

While the change in allowance for impairment losses on co-guarantee receivables is as follows;

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018
Saldo Awal Tahun/Beginning Balance of The Year	76.822	83.391
Pembentukan Cadangan/Establishment of Allowance	15.444	10.277
Pemulihan Cadangan/Recovery of Allowance	-	(16.846)
Saldo Akhir Tahun/Ending Balance	92.266	76.822

2. Piutang Re-Asuransi

Piutang Re-Asuransi adalah penggantian pembayaran klaim yang ditagihkan kepada mitra Re-Asuransi atas pembayaran klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan. Perusahaan bekerjasama dengan mitra Re-asuransi untuk semua jenis kredit untuk mengalihkan sebagian risiko klaim.

Dalam kerja sama dengan re-asuransi digunakan metode *treaty* yang merupakan perjanjian pertanggungan ulang otomatis secara tahunan antara Perusahaan Penjamin dan Re-asuransi dengan kondisi yang disepakati bersama dalam negosiasi *treaty* .

Berikut adalah jumlah piutang re-asuransi

2. Re-Insurance Receivable

Re-Insurance Receivable is reimbursement payments charged to the partners' claim for payment of Re-Insurance claims paid by the Company. Re-insurance companies collaborate with partners for all types of credit to shift some of the risks of claims.

In cooperation with the insurance partner, treaty methods are being used that is an annually automatic re-guarantee agreement, and re-insurance partner with the condition agreed concerning treaty negotiation.

The following is the amount of the re-insurance receivable.

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Piutang Re-Asuransi/ Re-Insurance Receivable :	368.636	210.396	158.240	75,21%

PINJAMAN YANG DIBERIKAN

1. Pinjaman kepada Koperasi Pegawai sebagai berikut:

LOANS

1. Employee Cooperative Receivable as follows:

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Piutang kepada Koperasi Pegawai/ Employee Cooperative Receivable	455	695	(240)	-34,55%
Penyisihan kerugian nilai pinjaman koperasi pegawai/ Employee Cooperative Receivable for Impairment Losses	(326)	(326)	-	0,00%
Jumlah piutang pada koperasi pegawai – bersih/ Total Employee Cooperative Receivable - Net	129	369	(240)	-65,10%

2. Pinjaman Bagi Hasil

Piutang Pinjaman Bagi Hasil adalah penyediaan uang/ dana oleh Perusahaan kepada nasabah berdasarkan perjanjian pinjaman bagi hasil antara Perusahaan dengan nasabah yang mewajibkan pihak nasabah untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan imbalan bagi hasil yang dihitung dari nilai nominal atau target IRR tertentu. Piutang Pinjaman bagi Hasil diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan No. 42/DIR/IX/2001. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia tidak lagi menyalurkan pinjaman bagi hasil baru.

2. Profit Sharing Loan Receivable

Profit-Sharing Loan Receivable is the provision of money/ funds by the Company to customers under Profit Sharing Loan agreements between the Company with customers who require the customer to repay the debt after a certain period in return for taking into account the results calculated from the nominal value or a specific target IRR. Profit-Sharing Loan Receivable regulated in The Decree of Company's Board of Directors No.42/DIR/IX/2001. Based on Government Regulation Number 41 of 2008 Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia no longer distributes new profit-sharing loans.

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018	Perubahan Changes	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Piutang pinjaman bagi hasil/ Profit-Sharing Loan Receivable				
- Pihak Ketiga/ Third Parties	16.991	16.995	(4)	-0,02%
- Pihak Berelasi/ Related Parties	132	132	-	0,00%
Jumlah pinjaman bagi hasil/Total Profit-Sharing Loan	17.124	17.127	(4)	-0,02%
Penyisihan kerugian nilai pinjaman bagi hasil/ Profit Sharing Loan for Impairment Losses	(16.840)	(16.840)	-	0,00%
Jumlah piutang pinjaman bagi hasil – bersih/ Total Profit-Sharing Loan Receivable - Net	284	288	(4)	-1,22%

Pinjaman bagi hasil dengan kategori lancar ditetapkan sebagai pinjaman yang tidak mengalami penurunan nilai dan tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Terhadap Piutang bagi hasil yang mengalami penurunan nilai namun Perusahaan tidak dapat memperoleh komitmen pembayaran dari para debitur, maka nilai wajar Piutang bagi hasil ditetapkan nihil. Dengan demikian CKPN yang dibentuk sebesar 100% dari nilai tercatat.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya pinjaman tersebut.

Profit-Sharing Loan with the current category is defined as loans that are not impaired, and no impairment loss reserves established.

For profit-sharing loan, receivables are impaired, but the Company can not obtain payment from the debtor's commitments, the fair values of accounts receivable is set to nihil. Thus, allowance for impairment losses formed at 100% of the carrying value.

Management considers that allowance for impairment losses have been adequate to cover losses that may arise from uncollectible loans.

STRUKTUR MODAL
Capital Structure

Struktur modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal sendiri dengan penggunaan pinjaman/hutang.

Capital structure is a balance between the use of its own capital with the use of loans/debt.

Gambaran struktur modal pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

The description of the capital structure as of December 31, 2019, and December 31, 2018, was as follows:

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2019	2018
Total Liabilitas/Total Liabilities	5.589.811	4.945.317
Total Ekuitas/Total Equity	11.953.885	11.295.680
Rasio/Ratio :		
Debt to Equity (kali/times)	0,47	0,44

Perum Jamkrindo adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki sepenuhnya (100%) oleh Negara, setelah dilakukan penambahan modal sebesar Rp 500 miliar pada tahun 2016 dengan Peaturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2016, jumlah Penyertaan Modal Negara ("PMN") menjadi sebesar Rp7.638.733.365.160,- hingga akhir tahun 2019.

Perum Jamkrindo is one of the State-owned Enterprises (SOEs) wholly-owned (100%) by the State, after an additional capital of Rp 500 billion in 2016 with Government Regulation Number 92 of 2016, the number of State Capital Participation ("PMN") to Rp7,638,733,36565,160 until the end of 2019.

Hingga akhir tahun 2019, Perusahaan tidak menggunakan utang kepada lembaga keuangan (bank maupun non bank) sebagai sumber pembiayaan kegiatan usaha Perusahaan karena sumber pembiayaan berasal dari dana sendiri (ekuitas).

Until the end of 2019, the Company did not use debt to financial institutions (banks or non-banks) as a source of financing for the Company's business activities because the source of financing came from its own funds (equity).

Dari rasio *debt to equity* ("DER") tersebut di atas, menujukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2019, Perusahaan sebagian besar menggunakan ekuitas dalam membiayai usahanya. Namun karena pada tanggal 31 Desember 2019 peningkatan jumlah liabilitas lebih tinggi dari peningkatan ekuitas, maka terdapat sedikit peningkatan DER dibandingkan posisi 31 Desember 2018.

From the debt to equity ratio ("DER") mentioned above, it showed that until the end of 2019, the Company mostly used equity to finance its business. However, due to the increase in total liabilities was higher than the increase in equity on December 31, 2019, there was a slight increase in DER compared to December 31, 2018.

DASAR PEMILIHAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Kebijakan manajemen atas struktur modal didasarkan pada upaya melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga dapat tetap memberikan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, serta mempertahankan struktur permodalan yang sehat dalam rangka efisiensi biaya modal.

THE BASIS FOR CHOOSING MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

The management policy on capital structure is based on efforts to protect the Company's ability to maintain business continuity so that it can continue to provide optimal returns for shareholders and benefits for other stakeholders, as well as maintaining a healthy capital structure in the context of capital cost efficiency.\

KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Manajemen memanfaatkan ekuitas yang dimiliki oleh Perusahaan dalam mengelola sumber pembiayaan.

CAPITAL STRUCTURE POLICY

Management utilizes the equity owned by the Company in managing financing sources. The use of equity must

Penggunaan ekuitas harus dilaksanakan secara efektif dan efisien guna menjaga kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasional usahanya. Oleh sebab itu, Perusahaan juga membentuk cadangan-cadangan yang bersumber dari laba ditahan.

be carried out effectively and efficiently to maintain the Company's ability to run its business operations. Therefore, the Company also establishes reserves which are sourced from retained earnings.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Perusahaan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal pada tahun 2019. Seluruh belanja modal dibiayai sendiri dan digunakan untuk operasional Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan tidak memiliki informasi mengenai nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi dan langkah-langkah yang direncanakan Perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

The Company had no material commitments for capital investment in 2019. All capital expenditures were self-financed and were used for the Company's operations. Therefore, the Company did not have information about the name of the party to which the bond was made, the purpose of the bond, the source of funds expected to fulfill these bonds, the currency of the denomination, and steps planned by the Company to protect risks from the associated foreign currency positions.

INVESTASI BARANG MODAL

CAPITAL INVESTMENT

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	RKAP 2019 2019 RKAP	Realisasi Realization		Persentase Percentage	
		2019	2018	Capaian RKAP 2019 2019 RKAP Achievement	Pertumbuhan growth
Tanah dan Bangunan/ Land and buildings	81.905	46.069	8.789	56,25%	424,19%
Perabot Kantor dan Rumah Jabatan/ Office furniture and Houses	922	862	543	93,49%	58,75%
Inventaris Kantor/Office Equipment	13.522	17.412	17.964	128,77%	-3,07%
Kendaraan Bermotor/Vehicle	-	-	120	0,00%	-100,00%
Aset TI/IT assets	34.142	49.542	1.029	145,11%	100,00%
Total Investasi Barang Modal/ Total Capital Investment	130.491	113.885	28.445	87,27%	300,38%

Total realisasi investasi (belanja modal) tahun 2019 sebesar Rp113,89 miliar atau 87,27% dari target RKAP tahun 2019. Kondisi tersebut disebabkan realisasi investasi perusahaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan operasional tahun berjalan, dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan 300,38%.

The total investment realization (capital expenditure) in 2019 was Rp113.89 billion or 87.27% of the 2019 RKAP target. This condition was due to the realization of the company's investment adjusted to the conditions and operational needs of the current year, and when compared to the realization in 2018, it experienced an increase of 300.38%.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2019, DAN TARGET TAHUN 2020

Comparison between the 2019 Target and Realization, and the 2020 Target

LABA (RUGI) PROFIT (LLOSS)

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	Tahun 2019 Year 2019		
	RKAP	Realisasi Realization	Capaian (%) Achievement (%)
Pendapatan Penjaminan/ Guarantee Revenues	1.615.953	2.104.732	130,25%
Beban Klaim/ Claim Expense	(653.278)	(1.309.531)	200,46%
Penjaminan Bersih/ Net Guarantee Income	962.675	795.201	82,60%
Pendapatan Investasi/ Investment Income	746.482	782.810	104,87%
Beban Usaha/ Operating Expenses	(993.995)	(809.813)	81,47%
Pendapatan (Beban) Lain-lain/ Other Income (Expenses)	(1.174)	(2.484)	211,60%
Laba Sebelum Pajak/ Income Before Tax	713.989	765.714	107,24%
Pajak Kini/ Current Income Tax	(122.053)	(143.168)	117,30%
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan/ Tax Benefit (Deferred) Income Tax	-	3.234	-
Laba Tahun Berjalan/Current Year Income	591.936	625.779	105,72%

Realisasi pendapatan penjaminan tahun 2019 mencapai 130,25% dibandingkan target yang ditetapkan dalam RKAP Tahun 2019, hal tersebut sejalan dengan realisasi jumlah kredit yang dijamin mencapai 111,86% dari target yang ditetapkan dalam RKAP, namun karena realisasi beban klaim yang mencapai 200,46% dari pagu anggaran dalam RKAP, maka total penjaminan bersih hanya terealisasi 82,60% dari target. Di sisi lain, realisasi pendapatan investasi yang mencapai 104,87% dan beban usaha yang hanya terealisasi 81,47%, Perusahaan mampu membukukan realisasi laba sebelum pajak 107,24% dari target. Sekalipun realisasi pajak kini 117,30%, namun karena adanya manfaat pajak tangguhan yang tidak dianggarkan dalam RKAP tahun 2019, Perusahaan mampu membukukan realisasi laba tahun berjalan 105,72% dari target dalam RKAP tahun 2019.

Realization of Guarantee Revenues in 2019 reached 130.25% compared to the target set in the 2019 RKAP, this was in line with the realization of guaranteed credit amounts reaching 111.86% of the target set in the RKAP, but due to the realization of the Claim Expense which reached 200.46% of the budget limit in the RKAP, total Net Guarantee Income was only realized at 82.60% of the target. On the other hand, the realization of investment income reached 104.87% and operating expenses, which only realized 81.47%. The Company was able to book a realized Income Before Tax 107.24% of the target. Even though the tax realization was now 117.30%, due to deferred tax benefits that were not budgeted in the 2019 RKAP, the Company was able to book a realization of Current Year Income 105.72% of the target in the 2019 RKAP.

POSISI KEUANGAN FINANCIAL POSITION

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	Tahun 2019 Year 2019		
	RKAP RKAP	Realisasi Realization	Capaian (%) Achievement (%)
Jumlah Aset/Total Assets	16.166.077	17.543.697	108,52%
Jumlah Liabilitas/Total Liabilities	4.431.571	5.589.811	126,14%
Jumlah Ekuitas/Total Equity	11.734.506	11.953.885	101,87%

TARGET / PROYEKSI TAHUN 2020

TARGET / PROJECTION IN 2020

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	RKAP Tahun 2020 2020 RKAP
Pendapatan Penjaminan/ Guarantee Revenues	2.241.133
Beban Klaim/ Claim Expense	1.453.472
Penjaminan Bersih/ Net Guarantee Income	787.661
Laba Sebelum Pajak/ Income Before Tax	750.659
Laba Tahun Berjalan/Current Year Income	611.535
Jumlah Aset/Total Assets	17.225.397
Jumlah Liabilitas/Total Liabilities	6.468.218
Jumlah Ekuitas/Total Equity	10.757.179

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Sepanjang Tahun 2019, Perum Jamkrindo tidak memiliki informasi dan fakta material setelah tanggal laporan akuntan yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank dan risiko usaha di masa yang akan datang.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS THAT OCCURRED AFTER THE ACCOUNTANT'S REPORT DATE

Throughout 2019, Perum Jamkrindo had no material information and facts after the accountant's report date, which significantly influenced the Bank's performance and business risks in the future.

PROSPEK USAHA, KONDISI INDUSTRI DAN KONDISI EKONOMI
Business Prospects, Industrial Conditions, and Economic Conditions

Tahun 2020 dibuka dengan merebaknya virus corona atau yang dikenal dengan covid 19, dan pada tanggal 11 Maret 2020 World Health Organization ("WHO") telah menetapkan status pandemi virus yang dikenal dengan nama corona virus disease 2019 (COVID-19), yang artinya terjadi wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19.

The year 2020 opened with the outbreak of the coronavirus or known as COVID 19, and on March 11, 2020, the World Health Organization ("WHO") has established the status of a pandemic virus known as coronavirus disease 2019 (COVID-19), which means it occurs an outbreak of a disease that attacks many victims, simultaneously in various countries. While in the case of COVID-19, WHO established this disease as a pandemic because all citizens of the world have the potential to be infected with COVID-19 disease.



Dengan penetapan pandemi tersebut, setiap negara diminta untuk:

- mengaktifkan dan meningkatkan mekanisme tanggap darurat
- mengomunikasikan kepada warga tentang risiko virus corona dan mengimbau mereka untuk melindungi dirinya sendiri
- menemukan, mengisolasi, menguji dan merawat pasien COVID-19 dan melacak setiap kontak yang berkaitan dengan mereka

Menindaklanjuti permintaan dari WHO tersebut dan untuk menekan terjadinya penyebaran COVID 19 serta jatuhnya korban yang lebih banyak, seluruh Negara di dunia melakukan berbagai upaya antara lain dengan melakukan *lockdown*, termasuk Indonesia yang juga telah melakukan upaya-upaya seperti melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ("PSBB") di berbagai wilayah.

With the establishment of the pandemic, each country was requested to:

- activate and improve the emergency response mechanism
- communicate to residents about the risk of the coronavirus and urge them to protect themselves
- find, isolate, test and treat COVID-19 patients and track every contact related to them

Following up on the request from WHO and to reducing the spread of COVID 19 and the more casualties, all countries in the world made various efforts, including lockdowns, including Indonesia, which has also made efforts such as conducting Large-Scale Social Restrictions ("PSBB") in various regions.

Status pandemi tersebut selain mempengaruhi kesehatan masyarakat juga berpengaruh pada kondisi perekonomian seluruh dunia, dan pada tanggal 14 April 2020 IMF telah menerbitkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebagai berikut :

The pandemic status not only affects public health but also affects the condition of the world economy, and on April 14, 2020, the IMF has published a projection of economic growth in 2020 as follows:

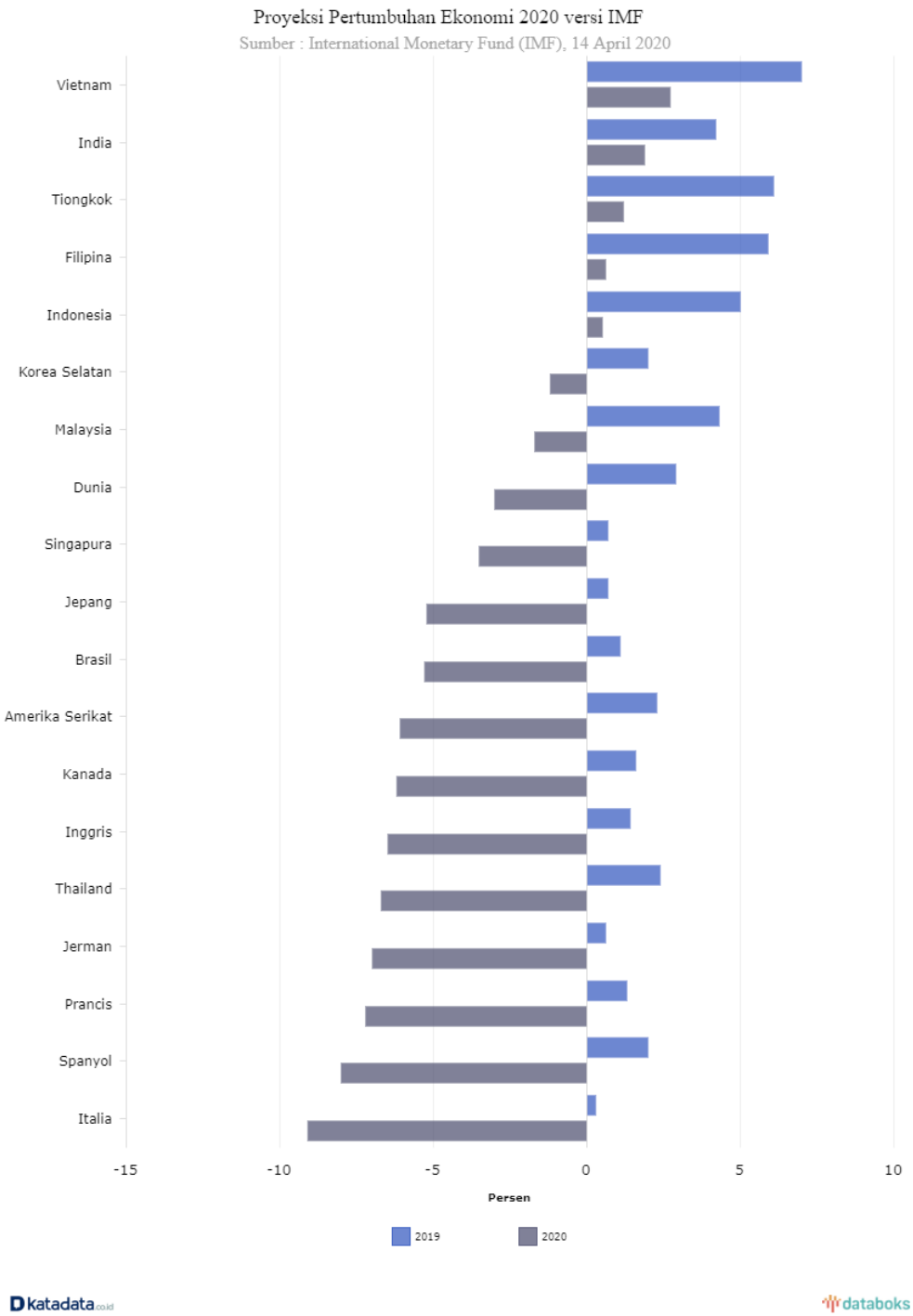

Bank Indonesia, di dalam laporannya menyampaikan bahwa risiko resesi ekonomi global pada 2020 dipengaruhi oleh penurunan permintaan dan terganggunya proses produksi antara lain akibat terbatasnya mobilitas manusia sejalan dengan kebijakan mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Sejalan dengan risiko ini, pertumbuhan ekonomi Negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan banyak negara di kawasan Eropa diprakirakan mengalami kontraksi pada 2020, meskipun berbagai negara telah menempuh berbagai kebijakan ultra-akomodatif baik fiskal maupun moneter.

Penurunan ekonomi global dan penyebaran COVID-19 di dalam negeri berdampak pada pertumbuhan ekonomi domestik yang diperkirakan akan menurun. Ekspor 2020 diperkirakan menurun akibat melambatnya permintaan dunia, terganggunya rantai penawaran global, serta rendahnya harga komoditas global. Sementara itu, pembatasan social dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 berdampak pada pendapatan masyarakat dan produksi sehingga menurunkan prospek permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi.

Di sisi lain, Menteri Keuangan mengungkapkan skenario terberat pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2020 akan berada di posisi 0,3% hingga minus 2,6% akibat virus corona, dan menyampaikan bahwa kuartal kedua 2020 merupakan periode terberat untuk perekonomian Indonesia.

Dari hasil analisis Katadata diperoleh gambaran dampak negatif dari penyebaran covid 19 tersebut sebagai berikut

In its report, Bank Indonesia said that the risk of a global economic recession in 2020 was affected by the decline in demand and disruption of production processes, among others, due to limited human mobility in line with policies to reduce the risk of spreading COVID-19. In line with this risk, economic growth in advanced countries like the United States (US) and many European regions are predicted to experience a contraction in 2020. However, various countries have adopted various ultra-accommodative policies, both fiscal and monetary.

The decline in the global economy and the spread of COVID-19 domestically have an impact on domestic economic growth, which is predicted to decline. The 2020 exports are predicted to decline due to slowing world demand, disruption of global supply chains, and low global commodity prices. Meanwhile, social restrictions in the context of preventing the spread of COVID-19 have an impact on people's income and production, thereby reducing the prospect of domestic demand, both household consumption and investment.

On the other hand, the Minister of Finance revealed the toughest scenario of economic growth in the second quarter of 2020 would be in the position of 0.3% to minus 2.6% due to the coronavirus, and said that the second quarter of 2020 was the most robust period for the Indonesian economy.

From the results of Katadata analysis obtained a description of the negative impacts of the spread of COVID-19 as follows.

ANCAMAN KRISIS EKONOMI AKIBAT COVID-19

ECONOMIC CRISIS THREATS DUE TO COVID-19

EKONOMI RI 2020 DIROYEKSI TURUN
2020 RI ECONOMY IS PROJECTED TO FALL

Pemerintah mewaspadai dampak krisis ekonomi global akibat Covid-19. Terutama terhadap beban defisit APBN serta peningkatan jumlah pengangguran dan penduduk miskin.

The government is aware of the impact of the global economic crisis due to Covid-19. Especially towards the burden of state budget deficit and the increase in the number of unemployed and poor people.

SUMBER/ SOURCES:
IMF, EIU, ADB, WORLD BANK, KEMENKEU/the Ministry of Finance, CORE INDONESIA

NASKAH/ SCRIPT: **DWI HADYA JAYANI**

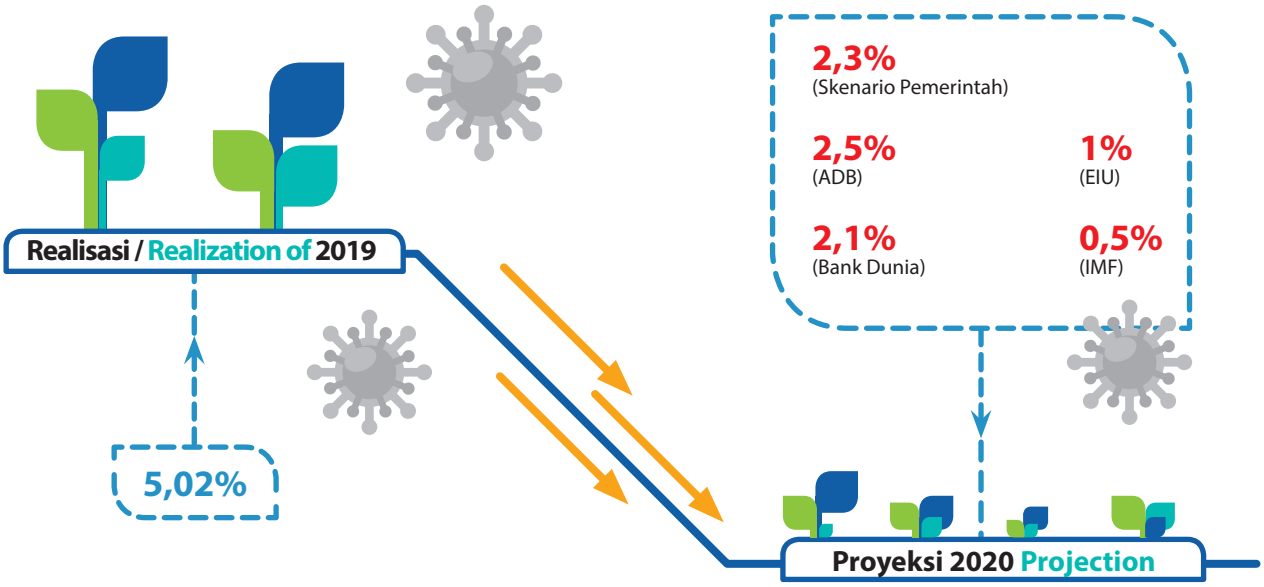

TETAP WASPADA
STAY ALERT

- Angka **pengangguran** naik (2020)
  Unemployment figures rise (2020)
  2,92 - 5,23 juta / million orang pengangguran baru*
  new unemployment people*
- Jumlah **orang miskin** bertambah (2020)
  Number of **poor people** increasing (2020)
  1,16 - 3,78 juta/ million orang miskin baru / new poor people*
- Defist **APBN 2020** membengkak hingga **5,07%**
  2020 **State Budget** Deficit swells to
  Defisit di atas **3%** hingga 2022
  Deficit above **3%** to 2022
- Pelebaran defisit transaksi berjalan
  Widening of current account deficit
  - **2,7%** terhadap PDB (2019) / of GDP (2019)
  - **3,2%** terhadap PDB (proyeksi 2020) / of GDP (2020 projection)
- **Target perpajakan** tak tercapai.
  Tax target not achieved.
  - **Rp 1.865,7** triliun (target awal APBN 2020) / trillion (initial target of the 2020 State Budget/APBN)
  - **Rp 1.462,6** triliun (perubahan)
- **Rasio utang** meningkat
  Debt ratio increases
  - **28%** terhadap PDB (2019)
  - **31,4%** terhadap PDB (proyeksi 2020)

*) Skenario berat dan sangat berat / severe and very severe scenario

Menyikapi kondisi sosial ekonomi Indonesia yang terdampak cukup berat dari penyebaran Covid-19 tersebut, Bank Indonesia menyampaikan 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Masih terjadi *net Inflows* investasi portofolio ke Indonesia.

   Berdasarkan data transaksi harian nonresiden, baik dari SBN maupun saham dalam periode 13-20 April 2020, terjadi *inflow* asing terhadap SBN sebesar Rp4,37 triliun dan *outflow* saham sebesar Rp2,8 triliun, sehingga secara keseluruhan tercatat *net inflow* sebesar Rp1,57 triliun. Hal tersebut menunjukan bahwa secara bertahap kepercayaan kepada Indonesia khususnya dalam investasi portofolio *fixed income*, berangsur-angsur mengalami kenaikan, didorong oleh :

   a. Imbal hasil investasi portofolio dalam bentuk SBN cukup menarik, diukur dari beberapa indikator, antara lain *yield spread* sebesar 7,1% atau, 713 bps antara obligasi Pemerintah Indonesia 10 tahun dengan US *treasury* 10 tahun dan *yield* secara riil sebesar 4,6%, lebih tinggi dibandingkan dengan India, Meksiko dan negara asia lainnya.

   b. Indikator premi risiko yaitu indeks volatilitas pasar keuangan (VIX) sebelum COVID-19 berada pada level 18,8, pada saat puncak yaitu sekitar minggu II-III Maret 2020 pada level 83,2 dan data terakhir menunjukan VIX pada level 43,8, artinya kepanikan pasar keuangan global berangsur-angsur mereda.

   Ke depan, dengan perbedaan suku bunga tinggi dan premi risiko yang berangsur-angsur membaik serta langkah-langkah kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah dan otoritas terkait akan meningkatkan daya tarik investasi portofolio di Indonesia dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

2. Nilai tukar Rupiah bergerak stabil dan cenderung menguat mengarah ke Rp15.000 pada akhir tahun

   Pergerakan nilai tukar Rupiah dipengaruhi 2 (dua) faktor, yaitu faktor fundamental

   a. Faktor fundamental yang akan memengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah

      Secara fundamental, nilai tukar Rupiah masih *undervalued*, didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran 3±1%, defisit transaksi berjalan Triwulan I akan lebih rendah dari 1,5% PDB dan secara keseluruhan pada tahun 2020 akan lebih rendah dari 2% PDB, serta langkah-langkah kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia, pemerintah dan otoritas terkait termasuk stimulus fiskal dan moneter yang memperkuat kepercayaan kepada Indonesia

Responding to the socio-economic conditions of Indonesia, which were affected quite severely from the spread of Covid-19, Bank Indonesia delivered 3 (three) things, namely:

1. There were still net portfolio investment inflows to Indonesia.

   Based on non-resident daily transaction data, both from SBN and shares in the period 13-20 April 2020, there was a foreign inflow of SBN of Rp 4.37 trillion and stock outflow of Rp 2.8 trillion, so that overall a net inflow of Rp 1.57 trillion was recorded. It showed that gradually the trust in Indonesia, especially in fixed income portfolio investments, has gradually increased, driven by:

   a. The yield on portfolio investments in the form of SBN was quite attractive, measured by several indicators, including a yield spread of 7.1% or 713 bps between 10-year Indonesian Government bonds and 10-year US treasury and real yield of 4.6%, more high compared to India, Mexico, and other Asian countries.

   b. The risk premium indicator was the financial market volatility index (VIX) before COVID-19 at the level of 18.8, when the peak was around the second until the third week of March 2020 at the level of 83.2, and the latest data showed the VIX at the level of 43.8, meaning the panic of global financial markets has gradually subsided.

   Going forward, with differences in high interest rates and gradually improving risk premiums and Bank Indonesia policy measures, the Government and related authorities would increase the attractiveness of portfolio investment in Indonesia and supported by the stability of the Rupiah exchange rate.

2. The Rupiah exchange rate was stable and tended to strengthen towards Rp 15,000 by the end of the year.

   The Rupiah exchange rate movement was influenced by 2 (two) factors, namely fundamental factors

   a. Fundamental factors that would affect the movement of the Rupiah exchange rate.

      Fundamentally, the Rupiah exchange rate was still undervalued, supported by low and controlled inflation in the target range of 3 ± 1%, the current account deficit in the first quarter would be lower than 1.5% of GDP and overall in 2020 would be lower than 2% of GDP, as well as policy steps taken by Bank Indonesia, the government and related authorities including a fiscal and monetary stimulus that strengthened confidence in Indonesia.

b. Faktor teknikal akan memengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah dari hari ke hari, antara lain dari sisi global yaitu harga minyak turun, perselisihan Rusia dan Arab Saudi, dan faktor geopilitik, seperti isu Korea Utara, pembukaan *lockdown* AS, dan sisi domestik seperti langkah penanganan COVID-19, termasuk penerapan PSBB di Indonesia.

3. Inflasi terkendali dan rendah

   Berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia sampai dengan minggu ketiga April 2020, menunjukan bahwa harga-harga di pasar terkendali dan rendah. Inflasi bulan April 2020 diperkirakan sekitar 0,22% (mtm) atau 2,82% (yoy). Komoditas penyumbang inflasi yaitu bawang merah, emas perhiasan, dan gula pasir. Sementara itu, komoditas penyumbang deflasi yaitu cabai merah, daging ayam dan telur.

Penilaian lembaga rating *Standard and Poor's* (S&P) yang merevisi *outlook* menjadi negatif terhadap Indonesia pada 17 April 2020 lalu, mencerminkan ekspektasi S&P bahwa dalam beberapa waktu ke depan Indonesia menghadapi kenaikan risiko eksternal dan fiskal akibat meningkatnya kewajiban luar negeri dan beban utang Pemerintah untuk membiayai penanganan Pandemi COVID-19. Terkait hal ini, Bank Indonesia melihat bahwa kondisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia masih aman, terkendali serta produktif. Posisi ULN Indonesia pada akhir Februari 2020 sebesar 407,5 miliar dolar AS, terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 203,3 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 204,2 miliar dolar AS. Pengelolaan ULN di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, baik ULN Pemerintah maupun Swasta, bahkan untuk swasta, terdapat peraturan Bank Indonesia mewajibkan melakukan manajemen risiko secara *prudent*, seperti *hedging* dan *minimum rating*. Sementara itu, rencana Pemerintah menerbitkan SBN untuk pemulihan ekonomi maupun pembiayaan defisit fiskal akibat penanganan pandemi Covid-19 akan menaikkan jumlah SBN yang diterbitkan. Namun, perlu dipahami adanya *outflow* SBN pada tahun ini yang menurunkan kepemilikan asing dari sekitar 40% menjadi sekitar 32%. Di sisi lain, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia meningkat.

Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi ini dengan Pemerintah dan OJK untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan.

b. Technical factors would affect the movement of the Rupiah exchange rate from day to day, among others from the global side namely falling oil prices, disputes between Russia and Saudi Arabia, and geopolitical factors, such as the North Korea issue, opening the US lockdown, and the domestic side such as COVID-19 handling measures, including the implementation of PSBB in Indonesia.

3. Controlled and low inflation

   Based on the Price Monitoring Survey (SPH) conducted by Bank Indonesia, together with 46 Bank Indonesia Representative Offices up to the third week of April 2020, it showed that prices in the market were controlled and low. Inflation in April 2020 was predicted to be around 0.22% (mtm) or 2.82% (YoY). Commodities contributing to inflation were onions, gold jewelry, and sugar. Meanwhile, contributing commodities to deflation were red chilies, chicken meat, and eggs.

The assessment of the Standard and Poor's rating agency (S&P), which revised its outlook to negative towards Indonesia on April 17, 2020, reflected the S&P's expectation that in the future Indonesia would face an increase in external and fiscal risks due to increased foreign obligations and the Government's debt expense to finance COVID-19 pandemic handling. Related to this, Bank Indonesia saw that the condition of Indonesia's Foreign Debt (ULN) was still safe, controlled, and productive. Indonesia's foreign debt position at the end of February 2020 was USD 407.5 billion, consisting of Foreign Debt of public sector (Government and central banks) of USD 203.3 billion and private sector debt (including SOEs) of USD 204.2 billion. The management of Indonesia's Foreign Debt was carried out with the principle of prudence, both Government's foreign debt and private's foreign debt, even for the private sector, there were regulations that Bank Indonesia required prudent risk management, such as hedging and minimum rating. Meanwhile, the Government's plan to issue SBNs for economic recovery and financing the fiscal deficit due to the Covid-19 pandemic handling would increase the number of SBN issued. However, it should be understood that there was an SBN outflow this year, which reduced foreign ownership from around 40% to around 32%. On the other hand, SBN ownership by Bank Indonesia increased.

Bank Indonesia would continue to strengthen this coordination with the Government and OJK to closely monitor the dynamics of the spread of Covid-19 and their impact on the Indonesian economy from time to time, as well as further policy coordination steps that needed to be taken to maintain macroeconomic and financial system stability, and sustained Indonesia's economic growth remained good and resilient.

Selain itu, dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional ("PP 23 / 2020") atau yang dikenal dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PEN").

Untuk melaksanakan Program PEN tersebut Pemerintah dapat melakukan : a) PMN ; b) Penempatan Dana; c) Investasi Pemerintah ; dan/atau d) Penjaminan. Selain itu Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kerangka Penjaminan, Pemerintah dapat melakukannya : a) secara langsung ; dan/atau melalui badan usaha Penjaminan yang ditunjuk, dalam hal ini Pemerintah akan menugaskan PT Jaminan Kredit Indonesia dan/atau PT Asuransi Kredit Indonesia untuk melakukan Penjaminan.

Adapun Penjaminan yang dimaksud diberikan kepada Pelaku Usaha dalam bentuk Penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Dalam hal PT Jaminan Kredit Indonesia dan/atau PT Asuransi Kredit Indonesia membutuhkan peningkatan kapasitas Penjaminan untuk melaksanakan penugasan tersebut, Pemerintah dapat memberikan PMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas Penjaminan tersebut Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa Penjaminan, Penjaminan balik, *loss limit*, atau dukungan pembagian risiko lainnya yang dibutuhkan, dan atas dukungan Penjaminan tersebut, Pemerintah dapat mengenakan imbal jasa Penjaminan sesuai dengan porsi dukungan yang diberikan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peranan yang diberikan oleh Negara kepada Jamkrindo dalam program PEN sangat penting. Sehingga Jamkrindo akan mengerahkan segenap sumber daya yang dimilikinya dan dengan dukungan Pemerintah untuk dapat segera membantu pemulihan kondisi sosial ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19.

Di samping itu, dunia perbankan yang menjadi mitra Jamkrindo tetap berkomitmen untuk menyalurkan kredit untuk UMKM, seperti BRI yang menjadi mitra terbesar Jamkrindo terus menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM lewat KUR. Hingga akhir Maret 2020, jumlah KUR yang disalurkan Bank BRI mencapai Rp37,4triliun kepada 1,3 juta pelaku UMKM, yang setara dengan 31,15% dari target penyaluran KUR BRI tahun 2020 sebesar Rp120,2 triliun. Sebagai upaya untuk

Besides, in order to face threats that endanger the national economy and/or Financial System Stability, the Government has established Government Regulation No. 23 of 2020 concerning the Implementation of the National Economic Recovery Program in the Context of Supporting State Financial Policies for Handling the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and/or Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability and National Economic Rescue ("PP 23/2020") or known as the National Economic Recovery Program ("PEN").

To implement the PEN Program, the Government can do: a) The PMN; b) Fund Placement; c) Government Investment; and/or d) Guarantee. Besides, the Government can also carry out policies through state expenditure according to statutory provisions.

Within the Guarantee framework, the Government can do it: a) directly; and/or through the appointed Guarantee business entity; in this case, the Government will assign PT Jaminan Kredit Indonesia and/or PT Asuransi Kredit Indonesia to carry out the Guarantee.

The guarantees referred to are given to business players in the form of Guarantees for working capital loans provided by banks. If PT Jaminan Kredit Indonesia and/or PT Asuransi Kredit Indonesia require an increase in the Guarantee capacity to carry out the assignment, the Government can provide PMN according to statutory provisions. For the Guarantee, the Government can provide support in the form of guarantee fee payment, back guarantee, loss limit, or other risk-sharing support needed, and for the support of the Guarantee, the Government can charge the Guarantee service according to the portion of the support provided.

Thus, it can be understood that the role given by the State to Jamkrindo in the PEN program is significant. So Jamkrindo will mobilize all its resources and, with the Government's support, to immediately help the recovery of Indonesia's socioeconomic conditions affected by the Covid-19 pandemic.

Also, the banking world, which is a partner of Jamkrindo, remains committed to distributing credit to MSMEs, such as BRI, which is Jamkrindo's largest partner, continues to distribute financing to MSMEs through KUR. Until the end of March 2020, the amount of KUR distributed by Bank BRI reached Rp37.4 trillion to 1.3 million MSME players, which is equivalent to 31.15% of the KUR BRI distribution target in 2020 of Rp120.2 trillion. BRI has also devised a strategy

tetap tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19, BRI juga telah menyusun strategi untuk melakukan *selective growth*. Pertama, BRI melakukan *clustering* sektor ekonomi dan wilayah terdampak sehingga bisa meminimalisir risiko yang muncul. Kemudian secara intensif BRI melakukan program relaksasi pinjaman bagi pengusaha yang terdampak COVID-19 serta melakukan pendampingan dan pelatihan secara virtual bagi pelaku UMKM.

Pemerintah juga meluncurkan berbagai stimulus guna tetap memberdayakan pelaku UMKM agar tetap dapat bertahan dalam menghadapi situasi yang cukup berat pada saat ini. Menteri Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyampaikan bahwa terdapat 2 (dua) skema yang dilakukan Pemerintah untuk melakukan mitigasi yaitu memberikan stimulus moneter untuk UMKM yang masih dapat berkegiatan usaha, dan mekanisme bantuan social untuk UMKM yang tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usahanya.

Stimulus moneter yang dilakukan antara lain dengan insentif perpajakan bagi para pelaku UMKM yang masih memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun dengan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final menjadi 0% atau bebas pajak selama 6 bulan di periode April – September 2020. Penundaan angsuran dan subsidi bunga kepada usaha mikro penerima kredit dari lembaga pengelola dana bergulir, LPDB, kemudian penundaan angsuran dan dana subsidi bunga kepada para penerima permodalan dari beberapa kementerian.

Sedangkan bentuk bantuan sosial yang diberikan Pemeritah antara lain Bantuan Langsung Tunai ('BLT"), kartu prakerja, dan jenis-jenis bantuan lainnya.

to conduct selective growth to continue to grow positively amid the COVID-19 pandemic. First, BRI conducts clustering of economic sectors and affected areas to minimize the risks that arise. Then BRI intensively conducted a loan relaxation program for entrepreneurs affected by COVID-19 and provided assistance and virtual training for MSME entrepreneurs.

The Government also launches a variety of stimuli to continue to empower MSMEs to be able to survive in the face of the current heavy situation. The Minister of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises said that there are 2 (two) schemes carried out by the Government to mitigate, namely providing monetary stimulus for MSMEs that can still carry out business activities and social assistance mechanisms for MSMEs that can no longer run their business activities.

The monetary stimulus is carried out among others with tax incentives for SMEs who still have a turnover of under Rp 4.8 billion per year by reducing the final income tax (PPh) rate to 0% or free of tax for 6 (six) months in the period April - September 2020. The delayed installments and interest subsidies to micro-credit recipients from the revolving fund management agency, LPDB, then delays installments and interest subsidy funds to capital recipients from several ministries.

The forms of social assistance provided by the Government include Direct Cash Assistance ('BLT"), pre-employment cards, and other types of assistance.

PEMASARAN
Marketing

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya Perum Jamkrindo mengacu pada Peraturan Pemerintah, Perundang – undangan dan asas – asas penjaminan yang berhati – hati (prudent). Perum Jamkrindo turut menunjang program Pemerintah dibidang pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi melalui kegiatan usaha penjaminan atas kredit yang diberikan lembaga keuangan atau bukan keuangan dan bantuan konsultasi manajemen serta melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang pencapaian tujuan perusahaan, sebagaimana diatur dalam PP No. 41 Tahun 2008 jo PP nomor No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.

STRATEGI PEMASARAN

Peningkatan jumlah kredit yang dijamin pada tahun 2019 sebesar 17% dibandingkan dengan tahun 2018 tidak terlepas dari strategi pemasaran yang telah diimplementasikan dengan baik, seperti meningkatkan pangsa pasar penjaminan KUR dan KPRS, meningkatkan kualitas layanan (*support*) dan efektifitas monitoring terhadap Kantor Wilayah dan Kantor Cabang, melakukan market mapping terhadap mitra kerja dan memperbaiki tarif IJP KPRS, dan melakukan sosialisasi dengan pihak internal dan eksternal tentang ketentuan KUR dan KPRS yang terbaru untuk percepatan *transfer knowledge*.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada mitra kerja seiring terdapatnya regulasi KUR terbaru yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Permenko) Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, maka dilakukan perubahan dan pembaharuan Perjanjian Kerjasama (PKS) KUR dengan Bank Penyalur KUR Tahun 2019.

Dalam rangka *refreshment* dan sosialisasi produk penjaminan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan monitoring terhadap Kanwil/ Cabang, telah dilakukan kegiatan seperti penandatanganan Perjanjian Kerjasasama antara Perum Jamkrindo dan BPR Universal Kalbar di Kantor BPR Universal Kalbar, Pontianak – Kalimantan Barat, melakukan sosialisasi produk ATMR dengan Perbarindo Sulawesi Selatan, di Kantor Wilayah IX Makasar, finalisasi rekonsilliasi produk Kupedes Rakyat dengan BRI di kantor TSI BRI dan melakukan sosialisasi tentang Arah Bisnis Penjaminan Divisi Bisnis 2 di tahun 2020 di Kantor Cabang Yogyakarta.

The Indonesian Credit Guarantee Public Corporation (Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia/Perum Jamkrindo) is a State-Owned Enterprise (BUMN) that has the duty and authority to carry out business activities in the field of Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK) development.

In carrying out its business activities, Perum Jamkrindo refers to Government Regulations, Legislation, and Prudent Guarantee Principles. Perum Jamkrindo also supports Government programs in the development of Small, Medium Enterprises and Cooperatives through business guarantees for loans provided by financial or non-financial institutions and management consultancy assistance and other business activities that can support the achievement of corporate objectives, as stipulated in PP No. 41 of 2008 jo PP number No. 35 of 2018 concerning Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.

MARKETING STRATEGY

The increase in guaranteed loans in 2019 by 17% compared to 2018 was inseparable from marketing strategies that have been implemented well, such as increasing the market share of KUR and KPRS guarantees. Besides, increasing the quality of service (support) and the effectiveness of monitoring of Regional Offices and Branch Offices, conducting market mapping of business partners and improving KPRS Guarantee Fee, and conducting socialization with internal and external parties regarding the latest KUR and KPRS provisions to accelerate transfer knowledge.

One of the efforts to improve services to business partners is along with the latest KUR regulations, namely Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia (Permenko) Number 6 the Year 2019, Second Amendment to the Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs as Chairman of the Financing Policy Committee for Micro, Small and Medium Enterprises Number 11 of 2017 concerning the Guidelines for the Implementation of People's Business Credit, then a change and renewal of the KUR Cooperation Agreement (PKS) with the KUR Distributor Bank in 2019.

In the context of refreshment and socialization of guarantee products to improve service quality and monitor Regional Offices / Branches, activities have been carried out such as the signing of a Cooperation Agreement between Perum Jamkrindo and BPR Universal Kalbar at the BPR Universal Kalbar Office, Pontianak - West Kalimantan, conducting socialization of risk-weighted assets products with Perbarindo South Sulawesi, at the Makassar Regional Office IX, finalizing the reconciliation of the People's rural general credit (Kupedes) product with BRI at the TSI BRI office and conducting socialization on Business Guarantee's Direction for Business Division 2 in 2020 at the Yogyakarta Branch Office.

Selaras dengan tema perusahaan tahun 2019 yang mendorong bisnis secara *sinergize, strengthen people, and strengthen process*, strategi yang dicanangkan adalah dengan menjalin kerjasama sinergi BUMN, Himbara, Himpara dan mitra *suretyship* dan non bank lainnya.

Jamkrindo telah melakukan pembenahan proses bisnis melalui implementasi *Surety Bond Online* baik *Web Base* maupun *Mobile Apps*. Pembenahan *Standard Operating Procedure* ("SOP") produk *suretyship* juga menjadi target pada tahun ini. Dalam pelaksanaannya Jamkrindo telah menyelengarakan *launching* aplikasi *Surety Bond Online* dan Jamkrindo *Partner Gathering* dalam rangka memperkuat jaringan agen penjaminan *suretyship*. Atas terselenggaranya acara tersebut, seluruh agen penjaminan Jamkrindo dapat termotivasi untuk terus meningkatkan produksinya. Selain itu, terdapat *In House Training* Analisa Laporan Keuangan dan Sertifikasi *Product Knowledge Suretyship* yang telah berlangsung. Pelatihan ini diharapkan melahirkan ahli penjaminan yang tersertifikasi resmi. Untuk penguasaan pasar *suretyship* dilakukan dengan memperkuat jaringan agen penjaminan *suretyship* yang tersebar dengan skema SaKa-SaKi (Satu Kabupaten, Satu Kaki), dengan langkah kegiatan melakukan analisa permohonan agen baru dan perpanjangan.

Selain itu, terdapat realiasi penandatangan MoU Sinergi BUMN antara Jamkrindo, LPDB dan BUMN Karya dalam rangka sinergi BUMN. Kemudian terdapat realisasi Perjanjian Kerjasama dengan PT. Amartha Mikro Fintek tentang Penjaminan Pembiayaan Modal Kerja (kelompok) yang merupakan Penjaminan Kredit Mikro melalui lembaga *fintech* yaitu PT. Amartha dan realisasi Kerjasama dengan PT. Mandiri Manajemen Investasi terkait Penjaminan KIK EBA PT. Garuda Indonesia. Selain itu, terdapat realisasi penjaminan perusahaan fabrikan yaitu PT Krakatau Steel. Inisisasi kerjasama juga terhadap perusahaan *Fintech* yaitu Danamart, Aktivaku serta dengan beberapa perusahaan *fintech* lainnya. Perusahaan pabrikan yaitu PT Semen Indonesia.

Sedangkan *maintenance* dilakukan dengan membina hubungan baik yang telah terbentuk selama ini dan melakukan kegiatan *cross selling* dengan produk Penjaminan dengan mitra penjaminan eksisting. Rencana kerjasama *cross selling* diinisiasi dengan PT Pegadaian untuk produk kredit umum dan multiguna. Berikutnya adanya potensi penjaminan produk *Invoice Financing* oleh PT Pegadaian. Kemudian dengan PT PNM mengembangkan produk Super Mikro Mekaar yang sudah ada saat ini dimana debiturnya diberikan fasilitas kenaikan kelas menjadi Super Mikro Mekaar Plus yang akan di-*cover* oleh Perum Jamkrindo. Sedangkan untuk mengakomodir permintaan pasar atas produk penjaminan yang belum tersedia, saat ini Jamkrindo sedang mengembangkan *marketplace guarantee*.

In line with the company theme of 2019, which encouraged synergizing business, strengthened people, and strengthened processes, the strategy was to establish synergy cooperation between BUMN, Himbara, Himpara, and other suretyship and non-bank partners.

Jamkrindo has improved its business processes through the implementation of Surety Bond Online, both Web Base and Mobile Apps. Revamping the Standard Operating Procedure ("SOP") of suretyship products will also be targeted this year. In its implementation, Jamkrindo has conducted the launching of the Surety Bond Online and Jamkrindo Partner Gathering applications to strengthen the suretyship guarantee agent network. Upon the event's implementation, all Jamkrindo guarantee agents can be motivated to continue to increase their production. Besides, there is an ongoing In House Training on Financial Statement Analysis and Suretyship Product Knowledge Certification. This training is expected to produce officially certified guarantee experts. The suretyship market control is carried out by strengthening the suretyship guarantee agent network that is spread under the SaKa-SaKi scheme (One District, One Leg), with the activity step to analyze the application for new and extended agents.

Also, there is a realization of the signing of the BUMN Synergy MoU between Jamkrindo, LPDB, and BUMN Karya in BUMN synergy. Then there is the realization of the Cooperation Agreement with PT. Amartha Micro Fintek on Working Capital Financing Guarantees (groups) is Micro Credit Guarantees through fintech institutions, namely PT. Amartha and the realization of the Cooperation with PT. Mandiri Manajemen Investasi related to the KIK EBA Guarantee of PT. Garuda Indonesia. Besides, there is the realization of the manufacturing company guarantee, PT Krakatau Steel. Initiation of cooperation also with Fintech companies, namely Danamart, Aktivaku, and with several other fintech companies, the manufacturing Company, PT Semen Indonesia.

While maintenance is carried out by fostering good relations that have been formed so far and conducting cross-selling activities with Guarantee products with existing guarantee partners. The cross-selling cooperation plan is initiated with PT Pegadaian for general and multipurpose credit products. Next, there is the potential for guaranteeing Invoice Financing products by PT Pegadaian. Then, developing the existing Super Micro Mekaar products with PT PNM, where the debtor was given a class upgrade facility to Super Micro Mekaar Plus, which would be covered by Perum Jamkrindo. Meanwhile, to accommodate market demand for unavailable guarantee products, currently, Jamkrindo is developing a marketplace guarantee.

Demi terciptanya peningkatan fungsi dan peran perusahaan Dalam rangka meningkatkan pangsa pasar usaha penjaminan syariah melalui pencapaian target perolehan Imbal Jasa Kafalah ("IJK"), terkait dengan Penjaminan Syariah telah ditetapkan strategi sebagai berikut:

- Merumuskan ketentuan-ketentuan dan langkah-langkah strategis tentang pelaksanaan pengelolaan perusahaan dalam bidang pemasaran dan operasional Penjaminan Syariah.
- Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi kerjasama Penjaminan Syariah pembiayaan dengan perbankan dan lembaga keuangan syariah.
- Melaksanakan kegiatan Pemasaran, promosi dan sosialisasi Penjaminan Syariah secara aktif kepada para pelaku ekonomi syariah dan masyarakat luas.
- Mengembangkan wawasan dan meningkatkan kapabilitas SDM.
- Menjalankan strategi ekspansi Penjaminan dengan mencoba membuka pasar baru (menawarkan proposal kerjasama dengan ± 365 BPRS ke seluruh Indonesia, dan melakukan evaluasi atas Perjanjian Kerjasama yang sedang berlangsung dengan mempertahankan target yang telah ditetapkan.
- Melakukan intensifikasi kerjasama dengan mitra eksisting dengan menambah produk dan menerapkan penjaminan berbasis IT.
- mendampingi Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan Uji Petik.
- Ikut berpartisipasi sebagai *sponsorship* dalam acara *Roadshow* Penjaminan Syariah yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah.

Terkait dengan kegiatan penjaminan sistem resi gudang, telah ditetapkan strategi sebagai berikut :

- Melakukan Koordinasi dengan PT Kliring Berjangka Indonesia, sehubungan dengan kelengkapan pembiayaan resi gudang yang diajukan oleh Calon terjamin.
- Melakukan Koordinasi dengan Kantor Cabang Lampung, dan Makasar sehubungan dengan adanya pengajuan permohonan penjaminan pembiayaan resi gudang dari calon terjamin.

Jamkrindo yang selama ini telah menempati posisi yang cukup baik di pasar, terus berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya, khususnya yang menyalurkan program KUR, serta terus melakukan edukasi kepada UMKMK akan fungsi industri penjaminan terhadap pengembangan usahanya.

The following strategies have been established to create an increase in the Company's function and role to increase the market share of sharia guarantee business through achieving the target of Guarantee Fee acquisition ("IJK"), related to Sharia Guarantee:

- Formulate provisions and strategic steps regarding the implementation of company management in the field of marketing and Sharia Guarantee operation.
- Intensify and extend the cooperation in financing Sharia Guarantee with banks and sharia financial institutions.
- Carry out activities of marketing, promotion, and socialization of Sharia Guarantee actively to the Sharia economic players and the wider community.
- Develop insights and enhance HR capabilities.
- Carry out an expansion strategy for Guarantees by trying to open new markets (offering proposals for cooperation with ± 365 BPRS throughout Indonesia, and evaluating ongoing Cooperation Agreements by maintaining the established targets.
- Intensify cooperation with existing partners by adding products and implementing IT-based guarantees.
- Assist the Board of Sharia Supervisor Council in the implementation of Pick Tests.
- Participate in sponsorship in the Sharia Guarantee Roadshow event organized by the Sharia Economic Community.

Regarding the activities of the warehouse receipt system guarantee, the following strategies have been established:

- Coordinate with PT Kliring Berjagka Indonesia, in connection with the completeness of warehouse receipt financing submitted by a guaranteed Candidate.
- Coordinate with Lampung and Makassar Branch Offices in connection with the submission of a guarantee application for the guaranteed candidate's warehouse receipt financing.

Jamkrindo, which has been occupying a fairly good position in the market, continues to strive to increase cooperation with the banking industry and other financial institutions, especially those that channel the KUR program, and continue to educate MSMEs and Cooperatives on the function of the guarantee industry for its business development.

PANGSA PASAR DAN KEDUDUKAN JAMKRINDO DI INDUSTRI PENJAMINAN INDONESIA

Berdasarkan data OJK, pada bulan Desember 2019 tercatat sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan yang bergerak di bidang industry penjaminan yang terdiri dari 1 (satu) Perusahaan Umum yaitu Perum Jamkrindo, 12 (dua belas) Peruahaan Penjaminan Daerah , dan 8 (delapan) Perusahaan Penjaminan Swasta.

Berikut adalah gambaran total aset, liablitas, dan ekuitas industri penjaminan konvensional serta posisi Jamkrindo di industri.

JAMKRINDO'S MARKET SHARE AND POSITION IN THE INDONESIAN GUARANTEE INDUSTRY

Based on OJK data, in December 2019, there were 20 (twenty) companies engaged in the guarantee industry, consisting of 1 (one) Public Corporation, namely Perum Jamkrindo, 12 (twelve) Regional Guarantee Companies, and 8 (eight) Private Guarantees Companies.

The following was an overview of the total assets, liabilities, and equity of the conventional guarantee industry and Jamkrindo's position in the industry.

(angka dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)/ (figures in billions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Desember 2019 / December 2019		
	Industri Industry	Jamkrindo	Komposisi Jamkrindo (%) Jamkrindo Composition (%)
	1	2	3 = (2/1)
Total Aset/Total Assets	19.682	17.544	89,14%
Total Liabilitas/Total Liabilities	6.031	5.590	92,68%
Total Ekuitas/Total Equity	13.651	11.954	87,57%

Sumber : diolah dari data statistic OJK dan Jamkrindo/ Source: processed from OJK and Jamkrindo statistical data

Dari data sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa sebagian besar aset, liabilitas dan ekuitas di dalam industri penjaminan konvensional berasal dari Jamkrindo yang merupakan perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia.

Untuk produk KUR, porsi pangsa pasar Jamkrindo pada tahun 2019 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

From the data as mentioned above, it appeared that the majority of assets, liabilities, and equity in the conventional guarantee industry came from Jamkrindo, which was the largest guarantee company in Indonesia.

For KUR products, the portion of Jamkrindo's market share in 2019 could be described in the following table:

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain))/ (figures in billions of Rupiah, unless otherwise stated)

No	Penyalur KUR KUR Distributor	Realisasi Realization			Persentase Percentage	
		Total	Jamkrindo	Pesaing Competitor	Jamkrindo	Pesaing Competitor
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	87.899.721				
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	25.023.344				
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	17.759.722				
4	Bank dan Lembaga Keuangan Lain/ Other Banks and Financial Institutions	9.437.631				
	Total	140.120.418	59.012.203	81.108.215	42,12%	57,88%

Sumber data : diolah dari data Kementerian Koordinator Perekonomian dan Jamkrindo
Data source: processed from data from the Coordinating Ministry for Economic Affairs and Jamkrindo

Dengan mencermati data sebagaimana tersebut di atas terlihat bahwa peranan Jamkrindo dalam industri penjaminan kredit di Indonesia cukup signifikan dengan kontribusi yang cukup tinggi yaitu 42,12% dari total penjaminan kredit di Indonesia. Penjaminan terbesar dilakukan untuk kredit yang disalurkan oleh PT BRI.

By looking at the data mentioned above, it could be seen that the role of Jamkrindo in the credit guarantee industry in Indonesia was quite significant, with a fairly high contribution of 42.12% of the total credit guarantee in Indonesia. The largest guarantee was for loans extended by PT BRI.

KEBIJAKAN DIVIDEN
Dividend Policy

Alokasi laba diperuntukkan sebesar-besarnya untuk pemupukan dana dalam rangka peningkatan kinerja penjaminan dan *sustainability program*, dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2019, Perusahaan tidak memiliki kebijakan mengenai pembagian dividen secara khusus. Mengingat Perum Jamkrindo adalah BUMN yang dimiliki sepenuhnya oleh Negara, maka keputusan pembagian Dividen diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham ('RUPS").

Profit allocation is to be maximally allocated for fund accumulation to improve the guarantees performance and sustainability program. Thus, until the end of 2019, the Company especially did not have a policy regarding the dividends distribution. Since Perum Jamkrindo was a BUMN fully owned by the State, the decision to distribute Dividends is taken at the General Meeting of Shareholders ("GMS").

Berdasarkan RUPS yang diselenggarakan tahun 2019, diputuskan pembagian Dividen Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut

Based on the General Meeting of Shareholders held in 2019, it was decided the distribution of Perum Jamkrindo's Dividends was as follows

Uraian Description	Tahun Buku 2018 2018 Fiscal Year	Tahun Buku 2017 2017 Fiscal Year
Laba Bersih (Rupiah penuh)/Net Profit (Full Rupiah)	397.543.371.999	801.846.160.838
Jumlah Dividen (Rupiah penuh)/ Total Dividends (Full Rupiah)	39.754.000.000	80.184.500.000
Payout Ratio (Persentase)/ Payout Ratio (Percentage)	10%	10%
Tanggal pengumuman/Announcement Date	29 Mei 2019 / May 29, 2019	3 Mei 2018 / May 3, 2018
Tanggal Pembayaran Dividen/Dividends Payment Date	27 Juni 2019 / June 27, 2019	30 Mei 2018 / May 30, 2018

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP / MSOP)
Employee and/or Management Shares Ownership Program (ESOP / MSOP)

Sampai dengan akhir periode pelaporan, Perusahaan belum melaksanakan program kepemilikan saham untuk pekerja dan/atau manajemen yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham. Dengan demikian Laporan Tahunan ini tidak menyajikan informasi terkait stock option yang dimiliki pekerja dan manajemen, baik jumlah saham dan harga *exercise*, jangka waktu, persyaratan pekerja dan/atau manajemen yang berhak.

Until the end of the reporting period, the Company has not implemented a shares ownership program for employees and/or management carried out through a stock offering or stock options offer. Therefore, this Annual Report does not present stock options owned by the employers and the management, the number of shares and the exercise price, the period, the requirements of the employees, and/or eligible management.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
Realization of the Use of Public Offering Funds

Perum Jamkrindo adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara. Sampai dengan akhir tahun 2019, Perum Jamkrindo belum melaksanakan Penawaran Saham Umum di bursa efek manapun. Dengan demikian Laporan Tahunan ini tidak menyajikan informasi terkait dengan total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana dan tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari kegiatan Penawaran Saham Umum Perusahaan.

Perum Jamkrindo is a State-Owned Enterprise (BUMN) which is 100% owned by the State. As of the end of 2019, Perum Jamkrindo did not carry out a Public Offering on any stock exchange. Therefore, this Annual Report did not present information related to the total acquisition of funds, the funds use plan, details of the use of funds, the balance of funds, and the date of the General Meeting of Shareholders' approval of the Company's Public Offering.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Material Transaction Information that Contains Conflicts of Interest or Transactions with Affiliates

Dalam kegiatan usahanya, perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2014), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Berikut adalah nama pihak yang bertransaksi , sifat hubungan, dan sifat transaksi :

In its business activities, the Company conducts certain transactions with related parties according to PSAK No. 7 (2014 Revision), "Related Parties Disclosures."

Here are the names of the parties to the transaction, the nature of the relationship, and the nature of the transaction:

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat dari Transaksi Nature of the Transaction
Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan / The Government of Republic of Indonesia through the Ministry of Finance	Pemegang Saham / Shareholder	Piutang IJP KUR/ IJP KUR Receivables ; Pendapatan IJP KUR / IJP KUR Revenue
Dewan Pengawas dan Direksi / Board of Supervisor Council and Board of Directors	Manajemen Kunci / Key Management	Gaji dan Tunjangan Dewas / Salaries and Allowances
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities
PT Bank Syariah Mandiri	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities
PT Bank Negara Indonesia Syariah	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities
PT Bank Tabungan Negara Syariah	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	Giro, deposito, efek-efek/ Bank Account, Deposit, Securities
PT Reasuransi Internasional Indonesia	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities
Perum Pegadaian (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities
Perum Perumahan Nasional (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities
PT Angkasa Pura II (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities
PT Hutama Karya (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat dari Transaksi Nature of the Transaction
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities
PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities
PT Danareksa (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities
PT Semen Gresik (Persero Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities
PT Waskita Beton Precast Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities
PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah/ Related with the Government	efek-efek/ Securities

KEWAJARAN TRANSAKSI

Manajemen berpendapat transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga.

FAIRNESS OF TRANSACTION

Management believes that transactions with related parties are conducted with the same conditions and requirements as those of third parties.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN TENTANG MEKANISME REVIEW ATAS TRANSAKSI DAN PEMENUHAN PERATURAN TERKAIT

Mekanisme *review* atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

COMPANY POLICY REGARDING THE REVIEW MECHANISM FOR TRANSACTIONS AND FULFILLMENT OF THE RELATED REGULATIONS

The Review mechanism for transactions with related parties through an audit process conducted by both internal and external auditors. In order to ensure the fairness of transactions and compliance with generally accepted accounting standards in Indonesia.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN

Amendments to the Laws and Regulations which have Significant Impacts

No.	Regulasi Regulation	Kajian Study	Dampaknya Terhadap Perusahaan Impact on the Company
1	PP No 82/ Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PP No 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian PP No. 82/2019 concerning Amendments to PP No. 44 of 2015 concerning the Implementation of Occupational Accident Insurance Programs and Death Insurance	Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya peningkatan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, antara lain manfaat perawatan di rumah (*home care*), beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta, dan manfaat lainnya This regulation aims to improve the services and welfare of Employment Social Security participants, in particular increasing the benefits of Work Accident Insurance and Death Security, including home care benefits, educational scholarships for children of Participants, and other benefits.	Sebagai peserta BPJS, peraturan tersebut berdampak kepada karyawan Perum Jamkrindo. Namun tidak berdampak secara langsung kepada Perusahaan. As a BPJS participant, the regulation has an impact on employees of Perum Jamkrindo. But it does not directly impact the Company.
2	Perpres No 7 Tahun 2019 Tanggal 29 Januari 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja Presidential Regulation No. 7 of 2019 dated January 29, 2019 concerning Occupational Diseases	• Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja. Occupational Disease is a disease caused by work and/or work environment. • Jaminan Kecelakaan Kerja ("JKK") adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Work Accident Insurance ("JKK") is a benefit in the form of cash and/or health services provided when a participant experiences an occupational accident or diseases caused by the work environment.	Sebagai peserta BPJS, peraturan tersebut berdampak kepada karyawan Perum Jamkrindo. Namun tidak berdampak secara langsung kepada Perusahaan. As BPJS participants, the regulation has an impact on employees of Perum Jamkrindo. But it does not directly impact the Company.
3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/ POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan Financial Services Authority Regulation Number 44 / POJK.05 / 2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 41 / POJK.05 / 2015 regarding Procedures for Establishing Statutory Managers at Financial Services Institutions.	• Pada prinsipnya Pengelola Statuter melaksanakan kewenangan OJK antara lain dalam bentuk upaya penyelamatan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan, pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen Lembaga Jasa Keuangan, pembatalan atau pengakhiran perjanjian, serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari Lembaga Jasa Keuangan. In principle, the Statutory Manager carries out the authority of the OJK, among others in the form of efforts to save the business continuity of the Financial Services Institution, take overall management authority and functions of the Financial Services Institution, cancellation or termination of the agreements, and transfer the wealth or business portfolio of the Financial Services Institution. • Agar kewenangan penunjukan dan penggunaan Pengelola Statuter dapat dilakukan dengan governance yang baik, maka diterbitkan Peraturan OJK Nomor 41/ POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan (POJK Pengelola Statuter) pada tanggal 21 Desember 2015 For the authority of an appointment and use of Statutory Managers can be conducted with good governance, then the OJK Regulation No. 41 / POJK.05 / 2015 was issued, concerning Procedures for Determining Statutory Managers at Financial Services Institutions (POJK of Statutory Managers) on December 21, 2015.	Pada tahun 2019, Perum Jamkrindo tidak melakukan kegiatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut. In 2019, Perum Jamkrindo did not carry out activities as regulated in these provisions.
4	POJK Nomor 26/POJK.01/2019 tentang Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan. POJK Number 26 / POJK.01 / 2019 concerning Electronic Licensing in the Financial Services Sector.	Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perizinan terintegrasi di sektor jasa keuangan, perlu dibangun suatu sistem perizinan elektronik yang andal dan transparan untuk mengintegrasikan keseluruhan proses perizinan di sektor jasa keuangan To increase the effectiveness of the integrated licensing implementation in the financial services sector, it is necessary to build a reliable and transparent electronic licensing system to integrate the entire licensing process in the financial services sector.	Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di Sektor Jasa Keuangan, Perum Jamkrindo wajib mengikuti ketentuan tersebut As one of the companies engaged in the Financial Services Sector, Perum Jamkrindo is required to comply with these provisions.

No.	Regulasi Regulation	Kajian Study	Dampaknya Terhadap Perusahaan Impact on the Company
5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan NonBank. Financial Services Authority Regulation Number 24 / POJK.05 / 2019 concerning Business Plans of Non-Bank Financial Services Institutions.	• Untuk mengarahkan kegiatan operasional lembaga jasa keuangan nonbank sesuai dengan visi dan misinya, lembaga jasa keuangan nonbank perlu menetapkan sasaran strategis dan nilai-nilai perusahaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis; To direct the operational activities of non-bank financial services institutions in accordance with their vision and mission, non-bank financial services institutions need to set strategic goals and company values that are further outlined in the business plan; • Rencana bisnis perlu disusun secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan nonbank; A business plan needs to be prepared realistically by taking into account external and internal factors that can affect the business continuity of non-bank financial service institutions; • Rencana bisnis merupakan salah satu acuan bagi pengawas lembaga jasa keuangan nonbank dalam menyusun rencana pengawasan yang optimal dan efektif. A business plan is one of the references for supervisors of non-bank financial service institutions in preparing optimal and effective supervision plans.	Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di Sektor Jasa Keuangan Non Bank, Perum Jamkrindo wajib mengikuti ketentuan tersebut. As one of the companies engaged in the Non-Bank Financial Services Sector, Perum Jamkrindo is required to comply with these provisions.
7	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Bidang Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs as Chairman of the Financing Policy Committee for Micro, Small and Medium Enterprises Number 6 of 2019 concerning the Second Amendment to the Ministerial Regulation as Chairman of the Financing Policy Committee for Micro, Small and Medium Enterprises Number 11 of 2017 concerning Guidelines for People's Business Credit Implementation.	Penambahan Kriteria KUR yang semula 8 (delapan) kriteria menjadi 9 (sembilan) kriteria dengan menambahkan: Usaha mikro, kecil dan menengah dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau pegawai pada masa pensiunan KUR Criteria addition which was originally 8 (eight) criteria to 9 (nine) criteria by adding: Micro, small and medium-sized businesses from retired Civil Servants, the National Army of the Republic of Indonesia and the Indonesian National Police and/or employees at the retirement.	Sebagai salah satu perusahaan penjamin KUR, Peum Jamkrindo wajib memahami ketentuan tersebut. As one of the KUR guarantor companies, Peum Jamkrindo is obliged to understand these provisions.
8	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Permenko) Nomor: 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Regulation of the Coordinating Minister for the Economic Affairs of the Republic of Indonesia (Permenko) Number: 8 of 2019 concerning Guidelines for the Implementation of People's Business Credit (KUR).	Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K). Adapun 4 Jenis KUR yang diperuntukan diantaranya KUR Mikro (Maksimal Plafond Kredit 50 Juta), KUR Kecil (*Plafond* Kredit 50 juta s/d 500 juta), KUR Khusus (Plafond Kredit 50 juta s/d 500 juta) dan KUR Penempatan TKI (maksimal Plafond Kredit 25 juta). Sistem penjaminan KUR dilakukan secara *Conditonal Automatic Cover* (CAC). The People's Business Credit Program (KUR) is intended for Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives (UMKM-K). The 4 Types of KUR that are intended are Micro KUR (Maximum Credit Limit of 50 Million), Small KUR (Credit Limit of 50 million to 500 million), Special KUR (Credit Limit of 50 million to 500 million) and KUR Placement of Migrant Workers (maximum TUR Credit limit of 25 million). The KUR guarantee system is done by Conditional Automatic Cover (CAC).	Sebagai salah satu perusahaan penjamin KUR, Peum Jamkrindo wajib memahami dan mengikuti ketentuan tersebut. As one of the KUR guarantor companies, Peum Jamkrindo is required to understand and follow these provisions.

No.	Regulasi Regulation	Kajian Study	Dampaknya Terhadap Perusahaan Impact on the Company
9	Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja No M/5/HK.04.00/VII/2019 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi terhadap Jabatan di Bidang Management SDM. Circular Letter of the Ministry of Manpower No. M / 5 / HK.04.00 / VII / 2019 concerning the Imposition of Competency Certification Obligations for the position in the field of HR Management.	Kementerian Ketenagakerjaan sebagai instansi pembina teknis di bidang manajemen SDM/HRD akan memberlakukan wajib sertifikasi kompetensi bagi pekerja yang menduduki jabatan bidang manajemen SDM/HRD dua tahun sejak terbitnya surat edaran. Menggunakan skema sertifikasi kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan mengacu pada SKNII bidang SDM yang berlaku. The Ministry of Manpower as a technical fostering agency in the field of HR / HRD management will impose mandatory competency certification for employees who occupy positions in HR / HRD management two years since issuing the circular letter. Using the National Professional Certification Board (BNSP) competency certification scheme and referring to the applicable SKNII in HR.	Perusahaan wajib mengikuti ketntuan tersebut. The Company is required to follow these provisions.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
Changes in Accounting Policies

Pada tanggal 1 Januari 2019, Perum Jamkrindo dan Entitas Anak menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan ("PSAK") dan interpretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Perum Jamkrindo dan Entitas Anak telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perum Jamkrindo dan Entitas Anak, dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

1. Penyesuaian 2018 PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis
2. Amandemen PSAK No. 24: Imbalan Kerja
3. Penyesuaian 2018 PSAK No. 26: Biaya Pinjaman
4. Amandemen 2018 PSAK No. 46: Pajak Penghasilan
5. Penyesuaian 2018 PSAK No. 66: Pengaturan Bersama
6. ISAK No. 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka
7. ISAK No. 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

On January 1, 2019, Perum Jamkrindo and Subsidiaries adopted new and revised statements of financial accounting standards ("SFAS") and interpretations of statements of financial accounting standards ("ISFAS") that is mandatory for application from that date. Changes to the Perum Jamkrindo and Subsidiaries accounting policies have been made as required, according to the transitional provisions in the respective standards, and interpretations.

Adopting these new and revised standards and interpretation did not substantially change to Perum Jamkrindo and Subsidiaries accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

1. Annual Improvement 2018 of SFAS No. 22: Business Combination
2. Amendments of SFAS No. 24: Employee Benefits
3. Annual Improvement 2018 of SFAS No. 26: Loan Costs
4. Amendments of SFAS No. 46: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses
5. Annual Improvement 2018 of SFAS No.66: Joint Arrangements
6. ISFAS No. 33: Foreign Currency Transaction and Advance Consideration
7. ISFAS No. 34: Uncertainty over Income Tax Treatments

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
Business Continuity Information

HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Berdasarkan hasil penilaian manajemen, sampai dengan akhir tahun 2019 tidak terdapat hal-hal yang akan berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan Perum Jamkrindo untuk melanjutkan kelangsungan usahanya di masa yang akan datang. Sebagaimana diketahui bahwa Perum Jamkrindo memiliki tingkat pertumbuhan kinerja operasional dan keuangan yang sangat baik dan dari hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Hartanto, Grace, Karunawan mendapat opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019.

Pencapaian tersebut merupakan bagian dari usaha dan strategi Perum Jamkrindo untuk terus mengembangkan bisnis utamanya di bidang penjaminan dengan melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan antara lain, memperkuat potofolio produk eksisting dan pengembangan produk baru, memperkuat sinergi dengan BUMN, mengembangkan digitalisasi, melakukan penjaminan yang berorientasi pada profitabilitas, memperkuat dan mengembangkan jejaring kemitraan. Dan memperkuat human capital peusahaan.

ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Manajemen secara rutin melakukan evaluasi dan *assessment* terkait dengan kemampuan dan pencapaian target kinerja dari seluruh unit sesuai dengan rencana bisnis Perusahaan yang telah disusun. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk setiap level meliputi produktivitas, profitabilitas serta indikator-indikator utama yang tertuang dalam *Key Performance Indikator* (KPI) Perusahaan sampai dengan unit kerja terkecil. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi yang rutin dilakukan secara berkala, Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa Perum Jamkrindo memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan kegiatan usaha di masa mendatang. Perusahaan tidak memiliki ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha.

POTENTIAL THINGS THAT HAVE A SIGNIFICANT EFFECT ON BUSINESS CONTINUITY

Based on the results of management's assessment, until the end of 2019, there were no matters that would significantly influence Perum Jamkrindo to continue its business continuity as it was known that Perum Jamkrindo had a very high level of operational and financial performance growth. From the results of audits conducted by the Hartanto, Grace, Karunawan Public Accounting Firm, it received an unqualified opinion, in all material respects, the consolidated financial position of the Indonesian Credit Guarantee Corporation and its subsidiary entities December 31, 2019.

This achievement is part of Perum Jamkrindo's efforts and strategy to continue developing its core business in the guarantee sector by making various breakthroughs to improve its performance. Among others, strengthening existing product portfolios and developing new products, strengthening synergies with SOEs, developing digitalization, conducting guarantee-oriented on profitability, and strengthening and developing partnership networks and strengthening the Company's human capital.

MANAGEMENT ASSESSMENT OF POTENTIALLY SIGNIFICANT EFFECTS ON BUSINESS CONTINUITY

Management routinely conducts evaluations and assessments related to the ability and achievement of performance targets of all units according to the Company's business plans that have been prepared. Evaluations are conducted periodically for each level, including productivity, profitability, and key indicators, as stipulated in the Company's Key Performance Indicators (KPI) up to the smallest work units. Based on the results of regular assessments and evaluations conducted periodically, the Company's Management believes that Perum Jamkrindo has sufficient resources to carry out business activities in the future. The Company has no material uncertainties that can raise significant doubts about the Company's ability to maintain business continuity.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN DALAM MELAKUKAN *ASSESSMENT*

Dalam melaksanakan penilaian atas kemampuannya untuk melanjutkan kelangsungan usaha di masa yang akan datang, manajemen Perum Jamkindo menggunakan beberapa asumsi dan pertimbangan. Asumsi dan pertimbangan tersebut, antara lain kinerja keuangan, tingkat kecukupan modal, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi Perusahaan, permasalahan internal dan perkara hukum yang dihadapi Perusahaan, serta kondisi ekonomi mikro dan makro pada saat ini dan masa yang akan datang.

ASSUMPTIONS USED IN CONDUCTING ASSESSMENT

In assessing its ability to continue business continuity in the future, the Management of Perum Jamkindo uses several assumptions and considerations. These assumptions and considerations include financial performance, the level of capital adequacy, liquidity, solvency, profitability, and efficiency of the Company, internal and legal problems faced by the Company, as well as current and future micro and macroeconomic conditions.

Jamkrindo

Jamkrindo

Jaminan Kredit Indonesia



LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT
2019



FUNGSI PENUNJANG BISNIS

BUSINESS SUPPORT FUNCTIONS

208 Sumber Daya Manusia
Human Capital

209 Perencanaan dan Strategi Pengembangan SDM
HR Development Planning and Strategy

212 Profil Dan Data Statisitik Sdm
Hr Profile And Data Statistics

215 Rekrutmen Karyawan
Employee Recruitment

217 Pengembangan Karir
Career Development

219 Survei Kepuasan Karyawan
Employee Satisfaction Survey

225 Pendidikan Dan Pelatihan
Education And Training

240 Pengembangan Teknologi Informasi
Development of Information Technology

240 Visi dan Misi Penerapan Teknologi Informasi Perum Jamkrindo
Vision and Mission of Perum Jamkrindo's Information Technology Implementation

241 Penerapan Sistem Teknologi Informasi di Lingkup Perum Jamkrindo
Application of Information Technology Systems in Perum Jamkrindo

254 Investasi Teknologi Informasi
Information Technology Investment

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Capital



Perum Jamkrindo melakukan pengelolaan SDM secara menyeluruh mulai dari penetapan kebijakan strategis, pengembangan organisasi, rekrutmen tenaga kerja, pelatihan dan pengembangan kompetensi, pengembangan karir, penerapan sistem remunerasi berbasis penilaian kinerja, hingga program pensiun.

Perum Jamkrindo manages HR comprehensively from strategic policy setting, organizational development, workforce recruitment, training and competency development, career development, implementation of a performance appraisal-based remuneration system, to a pension program.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu pilar terpenting dalam mendukung pencapaian strategi bisnis yang telah ditetapkan Perum Jamkrindo. Oleh karena itu, Perusahaan secara serius menempatkan SDM sebagai mitra strategis dalam menjalankan kegiatan usaha. Strategi pengelolaan SDM diarahkan dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki dalam merespon tantangan dan menyesuaikan diri terhadap tuntutan industri serta perkembangan usaha Perusahaan dalam mencapai pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2019 Perum Jamkrindo melakukan pengelolaan SDM secara menyeluruh mulai dari penetapan kebijakan strategis, pengembangan organisasi, rekrutmen tenaga kerja, pelatihan dan pengembangan kompetensi, pengembangan karir, penerapan sistem remunerasi berbasis penilaian kinerja, hingga program pensiun.

Human Resources (HR) is one of the most important pillars supporting the achievement of business strategies set by Perum Jamkrindo. Therefore, the Company seriously places HR as a strategic partner in carrying out business activities. The HR management strategy is directed by mobilizing all of its capabilities in responding to challenges and adjusting to the demands of the industry and the development of the Company's business in achieving sustainable performance growth.

Throughout 2019, Perum Jamkrindo managed HR comprehensively from strategic policy setting, organizational development, workforce recruitment, training and competency development, career development, implementation of a performance appraisal-based remuneration system, to a pension program.

Perum Jamkrindo juga mengevaluasi efektivitas organisasi secara berkelanjutan dengan memperhatikan pedoman organisasi yang ditetapkan sebagai upaya dalam menunjang implementasi strategi bisnis, merespons perubahan serta perkembangan pasar. Perusahaan telah melakukan peninjauan secara terstruktur dan komprehensif terhadap beberapa organisasi unit bisnis sesuai kebutuhan usaha.

PERENCANAAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SDM

Sebagai aset utama, Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan SDM secara berkesinambungan. Perum Jamkrindo menyadari, kesuksesan dan keberlanjutan bisnis Perusahaan sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM, baik dari sisi pengelolaan internal maupun memenuhi kebutuhan pasar. Perencanaan dan strategi pengembangan SDM merupakan fungsi utama yang dilaksanakan Perum Jamkrindo untuk menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat.

Tujuan perencanaan dan strategi pengembangan SDM adalah:

1. Menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam Perusahaan.
2. Menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan dapat terselesaikan.
3. Menghindari terjadinya *miss management* dan tumpeng tindih dalam pelaksanaan tugas.
4. Mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga diharapkan produktivitas kerja meningkat.
5. Menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan.
6. Menjadi pedoman dalam menetapkan program rekrutmen, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan kedisiplinan, serta pemberhentian karyawan.
7. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi (*vertical* atau *horizontal*) dan pensiun karyawan.
8. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian pegawai.

Perusahaan terus berupaya menerapkan strategi pengembangan SDM berbasis kompetensi yang diawali dengan telah tersusunnya direktori kompetensi dan kebutuhan jabatan sebagaimana tercantum dalam rencana kerja Perusahaan pada RKAP 2020 dan RJPP 2019-2023. Upaya ini bertujuan untuk menempatkan posisi seorang karyawan pada tempat atau jabatan yang sesuai dengan kualitas kemampuannya.

Dalam rangka pengelolaan SDM yang lebih profesional, Perusahaan telah melakukan perubahan-perubahan kebijakan pengelolaan SDM sesuai praktik-praktik terbaik

Perum Jamkrindo also evaluates the organization's effectiveness on an ongoing basis by taking into account organizational guidelines set as an effort to support the implementation of business strategies, responding to changes and market developments. The Company has conducted a structured and comprehensive review of several business unit organizations according to business needs.

HR DEVELOPMENT PLANNING AND STRATEGY

As a major asset, the Company is committed to developing HR on an ongoing basis. Perum Jamkrindo realizes that the success and sustainability of the Company's business largely determined by the availability of HR, be it in terms of internal management and meeting market needs. HR planning and development strategies are the main functions carried out by Perum Jamkrindo to ensure the distribution of the workforce on the right job and at the right time to occupy various positions.

The objectives of HR planning and development strategies are:

1. To determine the quality and quantity of employees who will fill all positions in the Company.
2. To ensure the availability of current and future labor so that every work can be completed.
3. To avoid the occurrence of mismanagement and overlap in the execution of duties.
4. To facilitate coordination, integration, and synchronization to increase work productivity
5. To avoid employee shortages or excess
6. To become a guideline in establishing programs for recruitment, selection, development, compensation, integration, maintenance, and discipline, as well as the dismissal of employees.
7. To become a guideline in carrying out mutations (vertical or horizontal) and employee retirement.
8. To become the basis for employee appraisal.

The Company continues to implement a competency-based HR development strategy, which begins with the compilation of directories of competencies and job requirements, as stated in the Company's work plan in the 2020 RKAP and 2019-2023 RJPP. This activity is aimed to distribute the position of an employee in a place or position that is according to his/her capability quality.

In the framework of more professional human resources management, the Company has made changes to HR management policies according to best practices. In 2019,

(best practise). Pada tahun 2019, strategi utama bidang SDM adalah peningkatan produktivitas karyawan melalui peningkatan kompetensi, penyempurnaan sistem penilaian kinerja, sistem penggajian, peningkatan kedisiplinan dan peningkatan *engagement* karyawan.

Berikut program-program strategis bidang SDM tahun 2019 untuk peningkatan produktivitas tersebut di atas:

1. Pengembangan Sistem *Knowledge Management*.

   Knowledge Management adalah suatu rangkaian proses kegiatan dalam mengidentifikasi, menciptakan dan mendistribusikan pengetahuan agar bisa digunakan kembali oleh sebuah organisasi. Tujuan pengembangan Sistem *Knowledge Management* di Jamkrindo adalah agar pengetahuan yang dimiliki oleh Perusahaan dapat dikelola dengan baik dan dapat digunakan kembali sebagai media peningkatan kompetensi dan pembelajaran bagi seluruh generasi karyawan. Program *knowledge management* Jamkrindo saat ini antara lain:

   a *Sharing Knowledge*, kegiatan sharing pengetahuan terkait *product knowledge*, peraturan Perusahaan ataupun materi-materi pelatihan yang pernah diikuti oleh Karyawan

   b *Sharing experience, lesson learned* melalui media *knowledge management* www.km.jamkrindo.co.id

   c. E-learning , kegiatan pelatihan jarak jauh melalui media *knowledge management* www.km.jamkrindo.co.id dan www.ilmu.jamkrindo.co.id

2. Penerapan KPI Individu.

   Peningkatan produktivitas karyawan dapat tercapai apabila Perusahaan dapat mengukur kinerja karyawannya secara kuantitatif. Untuk itu Perusahaan telah menetapkan sistem penilaian kinerja berdasarkan KPI Individu. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan penilaian kinerja yang lebih terukur, objektif, *fair* (adil) dan transparan. Hasil penilaian kinerja tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atas kebijakankebijakan sebagai berikut:

   a. Kebijakan *reward and punishment*

   b. Penyusunan kebijakan alokasi bonus

   c. Kebijakan pengembangan karyawan

   d. Kebijakan rotasi karyawan

   e. Pembentukan *talent pool* karyawan

3. Tata Ulang Struktur Gaji

   Tujuan tata ulang struktur gaji adalah untuk menciptakan sistem remunerasi yang *internally fair* dan *externally competitive* di mana melalui penataan struktur gaji yang baru diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan memotivasi karyawan memberikan kinerja terbaik serta membangun budaya berkompetisi secara optimal untuk pencapaian kinerja Perusahaan. Tata ulang struktur gaji juga bertujuan untuk meningkatkan manfaat pensiun dari karyawan.

the main strategy in the HR sector was to increase employee productivity through increasing competence, improving the performance appraisal system, payroll system, improving discipline, and increasing employee engagement.

The followings were the HR division strategic programs in 2019 to increase the productivity mentioned above:

1. Knowledge Management System Development.

   Knowledge Management is a series of activities in identifying, creating, and distributing knowledge so that an organization can reuse it. The purpose of developing the Knowledge Management System in Jamkrindo is so that the knowledge owned by the Company can be managed properly and can be reused as a medium to increase competence and a medium of learning for all generations of employees. Jamkrindo's current knowledge management program includes:

   a. Sharing Knowledge. These sharing knowledge activities related to product knowledge, Company regulations or training materials which have been attended by Employees

   b. Sharing experience. Lessons learned through the knowledge management media www.km.jamkrindo.co.id

   c. E-learning. Remote training activities through knowledge management media www.km.jamkrindo.co.id and www.ilmu.jamkrindo.co.id

2. Application of Individual KPIs.

   Increased employee productivity can be achieved if the Company can measure employee performance quantitatively. For this reason, the Company has established a performance appraisal system based on Individual KPIs. It is done to create a performance appraisal that is more measurable, objective, fair, and transparent. The results of the performance appraisals are then used as the basis for making decisions on the following policies:

   a. Reward and punishment policy

   b. Compilation of bonus allocation policy

   c. Employee development policy

   d. Employee rotation policy

   e. Establishment of the employee talent pool

3. Restructuring of Salary Structure

   The purpose of the salary structure restructuring is to create a remuneration system that is internally fair and externally competitive in which through restructuring, the new salary structure is expected to increase employee productivity and motivate employees to provide the best performance and build a culture of competing optimally for the achievement of the Company's performance. The restructuring of the salary structure also aims to increase the pension benefits of employees.

4. Peningkatan komposisi karyawan di unit kerja bisnis

   Selaras dengan strategi utama bidang SDM tahun 2019, maka Perusahaan juga memperkuat tim bisnis, hal ini guna percepatan pencapaian kinerja korporasi yang dilakukan dengan cara :

   a. Melakukan mutasi karyawan dari unit non-bisnis ke unit bisnis
   b. Memberikan program pelatihan yang mendukung perkuatan tim bisnis

5. Sertifikasi Manajemen Risiko oleh Badan Nasional

   Sertifikasi Profesi dan Sertifikasi Internal Ahli Penjaminan. Sebagai Perusahaan yang yang bergerak di Industri Keuangan, pengelolaan risiko merupakan hal yang bersifat *mandatory*. Terkait hal tersebut, Perusahaan telah melakukan sertifikasi Manajemen Risiko oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan sertifikasi Internal Ahli Penjaminan kepada karyawan guna meningkatkan *awareness* karyawan terhadap risiko, peningkatan kompetensi serta standarisasi kompetensi karyawan.

6. Penyempurnaan kebijakan tentang sanksi pelanggaran ketentuan Perusahaan

   Kepercayaan mitra kerja sangat ditentukan oleh reputasi Perusahaan dan juga perilaku karyawan. Untuk menjaga kepercayaan mitra kerja tersebut maka Perusahaan meng*update* kebijakan tentang sanksi pelanggaran ketentuan Perusahaan dengan tujuan:

   a. meningkatkan kepatuhan karyawan
   b. mencegah terjadinya pelanggaran
   c. media pembinaan karyawan
   d. meningkatkan rasa keadilan *(fairness)*
   e. menciptakan *engagement*
   f. meningkatkan profesionalisme pengelolaan Perusahaan.

7. Pemberian penghargaan masa kerja

   Peningkatan produktivitas juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang kondusif, aman dan nyaman. Penghargaan masa kerja merupakan salah satu bentuk pengakuan Perusahaan atas kontribusi karyawan sehingga karyawan merasa nyaman karena adanya pengakuan oleh Perusahaan. Untuk itu Perusahaan memberikan penghargaan masa kerja dengan tujuan:

   a. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah menunjukkan loyalitas dan dedikasi kepada Perusahaan
   b. Meningkatkan motivasi karyawan agar terus memberikan kinerja terbaiknya kepada Perusahaan
   c. Meningkatkan *engagement*/ keterlekatan karyawan kepada Perusahaan sehingga produktivitas karyawan dapat ditingkatkan secara efektif dan optimal

4. Increasing the composition of employees in the business work unit

   In line with the HR division's main strategy in 2019, the Company also strengthened the business team to accelerate the achievement of corporate performance by:

   a. Transferring employees from non-business units to business units, and
   b. Providing training programs that support the strengthening of the business team

5. Risk Management Certification by the National Board

   Certification for Professional and Internal Assurance Expert Certification. As a company that engaged in the financial industry, risk management is mandatory. Related to this, the Company has carried out Risk Management certification by the National Board Certification for Professional (BNSP) and Internal Assurance Expert certification for the employees to increase their awareness of risks, improve competence, and standardize employee competencies.

6. Improvement of policies regarding sanctions for violating the Company's provisions.

   The trust of the partners is very much determined by the Company's reputation and employee behavior. To maintain the business partners' trust, the Company updates policies regarding sanctions for violating the Company's provisions with the aim of:

   a. Improving employee compliance
   b. Preventing violation
   c. Employee fostering media
   d. Increasing the sense of justice (fairness)
   e. Creating engagement, and
   f. Improving the professionalism of the Company's management

7. Granting award of the term of service

   Increased productivity is also influenced by a conducive, safe, and comfortable work environment. Award of the term of service is one form of the Company's recognition of employee contributions so that employees feel comfortable because of the Company's recognition. For this reason, the Company granting an award of the term of service with the aim of:

   a. Granting awards to employees who have shown loyalty and dedication to the Company
   b. Increasing employee motivation to continue to provide the best performance to the Company
   c. Increasing employee engagement/adherence to the Company so that employee productivity can be increased effectively and optimally.

PROFIL DAN DATA STATISITIK SDM

Jumlah Pegawai untuk masing-masing Level Organisasi

HR PROFILE AND DATA STATISTICS

Number of Employees for each Level of Position

Level Organisasi	2019	2018	2017	Level Organisasi
Kepala Divisi	20	18	19	Division Head
Pejabat Pranata Utama	5	0	7	First Class Officer
Kepala Kantor Wilayah	9	8	9	Head of Regional Office
Wakil Kepala Kantor Wilayah	1	1	0	Deputy Head of Regional Office
Kepala Kantor Cabang	56	56	56	Head of Branch Office/ Branch Manager
Kepala Bagian	210	198	201	Unit Head
Pejabat Pranata Madya	5	7	11	Middle Officer
Kepala Seksi	73	65	121	Section Head
Pranata Muda	0	1	1	Junior Officer
Staf	412	327	304	Staff
Pelaksana	118	113	115	Implementer
Calon Karyawan	56	167	198	Prospective Employee
Jumlah	**965**	**961**	**1.033**	**Total**

GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI

GRAPH OF NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON ORGANIZATIONAL LEVEL

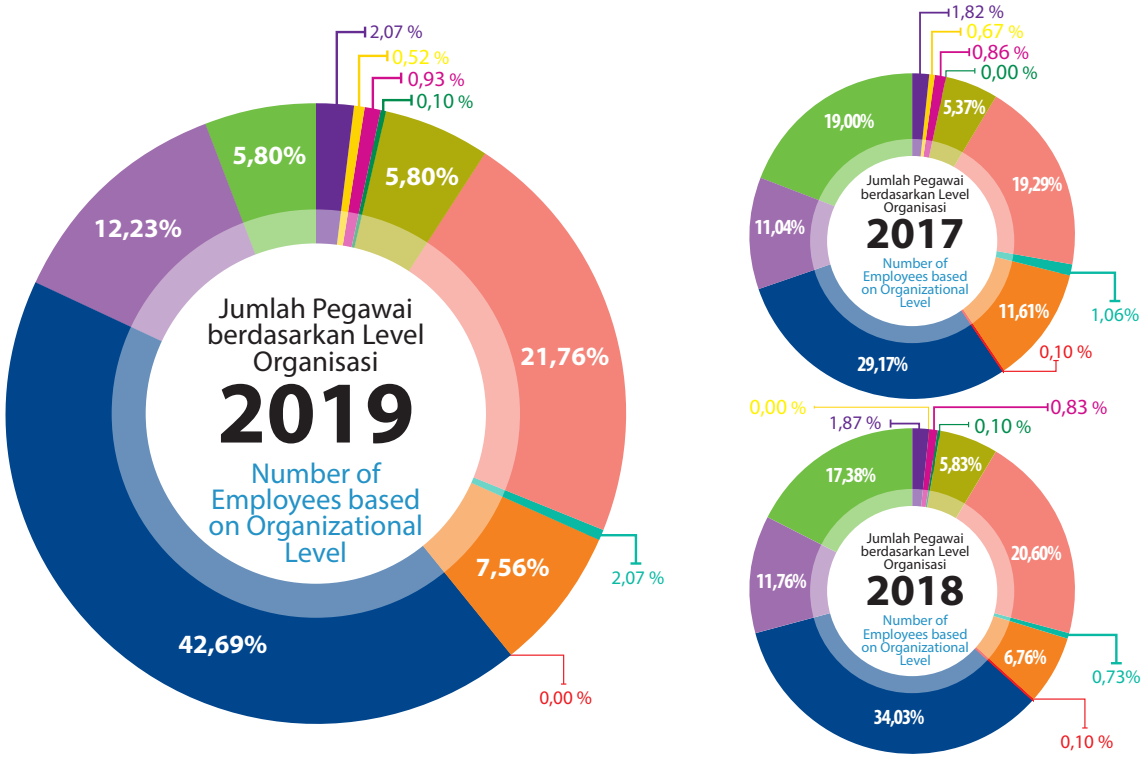

- Kepala Divisi — Division Head
- Pejabat Pranata Utama — First Class Officer
- Kepala Kantor Wilayah — Head of Regional Office
- Wakil Kepala Kantor Wilayah — Deputy Head of Regional Office
- Kepala Kantor Cabang — Head of Branch Office/ Branch Manager
- Kepala Bagian — Unit Head
- Pejabat Pranata Madya — Middle Officer
- Kepala Seksi — Section Head
- Pranata Muda — Junior Officer
- Staf — Staff
- Pelaksana — Implementer
- Calon Karyawan — Prospective Employee

Jumlah Pegawai untuk masing-masing Tingkat Pendidikan — Number of Employees for Each Level of Education

Tingkat Pendidikan	2019	2018	2017	Level of Education
S3	1	1	1	PhD
S2	71	71	71	Master's Degree
S1/D4	759	791	826	Bachelor's Degree/ Diploma 4
D1/D2/D3	94	97	99	Diploma 1/2/3
SMA Sederajat	35	37	38	Senior High School equivalent
SMP Sederajat	5	5	7	Junior High School equivalent
SD	0	0	0	Elementary School
Jumlah	**965**	**1.002**	**1.042**	**Total**

GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
GRAPH OF NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON LEVEL OF EDUCATION

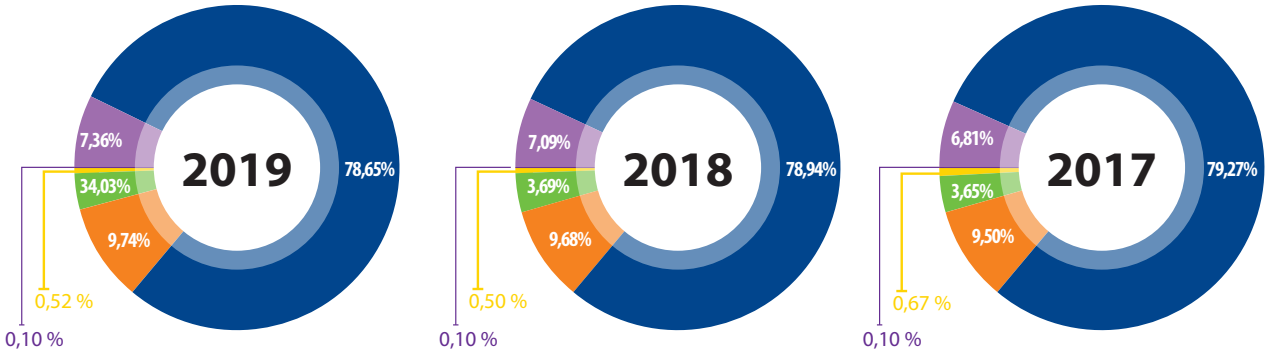

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	2019	2018	2017	Employment Status
Permanen	957	993	1.030	Permanent
Penugasan pada entitas anak, PT Jamkrindo Syariah	6	7	9	Assigned to a Subsidiary, PT Jamkrindo Syariah
Penugasan PT LSPP	2	2	3	Assigned to PT LSPP
Kontrak/*Outsource*	600	556	468	Contract/ Outsource
Magang Bersertifikasi	113	0	0	Certified Apprentice
Prohire	9	6	2	Prohire
KKWT / *Entry Level Hire*	49	55	57	Entry Level Hire
Jumlah	**1.736**	**1.619**	**1.569**	**Total**

GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
GRAPH OF NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON EMPLOYMENT STATUS

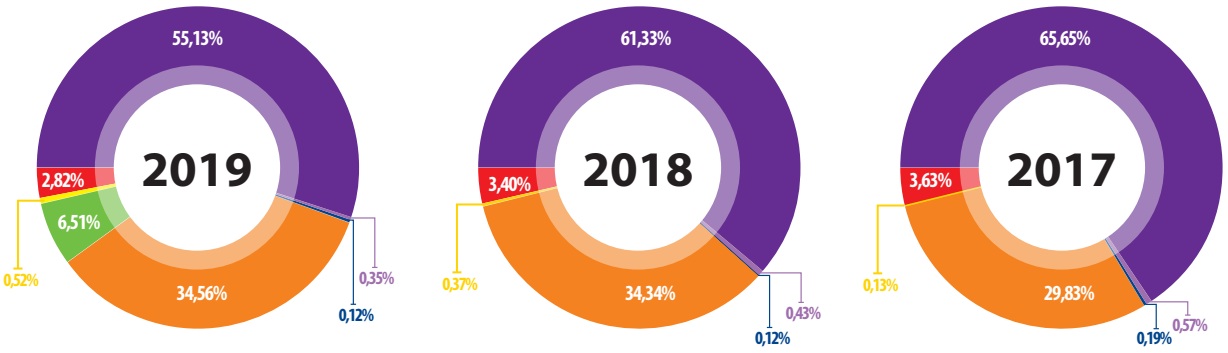

Jumlah Pegawai untuk masing-masing Wilayah Kerja — Number of Employees foe Each Work Area

Wilayah Kerja	2019	2018	2017	Work Area
Kantor Pusat	255	252	292	Head Office
Kantor Wilayah / Cabang	646	680	667	Regional Office/Branch Office
KUP	56	61	71	Service Unit Office
Penugasan Jamsyar	2	7	3	Assigned to PT Jamkrindo Syariah
Penugasan PT LSPP	6	2	9	Assigned to PT LSPP
Jumlah	**965**	**1.002**	**1.042**	**Total**

GRAFIK JUMLAH PEGAWAI UNTUK MASING-MASING WILAYAH KERJA
GRAFIK JUMLAH PEGAWAI UNTUK MASING-MASING MASA KERJA

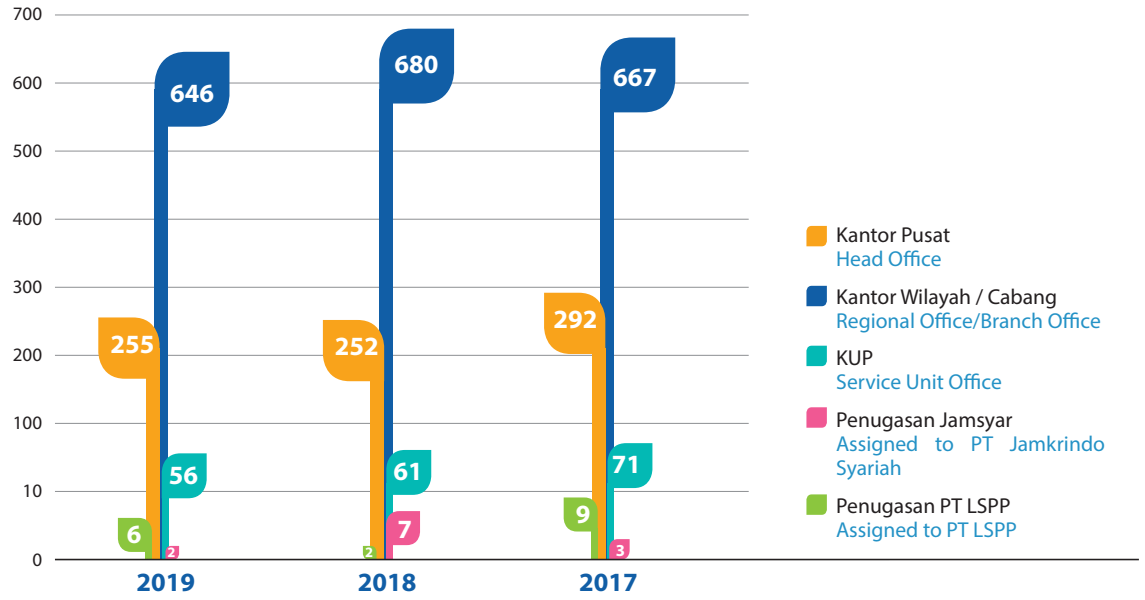

Jumlah Pegawai untuk masing-masing *Gender* — Number of Employees for Each Gender

Gender	2019	2018	2017	Gender
Laki-laki	1.103	1.047	1.065	Male
Perempuan	633	497	504	Female
Jumlah	**1.736**	**1.544**	**1.569**	**Total**

Jumlah Pegawai berdasarkan Gender diatas termasuk Pegawai *Outsource*, Magang Bersertifikasi, *Prohire*, dan KKWT/*Entry Level Hire*.

The number of employees based on Gender above includes Outsourced Employees, Certified Apprentice, Prohire, and KKWT/Entry Level Hire.

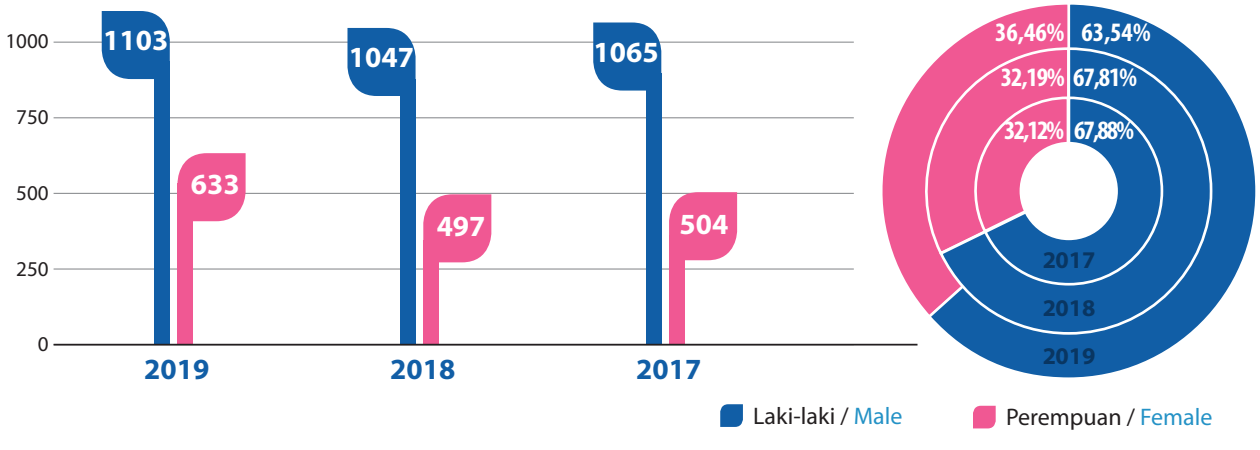

Jumlah Pegawai untuk masing-masing Usia
Number of Employees for Each Age

Usia (Tahun) Age (Years Old)	2019
<=25	37
26-35	694
36-45	156
46-55	78
>=56	0
Jumlah / Total	**965**

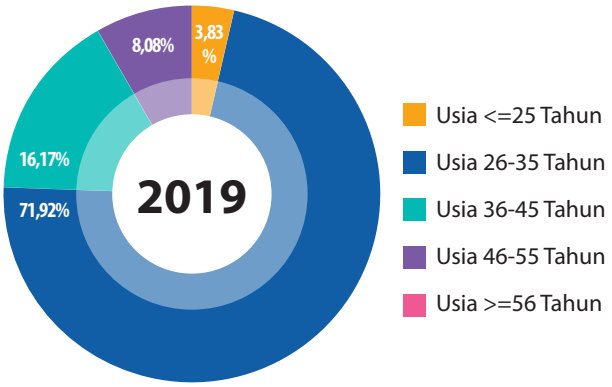

REKRUTMEN KARYAWAN

Perum Jamkrindo menyadari betapa pentingnya kualitas SDM bagi kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan Perusahaan.

Karyawan yang andal hanya dapat dibentuk dari orang-orang yang mempunyai integritas, dedikasi, serta loyalitas yang baik. Perusahaan terus mengimbangi pemenuhan kebutuhan SDM baik yang sudah berpengalaman maupun *fresh graduate* agar selaras dengan perkembangan dan pertumbuhan bisnis Perusahaan. Perekrutan SDM dilingkungan Perum Jamkrindo dilaksanakan dengan mengacu pada proyeksi kebutuhan karyawan untuk tahun berjalan serta mengacu kepada standar kompetensi dengan memegang teguh Nilai-nilai Perusahaan.

Oleh karena itu, Perum Jamkrindo pada tahap awal perekrutan karyawan senantiasa berupaya untuk mencari dan menempatkan calon-calon karyawan dengan aspek kompetensi dan integritas yang terbaik, berkualitas, dan mumpuni sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dalam melayani masyarakat. Perum Jamkrindo tidak hanya menawarkan pekerjaan pada bidang keahlian yang dimiliki masing-masing karyawan maupun calon karyawan, namun juga kepastian jenjang karier bersama Perum Jamkrindo.

Sesuai kompetensi dan untuk menjaga independensi maka seleksi karyawan dilakukan melalui konsultan independent yang mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang rekrutmen karyawan.

Proses rekrutmen yang diselenggarakan Perum Jamkrindo senantiasa mengedepankan asas-asas keterbukaan, kewajaran dan kesetaraan berdasarkan kebutuhan, serta kompetensi yang dimiliki oleh calon karyawan. Perum Jamkrindo juga memberikan peluang seluas-luasnya bagi lulusan perguruan tinggi.

Asas Rekrutmen SDM :

1. Terbuka
2. Selektif
3. Daya Guna dan Hasil Guna
4. Kebutuhan

EMPLOYEE RECRUITMENT

Perum Jamkrindo realizes the importance of HR's quality is for the Company's operational, marketing, and financial performance.

Reliable employees can only be formed from people who have integrity, dedication, and good loyalty. The Company continues to balance the fulfillment of the needs of HR with both experienced and fresh graduates to be in line with the development and growth of the Company's business. HR Recruitment in Perum Jamkrindo environment is carried out by referring to projections of employee needs for the current year and referring to competency standards by upholding Company Values.

Therefore, in the early stages of hiring employees, Perum Jamkrindo always strives to find and place prospective employees with the best competence and integrity and qualified according to the needs of the Company in serving the community. Perum Jamkrindo not only offers jobs in the areas of expertise owned by each employee and prospective employee but also the certainty of career paths with Perum Jamkrindo.

Following competence and maintaining independence, employee selection is carried out through an independent consultant who has competence and experience in the field of employee recruitment.

The recruitment process organized by Perum Jamkrindo always puts forward the principles of openness, fairness, and equality based on the needs and competencies possessed by prospective employees. Perum Jamkrindo also provides the widest opportunity for college graduates.

Principles of HR Recruitment include:

1. Open
2. Selective
3. Usability and Usage Results
4. Needs

Ruang lingkup pengadaan karyawan meliputi:

a. Perencanaan

untuk memperoleh tenaga yang tepat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan termasuk merencanakan kebutuhan profesional dengan kompetensi khusus.

b. Pengumuman

untuk memberikan kesempatan bagi angkatan kerja untuk melamar pada Perusahaan.

c. Pelamaran

untuk menciptakan ketertiban dalam proses penerimaan karyawan.

d. Seleksi

untuk memilih dan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

e. Pengangkatan

untuk memberikan status karyawan dan atau jabatan tertentu dalam Perusahaan.

Sumber pengadaan karyawan berasal dari dalam Perusahaan dan atau dari luar Perusahaan apabila dibutuhkan untuk pengisian format tertentu dan atau memerlukan keahlian/ keterampilan tertentu. Perusahaan dapat melakukan pengadaan/rekrutmen tenaga kerja berpengalaman/tenaga profesional untuk pengisian posisi tertentu dan/atau untuk kebutuhan keahlian / keterampilan tertentu berupa:

a. Karyawan/staf berpengalaman

Karyawan yang diangkat Perusahaan dengan memperhitungkan pengalaman kerja, masa kerja, keahlian dan kompetensi yang dimilikinya sesuai kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

b. Pejabat struktural/ fungsional

Karyawan yang diangkat Perusahaan dengan memperhitungkan pengalaman kerja, masa kerja, keahlian dan kompetensi yang dimilikinya sesuai kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk menduduki jabatan struktural/fungsional.

c. Tenaga kerja profesional *(Prohire)*

Tenaga Kontrak Waktu Tertentu yang direkrut berdasarkan pengalaman kerja, keahlian dan kompetensi yang dimilikinya sesuai kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan pendampingan dan asistensi pada unit kerja terkait atau untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dan/ atau dengan target tertentu dan jangka waktu tertentu.

Berikut jumlah rekrutmen karyawan Perusahaan di sepanjang tahun 2019:

Di sepanjang tahun 2019, Perusahaan melakukan rekrutmen sebanyak 61 orang karyawan baru, yang terdiri dari 17 orang karyawan tetap dan 44 orang karyawan tidak tetap (tenaga kontrak). Sementara itu, di sepanjang tahun

The Scope of Employee Procurement includes:

a. Planning

To obtain the appropriate employees according to the Company's needs, the recruitment must include planning professional needs with special competencies.

b. Announcement

To provide opportunities for the workforce to apply to the Company.

c. Application

To create order in the employee recruitment process.

d. Selection

To choose and acquire employees who are following the needs of the Company.

e. Appointment

To provide certain employee status and/or position within the Company.

The sources of procurement of employees come from within the Company and/or, if needed, from outside the Company to fill in certain formats and/or require certain expertise/skills. The Company can conduct procurement/recruitment of experienced workforce/professional personnel to fill certain positions and/or for specific expertise/skills in the form of:

a. Experienced employees/staff

An employee appointed by the Company by taking into account the employees' work experience, years of service, expertise, and competencies according to the requirements of the Company's needs.

b. Structural/functional officials

An employee appointed by the Company by taking into account employee's work experience, years of service, expertise, and competencies according to the requirements of the Company needs to occupy structural/ functional positions.

c. Professional workforce (Prohire)

The contract employee is recruited based on his/her work experience, expertise, and competencies according to the requirements of the Company's needs to provide accompaniment and assistance to the related work units or to carry out certain work and/or with specific targets and certain periods.

The following was the total recruitment of Company employees throughout 2019:

Throughout the year 2019, the Company recruited 60 new employees, consisting of 17 permanent (full-time) employees and 44 part-time (contract) employees. Meanwhile, throughout 2019, the Company did not recruit professional

2019, Perusahaan tidak melakukan rekrutmen karyawan profesional untuk ditetapkan sebagai pejabat struktural yang memiliki pengalaman sesuai kebutuhan Perusahaan.

employees to be appointed as structural officials with experience in accordance with the Company's needs.

REKRUTMEN PEJABAT STRUKTURAL (2018-2019)
STRUCTURAL OFFICIALS RECRUITMENT (2018-2019)

Rekrutmen	2019	2018	Recruitment
Pranata Utama	0	0	First Class Officer
Kepala Bagian	0	0	Unit Head
Pranata Madya	0	0	Middle Officer
Kepala Seksi	0	0	Section Head
Jumlah	0	0	Total

Selain hal tersebut, pada tahun 2019 Perusahaan juga melakukan rekrutmen tenaga kerja waktu tertentu professional untuk melakukan pendampingan dan asistensi sebanyak 4 (empat) orang meningkat 20,00% dibanding tahun 2018 yang sebanyak 5 (lima) orang yang tersebar di beberapa unit kerja, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah. Perekrutan tenaga profesional tersebut diharapkan dapat membantu percepatan tercapainya program-program kerja Perusahaan serta *transfer knowledge* kepada karyawan tetap pada unit kerja tersebut.

In addition to this, in 2019, the Company also recruited certain time professionals contract employees to provide accompaniment and assistance of 4 (four) people, an increase of 20.00% compared to 2018 with 5 (five) people spread across several work units, as shown in the table below. The recruitment of professionals is expected to help accelerate the achievement of the Company's work programs and transfer knowledge to permanent employees in the work unit.

Rekrutmen	2019	2018	Recruitment
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Profesional diperuntukan untuk mendukung bidang Sekretaris Perusahaan	0	2	Professional Specific Time Contract Workers to support the Corporate Secretary Division
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Profesional diperuntukan untuk mendukung bidang Satuan Pengawasan Intern	1	1	Professional Specific Time Contract Workers to support the Internal Control Unit
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Profesional diperuntukan untuk mendukung bidang Divisi Perencanaan Strategis	1	0	Professional Specific Time Contract Workers to support the Strategic Planning Division
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Profesional diperuntukan untuk mendukung bidang Divisi MSDM	0	1	Professional Specific Time Contract Workers to support the HR Management Division
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Profesional diperuntukan untuk mendukung bidang Divisi Keuangan dan Investasi	0	1	Professional Specific Time Contract Workers to support the Finance and Investment Division
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Profesional diperuntukan untuk mendukung bidang Divisi Klaim	2	0	Professional Specific Time Contract Workers to support the Claims Division
Jumlah	4	5	Total

PENGEMBANGAN KARIER

Untuk memastikan *Career Success Factor* (CSF) terpenuhi, maka Perusahaan melaksanakan kegiatan pengembangan karier yang sesuai dengan masing-masing faktor. Upaya ini dilakukan secara optimal agar dapat memotivasi karyawan untuk bekerja secara maksimal. Pengembangan karier dilakukan melalui kenaikan posisi jabatan seorang pegawai ke level yang lebih tinggi dengan program promosi. Program

CAREER DEVELOPMENT

To ensure that the Career Success Factor (CSF) is fulfilled, the Company carries out career development activities according to each factor. This activity is carried out optimally to motivate the employees to work at the maximum. Career development is done by increasing employee position to a higher level with a promotion program. This promotion program is conducted to get the appropriate candidates to fill the positions at a

promosi ini dilakukan untuk mendapatkan kandidat yang tepat guna mengisi jabatan pada level yang lebih tinggi sesuai dengan persyaratan secara tepat waktu.

Karyawan yang dinilai berdasarkan sistem penilaian kinerja dan telah menunjukkan prestasi kerja yang baik, jujur dan dapat dipercaya serta berwibawa dapat diangkat untuk menduduki jabatan struktural apabila memenuhi syarat jabatan yang dimaksud. Sistem penilaian kinerja karyawan diadakan untuk menjamin objektifitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat, golongan gaji dan tingkat gaji serta pengangkatan dalam jabatan struktural tertentu pada perusahaan.

Tahapan kegiatan pengembangan karier melalui kegiatan promosi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana jenjang karier karyawan berdasarkan:
   a. Kebijakan perusahaan tentang pengelolaan SDM.
   b. Peraturan-peraturan perusahaan yang terkait pengelolaan SDM.
   c. RKAP dan RJPP.
2. Memetakan seluruh formasi karyawan dan evaluasi karyawan berdasarkan:
   a. Formasi karyawan baru.
   b. Hasil penilaian kinerja pegawai.
3. Mengidentifikasikan formasi yang akan kosong berdasarkan:
   a. Hasil pemetaan formasi karyawan dan evaluasi karier karyawan.
   b. Identifikasi formasi yang akan kosong.
4. Melakukan rencana pengisian formasi melalui promosi dan menyusun persyaratan yang dibutuhkan untuk posisi tersebut.
5. Mencari kandidat untuk dipromosikan berdasarkan:
   a. Data kualifikasi karyawan yang kompeten untuk menempatkan posisi yang kosong.
   b. Seleksi kualifikasi dan kompetensi awal untuk mendapatkan calon kandidat terbatas/*sort listcandidate*.
   c. Rekomendasi atasan karyawan jika memiliki kandidat yang memenuhi kualifikasi yang menjadi syarat untuk posisi yang kosong.
6. Menetapkan kandidat yang tepat untuk posisi yang kosong melalui komite promosi.
7. Melakukan proses penggantian posisi karyawan sesuai mekanisme.

higher level according to the requirements promptly.

Employees who have been assessed based on a performance appraisal system and have demonstrated good, honest, and trustworthy and authoritative work performance can be appointed to occupy structural positions if they fulfill the intended job requirements. An employee performance appraisal system is conducted to ensure objectivity in considering and establishing promotions, salary group, salary levels, and appointments in certain structural positions in the Company.

The stages of career development activities through promotions are as follows:

1. Develop an employee career path plan based on:
   a. Company policy regarding HR management.
   b. Company regulations related to HR management.
   c. RKAP and RJPP.
2. Map the entire employee formation and evaluate employees based on:
   a. Formation of new employees.
   b. Results of employee performance appraisal.
3. Identify formations which will be vacant based on:
   a. Results of employee formation mapping and employee career evaluation.
   b. Identify the formation that will be vacant.
4. Make a plan to fill out the formation through promotion and drawing up the requirements needed for the position.
5. Look for candidates to be promoted based on:
   a. Data on qualifications of competent employees to fill in the vacant positions.
   b. Selection of initial qualifications and competencies to get the limited candidates/short-list the candidates.
   c. The employee's supervisor's recommendation if there are candidates who meet the qualifications required for the vacant position.
6. Establish the right candidate for the vacant position through the promotion committee.
7. Conduct the replacement process of employee positions according to the mechanism.

Pada tahun 2019, karyawan yang mendapatkan promosi tercatat sebanyak 66 orang atau turun 88,00% dibanding tahun 2018 yang sebanyak 76 orang dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

In 2019, the number of employees who received promotion was recorded as many as 66 people or a decrease of 88.00% compared to 2018 of 76 people. The details could be seen in the table below:

TABEL PROMOSI KARYAWAN
TABLE OF EMPLOYEES PROMOTION

Jabatan	2019	2018	Position
Kepala Divisi/ Setingkat	3	1	Head of Division/ Equivalent
Pemimpin Wilayah/ Wakil Pemimpin Wilayah	3	3	Head of Regional Office/Deputy Head of Regional Office
Pemimpin Cabang Tipe A/ B/ C/ D	16	13	Head of Branch Office/Branch Office Manager Type A/B/C/D
KaBag Kanpus/ Wil/ KCK/ Cab Tipe A/ B	20	29	Unit Head of Head office/Regional Office/Special Branch Office/ Branch Office Type A/B
KaBag Kanca Tipe C/ D	20	21	Unit Head of Branch Office Type C/D
Kepala KUP	4	8	Head of Service Unit Office
Kasie Pusat/ Wil/ Cab A/ B	0	0	Section Head of Head Office/ Regional Office/ Branch Office A/B
Kasubsie Kanca Tipe C	0	0	Sub-Section Head of Branch Office Type C
Kasubsie KUP	0	0	Sub-Section Head of Service Unit Office
Pranata Utama	0	0	First Class Officer
Pranata Muda	0	1	Middle Officer
Total	66	76	Total

SURVEI KEPUASAN KARYAWAN

Survei kepuasan karyawan dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan dan keterikatan karyawan terhadap Perusahaan. Tingkat kepuasan dan keterikatan karyawan merujuk pada sikap umum seorang karyawan terhadap pekerjaan dan Perusahaan. Tingkat kepuasan dan keterikatan yang tinggi akan menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaan tersebut. Sebaliknya, ketidakpuasan dan ketidak-terikatan karyawan menunjukkan sikap yang kontraproduktif terhadap pekerjaannya.

Dalam menilai program peningkatan tenaga kerja, maka Perum Jamkrindo membuat evaluasi indeks kepuasan karyawan dan *engagement* karyawan Perum Jamkrindo yang dinilai pada tahun 2018 dan tahun 2019. Program kepuasan karyawan dapat digambarkan sebagai program peningkatan kinerja *(performance improvement)* secara efektif, dalam hal ini adalah program yang menyesuaikan dengan kebutuhan para karyawan.

Penelitian kepuasan karyawan Perum Jamkrindo ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kepuasan karyawan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat, 9 Kanwil, dan KCK Unit Kerja Perum Jamkrindo dengan jumlah responden sejumlah 770 karyawan Perum Jamkrindo dengan rincian 479 karyawan laki-laki dan 291 karyawan perempuan.

Hasil dari survei kepuasan karyawan dengan menggunakan indeks kepuasan karyawan dan *engagement* karyawan ini

EMPLOYEE SATISFACTION SURVEY

The employee satisfaction survey is conducted to measure the extent of employee satisfaction and engagement with the Company. The level of satisfaction and engagement of employees refers to the general attitude of an employee to their work and the Company. A high level of satisfaction and engagement will show a positive attitude towards the work. Conversely, dissatisfaction and disengagement of employees show a counterproductive attitude towards their work.

In assessing the workforce improvement program, Perum Jamkrindo creates an evaluation of the employee satisfaction and engagement index of Perum Jamkrindo, which are assessed in 2018 and 2019. The employee satisfaction program can be described as an effective performance improvement program, in this case, the program which adjusts to the needs of the employees.

This employee satisfaction survey was carried out to find out how employee satisfaction was. This research was conducted at the Head Office, 9 Regional Offices, and Cash Branch Offices (KCK) Work Unit of Perum Jamkrindo with the number of respondents totaling 770 Perum Jamkrindo employees with details of 479 male employees and 291 female employees.

The results of the employee satisfaction survey by using employee satisfaction and employee engagement index

diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

are expected to be utilized by the Company to improve its performance further.

Uraian	Kepuasan Karyawan / Employee Satisfaction		Decription
	2019	2018	
Kantor Pusat	74,90	77,55	Head Office
Wilayah I	81,38	78,33	Region I
Wilayah II	85,41	78,38	Region II
Wilayah III	77,41	77,72	Region III
Wilayah IV	76,68	78,11	Region IV
Wilayah V	80,42	78,16	Region V
Wilayah VI	84,19	78,40	Region VI
Wilayah VII	83,56	78,16	Region VII
Wilayah VIII	76,85	78,14	Region VIII
Wilayah IX	95,64	77.40	Region IX
Kantor Cabang Khusus	74,08	-	Special Branch Office

Berdasakan data tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan tertinggi terdapat di wilayah IX Makassar dengan skor 95,64 (kualifikasi Sangat Baik).
2. Indeks kepuasan terendah terdapat di wilayah Kantor Pusat dengan skor 74,90 (kualifikasi Kurang Baik).

Based on the data above, the followings can be concluded:

1. The highest satisfaction index is in region IX Makassar, with a score of 95.64 (VERY GOOD category).
2. The lowest satisfaction index is in region Head Office, with a score of 77.40 (POOR category).

PEMENUHAN HAK KARYAWAN

Salah satu bentuk upaya Perusahaan dalam memperhatikan kesejahteraan seluruh pegawai, dengan memberikan remunerasi bagi pegawai yang memiliki kinerja yang baik setiap tahunnya. Perum Jamkrindo menyadari bahwa tuntutan tugas dan tanggung jawab Perusahaan terus meningkat seiring peningkatan skala dan *volume* bisnis Perusahaan. Untuk itu seluruh karyawan dituntut untuk dapat bekerja secara intensif dan optimal sesuai kebutuhan perusahaan.

Penggajian karyawan dilakukan berdasarkan job grade, kompetensi dan tingkat tanggung jawab jabatannya serta kinerja individu karyawan dan kinerja Perusahaan.

Selain hal tersebut, Perum Jamkrindo juga memberikan benefit kepada karyawan berupa Jasa Produksi sebagai bentuk apresiasi Perusahaan atas kinerja tahunannya.

Berikut rincian pendapatan dan rasio gaji tertinggi dan terendah karyawan Perum Jamkrindo:

1. Penggajian karyawan Perum Jamkrindo terdiri dari :
   a. Gaji Pokok
   b. Tunjangan
      1) Tunjangan Jabatan
      2) Tunjangan Zona
      3) Tunjangan Hari Raya

FULFILLMENT OF EMPLOYEE RIGHTS

One form of the Company's efforts to preserve all employees' welfare is by providing remuneration for employees who have a good performance every year. Perum Jamkrindo realizes that the demands of the Company's duties and responsibilities continue to increase along with the increase in the scale and volume of the Company's business. For this reason, all employees are required to work intensively and optimally according to the needs of the Company.

Employee salaries are based on job grade, competency and level of responsibility of the position as well as individual employee performance and Company performance.

Besides this, Perum Jamkrindo also provides benefits to employees in the form of Production Services as a form of the Company's appreciation for their annual performance.

The following is the breakdown of income and the ratio of the highest and lowest salary of the employees of Perum Jamkrindo:

1. Payroll employees of Perum Jamkrindo consist of:
   a. Basic salary.
   b. Allowances.
      1) Positional allowance.
      2) Regional Allowance.
      3) Religious Holiday Allowance.

4) Tunjangan Cuti Tahunan
5) Tunjangan Cuti Besar
6) Tunjangan Uang Makan

c. Fasilitas
1) Fasilitas Cuti
2) Fasilitas program kesehatan
3) Fasilitas program pensiun
4) Fasilitas asuransi jiwa
5) Fasilitas rumah jabatan
6) Fasilitas kendaraan jabatan
7) Fasilitas lainnya

2. Rasio Gaji (Upah) tertinggi dan terendah

Berikut kami sampaikan Rasio Gaji (Upah) Tertinggi dan Terendah sebagai berikut:

a. Rasio Gaji Karyawan Terendah dan Tertinggi = 1 : 10,4
b. Rasio Gaji Direksi Terendah dan Tertinggi = 1 : 1,1
c. Rasio Honorarium Dewan Pengawas Terendah dan Tertinggi = 1 : 1,1
d. Rasio Gaji Direksi Terendah dan Karyawan Tertinggi = 1: 2,7

4) Annual Leave Allowance.
5) Long Leave Allowance.
6) Food Allowance.

c. Facilities:
1) Leave Facility
2) Health program facility
3) Pension program facility
4) Life insurance facility
5) Positional housing facility
6) Positional vehicle facility
7) Other facilities

2. The highest and lowest salary ratio

The following is the Highest and Lowest Salary Ratios:

a. Lowest and Highest Employee Salary Ratio = 1: 10.4
b. Lowest and Highest Board of Directors Salary Ratio = 1: 1.1
c. Lowest and Highest Board of Supervisor Council Honorarium Ratio = 1: 1.1
d. Lowest board of Directors Salary and Highest Employee Salary ratio = 1:2.7

Gaji Salary	*Grade*	Gaji + Tunjangan Tetap Salary + Allowances Fixed	Jabatan Position
Gaji Tertinggi 2019 / Highest Salary in 2019	20	Rp.60.343.000.000	Pemimpin Wilayah / Regional Head
Gaji Terendah 2019/ Lowest Salary in 2019	7	Rp.5.802.000.000	Pelaksana / Implementer

PENGHARGAAN KEPADA KARYAWAN

Disamping memberikan hak-hak remunerasi karyawan, Perusahaan juga memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah bekerja dengan baik sekaligus sebagai stimulus dalam meningkatkan kinerja. Pada tahun 2019, Perusahaan memberikan *reward* dalam bentuk pemberian jasa produksi dan penghargaan masa kerja.

JUMLAH KARYAWAN KELUAR

Rasio *employee turnover* dapat menunjukkan produktivitas dari kinerja sebuah perusahaan. Selain itu, tingkat *turnover* karyawan juga merupakan refleksi dari budaya dan system kerja Perusahaan yang dapat menjadi indikator bagi keberhasilan Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Pada tahun 2019, jumlah karyawan yang keluar dari Perusahaan tercatat sebanyak 51 orang atau 5,28% dari jumlah keseluruhan karyawan, meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan jumlah 46 orang atau 4,59% dari jumlah keseluruhan karyawan.

Data jumlah karyawan keluar *(turnover)* pada tahun 2019 dan 2018 terdiri dari pensiun normal, pensiun dini, mengundurkan diri, dan meninggal dunia.

APPRECIATION TO EMPLOYEES

In addition to providing the employee with their remuneration rights, the Company also providing rewards to employees who have worked well. It also functions as a stimulus to improve performance. In 2019, the Company provided rewards in the form of providing production services and years of service rewards.

THE NUMBER OF EMPLOYEES TURNOVER

The employee turnover ratio can show the productivity of a Company's performance. Besides, the employee turnover rate is also a reflection of the Company's culture and work system, which can be an indicator of the Company's success in creating a conducive work environment.

In 2019, the number of employees leaving the Company was 51 people or 5.28% of the total number of employees. It was an increase compared to 2018 of 46 people or 4.59% of the total number of employees.

The data on the number of employees turnover in 2019 and 2018 consisted of data on normal retirement, early retirement, resignation, and death.

TINGKAT *TURNOVER* KARYAWAN 2018-2019
EMPLOYEES TURNOVER RATE 2018-2019

Uraian	2019		2018		Description
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	
Pensiun normal	3	5,88%	7	15,21%	Normal retirement
Pensiun dini	0	0,00%	1	2,18%	Early retirement
Mengundurkan diri	46	90,20%	35	76,09%	Resignation
Meninggal dunia	2	3,92%	3	6,52%	Death
Jumlah	51	100,00%	46	100,00%	Total
Jumlah Karyawan	965		1.002		Number of Employees
Tingkat Turnover	5,28%		4.59%		Turnover Rate

ROTASI DAN MUTASI KARYAWAN

Mutasi jabatan dan/atau mutasi unit kerja diberlakukan dengan maksud memberikan pengalaman menyeluruh kepada setiap karyawan tentang keseluruhan operasional dan bisnis yang dikembangkan Perusahaan. Melalui kebijakan mutasi jabatan dan/atau mutasi unit kerja ini, karyawan dapat mengenal prosedur, sistem, kebijakan, hingga kegiatan seharihari dan visi yang ingin dicapai Perusahaan.

Mutasi jabatan dan/atau mutasi unit kerja ini dapat diadakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Perusahaan dan pembinaan pegawai, termasuk di dalamnya perencanaan karier. Kewenangan mutasi dan penempatan karyawan dibedakan menjadi 2 (dua):

1. Kantor Pusat
   a. Mutasi dan penempatan karyawan di lingkungan intern Direktorat dapat dilakukan oleh Kepala Divisi/setingkat untuk diusulkan kepada Divisi yang membidangi SDM.
   b. Mutasi dan penempatan karyawan antar Direktorat dapat diusulkan oleh Kepala Divisi/setingkat untuk diusulkan kepada Direktur yang membidangi SDM.
2. Kantor Cabang
   a. Untuk mutasi dan penempatan karyawan di lingkungan intern kantor cabang ditetapkan oleh Kepala Kantor Cabang dengan memperhatikan kompetensi masing-masing karyawan dan kebutuhan Kantor Cabang.
   b. Khusus untuk penempatan karyawan sebagai kasir agar segera dibuat Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Cabang setempat.

Sebagian besar rotasi dan mutasi karyawan dilakukan dalam rangka memberikan tugas dan tanggung jawab terhadap Karyawan yang bersangkutan pada jabatan yang lebih tinggi. Ketentuan terkait rotasi dan mutasi karyawan untuk promosi ditetapkan sesuai dengan ketentuan promosi Perusahaan sesuai hasil komite promosi.

Employees Rotation and Mutation

Position mutations and/or mutations of work units are implemented to provide a thorough experience to each employee about the overall operations and business developed by the Company. Through the policy of transfer/ mutation of position and/or mutation of the work unit, employees can recognize the procedures, systems, policies, and daily activities, as well as the vision that the Company wants to achieve.

Position mutations and/or mutations of the work unit can be held for the interest of implementing the Company's duties and the employees fostering, including career planning. The authority for mutation and employees placement can be divided into 2 (two):

1. Head Office
   a. Mutations and placement of employees in the internal directorate can be carried out by the Head of Division/equivalent proposed to the Division in charge of HR.
   b. Mutation and placement of employees between directorates can be proposed by the Head of Division/ equivalent to the Director in charge of HR.
2. Branch Office
   a. The Head of the Branch Office determines the mutations and placement of employees in the internal branch office by paying attention to each employee's competencies and the needs of the Branch Office.
   b. For the placement of employees as cashiers, a Task Order is immediately made that is signed by the local Branch Head.

Most rotations and mutations of employees are carried out to assign duties and responsibilities to the employees concerned in higher positions. Provisions related to employees' rotation and mutation for promotions are determined according to the Company's promotional privisions based on the results of the Promotion Committee.

Selama tahun 2019 tingkat rotasi dan mutasi karyawan tercatat sebesar 5,91% dibandingkan jumlah keseluruhan karyawan.

In 2019, the rate of employess' rotation and mutation was 5.91% compared to the total number of employees.

Karyawan Mutasi / Rotasi	2019	2018	Employees Mutaion/Rotation
Januari	0	0	January
Februari	0	0	February
Maret	0	20	March
April	0	0	April
Mei	28	0	May
Juni	0	0	June
Juli	0	41	July
Agustus	29	22	August
September	0	0	September
Oktober	0	56	October
November	0	0	November
Desember	0	23	December
Jumlah	**57**	**162**	**Total**

PENILAIAN KINERJA KARYAWAN

Sejak tahun 2018, sesuai Surat Edaran No. 14/SE/4/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Penerapan KPI Individu sebagai Dasar Penilaian Kinerja Karyawan, maka terhitung mulai tahun 2018 penilaian kinerja karyawan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) berbasis *balanced scorecard*. Penilaian kinerja merupakan bagian dari pengembangan talenta bagi karyawan, di mana setiap karyawan akan mendapatkan evaluasi atas kinerja dari setiap individu.

Penilaian atas kinerja karyawan dilakukan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) Individu pola *Balance Scorecard* dengan 4 (empat) perspektif penilaian:

1. Financial
2. Customer
3. Internal Business Process
4. People Development

Tahap pelaksanaan penilaian kineja berdasarkan KPI Individu yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan target *(goals setting)* masing-masing komponen KPI Individu.
2. Penetapan target individu dilakukan dengan cara *one on one* (diskusi tatap muka) antara atasan dan karyawan yang bersangkutan, di mana atasan memberikan *coaching* dan mentoring kepada yang bersangkutan.
3. Penandatanganan KPI Individu oleh atasan langsung, atasan tidak langsung dan karyawan yang bersangkutan.
4. Untuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan agar target kerja yang menjadi KPI Individu dapat tercapai maka perlu dilakukan *Performance Review* setiap 3 (tiga) bulan sekali.

EMPLOYEE PERFORMANCE APPRAISAL

Since 2018, according to the Circular Letter No. 14/SE/4/III/2018 dated March 29, 2018, concerning the Guidelines for Individual KPI Implementation as a Basis of Employees Performance Appraisal, then since 2018 Employees Performance Appraisal uses the Key Performance Indicator (KPI) based on the balanced scorecard. Performance Appraisal is part of developing talent for employees, where each employee will get an evaluation of the performance of each individual.

Employees Performance Appraisal is carried out using the Individual Key Performance Indicator (KPI) Balance Scorecard pattern with 4 (four) valuation perspectives:

1. Financial
2. Customer
3. Internal Business Process
4. People Development

The implementation stage of the performance appraisal is based on the Individual KPI as follows:

1. Target setting for each individual KPI component.
2. The establishment of individual targets is done by way of one on one (face-to-face discussion) between the supervisor and the employee concerned, in which the superior provides coaching and mentoring to the concerned.
3. Signing of individual KPIs by direct supervisors, indirect supervisors, and the concerned employees.
4. To evaluate the implementation of work so that the work targets that become Individual KPIs can be achieved, it is necessary to do a Performance Review every 3 (three) months.

5. Pada akhir tahun dilakukan penilaian akhir kinerja *(Performance Appraisal)* KPI Individu. Penilaian dilakukan menggunakan 2 (dua) variabel sebagai berikut:
   a. Pencapaian KPI Individu dengan bobot sebesar 90 %.
   b. Budaya kerja dalam bentuk perilaku dengan bobot sebesar 10%.
6. Penilaian kinerja tersebut akan dilakukan pemeringkatan *(Performance Level)* pada setiap masing-masing tingkat jabatan yang sama.

Berdasarkan penilaian tersebut, Perusahaan dapat menggunkannya sebagai dasar kebijakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan perhitungan dan pembayaran jasa produksi karyawan.
2. Kebijakan *coaching* dan mentoring untuk meningkatkan produktifitas karyawan.
3. Kebijakan pengembangan karyawan
4. Kebijakan *talent management* dan *career planning* karyawan.

Pada tahun 2019, Perusahaan telah menggunakan hasil penilaian kinerja berdasarkan KPI Individu sebagai dasar untuk perhitungan pembayaran jasa produksi tahun buku 2019.

SURVEI KETERIKATAN PEGAWAI

Perum Jamkrindo telah melaksanakan survei opini pegawai untuk melihat persepsi para pegawai dalam aspek keterikatan mereka terhadap Perusahaan dan persepsi mereka terhadap kebijakan serta program pengelolaan SDM yang dijalankan. Hasil dari survei ini telah disampaikan sebagai management report kepada Direksi dan digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelola SDM dalam rangka terus menerus memperbaiki sistem serta meningkatkan berbagai aspek yang telah dinilai baik dalam pelaksanaan pengelolaan SDM.

Nilai keterikatan dibangun dari 12 pernyataan loyalitas dan emosional karyawan yang dikutip dari teori Gallup. Adapun dalam penelitian ini, klasifikasi kategori keterikatan karyawan terbagi menjadi 3 yaitu:

5. At the end of the year, a final Performance Appraisal of Individual KPI is conducted. Appraisal is carried out using the following 2 (two) variables:
   a. The achievement of Individual KPI with a weight of 90%.
   b. Work culture in the form of behavior with a weight of 10%.
6. The performance appraisal will be carried out with a ranking (Performance Level) at each level of the same position.

Based on the appraisal, the Company can use it as a policy basis for the following matters:

1. Calculation and payment policy of employee production services.
2. Coaching and mentoring policy to increase employee productivity.
3. Employee development policy
4. Employees talent management and career planning policies.

In 2019, the Company used the performance appraisal results based on the Individual KPI as the basis for calculating the payment of production services for the 2019 fiscal year.

EMPLOYEE ENGAGEMENT SURVEY

Perum Jamkrindo has conducted an employee opinion survey to see employees' perceptions in terms of their engagement to the Company and their perceptions of policies and HR management programs that are carried out. The results of this survey have been submitted as a management report to the Board of Directors and used as input for HR managers in order to continuously improve the system and improve various aspects that have been assessed in the implementation of HR management.

The value of engagement is built from 12 employee loyalty and emotional statements quoted from Gallup's theory. As in this study, the classification of employee engagement categories is divided into 3, namely:

Indikator Skor	Kategori Keterikatan
Setuju (Skor 3)	Terikat
Ragu-ragu (Skor 2)	Tidak Terikat
Tidak Setuju (Skor 1)	Tidak Terikat Sama Sekali



Berdasarkan hasil survey kepuasan karyawan Perum Jamkrindo pada penilaian keterikatan karyawan untuk sebanyak 770 responden, maka didapatkan hasil penilaian sebagai berikut:

Sesuai dengan hasil survei Keterikatan Karyawan maka dapat diketahui bahwa sebanyak 84% (644 orang) dari responden karyawan tergolong sebagai karyawan yang terikat atau dapat dikatakan bahwa skor keterikatan karyawan perum jamkrindo adalah sebesar 84,0 (tergolong sebagai kategori terikat). Sedangkan responden karyawan Perum Jamkrindo yang masuk ke dalam kategori tidak terikat (*not engaged*) adalah sebesar 16% (120 orang) dan kategori tidak terikat sama sekali (*actively disengaged*) adalah sebesar 1% (6 orang).

Based on the results of Perum Jamkrindo's employee satisfaction survey on employee engagement appraisal for as many as 770 respondents, the following assessment results were obtained:

In accordance with the results of the Employee Engagement survey, it could be seen that as many as 84% (644 people) of the employee respondents were classified as employees who were engaged or it could be said that Perum Jamkrindo's employee engagement score was 84.0 (classified as the engaged category). Whereas Perum Jamkrindo employee respondents who fell into the category of not engaged were 16% (120 people) and the category of actively disengaged was 1% (6 people).



PERKEMBANGAN PENGELOLAAN SDM KE DEPAN

Dalam rangka menjawab tantangan ke depan, Perusahaan akan melakukan pengelolaan SDM dengan mengedepankan pengelolaan yang profesional dan sesuai *best practise* yang ada, misalnya dengan memaksimalkan *Performance Management System*, Tata Ulang Sistem Remunerasi, Penerapan KPI Individu dan Internalisasi Budaya Perusahaan. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM Jamkrindo menjadi isu utama, hal ini guna menjadikan SDM Jamkrindo sebagai ahli di bidang penjaminan yang meguasai proses bisnis penjaminan, data *analytic* terkait UMK dan *behavioural analysis* UMKM.

FUTURE HR MANAGEMENT DEVELOPMENT

To respond to the challenges ahead, the Company will conduct HR management by prioritizing professional management and in accordance with existing best practices, for example by maximizing the Performance Management System, Restructuring of the Remuneration System, Individual KPI Implementation and Corporate Culture Internalization. In addition, the improvement of Jamkrindo's HR competency is a major issue; this is to make Jamkrindo's HR as an expert in the field of guarantee that controls the guarantee business process, MSE-related analytical data and behavioral analysis of MSMEs.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dewasa ini persaingan bisnis membutuhkan dukungan dan kehandalan SDM. Perum Jamkrindo berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM di seluruh proses bisnis sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja operasional dan keunggulan daya saing berkelanjutan.

Seiring perkembangan perusahaan, Perum Jamkrindo menyesuaikan pengelolaan dan pengembangan pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan terkini dunia bisnis. Komitmen tersebut diimplementasikan melalui program

EDUCATION AND TRAINING

Nowadays business competition needs HR support and reliability. Perum Jamkrindo is committed to improving the quality and competitiveness of its human resources in all business processes so as to be able to drive increased operational performance and sustainable competitive advantage.

As the Company develops, Perum Jamkrindo adjusts the management and development of employees to meet the current needs of the business world. This commitment is

pengembangan kompetensi karyawan yang intensif dan terarah. Kompetensi SDM yang memadai dan desain organisasi yang sesuai akan meningkatkan competitive advantage perusahaan.

Pada tahun 2019, Perum Jamkrindo mengeluarkan biaya sebesar 26.791.796.827 untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi pekerja. Perum Jamkrindo telah melakukan berbagai program pengembangan kompetensi.

implemented through an intensive and directed employee competency development program. Adequate HR competence and appropriate organizational design will increase the Company's competitive advantage.

In 2019, Perum Jamkrindo spent Rp26,791,796,827 for the implementation of employee competency development activities. Perum Jamkrindo has carried out various competency development programs.

No	Nama *Training* Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal / Date		Vendor/ Tempat Training Vendor/ Training Place
			Mulai Start	Selesai End	
1	Hari Mutu *Three Lines of Defense* Three Lines of Defense Quality Day	27	01 Januari 2019 January 1, 2019	01 Januari 2019 January 1, 2019	Perum Jamkrindo
2	Manajemen Asuransi Klaim Claim Insurance Management	2	03 Januari 2019 January 3, 2019	04 Januari 2019 January 4, 2019	*Fresh Consutant*
3	*Healthy Lifestyle*	112	04 Januari 2019 January 4, 2019	04 Januari 2019 January 4, 2019	Perum Jamkrindo
4	Hari Mutu *Consultative Marketing* Consultative Marketing Quality Day	18	11 Januari 2019 January 11, 2019	11 Januari 2019 January 11, 2019	Perum Jamkrindo
5	*Professional Communication* MSDM Professional Communication of HR Management	14	17 Januari 2019 January 17, 2019	18 Januari 2019 January 18, 2019	Perum Jamkrindo
6	Hari Mutu Pengenalan produk-produk Asuransi dan Potensi Sinergi Bisnis Penjaminan The Quality Day of the Insurance-products Introduction and the Guarantee Business Synergy Potential	37	25 Januari 2019 January 25, 2019	25 Januari 2019 January 25, 2019	Perum Jamkrindo
7	*Professional Communication* Umum & Hukum General & Legal Professional Communication	14	25 Januari 2019 January 25, 2019	26 Januari 2019 January 26, 2019	Perum Jamkrindo
8	Pelatihan Penulisan & Kehumasan Writing & Public Relations Training	14	26 Januari 2019 January 26, 2019	26 Januari 2019 January 26, 2019	Perum Jamkrindo
9	*Intro to Python for Data Science*	2	28 Januari 2019 January 28, 2019	06 Maret 2019 March 6, 2019	PT. *Hacktive* Teknologi Indonesia
10	Hari Mutu Audit & Auditor Hukum The Quality Day of the Legal Audit & Auditor	20	01 Februari 2019 February 1, 2019	01 Februari 2019 February 1, 2019	Perum Jamkrindo
11	Hari Mutu *Product Innovation Management* The Quality Day of Product Innovation Management	20	08 Februari 2019 February 8, 2019	08 Februari 2019 February 8, 2019	Perum Jamkrindo
12	*Leaders at Work* (James Gwee)	60	10 Februari 2019 February 10, 2019	11 Februari 2019 February 11, 2019	Perum Jamkrindo & James Gwee *Academy*

No	Nama *Training* Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal / Date		Vendor/ Tempat Training Vendor/ Training Place
			Mulai Start	Selesai End	
13	*Merger and Acquisition*	2	13 Februari 2019 February 13, 2019	15 Februari 2019 February 15, 2019	Clariden (*Knowledge for the world business leaders*)
14	Pelatihan Mentoring Analisa Kredit Malang Credit Analysis Mentoring Training in Malang	6	13 Februari 2019 February 13, 2019	14 Februari 2019 February 14, 2019	Perum Jamkrindo
15	*"Business Coaching & Strategic Leadership"*	14	14 Februari 2019 February 14, 2019	15 Februari 2019 February 15, 2019	Perum Jamkrindo
16	Hari Mutu Klaim Asuransi The Quality Day of Insurance Claims	20	15 Februari 2019 February 15, 2019	15 Februari 2019 February 15, 2019	Perum Jamkrindo
17	*HR Director* 2019	2	19 Februari 2019 February 19, 2019	19 Februari 2019 February 19, 2019	PT Intipesan Pariwara
18	Menjadi Humas BUMN Handal Become a Reliable BUMN Public Relations	1	21 Februari 2019 February 21, 2019	22 Februari 2019 February 22, 2019	Intrinsics
19	Hari Mutu HR *Director Summit* The Quality Day of Director Summit	20	22 Februari 2019 February 22, 2019	22 Februari 2019 February 22, 2019	Perum Jamkrindo
20	Pelatihan Mentoring Analisa Kredit Sorong Credit Analysis Mentoring Training in Sorong	16	22 Februari 2019 February 22, 2019	23 Februari 2019 February 23, 2019	Perum Jamkrindo
21	ToT SnapJam	10	22 Februari 2019 February 22, 2019	22 Februari 2019 February 22, 2019	Perum Jamkrindo
22	*Optimizing Business Profit*	3	25 Februari 2019 February 25, 2019	26 Februari 2019 February 26, 2019	Kontan Academy
23	Haruskah Perusahaan Melakukan Transformasi Budaya di Era Vuca dan Era Bisnis 4.0 Should the Company Perform Cultural Transformation in the Vuca Era and Business Era 4.0?	2	05 Maret 2019 March 5, 2019	06 Maret 2019 March 6, 2019	QLM Consultacy
24	Pelatihan Mentoring Analisa Kredit Banda Aceh Credit Analysis Mentoring Training in Banda Aceh	6	05 Maret 2019 March 5, 2019	06 Maret 2019 March 6, 2019	Perum Jamkrindo
25	*Professional Communication Batch I*	31	05 Maret 2019 March 5, 2019	06 Maret 2019 March 6, 2019	Perum Jamkrindo

No	Nama *Training* Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal / Date Mulai Start	 Selesai End	Vendor/ Tempat Training Vendor/ Training Place
26	*Professional Communication Batch II*	33	08 Maret 2019 March 8, 2019	09 Maret 2019 March 9, 2019	Perum Jamkrindo
27	Pelatihan *Awareness* & Audit Internal Awareness & Internal Audit Training	4	13 Maret 2019 March 13, 2019	15 Maret 2019 March 15, 2019	Sucofindo
28	QIA Manajerial QIA Managerial	2	18 Maret 2019 March 18, 2019	27 Maret 2019\ March 27, 2019	YPIA
29	*ToT SnapJam*	20	20 Maret 2019 March 20, 2019	20 Maret 2019 March 20, 2019	YPIA
30	Hari Mutu Sosialisasi Aplikasi SIPP The Quality Day of SIPP Application Socialization	45	22 Maret 2019 March 22, 2019	22 Maret 2019 March 22, 2019	Perum Jamkrindo
31	*Professional Communication Batch III*	35	22 Maret 2019 March 22, 2019	23 Maret 2019 March 23, 2019	Perum Jamkrindo
32	APC KPKU Assessor Preparation Course of Assessment Criteria of Performance Excellence	3	25 Maret 2019 March 25, 2019	26 Maret 2019 March 26, 2019	Forum Ekselen BUMN
33	*Professional Communication Batch IV*	29	25 Maret 2019 March 25, 2019	26 Maret 2019 March 26, 2019	Perum Jamkrindo
34	*Winning Strategy Innovation & Leadership*	1	25 Maret 2019 March 25, 2019	26 Maret 2019 March 26, 2019	PTC
35	Hari Mutu Transformasi VUCA The Quality Day of VUCA Transformation	22	05 April 2019 April 5, 2019	05 April 2019 April 5, 2019	Perum Jamkrindo
36	*In House Training Financial for Non-Financial*	19	10 April 2019 April 10, 2019	10 April 2019 April 10, 2019	Perum Jamkrindo
37	*In House Training Product Knowledge Suretyship*	32	11 April 2019 April 11, 2019	12 April 2019 April 12, 2019	Infobank
38	Sosialisasi Persiapan *Business Countinuity Management* Business Continuity Management Preparation Socialization	20	15 April 2019 April 15, 2019	15 April 2019 April 15, 2019	
39	*Digital Human Resources Practitioner Program*	2	22 April 2019 April 22, 2019	24 April 2019 April 24, 2019	Vanaya Digital
40	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko lvl 2 Level 2 Risk Management Certification Examination	24	23 April 2019 April 23, 2019	23 April 2019 April 23, 2019	LSPP
41	Pelantikan QIA dan Seminar Nasional Internal Audit 2019 QIA Inauguration and the 2019 Internal Audit National Seminar	1	24 April 2019 April 24, 2019	25 April 2019 April 25, 2019	YPIA
42	*Powering Indonesian SMEs with Technology*	8	25 April 2019 April 25, 2019	25 April 2019 April 25, 2019	Mekari Confrence
43	*In House Training* Analisa Laporan Keuangan dan Sertifikasi *Product Knowledge Suretyship* Makassar In House Training on Financial Statements Analysis and Suretyship Product Knowledge Certification in Makassar	42	26 April 2019 April 26, 2019	28 April 2019 April 28, 2019	Infobank

No	Nama *Training* Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal / Date Mulai Start	 Selesai End	Vendor/ Tempat Training Vendor/ Training Place
44	Manajemen Perkantoran Modern 4.0 Modern Office Management 4.0	3	26 April 2019 April 26, 2019	26 April 2019 April 26, 2019	F2N Human Development Centre dan PT Swandra Mitra Konsultan F2N Human Development Centre and PT Swandra Mitra Konsultan
45	Workshop Optimalisasi Penagihan Subrogasi Workshop on Subrogation Billing Optimization	25	30 April 2019 April 30, 2019	30 April 2019 April 30, 2019	Perum Jamkrindo
46	Mengukur Resiko Operasional Perbankan (*Risk Tolerance & Risk Appetite,Risk Lost Event Database, Control Self Assessment, Key Operasional Risk Indicator)* Measuring Banking Operational Risk (Risk Tolerance & Risk Appetite, Risk Lost Event Database, Control Self Assessment, Key Operational Risk Indicators)	3	02 Mei 2019 May 2, 2019	03 Mei 2019 May 3, 2019	PT. Nayottama
47	Pembekalan Sertifikasi Manajamen Risiko Level 1 Risk Management Certification Debriefing Level 1	23	02 Mei 2019 May 2, 2019	03 Mei 2019 May 3, 2019	LSPP
48	*In House Training* Analisa Laporan Keuangan dan Sertifikasi *Product Knowledge Suretyship* Palembang In House Training on Financial Statements Analysis and Suretyship Product Knowledge Certification in Palembang	40	03 Mei 2019 May 3, 2019	05 Mei 2019 May 5, 2019	Infobank
49	Ujian Sertifikasi Manajamen Risiko Level 1 Level 1 Risk Management Certification Examination	23	04 Mei 2019 May 4, 2019	04 Mei 2019 May 4, 2019	LSPP
50	Pelatihan Mentoring Analisa Kredit Bisnis 2 Mentoring Training of Business Credit Analysis 2	12	08 Mei 2019 May 8, 2019	09 Mei 2019 May 9, 2019	Perum Jamkrindo
51	*ToT SnapJam*	13	10 Mei 2019 May 10, 2019	10 Mei 2019 May 10, 2019	Perum Jamkrindo
52	*ToT SnapJam*	10	14 Mei 2019 May 14, 2019	14 Mei 2019 May 14, 2019	Perum Jamkrindo
53	*ToT SnapJam*	15	15 Mei 2019 May 15, 2019	15 Mei 2019 May 15, 2019	Perum Jamkrindo
54	Mengelola dan Mengukur Resiko Kredit (*Credit Scoring, Migration Analysis, Credit Portfolio*) Managing and Measuring Credit Risk (Credit Scoring, Migration Analysis, Credit Portfolio)	3	16 Mei 2019 May 16, 2019	17 Mei 2019 May 17, 2019	Nayottama
55	*ToT SnapJam*	12	17 Mei 2019 May 17, 2019	17 Mei 2019 May 17, 2019	Perum Jamkrindo

No	Nama *Training* Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal / Date Mulai Start	 Selesai End	Vendor/ Tempat Training Vendor/ Training Place
56	Workshop Penulisan *Ace Team* dan TKMPN Ace Team and TKMPN Writing Workshop	54	20 Mei 2019 May 20, 2019	21 Mei 2019 May 21, 2019	Perum Jamkrindo
57	Pelatihan Mentoring Analisa Kredit Divisi Jarlay & Hukum Mentoring Training of Credit Analysis of Network and Services & Legal Divisions	6	21 Mei 2019 May 21, 2019	21 Mei 2019 May 21, 2019	Perum Jamkrindo
58	*ToT SnapJam*	7	21 Mei 2019 May 21, 2019	21 Mei 2019 May 21, 2019	Perum Jamkrindo
59	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 Kabag pusat Risk Management Certification Debriefing Level 2 for Head Office Unit Heads	24	23 Mei 2019 May 23, 2019	24 Mei 2019 May 24, 2019	Perum Jamkrindo
60	*ToT SnapJam*	9	23 Mei 2019 May 23, 2019	23 Mei 2019 May 23, 2019	Perum Jamkrindo
61	Pelatihan Mentoring Analisa Kredit dan Manajemen Subrogasi Credit Analysis and Subrogation Management Mentoring Training	14	24 Mei 2019 May 24, 2019	25 Mei 2019 May 25, 2019	Perum Jamkrindo
62	Pelatihan Hipnoselling Hypnoselling Training	24	25 Mei 2019 May 25, 2019	26 Mei 2019 May 26, 2019	Perum Jamkrindo
63	*ToT SnapJam*	7	27 Mei 2019 May 27, 2019	27 Mei 2019 May 27, 2019	Perum Jamkrindo
64	Workshop Penulisan *Ace Team* dan TKMPN Ace Team and TKMPN Writing Workshop	54	27 Mei 2019 May 27, 2019	28 Mei 2019 May 28, 2019	Perum Jamkrindo
65	Online Learning tentang Perdir Kedisplinan Divisi MSDM Online Learning on Board of Directors Regulation on HRM Division's Discipline	13	29 Mei 2019 May 29, 2019	29 Mei 2019 May 29, 2019	Perum Jamkrindo
66	Hari Mutu Produk Pegadaian The Quality Day of Pawnshop Products	20	16 Juni 2019 June 16, 2019	16 Juli 2019 July 16, 2019	Perum Jamkrindo
67	Pelatihan Profesi Finansial Modeler (PFM) Professional Financial Modeler Training (PFM)	1	17 Juni 2019 June 17, 2019	21 Juni 2019 June 21, 2019	PT. Rajawali Konsulindo
68	Sosialisasi Kebijakan Bisnis dan Pengelolaan Portofolio Penjaminan Socialization of Business Policy and Management of Guarantee Portfolios	15	19 Juni 2019 June 19, 2019	19 Juni 2019 June 19, 2019	Perum Jamkrindo
69	Pelatihan Implementasi *Business Continuity Management* (BCM) saat bencana terjadi Training on Implementation of Business Continuity Management (BCM) when a disaster occurs	2	20 Juni 2019 June 20, 2019	21 Juni 2019 June 21, 2019	PT. Nayotrama Dinamika Indonesia
70	Hari Mutu Kepuasan Pelanggan The Quality Day of Customer Satisfaction	12	21 Juni 2019 June 21, 2019	21 Juli 2019 July 21, 2019	Perum Jamkrindo

No	Nama *Training* Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal / Date Mulai Start	Tanggal / Date Selesai End	Vendor/ Tempat Training Vendor/ Training Place
71	Mentoring Analisa Kredit & Manajemen Subrogasi Kanwil IX Makasar Mentoring on Credit Analysis & Subrogation Management of Regional Office IX Makassar	14	21 Juni 2019 June 21, 2019	21 Juni 2019 June 21, 2019	Perum Jamkrindo
72	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 Kabag pusat Level 2 Risk Management Certification Examination for Head Office Unit Heads	24	21 Juni 2019 June 21, 2019	21 Juni 2019 June 21, 2019	Perum Jamkrindo
73	Pelatihan *Profesional Financial* Modeler (PFM) Profesional Financial Modeler (PFM) Training	1	24 Juni 2019 June 24, 2019	28 Juni 2029 June 28, 2019	PT. Rajawali Konsulindo
74	Sosialisasi Kebijakan Bisnis dan Pengelolaan Portofolio Penjaminan Socialization of Business Policy and Management of Guarantee Portfolios	15	24 Juni 2019 June 24, 2019	26 Juni 2019 June 26, 2019	Perum Jamkrindo
75	Pengajuan Pembayaran biaya pelatihan dan UTP *Financial Risk Management* dan *Fraud Detection* Submission of payment of training fees and UTP Financial Risk Submission of payment of training fees and Financial Risk UTP Submission of payment of training costs and UTP Financial Risk Management and Fraud Detection	1	26 Juni 2019 June 26, 2019	26 Juni 2019 June 26, 2019	PT. Mega Nilai Cipta
76	Sosialisasi Kebijakan Bisnis dan Pengelolaan Portofolio Penjaminan Socialization of Business Policy and Management of Guarantee Portfolios	15	26 Juni 2019 June 26, 2019	28 Juni 2019 June 28, 2019	Perum Jamkrindo
77	Pelatihan *International Certified Wealth Manager (CWM) Executive Program 2019 Public Class* International Certified Wealth Manager (CWM) Executive Program 2019 Public Class Training	1	27 Juni 2019 June 27, 2019	15 Agustus 2019	Moesa Consulting Indonesia (MCI)
78	Sosialisasi Kebijakan Bisnis dan Pengelolaan Portofolio Penjaminan Socialization of Business Policy and Management of Guarantee Portfolios	15	01 Juli 2019 July 1, 2019	03 Juli 2019 July 3, 2019	Perum Jamkrindo
79	Kegiatan *Responsive Culture and Pre Show Vlog & Short Movie* Responsive Culture Activities and Pre Show Vlog & Short Movie	100	02 Juli 2019 July 2, 2019	02 Juli 2019 July 2, 2019	Perum Jamkrindo
80	Pelatihan 2 Days Workshop IFRS 9 (PSAK 71) *Credit Risk Modelling* 2 Days Workshop of IFRS 9 (PSAK 71) on Credit Risk Modeling	3	03 Juli 2019 July 3, 2019	04 Juli 2019 July 4, 2019	Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Indonesian Economists Association
81	Sosialisasi Kebijakan Bisnis dan Pengelolaan Portofolio Penjaminan Socialization of Business Policy and Management of Guarantee Portfolios	15	03 Juli 2019 July 3, 2019	05 Juli 2019 July 5, 2019	Perum Jamkrindo
82	Hari Mutu Review Temuan SPI The Quality Day of SPI Findings Review	30	05 Juli 2019 July 5, 2019	05 Juli 2019 July 5, 2019	Perum Jamkrindo

No	Nama *Training* Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal / Date Mulai Start	Tanggal / Date Selesai End	Vendor/ Tempat Training Vendor/ Training Place
83	Sosialisasi Kebijakan Bisnis dan Pengelolaan Portofolio Penjaminan Socialization of Business Policy and Management of Guarantee Portfolios	15	08 Juli 2019 July 8, 2019	10 Juli 2019 July 10, 2019	Perum Jamkrindo
84	Pelatihan/workshop mengikuti Seminar National *Anti Fraud Confrence* Training/Workshop on the Anti Fraud Conference National Seminar	2	10 Juli 2019 July 10, 2019	11 Juli 2019 July 11, 2019	ACFE
85	Sosialisasi Kebijakan Bisnis dan Pengelolaan Portofolio Penjaminan Socialization of Business Policy and Management of Guarantee Portfolios	15	10 Juli 2019 July 10, 2019	12 Juli 2019 July 12, 2019	Perum Jamkrindo
86	*Online Learning* tentang Perdir Kedisplinan Online Learning on Board of Directors Regulation on HRM Division's Discipline	676	12 Juli 2019 July 12, 2019	12 Juli 2019 July 12, 2019	Perum Jamkrindo
87	Sosialisasi Kebijakan Bisnis dan Pengelolaan Portofolio Penjaminan Socialization of Business Policy and Management of Guarantee Portfolios	15	15 Juli 2019 July 15, 2019	17 Juli 2019 July 17, 2019	Perum Jamkrindo
88	*Outbond* Bintalsik dan Kepemimpinan Program magang mahasiswa berserifikat batch II Outboundond on Mental and Attitude Development Program (Bintalsik) and Certified Student Internship Program Leadership Batch II	36	16 Juli 2019 July 16, 2019	18 Juli 2019 July 18, 2019	Rindam Jaya
89	Sosialisasi Kebijakan Bisnis dan Pengelolaan Portofolio Penjaminan Socialization of Business Policy and Management of Guarantee Portfolios	15	17 Juli 2019 July 17, 2019	19 Juli 2019 July 19, 2019	Perum Jamkrindo
90	*Online Learning* tentang Permenko Online Learning about Coordinating Ministerial Regulations	688	18 Juli 2019 July 18, 2019	18 Juli 2019 July 18, 2019	Perum Jamkrindo
91	Public Workshop Update PSAK Terbaru 72&73 Public Workshop on Update of the Latest PSAK of 72 & 73	2	18 Juli 2019 July 18, 2019	19 Juli 2019 July 19, 2019	Banking & Finance Development Center
92	*Training Of Trainer (TOT)* Kebijakan Bisnis dan Portofolio Training of Trainer (TOT) of Business and Portfolio Policies	3	18 Juli 2019 July 18, 2019	20 Juli 2019 July 20, 2019	Perum Jamkrindo
93	Mentoring Analisa Kredit & Manajemen Subrogasi Batam Mentoring on Credit Analysis & Subrogation Management in Batam	14	19 Juli 2019 July 19, 2019	20 Juli 2019 July 20, 2019	Perum Jamkrindo
94	Pelatihan *Visioning Blueprint* dan *Roadmap* Manajemen Risiko Training on Blueprint Visioning and Risk Management Roadmap	43	19 Juli 2019 July 19, 2019	20 Juli 2019 July 20, 2019	Perum Jamkrindo

No	Nama *Training* Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal / Date Mulai Start	Tanggal / Date Selesai End	Vendor/ Tempat Training Vendor/ Training Place
95	*In House Training* Analisa Laporan Keuangan dan Sertifikasi *Product Knowledge Suretyship* In House Training on Financial Statements Analysis and Suretyship Product Knowledge Certification	25	20 Juli 2019 July 20, 2019	22 Juli 2019 July 22, 2019	Perum Jamkrindo
96	*2019 II A Indonesia National Conference*	1	24 Juli 2019 July 24, 2019	25 Juli 2019 July 25, 2019	The Institute of Internal Auditors Indonesia
97	*Online Learning* tentang Penjaminan Bisnis 2 Online Learning on Business Guarantee 2	646	25 Juli 2019 July 25, 2019	25 Juli 2019 July 25, 2019	Perum Jamkrindo
98	Pengelolaan PPH Pasal 21 yang *effective* dengan Ms. Excel dan eSPT Effective Management of Income Tax Article 21 with Ms. Excel and eSPT	1	25 Juli 2019 July 25, 2019	25 Juli 2019 July 25, 2019	Ortax Training
99	*Public Training Vintage Analysis*	3	26 Juli 2019 July 26, 2019	26 Juli 2019 July 26, 2019	Suryandra Hutama Consultant
100	Hari Mutu Perdir SMK 3 No.3 Perdir 4 VIII 2018 The Quality Day of Board of Directors Regulation on Performance Management System 3 No.3, Board of Directors Regulation 4 VIII of 2018	12	28 Juli 2019 July 28, 2019	28 Juli 2019 July 28, 2019	Perum Jamkrindo
101	Pelatihan dan Sertifikasi Pendamping UMKM UMKM Assistant Training and Certification	5	29 Juli 2019 July 29, 2019	31 Juli 2019 July 31, 2019	Global Entrepreneur Proffesional
102	*Training of Trainers* Analisa Kredit A-Z Training of Trainers on Credit Analysis A-Z	25	31 Juli 2019 July 31, 2019	03 Agustus 2019 August 3, 2019	Perum Jamkrindo
103	*Online Learning* tentang Penjaminan Bisnis 3 Online Learning on Business Guarantee 3	656	01 Agustus 2019 August 1, 2019	01 Agustus 2019 August 1, 2019	Perum Jamkrindo
104	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 Risk Management Certification Debriefing Level 2	25	01 Agustus 2019 August 1, 2019	02 Agustus 2019 August 2, 2019	Perum Jamkrindo
105	*Online Learning* tentang Sistem Resi Gudang Online Learning on Warehouse Receipt System	602	08 Agustus 2019 August 8, 2019	08 Agustus 2019 August 8, 2019	Perum Jamkrindo
106	Hari Mutu Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset Quality Day of Collective Investment Contract - Asset Backed Securities	18	09 Agustus 2019 August 9, 2019	09 Agustus 2019 August 9, 2019	Perum Jamkrindo
107	Mentoring Analisa Kredit & Manajemen Subrogasi Makassar Mentoring on Credit Analysis & Subrogation Management in Makassar	28	23 Agustus 2019 August 23, 2019	24 Agustus 2019 August 24, 2019	Perum Jamkrindo

No	Nama *Training* Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal / Date Mulai Start	Tanggal / Date Selesai End	Vendor/ Tempat Training Vendor/ Training Place
108	*Online Learning* tentang Perencanaan Strategis Online Learning on Strategic Planning	599	29 Agustus 2019 August 29, 2019	29 Agustus 2019 August 29, 2019	Perum Jamkrindo
109	Pelatihan *Querying Microsoft SQL Server* Querying Microsoft SQL Server Training	2	02 September 2019 September 2, 2019	06 September 2019 September 6, 2019	Perum Jamkrindo
110	Pelatihan Manajemen Risiko level 2 Pemimpin Cabang Risk Management Training Level 2 for Branch Manager/ Head of Branch Office	26	05 September 2019 September 5, 2019	06 September 2019 September 6, 2019	Perum Jamkrindo
111	*Online Learning* tentang Klaim Online Learning onClaims	572	05 September 2019 September 5, 2019	05 September 2019 September 5, 2019	Perum Jamkrindo
112	Sertifikasi Professional Financial Modeler Professional Financial Modeler Certification	1	07 September 2019 September 7, 2019	07 September 2019 September 7, 2019	Perum Jamkrindo
113	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 Pinca	28	07 September 2019 September 7, 2019	07 September 2019 September 7, 2019	BNSP
114	Pendidikan Sertifikasi Auditor Hukum	1	09 September 2019 September 9, 2019	13 September 2019 September 13, 2019	YPIA
115	*Capital Market Product: Exchange Traded Fund (EFT),* Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), Dana Investasi Real Estate (DIRE), dan Efek Beragun Aset (EBA)	2	09 September 2019 September 9, 2019	10 September 2019 September 10, 2019	PT BRI
116	Pelatihan Kehumasan di Era #MO	1	11 September 2019 September 11, 2019	12 September 2019 September 12, 2019	Perum Jamkrindo
117	Workshop PSAK 72 & 73	3	11 September 2019 September 11, 2019	12 September 2019 September 12, 2019	Perum Jamkrindo
118	Kehumasan di Era Mobilisasi	1	11 September 2019 September 11, 2019	12 September 2019 September 12, 2019	Rumah Perubahan
119	*Talent Management*	1	11 September 2019 September 11, 2019	12 September 2019 September 12, 2019	PPM Manajemen
120	*Online Learning* tentang Pengadaan Barang dan Jasa	393	12 September 2019 September 12, 2019	12 September 2019 September 12, 2019	Perum Jamkrindo

No	Nama *Training* Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal / Date		Vendor/ Tempat Training Vendor/ Training Place
			Mulai Start	Selesai End	
121	Mentoring Analisa Kredit Makassar oleh Trainer	12	13 September 2019 September 13, 2019	14 September 2019 September 14, 2019	Perum Jamkrindo
122	Program Pengembangan Direksi CWM Executive Program 2019	2	14 September 2019 September 14, 2019	21 September 2019 September 21, 2019	PT Maesa Consulting Indonesia
123	In House Training Perikatan Jaminan dan Kepailitan Percepatan Bisnis	25	14 September 2019 September 14, 2019	14 September 2019 September 14, 2019	Perum Jamkrindo
124	Pelatihan APQO IC & TKMPN 2019	9	16 September 2019 September 16, 2019	17 September 2019 September 17, 2019	Perum Jamkrindo
125	*In House Training* Workshop Strategi Penyusunan RKAP	47	17 September 2019 September 17, 2019	18 September 2019 September 18, 2019	Perum Jamkrindo
126	*Branch Manager Development Program Batch I*	19	18 September 2019 September 18, 2019	21 September 2019 September 21, 2019	Perum Jamkrindo
127	Pelatihan *The Effective Manager Program* di Singapura	3	19 September 2019 September 19, 2019	20 September 2019 September 20, 2019	Rafles Leadership Centre
128	Pelatihan dan UTP PSAK 71	37	20 September 2019 September 20, 2019	21 September 2019 September 21, 2019	Perum Jamkrindo
129	Mentoring Analisa Kredit oleh Trainers	28	24 September 2019 September 24, 2019	24 September 2019 September 24, 2019	Perum Jamkrindo
130	*Branch Manager Development Program Batch II*	17	25 September 2019 September 25, 2019	28 September 2019 September 28, 2019	Perum Jamkrindo
131	*Online Learning* tentang RJPP	393	26 September 2019 September 26, 2019	26 September 2019 September 26, 2019	Perum Jamkrindo
132	Hari Mutu Audit & Auditor Hukum	1	27 September 2019 September 27, 2019	27 September 2019 September 27, 2019	Perum Jamkrindo
133	*Branch Manager Development Program Batch III*	18	02 Oktober 2019 October 2, 2019	05 Oktober 2019 October 5, 2019	Perum Jamkrindo
134	*Digital Leadership*	4	03 Oktober 2019 October 3, 2019	04 Oktober 2019 October 4, 2019	Perum Jamkrindo
135	*Online Learning* tentang Akuntansi	511	03 Oktober 2019 October 3, 2019	03 Oktober 2019 October 3, 2019	Perum Jamkrindo

No	Nama *Training* Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal / Date		Vendor/ Tempat Training Vendor/ Training Place
			Mulai Start	Selesai End	
136	*Workshop Data Analytics*	26	07 Oktober 2019 October 7, 2019	08 Oktober 2019 October 8, 2019	Perum Jamkrindo
137	*Online Learning* tentang PP No 35	450	10 Oktober 2019 October 10, 2019	10 Oktober 2019 October 10, 2019	Perum Jamkrindo
138	Hari Mutu Digital Leadership	2	11 Oktober 2019 October 11, 2019	11 Oktober 2019 October 11, 2019	Perum Jamkrindo
139	Sertifikasi QIA Tingkat Manajerial	1	14 Oktober 2019 October 14, 2019	23 Oktober 2019 October 23, 2019	YPIA
140	PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan Pelanggan dan PSAK 73: Sewa	2	16 Oktober 2019 October 16, 2019	17 Oktober 2019 October 17, 2019	Perum Jamkrindo
141	*The 1st ASEAN CPA Conference*	1	16 Oktober 2019 October 16, 2019	17 Oktober 2019 October 17, 2019	CPA
142	Pendidikan & Pelatihan Bersertifikat Mediator	2	16 Oktober 2019 October 16, 2019	18 Oktober 2019 October 18, 2019	Justitia Training Center
143	*Training Of Trainers* Financial for Non Financial	25	17 Oktober 2019 October 17, 2019	18 Oktober 2019 October 18, 2019	Perum Jamkrindo
144	*Online Learning* tentang Perdir Kedisiplinan	453	17 Oktober 2019 October 17, 2019	17 Oktober 2019 October 17, 2019	Perum Jamkrindo
145	Pelatihan dan Sertifikasi Professional Financial Modeler Professional Financial Modeler Training and Certification	1	19 Oktober 2019 October 19, 2019	14 Desember 2019	Perum Jamkrindo
146	Online Training Finon 1: Memahami Laporan Keuangan Online Training for Finance for Non-Finance 1: Understanding Financial Statements	76	21 Oktober 2019 October 21, 2019	17 November 2019 November 17, 2019	PPM Manajemen
147	TOT Aplikasi PMS KPI Jamkrindo Training of Trainer of Jamkrindo's KPI Performance Management System Application	23	24 Oktober 2019 October 24, 2019	25 Oktober 2019 October 25, 2019	Perum Jamkrindo
148	*Online Learning* tentang Penjaminan Bisnis 1 Online Learning on Business Guarantee 1	553	24 Oktober 2019 October 24, 2019	24 Oktober 2019 October 24, 2019	Perum Jamkrindo
149	*Online Learning* tentang Penjaminan Bisnis 2 Online Learning on Business Guarantee 2	443	30 Oktober 2019 October 30, 2019	30 Oktober 2019 October 30, 2019	Perum Jamkrindo

No	Nama *Training* Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal / Date Mulai Start	Tanggal / Date Selesai End	Vendor/ Tempat Training Vendor/ Training Place
150	*Certification in Audir Committee Practice (CACP) batch XII*	1	05 November 2019 November 5, 2019	07 November 2019 November 7, 2019	Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Institute of Audit Committee
151	*Negotiation Skill For Business*	2	05 November 2019 November 5, 2019	07 November 2019 November 7, 2019	PPM Manajemen
152	Pelatihan Optimalisasi Penanganan Fraud Fraud Handling Optimization Training	2	06 November 2019 November 6, 2019	07 November 2019 November 7, 2019	Kontan Academy
153	*Online Learning* tentang Penjaminan Bisnis 3 Online Learning on Business Guarantee 3	489	07 November 2019 November 7, 2019	07 November 2019 November 7, 2019	Perum Jamkrindo
154	Pendidikan Khusus Provesi Advokat Special education of advocate profession	1	08 November 2019 November 8, 2019	23 November 2019 November 23, 2019	PKPA
155	Seminar Nasional dan Pelatihan Perpajakan BUMN 2019 National Seminar and BUMN Taxation Training 2019	2	11 November 2019 November 11, 2019	13 November 2019 November 13, 2019	Tax Forum BUMN
156	Seminar Sehari Indonesia *Risk Management Outlook* (IRMO) 2020 One Day Seminar on Indonesia Risk Management Outlook (IRMO) 2020	3	12 November 2019 November 12, 2019	12 November 2019 November 12, 2019	LPPI
157	Tips & Trik Negosiasi Penagihan yang Efisien dan Efektif Tips & Tricks of Efficient and Effective Billing Negotiation	2	13 November 2019 November 13, 2019	14 November 2019 November 14, 2019	Kontan Academy
158	Pembekalan Manjamen Risiko lvl 3 Risk Management Debriefing Level 3	30	14 November 2019 November 14, 2019	15 November 2019 November 15, 2019	Perum Jamkrindo
159	Pembekalan Manjamen Risiko lvl 1 Batch 2 Risk Management Debriefing Level 1 Batch 2	30	14 November 2019 November 14, 2019	15 November 2019 November 15, 2019	Perum Jamkrindo
160	*IT Governance Indonesia Professional Camp 2019 IT Business Resilience*	2	14 November 2019 November 14, 2019	15 November 2019 November 15, 2019	Proxsis
161	Uji Sertifikasi Manajemen Risiko lvl 3 Risk Management Certification Test Level 3	30	16 November 2019 November 16, 2019	16 November 2019 November 16, 2019	BNSP

No	Nama *Training* Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal / Date Mulai Start	 Selesai End	Vendor/ Tempat Training Vendor/ Training Place
162	Uji Sertifikasi Manajemen Risiko lvl 1 Bacth 2 Risk Management Certification Test Level 1 Batch 2	40	16 November 2019 November 16, 2019	16 November 2019 November 16, 2019	BNSP
163	*Powerful Business Presentation*	2	19 November 2019 November 19, 2019	21 November 2019 November 21, 2019	PPM Manajemen
164	*Human Capital National Conference 2019*	2	20 November 2019 November 20, 2019	21 November 2019 November 21, 2019	PPM Manajemen
165	*Big Data Analytics AIBEX Bootcamp*	5	20 November 2019 November 20, 2019	21 November 2019 November 21, 2019	Aibex
166	Creative Thingking Technique	1	27 November 2019 November 27, 2019	28 November 2019 November 28, 2019	PPM Manajemen
167	Pelatihan & Sertifikasi Mediator Mediator Training & Certification	1	27 November 2019 November 27, 2019	30 November 2019 November 30, 2019	Justitia Training Center
168	Pembekalan Manajemen Risiko lvl 1 Batch 3 Risk Management Debriefing Level 1 Batch 3	33	28 November 2019 November 28, 2019	29 November 2019 November 29, 2019	Perum Jamkrindo
169	Pembekalan Manajemen Risiko lvl 2 Batch 2 Risk Management Debriefing Level 2 Batch 2	25	28 November 2019 November 28, 2019	29 November 2019 November 29, 2019	Perum Jamkrindo
170	Uji Sertifikasi Manajemen Risiko lvl 1 Bacth 3 Risk Management Certification Test Level 1 Batch 3	40	30 November 2019 November 30, 2019	30 November 2019 November 30, 2019	BNSP
171	Uji Sertifikasi Manajemen Risiko lvl 2 Batch 2 Risk Management Certification Test Level 2 Batch 2	46	30 November 2019 November 30, 2019	30 November 2019 November 30, 2019	BNSP
172	*Effective Business Communication B1*	18	03 Desember 2019 December 3, 2019	04 Desember 2019 December 4, 2019	BNSP

No	Nama *Training* Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal / Date Mulai Start	Tanggal / Date Selesai End	Vendor/ Tempat Training Vendor/ Training Place
173	Pembekalan Manajemen Risiko lvl 1 Batch 4 Risk Management Debriefing Level 1 Batch 4	27	05 Desember 2019 December 5, 2019	06 Desember 2019 December 6, 2019	Perum Jamkrindo
174	Pembekalan Manajemen Risiko lvl 2 Batch 2 Risk Management Debriefing Level 2 Batch 2	24	05 Desember 2019 December 5, 2019	06 Desember 2019 December 6, 2019	Perum Jamkrindo
175	*Effective Business Communication B2*	19	05 Desember 2019 December 5, 2019	06 Desember 2019 December 6, 2019	Perum Jamkrindo
176	Uji Sertifikasi Manajemen Risiko lvl 1 Batch 4 Risk Management Certification Test Level 1 Batch 4	33	07 Desember 2019 December 7, 2019	07 Desember 2019 December 7, 2019	BNSP
177	Uji Sertifikasi Manajemen Risiko lvl 2 Batch 2 Risk Management Certification Test Level 2 Batch 2	32	07 Desember 2019 December 7, 2019	07 Desember 2019 December 7, 2019	BNSP

PERNYATAAN PERSAMAAN HAK

Perum Jamkrindo memperlakukan setiap karyawan dengan adil dan objektif. Setiap karyawan memiliki hak asasi yang sama dan mengemban kewajiban sesuai dengan level jabatan. Hak dan kewajiban karyawan tertera dalam Peraturan Perusahaan dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

Perum Jamkrindo berkomitmen dengan mewujudkan kesejahteraan karyawan baik selama aktif di Perum Jamkrindo maupun di masa pensiun. Sebagai wujud komitmen tersebut, Perum Jamkrindo menyusun standar minium upah karyawan dengan mengacu pada Upah Minimun Regional (UMR) yang ditetapkan pemerintah disesuaikan dengan wilayah kerja di mana Perum Jamkrindo melakukan kegiatan usahanya.

STATEMENT OF RIGHTS EQUATION

Perum Jamkrindo treats every employee fairly and objectively. Every employee has the same basic human rights and has obligations according to the level of the position. Employees' rights and obligations are stated in the Company Regulations and have been socialized to all employees.

Perum Jamkrindo is committed to realizing employee welfare both while active in Perum Jamkrindo and retirement. As a form of this commitment, Perum Jamkrindo has compiled minimum standards for employee wages by referring to the Regional Minimum Wage (UMR) set by the government according to the working area where Perum Jamkrindo conducts its business activities.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
Development of Information Technology



Perkembangan kebutuhan bisnis dan organisasi mengharuskan Perusahaan untuk menata dan membenahi diri dalam menyiapkan teknologi yang dibutuhkan untuk dapat mendukung pengembangan dan perluasan bisnis, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pemangku kepentingan melalui layanan berbasis teknologi informasi. Dalam era globalisasi, keandalan teknologi informasi merupakan salah satu unsur penting yang mendukung proses bisnis dan layanan yang prima. Teknologi merupakan kunci utama yang memungkinkan Perusahaan menyediakan produk dan jasa kepada para pemangku kepentingan, mengukur dan menelusuri kinerja bisnis, serta mengambil keputusan-keputusan manajemen yang tepat untuk kelangsungan usaha ke depannya.

The development of business and organizational needs requires the Company to organize and improve itself in preparing the technology needed to be able to support business development and expansion, as well as providing the best service to stakeholders through information technology-based services. In the globalization era, the reliability of information technology is one of the important elements that support excellent business processes and services. Technology is the main key that enables the Company to provide products and services to stakeholders, measure and track business performance, and make appropriate management decisions for the continuity of the business going forward.

VISI DAN MISI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI PERUM JAMKRINDO

VISI

Pada tahun 2019 dengan mengusung tema *"To **S**ynergize, To Strengthen People & To Strengthen Process"* bagi transformasi Perusahaan menuju Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional.

MISI

1. Menyediakan Solusi Bisnis yang terintegrasi, efisien dan efektif untuk mendukung transformasi Perusahaan.
2. Menyediakan infrastruktur TI yang aman dan andal sesuai dengan perkembangan bisnis.
3. Meningkatkan kematangan atau kapabilitas IT *Governance* sesuai dengan kebutuhan kepatuhan regulasi dan pemenangan persaingan.

VISION AND MISSION OF PERUM JAMKRINDO'S INFORMATION TECHNOLOGY IMPLEMENTATION

VISION

In 2019 with the theme "To Synergize, To Strengthen People & To Strengthen Process" for the Company's transformation towards the Leading Guarantee Company that Supports National Economic Development

MISSION

1. Providing integrated, efficient, and effective business solutions to support the Company's transformation.
2. Providing a secure and reliable IT infrastructure according to business development.
3. Improving the maturity or capability of IT Governance according to the requirements of regulatory compliance and winning competition.

PENERAPAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUP PERUM JAMKRINDO

Dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perusahaan, khususnya dukungan dalam penyediaan infrastruktur kegiatan operasional penjaminan kredit perusahaan, maka pada tahun 2019 Perusahaan melaksanakan beberapa inovasi khususnya di bidang teknologi informasi sebagai berikut:

PENERAPAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUP PERUM JAMKRINDO

1. ***Enterprise Resource Planning (ERP)***

   ERP adalah aplikasi sistem informasi manajemen terintegrasi untuk bisnis/organisasi yang mencakup multi fungsionalitas.

   Implementasi ERP modul *Financial Management* (Akuntansi) ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas kinerja keuangan dan memperkuat kendali dan efisiensi operasional di Perum Jamkrindo khususnya dalam proses pencatatan akuntansi.

   Saat ini sedang dilaksanakan kegiatan implementasi tahap 1 dengan modul berikut ini:

   - Modul Konfigurasi Akun (*GL Journal Entries*).
   - Modul *Accounting*.
   - Modul *Banking* dan *Bank Statement Processing*.
   - Modul *Payment Processing*.
   - Modul Laporan Keuangan.
   - Modul Laporan *Self Service* dan *Dashboard*.
   - Target implementasi Maret 2020.

2. ***Employee Self Service* (ESS)**

   Employee Self Service (ESS) merupakan aplikasi pengelolaan layanan operasional Karyawan Perum Jamkrindo yang dapat diakses melalui *mobile application* (Android / IoS). Manfaat aplikasi ini antara lain: Pengajuan Cuti, Informasi Slip gaji, manfaat kesehatan, perjalan dinas dan lembur.

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS IN PERUM JAMKRINDO

To support the Company's business activities, specifically support in providing infrastructure for the Company's credit guarantee operational activities, in 2019 the Company implemented several innovations in particular in the field of information technology as followed:

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS IN PERUM JAMKRINDO

1. **Enterprise Resource Planning (ERP)**

   ERP is an integrated management information system application for businesses/organizations that includes multiple functionalities.

   The ERP implementation of the Financial Management (Accounting) module aims to increase the visibility of financial performance and strengthen operational control and efficiency at Perum Jamkrindo, especially in accounting records.

   At present, a phase 1 implementation activity is being carried out with the following modules:

   - Account Configuration Module (GL Journal Entries).
   - Accounting Module.
   - Banking and Bank Statement Processing Module.
   - Payment Processing Module.
   - Financial Statement Module.
   - Self Service Report and Dashboard Module.
   - March 2020 implementation target.

2. **Employee Self Service (ESS)**

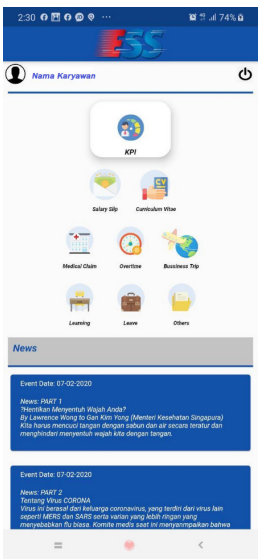

Employee Self Service (ESS) is an operational service management application for Perum Jamkrindo employees that can be accessed through a mobile application (Android / IoS). Benefits of this application include Filing Leave, Salary slip information, health benefits, official travel, and overtime.

3. *SnapJam / E-Office*

Aplikasi *snapjam (e-office*) yang dapat diakses melalui web dan *mobile application* yang bertujuan untuk meningkatkan layanan korespondensi surat-menyurat bagi setiap unit kerja secara elektronis dan *paperless*.

Sejak bulan April 2019, Snapjam (*eOffice)* telah diimplementasikan di seluruh Indonesia. Aplikasi pengelolaan persuratan ini dapat diakses via *Web Apps* dan *Mobile Apps* (tersedia versi Android dan IOS).

Dengan terimplementasinya Snapjam maka proses korespodensi surat-menyurat dapat lebih cepat dan efisien karena dapat dilakukan dimana saja (dapat diakses publik).

Untuk menjaga keamanan informasi di dalamnya maka Snapjam diperkuat dengan enkripsi SSL RSA 256 bit.

3. SnapJam / E-Office

Snapjam (e-office) application can be accessed through the web and mobile applications that aim to improve correspondence services for each work unit electronically and paperless.

Since April 2019, Snapjam (eOffice) has been implemented throughout Indonesia. This mail management application can be accessed via Web Apps and Mobile Apps (available in Android and IOS versions).

With the implementation of Snapjam, the correspondence process can be faster and more efficient because it can be done anywhere (accessible to the public).

To maintain the security of information in it, Snapjam is strengthened with 256-bit RSA SSL encryption.



4. *Mobile Apps Suretyship*

Merupakan aplikasi *Suretyship self-service* yang dapat diakses melalui *mobile* maupun *web*. Aplikasi telah diluncurkan pada bulan Juli 2019 untuk platform web dan mobile.

Calon terjamin dapat melakukan *input* secara mandiri dan dari Perum Jamkrindo yang berwenang untuk melakukan *approval*. Untuk kebutuhan Administrasi dokumen dapat dilakukan melalui aplikasi (*online*) maupun di luar aplikasi (*offline*).

Link : https://play.google.com/store/apps/details?id=id.co.jamkrindo.suretyshiponline

4. Suretyship Mobile Apps

It is a self-service Suretyship application that can be accessed via mobile or the web. The application was launched in July 2019 for web and mobile platforms.

The Guaranteed candidates can input independently and from Perum Jamkrindo authorized to conduct approval. For administrative needs, documents can be done through the application (online) or outside the application (offline).

Link : https://play.google.com/store/apps/details?id=id.co.jamkrindo.suretyshiponline

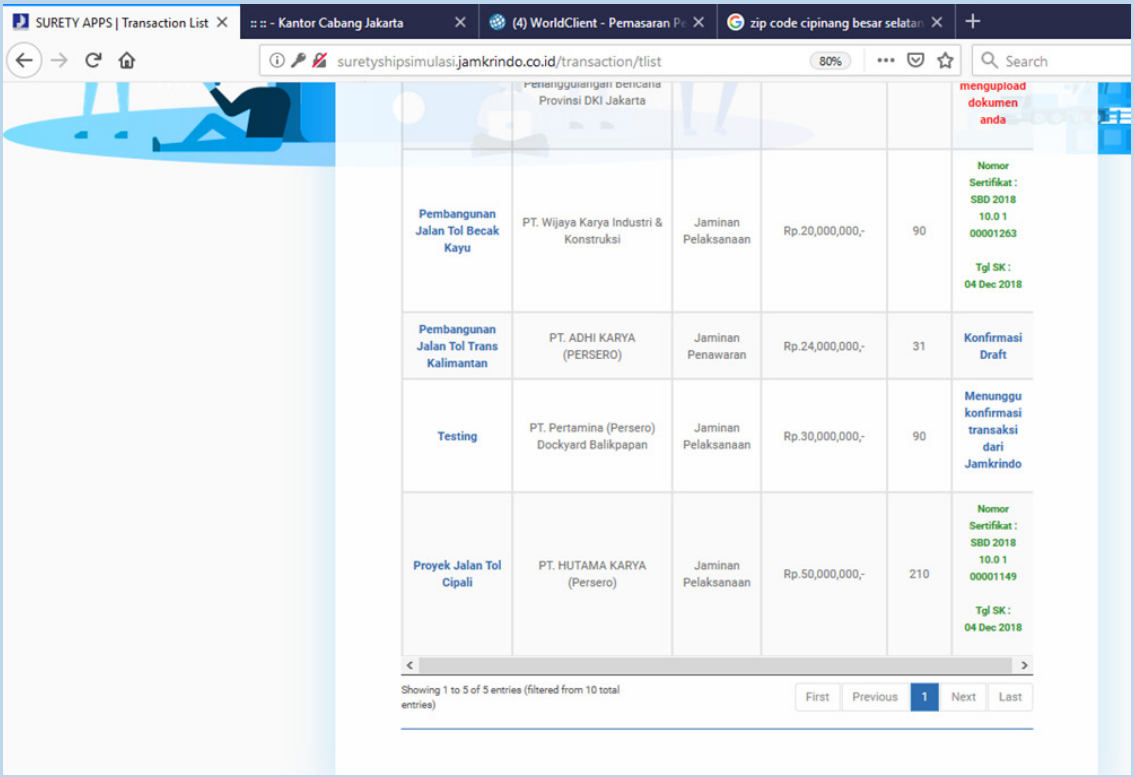
SURETY APPS | Transaction List
:: :: - Kantor Cabang Jakarta
(4) WorldClient - Pemasaran
zip code cipinang besar selatan
suretyshipsimulasi.jamkrindo.co.id/transaction/tlist
80%
Search
Provinsi DKI Jakarta
mengupload dokumen anda
Pembangunan Jalan Tol Becak Kayu
PT. Wijaya Karya Industri & Konstruksi
Jaminan Pelaksanaan
Rp.20,000,000,-
90
Nomor Sertifikat : SBD 2018 10.0 1 00001263
Tgl SK : 04 Dec 2018
Pembangunan Jalan Tol Trans Kalimantan
PT. ADHI KARYA (PERSERO)
Jaminan Penawaran
Rp.24,000,000,-
31
Konfirmasi Draft
Testing
PT. Pertamina (Persero) Dockyard Balikpapan
Jaminan Pelaksanaan
Rp.30,000,000,-
90
Menunggu konfirmasi transaksi dari Jamkrindo
Proyek Jalan Tol Cipali
PT. HUTAMA KARYA (Persero)
Jaminan Pelaksanaan
Rp.50,000,000,-
210
Nomor Sertifikat : SBD 2018 10.0 1 00001149
Tgl SK : 04 Dec 2018
Showing 1 to 5 of 5 entries (filtered from 10 total entries)
First
Previous
1
Next
Last

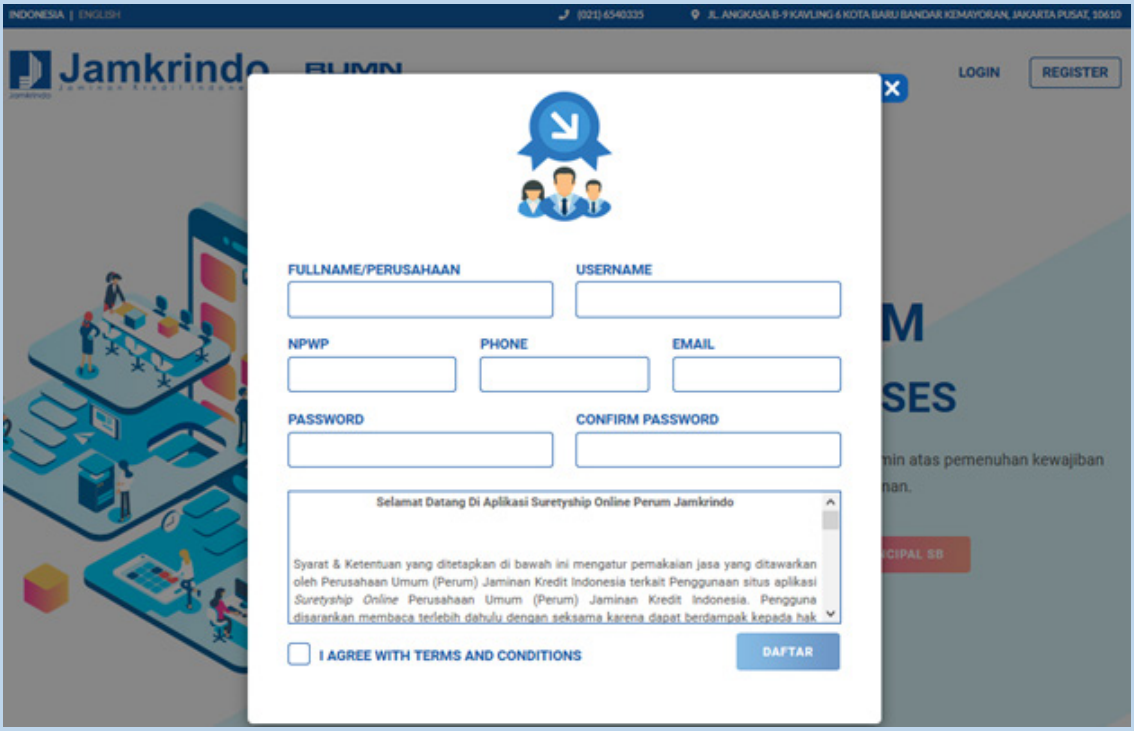
INDONESIA | ENGLISH
(021) 6540335
JL. ANGKASA B-9 KAVLING 6 KOTA BARU BANDAR KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT, 10610
Jamkrindo
LOGIN
REGISTER
FULLNAME/PERUSAHAAN
USERNAME
NPWP
PHONE
EMAIL
PASSWORD
CONFIRM PASSWORD
Selamat Datang Di Aplikasi Suretyship Online Perum Jamkrindo
Syarat & Ketentuan yang ditetapkan di bawah ini mengatur pemakaian jasa yang ditawarkan oleh Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia terkait Penggunaan situs aplikasi Suretyship Online Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Pengguna disarankan membaca terlebih dahulu dengan seksama karena dapat berdampak kepada hak
I AGREE WITH TERMS AND CONDITIONS
DAFTAR

5. *WAN Optimization & Link Balancer*

WAN Optimization merupakan perangkat yang memiliki kemampuan untuk mendukung kinerja aplikasi bisnis dengan mengatasi permasalahan *latency* dan pengaturan *bandwidth* antara Unit Kerja dengan *Data Center*.

Link Balancer adalah perangkat yang memiliki kemampuan melakukan mekanisme aktif - aktif dengan *balancing* di kedua jalur interkoneksi VPN IP. Selain itu perangkat ini dapat melakukan mekanisme *fail-over* secara otomatis ketika salah satu jalur terputus dan melakukan koneksi secara otomatis dengan menggunakan VPN via internet jika kedua jalur MPLS terputus.

WAN *Optimization* ditempatkan di *Hybrid Cloud Multi* DC dan Kantor Pusat dimana saat ini interkoneksi selindo masih melalui Kantor Pusat sebagai penghubung. Sedangkan penempatan *Link Balancer* dilakukan di seluruh Kantor Unit Kerja Perum Jamkrindo agar dapat menjamin ketersediaan interkoneksi dalam mendukung system informasi perusahaan.

6. *Enterprise Service Bus (ESB)*

Enterprise Service Bus merupakan suatu model arsitektur yang digunakan untuk mendesain dan mengimplementasikan komunikasi antara program aplikasi dalam *Service Oriented Architecture* (SOA).

Enterprise Service Bus juga dapat dipandang sebagai layer yang menghubungkan antara *front-end application* dengan *back-end application*.

Projek Implementasi ***Enterprise Service Bus*** yang dimulai sejak 2019 saat ini dikembangkan menggunakan platform Redhat Fuse dengan menggunakan metode kolaborasi antara tenaga *insource* dan *outsource*. Sehingga diharapkan *transfer knowledge* dan pengerjaan dapat dengan cepat dilakukan.

Dikarenakan memiliki keuntungan sebagai sebuah *software* yang terletak diantara aplikasi atau yang lebih dikenal dengan adaptor/ broker, maka keberadaannya harus dibangun berdasarkan standar dan fleksibel sehingga dapat digunakan untuk fitur penghubung aplikasi-aplikasi lain yang luas seperti aplikasi layanan *online host to host*.

Selain itu, dengan arsitektur aplikasi berbasis *microservice* ke depan, fungsi ***Enterprise Service Bus*** ini menjadi *support* dalam hal integrasi *enterprise* sehingga memberikan solusi integrasi yang lebih cepat.

5. WAN Optimization & Link Balancer

WAN Optimization is a device that can support the performance of business applications by addressing the problems of latency and bandwidth settings between Work Units and Data Centers.

Link Balancer is a device that can carry out active mechanisms active by balancing on both VPN IP interconnect lines. Besides, this device can automatically perform a fail-over mechanism when one of the lines is cut off and automatically connects using a VPN via the internet if both MPLS lines are cut off.

WAN Optimization is placed in Hybrid Cloud Multi DC and Head Office, where the interconnection of Selindo is currently still through the Headquarters as a liaison. In contrast, the placement of Link Balancer is carried out in all work unit offices of Perum Jamkrindo to guarantee the availability of interconnection in supporting the Company's information system.

6. Enterprise Service Bus (ESB)

The Enterprise Service Bus is an architectural model used to design and implement communication between application programs in Service Oriented Architecture (SOA).

The Enterprise Service Bus can also be seen as a layer that connects a front-end application with a back-end application.

The Enterprise Service Bus Implementation Project, established in 2019, was developed using the Redhat Fuse platform by using the collaboration method between insourcing and outsourced personnel. So hopefully, the transfer of knowledge and workmanship can be done quickly.

Because it has the advantage of being a software located between applications or better known as adapters/ brokers, its existence must be built based on standards and flexibility so that it can be used to connect other broad application features such as host to host online service applications.

Besides, with the microservice-based application architecture going forward, the Enterprise Service Bus function becomes support in terms of enterprise integration to provide a faster integration solution.

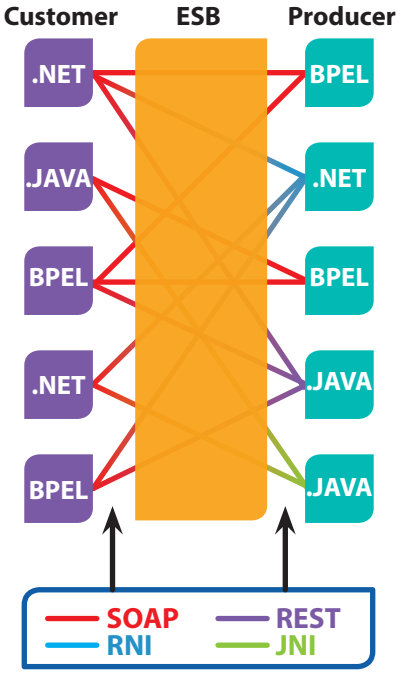

COMPOSING MICROSERVICES WITH FUSE

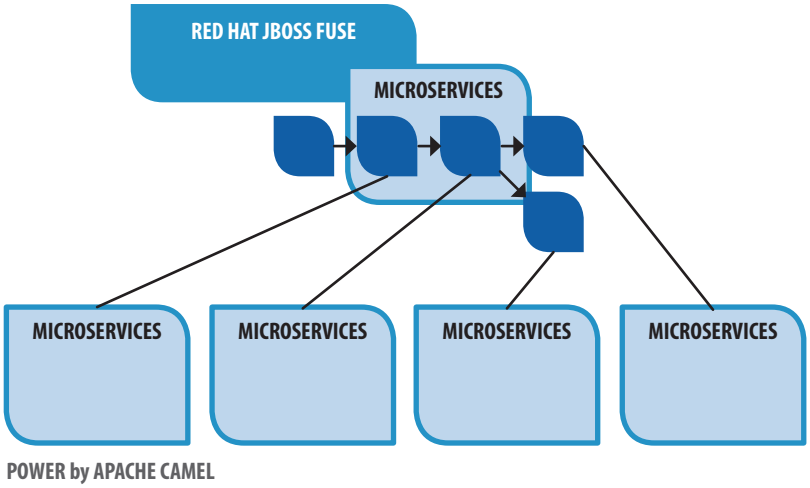

7. Platform Market Place Guarantee (MPG)

Market Place Guarantee (MPG)/ UMKM Layak merupakan sebuah *platform* digital yang dibuat dengan tujuan mengakomodir kebutuhan UMKM, yaitu kebutuhan untuk mengakses pembiayaan dan kebutuhan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan.

MPG adalah *tool/ platform* yang digunakan bertujuan untuk:

a. Agar tersedianya sarana dan prasana untuk mendukung optimalisasi pasar dan mitra penjaminan
b. Agar tersedianya database UMKM yang komprehensif
c. Tersedianya informasi profil UMKM yang akurat
d. Membantu UMKM dalam mengakses layanan keuangan

Saat ini **UMKM Layak** telah dapat diakses dan telah bekerjasam dengan beberapa pihak untuk membantu mendukung optimalisasi pasar dan mitra penjaminan.

Ke depan akan dikembangkan sebagai *database* UMKM, baik terjamin maupun calon terjamin yang layak. Termasuk dengan melakukan sinergi dengan *platform* UMKM lainnya, seperti perijinan, jasa konsultasi. Diharapkan dengan adanya sinergi platform lain tersebut, konsep data sharing dapat berjalan.

7. Market Place Guarantee (MPG) Platform

Decent Market Place Guarantee (MPG)/MSMEs is a digital platform created to accommodate the needs of MSMEs, namely the need to access financing and attend training.

MPG is a tool/platform that is used, aiming to:

a. To provide facilities and infrastructures to support market optimization and guarantee partners
b. To provide a comprehensive MSMEs database
c. The availability of accurate MSMEs profile information
d. Helping MSMEs in accessing financial services

At present, MSMEs Eligible is accessible and has collaborated with several parties to help support market optimization and guarantee partners.

In the future, it will be developed as a database of MSMEs, both guaranteed and decent prospective guaranteed. Including by synergizing with other MSME platforms, such as licensing, consulting services. It is expected that with the synergy of other platforms, the concept of data sharing can work.

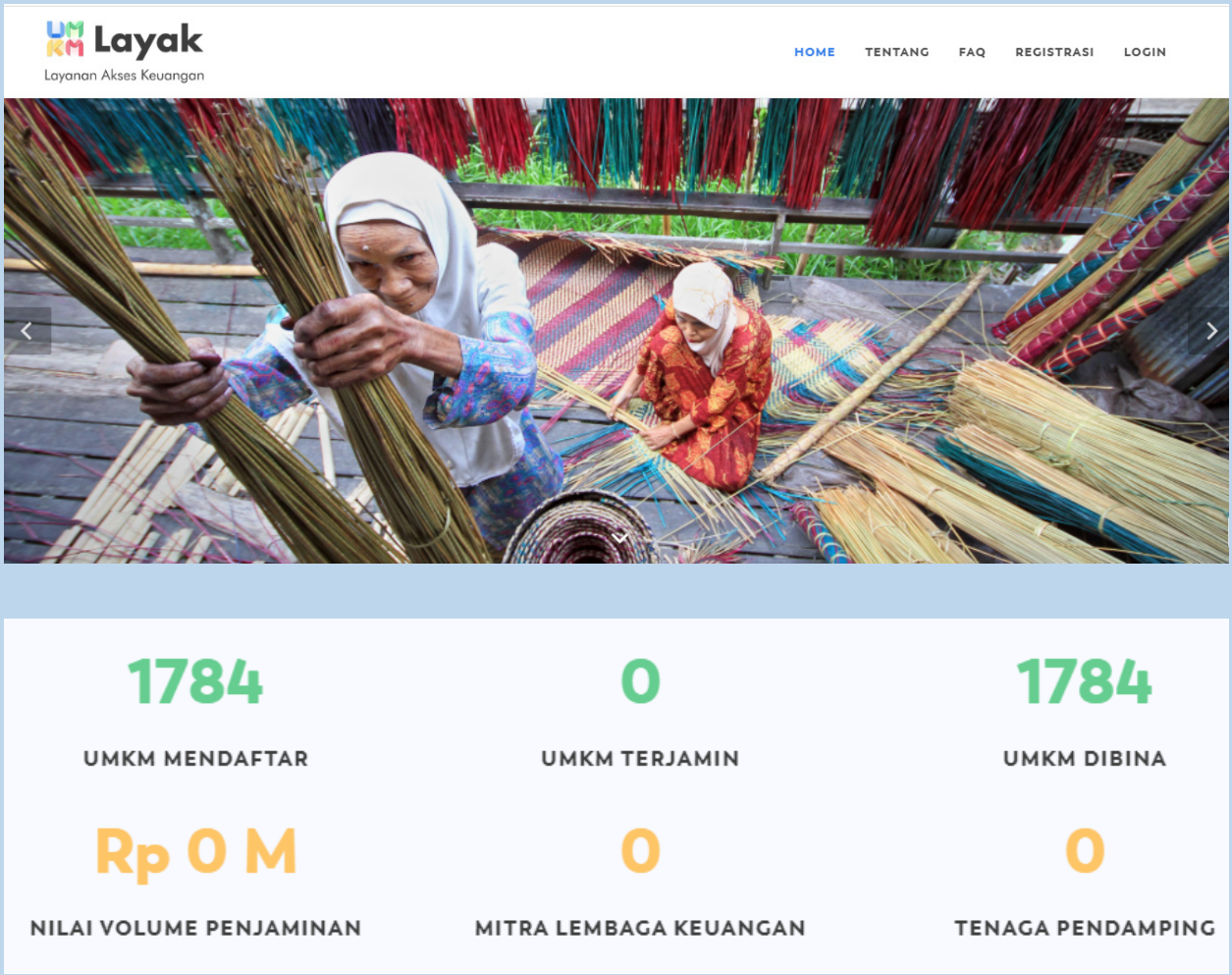
UMKM Layak
Layanan Akses Keuangan
HOME
TENTANG
FAQ
REGISTRASI
LOGIN
1784
UMKM MENDAFTAR
0
UMKM TERJAMIN
1784
UMKM DIBINA
Rp 0 M
NILAI VOLUME PENJAMINAN
0
MITRA LEMBAGA KEUANGAN
0
TENAGA PENDAMPING


UMKM Layak
Layanan Akses Keuangan
HOME
TENTANG
FAQ
REGISTRASI
LOGIN
MITRA
UMKM Layak memiliki mitra dari tingkat pusat sampai daerah
BDS Indonesia
Indonesian Business Development Services
BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BDS Indonesia
Indonesian Business Development Services
BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

8. Aplikasi Pengelola Acara

Aplikasi Pengelola Acara merupakan aplikasi *mobile* dan web (khusus admin) untuk digunakan khususnya dalam *event-event* korporat. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur antara lain unduh materi kegiatan, keterangan pengisi acara, dan absensi kegiatan yang dapat dipantau langsung secara *online*.

8. Event Manager Application

The Event Manager Application is a mobile and web application (admin only) to be used, especially in corporate events. This application has several features, including the download of activity material, information on the event filler, and the attendance of activities that can be monitored directly online.

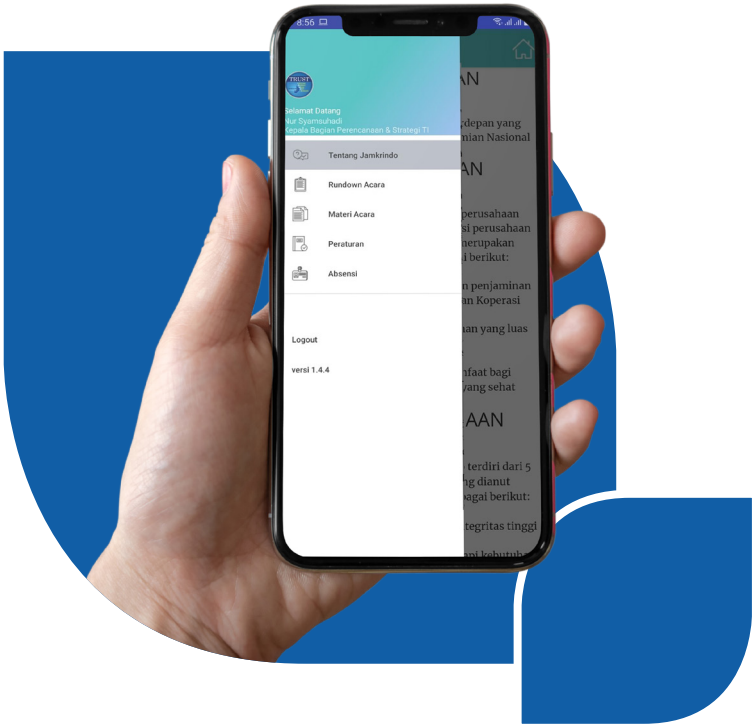

9. Privileged Access Management (PAM)

Privileged Access Management adalah controler yang mengatur dan menjamin kerahasiaan *password* akses serta mengawasi aktivitas *user* yang memiliki *privileged access*.

Solusi *Privileged Access Management* adalah untuk mengatur dan menjamin kerahasiaan *password* akses, mengawasi aktivitas *user* yang memiliki *privileged access,* dan mampu menganalisis ancaman yang berpotensi menyerang keamanan informasi penting perusahaan yang dapat diakses melalui *user* yang memiliki hak akses tersebut.

10. Network Access Control (NAC)

***Network Access Control (NAC)/* Kendali Akses Jaringan** adalah pendekatan keamanan jaringan komputer yang untuk menyatukan kerja endpoint teknologi keamanan (seperti antivirus dan *firewall*), identifikasi user atau sistem, dan pelaksanaan keamanan jaringan.

9. Privileged Access Management (PAM)

Privileged Access Management is a controller that manages and guarantees the confidentiality of access passwords and monitor the users' activities who have privileged access.

Privileged Access Management's solution is to manage and guarantee the confidentiality of access passwords, monitor the users' activities who have privileged access, and analyze threats that potentially attack the security of important company information that can be accessed through users who have access rights.

10. Network Access Control (NAC)

Network Access Control (NAC) is a computer network security approach that unites the work of security technology endpoints (such as antivirus and firewall), the user identification or system, and implementation of network security.

NAC berfungsi Untuk mendukung Penerapan standar keamanan *network* Sistem Teknologi Informasi Komputer (TIK) berbasis ISO 27001:2013 di lingkungan Perum Jamkrindo serta merupakan salah satu solusi dalam menghadapi ancaman TIK yang mampu dikelola dengan baik menjadi salah satu strategi untuk mendukung bisnis dalam memberikan layanan yang terbaik kepada penggunak internal, agen dan mitra, yaitu layanan yang handal, mudah dan aman.

11. Next Generation Firewall (NGFW)

Next-generation firewall (NGFW) adalah bagian dari teknologi *firewall* generasi ketiga yang diimplementasikan dalam perangkat keras atau perangkat lunak. NGFW mampu mendeteksi dan memblokir serangan dengan memberlakukan kebijakan keamanan di tingkat aplikasi, port dan protocol.

NGFW dapat memblokir *malware* sebelum memasuki jaringan, sesuatu yang sebelumnya tidak dapat dilakukan dengan *firewall* biasa. NGFW menjadi alternatif rendah biaya bagi perusahaan yang berusaha meningkatkan keamanan perangkat dasar melalui penggunaan layanan inspeksi, dan sistem perlindungan.

12. Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) atau *Information Security Management System* (ISMS)

Standar ISO 27001:2013 merupakan salah satu standar dalam Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) atau *Information Security Management System* (ISMS), yang memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi dalam usaha mereka untuk mengevaluasi, mengimplementasikan dan memelihara keamanan informasi di organisasi berdasarkan "*best practise*" dalam pengamanan informasi.

Sejak tahun 2019, Jamkrindo telah mengikuti sertifikasi ISO 27001:2013 dengan nomor sertifikat IS 705223 dengan Ruang lingkup sertifikasi: Pengelolaan Pemantauan (*Monitoring*) Aplikasi Penjaminan oleh Divisi Teknologi Informasi Perum Jamkrindo.

13. HYBRID CLOUD MULTI DATA CENTER

Pengertian *hybrid cloud* adalah campuran dari *public cloud* dengan *private cloud*. Aktivitas yang rahasia tidak akan dilakukan dengan *public cloud* sedangkan kegiatan rahasia yang dilakukan oleh perusahaan akan diubah menjadi *private cloud*. *Hybrid cloud* ini akan mengelola *private cloud* dan juga *public cloud* secara bersama menggunakan tool pada lingkungan cloud yang berbeda.

Manfaat dari *hybrid cloud* yaitu: Manfaat yang pertama adalah dengan *hybrid cloud* ini pengambil keputusan IT akan memiliki kontrol yang lebih besar terhadap komponen *private*

NAC serves to support the implementation of network security standards of Computer Information Technology System (ICT) based on ISO 27001: 2013 in Perum Jamkrindo environment and is one of the solutions in dealing with the ICT threat that can be managed well into one strategy to support businesses in providing the best service to internal users, agents and partners, namely reliable, easy and safe services.

11. Next-Generation Firewall (NGFW)

Next-generation firewall (NGFW) is part of a third-generation firewall technology that is implemented in hardware or software. NGFW can detect and block attacks by enforcing security policies at the application, port, and protocol level.

NGFW can block malware before entering the network, something that previously could not be done with a normal firewall. NGFW is a low-cost alternative for the Company that seeks to improve basic device security through the use of inspection services and protection systems.

12. Information Security Management System (ISMS)

ISO 27001: 2013 standard is one of the standards in the Information Security Management System (ISMS), which provides an overview in general of what must be done by an organization in their efforts to evaluate, implement and maintain information security in organizations based on "best practice" in information security.

Since 2019, Jamkrindo has followed ISO 27001: 2013 certification with certificate number IS 705223 with the certification scope: Guarantee Applications Monitoring of by Perum Jamkrindo's Information Technology Division.

13. HYBRID CLOUD MULTI DATA CENTER

Understanding hybrid cloud is a mixture of public cloud and private cloud. Confidential activities will not be carried out with the public cloud, while confidential activities carried out by the Company will be changed to private clouds. This hybrid cloud will manage the private cloud and public cloud together using tools in different cloud environments.

The benefits of hybrid cloud are: First, with this hybrid cloud, IT decision-makers will have greater control over the private component than the previously packaged

dibandingkan dengan publik yang dikemas sebelumnya. semua hal yang diinginkan termasuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas untuk kebutuhan yang berbeda.

Manfaat lainnya adalah dengan menggunakan *hybrid cloud* ini akan memiliki infrastruktur komputasi lokal yang mana bisa mendukung beban kerja rata-rata untuk bisnis Anda, sekaligus bisa mempertahankan kemampuan dalam memanfaatkan *public cloud* jika menemui keterbatasan sumber daya yang beban kerjanya melebihi dari kapasitas komputasi perusahaan.

Untuk saat ini Perum Jamkrindo masih menggunakan *private cloud* dan belum menggunakan *hybrid* dikarenakan untuk kapasitas plan di awal TW 1 untuk kapasitas dari private cloud yang dimiliki masih mencukupi.

Untuk rencana pengembangan hybrid cloud Multi data Center akan dilakukan mulai TW 2 2020 saat project aplikasi sudah mulai di implementasikan karna kapasitas dari private cloud yang dimiliki Perum Jamkrindo tidak dapat mengcover penambahan dari *resource* yang dibutuhkan.

14. APLIKASI PENJAMINAN TERPADU

Aplikasi Penjaminan Terpadu dikembangkan untuk mengatasi kekurangan yang ada pada aplikasi penjaminan yang telah ada. Aplikasi-aplikasi yang sebelumnya terpisah digabung menjadi satu dan terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain. Sistem yang lebih dinamis dibutuhkan agar dapat memenuhi kebutuhan proses bisnis perusahaan.

Terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi pendukung lain yang dijembatani oleh teknologi *Enterprise Service Bus*.

Pada pengembangan Tahap 1 ini dikembangan beberapa fitur antara lain:

- *Master Data*.
- Pengelolaan IJP.
- Penerbitan Sertifikat.
- *End of Day*.
- Kewenangan *Maker Checker Signer*.
- Target implementasi Maret 2020.

Tahap 2 selanjutnya akan dikembangan beberapa fitur antara lain:

- Pengajuan dan Approval Klaim.
- Banding Klaim.
- Berkas Klaim.
- Subrogasi.
- Optimalisasi dan Standarisasi Penjaminan Online
- Target pelaksanaan April 2020 s.d Agustus 2020.

public. All things desired include increasing efficiency and flexibility for different needs.

Another benefit is that using this hybrid cloud will have a local computing infrastructure that can support the average workload for your business while also maintaining the ability to utilize public cloud if it has limited resources whose workload exceeds the Company's computing capacity.

At the moment, Perum Jamkrindo still uses a private cloud and has not used hybrid due to the capacity of the plan at the beginning of TW 1, the capacity of the private cloud owned is still sufficient.

The Multi Data Center hybrid cloud development plan will be carried out starting the 2nd Quarter of 2020 when the application project has begun to be implemented because the capacity of private cloud owned by Perum Jamkrindo cannot cover the addition of the required resources.

14. 1.14 INTEGRATED GUARANTEE APPLICATION

The Integrated Guarantee application was developed to overcome the deficiencies that exist in the existing guarantee application. Previously separated applications are combined into one and integrated with other applications. A more dynamic system is needed to meet the needs of the Company's business processes.

It is integrated with other supporting applications that are bridged by Enterprise Service Bus technology.

In the development of Phase 1, several features were developed, including:

- Master Data.
- IJP Management.
- Certificate Issuance.
- End of Day.
- Maker Checker Signer Authority.
- March 2020 implementation target.

Phase 2 will further develop several features, including:

- Submission and Claims Approval.
- Claim Appeal.
- Claim file.
- Subrogation.
- Optimization and Standardization of Online Guarantees
- Target for implementation from April 2020 to August 2020.

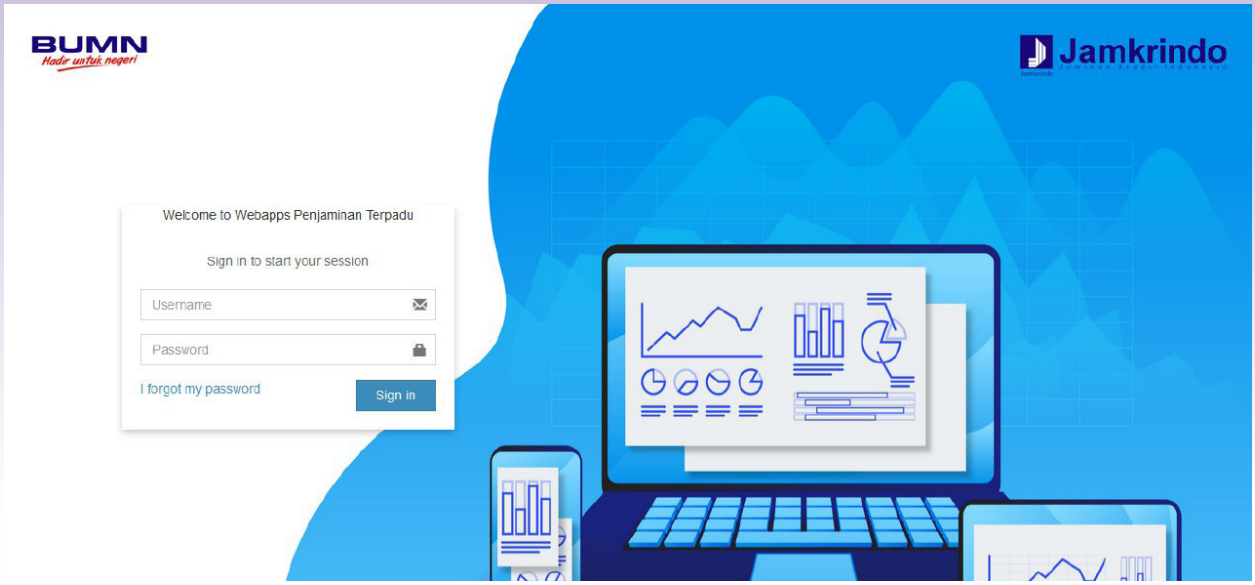

Fitur Validasi Tarif

Merupakan fitur peringatan dini (EWS) yang membandingkan antara IJP yang diinput ke dalam aplikasi dengan data dasar Tarif yang berdasarkan PKS/SOP/ Petunjuk Teknis, untuk mendukung kebijakan atas resiko kekurangan pembayaran IJP sebagaimana diatur dalam Memorandum Nomor B.01/ INT/DIRUT/STF/XII perihal: Kebijakan Atas resiko Operasional Kekurangan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Kelebihan Pembayaran Klaim.

Fitur *Blacklist*

Penambahan fitur pengecekan atas calon terjamin *Suretyship* yang telah klaim dan belum lunas subrogasinya dimana pengajuan tidak dapat dilanjutkan dalam fase persetujuan oleh *checker-signer*.

Aplikasi Koreksi

Aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan Kantor Cabang melakukan koreksi data secara mandiri.

Ruang lingkup fitur koreksi meliputi:

a. Koreksi data Penjaminan (*Aproval* Kantor Cabang, kecuali KUR dilakukan oleh Kantor Cabang dan Divisi Bisnis 1).
b. Koreksi data Klaim (*Aproval* Kanwil).
c. Koreksi data Subrogasi (*Aproval* Kantor Cabang).
d. Koreksi data *Feebase* dan Agen (*Aproval* Kantor Cabang).
e. Beberapa koreksi yang belum dapat diakomodasi oleh fitur koreksi adalah :
f. Koreksi nilai *coverage*.
g. Koreksi nomor rekening terjamin.
h. Koreksi kantor cabang penerima jaminan.
i. Untuk keterbatasan ini, proses koreksi harus dilakukan oleh Divisi TI dengan persetujuan Divisi/ *Desk* pengelola bisnis.

Tariff Validation Feature

It is an early warning feature (EWS) that compares IJP inputted into the application with basic data rates based on PKS / SOP / Technical Guidelines, to support policies for the risk of underpaid IJP payments as stipulated in Memorandum Number B.01 / INT / DIRUT / STF / XII concerning: Policy on Operational Risk of Guarantee Fee (IJP) Underpayment and Claim Overpayment.

Blacklist feature

Additional checking features for Suretyship guaranteed candidates who have claimed and have not yet paid off their subrogations where the submission cannot be continued in the approval phase by the checker-signer.

Correction Application

It is an application that serves to facilitate the Branch Office to independently correct the data.

The scope of correction features includes:

a. Correction of Guarantee data (Branch Office Approval, except KUR, is done by Branch Offices and Business 1 Division).
b. Claim data correction (Regional Office Approval).
c. Subrogation data correction (Branch Office Approval).
d. Freebase and Agent data correction (Branch Office Approval).
e. Some corrections that cannot be accommodated by the correction feature are:
f. Coverage values correction.
g. Guaranteed account number corrected.
h. Correction of the branch office of the guarantee recipient.
i. For this limitation, the correction process must be carried by the IT Division with the approval of the Business Management Division/Desk.

15. Kerja Sama Integrasi DUKCAPIL

Ditjen Dukcapil merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Ditjen Dukcapil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama dengan Dukcapil memiliki manfaat yang sangat strategis terutama dalam mendukung proses *Know Your Customer*. Kerjasama ini berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap keaslian identitas calon terjamin

Saat ini pengelolaan verifikasi data telah berjalan dalam melakukan pengumpulan informasi terkait calon terjamin.

16. Kerjasama Dengan Pefindo Biro Kredit

PEFINDO Biro Kredit merupakan pelopor biro kredit swasta di Indonesia. PEFINDO Biro Kredit adalah Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP)—sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No.15/1/PBI/2013 tanggal 18 Februari 2013—atau dikenal juga sebagai Biro Kredit Swasta. PEFINDO Biro Kredit memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan pada 22 Desember 2015 dan mulai beroperasi secara komersial sejak 27 Maret 2017 melalui peluncuran produk *credit score & report*.

PEFINDO Biro Kredit didirikan atas prakarsa PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), perusahaan pemeringkat efek (credit rating agency) terdepan di Indonesia yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam pemeringkatan serta pengelolaan data sensitif dan rahasia. Susunan pemegang saham PEFINDO Biro Kredit saat ini adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), PT Pegadaian (Persero), PT TASPEN (Persero), PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma), PT Consumer Information Consulting, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PEFINDO Biro Kredit menghimpun data kredit dari lembaga keuangan dan data non-kredit dari beberapa instansi publik beserta lembaga yang telah bekerja sama untuk menjadi sumber data. Data tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk informasi yang komprehensif dan bernilai tambah.

Pemanfaatan Pefindo Biro Kredit telah berperan dalam mendukung skoring calon terjamin, dengan menambah informasi kredibilitas calon terjamin. Dalam hal ini telah terdapat fasilitas proses integrasi data UMKM dari Pefindo

15. 1.15 DUKCAPIL Integration Cooperation

The Directorate General of Population and Civil Registration is the implementer elements of the Ministry of Home Affairs in population and civil registration. The Dukcapil Directorate General is subordinate and responsible to the Minister.

The Directorate General of Population and Civil Registration has the duties of carrying out the formulation and implementation of policies in population and civil registration according to statutory provisions.

Cooperation with Dukcapil has very strategic benefits, especially in supporting the Know Your Customer process. This collaboration serves to check the authenticity of the guaranteed candidate identity.

Currently, the management of data verification has been running in collecting information related to guaranteed candidates.

16. 1.16 Collaboration with Pefindo Credit Bureau

PEFINDO Credit Bureau is a pioneer of private credit bureaus in Indonesia. PEFINDO Credit Bureau is a Credit Information Management Agency (LPIP) —as Bank Indonesia Regulation No.15 / 1 / PBI / 2013 dated February 18, 2013 — also known as the Private Credit Bureau. PEFINDO Credit Bureau obtained an operational permit from the Financial Services Authority on December 22, 2015, and began operating commercially since March 27, 2017, through the launch of a credit score & report product.

PEFINDO Credit Bureau was established on the initiative of PT Indonesian Rating Agency (PEFINDO), a leading credit rating agency in Indonesia that has more than 20 years of experience in rating and managing sensitive and confidential data. The current shareholders of the PEFINDO Credit Bureau are PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), PT Pegadaian (Persero), PT TASPEN (Persero), PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma), PT Consumer Information Consulting, Indonesian Financial Services Association (APPI).

In carrying out its business activities, PEFINDO Credit Bureau collects credit data from financial institutions and non-credit data from several public agencies and institutions that have worked together to become data sources. The data is then processed and presented in the form of comprehensive and value-added information.

The use of the Pefindo Credit Bureau has a role in supporting the scoring of guaranteed candidates by adding information on guaranteed candidates' credibility. In this case, there has been a facility to integrate MSME

kredit dengan aplikasi PUMK terkait data perkreditan score dan report informatif (informasi calon terjamin, pefindo score, fasilitas kredit, agunan, surat berharga, dsb).

Pemanfaatan Pefindo Biro Kredit telah berperan dalam mendukung skoring calon terjamin, dalam hal ini telah terdapat fasilitas proses integrasi data UMKM dari Pefindo kredit dengan aplikasi PUMK terkait data perkreditan score dan report informatif (informasi calon terjamin, pefindo score,fasilitas kredit, agunan, surat berharga dsb).

data from Pefindo Credit with the PUMK application related to credit score and informative report data (guaranteed candidates information, Pefindo score, credit facilities, collateral, securities, etc.).

Utilization of PEFINDO Credit Bureau has a role in supporting the scoring of guaranteed candidates, in this case, there has been a process of MSME data integration process from Pefindo credit with PUMK application related to credit score data and informative reports (information of guaranteed candidates, PEFINDO score, credit facilities, collateral, securities, etc.)

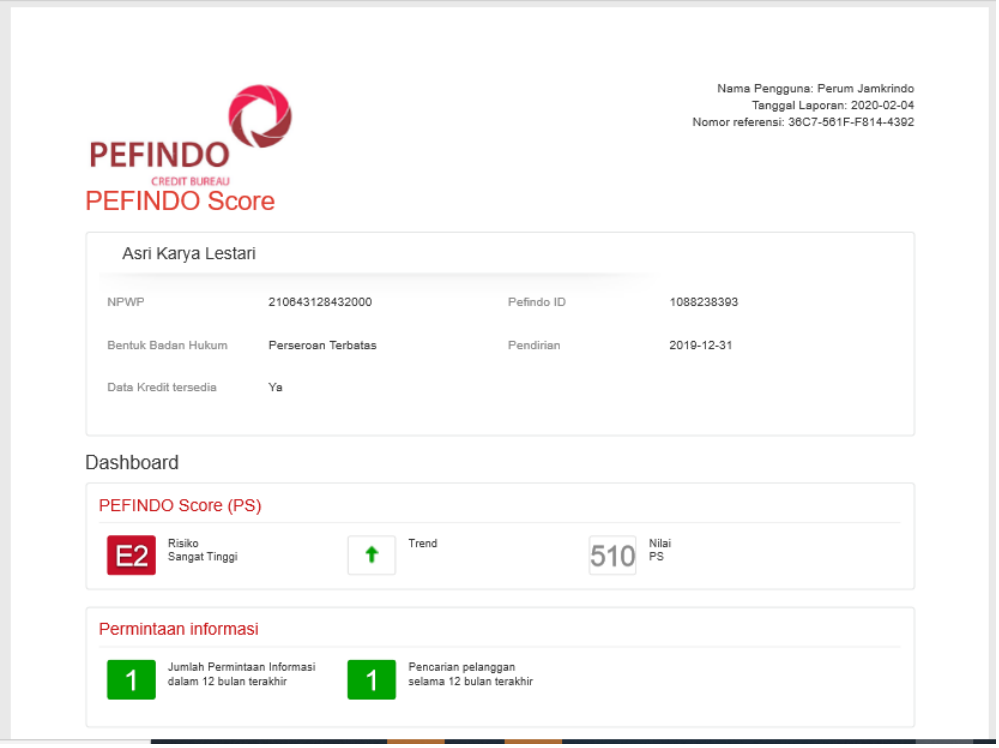

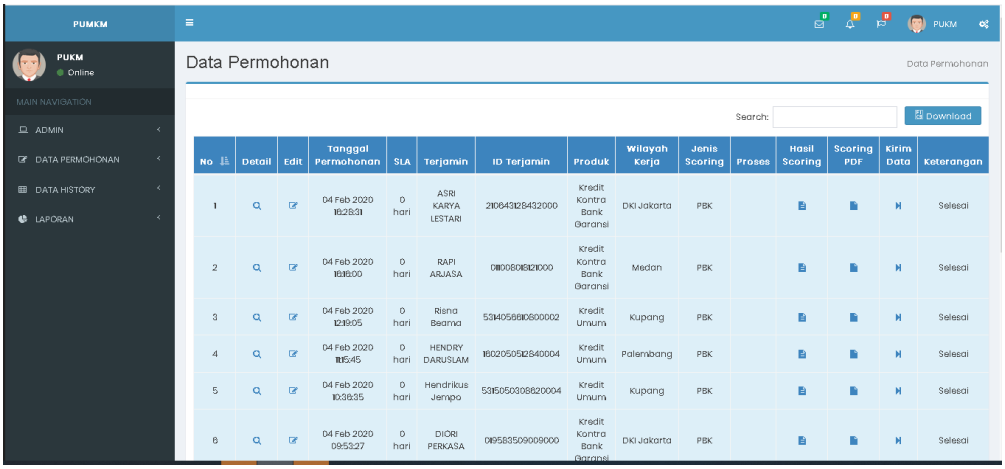

17. Sistem Informasi Kredit Program

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) merupakan suatu sistem aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan Kredit Program khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sesuai dengan hasil evaluasi program KUR tahun 2014 yang dirasa masih kurang tepat sasaran, maka perlu disusun suatu aplikasi untuk mendorong ketepatan sasaran KUR. SIKP sendiri merupakan sistem informasi database untuk calon debitur dan debitur KUR. SIKP dikembangkan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan. SIKP merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan KUR Mikro.

Tujuan SIKP adalah menjadi basis data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terpercaya dan dapat dijadikan rujukan bagi Bank untuk penyaluran kredit yang efektif. SIKP juga didorong untuk dapat menjadi alat pemercepat proses pembayaran tagihan subsidi kredit program.Proses penyusunan aplikasi SIKP telah dimulai sejak arahan dalam Rapat Koordinasi KUR pada bulan Desember 2014. Sesuai arahan dalam Rakor tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan menjadi pioner dalam penyusunan aplikasi tersebut. Perencanaan, proses penyusunan, hingga pentahapan penggunaan aplikasi SIKP ini merupakan hasil koordinasi dari Komite Kebijakan KUR yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Fungsi dari adanya kerjasama dengan sistem informasi kredit Program ini adalah Legitimasi Terjamin KUR.

18. Aplikasi PMS KPI

Aplikasi *Performance Management System* (PMS) adalah suatu perangkat lunak aplikasi (application software) berbasis web yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, mendorong, meningkatkan dan memberikan penghargaan terhadap hasil kinerja Perusahaan, Unit Kerja dan Individu. Oleh Karna itu dibutuhkan Aplikasi PMS untukmendorong peningkatan kinerja SDM agar lebih produktif sesuai *job description*, lebih efisien dan efektif dalam bekerja sesuai kewenangan yang telah didelegasikan.

17. Program Credit Information System

Program Credit Information System (SIKP) is an application system built to facilitate the Credit Program's implementation, especially the People's Business Credit (KUR). According to the results of the 2014 KUR program evaluation, which were felt to be still not well-targeted, it was necessary to develop an application to encourage the accuracy of the KUR targets. SIKP itself is a database information system for prospective debtors and KUR debtors. SIKP was developed by the Directorate of Treasury System of the Ministry of Finance. SIKP is an important part of the process of Micro KUR implementation.

The purpose of SIKP is to become a database of reliable Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) that can be used as a reference for banks for effective lending. SIKP is also encouraged to become a tool to accelerate the billing payment process of program credit subsidy. The process of preparing the SIKP application has begun since the directive in the KUR Coordination Meeting in December 2014. According to the Coordination Meeting's directives, the Directorate General of Treasury, the Ministry of Finance, became the pioneer in preparing the application. The planning, preparation process, and phasing of the use of the SIKP application are the result of coordination from the KUR Policy Committee, which is led by the Deputy for Macroeconomic and Financial Coordination, the Coordinating Ministry for Economic Affairs.

The function of the collaboration with the program credit information system is KUR Guaranteed Legitimacy.

18. KPI PMS Application

Performance Management System (PMS) Application is web-based application software used to identify, measure, evaluate, encourage, improve, and give rewards to the Company's performance results, Work Units, and individuals. Therefore, PMS application is needed to encourage the improvement of HR performance to be more productive according to the job description, more efficient and effective in working according to delegated authority.

INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI

Di sepanjang tahun 2019 Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp31.689 miliar, mengalami peningkatan 19.6% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp26.486 miliar. Karena adanya pengadaan alat-alat IT khususnya infrastruktur Keamanan TI.

INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENT

Throughout 2019 the Company spent Rp31.689 billion, an increase of 19.6% from the previous year of Rp26.486 billion. because of the procurement of IT tools especially IT Security infrastructure.

PROGRAM KERJA JANGKA PANJANG PERIODE TAHUN 2019 -2023 DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI
LONG-TERM WORK PROGRAM FOR THE PERIOD 2019-2023 OF INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION

No	Kode IS IS Code	Program Kerja Work Program	*Output*	Tahun / Years				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	IS 01	Mengembangkan sinergi BUMN dengan BANK & non BANK guna meningkatkan volume penjaminan (dengan cara: Sosialisasi, Penyusunan MOU / PKS dan meningkatkan kerjasama melalui anak perusahaan atau mitra strategis BUMN) Developing synergy between BUMN and BANK & non-BANK to increase the volume of guarantees (by Socialization, Formulation of MOU/ Cooperation Agreement (PKS) and increasing cooperation through subsidiaries or SOEs strategic partners)	- Peningkatan PKS dengan perusahaan BUMN - Diperolehnya kenaikan proporsi sinergi BUMN sebesar 12% menjadi 24% sampai 2023 - Increasing PKS with BUMN companies - Obtaining an increase in the proportion of BUMN synergy by 12% to 24% until 2023			X	X	X
2	IS 06	Mensosialisasikan dan Mengimplementasikan *suretyship online* Socializing and implementing online suretyship	Terimplementasikannya *suretyship online* Online suretyship implemented					
3	IS 06	Mengembangkan layanan penjaminan B2C secara *online* berbasis *mobile apps* dan *web* Develop online B2C guarantee services based on mobile apps and the web	Tersedianya mobile apps penjaminan Guarantee mobile apps are available					
4	IS 06	Mengembangkan system / aplikasi CRM (*Customer Relationship Management*) Develop a CRM (Customer Relationship Management) system / application	Tersedianya sistem CRM yang dapat melakukan profiling pelanggan dan memberikan perhatian atas kebutuhan pelanggan CRM system that can do customer profiling and pay attention to customer needs is available					

No	Kode IS IS Code	Program Kerja Work Program	*Output*	Tahun / Years				
				2019	2020	2021	2022	2023
5	IS 07	Memetakan dan menyempurnakan proses bisnis secara menyeluruh (kantor pusat dan unit kerja) Mapping and refining overall business processes (head office and work units)	Tersusunnya proses bisnis yang lebih efektif dan efisien untuk seluruh proses di kantor pusat dan unit kerja More effective and efficient business processes for all processes in the head office and work units have been composed					
6	IS 07	Menyempurnakan prosedur / SOP & kebijakan, a.l: - prosedur analisis terjamin - prosedur terkait subrogasi - prosedur layanan klaim - prosedur manajemen risiko - prosedur anggaran, dll. Refine procedures/SOPs & policies, among others: - guaranteed analysis procedures - procedures related to subrogation - claim service procedure - risk management procedures - budget procedures, etc.	Tersusunnya dan tersosialisasikannya prosedur/SOP yang lebih efektif dan efisien (Sesuai tanggung jawab masing - masing) Effective and efficient procedures/SOPs compiled and socialized (in accordance with their respective responsibilities)					
7	IS 07	Menyiapkan dan melakukan sertifikasi ISO 27001 Prepare and perform ISO 27001 certification	Sertifikasi ISO 27001 ISO 27001 Certification		X	X	X	X
8	IS 07	Menyusun kebijakan IT DRP (DR BC Plan) Prepare IT DRP policy (DR BC Plan)	Tersusunnya kebijakan IT DRP IT Disaster Recovery Plan (DRP) policies compiled					
9	IS 07	Meningkatkan tingkat kematangan tata kelola TI (Cobit 4.1) Increase the level of maturity of IT governance (Cobit 4.1)	Nilai tata kelola TI yang lebih baik The better score of IT governance.					
10	IS 07	Meningkatkan kualitas katalog layanan TI Improve the quality of IT service catalogs	Katalog layanan TI yang lebih sesuai dengan kebutuhan IT services catalog that more suits the needs					

No	Kode IS IS Code	Program Kerja Work Program	*Output*	Tahun / Years				
				2019	2020	2021	2022	2023
11	IS 07	Optimalisasi penagihan IJP KUR Gen 1 dan Gen 2 Optimization of the IJP KUR Billing Gen 1 and Gen 2	Diterimanya IJP KUR Gen 1 dan Gen 2 dengan koreksi 10% dari nilai tagihan IJP KUR Gen 1 and Gen 2, with a 10% correction of the billing value, are received.					
12	IS 08	Memperluas, standardisasi, simplifikasi *digital channeling (e-SP, e-IJP, e-klaim, esubro)* dengan mitra perbankan maupun non Perbankan Expanding, standardizing, simplifying digital channeling (e-SP, e-IJP, e-claims, esubro) with banking and non-banking partners	Tercapainya efisiensi SDM, waktu dan biaya, reduksi *human error* , dan pertumbuhan *volume* bisnis HR efficiency, time and cost, human error reduction, and business volume growth achieved.					
13	IS 08	Melakukan integrasi secara *online* dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Integrate online with the Credit Information System Program (SIKP)	Terbaruinya debitur di aplikasi perusahaan dan data penagihan IJP (jika debitur tersebut lolos SIKP) The debtor in the Company's application and billing data for IJP (if the debtor passes the SIKP) updated.					
14	IS 08	Mengembangkan aplikasi terintegrasi antara penjaminan dengan akuntansi (a.l: sistem informasi anggaran) Develop an integrated application between guarantee and accounting (including budget information systems)	Tercapainya efisiensi SDM, waktu, dan biaya, reduksi *human error*, validitas data HR efficiency, time and cost, human error reduction, and data validity achieved.					
15	IS 08	Mengembangkan *dashboard* kinerja perusahaan dan unit kerja (untuk fungsi bisnis) Develop a dashboard of company and work unit performance (for business functions)	Terimplementasikannya *dashboard* kinerja untuk fungsi bisnis A performance dashboard for business functions implemented					

No	Kode IS IS Code	Program Kerja Work Program	*Output*	Tahun / Years				
				2019	2020	2021	2022	2023
16	IS 08	Mengembangkan *dashboard* kinerja perusahaan dan unit kerja (untuk fungsi pendukung, mis: SDM, MR, Umum, dll.) Develop a dashboard of company and work unit performance (for supporting functions, such as HR, MR, General, etc.)	Terimplementasikannya *dashboard* kinerja untuk fungsi pendukung Performance dashboards for supporting functions implemented					
17	IS 08	Mengembangkan otomasi proses pembuatan PKS Developing the automation of the PKS making process	Terimplementasikannya sistem proses PKS terintegrasi Integrated PKS process system implemented					
18	IS 08	Menyempurnakan klaim *online* KUR dan Non-KUR Improve online KUR and Non-KUR claims	Tersedianya data klaim yg akurat dan tepat jumlah (menampilkan berapa lama pengajuan klaim dll.) Accurate claim data and the right amount is available (showing how long the submission of claims, etc.).					
19	IS 08	Mengembangkan aplikasi skoring bisnis, reasuransi, dan agen penjaminan Develop business scoring applications, reinsurance, and guarantee agents	Terbangunnya aplikasi skoring untuk bisnis, reas, dan agen penjaminan Scoring application for businesses, reinsurance, and guarantee agents developed					
20	IS 08	Mengimplementasikan dan menyempurnakan aplikasi *Marketplace Guarantee* Implement and refine Marketplace Guarantee applications	Terimplementasikannya aplikasi *marketplace guarantee* The marketplace guarantee application implemented					
21	IS 08	Mengembangkan aplikasi piutang IJP, piutang reasuransi, pengajuan reas, dan piutang *co-guarantee* Develop applications for IJP receivables, reinsurance receivables, reinsurance submissions, and coguarantee receivables	Mengefisienkan perolehan data piutang dan aging piutang terbaru Streamlining the data collection of the latest receivables and receivable aging schedule					

No	Kode IS IS Code	Program Kerja Work Program	*Output*	Tahun / Years				
				2019	2020	2021	2022	2023
22	IS 08	Mengembangkan portal UMKMK *Consultancy* Developing the UMKMK Consultancy portal	Tersedianya dan terimplementasikannya portal UMKMK *Consultancy* The UMKMK Consultancy portal is available and implemented			■		
23	IS 08	Mengembangkan sistem *Learning Center* Penjaminan Developing the Guarantee Learning Center system	Tersedianya dan terimplementasikannya sistem *Learning Center* Penjaminan The Guarantee Learning Center system is available and implemented			■	■	
24	IS 08	Mengembangkan portal UMKMK *Center of Excellence* (layanan terintegrasi untuk UMKMK, *incl. Learning Management System, Data Center*, Konsultansi, MPG, dll.) Developing the UMKMK Center of Excellence portal (integrated services for UMKMK, including Learning Management System, Data Center, Consultancy, MPG, etc.)	Tersedianya dan terimplementasikannya *portal* UMKMK *Center of Excellence* The UMKMK Center of Excellence portal is available and implemented				■	
25	IS 08	Meningkatkan kapasitas dan ketersediaan infrastruktur penunjang bisnis perusahaan Increasing the capacity and availability of the Company's business supporting infrastructure	Meningkatkan ketersediaan layanan dan kepuasan pelanggan Increase service availability and customer satisfaction	■	■	■	■	■
26	IS 09	Melakukan pembenahan *data governance blueprint* Improving blueprint governance data	Tersusunnya prosedur tata kelola data untuk mendukung tersusunnya database yang terintegrasi dan konsisten Data management procedures to support the establishment of integrated and consistent databases compiled	■				

No	Kode IS IS Code	Program Kerja Work Program	*Output*	Tahun / Years				
				2019	2020	2021	2022	2023
27	IS 09	Mengembangkan *machine learning* dengan pendekatan DWHBI untuk prediksi IJP, Klaim, Subrogasi Develop machine learning with the DWHBI approach for prediction of IJP, Claims, Subrogation	- Penetapan/penyesuaian tarif IJP secara otomatis - Prediksi tren IJP, klaim, dan subrogasi secara otomatis - Automatic determination / adjustment of IJP rates - Automatic prediction of IJP trends, claims, and subrogation					
28	IS 09	Mengembangkan *machine learning* untuk penguatan analisis terjamin Develop machine learning to strengthen guaranteed analysis	- Terjamin yang lebih berkualitas - Turunnya rasio klaim - Guaranteed with higher quality - Declining claim ratio					
29	IS 09	Mengembangkan *machine learning* dengan pendekatan DWHBI untuk pemetaan produk-pasar Develop machine learning with the DWHBI approach for product-market mapping	Pemetaan produk dan pasar yang lebih cepat dan akurat Faster and more accurate product and market mapping					
30	IS 09	Mengembangkan *machine learning* dengan pendekatan DWHBI untuk penguatan aktivitas pemasaran Develop machine learning with the DWHBI approach to strengthen marketing activities	Aktivitas pemasaran yang lebih tepat sasaran Marketing activities that are more targeted					
31	IS 09	Mengembangkan *big data analytics* Develop big data analytics	Terimplementasikannya *big data analytics* Big data analytics implemented					

Jamkrindo

Jaminan Kredit Indonesia



LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT
2019



TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

262 Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
General Principles of Good Corporate Governance

264 Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Di Lingkup Perum Jamkrindo
The Development of Good Corporate Governance Implementation In Perum Jamkrindo

325 Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Organization Structure

446 Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama Dan Pengendali, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung, Sampai Kepada Pemilik Individu
Information About Major And Controlling Shareholders, Whether Direct Or Indirect, Until The Individual Owner

447 Manajemen Risiko
Risk Management

492 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

493 Perkara Penting
Significant Cases

494 Akses Informasi Dan Data Perusahaan
Access To Company Information and Data

505 Kode Etik
Code of Conduct

515 Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control

516 Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policies

516 Informasi Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik
Information on Funding for Political Activities

517 *Whistleblowing System*
Whistleblowing System

196 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of the Use of Public Offering Funds

197 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Material Transaction Information that Contains Conflicts of Interest or Transactions with Affiliates

199 Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan
Amendments to the Laws and Regulations which have Significant Impacts

201 Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies

202 Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information

PRINSIP UMUM TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
General Principles of Good Corporate Governance

Perum Jamkrindo memandang bahwa penerapan GCG bukan sekadar mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator. Oleh karena itu, Perum Jamkrindo telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG. Hal ini dibuktikan dengan Capaian *assessment* penerapan GCG Perum Jamkrindo pada Tahun Buku 2019 mencapai 95,804 yang meningkat dari Tahun Buku sebelumnya dengan skor 95,716. Kenaikan ini secara umum dikarenakan adanya peningkatan wujud komitmen Perum Jamkrindo dalam penerapan GCG. Penerapan GCG di Perum Jamkrindo dapat menjadi budaya yang terinternalisasi di setiap Insan Perusahaan serta standar prosedur operasional yang dijalankan.

Perum Jamkrindo's view is that the application of GCG is not merely to comply with the provisions set by the Regulator. Therefore, Perum Jamkrindo has committed to implementing GCG principles, and this effort was evidenced by Perum Jamkrindo's in 2019 being assessed with a score of 95.804, an increase from 95.716 the previous year. This increase was generally due to the increase in Perum Jamkrindo's commitment in implementing GCG.

Guna memastikan kegiatan operasional telah dijalankan dan dikendalikan dengan baik sesuai dengan tujuan Perusahaan, organ Perusahaan senantiasa berupaya untuk mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan menyeluruh serta mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Pada konsep pembangunan berkelanjutan, atau *sustainability development*, GCG menjadi salah satu pilar utama yang diharapkan mampu membentuk fondasi iklim investasi yang sehat. Lebih jauh, GCG telah menjadi salah satu faktor fundamental bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan yang berkelanjutan hingga masa-masa mendatang.

To ensure that operational activities have been carried out and controlled properly in accordance with the Company's objectives, the Company's organs always strive to implement Good Corporate Governance (GCG) consistently and thoroughly and refer to the applicable laws and regulations, while taking into account the interests of stakeholders the other. In the concept of sustainable development, GCG is one of the main pillars that is expected to form the foundation of a healthy investment climate. Furthermore, GCG has become one of the fundamental factors for investors in assessing the company's sustainable performance in the future.

Komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*/GCG) merupakan bagian proses transformasi dan hal yang mutlak bagi Perum Jamkrindo. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan infrastruktur yang dimiliki dan secara berkesinambungan meningkatkan sistem dan prosedur untuk mendukung efektivitas pelaksanaan GCG di Perum Jamkrindo.

Commitment to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is part of the transformation process and is absolutely essential for Perum Jamkrindo. It is done by strengthening the infrastructure that is owned and sustainably improving systems and procedures to support the effectiveness of GCG implementation at Perum Jamkrindo.

PENDEKATAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE APPROACH

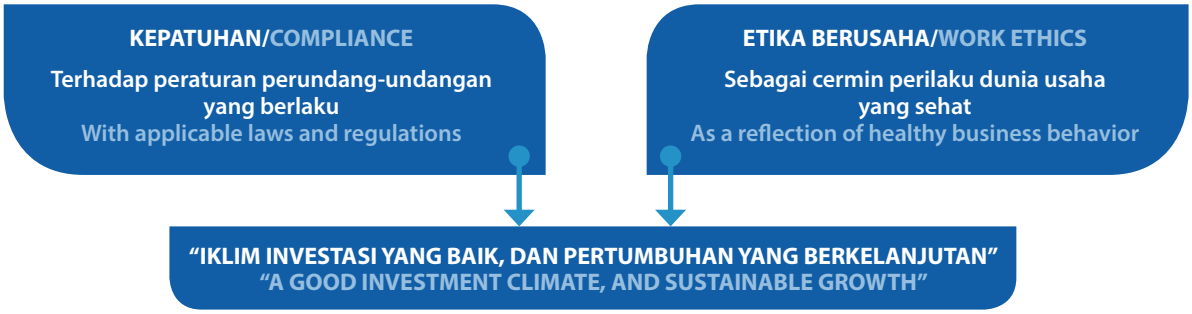

Regulator bersama-sama dengan berbagai pihak yang menaruh perhatian terhadap perkembangan GCG di Indonesia memberikan penegasan yang kuat atas pentingnya hubungan yang harmonis antara entitas usaha dan pemangku kepentingan. Melalui hubungan yang harmonis ini, diharapkan akan terbentuk dunia usaha yang menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat, dan justru mampu berkontribusi bagi dimensi sosial dan lingkungan di sekitarnya.

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, prinsip GCG turut mengalami perkembangan yang mencakup sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta hubungan pemangku kepentingan dan Perusahaan yang berlandaskan etika. Di lingkungan Perusahaan, evaluasi secara berkala dilakukan atas penerapan GCG untuk memastikan terwujudnya prinsip GCG secara komprehensif.

Together with various parties who pay attention to the development of GCG in Indonesia, the Regulator provides a strong affirmation of the importance of harmonious relationships between business entities and stakeholders. Through this harmonious relationship, it is hoped that a business world will be formed, which avoids the ways of creating temporary profits and be able to contribute to the surrounding social and environmental dimensions.

In line with the development of the business world, GCG principles have also experienced developments that include a system of supervision and control that support work ethics and responsible decision making, supporting integrity in financial reporting, appropriate risk management, and ethical-based stakeholders-company relationship. Within the Company, regular evaluations are carried out on the GCG implementation to ensure the realization of the GCG principles comprehensively.

HARMONISASI ENTITAS USAHA DENGAN PEMILIK MODAL DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
HARMONIZATION OF BUSINESS ENTITIES WITH CAPITAL OWNERS (SHAREHOLDERS) AND STAKEHOLDERS

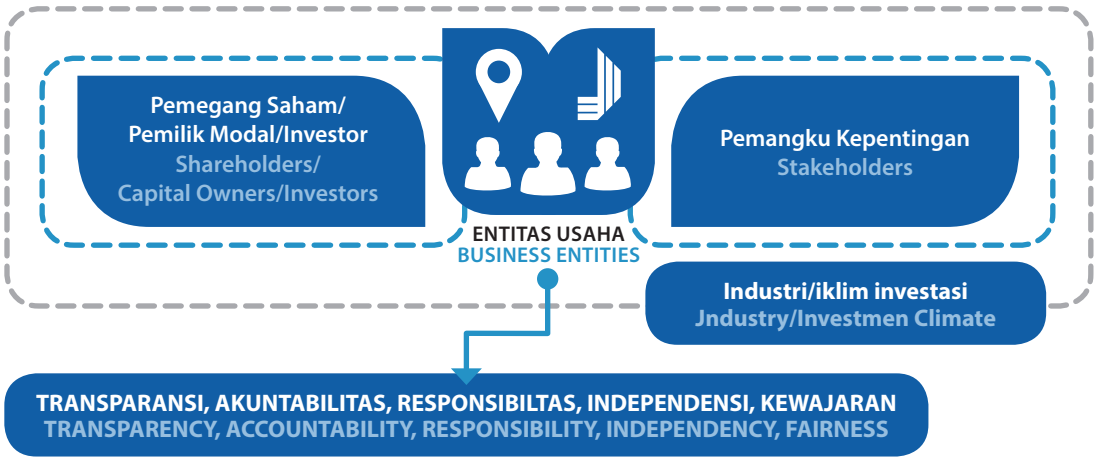

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUM JAMKRINDO

The Development of Good Corporate Governance Implementation In Perum Jamkrindo

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

KOMITMEN JAMKRINDO ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Menyadari pentingnya penerapan GCG bagi kelangsungan usaha secara berkelanjutan, maka Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada best-practice di lingkungan kerja Perum Jamkrindo. Hal tersebut, ditujukan agar penerapan GCG di Perusahaan dapat menjadi budaya yang terinternalisasi di setiap Insan Perusahaan serta standar prosedur operasional yang dijalankan. Dengan adanya komitmen tersebut, diharapkan Perusahaan dapat memenuhi kepentingan segenap *stakeholders* secara seimbang. Selain itu, penerapan GCG juga dapat membuka peluang bagi pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan bagi Perusahaan dan mencegah dari praktik-praktik yang dapat merugikan Perusahaan maupun *stakeholders*. Praktik GCG terus dikembangkan Perum Jamkrindo sebagai komitmen untuk terus berinovasi dalam upaya penyempurnaan implemetasi GCG di lingkup keorganisasian di lingkungan Perum Jamkrindo, di mana hal ini memberikan Perusahaan kepercayaan diri dalam menghadapi setiap tantangan ke depan dan menjadi entitas usaha dengan kompetensi yang kompetitif.

Perum Jamkrindo senantiasa memiliki semangat dan komitmen dalam menerapkan GCG di lingkup Perusahaan yang dilandaskan pada kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar Perum Jamkrindo dapat berkembang secara maksimal serta memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi dinamika usaha khususnya pada industri penjaminan secara konsisten. Untuk itu, implementasi GCG menjadi aspek penting bagi Perusahaan dalam mencapai cita-cita yang digariskan serta mewujudkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Dalam mengimplementasikan GCG, Perum Jamkrindo mengacu pada beberapa peraturan dan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Undang-undang ini memberikan fondasi menyeluruh terhadap aspek pengelolaan organisasi; mulai dari hak dan kewajiban pemilik modal, tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, hingga hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerapan GCG di lingkup Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corperate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, di mana disebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan

BASIS OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

JAMKRINDO'S COMMITMENT TO IMPLEMENTING GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Recognizing the importance of implementing GCG for sustainable business continuity, the Company is committed to implementing GCG principles that refer to best practices in the work environment of Perum Jamkrindo. It is intended that the implementation of GCG in the Company can become an internalized culture in every Individual of the Company and the standard operating procedures that are carried out. With this commitment, the Company is expected to be able to meet the interests of all stakeholders in a balanced manner. In addition, the implementation of GCG can also open opportunities for long-term sustainable growth for the Company and prevent practices that can harm the Company and stakeholders. GCG practices continue to be developed by Perum Jamkrindo as a commitment to continue to innovate to improve the GCG implementation in the organizational environment of Perum Jamkrindo, giving the Company confidence in facing every challenge ahead and becoming a business entity with competitive competencies.

Perum Jamkrindo always has enthusiasm and commitment in implementing GCG in the Company, which is based on compliance with applicable laws and regulations. It is intended so that Perum Jamkrindo can develop optimally and consistently have high competitiveness in dealing with business dynamics, especially in the guarantee industry. For this reason, the GCG implementation is an essential aspect for the Company in achieving the outlined goals and realizing sound corporate principles.

In implementing GCG, Perum Jamkrindo refers to a number of laws and regulations, especially Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN). This law provides a comprehensive foundation for the organizational management aspect, starting from the rights and obligations of the capital owners, the duties and authority of the Board of Directors, and the Board of Commissioners/Board of Supervisor Council, to the Company's relationship with internal and external stakeholders.

As a State-Owned Enterprise (BUMN), the implementation of GCG in the Company also refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-01 / MBU / 2011 concerning the Determination of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (SOEs) as amended by Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09 / MBU / 2012 dated July 6, 2012, states that GCG is the principles that underlie a process and mechanism for managing the Company based

mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian dan kewajaran merupakan landasan yang kuat bagi keberlanjutan aktivitas usaha Perusahaan. Selain itu penerapan GCG yang mengacu pada praktik terbaik akan meningkatkan kepercayaan pemilik modal dan para pemangku kepentingan yang akan membawa Perusahaan kepada kemajuan yang signifikan dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN tersebut, penerapan prinsip-prinsip GCG pada entitas usaha BUMN mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan.
3. Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

on legislation and business ethics. The implementation of GCG principles, which includes transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness is a strong foundation for the sustainability of the Company's business activities. In addition, the implementation of GCG that refers to best practices will increase the trust of capital owners and stakeholders, which will eventually bring the Company to be significant and sustainable progress.

In accordance with the Minister of SOE's Regulation, the implementation of GCG principles to SOEs business entities has the following objectives:

1. Optimizing the value of SOEs so that companies have strong competitiveness, both nationally and internationally.
2. Encouraging SOEs' management in a professional, efficient, and effective manner, as well as empowering functions and increasing the independence of the company's organs.
3. Encouraging corporate organs in making decisions and carrying out actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of the existence of SOE's social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around the SOEs.
4. Increasing the contribution of SOEs in the national economy.
5. Improving a conducive climate for the development of the national investment.

PRINSIP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION



Prinsip implementasi GCG yang digunakan Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 serta Pedoman Umum GCG dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui asas-asas GCG yang umum dikenal dengan sebutan TARIF, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) pada seluruh Organ Perusahaan baik Pemilik Modal, Dewan Pengawas maupun Direksi yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 88/KEP-DIR/XII/2012, KEP-05/DP JAMKRINDO/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

The principles of GCG implementation used by the Company refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-01 / MBU / 2011 and the GCG General Guidelines from the National Committee on Governance (KNKG) and interpreted through the GCG principles which are generally abbreviated into TARIF, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness to all Company Organs such as to Capital Owners, Board of Supervisor Council and Board of Directors. It listed in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Supervisor Council of Perum Jamkrindo No. 88/KEP-DIR/XII/2012, KEP-05/DPJAMKRINDO/XII/2012 dated December 3, 2012, concerning Guidelines for Good Corporate Governance Implementation of Perum Jaminan Kredit Indonesia, with details as follows:

Organ GCG GCG Organs	Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Principles of Good Corporate Governance				
	Transparasi **Transparency**	**Akuntabilitas** **Accountability**	**Pertanggungjawaban** **Responsibility**	**Kemandirian** **Independence**	**Kewajaran** **Fairness**
Pemilik Modal Capital Owners	1. Pengungkapan yang jelas mengenai rencana transaksi luar biasa antara lain merger, akuisisi, penjualan aset Perusahaan dalam jumlah yang substansional Clear disclosures regarding extraordinary transaction plans including mergers, acquisitions, sales of Company assets in substantial amounts 2. Keterbukaan dalam penetapan penghasilan direksi dan dewan pengawas Disclosure in determining the income of the Board of Directors and Board of Supervisor Council	Pemilik modal mempunyai tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam proses pengelolaan Perusahaan dan memastikan bahwa semua pengelolaan Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan Capital owners have the responsibility to monitor the implementation of GCG principles in the process of managing the Company and ensure that all Company management complies with the laws and regulations	Pemilik modal tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Capital owners are not allowed to interfere with the Company's operational activities, which are the Board of Directors' responsibility according to applicable laws and regulations	Melakukan prosedur yang lazim dalam menetapkan anggota direksi dan dewan Pengawas sehingga secara objektif didapatkan orang yang tepat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Perusahaan Perform the usual procedures in determining the members of the Board of Directors and Board of Supervisor Council so that objectively the right person is found according to the qualifications required by the Company	Pemilik modal berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan dari Direksi dan atau Dewan Pengawas Capital owners are entitled to obtain information relating to the interests of the Company from the Board of Directors and/or the Board of Supervisor Council

Organ GCG GCG Organs	Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Principles of Good Corporate Governance				
	Transparasi **Transparency**	**Akuntabilitas** **Accountability**	**Pertanggungjawaban** **Responsibility**	**Kemandirian** **Independence**	**Kewajaran** **Fairness**
Dewan Pengawas Board of Supervisor Council	1. Dibuat risalah rapat Dewan Pengawas yang menunjukkan adanya dinamika rapat dalam proses pengambilan keputusan The minutes of the Board of Supervisor Council's meeting made showing the dynamics of the meeting in the decision-making process 2. Kehadiran setiap anggota Dewan Pengawas dan pelaksanaan rapat Dewan Pengawas dilaporkan pada Laporan Tahunan Perusahan The attendance of each member of the Board of Supervisor Council and the implementation of the Board of Supervisor Council's meeting is reported in the Company's Annual Report 3. Remunerasi dewan Pengawas dilaporkan pada Laporan Tahunan Perusahaan Remuneration of the Board of Supervisor Council is reported in the Company's Annual Report	1. Dewan Pengawas bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan strategi Perusahaan dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas serta pemberian nasehat kepada Direksi dalam rangka pengelolaan Perusahaan secara efektif The Board of Supervisor Council is responsible for overseeing the implementation of the Company's strategy and requires the implementation of accountability and providing advice to the Board of Directors in order to the Company's effective management 2. Pemberdayaan fungsi Dewan Pengawas Empowerment of the functions of the Board of Supervisor Council	1. Dewan Pengawas harus mempunyai komitmen untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas jabatannya The Board of Supervisor Council must have a commitment to obey the laws and regulations related to the duties of its position 2. Dewan Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemilik modal The Board of Supervisor Council is responsible for its duties implementation to the capital owners 3. Dewan Pengawas turut bertanggung jawab terhadap kebenaran Laporan Keuangan yang diajukan direksi kepada Pemilik modal The Board of Supervisor Council is also responsible for the accuracy of the Financial Statements submitted by the Board of Directors to the capital owners	1. Memberikan pertimbangan yang objektif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi Perusahaan yang mungkin mengandung potensi terjadinya benturan kepentingan Give objective consideration in solving problems faced by the Company that may contain potential conflicts of interest 2. Dewan Pengawas tidak berwenang membuat keputusan manajemen pengelolaan Perusahaan sehari-hari seperti keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian karyawan atau penandatanganan kerja sama atau kontrak- kontrak yang bersifat rutin The Board of Supervisor Council is not authorized to make decisions on the daily Company's management such as decisions regarding the appointment and dismissal of employees or signing of routine cooperation or contracts	Dewan Pengawas dalam menjalankan jabatannya akan selalu menerapkan etika bisnis Perusahaan dalam rangka pemenuhan kepentingan *stakeholders* The Board of Supervisor Council in carrying out its position will always apply the Company's business ethics in the framework of fulfilling the interests of stakeholders.

Organ GCG GCG Organs	Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Principles of Good Corporate Governance				
	Transparasi **Transparency**	**Akuntabilitas** **Accountability**	**Pertanggungjawaban** **Responsibility**	**Kemandirian** **Independence**	**Kewajaran** **Fairness**
Direksi Board of Directors	1. Menyediakan Laporan Kegiatan dan Keuangan Perusahaan sebagai alat bantu untuk mengungkapkan transaksi keuangan dan kinerja Perusahaan kepada *stakeholder* secara transparan Providing Corporate Activity Reports and Financial Statements as a tool to transparently disclose financial transactions and Company performance to stakeholders 2. Mengungkapkan informasi dan Laporan Keuangan Perusahaan di antaranya disajikan melalui *website* Perusahaan Disclose information and the Company's Financial Statements including those presented on the Company's website 3. Mengungkapkan gaji dan penghasilan lain direksi pada Laporan Tahunan Disclose the salary and other income of the Board of Directors in the Annual Report	1. Direksi harus mampu menempatkan urutan prioritas dalam upaya pemenuhan kepentingan *stakeholder* The Board of Directors must be able to place priority order in the effort to fulfill stakeholder interests 2. Direksi membangun dan menetapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif sehingga dapat mengamankan aset Perusahaan The Board of Directors develops and determines an effective Internal Control System so as to secure the Company's assets 3. Direksi memberdayakan peran dan fungsi SPI sebagai mitra strategis manajemen. The Board of Directors empowers the role and function of SPI as a strategic partner of management. 4. Direksi harus memastikan bahwa SPI memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang perlu untuk dapat melaksanakan tugasnya The Board of Directors must ensure that the SPI has access to information about the Company that needs to be able to carry out its duties	1. Direksi harus mempunyai komitmen untuk mentaati Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan operasional Perusahaan The Board of Directors must have a commitment to obey the laws and regulations relating to the Company's operations 2. Direksi bertanggung jawab terhadap materi yang disajikan pada Laporan Keuangan The Board of Directors is responsible for the material presented in the Financial Statements 3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengungkapan informasi Laporan Keuangan ada media publikasi nasional sehingga dapat diakses oleh *stakeholder* The Board of Directors is responsible for disclosing financial statement information in national publication media so that stakeholders can access it	Komposisi Direksi harus memungkinkan direksi dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lainnya The composition of the Board of Directors must enable the Board of Directors to act independently in the sense of not having an interest that can interfere with their ability to carry out their duties independently and critically concerning each other	1. Penerapan *sistem* reward dan *punishment* yang memadai agar setiap karyawan memperoleh rasa keadilan dikaitkan dengan keberhasilan dalam pencapaian kinerja Applying an adequate reward and punishment system so that each employee gets a sense of justice associated with success in achieving performance 2. Menerapkan etika bisnis Perusahaan dalam rangka pemenuhan kepentingan *stakeholder* Implement the Company's business ethics in the context of fulfilling stakeholders' interests`

LANDASAN HUKUM

Perusahaan memiliki komitmen penuh dan secara konsisten menegakkan penerapan GCG dengan mengacu kepada beberapa aturan formal yang menjadi landasan bagi Perusahaan dalam penerapan GCG, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia
   i. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
   ii. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
   iii. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
   iv. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
   v. Undang Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2003.
   vi. Undang Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
   vii. Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Peraturan Pemerintah
   a. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
   b. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
   c. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.

3. Peraturan Menteri BUMN
   a. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
   b. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
   c. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara
   d. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan

LEGAL BASIS

The Company is fully committed to and consistently upholds the implementation of GCG by referring to several formal rules that form the basis for the Company in implementing GCG, namely:

1. Law of the Republic of Indonesia.
   i. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.
   ii. Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2016 concerning Guarantees.
   iii. Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption.
   iv. Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 1999 concerning State Officials that are Clean and Free of Corruption, Collusion, and Nepotism.
   v. Law of the Republic of Indonesia No. 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering as amended by the Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2003.
   vi. Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 concerning Information Disclosure.
   vii. Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.

2. Government regulations
   a. Government Regulation No. 35 of 2018 concerning Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
   b. Government Regulation No. 38 of 2008 concerning Amendments to Government Regulation No. 6 of 2006 concerning Management of State/Regional Property.
   c. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of SOEs.

3. Minister of SOEs Regulations
   a. Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, and its amendment No. PER-09/MBU/2012 concerning the implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
   b. Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/06/2017 concerning Second Amendment to Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Establishing the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisor Council of State-Owned Enterprises.
   c. Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises
   d. Minister of SOEs Regulation No. PNo. PER-02/MBU/06/2016 concerning Second Amendment to Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Establishing the Income of

Pengawas Badan Usaha Milik Negara

e. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
f. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.
g. Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris / Dewan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara

h. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05 MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.

4. Keputusan Menteri BUMN
   a. Keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.
5. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

PETA JALAN: RENCANA PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perum Jamkrindo memiliki *Roadmap* dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG guna mencapai *Good Corporate Citizen* dengan mekanisme di bawah ini:

the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.
e. Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Establishing the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.
f. Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/2013 dated February 18, 2013, concerning the Preparation Guidelines of the SOEs' Information Technology Management.
g. Minister of SOEs Regulation No. PER-10/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners / Supervisory Board of State-Owned Enterprises.
h. Minister of SOEs Regulation No. PER-05/MBU/2006, concerning SOEs' Audit Committee.

4. Decree of the Minister of SOEs
   a. Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in SOEs.
5. General guidelines of Indonesian GCG by National Committee on Governance (KNKG)

ROAD MAP: A GOOD CORPORATE GOVERNANCE DEVELOPMENT PLAN

Perum Jamkrindo has a Roadmap in implementing GCG principles to achieve Good Corporate Citizen with the mechanism below:

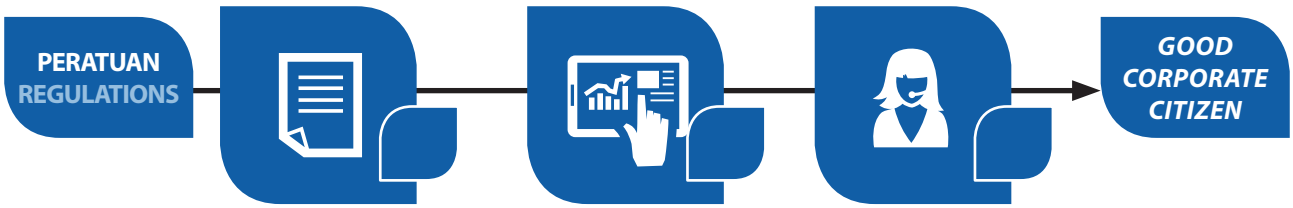

KOMITMEN
COMMITMENT

Patuhi terhadap seluruh regulasi atau pedoman yang dijalankan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan *best practice*.

Comply with all regulations or guidelines implemented by the Company in accordance with applicable laws and regulations and best practices.

SISTEM
SYSTEM

Operasional Perusahaan dapat bekerja secara efektif dan efisien melalui kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan Penerapan WBS

The Company's operations can work effectively and efficiently through compliance, internal control, risk management, and WBS implementation.

BUDAYA
CULTURE

Memberikan pelayanan terbaik untuk kegiatan penjaminan bagi UMKMK, dan dapat menjadi *Role Model* bagi perusahaan Sejenis

Provide the best service for guarantee activities for MSMEs and Cooperatives, and can be a role model for similar companies

KOMITMEN

Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, seluruh Insan Perusahaan berkomitmen untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta yang berlaku umum. Dukungan dari manajemen memberikan peran besar dalam menentukan arah dan tujuan penerapan GCG di Perum Jamkrindo. Dalam praktiknya, Manajemen Perum Jamkrindo menjadi contoh bagi karyawan untuk terus berkomitmen dalam penerapan GCG yang berkelanjutan. Perum Jamkrindo akan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses bisnis dan melakukan penyempurnaan perangkat pendukung GCG.

SISTEM

Dalam mendukung komitmen GCG yang berkelanjutan di Perum Jamkrindo, maka diperlukan sistem operasional perusahaan yang dapat bekerja secara efektif dan efisien melalui kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, sistem pengendalian internal yang memadai dan pengelolaan manajemen risiko yang baik serta penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif.

BUDAYA

Nilai-nilai budaya Perum Jamkrindo merupakan landasan bagi Insan Perusahaan dalam bekerja agar lebih jelas dan terstruktur. Dalam rangka penerapan GCG Perum Jamkrindo, maka seluruh Insan Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai budaya perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Tujuan implementasi GCG yang dilakukan Perum Jamkrindo adalah untuk menjadi Perusahaan Penjaminan yang memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan melalui pengelolaan Perusahaan yang efektif dan efisien dengan menciptakan nilai-nilai budaya sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan, membangun citra Perusahaan (*brand image*) dan reputasi Perusahaan yang baik serta *benchmark* bagi perusahaan sejenis lainnya sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

COMMITMENT

In implementing these GCG principles, all Company Personnel are committed to abide by and comply with all applicable laws and regulations, as well as those that are generally accepted. Support from management provides a significant role in determining the direction and objectives of GCG implementation at Perum Jamkrindo. In practice, the Management of Perum Jamkrindo is a role model for the employees to continue committing to the implementation of sustainable GCG. Perum Jamkrindo will implement GCG principles in every business process and make improvements to the GCG supporting instuments.

SYSTEM

In supporting sustainable GCG commitment at Perum Jamkrindo, it needs a company operational system that can work effectively and efficiently through compliance with applicable laws, adequate internal control systems and good risk management and implementation of an effective violation reporting system.

CULTURE

Perum Jamkrindo's cultural values are the foundation for the Company's personnel in their work to be clearer and more structured. In the GCG implementation framework at Perum Jamkrindo, all Company Personnel are committed to implementing corporate cultural values that are in line with the GCG principles.

The purpose of GCG implementation conducted by Perum Jamkrindo is to become a Guarantee Company that provides values to stakeholders through effective and efficient company management by creating cultural values so as to increase the level of trust, build a corporate image (brand image) and a good Company's reputation and the benchmarks for other similar companies, as explained below:

MENUJU TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG LEBIH BAIK DAN PENCIPTAAN NILAI-NILAI BUDAYA
TOWARD GOVERNANCE GOOD CORPORATE AND THE CREATION OF CULTURAL VALUES

KOMITMEN TATA KELOLA
GOVERNANCE COMMITMENT

Visi dan Misi Nilai-Nilai Budaya Perusahaan
Pedoman Tata Kelola Pedoman Perilaku Charter
- *Internal Audit Charter*
- Komite *Audit Charter*
- Kiru *Charter*

Pedoman Pengawas dan Direksi Kebijakan Gratifikasi Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran Sistem dan Prosedur

Vision and Mission Corporate Cultural Values
Governance guidelines Code of Conduct Charter
- Internal Audit Charter
- Audit Committee Charter
- Kiru Charter

Guideliness of the board of supervisors and Directors Gratification Policies Guideliness of Violation Reporting System System and Procedure

STRUKTUR TATA KELOLA
GOVERNANCE STRUCTURE

Organ Utama
- Rapat Pembahasan Bersama Dewan Pengawas
- Direksi Organ Pendukung
- Komite Audit
- Komite Investasi dan Risiko Usaha
- Sekretaris Dewan Pengawas
- Sekretaris Perusahaan
- Satuan Pengawas Internal Perusahaan

Main Organ
- Joint Meeting with Board of Supervisors
- Directors Supporting Organ
- Audit Committee
- Investment and Business Risk Committee
- Secretary to the Board of Supervisors
- Corporate Secretary
- Internal Control Unit Company

MEKANISME TATA KELOLA
GOVERNANCE MECHARISM

Implementasi
- Penerapan Prinsip GCG
- Pada Kegiatan Usaha Perusahaan

Evaluasi
- *Monitoring* Implementasi
- Tata kelola Perusahaan
- Evaluasi Kinerja Perusahaan
- Evaluasi Rencana
- Bisnis Perusahaan Pemutakhiran
- Penyempurnaan Perangkat
- Pendukung Tata Kelola

Implementation
- GCG Principles Implementation
- On Company's business activities

Evaluation
- Monitoring of Implementation
- Corporate Governance
- Company Perfomance Evaluation
- Plan Evaluation
- Company Business Update
- Device Enchancement
- Corporate Governance support

TUJUAN TATA KELOLA
GOVERNANCE OBJECTIVES

Pengelolaan Perusahaan yang efektif dan efisien Kepercayaan, Image, dan Reputasi Perusahaan yang lebih baik Menjadi *Benchmark*

Effective and Efficient company management Better Trust, Image, and Reputation of the Company Become benchmark

REKAM JEJAK PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TRACK RECORD OF THE DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

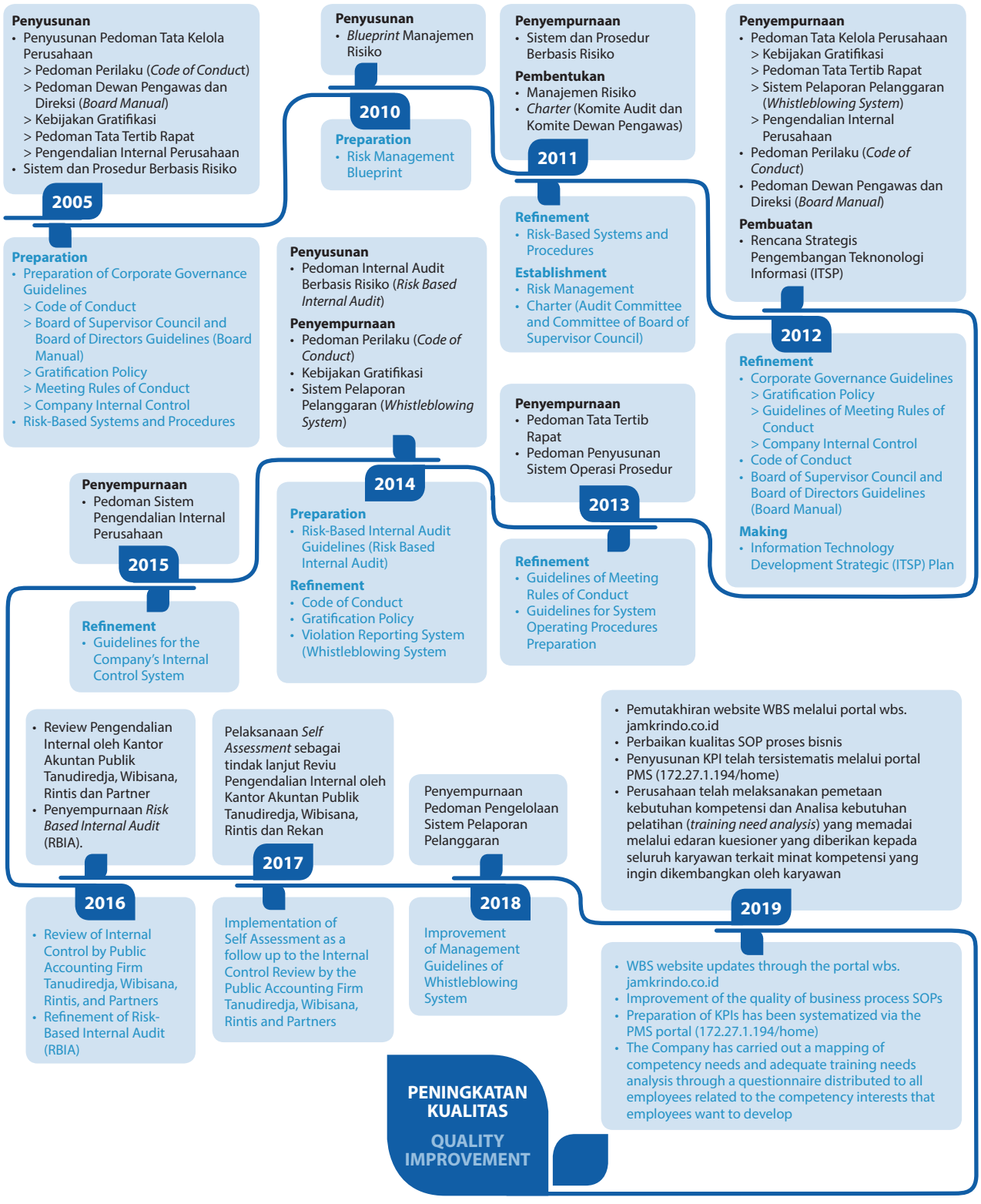

PERKEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI TAHUN 2019

Penerapan praktik GCG terus menerus ditingkatkan di Perum Jamkrindo, melalui *monitoring* dari SPI dan Divisi MSDM atas implementasi *Code of Conduct* (CoC). Apabila ditemukan benturan kepentingan atau penyalahgunaan jabatan yang menimbulkan tindakan *fraud* di lingkup Perusahaan, maka akan diselesaikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2019, pemantauan atas penerapan praktik GCG pada Perum Jamkrindo, di antaranya:

1. Menyampaikan Laporan *Self Assessment* atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Perum Jamkrindo Tahun 2019 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat B.1928/EKT/DIRUT/SPI/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Perum Jamkrindo tahun 2019;
2. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Whistleblowing System* kepada Direktur Utama
   - B.329/INT/SPI/STF/VI/2020 Laporan Pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS) periode bulan Mei 2020 tanggal 29 Juni 2020
   - B.722/INT/SPI/STF/XII/2019 Laporan WBS Periode Desember 2019 tanggal 31 desember 2019;
3. Melakukan *Assessment* penerapan GCG untuk periode tahun ukur 2019 dilakukan secara mandiri oleh Tim SelfAssessment dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan GCG di lingkungan Perum Jamkrindo. Proses penilaian dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 767/SPT/1/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019

INFRASTRUKTUR DAN *SOFT STRUCTURE* TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

STRUKTUR GCG DI LINGKUNGAN PERUM JAMKRINDO

Infrastruktur keorganisasian sebuah Perusahaan Umum (Perum) mencakup kepentingan pemilik modal yang dituangkan melalui Rapat Pembahasan Bersama (RPB); Direksi dengan tugasnya untuk mengelola; serta Dewan Pengawas yang berfungsi melakukan pengawasan. Sistem kepengurusan Perum menganut model 2 (dua) badan (*two tier system*), yaitu Dewan Pengawas dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DEVELOPMENT IN 2019

The implementation of GCG practices was continuously improved at Perum Jamkrindo, through monitoring of the Internal Control Unit (Internal Audit Unit) and the HRM Division on the implementation of the Code of Conduct (CoC). If a conflict of interest or positional abuse was found that caused fraud in the scope of the Company, it would be resolved and followed up in accordance with applicable provisions. During 2019, the monitoring of the implementation of GCG practices at Perum Jamkrindo, among others:

1. Submitting a Self Assessment Report on the Implementation of Good Corporate Governance of Perum Jamkrindo in 2019 to Chief Executive functioning as Supervisor of Insurance, Pension Fund, Financing Institutions, and Other Financial Services Institutions of the Financial Services Authority through Letter No: B.1928/EKT/DIRUT/SPI/VI/ 2020 dated June 29, 2020 regarding Submission of Implementation Good Corporate Governance Reports Perum Jamkrindo in 2019;
2. Submitting the Implementation of Whistle Blowing System Report to President Director
   - B.329/INT/SPI/STF/VI/2020 Implementation Whistleblowing System (WBS) Report May 2020 period dated June 29, 2020
   - B.722/INT/SPI/STF/XII/2019 WBS Report Period December 2019 dated December 31 2019;
3. Conducting the GCG Assessment of Perum Jamkrindo for a period of 2019 carried out independently by Self Assessment Team with the aim to provide a sustainable improvement recommendation on the GCG implementation in the Perum Jamkrindo environment. The assessment process carried out based on Task Order Letter No. 767/SPT/1/XII/2019, dated December 3, 2019.

INFRASTRUCTURE AND SOFT STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

GCG STRUCTURE IN PERUM JAMKRINDO

The organizational infrastructure of Public Corporation (Perum) Jamkrindo includes the interests of capital owners as outlined in a Joint Discussion Meeting (RPB); the Board of Directors with their duties to manage; and the Board of Supervisor Council which functions to supervise. Perum Management System follows the model of 2 (two) bodies (two-tier system), namely the Board of Supervisor Council and the Board of Directors, which have clear authority and responsibility in line with their respective functions as mandated in the laws and regulations.

Perusahaan telah memiliki ketiga organ utama tersebut, baik RPB, Dewan Pengawas dan Direksi. Dewan Pengawas dan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Pengawas dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan.

Infrastruktur GCG Perusahaan juga mengikutsertakan beberapa aspek penting yang berperan untuk mendukung penguatan kontrol dan pengelolaan terhadap Perusahaan, terdiri dari pemangku kepentingan dan organ pendukung. Struktur tersebut telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia. Sebagai landasan utama, Perusahaan menempatkan visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan sebagai kunci utama yang melandasi seluruh organisasi Perusahaan untuk dapat bekerja bersama-sama, dan mampu mewujudkan kinerja yang sesuai dengan etika usaha yang berlaku di Indonesia.

The Company has possessed three main organs, namely the Joint Discussion Meeting, Board of Supervisor Council, and Board of Directors. The Board of Supervisors Council and Board of Directors have the responsibility to maintain the sustainability of the Company's business in the long term. Therefore, the Board of Supervisor Council and Board of Directors must have the same perception of the Company's vision, mission, and values.

The Company's GCG Infrastructure also includes several important aspects with the role to support the control strengthen and management of the Company. These aspects consist of stakeholders and supporting organs. This structure is in accordance with the applicable provision of regulations in Indonesia. As the primary foundation, the Company places the Company's vision, mission, and values as the main key that underlies all Company organizations to work together and able to realize the performance that is in line with the prevailing business ethics in Indonesia.

STRUKTUR ORGAN GCG PERUM JAMKRINDO
PERUM JAMKRINDO GCG ORGAN STRUCTURE

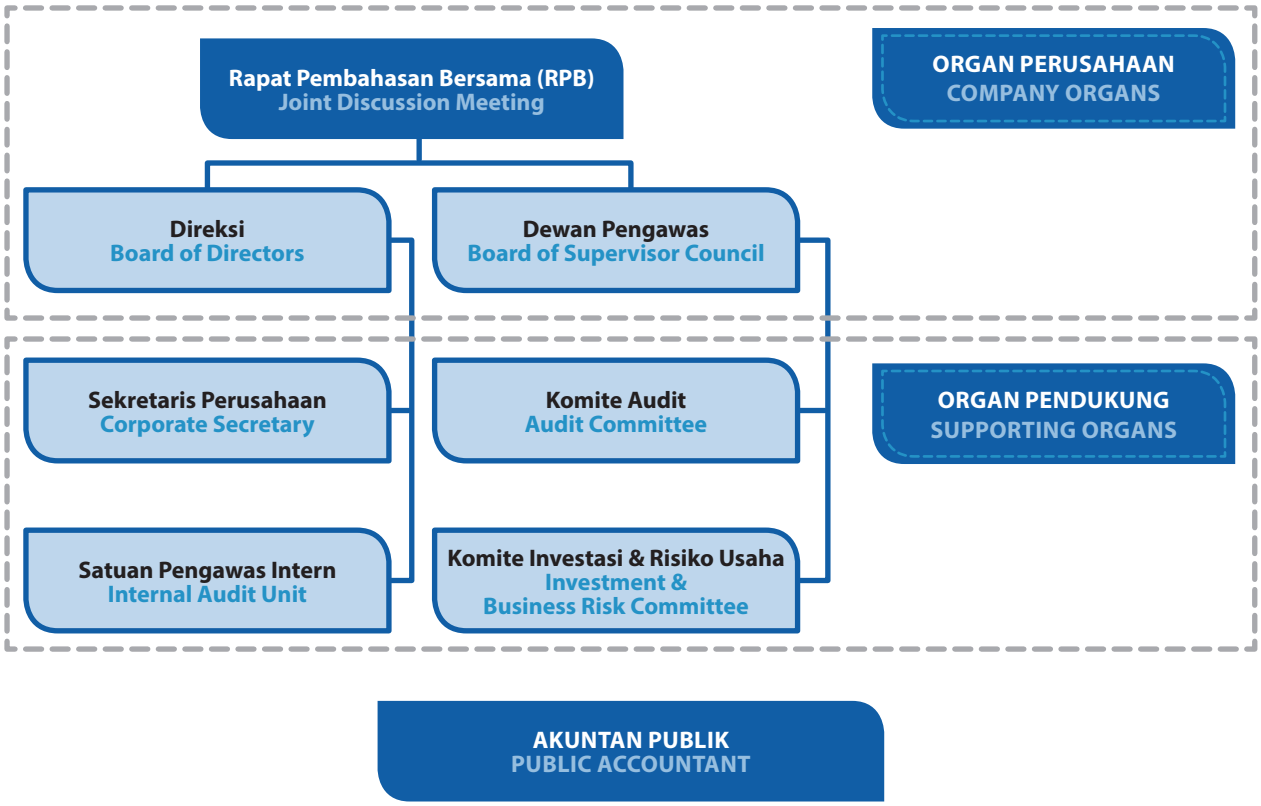

Dalam forum Rapat Pembahasan Bersama (RPB), para Pemilik Modal dapat melakukan pengambilan keputusan penting berkaitan dengan investasi yang telah ditanamkan di Perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RPB didasarkan pada kepentingan Perusahaan. RPB atau Pemilik Modal tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RPB untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. Dengan kedudukan yang setara, para Pemilik Modal akan mempertimbangkan dengan seksama keputusannya demi kepentingan jangka Panjang Perusahaan. Setelah keputusan diambil, maka RPB kemudian akan menyerahkan segala kewenangan pengawasan dan pelaksanaan keputusan tersebut kepada Dewan Pengawas dan Direksi. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengelolaan Perusahaan dan pelaksanaan atas setiap keputusan RPB tersebut dilakukan oleh Direksi. Dewan Pengawas kemudian melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk memastikan bahwa tujuan Perusahaan serta keputusan RPB tersebut dilaksanakan secara optimal dan dicapai maksimal. Dengan tugas dan tanggung jawab yang sedemikian besar dalam menjaga keberlangsungan Perusahaan, Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Penunjang sedangkan Direksi dibantu oleh unit kerja yang terkait dengan mekanisme tata kelola tersebut.

PROSES DAN MEKANISME GCG: *SOFTSTRUCTURE* DAN PERANGKAT KEBIJAKAN

Agar infrastruktur berjalan pada koridor yang tepat, Perusahaan menerapkan perangkat kebijakan berupa peraturan internal sebagai *softstructure* yang mengatur Tata Kelola Perusahaan di lingkup Perusahaan. *Softstructure* atau perangkat kebijakan berguna untuk memberikan kerangka acuan dan standarisasi pelaksanaan tugas dari setiap organ GCG yang dimiliki Perusahaan.

In the Joint Discussion Meeting (RPB) forum, the Capital Owners can make important decisions related to their investments in the Company. Decisions taken in the RPB are based on the interests of the Company. The RPB or Capital Owners cannot intervene in the duties, functions, and authorities of the Board of Supervisor Council and Board of Directors without reducing the authority of the RPB to exercise its rights according to the Articles of Association and laws and regulations. With an equal position, the Capital Owners will carefully consider their decisions for the long term interests of the Company. After the decision is taken, the RPB will hand over all authorities of supervisory and resolution implementation to the Board of Supervisor Council and Board of Directors. It is in line with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

The Company's management and implementation of each RPB's decision are carried out by the Board of Directors. The Board of Supervisor Council then supervises and provides advice to ensure that the Company's objectives and RPB decisions are carried out optimally and maximally achieved. With such significant duties and responsibilities in maintaining the sustainability of the Company, the Board of Supervisor Council is assisted by a Supporting Committee. In contrast, the Board of Directors is assisted by work units related to the governance mechanism.

GCG PROCESSES AND MECHANISMS: SOFT STRUCTURE AND POLICY INSTRUMENTS

For infrastructure to operate appropriately, the Company implements policy instruments in the form of internal regulations as a soft structure that regulates Corporate Governance within the Company. The soft structure or policy instruments are useful to provide a reference framework and standardization of the duties implementation of each GCG organ of the Company.

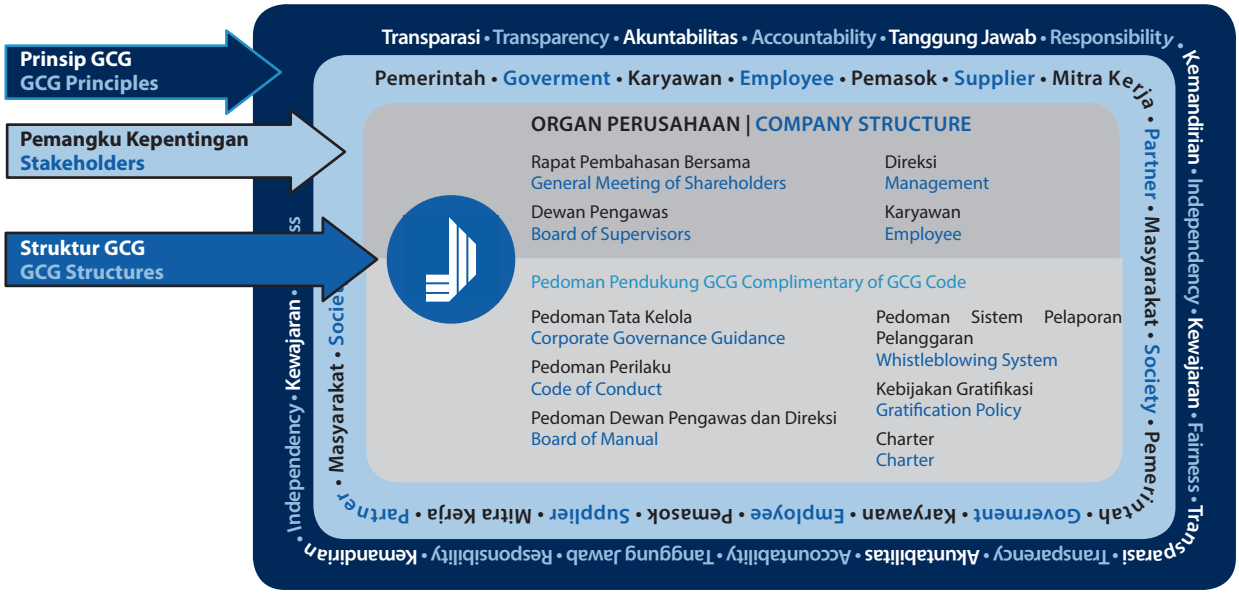

Secara rinci, aspek perangkat kebijakan GCG yang telah tercatat dan disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang sebagai bentuk ketaatan hukum dan komitmen dalam pelaksanaan GCG, meliputi:

In detail, the aspects of the GCG policy instruments that have been recorded and ratified by the authorities as a form of legal compliance and commitment in the GCG implementation, include:

Perangkat Kebijakan / Policy Instruments	**Penetapan** / Established by
Anggaran Dasar Perusahaan Company's Articles of Association	Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia sebagai Anggaran Dasar Perusahaan. Government Regulation No. 35 of 2008 concerning Perum Jamkrindo as the Company's Articles of Association.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik Guidelines for Good Corporate Governance	Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No. 88/KEP-DIR/XII/2012—KEP-05/DP-JAMKRINDO/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pedoman Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Joint Decree of the Board of Directors and Supervisory Board ofPerum Jamkrindo No. 88 / Kep-Dir / XII / 2012 — KER-05 / DP-JAMKRINDO / XII / 2012 dated 3 December 2012 concerning General Guidelines of Perum Jamkrindo.
Pedoman Perilaku Code of Conduct/CoC	Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/XII/2012—KEP-07/DP JAMKRINDO/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*). Joint Decree of the Board of Directors and Supervisory Board of Perum Jamkrindo No. 93 / Kep-Dir / XII / 2012 — KEP-07 / DP JAMKRINDO / XII / 2012, December 13, 2012 concerning the Code of Conduct.
Buku Panduan Dewan Komisaris dan Direksi Board Manual	Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 89/Kep-Dir/XII/2012—KEP-06/DP-JAMKRINDO/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012. Joint Decree of the Board of Directors and Supervisory Board of Perum Jamkrindo No. 89 / Kep-Dir / XII / 2012 — KEP-06 / DP-JAMKRINDO / XII / 2012 dated 3 December 2012.
Piagam Komite Audit Audit Committee Charter	Telah disahkan oleh Ketua Dewan Pengawas pada tanggal 26 April 2011 It has been approved by the Chairperson of the Supervisory Board on April 26, 2011
Piagam Komite Investasi dan Risiko Usaha Charter of the Business Risk and Investment Committee	Telah disahkan oleh Ketua Dewan Pengawas pada Desember 2012 It has been approved by the Chairperson of the Supervisory Board in December 2012
Piagam Audit Internal Internal Audit Charter	Telah diperbaharui serta disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 38/Kep-Dir/V/2017–KEP-03/DPJAMKRINDO/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 It has been updated and ratified through a Joint Decree of the Board of Directors and Supervisory Board of Perum Jamkrindo No. 38 / Kep-Dir / V / 2017 – KEP-03 / DP-JAMKRINDO / V / 2017 dated May 10, 2017
Kode Etik Satuan Pengawasan Intern Code of Ethics for Internal Audit Unit	Disahkan melalui Peraturan Direksi No. 30/Per-Dir/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017. Ratified through Directors Regulation No. 30 / Per-Dir / VIII / 2017 dated August 25, 2017
Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Manajemen Risiko Risk Management Implementation Reporting Guidelines	Disahkan melalui Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit No. 02 / Per- Dir / III / 2014 tanggal 5 Maret 2014 Ratified through the Perum Jamkrindo's Board of Directors Regulation No. 02 / Per-Dir / III / 2014 dated March 5, 2014
Pedoman Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Guideline for Procurement of Goods and Service policy	Telah diperbaharui serta disahkan melalui Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No 13/Per-Dir/III/2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia tanggal 26 Maret 2013 It has been updated and ratified through the Board of Directors of Perum Jamkrindo Regulation No13 / Per-Dir / III / 2013 concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services for Perum Jamkrindo dated March 26, 2013 Ada pembaharuan Perdir PBJ No. 03/Per-Dir/4/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa There is a renewal of Perdir PBJ No. 03/Per-Dir/4/III/2020 dated March 11, 2020 concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services Policy
Pedoman Kebijakan Gratifikasi Guidelines for Gratification Policy	Diperbaharui serta disahkan melalui Surat Edaran Direksi No. 9/SE/4/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi di Perum Jamkrindo.
Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Violation Reporting System (Whistleblowing System)	Diperbaharui serta disahkan melalui Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No. 04/Per-Dir/IV/2018 tanggal 10 April 2018. It has been updated and validated through the Board of Directors of Perum Jamkrindo Regulation No. 04 / Per-Dir / IV / 2018 dated April 10, 2018.
Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Guidelines for Submitting State Administrators Wealth Report)	Diperbaharui serta disahkan melalui Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No. 24/Per-Dir/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017. It has been updated and ratified by the Board of Directors' Circular No. 9 / SE / 4 / IX / 2014 dated September 24, 2014, concerning Gratification Control Policies at Perum Jamkrindo.

SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang selanjutnya disebut Perusahaan memiliki komitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan, serta menjadikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai landasan operasional di lingkungan Perusahaan. Terkait dengan usaha penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi, suap dan praktik kecurangan lainnya, maka salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system*).

Whistle Blowing System (WBS) adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pelapor dalam melaporkan terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan.

Sejak diterbitkannya Peraturan Direksi *Whistle Blowing System* (WBS) Nomor:04/Per-Dir/IV/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistle Blowing System* (WBS) SPI telah melakukan sosialisasi WBS terhadap *auditee* bersamaan dengan pelaksanaan general audit.

Pedoman WBS tersebut disosialisasikan kepada Karyawan, yaitu:

SOCIALIZATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICY

Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia/ Public Corporation of Indonesian Credit Guarantee, hereinafter referred to as the Company, has a commitment to implement Good Corporate Governance (GCG) consistently and sustainably, and to make the principles of Good Corporate Governance (GCG) as the operational foundation in the Company's environment. Related to efforts to implement Good Corporate Governance (GCG) and include the eradication of corruption, bribery, and other fraud practices, then one of the most effective ways to prevent and fight against practices that are contrary to Good Corporate Governance (GCG) is through violation reporting systems (whistleblowing system).

Whistleblowing System (WBS) is part of the internal control system in preventing the irregularities and fraud practice as well as strengthening the implementation of Good Corporate Governance (GCG) practices. This system is expected to increase the reporter's participation in reporting violations that can harm the Company.

Since the issuance of the Board of Directors' Whistle Blowing System (WBS) Regulation Number: 04 / Per-Dir / IV / 2018 dated April 10, 2018, concerning Guidelines for Management of Violation Reporting System of Whistleblowing System (WBS), SPI socialized WBS to the auditee along with the implementation of general audit.

The WBS Guidelines are socialized to employees, namely:

No	Tempat Sosialisasi Place of Dissemination	Tanggal Sosialisasi Date of Dissemination	Tim Pelaksana Disseminating Team	Rekap Sosialisasi Dissemination Recap
1.	Kanca Purwakarta Branch Office Purwakarta	29 Januari 2019 January 29, 2019	1. Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1/ Region 1 Section Head) 2. Rinjani Yusni Maharjanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
2	Kanca Sukabumi Branch Office Sukabumi		1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Faoziah Ulfah (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Laila Wijayanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. KUR
3	Kanca Tasikmalaya Branch Office Tasikmalaya		1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Keagenan Kargo / Cargo Agency
4	Kanca Cirebon Branch Office Cirebon		1. Kartono (Kabag PSKA/ Head of PSKA) 2. Asep Ginanjar Cahya Gumilar (Kasie SPI/ Internal Audit Unit Section Chief) 3. Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Mul

No	Tempat Sosialisasi Place of Dissemination	Tanggal Sosialisasi Date of Dissemination	Tim Pelaksana Disseminating Team	Rekap Sosialisasi Dissemination Recap
5	Kanca Madiun Branch Office Madiun	20 Februari 2019 February 20,2019	1. Kartono (Kabag PSKA/ Head of PSKA) 2. Rinjani Yusni Maharjanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
6	Kanca Malang Branch Office Malang		1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI)/ Internal Audit Unit Staff	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
7	Kanwil VI Surabaya Region VI Office Surabaya		1. Irmatati (Kabag Korporasi dan TI / Head of Corporate and IT Division) 2. Muhammad Ilham (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andreas Theodorus M (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
8	Kanca Kudus Branch Office Kudus	18 Maret 2019 March 18, 2019	1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Muhammad Ilham (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
9	Kanca Pare-Pare Branch Office Pare-Pare	13 Maret 2019 March 13, 2019	1. Irmatati (Kabag Korporasi dan TI / Head of Corporate and IT Division) 2. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Aldhy Haryono Fachrial (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
10.	Kanca Batam Branch Office Batam	18 Maret 2019 March 18, 2019	1. Kartono (Kabag PSKA / Head of PSKA) 2. Laurdes Sinurat (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Rinjani Yusni Maharjanti(Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
11.	Kanwil I Medan Region I Office Medan	14 Maret 2019 March 14, 2019	1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee 4. *Surety Bond*
12.	Kanca Balikpapan Branch Office Balikpapan	13 Maret 2019 March 13, 2019	1. Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1/ Region 1 Section Head) 2. Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andreas Theodorus M (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
13.	Kanca Pekalongan Branch Office Pekalongan	22 Maret 2019 March 22, 2019	1. Kartono (Kabag PSKA/ Head of PSKA) 2. Faoziah Ulfah (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Laila Wijayanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
14.	Kanca Kediri Branch Office Kediri	28 Maret 2019 March 28, 2019	1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andik Sugiarto (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. KUR

No	Tempat Sosialisasi Place of Dissemination	Tanggal Sosialisasi Date of Dissemination	Tim Pelaksana Disseminating Team	Rekap Sosialisasi Dissemination Recap
15.	Kanca Bitung Branch Office Bitung	30 Maret 2019 March 30, 2019	1. Irmatati (Kabag Korporasi dan TI / Head of Corporate and IT Division) 2. Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andreas Theodorus M (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
16.	Kanca Solo Branch Office Solo	1 April 2019 April 1, 2019	1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Muhammad Ilham (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
17.	Kanca Purwokerto Branch Office Purwokerto	26 April 2019 April 26, 2019	1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Rinjani Yusni Maharjanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Laila Wijayanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
18.	Kanca Sumbawa Besar Branch Office Sumbawa Besar	29 April 2019 April 29, 2019	1. Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1/ Region 1 Section Head) 2. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
19.	Kanca Banyuwangi Branch Office Banyuwangi	26 April 2019 April 26, 2019	1. Sinatria Gaza Lovendra (Kabag Prohire/ Head of Prohire) 2. Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andreas Theodorus M (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
20.	Kanca Ambon Branch Office Ambon	30 April 2019 April 30, 2019	1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 2. *Surety Bond*
21.	Kanca Aceh Branch Office Aceh	10 Juli 2019 July 10, 2019	1. Irmatati (Kabag Korporasi dan TI / Head of Corporate and IT Division) 2. Rinjani Yusni Maharjanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Laila Wijayanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
22.	Kanca Mataram Branch Office Mataram	11 Juli 2019 July 11, 2019	1. Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1/ Region 1 Section Head) 2. Laurdes Sinurat (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
23.	Kanca Bandar Lampung Branch Office Bandar Lampung		1. Sinatria Gaza Lovendra (*Prohire*) 2. Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Andik Sugiarto (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kebijakan Akuntansi / the Board of Directors' Accounting Policy

No	Tempat Sosialisasi Place of Dissemination	Tanggal Sosialisasi Date of Dissemination	Tim Pelaksana Disseminating Team	Rekap Sosialisasi Dissemination Recap
24.	Kanca Palopo Branch Office Palopo	07 Juli 2019 July 07, 2019	1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Andreas Theodorus M (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Aldhy Haryono Fachrial (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
25.	Kanca Tarakan Branch Office Tarakan	12 Juli 2019 July 12, 2019	1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Ilham (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
26.	Kanca Sorong Branch Office Sorong	29 Juli 2019 July 29, 2019	1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
27.	Kanca Balige Branch Office Balige	30 juli 2019 July 30, 2019	1. Irmatati (Kabag Korporasi dan TI / Head of Corporate and IT Division) 2. Asep Ginanjar Cahya Gumilar (Kasie SPI / Internal Audit Unit Section Chief) 3. Andreas Theodorus M (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
28.	Kanca Semarang Branch Office Semarang	02 Agustus 2019 August 02, 2019	1. Kartono (Kabag PSKA / Head of PSKA) 2. Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
29.	Kanca Palu Branch Office Palu		1. Sinatria Gaza Lovendra (*Prohire*) 2. Rinjani Yusni Maharjanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Ilham (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
30.	Kanca Padang Branch Office Padang		1. Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1/ Region 1 Section Head) 2. Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Laurdes Sinurat (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Andik Sugiarto (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
31.	Kanca Gorontalo Branch Office Gorontalo	07 Agustus 2019 August 07, 2019	1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Aldhy Haryono Fachrial (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Laila Wijayanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority

No	Tempat Sosialisasi Place of Dissemination	Tanggal Sosialisasi Date of Dissemination	Tim Pelaksana Disseminating Team	Rekap Sosialisasi Dissemination Recap
32.	Kanwil II – Palembang Region II Office Palembang	22 Agustus 2019 August 22, 2019	1. Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1/ Region 1 Section Head) 2. Asep Ginanjar Cahya Gumilar (Kasie SPI / Internal Audit Unit Section Chief) 3. Laurdes Sinurat (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
33.	Kanwil VII – Denpasar Region VII Office Denpasar		1. Kartono (Kabag PSKA / Head of PSKA) 2. Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
34.	Kanca Makassar Branch Office Makassar	23 Agustus 2019 August 23, 2019	1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andreas Theodorus M (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Andik Sugiarto (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Pengaturan Komite Penjaminan / Guarantee Committee Arrangements
35.	Kanca Yogyakarta Branch Office Yogyakarta	30 Agustus 2019 August 30, 2019	1. Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1/ Region 1 Section Head) 2. Rinjani Yusni Maharjanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Ilham (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Laila Wijayanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
36.	Kanca Serang Branch Office Serang	12 September 2019 September 12, 2019	1. Kartono (Kabag PSKA / Head of PSKA) 2. Emmerisa (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
37.	Kanca Kendari Branch Office Kendari		1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
38.	Kanca Manado Branch Office Manado	13 September 2019 September 13, 2019	1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andreas Theodorus M (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Laurdes Sinurat (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
39.	Kanca Pangkal Pinang Branch Office Pangkal Pinang	19 September 2019 September 19, 2019	1. Irmatati (Kabag Korporasi dan TI / Head of Corporate and IT Division) 2. Aldhy Haryono Fachrial (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Ilham (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*

No	Tempat Sosialisasi Place of Dissemination	Tanggal Sosialisasi Date of Dissemination	Tim Pelaksana Disseminating Team	Rekap Sosialisasi Dissemination Recap
40.	Kanca Bandung Branch Office Bandung	24 September 2019 September 24, 2019	1. Sinatria Gaza Lovendra (Kabag *Prohire* / Head of Prohire) 2. Rinjani Yusni Maharjanti (Staf SPI) 3. Andik Sugiarto (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Igo Cahyono (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
41.	Kanca Kupang Branch Office Kupang	04 Oktober 2019 October 04, 2019	1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andreas Theodorus M (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan/ the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
42.	Kanca Jayapura Branch Office Jayapura		1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
43.	Kanca Tanjung Pinang Branch Office Tanjung Pinang		1. Irmatati (Kabag Korporasi dan TI / Head of Corporate and IT Division) 2. Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Laurdes Sinurat (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
44.	Kanca Tangerang Branch Office Tangerang	10 Oktober 2019 October 10, 2019	1. Sinatria Gaza Lovendra (Kabag *Prohire* / Head of Prohire) 2. Rinjani Yusni Maharjanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Emmerisa B. Sembiring (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perhitungan Klaim / Claim Calculation
45.	Kanca Manokwari Branch Office Manokwari	12 Oktober 2019 October 12, 2019	1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Aldhy Haryono Fachrial (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Ilham (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. *Surety Bond*
46.	Kanca Surabaya Branch Office Surabaya	18 Oktober 2019 October 18, 2019	1. Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1/ Region 1 Section Head) 2. Andik Sugiarto (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Laila Wijayanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority

No	Tempat Sosialisasi Place of Dissemination	Tanggal Sosialisasi Date of Dissemination	Tim Pelaksana Disseminating Team	Rekap Sosialisasi Dissemination Recap
47.	Kanca Pekanbaru Branch Office Pekanbaru	25 Oktober 2019 October 25, 2019	1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Laurdes Sinurat (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
48.	Kanca Denpasar Branch Office Denpasar		1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Andreas Theodorus M (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
49.	Kanca Palangkaraya Branch Office Palangkaraya	06 November 2019 November 06, 2019	1. Sinatria Gaza Lovendra (Kabag *Prohire* / Head of Prohire) 2. Rinjani Yusni Maharjanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
50.	Kanca Medan Branch Office Medan	08 November 2019 November 08, 2019	1. Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1/ Region 1 Section Head) 2. Emmerisa B. Sembiring (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Laurdes Sinurat (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
51.	Kanca Samarinda Branch Office Samarinda	08 November 2019 November 08, 2019	1. Irmatati (Kabag Korporasi dan TI / Head of Corporate and IT Division) 2. Asep Ginanjar Cahya Gumilar (Kasie SPI / Internal Audit Unit Section Chief) 3. Andik Sugiarto (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Laila Wijayanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Supply Chain*
52.	Kanca Banjarmasin Branch Office Banjarmasin	15 November 2019 November 15, 2019	1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority
53.	Kanwil Banjarmasin Region Office Banjarmasin		1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	

No	Tempat Sosialisasi Place of Dissemination	Tanggal Sosialisasi Date of Dissemination	Tim Pelaksana Disseminating Team	Rekap Sosialisasi Dissemination Recap
54.	Kanca Palembang Branch Office Palembang	22 November 2019 November 22, 2019	1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Aldhy Haryono Fachrial (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Ilham (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Andreas Theodorus M (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
55.	Kanca Pontianak Branch Office Pontianak	29 November 2019 November 29, 2019	1. Irmatati (Kabag Korporasi dan TI / Head of Corporate and IT Division) 2. Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Laila Wijayanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
56.	Kanca Jambi Branch Office Jambi		1. Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1 Region 1 Section Head) 2. Emmerisa B. Sembiring (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Laurdes Sinurat (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
57.	Kanwil Semarang Region Office Semarang	23 Desember 2019 December 23, 2019	1. Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1 Region 1 Section Head) 2. Aldhy Haryono Fachrial (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Laurdes Sinurat (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority
58.	Kanwil Semarang Region Office Semarang	27 Desember 2019 December 27, 2019	1. Irmatati (Kabag Korporasi dan TI / Head of Corporate and IT Division) 2. Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andik Sugiarto (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority

KEGIATAN SOSIALISASI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI SEPANJANG TAHUN 2019
WHISTLEBLOWING SYSTEM SOCIALIZATION ACTIVITIES THROUGHOUT 2019









PENILAIAN: EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN PENINGKATAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

ASSESSMENT PENERAPAN GCG

Metode *Assessment*

Sebagai wujud komitmen penerapan prinsip GCG, Perum Jamkrindo melaksanakan *assessment* atau penilaian atas penerapan GCG di lingkup Perusahaan. *Assessment* dilakukan dengan 2 (dua) model, yaitu melalui *self assessment* atau evaluasi yang dilakukan oleh tim internal Perusahaan, dan *assessment* atau penilaian yang dilakukan oleh pihak independen. Tujuan pelaksanaan penilaian (*assessment*) atas penerapan GCG pada Perum Jamkrindo mengacu pada Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG perusahaan melalui evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan pada Perum Jamkrindo, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG perusahaan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan pada Perum Jamkrindo.
3. Memonitor konsistensi penerapan GCG pada Perum Jamkrindo dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate govermance* di lingkungan perusahaan.

Hasil *assessment* diharapkan dapat menjadi landasan untuk peningkatan dan perbaikan penerapan praktik GCG di Perum Jamkrindo. Selanjutnya penerapan praktik GCG tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mendorong pengelolaan Perusahaan secara transparan, profesional, dan efisien sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dalam bentuk tren kinerja Perusahaan yang tinggi (*high performance*), dan citra Perusahaan yang baik (*good corporate image*), serta kepercayaan *stakeholders* (pengguna jasa, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan) terhadap Perum Jamkrindo.

Dasar pelaksanaan penilaian/evaluasi atas penerapan GCG pada Perum Jamkrindo mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 dan Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

ASSESSMENT: EVALUATION, MONITORING, AND IMPROVEMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Assessment Method

As a form of commitment to the implementation of GCG principles, Perum Jamkrindo conducts an assessment or evaluation of the GCG implementation within the Company. The assessment is carried out with 2 (two) models, namely through self-assessment or evaluation conducted by the Company's internal team and assessment or evaluation carried out by an independent party. The purpose of the GCG implementation assessment at Perum Jamkrindo refers to the Letter of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012, are:

1. To measure the quality of corporate GCG implementation through evaluating the fulfillment level of GCG criteria with the real conditions in Perum Jamkrindo, through the provision of scores on the GCG implementation and the quality categories of its implementation.
2. To identify the strengths and weaknesses of the Company's GCG implementation and propose improvement recommendations to reduce the gap between the GCG criteria and its implementation at Perum Jamkrindo.
3. To monitor the consistency of GCG implementation at Perum Jamkrindo and obtain input for improving and developing corporate governance policies in the Company environment.

The assessment results are expected to be the basis for increasing and improving the implementation of GCG practices at Perum Jamkrindo. Furthermore, the implementation of GCG practices is also expected to provide benefits to encourage the Company management in a transparent, professional, and efficient manner so that it can increase the Company's value in the form of high-performance trends, and a good corporate image, as well as trust of stakeholders (i.e., service users, employees, and the community as a whole) towards Perum Jamkrindo.

The basis for implementing the assessment/evaluation of the GCG implementation at Perum Jamkrindo refers to the State Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises as amended by the State Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012, and Letter of the Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, concerning the Indicators/Parameters of Assessment/Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in the State-Owned Enterprises.

Metode penilaian dan evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012.

This assessment and evaluation method is carried out using a measuring instrument, which consists of 6 (six) aspects with the weight has been determined as stipulated in the Copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012.

6 ASPEK ASSESSMENT GCG
(KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN NO. SK-16/S.MBU/2012)
6 ASPECTS OF GCG ASSESSMENT
(DECREE OF THE SECRETARY OF THE MINISTRY OF SOES NO. SK-16 / S.MBU / 2012)

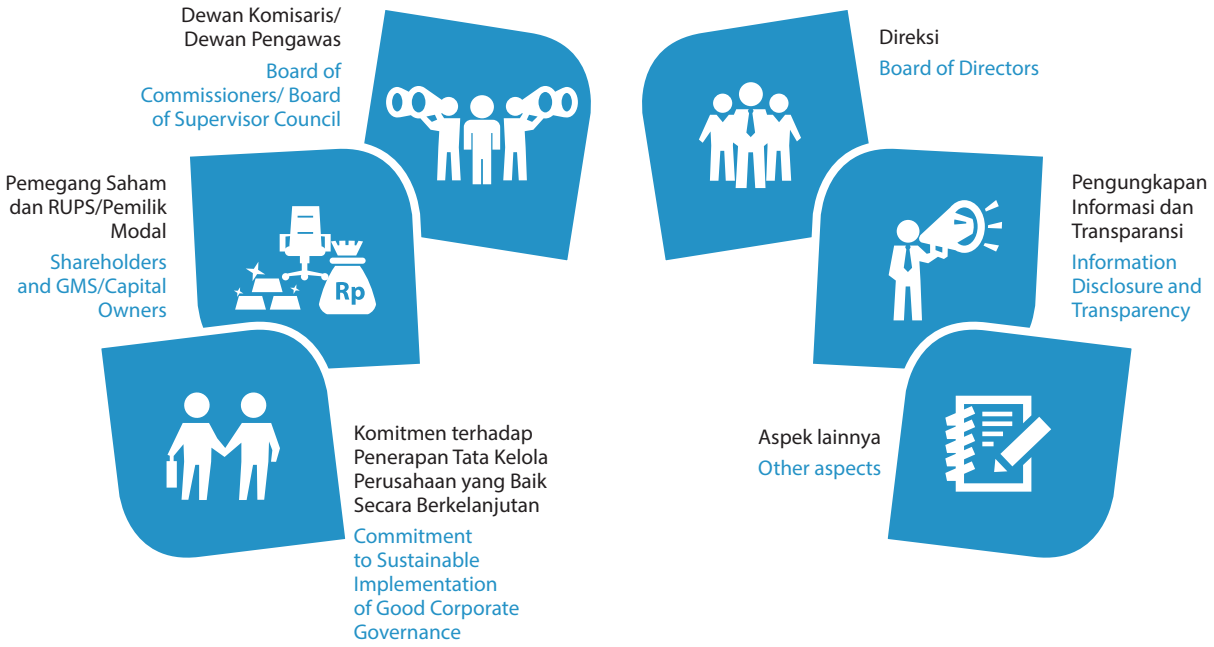

ASSESSMENT PENERAPAN GCG TAHUN UKUR 2018, HASIL, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUTNYA HINGGA AKHIR TAHUN BUKU 2019

Assessment penerapan GCG untuk periode tahun ukur 2018 dilakukan secara independen oleh PT Cita Negeri Amanah, dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan GCG di lingkungan Perum Jamkrindo. Proses penilaian dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 56/SPK/4.2/II/2018 tanggal 28 Desember 2018.

2018 GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENT: THE RESULTS, RECOMMENDATIONS, AND FOLLOW-UP UNTIL THE END OF 2019 FISCAL YEAR

The GCG implementation assessment for 2018 was conducted independently by PT Cita Negeri Amanah, with the aim of providing recommendations for continuous improvement on the GCG implementation at Perum Jamkrindo environment. The assessment process was carried out based on Task Order Letter No. 56 / SPK /4.2/ II/2018 dated December 28, 2018.

Jenis Penilaian / Type of Assessment	*Assessment*
Penilai / Assessor	PT Cita Negeri Amanah *(Subsidiary of IICD)*
Metode Penilaian / Assessment Method	Indikator/Parameter Penilaian Atas Penerapan GCG SK16/S.MBU/2012 Indicators / Parameters of Assessment of GCG Implementation SK16 / S.MBU / 2012
Tahun Buku Penerapan / Year of Implementation	1 Januari - 31 Desember 2018 / January 1 - December 31, 2018
Periode Pengukuran / Period of Measurement	Januari 2019 - Maret 2019 / January 2019 - March 2019
Waktu Pelaporan / Reporting Time	21 Maret 2019 / March 21, 2019

Hasil penilaian penerapan GCG Perum Jamrkindo tahun 2018 mencapai total skor sebesar 95,716 dengan kualifikasi "Sangat Baik", yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

The results of the assessment of the GCG implementation at Perum Jamrkindo in 2018 reached a total score of 95.716 with a qualification category of "Very Good". The details can be seen in the following table.

	Aspek	Bobot	Nilai	Pencapaian (%)	Aspect
1		2	3	(4=3/2 x 100)	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secaran Berkelanjutan	7,000	6,924	98,913	Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation
II	Pemegang Saham dan RPB/Pemilik Modal	9,000	8,957	99,519	Shareholders and GMS/Capital Owne
III	Dewan Pengawas	35,000	33,351	95,301	Board of Supervisor Council
IV	Direksi	35,000	33,355	95,289	Board of Directors
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,000	8,754	97,267	Information Disclosure and Transparency
VI	Aspek Lainnya	5,000	4,375	87,500	Other Aspects
	Skor Keseluruhan	**100,000**	**95,716**	**95,716**	**Total Score**
	Peringkat Kualitas Penerapan GCG	**"Sangat Baik" / 'Very Good'**			GCG Implementation quality

KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN ASSESSMENT
CLASSIFICATION OF ASSESSMENT IMPLEMENTATION QUALITY

Nilai di atas 85	Sangat Baik	Very Good	**Score above 85**
75 < Nilai ≤ 85	Baik	Good	**75 < Score ≤ 85**
60 < Nilai ≤ 75	Cukup Baik	Satisfactory	**65 < Score ≤ 75**
50 < Nilai ≤ 60	Kurang Baik	Poor	**50 < Score ≤ 60**
Nilai ≤ 50	Tidak Baik	Bad	**Score ≤ 50**

Berdasarkan hasil asesmen GCG 2018, Perum Jamkrindo memperoleh sebesar 95,716 dengan predikat sangat baik dan terdapat 35 usulan perbaikan yang dimana sampai saat ini 21 usulan perbaikan atau sebesar 60% dari keseluruhan usulan perbaikan telah ditindaklanjuti. Berikut rincian *Area of Improvement* pada tahun 2018 pada masing-masing aspek beserta progresnya.

Based on the results of the 2018 GCG assessment, Perum Jamkrindo obtained a score of 95.716 with a very good predicate and there were 35 improvement recommendations where to date 21 improvement recommendations or 60% of all improvement recommendations have been followed up. The following were the details of Area of Improvement in 2018 on each aspect along with its progress.

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Recommendations for 2018 GCG Implementation Assessment	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 / Follow-ups as of December 31, 2019		
		Status	Periode Tindak Lanjut Follow-up Perio	Bentuk Tindak Lanjut Form of Follow-up
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation			
1.	Perusahaan agar melakukan upaya sosialisasi makna pedoman perilakuserta pemberian contoh-contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari The Company should make efforts to socialize the meaning of the code of conduct and provided examples of implementation in everyday life	✓	2019	Perusahaan telah mengeluarkan Memorandum melalui Divisi MSDM nomor: B.1556/INT/SDM/KPS/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 perihal surat pernyataan komitmen pedoman perilaku (*Code of Conduct*) Tahun 2019. The company has issued a Memorandum through the HRM Division number: B.1556 / INT / SDM / KPS / X / 2019, dated October 24, 2019 regarding a statement of commitment to the Code of Conduct in 2019.

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Recommendations for 2018 GCG Implementation Assessment	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 / Follow-ups as of December 31, 2019		
		Status	Periode Tindak Lanjut Follow-up Perio	Bentuk Tindak Lanjut Form of Follow-up
2.	Perusahaan agar menampilkan informasi program Pengendalian Gratifikasi pada *website* Perusahaan sehingga mudah ditemukan oleh *stakeholders*. The company should display information on the Gratification Control program on the Company's website so that it was easily found by stakeholders.	X	-	Sekretaris Perusahaan telah bermemo ke Divisi TI untuk penambahan informasi program Pengendalian Gratifikasi pada halaman pertama *website*. The Corporate Secretary has sent a memo to the IT Division for additional information on the Gratification Control program on the first page of the website.
3.	Perusahaan agar menyediakan media sosialisasi (misalnya: standing banner, dan sebagainya) yang dipasang pada seluruh unit kantor Perum Jamkrindo (Kantor Pusat, Kantor Cabang Khusus, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor KUP dan unit lain sesuai dengan pertimbangan manajemen) The Company should provide socialization media (such as standing banners, etc.) that were installed in all Perum Jamkrindo office units (Head Office, Special Branch Offices, Regional Offices, Branch Offices, Service Unit Offices, and other units in accordance with management considerations)	✓	2019	Perusahaan telah melakukan media sosialisasi melalui *standing banner* pada seluruh unit kerja. The company has conducted socialization media through standing banners in all work units.
4.	Perusahaan agar menampilkan informasi link saluran pengaduan WBS di *website* secara lebih jelas, yaitu dengan memasang icon pada halaman pertama *website*, misalnya antara lain menempatkannya secara bersebelahan dengan *icon link* "Lapor.Go". The Company should display the WBS complaint channel link information on the website more clearly, by placing an icon on the first page of the website, such as by placing it next to the "Lapor.Go" link icon.	✓	2019	Perusahaan telah melakukan pemutakhiran website WBS melalui portal wbs.jamkrindo.co.id The Company has updated the WBS website through the wbs.jamkrindo.co.id portal
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal / Shareholders and GMS/Capital Owners			
	Perusahaan agar meningkatkan kualitas sistem penilaian kinerja Direksi dengan memberikan ukuran kinerja untuk masing-masing Direksi/Direktorat. The Company should improve the quality of the Board of Directors' performance appraisal system by providing performance measures for each Director / Directorate.	X	-	Saat ini kinerja untuk Direksi dilakukan secara kolegial. Sedangkan untuk ukuran kinerja per masing-masing Direksi/ Direktorat masih menjadi pembahasan dengan Divisi Perencanaan Strategis. Currently, the performance of the Board of Directors was conducted collegial. As for the performance measures for each Director/ Directorate were still being discussed with the Strategic Planning Division.
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas / Board of Commissioners/ Board of Supervisor Council			
	Perusahaan agar melakukan improvement terhadap *Board Manual* yang meliputi: a. Aturan mengenai jangka waktu pemberian tanggapan Dewan Pengawas. b. Kebijakan spesifik pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko. c. Kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya d. Kebijakan pengadaan dan pelaksanaan e. Kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan dan f. Aturan yang jelas dan spesifik mengenai pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Pengawas atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan anggaran dasar The Company should make improvements to the Board Manual, which included: a. Rules regarding the period for the Board of Supervisor Council's response. b. The specific policy of supervision and advice provision on risk management policies. c. The Company's information technology system policies and their implementation. d. Procurement policy and its implementation. e. Quality and service policy and its implementation and f. Clear and specific rules regarding Board of Supervisor Council's supervision and advice provision on the Company's compliance in implementing the applicable laws and regulations with the Articles of Association.	X	-	*Board Manual* telah diperbaharui dan masih dalam tahap finalisasi

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Recommendations for 2018 GCG Implementation Assessment	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 / Follow-ups as of December 31, 2019		
		Status	Periode Tindak Lanjut Follow-up Perio	Bentuk Tindak Lanjut Form of Follow-up
2.	Dewan Pengawas agar melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual The Board of Supervisor Council should conduct an assessment of the Board of Directors' performance individually	X	-	Saat ini kinerja untuk Direksi dilakukan secara kolegial. Sedangkan untuk ukuran kinerja per masing-masing Direksi/ Direktorat masih menjadi pembahasan dengan Divisi Perencanaan Strategis Currently, the performance of the Board of Directors was conducted collegial. As for the performance measures for each Director/ Directorate were still being discussed with the Strategic Planning Division.
3.	Sekretariat Dewan Pengawas agar menyampaikan bahan-bahan rapat paling lambat 3 hari sebelum diadakannya rapat serta dokumentasikan penyerahan dokumen tersebut. The Secretariat of the Board of Supervisor Council should submit meeting materials no later than 3 days before the meeting and documented the submission of those documents.	✓	2019	Sekretariat Dewan Pengawas telah menyampaikan bahan-bahan rapat paling lambat 3 hari sebelum diadakannya rapat serta mendokumentasikan penyerahan dokumen tersebut baik melalui *email* dan *personal chat*. The Secretariat of the Board of Supervisor Council has submitted the materials no later than 3 days before the meeting held and documented the submission of those documents both via email and personal chat.
IV	Direksi / Board of Directors			
1.	Perusahaan agar meningkatkan kualitas SOP proses bisnis, sebagai berikut: a. Peningkatan peran komite investasi b. Peningkatan kualitas SOP dalam proses investasi ke reksa dana c. Peningkatan kualitas SOP dalam proses pemilihan manajer investasi d. Pemantauan dan evaluasi investasi The Company should improve the quality of business process SOPs, as followed: a. Increasing the role of the investment committee b. Improving the quality of SOP in the investment process in mutual funds c. Improving the quality of SOP in the selecting process of investment managers d. IInvestment monitoring and evaluation	✓	2019	Telah dilakukan perbaikan kualitas SOP proses bisnis melalui Peraturan Direksi Nomor:07/Per-DIR/5/IV/2019 tanggal 30 April 2019 perihal Kebijakan Umum Investasi Improvements have been made to the quality of business process SOPs through Board of Directors' Regulation Number: 07 / Per-DIR / 5 / IV / 2019 dated April 30, 2019, concerning the Investment General Policy
2.	Perusahaan agar segera mengisi kekosongan jabatan yang kososng (Satu jabatan Kepala Divisi dan Satu Jabatan Kepala Kantor Wilayah) The Company should immediately fill vacant positions (One position of Division Head and One Position of Regional Office Head)	✓	2019	Perusahaan telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi No.26/SKD/4/V/2019 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat untuk pengisian kekosongan jabatan yakni Kepala Divisi Umum dan Pemimpin Wilayah IV-Bandung The Company has issued a Decree of the Board of Directors No.26 / SKD / 4 / V / 2019 concerning the Appointment and Transfer of Officials to fill vacancies, namely the Head of General Affairs Division and Head of Regional Office IV-Bandung
3.	Direksi agar menuntaskan pengelolaan peluang bisnis sehingga dapat diperoleh manfaat bagi Perusahaan. The Board of Directors should complete the business opportunities management so that benefits for the Company could be obtained.	✓	2019	Perusahaan telah menuntaskan pengelolaan peluang bisnis dengan mengakses ke Website www.umkmlayak.co.id serta Launching 28 November 2019 berbarengan dengan Jamkrindo UMKM *Apretiation Awards* The Company has completed the business opportunities management by accessing the Website www.umkmlayak.co.id and launching on November 28, 2019, together with the Jamkrindo UMKM Appreciation Awards

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Recommendations for 2018 GCG Implementation Assessment	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 / Follow-ups as of December 31, 2019		
		Status	Periode Tindak Lanjut Follow-up Perio	Bentuk Tindak Lanjut Form of Follow-up
4.	Direksi agar menerapkan penandatanganan kontrak kinerja pada jabatan dalam struktur organisasi yang lebih las sehingga di bawah Kantor Cabang atau Divisi sehingga apat dijadikan acuan dalam penyusunan KPI individu seluruh pegawai Perusahaan Board of Directors should implement the signing of performance contracts for positions in a broader organizational structure so that under the Branch Office or Division so that it could be used as a reference in the preparation of individual KPIs of all Company employees	✓	2019	Kontrak kinerja pada jabatan pada tahun 2019 telah ditandatangani secara otomatis melalui aplikasi PMS (*Performance Management System*) Performance contracts for positions in 2019 have been automatically signed through the PMS (Performance Management System) application
5.	Perusahaan agar meningkatkan kualitas sistem manajemen kinerja seperti: a. Menyusun *strategy map* dan CSF (*Critical Success Factors*) b. Menyusun KPI yang seimbang (*balanced*) dan terintegrasi c. Menyusun KPI berjenjang dari pimpinan hingga pelaksana d. Menyusun KPI yang bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur e. Menyusun KPI yang mampu mengukur kinerja pokok setiap unit organisasi maupun individu The Company should improve the quality of performance management systems such as: a. Preparing a strategy map and CSF (Critical Success Factors) b. Preparing a balanced and integrated KPIs c. Preparing tiered KPIs from leaders to implementers d. Preparing quantitative KPIs that could be measured e. Preparing KPIs that were able to measure the basic performance of each organizational unit and individual	✓	2019	Penyusunan KPI telah tersistematis melalui portal PMS (172.27.1.194/home) The preparation of KPIs has been systematized via the PMS portal (172.27.1.194/home)
6.	Perusahaan agar melakukan upaya berkelanjutan dalam rangka pengembangan teknologi untuk mendapatkan manfaat atas berbagai isu bisnis. The Company should make continuous efforts in developing technology to benefit from various business issues.	✓	2019	Perusahaan telah melakukan upaya berkelanjutan dengan cara menyampaikan dokumentasi realisasi atas penerapan master plan TI melalui memorandum yang disampaikan ke Direksi terkait tiap bulannya. The Company has made sustainable efforts by submitting documentation of the realization of the IT master plan implementation through memorandum that was submitted to the relevant Board of Directors every month.
7.	Perusahaan agar meningkatkan nilai kepuasan pelanggan khususnya pada aspek survey pada segmen "Pesaing KUR" yang nilainya masih 74,5 atau kategori "Kurang Baik". The Company should increase the score of customer satisfaction, especially in the survey aspects in the segment of "KUR competitors" whose score was still 74.5 or the category of "Poor".	✓	2019	Berdasarkan Konfirmasi dari Divisi Perencanaan Strategis iketahui bahwa nilai pesaing KUR bukan lah area pengelolaan Perum Jamkrindo melainkan nilai kepusasn pelanggan yang harus di Kelola adalah Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Mitra KUR dan Mitra Non KUR " Untuk asesmen di 2019 bisa menjadi *point of view* untuk nilai kenaikan dan penurunan atas tingkat kepuasan dimaksud Based on confirmation from the Strategic Planning Division, it was known that the KUR competitor score was not the management area of Perum Jamkrindo, but the customer satisfaction score that must be managed was the customer satisfaction level for KUR Partners and Non-KUR Partners. The 2019 assessment could be the point of view to an increase and decrease scores on the satisfaction level referred to
8.	Perusahaan agar meningkatkan sistem pengendalian mutu produk perusahaan The Company should improve the Company's product quality control system	✓	2019	Perusahaan telah meningkatkan sistem pengendalian mutu melalui Laporan ISO yang rilis pada tahun 2019 terkait ISO 9001:2015 dan Laporan Rekapitulasi Pengaduan *Call Center* The Company has improved the quality control system through ISO Reports released in 2019 related to ISO 9001: 2015 and the Call Center Complaints Recapitulation Report

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 / Recommendations for 2018 GCG Implementation Assessment	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 / Follow-ups as of December 31, 2019		
		Status	Periode Tindak Lanjut / Follow-up Perio	Bentuk Tindak Lanjut / Form of Follow-up
9.	Perusahaan agar melaksanakan pemetaan kebutuhan kompetensi dan Analisa kebutuhan pelatihan (*training need analysis*) yang memadai untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan kompetensi perusahaan. The Company should carry out the mapping of competency needs and adequate training need analysis to anticipate the growth of Company competency needs.	✓	2019	Perusahaan telah melaksanakan pemetaan kebutuhan kompetensi dan Analisa kebutuhan pelatihan (*training need analysis*) yang memadai melalui edaran kuesioner yang diberikan kepada seluruh karyawan terkait minat kompetensi yang ingin dikembangkan oleh karyawan The company has carried out a mapping of competency needs and adequate training needs analysis through a questionnaire distributed to all employees related to the competency interests that employees want to develop
10.	Perusahaan agar meningkatkan anggaran biaya pelatihan pegawai sehingga dapat memenuhi standar *best practice* serta memenuhi kebutuhan pengembangan pegawai berdasarkan hasil *training need analysis*. The Company should increase the budget for employees' training expenses so that they could meet best practice standards and met employee development needs based on the results of training need analysis.	✓	2019	Perusahaan telah meningkatkan anggaran biaya pelatihan pegawa yang memadai untuk kebuthan pengembangan pegawai berdasarkan hasil *training need analysis*. The Company has increased the budget for adequate employee training expenses for employee development needs based on the results of training need analysis.
11.	Direksi agar menetapkan kebijakan: a. Pengangkatan Dekom/Dewas dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi Dekom/Dewas dan Direksi pada anak perusahaan (*subsidiary governance*) b. Proses pengurusan Anak Perusahaan yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN dan OJK; dan c. Besaran tantiem Pengurus Anak Perusahaan yang mengacu pada formulasi yang didasarkan pada laba bersih dan skor KPI Board of Directors should set policies: a. Appointment of Board of Commissioners / Board of Supervisor Council and Board of Directors, determination of performance targets and performance appraisal as well as incentives for Board of Commissioners/ Board of Supervisor Council and Board of Directors in subsidiaries (subsidiary governance) b. The managing process of subsidiaries refer to the Minister of SOE s and OJK Regulations; and c. Amount of the tantiem of the Subsidiary Management refers to a formulation based on net profit and KPI scores	X	-	Belum ditindaklanjuti Has not been followed up
12.	Perusahaan agar melakukan pembahasan/kajian PSAK 71 dan kaitannya dengan akuntansi perusahaan The Company should discuss/study PSAK 71 and its relation to corporate accounting	✓	2019	Perusahaan telah mengeluarkan memorandum No. B.1308/INT/SDM/DLT/IX/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Undangan *Workshop* penerapan PSAK 71 dan Dampaknya terhadap Bisnis Perbankan dalam Rangka Mencari Peluang Bisnis Penjaminan The Company has issued a memorandum No. B.1308 / INT / SDM / DLT / IX / 2019 dated September 24, 2019, concerning Workshop Invitation on the PSAK 71 Implementation and its Impacts on Banking Businesses in the Framework of Finding Guaranteed Business Opportunities
13.	Direksi agar melaksanakan program manajemen risiko secara efektif dan berkesinambungan sehingga hasil identifikasi risiko dapat mengakomodasi seluruh risiko yang ada dan penilaian risiko dapat mencerminkan nilai risiko yang faktual Board of Directors should carry out risk management programs effectively and sustainably so that the results of risk identification could accommodate all existing risks and risk assessment could reflect factual risk values	✓	2019	Direksi telah memberikan disposisi untuk Laporan Profil Risiko yang disampaikan kepada Direksi melalui Divisi Manajemen Risiko Board of Directors has provided dispositions for the Risk Profile Report submitted to the Board of Directors through the Risk Management Division

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Recommendations for 2018 GCG Implementation Assessment	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 / Follow-ups as of December 31, 2019		
		Status	Periode Tindak Lanjut Follow-up Perio	Bentuk Tindak Lanjut Form of Follow-up
14.	Direksi agar melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko secara berkelanjutan. Board of Directors should carry out monitoring of risk management programs on an ongoing basis.	✓	2019	Direksi melaksanakan pemantauan program manajemen risiko melalui laporan triwulan yang disampaikan dari Divisi Manajemen Risiko Board of Directors monitored the risk management program through quarterly reports submitted by the Risk Management Division
15.	Kepala SPI agar menambah jadwal pelatihan/*training* tematik profesi audit internal untuk meningkatkan pengetahuan *auditor* The Head of SPI should add a thematic training schedule for the internal audit profession to increase auditor's knowledge	✓	2019	Selama tahun 2019, Kepala SPI telah melaksanakan pelatihan/*training* kepada *auditor* diantaranya pelatihan QIA dan Pelatihan *Fraud Auditing* During 2019, the Head of SPI has conducted training for auditors including QIA training and Fraud Auditing Training
16.	Kepala SPI agar melaksanakan program jaminan dan peningkatan kualitas Fungsi Audit Internal, yang mencakup seluruh aspek aktivitas fungsi pengawasan intern, khususnya program reviu berkala baik internal maupun eksternal The Head of SPI should carry out a guarantee program and improved the quality of the Internal Audit Function, which covered all aspects of the activities of the internal control function, specifically the internal and external periodic review program	✓	2019	Selama tahun 2019, Kepala SPI telah melaksanakn program jaminan dan peningkatan kualitas fungsi audit secara internal oleh Bagian Pengembangan Standar Kualitas Audit dan secara Eksternal oleh konsultan During 2019, the Head of SPI has implemented a guarantee program and improved the quality of the audit function internally by the Audit Quality Standards Development Section and externally by consultants
17.	Sekretaris perusahaan agar mencantumkan jalannya rapat (dinamika rapat) pada seluruh risalah rapat Corporate Secretary should include the meeting proceedings (meeting dynamics) in all minutes of the meeting	✓	2019	Sekretaris Perusahaan telah mencantumkan jalannya rapat (dinamika rapat) notulen rapat yang menjadi kesatuan dengan risalah rapat Corporate Secretary has included the meeting proceedings (meeting dynamics) Minutes of meetings were united with the minutes of the meeting
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Information Disclosure and Transparency			
1.	Perusahaan agar mempublikasikan berbagai dokumen tata Kelola perusahaan,termasuk *Board Manual*, Pedoman Perilaku, dan Program Pengendalian Gratifikasi Perusahaan pada website The Company should publish various corporate governance documents, including the Board Manual, the Code of Conduct, and the Corporate Gratification Control Program on the website	X	-	Belum ditindaklanjuti Has not been followed up
2.	Perusahaan agar mempublikasikan berbagai dokumen yang memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik khusunya tentang program peningkatan layanan kepada konsumen serta biaya yang telah dikeluarkan The Company should publish various documents that contained the disclosure of Good Corporate Governance practices especially regarding service improvement programs to consumers and costs incurred.	X	-	Belum ditindaklanjuti Has not been followed up
VI	Aspek Lainnya / Other Aspects			
	Perusahaan agar selalu menjaga menjadi institusi terdepan dalam bisnis penjaminan di Indonesia sehingga dapat menjadi pusat *Benchmarking* nasional maupun regional The company should always be the leading institution in the guarantee business in Indonesia so that it could become a national and regional benchmarking center	✓	2019	Perusahaan memperoleh penghargaan Penjamin KUR terbaik tahun 2019 dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 12 Desember 2019 The Company received the Best KUR Guarantor Award in 2019 from the Coordinating Minister for Economic Affairs on December 12, 2019

✓ = telah ditindaklajuti / has been followed up X = belum ditindaklanjuti / Has not been followed up

ASSESSMENT PENERAPAN GCG TAHUN UKUR 2019

Assessment penerapan GCG untuk periode tahun ukur 2019 dilakukan secara mandiri oleh Tim *Self Assessment* dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan GCG di lingkungan Perum Jamkrindo. Proses penilaian dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 767/SPT/1/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019.

ASSESSMENT OF THE GCG IMPLEMENTATION IN 2019

Assessment of the GCG implementation in 2019 carried out independently by the Self-Assessment Team intending to provide recommendations for continuous improvement of the GCG implementation within the Perum Jamkrindo environment. The assessment process was based on the Task Order Letter No. 767 / SPT / 1 / XII / 2019 dated December 3, 2019.

Jenis Penilaian/Type of Assessment	*Self Assessment*/Evaluasi/ Self-Assessment/Evaluation
Penilai /Assessor	Tim *Self Assessment Internal* Perum Jamkrindo Perum Jamkrindo Internal Self-Assessment Team
Metode Penilaian/ Assessment Method	Indikator/Parameter Penilaian Atas Penerapan GCG SK16/S.MBU/2012 Indicators / Parameters of the GCG Implementation Assessment SK16 / S.MBU / 2012
Tahun Buku Penerapan/ Year of Implementation	1 Januari - 31 Desember 2019 / January 1 - December 31, 2019
Periode Pengukuran/ Period of Measurement	1 Januari - 31 Desember 2019 / January 1 - December 31, 2019
Waktu Pelaporan/Reporting Time	10 Maret 2020 / March 10, 2020

Hasil penilaian penerapan GCG Perum Jamkrindo tahun 2019 mencapai total skor sebesar 95,804 dengan kualifikasi "Sangat Baik", yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

The results of the assessment of 2019 Perum Jamkrindo's GCG implementation reached a total score of 95.804 with "Very Good" qualifications, which could be seen in the following table

	Aspek	Bobot Weight	Nilai Score	Pencapaian Achievement (%)	Aspect
1		2	3	(4=3/2 x 100)	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,000	6,848	97,825	Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation
II	Pemegang Saham dan RPB/Pemilik Modal	9,000	8,944	99,374	Shareholders and GMS/ Capital Owners
III	Dewan Pengawas	35,000	33,289	95,111	Board of Supervisor Council
IV	Direksi	35,000	33,293	95,123	Board of Directors
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,000	8,431	93,679	nformation Disclosure and Transparency
VI	Aspek Lainnya	5,000	5,00	100,00	Other Aspects
	Skor Keseluruhan	**100,000**	**95,804**	**95,804**	**Total Score**
	Peringkat Kualitas Penerapan GCG		**Sangat Baik / Very Good**		**GCG Implementation Quality**

KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN ASSESSMENT
CLASSIFICATION OF ASSESSMENT IMPLEMENTATION QUALITY

Nilai di atas 85	Sangat Baik	Very Good	**Score above 85**
75 < Nilai ≤ 85	Baik	Good	**75 < Score ≤ 85**
60 < Nilai ≤ 75	Cukup Baik	Satisfactory	**65 < Score ≤ 75**
50 < Nilai ≤ 60	Kurang Baik	Poor	**50 < Score ≤ 60**
Nilai ≤ 50	Tidak Baik	Bad	**Score ≤ 50**

Hasil *Area of Improvement* (AOI) atau rekomendasi atas *assessment* penerapan GCG yang dilakukan untuk tahun 2019, serta ada atau tidak adanya kesamaan dengan hasil *assessment* untuk tahun buku 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The results of the Area of Improvement (AOI) or recommendations on the GCG implementation assessment carried out for 2019, and the presence or absence of similarities with the results of the assessment for the 2018 fiscal year could be seen in the table below.

No.	Hasil Assessment Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year Assessment Results	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 Follow Up as of December 31, 2019	
			Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Found in the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2018	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018) Follow-up Plan (If It was a GCG Implementation Assessment Recommendation for Fiscal Year 2018)
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation			
1.	Peraturan Direksi Nomor 14/Per-Dir/4/VI/2019 tentang Pengelolaan Budaya Kepatuhan terhadap Gratifikasi Perusahaan Umum Jamkrindo belum disosialisasikan secara efektif terhadap seluruh insan Perusahaan. Selain itu kegiatan diseminasi Pengendalian Gratifikasi kepada *stakeholders* belum efektif karena penyampaian informasi program Pengendalian Gratifikasi pada *website* perusahaan belum Nampak jelas pada halaman pertama *website* Board of Directors Regulation Number 14 / Per-Dir / 4 / VI / 2019 concerning Management of Compliance Culture to Perum Jamkrindo Gratification has not been effectively socialized to all Company personnel. In addition, the Gratification Control dissemination activities to stakeholders have not been effective because the submission of information on the Gratification Control program on the Company's website was not yet clearly appeared on the first page of the website	Agar ketentuan terkait gratifikasi disosialisasikan kepada seluruh insan Perusahaan, selain itu Perusahaan agar menampilkan informasi program Pengendalian Gratifikasi pada halaman pertama *website* perusahaan sehingga mudah ditemukan oleh *stakeholders*. In order for the provisions regarding gratification were socialized to all Company personnel, in addition to that the Company should display information on the Gratification Control program on the first page of the company's website so that it was easily found by stakeholders.	X	-
2.	Sarana/media perusahaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan *whistle blowing system* (WBS) belum efektif dan masih perlu ditingkatkan karena belum tersedia pada halaman pertama *website* Perusahaan. The Company facilities/media to support the implementation of the whistleblowing system (WBS) policy had not been effective and still needed to be improved because they were not yet available on the first page of the Company's website	Agar *website* Perusahaan menampilkan informasi *link* saluran pengaduan WBS secara lebih jelas, yaitu dengan memasang *icon* pada halaman awal website sehingga mudah diakses. In order for the Company's website to display the WBS complaint channel link information more clearly, by placing an icon on the website's first page so that it was easily accessed.	X	-

No.	Hasil Assessment Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year Assessment Results	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 Follow Up as of December 31, 2019	
			Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Found in the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2018	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018) Follow-up Plan (If It was a GCG Implementation Assessment Recommendation for Fiscal Year 2018)
II.	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners			
1.	Penetapan anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas oleh RUPS/Pemilik Modal selambat-lambatnya 30 hari sejak masa jabatan tersebut berakhir, namun pada realisasinya Pengangkatan Sdr. Moh. Muklas Rowi (Anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas) pada tanggal 17 Oktober 2019 menggantikan Sdr Subandriyo yang diberhentikan dengan hormat pada tanggal 31 Desember 2018 dan Pengangkatan Sdri Ari Wahyuni (Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas) pada tanggal 3 Januari 2019 menggantikan Sdr Dahlan Siamat yang diberhentikan dengan hormat pada tanggal 28 Juni 2018 sehingga penetapan anggota Dewan Pengawas tersebut melebihi 30 hari. Determination of the members of the Board of Commissioners/Board of Supervisor Council by the GMS/Capital Owners no later than 30 days after the end of the term of office, but in the realization of the appointment of Mr. Moh. Muklas Rowi (Member of the Board of Commissioners/Board of Supervisor Council) on October 17, 2019, replaced Mr. Subandriyo who was honorably dismissed on December 31, 2018, and the appointment of Ms. Ari Wahyuni (Member of the Board of Commissioners/ Board of Supervisor Council) on January 3, 2019, replaced Mr. Dahlan Siamat who honorably dismissed on June 28, 2018, so that the appointment of members of Board of Supervisor Council exceeded 30 days.	Agar pemegang saham lebih memperhatikan tenggat waktu dalam jangka waktu penetapan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris In order to the shareholders paid more attention to the deadline of the period for determination of the members of the Board of Supervisor Council/Board of Commissioners	X	-
2.	Perusahaan telah memiliki sistem/ pedoman penilaian kinerja Direksi yang telah memuat *indicator* kinerja utama dan kriteria keberhasilan, yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor:PER-10/ MBU/2014 tanggal25 Juli 2014 tentang *indicator* Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan. Selain itu, Perusahaan juga sudah memiliki pedoman berupa Peraturan Direksi Nomor 9/Per-Dir/1/VII/2018 tentang Deskripsi Pekerjaan Perum Jamkrindo. Namun masih terdapat area of improvement yang perlu diperhatikan pada indicator GCG ini, yaitu perlunya ditetapkan ukuran kinerja untuk masing-masing Direksi secara individual.	Agar meningkatkan kualitas sistem penilaian kinerja Direksi dengan memberikan ukuran kinerja untuk masing-masing Direksi secara individual In order for the quality of the Board of Directors' performance appraisal system improved by providing performance measures for each Board of Directors individually	X	-

No.	Hasil Assessment Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year Assessment Results	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 Follow Up as of December 31, 2019		
			Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Found in the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2018	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018) Follow-up Plan (If It was a GCG Implementation Assessment Recommendation for Fiscal Year 2018)	
	The Company had a system/guidelines for assessing the Board of Directors' performance which included key performance indicators and success criteria, namely the Minister of SOEs Regulation Number: PER-10 / MBU / 2014 dated July 25, 2014, concerning Assessment Indicators of the Sound Level of SOEs Financial Services in the Insurance and Guarantee Services field. Besides, the Company also had guidelines in the form of Board of Directors' Regulation Number 9 / Per-Dir / 1 / VII / 2018 concerning The Job Description of Perum Jamkrindo. However, there were still areas of improvement that needed to be considered in these GCG indicators, namely the need to set performance measures for each Board of Directors individually.				
3.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi. Hal tersebut tertuang pada Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas Perum Jamkrindo tahun 2019 romawi III bagian A ayat e. (a) seharusnya Rencana Kerja Dewan Pengawas atas proses persetujuan RJPP dituangkan dalam RKAT tahun 2018 agar hal tersebut sejalan dengan dikeluarkannya Surat tanggapan Dewan Pengawas atas RJPP Perum Jamkrindo. Selain itu dalam matriks kegiatan Komite Audit pada Juni dan Juli terdapat kegiatan *Review* atas RJPP. The Board of Commissioners/Board of Supervisor Council approved the Corporate Long-Term Plan (RJPP) draft submitted by the Board of Directors. It was stated in the Work Plan and Budget of Perum Jamkrindo's Board of Supervisor Council for 2019 roman III section A paragraph e. (a) The Board of Supervisor Council's Work Plan for the RJPP approval process should be outlined in the 2018 RKAT so that it was in line with the issuance of the Board of Supervisor Council's response letter to Perum Jamkrindo RJPP. In addition, the Audit Committee's activities matrix in June and July contained a review of the RJPP.	Agar Rencana Kerja Dewan Pengawas atas proses persetujuan RJPP dituangkan dalam RKAT pada tahun sebelum RJPP dirilis. In order for the Board of Supervisor Council's Work Plan for the RJPP approval process was stated in the RKAT in the year before the RJPP was released.	X	-	

No.	Hasil Assessment Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year Assessment Results	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 Follow Up as of December 31, 2019	
			Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Found in the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2018	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018) Follow-up Plan (If It was a GCG Implementation Assessment Recommendation for Fiscal Year 2018)
4.	*Board Manual* belum dilengkapi dengan kebijakan mengenai jangka waktu pemberian tanggapan Dewan Pengawas atas rancangan RKAP yang diusulkan oleh Direksi, namun Dewan Pengawas telah melaksanakan proses pemberian tanggapan rancangan RKAP secara proaktif/dalam jangka waktu yang terbaik. The Board Manual has not yet been equipped with a policy regarding the time frame for the Board of Supervisor Council's response to the RKAP draft proposed by the Board of Directors, but the Board of Supervisor Council has carried out the process of proactively responding to the RKAP draft in the best time frame	Agar dilakukan *improvement* terhadap *Board Manual* sehingga mencakup aturan mengenai jangka waktu pemberian tanggapan Dewan Pengawas atas rancangan RKAP yang diusulkan oleh Direksi In order for the improvements to the Board Manual made so that covered rules regarding the time period for the Board of Supervisor Council's response to the RKAP draft proposed by the Board of Directors	✓	*Board Manual* terbaru telah selesai disusun namun masih dalam proses pengesahan. The latest Board Manual has been prepared but was still in the process of approval.
5.	Kebijakan Dewan Pengawas mengenai pengelolaan perusahaan dalam *Board Manual* belum mencakup kebijakan spesifik terkait fungsi pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaannya. The Board of Supervisor Council's policies regarding company management in the Board Manual did not cover specific policies related to the function of supervision and the advice provision on the Company's risk management policies and their implementation.	Agar dilakukan *improvement* terhadap *Board Manual* sehingga mencakup kebijakan spesifik pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Keputuan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN. In order for the improvements to the Board Manual made so that covered specific policies on supervision and advice provision on Company risk management policies and their implementation as referred to in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs Number: SK-16 / S.MBU / 2012 concerning Indicators / Parameters for Assessment and Evaluation of Governance Implementation Good Company (GCG) in SOEs.	✓	*Board Manual* terbaru telah selesai disusun namun masih dalam proses pengesahan. The latest Board Manual has been prepared but was still in the process of approval.

No.	Hasil Assessment Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year Assessment Results	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 Follow Up as of December 31, 2019 Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Found in the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2018	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 Follow Up as of December 31, 2019 Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018) Follow-up Plan (If It was a GCG Implementation Assessment Recommendation for Fiscal Year 2018)
6.	Kebijakan Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pengelolaan perusahaan belum secara spesifik mencakup kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya. The Board of Supervisor Council's policy regarding supervision and advice provision on company management did not specifically cover the Company's information technology system policy and its implementation.	Agar dilakukan *improvement* terhadap *Board Manual* sehingga telah secara spesifik mencakup kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan TataKelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. In order for the improvements to the Board Manual made so that specifically has covered Company's information technology system policies and their implementation as referred to in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs Number: SK-16 / S.MBU / 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Good Corporate Governance (GCG) Implementation in SOEs.	✓	*Board Manual* terbaru telah selesai disusun namun masih dalam proses pengesahan. The latest Board Manual has been prepared but was still in the process of approval
7.	Kebijakan Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pengelolaan perusahaan belum secara spesifik mencakup mengatur mengenai kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. The Board of Supervisor Council's policy on supervision and advice provision on company management did not specifically cover regulating procurement policies and its implementation.	Agar dilakukan *improvement* terhadap *Board Manual* sehingga telah secara spesifik mencakup kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan TataKelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. n order for the improvements to the Board Manual made so that specifically has covered procurement policies and its implementation as referred to in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs Number: SK-16 / S.MBU / 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation on the Good Corporate Governance (GCG) Implementation in SOEs.	✓	*Board Manual* terbaru telah selesai disusun namun masih dalam proses pengesahan. The latest Board Manual has been prepared but was still in the process of approval

No.	Hasil Assessment Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year Assessment Results	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 Follow Up as of December 31, 2019 Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Found in the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2018	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 Follow Up as of December 31, 2019 Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018) Follow-up Plan (If It was a GCG Implementation Assessment Recommendation for Fiscal Year 2018)
8.	Kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kegiatan operasi perusahaan, namun belum mengatur secara spesifik mengenai kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya. The policy on supervision and advice provision on company operations, but has not yet specifically regulated the quality policy and services and its implementation.	Agar dilakukan *improvement* terhadap *Board Manual* sehingga mencakup kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan TataKelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. In order for the improvements to the Board Manual made, so that covered the quality policies and services and their implementation as referred to in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs Number: SK-16 / S.MBU / 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Good Corporate Governance (GCG) Implementation in SOEs.	✓	*Board Manual* terbaru telah selesai disusun namun masih dalam proses pengesahan. The latest Board Manual has been prepared but was still in the process of approval
9.	Telah terdapat kebijakan umum mengenai pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Pengawas atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga. Kebijakan ini perlu dimuat secara spesifik pada *Board Manual*. There has been a general policy regarding the supervision and advice provision of the Board of Supervisor Council on the Company's compliance in implementing the applicable laws and regulations and the articles of association and company compliance with all agreements and commitments made by the Company with third parties. This policy needed to be specifically stated in the Board Manual.	Agar dilakukan *improvement* terhadap *Board Manual* sehingga mencakup aturan yang jelas dan spesifik mengenai pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Pengawas atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga. n order for the improvements to the Board Manual made so that covered clear and specific rules regarding supervision and advice provision of the Board of Supervisor Council on the Company's compliance in implementing applicable laws and regulations and the articles of association and company compliance with all agreements and commitments made by the Company with third parties.	X	-
10.	Proses penandatanganan Laporan Manajemen Triwulanan hanya ditandatangani oleh Direksi tanpa ada tandatangan Ketua Dewan Pengawas The process of signing the Quarterly Management Report was only signed by the Board of Directors without the signature of the Chairman of the Board of Supervisor Council	Agar Laporan Manajmen Triwulanan ditandatangani juga oleh Ketua Dewan Pengawas/ Komisaris Utama In order for the Quarterly Management Report was also signed by the Chairman of the Board of Supervisor Council/ President Commissioner	X	-

No.	Hasil Assessment Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year Assessment Results	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 Follow Up as of December 31, 2019 Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Found in the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2018	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018) Follow-up Plan (If It was a GCG Implementation Assessment Recommendation for Fiscal Year 2018)
11.	Dewan Pengawas telah melakukan penilaian kinerja direksi secara keseluruhan (kolegial) dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal nammun Dewan Pengawas belum melakuka penilaian kinerja direksi secara individual. The Board of Supervisor Council has assessed the overall performance of the Board of Directors (collegial) and reported the results of the assessment to the Shareholders/Capital Owners but the Board of Supervisor Council has not done an assessment of the Board of Directors' performance individually.	Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual dan Dewan Pengawas menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individual kepada RUPS dalam Laporan Kegiatan dan Keuangan yang disampaikan kepada Pemilik Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor:SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN. The Board of Supervisor Council assessed the performance of the Board of Directors individually and the Board of Supervisor Council submitted the results of the Board of Directors' performance evaluation collegially and individually to the GMS in the Activity Report and Financial Statement submitted to the Capital Owners as referred to in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs Number: SK-16 / S.MBU / 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Good Corporate Governance (GCG) Implementation in SOEs.	✓	
12.	Berdasarkan hasil *assessment* tahun 2018 terdapat delapan AOI yang merupakan ranah Dewan Pengawas Perusahaan. Dari delapan tersebut, satu AOI telah selesai, enam AOI terkait *Board Manual* yang sedang dalam proses pengesahan dan satu AOI terkait penilaian kinerja Direksi secara individual. Based on the 2018 assessment results, there were eight AOI which were the domain of the Company's Board of Supervisor Council. Of the eight, one AOI has been completed, six AOI related to the Board Manual that was in the process of ratification, and one AOI related to the performance assessment of the Board of Directors individually.	Menindaklanjuti AOI tahun 2018 yang belum ditindaklanjuti. Following up on AOI 2018 that hasn't been followed up yet.	✓	

No.	Hasil Assessment Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year Assessment Results	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 Follow Up as of December 31, 2019	
			Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Found in the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2018	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018) Follow-up Plan (If It was a GCG Implementation Assessment Recommendation for Fiscal Year 2018)
13.	Dewan Pengawas telah melakukan evaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Pengawas yang menuangkan evaluasi tersebut belum terdapat Risalah Rapat Dewan Pengawas yang menuangkan evaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Pengawas The Board of Supervisor Council has evaluated the achievement of the performance of each member of the Board of Supervisor Council who outlined the evaluation. There were not yet Minutes of the Meetings of Board of Supervisor Council which outlined the evaluation of the performance of each member of the Board of Supervisor Council	Agar dilakukan evaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Risalah Rapat. In order for the performance achievements evaluation of each member of the Board of Commissioners/Board of Supervisor Council carried out as outlined in the Minutes of Meeting.	X	-
14.	Dalam *Board Manual* ataupun Pedoman pengelolaan rapat Dewas belum mengatur atas evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan Pembahasan/ telaah atas usulan Direksi dan arahan/ keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi. The Board Manual or the Guidelines for the management of Board of Supervisor Council meetings have not yet regulated the evaluation of the follow-up to the results of the previous meeting and discussion/review of the Board of Directors' recommendations and the GMS directives/decisions related to the Board of Directors' recommendations.	Agar *Board Manual* ataupun Pedoman pengelolaan rapat Dewas mengatur atas evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan Pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi. In order for the Board Manual or the Guidelines for the management of the Board of Supervisor Council meetings regulated the evaluation of the follow-up to the results of the previous meeting and the discussion/review of the Board of Directors' recommendations and the GMS's directives/decisions related to the Board of Directors' recommendations.	X	-
15.	Masih terdapat risalah rapat yang penyampaiannya kepada seluruh anggota Dewan Pengawas melebihi 7 hari setelah rapat dillaksanakan. There were still minutes of meetings which were submitted to all members of the Board of Supervisor Council more than 7 days after the meeting was held	Agar Sekretaris Dewan Pengawas selalu menyampaikan risalah rapat keseluruhan Dewan Pengawas selambat-lambatnya 7 hari setelah rapat selesai dilaksanakan. In order for the Secretary of the Board of Supervisor Council to always submitted minutes of the overall meeting of the Board of Supervisor Council no later than 7 days after the meeting was finished.	X	-

No.	Hasil Assessment Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year Assessment Results	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 Follow Up as of December 31, 2019 Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Found in the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2018	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 Follow Up as of December 31, 2019 Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018) Follow-up Plan (If It was a GCG Implementation Assessment Recommendation for Fiscal Year 2018)
IV	Direksi Board of Directors			
1.	Perusahaan telah mengeluarkan SOP Penjaminan langsung dan SOP penjaminan tidak langsung, namun Perusahaan belum memperbarui SOP KUR sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) terbaru yaitu Permenk no 8 Tahun 2019. The Company has issued a direct guarantee SOP and an indirect guarantee SOP, but the Company has not updated the KUR SOP in accordance with the latest Regulation of the Coordinating Minister for the Economy (Permenko) namely the Coordinating Minister for the Economy Regulation No 8 of 2019.	Memperbarui SOP KUR sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) terbaru. Updated KUR SOP in accordance with the latest Coordinating Minister for the Economy Regulation		
2.	Masih terdapat jabatan Kepala Bagian pada Kantor Cabang yang belum terpenuhi fromasinya pada Tahun 2019. Selain itu Perusahaan telah memiliki database tentang karyawan yang memiliki skill dan kompetensi serta pengalaman yang cukup untuk menduduki posisi/ jabatan di perusahaan, namun database tersebut belum menyebutkan siapa saja yang dapat mengambil alih pekerjaan-pekerjaan utamanya apabila terdapat karyawan berhenti, pensium, meninggal dengan tak terduga. There were still positions of the Section Head at Branch Offices that have not been fulfilled from 2019. In addition, the Company already has a database of employees who had sufficient skills and competence and experience to occupy that position in the company, but the database did not mention anyone who could take over the main jobs if there were employees quit, retirees, died unexpectedly.	Mengisi posisi Kepala Bagian yang kosong dan Menyusun database yang menyebutkan siapa saja karyawan yang dapat mengambil alih pekerjaan-pekerjaan utama apabila karyawan-karyawan berhenti, pensiun, meninggal dengan tak terduga. Filled in the vacant position of the Section Head and compiled a database that mentioned which employees could take over the main jobs if the employees resigned, retired, died unexpectedly.		
3.	Perusahaan telah memiliki Aplikasi UMKM *Marketplace Guarantee* (MPG) yang berfungsi sebagai alat analisis kelayakan UMKM sekaligus mempertemukan UMKM layak kredit dengan Lembaga keuangan penyaluran kredit. Namun hasil atas Aplikasi UMKM MPG tersebut masih belum optimal pemanfaatannya. The Company already had an MSMEs Marketplace Guarantee (MPG) application that functions as a tool for analyzing the feasibility of MSMEs as well as bringing together the credit-eligible MSMEs with credit distributor financial institutions. But the results of the MSMEs MPG Application were still not optimally utilized.	Agar mengoptimalkan hasil laporan aplikasi UMKM MPG baik bagi UMKM maupun Lembaga pembiayaan.	X	-

No.	Hasil Assessment Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year Assessment Results	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 Follow Up as of December 31, 2019	
			Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Found in the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2018	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018) Follow-up Plan (If It was a GCG Implementation Assessment Recommendation for Fiscal Year 2018)
4.	Belum terdapat pencapaian target kinerja anggota direksi secara individual. There has not yet been an achievement of the performance targets of the Board of Directors individually.	Agar dibuat dasar penilaian kinerja direksi secara individual.	✓	
5.	Terdapat dua ketentuan terkait TI yang belum disahkan menjadi kebijakan Perusahaan , yaitu *Master Plan* Teknologi Informasi Perum Jamkrindo tahun 2019 s.d 2023 dan kebijakan pengelolaan data, prosedur pengelolaan data, dan pelaporan IT There were two provisions related to IT that have not yet been ratified as Company policy, namely the Perum Jamkrindo Information Technology Master Plan 2019-2023 and data management policies, data management procedures, and IT reporting	Agar *Master Plan TI* tahun 2019 s.d 2023 dan kebijakan pengelolaan data, prosedur pengelolaan data, dan pelaporan IT untuk disahkan menjadi ketentuan Perusahaan In order for IT Master Plan 2019-2023 and data management policies, data management procedures, and IT reporting to be ratified as Company provisions	X	-
6.	Terdapat program Pendidikan dan pelatihan yang telah direncanakan pada tahun 2019 namun belum dilaksanakan. Selain itu program *reward* dan *punishment* Perusahaan belum dilaksanakan scara optimal. There were Education and training programs planned in 2019 but not yet implemented. In addition, the Company's reward and punishment program have not been implemented optimally.	Agar pada tahun 2020 kebijakan/ program Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan menjalankan program *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang ada. in order in 2020 the education/ training policies/programs were implemented in accordance with the work plans that have been set and carried out a reward and punishment program in accordance with existing provisions.	X	-
7.	Perusahaan belum memiliki aturan terkait anak perusahan yang mencakup: a. Pengangkatan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi. b. Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris. c. Sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial dan individu) dan Dewan Komisaris (kolegial), yang memuat sekurang-kurangnya indicator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. d. Pedoman gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	Agar Perusahaan Menyusun kebijakan terkait anak perusahaan yang mencakup hal-hal tersebut di atas. In order for the Company to formulate policies related to subsidiaries that covered the above-mentioned matters.	✓	

No.	Hasil Assessment Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year Assessment Results	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 Follow Up as of December 31, 2019	
			Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Found in the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2018	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018) Follow-up Plan (If It was a GCG Implementation Assessment Recommendation for Fiscal Year 2018)
	The Company did not yet have rules regarding subsidiaries that included: a. Appointment of the Board of Commissioners/Board of Supervisor Council and Board of Directors, determination of performance targets and performance appraisals and incentives for the Board of Commissioners/Board of Supervisor Council and Board of Directors. b. Guidelines for appointment and dismissal of the Board of Directors and Board of Commissioners. c. System/guidelines for assessing the performance of the Board of Directors (collegial and individual) and the Board of Commissioners (collegial), which contained at least the main performance indicators and success criteria. d. Salary/honorarium guidelines, allowances, and facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners/Board of Supervisor Council.			
8.	Direksi telah menetapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan. Hal tersebut tercermin antara lain pada Peraturan Direksi No. 27/Per-Dir/5/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Manual Sistem Akuntansi Perum Jamkrindo dan Peraturan Direksi No.41/Per-Dir/XII/2012 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pedoman Akuntansi dan SOP Prgram Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Namun masih terdapat ruang untuk dapat menerapkan standar akuntansi secara lebih berkualitas terkait dengan perkembangan terbaru lingkungan perusahaan, antara lain diberlakukannya PSAK 71, 72 dan 73 The Board of Directors has established accounting policies and prepared financial statements in accordance with Financial Accounting Standards. This was reflected in the Board of Directors' Regulation no. 27 / Per-Dir / 5 / XII / 2018 dated December 31, 2018, concerning the Accounting System Manual of Perum Jamkrindo and Board of Directors Regulation No.41 / Per-Dir / XII / 2012 dated August 25, 2017, concerning Accounting Guidelines and SOP for Partnership Program and Environmental Development Program. However, there was still room to be able to apply higher quality accounting standards related to the latest developments in the Company's environment, including the adoption of PSAK 71, 72 and 73	Agar Perusahaan menerapkan standar akuntansi terkait dengan perkembangan terbaru lingkungan perusahaan, antara lain diberlakukannya PSAK 71, 72 dan 73. In order for the Company to apply accounting standards related to the latest developments in the Company's environment, including the adoption of PSAK 71, 72, and 73.	X	-

No.	Hasil Assessment Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year Assessment Results	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 Follow Up as of December 31, 2019	
			Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Found in the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2018	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018) Follow-up Plan (If It was a GCG Implementation Assessment Recommendation for Fiscal Year 2018)
9.	Direksi telah melaksanakan program manajemen risiko (program manajamen risiko antara lain mencakup identifikasi dan penanganan risiko pada proses bisnis melalui Profil Risiko yang dibuat setiap triwulanan) tertuang dalam Notulen Rapat Direksi. Namun dalam aplikasi SIMR maupun laporan triwulanan belum dapat memetakan risiko per unit kerja. The Board of Directors has implemented a risk management program (risk management program which included the identification and handling of risks in the business process through a Risk Profile that was made quarterly) as outlined in the Minutes of the Board of Directors' Meeting. However, in the SIMR application as well as quarterly reports, it could not yet map the risks per work unit.	Agar aplikasi SIMR dilakukan perbaikan sehingga risiko per unit kerja dapat teridentifikasi dan ditampilkan pada laporan triwulanan In order for the SIMR application was improved so that risks per work unit could be identified and displayed on quarterly reports	X	-
10.	Masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal (BPK dan BPKP) yang belum selesai tindak lanjutnya sehingga progressnya belum 100%. There were still recommendations on the results of internal and external auditors (BPK and BPKP) whose follow-up has not yet been completed so that the progress has not been 100%.	Agar Perusahan menyelesaikan tindak lanjut dari rekomendasi SPI dan auditor eksternal (BPK dan BPKP) yang masih belum terselesaikan. In order for the Company to complete the follow-up of the SPI's recommendations and external auditors (BPK and BPKP) which have yet to be resolved.	X	-
11.	Perusahaan menerima surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal a. Surat teguran nomor:S-30/ NB.222/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Surat Peringatan Pertama yang menjelaskna bahwa Perum Jamkrindo tidak memenuhi ketentuan POJK terkait biaya akuisisi maksimal 20% dari nilai IJP. b. Surat pemberitahuan nomor: S-31/ NB.222/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Surat Pemberitahuan yang menjelaskan bahwa Perum Jamkrindo tidak memenuhi ketentuan POJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembayaran klaim paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.	Agar Perusahaan lebih mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK mengingat apabila tidak dipatuhi berpotensi terhadap pembekuan usaha Perusahaan. In order for the Company to comply more with the provisions stipulated by the OJK, remembering that if it was not complied with, it had the potential to freeze the Company's business.	X	-

No.	Hasil Assessment Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year Assessment Results	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 Follow Up as of December 31, 2019 Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Found in the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2018	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 Follow Up as of December 31, 2019 Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018) Follow-up Plan (If It was a GCG Implementation Assessment Recommendation for Fiscal Year 2018)
	The Company received a letter from the Financial Services Authority (FSA) regarding a. Letter of reprimand number: S-30 / NB.222 / 2019 dated February 11, 2019, concerning the First Warning Letter explaining that Perum Jamkrindo did not meet POJK requirements related to the acquisition cost of a maximum of 20% of the IJP value. b. Notification letter number: S-31 / NB.222 / 2019 dated February 11, 2019, concerning Notification Letter explaining that Perum Jamkrindo did not meet the POJK provisions giving approval or rejection of the claim payment request no later than 15 (fifteen) working days since the complete documents received.			
12.	Hasil survei kepuasan pelanggan masih dalam proses tindaklanjut The results of the customer satisfaction survey were still in the process of follow-up	Agar Perusahaan segera menindaklanjuti rekomendasi atas laporan survei kepuasan pelanggan yang belum ditindaklanjuti. In order for the Company immediately followed up on recommendations of customer satisfaction survey reports that have not been followed up.	X	-
13.	Perusahaan telah melakukan pembayaran dan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan, namun masih terdapat keterlambatan pembayaran ataupun pelaporan pada Kantor Cabang. The Company has paid and submitted tax liability documents, but there were still late payments or reporting at the Branch Office.	Agar pembayaran dan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan (SPT Tahunan maupun bulanan) tepat waktu. In order for the payments and submission of tax obligation documents (annual and monthly tax return) were timely	X	-
14.	Terdapat kenaikan NPL atas pinjaman kemitraan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 There was an increase in NPLs on partnership loans in 2019 compared to 2018	Agar penyaluran pinjaman kemitraan dilakukan lebih *prudent* dan diupayakan penagihan atas pinjaman bermasalah tersebut. In order for the distribution of partnership loans was carried out more prudently and were attempted the collection of the problem loans.	X	-
15.	Direksi menyampaikan laporan manajemen kepada Menteri BUMN dan ditembuskan ke Dewan Pengawas, seharusnya laporan manajemen disampaikan kepada Dewan Pengawas terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham. The Board of Directors submitted the management report to the SOEs Minister and is forwarded to the Board of Supervisor Council, the management report should have been submitted to the Board of Supervisor Council before being submitted to the SOEs Minister as the shareholders.	Agar laporan manajemen disampaikan kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham. In order for the management reports were submitted to the Board of Supervisor Council/Board of Commissioners before being submitted to the Minister of SOEs as the shareholders.	X	-

No.	Hasil Assessment Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year Assessment Results	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 Follow Up as of December 31, 2019	
			Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Found in the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2018	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018) Follow-up Plan (If It was a GCG Implementation Assessment Recommendation for Fiscal Year 2018)
16.	Rencana rapat Direksi telah tertuang dalam RKAP namun belum menyebutkan agenda yang dietapkan secara khusus. The Board of Directors' meeting plan has been stated in the RKAP but it has not mentioned the specific agenda.	Agar dalam jadwal RKAP telah menjadwalkan agenda secara khusus seperti pembahasan laporan triwulanan maupun tahunan. In order for the RKAP schedule has scheduled specific agendas such as quarterly and annual report discussions	X	-
17.	Dalam piagam audit yang dimiliki oleh SPI, belum sepenuhnya mengacu kepada *International Professional Practices Framework of Internal Auditing* (IPPF) yang dikeluarkan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA). In the audit charter owned by SPI, it has not yet fully referred to the International Professional Practices Framework of Internal Auditing (IPPF) issued by the Institute of Internal Auditors (IIA).	Agar dilakukan perbaikan atas piagam audit yang ada sehingga sesuai dengan standar ataupun *best practice* yang berlaku In order for the improvements made to the existing audit charter so that it complied with applicable standards or best practices		
18.	Berdasarkan hasil *manning analysis internal* SPI, masih terdapat kekurangan satu orang Kepala Bagian dan dua orang staf dalam rangka memenuhi tugas SPI khususnya auditor dengan latar belakang IT. Selain itu, program Pendidikan/pengembangan profesi terhadap personil SPI perlu ditingkatkan dalam rangka mempertahankan sertifikasi yang dimiliki. Hal lain yang masih belum sesuai adalah belum adanya SOP turunan atas kebijakan audit yang ada sehingga dapat menjadi acuan untuk program jaminan kualitas yang efektif. Based on the results of SPI's internal manning analysis, there was still a shortage of one Section Head and two staff in order to fulfill the SPI's duties, especially auditors with IT backgrounds. In addition, education program/ professional development for SPI personnel need to be improved in order to maintain their certification. Another thing that was still not yet suitable as there was not yet the derivative SOPs of the existing audit policies so that they could become a reference for an effective quality assurance program.	Agar dilakukan pelatihan berkelanjutan terhadap personil SPI dan dilakukan pembaharuan atas kebijakan audit yang ada. Kebijakan audit tersebut nantinya akan menjadi landasan untuk dijalankannya program jaminan kualitas audit yang efektif. In order for the sustainable training of SPI personnel and updating of the existing audit policies conducted. The audit policy would later become the foundation for the implementation of an effective audit quality assurance program.	X	-
19.	Perencanaan Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) SPI tahun 2019 belm sepenuhnya mempertimbangkan risiko yang dimiliki oleh unit kerja. Selain itu PKPT tersebut belum dikomunikasikan secara formal kepada Dewan Pengawas cq Komite Audit. Annual Audit Work Plan (PKPT) of SPI in 2019 has not fully considered the risks that were owned by the work units. In addition, PKPT has not been communicated formally to the Board of Supervisor Council for attention to the Audit Committee.	Agar perencanaan tahunan mendatang dilakukan berbasis risiko dan dikomunikasikan secara formal kepada Dewan Pengawas cq Komite Audit. In order for the future annual planning was done based on risk and formally communicated to the Board of Supervisor Council for attention to the Audit Committee.	X	-

No.	Hasil Assessment Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year Assessment Results	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019	Tindak Lanjut per 31 Desember 2019 Follow Up as of December 31, 2019	
			Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Found in the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2018	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018) Follow-up Plan (If It was a GCG Implementation Assessment Recommendation for Fiscal Year 2018)
20.	Laporan/hasil telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru dilakukan oleh Divisi Hukum dan Kepatuhan serta pihak eksternal yaitu KAP Hertanto Grace Karunawan, bukan Sekretaris Perusahaan Reports/results of the review of new laws and regulations by the Legal and Compliance Division and external parties, namely KAP Hertanto Grace Karunawan, not the Corporate Secretary	Agar Sekretaris Perusahaan juga melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. In order for the Corporate Secretary also reviewed the new laws and regulations.	X	-
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency			
1.	Perusahaan telah mempubikasikan berbagai dokumen tata kelola perusahaan, antara lain: GCG *Code*, yang dapat diakses di: http://www.jamkrindo.co.id/gcg. Sedangkan *Board Manual* dan Pedoman Perilaku Perusahaan belum dipublikasikan di *website*. The Company has published various corporate governance documents, including GCG Code, which could be accessed at http://www.jamkrindo.co.id/gcg. Whereas the Board Manual and Company Code of Conduct have not been published on the website.	Agar Perusahaan mempublikasikan *Board Manual* dan Pedoman Perilaku di *website*. In order for the Company to publish the Board Manual and Code of Conduct on the website.	X	-
2.	Laporan Tahunan tahun 2018 Belum mencantumkan: (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan kepada konsumen; (3) Biaya yang telah dikeluarkan. The 2018 Annual Report has not included: (1) Establishment of a Consumer Complaints Center; (2) Service improvement program for consumers; (3) Costs incurred.	Agar Perusahaan mencantumkan (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan kepada konsumen; (3) Biaya yang telah dikeluarkan pada laporan tahunan For the Company to list (1) Establishment of a Consumer Complaints Center; (2) Service improvement program for consumers; (3) Costs incurred in the annual report	X	-
3.	Perusahaan belum memenangkan *Annual Report Award* (ARA) yang diselenggarakan pada tahun 2019. The Company has not yet won the Annual Report Award (ARA) held in 2019	Agar Perusahaan memenuhi poin-poin dalam penilaian ARA sehingga dapat memenangkan penghargaan tersebut. In order for the Company to meet the points in the ARA assessment so that it could win the Award.		

✓ = Terdapat dalam rekomendasi *assessment* penerapan GCG tahun buku 2018 /There were in the assessment recommendations of the GCG implementation for the 2018 fiscal year

X = Tidak terdapat dalam rekomendasi *assessment* penerapan GCG tahun buku 2018 /There were not in the assessment recommendations of the GCG implementation for the 2018 fiscal year

Beberapa butir rekomendasi yang menjadi *Area of Improvement* penerapan GCG di Perusahaan, sebagaimana yang terlampir pada tabel di atas, meskipun ada beberapa butir yang perlu diperhatikan atau ditindaklanjuti lebih lanjut, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa, penerapan GCG di Perusahaan telah diterapkan atau berjalan dengan baik, sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahan Yang Baik Secara Berkelanjutan

   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 6,848 dari bobot sebesar 7,000 atau setara dengan *prosentase* pencapaian sebesar 97,825%. Hal ini memperlihatkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 6,924 atau 98,913% dari bobot keseluruhan sebesar 7,000, terdapat penurunan sebesar 0,076.

2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Pemegang Saham dan RUPS, skor yang dicapai adalah 8,944 atau 99,374% dari bobot keseluruhan 9,000. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Pemegang Saham dan RUPS telah berjalan dengan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya yaitu 8,957 atau 99,519% terdapat penurunan sebesar 0,013.

3. Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

   Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, skor yang dicapai adalah 33,289 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 95,111%. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah berjalan dengan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 33,351 atau 95,289%, terdapat penurunan sebesar 0,062.

4. Aspek Direksi

   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Direksi, skor yang dicapai adalah 33,293 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan *prosentase* pencapaian sebesar 95,123%. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Direksi telah berjalan dengan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 33,355 atau 95,300%, terdapat penurunan sebesar 0,062.

5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi

   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, skor yang dicapai adalah 8,431 dari bobot sebesar 9,000 atau setara dengan *prosentase* pencapaian sebesar 93,679%.

Some of the recommendations that were the Area of Improvement in the GCG implementation in the Company, as attached to the above table, although some items needed further attention or followed up, in general, it could be concluded that the GCG implementation in the Company has been implemented or run well, as described below:

1. Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance

   Based on the assessment results conducted on this aspect, the score achieved was 6.848 from a total weight of 7.000 or equivalent to the achievement percentage of 97.825%. It showed that the commitment to implement GCG on an ongoing basis in the Company has been running "Very Good". When compared with the previous year's score of 6.924 or 98.913% of the overall weight of 7.000, there was a decrease of 0.076.

2. The Shareholders and GMS/Capital Owners Aspect

   Based on the results of the assessment carried out on the Shareholders and GMS aspect, the score achieved was 8.944 or 99.374% of weight of 9.000. It meant that in general, the GCG implementation for the Shareholders and GMS aspects has been going "Very Good". Compared with the previous year's score of 8.957 or 99.519% there was a decrease of 0.013.

3. The Board of Commissioners/Board of Supervisor Council Aspect

   Based on the results of the assessment conducted on the Board of Commissioners/Board of Supervisor Council aspect, the score achieved was 33.289 from a weight of 35.000 or equivalent to the achievement percentage of 95.111%. It meant that in general, the GCG implementation for the Board of Commissioners/Board of Supervisor Council aspect has been going "Very Good". Compared with the previous year's score, which was 33.351 or 95.289%, there was a decrease of 0.062.

4. The Board of Directors Aspect

   Based on the assessment results on the Board of Directors aspect, the score achieved was 33.293 out of a weight of 35.000 or equivalent to the achievement percentage of 95.123%. It meant that in general, the GCG implementation for the Board of Directors aspect has been going "Very Good". Compared to the previous year's score, which was 33.355 or 95.300%, there was a decrease of 0.062.

5. Information Disclosure and Transparency Aspect

   Based on the results of the assessment conducted on the Information Disclosure and Transparency aspect, the score achieved was 8.431 from a weight of 9.000 or equivalent to the achievement percentage of 93.679%.

Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi telah berjalan dengan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 8,743 atau 97,267% terdapat penurunan sebesar 0,323.

6. Aspek Lainnya

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Lainnya, skor yang dicapai adalah 5,000 dari bobot sebesar 5,000 atau setara dengan *prosentase* pencapaian sebesar 100,00%. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Lainnya telah berjalan dengan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 4,475 atau 87,500% maka terdapat kenaikan sebesar 0,625.

It meant that in general, the GCG implementation for the Information Disclosure and Transparency aspect has been going "Very Good". Compared with the previous year's score of 8.743 or 97.267% there was a decrease of 0.323.

6. Other Aspects

Based on the assessment results that have been carried out on Other Aspects, the score achieved was 5.000 from a weight of 5.000 or equivalent to the achievement percentage of 100.00%. It meant that the GCG implementation for Other Aspects has been going "Very Good" in general. Compared with the previous year's score of 4.475 or 87.500%, there was an increase of 0.625.

PERJALANAN *ASSESSMENT* PERUM JAMKRINDO

Sekilas riwayat proses penilaian penerapan GCG Perusahaan adalah sebagai berikut:

PERUM JAMKRINDO ASSESSMENT HISTORY

A brief history of the assessment process of the GCG implementation was as follows:

Pengukuran GCG GCG Assessment	Tahun Buku Fiscal Year	*Asssessor*	Skor Score (%)	Kategori Category
Self Assessment	2019	Tim *Self Assesment* Perum Jamkrindo Perum Jamkrindo's Self Assesment Team	95,804	Sangat Baik
Assessment	2018	PT Cita Negeri Amanah	95,716	Sangat Baik
Self Assessment	2017	Tim *Self Assesment* Perum Jamkrindo Perum Jamkrindo's Self Assesment Team	92,470	Sangat Baik
Assessment	2016	Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Public Accounting Firm	92,120	Sangat Baik
Self Assessment	2015	Tim *Self Assesment* Perum Jamkrindo Perum Jamkrindo's Self Assesment Team	91,563	Sangat Baik

ASSESSMENT GCG
GCG ASSESSMENT

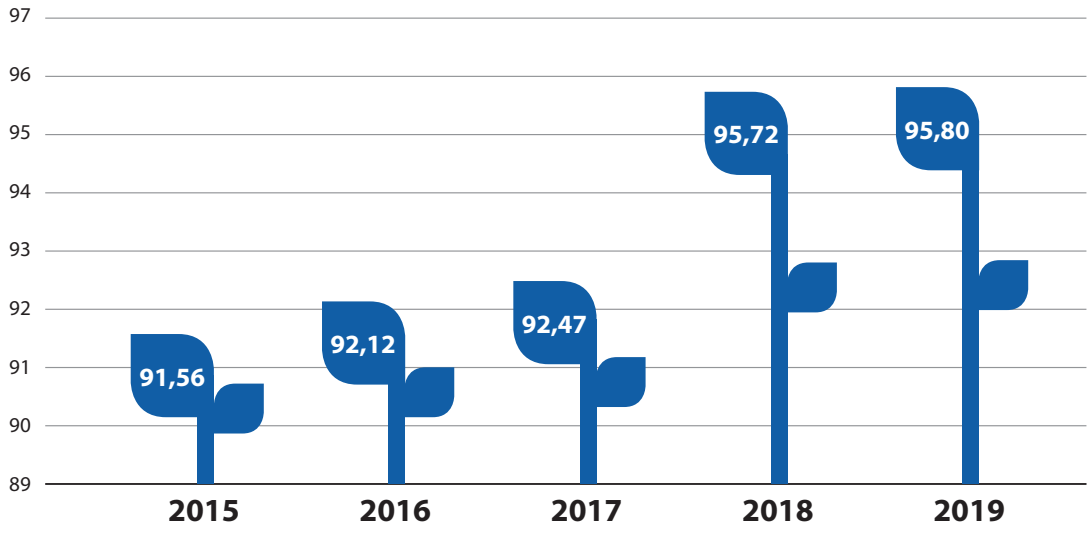

Hasil *assessment* atas penerapan GCG Perum Jamkrindo periode tahun 2015-2019 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

The results of the assessment of the GCG implementation at Perum Jamkrindo for the 2015-2019 period could be summarized as follows:

Aspek	Bobot	Capaian Tahun 2015		Capaian Tahun 2016		Capaian Tahun 2017		Capaian Tahun 2018		Capaian Tahun 2019	
		Nilai	Pencapaian (%)	Nilai	Pencapaian (%)	Nilai	Pencapaian (%)	Nilai	Pencapaian (%)	Nilai	Pencapaian (%)
I Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	6,95	99,35	6,96	99,46	6,92	98,91	6,92	98,91	6,85	97,83
II Pemegang Saham dan RPB/Pemilik Modal Shareholders and GMS /Capital Owners	9,00	8,11	90,07	8,21	91,18	8,57	95,19	8,96	99,52	8,94	99,37
III Dewan Pengawas Board of Supervisor Council	35,00	31,61	90,32	32,25	92,14	32,08	91,67	33,36	95,23	33,29	95,11
IV Direksi Board of Directors	35,00	32,94	94,12	32,94	94,12	32,43	92,65	33,35	95,30	33,29	95,12
V Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	7,95	88,32	7,76	86,23	8,47	94,08	8,75	97,27	8,43	93,68
VI Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	4,00	80,00	4,00	80,00	4,00	80,00	4,38	87,50	5,00	100,00
Skor Keseluruhan	**100,00**	**91,56**		**92,12**		**92,47**		**95,72**		**95,80**	
Peringkat Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality		**"Sangat Baik" "Very Good"**		**"Sangat Baik" "Very Good"**		**"Sangat Baik" "Very Good"**		**"Sangat Baik" "Very Good"**		**"Sangat Baik" "Very Good"**	

KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU)

METODE PENILAIAN

Dalam rangka peningkatan kemampuan dan daya saing BUMN, Kementerian BUMN memutuskan untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan dan pengendalian kinerja BUMN berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). Hal ini dituangkan melalui Surat Kementerian Negara BUMN No.S-153/S.MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN yang telah diperbaharui melalui Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-445/D7.MBU/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pelaksanaan *Assessment* Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN 2016.

Sistem Penilaian pada Evaluasi Kinerja BUMN ini didasarkan pada metode yang diuraikan dalam dokumen Kriteria Penilaian

ASSESSMENT CRITERIA OF PERFORMANCE EXCELLENCE

ASSESSMENT METHOD

In order to improve the capability and competitiveness of SOEs, the Ministry of SOEs decided to implement a management and control system of SOEs' performance based on Assessment Criteria of Performance Excellence (KPKU). It was contained through a letter of State Ministry of SOEs No.S-153/S.MBU/2012 dated July 19, 2012, concerning Performance Reporting Based on Approach on Assessment Criteria of Performance Excellence (KPKU) of SOEs has been updated through a Letter of the Secretary of the Ministry of SOEs No. S-445/D7.MBU/10/2016 dated October 14, 2016, concerning the Assessment Implementation of the Assessment Criteria of Performance Excellence (KPKU) of SOEs of 2016.

The Assessment System on SOEs Performance Evaluation is based on the method described in the document of

Kinerja Unggul (KPKU) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN yang mengadopsi dan mengadaptasi "*Malcolm Baldridge Criteria for Performance Excellence*". Penyelenggaraan Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) bertujuan untuk mengidentifikasi sebuah perusahaan yang dapat dijadikan role model bagi perusahaan lain. Selain itu, Perusahaan juga menerapkan kriteria Malcolm Baldrige untuk menguatkan daya saing melalui upaya:

- Meningkatkan praktik kinerja organisasi, kemampuan dan hasil.
- Memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi tentang praktik terbaik di antara perusahaan-perusahaan dari semua jenis industri.
- Menyediakan sebuah alat untuk memahami dan mengelola kinerja perusahaan, juga sebagai alat untuk membimbing perencanaan dan meningkatkan pembelajaran.

Evaluasi kinerja KPKU tersebut didasarkan pada 2 (dua) dimensi penilaian, yaitu "Proses", dan "Hasil". Proses penerapan KPKU dilakukan melalui 2 (dua) tahapan besar, yaitu tahap "*Ondesk Review*" yaitu penilaian di atas kertas berbasis pada respon KPKU pada tahun sebelumnya dan informasi pendukung melalui Metode/Sistem (*Approach*), Penerapan (*Deployment*), Pembelajaran (*Learning*), dan Integrasi (*Integration*) atau disingkat ADLI; serta tahapan "*Site Visit*" ke perusahaan untuk wawancara dan klarifikasi atas respon KPKU terhadap Direksi serta *Senior Leader* lainnya yang ditunjuk oleh perusahaan serta verifikasi berbagai data dan informasi. Sementara faktor yang digunakan untuk mengevakuasi hasil-hasil perusahaan adalah *Level, Trend, Comparison dan Integration* (LeTCI).

Kedua dimensi evaluasi, yaitu dimensi "Proses" dan dimensi "Hasil" sangat penting bagi evaluasi dan umpan balik. Berdasarkan kedua tahapan di atas kemudian disusun laporan yang berisi Skor dan Umpan Balik yang berisikan *Opportunity for Improvements* (OFI) dan Kekuatan (*Strengths*) Perusahaan untuk dapat dimanfaatkan sebagai basis dalam melakukan perbaikan, baik proses maupun peningkatan hasil-hasil bisnis. Hasil skor dan kategorisasi atas penilaian penerapan KPKU adalah sebagai berikut:

Assessment Criteria of Performance Excellence (KPKU) as has determined by the Ministry of SOEs that adopts and adapts "Malcolm Baldridge Criteria for Performance Excellence". The implementation of the Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) aims to identify a company that can be a role model for other companies. Besides, the Company also applies the Malcolm Baldrige criteria to strengthen competitiveness through the following efforts:

- Improve the practice of organizational performance, capabilities, and results.
- Facilitate communication and information sharing about best practices among companies of all types of industries.
- Provides an instrument for understanding and managing company performance and an instrument to guide planning and improve learning.

The KPKU performance evaluation is based on 2 (two) assessment dimensions, namely "Process", and "Result". The KPKU implementation process is carried out through 2 (two) major stages, namely the "On-desk Review" stage is the on-paper assessment based on the KPKU's response on the previous year and supporting information through the method/system of Approach, Deployment, Learning, and Integration or abbreviated ADLI; and the "Site-Visit" stage to the Company for interviews and clarification of the KPKU's response to the Board of Directors and other Senior Leaders appointed by the Company, and verification of various data and information. While the factors used to evaluate The Company's results are Level, Trend, Comparison, and Integration (LeTCI).

The two evaluation dimensions, namely the "Process" dimension and the "Results" dimension, are essential for evaluation and feedback. Based on the two stages above, a report is later compiled containing Scores and Feedback that include Opportunity for Improvements (OFI) and Company Strengths to be utilized as a basis for making improvements, both in the processes and business results. The results of the score and categorization of the assessment of the KPKU implementation are as follows:

Skala Skor / Score Scale	**Kategori** / Category
876 - 1.000	*World Class Leader*
776 - 875	*Benchmark Leader*
676 - 775	*Industry Leader*
576 - 675	*Emerging Industry Leader*
476 – 575	*Good Performance*
376 - 475	*Early Improvement*
276 - 375	*Early Result*
0 - 275	*Early Development*

PENILAIAN KPKU TAHUN BUKU 2018 DAN TINDAK LANJUT DI TAHUN 2019

Penilaian KPKU untuk tahun 2018 didasarkan pada metode yang diuraikan dalam dokumen KPKU sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Di bawah ini disampaikan hasil penilaian KPKU Perusahaan tahun 2018.

ASSESSMENT OF THE KPKU FOR THE 2018 FISCAL YEAR AND ITS FOLLOW-UP IN 2019

The KPKU assessment for 201 8 was based on the method described in the KPKU document as determined by the Ministry of SOEs. Below are the results of the Company's KPKU assessment in 2018.

Kategori	Maksimal Skor Maximum Score	Persentase Percentage (%)	Skor Score (*nominal*)	Category
	(1)	(2)	(3 = 1x2)	
Kategori 1: Kepemimpinan				Category 1: Leadership
1.1. Kepemimpinan Senior	70	60%	42,00	Senior Leadership
1.2. Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan	50	60%	30,00	Community Governance and Responsibility
Kategori 2: Perencanaan Strategis				Category 2: Strategic Planning
2.1. Pengembangan Strategi	45	65%	29,25	Strategy Development
2.2. Implementasi Strategi	40	65%	26,00	Strategy Implementation
Kategori 3: Fokus Pelanggan				Category 3: Customer Focus
3.1. Suara Pelanggan	40	55%	22,00	Customer Voice
3.2. Keterikatan (*Engagement*) Pelanggan	45	55%	24,75	Customer Engagement
Kategori 4: Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan				Category 4: Measurement, Analysis, and Knowledge Management
4.1. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan Kinerja Perusahaan	45	60%	27,00	Measurement, Analysis, and Improvement of Company Performance
4.2. Manajemen Pengetahuan, Pengelolaan Informasi dan Teknologi Informasi	45	55%	24,75	Knowledge Management, Information Management, and Information Technology
Kategori 5: Fokus Tenaga Kerja				Category 5: Employee Focus
5.1. Lingkungan Tenaga Kerja	40	60%	24,00	Working Environment
5.2. Keterikatan (Engagement) Tenaga Kerja	45	55%	24,75	Employee Engagement
Kategori 6: Fokus Operasi				Category 6: Operation Focus
6.1. Proses Kerja	45	55%	24,75	Work Process
6.2. Efektivitas Operasional	40	55%	22,00	Operational Effectiveness
Kategori 7: Dimensi Hasil				Category 7: Dimension of Results
7.1. Hasil/Kinerja Produk dan Proses	120	55%	66,00	Product and Process Results/ Performance
7.2. Hasil/Kinerja Fokus Pelanggan	80	55%	44,00	Customer Focus Results/Performance
7.3. Hasil/Kinerja Fokus Tenaga Kerja	80	55%	44,00	Employee Focus Results/ Performance
7.4. Hasil/Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola	80	55%	44,00	Leadership and Governance Results/ Performance
7.5. Hasil/Kinerja Finansial dan Pasar	90	55%	49,50	Financial and Market Results/ Performance
Jumlah	**1.000**		**568,75**	**Total**
Kategori		***"Good Performance"***		Category

Berikut disampaikan *Opportunity of improvement* dari hasil penilaian KPKU tahun 2018 yang menjadi rekomendasi perbaikan, dan tindak lanjut manajemen yang dilakukan di sepanjang tahun 2019.

The following was the Opportunity of Improvement from the results of the 2018 KPKU assessment which was a recommendation for improvement, and management follow-up conducted throughout 2019

No	*Opportunity of improvement*	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2019
Dimensi "PROSES"		
1.	a. Kepemimpinan (1.1.c.1.2.2) Walaupun Pimpinan Senior Jamkrindo menumbuhkan pembelajaran organisasi, pembelajaran pekerja pada umumnya, serta pembelajaran untuk pengambilan risiko secara cerdas melalui mekanisme i. Pengelolaan SDM sesuai *Best Practise* : Sistem Penilaian Kinerja Karyawan (KPI Individu), Sistem *Reward and Punishment*, Sistem Remunerasi (*Job & Person Grade*), Sistem Rekrutmen dan *Talent Management* ii. Internalisasi Budaya Perusahaan (TRUST) iii. Program *training Development* iv. Optimalisasi Produktifitas karyawan melalui *Gap* analisis Kompetensi v. Membudayakan *Risk Manajemen* baik di unit operasional, perencanaan, Pengelolaan SDM, Penjualan jasa, pengadaan dll sebagai asas kesuksesan dan *prudence* (Kehati-hatian) Divisi MSDM sebagai pengelola pengembangan SDM sebagai asset perusahaan secara konsisten menyempurnakan program internalisasi di atas sehingga mampu terdeliver ke setiap insan Jamkrindo, evaluasi dilakukan untuk mengukur efektifitas pengembangan SDM. Namun pemetaan *Training development* belum *inline* dengan *core competence* Jamkrindo serta belum dilakukan pengukuran efektifitas dari program *Best Practice* (COP, *Transfer Knowledge*), serta hasil pengukuran yang tercermin dari Grafik 7.3.a.1.3 Produktifitas Pegawai (Juta Rp) Menunjukkan kinerja yang kurang baik dengan *trend* yang menurun signifikan setiap tahunnya (*Level Poor : Trend : Advers*), Grafik 7.3.a.3.4 Pencapaian Kinerja Tenaga Kerja, Sesuai klasifikasi yang ditetapkan (%) Grafik 7.4b.13 Peta Risiko Bidang Pasar (*High*) Grafik 7.4b.14 Peta Risiko Bidang Pasar (*Extreme*) Grafik 7.4b.17 Peta Risiko Bidang Likuiditas (*High*) Grafik 7.4b.18 Peta Risiko Bidang Likuiditas (*Extreme*) Grafik 7.4b.25 Peta Risiko Bidang Hukum (*High*) Grafik 7.4b.26 Peta Risiko Bidang Hukum (*Extreme*) Grafik 7.4b.29 Peta Risiko Bidang Reputasi (*High*) Grafik 7.4b.30 Peta Risiko Bidang Reputasi (*Extreme*) menunjukkan kinerja yang kurang baik dengan trend yang cenderung menurun (*Level Poor : Trend Unfavorable*). Hal tersebut berdampak pada tidak efektifnya program pengelolaan SDM sebagai asset perusahaan. Belum selaras dalam membangun *core competence* Jamkrindo dan *Core Values Valuing People* dan *Visionary Leadership*.	a. Leadership (1.1.c.1.2.2) Eventhough Jamkrindo's Senior Leaders foster organizational learning, employee learning in general, and smart learning for risk-taking through mechanisms i. HR Management according to Best Practices: Employee Performance Assessment System (Individual KPI), Reward and Punishment System, Remuneration System (Job & Person Grade), Recruitment System, and Talent Management ii. Internalization of Corporate Culture (TRUST) iii. Development Training program iv. Optimization of Employee Productivity through Gap Competency analysts v. Cultivating Risk Management both in operational, planning, human resource management, sales of services, procurement units, etc. as the principle of success and prudence The HRM Division, as the manager of HR development as the Company asset, consistently refines the internalization program above so that it is able to be delivered to every Jamkrindo personnel. Evaluation is carried out to measure the effectiveness of HR development. However, the development training mapping has not been in line with Jamkrindo's core competence, and the effectiveness of the Best Practice program (COP, Transfer Knowledge) has not been measured, and the measurement results reflected in Graph 7.3.a.1.3 Employee Productivity (Million Rp) shows poor performance with a significant downward trend every year (Poor Level: Adverse Trend), Graph 7.3.a.3.4 Achievement of Workforce Performance, according to the classification determined (%) Graph 7.4b.13 Risk Map in the field of Market (High) Graph 7.4b.14 Risk Map in the field of Market (Extreme) Graph 7.4b.17 Risk Map in the field of Liquidity (High) Graph 7.4b.18 Risk Map in the field of Liquidity (Extreme) Graph 7.4 b.25 Risk Map in the field of Legal (High) Graph 7.4b.26 Risk Map in the field of Legal (Extreme) Graph 7.4b.29 Risk Map in the field of Reputation (High) Graph 7.4b.30 Risk Map in the field of Reputation (Extreme) shows poor performance, both with a downward trend (Poor Level: Unfavorable Trend). It has an impact on the ineffectiveness of the HR management program as a Company's asset. This was not yet aligned with the building of Jamkrindo's core competencies and Core Values of Valuing People and Visionary Leadership.	a. Pemetaan *Training development* belum *inline* dengan *core competence* Jamkrindo : Terkait dengan perubahan RJPP 2019-2023, akan dilakukan penyesuaian kamus kompetensi yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun training development Jamkrindo Training Development Mapping was not yet inline with Jamkrindo's core competencies: Related to the change in RJPP 2019-2023, the competency dictionary would be adjusted, which would then be used as a reference in preparing Jamkrindo's training development. b. Belum dilakukan pengukuran efektifitas dari program *Best Practice* (COP, *Transfer Knowledge*) : Efektivitas *transfer knowledge* diukur salah satunya melalui penguasaan karyawan terhadap *knowledge-knowledge* yang dimiliki Perusahaan. Hal ini dillakukan dengan melakukan *quiz online* setiap minggu. *Quiz Online* akan di *update* setiap saat, hal ini antara lain seputar peraturan-peraturan Perusahaan, *product knowledge* dan ilmu pengetahuan lainnya yg berkembang sesuai kebutuhan Perusahaan. Has not been measured the effectiveness of the Best Practice program (COP, Transfer Knowledge): Transfer Knowledge's effectiveness was measured one of them through the employees' mastery of the Company's knowledge. It was done by doing an online quiz every week. Online Quiz would be updated all the time, among others, about the Company's regulations, product knowledge and other knowledge that developed according to the Company's needs. **No / Keterangan / Description / 2018 / 2019** 1. Rata-rata nilai kuis online / Average online quiz score — 7,17 — 8,88 2. Jumlah *Sharing Knowledge* / Total Sharing Knowledge — - — 185 Selain itu efektifitas *transfer knowledge* dapat dilihat dari peningkatan rata-rata nilai *quiz online*. Hal ini menunjukkan penguasaan karyawan terhadap *knowledge* yang dimiliki Perusahaan semakin meningkat. Besides, the effectiveness of transfer knowledge could be seen from the increase in the average of online quiz scores. It showed that employees' mastery of the Company's knowledge was increasing.

No	*Opportunity of improvement*		Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2019
	b. Perencanaan Strategis (2.2.a.4.2) Walaupun Pimpinan Senior Jamkrindo telah mengatasi dampak potensial terkait dengan ketersediaan tenaga kerja di perusahaan, juga potensi perubahan lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja. Mekanismenya diatur dalam Perdir No 16 Tahun 2013 Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang, Perdir No: 44/Per-Dir/XI/2014 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Penyusunan, Pelaksanaan dan Evaluasi RKAP Berbasis Risiko Perum Jamkrindo yang meliputi: • Menetapkan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan program. • Menentukan kompetensi yang diperlukan oleh setiap tenaga kerja • Menganalisa gap antara kebutuhan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja • Menyusun program terkait dengan pemenuhan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja. Divisi Perencanaan Strategis sebagai penanggung jawab pengelolaan perencanaan strategis berkoordinasi dengan Divisi MSDM untuk melakukan *mapping* formasi untuk jabatan manajerial dan *staffing* yang disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan, yang tersirat dalam RJPP dan RKAP. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dari perencanaan tenaga kerja ke depan. Namun, belum efektif terbukti belum melakukan pengukuran efektivitas RJPP dan RKAP terhadap formasi tenaga kerja. Sehingga Jamkrindo akan mengalami kesulitan untuk menyusun formasi tenaga kerjanya sesuai dengan perencanaan strategis perusahaan. Hal tersebut menunjukkan Jamkrindo belum selaras dengan perspektif kesisteman dan *valuing people*.	b. Strategic Planning (2.2.a.4.2) Eventhough Jamkrindo's Senior Leaders have overcome the potential impacts related to the availability of workforce in the Company, also other changes potential related to the capabilities needs and workforce capabilities. The mechanism which is regulated in Board of Directors' regulation No 16 of 2013 concerning Guidelines for Preparation of Long Term Plans, Board of Directors' regulation No: 44 / Per-Dir / XI / 2014 concerning Standard Operating Procedure (SOP) for Preparation, Implementation, and Evaluation of Perum Jamkrindo's Risk-Based RKAP which includes: • Determine the workforce requirements needed to implement the program. • Determine the required competencies by each workforce • Analyze the gap between the capacity requirements and workforce capabilities • Arrange programs related to fulfilling the capacity and capabilities of the workforce. The Strategic Planning Division as the person in charge of strategic planning management coordinates with the HRM Division to mapping formations for managerial and staffing positions that are tailored to the Company's business processes, which are implied in the RJPP and RKAP. An evaluation is carried out to measure the effectiveness of future workforce planning. However, it has not been proven effective yet in measuring the effectiveness of the Company's Long Term Plan (RJPP) and Work Plan and Budget (RKAP) on workforce formation. So that Jamkrindo will experience difficulties in arranging workforce formation according to the Company's strategic planning. This shows that Jamkrindo is not yet aligned with the systemic perspective and valuing people.	1. Pengukuran efektivitas RJPP dan RKAP dilakukan melalui penilaian kinerja KPI Individu Karyawan dengan menilai realisasi pencapaian kinerja terhadap target yang telah ditentukan pada RJPP dan RKAP. Measurement of the effectiveness of RJPP and RKAP was done through the performance assessment of employee individual KPIs by assessing the realization of performance achievements against the targets set in the RJPP and RKAP. 2. Pemenuhan formasi untuk jabatan manajerial dan staffing senantiasa dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan pada RJPP dan RKAP masing-masing individu karyawan dan unit kerja. Fulfillment of formation for managerial and staffing positions always by considering the performance achievement according to the targets set in the RJPP and RKAP of each employee and work unit.
	c. Fokus Pelanggan (3.1.a.1.3) Walaupun Jamkrindo telah menggunakan metode mendengarkan pelanggan yang beragam di seluruh siklus hidup pelanggan (*customer life cycle*) dengan mekanisme : • Menentukan segment pelanggan yang akan digali informasinya: » Pelanggan KUR » Pelanggan Non KUR • Menentukan dan mendefinisikan tahapan, periode waktu dan atribut siklus hidup pelanggan baik pelanggan KUR maupun Non KUR. • Menentukan cara dan media mendengarkan pelanggan dari masing masing tahapan siklus hidup pelanggan. Misalnya melalui pertemuan pelanggan untuk mengumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk kemudian meyeleksi umpan balik yang bisa ditindak lanjuti.	c. Customer Focus (3.1.a.1.3) Eventhough Jamkrindo has used a variety of ways to pay attention to customer's voice throughout the customer life cycle with the following mechanism: • Determine the customer segment to be dug up its information: » People's Business Credit (KUR) customers » Non-People's Business Credit (Non-KUR) customers • Determine and define stages, periods, and life cycle attributes of customers, both KUR and Non-KUR customers. • Determine how and media to listen to customers from each stage of the customer's life cycle. For example, through a customer meeting to collect feedback from customers and then select the input that can be followed up.	Divisi Jaringan dan Layanan telah menyampaikan Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Perum Jamkrindo Tahun 2019. The Network and Services Division has submitted the 2019 Jamkrindo Consumer Satisfaction Survey Results. a. Kepuasan Pelanggan Consumer Satisfaction i. Secara nasional Indeks Kepuasan Perum Jamkrindo untuk kategori Mitra Eksisting dalam kategori kinerja Baik, dengan skor indeks sebesar 83,8 dengan demikian Perum Jamkrindo telah memenuhi target berdasarkan RKAP 2019 sebesar 83,5. Nationally, Perum Jamkrindo's Satisfaction Index for the category of Existing Partners was in the Good performance category, with an index score of 83.8. Thus Perum Jamkrindo has met the target based on the 2019 RKAP of 83.5

No	*Opportunity of improvement*		Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2019
	• Melaksanakan cara mendengarkan pelanggan baik pelanggan KUR maupun Non KUR sesuai tahapan siklus hidup pelanggan. • Melakukan Evaluasi terhadap efektifitas tindak lanjut dari hasil mendengarkan pelanggan baik KUR maupun Non KUR. Menentukan pelanggan yang akan digali informasinya. Namun, pelaksanaan tersebut belum konsisten diterapkan secara menyeluruh terbukti butir 3, 4, dan 5 khusus terkait pelanggan NON KUR belum dilaporkan bukti hasil penerapannya dan belum melakukan pengukuran efektifitas terhadap mendengarkan pelanggan berdasarkan segmen persepsi positik dan negatif (komplain), hal tersebut berdampak Jamkrindo akan kesulitan untuk mengetahui persyaratan dan harapan pelanggan, sehingga Jamkrindo tidak optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan serta belum selaras dengan misi Jamkrindo pada dharma kedua "memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas".	• Carry out ways to listen to customers, both KUR and Non-KUR customers, according to the customer's life cycle stages. • Evaluate the effectiveness of follow-up of the results from listening to customers both KUR and Non-KUR. Determine the customers whose information will be dug up. However, the implementation has not been consistently thoroughly applied, as evidenced in points 3, 4, and 5 related explicitly to Non-KUR customers. Evidence of the results of its application has not been reported and has not measured the effectiveness of listening to customers based on positive and negative perception segments (complaints), this will impact Jamkrindo will difficulties in knowing the requirements and expectations of customers, so that Jamkrindo is not optimal in providing the best service to customers and has not been aligned with Jamkrindo's mission in the second dharma "to provide extensive and quality services".	ii. Secara segmentasi, indeks Kepuasan Pelanggan tertinggi terdapat pada segmen calon mitra dengan skor 86,7 didorong oleh dimensi Tangible sebesar 87,4 sedangkan Indeks Kepuasan Pelanggan terendah terdapat pada segmen pesaing KUR dengan skor 72,8 didorong oleh dimensi Empathy sebesar 74,4 In segmentation, the highest Customer Satisfaction index was in the prospective partner segment with a score of 86.7 driven by the Tangible dimension of 87.4 while the lowest Customer Satisfaction Index was in the KUR competitor segment with a score of 72.8 driven by the Empathy dimension of 74.4. iii. Secara wilayah, Indeks Kepuasan Pelanggan tertinggi terdapat di Kantor Wilayah IX dengan skor 90,8 didorong oleh dimensi Empathy sebesar 93,7. Sedangkan Indeks Kepuasan Pelanggan terendah terdapat di Kantor Wilayah III dengan skor 75,3 didorong oleh dimensi Tangible 78,0. Regionally, the highest Customer Satisfaction Index was in Regional Office IX with a score of 90.8 driven by an Empathy dimension of 93.7. In comparison, the lowest Customer Satisfaction Index was in Regional Office III, with a score of 75.3 driven by the Tangible dimension 78.0. b. Keterikatan Pelanggan Customer Engagement i. Indeks keterikatan pelanggan Perum Jamkrindo secara nasional tahun 2019 sebesar 84,0 yang termasuk kategori baik, jika dibandingkan dengan indeks keterikatan tahun 2018 sebesar 80,0 maka hal tersebut menunjukan bahwa tahun 2019 tingkat keterikatan pelanggan mengalami kenaikan. The national customer engagement index for Jamkrindo in 2019 was 84.0, which was in the good category when compared to the 2018 engagement index of 80.0. It showed that in 2019 the level of customer engagement has increased. ii. Secara segmentasi, Indeks Keterikatan Pelanggan tertinggi terdapat pada segmen Mitra Eksisting dengan skor 84,0 Sedangkan Indeks Keterikatan Pelanggan terendah terdapat pada segmen Pesaing KUR dengan skor 77,8. By segmentation, the highest Customer Engagement Index was found in the Existing Partner segment with a score of 84.0 while the lowest Customer Engagement Index was found in the KUR Competitors segment with a score of 77.8. c. Gap Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Gap Secara Keseluruhan Gap pelayanan Perum Jamkrindo pada mitra/pelanggan adalah sebesar 0,0424 yang termasuk dalam kategori Sangat Baik. Tingkat Gap terendah terdapat pada dimensi Tangible dengan Gap sebesar 0,029 pada aspek "fasilitas fisik, perlengkapan dan Peralatan yang digunakan". Overall, the service gap of Perum Jamkrindo to partners/customers was 0.0424, which was included in the category of Very Good. The lowest Gap level was found in the Tangible dimension with a Gap of 0.029 in the "physical facilities, equipment, and equipment used" aspect. Selain itu, gap tertinggi terdapat pada dimensi *Responsiveness* (0,059) dimana menunjukan "Kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap kepada pelanggan perlu dilakukan lebih optimal". Besides, the highest gap was in the Responsiveness dimension (0.059), which showed "The ability of employees to provide fast and responsive services to customers needs to be done more optimally."

No	*Opportunity of improvement*		Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2019
	d. Pengukuran Kinerja (4.1.a.3.1) Walaupun Pimpinan Senior Jamkrindo telah memilih/memperoleh data dan informasi suara pelanggan dan calon pelanggan (pasar), salah satunya diatur dalam Surat Edaran Nomor: 36/SE/3/VI/2017 tentang Pedoman Layanan *Call Center* Perum Jamkrindo, yang meliputi : • Penyediaan Informasi Produk Penjaminan • Penerimaan aduan pelanggan (keluhan) » Menerima permasalahan dan informasi dari penelepon. » Menerima dan mengolah informasi, melakukan verifikasi, meneruskan permasalahan dan menyampaikan informasi atau hasil aduan kepada atasan. » Membuat laporan harian yang dilaporkan kepada atasan. • Koordinasi dan monitor seluruh kegiatan *call center* sesuai ketentuan. • Memeriksa dan menindaklanjuti hasil laporan *call center*. Divisi Jaringan dan Layanan bertanggung jawab melakukan koordinasi, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan melaksanakan kegiatan call center untuk memastikan pelayanan tersebut telah dilaksanakan dengan benar sesuai tujuan yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku serta mendukung pencapaian peningkatan performa pelayanan terbaik. Namun, belum efektif diterapkan pada perusahaan, terbukti belum dapat menunjukkan efektivitas pengukuran layanan *call center*, dan seperti ditunjukkan pada Grafik 7.2.a.3.6 Jumlah Keluhan Pelanggan yang mengalami peningkatan. Sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan "*Strengthen The Process*" dari perusahaan, serta pembelajaran dan kelincahannya.	d. Performance Measurement (4.1.a.3.1) Although Jamkrindo's Senior Leaders have chosen/obtained data and information on customers' voice and prospective customers (market), one of which is regulated in Circular Letter Number: 36 / SE / 3 / VI / 2017 regarding Perum Jamkrindo's Call Center Service Guidelines, which include: • Provision of Guarantee Product Information • Receipt of customer complaints » Receive problems and information from callers. » Receive and process information, verify, forward problems and submit information or complaints to superiors. » Make a daily report that is reported to superiors. • Coordinate and monitor all call center activities according to provisions. • Check and follow up on call center report results. The Network and Services Division is responsible for coordinating, planning, supervising, evaluating and carrying out call center activities to ensure that the services have been carried out correctly according to established objectives and applicable provisions and to support the achievement of improved best service performance. However, it has not been effectively applied to companies, it was proven to be unable to demonstrate the effectiveness of call center service measurements, and as shown in Graph 7.2.a.3.6 Number of Customer Complaints that have increased so that it can affect the Company's "Strengthen the Process" implementation, as well as learning and its agility.	Surat Edaran terbaru : Surat Edaran nomor 20/SE/3/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Jamkrindo Contact Center. Divisi Jaringan dan Layanan membuat laporan evaluasi layanan dan kinerja Jamkrindo *Contact Center* setiap bulan kepada Direktur Operasional dan Jaringan. Latest Circular Letter: Circular Letter number 20/SE/3/VI/2019 dated June 20, 2019 concerning Jamkrindo Contact Center. The Network and Services Division made Jamkrindo Contact Center's monthly service and performance evaluation report to the Director of Operations and Networks.
	e. Pembelajaran Organisasi (4.2.b.1.1) Walaupun Pimpinan *Senior* Jamkrindo membangun dan mengelola pengetahuan organisasi melalui mekanisme • Himbauan ke Unit Kerja apabila ada inisiatif terkait *sharing knowledge* (FGD) untuk memberikan atau melakukan sharing dengan di fasilitasi oleh Dept Pengembangan MSDM. • Membuat aplikasi database dari seluruh literatur *knowledge* dari seluruh kegiatan *training* dan FGD sehingga mudah diakses oleh seluruh karyawan. • Menyusun kajian-kajian transformasi *knowledge* yang terintegrasi yang dilaksanakan oleh divisi SDM dan diletakkan dalam KM Portal sehingga mudah diakses oleh seluruh Insan Jamkrindo	Organizational Learning (4.2.b.1.1) Although the Jamkrindo Senior Leaders build and manage organizational knowledge through mechanisms • Call to the Work Unit if there is an initiative related to sharing knowledge (FGD) to provide or carry out sharing facilitated by the Department of HR Management Development. • Create a database application of all knowledge literature from all training activities and FGD so that it is easily accessible to all employees. • Compile studies of integrated knowledge transformation carried out by the HR division and placed in the KM Portal so that all Jamkrindo personnel easily accesses it	Pemanfaatan portal KM menjadi media penyimpanan materi hasil *sharing knowledge* dilakukan dengan melakukan dokumentasi terhadap materi-materi tersebut menjadi materi yang bisa dipelajari ulang, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh karyawan. Jumlah materi *sharing knowledge* yang telah di dokumetasikan dalam porta KM: The use of the KM portal as a media to store the results of sharing knowledge was done by documenting these materials to be re-studied material so that all employees could feel the benefits. The amount of sharing knowledge material that has been documented in the KM port: **2018** **2019** Jumlah materi *sharing knowledge* yang disimpan dalam *portal* KM The amount of sharing knowledge material stored in the KM portal 45 625

No	*Opportunity of improvement*		Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2019
	Pemilik proses di atas adalah Departemen Pengembangan MSDM sebagai penganggungjawab proses, bahwa proses transformasi *knowledge* di implementasikan dengan baik di seluruh Dept yang ada di Jamkrindo dengan mekanisme Departemen Pengembangan MSDM yang mengundang dan memfasilitasi partisan dari seluruh unit kerja untuk berbagi pengetahuan. Evaluasi dilakukan berdasarkan respon kusioner dari partisan yang *outputnya* menjadi acuan peningkatan kegiatan *Transfer Knowledge* yang akan datang. Namun, terbukti belum efektif hal tersebut tercermin belum dilakukan pengukuran tingkat efektifitas kajian dari pembelajaran menjadi acuan literature yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja perusahaan serta belum dilakukan pengukuran seberapa besar materil *sharing Knowledge* menjadi literature yang tersimpan dalam aplikasi Portal KM. Hal ini berdampak sulitnya membangun efektifitas dari Pembelajaran karyawan sebagai bagian dari pengembangan pengetahuan dan kompetensi Tenaga kerja Jamkrindo. Sehingga belum selaras dengan *Core Values organizational learning and agility.*	The owner of the above process is the HR Management Development Department as the person in charge of the process of knowledge transformation is well implemented in all Departments in Jamkrindo with the HR Management Development Department mechanism that invites and facilitates participants from all work units to share knowledge. The evaluation conducted based on the questionnaire response from participants whose output is used as a reference for the increase of the future Transfer Knowledge activities. However, it is proven not yet effective, it is reflected the measurement of the effectiveness level of the research of learning that becomes a literature reference that is useful for improving company performance does not carry out yet, and the measurement how much material of sharing knowledge becomes literature stored in the KM Portal application does not carry out yet. It impacts the difficulty of building the effectiveness of employee learning as part of the development of knowledge and competence of the Jamkrindo Workforce. So it is not aligned yet with the Core Values of organizational learning and agility.	
f.	(5.2.b.3.3) Walaupun Jamkrindo telah melakukan kaderisasi (*succession planning*) untuk posisi managerial dan pimpinan dengan tahapan : Mengacu pada Peraturan Direksi No.04/ Per-Dir/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang SOP Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Berbasis Risiko Perum Jamkrindo, yang menjelaskan tentang proses *asessment* untuk kandidat pejabat yang dipersiapkan. Penetapan kandidat berdasarkan evaluasi kinerja dan kamus kompetensi serta disahkan oleh KOMITE DIREKSI sesuai dengan kewenangannya *Mapping* formasi jabatan diselaraskan dengan struktur organisasi termutakhir yang tercantum pada Peraturan Direksi No. 01/KD/I/V/2008 tanggal 30 Mei 2018 tentang Struktur Organisasi Perum Jamkrindo. Divisi MSDM sebagai penanggungjawab proses dari rekrutmen pejabat dan pegawai secara terpusat (tertutup) untuk seluruh formasi pejabat di area Kantor Pusat, Kanwil dan Cabang. Hasil *asessment* dilaporkan kepada Direksi untuk diterbitkan Perdir Penetapan Jabatan. Namun, mekanisme di atas belum sistematis terbukti Jamkrindo belum memiliki aturan pengembangan karier SDM atau SOP jalur karier (*Career Path*). Jamkrindo belum menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas untuk proses pemenuhan formasi pejabat yang dapat langsung diakses oleh pegawai. Hal tersebut berdampak pada persepsi negative karyawan terhadap Jamkrindo yang dibuktikan dengan grafik 7.3a(2) *Turn Over* Pegawai yang menunjukkan kinerja yang kurang baik dengan tren yang menurun setiap tahun dan tingkat efektivitas promosi yang belum dipetakan sehingga proses di atas belum selaras dengan harapan pegawai dan *core valuing people* dalam pengelolaan sumber daya manusia Jamkrindo.	f. (5.2.b.3.3) Although Jamkrindo has carried out regeneration (succession planning) for managerial and leadership positions with stages: Referring to Board of Directors Regulation No. 04 / Per-Dir / X / 2011 dated October 10, 2011, concerning SOP for Risk-Based Human Resource Management of Perum Jamkrindo, which explains the assessment process for the officials' candidates prepared—according to their authorities, determining candidates based on performance evaluation and competency dictionary and approved by the Board of Directors Committee. Mapping the position formation is aligned with the latest organizational structure listed in the Board of Directors' Regulation No.01/KD/I/V/2008 dated May 30, 2018, concerning the Organizational Structure of Perum Jamkrindo. The HRM Division is responsible for the process of centralized (closed) recruitment of officials and employees for all the officials' formation in the area of the Head Office, Regional Offices, and Branch Offices. The results of the assessment are reported to the Board of Directors for the Issuance of the Board of Directors' regulation on the Determination of Positions. However, the above mechanism has not yet systematically been proven Jamkrindo does not yet have HR career development rules or career path SOPs. Jamkrindo has not applied the principles of transparency and accountability for the process of fulfilling the officials' formation that can directly be accessed by employees. This has an impact on negative employee perceptions of Jamkrindo as evidenced with graph 7.3a (2) Employee Turn Over which shows poor performance with a downward trend every year and the level of effectiveness of promotions that have not been mapped so that the above process is not yet in line with employee expectations and core valuing people in the management of Jamkrindo's human resources.	a. Pengembangan aplikasi pengelolaan *career management* Development of career management applications b. Penyusunan ketentuan *career management* Formulation of career management provisions c. Penyusunan *Job Family* dan *Grading*. Preparation of Job Family and Grading.

No	*Opportunity of improvement*		Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2019
	g. (6.a.(2).a.2.1) Walaupun JAMKRINDO memadukan waktu siklus, produktivitas dan faktor efektivitas dan efisiensi lainnya ke dalam proses kerja dengan cara : • Mengacu kepada Peraturan Direksi Perum JAMKRINDO No: 42/Per-Dir/XII/2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Direksi Nomor 12/Per-Dir/XII/2012 tentang SOP Penjaminan Kredit Umum berbasis Risiko • Memisahkan alur kerja berdasarkan produk; • Perencanaan dan penetapan biaya operasional keseluruhan berbasis Risiko; • Monitoring kesesuaian terhadap tahapan proses penjaminan (dari mulai pengajuan penjaminan, penerbitan Sertifikat Penjaminan sampai pelunasan). • Produktivitas diukur dari volume total penjaminan setiap tahun yang terealisasi dibandingkan dengan target Sistem telah diterapkan oleh Bisnis dan penunjang serta lainnya yang terkait di Kantor Pusat, Kanwil dan Kantor Cabang dan secara konsisten dilakukan pengukuran terhadap efektivitas dan efisiensi produk penjaminan. Namun, belum terbukti efektif sebagaimana yang ditunjukkan oleh grafik pada kinerja *Time Accuracy in Claim Process* (%) yang berfuktuatif cenderung menurun (*level poor dan unfavourable*) (grafik 7.1.b.1.16) dan Bopo meningkat dalam 3 tahun terakhir (grafik 7.5.a.1.19) dengan *level poor serta unfavourable*. Hal tersebut berdampak pada unefisiensi dan ketidakefektifan dari siklus proses penjaminan sehingga menurunkan akurasi dan kualitas penjaminan sesuai dengan SLA (*service level agreement*), belum selaras dengan Dharma Kedua misi Perusahaan yaitu memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas dan dengan tata nilai Keunggulan yang fokus kepada pelanggan (*customer-focused excellence*) dan Persepektif kesisteman (*systems perspective*) serta core visioner.	g. (6.a. (2) .a.2.1) Although Jamkrindo integrates cycle time, productivity, and other effectiveness and efficiency factors into the work process byways: • Referring to the Regulation of the Board of Directors of Perum Jamkrindo No: 42/Per-Dir/XII/2013 concerning Amendment of the attachment of Board of Directors' Regulation Number 12 / Per-Dir / XII / 2012 concerning SOP of the Risk-based General Credit Guarantee • Separating workflows based on products; • Planning and determination of risk-based overall operational costs; • Monitoring the suitability with the guarantee process stages (from the submission of the guarantee, issuance of the Guarantee Certificate to the repayment). • The total volume of guarantees measures productivity, realized each year compared to the target. The system has been applied by the business and support and other related parties in the Head Office, Regional Offices and Branch Offices and was consistently measured for the effectiveness and efficiency of the guarantee product. However, it has not been proven effective as shown by the graph on the performance of Time Accuracy in Claim Process (%) which tends to decrease (poor level and unfavorable) (graph 7.1.b.1.16), and Bopo has increased in the last 3 (three) years (graph 7.5.a .1.19) with poor level and unfavorable. It has an impact on the inefficiency and ineffectiveness of the guarantee process cycle to reduce the accuracy and quality of the guarantee according to the SLA (service level agreement), not yet in harmony with the Second Dharma of the Company's mission, namely providing extensive and quality service and with a value system of customer-focused excellence and systemic perspective and core visionaries.	Dalam mengoptimalkan kinerja *Time Accuracy in Claim Process*, divisi Klaim telah melakukan hal-hal sebagai berikut : In optimizing the performance of the Time Accuracy in Claim Process, the Claims Division has done the following: 1. Melakukan kerja sama Penjaminan dan Klaim *online* yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Jaminan dalam rangka percepatan proses Klaim; Collaborating with online Guarantee and Claims as outlined in the Collaboration Agreement with the Guarantee Recipient to accelerate the Claim process; 2. Divisi Klaim telah meminta seluruh Kantor Cabang untuk melakukan penginputan tanggal berkas lengkap. Divisi Klaim telah berkordinasi dengan Divisi Teknlogi Informasi untuk melakukan *lock* tanggal berkas lengkap sebagai *mandatory*, sehingga proses tidak dapat dilanjutkan jika tanggal berkas lengkap belum diinput. Hal ini dimaksudkan agar SLA Persetujuan Klaim dapat dihitung dan terukur secara persis. The Claims Division has requested all Branch Offices to input the complete file date. The Claims Division has coordinated with the Information Technology Division to lock the complete file date as mandatory, so the process could not proceed if the complete file date has not been inputted. This aimed to calculate and measure precisely the SLA of Claims Approval. 3. Membuat kebijakan terkait pengelolaan koreksi data klaim secara mandiri sehingga dapat mengakselerasi SLA koreksi data klaim pada aplikasi *Core* sehingga dapat mendapatkan data *Time Accuracy in Claim Process* yang valid. Making policies related to managing claims data correction independently so that it could accelerate claims data correction SLAs on the Core application so that it could get valid Time Accuracy in Claim Process data. 4. Divisi Klaim menyampaikan laporan *Time Accuracy in Claim Process* (TACP) kepada masing-masing Kantor Wilayah setiap bulannya untuk memastikan keputusan klaim tidak melebihi SLA sesuai ketentuan. The Claim Division submitted a Time Accuracy in Claim Process (TACP) report to each Regional Office each month to ensure the claim decision did not exceed the SLA according to the provisions. Tahun 2019 BOPO cenderung stabil/dibawah target RKAP 2019. BOPO tahun 2019 32,02% sedangkan RKAP tahun 2019 50,35%. Hal ini cukup efisien karena pendapatan IJP *Bruto* 2019 melebihi rkap (realisasi 122%) dibandingkan dengan RKAP 2019. In 2019 the BOPO tended to be stable / below the 2019 RKAP target. The 2019 BOPO was 32.02%, while the 2019 RKAP was 50.35%. This was quite efficient because 2019 Gross IJP revenue exceeded the RKAP (122% realization) compared to the 2019 RKAP.

Keterangan Description	Des 2019 Dec 2019	RKAP 2019
IJP Bruto Gross IJP	2.529.234.278.324	2.075.653.082.290
Beban Usaha Operating expenses	809.813.400.287	1.045.153.421.693
BOPO	**32,02%**	**50,35%**

No	*Opportunity of improvement*	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2019

Dimensi "HASIL" / Dimension of "RESULTS"

Walaupun Secara *Overall* JAMKRINDO telah membangun dan mengukur kinerja ekselennya dengan menampilkan 303 Grafik Kinerja secara keseluruhan dengan sebaran sebagai berikut; Kinerja Produk dan Proses (44 Grafik Kinerja), Kinerja *Customer Focus* (40 Grafik Kinerja), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (47 Grafik Kinerja), Kinerja Kepemimpinan (103 Grafik Kinerja) dan Kinerja Keuangan dan Pasar (69 Grafik Kinerja), Namun masih terdapat Kinerja yang belum menunjukkan kinerja positif, dibawah targetnya dan belum standar sebagai berikut:

- *Level – Poor* 28% (86 Grafik Kinerja dari 303 Grafik Kinerja yang tersedia) memiliki kecenderungan level yang kurang baik dibandingkan tahun sebelumnya , yang meliputi kinerja Produk dan Proses (12 Grafik), Kinerja *Customer Focus* (12 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (13 Grafik), Kinerja Kepemimpinan (27 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (22 Grafik)
- *Level – Nol Level (NL)*, 8% (23 Grafik Kinerja dari 303 Grafik Kinerja yang tersedia) memiliki level yang tidak dapat diukur yang meliputi Kinerja Produk dan Proses (0 Grafik), Kinerja *Customer Focus* (0 Grafik), Kinerja Focus pada Tenaga Kerja (5 Grafik), Kinerja Kepemimpinan (17) Kinerja Keuangan dan Pasar (1 Grafik)
- *Trend – Unfavorable*, 23% (71 Grafik kinerja dari 303 Grafik Kinerja yang tersedia) menunjukan Trend negative yang berfluktuasi dan mengalami penurunan , yang meliputi kinerja Produk dan Proses (7 Grafik), Kinerja *Customer Focus* (24 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (21 Grafik), Kinerja Kepemimpinan (26 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (12 Grafik)
- *Trend - Advers* ,9% (26 Grafik Kinerja dari 303 Grafik yang tersedia) menunjukkan Trend negatif yang mengalami penrunan signifikan setiap tahunnya, yang meliputi Kinerja Produk dan Proses (6 Grafik), Kinerja *Customer Focus* (3 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (3 Grafik), Kinerja Kepemimpinan (3 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (11 Grafik)
- *Trend – No Trend* (NT), 7% (20 Grafik kinerja dari 303 Grafik Kinerja yang tersedia) menunjukan Trend yang tidak dapat diukur , yang meliputi kinerja Produk dan Proses (0 Grafik), Kinerja *Customer Focus* (1 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (0 Grafik), Kinerja Kepemimpinan (17 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (2 Grafik)

Even though, in Overall, JAMKRINDO has built and measured its excellent performance by displaying 303 Performance Charts as a whole with the following distribution; Product and Process Performance (44 Performance Charts), Customer Focus Performance (40 Performance Charts). Besides, Workforce Focus Performance (47 Performance Charts), Leadership Performance (103 Performance Charts), and Financial and Market Performance (69 Performance Charts), but there are still Performances that have not shown positive performance. The followings are the target and standard which have not shown positive performances:

- Level - Poor, 28% (86 Performance Charts of the available 303 Performance Charts), tends to be less favorable than the previous year. It includes Product and Process performance (12 Charts), Customer Focus Performance (12 Charts), Workforce Focus Performance (13 Charts), Leadership Performance (27 Charts), and Financial and Market Performance (22 Charts)
- Level - Zero Level (NL), 8% (23 Performance Charts of the available 303 Performance Charts), has levels that cannot be measured. It includes Product and Process Performance (0 Chart), Customer Focus Performance (0 Chart), Workforce Focus Performance (5 Charts), Leadership Performance (17 Charts), and Financial and Market Performance (1 Chart)
- Trend - Unfavorable, 23% (71 Performance charts of the available 303 Performance Charts), shows negative trends that fluctuate and decline, which includes Product and Process performance (7 Charts), Customer Focus Performance (24 Charts), Workforce Focus Performance (21 Charts), Leadership Performance (26 Charts), and Financial and Market Performance (12 Charts)
- Trend - Adverse, 9% (26 Performance Charts of the available 303 Charts), shows a negative trend that experiences significant losses every year, which includes Product and Process Performance (6 Charts), Customer Focus Performance (3 Charts), Workforce Focus Performance (3 Charts), Leadership Performance (3 Charts), and Financial and Market Performance (11 Charts)
- Trend - No Trend (NT), 7% (20 performance Charts of the available 303 Performance Charts), shows a trend that cannot be measured, which includes Product and Process performance (0 Chart), Customer Focus Performance (1 Chart), Workforce Focus Performance (0 Chart), Leadership Performance (17 Charts), and Financial and Market Performance (2 Charts)

- Poin 7.1.a.1-1 SLA Penerbitan KUR. Divisi Bisnis 1 akan melakukan *control* penerbitan Sertifikat Penjaminan atas tidak terbitnya Sertifikat Penjaminan (*host to host*) terganggu dan segera berkoordinasi dengan Divisi Teknologi Informasi.

  Points 7.1.a.1-1 SLA Issuance of KUR. Business Division 1 would control the issuance of the Guarantee Certificate for non-issuance of the Guarantee Certificate (host to host) was disrupted and immediately coordinated with the Information Technology Division.
- Poin 7.1.a.1.13 Peningkatan *Volume* di Wilayah Indonesia Timur Divisi Bisnis 1 akan terus melakukan koordinasi dan memberi *support* terhadap Kanwil IX untuk meningkatkan *volume* Penjaminan di Wilayah Indonesia Timur.

  Point 7.1.a.1.13 Increased Volume in Eastern Indonesia Region Business Division 1 would continue to coordinate and provide support for Regional Office IX to increase the volume of Guarantees in the Eastern Indonesia Region.
- Pola Grafik 7.1.b.1.4 untuk menjaga dan melakukan penurunan angka NPG (*non performing guarantee*) Divisi Bisnis 1 sudah melakukan pemasangan Pasal Evaluasi di setiap Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk Non KUR.

  Graphic Pattern 7.1.b.1.4 to maintain and reduce NPG (non-performing guarantee) Business Division 1 has installed Article of Evaluation in each Cooperation Agreement (PKS) for Non-KUR.
- Untuk KUR tidak diberlakukan pasal evaluasi dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dan untuk menjaga angka NPG Divisi Bisnis 1 akan melakukan koordinasi dengan Desk Subrogasi untuk melakukan Rekonsiliasi kepada Mitra-mitra untuk pelimpahan Subrogasi atas pembayaran Klaim.

  For KUR, there was no article of evaluation in the Cooperation Agreement (PKS), and to maintain the NPG figures, Business Division 1 would coordinate with the Subrogation Desk to Reconcile the Partners for Subrogation delegation of claim payment.
- Data grafik peta risiko yang tercantum pada grafik 7.4 menunjukkan jumlah risiko per tahun. Semakin banyak jumlah risikonya menunjukkan bahwa tingkat "mitigasi" karyawan yang semakin baik. Semakin baik tingkat "mitigasi risiko" nya semakian kecil risiko yang di timbulkan.

  The risk map chart data listed in Graph 7.4 showed the number of risks per year. The greater the number of risks, the better the level of "mitigation" of employees. The better the level of "risk mitigation," the smaller the risk that arises.
- Dalam rangka meningkatkan awareness karyawan, Divisi Manajemen Risiko telah melaksanakan sosialisasi ke seluruh Kantor Wilayah dengan mengundang Kantor Cabang.

  In order to increase employee awareness, the Risk Management Division has conducted socialization to all Regional Offices by inviting Branch Offices.
- Beberapa data yang belum memiliki comparison, antara lain pada grafik 7.4b.1, 7.4b.2, 7.4b.4, 7.4b.5, 7.4b.6.

  Some data did not yet have comparison, among others, in graphs 7.4b.1, 7.4b.2, 7.4b.4, 7.4b.5, 7.4b.6.

No	*Opportunity of improvement*		Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2019
	• *Comparison – Laging*, 8% (25 Grafik kinerja dari 303 Grafik Kinerja yang tersedia) menunjukan Kinerja dibawah pembandingnya / Kompetitornya, yang meliputi kinerja kinerja Produk dan Proses (7 Grafik), Kinerja *Customer Focus* (2 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (0 Grafik), Kinerja Kepemimpinan (11 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (5 Grafik) • *Comparison – No Comparison* (NC), 68% (206 Grafik kinerja dari 303 Grafik Kinerja yang tersedia) tidak memiliki pembandingnya baik dari *Benchmark* maupun Kompetitornya, yang meliputi kinerja kinerja Produk dan Proses (7 Grafik), Kinerja *Customer Focus* (25 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (47 Grafik), Kinerja Kepemimpinan (86 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (41 Grafik) • Tidak ada Proyeksi nya , 86% (262 Grafik kinerja dari 303 Grafik Kinerja yang tersedia) yang meliputi kinerja kinerja Produk dan Proses (35 Grafik), Kinerja *Customer Focus* (37 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (39 Grafik), Kinerja Kepemimpinan (103 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (48 Grafik) • Tidak ter Segmen, 40% (121 Grafik kinerja dari 303 Grafik Kinerja yang tersedia), yang meliputi kinerja kinerja Produk dan Proses (6 Grafik), Kinerja *Customer Focus* (9 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (44 Grafik), Kinerja Kepemimpinan (13 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (49 Grafik) • Kurang Data, 10% (30 Grafik kinerja dari 303 Grafik Kinerja yang tersedia), yang meliputi kinerja kinerja Produk dan Proses (0 Grafik), Kinerja *Customer Focus* (11 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (5 Grafik), Kinerja Kepemimpinan (14 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (0 Grafik) Hal ini dapat menjadi gap bagi Jamkrindo dalam membangun kinerja ekselennya sesuai dengan harapan para *Stakeholder* dan Pelanggan serta membangun Visi Misi dan Kompetensi Inti Jamkrindo, Belum selaras dengan membangun *Core Values Focus on Success.*	• Comparison - Lagging, 8% (25 Performance Charts of the available 303 Performance Charts), shows performance under its Competitors, which includes Product and Process performance (7 Charts), Customer Focus Performance (2 Charts), Workforce Focus Performance (0 Chart), Leadership Performance (11 Charts), and Financial and Market Performance (5 Charts) • Comparison - No Comparison (NC), 68% (206 Performance Charts of the available 303 Performance Charts) has no comparison from both Benchmark and Competitors. It includes Product and Process performance (7 Charts), Customer Focus Performance (25 Charts), Workforce Focus Performance (47 Charts), Leadership Performance (86 Charts), and Financial and Market Performance (41 Charts) • No Projections, 86% (262 Performance charts of the available 303 Performance Charts), which includes Product and Process performance (35 Charts), Customer Focus Performance (37 Charts), Workforce Focus Performance (39 Charts), Leadership Performance (103 Charts), and Financial and Market Performance (48 Charts) • Not Segmented, 40% (121 performance charts of the available 303 Performance Charts), which includes Product and Process performance (6 Charts), Customer Focus Performance (9 Charts), Workforce Focus Performance (44 Charts), Leadership Performance (13 Charts), and Financial and Market Performance (49 Charts) • Lack of Data, 10% (30 performance charts of the available 303 Performance Charts), which includes Product and Process Performance (0 Chart), Customer Focus Performance (11 Charts), Workforce Focus Performance (5 Charts), Leadership Performance (14 Charts), and Financial and Market Performance (0 Chart). It can be a gap for Jamkrindo to build its excellent performance according to the Stakeholders' and Customers' expectations and building the Core Vission, Mission, and Competency of Jamkrindo. It shows not yet in tune with building Core Values Focus on Success.	• Akan disesuaikan dan dilengkapi dengan proyeksi berdasarkan pada RJPP dan RKAP Perusahaan. It would be adjusted and equipped with projections based on the Company's RJPP and RKAP. • Divisi Jaringan dan Layanan membuat hasil evaluasi kinerja Unit Kerja setiap bulannya dengan beberapa parameter pengukuran kinerja dan disampaikan ke seluruh Kantor Wilayah. Network and Service Division made a monthly work unit performance evaluation result with several performance measurement parameters and was submitted to all Regional Offices. • Divisi Bisnis 1 sudah melakukan daily report kepada Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan KUP untuk melakukan kunjungan kepada Mitra-mitra guna memberikan pelayanan, rekonsiliasi dan memberikan solusi atas kendala yang terjadi. Business Division 1 has conducted a daily report to the Regional Offices, Branch Offices, and Service Unit Offices (KUP) to make visits to Partners to provide services, reconciliation and provided solutions to problems that occurred. • Kunjungan mitra dan rekonsiliasi. Partner visits and reconciliation.

PERKEMBANGAN PENERAPAN KPKU DI LINGKUP PERUM JAMKRINDO

Melalui penerapan KPKU, Perusahaan memiliki perangkat untuk dapat melakukan evaluasi yang meliputi "Proses" dan "Hasil", di mana kedua faktor ini mempengaruhi seluruh aspek baik kinerja maupun penerapan GCG yang berlandaskan kepatuhan. Tren skor *assessment* GCG periode 2014-2018 adalah sebagai berikut:

THE DEVELOPMENT OF THE KPPU IMPLEMENTATION IN THE SCOPE OF PERUM JAMKRINDO

Through the KPPU implementation, the Company has the tools to conduct evaluations, which include "Process" and "Results", in which both of these factors affect all aspects of both GCG performance and implementation based on compliance. The trends in GCG assessment scores for the 2014-2018 period were as follows:

PERKEMBANGAN SKOR PENERAPAN KPKU 2014-2018
DEVELOPMENT OF KPPU IMPLEMENTATION SCORE 2014-2018

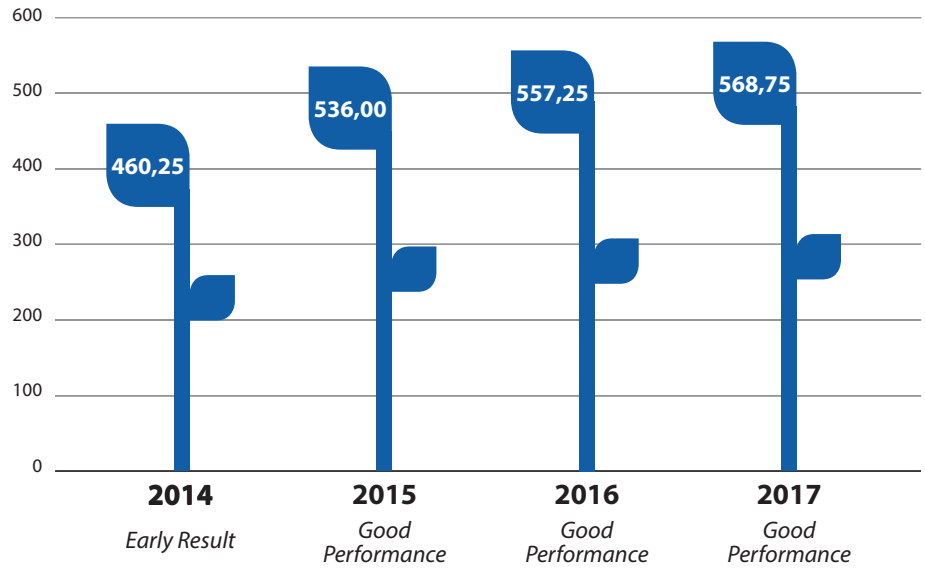

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance Organization Structure

PEMILIK MODAL DAN RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA

PEMILIK MODAL DAN RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA

Pemilik Modal dan Informasi Terkait Entitas Induk Akhir

Perum Jamkrindo merupakan entitas usaha dengan status hukum Perusahaan Umum (Perum), di mana Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia menjadi pemilik modalnya. Kebijakan kepemilikan modal dalam Perusahaan dilakukan melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan demikian, Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian BUMN menjadi pemilik tunggal sekaligus entitas induk akhir dari Perum Jamkrindo.

CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

CAPITAL OWNER AND JOINT DISCUSSION MEETING

Capital Owner and Information Related to the Ultimate Parent Entity

Perum Jamkrindo is a business entity with the legal status of a Public Corporation (Perum), in which the Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia is the owner of its capital. The policy of capital ownership in the Company is carried out through the mechanism known as the State Capital Participation (PMN). Thus,the Republic of Indonesia through its government of the Republic of Indonesia /the Ministry of SOEs becomes the sole owner and the ultimate parent entity of Perum Jamkrindo.

KOMPOSISI KEPEMILIKAN PERUM JAMKRINDO PER 31 DESEMBER 2019
PERUM JAMKRINDO'S OWNERSHIP COMPOSITION AS OF DECEMBER 31, 2019

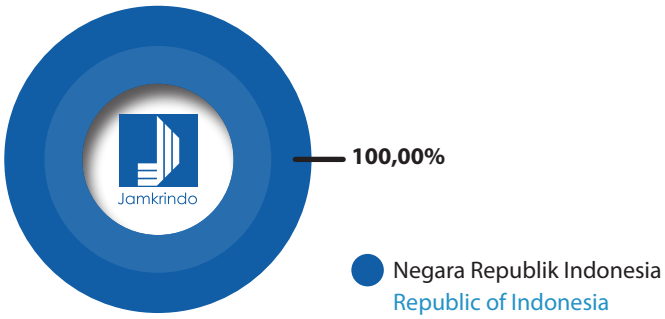

Rapat Pembahasan Bersama (RPB) merupakan mekanisme pengambilan keputusan strategis oleh pemilik modal. Melalui RPB, pemilik modal memiliki wewenang dan hak untuk melakukan berbagai keputusan atas Perusahaan seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Wewenang Rapat Pembahasan Bersama

Kewenangan RPB dalam hal ini adalah Menteri Negara BUMN atau Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modal pada Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundangundangan, antara lain:

1. Penambahan Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya;
2. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah;

The Joint Discussion Meeting (RPB) is a mechanism for strategic decision making by the capital owners. Through the RPB, the capital owners have the authority and rights to make various decisions on the Company, as described below.

The Authorities of Joint Discussion Meeting

The RPB authorities, in this case, the State Minister of State-Owned Enterprises or any other Minister who is appointed and/or authorized to represent the Government as the Company's capital owner by still adhering to the provisions of laws and regulations, among others:

1. Providing addition to the State Capital Participation originating from the capitalization of reserves and other sources;
2. Ratifying the amendment to the Company's Articles of Association;
3. Appointing and dismissing members of the Board of Directors, Board of Supervisor Council and the Board of Sharia Supervisor Council;

4. Menetapkan jumlah anggota Direksi Perusahaan dan jumlah anggota Dewan Pengawas;
5. Pengesahan Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
6. Pengesahan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
7. Memberikan Persetujuan Rancangan perubahan RKAP yang telah disahkan, apabila terdapat perubahan;
8. Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan;
9. Pengesahan atas auditor eksternal yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan, dan melakukan pengesahan atas laporan hasil pemeriksaan auditor eksternal dimaksud;
10. Menetapkan alokasi penggunaan laba bersih Perusahaan, termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan;
11. Menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas;
12. Melakukan penilaian (evaluasi) kinerja Direksi dan Dewan Pengawas.

4. Determining the number of members of the Company's Board of Directors and the number of members of the Board of Supervisor Council;
5. Ratifying the Draft of the Company Long Term Plan (RJPP);
6. Endorsing the Draft of Corporate Work Plan and Budget (RKAP);
7. Approving the amendment draft of RKAP that has been ratified, if there are any changes;
8. Ratifying the Company's Annual Report;
9. Ratifying the appointed external auditor to carry out the assessment, and ratifying the report of the intended external auditor assessment results;
10. Establishing allocation of the use of the Company's net income, including the amount of allowance for reserves;
11. Determining the income of the Board of Directors and Board of Supervisor Council;
12. Conducting an assessment (evaluation) of the Board of Directors' and Board of Supervisor Council's performances.

Hasil Keputusan RPB Tahun 2018 dan Tindak Lanjut serta Realisasi oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2018

Di sepanjang tahun 2018, Perusahaan menyelenggarakan RPB sebanyak 2 kali, yaitu RPB pada tanggal 4 Januari 2018 dan 3 Mei 2018. Berikut disampaikan hasil keputusan RPB dan realisasi tindak lanjutnya oleh manajemen hingga akhir tahun 2018.

Results of the 2018 RPB Resolution and Its Follow-Up and Realization by Management Until the End of 2018

13. Throughout 2018, the Company held 2 (two) Joint Discussion Meetings; on January 4, 2018, and May 3, 2018. The following were the RPB resolution results and the realization of its follows-up by the Company's management until the end of 2018.

No	Hasil Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Tahun 2018 Results of the 2018 Joint Discussion Meeting (RPB) Resolution	Sudah/Belum Terlaksana Has already been implemented / Has not been Implemented	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RPB Tahun 2018 Hingga Akhir Tahun 2018 Follow-up by Management on the 2018 RPB Resolutions Until the End of 2018
RPB tanggal 4 Januari 2018 / RPB on January 4, 2018			
1	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perum Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2018 Ratification of the 2018 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of Perum Jaminan Kredit Indonesia	✓	Tertuang dalam Surat Menteri BUMN No. S-11/MBU/01/2018 tanggal 4 Januari 2018 perihal pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan perum jaminan kredit indonesia tahun 2018 Stated in the Minister of SOEs Letter No. S-11 / MBU / 01/2018 dated January 4, 2018, concerning the ratification of the 2018 corporate work plan and budget of Perum Jaminan Kredit Indonesia
RPB tanggal 3 mei 2018 / RPB on May 3, 2018			
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan dan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia tahun buku 2017 Approval of the Annual Report and Ratification of the Consolidated Financial Statements of Perum Jaminan Kredit Indonesia for the fiscal year 2017	✓	Tertuang dalam surat Meneteri BUMN No. S-11/MBU/01/2018 tanggal 03 mei 2018 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan dan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia tahun buku 2017 Stated in the Minister of SOEs letter No. S-11 / MBU / 01/2018 dated May 3, 2018, concerning the Approval of the Annual Report and the Ratification of the Consolidated Financial Statements of Perum Jaminan Kredit Indonesia for the fiscal year 2017

PENYELENGGARAAN RPB DI TAHUN 2019

Di tahun 2019, Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) kali RPB, yaitu tanggal 25 Januari 2019 dan 29 Mei 2019. Berikut disampaikan hasil keputusan RPB dan realisasi tindak lanjutnya oleh manajemen.

THE RPB IMPLEMENTATION IN 2019

In 2019, the Company held 2 (dua) Joint Discussion Meetings; dated on January 25, 2019, and May 29, 2019. The following were the RPB resolution results and the realization of its follows-up by the Company's management.

No	Hasil Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Tahun 2019 Results of the 2019 Joint Discussion Meeting (RPB) Resolution	Sudah/Belum Terlaksana Has already been implemented / Has not been Implemented	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RPB Tahun 2019 Hingga Akhir Tahun 2019 Follow-up by Management on the 2019 RPB Resolutions Until the End of 2019
RPB tanggal 25 Januari 2019 / RPB on January 25, 2019			
1	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2019 Perum Jamkrindo Ratification of the 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of Perum Jaminan Kredit Indonesia	✓	Tertuang dalam Surat Kementerian BUMN S-61/MBU/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 perihal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perum Jamkrindo Tahun 2019. Stated in the Minister of SOEs Letter No. S-61/MBU/01/2019 dated January 25, 2019 concerning the ratification of the 2019 corporate work plan and budget of Perum Jaminan Kredit Indonesia
RPB tanggal 29 Mei 2019 / RPB on May 29, 2019			
2	Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 Audited Perum Jamkrindo Approval of the Financial Statements of Perum Jaminan Kredit Indonesia audited for the fiscal year 2018	✓	Tertuang dalam surat Meneteri BUMN No. S-373/MBU/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan dan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia tahun buku 2018 Stated in the Minister of SOEs letter No. S-373/ MBU/05/2019 dated May 29, 2019, concerning the Approval of the Annual Report and the Financial Statements of Perum Jaminan Kredit Indonesia for the fiscal year 2018

DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas dibentuk oleh pemilik modal untuk memberikan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL

The Board of Supervisor Council is formed by the capital owners to provide oversight of the management of the Company run by the Board of Directors. The legal basis for the appointment of the Board of Supervisor Council is stipulated in the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Board of Supervisor Council of State-Owned Enterprises.

PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN PENGAWAS

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas mengacu kepada *Board Manual* Dewan Pengawas dan Direksi yang telah disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 89/Kep-Dir/XII/2012—KEP-06/DP-JAMKRINDO/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012.

Board Manual merupakan kompilasi dan implementasi dari prinsip-prinsip hukum Perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dan praktik-praktik terbaik (*best practices) Good Corporate Governance* (GCG).

THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL MANUAL

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Supervisor Council refer to the Board of Supervisor Council and Board of Directors Manual that has been ratified through a Joint Decree of the Board of Directors and Board of Supervisor Council of Perum Jamkrindo No. 89/Kep-Dir/XII/2012 — KEP-06/DP-JAMKRINDO/XII/2012 dated December 3, 2012.

The Board Manual is a compilation and implementation of the Company legal principles, as stipulated in Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Government Regulations Number 35 of 2018 concerning Public Corporation of Indonesian Credit Guarantee/ Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia and Good Corporate Governance (GCG) best practices.

Maksud dari *Board Manual* ialah sebagai dokumen yang menjadi acuan bagi Dewan Pengawas dan Direksi dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajibannya. Dokumen ini juga mengatur tata hubungan antara Dewan Pengawas, Direksi, dan Pemilik Modal yang dikuasakan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Ruang lingkup *Board Manual* adalah mengatur dan menjelaskan pelaksanaan hubungan kerja antar organ Dewan Pengawas dan organ Direksi di lingkungan Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana Dewan Pengawas merupakan organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.

Dalam tata laksana hubungan kerja Dewan Pengawas dan Direksi meliputi, di antaranya:

1. Pertemuan formal yang terdiri atas:
   a. kehadiran Direksi dalam rapat Dewan Pengawas
   b. kehadiran Dewan Pengawas dalam rapat Direksi
   c. penyelenggaraan rapat gabungan Dewan Pengawas – Direksi
2. Pertemuan informal
3. Komunikasi formal
   a. pelaporan, terdiri atas:
      1) pelaporan berkala
      2) pelaporan khusus
      3) surat-menyurat/Nota dinas
      4) pemberitahuan pelaksanaan kegiatan resmi perusahaan
4. Komunikasi infromal

The purpose of Board Manual is as a reference document for the Board of Supervisor Council and Board of Directors in carrying out their duties, authorities, responsibilities, rights, and obligations. This document also regulates the relationship between the Board of Supervisor Council, Board of Directors, and Capital Owners authorized by the Minister of State-Owned Enterprises.

The scope of the Board Manual is to regulate and describe the implementation of work relations between the organs of the Board of Supervisor Council and Board of Directors in the Company by referring to the provisions of the Company's Articles of Association and/or the provisions contained in the applicable laws and regulations. The Board of Supervisor Council is the Company organ whose duty is to supervise and provide advice to the Board of Directors in carrying out the Company management activities.

In work relations between the Board of Supervisor Council and Board of Directors include, among others:

1. Formal meeting consisting of:
   a. the presence of the Board of Directors at the Board of Supervisor Council meetings
   b. the presence of the Board of Supervisor Council at the Board of Directors meetings
   c. the holding of joint meetings of the Board of Supervisor Council - Board of Directors
2. Informal meetings
3. Formal communications
   a. reporting, which consists of:
      1) periodic reporting
      2) special reporting
      3) correspondence/official note
      4) notification of the Company official activities implementation
4. Informal communications

KRITERIA DEWAN PENGAWAS

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mentri BUMN No.PER-02/MBU/02/2015 persyaratan formal dan materil anggota Dewan Pengawas terdiri dari:

THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL CRITERIA

Based on the provisions in the Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 states that formal and material requirements of the members of the Board of Supervisor Council consist of:

Persyaratan Requirements	Uraian	Description
Formal	1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum	1. Able to carry out legal actions
	2. Tidak pernah dinyatakan pailit	2. Has never been declared bankrupt
	3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan/Perum dinyatakan pailit; dan	3. Has never been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners/Board of Supervisor Council that was found guilty of causing a Company/Perum to be declared bankrupt; and
	4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara	4. Has never been convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's finances
Materil Material	1. Integritas Dedikasi	1. Possesses integrity dedication
	2. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen	2. Understands the Company management problems related to one of the management functions
	3. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan	3. Has adequate knowledge in the Company/Public Corporation's business field in which the person concerned is nominated; and
	4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya	4. Can provide sufficient time to carry out its duties
Persyaratan lainnya Other Requirements	Persyaratan lain anggota Dewan Pengawas, yaitu:	Other requirements for members of the Board of Supervisor Council are:
	1. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II	1. He/she is not a member of the management of Political Parties and/or candidates for legislative members and/or legislative members. Legislative candidates or legislative members consisting of candidates/members of the House of People's Representatives, Regional Representative Board, Level I Regional House of Representatives, and Level II Regional House of Representatives
	2. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah	2. He/she is not a candidate of Regional Heads/Regional Deputy Heads and/or a Regional Head/a Regional Deputy Head
	3. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut	3. He/she is not serving as a member of the Board of Commissioners/Board of Supervisor Council at the relevant SOEs for 2 (two) consecutive periods
	4. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan Komisaris/dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter	4. He/she is physically and mentally healthy (is not suffering from an illness that can hinder the implementation of duties as a member of the Board of Commissioners/Board of Supervisor Council), as evidenced by a health certificate from a doctor
	5. Bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan	5. It must be based on the proposal letter from the relevant agency for prospective candidates from the Technical Ministry or other Government Agencies.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS TAHUN 2019

Di tahun 2019 terjadi perubahan keanggotaan Dewan Pengawas, terkait dengan telah habisnya masa jabatan salah satu Dewan Pengawas Perusahaan. Kronologi perubahan susunan Dewan Pengawas, dan susunan Dewan Pengawas per 31 Desember 2019 dapat dilihat di bawah ini.

COMPOSITION OF THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL IN 2019

In 2019 there was a change in the membership of the Board of Supervisor Council, related to the expiration of the term of office of one of the Company's Board of Supervisor Council. The chronology of the changes in the composition of the Board of Supervisor Council, and the formation of the Board of Supervisor Council as of December 31, 2019, could be seen below.

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS PERUM JAMKRINDO PER 31 DESEMBER 2019
THE COMPOSITION OF THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL OF PERUM JAMKRINDO AS OF DECEMBER 31, 2019

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Awal Jabatan Beginning of Term of Office	Masa Akhir Jabatan Ending of Term of Office	Periode Jabatan Term of Office
Ketua Dewan Pengawas merangkap Dewan Pengawas Independen Chairman of Board of Supervisor Council concurrent Independent Board of Supervisor Council	Sri Mulyanto	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-233/MBU/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 The Decree of the State Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-233 / MBU / 10/2017 dated October 27, 2017	27 Oktober 2017 October 27, 2017	26 Oktober 2022 October 26, 2022	Ke-1 1st
Anggota Dewan Pengawas Member of Board of Supervisor Council	Noor Ida Khomsiyati	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-76/MBU/4/2016 tanggal 12 April 2016 The Decree of the State Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-76/ MBU / 4/2016 dated April 12, 2016	12 April 2016 April 12, 2016	11 April 2021 April 11, 2021	Ke-1 1st
Anggota Dewan Pengawas Member of Board of Supervisor Council	Diah Natalisa	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-88/MBU/05/2017 tanggal 3 Mei 2017 The Decree of the State Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-88 / MBU / 05/2017 dated May 3, 2017	3 Mei 2017 May 3, 2017	2 Mei 2022 May 2, 2022	Ke-1 1st
Anggota Dewan Pengawas Member of Board of Supervisor Council	Ari Wahyuni	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-02/MBU/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 The Decree of the State Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-02/MBU/01/2019 dated January 3, 2019	3 Januari 2019 January 3, 2019	2 Januari 2024 January 2, 2024	Ke-1 1st
Dewan Pengawas Independen Member of Board of Supervisor Council	M. Muchlas Rowi	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-241/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 The Decree of the State Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-241 / MBU / 10/2019 dated	17 Oktober 2019 October 17, 2019	16 Oktober 2024 October 16, 2024	Ke-1 1st

*Profil singkat masing-masing anggota Dewan Pengawas dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas, dalam bab Profil Perusahaan.
*A brief profile of each member of the Board of Supervisor Council can be seen in the Profile section of the Board of Supervisor Council, in the Company Profile chapter

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai PP Nomor 35 Tahun 2018 serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas dilaksanan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas akan selalu mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan prinsip profesionalisme, efesiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.
2. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi.
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Pengawas.
4. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, kecuali dalam hal Perusahaan tidak mempunyai Direksi, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara belum mengisi jabatan Direksi yang kosong.
5. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas, tetapi pengawasan dilakukan secara pro-aktif, mencakup semua aspek bisnis Perusahaan
6. Dewan Pengawas dapat menggunakan jasa profesioal yang mandiri dan/atau membentuk Komite untuk membantu tugas Dewan Pengawas.

a. Umum

1). Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
2). Memiliki itikad baik, penuh kehati-hatian dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3). Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi serta *member* nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Pemilik Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4). Melakukan Tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
5). Memantau dan memastikan bahwa praktik *Good*

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL

The Board of Supervisor Council is the Company's Organ whose duty is to supervise in general and/or specifically according to Government Regulation (PP) Number 35 of 2018 and provide advice to the Board of Directors.

The supervision and advisory activities by the Board of Supervisor Council are carried out with the following principles:

1. In conducting supervision, the Board of Supervisor Council will always comply with Government Regulation Number 35 of 2018 and the provisions of the legislation and carry out the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.
2. Supervision is carried out by the Board of Supervisor Council to the Company's management by the Board of Directors.
3. In conducting supervision, the Board of Supervisor Council acts as an assembly and cannot act individually, representing the Board of Supervisor Council.
4. Supervision must not change to the implementation of executive duties, except in the case of the Company does not have the Board of Directors, with obligations in period no later than 30 (thirty) days after the Minister of State-Owned Enterprises have not yet filled the vacant position of the Board of Directors.
5. Supervision is carried out not only by mere agree or disagree the Actions which requires the approval of the Board of Supervisor Council, but supervision is carried out pro-actively, including all aspects of the Company's businesses.
6. The Board of Supervisor Council can use professional services that are independent and/or forms the Committees to assist the Board of Supervisor Council's duties.

a. General

1). Comply with laws and regulations and/or Articles of Association.
2). Have good faith, prudence, and responsibility in carrying out duties for the Company's interests and business according to the provisions of the legislation.
3). Supervise the Company's management policies by the Board of Directors as well as provide advice to the Board of Directors including regarding Company Development Plan, Long-Term Plan, Corporate Work Plan and Budget, the implementation of the provisions of Articles of Association and decisions of Capital Owners and applicable laws and regulations.
4). Perform the Company's management actions in certain circumstances for a certain period.
5). Monitor and ensure that Good Corporate Governance

Corporate Governance telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan, antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Pengawas dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*.

6). Menyusun rencana kerja Dewan Pengawas untuk periode tahun berikutnya
7). Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri.

b. Pengawasan

Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilakukan antara lain dengan cara:

1). Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan di Perusahaan.
2). Melakukan kunjungan ke unit kerja/kantor cabang/proyek tertentu, baik dengan (atau tanpa) pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya
3). Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Direksi
4). Menugaskan Komite Audit, dan Komite Investasi dan Manajemen Risiko untuk melakukan tugas-tugas pengawasan.

c. Pelaksanaan Tugas Berkaitan dengan Pemilik Modal

Dalam hubungannya dengan Pemilik Modal, Dewan Pengawas bertugas dan berkewajiban untuk:

1). Memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik Modal mengenai Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Perusahaan serta perubahan dan penambahanya.
2). Mengikuti perkembanagan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik Modal mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.
3). Melaporkan dengan segera kepada Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan dengan disertai saran mengenai Langkah perbaikan yang harus ditempuh.
4). Meneliti dan menelaah serta menandatangani Laporan Tahunan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi.
5). Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Pemilik Modal.
6). Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemilik Modal.
7). Mengajukan calon Auditor Eksternal kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara yang dilengkapi dengan alasan pencalonan dan besarnya biaya.

d. Pengelolaan Manajemen Risiko

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko.

practices have been implemented effectively and sustainably, among others, by holding periodic meetings between the Board of Supervisor Council and Board of Directors to discuss the implementation of Good Corporate Governance.

6). Prepare a work plan for the Board of Supervisor Council for the next period.
7). Account its duties implementation to the Minister.

b. Supervision

Supervision by the Board of Supervisor Council is carried out among others in a way:

1). Request written information to the Board of Directors about a problem in the Company.
2). Conduct visits to work units/branch offices/specific projects, both with (or without) prior notice to the Board of Directors.
3). Respond to periodic reports of the Board of Directors
4). Assign the Audit Committee and the Investment and Risk management Committee to carry out supervisory duties.

c. Implementation of Duties Relating to the Capital Owners

In conjunction with the Capital Owners, the Board of Supervisor Council has duties and obligations to:

1). Give opinions and suggestions to the Capital Owners regarding the Company's Annual Work Plan and Budget as well as its changes and addition.
2). Follow the development of the Company's activities, provide opinions and suggestions to the Capital Owners regarding every problem considered important for the management of the Company.
3). Report immediately to the Capital Owners if there are symptoms of a decline in the Company's performance accompanied by suggestions regarding corrective measures that must be taken.
4). Research and analyze and sign the Annual Report prepared and submitted by the Board of Directors.
5). Perform other supervisory duties determined by the Capital Owners.
6). Account the implementation of its duties to the Capital Owners.
7). Submit a candidate for External Auditor to the Minister of State-Owned Enterprises accompanied by the reasons for the nomination and the amount of the fee.

d. Management of Risk Management

The Board of Supervisor Council must supervise and provide advice to the Board of Directors periodically regarding the effectiveness of the risk management application.

e. Sistem Pengendalian Internal

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif.

f. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

1). Dewan Pengawas mengawasi agar Direksi mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemilik Modal, dan Instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.

2). Dewan Pengawas mengawasi agar Direksi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga informasi penting yang diperlukan oleh Pemangku Kepentingan.

3). Dewan Pengawas mengawasi agar Direksi aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dan masalah material yang dihadapi.

4). Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Dewan Pengawas harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5). Etika Berusaha dan Anti Korupsi. Dewan Pengawas tidak diperkenankan memberikan atau menawarkan atau menerima, sesuatu yang berharga kepada atau dari setiap pihak yang berkepentingan untuk mempegaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai perundang-undangan.

g. Wewenang Dewan Pengawas

Kewenangan Dewan Pengawas tercantum dalam PP No 35 Tahun 2018, meliputi:

1). Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas, dan perbuatan-perbuatan Direksi yang hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas dan persetujuan Pemilik Modal. Dewan Pengawas berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana/usulan Direksi dalam hal:

a) Mengadakan Kerjasama dengan badan usaha atau pihak lainnya berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Building Operate Transfer*/BTO), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BOwT), Bangun Serah Guna (*Built Transfer Operate*/BTO), dan kerja sama lainnya dengan nilai dan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

e. Internal Control System

The Board of Supervisor Council must supervise and provide advice to the Board of Directors to establish an effective internal control system.

f. Information Disclosure and Confidentiality

1). The Board of Supervisor Council oversees the Board of Directors discloses important information in the Annual Report and the Company's Financial Statements to the Capital Owners, and the related Government Agencies according to applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective manner.

2). The Board of Supervisor Council oversees that the Board of Directors takes the initiative to disclose not only problems that are required by laws and regulations but also important information needed by the Stakeholders.

3). The Board of Supervisor Council oversees that the Board of Directors actively discloses the Good Corporate Governance principles implementation and the material problems faced.

4). The Board of Supervisor Council is responsible for maintaining the confidentiality of Company information. Confidential information obtained while serving as the Board of Supervisor Council must be kept confidential according to applicable laws and regulations.

5). Business Ethics and Anti-Corruption. The Board of Supervisor Council may not give or offer or accept, anything of value to or from any interested party to influence or in return for what he/she has done and other actions according to the legislation.

g. Authorities of the Board of Supervisor Council

The Board of Supervisor Council's authorities is listed in Government Regulation (PP) No 35 of 2018, including:

1). The actions of the Board of Directors must obtain written approval from the Board of Supervisor Council, and the Board of Directors' actions that can only be conducted by the Board of Directors after obtaining written responses from the Board of Supervisor Council and approval of the Capital Owners. The Board of Supervisor Council authorized to approve or disapprove in written of the plans/ proposals of the Board of Directors in terms of:

a) Establish cooperation with business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contract, leasing assets, Joint Operation (KSO), Building Operate Transfer/BTO, Build Own Transfer / BOwT, Built Transfer Operate / BTO, and other cooperation with a certain value and period stipulated by the Minister.

b) Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
c) Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
d) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
e) Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain.
f) Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
g) Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
h) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
i) Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.
j) Melepaskan dan menghapus aktiva/aset tetap Perusahaan, kecuali aktiva/aset tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
k) Menetapkan cetak biru (*blueprint*) organisasi Perusahaan.
l) Menetapkan dan mengubah logo perusahaan.
m) Melakukan Tindakan lain yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
n) Membentuk Yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang dapat berdampak bagi perusahaan.
o) Pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk Yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan dan/atau
p) Pengusulan wakil dari Perusahaan untuk menjadi calon anggota direksi dan/atau komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang tidak memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Menteri.

2). Memasuki pekarangan, gedung dan, kantor yang dipergunakan oleh perusahaan dan berhak memeriksa buku, surat serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, memeriksa kekayaan perusahaan, meminta penjelasan Direksi dan/atau pejabat lainnya yang menyangkut persoalan pengelolaan perusahaan, mengetahui segala kebijakan dan Tindakan yang telah dan akan dijalankan Direksi dan meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas, menghadiri rapat Direksi dan memberikan pendapat terhadap hal yang dibicarakan.

b) Write off the Non-Performing Loans and inventory of inanimate objects.
c) Release movable fixed assets of the life cycle that is normally applied in the industry in general up to 5 (five) years.
d) Establish organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors.
e) Conduct equity participation in other companies.
f) Establish a subsidiary and/or joint venture.
g) Release equity participation in a subsidiary and/or joint venture.
h) Conduct merger, consolidation, acquisition, spin-off, and dissolution of a subsidiary and/or joint venture.
i) No longer collecting non-performing loans that have been written off.
j) Release and write off the Company's fixed assets, except for movable fixed assets of the life cycle that are normally applied in the industry in general up to 5 (five) years.
k) Establish the blueprint of the Company's organization.
l) Establish and change the Company's logo.
m) Perform other actions that have not been determined in the Corporate Work Plan and Budget.
n) Form a foundation, organization, and/or association, both directly or indirectly related to the Company that can have an impact on the Company.
o) Impose the Company's expenses that are fixed and routine for foundations, organizations and/or associations that are directly or indirectly related to the Company and/or,
p) Propose representatives from the Company to become candidates for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners in joint ventures and/or subsidiaries which do not make a significant contribution to the Company and/or have a strategic value determined by the Minister.

2). Enter the yards, buildings, and offices used by the Company and entitled to examine books, letters, and other documents, examine the cash for verification purposes, examine company assets. Besides, request clarification from the Board of Directors and/or other officials regarding company management issues, know all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors. Also, require the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the Board of Directors' notice to attend the Board of Supervisor Council's meetings, attend the Board of Directors' meetings, and provide opinions on matters discussed.

3). Dewan Pengawas dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara waktu apabila anggota Direksi bertindak bertentangan dengan PP No 35 Tahun 2018, terdapat indikasi melakukan kerugian perusahaan, melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi perusahaan.

4). Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Keputusan Menteri, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3). The Board of Supervisor Council may temporarily dismiss a member of the Board of Directors if a member of the Board of Directors acts contrary to PP No. 35 of 2018, there are indications of making the Company losses, neglecting its obligations or there is an urgent reason for the Company.

4). Carry out other supervisory authorities as long as they do not conflict with the Articles of Association, the Ministerial Decrees, and/or Laws and Regulations.

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN PENGAWAS

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo Nomor: KEP-06/DP-JAMKRINDO/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pembagian Tugas Dewan Pengawas Perum Jamkrindo maka pembagian tugas Dewan Pengawas Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:

DISTRIBUTION OF THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL'S DUTIES

Based on the Decree of the Board of Supervisor Council of Perum Jamkrindo Number: KEP-06 / DP-JAMKRINDO / X / 2019 dated October 21, 2019, concerning the Distribution of Duties of the Board of Supervisor Council of Perum Jamkrindo, then the division of duties of the Board of Supervisor Council of Perum Jamkrindo was as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duties
1.	Sri Mulyanto	Ketua Chairman	Melakukan koordinasi dengan segenap anggota Dewan Pengawas maupun perangkat Dewan Pengawas berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawaas serta khususnya dalam bidang keuangan, dan bisnis penjaminan Coordinate with all members of the Board of Supervisor Council and the Board of Supervisor Council's Organs related to the duties and authorities of the Board of Supervisor Council as well as specifically in the field of finance and guarantee business.
2.	Noor Ida Khomsiyati	Anggota Member	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas khusunya di bidang MSDM, Hukum dan Kepatuhan Handling activities related to the duties and authorities of the Board of Supervisor Council especially in the field of HRM, Legal and Compliance.
3.	Diah Natalisa	Anggota Member	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas khusunya di bidang Operasional, dan Layanan Handling activities related to the duties and authorities of the Board of Supervisor Council especially in the field of Operations, and Services.
4.	Ari Wahyuni	Anggota Member	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas khususnya di bidang Investasi, dan Manajemen Risiko Handling activities related to the duties and authorities of the Board of Supervisor Council, especially in the field of Investment and Risk Management.
5.	M. Muchlas Rowi	Anggota Member	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas khususnya di bidang Jaringan dan Teknologi Informasi Handling activities related to the duties and authorities of the Board of Supervisor Council, especially in the field of Network and Information Technology.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Agar Dewan Pengawas dapat selalu memahami perkembangan hal-hal terkait industri penjaminan. Dewan Pengawas mengikuti program pengembangan kompetensi berupa seminar, *workshop*, sertifikasi atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi. Tentang kegiatan program pengembangan kompetensi yang diikuti Dewan Pengawas di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAM

So that the Board of Supervisor Council can always understand the development of matters related to the guarantee industry, the Board of Supervisor Council follows competency development programs in the form of seminars, workshops, certifications, or other activities that can increase knowledge and competence. Concerning the competency development program activities that the Board of Supervisor Council participated in throughout 2019 could be seen in the Corporate Profile chapter in this Annual Report.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS TAHUN 2019

Selama tahun 2019 Dewan Pengawas telah melakukan 12 (dua belas) kali rapat internal, 12 (dua belas) kali rapat gabungan dengan Direksi, dan 2 (dua) Rapat Pembahasan Bersama dengan Pemilik Modal (Kementerian BUMN). Selain Rapat Rutin Bulanan (Internal dan Gabungan) dan Rapat Pembahasan Bersama selama tahun 2019 Dewan Pengawas juga telah melaksanakan 39 (tiga puluh Sembilan) kali rapat lainnya yang bersifat teknis (secara internal maupun dengan Direksi) serta dilaksanakan dalam rangka membahas permasalahan yang lebih spesifik dan lebih mendalam. Selama tahun 2019 telah diterbitkan 42 (empat puluh dua) surat dan 7 (tujuh) keputusan.

Dewan Pengawas telah melakukan *monitoring* tindak lanjut atas masalah-masalah penting di lingkup Perusahaan serta berupaya aktif dalam membantu Direksi untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dengan memberikan saran dan masukan. Perkembangan tindak lanjut permasalahan strategis dibahas secara intensif dalam kesempatan rapat bulanan Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas melaksanakan kegiatan kunjungan ke lapangan guna mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih akurat/jelas mengenai bidang atau hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Selama tahun 2019, Dewan Pengawas telah melaksanakan 7 (tujuh) kali kunjungan, dengan rincian sebagai berikut:

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL IN 2019

In 2019, the Board of Supervisor Council conducted 12 (twelve) internal meetings, 12 (twelve) joint meetings with the Board of Directors, and 2 (two) Joint Discussion Meeting with Capital Owner (The Minister of SOE's). In addition to Regular Monthly Meetings (Internal and Joint) and Joint Discussion Meetings during the 2019 Board of Supervisor has also carried out 39 (thirty nine) times other meetings that are technical (internally and with the Directors) and carried out in order to discuss more specific and deeper problems. During 2019 there were 42 (forty two) published letter and 7 (seven) decisions.

The Board of Supervisor Council has monitored follow-up on important issues within the Company as well as performed active efforts to assist the Board of Directors in completing any problems that occur by providing advice and input. The development of a strategic problem's follow-up was discussed intensively at the Board of Supervisor Council monthly meeting.

The Board of Supervisor Council carries out field visits to get a more accurate picture/information about the areas or aspects that need the Company's attention. In 2019, the Board of Supervisor Council had conducted 7 (seven) visits, with details as followed:

Tanggal Date	**Lokasi** Location	**Perihal** Reason of Visit	**Kehadiran** The Visiting Party
13 Maret 2019 March 13, 2019	Kantor Wilayah III Jakarta Regional Office III Jakarta	*Monitoring* Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah dan Kantor Cabang / Monitoring the Performance Evaluation of Regional Office and Branch Office	1. Ari Wahyuni 2. Alvin Nur W 3. Slamet Wiyono
14 Maret 2019 March 14, 2019	Kantor Cabang Yogyakarta / Branch Office Yogyakarta	*Monitoring* Evaluasi Kinerja Kantor Cabang / Monitoring the Performance Evaluation of Branch Office	1. Sri Mulyanto 2. Doddy Heriawan P
30 Agustus 2019 August 30, 2019	Kantor Cabang Kudus / Branch Office Kudus	*Monitoring* Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah dan Kantor Cabang / Monitoring the Performance Evaluation of Regional Office and Branch Office	1. Sri Mulyanto 2. Noor Ida Khomsiyati 3. Safari Mirza
2 September 2019 September 2, 2019	Kantor Cabang Manado / Branch Office Manado	*Monitoring* Evaluasi Kinerja Kantor Cabang / Monitoring the Performance Evaluation of Branch Office	1. Noor Ida Khomsiyati 2. Alvin Nur W
20 September 2019 September 20, 2019	Kantor Cabang Banjarmasin / Branch Office Banjarmasin	*Monitoring* Evaluasi Kinerja Kantor Cabang/ Monitoring the Performance Evaluation of Branch Office	Diah Natalisa
27 September 2019 September 27, 2019	Kantor Wilayah II Palembang / Regional Office II Palembang	Monitoring Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah/ Monitoring the Performance Evaluation of Regional Office	Diah Natalisa
1 November 2019 November 1, 2019	Kantor Wilayah IV Bandung dan Kantor Cabang Bandung / Regional Office IV and Branch Office Bandung	*Monitoring* Evaluasi kinerja Kantor Cabang Wilayah dan Kantor Cabang/ Monitoring the Performance Evaluation of Regional Office and Branch Office	1. Sri Mulyanto 2. Noor Ida Khomsiyati 3. M Muchlas Rowi 4. Alvin Nur W 5. Doddy Heriawan P 6. Safari Mirza

Hasil pengukuran terhadap pelaksanaan tugas pengawasan menunjukkan bahwa capaian kinerja dari program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2019 secara umum dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian skor KPI (*Key Performance Indicator*) Dewan Pengawas tahun 2019 sebesar 100% (sangat baik). Dewan Pengawas juga telah menyusun rencana kerja untuk tahun 2020 yang masih diarahkan pada tiga aspek strategis, yakni aspek Pengawasan dan Pemberian Nasihat, aspek Pelaporan, dan aspek Dinamis. Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilakukan antara lain dengan cara:

1. Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan di Perusahaan;
2. Melakukan kunjungan ke unit kerja/kantor cabang/ proyek tertentu, baik dengan (atau tanpa) pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya;
3. Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Direksi;
4. Menugaskan Komite Audit, dan Komite Investasi dan Manajemen Risiko untuk melakukan tugas-tugas pengawasan.

Dasar ketentuan dalam melakukan pengawasan pada pengelolaan perusahaan senantiasa mengacu pada ketentuan perundangan-undangan seperti Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 jo. PER-09/MBU/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik GCG pada BUMN, Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjaminan, serta Anggaran Dasar perusahaan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perum Jamkrindo.

DEWAN PENGAWAS INDEPENDEN

Dalam rangka memenuhi ketentuan minimal 20% Dewan Pengawas Independen dalam susunan keanggotaan Dewan Pengawas Perusahaan Umum(Perum) Jaminan Kredit Indonesia maka perlu untuk melakukan pengangkatan Dewan Pengawas Independen Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Dewan Pengawas Independen merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak terafiliasi dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, agar dapat menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga "*fairness*" serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas termasuk pemegang saham publik dan pemangku kepentingan lainnya.

The results of the measurement of supervisory duties' implementation indicated that the performance achievements of work programs and activities carried out during 2019 could generally be categorized as 'Very Good'. It could be seen from the achievement of the Board of Supervisor Council's KPI (Key Performance Indicator) score of 2019 of 100% (Very Good). The Board of Supervisor Council has also compiled a work plan for 2020, which is still directed at three strategic aspects, namely the aspects of Supervision and Advice Provision, Reporting, and Dynamic. The supervision activities by the Board of Supervisor Council carried out among others by:

1. Requesting written information from the Board of Directors about a problem at the Company;
2. Making visits to the certain work unit/branch office/ project, with (or without) prior notice to the Board of Directors;
3. Responding to periodic reports of the Board of Directors;
4. Assigning Audit Committee, and the Investment and Risk Management Committee to carry out supervisory duties.

The basis of provisions in conducting supervision of the Company management always refers to the provisions of laws and regulations, such as the Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011, dated August 1, 2011, jo. PER-09/ MBU/2012 dated July 16, 2012, regarding the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, the Financial Service Authority Regulation No. 3/POJK.05/2017 dated January 11, 2017, concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, and the Articles of Association of the Company listed in the Government Regulation (PP) Number 35 of 2018 concerning Perum Jamkrindo.

INDEPENDENT BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL

In order to meet the minimum requirement of 20% of the Independent Board of Supervisor Council in the membership composition of the Board of Supervisor Council of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, it is necessary to appoint the Independent Board of Supervisor Council of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. The Independent Board of Supervisor Council is a member of the Board of Supervisor Council who is not affiliated with members of the Board of Supervisor Council, members of the Board of Directors and/or controlling shareholders as well as free from business relationships or other relationships that can affect its ability to act independently according to GCG principles. It is to create a more objective and independent climate and maintain "fairness" and balance between the interests of majority shareholders and the protection of minority shareholders' interests, including public shareholders and other stakeholders.

KRITERIA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS INDEPENDEN

Sesuai dengan POJK Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, kriteria Komisaris Independen/Dewan Pengawas Independen adalah :

1. berkewarganegaraan Indonesia; dan
2. berdomisili di Indonesia.

Komisaris Independen/Dewan Pengawas Independen Lembaga Penjamin, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, anggota DPS, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama;
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
3. memahami peraturan perundang-undangan di bidang Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, dan/atau Penjaminan Ulang Syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; dan
4. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen/Dewan Pengawas Independen dimaksud menjabat.

CRITERIA OF INDEPENDENT BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL MEMBERS

In accordance with the regulation of the financial service authority (POJK) Number 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for the Guarantee Institution, the criteria of Independent Commissioners/ Independent Board of Supervisor Council members are:

1. Indonesian citizenship; and
2. domiciled in Indonesia.

The Independent Commissioner/Independent Board of Supervisor Council of the Guarantee Institution must meet the following requirements:

1. has no affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners/ Board of Supervisor Council, members of Board of Sharia Supervisor Council, or shareholders of the Guarantee Institution, within the same Guarantee Institution;
2. has never become a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners/Board of Supervisor Council, a member of Board of Sharia Supervisor Council, or taken a position of 1 (one) level below the Board of Directors in the same Guarantee Institution or other business entity that has an affiliation with the Guarantee Institution within the last 6 (six) month period;
3. understand the laws and regulations in the Guarantees field, Sharia Guarantees, Re-Guarantees, and/or Sharia Re-Guarantee, and other relevant laws and regulations; and
4. has a good knowledge of the financial condition of the Guarantee Institution, where the Independent Commissioner/Independent Board of Supervisor Council serves.

PERNYATAAN INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS INDEPENDEN

Sri Mulyanto sebagai Ketua Dewan Pengawas sekaligus Dewan Pengawas Independen Jamkrindo dan M. Muchlas Rowi sebagai Dewan Pengawas Independen telah membuat pernyataan independensi sebagaimana terlampir.

INDEPENDENCE STATEMENT OF THE INDEPENDENT BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL

Sri Mulyanto, as Chairman of the Board of Supervisor Council and Independent Board of Supervisor Council of Jamkrindo and M. Muchlas Rowi as Independent Board of Supervisor Council, have made statements of independence as attached in this document.

PERNYATAAN
DEWAN PENGAWAS PERUM JAMKRINDO
DALAM PENGAWASAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Guna mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya sebagaimana tercantum dalam:

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan pembubaran BUMN;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;
d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 jo. Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara;
e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin;
f. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan sebagaimana tercantum dalam *Board Manual* dan *Code of Conduct*.

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama : **SRI MULYANTO**

Jabatan : Ketua Dewan Pengawas merangkap Dewan Pengawas Independen Perum Jamkrindo

Menyatakan bahwa:

1. Kepemilikan Saham
   - ☑ Saya tidak memiliki saham pada Perum Jamkrindo dan/atau anak perusahaannya.
   - ☐ Saya memiliki saham pada Perum Jamkrindo dan/atau anak perusahaannya.

   - ☑ Keluarga saya tidak memiliki saham pada Perum Jamkrindo dan/atau anak perusahaannya.
   - ☐ Keluarga saya memiliki saham pada Perum Jamkrindo dan/atau anak perusahaannya.

   - ☑ Saya tidak memiliki saham diluar Perum Jamkrindo seperti Lembaga Penjamin lain/Perusahaan Jasa Keuangan dan/atau anak perusahaannya yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Lembaga/Institusi tersebut.
   - ☐ Saya memiliki saham diluar Perum Jamkrindo seperti Lembaga Penjamin lain/Perusahaan Jasa Keuangan dan/atau anak perusahaannya yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Lembaga/Institusi tersebut.

   - ☑ Keluarga saya tidak memiliki saham diluar Perum Jamkrindo seperti Lembaga Penjamin lain/Perusahaan Jasa Keuangan dan/atau anak perusahaannya yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Lembaga/Institusi tersebut.
   - ☐ Keluarga saya memiliki saham diluar Perum Jamkrindo seperti Lembaga Penjamin lain/Perusahaan Jasa Keuangan dan/atau anak perusahaannya yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Lembaga/Institusi tersebut.

Setiap.../2

Setiap adanya perubahan portofolio kepemilikan saham pribadi maupun anggota keluarga baik di Perum Jamkrindo/anak perusahaan Perum Jamkrindo/diluar Perum Jamkrindo seperti Lembaga Penjamin lain/Perusahaan Jasa Keuangan dan/atau anak perusahaannya akan saya laporkan kepada Sekretaris Perusahaan melalui penyerahan daftar khusus kepemilikan saham.

2. Hubungan Keluarga
   - ☑ Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Dewan Pengawas lainnya, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo.
   - ☐ Mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Dewan Pengawas lainnya, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo sebagaimana tercantum di bawah ini:

Nama Dewan Pengawas	Nama Dewan Pengawas Direksi/Dewan Pengawas Syariah/Kementerian BUMN

3. Hubungan Keuangan
   - ☑ Tidak mempunyai hubungan keuangan dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo.
   - ☐ Mempunyai hubungan keuangan dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo sebagaimana tercantum di bawah ini:

Nama Dewan Pengawas	Nama Dewan Pengawas Direksi/Dewan Pengawas Syariah/Kementerian BUMN	Penjelasan singkat

4. ☑ Tidak memiliki aktivitas sbb.: ☐ Memiliki aktivitas sbb.:
   a. Menjabat sebagai Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan saya di Perum Jamkrindo.
   b. Menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai Kepala/Wakil Kepala Pemerintahan Daerah.
   c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan saya di Perum Jamkrindo.

5. Tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan pemberian perintah maupun melakukan sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/keluarga, jabatan atau golongan dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest rule*).

6. Menghindari…/3

6. Menghindari benturan kepentingan yang berpengaruh pada pengawasan saya sebagai Dewan Pengawas Perum Jamkrindo.

7. Dalam melaksanakan aktivitas fungsi pengawasan operasional Perusahaan pada tahun 2018 akan bertindak independen terutama dalam proses pengambilan keputusan, dan tidak terbatas pada hal-hal yang tertulis di atas.

8. Senantiasa melaksanakan tugas dan kewajiban secara bersih, transparan, dan professional.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta serta hal-hal material apapun dan kami bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Jakarta, 3 Januari 2019

SRI MULYANTO

PERNYATAAN
DEWAN PENGAWAS PERUM JAMKRINDO
DALAM PENGAWASAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Guna mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya sebagaimana tercantum dalam:

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan pembubaran BUMN;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;
d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 jo. Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara;
e. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan sebagaimana tercantum dalam *Board Manual* dan *Code of Conduct*.

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama : **MUHAMMAD MUCHLAS ROWI**

Jabatan : Dewan Pengawas Perum Jamkrindo

Menyatakan bahwa:

1. Kepemilikan Saham
   - ☑ Saya tidak memiliki saham pada Perum Jamkrindo dan/atau anak perusahaannya.
   - ☐ Saya memiliki saham pada Perum Jamkrindo dan/atau anak perusahaannya.

   - ☑ Keluarga saya tidak memiliki saham pada Perum Jamkrindo dan/atau anak perusahaannya.
   - ☐ Keluarga saya memiliki saham pada Perum Jamkrindo dan/atau anak perusahaannya.

   - ☑ Saya tidak memiliki saham diluar Perum Jamkrindo seperti Lembaga Penjamin lain/Perusahaan Jasa Keuangan dan/atau anak perusahaannya yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Lembaga/Institusi tersebut.
   - ☐ Saya memiliki saham diluar Perum Jamkrindo seperti Lembaga Penjamin lain/Perusahaan Jasa Keuangan dan/atau anak perusahaannya yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Lembaga/Institusi tersebut.

   - ☑ Keluarga saya tidak memiliki saham diluar Perum Jamkrindo seperti Lembaga Penjamin lain/Perusahaan Jasa Keuangan dan/atau anak perusahaannya yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Lembaga/Institusi tersebut.
   - ☐ Keluarga saya memiliki saham diluar Perum Jamkrindo seperti Lembaga Penjamin lain/Perusahaan Jasa Keuangan dan/atau anak perusahaannya yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Lembaga/Institusi tersebut.

Setiap.../2

Setiap adanya perubahan portofolio kepemilikan saham pribadi maupun anggota keluarga baik di Perum Jamkrindo/anak perusahaan Perum Jamkrindo/diluar Perum Jamkrindo seperti Lembaga Penjamin lain/Perusahaan Jasa Keuangan dan/atau anak perusahaannya akan saya laporkan kepada Sekretaris Perusahaan melalui penyerahan daftar khusus kepemilikan saham.

2. Hubungan Keluarga
   - ☑ Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Dewan Pengawas lainnya, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo.
   - ☐ Mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Dewan Pengawas lainnya, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo sebagaimana tercantum di bawah ini:

Nama Dewan Pengawas	Nama Dewan Pengawas Direksi/Dewan Pengawas Syariah/Kementerian BUMN

3. Hubungan Keuangan
   - ☑ Tidak mempunyai hubungan keuangan dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo.
   - ☐ Mempunyai hubungan keuangan dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo sebagaimana tercantum di bawah ini:

Nama Dewan Pengawas	Nama Dewan Pengawas Direksi/Dewan Pengawas Syariah/Kementerian BUMN	Penjelasan singkat

4. ☑ Tidak memiliki aktivitas sbb.: ☐ Memiliki aktivitas sbb.:
   a. Menjabat sebagai Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan saya di Perum Jamkrindo.
   b. Menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai Kepala/Wakil Kepala Pemerintahan Daerah.
   c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan saya di Perum Jamkrindo.

5. Tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan pemberian perintah maupun melakukan sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/keluarga, jabatan atau golongan dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest rule*).

6. Menghindari…/3

6. Menghindari benturan kepentingan yang berpengaruh pada pengawasan saya sebagai Dewan Pengawas Perum Jamkrindo.

7. Dalam melaksanakan aktivitas fungsi pengawasan operasional Perusahaan pada tahun 2019 akan bertindak independen terutama dalam proses pengambilan keputusan, dan tidak terbatas pada hal-hal yang tertulis di atas.

8. Senantiasa melaksanakan tugas dan kewajiban secara bersih, transparan, dan professional.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta serta hal-hal material apapun dan kami bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Jakarta, 18 Oktober 2019

MUHAMMAD MUCHLAS ROWI

DIREKSI

Berdasarkan Keputusan Direksi dan Dewan Pengawas No. 89/Kep-Dir/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pedoman bagi Dewan Pengawas dan Direksi (*Board Manual*), Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mengacu kepada *Board Manual* Dewan Pengawas dan Direksi yang telah disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 89/Kep-Dir/XII/2012—KEP-06/DP-JAMKRINDO/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012. *Board Manual* merupakan kompilasi dan implementasi dari prinsip-prinsip hukum Perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance* (GCG).

Ruang lingkup *Board Manual* adalah mengatur dan menjelaskan pelaksanaan hubungan kerja antar organ Direksi dan organ Dewan Pengawas di lingkungan Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana Direksi merupakan organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Selain mengatur tentang kegiatan antar organ serta tata laksana hubungan kerja Direksi dan Dewan Pengawas, dalam *Board Manual* Direksi juga di atur tentang tugas serta wewenang dan kewajiban Direksi, pembagian kerja Direksi, rapat Direksi, program pengenalan Direksi, Pendidikan berkelanjutan bagi Direksi, serta organ pendukung Direksi.

Board Manual ini menjadi acuan dalam pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG melalui kejelasan sistem dan struktur yang menyangkut hubungan antar organ utama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER- 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BOARD OF DIRECTORS

Based on the Decree of the Board of Directors and the Board of Supervisor Council No. 89/Kep-Dir XII/2012 dated December 3, 2012, concerning Guidelines for the Board of Supervisor Council and the Board of Directors (Board Manual), the Board of Directors is the Company's organ responsible for the Company management for the Company interest and objective, and represents the Company inside or outside the court in accordance with the Articles of Association.

BOARD MANUAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors refers to the Board Manual of Board of Supervisor Council and Board of Directors which has been ratified through a Joint Decree of the Board of Directors and Board of Supervisor Council of Perum Jamkrindo No. 89/Kep-Dir/XII/2012 — KEP-06/DP-JAMKRINDO/XII/2012 dated December 3, 2012. The Board Manual is a compilation and implementation of the Company legal principles, as stipulated in Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and Government Regulations Number 35 of 2018 concerning Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia and Good Corporate Governance (GCG) best practices.

The scope of the Board Manual is to regulate and explain the implementation of work relations between the organs of the Board of Directors and Board of Supervisor Council in the Company concerning the provisions contained in the Company's Articles of Association and/or the provisions contained in the applicable laws and regulations. The Board of Directors is the Company's organ that is authorized and fully responsible for the Company's management for the interest of the Company, according to the purposes and objectives of the Company, and represents the Company both inside and outside the court according to the Articles of Association.

In addition to regulating inter-organ activities as well as the management of work relations of the Board of Directors and Board of Supervisor Council, in the Board Manual, it also regulates the Board of Directors' duties, authorities, and responsibilities of the Board of Directors, distribution of duties of the Board of Directors, the Board of Directors meetings, the Board of Directors introduction programs, the continuing education program for the Board of Directors, and the Board of Directors' supporting organs.

This Board Manual becomes a reference in the Company management based on the GCG principles through the clarity of the system and structure concerning the relationship between the Company's main organs, as referred to in Article 2 paragraph (2) of the State Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011, concerning the implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (SOEs).

KRITERIA DIREKSI

Penetapan pedoman kualifikasi Direksi Perusahaan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Perusahaan bersandar pada Peraturan Mentri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan aturan tersebut terdapat ketetapan mengenai persyaratan formal, materiil dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh seorang Direksi Perum yang mencakup:

CRITERIA OF THE BOARD OF DIRECTORS

The determination of the qualification guidelines of the Company's Board of Directors refers to the prevailing laws and regulations. In this case, the Company relies on the Minister of SOEs Regulation No. PER-03 / MBU / 02/2015 concerning Requirements, Procedures for the Appointment, and Dismissal of State-Owned Enterprises' Board of Directors.

Based on this regulation, there are provisions concerning formal, material, and other requirements that must be met by the Board of Directors of Perum Jamkrindo, which includes:

Persyaratan	Uraian	Description
Formal	• Mampu melaksanakan perbuatan hukum • Tidak pernah dinyatakan pailit • Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan/Perum dinyatakan pailit; dan • Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara	• Able to carry out legal actions • Has never been declared bankrupt • Has never been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners/ Board of Supervisor Council that was found guilty of causing a Company/Perum to be declared bankrupt; and • Has never been convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's finances
Materil	• Integritas • Dedikasi • Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen • Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan • Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya	• Possesses integrity • dedication • Understands the Company management problems related to one of the management functions • Has adequate knowledge in the Company/Public Corporation's business field in which the person concerned is nominated; and • Can provide sufficient time to carry out its duties
Persyaratan lainnya	Persyaratan lain anggota Direksi, yaitu: • Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II • Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/ atau Kepala/Wakil Kepala Daerah • Tidak menjabat sebagai anggota Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut • Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan Komisaris/dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter • Bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dan instansi yang bersangkutan	Other requirements for members of the Board of Directors are: • He/she is not a member of the management of Political Parties and/or candidates for legislative members and/or legislative members. Legislative candidates or legislative members consisting of candidates/members of the House of People's Representatives, Regional Representative Board, Level I Regional House of Representatives, and Level II Regional House of Representatives • He/she is not a candidate of Regional Heads/ Regional Deputy Heads and/or a Regional Head/ a Regional Deputy Head • He/she is not serving as a member of the Board of Commissioners/Board of Supervisor Council at the relevant SOEs for 2 (two) consecutive periods • He/she is physically and mentally healthy (is not suffering from an illness that can hinder the implementation of duties as a member of the Board of Commissioners/Board of Supervisor Council), as evidenced by a health certificate from a doctor • It must be based on the proposal letter from the relevant agency for prospective candidates from the Technical Ministry or other Government Agencies.

KETENTUAN MASA JABATAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Pasal 14, disebutkan bahwa anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

PROVISIONS OF TERM OF OFFICE

Based on Government Regulation No. 35 of 2018 dated July 20, 2018 concerning Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, in Article 14, it is stated that members of the Board of Directors are appointed for a term of office of 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) next term of office.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DIREKSI TAHUN 2019

Di tahun 2019 tidak terjadi pergantian maupun perubahan susunan dan komposisi keanggotaan jajaran Direksi Perusahaan, susunan dan komposisi Direksi per 31 Desember 2019 dapat dilihat di bawah ini.

THE STRUCTURE AND COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2019

In 2019, there was no change in the structure and composition of the membership of the Company's Board of Directors. The structure and composition of the Board of Directors as of December 31, 2019, could be seen below.

SUSUNAN DIREKSI PERUM JAMKRINDO PER 31 DESEMBER 2019
THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PERUM JAMKRINDO AS OF DECEMBER 31, 2019

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Awal Jabatan Beginning of Term of Office	Masa Akhir Jabatan Ending of Term of Office	Perio Jabat Term Offi
Direktur Utama President Director	Randi Anto	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-249/MBU/11/2017 The Decree of the State Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-249 / MBU / 11/2017	21 November 2017 November 21, 2017	20 November 2022 November 20, 2022	Ke- 1st
Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business	Amin Masudi	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-187/MBU/09/2017 The Decree of the State Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-187/ MBU/09/2017	7 September 2017 September 7, 2017	6 September 2022 September 6, 2022	Ke- 1st
Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network	Kadar Wisnuwarnaman	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-249/MBU/11/2017 The Decree of the State Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-249 / MBU / 11/2017	21 November 2017 November 21, 2017	20 November 2022 November 20, 2022	Ke- 1st
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan Director of HRM, General Affairs, and Compliance	Sulis Usdoko	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-187/MBU/09/2017 The Decree of the State Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-187/ MBU/09/2017	7 September 2017 September 7, 2017	6 September 2022 September 6, 2022	Ke- 1st
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko Director of Finance, Investment and Risk Management	I. Rusdonobanu	Periode Ke-1: Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-12/MBU/2013 j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014 Periode Ke-2: Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-22/MBU/01/2018 For the 1st Period: The Decree of the State Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-12 / MBU / 2013 j.o Decree of the State Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-44 / MBU / 2014 For the 2nd Period: The Decree of State Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-22 / MBU / 01/2018	15 Januari 2018 January 15, 2018	14 Januari 2023 January 15, 2023	Ke- 1st

KEBIJAKAN KEPENGURUSAN PERUSAHAAN

Kebijakan Kepengurusan Perusahaan ditetapkan oleh Direksi. Dalam melaksanakan Kepengurusan Perusahaan, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan, dengan syarat semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi. Jika Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, maka ditetapkan salah seorang Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dengan urutan sebagai berikut:

1. Salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
2. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan diantara anggota Direksi yang ada berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada butir (b) tidak dilakukan, salah seorang Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
4. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang. Direktur sebagaimana dimaksud pada butir (c) yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.

TUGAS, KEWENANGAN, DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi yang telah di susun dalam board manual Direksi, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, di mana tugas, kewenangan, dan kewajiban Direksi adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok

1. Berwenang penuh untuk melakukan segala Tindakan terkait dengan Pengurusan Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Anggaran Dasar.
2. Berwenang untuk mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan yang tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Anggaran Dasar, serta Keputusan Menteri.
3. Menetapkan kebijakan Pengurusan Perusahaan;
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;

COMPANY MANAGEMENT POLICY

The Board of Directors establishes the Company's Management Policy. In carrying out the Company Management, the President Director has the right and authority to act on behalf of the Board of Directors and represents the Company, with requirements that the Board of Directors Meeting approves all the actions of the President Director. If the President Director is absent for any reason, then a Director is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors in the following order:

1. One of the Directors appointed by the President Director is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors.
2. If the President Director does not appoint anyone, one of the Directors appointed by and among the Board of Directors members is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors.
3. In the case referred to in item (b) is not carried out, one of the Directors who has served the longest as a member of the Board of Directors is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors.
4. In the case of a Director who has served the longest as a member of the Board of Directors are more than 1 (one) person, the Director as referred to in point (c) with the oldest in the age is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors.

DUTIES, AUTHORITIES, AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Duties and Responsibilities of the Board of Directors which have been arranged in the Board Manual refer to the Government Regulation No. 35 of 2018 dated July 20, 2018, concerning Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, in which it is stated that the duties, authorities, and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

Main Duties

1. The Board of Directors has the full authority to take all actions related to the Management of the Company in accordance with policies that are deemed appropriate within limits stipulated in the laws and regulations concerning State-Owned Enterprises (SOEs), and Articles of Association.
2. The Board of Directors has the unlimited and unconditional full authorities to represent the Company inside and outside of court unless otherwise stipulated in the laws and regulations concerning State-Owned Enterprises (SOEs), Articles of Association, and Ministerial Decrees.
3. To establish the Company Management policies;
4. To regulate the devolution of the authority of the Board of Directors to one or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or to represent the Company inside and outside the court;

5. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
6. Mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;
7. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
8. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawasan Intern, dan jabatan lainnya;
9. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai Pengurusan dan pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan Rencana Jangka panjang perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan pengawas dan Menteri untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri;
3. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan beserta perubahannya, dan menyampaikannya kepada Dewan Pengawas dan Menteri untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri atau Dewan Pengawas;
4. Memberikan penjelasan kepada Menteri mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
5. Memberikan penjelasan kepada Menteri mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dalam hal pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan merupakan kewenangan Menteri;
6. Memberikan penjelasan kepada Dewan pengawas mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dalam hal pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan merupakan kewenangan Dewan Pengawas;
7. Membuat risalah rapat Direksi;

5. To regulate the devolution of the authority of the Board of Directors to one or several Company employees both individually and together or to others, to represent the Company inside and outside the court;
6. To regulate provisions concerning the Company's employment, including the stipulation of salaries, pensions or old-age insurance, and other income for Company employees based on the provision of laws and regulations. The decisions on the determination of salaries, pensions or old-age insurance and other income for the employees that exceed the obligation of the stipulated obligation determined by laws and regulations must get prior approval from the Minister;
7. To appoint and dismiss the Company employees based on the Company's employment regulations, and laws and regulations;
8. To appoint and dismiss the Corporate Secretary and Head of the Internal Audit Unit, and other positions;
9. To carry out all other actions regarding the management and ownership of the Company property, the Company's partnership with other parties or vice versa, and to represent the Company inside and outside the court regarding all matters and events, with restrictions as stipulated in the Articles of Association and/or the provisions of laws and regulations.

Responsibilities

1. To work for and guarantee the Company's business and activities implementation according to the purpose and objectives and its business activities;
2. To prepare the Company's Long Term Plan and submit it to the Board of Supervisor Council and the Minister for approval from the Minister;
3. To prepare the Corporate Work Plan and Budget and its amendments, and submit it to the Board of Supervisor Council and the Minister for approval from the Minister or the Board of Supervisor Council;
4. To provide an explanation to the Minister regarding the Company's Long-Term Plan;
5. To provide an explanation to the Minister regarding the Corporate Work Plan and the Budget if the ratification of the Corporate Work Plan and Budget is the authority of the Minister ;
6. To explain the Board of Supervisor Council regarding the Corporate Work Plan and Budget if the ratification of Corporate Work Plan and Budget is the authority of the Board of Supervisor Council;
7. To make minutes of the Board of Directors meetings;

8. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggung jawaban Pengurusan Perusahaan dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
10. Menyampaikan laporan kepada Dewan pengawas mengenai penetapan anggota direksi dan komisaris pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
11. Menyampaikan dan memberikan penjelasan mengenai laporan semesteran kepada Menteri;
12. Menyampaikan dan memberikan penjelasan mengenai laporan triwulanan kepada Dewan Pengawas;
13. Memberikan penjelasan yang berkaitan dengan Pengurusan Perusahaan apabila ditanyakan atau diminta anggota Dewan Pengawas dan/ atau Menteri;
14. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Menteri untuk disetujui dan disahkan;
15. Memberikan penjelasan kepada Menteri mengenai Laporan Tahunan;
16. Memelihara risalah rapat Dewan Pengawas, risalah rapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen keuangan, dan dokumen lain;
17. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan, risalah rapat Dewan Pengawas dan risalah rapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen keuangan, dan dokumen lain;
18. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi Pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan Pengawasan;
19. Memberikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta laporan khusus dan laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Pengawas dan/atau Menteri;
20. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
21. Menyusun dan menetapkan cetak biru (*bluepint*) organisasi Perusahaan;
22. Menyusun indikator pencapaian kinerja Direksi untuk dimintakan persetujuan Menteri;
23. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. To write annual reports as a form of accountability of the Company Management and financial documents according to the laws and regulations;
9. To prepare financial statements based on the Financial Accounting Standards and submit them to the Public Accounting Firm for auditing;
10. To submit a report to the Board of Supervisor Council regarding the determination of members of the Board of Directors and Board of Commissioners in subsidiaries and/or joint ventures;
11. To deliver and explain the semesterly report to the Minister;
12. To submit and explain the quarterly report to the Board of Supervisor Council;
13. To provide explanations relating to Company Management if asked or requested by members of the Board of Supervisor Council and/or the Minister;
14. To submit annual reports which include financial statements to the Minister for approval and ratifying;
15. To provide an explanation to the Minister regarding the annual report;
16. To archive the minutes of the Board of Supervisor Council's meetings, minutes of Board of Directors' meetings, annual reports, financial documents, and other Company's documents;
17. To archive at the Company's domicile, the minutes of the Board of Supervisor Council's meetings, minutes of Board of Directors' meetings, annual reports, financial documents, and other Company's documents;
18. To compile the accounting system according to the Financial Accounting Standards and based on the internal control principles, especially the functions of Management, Recording, Storage, and Supervision;
19. To provide periodic reports which are according to the provisions of laws and regulations, as well as special reports and other reports whenever requested by the Board of Supervisor Council and/or the Minister;
20. To prepare the complete Company's organizational structure with its details and duties;
21. To compile and establish blueprints of Company organizations;
22. To compile the Board of Directors' performance achievement indicators to be requested the approval of the Minister;
23. To carry out other responsibilities according to the provisions stipulated in this Government Regulation and those specified by the Minister according to the provision of laws and regulations.

PEMBAGIAN LINGKUP TUGAS ANTAR DIREKSI

Tugas dan wewenang masing-masing Direksi telah diatur dalam Ketetapan Direksi No. 01/KD/1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Struktur Organisasi Perum Jamkrindo yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas melalui surat No. S-24/DP/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Perum Jamkrindo. Dalam menjalankan kegiatannya, anggota Direksi Perusahaan membagi tugas dan wewenang sebagai berikut:

DISTRIBUTION OF DUTIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The duties and authorities of each Board of Directors are regulated in the Decree of the Board of Directors No. 01 / KD / 1 / V / 2018 dated May 30, 2018, concerning the Organizational Structure of Perum Jamkrindo that has been approved by the Board of Supervisor Council through letter No. S-24 / DP / V / 2018 dated May 23, 2018, concerning the Approval of Amendment of the Organizational Structure of Perum Jamkrindo. In carrying out its activities, the members of the Company's Board of Directors distribute the duties and authorities as follows:

Nama dan Jabatan Names and Positions	Tugas dan Wewenang	Duties and Authorities
Direktur Utama, President Director, Randi Anto	Direktur Utama memiliki tugas dan wewenang meliputi: 1. Audit Wilayah; 2. Audit Teknologi Informasi dan Korporasi; 3. Pengembangan Standar dan Kualitas Audit; 4. Kesekretariatan; 5. Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Perusahaan; 6. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; 7. Riset dan Pengembangan Produk; 8. Perencanaan dan Pengembangan Bisnis; dan 9. Sistem Manajemen dan Pengembangan Organisasi.	The President Director has duties and authorities including: 1. Regional Audit; 2. Audit of Information Technology and Corporation; 3. Development of Audit Standards and Quality; 4. Secretariat; 5. Public Relations and Corporate Communication; 6. Partnership and Community Development Program; 7. Product Research and Development; 8. Business Planning and Development; and 9. Management System and Organizational Development
Direktur Bisnis Penjaminan, Director of Guarantee Business Amin Masudi	Direktur Bisnis Penjaminan memiliki tugas dan wewenang meliputi Bisnis Penjaminan Program dan Non Program baik Bank BUMN, Bank Swasta, Lembaga Non Bank, Suretyship, Resi Gudang maupun Penjaminan Syariah, Pengelolaan Portofolio dan Kebijakan Perusahaan.	The Director of Guarantee Business has duties and authorities covering the Guarantee Business Program and Non-Guarantee Business Program for SOEs Bank, Private Bank, Non-Bank Institution, Suretyship, Warehouse Receipt, and Sharia Guarantee, Portfolio Management and Company Policy.
Direktur Operasional dan Jaringan, Director of Operations and Network Kadar Wisnuwarman	Direktur Operasional dan Jaringan memiliki tugas dan wewenang meliputi: 1. Teknik Bisnis; 2. Adminsitrasi Bisnis; 3. Pengelolaan Bisnis; 4. Subrogasi; 5. Jaringan Kerja; 6. Layanan dan Pengendalian Mutu; 7. Perencanaan dan Strategi Teknologi Informasi; 8. Pengembangan Sistem Aplikasi; 9. Operasional Teknologi Informasi; dan 10. Tata Kelola Teknologi Informasi (IT *Governance*).	Director of Operations and Network has the duties and authorities which include: 1. Business Engineering; 2. Business Administration; 3. Business Management; 4. Subrogation; 5. Networking; 6. Service and Quality Control; 7. Information Technology Planning and Strategy; 8. Application System Development; 9. Information Technology Operations; and 10. Information Technology Governance (IT Governance).
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan, Director of HRM, General Affairs, and Compliance, Sulis Usdoko	Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Kepatuhan memiliki tugas dan wewenang meliputi: 1. Kebijakan dan Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM); 2. Pendidikan dan Pelatihan; 3. Operasional dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM); 4. Pengadaan Barang dan Jasa; 5. Administrasi dan Pelayanan Intern; 6. Manajemen Aktiva Tetap; 7. Hukum; dan 8. Kepatuhan.	The Director of HRM, General Affairs, and Compliance has the duties and authorities which include: 1. Human Resource Management (HRM) Policy and Development; 2. Education and Training; 3. Operations and Management of Human Resources (HR); 4. Procurement of goods and services; 5. Internal Administration and Services; 6. Fixed Assets Management; 7. Law; and 8. Compliance.

Nama dan Jabatan Names and Positions	Tugas dan Wewenang	Duties and Authorities
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko, Director of Finance, Investment and Risk Management, I. Rusdonobanu	Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko memiliki tugas dan wewenang meliputi: 1. Investasi; 2. Operasional dan Layanan Keuangan; 3. Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Akuntansi; 4. Perencanaan dan Pengendalian Anggaran; 5. Laporan dan Sistem Informasi Manajemen; 6. Pengelolaan Risiko Penjaminan dan Korporasi; 7. Pemeringkatan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta Konsultasi Manajemen; dan 8. Klaim.	Director of Finance, Investment and Risk Management has duties and authorities which include: 1. Investment; 2. Operations and Financial Services; 3. Accounting Supervision and Control Policy; 4. Budget Planning and Control; 5. Management Information Systems and Reports; 6. Management of Guarantee and Corporate Risk; 7. Ranking of Micro Enterprises, Small Businesses and Medium Enterprises, and Management Consultations; and 8. Claim.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Agar Direksi dapat selalu memahami perkembangan hal-hal terkait industri penjaminan, Direksi mengikuti program pengembangan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi. Tentang kegiatan program pengembangan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

In order for the Board of Directors to always understand the development of matters related to the guarantee industry, the Board of Directors follows competency development programs in the form of seminars, workshops, or other activities that can improve knowledge and competence. In regards to the competency development program activities participated by the Board of Directors throughout 2019, it could be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

KEPUTUSAN STRATEGIS TAHUN 2019

Keputusan strategis yang tertuang dalam Peraturan Direksi adalah:

STRATEGIC DECISIONS IN 2019

Strategic decisions contained in Board of Directors Regulation:

No	Perihal / Subject	Nomor / Number
1.	Pedoman Pendelegasian Kewenangan Administrasi dan Kebijakan Perum Jamkrindo Guidelines for Delegating Administrative Authority and Policy Perum Jamkrindo	Peraturan Direksi Perum Jamkrindo Nomor:15/Per-Dir/I/VII/2019 Regulation of the Board of Directors of Perum Jamkrindo Number: 15/Per-Dir/I/VII/2019

TRANSPARANSI INFORMASI TERKAIT DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

TRANSPARENCY OF INFORMATION RELATED TO THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL AND BOARD OF DIRECTORS

ASSESSMENT DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Sebagai organ utama dalam Perusahaan, Dewan Pengawas dan Direksi memiliki peran sentral dalam gerak pertumbuhan Perusahaan. *Assessment* atas kedua organ ini menjadi sebuah keharusan, terutama karena Perusahaan merupakan BUMN yang diarahkan untuk menerapkan prinsip GCG pada standar BUMN sekaligus penilaian terhadap penerapan tersebut. *Assessment* terhadap penerapan GCG mengacu kepada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter

ASSESSMENT OF THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL AND BOARD OF DIRECTORS

As the Company's main organs, the Board of Supervisor Council and the Board of Directors have a central role in the growth of the Company. The assessment of these two organs is a necessity, mainly because the Company is an SOE that is guided to implement the GCG principles at the SOEs standards and an assessment of these implementations. The assessment of the GCG implementation refers to a copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012, concerning Indicators/

Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Metode penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan di atas.

Parameters for Assessing and Evaluating the implementation of Good Corporate Governance in SOEs. The method of assessment and evaluation is carried out by using a measuring instrument consisting of 6 (six) aspects with the weight determined as stipulated in the Copy of the Decree mentioned above.

Sejalan dengan *assessment* yang bertujuan memberikan evaluasi dan rekomendasi, Manajemen Perusahaan diharapkan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang muncul dari proses *assessment*. Untuk *assessment* penerapan GCG tahun ukur 2019, telah dilakukan *self assessment* oleh Tim *Self Assessment* Internal Perum Jamkrindo. Hasil *self assessment* memberikan predikat "Sangat Baik", dengan nilai mencapai 95,804. Khusus untuk aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, masing-masing meraih nilai perolehan 95,111 dan 95,123, keduanya dengan predikat "Sangat Baik".

In line with the aim of the assessment, which is to provide evaluation and recommendations, Company Management is expected to follow up on suggestions that arise from the assessment process. For the 2019 GCG implementation assessment, self-assessment has been carried out by the Internal Self Assessment Team of Perum Jamkrindo. The self-assessment results were credited with the category of "Very Good", with scores reaching 95.804. Specifically, the aspects of the Board of Commissioners/Board of Supervisor Council and Board of Directors, each of which achieved a score of 95.111 and 95.123 respectively, both with the category of "Very Good".

Jenis Penilaian / Type of Assessment	*Self Assessment*/Evaluasi / Self Assessment/ Evaluation
Penilai / Assesor	Tim Self Assessment Internal Perum Jamkrindo Perum Jamkrindo's Internal Self Assessment Team
Tahun Buku Penerapan / Year of Implementation	1 Januari - 31 Desember / January 1 – December 31, 2019
Periode Pengukuran / Period of Measurement	1 Januari - 31 Desember / January 1 – December 31, 2019

Hasil Assessment Penerapan GCG Aspek Dewan Pengawas dan Direksi Tahun Buku 2019 (Metode Penilaian Berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012)

The results of GCG Implementation Assessment for fiscal year 2019 for the Board of Supervisor Council and Board of Directors' Aspects, (with the Assessment Method based on Copies of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16 / S.MBU / 2012)

Aspek Pengujian Assessment Aspect	Bobot Weight	Pencapaian Tahun Buku 2019 Achievement for Fiscal Year 2019		
		Nilai Score	Pencapaian Achievement %	Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG Qualification of GCG Implementation Quality
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/ Board of Supervisor Council	35,00	33,289	95,111	Sangat Baik
Direksi Board of Directors	35,00	33,293	95,123	Sangat Baik

Keterangan: 0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik

Information: 0-50: Bad | 50-60: Poor | 60-75: Satisfactory | 75-85: Good | 85-100: Very Good

Tentang rekomendasi hasil *assessment* penerapan GCG untuk aspek Dewan Pengawas dan Direksi tahun ukur 2019 dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Perusahaan dapat dilihat pada bagian *Assessment* Penerapan GCG di bagian atas bab ini.

Information regarding the recommendations for the assessment results of GCG implementation for the Board of Supervisor Council and Board of Directors aspects for the 2019 measurement year and follow-up actions taken by the Company could be seen in the GCG Implementation Assessment section at the top of this chapter.

PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DEWAN PENGAWAS

Penilaian Dewan Pengawas Perusahaan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No: S-31/DP/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo Triwulan III Tahun Buku 2019 kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Pengawas secara kolegial dilakukan berdasarkan capaian *Key Performance Indicators* yang mencakup aspek-aspek berikut:

1. Aspek Pengawasan dan Pengarahan, bobot 60%;
2. Aspek Pelaporan, bobot 30%;
3. Aspek Dinamis, bobot 10%.

Sedangkan pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Pengawas secara individual dilakukan dengan memperhatikan ketentuan unsur-unsur penilaian, adalah sebagai berikut:

1. Realisasi capaian total skor KPI Dewan Pengawas, bobot 60%; dan
2. Realisasi persentase kehadiran Dewan Pengawas (individual) dalam rapat, bobot 40%. Perhitungan bobot per jenis rapat, yaitu:
   a. Rapat Gabungan, bobot 50%;
   b. Rapat dengan Direktur Teknis, bobot 20%;
   c. Rapat dengan Komite, bobot 15% x 2 = 30%.

Pengukuran kinerja Dewan Pengawas dilaksanakan secara *self-assessment* oleh Komite Audit bersama dengan Komite Investasi dan Risiko Usaha, dan selanjutnya hasilnya akan dilaporkan kepada Dewan Pengawas untuk dievaluasi sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan kepada Kementerian BUMN selaku Pemilik Modal, dalam bentuk Laporan Triwulanan Perkembangan Realisasi KPI dan Laporan Tahunan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas.

Hasil pengukuran terhadap pelaksanaan tugas pengawasan menunjukkan bahwa capaian kinerja dari program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2019 secara umum dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini dapat

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL AND BOARD OF DIRECTORS

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL

The assessment of the Company's Board of Supervisor Council is carried out based on the Decree of the Board of Supervisor Council of Perum Jamkrindo No: S-31/DP/X/2019 dated October 15, 2019, concerning the Policy related to the Board of Supervisor Council's Performance Assessment, which states that the Board of Supervisor Council carries out measurement and assessment of performance independently (self-assessment) based on Key Performance Indicators.

The measurement and assessment of the Board of Supervisor Council's performance collegially are carried out based on the achievements of Key Performance Indicators which cover the following aspects:

1. The Monitoring and Guidance Aspects, with a weight of 60%;
2. The Reporting Aspects, with a weight of 30%;
3. The Dynamic Aspect, with a weight of 10%.

The measurement and assessment of the Board of Supervisor Council's performance individually are carried out by taking into account the provisions of the assessment elements, are as follows:

1. The realization of the total score of the Board of Supervisor Council's KPI with a weight of 60%; and
2. The attendance percentage realization of the Board of Supervisor Council in the meeting (individually) with a weight of 40%. The calculation of the weights per type of meeting are:
   a. The Joint Meeting, with a weight of 50%;
   b. The Meeting with Technical Director, with a weight of 20%; and
   c. The Meeting with the Committee, with a weight of 15% x 2 = 30%.

The measurement of the Board of Supervisor Council's performance is carried out on a self-assessment basis by the Audit Committee, together with the Investment and Business Risk Committee. The results will be reported to the Board of Supervisor Council to be evaluated as input to improve the performance of the Board of Supervisor Council in carrying out supervisory and advisory duties to the Board of Directors. Furthermore, the result is submitted to the Ministry of SOEs as the Capital Owner, in the form of Quarterly Reports on the Development of the KPI Realization and the Annual Report of the Supervisory Duties of Board of Supervisor Council.

The results of the measurement of the implementation of supervisory duties indicate that the performance achievements of work programs and activities carried out during 2019 could generally be categorized as 'Very Good'. It could be seen

terlihat dari pencapaian skor KPI (*Key Performance Indicator*) Dewan Pengawas tahun 2019 sebesar 100 persen. Ke depan, Dewan Pengawas akan terus melakukan penyempurnaan dan peningkatan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Perusahaan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel. Realisasi *Key Performance Indicators* (KPI)/ Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas dan hasil penilaian kinerja Dewan Pengawas tahun 2019 adalah sebagai berikut:

from the achievement of the Board of Supervisor Council's KPI (Key Performance Indicator) score in 2019 of 100%. In the future, the Board of Supervisor Council will continue to make enhancements and improvements to carry out the Company's supervisory duties more effectively, efficiently, and accountably. The realization of the Key Performance Indicators (KPI) / Performance Achievement Indicators of the Board of Supervisor Council and the 2019 Board of Supervisor Council performance assessment results were as follows:

No	Program Kerja Work Program	KPI		Bobot Weight	Realisasi Realization		Bobot Weight
		Jumlah Amount	Satuan Unit		Jumlah Amount	Satuan Unit	
I	**Aspek Pengawasan & Pengarahan Monitoring & Guidance Aspects**			**60,00**			**60,00**
1	Rapat Internal Dewan Pengawas Monitoring & Guidance Aspects	24	Rapat Meetings	10.00	24	Rapat Meetings	10.00
2	Rapat Dewan Pengawas dan Direksi Internal Meeting of the Board of Supervisor Council and Board of Director	24	Rapat Meetings	10.00	24	Rapat Meetings	10.00
3	Rapat Pembahasan RKAP Tahun 2020 2020 Corporate Work Plan and Budget Discussion Meeting	2	Rapat Meetings	10.00	2	Rapat Meetings	10.00
4	Rapat Pembahasan Kinerja Perusahaan Tahun 2019 2019 Company Performance Discussion Meeting	2	Rapat Meetings	5.00	2	Rapat Meetings	5.00
5	Pemberian Saran dan Masukan Kepada Direksi Dalam Pengurusan Perusahaan Advice-Giving and Feedback to the Directors in the Management of the Company	12	Dokumen Documents	10.00	12	Dokumen Documents	10.00
6	Evaluasi Terhadap Auditor Eksternal Evaluation of External Auditors	1	Rapat Meetings	5.00	1	Rapat Meetings	5.00
7	Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal Evaluation of the Internal Control System	2	Rapat Meetings	5.00	2	Rapat Meetings	5.00
8	Pengawasan Terhadap Anak Perusahaan Supervision of Subsidiaries	2	Rapat Meetings	5.00	2	Rapat Meetings	5.00
	Sub Jumlah I / Subtotal I			**30,00**			**30,00**
II	**Aspek Pelaporan / The Reporting Aspects**			**10,00**			**10,00**
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas Tahun 2020 Compile the Work Plan and Budget of the Supervisory Board in 2020	1	Dokumen Documents	5.00	1	Dokumen Documents	5.00
2	Menyusun dan Mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas Tahun 2020 Compile and Propose Indicators for Performance Achievement of the Supervisory Board in 2020	1	Dokumen Documents	5.00	1	Dokumen Documents	5.00
3	Menyusun Laporan Berkala Tugas Pengawsan Dewas (Triwulanan) Tahun 2019 Compile the 2019 Board's Quarterly Supervisory Duties Report	4	Dokumen Documents	5.00	4	Dokumen Documents	5.00
4	Menyusun Laporan Berkala Hasil Evaluasi atas Kinerja Perusahaan Tahun 2019 (Triwulanan) Prepare Quarterly Periodic Reports on Evaluation Results for 2019 Company Performance	4	Dokumen Documents	5.00	4	Dokumen Documents	5.00
5	Memberikan Tanggapan/Pendapat Terhadap Hal-Hal yang Memerlukan Persetujuan dan/atau Rekomendasi Dewan Pengawas sesuai Ketentuan Dalam Anggaran Dasar atau Peraturan Lainnya. Give a Response/Opinion to Matters that Require Approval and/or Recommendations of the Board of Supervisors in Accordance with the Provisions in the Articles of Association or Other Regulations	4	Dokumen Documents	10.00	4	Dokumen Documents	10.00

No	Program Kerja Work Program	KPI Jumlah Amount	KPI Satuan Unit	Bobot Weight	Realisasi Realization Jumlah Amount	Realisasi Realization Satuan Unit	Bobot Weight
	Sub Jumlah II / Subtotal II			**30,00**			**30,00**
III	**Aspek Dinamis / Dynamic Aspect**			**10,00**			**10,00**
1	Kunjungan Kerja Ke Cabang Working Visit to Branch Offices	6	Kegiatan Activity	5.00	6	Kegiatan Activity	5.00
2	Seminar/Workshop Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Pengawas dan Organ Dewan Pengawas Seminar/Workshop in the Context of Increasing Competency of Supervisory Board Members and Supporting Organ of the Supervisory Board	4	Kegiatan Activity	5.00	4	Kegiatan Activity	5.00
	Sub Jumlah III / Subtotal III			**10.00**			**10.00**
	Jumlah / Total			100.00			100.00

Sistem Penilaian:

1. Penilaian maksimal sesuai dengan bobot masing-masing indikator.
2. Kriteria hasil penilaian:

Scoring System:

1. Maximum scoring in accordance with the weight of each indicator.
2. Criteria for scoring results:

No.	Realisasi Skor	Kriteria	Criteria	Score Realization
1.	> 95 (maksimal 100)	Sangat Baik	Very Good	> 95 (maximum of 100)
2.	> 80 s.d. 94	Baik	Good	> 80 to 94
3.	> 65 s.d. 80	Cukup	Satisfactory	> 65 to 80
4.	> 50 s.d. 65	Kurang	Poor	> 50 to 65
5.	< 50	Sangat Kurang	Bad	< 50

Sementara, berdasarkan surat keputusan Dewan Pengawas No. KEP-04/DP-JAMKRINDO/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Kebijakan Terkait Penilaian Kinerja Dewan Pengawas, realisasi capaian kinerja individual masing-masing Dewan Pengawas, adalah sebagai berikut.

Based on the Decree of the Board of Supervisor Council No. KEP-04/DP-JAMKRINDO/III/2018 dated March 27, 2018, concerning Policies regarding the Performance of the Board of Supervisor Council, the realization of individual performance achievements of each Board of Supervisor Council is as follows.

Nama Name	Bobot Persentase Capaian Skor KPI Dewan Pengawas Weight of KPI Score Achievement Percentage of Board of Supervisor Council	Persentase Kehadiran Dewan Pengawas Council Rapat Gabungan Joint Meeting	Persentase Kehadiran Dewan Pengawas Council Rapat dengan Direktur Teknis Meeting with Technical Director	Persentase Kehadiran Dewan Pengawas Council Rapat dengan Komite Meeting with Committee	Persentase Kehadiran Dewan Pengawas Council Total Kehadiran Rapat Total Meeting Attendance	Persentase Kehadiran Dewan Pengawas Council Bobot persentase kehadiran rapat Weight of Meeting Attendance Percentage	Total Persentasi Capaian Kinerja Individu Total Individual Performance Achievement Percentage
	1	2	3	4	5=2+3+4	6=5x40%	7=1+6
Sri Mulyanto	60	50	20	30	100	40	100
Ari Wahyuni	60	50	16,7	26,25	92,95	37,18	97,2
Diah Natalisa	60	33,3	20	23,75	77,05	30,82	90,8
Noor Ida Khomsiyati	60	50	18,3	30	98,3	39,3	99,3
M. Muchlas Rowi	60	50	10	22,5	82,5	33	93

Sistem Penilaian:

1. Realisasi capaian total skor KPI Dewan Pengawas, bobot 60%. Perhitungan mencakup:
   a. Aspek pengawasan dan pengarahan, bobot 60%
   b. Aspek pelaporan, bobot 30%
   c. Aspek dinamis, bobot 10%
2. Realisasi persentase kehadiran Dewan Pengawas (individual) dalam rapat, bobot 40% Perhitungan bobot per jenis rapat, yaitu:
   a. Rapat gabungan, bobot 50%
   b. Rapat dengan Direktut Teknis, bobot 20%
   c. Rapat dengan Komite, bobot 15% x 2 = 30%

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI

Penilaian atau evaluasi kinerja Direksi melekat pada *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan, yang mengacu kepada Surat Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 perihal Penyampaian Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun yang melakukan penilaian adalah setiap unit kerja sesuai perpektif atau Indikator Kinerja.

Indikator untuk mengukur kinerja Direksi yang melekat pada penilaian KPI Perusahaan, terdiri dari 5 (Lima) Perspektif (Keuangan, Fokus Pelanggan dan Pasar, Efektivitas Produk dan Proses, Fokus Tenaga Kerja, Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung jawab Kemasyarakatan). Selain penilaian KPI, terdapat juga penilaian *Agent of Development* (AOD) dengan lingkup penilaian peningkatan kerja sama penjaminan Mekaar dengan PNM dan Peningkatan Volume Penjaminan Produk Kreasi Pegadaian, Pemeringkatan dan Pendampingan UMKM & BUMDes, Peningkatan Volume Penjaminan di Wilayah Indonesia Timur, Penjaminan Pembiayaan Produktif Non Program, Penyerapan *Plafond* Penjaminan KUR.

Assessment System:

1. Realization of the total score achievement of the Board of Supervisor Council's KPI, with a weight of 60%. The calculation includes:
   a. Monitoring and Guidance Aspects, with a weight of 60%
   b. Reporting aspects, with a weight of 30%
   c. Dynamic aspect, with a weight of 10%
2. Realization of the attendance percentage of the Board of Supervisor Council in the meeting (individually), with a weight of 40%. The calculation of weights per type of meeting are:
   a. Joint Meetings, with a weight of 50%
   b. Meetings with Technical Director, with a weight of 20%
   c. Meetings with the Committees, with a weight of 15% x 2 = 30%

ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

The performance assessment or evaluation of the Board of Directors are integrated into the Company's Key Performance Indicator (KPI), which refers to the Ministry of SOEs Letter No. S-08 / S.MBU / 2013 dated January 16, 2013, concerning the Submission of Guidelines for Determining KPIs and Assessment Criteria for Performance Excellence in State-Owned Enterprises (SOEs). The assessors are each work unit according to the perspective or Performance Indicator.

The indicators to measure the performance of the Board of Directors Integrated to the Company's KPI assessment consist of 5 (Five) Perspectives (Finance, Customer and Market Focus, Product and Process Effectiveness, Workforce Focus, Leadership, Governance and Community Responsibility). In addition to KPI's assessment, there is also an Agent of Development (AOD) assessment with the scope of increasing Mekaar guarantee cooperation with PNM and increasing Product Guarantee Volume of Pawnshop Creation, the Ratings and Assistance of MSMEs & Village Owned Enterprises (BUMDes) and increasing of Guarantee Volume in Eastern Indonesia, Non-Programming Productive Financing Guarantee, Absorption of KUR Guarantee Plafond.

Dasar Penyusunan KPI Tahun 2019 sesuai dengan surat Kementerian BUMN S-61/MBU/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 perihal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perum Jamkrindo Tahun 2019. Adapun KPI Tahun 2019 Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia adalah sebagai berikut:

The Basis for KPI Preparation in 2019 was according to the letter of the Ministry of SOEs No. S-61/MBU/01/2019 dated January 25, 2019 , regarding Shareholders / Capital Owners Aspirations for the Preparation of Corporate Work Plans and Budgets for 2019. The 2019 KPI of Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia were as follows:

KPI KINERJA DAN PENILAIAN DIREKSI TAHUN 2019
KPI OF PERFORMANCE AND ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS IN 2019

No	Perspektif/Indikator Kinerja Kunci Perspective/KPI	Satuan Unit	*Formula* Formula	RKAP 2019		Desember 2019 December 2019	
				Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Nilai Score
I	Perspektif Keuangan / Financial Perspectives						
1	*Yield On Investment*	%	Hasil Investasi / Rata-rata Total Investasi Investment Result / The average of total Investment	5,00	7,38%	7,53%	5,10
2	*Net Profit Margin*	%	Laba Setelah Pajak (EAT) / Pendapatan IJP Bruto Earnings After Tax / Gross Guarantee Fee	5,00	28,52%	24,74%	4,34
3	Penerimaan Subrogasi Subrogation Income	%	Kenaikan Penerimaan Subrogasi Increase in Subrogation Income	5,00	20,00%	9,37%	2,34
4	*Credit Guarantee Growth*	%	Volume Penjaminan (n)-Volume Penjaminan 4(n-1) / Volume Penjaminan 4(n-1) Guarantee Volume (n) – Guarantee Volume 4(n-1) / Guarantee Volume 4(n-1)	5,00	12,05%	16,74%	6,00
5	BOPO	%	Biaya Usaha / Pendapatan Usaha (IJP Bruto) Operating Expenses / Operating Income (Gross Guarantee Fee)	4,00	49,75%	32,02%	4,80
	Skor / Score			**24**			**22,58**
II	Perspektif Fokus Pelanggan Dan Pasar / Customer And Market Focus Perspective						
1	*Time Accuracy in Claim Process*	%	Klaim yang berhasil diputuskan dalam waktu 12 hari / Claims which are successfully decided within 12 days	6,00	80,00%	78,45%	4,90
2	Peningkatan Kerja sama Klaim KUR Online / Increased Cooperation of KUR Claims Online	Jumlah Number	Peningkatan Kerja sama Klaim KUR Online Increased Cooperation of Online KUR Claims	5,00	5	5	5,00
3	Rasio Klaim	%	Beban Klaim / Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Claim Expenses / Guarantee Fee Income	5,00	55,77%	72,21%	3,53
4	Subrogasi *Online*	Jumlah Number	Peningkatan Kerja sama Subrogasi Online KUR untuk Bank HIMBARA Increased Cooperation of Online KUR Subrogation for Banks which belong to State-Owned Banks Association	6,00	2	2	6,00
	Skor / Score			**21**			**19,43**

No	Perspektif/Indikator Kinerja Kunci Perspective/KPI	Satuan Unit	*Formula* Formula	RKAP 2019		Desember 2019 December 2019	
				Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Nilai Score
III	Perspektif Efektivitas Produk Dan Proses / Products and Processes Effectiveness Perspective						
1	Inovasi Produk Product Innovation	Jumlah Number	Integrasi Volume dan IJP *Cash Basis End of Day* (Inovasi Proses) dan Penambahan Produk Baru (Inovasi Produk) Integration of Volume and IJP Cash Base End of Day (Process Innovation) and Adding New Products (Product Innovation)	6,00	3	3	6,00
2	Pertambahan Jumlah Produk *Online* Non KUR/ Increase in Number of Non KUR Online Products	Jumlah Number	Σ Pertambahan Jumlah Produk *Online* Non KUR per Mitra Kerja Σ Increased Number of Non-KUR Online Products per Business Partner	5,00	3	3	5,00
3	Mempertahankan Rating Perusahaan Maintaining Company Rating	*Rating*	Hasil Rating Perusahaan Results of Company Ratings	5,00	AA+	AA+	5,25
	Skor / Score			**16**			**16,25**
IV	Perspektif Fokus Tenaga Kerja / Workforce Focus Perspective						
1	Pemenuhan Tenaga Ahli Penjaminan Fulfillment of Guarantee Experts	Jumlah Total	Sertifikasi Tenaga Ahli Penjaminan Certification of Guarantee Expert	5,00	50	304	5,25
2	Jumlah Jam *Training* Per Karyawan Number of Training Hours Per Employee	Skor Score	Jumlah Jam Pelatihan Setahun / Jumlah SDM Number of training hours per year / Total Number of HR	5,00	20,00	99,92	5,25
3	Produktivitas Pegawai Non KUR Non-KUR Employee Productivity	Rp Miliar Rp Billions	Volume Penjaminan Non KUR / Jumlah SDM Non-KUR Guarantee Volume / Total Number of HR	5,00	Rp 102,48 Miliar	Rp 150,24 Miliar	5,25
	Skor / Score			**15**			**15,75**
V	Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola, Dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan Leadership, Governance, and Community Responsibility Perspectives						
1	Penerapan GCG GCG Implementation	Skor Score	Hasil *Assesment* GCG (Internal) GCG Assessment Results (Internal)	6,00	93,00	95,80	6,18
2	Implementasi KPKU KPKU Implementation	Skor Score	*Good Performance* (Rentang Skor : 476 – 575)/ Good Performance (Score Range: 476 – 575)	5,00	565	565,0	5,25
3	Peningkatan Laba Anak Perusahaan Increase in Subsidiary's Profit	%	Kenaikan Laba Sebelum Pajak Anak Perusahaan Increase in Income Before Tax of Subsidiaries	3,00	35,00%	76,95%	3,15
	Skor / Score			**14**			**14,58**
	Total Skor / Total Score			**90**			**88,59**

Adapun penilaian *Agent of Development* (AOD) tahun 2019 tercatat sebesar 12 lebih besar dibandingkan dengan RKAP tahun 2019 sebesar 10. Adapun dibawah ini tabel AOD Tahun 2019 Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia adalah sebagai berikut:

The Agent of Development (AOD) assessment for 2019 was recorded 12 times higher compared to the 2019 RKAP of 10. As below, the 2019 AOD table for Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia in 2019 was as follows:

PENILAIAN AGENT OF DEVELOPMENT (AOD) TAHUN 2019
PENILAIAN AGENT OF DEVELOPMENT (AOD) TAHUN 2019

No	*Agent Of Development*	Satuan Unit	*Formula*	RKAP 2019		Desember 2019 December 2019	
				Bobot Weight	*Target*	Realisasi Realization	Nilai Score
I	Peningkatan Kerjasama penjaminan *Suretybond* dan Kredit dengan BUMN Enhancing Collaboration between Suretybond and Credit guarantees with SOEs	%	Peningkatan *Volume* Penjaminan *Surety Bond* dan Kredit dengan BUMN Increase in Surety Bond and Credit Guarantee Volume with SOEs	2,00	20,00%	37,7%	2,40
	Peningkatan *Volume* Penjaminan Produk Kreasi Pegadaian Volume Increasing of Products Guarantee of Pawnshop Creation	%	Peningkatan *Volume* Penjaminan Produk Kreasi Pegadaian Volume Increasing of Products Guarantee of Pawnshop Creation	2,00	20,00%	108,4%	2,40
2	Peningkatan *Volume* Penjaminan Di Wilayah Indonesia Timur Volume Increasing of Guarantee in Eastern Indonesia	%	Peningkatan *Volume* penjaminan Non KUR di Wilayah Indonesia Timur Volume Increasing of Non-KUR Guarantee in Eastern Indonesia	3,00	10,00%	40,3%	3,60
3	Penjaminan Pembiayaan Produktif Non Program Non Program Productive Financing Guarantee	%	Peningkatan *Volume* Penjaminan Pembiayaan Produktif Non Program Volume Increasing of Non Program Productive Financing Guarantee	3,00	20,00%	32,1%	3,60
	Total Bobot / Total Weight			10			12

REMUNERASI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Penetapan remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan mengacu kepada Peraturan Kementerian BUMN selaku perwakilan Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. PER-06/MBU/06/2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan diusulkan dalam Rapat Dewan Pengawas, dengan membahas pertimbangan usulan, hasil survei dengan industri sejenis dan sektor lainnya. Dewan Pengawas dan Direksi mengusulkan kepada Pemilik Modal melalui RPB, dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri di atas dan kemampuan Perusahaan, untuk kemudian ditetapkan dalam RPB.

REMUNERATION OF THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL AND BOARD OF DIRECTORS

Remuneration Proposal and Stipulation Procedure of the Board of Supervisor Council and Board of Directors The stipulation of remuneration for the Company's Board of Supervisor Council and Board of Directors refers to the Ministry of SOEs Regulation as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. PER-06 / MBU / 06/2018, dated June 4, 2018, concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04 / MBU / 2014 concerning Guidelines for Stipulating the Income of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Remuneration of the Board of Supervisor Council and Board of Directors of the Company is proposed at the Board of Supervisor Council Meeting by discussing proposal considerations and the results of surveys with similar industries and other sectors. The Board of Supervisor Council and the Board of Directors propose to the Capital Owners through the Joint Discussion Meeting with due regard to the Ministerial Regulations above and the ability of the Company, to then be stipulated in the RPB.

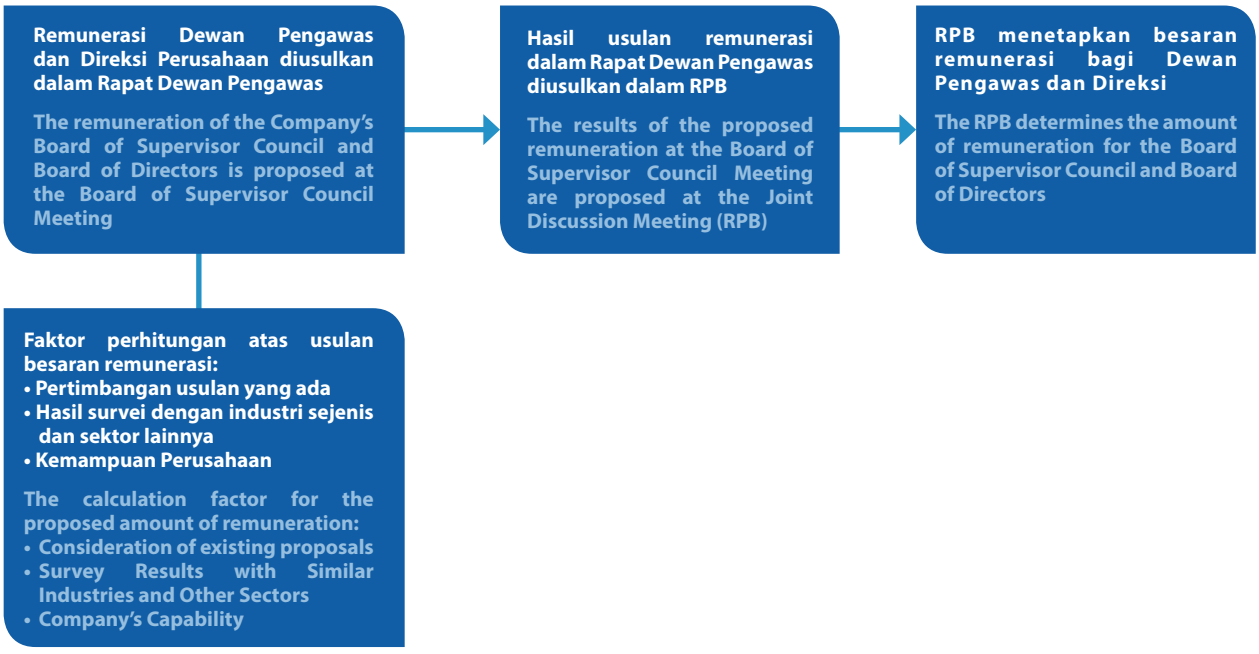

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Berdasarkan Keputusan Kementerian BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, struktur remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Perum Jamkrindo terdiri dari:

BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL AND BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION STRUCTURE

Based on the Decree of the Ministry of SOEs No. PER-01/MBU/05/2019 dated May 31, 2019, concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-04 / MBU / 2014 Regarding the Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisor Council of State-Owned Enterprises, the remuneration structure of the Board of Supervisor Council and Board of Directors of Perum Jamkrindo consists of:

	Struktur Remunerasi Dewan Pengawas	Remuneration Structure of the Board of Supervisor Council
Honorarium	Dewan Pengawas diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut: • Honorarium Ketua Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama • Wakil Ketua Dewan Pengawas: 42,5% dari Gaji Direktur Utama; dan • Honorarium anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebesar 90% dari Ketua Dewan Pengawas	The Board of Supervisor Council are given the honorarium with the following provisions: • The honorarium of the Chairman of the Board of Supervisor Council is determined with the composition of position factor amounted to 45% of the Salary of the President Director • The honorarium of Deputy Chairman of the Board of Supervisor Council is 42.5% of the Salary of the President Director; and • The honorarium of members of the Board of Supervisor Council are determined with the composition of position factor amounted to 90% of the Salary of the Chairman of the Board of Supervisor Council
Tunjangan Allowances	• Tunjangan Hari Raya Keagamaan • Tunjangan Komunikasi • Tunjangan Santunan Purna Jabatan • Tunjangan Pakaian • Tunjangan Transportasi	• Religious holiday allowance • Communication Allowances • Post Position Allowance • Clothing Allowances • Transportation Allowances
Fasilitas Facilities	• Pemeliharaan Kesehatan • Kepersertaan dan Perkumpulan Profesi • Bantuan Hukum	• Health Care • Professional Participation and Association • Legal Assistance
Tantiem	Komposisi besarnya Tantiem/Insensif Kinerja bagi anggota Dewan Pengawas mengikuti Faktor Jabatan sebagai berikut: • Ketua Dewan Pengawas 45% dari Direktur Utama; • Wakil Ketua Dewan Pengawas 42,5% dari Direktur Utama; dan • Anggota Dewan Pengawas 90% dari Ketua Dewan Pengawas.	• The Chairperson of the Supervisory Board's tantiem is 45% of that of the President Director; • The Deputy Chairperson of the Supervisory Board's tantiem is 42.5% of that of the President Director; and • The Members of the Supervisory Board's tantiem is 90% of that of the Chairperson of the Supervisory Board.

	Struktur Remunerasi Direksi	
Gaji *Salary*	Anggota Direksi BUMN diberikan gaji dengan ketentuan sebagai berikut: a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri b. Gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebagai berikut: • Wakil Direktur Utama: 95% dari Gaji Direktur Utama; dan • Anggota Direksi lainnya: 85% dari Gaji Direktur Utama. c. Bagi Wakil Direktur Utama dan Anggota Direksi yang sudah ada (*existing*), dalam hal berdasarkan komposisi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b mengakibatkan gaji yang diterima menjadi lebih kecil dari gaji yang telah diterima pada tahun buku sebelumnya maka gaji Wakil Direktur Utama dan Anggota Direksi lainnya yang sudah ada (existing) tersebut menggunakan gaji yang diterima pada tahun buku sebelumnya. d. RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran Faktor Jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi serta kemampuan perusahaan. e. Bagi BUMN Induk (*Holding*), Gaji Direktur Pelaksana dihitung menggunakan pendekatan perhitungan berdasarkan angka sebelum konsolidasi setara Direktur Utama. f. Besarnya Gaji anggota Direksi BUMN ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan. g. Dalam hal RUPS/ Menteri tidak menetapkan besarnya Gaji anggota Direksi BUMN untuk tahun tertentu, maka penetapan besarnya Gaji anggota Direksi menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS/Menteri. h. Perhitungan pemberian Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ini mulai berlaku untuk penetapan Gaji tahun buku 2019.	Members of the SOEs Board of Directors salaries follow these conditions: a. The salary of the President Director is determined by using internal guidelines stipulated by the Minister b. Salaries of other members of the Board of Directors are determined based on position, with the composition as follows: • Deputy of President Director's Tantiem is 95% of the President Director; • Other members of the Board of Directors is 85% of the President Director; c. For the Deputy President Director and existing Directors, in terms of composition based on the Position Factor referred to in letter b, the salary received will be less than the salary received in the previous financial year, then the salary of the Deputy President Director and other Directors existing using the salary received in the previous financial year. d. GMS/Minister may determine the amount of Position Factor that is different from the provisions referred to in letter b, if deemed to be more able to reflect the appropriateness and fairness in carrying out the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors and the ability of the company. e. Bagi BUMN Induk (Holding), Gaji Direktur Pelaksana dihitung menggunakan pendekatan perhitungan berdasarkan angka sebelum konsolidasi setara Direktur Utama. f. The amount of salary for a member of the SOE Directors is determined by the GMS/Minister every year for one year starting from January of the year. g. In the event that the GMS/Minister does not determine the amount of salary for a member of the SOE Directors for a particular year, the determination of the amount of salary for a member of the Board of Directors uses the latest amount determined and enforced by the GMS/ Minister. h. The calculation of Directors' salary as referred in number 1 entered into force for the determination of Salary for the 2019 fiscal year.
Tunjangan *Allowances*	Tunjangan yang terdiri atas: • Tunjangan hari raya diberikan sebesar 1 (satu) kali Gaji • Tunjangan perumahan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut; • Tunjangan perumahan termasuk biaya utilitas diberikan secara bulanan sebesar 40% dari Gaji dengan ketentuan paling banyak sebesar Rp27.500.000,00 untuk wilayah Ibu Kota Perusahaan tidak memberikan fasilitas rumah jabatan bagi Direksi • Tunjangan komunikasi bagi Direksi sebesar pemakaian (*at cost*) • Asuransi purna jabatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: > Asuransi purna jabatan diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti)	Allowances consisting of: • Holidays allowance which is given in the amount of 1 (one) time salary. • Housing allowances, which are provided under the following conditions; • Housing allowances including utility fees are provided on a monthly basis, which amount is 40% of the Salaries received with a maximum provision of IDR 27,500,000.00 for the Capital City area The Company does not provide housing facilities for the Directors • Communication allowances for Directors are per usage (at cost) • Post-position allowance is provided with the following conditions: > Post-position allowance is granted during the term of office time (starting from the appointment to dismissal)

Struktur Remunerasi Direksi		
	> Premi yang ditanggung perusahaan paling banyak 25% dari Gaji dalam satu tahun > Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN > Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian • Tunjangan pakaian sesuai dengan yang dianggarkan di RKAP • Tunjangan cuti tahunan diberikan setiap tahun sebanyak 1 (satu) kali Gaji/Honorarium, setelah Direksi bekerja selama minimal 6 (enam) bulan berturut-turut • Tunjangan cuti besar diberikan paling banyak 2 (dua) kali Gaji/Honorarium per bulan apabila Direksi bekerja 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam satu periode jabatan. Selama tahun buku 2018 Perusahaan tidak mengeluarkan Tunjangan Cuti Besar • Pajak tunjangan ditanggung dan menjadi beban Perusahaan	> The premium borne by the Company is at most 25% of the salary in one year > The selection of for post-position allowance is determined by each member of the Board of Directors, Board of Commissioners and the SOEs Supervisory Board > Provision of premiums, contributions or other terms relevant to Post-position allowance include premiums for accident and death insurance • Clothing allowances are given in accordance with those budgeted in the Company Work Plan and Budget • Annual leave allowance is given every year as much as 1 (one) time Salary / Honorarium, after the Board of Directors has worked for at least 6 (six) consecutive months • Major leave allowance is given at most in the amount of 2 (two) times Salary / Honorarium per month if the Board of Directors has been working for the Company for at least 3 (three) consecutive years in one period of office. During the 2018 fiscal year, the Company did not issue a Major Leave Allowance • Taxes for the allowances are covered by the Company
Fasilitas *Facilities*	Fasilitas kendaraan bagi Direksi sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta pemeliharaan dan operasionalnya. Spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh Pemilik Modal. Fasilitas kendaraan ini harus dikembalikan kepada Perusahaan dalam 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat Perusahaan telah memberikan fasilitas berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas kepada seluruh Direksi beserta biaya pemeliharaan dan operasional sehingga tidak diberikan lagi tunjangan transportasi Fasilitas kesehatan; Fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi beserta seorang istri/suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan Fasilitas kesehatan diberikan berupa: • Rawat jalan dan obat • Rawat inap dan obat • *Medical check up.* Fasilitas uang pangkal dan iuran tahunan paling banyak 2 (dua) perkumpulan profesi Fasilitas biaya respresentasi Direksi mewakili Perusahaan sebesar *at cost* yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan batas maksimumnya ditetapkan oleh RPB Fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan Pajak yang timbul akibat pemberian fasilitas ditanggung dan menjadi beban perusahaan	Tansportation facilities for the Board of Directors are 1 (one) unit of office vehicles along with its maintenance and operations. The vehicle specifications and standards are set by the Equity Owner. This vehicle facility must be returned to the Company within 30 (thirty) days after dismissal. The Company has provided facilities in the form of 1 (one) unit of office vehicle to all Directors along with its maintenance and operational costs so that transportation allowances are no longer given Health facilities; Health facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses Health facilities are given to members of the Board of Directors and a wife / husband and a maximum of 3 (three) children who have not reached the age of 25, provided that, if the child who is not yet 25 years old has gotten married or has worked, then the child is not entitled to health facilities Health facilities are provided in the form of: • Outpatient and medication • Hospitalization and medication • Medical check-up. Facilities for the entry and annual fees of at most 2 (two) professional associations Representation costs of the Directors in representing the Company which is given at cost and adjusted to the Company's ability and the maximum limit set by the Joint Discussion Meeting Legal aid for all actions for and on behalf of the positions in the Company is related to the purpose and objectives and business activities of the Company Taxes arising from the provision of facilities are covered by the Company

	Struktur Remunerasi Direksi	
Tantiem	Komposisi besarnya Tantiem/Intensif Kinerja bagi anggota Direksi mengikuti Faktor Jabatan sebagai berikut: • Wakil Direktur Utama: 95% dari Direktur Utama; • Anggota Direksi lainnya: 85% dari Direktur Utama;	The composition of the Tantiem / Performance Intensive for the members of the Board of Directors is based on the Position Factors with details as follow: • Deputy of President Director's Tantiem is 95% of the President Director; • Other members of the Board of Directors is 85% of the President Director;

INDIKATOR UNTUK PENETAPAN REMUNERASI DIREKTUR UTAMA DAN PENGESAHANNYA

Penetapan remunerasi yang berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor di bawah ini:

- Pendapatan Perusahaan.
- Aktiva Perusahaan.
- Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.
- Tingkat inflasi.
- Faktor-faktor lain yang relevan, termasuk di antaranya adalah tingkat remunerasi yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Untuk penetapan remunerasi yang berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

- Pencapaian target.
- Tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan Perusahaan.
- Faktor-faktor lain yang relevan (*merit system*), termasuk di antaranya adalah tingkat remunerasi yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Sesuai dengan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-470/MBU/D5/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo Tahun 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Besarnya gaji yang diterima Direktur Utama untuk tahun 2019 sebesar Rp.160.000.000,00.

b. Gaji Direktur Utama tersebut menjadi acuan bagi besaran perhitungan gaji Dewan Pengawas dan Direksi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/05/2019, tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

INDICATOR FOR THE STIPULATION OF REMUNERATION OF THE PRESIDENT DIRECTOR AND ITS RATIFICATION

The stipulation of remuneration in the form of salary/honorarium, allowances, and facilities, that is permanent, is done by considering several factors below:

- Company income.
- Company assets.
- The financial condition and capabilities of the Company.
- Inflation rate.
- Other relevant factors, including among others are the level of remuneration generally accepted in similar industries.

For the determination of remuneration in the form of allowances and tantrum that are variable carried out by considering several factors, namely:

- Target Achievement.
- The Company's health level and financial capacity.
- Other relevant factors (merit system), including the level of remuneration generally accepted in similar industries.

In accordance with the Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. S-470/MBU/D5/05/2019 dated May 31, 2019, concerning the Submission of Stipulation of Income of Board of Directors and Board of Supervisor Council of Perum Jamkrindo in 2019, then delivered as follows:

a. The amount of salary received by the President Director in 2019 amounted to Rp .160,000,000.00.

b. The President Director's salary becomes a reference for the amount of salary calculation of the Board of Supervisor Council and the Board of Directors, as stated in the State Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/05/2019, dated May 31, 2019, concerning the fourth amendment to the Minister of SOEs regulation No. PER-04/MBU/2014, concerning Guidelines for Stipulating the Income of the Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisor Council of State-Owned Enterprises.

JUMLAH REMUNERASI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI TAHUN 2019

Besaran remunerasi yang diterima Dewan Pengawas di sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

TOTAL REMUNERATION OF THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL AND BOARD OF DIRECTORS IN 2019

The amount of remuneration received by the Board of Supervisor Council throughout 2019 was as follows:

JUMLAH REMUNERASI DEWAN PENGAWAS TAHUN 2019
TOTAL REMUNERATION OF THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL IN 2019

No	Employee Information	Income			Benefit Non Tax [Jumlah Brutto]	Deduction						TOTAL
	Nama Name	Gaji Pokok Basic Salary	Perumahan Housing	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	Non-benefits Tax [Amount Brutto]	BPJS TK (3%)	BPJS KES	ARISAN DW	INFAK/ZAKAT	KOPERASI COOPERATIVE	LAIN LAIN OTHERS	
1	Sri Mulyanto	72.000.000	0,00	14.400.000	86.400.000	1.440.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	84.960.000
2	Diah Natalisa	64.800.000	0,00	12.960.000	77.760.000	1.381.124	0	0,00	0,00	0,00	0,00	76.378.876
3	Noor Ida Khomsiyati	64.800.000	0,00	12.960.000	77.760.000	1.381.124	0	0,00	0,00	0,00	0,00	76.378.876
4	Demy Marizka Inriani	5.000.000	0,00	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000
5	Ari Wahyuni	64.800.000	0,00	12.960.000	77.760.000	1.381.124	0	0,00	0,00	0,00	0,00	76.378.876
6	Alvin Nur Widjajanti	24.000.000	0,00	1.300.000	25.300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300.000
7	Muhammad Muchlas Rowi	64.800.000	0,00	12.960.000	77.760.000	1.381.124	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	76.298.876
		360.200.000	**0,00**	**67.540.000**	**427.740.000**	**6.964.496**	**80.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.695.504**
	GRAND TOTAL	**360.200.000**	**0,00**	**67.540.000**	**427.740.000**	**6.964.496**	**80.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.695.504**

No.	Uraian	Ketua Dewan Pengawas (Rp) Chairman of Board of Supervisor Council (Rp)	Anggota Dewan Pengawas (Rp) Member of Board of Supervisor Council (Rp)	Description
1	Honorarium per bulan	72.000.000,00	64.800.000,00	Honorarium per month
2	THR per Tahun	72.000.000,00	64.800.000,00	Religious Holiday Allowance per Year
3	Transportasi per bulan	14.400.000,00	12.960.000,00	Transportation Subsidy per Month
	Jumlah Honor dan Tunjangan dalam 1 bulan	86.400.000,00	77.760.000,00	Total Remuneration in one month per member of the Board of Supervisor Council
	Jumlah Honor dan Tunjangan dalam 1 tahun (termasuk THR)	1.108.800.000,00	997.920.000,00	Total Remuneration in one year per member of the Board of Supervisor Council
	Tantiem Bonus TB 2018 sebelum PPH21 per Dewas	1.435.979.258,08	1.292.381.332,27	Bonus in 2018 before PPH21 per Board of Supervisor
	Jumlah Renumerasi dalam 1 tahun (Honor, Tunjangan, THR dan Tantiem) per Dewas	2.544.779.258,08	2.290.301.332,27	Remuneration Amount in 1 years (Honor, Allowances, THR and Tantiem) per Board of Supervisor
	Jumlah Dewas	1	4	Total the Board of Supervisor Council
	Jumlah Renumerasi dalam 1 tahun untuk seluruh Dewas	11.705.984.587,16		Total Remuneration of the Board of Supervisor Council in 2019

Untuk besaran remunerasi yang diterima Direksi di sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

The amount of remuneration received by Board of Directors throughout 2019 was as follows:

JUMLAH REMUNERASI DIREKSI TAHUN 2019
TOTAL REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTOR IN 2019

No	Employee Information	Income			Benefit Non Tax [Jumlah Brutto]	Deduction						TOTAL
	Nama Name	Gaji Pokok Basic Salary	Perumahan Housing	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	Non-benefits Tax [Amount Brutto]	BPJS TK (3%)	BPJS KES	ARISAN DW	INFAK/ZAKAT	KOPERASI COOPERATIVE	LAIN LAIN OTHERS	
1	Randi Anto	160.000.000	27.500.000	0,00	187.500.000	3.200.000	80.000	200.000	3.750.000	11.161.461	0	169.108.539
2	Ignatius Rusdonobanu	136.000.000	27.500.000	0,00	163.500.000	2.720.000	80.000	200.000	0	1.700.000	4.444.761	154.355.239
3	Sulis Usdoko	144.000.000	27.500.000	0,00	171.500.000	2.880.000	80.000	200.000	0	57.141.644	0	111.198.356
4	Amin Masudi	136.000.000	27.500.000	0,00	163.500.000	2.805.124	80.000	200.000	1.500.000	12.501.122	0	146.413.754
5	Kadar Wisnuwarman	136.000.000	27.500.000	0,00	163.500.000	2.805.124	80.000	0	1.000.000	14.574.003	0	145.040.873
		712.000.000	**137.500.000**	**0,00**	**849.500.000**	**14.410.248**	**400.000**	**800.000**	**6.250.000**	**97.078.230**	**4.444.761**	**726.116.761**
GRAND TOTAL		**712.000.000**	**137.500.000**	**0,00**	**849.500.000**	**14.410.248**	**400.000**	**800.000**	**6.250.000**	**97.078.230**	**4.444.761**	**726.116.761**

*) Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-04MBU2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. / In accordance with SOE Minister Regulation No. PER-04MBU2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners and Board of Supervisor of SOE.

No	Uraian	Direktur Utama President Director (Rp)	Direktur Bidang SDM HR Director (Rp)	Direktur Lainnya Other Directors (Rp)	Description
1	Gaji per bulan	160.000.000,00	144.000.000,00	136.000.000,00	Salary per month
2	THR per Tahun	160.000.000,00	144.000.000,00	136.000.000,00	Annual Religious Holiday Allowance
3	Tunjangan Perumahan	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	Housing facilities
	Jumlah Gaji dan Tunjangan dalam 1 (satu) bulan per Direksi	187.500.000,00	171.500.000,00	163.500.000,00	The Amount of Salary and Allowances in 1 (one) month
	Jumlah Gaji dan Tunjangan dalam 1(satu) tahun (termasuk THR) per Direksi	2.410.000.000,00	2.202.000.000,00	2.098.000.000,00	The Amount of Salary and Allowances in 1 (one) year
	Tantiem Bonus TB 2018 sebelum PPH 21 per Direksi	3.191.065.017,95	2.712.405.265,26	2.712.405.265,26	Tantiem Bonus for the Fiscal Year 2018 before PPh 21(Income Tax)
	Jumlah Remunerasi dalam 1 tahun (Gaji, Tunjangan, THR dan Tantiem) per Direksi	5.601.065.017,95	4.914.405.265,26	4.810.405.265,26	Total Amount of Remuneration in 1 (one) year per Director
	Jumlah Direksi	1	1	3	Number of Director
	Jumlah Remunerasi dalam 1 tahun untuk seluruh Direksi	24.946.686.078,98			Total Amount of Remuneration in 1 (one) year for all Directors

Jumlah remunerasi yang diberikan Perusahaan kepada Dewan Pengawas dan Direksi di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

The amount of remuneration provided by the Company to the Board of Supervisor Council and Board of Directors in 2019 was as follows:

Uraian	Description	Jumlah/ Total (Rp)
Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas	Total Remuneration of Board of Supervisor Council	**11.705.984.587,16**
Jumlah Remunerasi Direksi	Total Remuneration of the Board of Directors	**24.946.686.078,99**
Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Tahun 2019	**Total Remuneration of the Board of Supervisors and Directors in 2019**	**36.652.670.666,15**

RAPAT DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Rapat Dewan Pengawas

Dewan Pengawas mengadakan rapat rutin sekali dalam setiap bulan, yaitu Rapat Internal Dewan Pengawas yang dihadiri oleh Komite Audit, dan Komite Investasi dan Risiko Usaha serta Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi. Namun dalam hal dipandang penting, Dewan Pengawas juga melakukan rapat-rapat insidental, baik dengan komite-komite maupun dengan Direksi.

Di sepanjang tahun 2019, Dewan Pengawas menggelar 12 (dua belas) kali Rapat Dewan Pengawas. Berikut disampaikan risalah rapat dan tingkat kehadiran Dewan Pengawas dalam rapat internal Dewan Pengawas.

MEETINGS OF THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL AND BOARD OF DIRECTORS

Board of Supervisor Council Meeting

The Board of Supervisor Council holds regular meetings once a month, which is the Internal Meeting of the Board of Supervisor Council. This meeting is attended by the Audit Committee and the Investment and Business Risk Committee. The Board of Supervisor Council also holds a meeting with the Board of Directors. If deemed necessary/important, the Board of Supervisor Council also conducts incidental meetings, both with committees and with the Board of Directors.

Throughout 2019, the Board of Supervisor Council held 12 (twelve) Meetings. The following were the meetings' minutes and the levels of attendance of the Board of Supervisor Council in the internal meetings of the Board of Supervisor Council.

Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Pengawas yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentee Board of Supervisor Council and Reasons for Absence
16 Januari 2019 January 9, 2019	1. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Desember 2018 Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in December 2018. 2. Lain-lain / Others	1. Sri Mulyanto 2. Diah Natalisa 3. Noor Ida Khomsiyati	Ari Wahyuni dikarenakan terdapat kegiatan yg tidak dapat ditinggalkan Ari Wahyuni because there are activities that cannot be abandoned
27 Februari 2019 February 27, 2019	1. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Januari 2019 Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in January 2019. 2. Lain-lain / Others	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Diah Natalisa 4. Noor Ida Khomsiyati	
27 Maret 2019 March 27, 2019	1. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Februari 2019 Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in February 2019. 2. Lain-lain / Others	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Diah Natalisa 4. Noor Ida Khomsiyati	

Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Pengawas yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentee Board of Supervisor Council and Reasons for Absence
24 April 2019 April 24, 2019	1. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Maret 2019, Persiapan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in March 2019. 2. Pengesahan Laporan Tahunan Audited Tahun Buku 2018 Preparation for Joint Discussion Meeting (RPB) of Audited Annual Report Ratification for Fiscal Year 2018. 3. Lain-lain / Others	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Diah Natalisa 4. Noor Ida Khomsiyati	
24 Mei 2019 May 24, 2019	1. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan April 2019 Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in April 2019. 2. Lain-lain / Others	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Noor Ida Khomsiyati	Diah Natalisa dikarenakan terdapat kegiatan yg tidak dapat ditinggalkan Diah Natalisa because there are activities that cannot be abandoned
26 Juni 2019 June 26, 2019	1. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrinddo Bulan Mei 2019 Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in May 2019. 2. Lain-lain / Others	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Noor Ida Khomsiyati	Diah Natalisa dikarenakan terdapat kegiatan yg tidak dapat ditinggalkan Diah Natalisa because there are activities that cannot be abandoned
24 Juli 2019 July 24, 2019	1. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Juni 2019 Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in June 2019. 2. Pembahasan Penghapusan Piutang Co-Guarantee PT Asuransi Syariah Mubarokah (ASM) Discussion on the Write Off of PT Asuransi Syariah Mubarokah (ASM)'s Co-Guarantee Receivables 3. Lain-lain / Others	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Diah Natalisa 4. Noor Ida Khomsiyati	
22 Agustus 2019 August 22, 2019	1. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Juli 2019 Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in July 2019. 2. Lain-lain / Others	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Diah Natalisa 4. Noor Ida Khomsiyati	
18 September 2019 September 18, 2019	1. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Agustus 2019 Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in August 2019. 2. Lain-lain / Others	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Diah Natalisa 4. Noor Ida Khomsiyati	
29 Oktober 2019 October 29, 2019	1. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan September 2019 Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in September 2019. 2. Tanggapan Dewan Pengawas atas Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020 Review of Partnership and Community Development Programs (PKBL) Perum Jamkrindo 2016-2019 3. Lain-lain / Others	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Diah Natalisa 4. Noor Ida Khomsiyati 5. M. Muchlas Rowi	

Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Pengawas yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentee Board of Supervisor Council and Reasons for Absence
19 November 2019 November 19, 2019	*Review* Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Jamkrindo Tahun 2016-2019 Review of Partnership and Community Development Programs (PKBL) Perum Jamkrindo 2016-2019	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Diah Natalisa 4. Noor Ida Khomsiyati 5. M. Muchlas Rowi	
20 Desember 2019 December 20, 2019	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan November 2019 Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in November 2019. 2. Pembahasan Persiapan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum Jamkrindo Tahun 2020 Discussion Preparation of Joint Discussion Meeting of Ratification of the Work Plan and Company Budget (RKAP) Perum Jamkrindo 2020	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Diah Natalisa 4. Noor Ida Khomsiyati 5. M. Muchlas Rowi	

REKAPITULASI DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN PENGAWAS DALAM RAPAT INTERNAL DEWAN PENGAWAS

Realisasi kehadiran Rapat Dewan Pengawas pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

RECAPITULATION AND LEVEL OF ATTENDANCE OF THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL IN THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL'S INTERNAL MEETINGS

Realization of the attendance of the Board of Supervisor Council meeting in 2019 was as follows:

Jabatan Position	Nama Name	Jumlah Wajib Rapat Total Required Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absences	% Kehadiran % of Attendance
Ketua Dewan Pengawas merangkap Dewan Pengawas Independen The Chairman of the Board of Supervisor Council Concurrent of Independent Board of Supervisor Council	Sri Mulyanto	12	12		100,00%
Anggota Dewan Pengawas Member of Board of Supervisor Council	Ari Wahyuni	12	11	1	91,67%
Anggota Dewan Pengawas Member of Board of Supervisor Council	Diah Natalisa	12	10	2	83,33%
Anggota Dewan Pengawas Member of Board of Supervisor Council	Noor Ida Khomsiyati	12	12		100,00%
Dewan Pengawas Independen Independent Board of Supervisor Council	M. Muchlas Rowi	3	3		100,00%
Total Penyelenggaran Rapat **Total Meeting Arrangements**		**51**	**48**	**3**	**94,11%**

RAPAT/PERTEMUAN LAIN

Selain Rapat Rutin Bulanan (Internal dan Gabungan) dan Rapat Pembahasan Bersama, selama tahun 2019 Dewan Pengawas juga telah menyelenggarakan 39 (tiga puluh Sembilan) kali Rapat Lain yang bersifat teknis (secara internal maupun dengan Direksi) serta dilaksanakan dalam rangka membahas permasalahan perusahaan secara spesifik dan lebih mendalam, antara lain:

OTHER MEETINGS

In addition to Monthly Regular Meetings (Internal and Joint) and Joint Discussion Meeting, during 2019 The Board of Supervision Council held 39 (thirty Nine) Other technical meetings (internally and with the Directors) and implemented in the framework discuss company issues specifically and more in depth, including:

No.	Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Rapat Meeting agenda	Keterangan Description
1.	9 Januari 2019 January 9, 2019	Persiapan RPB RKAP 2019 Preparation of the 2019 RKAP RPB	Rapat Internal Internal Meeting
2.	9 Januari 2019 January 9, 2019	Realisasi Capaian Kinerja per Bulan terhadap Prognosa Tahun 2018 Realization of Monthly Performance Results for 2018 Prognosis	Rapat Internal Internal Meeting
3.	16 Januari 2019 January 16, 2019	Tindak Lanjut atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2018 Perum Jamkrindo Follow-up on Government Regulation (PP) Number 35 Year 2018 Perum Jamkrindo	Rapat dengan Direktur Teknis Meeting with Technical Director
4.	30 Januari 2019 January 30, 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPLF) Perum Jamkrindo Tahun 2018 Report on Final Direct Inspection Results (LHPLF) of Perum Jamkrindo 2018	Rapat Internal Internal Meeting
5.	6 Februari 2019 February 6, 2019	Penyelesaian Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 oleh KAP Completion of Audit for Fiscal Year 2018 by KAP	Rapat dengan Direktur Teknis Meeting with Technical Director
6.	22 Februari 2019 February 22, 2019	Perkembangan Penyelesaian atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final OJK pada Perum Jamkrindo Tahun 2018 Progress of Settlement of Reports on Direct Inspection Results Final OJK at Perum Jamkrindo 2018	Rapat Internal Internal Meeting
7.	22 Februari 2019 February 22, 2019	Evaluasi Kinerja Keuangan Kantor Wilayah I-IX Perum Jamkrindo Tahun Buku 2019 Financial Performance Evaluation of Regional Office I-IX Perum Jamkrindo Year Book 2019	Rapat Internal Internal Meeting
8.	6 Maret 2019 March 6, 2019	Perkembangan *Assessment* GCG Tahun 2018 Progress of GCG Assessment in 2018	Rapat Internal Internal Meeting
9.	13 Maret 2019 March 13, 2019	Perkembangan *Assessment* GCG Tahun 2018 Progress of GCG Assessment in 2018	Rapat Internal Internal Meeting
10.	20 Maret 2019 2019	Profil Risiko Perum Jamkrindo Triwulan IV Tahun 2018 Perum Jamkrindo Risk Profile Quarter IV of 2018	Rapat Internal Internal Meeting
11.	10 April 2019 April 10, 2019	Optimalisasi *Gearing Ratio* Optimization of Gearing Ratio	Rapat Internal Internal Meeting
12.	10 April 2019 April 10, 2019	Tanggapan atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 Audited Responses to the Annual Report 2018 Audited	Rapat Internal Internal Meeting
13.	18 April 2019 April 18, 2019	Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Jamkrindo Changing the Legal Entity of Perum Jamkrindo	Rapat dengan Direktur Teknis Meeting with Technical Director
14.	29 April 2019 April 29, 2019	Usulan RPB Pengesahan Laporan Tahunan *Audited* Perum Jamkrindo Tahun Buku 2018 Proposed RPB Ratification of the Perum Jamkrindo Annual Report Audited 2018	Rapat dengan Direktur Teknis Meeting with Technical Director

No.	Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Rapat Meeting agenda	Keterangan Description
15.	8 Mei 2019 May 8, 2019	Strategi Percepatan Penyerapan Belanja Modal (Capex) Perum Jamkrindo Tahun 2019 Strategy for the Acceleration of Capital Expenditures (Capex) at Perum Jamkrindo 2019	Rapat dengan Direktur Teknis Meeting with Technical Director
16.	15 Mei 2019 May 15, 2019	Tanggapan Dewan Pengawas atas Laporan Kegiatan dan Keuangan Perum Jamkrindo Triwulan I Tahun 2019 Response of the Board of Supervisor Council to Perum Jamkrindo's Activity and Financial Report Quarter I Year 2019	Rapat Internal Internal Meeting
17.	22 Mei 2019 May 22, 2019	Implementasi Manajemen Risiko pada Perum Jamkrindo Implementation of Risk Management at Perum Jamkrindo	Rapat Internal Internal Meeting
18.	12 Juni 2019 June 12, 2019	Efektivitas Mitigasi Risiko Klaim Penjaminan Kredit Effectiveness of Credit Risk Claims Mitigation	Rapat dengan Direktur Teknis Meeting with Technical Director
19.	18 Juni 2019 June 18, 2019	Manajemen Kas dan Keputusan Investasi pada Perum Jamkrindo Cash Management and Investment Decisions at Perum Jamkrindo	Rapat Internal Internal Meeting
20.	18 Juni 2019 June 18, 2019	Hasil *Assessment* GCG Perum Jamkrindo Tahun Buku 2018 Results of Jamkrindo's GCG Assessment Year 2018	Rapat Internal Internal Meeting
21.	10 Juli 2019 July 10, 2019	Pelaksanaan Audit Tahun Buku 2019 oleh KAP Audit of Fiscal Year 2019 by KAP	Rapat Internal Internal Meeting
22.	10 Juli 2019 July 10, 2019	Kinerja Investasi saham LQ-45 Perum Jamkrindo Investment LQ-45 shares Performance of Perum Jamkrindo	Rapat Internal Internal Meeting
23.	10 Juli 2019 July 10, 2019	Pembahasan realisasi rencana kerja dan perkembangan kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah sampai dengan Juni 2019 Discussion on the realization of the work plan and the development of the performance of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah until June 2019	Rapat dengan Direktur Teknis Meeting with Technical Director
24.	7 Agustus 2019 August 7, 2019	Pembahasan mengenai SOP dan Implementasi Kegiatan Investasi pada Perum Jamkrindo Discussion on SOP and Implementation of Investment Activities at Perum Jamkrindo	Rapat Internal Internal Meeting
25.	7 Agustus 2019 August 7, 2019	Pembahasan mengenai SOP dan Implementasi Kegiatan Investasi pada Perum Jamkrindo Discussion on SOP and Implementation of Investment Activities at Perum Jamkrindo	Rapat Internal Internal Meeting
26.	7 Agustus 2019 August 7, 2019	Monitoring terhadap SOP, Implementasi, dan Strategi Pengelolaan Investasi pada Perum Jamkrindo Monitoring of SOPs, Implementation, and Investment Management Strategies at Perum Jamkrindo	Rapat dengan Direktur Teknis Meeting with Technical Director
27.	4 September 2019 September 4, 2019	Optimalisasi Pendapatan Subrogasi Optimization of Subrogation Revenue	Rapat Internal Internal Meeting
28.	4 September 2019 September 4, 2019	Reviu atas Penjaminan Kredit Kontruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa Review of the Construction and Procurement Credit Guarantee Services	Rapat Internal Internal Meeting
29.	4 September 2019 September 4, 2019	Upaya peningkatan Kompetensi (*skill, knowledge,* dan *attitude*) SDM Perum Jamkrindo Efforts to increase competency (skills, knowledge, and attitude) of HR Perum Jamkrindo	Rapat dengan Direktur Teknis Meeting with Technical Director
30.	15 Oktober 2019 October 15, 2019	Rencana Revisi *Board Manual* Board Manual Revision Plan	Rapat Internal Internal Meeting
31.	15 Oktober 2019 October 15, 2019	Reviu Penjaminan Kredit FLPP FLPP Credit Guarantee Review	Rapat Internal Internal Meeting

No.	Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Rapat Meeting agenda	Keterangan Description
32.	15 Oktober 2019 October 15, 2019	Kebijakan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 dalam Rangka Mewujudkan *Sustainable Growth* Perum Jamkrindo Policy in preparing the Company's Work Plan and Budget (RKAP) Year 2020 in Order to Achieve Sustainable Growth Perum Jamkrindo	Rapat dengan Direktur Teknis Meeting with Technical Director
33.	19 November 2019 November 19, 2019	Tanggapan Dewan Pengawas atas Laporan Keuangan dan Kegiatan Perum Jamkrindo Triwulan III Tahun 2019 Response of the Board of Supervisor Council to the Financial Statements and Perum Jamkrindo Activities Quarter III 2019	Rapat Internal Internal Meeting
34.	19 November 2019 November 19, 2019	Pembahasan Lanjutan mengenai Reviu Penjaminan Kredit FLPP Further discussion regarding FLPP Credit Guarantee Review	Rapat Internal Internal Meeting
35.	19 November 2019 November 19, 2019	Review Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Jamkrindo Tahun 2016-2019 Review on the Implementation of the Partnership and Community Development Program (PKBL) Perum Jamkrindo 2016-2019	Rapat dengan Direktur Teknis Meeting with Technical Director
36.	27 November 2019 November 27, 2019	1. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Oktober 2019 Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo Month Performance Achievement October 2019 2. Lain-Lain Others	Rapat dengan Direktur Teknis Meeting with Technical Director
37.	12 Desember 2019 Desember 12, 2019	Tanggapan atas RKAP Perum Jamkrindo tahun 2020 Responses to the Work plan and budget Perum Jamkrindo 2020	Rapat Internal Internal Meeting
38.	12 Desember 2019 Desember 12, 2019	*Review* Kinerja Penjaminan KBG Review of KBG Guarantee Performance	Rapat Internal Internal Meeting
39.	12 Desember 2019 Desember 12, 2019	1. Perkembangan Pembangunan Teknologi Informasi (TI) dan Permasalahan yang dihadapi Progress of Information Technology (IT) Development and Problems faced 2. *Roadmap* IT untuk Tiga Tahun Mendatang IT Roadmap for the Next Three Years	Rapat dengan Direktur Teknis Meeting with Technical Director

RAPAT GABUNGAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Di sepanjang tahun 2019, Dewan Pengawas menggelar 12 (dua belas) kali Rapat Gabungan dengan Direksi. Berikut disampaikan risalah rapat dan tingkat kehadiran Dewan Pengawas dan Direksi dalam Rapat Gabungan.

JOINT MEETING OF THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL AND BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2019, the Board of Supervisor Council held 12 (twelve) joint meetings with the Board of Directors. The following were the minutes of the meetings and the levels of attendance of the Board of Supervisor Council and Board of Directors in the Joint Meeting.

RISALAH RAPAT DEWAN PENGAWAS DENGAN DIREKSI
RISALAH RAPAT DEWAN PENGAWAS DENGAN DIREKSI

Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Pengawas dan Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentee Board of Supervisor Council and Board of Director,, and Reason for Absence
18 Januari 2019 January 18, 2019	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Desember 2018 Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in December 2019 2. Lain-lain Others. 3. Program Pengenalan Dewan Pengawas The Board of Supervisor Council's Introduction Program	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Noor Ida Khomsiyati 4. Randi Anto 5. Kadar Wisnuwarnaman 6. Amin Masudi 7. Sulis Usdoko 8. I. Rusdonobanu	Diah Natalisa dikarenakan terdapat kegiatan yg tidak dapat ditinggalkan Diah Natalisa because there are activities that cannot be abandoned
27 Februari 2019 February 27, 2019	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Januari 2019 Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in January 2019 2. Lain-lain Others.	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Diah Natalisa 4. Noor Ida Khomsiyati 5. Randi Anto 6. Kadar Wisnuwarnaman 7. I. Rusdonobanu	Amin Masudi dan Sulis Usdoko dikarenakan terdapat kegiatan yg tidak dapat ditinggalkan. Amin Masudi and Sulis Usdoko because there are activities that cannot be abandoned
27 Maret 2019 March 27, 2019	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Februari 2019 Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in February 2019 2. Lain-lain Others.	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Diah Natalisa 4. Noor Ida Khomsiyati 5. Randi Anto 6. Kadar Wisnuwarnaman 7. Amin Masudi	Sulis Usdoko dan I. Rusdonobanu dikarenakan terdapat kegiatan yg tidak dapat ditinggalkan Sulis Usdoko and I. Rusdonobanu because there are activities that cannot be abandoned
24 April 2019 April 24, 2019	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Maret 2019 Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in March 2019 2. Persiapan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Pengesahan Laporan Tahunan Audited Tahun Buku 2018 Preparation of Joint Discussion Meeting of Ratification of Audited Annual Report for Fiscal Year 2018 3. Lain-lain Others.	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Diah Natalisa 4. Noor Ida Khomsiyati 5. Kadar Wisnuwarnaman 6. Amin Masudi 7. Sulis Usdoko 8. I. Rusdonobanu	Randi Anto dikarenakan terdapat kegiatan yg tidak dapat ditinggalkan Randi Anto because there is activities that cannot be abandoned
24 Mei 2019 May 24, 2019	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan April 2019 Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in April 2019 2. Lain-lain / Others.	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Noor Ida Khomsiyati 4. Randi Anto 5. Kadar Wisnuwarnaman 6. Amin Masudi 7. I. Rusdonobanu	Diah Natalisa dan Sulis Usdoko dikarenakan terdapat kegiatan yg tidak dapat ditinggalkan Diah Natalisa and Sulis Usdoko because there are activities that cannot be abandoned

Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Pengawas dan Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentee Board of Supervisor Council and Board of Director,, and Reason for Absence
26 Juni 2019 June 26, 2019	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Mei 2019 Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in May 2019 2. Lain-lain / Others.	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Noor Ida Khomsiyati 4. Randi Anto 5. Kadar Wisnuwarnaman 6. Amin Masudi 7. Sulis Usdoko 8. I. Rusdonobanu	Diah Natalisa dikarenakan terdapat kegiatan yg tidak dapat ditinggalkan Diah Natalisa because there is activities that cannot be abandoned
24 Juli 2019 July 24, 2019	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Juni 2019, Pembahasan Penghapusan Piutang Co-Guarantee PT Asuransi Syariah Mubarokah (ASM) 2. Lain-lain	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Diah Natalisa 4. Noor Ida Khomsiyati 5. Kadar Wisnuwarnaman 6. Amin Masudi 7. Sulis Usdoko 8. I. Rusdonobanu	Randi Anto dikarenakan terdapat kegiatan yg tidak dapat ditinggalkan Randi Anto because there is activities that cannot be abandoned
22 Agustus 2019 August 22, 2019	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Juli 2019 Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in July 2019 2. Lain-lain / Others.	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Diah Natalisa 4. Noor Ida Khomsiyati 5. Randi Anto 6. Sulis Usdoko	I. Rusdonobanu, Kadar Wisnuwarnaman dan Amin Masudi dikarenakan terdapat kegiatan yg tidak dapat ditinggalkan I. Rusdonobanu, Kadar Wisnuwarnaman and Amin Masudi because there are activities that cannot be abandoned
18 September 2019 September 18, 2019	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Agustus 2019 Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in August 2019 2. Lain-lain / Others.	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Diah Natalisa 4. Noor Ida Khomsiyati 5. Randi Anto 6. Sulis Usdoko 7. I. Rusdonobanu	Kadar Wisnuwarnaman dan Amin Masudi dikarenakan terdapat kegiatan yg tidak dapat ditinggalkan Kadar Wisnuwarnaman and Amin Masudi because there are activities that cannot be abandoned
29 Oktober 2019 October 29, 2019	1. Pembahasan Finalisasi RKAP Tahun 2020 2. Evaluasi dan *Monitoring* Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo bulan September 2019 Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in September 2019	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Diah Natalisa 4. Noor Ida Khomsiyati 8. M. Muchlas Rowi 9. Randi Anto 10. Kadar Wisnuwarnaman 11. Amin Masudi 12. Sulis Usdoko 13. I. Rusdonobanu	
27 November 2019\ November 27, 2019	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo bulan Oktober 2019 Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in October 2019 2. Lain-lain / Others.	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Noor Ida Khomsiyati 4. M. Muchlas Rowi 5. Randi Anto 6. Kadar Wisnuwarnaman 7. Amin Masudi 8. Sulis Usdoko 9. I. Rusdonobanu	Diah Natalisa dikarenakan terdapat kegiatan yg tidak dapat ditinggalkan Diah Natalisa because there are activities that cannot be abandoned
30 Desember 2019 December 30, 2019	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo bulan November 2019 Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in November 2019 2. Lain-lain / Others.	1. Sri Mulyanto 2. Ari Wahyuni 3. Diah Natalisa 4. Noor Ida Khomsiyati 5. M. Muchlas Rowi 6. Randi Anto 7. Kadar Wisnuwarnaman	I. Rusdonobanu, Amin Masudi, dan Sulis Usdoko dikarenakan terdapat kegiatan yg tidak dapat ditinggalkan I. Rusdonobanu, Amin Masudi, and Sulis Usdoko because there are activities that cannot be abandoned

REKAPITULASI DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI DALAM RAPAT GABUNGAN

RECAPITULATION AND ATTENDANCE LEVEL OF THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL AND BOARD OF DIRECTORS IN THE JOINT MEETING

Jabatan Position	Nama Name	Jumlah Wajib Rapat Total Required Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absences	% Kehadiran % of Attendances
Dewan Pengawas / Board of Supervisor Council					
Ketua Dewan Pengawas merangkap Dewan Pengawas Independen The Chairman of the Board of Supervisor Council Concurrent of Independent Board of Supervisor Council	Sri Mulyanto	12	12		100%
Anggota Dewan Pengawas Member of Board of Supervisor Council	Ari Wahyuni	12	12		100%
Anggota Dewan Pengawas Member of Board of Supervisor Council	Diah Natalisa	12	8	4	66,67%
Anggota Dewan Pengawas Member of Board of Supervisor Council	Noor Ida Khomsiyati	12	12		100%
Dewan Pengawas Independen Independent Board of Supervisor Council	M. Muchlas Rowi	3	3		100%
Direksi / Board of Directors					
Direktur Utama President Director	Randi Anto	12	10	2	83,33%
Direktur Bisnis Penjaminan Director of Business of Guarantee	Amin Masudi	12	7	5	58,33%
Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network	Kadar Wisnuwarnaman	12	10	2	83,33%
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan Director of HRM, General Affairs, and Compliance	Sulis Usdoko	12	8	4	66,67%
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko Director of Finance, Investment and Risk Management	I. Rusdonobanu	12	9	3	75%
Rata-rata / Average					**83,33%**

RAPAT DIREKSI

Sebagaimana diatur dalam peraturan Direksi No. 56/PerDir/XII/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Rapat DireksiPerum Jamkrindo, ketentuan mengenai Rapat Direksi Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:

1. Rapat wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya satu bulan sekali, atau atas usul dari sesama anggota Direksi dengan menyebutkan agenda atau hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Apabila Direktur Utama berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh anggota Direksi yang hadir atau diwakili.

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

As regulated in Board of Directors' regulation No. 56 / PerDir / XII / 2013 concerning Management Guidelines for the Board of Directors Meeting of Perum Jamkrindo, the provisions regarding the Board of Directors Meeting of Perum Jamkrindo are as follows:

1. Meetings must be held at least once a month, or at the suggestion of fellow members of the Board of Directors by stating the agenda or matters to be discussed.
2. The Board of Directors Meeting is chaired by the President Director. If the President Director is unable to attend, the meeting will be chaired by a member of the Board of Directors appointed by other members of the Board of Directors present or represented.

Direksi mengadakan rapat rutin setiap sekali dalam setiap bulan, sebagaimana ketentuannya telah diatur dalam penjelasan di atas. Di sepanjang 2019, Direksi melaksanakan 31 (tiga puluh satu) kali Rapat Internal Direksi. Di samping itu, Direksi menghadiri 12 (dua belas) kali Rapat dengan Dewan Pengawas. Tentang risalah Rapat Dewan Pengawas dan Direksi dapat dilihat pada bagian pembahasan Rapat Dewan Pengawas.

Berikut disampaikan risalah rapat dan tingkat kehadiran Direksi dalam rapat.

The Board of Directors holds regular meetings once a month, as stipulated in the explanation above. Throughout 2019, the Board of Directors held 31 (thirty one) internal meetings of the Board of Directors. In addition, the Board of Directors attended 12 (twelve) meetings with the Board of Supervisor Council. Regarding the minutes of the Board of Supervisor Council and Board of Directors' meetings, could be seen in the discussion section of the Board of Supervisor Council Meeting.

The following were the minutes of the meetings and the level of attendance of the Board of Directors at the meeting.

Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Rapat	Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Directors Who Are Not Present, and Reasons for Absence
9 Januari 2019 & Gedung Jamkrindo January 9, 2019 & Building Jamkrindo	Pembahasan tentang Penjaminan Fasilitas Pembiayaan Proyek APBN Discussion about Facility Guarantee Project Funding State Budget	Seluruh Direksi, Sekper, Div. Klaim, Div. Teknik & Adm. Bisnis, Div. MR & PUMKM, Div. Penunjang Bisnis, Div. Bisnis 1, Desk Subrograsi	All Directors, Corporate Secretary, Claims Division, Engineering & Adm. Business Division, MR & PUMKM Division, Business Support Division, Business 1 Division, Subrogration Desk	-
11 Januari 2019 & Gedung Jamkrindo January 11, 2019 & Building Jamkrindo	Pembahasan dengan Konsultan DDI Discussion with DDI Consultant	Direktur MSDM dan Direktur Operasional	HRM Director and Operations Director	Direktur Utama, Direktur Bisnis Penjaminan, Direktur Keuangan dikarenakan terdapat kegiatan yg tidak dapat d tinggalkan President Director, Director of Guarantee Business, Director of Finance because there are activities that cannot be abandoned
30 Januari 2019 & Gedung Jamkrindo January 30, 2019 & Building Jamkrindo	Pemaparan Produk dari PT Semen Holcim Indonesia Product Exposure from PT Semen Holcim Indonesia	Seluruh Direksi, Sekper, Div. Bisnis 3, Div. Teknik & Adm. Bisnis, Div. MR & PUMKM, Div. Penunjang Bisnis, Desk Subrograsi	All Directors, Corporate Secretary, Business 3 Division, Engineering & Adm. Business Division, MR & PUMKM Division, Business Support Division, Subrogration Desk	-
13 Februari 2019 & Gedung Jamkrindo February 13, 2019 & Building Jamkrindo	Pembahasan Performance Appraisal KPI unit kerja Tahun 2018 Discussion Performance Appraisal KPI work unit in 2018	Seluruh Direksi, Sekper, Div. Perencanaan Strategis, Div. Jaringan dan Layanan	All Directors, Corporate Secretary, Strategic Planning Division, Network and Services Division	
21 Februari 2019 & Gedung Jamkrindo February 21, 2019 & Building Jamkrindo	Pembahasan tentang Draft Master Plan IT tahun 2019-2023 Discussion about IT Master Plan Draft 2019-2023	Seluruh Direksi, Sekper/Ka. SPI/Kepala Divisi, Kepala Desk	All Directors, Secretary / Head. SPI/Head of Division, Head of Desk	
5 Maret 2019 & Gedung Jamkrindo March 5, 2019 & Building Jamkrindo	Pembahasan tentang Pendelegasian Kewenangan Discussion about IT Master Plan Draft 2019-2023	Seluruh Direksi, Sekper/Ka. SPI/Kepala Divisi, Kepala Desk	All Directors, Secretary / Head. SPI/Head of Division, Head of Desk	
14 Maret 2019 & Gedung Jamkrindo March 14, 2019 & Building Jamkrindo	Pembahasan terkait Potensi Klaim Palu dan E-document Klaim Bank BRI Discussion about Delegation Authority	Seluruh Direksi, Sekper, Kepala SP, Div. MR & PUKM, Div. Hukum & Kepatuhan, Div. TI	All Directors, Secretary / Head of SPI / Head of Division, Head of Desk	

Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Rapat	Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Directors Who Are Not Present, and Reasons for Absence
21 Maret 2019 & Gedung Jamkrindo March 21, 2019 & Building Jamkrindo	Pembahasan Performance Appraisal KPI unit kerja Tahun 2018 Discussion related to Potential Palu Claims and Bank BRI Claim E-documents	Seluruh Direksi, Sekper, Div. Perencanaan Strategis, Div. Jaringan dan Layanan	All Directors, Secretary, Strategic Planning Division, Network and Services Division	-
11 April 2019 & Gedung Jamkrindo April 11, 2019 & Building Jamkrindo	Pembahasan tentang MSDM Perum Jamkrindo Discussion about HRM Perum Jamkrindo	Seluruh Direksi, Kadiv. MSDM	All Directors, Head of HRM division	
18 April 2019 & Gedung Jamkrindo April 18, 2019 & Building Jamkrindo	Pembahasan tentang Pendelegasian Kewenangan Discussion on Delegation of Authority	Seluruh Direksi, Sekper/Ka. SPI/Kepala Divisi, Kepala Desk	All Directors, Secretary / Head of SPI / Head of Division, Head of Desk	
9 Mei 2019 & Gedung Jamkrindo May 9, 2019 & Building Jamkrindo	1. Pembahasan terkait Potensi Klaim Palu dan E-document Klaim Bank BRI Discussion regarding the Potential of Palu Claims and E-Claim Documents Bank BRI 2. Pembahasan Klaim Telkom Discussion of Telkom Claims	Direktur Bisnis Penjaminan, Direktur Operasional & Jaringan, Direktur Keuangan & Investasi, Sekper, Kepala SPI, Div. MR & PUMKM, Div. Hukum & Kepatuhan, Div. TI	Director of Guarantee Business, Director of Operations & Network, Director of Finance & Investment, Secretary, Head of SPI, MR & PUMKM Division, Law & Compliance Division,TI Division	Direktur Utama & Direktur MSDM, Umum, dan Kepatuhan dikarenakan terdapat kegiatan yg tidak dapat di tinggalkan President Director & Director HR, General, and Compliance because there are activities that cannot be abandoned
20 Mei 2019 & Gedung Jamkrindo May 20, 2019 & Building Jamkrindo	1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan April 2019 Performance Achievement Evaluation Perum Jamkrindo in April 2019 2. Pembahasan tentang *Update Co-Guarantee* PT ASM Discussion about Co-Guarantee Update PT ASM	Direktur Utama, Direktur Bisnis Penjaminan, Direktur MSDM, Umum, dan Kepatuhan, Ka. SPI, Project Management Officer Perum Jamkrindo	President Director, Director Guarantee Business, Director of HRM, General Affair, and Compliance, Head of SPI, Project Management Officer Perum Jamkrindo	Direktur Operasional & Jaringan , Direktur Keuangan & Investasi dikarenakan terdapat kegiatan yg tidak dapat di tinggalkan Director of Operation and Network, Director of Finance & Investment because there are activities that cannot be abandoned Director of Operation and Network, Director of Finance & Investment because there are activities that cannot be abandoned
13 Juni 2019 & Gedung Jamkrindo June 13, 2019 & Building Jamkrindo	1. Pembahasan Kebijakan umum Sinergi BUMN Discussion of General Policy Synergy of SOE 2. Pembahasan Ketentuan Pendekatan Proses Penjaminan Discussion Provisions Approach Guarantee Process 3. Pembahasan Kebijakan Pengaturan Agunan Uang Tunai (*Cash Collateral*) Policy Discussion Collateral Settings Cash (Cash Collateral)	Seluruh Direksi, Sekper, Divisi Bisnis 1, Divisi Bisnis , Divisi Bisnis 3, Divisi Penunjang Bisnis, Divisi MR & PUMKM, Divisi Keuangan & Investasi, Divisi TAB, Divisi Jaringan & Layanan, Divisi Hukum & Kepatuhan, Divisi Klaim & Subrogasi	All Directors, Secretary, Division Business 1, Business Division, Division Busines 3, Business Support Division, MR & PUMKM Division, Division Finance & Investment, Division TAB, Network & Services Division, Legal & Compliance Division, Claims & Subrogation Division	

Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Rapat	Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Directors Who Are Not Present, and Reasons for Absence
14 Juni 2019 & Gedung Jamkrindo June 14, 2019 & Building Jamkrindo	Rapat Lanjutan Pembahasan Lanjutan Tata Ulang Struktur Gaji Advanced Meeting Further discussion Salary Structure Reset	Seluruh Direksi, Kadiv. MSDM, Project Management Officer	All Directors, heads of HR divisions, Project Management Office	
19 Juni 2019 & Gedung Jamkrindo June 19, 2019 & Building Jamkrindo	Pemaparan produk Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Umum (Modal Kerja iB dan Investasi iB) Exposure Guarantee Product (Kafalah) General Financing (Working Capital iB and IB investment)	Direktur Utama, Direktur Bisnis Penjaminan, Direktur Operasional & Jaringan, Direktur Keuangan & Investasi, Sekper, Divisi MR, Div. Teknik dan AdministrasiBisnis, Div. Klaim, Desk Penjaminan Syariah,Desk Subrogasi, Project Management officer	President Director, Director of Guarantee Business, Director of Operations & Networks, Director of Finance & Investment, Corporate Secretary, MR Division, Technique and Business Administration Division, Claims Division, Sharia Guarantee Desk, Subrogation Desk, Project Management officer	Direktur MSDM dikarenakan terdapat kegiatan yg tidak dapat di tinggalkan Director of HRM because there are activities that cannot be abandoned
25 Juni 2019 & Gedung Jamkrindo June 25, 2019 & Building Jamkrindo	1. Pemaparan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Mei 2019 Performance Achievement Evaluation Perum Jamkrindo in May 2019	Seluruh Direksi, Sekper/Ka. SPI/Kepala Divisi, Kepala Desk, Project Management officer	All Directors, Secretary / Head of SPI / Head of Division, Head of Desk, Project Management officer	
	2. Tindak lanjut Hasil Temuan BPK terhadap PT. ASM Follow-up BPK findings Results on PT. ASM	Seluruh Direksi, Sekper,Kepala SPI, Div. Klaim, Div. Hukum & Kepatuhan, Div. Keuangan & Investasi, Div. Akuntansi, Div. MR & PUMKM, Desk Subrograsi, Project Management Officer	All Directors, Secretary, Chief SPI, Claims Division, Law & Compliance Division, Finance & Investment Division, Accounting Division, MR & PUMKM Divison, Subrogration Desk, Project Management Officer	
4 Juli 2019 & Gedung Jamkrindo July 4, 2019 & Building Jamkrindo	1. Progress Optimalisasi Belanja Modal (capex 2019) Progress on Optimizing Capital Expenditures (capex 2019)	Seluruh Direksi, Sekper, Div. Jaringan dan Layanan, Div. Hukum & Kepatuhan, Div. Teknologi Informasi, Div. Akuntansi, Project Management officer	All Directors, Corporate Secretary, Network and Services Division, Law & Compliance Division, Information Technology Division, Accounting Division, Project Management officer	
	2. Penetapan Plafond Penjaminan PT Adyawinsa (Sinergi BUMN, Penjaminan KIK EBA Mandiri – Garuda, Jamkrindo Prioritas Determination of Guarantee Plafond PT Adyawinsa (Synergy SOE, Guarantee KIK EBA Mandiri -Garuda, Jamkrindo Priority)	Seluruh Direksi, Sekper,Div. Penunjang Bisnis, Div. Teknik & Administrasi Penjaminan, Div. MR & PUMKM, Div. Hukum & Kepatuhan, Project Management officer	All Directors, Corporate Secretary, Business Support Division, Technical & Guarantee Administration Division, MR & PUMKM Division, Law & Compliance Division, Project Management officer	

Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Rapat	Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Directors Who Are Not Present, and Reasons for Absence
8 Juli 2019 & Gedung Jamkrindo July 8, 2019 & Building Jamkrindo	• Penetapan Plafond Penjaminan PT Adyawinsa (Sinergi BUMN) Determination of Guarantee Plafond PT Adyawinsa (Synergy SOE) • Eskalasi Penjaminan *Suretyship* Scalation Suretyship Guarantee • Penjaminan Mekaar Plus PNM Mekaar Plus PNM guarantee • Penjaminan Distribusi Barang KWSG KWSG Goods Distribution Guarantee	Direktur Bisnis Penjaminan, Direktur Operasional & Jaringan, Direktur MSDM, Umum, dan Kepatuhan, Sekper,Div. Penunjang Bisnis, Div. Teknik & Administrasi Penjaminan,Div. MR & PUMKM,Div. Hukum & Kepatuhan, Project Management officer	Director of Business Guarantee, Director of Operations & Network,Director of HRM, General Affair, and Compliance, Corporate Secretary, Business Support Division, Engineering & Administration Guarantee Divison, MR & PUMKM Division, Law & Compliance Division, Project Management officer	Direktur Utama dan Direktur Keuangan, Investasi dan MR dikarenakan terdapat kegiatan yg tidak dapat ditinggalkan President Director, and Director of Finance, Investment and MR because there are activities that cannot be abandoned
18 Juli 2019 & Gedung Jamkrindo July 18, 2019 & Building Jamkrindo	Pemaparan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Juni 2019 Performance Achievement Evaluation Perum Jamkrindo in June 2019	Seluruh Direksi ,Sekper/Ka. SPI/ Kepala Divisi,Seluruh Kepala Desk,Project Management officerFinancial Advisor	All Directors, Secretary / Chief SPI/Head of Division, All Head of Desk, Project Management officer, Financial Advisor	
	• Pejaminan *Showroom Finanncing BCA Finance* Showroom Financing Guarantee BCA Finance • Penetapan *Plafond* Penjaminan PT Adyawinsa (Sinergi BUMN) Determination of Guarantee Plafond PT Adyawinsa (Synergy SOE)	Seluruh Direksi,Sekper,Div. Bisnis 3, Div. Klaim,Div. Teknik dan Adm Bisnis,Div. MR dan PUKM,Div. Penunjang Bisnis, Desk Subrograsi,Ka. KCK Jakarta,Project Management officer	All Directors, Corporate Secretary, Business 3 Division, Claims Division, Engineering and Administration Business Division, MR and PUKM Division, Business Support Division, Subrogration Desk, Head of Special Regional Office Jakarta, Project Management officer	
6 Agustus 2019 & Gedung Jamkrindo August 6, 2019 & Building Jamkrindo	Pembahasan Peningkatan Volume Penjaminan KUR BRI melalui Penambahan Manfaat Asuransi Jiwa Bagi Debitur KUR BRI Discussion on Increasing BRI KUR Guarantee Volume through Adding Life Insurance Benefits to BRI KUR Debtors	Direktur Utama, Direktur Bisnis Penjaminan, Direktur Operasional & Jaringan, Direktur Keuangan, Investasi, dan MR,Sekper,Div. Bisnis 1,Div. Penunjang Bisnis,Div. Klaim,Div. TI,Desk Subrograsi,Project Management officer	President Director, Director of Business Guarantee, Director of Operations & Networks, Director of Finance, Investment, and MR, Corporate Secretary, Business 1 Division, Business Support Division, Claims Division, TI Division, Subrogration Desk, Project Management officer	Direktur MSDM, Umum, dan Kepatuhan dikarenakan terdapat kegiatan yg tidak dapat di tinggalkan Director of HRM, General Affair, and Compliance because there are activities that cannot be abandoned
	Komite Klaim PT. Telkom Claims Committee PT Telkom	Direktur Utama, Direktur Bisnis Penjaminan, Direktur Operasional & Jaringan, Direktur Keuangan, Investasi, dan MR,Sekper, 3. Ka. SPI,Div. Bisnis 3, Div. Hukum & Kepatuhan, Div. MR dan PUKM,Project Management officer	President Director, Director of Business Guarantee, Director of Operations & Networks, Director of Finance, Investment, and MR, Corporate Secretary, 3. Head of SPI, Business 3 Division, Law & Compliance Division, MR and PUKM Division, Project Management officer	Direktur MSDM, Umum, dan Kepatuhan dikarenakan terdapat kegiatan yg tidak dapat d tinggalkan Director of HRM, General Affair, and Compliance because there are activities that cannot be abandoned

Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Rapat	Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Directors Who Are Not Present, and Reasons for Absence
21 Agustus 2019 & Gedung Jamkrindo August 21, 2019 & Building Jamkrindo	Pemaparan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Juli 2019 Performance Achievement Evaluation Perum Jamkrindo in July 2019	Seluruh Direksi, Sekper/Ka. SPI/ Kepala Divisi,Seluruh Kepala Desk,Project Management officer,Financial Advisor	All Directors, Corporate Secretary/Chief of SPI/Head of Division, All Head of Desk, Project Management officer, Financial Advisor	
	Pembahasan Penjaminan *Showroom Financing BCA Finance* Showroom Financing Guarantee BCA Finance	Seluruh Direksi,Sekper,Kadiv. Klaim,Kadiv. Teknik & Administrasi Bisnis,Kadiv. MSDM,Kadiv. Penunjang Bisnis, Kepala Desk Subrogasi	All Directors, Corporate Secretary, Head of Claims Division, Head of Engineering & Administration Business Division, Head of HRM Division, Head of Business Support Division, Head of the Subrogation Desk	
29 Agustus 2019 August 29, 2019	Pembahasan Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Penagihan IJP KUR Subsidi Bunga Instructions Circular Letter Discussion of Billing Implementation IJP KUR Interest Subsidies	Seluruh Direksi,Sekper, Kadiv. Teknik & Administrasi Bisnis,Kadiv. Bisnis 1,Kadiv. TI,Kadiv. Akuntansi,Kadiv. Keuangan & Investasi,Kadiv. Klaim,Kadiv. Hukum & Kepatuhan,Project Management Officer	All Directors, Corporate Secretary, Head of Engineering & Administration Business Division, Head of Business 1 Division, Head of IT Division, Head of Accounting Division, Head of Finance & Investment Division, Head of Claims Division, Head of Law & Compliance Division, Project Management Officer	
	Pemaparan Hasil Penyusunan Kajian Anak Perusahaan Penjaminan Ulang (Re-Guarantee) Disclosure Preparation of Subsidiary Guarantee Company Re-Guarantee review	Seluruh Direksi,Sekper/SPI/ Kepala Divisi,Kepala Desk,Project Management Officer	All Directors, Corporate Secretary/SPI/Head of Division, Head Desk, Project Management Officer	
	Pembahasan Blueprint dan Roadmap Manajemen Risiko Tahun 2020-2024 Discussion Blueprint and Roadmap Risk Management 2020-2024	Seluruh Direksi,Sekper, Kadiv. MR & PUMKM,Project Management Officer	All Directors, Corporate Secretary, Head of MR & PUMKM Division, Project Management Officer	
11 September 2019 & Gedung Jamkrindo September11, 2019 & Building Jamkrindo	Presentasi Materi *Branch Manager Development Program* Material Presentation of Branch Development Manager Program	Seluruh Direksi, Kadiv. Bisnis 1, Kadiv. Bisnis 2,Kadiv. Bisnis 3,Kadiv. Keuangan,Konsultan	All Directors, Head of Business 1 Division, Head of Business 2 Division, Head of Business 3 Division, Head of Finance Division, Consultant	

Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Rapat	Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Directors Who Are Not Present, and Reasons for Absence
20 September 2019 & Gedung Jamkrindo September 20, 2019 & Building Jamkrindo	*Blueprint* dan *Roadmap* Manajemen Risiko Tahun 2020-2024. Blueprint and Risk Management Roadmap for 2020-2024.	1. Direksi 2. Sekper 3. Kadiv. MR & PUMKM 4. Project Management Officer	1. Directors 2. Corporate Secretary 3. Head of Division MR & PUMKM 4. Project Management Officer	
	Pembahasan Penyesuaian Retensi Sendiri Program Reasuransi Produk Eksisting Discussion on Adjustment of Own Retention of Existing Product Reinsurance Program	1. Direksi 2. Sekper 3. Kadiv. Bisnis 2 4. Kadiv. MR & PUMKM 5.Kadiv. Hukum & Kepatuhan 6.Project Management Officer	1. Directors 2. Corporate Secretary 3. Head of Business 2 Division 4. Head of MR & PUMKM Division 5. Head of Law & Compliance Division 6. Project Management Officer	
	Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Pembayaran IJP KUR Tahun 2014 Continue Discussion of Settlement KUR IJP Payment Year 2014	1. Direksi 2. Sekper 3. Kadiv. TAB 4. Kadiv. Bisnis 1 5. Kadiv. Klaim 6. Kadiv. Akuntansi 7. Kadiv. TI 8. Kadiv. MR & PUKM 9. Kadiv. Hukum & Kepatuhan 10.Project Management Officer	1. Directors 2. Corporate Secretary 3. Head of TAB Division 4. Head of Business 1 Division 5. Head of Claim Division 6. Head of Accounting Division 7. Head of TI Division 8. Head of MR & PUKM Division 9. Head of Law & Compliance Division 10. Project Management Officer	
	Pembahasan Rancangan Perdir tentang Pemberian Bantuan Hukum (Advokasi) dalam Rapat Direksi Plan Discussion through Director Regulation about Providing Assistance Law (Advocacy) in Directors Meeting	1. Direksi 2. Sekper 3. Kadiv Hukum & Kepatuhan 4. Project Management Officer	1. Directors 2. Corporate Secretary 3. Legal & Compliance Office 4. Project Management Officer	
25 September 2019 & Gedung Jamkrindo September 25, 2019 & Building Jamkrindo	Pembahasan MSDM HRM Discussion	1. Direksi 2. Sekper 3. Kadiv. MSDM	1. Directors 2. Corporate Secretary 3. Head of HRM Division	
	Pembahasan Rancangan Perdir tentang Pemberian Bantuan Hukum (Advokasi) dalam Rapat Direksi Plan Discussion through Director Regulation about Providing Assistance Law (Advocacy) in Directors Meeting	1. Direksi 2. Sekper 3. Kadiv. Hukum & Kepatuhan 4. Project Management Officer	1. Directors 2. Corporate Secretary 3. Head of Law & Compliance Division 4. Project Management Officer	

Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Rapat	Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Directors Who Are Not Present, and Reasons for Absence
	a. Pembahasan EBA SP (Efek Beraguna Aset-Surat Partisipasi) PT Sarana Multigriya Finansial EBA discussion SP (Participant Asset Backed Securities) PT Sarana Multigriya Financial b. Penjaminan Pembayaran Suretybond Distribusi Semen KWSG (Koperasi Warga Semen Gresik) Guarantee Payment Suretybond Distribution Semen KWSG (Citizens Cooperative Semen Gresik)	1. Direksi 2. Sekper 3. Kadiv. Bisnis 3 4. Kadiv. Klaim 5. Kadiv. Teknik Administrasi Bisnis 6. Kadiv. Penunjang Bisnis 7. Kadiv. MR & PUMKM 8. Kadiv. Hukum & Kepatuhan 9. Kadesk. Subrogasi 10.Project Management Office	1. Directors 2. Corporate Secretary 3. Head of Business 3 Division 4. Head of Claim Division 5. Head of Engineering Administrative Business Division 6. Head of Business Support Division 7. Head of MR & PUMKM Division 8. Head of Law & Compliance Division 9. Head of Subrogation Desk 10. Project Management Office	
	Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Pembayaran IJP KUR Tahun 2014 Continue Discussion of Settlement KUR IJP Payment Year 2014	1. Direksi 2. Sekper 3. Kadiv. TAB 4. Kadiv. Bisnis 1 5. Kadiv. Klaim 6. Kadiv Akuntansi 7. Kadiv. TI 8. Kadiv. MR & PUMKM 9. Kadiv. Hukum & Kepatuhan 10.Project Management Officer	1. Directors 2. Corporate Secretary 3. Head of TAB Division 4. Head of Business 1 Division 5. Head of Claim Division 6. Head of Accounting Division 7. Head of IT Division 8. Head of MR & PUMKM Division 9. Head of Law & Compliance Division 10. Project Management Officer	
11 Oktober 2019 & Gedung Jamkrindo October 11, 2019 & Building Jamkrindo	Penyampaian Hasil Kinerja SPI Submission of SPI Performance Results	1. Direksi 2. Kepala SPI	1. Directors 2. Head of SPI	
	Pembahasan Pemaparan Juklak Keagenan Exposure Discussion on agency operational guidelines	1. Direksi 2. Sekper 3. Kadiv. Penunjang Bisnis 4. Kadiv. Bisnis 1 5. Kadiv. Bisnis 2 6. Kadiv. Bisnis 3 7. Kadiv. MR & PUMKM 8. Kadiv. Hukum & Kepatuhan 9. Kepala Desk Bisnis Penj. Syariah 10. Kepala Desk SRG 11. Project Management Officer	1. Directors 2. Corporate Secretary 3. Head of Business Support Division 4. Head of Business 1 Division 5. Head of Business 2 Division 6. Head of Business 3 Division 7. Head of MR & PUMKM Division 8. Head of Law & Compliance Division 9. Head of Sharia Business Guarantee Division 10. Head of SRG Desk 11. Project Management Officer	

Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Rapat	Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Directors Who Are Not Present, and Reasons for Absence
24 Oktober 2019 & Gedung Jamkrindo October 24, 2019 & Building Jamkrindo	Pembahasan RKAP 2020 Discussion on RKAP 2020	1. Sekper 2. Kepala SPI 3. Para Kepala Divisi 4. Para Kepala Desk 5. Project Management Officer	1. Corporate Secretary 2. Head of SPI 3. Division Heads 4. Desk Heads 5. Project Management Officer	
11 November 2019 & Gedung Jamkrindo November 11, 2019 & Building Jamkrindo	Program Pengembangan BOD-1 *(Minus One)* *BOD-1 (Minus One) Development Program*	1. Direksi 2. Sekper 3. Kadiv MSDM 4. Project Management Officer	1. Directors 2. Corporate Secretary 3. Department of HRM 4. Project Management Officer	
	Alternatif Dokumen Klaim KUR Gen2 Pembahasan Komite Klaim Telkom Di Kantor Cabang Khusus Jakarta Alternative KUR Claim Document Gen 2 Discussion of Telkom's Claim Committee at the Special Branch Office Jakarta	1. Direksi 2. Sekper 3. Divisi Bisnis 1 4. Divisi Manajemen Risiko dan Pemeringkatan UMKM dan Konsultasi Manajemen (PUKM) 5. Divisi Hukum dan Kepatuhan 6. Kantor Cabang Khusus Jakarta 7. Project Management Officer	1. Directors 2. Corporate Secretary 3. Business 1 Division 4. Risk Management Division and MSME Ranking and Management Consultation (PUKM) 5. Legal and Compliance Division 6. Special Branch Offices Jakarta 7. Project Management Officer	
	Asset and Liability Commitee (ALCO) Periode September 2019 Asset and Liability Commitee (ALCO) September 2019 period	1. Direksi 2. Kepala Divisi Bisnis 1 3. Kepala Divisi Bisnis 2 4. Kepala Divisi Bisnis 3 5. Kepala Divisi Penunjang Bisnis 6. Kepala Desk Bisnis Penjaminan Syariah 7. Kepala Desk Penjaminan Sistem Resi Gudang 8. Kepala Divisi Keuangan dan Investasi 9. Kepala Divisi Akuntansi 10. Kepala Divisi Teknik dan Administrasi Bisnis 11. Kepala Divisi Jaringan dan Layanan 12. Kepala Divisi Klaim 13. Kepala Desk Subrogasi 14. Project Management Officer	1. Directors 2. Head of Business 1 Division 3. Head of Business 2 Division 4. Head of Business 3 Division 5. Head of Support Business Division 6. Head of Sharia Guarantee Business Desk 7. Head of Warehouse Receipt System Guarantee Desk 8. Head of Finance and Investment Division 9. Head of Accounting Division 10. Head of Engineering and Business Administration 11. Head of Network Division and Service 12. Head of Claim Division 13. Head of the Subrogation Desk 14. Project Management Officer	

Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Rapat	Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Directors Who Are Not Present, and Reasons for Absence
21 November 2019 & Gedung Jamkrindo November 21 2019 & Building Jamkrindo	Pengaturan dalam Peraturan Direksi Beban Penagihan Subrogasi Regulations in the Board of Directors' Regulation for Subrogation Billing Charges	1. Direksi 2. Sekper 3. Divisi Hukum dan Kepatuhan 4. Divisi Klaim 5. Divisi Akuntansi 6. Divisi Keuangan dan Investasi 7. Divisi Penunjang Bisnis 8. Project Management Officer	1. Directors 2. Corporate Secretary 3. Legal and Compliance Division 4. Claim Division 5. Accounting Division 6. Finance and Investment Division 7. Business Support Division 8. Project Management Officer	
	Asset and Liability Commitee (ALCO) Periode Oktober 2019 Asset and Liability Commitee (ALCO) for October 2019	1. Direksi 2. Sekper 3. Kepala Divisi Bisnis 1 4. Kepala Divisi Bisnis 2 5. Kepala Divisi Bisnis 3 6. Kepala Divisi Penunjang Bisnis 7. Kepala Desk Bisnis Penjaminan Syariah 8. Kepala Desk Penjaminan Sistem Resi Gudang 9. Kepala Divisi Keuangan dan Investasi 10. Kepala Divisi Akuntansi 11. Kepala Divisi Teknik dan Administrasi Bisnis 12. Kepala Divisi Jaringan dan Layanan 13. Kepala Divisi Klaim 14. Kepala Desk Subrogasi 15. Project Management Officer	1. Directors 2. Corporate Secretary 3. Head of Business Division 1 4. Head of Business Division 2 5. Head of Business Division 3 6. Head of Business Support Division 7. Head of Sharia Guarantee Business Desk 8. Head of Warehouse Receipt System Guarantee Desk 9. Head of Finance and Investment Division 10. Head of Accounting Division 11. Head of Engineering and Business Administration Division 12. Head of Network and Service Division 13. Head of Claim Division 14. Head of the Subrogation Desk 15. Project Management Officer	
26 November 2019 & Gedung Jamkrindo November 26, 2019 & Building Jamkrindo	Rapat Direksi Lanjutan tgl 21 November 2019 Continued Board of Directors Meeting on November 21, 2019			
	Pengaturan dalam Peraturan Direksi Beban Penagihan Subrogasi Regulations in the Board of Directors' Regulation for Subrogation Billing Charges	1. Direksi 2. Sekper 3. Divisi Hukum dan Kepatuhan 4. Divisi Klaim 5. Divisi Akuntansi 6. Divisi Keuangan dan Investasi 7. Divisi Penunjang Bisnis 8. Project Management Officer	1. Directors 2. Corporate Secretary 3. Legal and Compliance Division 4. Claim Division 5. Accounting Division 6. Finance and Investment Division 7. Business Support Division 8. Project Management Officer	

Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Rapat	Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Directors Who Are Not Present, and Reasons for Absence
	Asset and Liability Commitee (ALCO) Periode Oktober 2019 Asset and Liability Commitee (ALCO) for October 2019	1. Direksi 2. Sekper 3. Kepala Divisi Bisnis 1 4. Kepala Divisi Bisnis 2 5. Kepala Divisi Bisnis 3 6. Kepala Divisi Penunjang Bisnis 7. Kepala Desk Bisnis Penjaminan Syariah 8. Kepala Desk Penjaminan Sistem Resi Gudang 9. Kepala Divisi Keuangan dan Investasi 10. Kepala Divisi Akuntansi 11. Kepala Divisi Teknik dan Administrasi Bisnis 12. Kepala Divisi Jaringan dan Layanan 13. Kepala Divisi Klaim 14. Kepala Desk Subrogasi 15. Project Management Officer	1. Directors 2. Corporate Secretary 3. Head of Business Division 1 4. Head of Business Division 2 5. Head of Business Division 3 6. Head of Supporting Business Division 7. Head of Sharia Guarantee Business Desk 8. Head of the Warehouse Receipt System Guarantee Desk 9. Head of Finance and Investment Division 10. Head of Accounting Division 11. Head of Engineering and Business Administration Division 12. Head of Network and Service Division 13. Head of Claim Division 14. Head of the Subrogation Desk 15. Project Management Officer	
18 Desember 2019 & Gedung Jamkrindo December 18, 2019 & Building Jamkrindo	1. Usulan desain renovasi gedung Jamkrindo Bandung; Proposed design of the Bandung Jamkrindo building renovation; 2. Renovasi gedung KCK di kuningan Renovating KCK building in Kuningan	1. Direksi 2. Sekper 3. Divisi Umum 4. Divisi Jaringan dan Layanan 5. Kantor Cabang Khusus Jakarta	1. Directors 2. Corporate Secretary 3. General Affair Division 4. Network and Service Division 5. Special Branch Offices Jakarta	

REKAPITULASI DAN TINGKAT KEHADIRAN DIREKSI DALAM RAPAT INTERNAL

RECAPITULATION AND ATTENDANCE OF DIRECTORS AT INTERNAL MEETINGS

Jabatan	Position	Nama Name	Jumlah Wajib Rapat Total Required Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absences	% Kehadiran % of Attendance
Direktur Utama	President Director	Randi Anto	31	29	2	93,54%
Direktur Bisnis Penjaminan	Director of Business of Guarantee	Amin Masudi	31	30	1	96,77%
Direktur Operasional dan Jaringan	Director of Operations and Network	Kadar Wisnuwarnaman	31	30	1	96,77%
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan	Director of HRM, General Affairs, and Compliance	Sulis Usdoko	31	28	3	90,32%
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko	Director of Finance, Investment and Risk Management	I. Rusdonobanu	31	29	2	93,54%
Rata-rata / Average						**94,19%**

TRANSPARANSI HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEWAN PENGAWAS , DIREKSI, DAN PEMILIK MODAL INFORMASI TENTANG PEMILIK MODAL HINGGA NAMA PEMILIK AKHIR

Pemilik Modal Perum Jamkrindo adalah Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kepemilikan sebesar 100,00%.

TRANSPARENCY OF AFFILIATION BETWEEN THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL, BOARD OF DIRECTORS AND CAPITAL OWNERS

Information about the Capital Owner and the Name of Capital Owner The capital owner of Perum Jamkrindo is the Republic of Indonesia, represented by the Government of the Republic of Indonesia / the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) with 100.00% of ownership.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN PENGAWAS, DAN PEMILIK MODAL

Tabel di bawah ini menunjukkan hubungan hubungan afiliasi antara Dewan Pengawas, Direksi, dan Pemilik Modal. Bentuk hubungan afiliasi mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/ istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsbnya, maupun hubungan lainnya yang dapat menimbulkan hubungan yang istimewa, seperti yang diuraikan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

DISCLOSURE OF AFFILIATION BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL, AND CAPITAL OWNERS

The table below shows the affiliation between the Board of Supervisor Council, Board of Directors, and Capital Owners. The form of affiliation includes a special relationship which is mainly due to blood relationship such as husband/wife/ children/parents/siblings/in-laws, etc., as well as other relationships that can lead to particular relationships, as described in the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 7 concerning Disclosure of Affiliated Parties.

HUBUNGAN AFILIASI DENGAN

AFFILIATINS WITH

Jabatan Position	**Nama** Name	**Dewan Pengawas** Board of Supervisor Council	**Direksi** Board of Directors	**Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemilik Modal** The Government of the Republic of Indonesia as the Capital Owner
Dewan Pengawas / Board of Supervisor Council				
Ketua Dewan Pengawas merangkap Dewan Pengawas Independen The Chairman of the Board of Supervisor Council Concurrent of Independent Board of Supervisor Council	Sri Mulyanto	X	X	X
Anggota Dewan Pengawas Member of Board of Supervisor Council	Ari Wahyuni	X	X	X
Anggota Dewan Pengawas Member of Board of Supervisor Council	Diah Natalisa	X	X	X
Anggota Dewan Pengawas Member of Board of Supervisor Council	Noor Ida Khomsiyati	X	X	X
Dewan Pengawas Independen Independent Board of Supervisor Council	M. Muchlas Rowi	X	X	X

Jabatan Position	Nama Name	Dewan Pengawas Board of Supervisor Council	Direksi Board of Directors	Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemilik Modal The Government of the Republic of Indonesia as the Capital Owner
Direksi / Board of Directors				
Direktur Utama President Director	Randi Anto	X	X	X
Direktur Bisnis Penjaminan Director of Business of Guarantee	Amin Masudi	X	X	X
Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network	Kadar Wisnuwarnaman	X	X	X
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan Director of HRM, General Affairs, and Compliance	Sulis Usdoko	X	X	X
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko Director of Finance, Investment and Risk Management	I. Rusdonobanu	X	X	X

✓ = ada / yes X = tidak ada / no

Sebagaimana peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya sebagaimana tercantum dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan pembubaran BUMN;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 jo. Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin;
6. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan sebagaimana tercantum dalam *Board Manual* dan *Code of Conduct*.

Dewan Pengawas telah menandatangani surat pernyataan berkenaan dengan kepemilikan saham, hubungan keluarga, hubungan keuangan, serta aktivitas yang dapat menimbulkan dan mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest rule*).

As the laws and regulations and other legal regulations as stated in:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Government Regulation Number 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision and Dissolution of SOEs;
3. Government Regulation Number 35 of 2018 concerning Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia/ Public Corporation of Indonesian Credit Guarantee;
4. Regulation of the State Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01 / MBU / 2011 jo. Number PER-09 / MBU / 2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
5. Financial Services Authority Regulation No. 3 / POJK.05 / 2017 concerning Good Corporate Governance for the Guarantee Institution;
6. Corporate Governance Policies, as stated in the Board Manual and Code of Conduct.

The Board of Supervisor Council has signed a statement regarding the shares ownership, family relations, financial relations, and activities that may cause and contain a potential conflict of interest rule.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Hubungan kepengurusan anggota Dewan Pengawas dan Direksi pada perusahaan lain di luar Perum Jamkrindo periode tahun 2019 sebagai berikut:

TRANSPARENCY OF CONCURRENT POSITION OF THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL AND BOARD OF DIRECTORS

The management relationship of the members of the Board of Supervisor Council and Board of Directors in other companies outside Perum Jamkrindo in 2019 was as follows:

Jabatan Position	Nama Name	Kepengurusan pada Perusahaan Lain Concurrent Position in Other Companies	
		Sebagai Anggota Dewan Pengawas As a member of the Board of Supervisor Council	Sebagai Anggota Direksi As a member of the Board of Directors
Dewan Pengawas / Board of Supervisor Council			
Ketua Dewan Pengawas merangkap Dewan Pengawas Independen The Chairman of the Board of Supervisor Council Concurrent of Independent Board of Supervisor Council	Sri Mulyanto	X	X
Anggota Dewan Pengawas Member of Board of Supervisor Council	Ari Wahyuni	X	X
Anggota Dewan Pengawas Member of Board of Supervisor Council	Diah Natalisa	X	X
Anggota Dewan Pengawas Member of Board of Supervisor Council	Noor Ida Khomsiyati	X	X
Dewan Pengawas Independen Independent Board of Supervisor Council	M. Muchlas Rowi	X	X
Direksi / Board of Directors			
Direktur Utama / President Director	Randi Anto	X	X
Direktur Bisnis Penjaminan Director of Business of Guarantee	Amin Masudi	X	X
Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network	Kadar Wisnuwarnaman	X	X
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan Director of HRM, General Affairs, and Compliance	Sulis Usdoko	X	X
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko Director of Finance, Investment and Risk Management	I. Rusdonobanu	X	X

✓ = ada / yes x = tidak ada / no

ORGAN PENDUKUNG DEWAN PENGAWAS

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretaris Dewan Pengawas yang berfungsi melaksanakan kegiatan protokoler dan kesekretariatan Perusahaan.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan PER-12/MBU/2012 bagian ketiga Pasal 5 masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pejabat Sekretaris Dewan Pengawas

Sekretaris Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-05/DP-JAMKRINDO/XI/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, Pejabat Sekretaris Dewan Pengawas dipercayakan kepada Alvin Nur Widjajanti.

SUPPORTING ORGANS OF BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL

SECRETARY OF THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL

To assist the implementation of its duties, the Board of Supervisor Council is assisted by the Secretary of the Board of Supervisor Council, whose function is to carry out Company's protocol and secretariat activities.

Term of Office

Based on PER-12 / MBU / 2012 Section 3 of Article 5, the term of office of the Secretary and Secretariat Staff of the Board of Commissioners/ Board of Supervisor Council is determined by the Board of Commissioners/ Board of Supervisor Council for a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years without prejudice to the right of the Board of Supervisor Council to dismiss him/her at any time.

The Secretary of the Board of Supervisor Council

The Secretary of the Board of Supervisor Council is appointed and dismissed by the Board of Supervisor Council. Based on the Decree of the Board of Supervisor Council No. KEP-05 / DP-JAMKRINDO / XI / 2017 dated November 1, 2017, concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary of the Board of Supervisor Council at Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Public Corporation of Indonesian Credit Guarantee), the Secretary of the Board of Supervisor Council was entrusted to Mr. Alvin Nur Widjajanti.

60 tahun years old
JAKARTA
5 Novemberi November 5, 1959

Alvin Nur Widjajanti

Sekretaris Dewan Pengawas / Secretary of the Board of Supervisor Council

Periode Jabatan: 1 November 2017 - 31 Oktober 2020, Periode Pertama
Term of Office: November 2017 - 31 Oktober 2020, First Period

PENDIDIKAN / EDUCATION

Sarjana (S1) Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Trisakti, Jakarta (1995), dan /Bachelor of Civil Engineering, Trisakti University, Jakarta (1995), and Pasca Sarjana (S2) Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997) / Master of Management, Gadjah Mada University, Yogyakarta (1997)

PENGALAMAN KERJA /WORK EXPERIENCES

Telah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada beberapa BUMN, di antaranya PT Taman Wisata Candi BP dan RB (2003-2013), PT Perikanan Nusantara (2008-2013), PT Asuransi Jiwasraya (2013-2017). Sejak 2015 menjabat sebagai Kepala Subbidang Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan I, Kementerian BUMN

He has served as Secretary of Board of Commissioners/ Supervisory Board in several SOEs, such as PT Taman Wisata Candi BP and RB (2003-2013), PT Perikanan Nusantara (2008-2013), PT Asuransi Jiwasraya (2013-2017). Since 2015 he has served as Sub Division Head of Financial Services, Survey Services and Consultant I, the Ministry of SOEs

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Tugas Sekretaris Dewan Pengawas

Pelaksanaan kegiatan tugas Sekretaris Dewan Pengawas mengacu pada Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 Pasal 4, yang meliputi:

i. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Pengawas;

ii. Membuat risalah rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;

iii. Mengadministrasikan dokumen Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;

iv. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas;

v. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Pengawas;

vi. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas.

Selain melaksanakan tugas di atas, Sekretaris Dewan Pengawas selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:

1. Memastikan bahwa Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundangundangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas;
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Pengawas dengan pihak lain.

Kebijakan Remunerasi bagi Sekretaris Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas No. Kep-05/DP/Jamkrindo/XI/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, memutuskan:

1. Honorarium per bulan sebesar Rp18.000.000
2. Tunjangan Transportasi Rp1.300.000

Duties of the Secretary of the Board of Supervisor Council

The implementation of the duties of the Secretary of the Board of Supervisor Council refers to SOEs Ministerial Regulation no. PER-12 / MBU / 2012 Article 4, which includes:

i. Preparing meetings, including briefing sheets for the Board of Supervisor Council;

ii. Making minutes of the Board of Supervisor Council meeting in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association;

iii. Administering the Board of Supervisor Council documents, regarding incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;

iv. Preparing the draft of Board of Supervisor Council Work Plan and Budget;

v. Compiling the Report Drafts of the Board of Supervisor Council;

vi. Carrying out other duties from the Board of Supervisor Council.

In addition to carrying out the above duties, the Secretary of the Board of Supervisor Council as the Head of the Secretariat carries out other duties in the form of:

1. Ensuring that the Board of Supervisor Council complies with the laws and regulations and applies GCG principles;
2. roviding information needed by the Board of Supervisor Council periodically and/or at any time when requested;
3. Coordinating Committee members, if needed in order to expedite the duties of the Board of Supervisor Council;
4. As a liaison officer for the Board of Supervisor Council with other parties.

Remuneration Policy for the Secretary of the Board of Supervisor Council

Based on the Board of Supervisor Council Decree No. Kep-05 / DP / Jamkrindo / XI / 2017 dated November 1, 2017, concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary of the Board of Supervisor Council at Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, decides:

1. The amount of the monthly honorarium is Rp. 18,000,000
2. The transportation Allowance is Rp1,300,000

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Tahun 2019

Kegiatan Sekretariat Dewan Pengawas seiama tahun 2019 antara lain:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat *(briefing sheet)* Dewan Pengawas;
2. Membuat risalah rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas;
5. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Pengawas;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas.

Selain melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Sekretaris Dewan Pengawas selaku pimpinan Sekretariat melaksanakan tugas lain berupa:

1. Memastikan bahwa Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas;
4. Sebagai penghubung *(liaison officer)* Dewan Pengawas dengan pihak lain.

KOMITE AUDIT

Pembentukan Komite Audit serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN; dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.

Komite Audit senantiasa menjalankan tugasnya secara independen dalam membantu Dewan Pengawas memantau kinerja Unit Audit Internal serta Auditor Eksternal yang ditunjuk. Oleh karena itu, Komite Audit diberikan kewenangan

Brief Report on the Implementation of Duties in 2019

The Secretariat Activities of the Board of Supervisor Council for 2019 included:

1. Prepared meetings, including materials for the Board of Supervisor Council's briefing sheet;
2. Made minutes of the Board of Supervisor Council meeting according to the provisions of the Company's Articles of Association;
3. Administered the Board of Supervisor Council documents regarding incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
4. Prepared the draft of the Board of Supervisor Council Work Plan and Budget;
5. Prepared the Report Drafts of the Board of Supervisor Council;
6. Carried out other duties of the Board of Supervisor Council.

In addition to carrying out the above duties, the Secretary of the Board of Supervisor Council as the Head of the Secretariat carried out other duties in the form of:

1. Ensured that the Board of Supervisor Council complied with laws and regulations and applied GCG principles;
2. Provided information needed by the Board of Supervisor Council periodically and/or at any time when requested;
3. Coordinated Committee members, if needed to expedite the duties of the Board of Supervisor Council;
4. As a liaison officer for the Board of Supervisor Council with other parties.

AUDIT COMMITTEE

The establishment of the Audit Committee and the implementation of its duties and responsibilities are based on Government Regulation No. 35 of 2018 concerning Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Public Corporation of Indonesian Credit Guarantee), Government Regulation No. 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of SOEs; and the State Minister of SOEs Regulation No. PER-05 / MBU / 2006 concerning the Audit Committee for SOEs.

The Audit Committee always carries out its duties independently to help the Board of Supervisor Council monitors the performance of the Internal Audit Unit and the appointed External Auditor. Therefore, the Audit Committee

untuk membangun hubungan dengan kedua institusi tersebutmenyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas. Hasil pengawasan berupa temuan maupun rekomendasi dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dewan Pengawas dalam hal pengambilan keputusan.

Piagam Komite Audit

Piagam komite audit berfungsi sebagai panduan (*terms of reference*) bagi Dewan Pengawas dalam memberikan penugasan kepada Komite Audit serta Direksi dan jajarannya dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Komite Audit.

Di mana dalam piagam tersebut dijelaskan bahwa tujuan pembentukan Komite Audit adalah untuk:

1. Membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang diselenggarakan oleh Direksi
2. Mendorong terwujudnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada perusahaan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajaran.

Di dalam piagam Komite Audit, juga telah diatur perihal tugas dan tanggung jawab, wewenang serta kode etik kerahasiaan Komite Audit.

Struktur, Keanggotan, Integritas dan Keahlian, dan Independensi Komite Audit

Struktur, keanggotaan, dan tugas Komite Audit Perum Jamkrindo diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Komite Audit dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari anggota Dewan Pengawas. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Pengawas atau dari luar Perusahaan yang memiliki integritas yang baik dan mempunyai pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan. Selain itu, anggota Komite Audit Perum Jamkrindo mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan serta memahami industri bisnis Perum Jamkrindo. Anggota Komite Audit juga tidak mempunyai potensi benturan kepentingan dengan Perum Jamkrindo.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas Perusahaan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua)

is given the authority to build relationships with the two institutions to submit reports to the Board of Supervisor Council. The supervision results in the form of findings, and recommendations can be taken into consideration for the Board of Supervisor Council's decision making.

Audit Committee Charter

The audit committee charter serves as a guideline (terms of reference) for the Board of Supervisor Council in giving assignments to the Audit Committee and the Board of Directors and staff in assisting the implementation of the Audit Committee's duties.

In the charter, it is explained that the purpose of establishing the Audit Committee is to:

1. Assist the Board of Supervisor Council in carrying out its duties, especially in carrying out supervision of the management of the Company carried out by the Board of Directors
2. Encouraging the realization of Good Corporate Governance in the Company, which is based on the principles of transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.

The Audit Committee charter also regulates the duties and responsibilities, authorities, and code of conduct of the confidentiality of the Audit Committee.

Structure, Membership, Integrity and Expertise, and Independence of Audit Committee

The structure, membership, and duties of the Perum Jamkrindo Audit Committee are regulated in SOEs Ministerial Regulation No. PER-12 / MBU / 2012 dated August 24, 2012, concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners / Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

The Audit Committee is led by a chairman who is a member of the Board of Supervisor Council. Audit Committee members may come from members of the Board of Supervisor Council or from outside the Company who have good integrity and have sufficient work experience in the field of supervision/ inspection. In addition, Perum Jamkrindo Audit Committee members have an accounting or financial education background and understand Perum Jamkrindo's business industry. Audit Committee members also do not have the potential for a conflict of interest with Perum Jamkrindo.

Term of Office

The term of office of Audit Committee member who is not member of the Company's Board of Supervisor Council is 3 (three) years and can be extended 1 (one) time for 2 (two)

tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan dan Profil Anggota Komite Audit

Di tahun 2019 terjadi pergantian keanggotaan Komite Audit. Kronologi pergantian susunan Komite Audit, dan susunan Komite Audit per 31 Desember 2019 dapat dilihat di bawah ini.

SUSUNAN KOMITE AUDIT DI SEPANJANG TAHUN 2019

years of office, without prejudice to the Board of Supervisor Council's right to dismiss him/her at any time.

Composition and Profile of Audit Committee Members

In 2019 there was a change in the membership of the Audit Committee. The chronology of changes in the composition of the Audit Committee, and the composition of the Audit Committee as of December 31, 2019, could be seen below.

CHRONOLOGY OF CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE AUDIT COMMITTEE THROUGHOUT 2019

Nama	Jabatan	Dasar Penunjukan	Periode
Sri Mulyanto	Ketua Komite Audit/Ketua Dewan Pengawas Chaiman of Audit Committee/Chairman of Board of Supervisor Council	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-07/DP-JAMKRINDO/IX/2018 tanggal 5 September 2018 Decree of Board of Supervisor Council No. KEP-07/DP-JAMKRINDO/IX/2018 dated September 5, 2018	Mengikuti masa jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Following his tenure as a Member of Board of Supervisor Council
Noor Ida Khomsiyati	Anggota Komite Audit/ Anggota Dewan Pengawas Member of Audit Committee/Member of Board of Supervisor Council	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-07/DP-JAMKRINDO/IX/2018 tanggal 5 September 2018 Decree of Board of Supervisor Council No. KEP-07/DP-JAMKRINDO/IX/2018 dated September 5, 2018	Mengikuti masa jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Following his tenure as a Member of Board of Supervisor Council
Dody Heriawan Priatmoko	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-06/DP-Jamkrindo/XI/2017 tanggal 15 November 2017 Decree of Board of Supervisor Council No. KEP-06/DP-Jamkrindo/XI/2017 dated November 15, 2017	15 November 2017 - 14 November 2020 November 15, 2017 - November 14, 2020



Sri Mulyanto

Ketua Komite Audit/Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Audit Committee / Chairman of the Supervisory Board

Profil Ketua Komite Audit Sri Mulyanto dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas, dalam bab Profil Perusahaan.

The profile of the Chairman of the Audit Committee, Sri Mulyanto, can be seen in the Profile of the Board of Supervisor Council, in the Company Profile chapter.



Noor Ida Khomsiyati

Anggota Komite Audit/Anggota Dewan Pengawas
Audit Committee Member / Supervisory Board Member

Profil anggota Komite Audit Noor Ida Khomsiyati dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas, dalam bab Profil Perusahaan.

The profile of member of the Audit Committee, Noor Ida Khomsiyati, can be seen in the Profile of the Board of Supervisor Council, in the Company Profile chapter.

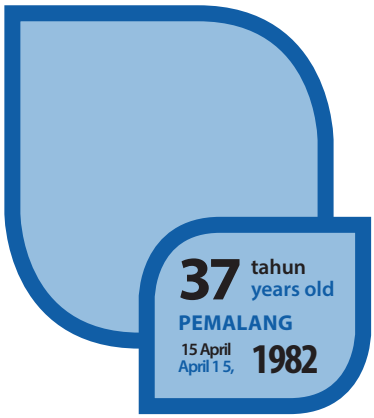

Dody Heriawan Priatmoko

Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee

Periode Jabatan: 15 November 2017 - 14 November 2020
Term of Office: November 15, 2017 - November 14, 2020

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
South Tangerang Region, Banten, Indonesia

PENDIDIKAN / EDUCATION

Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang (2004).
Bachelor of Economics majoring Accounting, Diponegoro University

PENGALAMAN KERJA / WORK EXPERIENCES

Pernah bekerja di Grup Astra (2004-2008), PT Unilever Indonesia Tbk (2008-2009) dan sejak tahun 2009 menjadi pegawai Kementerian BUMN, di mana sejak tahun 2015 hingga kini menjabat Kepala Subbidang Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas I pada Kedeputian Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, serta Ketua Pokja 3 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementrian BUMN (2017-sekarang). Beberapa pengalaman penugasan di BUMN yaitu Staf Sekretariat Dewan Pengawas (2011-2014) dan Sekretaris Dewan Pengawas (2014-2017) di Perum Perhutani.

He worked at Astra Group (2004-2008), PT Unilever Indonesia Tbk (2008-2009), and since 2019 has been an employee at the Ministry of SOEs, where since 2015 until now he has served as Sub Division Head of Minority I State Ownership Portfolio Utilization at Deputy of Business Restructuring and Development, and Chairman of Working Group 3 of Procurement Services Units (ULP) of the Ministry of SOEs (2017-present). Some of the assignment which has been taken in SOEs were as the Secretariat Staff of the Supervisory Board (2011-2014) and the Secretary of the Supervisory Board of Perum Perhutani (2014-2017)

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Transparansi independensi Komite Audit terlihat dalam tabel berikut:

INDEPENDENCE OF AUDIT COMMITTEE

Transparency, Independence of the Audit Committee can be seen in the following table:

Aspek Independensi	Sri Mulyanto	Noor Ida Khomsiyati	Dody Heriawan Priatmoko	Independence aspect
Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan	X	X	X	Do not have blood relations up to the third degree, either in a straight line (directly) or side line (indirectly) or relationships that arise due to marriage
Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung di perusahaan dan perusahaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan	X	X	X	Do not own shares directly or indirectly in the Company and other companies that can cause a conflict of interest
Tidak memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/ata calon/ anggota legislatif dan/atau kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan kepentingan	X	X	X	Do not hold concurrent positions as the administrators of political parties and/or candidates/members of legislative and/ or regional heads and other positions in accordance with statutory provisions that may cause a conflict of interest;
Anggota komite audit yang bukan merupakan anggota dewan pengawas, tidak merangkap sebagai: • anggota Dewan Pengawas pada BUMN/ perusahaan lain; • sekretaris/staf sekretariat Dewan Pengawas Pengawas pada BUMN/ perusahaan lain; • anggota Komite lain pada Perusahaan; dan/atau • anggota Komite pada BUMN/ perusahaan lain.	X	X	X	Audit committee members who are not members of the Board of Supervisor Council do not hold concurrent position as: • member of the Supervisory Board at the other SOEs/ companies; • a secretary/ secretariat staff of the Supervisory Board of the other SOEs / companies; • other Committee members in the Company; and/or • Committee members in another SOEs/ companies.
Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan	X	X	X	Do not have a business relationship, directly or indirectly related to the Company's business activities which may cause a conflict of interest;
Bukan merupakan karyawan kunci yakni orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Pengawas	X	X	X	Not a key employee, namely someone who has the authority and responsibility to plan, lead, or control the Company's activities in the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Supervisor Council;
Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material perusahaan	X	X	X	Do not have personal interests directly or indirectly with the Company material information;
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan/atau jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Pengawas	X	X	X	Not a person employed by a Public Accountant Firm, a Legal Consultant Firm, other party that provides audit services, non-audit services and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Supervisor Council;

√ = ada / yes | x = tidak ada / no

FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 Pasal 12, Komite Audit Perusahaan bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pelaporannya dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

i. Membantu Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Auditor Internal.
ii. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal.
iii. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan Sistem Pengendalian Manajemen serta pelaksanaannya.
iv. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
v. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Pemilik Modal.
vi. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas lainnya.

RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit telah menyelanggarakan rapat yang ditujukan untuk membantu tugas Dewan Pengawas dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan. Rapat Komite Audit di tahun 2018 diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali sepanjang tahun 2019. Kehadiran Komite Audit pada rapat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

FUNCTIONS, DUTIES, AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

according to the Minister of SOEs Regulation No. PER-12 / MBU / 2012 Article 12, The Audit Committee of the Company works collectively and functions to assist the Board of Supervisor Council in carrying out its duties and reporting and is responsible directly to the Board of Supervisor Council. In carrying out its functions, the Audit Committee has the following duties and responsibilities:

i. Assist the Board of Supervisor Council to ensure the Internal Control System's effectiveness and the effectiveness of the implementation of the duties of the External Auditor and Internal Auditor.
ii. Assess the implementation of activities and results of audits carried out by the Internal Audit Unit and the External Auditor.
iii. Provide recommendations regarding improving the management control system, and its implementation.
iv. Ensure that there are satisfactory evaluation procedures for all information released by the Company.
v. Provide recommendations regarding the appointment of Public Accountants and Public Accounting Firm to the Board of Supervisor Council to be submitted to the Capital Owners.
vi. Identify matters that require the Board of Supervisor Council's attention and other Board of Supervisor Council duties.

AUDIT COMMITTEE MEETING

The Audit Committee has held a meeting aimed at assisting the Board of Supervisor Council's duties in overseeing the management of the Company. Audit Committee Meetings in 2019 were held 12 (twelve) times. The attendance of the Audit Committee at the meetings could be seen in the table below.

KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PADA RAPAT
ATTENDANCE OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS IN THE MEETINGS

Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Komite Audit / Audit Committee		
		Sri Mulyanto	Noor Ida Khomsiyati	Dody Heriawan
16 Januari 2019 Januari 16, 2019	Rapat bersama dengan Direktur Bisnis Penjaminan membahas tentang Tindak Lanjut atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2018 Perum Jamkrindo Joint meeting with the Director of Business Guarantee discussed the Follow-up of Government Regulation (PP) Number 35 of 2018 concerning Perum Jamkrindo	✓	✓	✓
17 Januari 2019 January 17, 2019	Rapat bersama Direksi dan Kementerina BUMN dengan agenda Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Pengesahan RKAP Perum Jamkrindo Tahun 2019 Joint Meeting of the Board of Directors and the Ministry of State-Owned Enterprises with the Joint Discussion Meeting agenda of the Ratification of Perum Jamkrindo's RKAP 2019	✓	✓	✓

Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Komite Audit / Audit Committee		
		Sri Mulyanto	Noor Ida Khomsiyati	Dody Heriawan
6 Februari 2019 February 6, 2019	Direktur Keuangan, Investasi, dan Manajemen Risiko membahas tentang Penyelesaian Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 oleh KAP The Director of Finance, Investment, and Risk Management discussed the Audit Completion of Financial Statements for Fiscal Year 2018 by Public Accounting Firm (KAP)	✓	✓	✓
13 Maret 2019 March 13, 2019	Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) Perum Jamkrindo membahas tentang Perkembangan *Assessment* GCG Tahun 2018 The Head of Internal Control Unit (SPI) of Perum Jamkrindo discussed the Development of GCG Assessment in 2018	✓	✓	✓
10 April 2019 April 10, 2019	Rapat bersama Direktur Bisnis Penjaminan membahas tentang Optimalisasi Gearing Ratio Joint meeting of Director of Business Guarantee discussed the Optimization of Gearing Ratio	✓	✓	✓
18 April 2019 April 18, 2019	Rapat bersama Direktur Investasi, Keuangan, dan Manajemen Risiko dan Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia, Umum, dan Kepatuhan membahas tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Jamkrindo Joint meeting of the Director of Investment, Finance and Risk Management and the Director of Human Capital Management, General Affairs and Compliance discussed the Changing of Legal Entity of Perum Jamkrindo	✓	✓	✓
29 April 2019 April 29, 2019	Direktur Investasi, Keuangan, dan Manajemen Risiko membahas tentang Usulan RPB Pengesahan Laporan Tahunan Audited Perum Jamkrindo Tahun Buku 2018 The Director of Investment, Finance, and Risk Management discussed the Proposed RPB on the Ratification of the Perum Jamkrindo's Audited Annual Report 2018	✓	✓	✓
8 Mei 2019 May 8, 2019	Direktur Manajamen Sumber Daya Manusia, Umum, dan Kepatuhan membahas tentang Strategi Percepatan Penyerapan Belanja Modal (Capex) Perum Jamkrindo Tahun 2019 The Director of Human Resources Management, General Affairs and Compliance discussed the Acceleration Strategy of Capital Expenditures (Capex) of Perum Jamkrindo in 2019	✓	✓	✓
12 Juni 2019 June 12, 2019	Rapat bersama Direktur Bisnis Penjaminan membahas tentang Efektivitas Mitigasi Risiko Klaim Penjaminan Kredit Joint meeting of the Director of the Business Guarantee discussed the Mitigation Effectiveness of Credit Guarantee Claim Risk	✓	✓	✓
10 Juli 2019 July 10, 2019	Rapat bersama Direktur Investasi, Keuangan, dan Manajemen Risiko membahas tentang Pembahasan realisasi rencana kerja dan perkembangan kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah sampai dengan Juni 2019 Joint meeting of the Director of Investment, Finance and Risk Management discussed the discussion of the work plan realization and the performance development of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah until June 2019	✓	✓	✓
7 Agustus 2019 Agustus 7, 2019	Rapat bersama Direktur Investasi, Keuangan, dan Manajemen Risiko membahas tentang *Monitoring* terhadap SOP, Implementasi, dan Strategi Pengelolaan Investasi pada Perum Jamkrindo Joint meeting of the Director of Investment, Finance, and Risk Management discussed the Monitoring of SOPs, Implementation, and Investment Management Strategies at Perum Jamkrindo	✓	✓	✓
4 September 2019 September 4, 2019	Rapat bersama Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), Umum dan Kepatuhan membahas tentang upaya peningkatan Kompetensi (*skill, knowledge,* dan *attitude*) SDM Perum Jamkrindo Joint meeting of the Director of Human Resource Management (HRM), General Affairs and Compliance discussed efforts to increase the competency (skill, knowledge, and attitude) of Perum Jamkrindo's Human Capital	✓	✓	✓

REKAPITULASI DAN TINGKAT KEHADIRAN KOMITE AUDIT DALAM RAPAT
RECAPITULATION AND ATTENDANCE LEVEL OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS IN THE MEETINGS

Komite Audit Audit Committee	Komite Audit Audit Committee	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absence	% Kehadiran % of Attendance
Sri Mulyanto Ketua / Chairman	12	12	-	100%
Noor Ida Khomsiyati Anggota / Member	12	12	-	100%
Dody Heriawan Priatmoko Anggota / Member	12	12	-	100%
Rata-rata ***Average***	12	12	-	100%

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KOMITE AUDIT 2019

Komite Audit bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada dewan Pengawas. Program Kerja Komite Audit di tahun 2018 disampaikan pada Desember 2019 kepada Dewan Pengawas dan pelaporannya disampaikan melalui laporan triwulan.

Selama tahun 2019, Komite Audit telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Januari 2019.
2. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Februari 2019.
3. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Maret 2019.
4. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan April 2019.
5. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Mei 2019.
6. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Juni 2019.
7. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Juli 2019.
8. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Agustus 2019.
9. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan September 2019.
10. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Oktober 2019.

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE AUDIT COMMITTEE WORK PROGRAM 2019

The Audit Committee works collectively and functions to assist the Board of Supervisor Council in carrying out its duties. The Audit Committee is independent in carrying out its duties and reporting and directly is responsible to the Board of Supervisor Council. The Audit Committee Work Program in 2019 was submitted in December 2019 to the Board of Supervisor Council, and its reporting was submitted through quarterly reports.

During 2019, the Audit Committee carried out its duties according to applicable regulations, including the following activities:

1. Prepare a review and material for the January 2019 Board of Supervisors' meeting.
2. Prepare a review and material for the February 2019 Board of Supervisors' meeting.
3. Prepare a review and material for the March 2019 Board of Supervisors' meeting.
4. Prepare a review and material for the April 2019 Board of Supervisors' meeting.
5. Prepare a review and material for the May 2019 Board of Supervisors' meeting.
6. Prepare a review and material for the June 2019 Board of Supervisors' meeting.
7. Prepare a review and material for the July 2019 Board of Supervisors' meeting.
8. Prepare a review and material for the August 2019 Board of Supervisors' meeting.
9. Prepare a review and material for the September 2019 Board of Supervisors' meeting.
10. Prepare a review and material for the October 2019 Board of Supervisors' meeting.

11. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan November 2019.
12. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Desember 2019.
13. Melakukan pendampingan atas kunjungan Dewas Pengawas ke lapangan.
14. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan audit Laporan Keuangan tahun buku 2019 yang dilaksanakan oleh KAP Hertanto, Grace dan Karunawan.
15. Membantu Dewan Pengawas dalam proses pengadaan dan pengusulan KAP audit tahun buku 2019 untuk ditetapkan oleh Menteri BUMN.
16. Melakukan review terhadap kegiatan pengendalian inernal yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern serta memberi tanggapan/masukan terkait temuan-temuan penting SPI dan temuan-temuan dari pihak eksternal seperti BPK-RI, OJK, dan Lainnya.
17. Melakukan telaah atas Laporan Manajemen Triwulan IV Tahun 2018 Perum Jamkrindo.
18. Melakukan telaahan atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2019 Perum Jamkrindo.
19. Melakukan telaahan atas Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2019 Perum Jamkrindo.
20. Melakukan telaahan atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2019 Perum Jamkrindo.
21. Melakukan telaahan atas *Assesment Good Corporate Governance*, dan Pedoman Perilaku Perusahaan.
22. Melakukan telaahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum Jamkrindo Tahun 2019.

KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI KOMITE AUDIT

Remunerasi anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan, dengan besaran maksimal 20% dari gaji Direktur Utama. Anggota Dewan Pengawas yang menjadi Ketua/anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.

Kepada anggota Komite Audit yang bukan merupakan Dewan Pengawas, Perusahaan memberikan kebijakan remunerasi sebagai berikut:

1. Honorarium per bulannya Rp29.000.000.
2. Tunjangan Hari Raya per tahunnya 1x Honorarium

11. Prepare a review and material for the November 2019 Board of Supervisors' meeting.
12. Prepare a review and material for the December 2019 Board of Supervisors' meeting.
13. Provide assistance on the visit of the Supervisory Board to the site.
14. Monitor and evaluate the implementation of the 2019 financial statement audit conducted by Hertanto, Grace and Karunawan Public Accounting Firm.
15. Assist the Supervisory Board in the procurement and proposal of the Public Accounting Firm for the audit year 2019 to be stipulated by the Minister of SOEs.
16. Review internal control activities carried out by the Internal Audit Unit and provide feedback / input regarding important findings by the unit, or other findings from external parties such as the Financial Service Authority, Audit Board of the Republic of Indonesia and others.
17. Conduct a review of the 4th Quarter Management Report of Perum Jamkrindo in 2019.
18. Conduct a review of the 1st Quarter Management Report of Perum Jamkrindo of 2019.
19. Conduct a review of the 2nd Quarter Management Report of Perum Jamkrindo of 2019.
20. Conduct a review of the 3rd Quarter Management Report of Perum Jamkrindo of 2019.
21. Conduct a review of Good Corporate Governance Assessment, and Company Code of Conduct.
22. Conduct a review of the Jamkrindo Corporate Work Plan and Budget (RKAP) in 2019.

REMUNERATION POLICY FOR THE AUDIT COMMITTEE

The Board of Supervisor Council determines the remuneration of Audit Committee members by taking into account the capability of the Company, with a maximum amount of 20% of the salary of the President Director. Members of the Board of Supervisor Council, who are Chairman/members of the Audit Committee, are not given additional income from the position other than income as a member of the Board of Supervisor Council.

To members of the Audit Committee who are not the Board of Supervisor Council, the Company provides the following remuneration policies:

1. A monthly honorarium of Rp.29,000,000.
2. Religious Holiday Allowance per year of 1 (one) month amount of honorarium

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Perum Jamkrindo tidak memiliki komite tersendiri terkait fungsi nominasi dan remunasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi. Mekanisme nominasi dan pengangkatan sepenuhnya menjadi wewenang Kementerian BUMN sebagai Pemilik Modal. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dan juga Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor: Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas berwenang membentuk Komite selain Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

1. Pengangkatan

   Mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 yaitu dengan terlebih dahulu menominasikan beberapa calon yang berasal dari berbagai sumber seperti mantan Direksi BUMN, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN, Pejabat Struktual maupun Fungsional serta dari sumber lain.

   Mekanisme pengangkatan selanjutnya adalah melakukan penjaringan dengan Menteri BUMN, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/atau Deputi yang bertindak sebagai penanggung jawab.

   Setelah didapatkan kandidat calon Dewan Pengawas, selanjutnya Deputi melakukan pengadministrasian terhadap masing-masing kandidat. Setelah pengadministrasian dirampungkan, Deputi melakukan penilaian serta evaluasi terhadap seluruh kandidat calon anggota Dewan Pengawas dengan mengacu kepada kualifikasi yang sudah ditetapkan. Rekomendasi yang diberikan setelah hasil penilaian dan evaluasi berupa pernyataan kualitatif yaitu, "Disarankan" atau"Tidak Disarankan".

   Bagi kandidat calon yang mendapatkan kriteria "Disarankan" dapat diusulkan untuk kemudian ditetapkan menjadi anggota Dewan Pengawas Perusahaan. Dalam aturan ini, anggota Dewan Pengawas dilarang untuk melakukan rangkap jabatan.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Nomination and Remuneration Functions

Perum Jamkrindo does not have its own committee related to the nomination and remuneration function for the Board of Supervisor Council and Board of Directors. The nomination and appointment mechanism is fully the authority of the Ministry of SOEs as the Capital Owner. It is in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 35 the Year 2018 concerning Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia/ Public Corporation of Indonesian Credit Guarantee and also the State Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: Per-12 / MBU / 2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises which states that the Board of Supervisor Council has the authority to establish a Committee other than Audit Committee if deemed necessary by taking into account the capability of the Company.

PROCEDURE FOR APPOINTMENT AND DISMISSAL OF MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL

1. Appointment

   The mechanism for the appointment of the Board of Supervisor Council is based on the Ministry of SOEs Decree No. PER-02 / MBU / 02/2015, namely by first nominating several candidates from various sources such as former SOEs Board of Directors, Board of Commissioners or SOEs Supervisory Board, Structural and Functional Officials as well as from other sources.

   The next appointment mechanism is conducting a screening with the Minister of SOEs, the Secretary, Technical Deputy, and/or Deputy in charge.

   After obtaining the candidates for the Board of Supervisor Council, the Deputy then administers each candidate. After the administration has been completed, the Deputy conducts an assessment and evaluation of all candidates for Board of Supervisor Council using the predetermined qualifications as its reference. Recommendations given after the results of the assessment and evaluation are in the form of qualitative statements, such as "Recommended" or "Not Recommended".

   Candidates who get the "Recommended" criteria can be proposed and then set to become members of the Company's Board of Supervisor Council. In this regulation, members of the Board of Supervisor Council are prohibited from holding concurrent positions.

Untuk itu, terdapat ketentuan bahwa kandidat terpilih diwajibkan menandatangani surat pengunduran diri dari jabatan sebelumnya semenjak ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengawas Perusahaan. Jika dalam waktu yang telah ditetapkan anggota Dewan Pengawas tidak melaksanakan ketentuan tersebut, secara otomatis masa jabatan yang bersangkutan berakhir pada saat itu.

2. Pemberhentian

   Dalam ketentuan ini, Dewan Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan berbagai alasan baik atas permintaan pribadi maupun alasan-alasan lain terkait seperti pelanggaran ketentuan kebijakan internal dan hukum, serta tidak terpenuhinya tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan. Dewan Pengawas Perusahaan juga dapat diberhentikan oleh Menteri BUMN dalam rangka restrukturisasi atau memasuki masa usia pensiun Aparatur Sipil Negara.

   Mekanisme pemberhentian diawali dengan pelaksanaan evaluasi terhadap anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan oleh Deputi Teknis berkoordinasi dengan Sekretaris. Setelah melakukan evaluasi, Deputi Teknis mengajukan usulan kepada Mentri BUMN guna mendapatkan penetapan. Penyampaian usulan pemberhentian disertai dengan penjelasan alasan pemberhentian dan konsep surat Menteri tentang pemberhentian.

   Selain mendapatkan usulan dari Deputi Teknis dan Sekretaris sebagaimana yang dijabarkan sebelumnya, proses pemberhentian anggota Dewan Pengawas juga dapat dilakukan langsung oleh Menteri BUMN berdasarkan hasil evaluasinya sendiri. Mentri BUMN juga dapat menerima masukan dari Deputi Teknis dan Sekretaris terkait kebijakan pemberhentian yang dilakukan.

KEBIJAKAN MENGENAI RENCANA SUKSESI DIREKSI

Suksesi Direksi menjadi momentum membangun tradisi alih generasi dan role model bagi Perum Jamkrindo, selain sebagai tantangan bagi Direksi terpilih dan segenap karyawan untuk menjawabnya dengan prestasi dan kinerja terbaik. Untuk memastikan Perusahaan dikelola oleh manajemen yang memiliki keahlian dan kompetensi yang semestinya, Perusahaan melakukan proses suksesi Direksi di mana penetapan calon Direksi Perum Jamkrindo ditetapkan berdasarkan pemenuhan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-03/MBU/02/2015. Adapun proses pemilihan Direksi dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Eselon I terkait dan Sekretaris Kementerian.

For this reason, there is a provision that elected candidates are required to sign a letter of resignation from their previous position once he/she is appointed as a member of the Company's Board of Supervisor Council. If within the stipulated period, the member of the Board of Supervisor Council does not implement the provision, then he/she automatically will be dismissed from the position.

2. Dismissal

   In this provision, the Board of Supervisor Council may be dismissed at any time for various reasons such as the personal request and other related reasons such as violations of the provisions of internal and legal policy, as well as the unfulfillment of the duties and responsibilities that have been mandated. The Company's Board of Supervisor Council may also be dismissed by the Minister of SOEs in the context of restructuring or entering the retirement age of the State Civil Apparatus.

   The dismissal mechanism begins with an evaluation of the Board of Supervisor Council members, who are dismissed by the Technical Deputy in coordination with the Secretary. After conducting an evaluation, the Technical Deputy submitted a proposal to the Minister of SOEs to acquire a decision. Submission of the dismissal proposal is accompanied by an explanation of the reasons of the dismissal and a concept of the Minister's letter regarding the dismissal.

   In addition to getting a proposal from the Technical Deputy and the Secretary as previously described, the Board of Supervisor Council members' dismissal process can also be carried out directly by the Minister of SOEs based on the results of his/her evaluation. The Minister of SOEs can also receive input from the Technical Deputy and the Secretary regarding the dismissal policy that is carried out.

POLICY REGARDING THE BOARD OF DIRECTORS' SUCCESSION PLAN

The succession of the Board of Directors is a momentum to build the tradition of regeneration and role model for Perum Jamkrindo. In addition to being a challenge for the elected Board of Directors and all employees to respond to the succession with the best achievement and performance. To ensure that the Company is managed by a management who have the appropriate expertise and competence, the Company conducts a Board of Directors succession process in which the appointment of prospective Board of Directors of Perum Jamkrindo is determined based on the fulfillment of the Minister of SOEs Regulation No. Per-03 / MBU / 02/2015. The process of selecting the Board of Directors is carried out by an Evaluation Team determined by the Minister based on a proposal from the related Echelon I officials and the Secretary of the Ministry.

Proses penyeleksian oleh Tim Evaluasi, adalah sebagai berikut:

The selection process by the Evaluation Team is as follows:

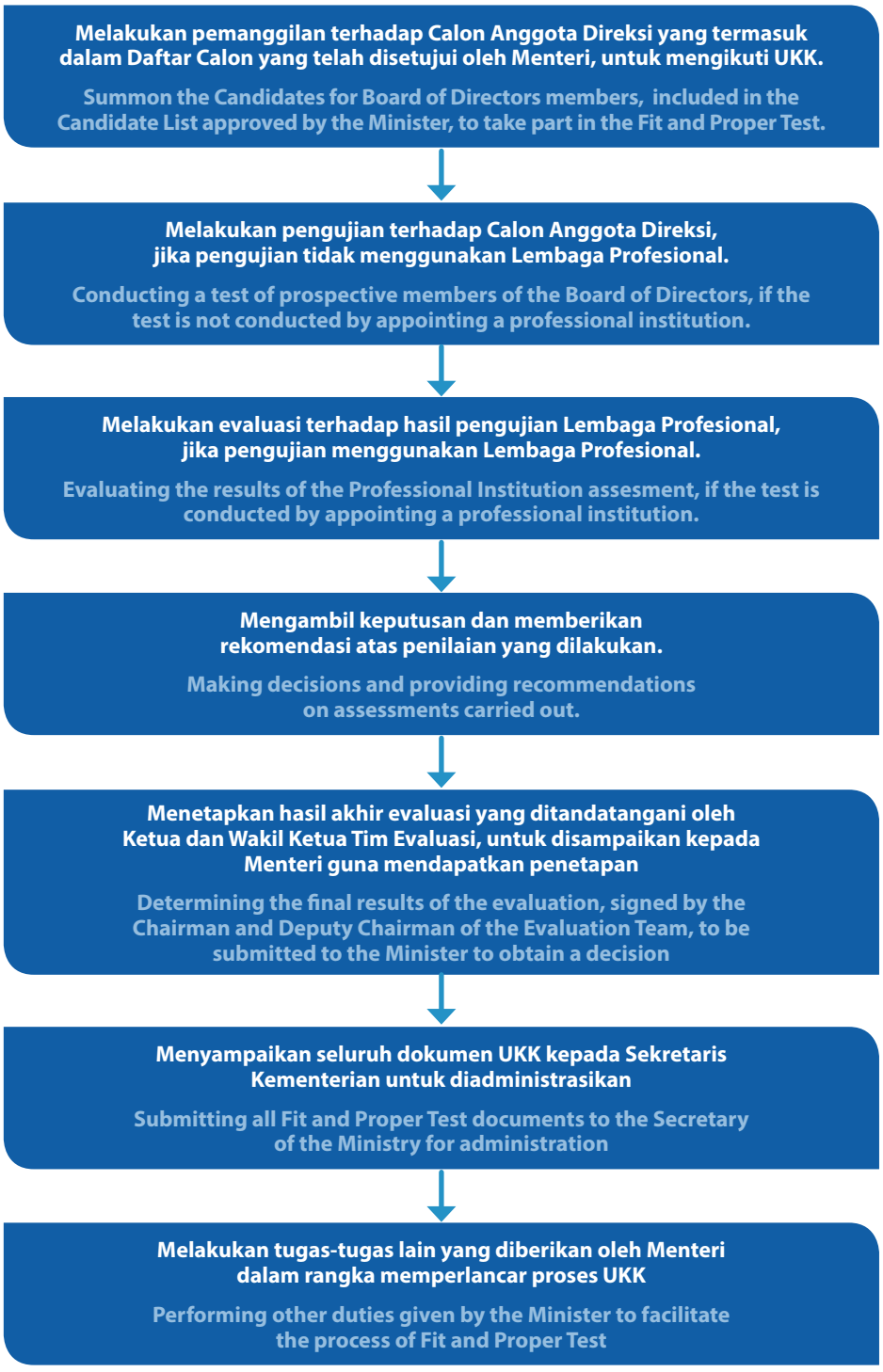

Tim Evaluasi memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menentukan calon terbaik. Sedangkan pembobotan dalam penilaian terhadap persyaratan materil calon Direksi, adalah sebagai berikut:

1. Integritas dan moral diberikan bobot penilaian sebesar 35% dengan perincian sebagai berikut:
   a. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur), diberikan bobot sebesar 10%;
   b. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%;
   c. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/ atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%;
   d. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 5%;
2. Kompetensi teknis/keahlian diberikan bobot penilaian sebesar 55% dengan perincian sebagai berikut:
   a. Pengetahuan di bidang usaha BUMN yang bersangkutan diberikan bobot 5%.
   b. Pemahaman terhadap manajemen dan tata Kelola perusahaan diberikan bobot 10%.
   c. Pengalaman dalam pengelolaan BUMN/ Perusahaan/ Lembaga diberikan bobot 10%.
   d. Kemampuan memimpin dan bekerja sama diberikan bobot 10%.
   e. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN diberikan bobot 20%.
3. Psikologis diberikan bobot penilaian sebesar 10%.

Saat ini, terdapat anggota Direksi yang berasal dari kalangan internal Perusahaan yakni Direktur Bisnis Penjaminan yang merupakan mantan Kepala Divisi dilingkungan Perusahaan, dan Direktur Operasional & Jaringan yang merupakan mantan Direktur Utama pada Anak Perusahaan.

The Evaluation Team provides recommendations to the Minister to determine the best candidate. Whereas the weighting in evaluating the material requirements of the prospective Board of Directors are as follows:

1. Integrity and morals are given an assessment weight of 35% with the following details:
   a. Never been involved in an act of engineering and deviant practices at the candidate's workplace before the nomination (which includes dishonest act), given a weight of 10%;
   b. Never been involved in a breach of contract that can be categorized as not fulfilling the agreed commitments at the candidate's workplace before the nomination (which includes bad behavior), given a weight of 10%;
   c. Never been involved in an act that is categorized as being able to provide unlawful benefits to the person concerned and/or other parties before the nomination (which includes bad behavior), given a weight of 10%;
   d. Never been involved in an act that can be categorized as a violation of the provisions relating to the principles of healthy company management (which includes bad behavior), given a weight of 5%;
2. Technical/expertise competencies are given an assessment weight of 55% with the following details:
   a. Knowledge in the line of business of the relevant SOEs is given a weight of 5%.
   b. Understanding of management and corporate governance is given a weight of 10%.
   c. Experience in managing SOEs/Companies/ Institutions is given a weight of 10%.
   d. The ability to lead and work together is given a weight of 10%.
   e. The ability to formulate and implement strategic policies in the context of SOEs' development is given a weight of 20%.
3. Psychological aspect is given an assessment weight of 10%.

At present, there are members of the Board of Directors who are from the Company internal circle, namely the Director of Business of Guarantee who is the former Division Head within the Company, and the Director of Operations & Network who is the former President Director of a Subsidiary.

KOMITE INVESTASI DAN RISIKO USAHA

Pembentukan Komite Investasi dan Risiko Usaha pada Desember 2011 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia sebagai tindaklanjut atas Surat Menteri Negara BUMN No. S-328/MBU.4/2011 tanggal 25 Oktober 2011 perihal Laporan Hasil *Assessment* Penerapan GCG Perum Jamkrindo Tahun 2010, dengan memperhatikan kondisi bahwa:

1. Perum Jamkrindo mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi, yang menghadapi risiko tinggi, terutama risiko pembayaran klaim (tagihan ganti rugi dari pihak perbankan selaku pemberi kredit) akibat kredit macet.
2. Perum Jamkrindo mengelola dana dalam jumlah yang relatif besar yang pengelolaannya perlu diselenggarakan dengan baik melalui penempatan pada berbagai instrument investasi keuangan dengan memperhatikan keamanan dan optimalisasi pendapatan.

PIAGAM KOMITE INVESTASI DAN RISIKO USAHA

Tujuan pembentukan Komite Investasi dan Risiko Usaha adalah untuk membantu Dewan Pengawas menjalankan fungsi pengawasan terhadap penetapan kebijakan dan pedoman serta pelaksanaan investasi (penempatan dana) dan kebijakan dan pengelolaan risiko usaha yang dijalankan oleh Direksi dan jajarannya, termasuk kepatuhan perusahaan pada ketentuan hukum dan perundang-undangan sebagai bagian dari perwujudan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Dalam piagam Komite Investasi dan Risiko Usaha, telah di atur terkait tugas, kewajiban dan tanggung jawab, di mana Komite Investasi dan Risiko Usaha bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.

KRITERIA MENJADI ANGGOTA KOMITE INVESTASI DAN RISIKO USAHA

Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha yang berasal dari luar perusahaan harus memenuhi persyaratan:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan yang cukup di bidang investasi dan manajemen risiko;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang

INVESTMENT AND BUSINESS RISK COMMITTEE

The establishment of the Investment and Business Risk Committee in December 2011 was based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 35 of 2018 concerning Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia as a follow up to the Letter of the State Minister of SOEs No. S-328 / MBU.4 / 2011 dated October 25, 2011, concerning the Report on the Assessment Results of Perum Jamkrindo's GCG Implementation in 2010, taking into account the conditions:

1. Perum Jamkrindo has the main duty of carrying out credit guarantee activities for Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives, which face high risks, especially the risk of claims payment (compensation bills from banks as credit providers) due to Non-Performing Loan.
2. Perum Jamkrindo manages relatively large amounts of funds whose management needs to be carried out properly through placement in various financial investment instruments with due regard to security and revenue optimization.

CHARTER OF THE INVESTMENT AND BUSINESS RISK COMMITTEE

The purpose of establishing the Investment and Business Risk Committee is to help the Board of Supervisor Council carries out the supervisory function of the establishment of policies and guidelines and the implementation of investments (placement of funds) and the business risk management carried out by the Board of Directors and staff, including the Company compliance with legal and statutory provisions as part of the realization of Good Corporate Governance practices.

In the Charter of the Investment and Business Risk Committee, it has been regulated related to duties, obligations, and reponsibilities, where the Investment and Business Risk Committee is independent both in carrying out its duties and reporting and is directly responsible to the Board of Supervisor Council.

CRITERIA FOR MEMBER OF THE INVESTMENT AND BUSINESS RISK COMMITTEE

Members of the Investment and Business Risk Committee from outside the Company must meet the following requirements:

1. Have a good integrity and sufficient knowledge in the field of investment and risk management;
2. Do not have personal interests/relationship that can

dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan dengan perusahaan;

3. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
4. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.

cause negative impacts and conflicts of interest with the Company;

3. Can provide sufficient time to complete its duties; and
4. Able to work together and communicate effectively.

KETENTUAN MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

TERM OF OFFICE

The term of office of members of the Investment and Business Risk Committee who is not a member of the Company's Board of Supervisor Council is a maximum of 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Supervisor Council to dismiss him/her at any time.

SUSUNAN DAN PROFIL ANGGOTA KOMITE INVESTASI DAN RISIKO USAHA

Di tahun 2019 terdapat perubahan keanggotaan komite. Susunan dan komposisi anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

COMPOSITION AND PROFILE OF MEMBERS OF THE INVESTMENT AND BUSINESS RISK COMMITTEE

In 2019 there was a change in committee membership. The structure and composition of the members of the Investment and Business Risk Committee during 2019 were as follows:

SUSUNAN KOMITE INVESTASI DAN RISIKO USAHA PERUM JAMKRINDO TAHUN 2019
THE COMPOSITION OF PERUM JAMKRINDO INVESTMENT AND BUSINESS RISK COMMITTEE IN 2019

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Awal Jabatan The Beginning of Term of Office	Masa Akhir Jabatan The End of Term of Office	Periode Jabatan Period of Term of Office
Ketua/Anggota Dewan Pengawas Chairman/ Member of Board of Supervisor Council	Ari Wahyuni	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-01/DPJAMKRINDO/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 jo. KEP-08/ DP-JAMKRINDO/ IX/2018 tanggal 5 September 2018 Decree of the Board of Supervisor Council No. KEP-01 / DPJAMKRINDO /I / 2018 date January 31, 2018 jo. KEP-08 / DP-JAMKRINDO /IX / 2018 date September 5, 2018	Mengikuti masa jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Following her tenure as a Member of Board of Supervisor Council		
Wakil Ketua/Anggota Dewan Pengawas Deputy Chairman/ Member of Board of Supervisor Council	Noor Ida Khomsiyati				
Anggota/Anggota Dewan Pengawas Member of Board of Supervisor Council	Diah Natalisa				
Anggota Member	Safari Mirza	Dewan Pengawas No. KEP-04/DP-Jamkrindo/X/2019 tanggal 8 Mei 2019 Decree of the Board of Supervisor Council No. KEP-04/DP-Jamkrindo/X/2019 date May 8, 2019	8 Mei 2019 May 8, 2019	7 Mei 2022 May 7, 2022	Ke-1 1st

PROFIL ANGGOTA KOMITE INVESTASI DAN RISIKO USAHA
PROFILE OF MEMBERS OF THE INVESTMENT AND BUSINESS RISK COMMITTEE



Ari Wahyuni

Ketua Komite Investasi dan Risiko Usaha /Anggota Dewan Pengawas
Chairman of Investment and Business Risk Committee/ Member of Board of Supervisor Council

Profil Ketua Komite Investasi dan Risiko Usaha Ari Wahyuni dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas, dalam bab Profil Perusahaan.

The profile of the Chairman of the Investment and Business Risk Committee, Ari Wahyuni, can be seen in the Profile of the Board of Supervisor Council, in the Company Profile chapter.

Diah Natalisa



Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha/Anggota Dewan Pengawas
Member of Investment and Business Risk Committee/ Member of Board of Supervisor Council

Profil Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha Diah Natalisa dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas, dalam bab Profil Perusahaan.

The profile of the Member of the Investment and Business Risk Committee, Diah Natalisa, can be seen in the Profile of the Board of Supervisor Council, in the Company Profile chapter.

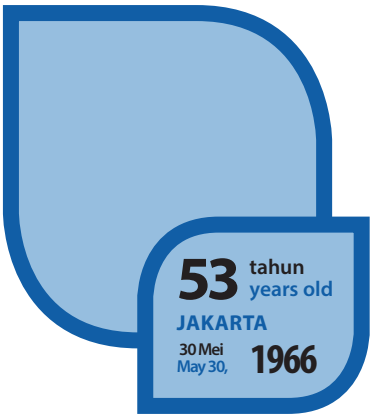

Safari Mirza

Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha
Member of Investment and Business Risk Committee

Periode Jabatan: 8 Mei 2019 - 7 Mei 2022
Term of Office: May 8, 2019 – May 7, 2022

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

PENDIDIKAN / EDUCATION
Diploma III di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1987
Diploma IV Program Akuntan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1994
Diploma III at State College of Accountancy (STAN) in 1987
Diploma IV Program in Accounting at State College of Accountancy (STAN) in 1994

PENGALAMAN KERJA / WORK EXPERIENCE
Lama berkarir dan menjadi PNS di Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan posisi terakhir sebagai Auditor Muda pada BPKP Provinsi Maluku Utara
Long career and became a civil servant at State Development Audit Agency (BPKP) with his last position as Young Auditor at BPKP North Maluku Province

INDEPENDENSI KOMITE INVESTASI DAN RISIKO USAHA

Transparansi independensi Komite Investasi dan Risiko Usahaterlihat dalam tabel berikut:

INDEPENDENCE OF THE BUSINESS RISK AND INVESTMENT COMMITTEE

The transparency of the independence of the Investment and Business Risk Committee is shown in the following table:

Aspek Independensi	Ari Wahyuni	Noor Ida Khomsiyati	Diah Natalisa	Safari Mirza	Independence aspect
Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan	X	X	X	X	Do not have blood relations up to the third degree, either in a straight line (directly) or side line (indirectly) or relationships that arise due to marriage
Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung di perusahaan dan perusahaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan	X	X	X	X	Do not own shares directly or indirectly in the Company and other companies that can cause a conflict of interest
Tidak memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan kepentingan	X	X	X	X	do not hold concurrent positions as the administrators of political parties and/or candidates/members of legislative and/or regional heads and other positions in accordance with statutory provisions that may cause a conflict of interest;
Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha yang bukan merupakan anggota dewan pengawas, tidak merangkap sebagai: • anggota Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain; • sekretaris/staf sekretariat Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain; • anggota Komite lain pada Perusahaan; dan/atau • anggota Komite pada BUMN/ perusahaan lain.	X	X	X	X	Investment and Business Risk Committee members who are not members of the Board of Supervisor Council do not hold concurrent position as: • member of the Supervisory Board at the other SOEs/ companies; • a secretary/ secretariat staff of the Supervisory Board of the other SOEs / companies; • other Committee members in the Company; and/or • Committee members in another SOEs/ companies.
Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan	X	X	X	X	Do not have a business relationship, directly or indirectly related to the Company's business activities which may cause a conflict of interest;
Bukan merupakan karyawan kunci yakni orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Pengawas	X	X	X	X	Not a key employee, namely someone who has the authority and responsibility to plan, lead, or control the Company's activities in the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Supervisor Council;
Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material perusahaan	X	X	X	X	Do not have personal interests directly or indirectly with the Company material information;
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan/atau jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Pengawas	X	X	X	X	Not a person employed by a Public Accountant Firm, a Legal Consultant Firm, other party that provides audit services, non-audit services and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Supervisor Council;

√ = ada / yes | x = tidak ada / no

TUGAS KOMITE INVESTASI DAN RISIKO USAHA

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Investasi dan Risiko Usaha Perum Jamkrindo memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan terhadap transaksi, pengelolaan, kebijakan dan pedoman keuangan dan investasi;
2. Melakukan *review* terhadap kinerja investasi, penerapan manajemen risiko, dan struktur permodalan;
3. Memberikan masukan mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian kepada Dewan Pengawas dalam rangka memberi nasihat kepada Direksi terkait dengan pengelolaan investasi dan risiko usaha;
4. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan yang diselaraskan dengan rencana kerja tahunan pengelolaan risiko dan investasi yang diselenggarakan Direksi;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengawas yang terkait dengan pemantauan risiko usaha dan investasi;
6. Melaporkan hasil-hasil kerja Komite kepada Dewan Pengawas.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Agar Komite Investasi dan Risiko Usaha dapat terus mengikuti perkembangan dunia usaha dan industri penjaminan, Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha. Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT KOMITE INVESTASI DAN RISIKO USAHA

Komite Investasi dan Risiko Usaha menyelenggarakan rapat yang ditujukan untuk membantu tugas Dewan Pengawas dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan. Rapat Komite Investasi dan Risiko Usaha di tahun 2019 diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali sepanjang tahun 2019. Tentang risalah rapat dapat dilihat pada pembahasan Rapat Dewan Pengawas.

Kehadiran Komite Investasi dan Risiko Usaha pada rapat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

DUTIES OF THE INVESTMENT AND BUSINESS RISK COMMITTEE

In carrying out its functions, the Investment and Business Risk Committee of Perum Jamkrindo has the following duties and responsibilities:

1. Monitor the transaction, management, policies and guidelines of finance and investment;
2. Review investment performance, implement risk management, and capital structure;
3. Provide input on matters that need attention to the Board of Supervisor Council to provide advice for the Board of Directors regarding investment management and business risk;
4. Make an annual work plan and budget draft aligned with the annual work plan for risk management, and investment carried out by the Board of Directors;
5. Carry out other duties assigned by the Board of Supervisor Council related to the monitoring of business risk and investment;
6. Report the work results of the Committee to the Board of Supervisor Council.

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

For the Investment and Business Risk Committee to keep abreast of developments in the business world and the guarantee industry, the Company facilitates competency development programs for members of the Investment and Business Risk Committee. Regarding competency development activities that were participated by Members of the Investment and Business Risk Committee throughout 2019, it could be seen in the chapter on Company Profile in this Annual Report.

INVESTMENT AND BUSINESS RISK COMMITTEE MEETINGS

The Investment and Business Risk Committee holds a meeting aimed at assisting the Board of Supervisor Council's duties in overseeing the management of the Company. Meetings of the Investment and Business Risk Committee were held 12 (twelve) times during 2019. Regarding the minutes of the meetings could be seen in the discussion section of the Board of Supervisor Council's Meeting.

The Investment and Business Risk Committee's attendance at the meetings could be seen in the table below.

Tanggal Date and Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Komite Investasi dan Risiko Usaha Investment and Business Risk Com			
		Ari Wahyuni	Noor Ida Khomsiyati	Diah Natalisa	Safari Mirza
16 Januari 2019 January 16, 2019	Rapat bersama dengan Direktur Bisnis Penjaminan membahas tentang Tindak Lanjut atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2018 Perum Jamkrindo Joint meeting with the Director of Business Guarantee discussed the Follow-up of Government Regulation (PP) Number 35 of 2018 concerning Perum Jamkrindo	✓	✓		✓
17 Januari 2019 January 17, 2019	Rapat bersama Direksi dan Kementerina BUMN dengan agenda Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Pengesahan RKAP Perum Jamkrindo Tahun 2019 Joint Meeting of the Board of Directors and the Ministry of State-Owned Enterprises with the Joint Discussion Meeting agenda of the Ratification of Perum Jamkrindo's RKAP 2019	✓	✓		✓
6 Februari 2019 February 6, 2019	Direktur Keuangan, Investasi, dan Manajemen Risiko membahas tentang Penyelesaian Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 oleh KAP The Director of Finance, Investment, and Risk Management discussed the Audit Completion of Financial Statements for Fiscal Year 2018 by Public Accounting Firm (KAP)	✓	✓		✓
13 Maret 2019 March 13, 2019	Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) Perum Jamkrindo membahas tentang Perkembangan *Assessment* GCG Tahun 2018 The Head of Internal Control Unit (SPI) of Perum Jamkrindo discussed the Development of GCG Assessment in 2018	✓	✓		✓
10 April 2019 April 10, 2019	Rapat bersama Direktur Bisnis Penjaminan membahas tentang Optimalisasi Gearing Ratio Joint meeting of Director of Business Guarantee discussed the Optimization of Gearing Ratio	✓	✓		✓
18 April 2019 April 18, 2019	Rapat bersama Direktur Investasi, Keuangan, dan Manajemen Risiko dan Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia, Umum, dan Kepatuhan membahas tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Jamkrindo Joint meeting of the Director of Investment, Finance and Risk Management and the Director of Human Capital Management, General Affairs and Compliance discussed the Changing of Legal Entity of Perum Jamkrindo	✓	✓		✓

Tanggal Date and Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Komite Investasi dan Risiko Usaha Investment and Business Risk Com			
		Ari Wahyuni	Noor Ida Khomsiyati	Diah Natalisa	Safari Mirza
29 April 2019 April 29, 2019	Direktur Investasi, Keuangan, dan Manajemen Risiko membahas tentang Usulan RPB Pengesahan Laporan Tahunan Audited Perum Jamkrindo Tahun Buku 2018 The Director of Investment, Finance, and Risk Management discussed the Proposed RPB on the Ratification of the Perum Jamkrindo's Audited Annual Report 2018	✓	✓		✓
8 Mei 2019 May 8, 2019	Direktur Manajamen Sumber Daya Manusia, Umum, dan Kepatuhan membahas tentang Strategi Percepatan Penyerapan Belanja Modal (Capex) Perum Jamkrindo Tahun 2019 The Director of Human Resources Management, General Affairs and Compliance discussed the Acceleration Strategy of Capital Expenditures (Capex) of Perum Jamkrindo in 2019	✓	✓		✓
12 Juni 2019 June 12, 2019	Rapat bersama Direktur Bisnis Penjaminan membahas tentang Efektivitas Mitigasi Risiko Klaim Penjaminan Kredit Joint meeting of the Director of the Business Guarantee discussed the Mitigation Effectiveness of Credit Guarantee Claim Risk	✓	✓		✓
10 Juli 2019 July 10, 2019	Rapat bersama Direktur Investasi, Keuangan, dan Manajemen Risiko membahas tentang Pembahasan realisasi rencana kerja dan perkembangan kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah sampai dengan Juni 2019 Joint meeting of the Director of Investment, Finance and Risk Management discussed the discussion of the work plan realization and the performance development of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah until June 2019	✓	✓		✓
7 Agustus 2019 August 7, 2019	Rapat bersama Direktur Investasi, Keuangan, dan Manajemen Risiko membahas tentang *Monitoring* terhadap SOP, Implementasi, dan Strategi Pengelolaan Investasi pada Perum Jamkrindo Joint meeting of the Director of Investment, Finance, and Risk Management discussed the Monitoring of SOPs, Implementation, and Investment Management Strategies at Perum Jamkrindo	✓	✓		✓
4 September 2019 September 4, 2019	Rapat bersama Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), Umum dan Kepatuhan membahas tentang upaya peningkatan Kompetensi (*skill, knowledge,* dan *attitude*) SDM Perum Jamkrindo Joint meeting of the Director of Human Resource Management (HRM), General Affairs and Compliance discussed efforts to increase the competency (skill, knowledge, and attitude) of Perum Jamkrindo's Human Capital	✓	✓		✓

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KOMITE INVESTASI DAN RISIKO USAHA 2019

Salah satu tugas Komite Investasi dan Risiko Usaha adalah menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan manajemen risiko dan investasi atas pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko dan investasi Perusahaan. Program Kerja Komite Investasi dan Risiko Usaha di tahun 2019 disampaikan pada Desember 2019 kepada Dewan Pengawas dan Laporan Pelaksanaan terhadap Program Kerja tersebut disampaikan melalui Laporan Triwulan. Selama tahun 2019, Komite Investasi dan Risiko Usaha telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Januari 2019.
2. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Februari 2019.
3. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Maret 2019.
4. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan April 2019.
5. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Mei 2019.
6. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Juni 2019.
7. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Juli 2019.
8. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Agustus 2019.
9. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan September 2019.
10. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Oktober 2019.
11. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan November 2019.
12. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Desember 2019.
13. Melakukan pendampingan atas kunjungan Dewas Pengawas ke lapangan.
14. Melakukan telaahan atas Penilaian/*Assesment Good Corporate Governance*, dan Pedoman Perilaku Perusahaan GCG di Perum Jamkrindo
15. Melakukan telaahan atas *Review Board Manual Code of Governance* dan Pedoman Perilaku Perusahaan
16. Melakukan telaahan atas reviu SOP dan pelaksanaan kegiatan investasi pada Perum Jamkrindo
17. Melakukan telaahan atas pelaksanaan dan reviu atas laporan berkala manajemen risiko.

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE INVESTMENT AND BUSINESS RISK COMMITTEE WORK PROGRAM IN 2019

One of the duties of the Investment and Business Risk Committee is to produce recommendations for improving the quality of the implementation of risk management and investment in monitoring the policies and risk management and investment implementation in the Company. The Work Program of the Investment and Business Risk Committee in 2019 was submitted in December 2019 to the Board of Supervisor Council, and the Work Program Implementation Report was submitted through the Quarterly Report. In 2019, the Investment and Business Risk Committee carried out its duties according to applicable regulations, including the following activities:

1. Prepare a review and material for the January 2019 Board of Supervisors' meeting.
2. Prepare a review and material for the February 2019 Board of Supervisors' meeting.
3. Prepare a review and material for the March 2019 Board of Supervisors' meeting.
4. Prepare a review and material for the April 2019 Board of Supervisors' meeting.
5. Prepare a review and material for the May 2019 Board of Supervisors' meeting.
6. Prepare a review and material for the June 2019 Board of Supervisors' meeting.
7. Prepare a review and material for the July 2019 Board of Supervisors' meeting.
8. Prepare a review and material for the August 2019 Board of Supervisors' meeting.
9. Prepare a review and material for the September 2019 Board of Supervisors' meeting.
10. Prepare a review and material for the October 2019 Board of Supervisors' meeting.
11. Prepare a review and material for the November 2019 Board of Supervisors' meeting.
12. Prepare a review and material for the December 2019 Board of Supervisors' meeting.
13. Provide assistance on the visit of the Supervisory Board to the site.
14. Conduct a review of Good Corporate Governance Assessment, and Company Code of Conduct.
15. Conduct a review of the Board Manual Code of Board and Code of Conduct of the Company
16. Conduct review of SOP review and implementation investment activities at Perum Jamkrindo
17. Review the implementation and review risk management periodic report.

KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI KOMITE INVESTASI DAN RISIKO USAHA

Remunerasi anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan, dengan besaran maksimal 20% dari gaji Direktur Utama. Anggota Dewan Pengawas yang menjadi Ketua/anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas. Kepada anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha yang bukan merupakan Dewan Pengawas, Perusahaan memberikan kebijakan remunerasi sebagai berikut:

- Honorarium per bulannya Rp24.000.000.
- Tunjangan Hari Raya per tahunnya 1x Honorarium.

REMUNERATION POLICY FOR THE INVESTMENT AND BUSINESS RISK COMMITTEE

The Board of Supervisor Council determines the remuneration of members of the Investment and Business Risk Committee by taking into account the ability of the Company, with a maximum amount of 20% of the salary of the President Director. Members of the Board of Supervisor Council, who are Chairman/members of the Investment and Business Risk Committee, are not given additional income from the position other than income as a member of the Board of Supervisor Council. To members of the Investment and Business Risk Committee who are not the Board of Supervisor Council, the Company provides the following remuneration policies:

- Monthly honorarium of Rp. 24,000,000.
- Religious holiday allowance every year 1 (one) month of honorarium.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN PENGAWAS

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF THE COMMITTEES UNDER THE SUPERVISORY BOARD

HASIL PENGUKURAN KINERJA KOMITE AUDIT PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2019
MEASUREMENT RESULTS OF AUDIT COMMITTEE PERFORMANCE FOR QUARTER IV OF 2019

INDIKATOR INDICATORS	RUMUSAN FORMULATION	TARGET 1 THN TARGET 1 YEAR	BOBOT WEIGHT	*REAL*	*SCORE*
Aspek Pengawasan & Pengarahan Supervision & Directive Aspects			60%		63.00
1. Menyelenggarakan Rapat Komite Organizing the Committee Meetings	Jumlah rapat Komite Number of Committee Meetings	12 kali 12 times	15%	12 kali 12 times	15.00
2. Mengikuti Rapat Dewas Following the Board of Supervisor Council Meetings	Jumlah rapat Dewas Number of Board of Supervisor Council Meetings	12 kali 12 times	15%	30 kali 30 times	18.0
3. Evaluasi terhadap Auditor Eksternal Evaluation of External Auditors	Jumlah rapat/surat/laporan Number of meetings/letters/reports	1 kali 1 time	15%	1 kali 1 time	15.00
4. Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Internal Evaluation of the Internal Control System	Jumlah rapat/surat/laporan Number of meetings/letters/reports	2 kali 2 times	15%	2 kali 2 times	15.00
Aspek Pelaporan: Reporting Aspects:			30%		30.00
1. Menyusun program kerja tahunan Prepared an annual work program	Jumlah Program Kerja Komite Number of Committee Work Programs	1 kali 1 time	5%	1 kali 1 time	5.00

INDIKATOR INDICATORS	RUMUSAN FORMULATION	TARGET 1 THN TARGET 1 YEAR	BOBOT WEIGHT	*REAL*	*SCORE*
2. Membantu Dewas Menyusun laporan/ pendapat/saran Dewas kepada Pemilik Modal Assisted the Board of Supervisor Council to prepare reports / opinions / suggestions of the Board of Supervisor Council to the Capital Owners	Jumlah surat Tanggapan Dewas Number of Board of Supervisor Council response letters	4 kali 4 times	10%	4 kali 4 times	10.00
3. Membantu Dewas Menyusun laporan tugas pengawasan Assisted the Board of Supervisor Council in preparing a supervisory duty report	Jumlah Laporan Tugas Pengawasan Number of Supervisory Duty Reports	4 kali 4 times	10%	4 kali 4 times	10.00
4. Membantu Dewas Menyusun balasan/ tanggapan surat Direksi Assisted the Board of Supervisor Council to prepare replies/responses to the Board of Directors' letters	% jumlah surat yang ditanggapi sesuai ketentuan % of responded letters according to provisions	100%	5%	100%	5.00
Aspek Dinamis/Lain-lain: Dynamic / Other Aspects:			10%		10.00
1. Mengikuti kegiatan kunjungan Dewas Following the Board of Supervisor Council's visit activities	Jumlah kunjungan yang diikuti Number of visits followed	2 kegiatan 2 activities	5%	2 kegiatan 2 activities	5.00
2. Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan Participated in competency and knowledge development activities	Jumlah pelatihan/seminar/ workshop yang diikuti Number of trainings/ seminars/workshops attended	1 kegiatan 1 activiy	5%	1 kegiatan 1 activiy	5.00
Jumlah Bobot / Total Weight			100%		103.00

PENILAIAN KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Komite Investasi dan Manajemen Risiko sebagai organ Dewan Pengawas yang bertugas menilai penerapan aspek investasi dan manajemen risiko Perum Jamkrindo. Menurut Dewan Pengawas, Komite Investasi dan Manajemen Risiko secara periodik melakukan rapat dan review tentang penerapan, efektivitas dan kualitas penerapan sesuai dengan bidang yang diawasi.

Dewan Pengawas berpendapat bahwa Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sehingga mampu memberikan masukan yang efektif bagi Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat bagi Direksi.

ASSESSMENT OF THE INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Investment and Risk Management Committee, as the organ of the Board of Supervisor Council, is tasked with assessing the implementation of investment and risk management aspects of Perum Jamkrindo. According to the Board of Supervisor Council, The Investment and Risk Management Committee periodically hold meetings and review the implementation, effectiveness, and quality of the implementation according to the area being monitored.

The Board of Supervisor Council thinks that Investment and Risk Management Committee has carried out their roles and functions properly to be able to provide effective input for the Board of Supervisor Council in carrying out the supervisory function and the advice provision to the Board of Directors.

PENDUKUNG DIREKSI

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perusahaan memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang bertugas melaksanakan kegiatan komunikasi Perusahaan, termasuk penyusunan strategi serta protokoler dan kesekretariatan Perusahaan. Fungsi Sekretaris Perusahaan berada langsung di bawah Direktur Utama.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Pasal 24, disebutkan bahwa Direksi memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.

PEJABAT SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 91/Kep-Dir/VIII/2016 tentang Pengangkatan Pejabat, Pejabat Sekretaris Perusahaan dipercayakan kepada Abdul Bari.

SUPPORTING OF THE BOARD OF DIRECTORS

CORPORATE SECRETARY

The Company has a Corporate Secretary function in charge of carrying out corporate communication activities, including the preparation of strategies and protocols and the secretariat of the Company. The function of the Corporate Secretary is directly under the President Director.

THE PARTY WHO APPOINTS AND DISMISSES THE CORPORATE SECRETARY

Based on Government Regulation No. 35 of 2018 concerning Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia/ Public Corporation of Indonesian Credit Guarantee Article 24, the Board of Directors has the authority to appoint and dismiss the Corporate Secretary.

CORPORATE SECRETARY OFFICIAL

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors. Based on Board of Directors Decree No. 91 / Kep-Dir / VIII / 2016 concerning Appointment of Officials. The position of the Corporate Secretary was entrusted to Mr. Abdul Bari.



Abdul Bari

Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

Menjabat sejak: 1 Agustus 2016
Serving the position since: August 1, 2016

Bergabung di Jamkrindo: 10 Desember 2015
Joined Jamkrindo: December 10, 2015

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia
Central Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan / Education:

S3 Manajemen SDM Universitas Negeri Jakarta, 2014
Doctor of HR Management, State University of Jakarta, 2014

Riwayat Jabatan / Job History:

Pranata Utama Direktorat Operasional dan Jaringan (2016)
First Class Officer of Directorate of Operations and Network (2016)
Pejabat Pranata Utama Direktorat Utama (2015-2016)
First Class Officer of the Main Directorate (2015-2016)
Pranata Madya Sekretaris Perusahaan (2015)
Middle Officer of Corporate Secretary (2015)

Sertifikasi / Certification:

Certified Profesional In Human Resources Management (CPHRM) Tahun 2015
Certified Profesional In Human Resources Management (CPHRM) in 2015
Completed DISC Trainer Certification Tahun 2014
Completed DISC Trainer Certification in 2014
Sertifikasi Traning of Trainer Tahun 2014/ Traning of Trainer Certification in 2014
Sertifikasi Keahlian Asuransi (Ahli Asuransi Kesehatan/AAK) Tahun 2008
Insurance Expertise Certification (Health Insurance Expert Certification) in 2008
Sertifikasi Asuransi Jiwa (AAIJ) Tahun 2007/ Life Insurance Certification in 2007
Sertifikasi Keahlian Asuransi (Ajun Ahli Asuransi Kesehatan/AAAK) Tahun 2006
Insurance Expertise Certification (Associate Level of Health Insurance Specialist Certification) in 2006
Sertifikasi K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) Tahun 2002
Occupational Health and Safety Certification in 2002

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pelaksanaan kegiatan Sekretaris Perusahaan yang meliputi beberapa aspek di bawah ini:

- Menyusun dan mengusulkan kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Unit Kerja Sekretaris Perusahaan.
- Menyediakan data dan informasi untuk keperluan pemeriksaan internal/eksternal serta menindaklanjuti rekomendasi auditor tersebut sesuai bidang tugasnya Merumuskan dan melaksanakan strategi dan kebijakan pengelolaan komunikasi perusahaan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembinaan hubungan baik dan kerja sama dengan internal, *stakeholders* eksternal termasuk media.
- Mengoordinasi dan memonitor pelaksanaan prosedur tata upacara/seremonial, tata tempat, tata penghormatan pejabat internal dan eksternal dalam setiap kegiatan di lingkungan Perusahaan.
- Mengumpulkan, menganalisa keluhan/saran masyarakat/klien dari kotak saran dan meneruskannya kepada pimpinan unit kerja terkait serta menyusun dan memberikan tanggapan terhadap keluhan tersebut, sebagai bahan kebijakan.
- Melaksanakan, memelihara dan mengelola data base sesuai bidang tugasnya.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Agar Sekretaris Perusahaan selalu dapat mengikuti perkembangan hal-hal terkait dunia usaha, industri penjaminan, serta peraturan dan perundang-undangan terkait, Perusahaan memfasilitasi SDM yang tergabung dalam Divisi Sekretaris untuk mengikuti program pengembangan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi. Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2019

Di sepanjang tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Terwujudnya standard administrasi perusahaan, khususnya tata persuratan dan kearsipan
   - Sasaran tersebut dilakukan melalui strategi Penyeragaman proses administrasi dan dokumentasi kegiatan perusahaan;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

The implementation of the Corporate Secretary's activities covers the following aspects:

- Prepare and propose policies and Standard Operating Procedure (SOP) of the Corporate Secretary Work Unit.
- Provide data and information for the purpose of internal/external audits and follow up on the auditor's recommendations according to their duties. Formulate and implement strategies and policies for managing corporate communications to improve the quality of fostering good relations and cooperation with internal and external stakeholders, including the media.
- Coordinate and monitor the implementation of ceremonial procedures, layout procedures, respecting procedures for internal and external officials in all activities within the Company.
- Collect, analyze complaints/suggestions from the community/clients from the suggestion box, and forward them to the head of the relevant work unit, compile and respond to the complaints, as policy material.
- Implement, maintain and manage databases according to their fields of work.

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The Corporate Secretary can always keep abreast of matters related to the business world, guarantees industry, and related laws and regulations. The Company facilitates HC who are members of the Corporate Secretary Division to participate in the competency development programs in the form of seminars, workshops, or other activities that can increase their knowledge and competence. In relation to competency development activities that were participated by the Corporate Secretary throughout 2019, it could be seen in the chapter of Company Profile in this Annual Report.

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SECRETARY'S DUTIES IN 2019

Throughout 2019, the Corporate Secretary has carried out the following activities:

1. The realization of Company administration standards, especially correspondence and archives
   - The target was carried out through an administrative process equation strategy and documentation of Company activities;

- Langkah kebijakan demi mendukung pencapaian sasaran tersebut diantaranya :
  Melakukan percepatan implementasi aplikasi office automation dan penataan arsip Bekerjasama dengan Jasa Konsultan Tata kelola Dokumen dan Kearsipan untuk :
  1) Penyesuaian ketentuan Tata Kelola Persuratan, Tata Kelola Kearsipan dan Retensi Arsip sesuai dengan perubahan Struktur Organisasi
  2) Pengembangan Aplikasi *Office Automation* untuk Tata Kelola Persuratan dan Kearsipan.
  3) Melakukan Sosialisasi Peraturan Tata Kelola Persuratan, Kearsipan dan Retensi Arsip ke seluruh unit kerja.
  4) Pelaksanaan Penataan arsip secara nasional (Kantor pusat, Kanwil dan Kantor Cabang/KUP) dengan pihak eksternal/konsultan maupun mandiri.
  5) Penyediaan perlengkapan kearsipan baik di kantor pusat dan kantor cabang
  6) Melakukan *Benchmarking* terkait Kesekretariatan meliputi Tata Kelola Persuratan, Tata Kelola Kearsipan, Retensi Arsip
- Dapat dilaporkan bahwa pada saat ini kami telah melakukan realisasi untuk periode sampai dengan triwulan IV Tahun 2019 antara lain :
  > Sekretaris Perusahaan telah melakukan pembahasan dengan beberapa calon vendor dalam hal standard administrasi perusahaan, khususnya tata persuratan dan kearsipan dan akan dilakukann *join planning* bersama Divisi TI dalam hal dukungan teknis untuk pembuatan Aplikasi e-Office dan digital Arsip yang terintegrasi serta dapat diakses secara Desktop dan Mobile. Saat ini Divisi TI sedang melakukan proses penyusunan *capacity plan* dan RFI (*request for Information*) sebagaimana KAK yang telah disampaikan ke Divisi TI dan selanjutnya dilakukan proses pengadaan;
  > Sekretaris Perusahaan teleh mengirimkan memorandum ke seluruh unit kerja untuk penunjukan PIC sebagai *Record Officer* (RO) satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Arsip di masing-masing unit kerja, sehingga pengelolaan kearsipan dan retensi arsip dapat dikelola secara terstruktur dan profesional oleh masing-masing unit kerja;

- The policy steps to support the achievement of those objectives included:
  Accelerating the implementation of office automation applications and structuring archives in collaboration with the Document and Archives Management Consultant Services to:
  1) Adjustment to the provisions of Correspondence Management, Archive Management and Archive Retention in accordance with changes in Organizational Structure
  2) Development of Office Automation Applications for the management of Correspondence and Archive.
  3) Socialized the Management Regulations of Correspondence, Archive, and Archive Retention to all work units.
  4) Implementation of national archive arrangement (Head office, Regional Offices, and Branch Offices / Services Unit Offices (KUP)) with external parties/ consultants or independently.
  5) Provision of archive equipment both at head office and branch offices
  6) Conducted Benchmarking related to Secretariat including Correspondence Management, Archive Management, Archive Retention
- It could be reported that at this time we have carried out the realization for a period until the fourth quarter of 2019, including:
  > The Corporate Secretary has carried out discussions with several prospective vendors in terms of company administration standards, especially correspondence and archives and joint planning would be carried out with the IT Division in terms of technical support for the creation of the application of the integrated e-office and digital archive that could be accessed on Desktop and Mobile. Currently, the IT Division was in the process of preparing a capacity plan, and RFI (Request for Information) as the Terms of Reference (KAK) that has been submitted to the IT Division and the procurement process was subsequently conducted;
  > The Corporate Secretary has sent a memorandum to all work units for the appointment of the PIC as a Record Officer (RO) of work units responsible for managing records in each work unit so that archive management and archive retention could be managed structurally and professionally by each work unit;

> Melakukan pendataan pemilahan Arsip baik aktif dan inaktif di seluruh unit kerja melalui *Record Officer* (RO) satuan kerja yang telah ditunjuk guna pendataan arsip dan penjadwalan retensi/ pemusnahan arsip.

2. Meningkatnya pelayanan terhadap Direksi dan Dewan Pengawas guna tercipta Pelayanan Prima.
   - Sasaran tersebut dilakukan melalui strategi:
     > Meningkatkan Fungsi pelayanan Internal dan pendampingan secara optimal.
     > Meningkatkan partisipasi aktif Fungsi pelayanan Internal dalam kegiatan-kegiatan Perusahaan baik di internal maupun Eksternal
     > Pengumpulan data dan informasi terkait dengan Rapat-Rapat Rutin (Rapat Direksi dan Dewan pengawas) dan non rutin untuk menunjang kegiatan korporasi.
   - Langkah kebijakan demi mendukung pencapaian sasaran tersebut diantaranya :
     > Bekerjasama dengan Jasa Konsultan Penyusunan Tata kelola Keprotokolan:
       1) Bekerjasama dengan Jasa Konsultan Penyusunan Tata kelola Keprotokolan guna Finalisasi draft kebijakan Tata Kelola Keprotokolan.
       2) Melakukan Sosialisasi Tata Kelola Keprotokolan di seluruh unit kerja baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang
     > Melakukan Fungsi Pelayanan Internal dan Keprotokoleran pada Seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
     > Optimalisasi Fungsi Pelayanan Internal dan Keprotokoleran pada pada setiap kegiatan Resmi Perusahaan baik di internal maupun eksternal Kantor
     > Sekretaris Perusahaan telah bekerjasama dengan beberapa insatansi untuk penyusunan kebijakan Tata Kelola Keprotokolan, dimana saat ini tengah dilakukan Finalisasi draft kebijakan Tata Kelola Keprotokolan.
     > Sekretaris Perusahaan aktif dalam setiap kegiatan Fungsi Pelayanan Internal dan Keprotokoleran Perusahaan baik di internal maupun Eksternal
     > Sekretaris Perusahaan secara rutin melakukan persiapan dan pengumpulan data terutama untuk kegiatan Rapat-Rapat Rutin Direksi dan Dewan pengawas serta Koordinasi kegiatan-kegiatan korporasi insidentil.

> Conducted archive data collection and archive sorting, both active and inactive in all work units through Record Officers (RO) of work units that have been designated for archive data collection and archive retention/destruction scheduling.

2. Increased services to the Board of Directors and Board of Supervisor Council to create Excellent Services.
   - The targets were carried out through strategies:
     > Improved the function of internal services and optimally fostering.
     > Increased the active participation of the Internal service function in the Company's activities both internally and externally
     > Data and information collecting related to Regular Meetings (Meetings of the Board of Directors and Supervisor Council) and non-routine to support corporate activities.
   - Policy steps to support the achievement of these objectives, among others:
     > Collaboration with consultant services on Protocol Management Arrangement:
       1) Collaboration with consultant services on protocol management arrangement to finalize the draft of protocol management policy.
       2) Conducting socialization on protocol management in all work units both at the Head Office and Branch Offices
     > Performed the functions of Internal Services and Protocol in all Regional Offices and Branch Offices.
     > Optimized the functions of Internal Services and Protocols in each of the Company's official activities both internally and externally of the office
     > The Corporate Secretary has collaborated with several agencies to formulate the Protocol Management policy, which was currently in the process of finalizing a draft of Protocol Management Policy.
     > The Corporate Secretary was active in every activity of the Internal Service Function and Corporate Protocol, both internally and externally.
     > The Corporate Secretary routinely prepared and collected data, especially for the activities of the Regular Meetings of the Board of Directors and the Board of Supervisor Council, as well as the Coordination of incidental corporate activities.

3. Meningkatkan citra positif Perusahaan
   - Sasaran tersebut dilakukan melalui strategi:
     > Meningkatkan kegiatan publikasi dan kehumasan perusahaan,
     > Ikut serta berpromosi melalui kegiatan *sponsorship*
     > Media *Monitoring*
   - Langkah kebijakan demi mendukung pencapaian sasaran tersebut diantaranya :
     > Melakukan publikasi perusahaan di koran, majalah, TV, radio dan event-event lainya;
     > Melakukan kegiatan promosi sesuai permintaan dan kewenangan yang berlaku;
     > Bekerjasama dengan wartawan atau pihak independen lainnya untuk membantu kegiatan kehumasan perusahaan.
4. Meningkatnya peran humas Perum Jamkrindo dan Komunikasi Perusahaan
   - Sasaran tersebut dilakukan melalui strategi:
     > Meningkatkan fungsi Kehumasan pada seluruh Kantor Cabang;
     > Meningkatkan partisipasi aktif perusahaan terkait komunikasi perusahaan dan keluarga besar BUMN
   - Langkah kebijakan demi mendukung pencapaian sasaran tersebut diantaranya :
     > Sosialisasi fungsi kehumasan pada seluruh kanca
     > Melakukan kegiatan promosi sesuai permintaan dan kewenangan yang berlaku;
     > Bekerjasama dengan wartawan atau pihak independen lainnya untuk membantu kegiatan kehumasan perusahaan;
   - Dapat dilaporkan bahwa pada saat ini kami telah melakukan realisasi untuk periode sampai dengan Triwulan IV 2019 antara lain :
     > Tersosialisasikannya *Digital Magazine* di seluruh Kantor Cabang
     > Tersosialisasikannya pemberitaan Jamkrindo di seluruh Kantor Cabang
     > Menyusun Press Release untuk kegiatan-kegiatan penting perusahaan dan mengundang media untuk peliputan acara.
     > Berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan KBUMN diantaranya adalah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dirut, HUT Bersama, HUT Kementerian BUMN.

3. Improved the Company's positive image
   - The targets were carried out through strategies:
     > Increased the Company's publicity and public relations activities,
     > Participated in promotion through sponsorship activities
     > Media Monitoring
   - Policy steps to support the achievement of these objectives, among others:
     > Conducted Company publications in newspapers, magazines, TV, radio and other events;
     > Conducted promotional activities according to the request and the applicable authority;
     > Collaborated with journalists or other independent parties to help the Company's public relations activities.
4. The increasing role of Public Relations of Perum Jamkrindo and Corporate Communications
   - The targets were carried out through strategies:
     > Improved the Public Relations function in all Branch Offices;
     > Increased the Company's active participation in corporate communication and SOEs' large family
   - Policy steps to support the achievement of these objectives, among others:
     > Public relations function socialization in all branch offices.
     > Conducted promotional activities according to the request and the applicable authority;
     > Collaborated with journalists or other independent parties to help the Company's public relations activities;
   - It could be reported that at this time we have carried out the realization for the period up to Quarter IV of 2019, among others:
     > Digital Magazine socialization in all Branch Offices
     > Jamkrindo news socialization in all Branch Offices
     > Prepared a Press Release for important company activities and invited the media to cover the events.
     > Actively participated in various the Ministry of SOEs activities including the Implementation of the President Director's Coordination Meeting, Joint Anniversary, Anniversary of the Ministry of SOEs.

5. Pemutakhiran konten *website* sesuai dengan agenda perusahaan
   - Sasaran tersebut dilakukan melalui strategi:
     > Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kebijakan dan keberhasilan perusahaan dan melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan kebijakan dan keberhasilan perusahaan.
     > *Updating* pemberitaan di *website* sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan
     > *Updating* pemberitaan dan kegiataan perusahaan di Media Sosial.

PENGELOLAAN INFORMASI MELALUI HUBUNGAN MEDIA

Untuk dapat menyampaikan informasi secara komprehensif kepada segenap pemangku kepentingan, Perusahaan melalui Sekretaris Perusahaan melakukan hubungan media dengan menyampaikan Rilis Media kepada sejumlah media baik nasional maupun lokal untuk disebarluaskan sebagai informasi Perusahaan yang harus diketahui oleh segenap pemangku kepentingan. Selama tahun 2019, terdapat 28 rilis yang diberikan kepada media baik nasional maupun lokal. Terkait hal ini, di uraikan secara rinci pada bagian pembahasan tentang Akses Informasi dan Data Perusahaan yang disajikan pada bab GCG ini.

AUDIT INTERNAL

Audit Internal merupakan proses pengawasan atas pengelolaan operasional dan bisnis Perusahaan yang dilakukan secara internal. Fungsi Audit Internal di Perum Jamkrindo dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas. SPI bertugas melakukan *assurance* dan *consulting* yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala SPI setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas, jika Kepala SPI tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

5. Updating the website content according to the Company's agenda
   - The targets were carried out through strategies:
     > Collecting data and information related to the Company's policy and success and collecting data and information related to the Company's policy and success.
     > Updating the news on the website according to the activities that have been carried out
     > Updating the Company's news and activities on Social Media.

MANAGEMENT OF INFORMATION THROUGH MEDIA RELATIONS

In order to convey information comprehensively to all stakeholders, the Company, through the Corporate Secretary, conducts media relations by submitting Media Release to several national and local media to be disseminated as Company information that should be known by all stakeholders. During 2019, there were 28 releases submitted to national and local media. In this regard, it was described in detail in the discussion section on Access to Company Information, and Data presented in this GCG chapter.

INTERNAL AUDIT

Internal Audit is a process of internal supervision of the management of the Company's operations and business. The Internal Audit function at Perum Jamkrindo is carried out by the Internal Audit Unit (SPI), led by the SPI Head who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Supervisor Council. SPI is tasked with conducting independent and objective assurance and consulting, with the aim to increase added value and improve the Company's operations, through a systematic approach by evaluating and increasing the adequacy and effectiveness of internal control systems, risk management, and corporate governance.

THE PARTY WHO APPOINTS AND DISMISSES THE HEAD OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

The SPI Head is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Supervisor Council. The President Director may dismiss the Head of SPI after obtaining approval from the Board of Supervisor Council if the Head of SPI does not meet the requirements as an Internal Auditor as stipulated in applicable regulations and or fails or is incapable of carrying out its duties.

PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 20/Kep-Dir/III/2017 tanggal 8 Maret 2017, Untung Heri S dipercaya untuk menjabat Kepala SPI dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas. Pada tanggal 31 Agustus 2018, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Jamkrindo No. 51/SKD/4/VIII/2018tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Perum Jamkrindo, Untung Heri S dipindahtugaskan menjadi Kepala Divisi Umum Perum Jamkrindo, sehingga jabatan Kepala SPI dipimpin oleh Mohamad Adhy Prayitno berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Jamkrindo No. 81/SKD/4/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Pengawasan Intern Perum Jamkrindo dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

PROFILE OF THE HEAD OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

Based on the Board of Directors Decree No. 20 / Kep-Dir / III / 2017 dated March 8, 2017, Untung Heri S was entrusted to serve as the Head of SPI and had obtained approval from the Board of Supervisor Council. On August 31, 2018, based on the Decree of the Board of Directors of Perum Jamkrindo No. 51 / SKD / 4 / VIII / 2018 regarding Appointment and Mutation of Perum Jamkrindo Officials, Untung Heri S was appointed as the Head of General Affairs Division of Perum Jamkrindo. Therefore, the position of Head of the Internal Audit Unit was held by Mohamad Adhy Prayitno based on Decree of Perum Jamkrindo Board of Directors No. 81 / SKD / 4 / XI / 2018 dated November 12, 2018, concerning the Appointment of the Head of the Internal Audit Unit of Perum Jamkrindo and has obtained approval from the Board of Supervisor Council.



Mohamad Adhy Prayitno

Kepala Satuan Pengawasan Intern / Head of Internal Control Unit

Menjabat sejak: 12 November 2018
Serving the position since: November 12, 2018

Bergabung di Jamkrindo: 15 Oktober 2018
Joined Jamkrindo: October 15, 2018

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Sleman, Yogyakarta, Indonesia
Sleman, Yogyakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan / Education:
S2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, 2003
Master of Management of Gadjah Mada University, 2003
S1 Perikanan Institut Pertanian Bogor Tahun 1987
Bachelor of Fisheries, Bogor Institute of Agriculture in 1987

Riwayat Jabatan / Job History:
Kepala Satuan Pengawasan Intern Perum Jamkrindo mulai menjabat 1 November 2018 – Sekarang
Head of Internal Audit Unit of Perum Jamkrindo served the position since November 1, 2018
Profesional Auditor Audit Internal Perum Jamkrindo periode 15 - 31 Oktober 2018
Professional Internal Auditor of Perum Jamkrindo period of October 15, 2018 – October 31, 2018
Wakil Pemimpin Wilayah Bisnis pada PT BRI (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang selama 2 tahun
Deputy Head of Business Region of PT BRI (Persero) Tbk, Malang Branch Office for 2 years
Wakil Inspektur pada Kantor Inspeksi Pekanbaru PT BRI (Persero), Tbk selama 3 tahun
Deputy Inspector, Pekanbaru Inspection Office of PT BRI (Persero) Tbk for 3 years
Wakil Pemimpin Wilayah Bisnis pada PT BRI (Persero), Tbk Kantor Wilayah Jayapura selama 2 tahun
Deputy Head of Business Region of PT BRI (Persero) Tbk, Jayapura Regional Office for 2 years
Pemimpin Cabang pada PT BRI (Persero), Tbk Kantor Cabang Jelambar selama 2 tahun
Branch Manager of PT BRI (Persero) Tbk, Jelambar Branch Office for 2 years
Pemimpin Cabang pada PT BRI (Persero), Tbk Kantor Cabang Pangkal Pinang selama 3 tahun
Branch Manager of PT BRI (Persero) Tbk, Pangkal Pinang Branch Office for 3 years
Pemimpin Cabang pada PT BRI (Persero), Tbk Kantor Cabang Rantau Prapat selama 3 tahun
Branch Manager of PT BRI (Persero) Tbk, Rantau Prapat Branch Office for 3 years
Pemimpin Cabang pada PT BRI (Persero), Tbk Kantor Cabang Maumere selama 2 tahun/Branch
Manager of PT BRI (Persero) Tbk, Maumere Branch Office for 2 years

Sertifikasi / Certification:
Qualified Internal Audit (QIA) 2015
Qualified Internal Audit (QIA) in 2015

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perum Jamkrindo dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala SPI setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas, jika Kepala SPI tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas. Struktur Organisasi SPI Perum Jamkrindo berdasarkan Keputusan Direksi No. 01/KD/1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Struktur Organisasi Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND POSITION OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

The Internal Audit Unit (SPI) of Perum Jamkrindo is led by a Head of Internal Audit Unit who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Supervisor Council. The President Director may dismiss the Head of SPI after obtaining approval from the Board of Supervisor Council if the Head of SPI does not meet the requirements as an Internal Auditor as stipulated in applicable regulations and or fails or is incapable of carrying out his duties. Organizational Structure of SPI of Perum Jamkrindo based on the Board of Directors Decree No. 01 / KD / 1 / V / 2018 dated May 30, 2018, concerning the Organizational Structure of Perum Jamkrindo is as follows:

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN SPI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND POSITION OF SPI

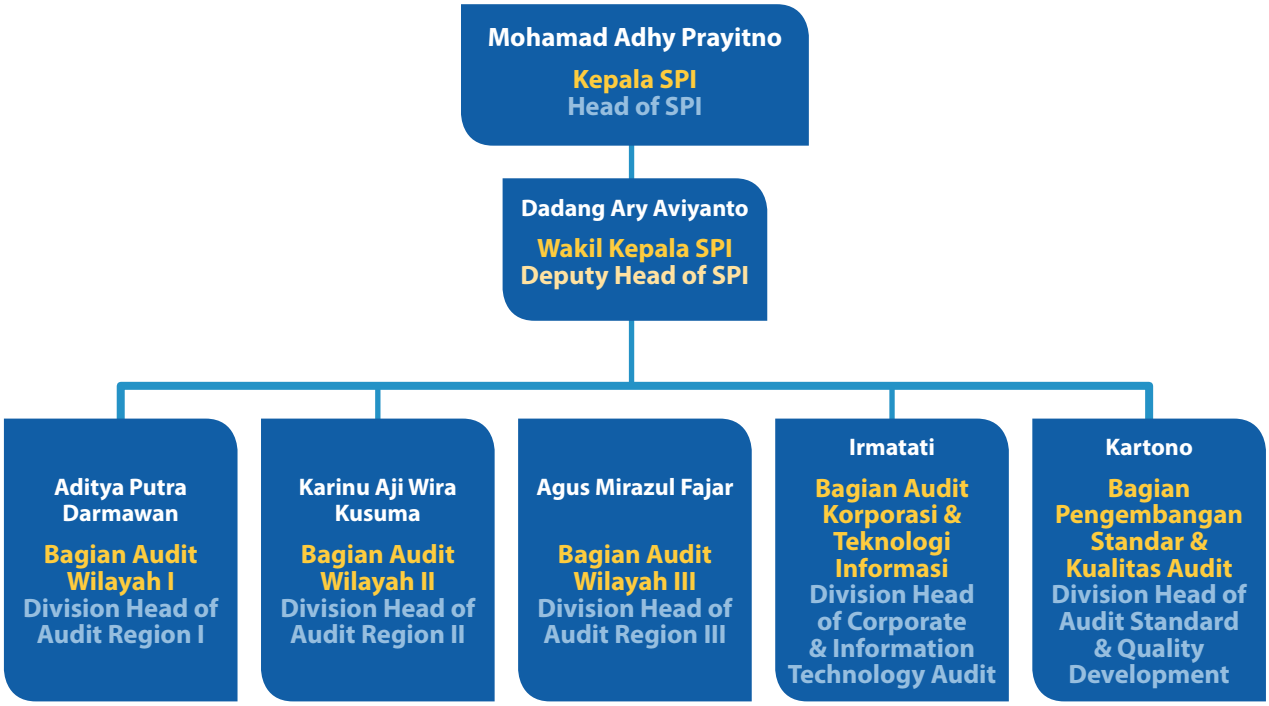

Jabatan	Nama
Kepala Satuan Pengawasan Internal	Mohamad Adhy Prayitno
Kepala Bagian Audit Wilayah I	Aditya Putra Darmawan
Kepala Bagian Audit Wilayah II	Karinu Aji Wira Kusuma
Kepala Bagian Audit Wilayah III	Agus Mirazul Fajar
Kepala Bagian Audit Korporasi dan Teknologi Informasi	Irmatati
Kepala Bagian Pengembangan Standar dan Kualitas Audit	Kartono

Untuk mendukung tugas-tugas pengawasan yang diemban SPI, berikut adalah jumlah dan kualitas personel SPI pada periode tahun 2019:

1. Kepala SPI : 1 orang
2. Kepala Bagian : 5 orang
3. Kepala Seksi : 1 orang
4. Staf : 14 orang
5. Agendaris : 1 orang

Jumlah : 22 orang

SERTIFIKASI PROFESI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan SPI hingga akhir tahun 2019.

To support the supervisory duties carried out by SPI, the following were the number and the quality of SPI personnel in the 2019 period:

1. Head of SPI : 1 person
2. Head of Division : 5 people
3. Section Head : 1 person
4. Staff : 14 people
5. Agent : 1 person

Total : 22 people

PROFESSIONAL CERTIFICATION OF INTERNAL AUDIT UNIT

Professional certification is an important aspect for auditors to understand the development of audits, especially related to compliance with regulations and industrial development. The following was the professional certification held by SPI employees until the end of 2019.

Nama dan Jabatan Names and Positions	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place / Date	Penyelenggara Organizer
Audit Internal/Satuan Pengawasan Intern / Internal Audit/Internal Control Unit			
Karinu Aji Wira Kusuma	Pembekalan Sertifikasi Manajamen Risiko Level 1 Level 1 Risk Management Certification Briefing	Kantor Pusat, 2-3 Mei 2019 Head Office, May 2-3, 2019	LSPP
	Ujian Sertifikasi Manajamen Risiko Level 1 Level 1 Risk Management Certification Test	Kantor Pusat, 4 Mei 2019 Head Office, May 4, 2019	LSPP
	Professional Communication Batch IV	Kantor Pusat, 25 - 26 Maret 2019 Head Office, March 25-26, 2019	Perum Jamkrindo
	Uji Sertifikasi Manajemen Risiko level 1 Kabag Level 1 Risk Management Certification Test for Section Heads	Kantor Pusat, 7 Desember 2019 Head Office, December 7, 2019	Perum Jamkrindo
Faisal Arief Sentosa	Hari Mutu Perdir SMK 3 No.3 Perdir 4 VIII 2018 The Quality Day of Directors' Regulation No. 3 on Occupational Health and Safety Management System, Directors' Regulation 4 VIII 2018	Kantor Pusat, 28 Juni - 28 Juli 2019 Head Office, June 28-July 28, 2019	Perum Jamkrindo
	QIA Manajerial Managerial QIA	Jakarta, 18 - 27 Maret 2019 Jakarta, March 18-27, 2019	YPIA
Laila Wijayanti	Hari Mutu Perdir SMK 3 No.3 Perdir 4 VIII 2018 The Quality Day of Directors' Regulation No. 3 on Occupational Health and Safety Management System, Directors' Regulation 4 VIII 2018	Kantor Pusat, 28 Juni - 28 Juli 2019 Head Office, June 28-July 28, 2019	Perum Jamkrindo
	Hari Mutu Produk Pegadaian The Quality Day of Pawnshop Product	Kantor Pusat, 16 Juni 2019 Head Office, June 16, 2019	Perum Jamkrindo

Nama dan Jabatan Names and Positions	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place / Date	Penyelenggara Organizer
Dadang Ary Aviyanto	2019 II A Indonesia National Conference	Jawa Tengah, 24 - 25 Juli 2019 Central Java, July 24-25, 2019	The Institute of Internal Auditors Indonesia
	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 Pinca Level 2 Risk Management Certification for Branch Managers	Kantor Pusat, 7 September 2019 Head Office, September 7, 2019	Perum Jamkrindo
	In House Training Workshop Strategi Penyusunan RKAP In House Training, Workshop on RKAP Preparation Strategy	Kantor Pusat, 17 - 18 September 2019 Head Office, September 17-18, 2019	Perum Jamkrindo
	Workshop PSAK 71 PSAK 71 Workshop	Kantor Pusat, 26 September 2019 Head Office, September 26, 2019	Perum Jamkrindo
Aditya Putra Darmawan	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 Kabag pusat Level 2 Risk Management Certification Briefing for Head Office's Section Heads	Kantor Pusat, 23 - 24 Mei 2019 Head Office, May 23-24, 2019	Perum Jamkrindo
	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 Kabag pusat Level 2 Risk Management Certification Test for Central Section Heads	Kantor Pusat, 21 Juni 2019 Head Office, June 21, 2019	Perum Jamkrindo
	Pelantikan QIA dan Seminar Nasional Internal Audit 2019 Inauguration of QIA and the 2019 Internal Audit National Seminar	Palembang, 24 - 25 April 2019 Palembang, April 24-25, 2019	YPIA
	Professional Communication Batch II	Kantor Pusat, 8 - 9 Maret 2019 Head Office, March 8-9, 2019	Perum Jamkrindo
Michael Ranap Simanjuntak	QIA Manajerial Managerial QIA	Jakarta, 18 - 27 Maret 2019 Jakarta, March 18-27, 2019	YPIA
	Hari Mutu *Consultative Marketing* The Quality Day of Consultative Marketing	Kantor Pusat, 11 Januari 2019 Head Office, January 11, 2019	Perum Jamkrindo
	Healthy Lifestyle	Kantor Pusat, 4 Januari 2019 Head Office, January 4, 2019	Perum Jamkrindo
Agus Mirazul Fajar	Pelatihan *Awareness & Audit Internal* Awareness & Internal Audit Training	Jakarta, 13 - 15 Maret 2019 Jakarta, March 13-15, 2019	Sucofindo
	Professional Communication Batch I	Kantor Pusat, 5 - 6 Maret 2019 Head Office, March 5-6, 2019	Perum Jamkrindo
	Healthy Lifestyle	Kantor Pusat, 4 Januari 2019 Head Office, January 4, 2019	Perum Jamkrindo
	In House Training Workshop Strategi Penyusunan RKAP In House Training, Workshop on RKAP Preparation Strategy	Kantor Pusat, 17 - 18 September 2019 Head Office, September 17-18, 2019	Perum Jamkrindo
	Uji Sertifikasi Manajemen Risiko level 1 Kabag Level 1 Risk Management Certification Test for Section Heads	Kantor Pusat, 16 November 2019 Head Office, November 16, 2019	Perum Jamkrindo
Irmatati	Professional Communication Batch I	Kantor Pusat, 5 - 6 Maret 2019 Head Office, March 5-6, 2019	Perum Jamkrindo
	Uji Sertifikasi Manajemen Risiko level 1 Kabag Level 1 Risk Management Certification Test for Section Heads	Kantor Pusat 30 November 2019 Head Office, November 30, 2019	Perum Jamkrindo
Andik Sugiarto	Hari Mutu Klaim Asuransi The Quality Day of Insurance Claims	Kantor Pusat, 15 Februari 2019 Head Office, February 15, 2019	Perum Jamkrindo
Aldhy Haryono Fachrial	Hari Mutu Audit & Auditor Hukum The Quality Day of the Legal audit and Auditor	Kantor Pusat, 1 Februari 2019 Head Office, February 1, 2019	Perum Jamkrindo
Muhammad Ilham	Hari Mutu Audit & Auditor Hukum The Quality Day of the Legal audit and Auditor	Kantor Pusat, 1 Februari 2019 Head Office, February 1, 2019	Perum Jamkrindo
Arif Syachroni	Healthy Lifestyle	Kantor Pusat, 4 Januari 2019 Head Office, January 4, 2019	Perum Jamkrindo

PIAGAM SPI

SPI Perum Jamkrindo memiliki *Internal Audit Charter* yang disusun sebagai pedoman standar yang memuat ukuran minimal tentang fungsi *Audit Internal* yang perlu diselenggarakan oleh Perusahaan serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Internal serta agar terciptanya kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Perusahaan.

Di samping itu, *Internal Audit Charter* merupakan pemenuhan *compliance* perusahaan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada BUMN dan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Piagam Audit Internal Perusahaan telah diperbaharui serta disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas No. 38/Kep-Dir/V/2017 – KEP-03/DPJAMKRINDO/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.

VISI DAN MISI SPI

Berdasarkan Piagam Audit Internal Perusahaan, Visi dan Misi SPI adalah sebagai berikut:

Visi

Menjadi *strategic business partner* yang independen, objektif, profesional, terpercaya, tanggap melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* serta dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

Misi

1. Aktif melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas Perusahaan meliputi proses pengendalian manajemen, operasional, dan pengelolaan risiko dalam peningkatan kinerja Perusahaan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan Perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip GCG.
2. Meningkatkan peran pemeriksaan intern dan kualitas hasil pengawasan melalui peningkatan kompetensi Auditor Internal dan pemanfaatan sistem informasi.
3. Mengupayakan pelayanan konsultasi untuk meningkatan nilai-nilai Perusahaan dan sistem pendukungnya, memberikan jaminan bahwa seluruh aktivitas Perusahaan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan, *business best practice*, dan prosedur serta kebijakan yang ditetapkan.
4. Memberikan nilai tambah yang berfokus pada proses bisnis dan pelanggan, proaktif, antusias dan terpercaya, dapat berkomunikasi secara efektif, mampu menemukan

INTERNAL AUDIT CHARTER

The SPI of Perum Jamkrindo has an Internal Audit Charter which is prepared as a standard guideline which contains a minimum measure of the Internal Audit function that needs to be carried out by the Company as well as aspects related to the implementation of Internal Audit and so that a common understanding and foundation is created regarding the level of maintenance of the interests and commitment of all parties related to the Company.

In addition, the Internal Audit Charter is the fulfillment of company compliance in complying with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01 / MBU / 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs and RI Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.

The Company's Internal Audit Charter has been updated and approved through a Joint Decree of the Board of Directors and Board of Supervisor Council No. 38 / Kep-Dir / V / 2017 - KEP-03 / DPJAMKRINDO / V / 2017 dated May 10, 2017.

SPI'S VISION AND MISSION

Based on the Company's Internal Audit Charter, SPI's Vision and Mission are as follows:

Vision

Become a strategic business partner that is independent, objective, professional, trustworthy, responsive through assurance and consulting activities, and can provide added value to the Company.

Mission

1. Actively supervises all Company's activities, including the process of controlling management, operations, and risk management in improving the Company's performance through increasing the efficiency and effectiveness of the Company's activities based on GCG principles.
2. Enhancing the role of internal audits and the quality of audit results through enhancing the competence of Internal Auditors and the utilization of information systems.
3. Seek consulting services to enhance the Company's values and supporting systems, assuring that all Company activities have been carried out according to regulations, business best practices, and established procedures and policies.
4. Providing added value that focuses on business and customers processes, be proactive, enthusiastic, and trustworthy, can communicate effectively, find the

akar permasalahan, dan dapat memanfaatkan secara optimal sistem teknologi informasi.

TUGAS SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) TERKAIT DENGAN PEMERIKSAAN INTERNAL PERUSAHAAN

Dalam menjalankan Pemeriksaan Internal pada Perusahaan, SPI Perum Jamkrindo bertugas:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dengan cara menjalankan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
2. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan anggarannya.
3. Melaksanakan pemeriksaan rutin sesuai Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan pemeriksaan lainnya atas tugas sesuai arahan dan persetujuan Direktur Utama.
4. Melakukan *review* dan evaluasi penerapan GCG dalam penyajian penilaian sesuai ketentuan/kebijakan peraturan organisasi yang berlaku serta memberikan kontribusi pada peningkatan proses manajemen risiko dengan membantu Perusahaan mengidentifikasi besaran risiko yang signifikan.
5. Melakukan koordinasi kegiatan SPI dengan kegiatan unit kerja lainnya di lingkungan Perusahaan dan mengevaluasi kecukupan indikator pengukuran kinerja yang digunakan.
6. Menyusun dan menyempurnakan standar kerja audit internal dan pedoman audit internal dan mengoordinir penyusunan laporan kegiatan SPI.
7. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pihak-pihak terkait.
8. Melakukan *monitoring* dan pelaksanaan atas tindak lanjut atas hasil audit internal maupun eksternal serta memberikan jasa konsultasi yang objektif kepada manajemen dan unit kerja lainnya terkait dengan fungsi pengawasan.
9. Berkoordinasi dengan pihak eksternal berdasarkan penugasan dari Direktur Utama dalam kaitan dengan tugas-tugas pengawasan.
10. Meningkatkan kompetensi pemeriksaan intern melalui pendidikan dan pelatihan.

root of the problem, and optimally utilize information technology systems.

DUTIES OF THE INTERNAL AUDIT UNIT (SPI) RELATED TO THE COMPANY'S INTERNAL AUDIT

In carrying out Internal Audits in the Company, Perum Jamkrindo's SPI is in charge of:

1. Assist the duties of the President Director and the Board of Supervisor Council in conducting supervision by carrying out operations in term of planning, implementation, and monitoring of audit results.
2. Coordinate and integrate the preparation of the Annual Audit Work Program (PKPT) and its budget.
3. Carry out routine audits according to the Annual Audit Work Program (PKPT) and other audits on duties according to the direction and approval of the President Director.
4. Review and evaluate the GCG implementation in presenting assessments according to the applicable organizational regulations provisions/policies and contribute to the improvement of the risk management process by assisting the Company to identify significant risks.
5. Coordinate SPI activities with other work unit activities within the Company and evaluate the adequacy of the performance measurement indicators used.
6. Compile and improve internal audit work standards and internal audit guidelines and coordinate the preparation of SPI activity reports.
7. Submit Reports on Audit Results (LHP) to related parties.
8. Monitor and carry out a follow-up on the internal and external audit results and provide objective consulting services to management and other work units related to the supervisory function.
9. Coordinate with external parties based on the assignment from the President Director concerning supervisory duties.
10. Improve the competencies of internal audits through education and training.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, SPI bertanggung jawab untuk:

1. Menyelenggarakan program kerja pengawasan atas pelaksanaan semua kebijakan dan keputusan Direksi serta program kerja Perusahaan.
2. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada bidang Pengawasan Intern Perusahaan yang berkaitan dengan pemeriksaan kegiatan operasional dan administrasi & keuangan.
3. Melakukan penelitian dan pengujian atas kebenaran laporan atau informasi mengenai segala hal yang dapat menyebabkan kerugian Perusahaan.
4. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama mengenai hasil pemeriksaan, berikut saran perbaikannya.
5. Menilai ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, dengan melakukan penilaian dan pemantauan atas semua sistem, prosedur, ketentuan dan operasional Perusahaan untuk mendorong efektivitas dan ketaatan dalam pelaksanaannya serta memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai pengendalian/pengelolaan risiko usaha.
6. Menilai sistem pengendalian intern perusahaan.
7. Menilai kewajaran Laporan Keuangan dan menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional/non operasional perusahaan.
8. Memberikan pendapat, usulan dan saran perbaikan atas kegiatan operasional/non operasional.
9. Memotivasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh setiap unit kerja dan wajib melakukan penilaian dan pemantauan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut oleh semua Organ Perusahaan.
10. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan atas hasil pemeriksaan SPI maupun auditor eksternal dan melaporkan hasil pantauan tersebut kepada Direktur Utama.
11. Menjadi mitra kerja auditor eksternal dalam pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan Perusahaan ataupun pemeriksaan lainnya.

PARTISIPASI DALAM PERHIMPUNAN PROFESI AUDITOR INTERNAL

SPI Perum Jamkrindo aktif sebagai anggota pada Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI) Asuransi Negara dan Jasa Keuangan (Asgara Jaskeu Plus). Keikutsertaan SPI dalam forum tersebut berguna untuk *sharing* pengetahuan dan informasi mengenai kegiatan pemeriksaan intern sesame BUMN.

To carry out these basic duties, SPI is responsible for:

1. Carry out a supervisory work program to implement all policies and decisions of the Board of Directors and the Company's work program.
2. Coordinate and control the implementation of activities in the Company's Internal Supervision field related to the audit of operational and administrative & financial activities.
3. Conducting research and testing the correctness of the reports or information regarding all matters that can cause losses to the Company.
4. Make and submit a report to the President Director regarding the audit results along with the suggestions for improvement.
5. Assess compliance with existing provisions, by assessing and monitoring all systems, procedures, provisions, and operations of the Company to encourage effectiveness and compliance in its implementation and provide recommendations to the Board of Directors regarding business risk control/management.
6. Assess the Company's internal control system.
7. Assess the fairness of the Financial Statements and assess the efficiency and effectiveness of the Company's operational/non-operational activities.
8. Provide opinions, inputs, and suggestions for improvement of operational/non-operational activities.
9. Motivate the implementation of GCG principles by each work unit and conduct an assessment and monitoring of the implementation of these principles by all Company Organs.
10. Monitor the implementation of the follow-up of audit results of SPI or the external auditors and report monitoring results to the President Director.
11. Become a working partner of external auditors in carrying out audits of the Company's Financial Statements or other audits.

PARTICIPATION IN THE PROFESSIONAL ASSOCIATION OF INTERNAL AUDITORS

SPI of Perum Jamkrindo is active as a member of the Internal Control Unit Communication Forum (FKSPI) of State Insurance and Financial Services (Asgara Jaskeu Plus). The participation of SPI in the forum is useful for sharing knowledge and information about fellow SOEs' internal audit activities.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AUDITOR

Dalam rangka memastikan kesinambungan pengembangan SDM, baik sisi kompetensi maupun *soft-skill*, auditor SPI Perum Jamkrindo terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dengan mengikuti seminar, *workshop*, studi banding, pelatihan dan pendidikan bersertifikasi auditor internal yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan yang kompeten, baik untuk pelatihan audit, manajemen risiko maupun *Good Corporate Governance* (GCG). Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Divisi Satuan Pengawasan Intern di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS SPI TAHUN 2019

1. Pelaksaaan Pemeriksaan Internal

   Sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan SPI Tahun 2019, sampai dengan bulan Juli 2019 telah menyelesaikan pemeriksaan internal terhadap 54 Kantor Cabang, 9 Kantor Wilayah, dan 3 Audit Investigasi pada 3 kantor cabang dan Audit 19 (Sembilan belas) Audit Divisi.

AUDITOR COMPETENCE DEVELOPMENT

To ensure the continuity of HC development, in terms of competencies and soft skills, SPI auditors of Perum Jamkrindo continue to improve their knowledge and capabilities by attending seminars, workshops, comparative studies, training and education of certified internal auditors organized by competent educational institutions, for audit training, risk management and Good Corporate Governance (GCG). Regarding competency development activities participated by the Internal Audit Unit throughout 2019, it could be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE SPI DUTIES IN 2019

1. Implementation of Internal Audit

   According to the SPI Annual Audit Work Program in 2019, until July 2019, it has completed internal audits of 54 (fifty-four) Branch Offices, 9 (nine) Regional Offices, and 3 (three) Investigative Audits at 3 (three) branch offices and 19 (Nineteen) division audits.

54 (LIMA PULUH EMPAT) KANTOR CABANG (KC)
54 (FIFTY-FOUR) BRANCH OFFICES AS FOLLOW:

No	Kantor Wilayah Regional Office	Kantor Cabang Branch Offices	Pelaksanaan Audit Date of Audit
1.	Kanwil I (Medan) Region I Office (Medan)	Batam	11 - 18 Maret 2019 11-18 March 2019
2.		Padang	23 Juli – 30 Juli 2019 23-30 July 2019
3.		Aceh	05 - 12 Juli 2019 05-12 July 2019
4.		Balige	23 - 30 Juli 2019 23-30 July 2019
5.		Tanjung Pinang	24 September – 04 Oktober 2019 24 September – 04 October 2019
6.		Medan	29 Oktober – 8 November 2019 29 October - 8 November 2019
7.		Pekan Baru	16 - 25 Oktober 2019 16 - 25 October 2019
8.	Kanwil II (Palembang) Region II Office (Palembang)	Pangkal Pinang	12 September 2019 12 September 2019
9.		Lampung	05 - 12 Juli 2019 05-12 July 2019
10.		Palembang	12 - 22 November 2019 12 - 22 November 2019
11.		Jambi	21 - 29 November 2019 21 - 29 November 2019

No	Kantor Wilayah Regional Office	Kantor Cabang Branch Offices	Pelaksanaan Audit Date of Audit
12.	Kanwil III (Jakarta) Region III Office (Jakarta)	Serang	4 - 13 September 2019 4 - 13 September 2019
13.		Tangerang	03 - 12 Oktober 2019 03-12 October 2019
14.		Pontianak	20 - 29 November 2019 20 - 29 November 2019
15.		Jakarta	31 Desember 2019 – 15 Januari 2020 31 December 2019 - 15 January 2020
16.	Kanwil IV (Bandung) Region IV Office (Bandung)	Cirebon	23 - 30 Januari 2019 23 - 30 January 2019
17.		Purwakarta	23 - 31 Januari 2019 23 - 30 January 2019
18.		Sukabumi	
19.		Tasikmalaya	
20.		Bandung	16 - 24 September 2019 16 - 24 September 2019
21.	Kanwil V (Semarang) Region V Office (Semarang)	Solo	26 Maret – 02 April 2019 26 March – 02 April 2019
22.		Pekalongan	21 - 28 Maret 2019 21 - 28 March 2019
23.		Purwokerto	23 - 30 April 2019 23 - 30 April 2019
24.		Semarang	24 Juli – 02 Agustus 2019 24 July – 02 August 2019
25.		Kudus	11 - 18 Maret 2019 11 - 18 March 2019
26.		Yogyakarta	21 - 30 Agustus 2019 21 - 30 August 2019
27.	Kanwil VI (Surabaya) Region VI Office (Surabaya)	Madiun	13 - 20 Februari 2019 13 - 20 February 2019
28.		Malang	
29.		Kediri	26 Maret – 02 April 2019 26 March – 02 April 2019
30.		Banyuwangi	22 - 30 April 2019 22 - 30 April 2019
31.		Surabaya	9 - 18 Oktober 2019 9 - 18 October 2019
32.	Kanwil VII (Denpasar) Region VII Office (Denpasar)	Sumbawa Besar	23 - 30 April 2019 23 - 30 April 2019
33.		Mataram	05-12 Juli 2019 05-12 July 2019
34.		Kupang	24 September – 04 Oktober 2019 24 September – 04 October 2019
35.		Denpasar	16 - 25 Oktober 2019 16 - 25 October 2019

No	Kantor Wilayah Regional Office	Kantor Cabang Branch Offices	Pelaksanaan Audit Date of Audit
36.	Kanwil VIII (Banjarmasin) Region VIII Office (Banjarmasin)	Balikpapan	06 - 14 Maret 2019 06 - 14 March 2019
37.		Tarakan	05-12 Juli 2019 05-12 July 2019
38.		Palangkaraya	29 Oktober – 06 November 2019 29 October - 8 November 2019
39.		Samarinda	30 Oktober – 08 November 2019 30 October – 08 November 2019
40.		Banjarmasin	06 - 15 November 2019 06 - 15 November 2019
41.	Kanwil IX (Makassar) Region IX Office (Makassar)	Pare-pare	06 - 15 Maret 2019 06 - 15 March 2019
42.		Bitung	26 Maret – 02 April 2019 26 March – 02 April 2019
43.		Ambon	23 April – 1 Mei 2019 23 April – 1 May 2019
44.		Palopo	05-12 Juli 2019 05-12 July 2019
45.		Palu	23 Juli – 03 Agustus 2019 23 July – 03 August 2019
46.		Sorong	23 - 31 Juli 2019 23 - 31 July 2019
47.		Gorontalo	30 Juli – 7 Agustus 2019 30 July – 7 August 2019
48.		Ternate	13 - 21 Agustus 2019 13 - 21 August 2019
49.		Makassar	14 - 23 Agustus 2019 14 - 23 August 2019
50.		Kendari	4 - 12 September 2019 4 - 12 September 2019
51.		Manado	4 - 13 September 2019 4 - 13 September 2019
52.		Jayapura	24 September – 04 Oktober 2019 24 September – 04 October 2019
53.		Manokwari	03 - 12 Oktober 2019 03 - 12 October 2019
54.	Kantor Cabang Khusus Special Branch Office	Jakarta	30 Desember 2019 – 13 Januari 2020 30 December 2019 – 13 January 2020

9 (SEMBILAN) KANTOR WILAYAH (KW)
9 (NINE) REGIONAL OFFICES

No	Kantor Wilayah Regional Offices	Pelaksanaan Audit Date of Audit
1.	Kanwil VI (Surabaya) Region VI Office (Surabaya)	14 - 23 Februari 2019 14 - 23 February 2019
2.	Kanwil I (Medan) Region I Office (Medan)	06 - 15 Maret 2019 06 - 15 March 2019
3.	Kanwil VII (Denpasar) Region VII Office (Denpasar)	14 - 23 Agustus 2019 14 - 23 August 2019
4.	Kanwil II (Palembang) Region II Office (Palembang)	14 - 23 Agustus 2019 14 - 23 August 2019
5.	Kanwil VIII (Banjarmasin) Region VIII Office (Banjarmasin)	06 - 15 Oktober 2019 06 - 15 October 2019
6.	Kanwil V (Semarang) Region V Office (Semarang)	04 - 13 Desember 2019 04 - 13 December 2019
7.	Kanwil IX (Makassar) Region IX Office (Makassar)	
8.	Kanwil IV (Bandung) Region IV Office (Bandung)	11 - 20 Desember 2019 11 - 20 December 2019
9.	Kanwil III (Jakarta) Region III Office (Jakarta)	30 Desember 2019 – 13 Januari 2020 30 December 2019 – 13 January 2020

3 (TIGA) AUDIT INVESTIGASI
3 (THREE) INVESTIGATIVE AUDITS

No	Kantor Wilayah Regional Offices	Kantor Cabang Branch Offices	Pelaksanaan Audit Date of Audit
1.	Kanwil II (Palembang) Region II Office (Palembang)	Bengkulu	13 - 22 Januari 2019 13 - 22 January 2019
2.	Kanwil IX (Makassar) Region IX Office (Makassar)	Mamuju	14 - 23 Februari 2019 14 - 23 February 2019
3.		Palu	23 Juli – 03 Agustus 2019 23 July – 03 August 2019

19 (SEMBILAN BELAS) AUDIT DIVISI
19 (NINETEEN) DIVISION AUDITS.

No	Divisi Division	Pelaksanaan Audit Date of Audit
1.	Divisi jaringan dan Layanan Network and Service Division	02 - 15 Mei 2019 02 - 15 May 2019
2.	Desk Bisnis Penjaminan Syariah Sharia Guarantee Business Desk	6 - 17 Mei 2019 6 - 17 May 2019
3.	Divisi Teknik dan Administrasi Bisnis Engineering & Business Administration Division	
4.	Divisi Umum General Affair Division	
5.	Divisi Hukum dan Kepatuhan Legal and Compliance Division	
6.	Divisi Bisnis 3 Business Division 3	15 - 31 Mei 2019 15 - 31 May 2019
7.	Divisi Keuangan dan Investasi Finance and Investment Division	21 Mei – 14 Juni 2019 21 May – 14 June 2019
8.	Divisi Bisnis 1 Business Division 1	22 Mei – 12 Juni 2019 22 May – 12 June 2019
9.	Divisi Bisnis 2 Business Division 2	
10.	Desk Subrogasi Subrogation Desk	
11.	Divisi Akuntansi Accounting Division	
12.	Divisi Manajemen Risiko dan PUKM Risk Management and Micro Enterprise Rating, Small Business, Medium Business,and Management Consultation	22 Mei – 13 Juni 2019 22 May – 13 June 2019
13.	Desk Sistem Resi Gudang Warehouse Receipt System Guarantee Desk	29 November – 06 Desember 2019 29 November – 06 December 2019
14.	Divisi Penunjang Bisnis Business Support Division	06 - 19 Desember 2019 06 - 19 December 2019
15.	Divisi MSDM HRM Division	
16.	Divisi Perencanaan Strategis Strategic Planning Division	17 - 31 Desember 2019 17 - 31 December 2019
17.	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	30 Desember – 13 Januari 2020 30 December – 13 January 2020
18.	Divisi Teknologi Informasi Information Technology Division	
19.	Divisi Klaim Claim Division	

2. Audit ISO 9001:2015 Layanan Penjaminan dan Klaim

   Pelaksanaan Pra Audit ISO 9001:2015 merupakan langkah awal dalam rangka mendapatkan sertifikasi ISO layanan penjaminan & klaim dari PT Sucofindo (Persero).

2. Guarantee and Claim Services Audit of ISO 9001: 2015

   The implementation of the Pre-Audit ISO 9001: 2015 is the first step to obtain ISO certification of guarantee & claim services from PT Sucofindo (Persero).

No.	Area/Bagian/Proses yang Diaudit The Audited Area/Section/Process	Tanggal Date
1.	Kantor Cabang Palembang Palembang Branch Office	22 s.d 30 April 2019 April 22-30, 2019
2.	Kantor Cabang Jambi Jambi Branch Office	
3.	Kantor Cabang Solo Solo Branch Office	
4.	Kantor Cabang Yogyakarta Yogyakarta Branch Office	

Selanjutnya, Audit ISO akan dijadikan sebagai *surveillance audit* oleh SPI dalam rangka memastikan bahwa layanan penjaminan dan klaim telah sesuai dengan ISO 9001:2015.

Furthermore, the ISO Audit would be used as a surveillance audit by SPI to ensure that guarantees and claims services were according to ISO 9001: 2015.

3. Penyelesaian tindaklanjut (TL) atas hasil pemeriksaan

   Berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut atas LHP SPI tahun 2019, 2018, dan 2017, dapat kami sampaikan rekap matriks penyelesaian tindak lanjut sampai dengan November 2019:

   a. Perkembangan Tindak Lanjut LHP SPI Tahun 2019

3. Completion of follow-up (TL) on the audit results

   Based on the follow-up of monitoring results of the SPI audit result report in 2019, 2018, and 2017, we could convey the recap of the follow-up completion matrix until November 2019:

   a. Development of Follow-Up of SPI audit result report in 2019

Unit Kerja Work Unit	Jumlah Temuan Number of Findings	Jumlah Rekomendasi atas Temuan Number of Recommendations on Findings	Penyelesaian Tindak Lanjut s/d bulan Desember 2019 Completion of the Follow-up up to December 2019		Belum Selesai Ditindaklanjuti have not been finished to be followed up	
Divisi / Divisions	87	136	86	63,24%	50	36,76%
Kantor Cabang/ Branch Offices	761	1846	1441	78,06%	405	21,94%
Kantor Wilayah / Regional Offices	33	68	56	82,35%	12	17,65%
JUMLAH / TOTAL	881	2050	1583	77,22%	467	22,78%

   b. Perkembangan Tindak Lanjut LHP SPI Tahun 2018

   b. Development of the Follow-Up of SPI Audit Result Report in 2018

Unit Kerja Work Unit	Jumlah Temuan Number of Findings	Jumlah Rekomendasi atas Temuan Number of Recommendations on Findings	Penyelesaian Tindak Lanjut s/d bulan Desember 2019 Completion of the Follow-up up to December 2019		Belum Selesai Ditindaklanjuti have not been finished to be followed up	
Divisi / Divisions	88	130	102	78,46%	28	21,54%
Kantor Cabang/ Branch Offices	422	761	748	98,29%	14	1,84%
Kantor Wilayah / Regional Offices	49	111	111	100,00%	0	0,00%
JUMLAH / TOTAL	559	1002	961	95,91%	42	4,19%

4. Pendampingan Pelaksanaan Pemeriksaan Eksternal

a. Assessment Good Corporate Governance

1) Assessment GCG Perum Jamkrindo tahun 2018 dilaksanakan sejak bulan Desember 2018 s.d Maret 2019 dengan tiga metode, yaitu:

4. IV. Assistance with the Implementation of External Audits

a. Good Corporate Governance Assessment

1) Perum Jamkrindo GCG Assessment in 2018 has been conducted from December 2018 until March 2019 with three methods, namely:

No.	Metode Penilaian Assessment Method	Assessor
1.	Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara Copy of Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs Number: SK-16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012, concerning Indicators / Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State-Owned Enterprises	PT Cita Negeri Amanah (*Subsidiary of* IICD) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 56/SPK/4.2/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Jasa *Assessor Assessment* Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Perum Jamkrindo Tahun 2018 PT Cita Negeri Amanah (Subsidiary of IICD) based on Work Order Letter Number: 56 / SPK / 4.2 / XII / 2018 dated December 28, 2018, regarding Assessment Assessor Services for Perum Jamkrindo's Good Corporate Governance Implementation 2018
2.	*Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS) Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)	
3.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 54/SEOJK.05/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin Financial Services Authority Circular Letter Number: 54 / SEOJK.05 / 2017 dated October 12, 2017, concerning Reports on the Implementation of Good Corporate Governance for Guarantee Institutions	Tim Internal berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor: 667/SPT/1/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 perihal Tim *Counterpart Assessment* Penerapan GCG Tahun 2018 Internal Team based on the Task Order Letter (SPT) Number: 667 / SPT / 1 / XII / 2018 dated December 4, 2018, concerning the Assessment Counterpart Team of GCG Implementation in 2018

2) Dalam rangka membangun pemahaman serta persepsi yang sama mengenai konsep, prinsip dan praktik GCG kepada seluruh Insan Perusahaan, pada tanggal 27 Februari 2017 telah dilaksanakan acara Sosialisasi *Assessment Good Corporate Governance* versi *Scoring Methodology Asean CG Scorecard* (ACGS) dan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK 16/S.MBU/2012 dengan Pemateri dari PT Cita Negeri Amanah (*Subsidiary of* IICD) sebagai Konsultan *Assessment* GCG.

2) To build the same understanding and perception of the GCG concepts, principles, and practices to all Company Personnel, on February 27, 2017, the Good Corporate Governance Assessment Socialization was held with a scoring version of the Methodology of Asean CG Scorecard (ACGS) and Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs Number: SK 16 / S.MBU / 2012 with presenters from PT Cita Negeri Amanah (Subsidiary of IICD) as GCG Assessment Consultants.

b. Audit BPKP

Sesuai dengan surat tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Keuangan (BPKP) nomor SR-187/D5/02/2019 Tanggal 28 Februari 2019 Perihal Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Penempatan Dana Investasi pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) Tahun 2012 sampai dengan 2018. Audit dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari kerja.

b. BPKP Audit

According to Assignment Letter of Indonesia's National Government Internal Auditor (BPKP) number SR-187 / D5 / 02/2019 dated February 28, 2019, regarding Audit with Specific Purpose on the Placement of Investment Funds in Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) from 2012 to 2018. The audit was carried out for 40 (forty) working days.

5. Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal

a. BPKP

Penyelesaian tindak lanjut atas Laporan Hasil Reviu Progres Pemanfaatan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2015 (sampai dengan Triwulan IV Tahun 2016) dan Tahun 2016 (Triwulan I Tahun 2017) pada Perum Jamkrindo Nomor: SP-769/D4/03/2017, sebagai berikut:

Jumlah Temuan Number of Findings	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	Penyelesaian Tindak Lanjut Completion of Follow up	
		Jumlah Total	%
2	2	1	50%

SPI melakukan monitoring tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dengan berkoordinasi dan bersurat secara periodik tiap bulan dengan unit kerja terkait untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi tersebut sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

b. Otoritas Jasa Keuangan

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK bulan September 2019. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor:S-30/NB.2/2019 tanggal 10 Januari 2019 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPLF) Perum Jamkrindo Tahun 2018.

Jumlah Temuan Number of Findings	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	Penyelesaian Tindak Lanjut Completion of Follow up	
		Jumlah Total	%
32	36	36	100,00%

Sesuai dengan surat tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor S-385/NB.2/2019 Tanggal 26 Juli 2019 Perihal Pemeriksaan Perum Jamkrindo Tahun 2019 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dan Pasal 4 ayat (2a) POJK Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

c. Audit BPK PDTT

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK PDTT bulan Juli 2019. Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 3/S/

5. Implementation of Completion of Follow-Up on External Audit Results

a. BPKP

The completion of follow-up on the Review Results Report of the Funds Additional Utilization Progress of the Government Paid-in Capital (PMN) in 2015 (up to Quarter IV of 2016) and 2016 (Quarter I of 2017) at Perum Jamkrindo Number: SP-769 / D4 / 03/2017, as followed:

SPI monitors the follow-up on the audit results by coordinating and correspondence periodically every month with the relevant work units to complete the follow-up to the recommendations according to the stipulated deadline.

b. Financial Services Authority

Completion of the Follow-Up to OJK Audit Results in September 2019. Financial Services Authority Letter (OJK) Number: S-30 / NB.2 / 2019 dated January 10, 2019, Concerning the Final Direct Audit Result Report (LHPLF) of Perum Jamkrindo 2018.

In accordance with the Financial Services Authority (OJK) assignment letter number S-385/NB.2/2019 dated July 26, 2019 concerning Inspection of Perum Jamkrindo in 2019 in accordance with Law Number 1 of 2016 concerning Guarantees and Article 4 paragraph (2a) Financial Services Authority Regulation Number 6 /POJK.05/2016 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.05/2014 Concerning On Site Examination Of Non-Bank Financial Services Institution

c. BPK PDTT Audit

Completion of Follow-Up to the Audit Results of Audit with Specific Purposes (PDTT) of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) in July 2019. Letter of

IXXX.4/01/2019 tanggal 4 Maret 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan PDTT-BPKRI Nomor: 05/AUDITAMA VII/PDTT/01/2019 tanggal 30 Januari 2019.

the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) Number: 3 / S / IXXX.4 / 01/2019 dated March 4, 2019, and Report on Results of PDTT-BPKRI Audit Number: 05 / AUDITAMA VII / PDTT / 01/2019 dated January 30, 2019.

Jumlah Temuan Number of Findings	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	Penyelesaian Tindak Lanjut Completion of Follow up	
		Jumlah Total	%
16	37	25	67,57%

SPI melakukan monitoring tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dengan berkoordinasi dan bersurat secara periodik dengan unit kerja terkait untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi tersebut sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

SPI monitors the follow-up on the audit results by periodically coordinating and correspondence with the relevant work units to complete the follow-up to the recommendations according to the stipulated deadline.

d. Audit KAP

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan KAP bulan Juni 2019. Perkembangan penyelesaian tindak lanjut atas Management Letter Tahun 2018 Nomor:17.03.03/PJ/HGK.HO/II-2019, sebagai berikut:

d. Public Accounting Firm (KAP) Audit

Completion of Follow-Up to KAP Audit Results in June 2019. Development of the follow-up completion of Management Letter 2018 Number: 17.03.03 / PJ / HGK.HO / II-2019, as followed:

Jumlah Temuan Number of Findings	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	Penyelesaian Tindak Lanjut Completion of Follow up	
		Jumlah Total	%
11	11	11	100,00%

SPI melakukan monitoring tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dengan berkoordinasi dan bersurat secara periodik dengan unit kerja terkait untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi tersebut sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

SPI monitors the follow-up on the audit results by periodically coordinating and correspondence with the relevant work units to complete the follow-up to the recommendations according to the stipulated deadline.

General Audit Tahun Buku 2019 yang dilakukan oleh KAP Hertanto, Grace dan Karunawan (HGK) berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS) Nomor: 24/PK/UM UM/X/2019 – 71.03.06/PJ/HGK.HO/X-2019 tanggal 03 Oktober 2019 dan telah dilakukan entry meeting yang dihadiri oleh Dewan Pengawas, Direksi, KAP HGK dan seluruh Kepala Divisi pada tanggal 15 Oktober 2019.

General Audit 2019 conducted by KAP Hertanto, Grace and Karunawan (HGK) based on Cooperation Agreement (PKS) Number: 24 / PK / UM UM / X / 2019 - 71.03.06 / PJ / HGK.HO / X-2019 date October 3, 2019 and an entry meeting was attended by the Board of Supervisor Council, Directors, KAP HGK and all Head of Division on October 15, 2019.

Sesuai dengan Surat Nomor:003/OPR/HGK/JMK/XI-2019 tanggal 13 November 2019 perihal Kunjungan Cabang, KAP melakukan sampling pada 2 (dua) Kantor Wilayah dan 6 (enam) Kantor Cabang Perum Jamkrindo, yaitu:

In accordance with Letter Number: 003 / OPR / HGK / JMK / XI-2019 dated November 13, 2019 regarding Branch Visits, KAP conducted sampling at 2 (two) Regional Offices and 6 (six) Jamkrindo Public Branch Offices, namely:

No.	Unit Kerja Work unit	Waktu Pemeriksaan Time of Inspection
1	Kanca Makassar Makassar Branch Office	20 - 29 November 2019 20 - 29 November 2019
2	Kanca Padang Padang Branch Office	17 - 26 November 2019 17 - 26 November 2019
3	Kanca Ternate Ternate Branch Office	01 - 10 Desember 2019 01 - 10 December 2019
4	Kanca Pekalongan Pekalongan Branch Office	
5	Kanca Surabaya Surabaya Branch Office	11 - 20 Desember 2019 11 - 20 December 2019
6	Kanca Manado Manado Branch Office	
7	Kanwil Makassar Makassar Regional Office	20 - 29 November 2019 20 - 29 November 2019
8	Kanwil Surabaya Surabaya Regional Office	11 - 20 Desember 2019 11 - 20 December 2019

e. BPK-RI

Monitoring atas penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terkait LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Penjaminan Kredit Program (KUR) dan Non Program (*Eksisting*), Penjaminan Bersama (*Co-Guarantee*), dan Pengelolaan Biaya Operasional pada Perum Jamkrindo Tahun Buku 2012 dan 2013 serta LHP Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Tahun 2011 s.d Semester I Tahun 2012, dengan perkembangan tindaklanjut sebagai berikut:

e. Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI)

Monitoring of the completion of Follow-Ups to BPK-RI Audit Result Reports related to Audit Result Report (LHP) of Audit with Specific Purposes (PDTT) for Program Credit Guarantee (KUR) and Non-Program (Existing), Co-Guarantee, and Operational Cost Management at Perum Jamkrindo for Fiscal Year 2012 and 2013 as well as LHP for the State Losses Compensation Settlement in 2011 until Semester I of 2012, with the development of the follow up as followed:

Jumlah Temuan Number of Findings	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	Penyelesaian Tindak Lanjut Completion of Follow up	
		Jumlah Total	%
7	28	27	96,43%

SPI melakukan monitoring tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dengan berkoordinasi dan bersurat secara periodik tiap bulan dengan unit kerja terkait untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi tersebut sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan surat tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor 44/ST/IX-XX.1/08/2019 Tanggal 06 Agustus 2019 Perihal Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program yang dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015 s.d 2018 pada

SPI monitors the follow-up on the audit results by periodically coordinating and correspondence with the relevant work units to complete the follow-up to the recommendations according to the stipulated deadline.

In accordance with the letter of assignment of the Supreme Audit Institution (BPK) number 44/ST/IX-XX.1/08/2019 dated August 06, 2019 Regarding Compliance Examination of Program Management funded by the State Capital Participation Fund (PMN)

Kementrian BUMN, BUMN Penerima PMN Tunai dan Instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara.

6. Pelaksanaan Kegiatan Lainnya

a. Sosialisasi pedoman *Whistle Blowing System* (WBS).

Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang selanjutnya disebut Perusahaan memiliki komitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan, serta menjadikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai landasan operasional di lingkungan Perusahaan.

Terkait dengan usaha penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi, suap dan praktik kecurangan lainnya, maka salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system*).

Whistle Blowing System (WBS) adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pelapor dalam melaporkan terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan.

Sejak diterbitkannya Peraturan Direksi *Whistle Blowing System* (WBS) Nomor: 04/Per-Dir/IV/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistle Blowing System* (WBS) SPI melakukan sosialisasi WBS terhadap auditee bersamaan dengan pelaksanaan general audit.

b. Revisi *Charter* dan Kebijakan Audit

Satuan Pengawasan Intern (SPI) mempunyai *Audit Charter* yang ditetapkan pada Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Nomor : 38/Kep-Dir/V/2017-KEP-03/DP-JAMKRINDO/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dan Pedoman Audit Internal Berbasis Risiko yang ditetapkan pada Peraturan Direksi Nomor : 11/Per-Dir/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pedoman Audit Internal Berbasis Risiko (*Risk Based Internal Audit*) Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

Cash 2015 until 2018 at the Ministry of SOEs, SOEs PMN Cash Receivers and other related institutions in DKI Jakarta, North Sumatra, Riau Islands, Banten, West Java, Central Java, East Java, NTB, South Sulawesi and North Maluku.

6. Implementation of Other Activities

a. Socialization of the Whistleblowing System (WBS) guidelines.

Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, hereinafter referred to as the Company, commits to implement Good Corporate Governance (GCG) consistently and sustainably, and to make the principles of Good Corporate Governance (GCG) as the operational foundation in the Company's environment.

Related to efforts to implement Good Corporate Governance (GCG) and include the eradication of corruption, bribery and other practices of fraud, then one of the most effective ways to prevent and combat practices that are contrary to Good Corporate Governance (GCG) is through violation reporting systems (whistleblowing system).

Whistleblowing System (WBS) is part of the internal control system in preventing the practice of irregularities and fraud and strengthening the application of Good Corporate Governance (GCG) practices. This system is expected to increase the reporter's participation in reporting violations that can harm the Company.

Since the issuance of the Board of Directors' Whistleblowing System (WBS) Regulation Number: 04 / Per-Dir / IV / 2018 dated April 10, 2018, concerning Guidelines for Management of the Whistleblowing System (WBS), SPI disseminated WBS to the auditee together with the general audit.

b. Charter Revision and Audit Policy

The Internal Audit Unit (SPI) has an Audit Charter determined by the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Supervisor Council Number: 38/Kep-Dir/V/2017- KEP-03/DP-JAMKRINDO/V/2017 dated May 10, 2017, concerning the Internal Audit Charter of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia and Risk-Based Internal Audit Guidelines stipulated in the Board of Directors Regulation Number: 11 / Per-Dir / VI / 2016 dated June 20, 2016, concerning Risk-Based Internal Audit Guidelines of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan efek audit internal, memberikan nilai tambah kepada Manajemen dan menyelaraskan fokus kegiatan audit internal dengan pencapaian dan tujuan sasaran Perusahaan, sehingga dipandang perlu audit internal terfokus pada area-area yang berisiko dan hal-hal yang signifikan bagi pencapaian tujuan dan sasaran

Perusahaan serta selaras dengan harapan *stakeholders* kepada Satuan Pengawasan Intern. Untuk mengoptimalkan visi dan misi Satuan Pengawasan Intern tersebut dibutuhkan Satuan Pengawas Intern yang andal, baik dari sisi sumber daya manusia, prosedur dan sistem manajemen audit. Prosedur audit yang ada haruslah sejalan dengan proses bisnis Perusahaan, sehingga hasil pemeriksaan dapat terstandar dan memberikan masukan untuk perbaikan unit kerja.

Target/sasaran yang ingin dicapai terkait *Methodology Audit* (*policy* & *procedure*) antara lain:

1) Tersedianya *methodology* yang dapat digunakan secara implementatif pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit berbasis risiko.
2) Tersedianya standarisasi prosedur yang applicable bagi auditor dalam melaksanakan audit program yang berbasis risiko.
3) Pengembangan prosedur penilaian *auditee* (audit *rating*) atas hasil pemeriksaan audit, sehingga management dapat dengan mudah untuk melihat kinerja unit kerja yang di audit.
4) *Methodology Audit* (*policy* & *procedure*) digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengembangan sistem audit (*Audit Management System*).
5) Mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Keluaran *Methodology* Audit (*policy* & *procedure*) diharapkan dokumen resmi (Audit Charter, Kebijakan Audit, & Prosedur Audit) yang telah disahkan oleh Manajemen Perum Jamkrindo.

c. Penyusunan Kebijakan Pidana Korporasi.

Pembuatan Kebijakan Pidana Korporasi untuk membantu meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dan efektifitas dalam mencegah dan memerangi pelaku – pelaku yang terjerat dalam pidana korporasi.

Dengan diterbitkannya Perma Nomor 13 Tahun 2016 maka Perma tersebut mengatur:

1) Penjelasan ketentuan umum yang menjelaskan berbagai hal termasuk bentuk Korporasi baik

In order to increase the internal audit's effect, provide added value to Management and align the focus of internal audit activities with the achievement and objectives of the Company, so that it is deemed necessary internal audit to focus on risk areas and significant matters for achieving the goals and objectives.

The Company is in line with stakeholders' expectations of the Internal Audit Unit. To optimize the vision and mission of the Internal Audit Unit, a reliable Internal Audit Unit is needed, both in terms of human resources, audit procedures, and management systems. Existing audit procedures must be in line with the Company's business processes so that the results of the audit can be standardized and provide input for the improvement of work units.

Targets/goals to be achieved related to Audit Methodology (policy & procedure) include:

1) The availability of methodology that can be implemented at the risk-based audit planning and implementation stage.
2) Availability of applicable standardized procedures to auditors in carrying out risk-based audit programs.
3) Development of auditee assessment procedures (audit rating) of the audit results, so that management can easily see the performance of the audited work units.
4) Audit methodology (policy & procedure) is used as a basis for developing an audit system (Audit Management System).
5) Support the creation of Good Corporate Governance.

The output of audit methodology (policy & procedure) is expected that the official documents (Audit Charter, Audit Policy & Audit Procedure), which have been approved by the Management of Perum Jamkrindo.

c. Formulation of Corporate Criminal Policy.

Establishment of a Corporate Criminal Policy to help improve performance on an ongoing basis and effectiveness in preventing and combating perpetrators who are caught up in corporate crime

With the issuance of Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, the Supreme Court Regulations regulates:

1) Explanation of general provisions that explain various matters, including the form of corporation,

berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan pengurus yang juga meliputi penerimaan manfaat (*beneficial owners*).

2) Perbuatan dan beberapa bentuk kesalahan dari Korporasi;

3) Tata cara penanganan perkara dengan pelaku tindak pidana adalah Korporasi, mulai dari bagaimana tata cara pemeriksaan sampai dengan penanganan Korporasi Induk, *Subsidiary* dan yang berhubungan serta Korporasi yang melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan serta pemisahan;

4) Tata cara penanganan aset Korporasi termasuk kebolehan bentuk penyimpanan berupa uang hasil penjualan aset Korporasi yang disita dengan potensi nilai ekonomi yang menurun sampai adanya putusan;

5) Eksekusi denda, uang pengganti restitusi serta sanksi lainnya.

Atas ketentuan tersebut, perlu dilakukan penyusunan atas Kebijakan Pidana Korporasi pada Perum Jamkrindo, sehingga kedepannya terdapat peraturan internal yang memuat penjelasan, tata cara, sanksi sampai dengan perlindungan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korporasi.

d. Evaluasi Perdir *Whistle Blowing System*

Pelaksanaan Whistleblowing System mengacu kepada Keputusan Direksi Nomor: 07/Kep-Dir/II/2018-KEP-03/DPJAMKRINDO/II/2018 tanggal 5 Februari 2018 Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) pada Perum Jamkrindo. Sosialisasi WBS pada tahun 2018 dan 2019 dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) bersamaan dengan pelaksanaan General Audit kepada 56 (lima puluh enam) Kantor Cabang dan 9 (sembilan) Kantor Wilayah.

Usulan perbaikan Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) adalah:

1) Membuat kebijakan mengenai jangka waktu (*service level agreement*) atas laporan pengaduan yang masuk.

2) Memberikan feedback bagi pelapor mengenai status laporan yang masuk, agar dapat diketahui sejauh mana proses pengaduan yang telah dilakukan.

3) Membuat ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap pelapor atas ancaman yang mungkin terjadi dan *reward* yang diberikan oleh perusahaan kepada pelapor.

legal and non-legal entity, and management, includes the receipt of benefits (beneficial owners).

2) Action and some forms of corporate faults;

3) The procedures for handling cases with the criminal offender are corporations, starting from the procedure for audit to the handling of Holding Company, Subsidiary and the related, and Corporations that conduct mergers, acquisitions, and separation;

4) Procedures for handling Corporate assets including those permitted in the form of safekeeping of money from Corporate assets sale which are confiscated with potential economic value that decreases until a decision is made;

5) Fines execution, restitution, and other sanctions.

Concerning these provisions, it is necessary to prepare the Corporate Criminal Policy at Perum Jamkrindo so that in the future, there will be internal regulations containing explanations, procedures, sanctions, and protections relating to Corporate Criminal Acts.

d. An evaluation of the Whistleblowing System

The implementation of the Whistleblowing System refers to the Board of Directors Decree Number: 07/Kep-Dir/II/2018-KEP-03/DPJAMKRINDO/II/2018 dated February 5, 2018 Guidelines for Management of the Whistleblowing System in Perum Jamkrindo. WBS socialization in 2018 and 2019 was carried out by the Internal Audit Unit (SPI) together with the implementation of General Audit to 56 (fifty-six) Branch Offices and 9 (nine) Regional Offices.

Proposed improvements to the Guidelines for Management of the Whistleblowing System are:

1) Make a policy regarding the period (service level agreement) for incoming complaint reports.

2) Provide feedback to the whistleblower regarding the incoming report status, so that it can be known the extent of the complaint process has been carried out.

3) Make provisions regulating the whistleblower's protection against possible threats and rewards given by the Company to the whistleblower.

4) Perbaikan informasi pada website pelaporan pelanggaran pada halaman pertama yang minimal memuat informasi sebagai berikut (terlampir):
   - Lingkup Pengaduan Pelanggaran
   - Informasi atau tata cara Laporan penggaduan pelanggaran (Identitas Bentuk, Kapan, Siapa, Kerugian dan sanksi)
   - Mekanisme Penanganan pelanggaran dan Pelaporan

e. *Fraud Control Plan*.

Fraud Control Plan merupakan Panduan/pedoman penyusunan rencana atau mekanisme untuk mencegah terjadinya *fraud* di lingkungan suatu organisasi, Pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian yang berindikasi fraud serta Sistem tersebut ditandai dengan adanya atribut-atribut yang spesifik yang merupakan pendalaman atau penguatan dari sistem tata kelola setiap organisasi yang telah ada yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masing-masing organisasi. Perum Jamkrindo melalui surat nomor: B.5344/EKT/SPI/XII/2019 pada tanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Bimbingan Teknis *Fraud Control Plan* (FCP) Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP) sebagai bagian dari kegiatan implementasi FCP.

f. SPI *Sharing Knowledge*.

SPI Perum Jamkrindo dalam melaksanakan pengawasan internal sebagai mitra strategis bagi manajemen yang dipercaya, profesional, obyektif, dan *independent* melalui kegiatan assurance dan consulting yang dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Perusahaan dengan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko, sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik. Selama tahun 2019, SPI melakukan Sharing Knowledge (produk/SOP/Peraturan terbaru) terhadap *auditee* bersamaan dengan pelaksanaan general audit.

4) Information correction related to violation reporting on the website, at the front page, which at least contains the following information (attached):
   - Scope of Violation Complaints
   - Information or procedures for violation complaint report (Identity, Form, When, Who, Losses and Sanctions)
   - Violation and Reporting Handling Mechanisms

e. Fraud Control Plan.

Fraud Control Plan is a guide/guideline for preparing a plan or mechanism to prevent fraud in an organizational environment. Development of controls specifically designed to prevent, deter, and facilitate disclosure of events that indicate fraud and the system are marked with specific attributes that deepen or strengthen the existing organizational governance system, which is influenced by the situation and conditions of each organization. Perum Jamkrindo through letter number: B.5344 / EKT / SPI / XII / 2019 on December 3, 2019, has submitted a request for Technical Guidance for the Fraud Control Plan (FCP) to Deputy for Investigation of the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) as part of the FCP implementation activities.

f. SPI Sharing Knowledge.

Perum Jamkrindo's SPI in carrying out internal supervision as a strategic partner for trusted, professional, objective and independent management through assurance and consulting activities that can provide added value to the achievement of the Company's objectives by increasing the effectiveness of risk management, internal control systems, and good corporate governance. During 2019, SPI conducted Knowledge Sharing (new products / SOPs / Regulations) to the auditee together with the implementation of general audits.

AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik, atau proses audit yang dilakukan pihak eksternal melakukan audit finansial untuk memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran, ketepatan dan kesesuaian Laporan Keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntan Publik harus terbebas dari pengaruh Dewan Pengawas, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perusahaan, serta Perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan dalam proses audit eksternal sehingga memungkinkan Akuntan Publik memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan dan kesesuaian Laporan Keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Penunjukan Auditor Publik mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik; dan usulan Dewan Pengawas yang disahkan dalam RPB. Berdasarkan PP 20/2015 tersebut, Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, di mana Auditor Publik dapat memberikan kembali jasa audit setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit pada perusahaan yang sama.

KEPATUHAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian Laporan Keuangan Perusahaan dan patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

PROSEDUR AUDIT EKSTERNAL DAN STANDAR AUDIT

- Audit atas Laporan Keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.
- Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.

PUBLIC ACCOUNTANT

Public Accountants or a process of financial audits carried out by external parties provides independent and objective opinions regarding the fairness, accuracy, and suitability of the Company's financial statements with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) and applicable laws and regulations. Public Accountants must be free from the influence of the Board of Supervisor Council, Board of Directors, and other interested parties in the Company. The Company must provide all accounting records and supporting data needed in the external audit process to enable Public Accountants to give their opinions on the fairness, compliance, and suitability of the Company's financial statements with Indonesian Financial Accounting Standards.

The appointment of Public Accountant refers to Government Regulation No. 20 of 2015 concerning the Practice of Public Accountants; and the proposal of the Board of Supervisor Council that as ratified in the Joint Discussion Meeting (RPB). Based on PP 20/2015, the service of Public Accountant is limited to a maximum of 5 (five) consecutive years. The same Public Accountant can provide audit services again after 2 (two) consecutive fiscal years of not providing audit services to the same Company.

COMPLIANCE WITH INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

Management is responsible for presenting the Company's financial statements and complying with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) stipulated by the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI).

EXTERNAL AUDIT PROCEDURES AND AUDIT STANDARDS

- An audit of the Company's financial statements is carried out according to the professional standards of a Public Accountant, which covers all audit procedures deemed necessary according to the circumstances.
- The audit includes testing and evaluating the internal control system and conducting audits on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit will also include an assessment of the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation according to the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI).

- Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam Laporan Keuangan.
- Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perusahaan untuk di-*review* oleh badan atau otoritas terkait.
- Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

MEKANISME PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Tahapan mekanisme penunjukan KAP:

1. Dewan Pengawas melalui Komite Audit melakukan usulan calon Auditor eksternal dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa.
2. Dewan Pengawas dapat melakukan penunjukan kembali auditor eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja auditor eksternal untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan.
3. Dewan Pengawas menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada RPB dan besarnya honorarium/imbalan jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut.
4. Usulan kepada RPB tersebut dapat disampaikan melalui surat tersendiri yang merupakan bagian dari surat tanggapan Dewan Pengawas atas kinerja tahunan.
5. Dewan Pengawas mengevaluasi kinerja auditor eksternal melalui Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
6. Untuk proses penunjukan calon auditor eksternal dan atau penunjukan kembali auditor eksternal yang dilakukan oleh RPB, Dewan Pengawas cukup memberikan kuasa kepada RPB untuk menetapkan auditor tersebut.

- As part of the audit process, the Public Accounting Firm (KAP) also conducted a question and answered session with the management regarding the management statement presented in the financial statements.
- The audit contains an inherent risk that, in the event of material errors and irregularities, the Public Accounting Firm will convey them to management. The Management approved the Public Accounting Firm's inspection document on the Company to be reviewed by the relevant agency or authority.
- The audit is carried out based on the Public Accountant Professional Standards issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). If there is financial assistance from the Republic of Indonesia's Government, the audit is carried out based on the State Financial Inspection Standards (SPKN) issued by the Indonesian Audit Board (BPK).

THE MECHANISM FOR THE APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM

The following are the stages of the appointment mechanism of Public Accounting Firm:

1. The Board of Supervisor Council, through the Audit Committee, proposes external Auditor candidates by requesting the assistance of the Board of Directors in the appointment process according to the provisions of procurement of goods/services.
2. The Board of Supervisor Council can reappoint an external auditor based on an evaluation of the external auditor's performance to conducting an audit of the financial statements.
3. The Board of Supervisor Council submits the reasons for the nomination to the Joint Discussion Meeting (RPB) and the proposed amount of honorarium/fee proposed for the external auditor's services.
4. The proposal to the Joint Discussion Meeting can be submitted in a separate letter, which is part of the Board of Supervisor Council's response letter to the annual performance.
5. The Board of Supervisor Council evaluates the performance of external auditors through the Audit Committee according to applicable provisions and standards.
6. For the process of appointing prospective external auditors and/or reappointing external auditors carried out by the Joint Discussion Meeting, the Board of Supervisor Council can authorize the Joint Discussion Meeting to determine the auditor.

MEKANISME PENUNJUKAN HINGGA PENETAPAN AKUNTAN PUBLIK
THE MECHANISM FOR THE APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM



AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2019

Berdasarkan keputusan RPB tahun 2019 disetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan untuk melaksanakan audit independen Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2019. Sementara akuntan yang akan melaksanakan audit independen Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2019 adalah Bambang Karunawan, S.E., Ak., CPA., CA. Audit Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2019 oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan telah memasuki periode ke-5 berturut-turut.

THE PUBLIC ACCOUNTING FIRM APPOINTED IN 2019

Based on the 2019's Joint Discussion Meeting's decision, the appointment of Hertanto, Grace, Karunawan Public Accounting Firm (KAP) has been approved to carry out an independent audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2019. The accountant who will conduct an independent audit of the Company's Financial Statements for 2019 was Bambang Karunawan, SE, Ak. , CPA., CA. The audit of the Company's financial statements for 2019 by Hertanto, Grace, Karunawan Public Accounting Firm has entered its 5th period in a row.

AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2019
PUBLIC ACCOUNTING FIRM IN 2019

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	KAP Hertanto, Grace, Karunawan
Akuntan Accountant	Bambang Karunawan, S.E., Ak., CPA., CA
Tahun Audit Audit Yea	Tahun Buku 2019 / Fiscal Year 2019
Periode Penugasan Assignment Period	15 Oktober sampai dengan 10 Februari 2020 October 15 to February 10, 2020
Jasa Services	Audit umum (general audit) atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2019 General audit of the Consolidated Financial Statements for 2019 Fiscal Year
Jasa Lainnya Other Services	Audit atas Kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Pengendalian Intern tahun 2019 Audit of Company Compliance with applicable Laws and Internal Control in 2019. Evaluasi Kinerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Performance Evaluation for the year ended December 31, 2019. Audit atas Laporan Keuangan Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pihak Pertama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Audit of Financial Statement of Partnership and Community Development Program Management of First Party for the year ended December 31, 2019. *Review*/telahaan atas Pengendalian Internal Pihak Pertama, sekaligus menyampaikan usulan/rekomendasi perbaikannya, dalam hal ditemukan kelemahan yang signifikan, yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut Direksi Reviewed of the First Party's Internal Control, as well as submitted recommendations/ suggestions for improvements, in case significant weaknesses which needed attention and followed-up of the Board of Directors, were found.
Biaya / Fee	458.850.000

Hasil audit menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 Perusahaan "Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".

The audit results stated that the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2019 "presented fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Perum Jaminan Kredit Indonesia and its subsidiaries on December 31, 2019, as well as the financial performance and the consolidated cash flows for the year ended, according to Financial Accounting Standards in Indonesia" (Unqualified Opinion).

DAFTAR AKUNTAN PUBLIK

Guna kepentingan transparansi, berikut disajikan Auditor Publik Laporan Keuangan Perusahaan 5 (lima) tahun berturut-turut, untuk tahun buku 2015 hingga 2019 seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

THE LIST OF PUBLIC ACCOUNTING FIRMS

For transparency, the following presented the Public Accounting Firms appointed by the Company to audit its Financial Statements for 5 (five) consecutive years. The list for 2015 to 2019 fiscal year could be seen in the table below:

Tahun Buku Fiscal Year	Akuntan Accountant	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Opini Opinion	Biaya Jasa Audit (Rp-ribu Audit Fee (thousand Rp)
2019	Bambang Karunawan	Hertanto, Grace, Karunawan	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Unqualified Opinion	458.850
2018	Bambang Karunawan	Hertanto, Grace, Karunawan	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Unqualified Opinion	424.500
2017	Drs. Hertanto	Hertanto, Grace, Karunawan	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Unqualified Opinion	386.000
2016	Drs. Hertanto	Hertanto, Grace, Karunawan	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Unqualified Opinion	387.612
2015	Drs. Hertanto	Hertanto, Grace, Karunawan	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Unqualified Opinion	389.565

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DIREKSI

Perum Jamkrindo tidak memiliki komite-komite yang berada di bawah Direksi, maka pada tahun 2019 tidak terdapat informasi terkait penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF THE COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Perum Jamkrindo doesn't have existing committees under the Board of Directors, there was no information related to assessment of the performance of the Committees under the Board of Directors.

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, SAMPAI KEPADA PEMILIK INDIVIDU
Information About Major And Controlling Shareholders, Whether Direct Or Indirect, Until The Individual Owner

Perum Jamkrindo merupakan entitas usaha dengan status hukum Perusahaan Umum (Perum), di mana Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia menjadi pemilik modalnya. Kebijakan kepemilikan modal dalam Perusahaan dilakukan melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan demikian, Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian BUMN menjadi pemilik tunggal sekaligus entitas induk akhir dari Perum Jamkrindo. Pemegang saham utama dan pengendali adalah Pemerintah Republik Indonesia. Komposisi Pemegang saham sampai dengan 31 Desember 2019 adalah 100% Pemerintah Republik Indonesia, tidak terdapat informasi terkait pemilik individu.

Perum Jamkrindo is a business entity with the legal status of a Public Corporation (Perum), in which the Republic of Indonesia through its Government is the owner of its equity. The policy of equity ownership in the Company is carried out through the mechanism known as the State Equity Participation (PMN). Thus, the Republic of Indonesia through its government/Ministry of SOEs becomes the sole owner and the ultimate parent entity of Perum Jamkrindo. Major and controlling shareholders is the Government of the Republic of Indonesia. Composition of Shareholder up to 31 December 2019 is 100% belong to the Republic of Indonesia, there was no information related to individual owners.

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

DEFINISI MANAJEMEN RISIKO PERUM JAMKRINDO

Manajemen Risiko merupakan sistem yang digunakan untuk memperkuat aspek akuntabilitas Direksi dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan pengembangan kinerja Perusahaan. Komitmen dalam penerapan Manajemen Risiko, sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem manajemen Perusahaan secara keseluruhan, dinyatakan dalam Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko yang dibangun sesuai konteks dan kapabilitas Perusahaan. Manajemen Risiko Perusahaan diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perusahaan dengan menggunakan ISO 31000:2018.

KELENGKAPAN MANAJEMEN RISIKO

Untuk implementasi manajemen risiko secara terintegrasi, maka diperlukan beberapa kelengkapan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan manajemen risiko. Terkait dengan hal tersebut, Perum Jamkrindo telah menyusun beberapa kelengkapan sebagai berikut:

1. Peraturan Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko merupakan peraturan yang menyatakan tentang penerapan manajemen risiko dan perangkat pendukung yang diperlukan. Dalam peraturan tersebut dilampirkan pernyataan tentang pengelolaan risiko yang merupakan pernyataan Direksi dan seluruh Pejabat Perum Jamkrindo mengenai kebijakan penanganan risiko Perusahaan. Pernyataan tersebut merupakan bentuk tertulis dari komitmen Direksi dan Pejabat Perum Jamkrindo dalam menerapkan manajemen risiko dalam setiap tahapan kegiatan.
2. Organisasi Manajemen Risiko Perum Jamkrindo secara struktural, Direksi telah menetapkan struktur organisasi yang di dalamnya terdapat Divisi Manajemen Risiko dan PUKM. Di samping organisasi yang bersifat struktural, terdapat pula struktur yang bersifat *ad hoc*, yaitu Komite Manajemen Risiko Perum Jamkrindo. Komite Manajemen Risiko (KMR) Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia adalah komite yang beranggotakan Direksi dan Kepala Divisi yang berkaitan dengan pengelolaan Manajemen Risiko Perusahaan. Komite Manajemen Risiko berperan untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi risiko usaha, jenis, dan dampaknya terhadap kegiatan Perusahaan, menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* Perusahaan, dan memberikan laporan atas pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan kepada Dewan Pengawas.
3. Di samping itu, untuk kelancaran pelaksanaan proses manajemen risiko, di setiap unit kerja ditunjuk seorang *Person in Charge* (PIC) yang bertugas untuk

PERUM JAMKRINDO RISK MANAGEMENT DEFINITION

Risk Management is a system used to strengthen the accountability aspects of the Board of Directors in supporting the decision making process and the development of the Company's performance. Commitment in implementing Risk Management, as an inseparable part of the Company's overall management system, is stated in the Risk Management Policies and Procedures that are built according to the Company's context and capabilities. The Company's Risk Management is implemented according to the Company's conditions and needs by using ISO 31000: 2018.

COMPLETENESS OF RISK MANAGEMENT

For the integrated risk management implementation, several types of equipment are needed to support the implementation of risk management. Regarding this matter, Perum Jamkrindo has compiled several of equipment as follows:

1. Directors' Regulations on the Implementation of Risk Management are regulations that state the application of risk management and the necessary supporting equipment. The regulation is attached with a statement on risk management, which is a statement of the Directors and all Perum Jamkrindo Officials regarding the Company's risk management policies. The statement is a written form of the commitment of the Board of Directors and Perum Jamkrindo Officials in implementing risk management at each stage of the activity.
2. Perum Jamkrindo's Risk Management Organization structurally, the Board of Directors has established an organizational structure in which there is a Risk Management Division and PUKM. In addition to the structural organization, there is also an ad hoc structure, namely Perum Jamkrindo's Risk Management Committee. The Risk Management Committee (KMR) of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia is a committee consisting of the Board of Directors and Division Heads related to the management of the Company's Risk Management. The Risk Management Committee has a role in conducting periodic assessments and providing recommendations of business risks, types, and their impact on the Company's activities, determine the Company's risk appetite and risk tolerance and provide reports on the implementation of the Company Risk Management to the Board of Supervisor Council.
3. Besides, for the smooth implementation of the risk management process, a Person in Charge (PIC) is assigned to coordinate the implementation of the risk

mengoordinasikan pelaksanaan proses manajemen risiko di masing-masing unit kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, PIC Manajemen Risiko berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Divisi Manajemen Risiko dan PUKM.

4. Kebijakan Manajemen Risiko Perum Jamkrindo merupakan pedoman atau acuan penerapan Manajemen Risiko yang terintegrasi di Perusahaan dan pedoman penyusunan kebijakan pendukung di korporasi dan tingkat Unit Kerja. Kebijakan Manajemen Risiko tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) ke dalam SOP yang terdapat di dalam Divisi Manajemen Risiko dan PUKM.

5. SOP Manajemen Risiko merupakan SOP yang ditujukan untuk memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan proses manajemen risiko pada Perum Jamkrindo. SOP Manajemen Risiko diterbitkan dengan Surat Edaran Direksi No. 13/SE/5/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Manajemen Risiko Perum Jamkrindo.

6. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Risiko diterbitkan dengan Surat Edaran Direksi No 40/SE/5/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018. Petunjuk Teknis tersebut memuat penjelasan mengenai panduan teknis penerapan Manajemen Risiko di Perum Jamkrindo.

   Panduan teknis penerapan Manajemen Risiko tersebut secara garis besar adalah :

   - Penetapan Konteks dan Kriteria
   - Identifikasi Risiko
   - Analisis Risiko
   - Evaluasi Risiko
   - Penanganan Risiko
   - Monitoring Risiko
   - Komunikasi dan Konsultasi Risiko
   - Pencatatan dan Pelaporan Risiko
   - Toleransi Risiko

7. SOP Proses Bisnis Berbasis Risiko merupakan SOP dari suatu proses bisnis yang disusun dengan mempertimbangkan risiko yang terkait di dalam proses tersebut. SOP tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa risiko yang tercantum dalam *risk register* dan pengendalian risiko yang diperlukan telah dipertimbangkan dalam pelaksanaan proses bisnis, sementara untuk jenis-jenis risiko baru dipastikan telah mendapatkan opini dari Divisi Manajemen Risiko dan PUKM sebagai *second opinion* dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Mengingat jenis kegiatan yang ada di Perum Jamkrindo cukup beragam, maka penyusunan SOP proses bisnis berbasis risiko dilakukan secara bertahap oleh setiap pemilik proses bisnis.

management process in each work unit. In carrying out their duties, the Risk Management PIC coordinates and consults to the Risk Management Division and PUKM.

4. Perum Jamkrindo's Risk Management Policy is a guideline or reference for the implementation of integrated Risk Management in the Company and guidelines for the formulation of supporting policies at the corporate and work unit level. The Risk Management Policy is then cascaded into SOPs contained in the Risk Management and PUKM Division.

5. Risk Management SOP is an SOP intended to provide technical guidance in the implementation of risk management processes at Perum Jamkrindo. Risk Management SOP is issued with the Board of Directors Circular Letter No. 13 / SE / 5 / IV / 2019 dated April 18, 2019, concerning Standard Operating Procedure (SOP) of Perum Jamkrindo's Risk Management.

6. The Guidelines for the Implementation of Risk Management are issued with the Board of Directors' Circular Letter No 40 /SE/5/XII/2018 dated December 21, 2018. The Technical Guidelines contain an explanation of the technical guidelines for implementing Risk Management at Perum Jamkrindo.

   The technical guidelines for implementing Risk Management in the outline are:

   - Establishing Contexts and Criteria
   - Risk identification
   - Risk Analysis
   - Risk Evaluation
   - Risk Management
   - Risk Monitoring
   - Risk Communication and Consultation
   - Risk Recording and Reporting
   - Risk Tolerance

7. Risk-based Business Process SOP is an SOP of a business process that is prepared by considering the risks involved in the process. The SOP is intended to ensure that the risks listed in the risk register and the necessary risk controls have been considered in the implementation of business processes. In contrast, for new types of risk, it is certain to have received an opinion from the Risk Management Division and PUKM as a second opinion in decision-making considerations. Since the types of activities at Perum Jamkrindo are quite diverse, the preparation of risk-based business process SOPs is carried out in stages by each business process owner.

8. Sistem Pendukung Manajemen Risiko Terintegrasi telah ada sejak tahun 2011, Perusahaan telah mulai membangun Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR). Aplikasi tersebut berfungsi untuk mempermudah proses identifikasi, penilaian risiko, dan tindak lanjut penanganan risiko secara periodik dan terekam digital. Dengan adanya aplikasi, data risiko dapat tersimpan dalam bentuk database yang terstruktur.

BLUE-PRINT MANAJEMEN RISIKO PERUM JAMKRINDO

Untuk melakukan implementasi manajemen risiko terintegrasi, Perum Jamkrindo telah menyusun *Blue-Print* Manajemen Risiko Terintegrasi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. *Blue-Print* yang telah diperbaharui pada tahun 2019 tersebut merupakan cetak biru arsitektur pengembangan *Enterprise Risk Management* (ERM).

Secara umum, *Blue-Print ERM* Perum Jamkrindo terdiri dari 4 komponen utama yaitu infrastruktur, kapabilitas, integrasi, dan budaya. Keempat komponen tersebut memiliki berbagai elemen sebagai bagian utamanya, secara lebih lengkap model *Blueprint ERM* Perum Jamkrindo digambarkan dalam model di bawah ini.

8. The Integrated Risk Management Support System has existed since 2011. The Company has begun to develop a Risk Management Information System (SIMR) Application. The application serves to facilitate the process of identification, risk assessment, and follow-up on risk management periodically and digitally recorded. With the application, risk data can be stored in a structured database.

PERUM JAMKRINDO RISK MANAGEMENT BLUEPRINT

To implement integrated risk management, Perum Jamkrindo has prepared a Blueprint for the Integrated Risk Management of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. The updated Blueprint in 2019 is the Blueprint for the Enterprise Risk Management (ERM) development architecture.

In general, Perum Jamkrindo's ERM Blueprint consists of 4 (four) principal components, namely infrastructure, capabilities, integration, and culture. The four components have various elements as their main parts. In more detail, Perum Jamkrindo's ERM Blueprint model is described in the model below.



ROAD MAP MANAJEMEN RISIKO

Untuk mencapai kondisi penerapan manajemen risiko seperti yang telah dituangkan dalam blue print Manajemen Risiko, Perum Jamkrindo telah menyusun road map implementasi pengembangan manajemen risiko sampai tahun 2024, dengan *milestone* pencapaian *Blue-Print* manajemen risiko yang terintegrasi adalah sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT ROAD MAP

To achieve the conditions of risk management implementation as outlined in the Risk Management blueprint, Perum Jamkrindo has compiled a road map for the implementation of risk management development until 2024, with the milestone of achieving an integrated risk management blueprint as follows:

2020	• Membangun *Loss Event Database* • Mengintegrasikan aplikasi SIMR, BIA dan LEM • *Risk Maturity Assessment* • Sosialisasi Manajemen Risiko • BCM *Maturity Assessment* • Uji Coba BC *Plan*	• Building a Loss Event Database • Integrating SIMR, BIA and LEM applications • Risk Maturity Assessment • Risk Management Socialization • BCM Maturity Assessment • Trial of BC Plan
2021	• Pemutakhiran Panduan Tatakelola Manajemen Risiko (RM *Policy*, RM *Manual*, RM *Procedure*) • *Risk Maturity Assessment* • Sosialisasi Manajemen Risiko • BCM *Maturity Assessment* • GRC *Awareness* • Integrasi Aplikasi SIMR dan Aplikasi Operasional • Apresiasi Penerapan MR pada Unit Kerja	• Update on Risk Management Governance Guidelines (RM Policy, RM Manual, RM Procedure) • Risk Maturity Assessment • Risk Management Socialization • BCM Maturity Assessment • GRC Awareness • Integration of SIMR Applications and Operational Applications • Appreciation of the Risk Management Implementation in the Work Units
2022	• Pengembangan/pemutakhiran aplikasi SIMR • *Risk Maturity Assessment* • Sosialisasi Manajemen Risiko • BCM *Maturity Assessment* • GRC *Awareness* • Uji Coba BC *Plan* • Integrasi lanjutan Aplikasi SIMR dan Aplikasi Operasional/Akuntansi • Forum/*Workshop* Manajemen Risiko • Apresiai Penerapan MR pada Unit Kerja	• Development / updating of the SIMR application • Risk Maturity Assessment • Risk Management Socialization • BCM Maturity Assessment • GRC Awareness • Trial of BC Plan • Advanced integration of SIMR Applications and Operational / Accounting Applications • Risk Management Forum / Workshop • Appreciation of the RM Implementation in the Work Units
2023	• Penyusunan Pedoman GRC • *Risk Maturity Assessment* • Sosialisasi Manajemen Risiko • BCM *Maturity Assessment* • GRC *Awareness* • Inisiasi Program Integrasi GRC • Forum/*Workshop* Manajemen Risiko • Apresiai Penerapan MR pada Unit Kerja	• Preparation of GRC Guidelines • Risk Maturity Assessment • Risk Management Socialization • BCM Maturity Assessment • GRC Awareness • Initiation of the GRC Integration Program • Risk Management Forum / Workshop • Appreciation of the MR Implementation in the Work Units
2024	• Menyusun rancangan infrastruktur GRC • *Risk Maturity Assessment* • Sosialisasi Manajemen Risiko • BCM *Maturity Assessment* • GRC *Awareness* • Uji Coba BC *Plan* • Program lanjutan integrasi GRC • Forum/*Workshop* Manajemen Risiko • Apresiai Penerapan MR pada Unit Kerja	• Preparing GRC infrastructure designs • Risk Maturity Assessment • Risk Management Socialization • BCM Maturity Assessment • GRC Awareness • Trial of BC Plan • Advanced GRC integration program • Risk Management Forum / Workshop • Appreciation of the MR Implementation in the Work Units

Note :

bahwa Uji Coba BC Plan yang menjadi program kerja tahun 2020 akan dilaksanakan apabila kondisi memungkinkan untuk dilakuakn perkumpuan massal mengingat kondisi Pandemi Covid-19, namun apabila sampai dengan akhir tahun 2020 untuk perkumpulan massal masih belum diijinkan, maka Divisi Manajemen Risiko dan PUKM akan menjadwalkan kembali pelaksanaannya pada progam kerja periode tahun 2020.

PERKEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO PERUM JAMKRINDO

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penjaminan kredit, Perum Jamkrindo telah menerapkan pengelolaan risiko penjaminan kredit melalui Sistem Manajemen Risiko Penjaminan Kredit. Sistem ini meliputi rangkaian prosedur yang digunakan untuk mengindentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan Penjaminan Kredit. Dalam pelaksanaannya, Sistem Manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif pada seluruh tahapan kegiatan penjaminan kredit disesuaikan dengan kemampuan sumber daya Perusahaan serta karakteristik dan risiko kredit yang dijamin. Pada tahapan implementasi, dilakukan proses identifikasi risiko penjaminan yang bertujuan untuk memprediksi risiko atas kredit yang diajukan Penjaminannya oleh Penerima Jaminan. Prediksi risiko tersebut dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam rangka implementasi Manajemen Risiko yang lebih baik dan terkendali, pada tahun 2019 Perum Jamkrindo melakukan hal-hal sebagai berikut:

I. Penetapan *Milestone* Pengembangan ERM Perusahaan

   Untuk mencapai sasaran tersebut Divisi Manajemen Risiko dan PUKM menyusun strategi dengan tersedianya kerangka kerja Manajemen Risiko secara terperinci. Langkah-langkah kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan menyusun *blue print* dan roadmap Manajemen Risiko.

II. Perusahaan Tanggap Menghadapi Kondisi Darurat.

   Untuk mencapai sasaran tersebut Divisi Manajemen Risiko dan PUKM Menyusun strategi dengan mengimplementasikan *Business Continuity Management* (BCM) pada perusahaan. Langlah-langkah kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut adalah :

   - Menyusun SOP *Business Continuity Plan* (BCP) pada Unit Kerja kritikal
   - Melakukan sosialisasi BCM
   - Melakukan pengembangan aplikasi untuk pengisian kuesioner *Business Impact Analysis* (BIA).

Note:

that the BC Plan Trial which will become a work program in 2020 will be carried out if the conditions allow for mass gatherings, considering the Covid-19 Pandemic conditions, but if until the end of 2020 for mass gatherings are still not permitted, the Risk Management and PUKM Division will reschedule its implementation in the 2020 work program.

DEVELOPMENT OF PERUM JAMKRINDO RISK MANAGEMENT

As a company engaged in credit guarantee, Perum Jamkrindo has implemented credit guarantee risk management through the Credit Guarantee Risk Management System. This system includes a series of procedures used to identify, measure, monitor, and control risks arising from Credit Guarantee activities. In its implementation, the Risk Management System is implemented effectively at all stages of credit guarantee activities according to the ability of the Company's resources and the characteristics and guaranteed credit risk. At the implementation stage, a guarantee risk identification process is carried out, aiming to predict the risk of the credit that its guarantee proposed by the Guarantee recipient. Risk prediction is used as one of the considerations in decision making. To implement a better and controlled Risk Management, in 2019, Jamkrindo carried out the following:

I. Determination of Company ERM Development Milestone

   To achieve these objectives, the Risk Management and PUKM Division prepared a strategy with the availability of a detailed Risk Management framework. The activity steps needed to achieve these targets were by preparing a Risk Management blueprint and roadmap.

II. The Company Responded to Emergencies.

   To achieve these targets, the Risk Management and PUKM Division prepared a strategy by implementing Business Continuity Management (BCM) in the Company. The activity steps needed to achieve these goals were:

   - Preparing Business Continuity Plan (BCP) SOPs in critical Work Units
   - Socializing BCM
   - Developing applications for filling out the Business Impact Analysis (BIA) questionnaires.

Dapat dilaporkan bahwa saat ini Divisi Manajemen Risiko dan PUKM telah menyusun SOP BCP dibakukan melalui Surat Edaran Nomor 2/SE/5/I/2019 tentang SOP *Business Continuity* (BC) Plan serta sosialisasinya dilakukan bersamaan dengan sosialisasi kebijakan MR lainnya.

Dapat dilaporkan juga Divisi Manajemen Risiko dan PUKM bekerjasama dengan Divisi Umum telah melakukan uji coba BC Plan dan simulasi gempa bumi pada tanggal 17 Juni 2019 dengan peserta seluruh penghuni Gedung Jamkrindo.

III. Terdapat Pedoman *Loss Event Management* (LEM) yang akan dijadikan pedoman untuk Divisi Manajemen Risiko dan PUKM dalam Pengumpulan Database Kejadian Kerugian Perusahaan. Saat ini Divisi Manajemen Risiko dan PUKM sedang dalam proses penyusunan SOP Loss Event Management (LEM) yang dibantu lembaga konsultan.

IV. Implementasi *Risk Based Audit*.

Divisi Manajemen Risiko dan PUKM mempunyai strategi yaitu bersinergi dengan Satuan Pengawas Intern (SPI). Langkah yang dapat dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan PUKM adalah dengan mengintegrasikan pelaksanaan *risk based audit*.

V. Project P*lan Risk Maturity Self Assesment*.

Dalam pelaksanaan program kerja *risk maturity self assessment,* Divisi Manajemen Risiko dan PUKM bekerjasama dengan pihak tenaga ahli untuk pelaksanaan *Risk Maturity Self Assessment* dan pembuatan pedoman *Risk Maturity Assessment*.

VI. Pengembangan Wawasan dan Kompetensi SDM.

Untuk sasaran tersebut Divisi Manajemen Risiko dan PUKM mempunyai strategi yaitu peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Divisi Manajemen Risiko dan PUKM. Langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut yaitu :

- Mengikutsertakan pelatihan/sertifikasi/seminar/kursus Manajemen Risiko dan PUKM serta pengetahuan lainnya yang dapat menunjang pengelolaan Manajemen Risiko dan PUKM bagi seluruh karyawan pada Divisi Manajemen Risiko dan PUKM
- Melakukan benchmarking pada perusahaan yang telah menjalankan implementasi manajemen risiko sesuai *best practice*.

Dapat dilaporkan bahwa Divisi Manajemen Risiko dan PUKM mengikuti pelatihan/ sertifikasi/seminar/kursus yaitu *Round Table* "Risiko Holding BUMN", Mengukur Risiko Operasional Perbankan (*Risk Tolerance & Risk*

It could be reported that at present, the Risk Management and PUKM Division has prepared a standardized BCP SOPs through Circular Letter Number 2 / SE / 5 / I / 2019 regarding Business Continuity (BC) Plan SOPs and its socialization was carried out in conjunction with other RM policy socialization.

It could also be reported that the Risk Management and PUKM Division, in collaboration with the General Affairs Division, have conducted a BC Plan trial and earthquake simulation on June 17, 2019, with all the residents of the Jamkrindo Building.

III. There was a Loss Event Management Guideline (LEM), which would be used as a guideline for the Risk Management and PUKM Division in the Corporate Loss Events Database Collection. Currently, the Risk Management and PUKM Division were preparing Loss Event Management (LEM) SOPs, which was assisted by a consulting agency.

IV. Risk-Based Audit Implementation

The Risk Management and PUKM Division had a synergizing strategy with the Internal Control Unit (SPI). The steps that could be taken by the Risk Management and PUKM Division was to integrate the implementation of risk-based audits.

V. Risk Maturity Self Assessment Project Plan.

In the implementation of the risk maturity self-assessment work program, the Risk Management and PUKM Division worked together with experts to carry out Risk Maturity Self Assessment and the preparation of Risk Maturity Assessment guidelines.

VI. Development of HC Insights and Competencies.

For this goal, the Risk Management and PUKM Division had a strategy to increase the capacity and quality of the Human Capital of the Risk Management and PUKM Division. The steps to achieving this goal were:

- Participating in training/certification/seminars/courses of Risk Management and PUKM and other knowledge that could support the management of Risk Management and PUKM for all employees in the Risk Management and PUKM Division
- Benchmarking companies that have implemented risk management according to best practices.

It could be reported that the Risk Management and PUKM Division participated in training/certification/seminars/courses namely the "BUMN Holding Risk" Round Table, Measuring Banking Operational Risk (Risk Tolerance &

Appetite, Risk Loss Event Database, Control Self Assessment, Key Operational Risk Indicators), Mekari *Conference "Powering Indonesia SMEs with Technology"*, Mengelola dan Mengukur Risiko Kredit, Implementasi *Business Continuity* Management saat Terjadi Bencana & telah melakukan pengajuan atas pelatihan yang ingin ikuti kepada Divisi MSDM.

VII. Penguatan *Risk Awareness* Perusahaan

Untuk sasaran tersebut Divisi Manajemen Risiko dan PUKM melakukan perumusan strategi yaitu dengan meningkatkan kesadaran para *Risk Owner* terhadap fungsi dan peranan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan proses bisnis di Perusahaan. Langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut yaitu :

- Melakukan sosialisasi Manajemen Risiko bagi seluruh *Risk Owner*
- Penguatan *Risk Awareness* untuk seluruh Direksi, Kepala Unit Kerja dan Kepala Bagian sesuai kualifikasi yang diperlukan.

Dapat dilaporkan bahwa Divisi Manajemen Risiko dan PUKM sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi Manajemen Risiko kepada seluruh Koordinator *Risk Owner* dan PIC MR. Penguatan Manajemen Risiko untuk seluruh Direksi, Kepala Unit Kerja dan Kepala Bagian mengikuti jadwal yang disusun oleh Divisi MSDM.

VIII. Monitoring Profil Risiko Perusahaan Berjalan Efektif.

Strategi Divisi Manajemen Risiko dan PUKM untuk mencapai sasaran tersebut adalah tersedianya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) terbaru yang dapat berjalan dengan efektif. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu :

- Pelaksanaan proses Manajemen Risiko diseluruh Unit Kerja secara tepat waktu dengan menggunakan aplikasi SIMR.
- Terdapat informasi risiko penjaminan perusahaan
- Melakukan maintenance aplikasi SIMR.

Dapat dilaporkan bahwa Divisi Manajemen Risiko dan PUKM telah melakukan kegiatan pengelolaan risiko pada Divisi, Kantor Wilayah, KCK, Kantor Cabang melalui aplikasi SIMR untuk periode TW-4 2019.

IX. Terdapat kesadaran seluruh insan perusahaan terhadap pelaksanaan manajemen risiko

Sasaran tersebut dilakukan melalui komitmen yang kuat dalam pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan. Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung strategi tersebut, Divisi Manajemen Risiko dan PUKM akan melakukan pengkinian data (*updating*)

Risk Appetite, Risk Loss Event Database, Control Self Assessment, Key Operational Risk Indicators), "Powering Indonesia SMEs with Technology" Mekari Conference, Managing and Measuring Credit Risk, Implementing Business Continuity Management in the event of a Disaster & has submitted a training proposal that would be attended to the HRM Division.

VII. Strengthening of Company Risk Awareness

For this purpose, the Risk Management and PUKM Division carried out a strategy formulation by increasing the risk owners' awareness of the function and role of Risk Management in implementing business processes in the Company. The steps to achieve these goals were:

- Disseminating Risk Management to all Risk Owners
- Strengthening Risk Awareness for all Board of Directors, Work Unit Heads, and Division Heads according to the required qualifications.

It could be reported that the Risk Management and PUKM Division was carrying out Risk Management socialization activities to all Risk Owner Coordinators and RM PIC. Strengthening Risk Management for all Board of Directors, Work Unit Heads, and Division Heads followed the schedule prepared by the HRM Division.

VIII. Effective Monitoring of Company Risk Profiles.

The strategy of the Risk Management and PUKM Division to achieve these targets was the availability of the latest Risk Management Information System (SIMR) application that could run effectively. The steps taken were:

- Implementation of the Risk Management process in all Work Units on time using the SIMR application.
- Company guarantee risk information was available
- Performed SIMR application maintenance.

It could be reported that the Risk Management and PUKM Division has carried out risk management activities at Divisions, Regional Offices, KCK, Branch Offices through the SIMR application for the 4th Quarter of 2019 period.

IX. There was awareness of all company personnel towards the risk management implementation

These targets were carried out through a strong commitment to the implementation of risk management in the Company. The steps of activities taken to support this strategy, the Risk Management and PUKM Division would update the charter of the Risk Management

charter/piagam komitmen pelaksanaan Manajemen Risiko pada tingkat Kepala Divisi/Kantor Wilayah/ Cabang/KUP setiap ada perubahan komposisi pejabat pada struktur organisasi.

X. Tersedianya *tools scoring* untuk kepentingan bisnis dan penunjang

Sasaran tersebut didukung oleh strategi dengan pelaksanaan proses scoring untuk kepentingan bisnis dan penunjang

Langkah-langkah terwujudnya sasaran tersebut sesuai dengan RKAP 2019 yaitu:

a. Pengembangan sistem aplikasi kuesioner BIA

b. Pengembangan sistem aplikasi Pialang Reasuransi

c. Pengembangan sistem aplikasi scoring agen dibatalkan dengan pertimbangan scoring tersebut telah terakomodir di aplikasi yang telah dibangun oleh Divisi Penunjang Bisnis

XI. Terdapat kerjasama dengan mitra dalam rangka pengelolaan risiko perusahaan

Perumusan strategi untuk mendukung sasaran tersebut yaitu melakukan Kerjasama dengan Dukcapil, Infobank dan Pefindo Biro Kredit.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu :

a. Melakukan perpanjangan PKS dengan Dukcapil dan Pefindo Biro Kredit,

b. Memanfaatkan data Infobank atau lembaga sejenis.

Dapat dilaporan bahwa Divisi Manajemen Risiko dan PUKM telah Menyusun pemanfaatan data Infobank dan telah didistribusikan kepada seluruh Unit Kerja Bisnis. Telah dilakukan perpanjangan PKS dengan Pefindo Biro Kredit dan perpanjangan PKS dengan Dukcapil.

XII. Melaksanakan Kompetisi Bagi Pelaku Usaha Rintisan (*Startup*)

Jamkrindo *StartUp Challenge* 2019 di bidang teknologi dengan tema sesuai kebutuhan perusahaan.

Dilakukan dengan melaksanakan Kompetisi *Startup* bagi Start bidang TI (Teknologi Informasi) yang produknya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis Perum Jamkrindo. Dapat dilaporkan saat ini telah terselenggara kegiatan Jamkrindo *StartUp Challenge* 2019 yang diberinama Kompetisi Jamkrindo Hackathon "*Smart Access Technology*" 2019 pada 10 - 12 Juli 2019.

implementation commitment at the levels of Division Head/Regional Office/ Branch Office/KUP every time there was a change in the composition of officials in the organizational structure.

X. Scoring tools were available for business and supporting purposes

The target was supported by a strategy with the scoring process implementation for business and supporting purposes.

The steps to realize these targets were according to the 2019 RKAP, namely:

a. Development of the BIA questionnaire application system

b. Development of the Reinsurance Broker application system

c. Development of the scoring agent application system was canceled, considering that the scoring was accommodated in applications that have been built by the Business Support Division.

XI. XI. There was cooperation with partners in the context of corporate risk management

The formulation of a strategy to support the target was to collaborate with the Department of Population and Civil Registration (Dukcapil), Infobank, and Pefindo Credit Bureau.

The steps that could be done were:

a. Extending Cooperation Agreement (PKS) with Dukcapil and Pefindo Credit Bureau,

b. Utilizing data from Infobank or similar institutions.

It could be reported that the Risk Management and PUKM Division has compiled the utilization of Infobank data and has been distributed to all Business Work Units. PKS has been extended with Pefindo Credit Bureau and PKS extension with Dukcapil.

XII. Organizing a Competition for Startup Businesses

Jamkrindo StartUp Challenge 2019 in the field of technology with the theme according to Company needs.

It was conducted by implementing a Startup Competition for Startup in the IT (Information Technology) field whose products could benefit the Perum Jamkrindo business. It could be reported that the Jamkrindo StartUp Challenge 2019 event was held at this time, which was named the Jamkrindo Hackathon Competition "Smart Access Technology" 2019 on July 10-12, 2019.

XIII. Memberikan Penghargaan terhadap UMKM Terjamin Perum Jamkrindo

- Jamkrindo UMKM *Award*
  Memberikan penghargaan kepada UMKMK yang sudah menjadi mitra terjamin Perum Jamkrindo. Kandidat UMKMK yang akan memperoleh penghargaan diutamakan yang berasal dari UMKMK Unggulan yang dimiliki oleh Perum Jamkrindo. Terdiri dari usaha mikro, kecil dan menengah, Jamkrindo UMKM *Award* telah dilaksanakan pada 29 - 30 November 2019.
- Pendampingan UMKM Ungulan
  Pendampingan bagi UMKM Unggulan Perum Jamkrindo, dipilih berdasarkan sektor-sektor usaha tertentu yang dianggap menarik, membawa keunikan dan konten local. Dapat dilaporkan saat ini telah disusunnya Kerangka Acuan Kerja Jamkrindo UMKM *Award* dan saat ini sedang disusunkan jadwal sosialisasi tentang pemberian *award* tersebut melalui kantor wilayah dan kantor cabang. Untuk pendampingan UMKM unggulan akan dilakukan *review* penggunaan *metode* GROW untuk pendampingan UMKM bersamaan dengan sosialisasi Jamkrindo UMKM *Award*.

XIV. Melaksanakan Penugasan AOD Perum Jamkrindo

Pendampingan BUMDes/ Balkondes (Balai Ekonomi Desa) dengan melakukan pendampingan kepada dua BUMDes sebagai penunjukan *Agent of Development* Perum Jamkrindo oleh Kementerian BUMN. Program pendampingan BUMDes tahun 2019 merupakan kelanjutan dari program pendampingan BUMDes di tahun 2018.

Dapat dilaporkan saat ini telah dibuat laporan dan usulan tindaklanjut BUMDes sebelumnya di Desa Ngadirojo dan Desa Silebung. Kegiatan pendampingan BUMDes telah dilaksanakan pada 4 - 6 November 2019.

XV. Mendukung Pengembangan Bisnis Penjaminan Langsung

Divisi MR dan PUKM akan melakukan beberapa kegitan yang mendukung bisnis penjaminan diantaranya sebagai berikut :

- Sosialisasi MPG
  Melakukan sosialisasi untuk meperkenalkan MPG untuk para stakeholder Perum Jamkrindo, terutama kepada calon konsumen pengguna MPG, yaitu Lembaga Keuangan, baik itu Bank maupun Non-Bank dan juga kepada UMKMK sebagai bahan baku dari MPG.
- Pelaksanaan sosialisasi mengenai penjaminan dan pemeringkatan UMKM
  Melakukan edukasi mengenai pentingnya peran penjaminan dan pemeringkatan bagi pengembangan UMKM.

XIII. Giving Appreciation to the Guaranteed MSME (UMKM) of Perum Jamkrindo

- Jamkrindo UMKM Award
  Gave awards to Micro Small Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK), who have become guaranteed partners of Perum Jamkrindo. The UMKMK candidates who would receive awards were prioritized from UMKMKs Excellence owned by Perum Jamkrindo. Consisted of micro, small, and medium businesses, Jamkrindo UMKM Award, has been held on November 29 - 30, 2019.
- UMKM Excellence Assistance
  UMKM Excellence Assistance of Perum Jamkrindo, selected based on specific business sectors that were considered attractive, bringing uniqueness and local content. At this time, the Terms of Reference for the Jamkrindo UMKM Award has been prepared, and currently, a socialization schedule on awarding was made through regional offices and branch offices. For UMKM Excellence Assistance, a review would be conducted on the GROW method for MSME assistance, together with the socialization of the Jamkrindo UMKM Award.

XIV. Carried out AOD Assignment of Perum Jamkrindo

Assistance for Village-Owned Enterprises (BUMDes) / Village Economic Center (Balkondes) by assisting two BUMDes as the Perum Jamkrindo Agent of Development appointment by the Ministry of SOEs. The BUMDes assistance program in 2019 was a continuation of the BUMDes assistance program in 2018.

At this time, the report and the proposed follow up on prior BUMDes in Ngadirojo and Silebung villages could be reported. BUMDes assistance activities have been carried out on November 4 - 6, 2019.

XV. Supported the Development of Direct Guarantee Business

The RM and PUKM division would carry out several activities that helped the guarantee business, including the following:

- MPG socialization
  Disseminating information on introducing MPG to Perum Jamkrindo stakeholders, especially to potential consumers of MPG users, namely financial institutions, both banks and non-banks, and also to MSMEs and Cooperatives as the raw material of MPG.
- Conducting information dissemination regarding UMKM guarantee and rating
  Educating on the importance of the role of guarantees and rating for the development of MSMEs.

- *Collecting Data*
  Melakukan edukasi mengenai pentingnya peran penjaminan dan pemeringkatan bagi pengembangan UMKM.
- Penambahan PKS untuk kepentingan pendataan dan pendampingan UMKMK.
  Melakukan penambahan Perjanjian Kerjasama dengan Universitas (negeri dan swasta), asosiasi UMKM dan asosiasi pendamping selaku *enumerator* dalam kegiatan *collecting data*.

Dapat dilaporkan Divisi MR dan PUKM telah melakukan diskusi progress MPG dengan Bank Indonesia (BI) serta rencana pemanfaatan BI sebagai tenaga enumerator. Dan telah dilakukan *pilot project* di semarang dengan melakukan *collecting data* menggunakan *web* umkmlayak.co.id serta dilakukan penjajakan kepada beberapa asosiasi terkait penggunakan *user enumerator* sebagai pendamping UMKM.

XVI. Peningkatan Kompetensi SDM Perusahaan dalam Melakukan Pendampingan kepada UMKM

- Sertifikasi Pendamping UMKM
  Seluruh jajaran Bagian Pemeringkatan UMKM dan Konsultasi Manajemen memiliki sertifikasi profesi pendamping UMKM untuk memastikan bahwa kegiatan konsultasi manajemen/pendampingan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar kompetensi yang ada.
- Sosialisasi Modul Pendampingan UMKMK bagi para Petugas (PIC)
  Melaksanakan kegiatan *Training of Trainers* (ToT) sosialisasi penggunaan modul pendampingan UMKM. Dapat kami laporkan saat ini sedang diadakan kegiatan ToT di 9 Kanwil dan dan saat ini sudah jalan di 8 wilayah yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Denpasar, dan Makassar dengan materi
  - » Modul Pendampingan *Digital Marketing*
  - » Modul Pendampingan Pencatatan Keuangan Usaha
  - » Modul Pendampingan Tehnik *Branding*.

PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka pengelolaan risiko operasional Perusahaan, Perum Jamkrindo mengembangkan kerangka kerja dengan mengacu kepada ketentuan ekternal dan internal Perusahaan. Cakupan kerangka kerja tersebut meliputi kebijakan dan prosedur, pengembangan *tools* dan sistem informasi Manajemen Risiko operasional, *monitoring* dan pelaporan.

- Collecting Data
  Educating on the importance of the role of guarantees and rating for the development of MSMEs.
- Addition of Cooperation Agreement (PKS) for the interest of UMKMK data collection and assistance.
  Adding Cooperation Agreement with Universities (State and Private), UMKM associations, and supporting associations as enumerators in data collecting activities.

It could be reported that RM and PUKM division has discussed the MPG progress with Bank Indonesia and plan to use BI as an enumerator. And the pilot project has been carried out in Semarang by collecting data using the web umkmlayak.co.id and exploratory to several associations related to the use of enumerators user as MSMEs assistance.

XVI. Improvement of Company HC Competency in Assisting MSMEs (UMKM)

- UMKM Assistance Certification
  All levels of the UMKM Rating and Management Consulting had UMKM assistance professional certifications to ensure that the management consulting/assistance activities carried out were according to existing competency standards.
- Socialization of UMKMK Assistance Module for Officers (PIC)
  Conducting Training of Trainers (ToT) activities for socialization on the use of MSME assistance modules. We could report that currently ToT activities were held in 9 Regional Offices and were now holding in 8 regions namely Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Denpasar and Makassar with material
  - » Digital Marketing Assistance Module
  - » Business Financial Recording Assistance Module
  - » Branding Technique Assistance Module.

RISK MANAGEMENT SYSTEM APPLICATION DEVELOPMENT

In managing the Company's operational risk, Perum Jamkrindo develops a framework concerning the Company's external and internal provisions. The scope of the framework includes policies and procedures, development of operational risk management tools and information systems, monitoring, and reporting.

Perusahaan juga menerapkan Manajemen Risiko pada sistem informasi dan menerapkan *Business Continuity Management* (BCM) serta melakukan *Risk Control Self Asessment*. Salah satu sistem yang diterapkan Perusahaan dalam melakukan *Risk Control Self Asessment* adalah dengan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko atau SIMR. SIMR merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan menilai risiko pada setiap Unit Kerja Perusahaan. Melalui aplikasi SIMR, setiap Unit Kerja dapat melakukan *risk control assessment* secara mandiri.

Kegiatan penilaian risiko melalui SIMR dilakukan oleh seluruh unit kerja secara periodik setiap triwulan. Hasil dari penilaian risiko tersebut dilaporkan oleh Divisi Manajemen Risiko dan PUKM setiap triwulan dalam Laporan Profil Risiko yang memuat kompilasi risiko dari seluruh Unit Kerja yang telah diinput kedalam SIMR. Laporan Profil Risiko tersebut dapat digunakan oleh BOD untuk mengevaluasi risiko perusahaan dan sebagai salah satu alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis. Selain Laporan Profil Risiko, Divisi Manajemen Risiko dan PUKM juga menyusun Laporan Risiko Penjaminan dengan mengevaluasi *performance* Rasio Klaim dan *Recovery Rate* setiap triwulanan bersamaan dengan penyampaian buku profil risiko, sehingga risiko yang dihadapi diharapkan dapat dimitigasi lebih awal.

Salah satu *tool scoring* Manajemen Risiko untuk kepentingan Bisnis dan Penunjang Sasaran tersebut didukung oleh strategi dengan pelaksanaan proses *scoring* untuk kepentingan bisnis dan penunjang. Langkah terwujudnya sasaran tersebut adalah Pengembangan sistem aplikasi kuesioner BIA.

The Company also applies Risk Management to the information system and applies Business Continuity Management (BCM) and carries out Risk Control Self Assessment. One of the systems implemented by the Company in conducting Risk Control Self Assessment is by developing a Risk Management Information System or SIMR. SIMR is an application used to identify risks and assess risks in each Company Work Unit. Through the SIMR application, each Work Unit can carry out risk control assessments independently.

Risk assessment activities through SIMR are carried out by all work units periodically every quarter. The results of the risk assessment are reported by the Risk Management and PUKM Division quarterly in the Risk Profile Report, which contains a compilation of risks from all Work Units which have been entered into the SIMR. The Risk Profile Report can be used by BOD to evaluate Company risks and as a consideration tool in making strategic decisions. In addition to the Risk Profile Report, the Risk Management, and PUKM Division also compile a Guaranteed Risk Report by evaluating the performance of the Claim Ratio and Recovery Rate quarterly along with the submission of a risk profile book, so that the risks faced are expected to be mitigated in advance.

One of the Risk Management scoring tools for Business and Supporting Objectives supported by the strategy with the scoring process implementation for business and supporting purposes. The step towards realizing the objectives is the development of the BIA questionnaire application system.

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

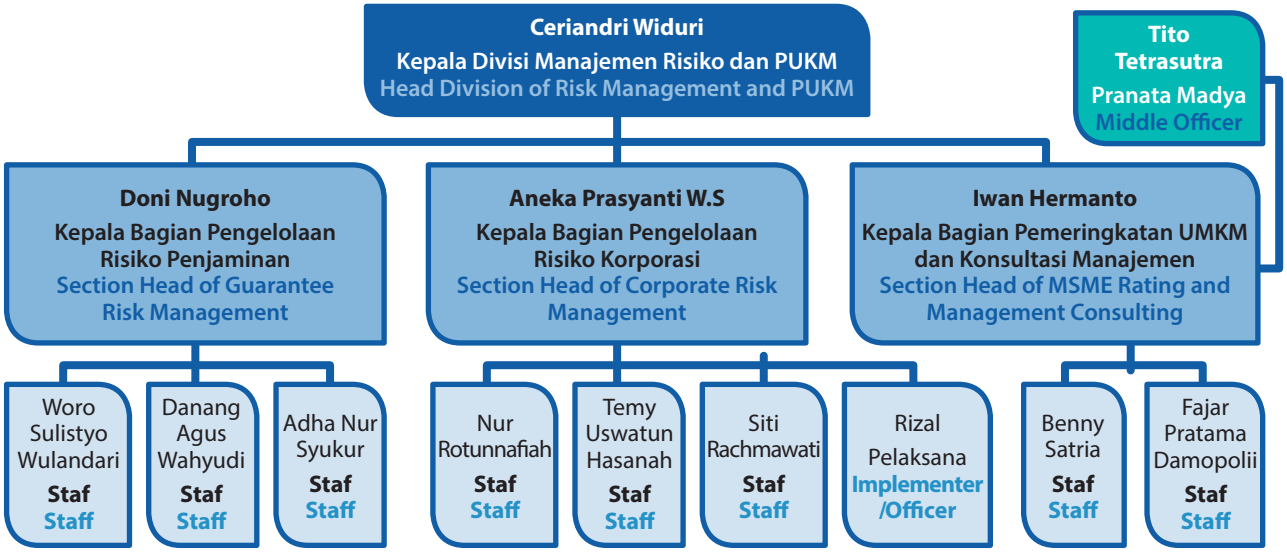

Sistem Manajemen Risiko Perum Jamkrindo dikelola oleh Divisi Manajemen Risiko dan Pemeringkatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Konsultasi Manajemen (PUKM), seperti yang terlihat pada struktur di atas, Divisi Manajemen Risiko dan PUKM menjalankan 3 (tiga) fungsi, yaitu Pengelolaan Risiko Penjaminan, Pengelolaan Risiko Korporasi, serta Pemeringkatan UMKM dan Konsultasi Manajemen. Struktur organisasi Manajemen Risko ditetapkan sesuai Keputusan Direksi No. 1/KD/1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018. Hingga akhir tahun 2019, jumlah pegawai yang tergabung dalam Divisi Manajemen Risiko dan PUKM sebanyak 14 orang.

The Risk Management and Micro, Small, Medium Enterprises Rating, and Management Consulting (PUKM) Division manages Perum Jamkrindo's Risk Management System, as seen in the above structure, the Risk Management and PUKM Division carries out 3 (three) functions, namely the Guarantee Risk Management, Corporate Risk Management, as well as MSME Rating and Management Consulting. The Risko Management organizational structure is determined according to the Board of Directors Decree No. 1 / KD / 1 / V / 2018 dated May 30, 2018. Until the end of 2019, there were 14 employees in the Risk Management and PUKM Division.

Nama/Name	Jabatan/Position
Ceriandri Widuri	Kepala Divisi Manajemen Risiko dan PUKM/ Head Division of Risk Management and PUKM
Doni Nugroho	Kepala Bagian Pengelolaan Risiko Penjaminan/ Section Head of Guarantee Risk Management
Aneka Prasyanti W.S	Kepala Bagian Pengelolaan Risiko Korporasi/ Section Head of Corporate Risk Management
Iwan Hermanto	Kepala Bagian Pemeringkatan UMKM dan Konsultasi Manajemen/ Section Head of MSME Rating and Management Consulting
Tito Tetrasutra	Pranata Madya/Middle Officer
Woro Sulistyo Wulandari	Staf/ Staff
Adha Nur Syukur	Staf/ Staff
Danang Agus Wahyudi	Staf/ Staff
Nur Rotunnafiah	Staf/ Staff
Temy Uswatun Hasanah	Staf/ Staff
Siti Rachmawati	Staf/ Staff
Benny Satria	Staf/ Staff
Fajar Pratama Damopolii	Staf/ Staff
Rizal	Staf/ Staff
Jumlah/ Total	14

PROFIL KEPALA DIVISI MANAJEMEN RISIKO DAN PUKM

HEAD DIVISION OF RISK MANAGEMENT AND PUKM PROFILE



Ceriandri Widuri

Kepala Divisi Manajemen Risiko dan PUKM
Head Division of Risk Management and PUKM

Menjabat sejak 19 September 2017
Serving the position since: September 19, 2017

Bergabung di Jamkrindo: 2 Januari 1997
Joined Jamkrindo: January 2, 1997

Warga negara Indonesia
Indonesian citizens

Domisili / Domicile
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Riwayat Pendidikan / Education:
S1 Manajemen Universitas Diponegoro (1995)/ Bachelor of Management, Diponegoro University (1995)
S2 Manajemen Strategik Universitas Gajah Mada (2009)/ Master of Startegic Management, Gadjah Mada University (2009)

Riwayat Jabatan / Job History:
- Kepala Divisi Manajemen Risiko & PUKM (Juli 2018 – Sekarang)/Head Division of Risk Management & PUKM Division (July 2018 – present)
- Kepala Divisi Manajemen Risiko (19 September 2017 - Juli 2018)/Division Head of Risk Management (September 19, 2017 – July 2018)
- Kepala Divisi Penjaminan Syariah (27 November 2012 – 18 September 2017)/Division Head of Sharia Guarantee (November 27, 2012 – September 18, 2017)
- Kepala Kantor Cabang Banjarmasin (27 Mei 2011 – 26 November 2012)/ Banjarmasin Branch Manager (May 27, 2011 – November 26, 2012)
- Kepala Bagian Penjaminan Syariah I (8 Juli 2010 – 26 Mei 2011)/Section Head of Sharia Guarantee I (July 8, 2010 – May 26, 2011)
- Kepala Bagian Divisi Penjaminan Syariah (6 November 2006 – 7 Juli 2010)/Section Head of Sharia Guarantee Division (November 6, 2006 – July 7, 2010)
- Kepala Bagian Wilayah I Divisi Pengendalian (11 Juli 2006 – 5 November 2006)/Section Head of Control Division Region I (July 11, 2006 – November 5, 2006)
- Kepala Bagian Penjaminan Divisi Penjaminan & Pemasaran (29 Desember 2005 – 10 Juli 2006)/ Section Head of Guarantee of Guarantee & Marketing Division (Desember 29, 2005 – July 10, 2006)
- Kepala Bagian Penjaminan Divisi Penjaminan & Pembiayaan (25 Mei 2005 – 28 Desember 2005)/Section Head of Guarantee of Guarantee & Financing Division (May 25, 2005 – December 28, 2005)

Sertifikasi / Certification:
- Certified Risk Governance Professional (CRGP) (2014) Perpanjangan CRGP No.0059/B-5/CRGP/X/2017/P-1 tanggal 10 Oktober 2017/ Certified Risk Governance Professional (CRGP) (2014) Extension of CRGP No.0059 / B-5 / CRGP / X / 2017 / P-1 dated October 10, 2017
- Serifikasi MR pada Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)/ RM Certification at the Banking Professional Certification Institute (LSPP)

KEGIATAN DIVISI MANAJEMEN RISIKO DAN PUKM DI 2019

Pada tahun 2019 Divisi Manajemen Risiko dan PUKM melakukan *Risk Maturity Assessment* dengan hasil 3,69 (*Managed*) dengan tingkat kematangan yaitu manajemen telah menetapkan *risk management strategy* (*blue print* dan *road map risk management*), telah diperbaharuinya pedoman Enterprise Risk Management (ERM) dan telah dilaksanakannya audit atas implementasi ERM, kebutuhan akan sumber daya ERM telah cukup & memadai serta system yang ada sudah mulai dapat terotomasi.

ACTIVITIES OF THE RISK MANAGEMENT AND PUKM DIVISION IN 2019

In 2019 the Risk Management and PUKM Division conducted a Risk Maturity Assessment with a result of 3.69 (Managed) with a level of maturity that is, management has established a risk management strategy (risk management blueprint and road map), the guideline of Enterprise Risk Management (ERM) has been updated and ERM implementation audit has been carried out, the need for ERM resources has been sufficient & adequate, and the existing system has begun to be automated.

Divisi Manajemen Risiko dan PUKM juga melakukan Penilaian Kematangan *Business Continuity Management* (BCM) dengan hasil 3,71 (Tahap *Mature*). Pada tingkatan ini perusahaan sudah mulai membangun aplikasi *Business Continuity Management* (BCM) dalam membantu implementasi *Business Continuity Management* (BCM) , khususnya terkait dengan proses-proses *Business Continuity Management* (BCM) , seperti *Business Impact Analysis* (BIA), *Risk Assessment* (RA), dan *Business Continuity Strategy* (BC *Strategy*).

Dalam pelaksanaan penlaian kematangan BCM, Divisi Manajemen Risiko dan PUKM dibantu tenaga ahli.

Dalam pelaksanaan program kerja *risk maturity self assessment* dan penilaian kematangan B*usiness Continuity Management* (BCM), Divisi Manajemen Risiko dan PUKM bekerjasama dengan pihak tenaga ahli yaitu PT Pengembangan Manajemen Terapan (Centrois).

Divisi Manajemen Risiko dan PUKM juga telah melakukan pengembangan aplikasi SIMR dengan tujuan lebih memudahkan Unit Kerja untuk melakukan identifikasi dan penilaian risiko terhadap Unit Kerjanya.

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan Manajemen Risiko dilakukan secara periodik dan insidentil. Kegiatan Manajemen Risiko yang dilakukan secara periodik adalah proses manajemen risiko yang terdiri dari 4 tahapan proses, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko dan monitoring & evaluasi risiko.

Pada tahap awal, proses yang dilakukan adalah Identifikasi dan Penilaian Risiko *Inherent*. Atas hasil identifikasi risiko dan penilaian risiko tersebut dilakukan evaluasi untuk perbaikan proses manajemen risiko. Kegiatan Manajemen Risiko yang bersifat insidentil adalah pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan pada tahap-tahap tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP proses bisnis berbasis risiko dan pemberian opini terkait dengan hal-hal yang harus dimintakan pendapat kepada Divisi Manajemen Risiko.

Kegiatan insidentil berupa pemberian opini sesuai Surat Edaran Direksi Nomor:12/SE/5/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang SOP Pendapat (Opini) Manajemen Risiko Perum Jamkrindo yaitu untuk hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak signifikan bagi keberlangsungan perusahaan, pembuatan produk dan/atau aktivitas baru, transaksi dengan nilai tertentu, kebijakan penghapus bukuan piutang perusahaan, pembuatan SOP, RJPP, RKAP, implementasi penggunaan aplikasi/*software* baru, penentuan bank baru untuk penempatan deposito dan investasi, dan kebijakan lainnya yang bersifat strategis.

The Risk Management and PUKM Division also conducted a Maturity Assessment of Business Continuity Management (BCM) with a score of 3.71 (Mature Stage). At this level, the Company has begun to develop Business Continuity Management (BCM) applications in assisting the implementation of Business Continuity Management (BCM), specifically related to Business Continuity Management (BCM) processes, such as Business Impact Analysis (BIA), Risk Assessment (RA), and Business Continuity Strategy (BC Strategy).

In implementing the BCM maturity assessment, the Risk Management and PUKM Division is assisted by experts.

In the implementation of the risk maturity self-assessment work program and Business Continuity Management (BCM) maturity assessment, the Risk Management and PUKM Division collaborates with experts, namely PT Pengembangan Manajemen Terapan (Centrois).

The Risk Management and PUKM Division has also developed the SIMR application with the aim of making it easier for the Work Unit to identify and assess the risk of its Work Unit.

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT

Risk Management activities are carried out periodically and incidentally. Risk Management activities carried out periodically are risk management processes that consist of 4 stages of the process, namely risk identification, risk assessment, risk management, and risk monitoring & evaluation.

In the initial stage, the process carried out is the Identification and Assessment of Inherent Risks. Based on the results of risk identification and risk assessment, an evaluation is carried out to improve the risk management process. Risk Management activities that are incidental are the implementation of risk management carried out at certain stages according to those stipulated in the SOP of risk-based business processes and the provision of opinions related to matters that must be requested for an opinion from the Risk Management Division.

Incidental activities in the form of provision of opinions according to Board of Directors' Circular Number: 12 / SE / 5 / IV / 2019 dated April 18, 2019, concerning Perum Jamkrindo's Risk Management Opinion SOP is for things that are strategic and have a significant impact on the sustainability of the Company, creation of new products and/or activities, transactions of a particular value, policies for writing off the Company's accounts receivable, making of SOPs, RJPP, RKAP, implementing the use of new applications/software, determining new banks for placement of deposits and investments, and other strategic policies.

Pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, telah dilakukan pemberian opini sebanyak 193 opini, baik opini terkait dengan kegiatan penjaminan, keuangan, maupun kegiatan pendukung lainnya.

From January 1 to December 31, 2019, 193 opinions were provided, both opinions related to guarantee activities, financial activities, and other supporting activities.

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO SELAMA TAHUN 2019

Dalam penerapan manajemen risiko Perusahaan diperlukan adanya profil risiko Perusahaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

A. PROFIL RISIKO KORPORASI

Profil risiko korporasi secara kuantitatif diukur untuk setiap Kategori risiko yang ada di Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah potensi kegagalan dalam mencapai sasaran perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya perusahaan terhadap perubahan eksternal. Tingkat risiko strategik dapat diukur dengan pendekatan berbasis pencapaian terhadap ***Earning Before Taxes*** **(EBT)**. EBT adalah laba sebelum pajak yang diperoleh Perusahaan.

Berdasarkan Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko, kriteria dampak risiko dengan pendekatan EBT adalah sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT REPORT FOR 2019

In implementing Company risk management, the Company risk profile needed both quantitatively and qualitatively.

B. COMPANY RISK PROFILE

The quantitative company risk profile was measured for each risk category in the Company with the following details:

1. Strategic Risk

Strategic Risk was the potential of failure in achieving Company goals due to improper or failure in the planning, determination, and strategic implementation, appropriate business decision making, and/or the Company's lack of responsiveness to external changes. The level of strategic risk could be measured by an achievement-based approach to Earning Before Taxes (EBT). EBT was the income before tax obtained by the Company.

Based on Circular Letter on Risk Management Implementation Guidelines, the criteria of risk impact using the EBT approach were as follows:

Dampak Impact	Keterangan Information
Catastrophic	Pencapaian EBT < 90% dari target RKAP EBT achievement <90% of the RKAP target
Major	Pencapaian EBT ≥ 90% sampai dengan < 93% dari target RKAP EBT achievement ≥ 90% to <93% of the RKAP target
Moderate	Pencapaian EBT ≥ 93% sampai dengan < 96% dari target RKAP EBT achievement ≥ 93% to <96% of the RKAP target
Minor	Pencapaian EBT ≥ 96% sampai dengan < 99% dari target RKAP EBT achievement ≥ 96% to <99% of the RKAP target
Insignificant	Pencapaian EBT ≥ 99% dari target RKAP EBT achievement ≥ 99% of the RKAP target

Realisasi EBT 2019 2019 EBT Realization	Target EBT 2019 2019 EBT Target	% Pencapaian % of Achievement
720.787.432.748	672.302.344.260	**107,21%**

Sumber : Divisi Akuntansi / Source: Accounting Division

Realisasi EBT Perusahaan sampai dengan Tahun 2019 adalah sebesar Rp 720.787.432.748 atau 107,21% dari target yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori dampak risiko ***Insignificant***. Adapun perbandingan realisasi EBT dengan Triwulan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Realization of the Company's EBT up to 2019 amounted to Rp 720,787,432,748 or 107.21% of the target set and included in the Insignificant risk impact category. The comparison of EBT realization with the previous quarter was as follows:

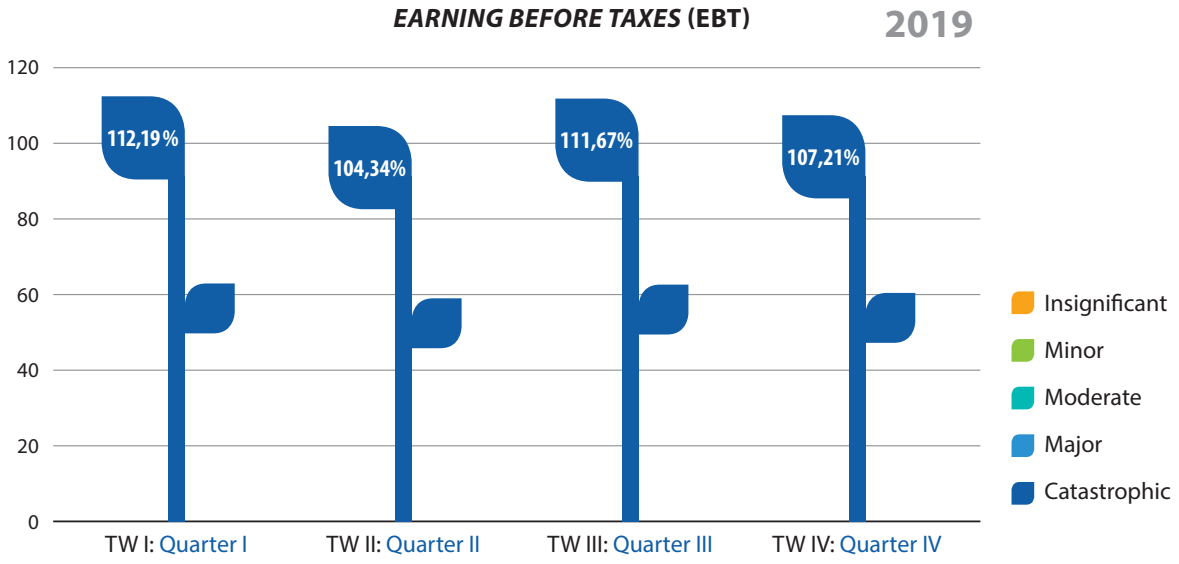

Persentase pencapaian EBT sampai dengan Tahun 2019 terhadap target EBT mengalami penurunan sebesar 4,46% dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya namun masih berada pada zona yang aman.

Disarankan pada setiap unit kerja untuk tetap melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan tindakan preventif melalui pemantauan kinerja/evaluasi rutin untuk memetakan kinerja Perusahaan
b. Melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudent) dalam setiap keputusan bisnis/non bisnis dengan mempertimbangkan risiko
c. Melakukan penyesuaian strategi/langkah-langkah untuk mencapai target sesuai dengan peraturan yang berlaku
d. Melakukan langkah-langkah kreatif dan atau inovatif sesuai arahan stratejik perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan

The percentage of EBT achievement up to 2019 against the EBT target has decreased by 4.46% compared to the previous quarter but was still in a safe zone.

It was recommended that each work unit continued to do the following:

a. Performed preventive actions through routine performance monitoring/evaluation to map Company performance
b. Implemented the prudent principle in every business/non-business decision by considering the risk
c. Adjusted strategies/steps to achieve targets in accordance with applicable regulations
d. Performed creative and or innovative steps according to the Company's strategic direction in an effort to improve Company performance

e. Melakukan pengendalian biaya secara efektif dan efisien

f. Melakukan pemantauan penjaminan bersih, pendapatan investasi, pendapatan (beban) lain-lain bersih, dan jumlah biaya usaha

e. Controlled costs effectively and efficiently

f. Monitored net guarantee, investment income, net other income (expenses), and total operating expenses.

2. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko ketidakmampuan Perusahaan memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Tingkat risiko likuiditas ditetapkan berdasarkan POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang penyelengaraan usaha penjaminan Pasal 43 ayat (2), yaitu paling rendah sebesar 120%. Perusahaan memformulasikan risiko likuiditas berdasarkan perhitungan ***Cash Flow To Debt Ratio***, yang dihitung dengan formula:

2. Liquidity Risk

Liquidity Risk is the risk which exists due to the inability of the Company to meet obligations at its maturity. The level of liquidity risk is determined based on The Financial Service Regulation No 2 / POJK.05 / 2017 concerning the implementation of the guarantee business Article 43 paragraph (2), which states a minimum of 120%. The Company formulates liquidity risk based on the calculation of Cash Flow To Debt Ratio, which is calculated using the following formula:

$$\textit{Cash Flow to Debt Ratio} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{(Liabilitas Total - Pendapatan yang ditangguhkan)}}$$

$$\text{Cash Flow to Debt Ratio} = \frac{\text{Cash and Cash Equivalent}}{\text{(Total Liabilities - Deferred income)}}$$

Berdasarkan Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko, kriteria dampak risiko dengan pendekatan *Cash Flow to Debt Ratio* adalah sebagai berikut:

Based on Circular Letter on Risk Management Implementation Guidelines, the criteria for risk impact using the Cash Flow to Debt Ratio approach was as follows:

Dampak Impact	Batas Bawah Lower Limit	Batas Atas Upper limit
Catastrophic	Apabila Cash Flow to Debt Ratio perusahaan mencapai ≤ 100% If the Company's Cash Flow to Debt Ratio reaches ≤ 100%	Apabila Cash Flow to Debt Ratio perusahaan mencapai ≥ 600% If the Company's Cash Flow to Debt Ratio reaches ≥ 600%
Major	Apabila Cash Flow to Debt Ratio perusahaan mencapai > 100% - 150% If the Company's Cash Flow to Debt Ratio reaches> 100% - 150%	Apabila Cash Flow to Debt Ratio perusahaan mencapai > 500% - 600% If the Company's Cash Flow to Debt Ratio reaches> 500% - 600%
Moderate	Apabila Cash Flow to Debt Ratio perusahaan mencapai > 150% - 200% If the Company's Cash Flow to Debt Ratio reaches> 150% - 200%	Apabila Cash Flow to Debt Ratio perusahaan mencapai > 400% - 500% If the Company's Cash Flow to Debt Ratio reaches> 400% - 500%
Minor	Apabila Cash Flow to Debt Ratio perusahaan mencapai > 200% - 250% If the Company's Cash Flow to Debt Ratio reaches> 200% - 250%	Apabila Cash Flow to Debt Ratio perusahaan mencapai > 350% - 400% If the Company's Cash Flow to Debt Ratio reaches> 350% - 400%
Insignificant	Apabila Cash Flow to Debt Ratio perusahaan mencapai > 250% -300% If the Company's Cash Flow to Debt Ratio reaches> 250% -300%	Apabila Cash Flow to Debt Ratio perusahaan mencapai ≥ 300% - 350% If the Company's Cash Flow to Debt Ratio reaches ≥ 300% - 350%

Data realisasi *cash flow to debt ratio* sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Data on the realization of cash flow to debt ratio up to 2019 was as follows:

$$\text{Cash Flow to Debt Ratio} = \frac{5.636.244.847.086}{5.107.094.225.422 - 4.027.603.174.386} = \mathbf{522,12\%}$$

Sumber : Divisi Akuntansi / Source: Accounting Division

Nilai *Cash Flow To Debt Ratio* pada tahun 2019 adalah sebesar 522,12% sehingga masuk ke dalam kategori ***Major.*** Adapun perbandingan realisasi dengan Triwulan sebelumnya adalah sebagai berikut :

The value of Cash Flow To Debt Ratio in 2019 was 522.12%, so it was included in the Major category. The comparison of realization with the previous Quarter was as follows:

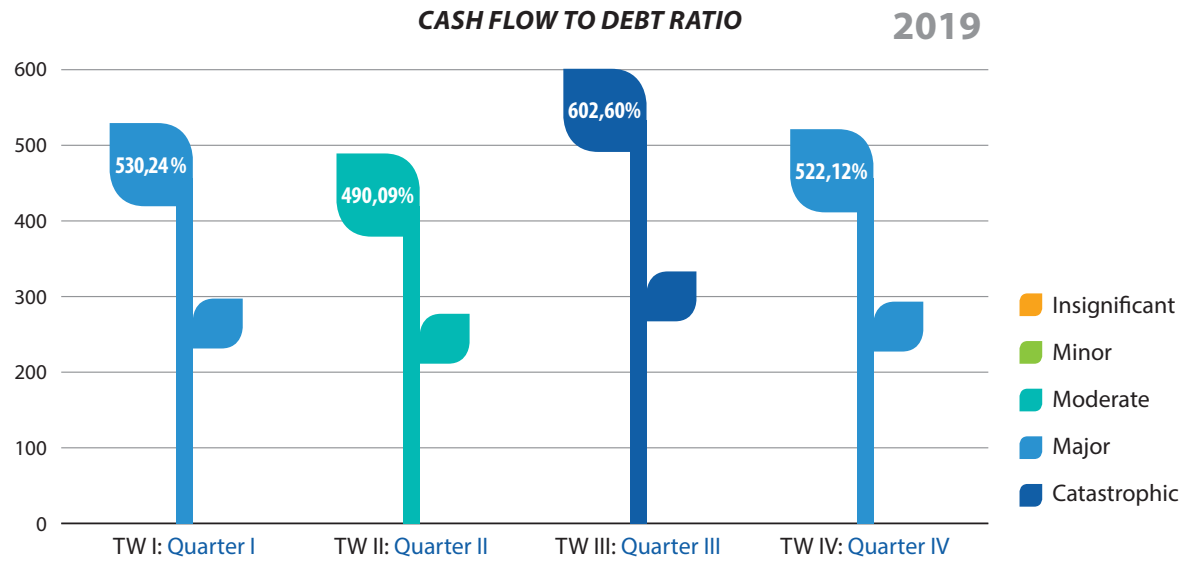

Persentase Likuiditas Triwulan IV Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 80,48% dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya. Rasio likuiditas masih berada di atas ketentuan regulator namun melebihi batas atas toleransi Perusahaan sehingga dapat berdampak pada potensial *loss* bagi Perusahaan karena dana kelolaan yang besar (Kas & Setara Kas) dapat dialokasikan untuk investasi lainnya yang profitable dan aman.

Sebagai salah satu upaya mitigasi risiko, telah dikeluarkan Perdir nomor 17/PER-DIR/5/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 perihal Kebijakan Pengelolaan Kas yang bertujuan memberikan panduan dan prosedur standar bagi seluruh unit kerja di Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kas. Dengan diberlakukan dan diterapkannya Perdir ini diharapkan dapat tercapainya efektivitas dan efisiensi penyediaan dan pengeluaran dana kas dengan meminimalisir transaksi keuangan secara tunai.

Percentage of Liquidity in Quarter IV of 2019 decreased by 80.48% compared to the previous Quarter. The liquidity ratio was still above the regulatory provisions. However, it exceeded the upper limit of the Company's tolerance so that it could impact the potential loss for the Company because significant managed funds (Cash & Cash Equivalents) could be allocated to other investments that were profitable and safe.

As one of the risk mitigation efforts, the Board of Directors regulation number 17 / PER-DIR / 5 / VIII / 2019 has been issued on August 16, 2019, regarding Cash Management Policy which aims to provide guidelines and standard procedures for all work units in the Company in carrying out cash management activities. With the enactment and implementation of this Board of Director's regulation, it was hoped that the effectiveness and efficiency of cash supply and expenditure would be achieved by minimizing financial transactions in cash.

Langkah mitigasi lainnya diharapkan agar setiap unit kerja selain meminimalisir saldo kas dan giro pada akhir periode adalah mengoptimalkan penempatan dana dalam bentuk deposito secara tepat sasaran, selain itu dapat diupayakan juga penjajakan instrumen investasi lainnya yang dimungkinkan dapat memberikan nilai tambah, keuntungan lebih dan aman bagi pendapatan perusahaan.

Other mitigation steps were expected so that each work unit in addition to minimizing cash and current account balances at the end of the period was optimizing the placement of funds in the form of deposits on target, besides that other investment instruments could also be explored which were possible to provide added value, more profits, and secure for Company's income.

3. Risiko Penjaminan

Risiko Penjaminan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan. Tingkat risiko penjaminan dapat menggunakan pendekatan Rasio Klaim (RK), *Recovery Rate* dan piutang Co Guarantee/ Reasuransi sebagai berikut:

a. Rasio Klaim

Rasio klaim dapat digunakan untuk mengukur dampak risiko penjaminan, dimana formulasinya adalah Klaim dibagi Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Dalam hal ini yang dimaksud Klaim adalah klaim yang telah terbit surat persetujuannya dan IJP adalah IJP *accrual basis*.

$$\text{Rasio Klaim} = \frac{\text{Klaim}}{\text{Imbal Jasa Penjaminan (IJP)}}$$

Berdasarkan Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko, kriteria dampak risiko dengan pendekatan Rasio Klaim adalah sebagai berikut:

3. Guarantee Risk

Guarantee Risk is the risk that arises due to the failure of Guaranteed to fulfill its financial obligations to the Guarantee Recipient. The guarantee risk level can use the Claim Ratio (RK), Recovery Rate, and Co-Guarantee Receivable/Reinsurance as follows:

a. Claim Ratio

Claim ratio can be used to measure the impact of guarantee risk, where the formulation is Claim divided by Guarantee Fee (IJP). In this case, what is meant by Claim is a claim whose approval letter has been issued, and IJP is an IJP accrual basis.

$$\text{Claim Ratio} = \frac{\text{Claim}}{\text{Guarantee Fee (IJP)}}$$

Based on Circular Letter on Risk Management Implementation Guidelines, the criteria of risk impact using the Claim Ratio approach are as follows:

Dampak Impact	Keterangan Information
Catastrophic	> 80 %
Major	> 65% - ≤ 80%
Moderate	> 50% - ≤ 65 %
Minor	> 35% - ≤ 50%
Insignificant	≤ 35%

Data realisasi Rasio Klaim secara accrual tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Accrual Claim Ratio realization data in 2019 was as follows:

$$\textit{Rasio Klaim Accrual} \text{ / Accrual Claim Ratio} = \frac{1.709.644.311.298}{2.325.173.872.489} = \mathbf{73,53\%}$$

Sumber : Divisi Akuntansi / Source: Accounting Division

Sedangkan Rasio Klaim secara cash basis tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Whereas the Cash Base Claim Ratio in 2019 was as follows:

$$\textit{Rasio Klaim Cash Basis} \text{ / Cash Base Claim Ratio} = \frac{2.032.381.345.514}{2.910.217.597.992} = \mathbf{69.84\%}$$

Sumber : Aplikasi ICPR / Source: ICPR application

Rasio Klaim pada tahun 2019 secara accrual adalah sebesar 73,53% masuk dalam kategori dampak risiko ***Major*** dan Rasio Klaim secara cash basis adalah sebesar 69,84% juga masuk dalam kategori ***Major***, dari kedua perhitungan tersebut telah melampaui KRI yang telah ditetapkan Perusahaan yaitu sebesar 55,77%. Adapun perbandingan persentase Rasio Klaim antar triwulan pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

Accrual Claims Ratio in 2019 was 73.53% included in the Major risk impact category, and the Cash Claims Ratio of 69.84% also included in the Major category. Both of these calculations have exceeded the Company's established KRI that was equal to 55.77%. The comparison of the percentages of claims ratio between quarters in 2019 was as follows:

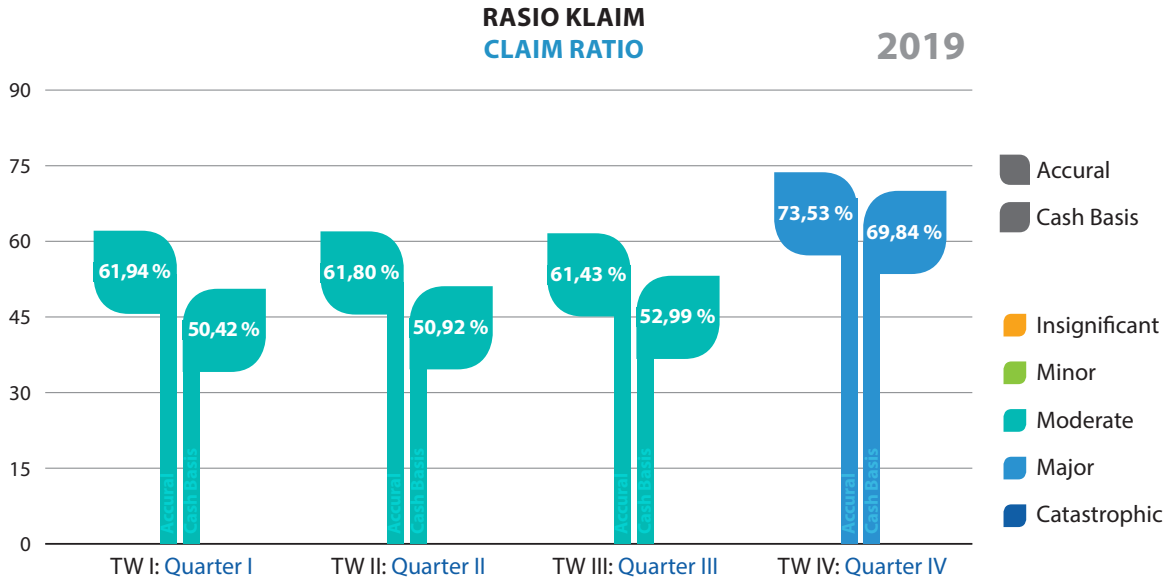

Rasio Klaim secara *accrual* antara Triwulan IV Tahun 2019 dengan periode sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 12,10% sedangkan rasio klaim secara *cash basis* juga mengalami kenaikan sebesar 16,85% dan dapat dikatakan mengalami kenaikan yang signifikan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini karena adanya klaim dalam jumlah besar dibanding dengan IJP yang didapat pada periode ini.

Accrual Claim Ratio between Quarter IV 2019 with the previous period increased by 12.10% while the Cash Ratio Claims also increased by 16.85% and could be said to experience a significant increase when compared with the last period. It was due to a large number of claims compared to the IJP obtained in this period.

Disarankan agar Perusahaan melakukan beberapa mitigasi risiko antara lain:

1) Memegang prinsip kehati-hatian dan melakukan analisa yang *prudent* pada proses penjaminan antara lain dengan; melalui verifiasi data dan dokumen Terjamin untuk validitas dan keabsahannya antara lain melalui aplikasi KTP El dengan kerjasama dengan Dirjen Dukcapil atau lembaga terkait dan checking data Calon Terjamin melalui Pefindo Biro Kredit atau lembaga sejenis, pengecekan ketersediaan anggaran project melalui DIP/DIPA, mempersyaratkan adanya

It was recommended that the Company did some risk mitigation, among others:

1) Holding the principle of prudence and conducting a prudent analysis of the guarantee process, among others by; through verification of Guaranteed data and documents for validity and its validity, among others through the Electronic Resident Card application in collaboration with the Director-General of Dukcapil or related institutions and checking the data of Guaranteed candidates through Pefindo Credit Bureau or similar institutions, checking the availability of project budgets through

SPKMGR, marginal deposit/cash collateral, transaksi yang bersifat close system dengan escrow account, sistem pemotongan angsuran melalui payroll, dan sebagainya.

2) Melakukan pembaharuan perjanjian kerjasama dengan menambahkan klausul yang dapat digunakan untuk meminimalkan risiko.
3) Mempertegas batasan kerugian yang termasuk dalam kriteria Kerugian yang tidak dijamin Perusahaan;
4) Melakukan penyebaran risiko dengan menambah mitra kerja baru dan menambah produk yang dikerjasamakan dengan mitra kerja.
5) Menambah produk yang dipasarkan oleh Perusahaan sesuai dengan tren yang sedang berkembang.
6) Melakukan penjajakan penyebaran risiko dengan bekerjasama dengan perusahaan re-asuransi dan co guarantee yang bonafid dan sehat.
7) Memetakan produk pada masing-masing unit kerja melalui penetapan produk unggulan sesuai dengan potensi pasar dan daya saing dengan memperhatikan profitabilitas produk secara individu maupun bundling, subsidi silang (*cross subsidy*) product *high risk* dan *low risk*.
8) Melakukan pembatasan volume penjaminan untuk produk yang berisiko tinggi dan memonitor kondisi Rasio Klaim baik secara individu maupun bundling produk.
9) Melakukan evaluasi atas kerjasama secara keseluruhan (perusahaan Penerima Jaminan, Produk, dll) apabila akan melakukan perpanjangan kerjasama dengan Penerima Jaminan
10) Mengetahui penyebab klaim dari setiap Terjamin, sehingga dapat diidentifikasi alternatif-alternatif pengamanan sebagai bagian dari langkah mitigasi risiko untuk menghindari/mengelola risiko-risiko yang pernah terjadi sehingga tidak terulang kembali atau mengurangi dampak klaim yang mungkin timbul
11) Atas klaim dalam proses segera dilakukan identifikasi apakah klaim tersebut layak bayar atau tidak. Apabila klaim dalam proses tidak layak bayar, maka segera diberitahukan ke Penerima Jaminan. Apabila dalam pengajuan klaim terdapat kekurangan berkas, maka segera dimintakan kelengkapan berkas ke Penerima Jaminan.

DIP/DIPA, requiring the availability of SPKMGR, marginal deposit/cash collateral, closed system transactions with an escrow account, installment deduction system through payroll, and so on.

2) Renewing the cooperation agreement by adding clauses that could be used to minimize risk.
3) Reinforcing the loss limits that were included in the Loss criteria that were not guaranteed by the Company;
4) Spreading the risk by adding new partners and adding products that were collaborated with business partners.
5) Adding products marketed by the Company according to developing trends.
6) Exploring the spread of risk by cooperating with trusted and healthy re-insurance and co-guarantee companies.
7) Mapping products in each work unit by determining superior products according to market potential and competitiveness by taking into account individual product profitability and bundling, cross-subsidy of high-risk and low-risk products.
8) Limiting the guarantee volume for high-risk products and monitoring the Claim Ratio condition of products both individually and bundling.
9) Evaluating the overall collaboration (Guarantee Recipient company, Products, etc.) if it would extend the cooperation with the Guarantee Recipient
10) Knowing the causes of claims for each Guaranteed, security alternatives could be identified as part of risk mitigation measures to avoid/manage risks that have occurred so that they did not recur or reduce the impact of claims that might arise
11) Claims in the process were immediately identified whether the claim was worth paying or not. If a claim in the process was not worth paying, it was immediately notified to the Guarantee Recipient. If there was a shortage of files in filing a claim, the files were directly requested to the Guarantee Recipient.

b. *Recovery Rate* (RR)

Recovery Rate (RR) dapat digunakan untuk mengukur dampak risiko penjaminan, dimana formulasinya adalah pembayaran angsuran subrogasi dibagi piutang subrogasi.

$$\textit{Recovery Rate} = \frac{\text{angsuran subrogation}}{\text{piutang subrogation}}$$

Berdasarkan Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko, kriteria dampak risiko dengan pendekatan Recovery Rate adalah sebagai berikut:

b. Recovery Rate (RR)

Recovery Rate (RR) can be used to measure the impact of guarantee risk, where the formulation is the payment of subrogation installments divided by subrogation receivables.

$$\text{Recovery Rate} = \frac{\text{subrogation installments}}{\text{subrogation receivables}}$$

Based on Circular Letter on Risk Management Implementation Guidelines, the criteria for risk impact using the Recovery Rate approach are as follows:

Dampak Impact	Keterangan Information
Catastrophic	< 5%
Major	5% - 6%
Moderate	> 6% - 7%
Minor	>7% - 8%
Insignificant	> 8%

Data realisasi *recovery rate* periode Januari 2019 - Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Recovery rate realization data for the period January 2019 - December 2019 was as follows:

$$\textit{Recovery Rate} = \frac{73.468.993.869}{1.959.084.194.230} = \mathbf{3,75\%}$$

Sumber : Desk Subrogasi / Source: Subrogation Desk

Perhitungan posisi angsuran subrogasi dengan piutang subrogasi per Januari 2019 sampai Desember 2019 adalah sebesar 3,75% dan masuk dalam kategori dampak risiko ***Catastrophic***. Adapun perbandingan *recovery rate* antar triwulan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

The calculation of the position of subrogation installments with subrogation receivables from January 2019 to December 2019 was 3.75% and fell into the category of Catastrophic risk impact. The comparison of recovery rates between quarters in 2019 was as follows:

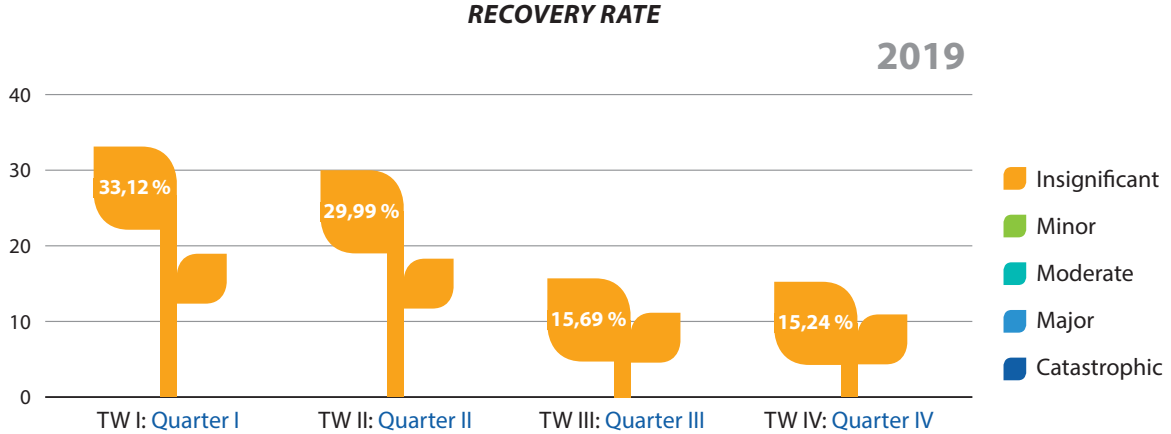

Recovery Rate pada Triwulan IV Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,45% dibanding periode sebelumnya yang sebesar 15,69%. Disarankan masing-masing unit kerja agar mengoptimalkan pencapaian target pendapatan subrogasi antara lain:

1) Melalui kegiatan penagihan subrogasi yang lebih aktif
2) Rutin melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank/ mitra
3) Membuat komitmen dengan Penerima Jaminan atas pembayaran klaim dengan offset potensi subrogasi yang belum dilimpahkan
4) Membuat *crash program* subrogasi dipetakan berdasarkan subrogasi potensial dan non potensial

Selain itu terhadap penerimaan subrogasi yang belum dapat teridentifikasi atau tidak dapat diinput dalam aplikasi operasional oleh sebab lainnya, agar dikoordinasikan dengan Divisi Teknologi Informasi sehingga dapat dimitigasi dan diupayakan metodenya agar tetap dapat terinput dalam aplikasi operasional sehingga data yang tersaji dalam ICPR (aplikasi operasional) lebih valid dan dapat menyajikan informasi yang akurat bagi pengguna.

c. Piutang *Co Guarantee*/Reasuransi

Piutang *Co Guarantee*/Reasuransi dapat digunakan untuk mengukur dampak risiko penjaminan, dimana formulasinya adalah Angsuran piutang *co guarantee*/ reasuransi dibagi piutang *co guarantee*/reasuransi.

Recovery Rate in Quarter IV 2019 decreased by 0.45% compared to the previous period of 15.69%. It was recommended that each work unit optimized the achievement of subrogation revenue targets, including:

1) Through more active subrogation billing activities
2) Reconciled with banks/partners regularly
3) Made a commitment with the Guarantee Recipient for the claims payment with offsets of potential subrogation that has not been delegated
4) Made a subrogation crash program mapped based on potential and non-potential subrogations

In addition to the receipt of subrogation that has not been identified or could not be inputted in operational applications by other causes, it must be coordinated with the Information Technology Division so that it could be mitigated and the method was pursued so that it could still be inputted in operational applications so that the data presented in ICPR (operational applications) was more valid and could present accurate information to users.

c. Co-Guarantee/ Reinsurance Receivables

Co-Guarantee/ Reinsurance Receivables can be used to measure the impact of guarantee risk, where the formulation is Installment of co-guarantee/ reinsurance receivables divided by co-guarantee/ reinsurance receivables.

$$\text{Piutang } Co\ Guarantee/\text{Reasuransi} = \frac{\text{angsuran piutang co guarantee/reasuransi}}{\text{piutang co guarantee/reasuransi}}$$

$$\textit{Co-guarantee/ reinsurance receivables} = \frac{\text{installments of co guarantee/ reinsurance receivables}}{\text{co guarantee/ reinsurance receivables}}$$

Berdasarkan Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko, kriteria dampak risiko dengan pendekatan pembayaran piutang co guarantee/reasuransi adalah sebagai berikut:

Based on Circular Letter on Risk Management Implementation Guidelines, the criteria of risk impact using the payment of co-guarantee/ reinsurance receivables approach are as follows:

Dampak Impact	Keterangan Information
Catastrophic	<30%
Major	≥30%-40%
Moderate	>40%-60%
Minor	>60%-70%
Insignificant	>70%

Data angsuran pembayaran piutang *co guarantee*/ reasuransi pada Triwulan IV Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Data on installment payments for co-guarantee/ reinsurance receivables in Quarter IV of 2019 were as follows:

Angsuran Installment	Piutang Receivables	Persentase Percentage
218.755.453.463	427.583.727.864	51,16 %

Sumber : Divisi Teknik & Administrasi Bisnis / Source: Engineering & Business Administration Division

Persentase angsuran pembayaran piutang *co guarantee*/reasuransi pada tahun 2019 adalah sebesar 51,16% masuk dalam kategori dampak risiko ***Moderate***. Adapun perbandingan persentase Piutang *Co-Guar*/Reas antar periode pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

The percentage of installment payments for co-guarantee/ reinsurance receivables in 2019 was 51.16% included in the Moderate risk impact category. The comparison of the percentage of Co-Guarantee/ Reinsurance Receivables between periods in 2019 was as follows:

PIUTANG *CO GUARANTEE*/REASURANSI
CO-GUARANTEE/ REINSURANCE RECEIVABLES **2019**

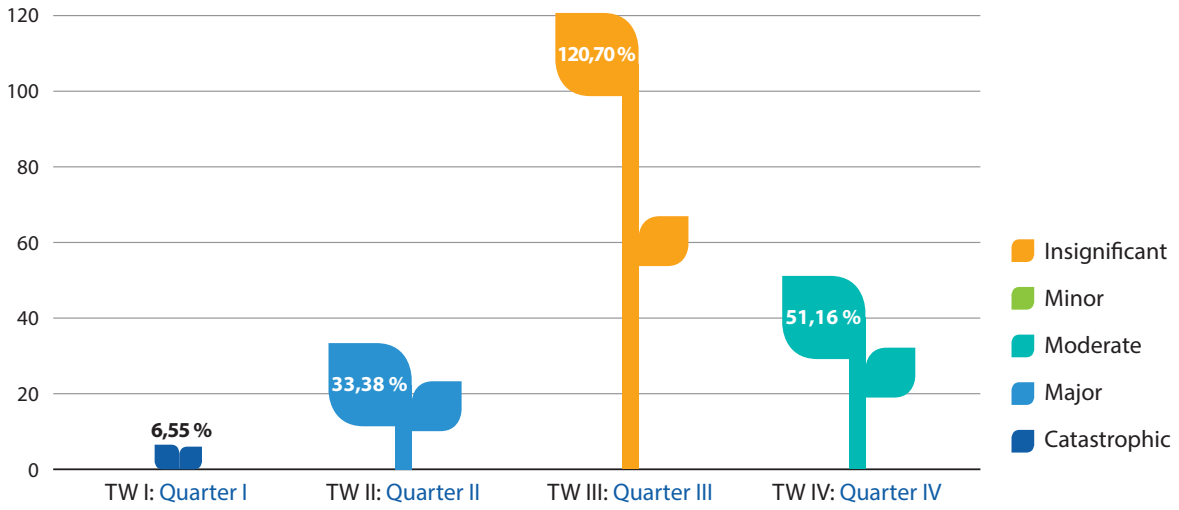

Pada diagram di atas, terlihat bahwa Triwulan IV Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 69,54%. Hal ini disebabkan karena beberapa Mitra *Co Guar*/ Reas belum melakukan penggantian klaim.

Rincian Data Piutang *Co Guarantee*/reasuransi adalah sebagai berikut:

In the diagram above, it appeared that Quarter IV of 2019 has decreased by 69.54%. This was due to some of the partners of Co-Guarantee/ Reinsurance Receivables have not yet reimbursed claims.

The details of the Co-Guarantee/ Reinsurance Receivables were as follows:

No	Mitra Co-Guarantee, Asuransi & Reasuransi Co-Guarantee, Insurance & Reinsurance Partners	Saldo Piutang per 31 Desember 2019 Balance of Receivables as of December 31, 2019	Penggantian Klaim Januari s.d Desember 2019 Reimbursement of Claim Bill from January to December 2019
1	PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	88.776.204.906,14	-
2	PT Heksa Solution Insurance	42.216.444.672,81	8.950.561.589,84
3	PT Asuransi Jiwasraya	1.670.127.309,62	2.776.438.589,89
4	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	8.299.728.658,18	17.693.670.319,46
5	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	9.474.160.134,03	31.293.902.848,04
6	PT Central Asia Raya	25.127.520,00	-
7	PT Binagriya Upakara	-	433.190.672,00
8	PT Reasuransi Nasional Indonesia	171.988.071.294,16	131.941.594.266,82
9	PT Reasuransi Indonesia Utama	105.133.863.369,81	25.666.095.177,25
	Jumlah/Total	427.583.727.864,75	218.755.453.463,29

Disarankan Divisi Teknik Administrasi Bisnis agar aktif berkoordinasi dengan pihak Reassuransi maupun Co Guarantee dalam hal percepatan dan peningkatan penyelesaian kewajiban piutangnya, mengingat upaya mitigasi melalui *risk transfer* sangat diperlukan untuk menjaga likuiditas Perusahaan.

It was recommended that the Engineering and Business Administration Division actively coordinated with the Reassurance and Co-Guarantee parties in accelerating and increasing the settlement of their receivables, considering that mitigation efforts through risk transfer were needed to maintain the Company's liquidity.

4. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio penjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan, yang dapat merugikan Perusahaan.

Dalam risiko pasar, variabel pasar yang terkait penjaminan adalah tingkat kompetisi, trend kredit per perusahaan, regulasi terkait dengan investasi antara lain suku bunga, inflasi, portofolio investasi. Tingkat dampak risiko pasar ditetapkan berdasarkan perhitungan risiko pasar dapat menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu berdasarkan perhitungan dampak *Yield of investment* (YoI) yang terdapat pada *Key Performance Indicator* (KPI) RKAP Perum Jamkrindo dan Pencapaian Target IJP Bersih.

a. Yield of Investment (YoI)

Yol digunakan sebagai acuan pengukuran risiko pasar dengan sudut pandang perubahan atas pencapaian Yol tahun terkait. Perhitungan Yol diperoleh dari Pendapatan investasi (*gross*) / Rata – rata total investasi.

$$\text{YoI} = \frac{\text{Pendapatan investasi (}gross\text{)}}{\text{Rata – rata total investas}}$$

4. Market Risk

Market Risk is the risk that arises due to the movement of market variables (adverse movement) of the guarantee portfolio owned by the Company, which can harm the Company.

In market risk, market variables related to guarantees are the level of competition, credit trends per Company, investment-related regulations including interest rates, inflation, investment portfolios. The level of market risk impact is determined based on the calculation of market risk, using 2 (two) approaches, namely based on the calculation of the yield of investment (YoI) contained in the Key Performance Indicator (KPI) of Perum Jamkrindo's RKAP and Net Guarantee Fee (IJP) Target Achievement.

a. Yield of Investment (YoI)

YoI is used as a reference for measuring market risk with a viewpoint of changes in the achievement of YoI in the related year. YoI calculations are obtained from investment income (gross) / average total investment.

$$\text{YoI} = \frac{\text{Investment income (gross)}}{\text{Average Total Investment}}$$

Berdasarkan Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko, kriteria dampak risiko dengan pendekatan *Yield of Investment* (YoI) adalah sebagai berikut:

Based on Circular Letter on Risk Management Implementation Guidelines, the risk impact criteria using the Yield of Investment (YoI) approach are as follows:

Dampak / Impact	Keterangan	Information
Catastrophic	Deviasi > 10% dari target YoI RKAP	Deviation> 10% of the YoI RKAP target
Major	Deviasi > 8% - 10% dari target YoI RKAP	Deviation> 8% - 10% of the YoI RKAP target
Moderate	Deviasi > 6% - 8% dari target YoI RKAP	Deviation> 6% - 8% of the YoI RKAP target
Minor	Deviasi > 4% - 6% dari target YoI RKAP	Deviation> 4% - 6% of the YoI RKAP target
Insignificant	Deviasi ≤ 4% dari target YoI RKAP	Deviation of <4% of the YoI RKAP target

Data realisasi YoI Triwulan IV adalah sebagai berikut:

YoI realization data for Quarter IV was as follows:

$$\text{YoI} = \frac{717.846.911.239}{10.602.443.274.849} = \mathbf{6,77\%}$$

Sumber : Divisi Keuangan & Investasi / Source: Finance & Investment Division

Realisasi YoI tahun 2019 sebesar 6,77%, sedangkan rata-rata YoI per bulannya adalah sebesar 0,56%. Rata-rata YoI per bulan tersebut diluar batas toleransi *Key Risk Indicator* yang telah ditetapkan oleh Perusahaan melalui Surat Edaran No. 01/SE/5/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang *Key Risk Indicator*, yaitu YoI sebesar 0,59% per bulan, sehingga target dalam 1 tahun tidak tercapai.

YoI 1 (satu) tahun di Tahun 2019 berdasarkan hasil rata-rata YoI per bulan adalah sebesar 6,77%, dan terdapat deviasi sebesar 0,61% terhadap target YoI tahun 2019 yaitu sebesar 7,38%, sehingga masuk dalam kategori ***insignificant***. Adapun perbandingan persentase YoI Triwulan IV Tahun 2019 dengan periode sebelumnya adalah sebagai berikut:

YoI realization in 2019 was 6.77%, while the average YoI per month was 0.56%. The average YoI per month was outside the tolerance limits of the Key Risk Indicator determined by the Company through Circular Letter No. 01 / SE / 5 / I / 2019 dated January 22, 2019, concerning Key Risk Indicator, namely YoI of 0.59% per month, so that the target in 1 year was not achieved.

YoI 1 (one) year in 2019 based on the average yield of YoI per month was 6.77%, and there was a deviation of 0.61% against the YoI target in 2019 of 7.38%, so it was included in the insignificant category. The comparison of the YoI percentage of Quarter IV of 2019 with the previous period was as follows:

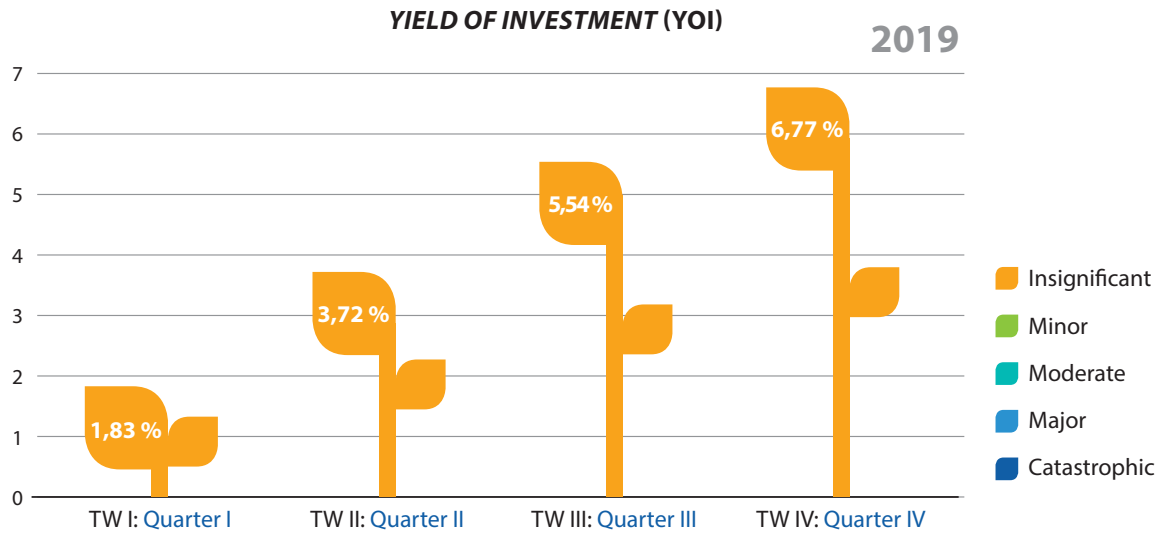

Pada diagram diatas terlihat Triwulan IV Tahun 2019 mengalami peningkatan pendapatan investasi sebesar 1,23% dari periode sebelumnya. Hal ini karena data pendapatan investasi Triwulan IV Tahun 2019 merupakan data akumulasi dari periode sebelumnya.

Disarankan pada masing-masing unit kerja untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Melakukan alokasi/diversifikasi portofolio investasi yang optimal.
2) Melakukan analisa penempatan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Melakukan pemantauan secara efektif kinerja portofolio investasi.
4) Menetapkan limit investasi di Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Khusus.
5) Melakukan pemantauan kinerja ekonomi makro dan industri domestik dan global secara rutin.
6) Menyusun strategi *cut loss* dalam mengelola investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7) Melakukan *review* secara berkala terhadap Kebijakan Investasi dengan memperhatikan perkembangan aktivitas terkini dengan prinsip kehati-hatian.
8) Melakukan *stress testing* dalam merespon suatu gejolak ekonomi.
9) Melakukan *exit policy* terhadap instrumen investasi pada mitra investasi yang terindikasi kesulitan likuiditas dan/atau indikasi lain yang berdampak pada Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Target IJP Bersih

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur dampak risiko dengan berbasis pencapaian terhadap Imbal Jasa Penjaminan (IJP) bersih.

Berdasarkan Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko, kriteria dampak risiko dengan pendekatan pencapaian target IJP Bersih.

The diagram above showed that Quarter IV of 2019 experienced an increase in investment income of 1.23% from the previous period. It was due to the investment income data for Quarter IV of 2019 was the accumulated data from the previous period.

It was recommended that each work unit did the following:

1) Conducting optimal allocation/diversification of investment portfolios.
2) Analyzing investment placement according to applicable regulations.
3) Monitoring the performance of investment portfolios effectively.
4) Setting investment limits at Head Office, Regional Offices, and Special Branch Offices.
5) Regularly monitoring domestic and global macroeconomic and industrial performance.
6) Preparing a cut loss strategy in managing investment according to applicable regulations.
7) Conducting periodic reviews of the Investment Policy by taking into account the latest activity development with the precautionary principle.
8) Performing stress testing in response to economic turmoil.
9) Conducting an exit policy for investment instruments with investment partners that were indicating liquidity difficulties and/or other indications that were impacting on the Company according to applicable regulations.

b. Net Guarantee Fee (IJP) Target

This approach is used to measure the risk impact on the basis of the achievement of a net guarantee fee (IJP).

Based on the Circular Letter on Risk Management Implementation Guidelines, the criteria of risk impact with the approach of Net Guarantee Fee (IJP) Target Achievement.

Dampak Impact	Keterangan Information
Catastrophic	Pencapaian IJP Bersih < 90% dari target RKAP Net IJP Achievement <90% of the RKAP target
Major	Pencapaian IJP Bersih ≥ 90% sampai dengan < 93% dari target RKAP Net IJP achievement> 90% up to <93% of the RKAP target
Moderate	Pencapaian IJP Bersih ≥ 93% sampai dengan < 96% dari target RKAP Net IJP achievement> 93% up to <96% of the RKAP target
Minor	Pencapaian IJP Bersih ≥ 96% sampai dengan 99% dari target RKAP Net IJP achievement> 96% up to 99% of the RKAP target
Insignificant	Pencapaian IJP Bersih > 99% dari target RKAP Net IJP Achievement> 99% of the RKAP target

Data realisasi pencapaian target IJP Bersih pada Triwulan IV Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Data on the achievement of the Net IJP target in Quarter IV of 2019 were as follows:

Realisasi IJP Bersih Net IJP Realization	Target IJP Bersih 2019 Net IJP Target 2019	% Pencapaian % of Achievement
2.325.173.872.489	1.521.361.686.038	152,84 %

Sumber : Divisi Akuntansi / Source: Accounting Division

Pada tahun 2019 pencapaian IJP bersih Perusahaan adalah sebesar Rp 2,3 Triliun atau setara dengan 152,84% dari target IJP Bersih Tahunan. Pencapaian target IJP Bersih Perusahaan tahun 2019 masuk dalam kategori risiko ***insignificant***. Adapun perbandingan persentase Realisasi IJP Bersih Triwulan IV Tahun 2019 dengan periode sebelumnya adalah sebagai berikut:

In 2019 the Company's net IJP achievement was Rp 2.3 Trillion or equivalent to 152.84% of the annual net IJP target. The achievement of the Company's 2019 net IJP target was included in the insignificant risk category. The comparison of the percentage of net IJP realization for Quarter IV of 2019 with the previous period was as follows:

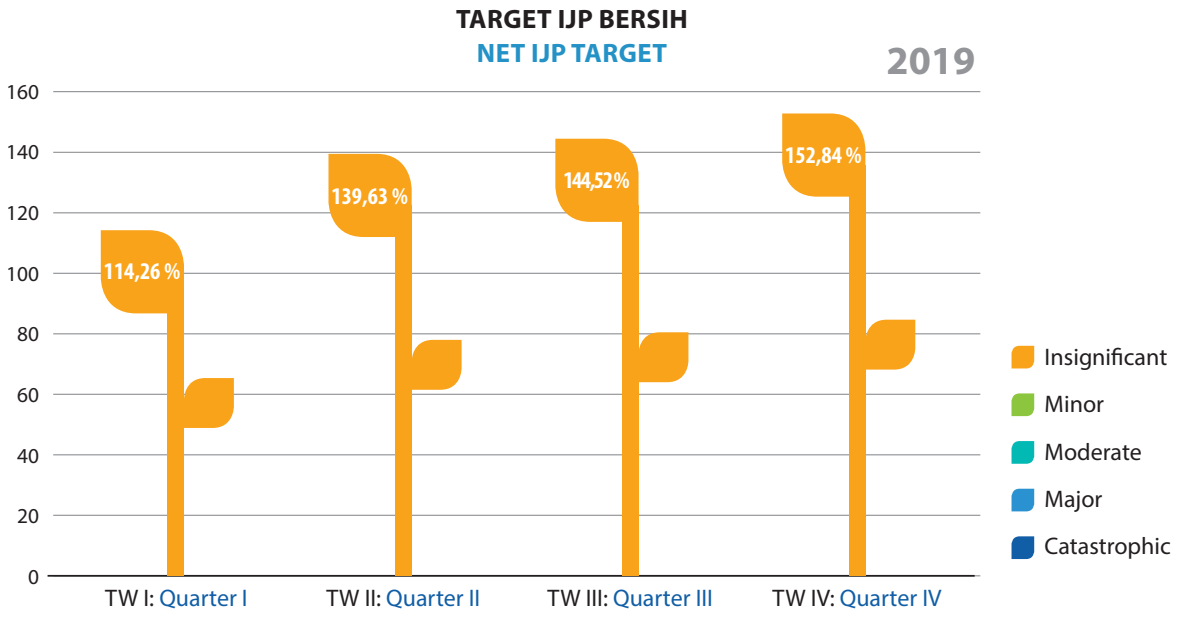

Pada diagram diatas terlihat Triwulan IV Tahun 2019 mengalami kenaikan pendapatan IJP sebesar 8,32% dari periode sebelumnya. Hal ini karena data pendapatan IJP Triwulan IV Tahun 2019 merupakan data akumulasi dari periode sebelumnya.

In the diagram above, it could be seen that Quarter IV of 2019 experienced an increase in IJP revenue of 8.32% from the previous period. It was due to the IJP revenue for Quarter IV of 2019 was the accumulated data from the previous period.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-udangan yang mendukung atau kelemahan perikatan dan nilai kerugian risiko hukum yang mencakup nilai tuntutan dan atau biaya perkara hukum, terdiri dari:

- Operasional perusahaan sebagai dapat menghindari dari hal-hal yang berkaitan dengan risiko hukum yang

5. Legal Risks

Legal Risk is the risk caused by the weakness of the juridical aspects. Weaknesses in the juridical aspects are caused by lawsuits, the absence of laws and regulations that support or weaknesses in the engagement and the value of legal risk losses that include the value of lawsuits and or legal costs, consisting of:

- The Company's operations as being able to avoid things related to the targeted legal risk will also impact

tertuju akan berdampak pula terhadap risiko reputasi perusahaan.

- **Risiko Hukum Langsung** adalah risiko yang berdampak secara langsung terhadap Perusahaan;
- **Risiko Hukum Tidak Langsung** adalah risiko yang disebabkan oleh pihak Mitra/eksternal dan berdampak mengikutsertakan secara tidak langsung peran Perusahaan dalam suatu perkara hukum.

Risiko hukum yang dapat diukur dengan pendekatan ini adalah risiko hukum "langsung", bukan risiko yang tergolong "tidak langsung". Perhitungan nilai kerugian risiko hukum berdasarkan perhitungan pendekatan nilai kerugian akibat risiko operasional. Nilai kerugian risiko hukum ini mencakup nilai tuntutan dan atau biaya perkara hukum.

Berdasarkan Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko, kriteria dampak risiko dengan pendekatan tuntutan hukum adalah sebagai berikut:

the Company's reputation risk.

- Direct Legal Risk is the risk that directly affects the Company;
- Indirect Legal Risk is the risk caused by the Partner/ external party and causes an impact of indirectly involving the Company's role in a legal case.

Legal risks that can be measured using this approach are "direct" legal risks, not risks classified "indirect". The calculation of legal risk loss value based on the calculation of the loss value approach due to operational risk. The value of this legal risk loss includes the value of the lawsuit and/or legal case costs.

Based on Circular Letter on Risk Management Implementation Guidelines, the criteria of risk impact using the lawsuits approach are as follows:

Dampak Impact	Keterangan Information
Catastrophic	Nilai tuntutan dan atau biaya perkara hukum mencapai > Rp 10 M The value of the lawsuit and/or legal case cost reaches> Rp 10 billion
Major	Nilai tuntutan dan atau biaya perkara hukum mencapai ≥ Rp 5 M sampai dengan Rp 10 M The value of the lawsuit and/or legal case cost reaches ≥ Rp 5 billion to Rp 10 billion
Moderate	Nilai tuntutan dan atau biaya perkara hukum mencapai ≥ Rp 1 M sampai dengan Rp 5 M The value of the lawsuit and/or legal case cost reaches ≥ Rp 1 billion to Rp 5 billion
Minor	Nilai tuntutan dan atau biaya perkara hukum mencapai ≥ Rp 100 juta sampai dengan Rp 1 M The value of the lawsuit and/or legal case cost reaches ≥ Rp 100 million to Rp 1 Billion
Insignificant	Nilai tuntutan dan atau biaya perkara hukum mencapai < Rp 100 juta The value of the lawsuit and/or legal case cost reaches <Rp 100 million

Pada Triwulan IV Tahun 2019 tidak terdapat tuntutan hukum.

In Quarter IV of 2019 there were no lawsuits.

6. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan atau persepsi negatif terhadap perusahaan.

Risiko reputasi dapat diukur dengan kuantitas berita negatif mengenai Perusahaan di media massa, baik cetak maupun online. Ukuran ini sudah diselaraskan dengan klasifikasi/penggolongan jenis media untuk mengelola pemberitaan negatif yang disusun Sekretaris Perusahaan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. **Tier 1** – media nasional yang reputasinya kuat (cetak dan online);

b. **Tier 2** – media nasional yang reputasinya moderat (cetak dan online);

6. Reputation Risk

Reputation Risk is a risk that is caused by, among others, negative publications related to the Company's business activities or negative perceptions towards the Company.

Reputation risk can be measured by the quantity of negative news about the Company in the mass media, both print and online. This measure has been aligned with the classification of media types to manage negative coverage. It is prepared by the Corporate Secretary. The explanation is as follows:

a. Tier 1 - national media with a strong reputation (print and online);

b. Tier 2 - national media with a moderate reputation (print and online);

c. **Tier 3** – media nasional yang reputasinya rendah (cetak dan online), dan

d. **Tier 4** – media lokal

Berdasarkan Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko, kriteria dampak risiko dengan pendekatan reputasi buruk Perusahaan di media massa adalah sebagai berikut:

c. Tier 3 - national media with a low reputation (print and online), and

d. Tier 4 - local media

Based on Circular Letter on Risk Management Implementation Guidelines, the criteria of risk impact with the Company's bad reputation approach in the mass media are as follows:

Dampak Impact	Keterangan Information
Catastrophic	Adanya pemberitaan negatif di lebih dari 5 media masa nasional tier 1 yang dapat menurunkan citra dan reputasi perusahaan There is negative news in more than 5 (five) national mass media tier 1 that can degrade the Company's image and reputation.
Major	Adanya pemberitaan negatif di 1-5 media massa nasional tier 1 yang dapat menurunkan citra dan reputasi perusahaan There is negative news in 1-5 national mass media tier 1 that can degrade the Company's image and reputation.
Moderate	Adanya pemberitaan negatif di media massa baik tier 2 ataupun 3 yang dapat menurunkan citra dan reputasi perusahaan There is negative news in the mass media, both tier 2 or 3, that can degrade the Company's image and reputation.
Minor	Adanya pemberitaan negatif di media masa lokal yang dapat menurunkan citra dan reputasi perusahaan There is negative news in the local mass media that can degrade the Company's image and reputation.
Insignificant	Adanya keluhan di media sosial mengenai pelayanan dan produk dapat menurunkan citra dan reputasi perusahaan There are complaints on social media about services and products that can degrade the Company's image and reputation.

Pada Triwulan IV Tahun 2019 terdapat berita negatif yang menyebabkan risiko reputasi dan berdampak buruk bagi Perusahaan, berikut rincian risiko reputasi pada Triwulan IV Tahun 2019.

In Quarter IV of 2019, there was negative news that caused reputation risk and had a negative impact on the Company. The following were the detail of reputation risks in Quarter IV of 2019.

No	Pemberitaan News	~~Lama~~ Jumlah Pemberitaan Number of News Coverage	Tier	Media	Penanganan Handling	Zona Zone
1	Klaim oleh BPD NTT kepada Perum Jamkrindo Kupang Claims by BPD NTT to Perum Jamkrindo Kupang	1 kali 1 time	2	Victory News dan Victorynews.com	1. Mengunjungi dan meminta hak jawab ke redaksi. Hak jawab dimuat di hari berikutnya, tetapi tonasi berita tetap condong ke BPD NTT (ada konflik kepentingan karena pemilik Victory News adalah Gubernur NTT/Pemegang saham pengendali Bank NTT. 2. Mengumpulkan dan silaturahmi dengan 10 reporter media di Kupang. Memberi penjelasan mengenai kontribusi Perum Jamkrindo di Kupang (sebagai soft counter terhadap Victory News) 1. Visited and requested the right of reply to the editor. The right of reply was loaded the following day, but the tonnage of news remained leaning towards BPD NTT (there was a conflict of interest because the owner of Victory News was the NTT Governor/ controlling shareholder of Bank NTT. 2. Gathered and met with 10 (ten) media reporters in Kupang. Provided explanations of the contribution of Perum Jamkrindo in Kupang (as a soft counter towards Victory News).	Moderate
2	Grafis BUMN yang membebani keuangan negara (pelengkap berita BUMN yang mendapatkan PMN tetapi masih rugi) SOEs chart that burdens state finances (complementary to SOEs news that gets Government Paid-in Capital (PMN) but still loses)).	1 kali 1 time	1	Kontan	1. Mengunjungi dan meminta klarifikasi sumber data. Ternyata data bersumber dari Kementerian BUMN yang template datanya tidak sesuai dengan pelaporan yang rutin disampaikan Divisi Keuangan ke Kementerian BUMN (terkait laba usaha). Lalu meminta Redaksi Kontan untuk membuat ralat pada edisi hari berikutnya 2. Berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk mereview publikasi mengenai laba usaha karena berpotensi bias atau keliru interpretasi. Dalam sistem pelaporan keuangan, laba usaha hanya memasukkan komponen IJP dan beban usaha. Sementara subrogasi masuk dalam kategori pendapatan lain-lain. Padahal, selain berasal dari IJP, pendapatan utama Jamkrindo juga berasal dari subrogasi 1. Visited and requested for clarification of data sources. It turned out that the data sourced from the Ministry of SOEs whose data templates did not match the reporting routinely submitted by the Finance Division to the Ministry of SOEs (related to operating profit). Then asked the Editor of Kontan to make corrections on the next day's edition 2. Coordinated with the Ministry of SOEs to review publications on operating profit because of the potential for bias or misinterpretation. In the financial reporting system, operating profit only includes the IJP component and operating expenses. At the same time, subrogation is included in other income categories. In fact, besides coming from IJP, Jamkrindo's primary income also came from subrogation.	Major

Dari rincian data risiko reputasi tersebut terdapat pemberitaan pada Kantor Cabang Kupang oleh media Victory News dan Victorynews.com, sehingga masuk ke dalam zona risiko ***Moderate.*** Dan Perum Jamkrindo juga mendapatkan pemberitaan dari media Kontan terkait grafis BUMN yang membebani keuangan negara, sehingga masuk ke dalam zona risiko ***Major***. *(Sumber : Sekretaris Perusahaan)*.

Disarankan pada masing-masing unit kerja untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Melakukan langkah preventif dengan menjalankan SOP Layanan Perusahaan;
b. Melakukan komunikasi secara rutin dengan pemangku kepentingan;
c. Menyampaikan informasi mengenai Perusahaan, karyawan dan kegiatan-kegiatan internal, serta produk dan layanan melalui berbagai saluran saluran komunikasi yang dimiliki;
d. Melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas pelayanan dan kemitraan secara konsisten;
e. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala dan membuka berbagai kanal komunikasi untuk memudahkan menerima aspirasi pelanggan/ mitra;
f. Melakukan respon atas keluhan/masukan dari pelanggan secara cepat dan tepat, dan dikomunikasikan dengan unit terkait yang memiliki tanggungjawab;
g. Membina dan menjalin hubungan baik dengan media yang memiliki kredibilitas baik untuk membuka akses informasi serta memberikan sumber berita;
h. Melakukan klarifikasi atas suatu pemberitaan secara cepat, tepat, dan menyeluruh melalui kanal informasi yang dapat merespon risiko reputasi;
i. Melakukan pengawasan dan pengendalian informasi yang beredar di msayarakat, media, dan media sosial;
j. Berkoordinasi dengan SPI untuk memantau temuan dan risiko yang dapat berakibat pada reputasi Perusahaan;
k. Melakukan berbagai kegiatan sosialisasi/edukasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai Perusahaan.
l. Setiap kejadian yang terkait dengan risiko reputasi dicatat dan ditatausahakan sehingga menjadi pelajaran dimasa datang dan untuk memproyeksikan potensi kerugian yang mungkin timbul;

From the detailed reputation risk data, there was news coverage at the Kupang Branch Office by Victory News and Victorynews.com, so that it belongs to the Moderate risk zone. And Perum Jamkrindo also received news from the media related to SOEs graph that burdened state finances, so it entered into the Major risk zone. (Source: Corporate Secretary).

It was recommended that each work unit do the following:

a. Took preventive measures by carrying out Company Service SOPs;
b. Communicated regularly with stakeholders;
c. Conveyed information about the Company, employees and internal activities, and products and services through various communication channels owned;
d. Conducted transparency and accountability in every service and partnership activity consistently;
e. Conducted customer satisfaction surveys regularly and opened various communication channels to facilitate receiving the aspirations of customers/ partners;
f. Responded to complaints/input from customers quickly and accurately, and communicated with related units that had responsibilities;
g. Fostered and established good relations with media that had good credibility to open access to information and provided news sources;
h. Clarified the news quickly, accurately, and thoroughly through information channels that could respond to reputation risk;
i. Supervised and controlled information circulating in the public, media and social media;
j. Coordinated with SPI to monitor findings and risks that might affect the Company's reputation;
k. Conducted various socialization/education activities to the community to increase understanding of the Company.
l. Every event related to reputation risk was recorded and administered to become a lesson in the future and projected potential losses that might arise;

m. Sekretaris Perusahaan dapat bekerja sama dengan unit kerja tertentu di Perusahaan dalam upaya memberikan informasi yang tepat, cepat, dan akurat ke masyarakat;

n. Dalam hal terjadi gangguan reputasi perusahaan, pihak yang dapat memberikan klarifikasi informasi kepada pihak eksternal hanya pihak yang berwenang (juru bicara Perusahaan). Ketentuan terkait juru bicara Perusahaan diatur dalam Peraturan Direksi tersendiri.

m. The Corporate Secretary could cooperate with specific work units in the Company to provide the right, fast and accurate information to the public;

n. In the event of a disruption to the Company's reputation, only those in authority could provide clarification of information to external parties (spokesperson of the Company). Provisions relating to the Company's spokesperson were regulated in a separate Board of Directors Regulation.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Perusahaan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Berdasarkan Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko, kriteria dampak risiko dengan pendekatan kepatuhan terhadap regulasi:

7. Compliance Risk

Compliance Risk is the risk caused by the Company not complying with or not implementing the laws and regulations and other applicable provisions. Based on Circular Letter on Risk Management Implementation Guidelines, the criteria of risk impact using the compliance to regulatory approach:

Dampak Impact	Keterangan Information
Catastrophic	Pelanggaran regulasi yang mengakibatkan pembatasan usaha Regulatory violations that result in business restrictions
Major	Mendapatkan surat peringatan tertulis Get a written warning letter
Moderate	Mendapatkan denda administrasi akibat keterlambatan menyampaikan laporan bulanan secara lengkap dan atau laporan tahunan Obtain administrative fines for delay in submitting a complete monthly report and/or annual report
Minor	Mendapat surat pemberitahuan dan wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan paling lama 1 bulan sejak tanggal pemberitahuan Receive notification letter and must comply with the provisions no later than 1 month from the date of notification
Insignificant	-

Pada Triwulan IV Tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran kepatuhan

In Quarter IV of 2019 there were no compliance violations.

8. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem, atau sebagai akibat dari kejadian eksternal.

Perusahaan dalam menghitung dampak risiko operasional menggunakan 7 aspek penilaian yaitu dampak dari nilai kerugian akibat risiko operasional, dampak dari persentase *turnover* Sumber Daya Manusia (SDM), dampak dari downtime piranti *Information Technology* (IT), dampak kesalahan (koreksi) yang dihitung berdasarkan aplikasi koreksi, dampak dari target BOPO, dampak dari tindak lanjut temuan audit, dan dampak kecelakaan kerja.

8. Operational Risk

Operational Risk is the loss of risk caused by failure or inadequacy of internal processes, people and systems, or external events.

The Company in calculating the impact of operational risk uses 7 (seven) aspects of assessment namely the impact of the losses value due to operational risk, the impact of the human resources turnover, the impact of the downtime of Information Technology (IT) devices, the impact of errors (corrections) calculated based on the application of the correction, the impact of the BOPO target, the impact of the follow-up on audit findings, and the impact of occupational accidents.

a. Nilai Kerugian akibat risiko operasional

Pengukuran risiko operasional dilihat dari nilai kerugian yang harus ditanggung Perusahaan. Dampak kerugian ini dihitung menggunakan pendekatan kerugian risiko non bisnis Perusahaan yang mengakibatkan kerugian finansial bagi Perusahaan.

Berdasarkan Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko, kriteria dampak risiko dengan pendekatan nilai kerugian akibat risiko operasional:

a. Loss value due to operational risk

The measurement of operational risk can be seen from the value of losses that must be borne by the Company. The impact of this loss is calculated using the Company's non-business risk loss approach, which results in financial losses for the Company.

Based on Circular Letter on Risk Management Implementation Guidelines, the criteria of risk impact using the loss value approach due to operational risk:

Dampak Impact	Keterangan Information
Catastrophic	Apabila kerugian mencapai > Rp 10 M If the loss reaches> Rp. 10 billion
Major	Apabila kerugian mencapai ≥ Rp 5 M sampai dengan Rp 10 M If the loss reaches ≥ Rp. 5 billion to Rp. 10 billion
Moderate	Apabila kerugian mencapai ≥ Rp 1 M sampai dengan Rp 5 M If the loss reaches ≥ Rp 1 billion to Rp 5 billion
Minor	Apabila kerugian mencapai ≥ Rp 100 juta sampai dengan Rp 1 M If the loss reaches ≥ Rp 100 million to Rp 1 Billion
Insignificant	Apabila kerugian mencapai < Rp 100 juta If the loss reaches <Rp 100 million

Pada Tahun 2019 data terkait nilai kerugian akibat risiko operasional belum tersedia karena risiko operasional yang terjadi tidak menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

In 2019 data related to the losses value due to operational risk was not yet available due to operational risks that occurred did not cause losses to the Company.

b. *Turn over* Karyawan

Digunakan untuk mengukur dampak sebuah risiko terhadap angka *turn over* karyawan. Dampak dari persentase *turn over* karyawan dihitung menggunakan pendekatan *turn over rate* (tingkat perputaran) yaitu jumlah karyawan keluar (*resign*, diangkat sebagai direktur, pensiun dan meninggal dunia) dibagi total jumlah karyawan pada satu periode yang sama.

$$\textit{Turn Over}\ \text{Karyawan} = \frac{\text{Jumlah Karyawan Keluar}}{\text{Total Jumlah Karyawan}}$$

b. Employee turnover

Use to measure the impact of a risk on employee turnover. The impact of the percentage of employee turnover is calculated using the turnover rate approach, namely the number of employees leaving (resigning, being appointed as Director, retiring and dying) divided by the total number of employees in the same period.

$$\text{Employee Turnover} = \frac{\text{Number of Employees Leaving}}{\text{Total Employees}}$$

Berdasarkan Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko, kriteria dampak risiko dengan pendekatan turn over karyawan:

Based on Circular Letter on Risk Management Implementation Guidelines, criteria for risk impact using employee turnover approach:

Dampak Impact	Keterangan Information
Catastrophic	Apabila persentase turnover karyawan > 3 % If the employee turnover percentage is> 3%
Major	Apabila persentase turnover karyawan > 2% - 3% If the employee turnover percentage is> 2% - 3%
Moderate	Apabila persentase turnover total karyawan > 1% - 2% If the percentage of employee turnover is> 1% - 2%
Minor	Apabila persentase turnover total karyawan > 0,5% - 1 % If the percentage of total employee turnover> 0.5% - 1%
Insignificant	Apabila persentase turnover total karyawan ≤ 0,5% If the percentage of total employee turnover <0.5%

Data *Turnover* Karyawan sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Employee Turnover data up to 2019 were as follows:

$$TurnOver = \frac{44}{1002} = \mathbf{4,39\%}$$

Realisasi *Turnover* Karyawan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 44 pegawai atau sebesar 4,39% masuk dalam kategori ***Catastrophic***. Adapun perbandingan persentase *Turnover* Karyawan dengan periode sebelumnya adalah sebagai berikut :

Realization of Employee Turnover until 2019, there were 44 employees or 4.39% included in the Catastrophic category. The percentage ratio of Employee Turnover with the previous period was as follows:

PIUTANG CO GUARANTEE/REASURANSI
CO-GUARANTEE/ REINSURANCE RECEIVABLES **2019**

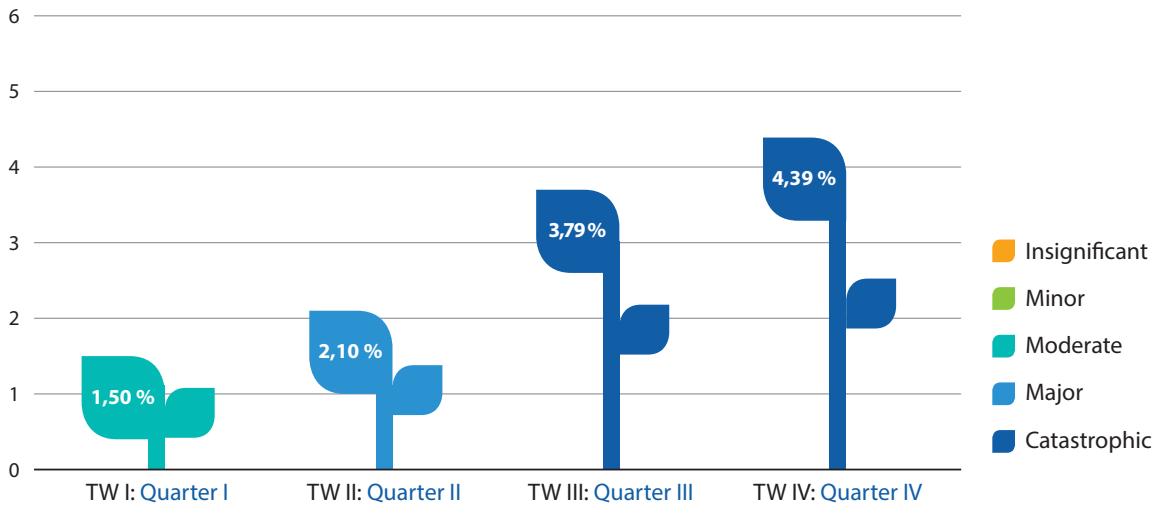

Berdasarkan diagram di atas dapat terlihat bahwa sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan persentase *turn over*, berikut rincian perbandingan *turn over* per periode.

Based on the diagram above, it could be seen that up to 2019 there has been an increase in the percentage of turnover, along with a detailed comparison of turnover per period.

No	Jabatan Position	Jabatan Position	Triwulan I Quarter I	Triwulan II Quarter II	Triwulan III Quarter III	Triwulan IV Quarter IV	Jumlah Total
1	Pemimpin Cabang	Branch Managers	1	-	-	-	1
2	Kepala Bagian	Division Heads	5	1	7	-	13
3	Kepala Unit	Unit Heads	-	-	1	-	1
4	Kepala Seksi	Section Heads	1	-	-	1	2
5	Staf	Staff	2	8	5	4	19
6	Calon Karyawan	Prospective employees	-	-	3	-	3
7	Pelaksana	Implementer/Officer	1	-	3	-	4
8	Pranata Muda	Junior Staff	-	-	-	1	1
	Total		**10**	**9**	**19**	**6**	**44**

Sumber : Divisi MSDM / Source: HRM Division

Untuk memitigasi hal tersebut dan mengurangi tingkat *turn over* pada periode selanjutnya disarankan Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemanfaatan tenaga kerja *Pro Hire* dan tenaga magang bersertifikat untuk mengisi kekosongan formasi pada unit kerja yang memerlukan tenaga kerja.
2) Perangkapan jabatan sementara untuk formasi pejabat yang masih kosong
3) Perlunya dilakukan evaluasi survey kepuasan karyawan dan hasil atas survey yang telah dilakukan ditindaklanjuti dalam bentuk sosialisasi *feedback* kepada karyawan.

To mitigated this and reduced the level of turnover in the next period, it was recommended that the Human Resources Management Division did the following:

1) Utilization of Pro Hire and certified apprentices to filled formation vacancies in work units that required labor.
2) Temporary concurrent positions for the formations of officials that were still vacant
3) The need to evaluate employee satisfaction surveys and the results of surveys that have been carried out were followed up in feedback socialization to employees.

c. *Downtime* IT

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur dampak sebuah risiko terhadap gangguan sistem informasi atau biasa disebut dengan *downtime* IT. Perhitungan kriteria dampak dari *downtime* sistem IT didasarkan pada dokumen kritikalitas sistem IT di Perusahaan. Berdasarkan dokumen tersebut, disebutkan bahwa untuk Sistem ***Critical*** maksimum *downtime* nya adalah 4 jam dan Sistem ***Non Critical*** maksimum *downtime*nya adalah 48 jam. Penentuan tingkat kritikalitas sistem mengacu pada ketentuan kritikalitas sistem Divisi yang membidangi TI.

Berdasarkan Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko, kriteria dampak risiko dengan pendekatan downtime TI adalah sebagai berikut:

c. IT Downtime

This approach is used to measure the impact of a risk on information system disruption or commonly referred to as IT downtime. Calculation of the impact criteria of IT system downtime is based on the IT system's criticality document in the Company. Based on this document, it is stated that for the Critical System, the maximum downtime is 4 hours, and the Non-Critical System, the maximum downtime is 48 hours. The system criticality's level determination refers to the system criticality provisions of the Division in charge of IT.

Based on Circular Letter on Risk Management Implementation Guidelines, the criteria of risk impact using the IT downtime approach are as follows:

Dampak Impact	Dampak *Downtime* IT (untuk Piranti *Critical*) Impact of IT Downtime (for Critical Devices)		Dampak *Downtime* IT (untuk Piranti *Non Critical*) Impact of IT Downtime (for Non Critical Devices)	
Catastrophic	> 4 jam	> 4 hours	> 16 jam	> 16 hours
Major	> 3 jam – 4 jam	> 3 hours - 4 hours	>11 – 16 jam	> 11-16 hours
Moderate	> 2 jam – 3 jam	> 2 hours - 3 hours	>7 – 11 jam	> 7 - 11 hours
Minor	> 1 jam – 2 jam	> 1 hour - 2 hours	>3 – 7 jam	> 3-7 hours
Insignificant	≤1 jam	≤1 hour	≤ 3 jam	≤3 hours

Berikut data *Downtime* yang terjadi pada periode Triwulan IV Tahun 2019 :

The following data was Downtime that occurred in the IV Quarter of 2019:

No.	Kategori aplikasi Application category	Rata-rata *Downtime* Average Downtime	Kategori Dampak Impact Category
1	Aplikasi kritikal Critical application	4h 34m 06s	***Catastrophic***
2	Aplikasi non kritikal Non-critical application	2h 44m 35s	***Minor***

Sumber : Divisi Teknologi Informasi / Source: Information Technology Division

Adapun rincian data *downtime* periode Triwulan IV Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

The details of the downtime data for the fourth quarter of 2019 were as follows:

No	Nama Aplikasi Application Name	Kategori Aplikasi Application Category	Rata-rata *Downtime* Average Downtime	Maksimal *Downtime* (dalam sehari) Maximum Downtime (in a day)	Keterangan Information
1	KUR *Online*	Kritikal Critical	23h 7m 3s	5d 12h 25m 50s	*Downtime* dengan waktu lama dikarenakan ada proses migrasi *server* dan *trip* koneksi untuk *downtime* waktu sebentar Downtime with a long time because there were a server migration process and connection trip for a short time downtime
2	Aplikasi Akuntansi Accounting Application	Kritikal Critical	57m 50s	2h 1m 1s	*Downtime trip* koneksi dan *service* aplikasi *down* Connection trip downtime and application service downtime
3	Penjaminan *Suretyship* Suretyship Guarantee	Kritikal Critical	1h 3m 46s	2h 21m 17s	*Downtime trip* koneksi dan *service* aplikasi *down* Connection trip downtime and application service downtime
4	Aplikasi Pelaporan Reporting Application	Kritikal Critical	1h 7m 48s	11h 12m 26s	*Downtime trip* koneksi dan *service* aplikasi *down* Connection trip downtime and application service downtime
5	Aplikasi Penerbitan Penjaminan Guarantee Issuance Application	Non Kritikal Non Critical	1h 34m 2s	8h 36m 00s	*Downtime trip* koneksi dan *service* aplikasi *down* Connection trip downtime and application service downtime
6	Aplikasi Koreksi Correction Application	Non Kritikal Non Critical	1h 51m 38s	8h 36m 00s	*Downtime trip* koneksi dan *service* aplikasi *down* Connection trip downtime and application service downtime
7	Jamkrindo *Mobile*	Non Kritikal Non Critical	53m 59s	1h 59m 43s	*Downtime trip* koneksi dan *service* aplikasi *down* Connection trip downtime and application service downtime

No	Nama Aplikasi Application Name	Kategori Aplikasi Application Category	Rata-rata *Downtime* Average Downtime	Maksimal *Downtime* (dalam sehari) Maximum Downtime (in a day)	Keterangan Information
8	*Micro Business Credit* (KUM) Mandiri	Non Kritikal Non Critical	1h 0m 15s	4h 1m 00s	*Downtime trip* koneksi dan *service* aplikasi *down* Connection trip downtime and application service downtime
9	SIMR	Non Kritikal Non Critical	10h 38m 40s	6d 16h 21m 12s	*Downtime trip* koneksi dan ada *update database* aplikasi sehingga aplikasi di *off* kan sementara saat penyesuaian Connection trip downtime and there was an application database update so the application was temporarily turned off while adjusting
10	Pegadaian *Online* Online Pawnshop	Non Kritikal Non Critical	12h 5m 35s	2d 1h 37m 00s	*Downtime trip* koneksi dan *service* aplikasi *down* Connection trip downtime and application service downtime
11	Penjaminan *Online* Bank Jateng Bank Jateng Online Guarantee	Non Kritikal Non Critical	1h 4m 7s	2h 21m 12s	*Downtime trip* koneksi dan *service* aplikasi *down* Connection trip downtime and application service downtime
12	Penjaminan Kupra/ Briguna Kupra / Briguna Guarantee	Non Kritikal Non Critical	1h 30m 14s	8h 36m 00s	*Downtime trip* koneksi dan *service* aplikasi *down* Connection trip downtime and application service downtime
13	Penjaminan jamkrindo *co-guarantee* Guarantee of Jamkrindo Co-Guarantee	Non Kritikal Non Critical	1h 22m 24s	8h 36m 00s	*Downtime trip* koneksi dan *service* aplikasi *down* Connection trip downtime and application service downtime
14	Manajemen Data Dasar Basic Data Management	Non Kritikal Non Critical	1h 42m 3s	8h 36m 00s	*Downtime trip* koneksi dan *service* aplikasi *down* Connection trip downtime and application service downtime
15	Wistleblowing System (WBS)	Non Kritikal Non Critical	1h 24m 46s	2h 21m 45s	*Downtime trip* koneksi dan *service* aplikasi *down* Connection trip downtime and application service downtime
16	Operasional Jakarta Khusus Special Jakarta Operations	Non Kritikal Non Critical	49m 5s	2h 17m 37s	*Downtime trip* koneksi dan *service* aplikasi *down* Connection trip downtime and application service downtime
17	Sistem Informasi PKBL PKBL Information System	Non Kritikal Non Critical	1h 7m 48s	1h 38m 46s	*Downtime trip* koneksi dan *service* aplikasi *down* Connection trip downtime and application service downtime
18	*Dashboard* BI BI Dashboard	Non Kritikal Non Critical	1h 25m 6s	2h 21m 2s	*Downtime trip* koneksi dan *service* aplikasi *down* Connection trip downtime and application service downtime

Sumber : Divisi Teknologi Informasi / Source: Information Technology Division

Penyebab *downtime* yang dialami yaitu dikarenakan Perusahaan sedang dalam proses migrasi *server* dan *trip* koneksi sehingga dimatikan sementara.

The cause of downtime experienced was due to the Company was in the process of migrating servers and connection trips, so it has been temporarily disabled.

d. Koreksi

Dampak dari risiko operasional juga dapat dihitung berdasarkan kesalahan/koreksi yang dihitung menggunakan aplikasi koreksi. Koreksi dimaksud merupakan koreksi yang berasal dari kegiatan koreksi oleh internal Perusahaan.

Berdasarkan Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko, kriteria dampak risiko dengan pendekatan jumlah koreksi adalah sebagai berikut:

d. Correction

The impact of operational risk can also be calculated based on errors/corrections calculated using the correction application. The corrections referred to are corrections arising from the Company's internal corrective activities.

Based on Circular Letter on Risk Management Implementation Guidelines, the criteria for risk impact using number of corrections approach were as follows:

Dampak / Impact	Keterangan	Information
Catastrophic	Kesalahan > 1000 koreksi	Error> 1000 corrections
Major	Kesalahan > 500 – 1000 koreksi	Error> 500 - 1000 corrections
Moderate	Kesalahan > 250 - 500 koreksi	Error> 250 - 500 corrections
Minor	Kesalahan > 100 – 250 koreksi	Error> 100 - 250 corrections
Insignificant	Kesalahan ≤ 100 koreksi	Error ≤ 100 corrections

Pada Triwulan IV Tahun 2019 terdapat 5.394 koreksi data terdiri dari 724 sebab internal dan 4.670 sebab eksternal dengan rincian koreksi sebagai berikut :

In Quarter IV of 2019 there were 5,394 data corrections consisting of 724 internal causes and 4,670 external causes with details of the correction as followed:

No.	Jenis Koreksi Correction Type	Triwulan I Quarter I	Triwulan II Quarter II		Triwulan III Quarter III		Triwulan IV Quarter IV	
		Internal & Eksternal Internal & External	Internal	Eksternal External	Internal	Eksternal External	Internal	Eksternal External
1	Koreksi Penjaminan Guarantee Corrections	1.892	75	1.811	941	1.534	490	2.905
2	Koreksi Klaim Claim Correction	59	5	53	55	10	91	3
3	Koreksi Subrogasi Subrogation Correction	16	2	6	16	-	6	-
4	Delete Penjaminan Guarantee Delete	538	-	117	56	640	56	1.736
5	Delete Klaim Claim Delete	43	1	42	74	2	80	5
6	Delete Subrogasi Subrogation Delete	4	-	8	3	12	1	21
	Total	**2.552**	**83**	**2.037**	**1.145**	**2.198**	**724**	**4.670**

Rincian per Wilayah Kerja sebagai berikut :

Details per Work Area were as follows:

No.	Kantor Wilayah Regional Office	Triwulan I Quarter I	Triwulan II Quarter II		Triwulan III Quarter III		Triwulan IV Quarter IV	
		Internal & Eksternal Internal & External	Internal	Eksternal External	Internal	Eksternal External	Internal	Eksternal External
1	Khusus DKI Jakarta Specifically for DKI Jakarta	179	4	41	105	26	80	535
2	Kantor Wilayah I Regional Office I	279	12	200	124	490	93	381
3	Kantor Wilayah II Regional Office II	209	4	147	33	179	66	147
4	Kantor Wilayah III Regional Office III	1.150	3	133	35	161	38	2.295
5	Kantor Wilayah IV Regional Office IV	134	-	544	21	37	91	27
6	Kantor Wilayah V Regional Office V	127	8	527	106	76	101	116
7	Kantor Wilayah VI Regional Office VI	133	8	133	118	258	112	340
8	Kantor Wilayah VII Regional Office VII	77	-	89	456	619	31	130
9	Kantor Wilayah VIII Regional Office VIII	67	15	88	49	95	17	506
10	Kantor Wilayah IX Regional Office IX	197	29	135	98	257	95	193
	Total	**2.552**	**83**	**2.037**	**1.145**	**2.198**	**724**	**4.670**

Rincian Kantor Cabang pada Kantor Wilayah dengan jumlah koreksi terbesar sebab internal dan eksternal pada Triwulan IV Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

The details of Branch Offices in Regional Offices with the largest number of corrections due to internal and external causes in Quarter IV of 2019 were as follows:

No.	Kantor Wilayah VI Regional Office VI	Internal	Kantor Wilayah III Regional Office III	Eksternal External
1	Surabaya	90	DKI Jakarta	2239
2	Malang	5	Pontianak	35
3	Madiun	12	Serang	6
4	Kediri	3	Tangerang	15
5	Banyuwangi	2	-	-
	Total	**112**	**Total**	**2295**

Jenis Koreksi pada Triwulan IV Tahun 2019 yang memiliki jumlah koreksi internal dan eksternal terbanyak terdapat pada jenis Koreksi Penjaminan yaitu sebanyak 490 sebab internal dan 2.905 sebab eksternal.

Adapun Kantor Wilayah yang memiliki koreksi paling besar dengan sebab internal yaitu pada Kantor Wilayah VI sebanyak 112 koreksi dan koreksi terbesar

Types of Corrections in Quarter IV of 2019, which had the highest number of internal and external corrections, were found in the type of Guarantee Correction, namely 490 internal causes and 2,905 external causes.

As for the Regional Offices that had the largest corrections with internal causes, namely in Regional Office VI as many as 112 corrections and the largest

terdapat pada Kantor Cabang Surabaya sebanyak 90 Koreksi, kemudian dengan sebab eksternal pada Kantor Wilayah III sebanyak 2295 koreksi dan koreksi terbesar pada Kantor Cabang DKI Jakarta sebanyak 2239 koreksi.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka risiko operasional untuk koreksi masuk ke dalam tingkat dampak risiko ***Catastrophic*.**

Untuk memitigasi koreksi sebab internal pada periode selanjutnya disarankan unit kerja melakukan mekanisme pengambilan keputusan dan *controlling* secara berjenjang dan sesuai dengan kewenangan (*maker, checker, signer*), dan untuk sebab eksternal agar dilakukan evaluasi terhadap mitra.

e. BOPO

Pendekatan ini mengukur dampak sebuah risiko berdasarkan deviasi pencapaian target BOPO. Ketika sebuah risiko terjadi, dimungkinkan akan terjadi perubahan biaya yang harus dikeluarkan. Salah satu pengukuran efisiensi yang banyak digunakan adalah rasio BOPO.

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Usaha}}{\text{Pendapatan Usaha}}$$

Berdasarkan Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko, kriteria dampak risiko dengan pendekatan BOPO adalah sebagai berikut:

correction was at Surabaya Branch Office as much as 90 Corrections, then with external causes at Regional Office III as many as 2,295 corrections and the largest correction at DKI Jakarta Branch Office 2,239 corrections.

Based on the data above, the operational risk for correction entered into the level of impact risk of Catastrophic.

To mitigate the corrections of internal causes in the next period, it was recommended that the work unit conduct decision-making and control mechanisms in stages and according to authority (maker, checker, signer). For external causes, the evaluation of partners must be conducted.

e. BOPO

This approach measures the impact of a risk-based on the deviation from achieving the BOPO target. When a risk occurs, there may be changes in costs that must be incurred. One efficiency measurement that is widely used is the BOPO ratio.

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Operating Expenses}}{\text{Operating Revenues}}$$

Based on Circular Letter on Risk Management Implementation Guidelines, the criteria for risk impact using the BOPO approach are as follows:

Dampak / Impact	Keterangan	Information
Catastrophic	Deviasi > 10% dari target BOPO	Deviation> 10% of the BOPO target
Major	Deviasi > 8% - 10% dari target BOPO	Deviation> 8% - 10% of the BOPO target
Moderate	Deviasi > 6% - 8% dari target BOPO	Deviation> 6% - 8% of the BOPO target
Minor	Deviasi > 4% - 6% dari target BOPO	Deviation> 4% - 6% of the BOPO target
Insignificant	Deviasi ≤ 4% dari target BOPO	Deviation ≤ 4% of the BOPO target

Data realisasi BOPO sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BOPO realization data up to 2019 were as follows:

$$\text{BOPO} = \frac{820.094.377.891}{2.325.173.872.489} = \mathbf{35,27\%}$$

Sumber : Divisi Akuntansi / Source: Accounting Division

BOPO Perusahaan tahun 2019 adalah sebesar 35,27%, dan tidak melampaui target yang telah ditetapkan perusahaan yaitu sebesar 49,75%, dengan demikian parameter BOPO perusahaan tahun 2019 masuk ke dalam tingkat dampak risiko ***Insignificant***.

The Company's BOPO in 2019 was 35.27% and did not exceed the target set by the Company, which was 49.75%. Thus the Company's BOPO parameters in 2019 entered into the level of impact of insignificant risk.

Adapun perbandingan persentase BOPO antar periode di tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

The comparison of BOPO percentages between periods in 2019 was as follows:

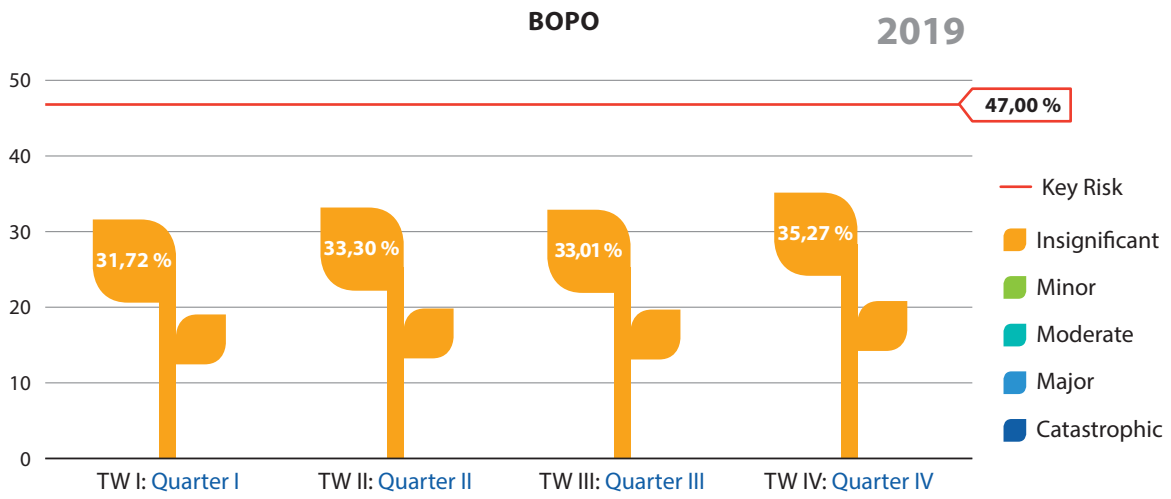

Disarankan agar masing-masing unit kerja tetap melakukan program efisiensi di Unit Kerjanya dan/atau peningkatan pendapat usaha, serta aktif melakukan *monitoring* pengendalian biaya operasional untuk menjaga supaya tidak terjadi pelampauan dari anggaran yang telah ditetapkan pada RKAP/RKAW/RKAC tahun 2020.

It was recommended that each work unit continued to carry out efficiency programs in its Work Unit and/or increased business opinion, and actively monitored operational cost controls to prevent overstepping the budget stipulated in the 2020 RKAP/RKAW/ RKAC.

f. Tindak Lanjut Temuan Audit

Pendekatan ini mengukur dampak sebuah risiko berdasarkan tindak lanjut dari temuan audit. Ada dua faktor yang mempengaruhi yaitu persentase tindak lanjut dan waktu penyelesaian tindak lanjut. Berdasarkan Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko, kriteria dampak risiko dengan pendekatan tindak lanjut atas temuan audit:

f. Follow Up on Audit Findings

This approach measures the impact of a risk based on the follow-up from the audit findings. Two factors influence the percentage of follow-up and time of completion of the follow-up. Based on Circular Letter on Risk Management Implementation Guidelines, the criteria for risk impact with a follow-up approach to the audit findings:

Dampak Impact	Keterangan Information
Catastrophic	Tidak dilakukan tindak lanjut atas temuan audit No follow-up was conducted on audit findings
Major	Tindak lanjut temuan audit ≤ 40% dan/atau melebihi batas waktu yang disepakati Follow up on audit findings <40% and/or exceed the agreed time limit
Moderate	Tindak lanjut temuan audit > 40%-90% dan melebihi batas waktu yang disepakati Follow-up on audit findings> 40% -90% and exceeding the agreed time limit
Minor	Tindak lanjut temuan audit > 40%-90% dan sesuai batas waktu yang disepakati Follow-up on audit findings> 40% -90% and according to the agreed time limit
Insignificant	Tindak lanjut temuan audit > 90% dan sesuai batas waktu yang disepakati Follow-up on audit findings> 90% and according to the agreed time limit

Pada tahun 2019 terdapat temuan audit sebanyak 1647 temuan dengan batas waktu penyelesaian tindak lanjut maksimal sampai dengan 31 Desember 2019, dari total tersebut 1417 temuan telah ditindak lanjuti sehingga presentase penyelesaian tindak lanjut sebesar 86,04% masuk dalam kategori dampak risiko ***Minor.*** *(Sumber: Satuan Pengawasan Intern)*

Berikut adalah persentase atas hasil data temuan audit.

In 2019 there were 1,647 audit findings with a maximum deadline for completion of follow-up to December 31, 2019, of the total 1,417 findings were followed up so that the percentage of completion of the follow-up of 86.04% was included in the Minor risk impact category. *(Source: Internal Control Unit)*

The following was a percentage of the audit findings data.

No.	Tindak Lanjut	Follow-up	Jumlah Temuan Number of Findings	Persentase Percentage
1	Sudah dilakukan	Have been done	1,417	86,04%
2	Belum dilakukan	Have not been done	230	13,96%
	Total		**1,647**	

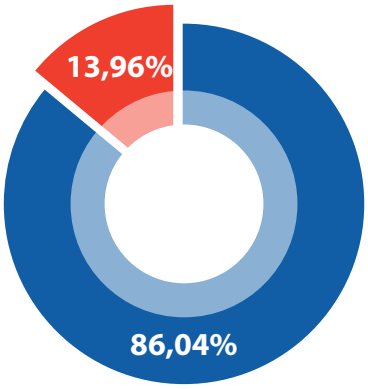

PERSENTASE TINDAK LANJUT DENGAN BATAS PENYELESAIAN 31 DESEMBER 2019

PERCENTAGE OF FOLLOW-UP WITH COMPLETION DEADLINE DECEMBER 31, 2019

Sudah ditindaklanjuti
Have been followed up

Belum ditindaklanjut
Have not yet followed up

Disarankan agar Satuan Pengawas Intern secara aktif melakukan monitoring terhadap progress tindak lanjut temuan dari masing-masing unit kerja untuk meminimalisir terjadinya temuan berulang pada saat audit berikutnya juga untuk lebih meningkatkan *awareness risk owner* dalam mengelola risiko yang terjadi pada unit kerjanya.

It was recommended that the Internal Audit Unit actively monitor the progress of the follow-up findings from each work unit to minimize the occurrence of repeated findings during the next audit and further increase the risk owner's awareness in managing risks that occurred in the work unit.

g. Terjadinya Kecelakaan Kerja

Pendekatan ini mengukur dampak terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi di Perusahaan. Pada tahun 2019 tidak terdapat kecelakaan kerja di lingkungan Perusahaan, sehingga dapat dikatakan dampak risikonya ***insignificant*** (*Sumber : Divisi Umum*)**.**

g. Occupational Accidents

This approach measures the impact of occupational accidents that occur in the Company. In 2019 there were no occupational accidents in the Company's environment, so it could be said that the impact of the risk was insignificant (*Source: General Affairs Division*).

Dampak Impact	Keterangan Information
Catastrophic	Kematian Dead
Major	Cedera fisik/mental yang menyebabkan cacat tetap Physical / mental injury that causes permanent disability
Moderate	Cedera fisik/mental yang mengharuskan rawat inap Physical / mental injury that requires hospitalization
Minor	Cedera fisik/mental yang perlu penanganan rawat jalan rumah sakit Physical / mental injuries that need hospital outpatient treatment
Insignificant	Luka ringan yang dapat diatasi dengan P3K Minor injuries that can be treated with First Aid in Accidents (First Aid)

Risiko kecelakaan kerja dilingkungan perusahaan dapat dicegah/diminimalisir salah satunya adalah melalui kegiatan sosialisasi dan pemakaian dari seluruh SDM Perusahaan mengenai pentingnya penerapan K3 Perusahaan.

The risk of occupational accidents in the Company environment can be prevented/minimized, one of which is through the socialization and use of all the Company's human resources regarding the importance of the Occupational Health and Safety (K3) application of the Company.

B. PROFIL RISIKO

Adapun top risiko Perum Jamkrindo pada Triwulan IV Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

B. RISK PROFILE

The top risks of Perum Jamkrindo in Quarter IV of 2019, were as follows:

No	Risiko Risk	Zona Residual 2 Residual Zone 2	Mitigasi Mitigation
1	Penyelesaian klaim tidak sesuai SLA Claim settlement was not in accordance with SLA	Extreme	- Dilakukan Perbaikan Sistem Integrasi dan Rekonsiliasi antara Kantor Pusat dengan Cabang Unit Kerja Improvements to the Integration and Reconciliation System between the Head Office and Branch Work Units - Usulan penyempurnaan sistem klaim online Proposed improvement of the online claim system
2	Bisnis penjaminan terhambat The guarantee business was hampered	Extreme	- Proses percepatan PKS Cooperation Agreement acceleration process - Memberikan service excellent kepada mitra Providing excellent service to partners
3	Data portofolio/ profitabilitas produk penjaminan tidak valid Invalid data of portfolio/profitability of guarantee products	Extreme	Desk Subrogasi dan Divisi IT memastikan bahwa seluruh data angsuran subrogasi terinput dengan baik di ICPR The Subrogation Desk and IT Division ensured that all subrogation installment data were inputted accurately at ICPR.
4	Ketidaksesuaian Data Pada Sistem ICPR Data Mismatch in ICPR System	Extreme	Melakukan rekonsiliasi data terkait penjaminan, klaim dan penagihan subrogasi kepada Penerima Jaminan Reconciled data related to guarantees, claims and subrogation billing to Guarantee Recipients
5	Target bisnis kantor cabang tidak tercapai The branch office business target was not achieved	Extreme	Penyusunan strategi bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar Preparation of business strategies tailored to market conditions
6	Subrogasi tidak tertagih Subrogation was not collectible	Extreme	Melakukan koordinasi bersama Penerima Jaminan dalam penagihan subrogasi Coordinated with Guarantee Recipients in billing subrogation

No	Risiko Risk	Zona Residual 2 Residual Zone 2	Mitigasi Mitigation
7	Laporan keuangan tidak valid Invalid financial report	**High**	Rekonsiliasi antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang Reconciliation between Head Office and Branch Offices
8	Penjaminan atas Debitur yang tidak layak jamin Guarantees for Debtors that were not worth guaranteeing	**High**	- Meningkatkan kompetensi karyawan Improved employee competence - Membuat sistem blokir otomatis untuk Terjamin yang telah klaim dan sedang proses klaim. Creating an automatic blocking system for the Guaranteed that has claimed and were being in the claim process.
9	Tingginya *outstanding* klaim dalam proses High outstanding claims in the process	**High**	Atas klaim dalam proses segera dilakukan identifikasi apakah klaim tersebut layak bayar atau tidak. Apabila klaim dalam proses tidak layak bayar, maka segera diberitahukan ke Penerima Jaminan. Apabila dalam pengajuan klaim terdapat kekurangan berkas, maka segera dimintakan kelengkapan berkas ke Penerima Jaminan. Claims in the process were immediately identified whether the claim was worth paying or not. If a claim in the process was not worth paying, it was immediately notified to the Guarantee Recipient. If in filing a claim there was a shortage of files, the files were immediately requested to the Guarantee Recipient.
10	Tidak terpenuhi tidak lanjut hasil Pemeriksaan Not fulfilled, the follow up of the audit results	**High**	Berkoordinasi dengan SPI untuk mendapatkan Penyelesaian atas Tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan secara rutin Coordinated with SPI to obtain Settlement of Follow-up from the results of the routine audit

MONITORING DAN *REVIEW* ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Implementasi manajemen risiko di Perum Jamkrindo mengacu pada Peraturan Direksi no. 20/Per-Dir/5/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Perum Jamkrindo yaitu di*monitor* dan di*review* secara berkala untuk mengikuti dinamika dan perkembangan yang mendukung suatu risiko serta relevansi dan status risiko sehingga risiko yang ditangani tetap mutakhir dan sesuai dengan kondisi terkini.

Hasil *monitoring* dan *review* yang dilaksanakan dipergunakan untuk penyesuaian proses Manajemen Risiko, baik berupa Kebijakan maupun prosesnya sesuai dengan kondisi Perusahaan.

Hasil *monitoring* dan *review* juga dapat dituangkan dalam laporan hasil evaluasi Manajemen Risiko yang disusun oleh seluruh Unit Kerja melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko dan dikompilasi oleh Divisi yang membidangi Manajemen Risiko dan dilaporkan kepada Direksi secara triwulanan.

Laporan hasil evaluasi Manajemen Risiko dilakukan secara triwulan dengan mengacu pada Surat Edaran Direksi nomor 40/SE/5/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko Perum Jamkrindo dan Surat Edaran Direksi nomor 11/SE/5/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Risiko Perum Jamkrindo.

MONITORING AND REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The implementation of risk management at Perum Jamkrindo refers to the Board of Directors Regulation no. 20 / Per-Dir / 5 / XII / 2018 dated December 20, 2018, concerning Perum Jamkrindo's Risk Management Policy, which is monitored and reviewed periodically to follow the dynamics and developments that support a risk and the relevance and risks status so that the risks handled remain update and according to current conditions.

The results of monitoring and review carried out are used to adjust the Risk Management process, both in the form of policies and processes, according to the conditions of the Company.

The results of monitoring and review can also be stated in the Risk Management evaluation report prepared by all Work Units through the Risk Management Information System Application and compiled by the Division in charge of Risk Management and reported to the Board of Directors quarterly.

The report on the results of the Risk Management evaluation is conducted quarterly by referring to the Circular Letter of Board of Directors number 40 / SE / 5 / XII / 2018 dated December 21, 2018, concerning Guidelines for the Implementation of Perum Jamkrindo Risk Management and Circular Letter of Board of Directors number 11 / SE / 5 / IV / 2019 date April 18, 2019, concerning Perum Jamkrindo Risk Management Information System.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Corporate Social Responsibility

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi sebuah wadah bagi Perum Jamkrindo dalam menjalin hubungan dengan Pemangku Kepentingan, baik dari internal seperti karyawan maupun dari eksternal seperti konsumen. Terkait pelaksanaan CSR, Perum Jamkrindo membaginya ke dalam 4 (empat) aspek.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Corporate Social Responsibility (CSR) becomes a forum for Perum Jamkrindo in establishing relationships with Stakeholders, both internally, such as employees, and externally, such as consumers. Regarding the implementation of CSR, Perum Jamkrindo divides it into 4 (four) aspects.



Selengkapnya tentang pelaksanaan CSR oleh Perum Jamkrindo dapat dilihat pada bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

More information about CSR's implementation by Perum Jamkrindo can be seen in the chapter of Corporate Social Responsibility in this Annual Report.

PERKARA PENTING
Significant Cases

PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Pengawas dan Direksi di sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut,

LEGAL PROBLEMS

The legal problems and/or cases faced by the Company, subsidiaries, and members of the Board of Supervisor Council and Board of Directors throughout 2019 were as follows,

Permasalahan Hukum Legal Cases	2019		2018	
	Perdata Civil	Pidana Criminal	Perdata Civil	Pidana Criminal
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Settled and has received final judgment	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian In a settlement process	-	-	-	-
Jumlah / Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Pihak yang Berperkara Disputing Parties	Pokok Perkara Case Principal	Status Perkara Case Status	Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Pengaruhnya Terhadap Perusahaan Risk faced by the Company and Its Impact on the Company	Tindak Lanjut Follow-ups
-	-	-	-	-

Disepanjang tahun 2019, tidak ada satupun permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perusahaan maupun entitas anak perusahaan.

Throughout 2019, there were no legal problems and/or cases faced by the Company or subsidiaries.

SANKSI ADMINISTRASI

Di sepanjang tahun 2019 tidak terdapat sanksi administrasi yang dikenakan oleh otoritas terkait baik kepada Perusahaan maupun kepada anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

In 2019, there were no administrative sanctions imposed by the relevant authorities either to the Company or to the members of the Board of Supervisor Council and Board of Directors.

PERKARA PENTING DI LUAR ASPEK HUKUM

Perusahaan tidak menemukan adanya perkara penting di luar aspek hukum yang melibatkan Perusahaan maupun kepada anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

IMPORTANT CASES OUTSIDE OF LEGAL ASPECTS

The Company did not find any important cases outside the legal aspects involving the Company or members of the Board of Supervisor Council and Board of Directors.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
Access To Company Information and Data

Dalam menyampaikan dan penyebaran informasi serta berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan Perum Jamkrindo menggunakan berbagai media yang ada, yaitu media internet, cetak dan kegiatan atau event.

In delivering and disseminating information and communicating it with interested parties, Perum Jamkrindo uses a variety of available media, namely the internet, print media, and activities or events.

Dalam prosesnya, akses terhadap informasi Perusahaan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

In the process, access to Company information can be divided into 2 (two), they are:

No	Akses Informasi Access to Company Information	Jenis Types
1	Komunikasi Internal Internal Communication	**Surat Edaran** Perum Jamkrindo Menggunakan Surat Edaran Untuk Mengkomunikasikan Kebijakan Dan Peraturan Terbaru Di Dalam Internal Perusahaan. Informasi Yang Disebarkan Umumnya Berisi Tentang Sosialisasi Kebijakan Direksi **Circular letter** Perum Jamkrindo Uses Circular Letter to Communicate the Latest Policies and Regulations internally. Generally, the disseminated Information Contains the socialization of Board of Directors' Policy. ICPR (*Integrated Corporate Performance Reporting*) Perum Jamkrindo Juga Menggunakan Sarana Teknologi Informasi Yang Berbasis Web Yaitu ICPR Yang Telah Diterapkan di Lingkungan Perum Jamkrindo **ICPR (Integrated Corporate Performance Reporting)** Perum Jamkrindo also uses web-based Information Technology facility, namely ICPR that has been implemented in the environment of Perum Jamkrindo. ***E-mail*** Perum Jamkrindo juga telah memiliki *e-mail system* sendiri untuk mengelola komunikasi internal perusahaan antar unit kerja **E-mail** Perum Jamkrindo also has its own e-mail system to manage the Company's internal communication between work units. **Evaluasi dan *Action Plan* Triwulan** Untuk sarana komunikasi antara Direksi dengan Kepala Divisi dan Pimpinan Kantor Cabang atau Kantor Anak Cabang dalam menyampaikan target dan rencana bisnis Perusahaan, Perum Jamkrindo secara rutin tiga bulan atau triwulanan menyelenggarakan rapat evaluasi dan *action plan*. Dalam rapat evaluasi dan *action plan* ini, Direksi Perum Jamkrindo melakukan evaluasi terhadap kinerja triwulanan berjalan dan membahas serta mengkomunikasikan rencana bisnis Perum Jamkrindo untuk triwulan-an kedepan kepada para Kepala Divisi, Kepala Kantor Cabang dan Kepala Kantor Anak Cabang untuk meneruskan target dan rencana bisnis tahunan yang telah ditetapkan dalam RKAP tahun berjalan **Quarterly Evaluation and Action Plan** Perum Jamkrindo routinely holds quarterly meetings for evaluation and action plan to facilitate communication between the Board of Directors and Division Heads and Head of Branch Offices or Heads of Sub-Branch Offices in delivering the Company's targets and business plans In this quarterly evaluation and action plan meeting, the Board of Directors of Perum Jamkrindo evaluates quarterly performance, discuss and communicate Perum Jamkrindo's business plan for the next quarter to the Division Heads, Heads of Branch Offices, and Heads of Sub-Branch Offices to continue the annual targets and business plans which have been stipulated in the current year's RKAP.

No	Akses Informasi Access to Company Information	Jenis Types
2	Komunikasi Eksternal External Communication	**Alamat Perusahaan / Company Address** Gedung Jamkrindo / Jamkrindo Building Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat Telepon/Phone:+62216540335 Faksimili/Facsimile : +62 21 6540344/48 **Situs Web** Untuk memudahkan mitra kerja, masyarakat yang berkepentingan lainnya atau *stakeholders* dalam mendapatkan informasi Perum Jamkrindo menyediakan akses dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi yang andal melalui website www. jamkrindo.co.id **Website** To facilitate work partners, other interested communities, or stakeholders in getting information, Perum Jamkrindo provides access by utilizing reliable information technology support through the website www. jamkrindo.co.id. ***Press Release*** Perum Jamkrindo juga pada saat diperlukan melakukan publikasi dari setiap kegiatan perusahaan yang dilakukan melalui *press release* When needed, Perum Jamkrindo also publishes every Company activity through a press release ***Public Expose*** Sekali dalam setahun perusahaan wajib menyelenggarakan *public expose* atau paparan publik mengenai kinerja perusahaan Once a year, the Company is required to hold a public expose regarding the Company's performance **Iklan** Iklan digunakan sebagai alat untuk mengelola citra dan meningkatkan *awareness* terhadap Perum Jamkrindo beserta produk-produknya, dengan menggunakan media untuk menyebarluaskan iklan di masyarakat, antara lain adalah surat kabar, majalah, dan media lainnya, dengan terlebih dahulu menganalisis media dan target *audiences* agar iklan dapat berfungsi dengan efektif **Advertisement** Advertisement is used as a tool to manage images and increase awareness of Perum Jamkrindo and its products. Perum Jamkrindo uses media to disseminate advertisements in the community, including in newspapers, magazines, and other media, by first analyzing the media and target audiences so that advertisements can function effectively. **Pameran** Perum Jamkrindo juga selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pameran untuk mengelola citra dan meningkatkan *awareness* terhadap Perum Jamkrindo beserta produk-produknya, dengan terlebih dahulu menganalisis media dan target *audiences* agar iklan dapat berfungsi dengan efektif **Exhibition** Perum Jamkrindo also always participates in every exhibition activity to manage the image and increase awareness of Perum Jamkrindo and its products, by first analyzing the media and target audiences so that their participation can function effectively.

KORESPONDENSI DAN LAPORAN BERKALA

Informasi keuangan dan non keuangan dari Perusahaan telah disusun dan dilaporkan secara transparan kepada pemilik modal, pemangku kepentingan dan lembaga lain yang dipersyaratkan. Informasi dilaporkan sesuai target waktu, tersajikan dengan lengkap dan akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Perusahaan. Informasi dipaparkan melalui laporan berupa:

- Laporan Triwulan.
- Laporan Tahunan.
- Keterbukaan informasi melalui *public expose*.
- Laporan administrasi kepada Pemilik Modal.

Korespondensi yang dilakukan Perusahaan di sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

CORRESPONDENCE AND PERIODIC REPORTS

Financial and non-financial information of the Company has been prepared and reported transparently to the required capital owners, stakeholders, and other institutions. Information is reported promptly, presented completely and accurately, updated, intact, and appropriate according to the procedures, types, and scope as stipulated in the provisions concerning the Transparency of the Company's Financial Conditions. Information is presented through reports in the form of:

- Quarterly Reports.
- Annual Reports.
- Information disclosure through public expose.
- Administrative report to the Capital Owner.

The types of Correspondence conducted by the Company throughout 2019 were as follows:

KORESPONDENSI KEPADA MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA RI

CORRESPONDENCE WITH THE MINISTER OF STATE-OWNED ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

No.	Bentuk Korespondensi Forms of Correspondence	Tanggal Date	Perihal Subject
1	Surat Penyampaian Submission Letter	30 Januari 2019 January 30, 2019	Laporan Kegiatan dan Keuangan Tahun Buku 2018 Activity Report and Financial Statement for Financial Year 2018
2	Surat Penyampaian Submission Letter	08 Februari 2019 February 8, 2019	Permohonan Ijin Dinas Dalam Rangka Undangan "Seminar Market Outlook 2019" Application for Official Travel Permit for the invitation "2019 Market Outlook Seminar"
3	Surat Penyampaian Submission Letter	20 Februari 2019 February 20, 2019	Penyampaian Dokumen RJPP Perum Jamkrindo Tahun Buku 2019-2023 Submission of Perum Jamkrindo's RJPP Documents for Fiscal Year 2019-2023
4	Surat Penyampaian Submission Letter	25 Februari 2019 February 25, 2019	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian Audited Tahun Buku 2018 Perum Jamkrindo Submission of Perum Jamkrindo's Audited Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2018
5	Surat Penyampaian Submission Letter	05 Maret 2019 March 5, 2019	penyampaian hasil review permen BUMN nomor per/05/MBU/2008 tentang pedoman Umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN sebagaimana telah diubah dengan permen BUMN nomor per-15/MBU/2012 tentang perubahan tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN Submission of the Review Result of the Minister of SOEs Regulation Number per / 05 / MBU / 2008 concerning General Guidelines on the Implementation of SOEs' Goods and Services Procurement as Amended by the Minister of SOEs Regulation Number per-15 / MBU / 2012 concerning Amendment to General Guidelines on the Implementation of SOEs' Goods and Services Procurement

No.	Bentuk Korespondensi Forms of Correspondence	Tanggal Date	Perihal Subject
6	Surat Pemberitahuan Letter of Notification	08 Maret 2019 March 8, 2019	Laporan bulanan unit usaha syariah Perum Jamkrindo bulan februari 2019 Monthly Report of Perum Jamkrindo's Sharia Business Unit for February 2019 • Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian Perum Jamkrindo Tahun 2018 Submission of Perum Jamkrindo's Consolidated Financial Statement for Fiscal Year 2018 • Penyampaian Program Bersih Kampoeng Sehat (Bpk. Hambra/Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis) Submission of Bersih Kampung Sehat Program/Clean Village to be Healthy Program (Mr. Hambra / Deputy Section for Business Infrastructure) • Penyampaian Program Bersih Kampoeng Sehat (Bpk. Imam Apriyanto Putro Sekretaris) Submission of Bersih Kampung Sehat Program/Clean Village to be Healthy Program (Mr. Imam Apriyanto Putro/ Secretary)
7	Surat Penyampaian Submission Letter	18 Maret 2019 March 18, 2019	Laporan Kegiatan dan Keuangan (Audited) Tahun Buku 2018 Activity Report and Financial Statement (Audited) for Financial Year 2018
8	Surat Pemberitahuan Letter of Notification	26 Maret 2019 March 26, 2019	Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perum Jamkrindo Tahun 2019-2023 Draft of Company Long-Term Plan (RJPP) of Perum Jamkrindo 2019-2023
9	Surat Penyampaian Submission Letter	29 Maret 2019 March 29, 2019	Usulan Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 Proposed Approval and Ratification of Annual Report for Fiscal Year 2018
10	Surat Pemberitahuan Letter of Notification	08 April 2019 April 8, 2019	Undangan Rapat Teknis RPB Invitation to the Technical Meeting of Joint Discussion Meeting (RPB)
11	Surat Pemberitahuan Letter of Notification	12 April 2019 April 12, 2019	Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Jamkrindo Change of the Legal Entity of Perum Jamkrindo
12	Surat Pemberitahuan Letter of Notification	16 April 2019 April 16, 2019	Laporan Kegiatan dan Keuangan Triwulan I Tahun 2019 Activity Report and Financial Statement for 1st Quarter of 2019
13	Surat Penyampaian Submission Letter	18 April 2019 April 18, 2019	Dukungan Partisipasi BUMN dan Millenials BUMN untuk Kegiatan Bersih Kampoeng Sehat di Ciamis SOEs Participation Support and BUMN Millennials for Bersih Kampung Sehat/Clean Village to be Healthy Activity in Ciamis
14	Surat Penyampaian Submission Letter	29 April 2019 April 29, 2019	Audit Posisi Keuangan Penutup dan Pembuka Perum Jamkrindo Audit of the Closing and Beginning of Financial Position of Perum Jamkrindo
15	Surat Penyampaian Submission Letter	15 Mei 2019 May 15, 2019	Undangan RPB Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 (Audited) Perum Jamkrindo Invitation to RPB Ratification of Financial Statements (Audited) for Fiscal Year 2018 of Perum Jamkrindo
16	Surat Pemberitahuan Letter of Notification	20 Mei 2019 May 20, 2019	Undangan Seremonial Mudik Bareng BUMN Tahun 2019 Perum Jamkrindo (Bpk. Hambra/Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis) Invitation to the Ceremonial of Homecoming with SOEs 2019 (Mr. Hambra / Deputy Section for Business Infrastructure)

No.	Bentuk Korespondensi Forms of Correspondence	Tanggal Date	Perihal Subject
17	Surat Pemberitahuan Letter of Notification	24 Mei 2019 May 24, 2019	Undangan Seremonial Mudik Bareng BUMN Tahun 2019 Perum Jamkrindo (Ibu Chairiah Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa Kesuangan, Jasa Survei dan Konsultan I) Invitation to the Ceremonial of Homecoming with SOEs 2019 of Perum Jamkrindo (Mrs. Chairiah Assistant to Deputy Section for Financial Services Business, Survey Services and Consultant I)
18	Surat Penyampaian Submission Letter	18 Juni 2019 June 18, 2019	Permohonan Testimoni HUT Perum Jamkrindo Petition for Testimony on Perum Jamkrindo's Anniversary
19	Surat Penyampaian Submission Letter	01 Juli 2019 July 1, 2019	Penyampaian Laporan Assessment atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Perum Jamkrindo Tahun 2018 Submission of an Assessment Report of Perum Jamkrindo's Good Corporate Governance Implementation 2018
20	Surat Pemberitahuan Letter of Notification	22 Juli 2019 July 22, 2019	Arahan Terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Directives Regarding Follow-Up to BPK RI Audit Results
21	Surat Penyampaian Submission Letter	29 Juli 2019 July 29, 2019	Laporan Kegiatan dan Keuangan Triwulan II Tahun 2019 Activity Report and Financial Statement for 2nd Quarter of 2019
22	Surat Penyampaian Submission Letter	08 Agustus 2019 August 8, 2019	Permohonan Ijin Dinas dalam Rangka Undangan "The 5th International Certified Wealth Manager (CWM) Executive Program & Continuing Professional Development (CPD) Program 2019" Application for Official Travel Permit for the invitation "The 5th International Certified Wealth Manager (CWM) Executive Program & Continuing Professional Development (CPD) Program 2019"
23	Surat Pemberitahuan Letter of Notification	20 Agustus 2019 August 20, 2019	Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Semester 1 Tahun 2019 Perum Jamkrindo Invitation to Monitoring and Evaluation Meeting for Semester 1 of 2019 of Perum Jamkrindo
24	Surat Pemberitahuan Letter of Notification	22 Agustus 2019 August 22, 2019	Permohonan Ijin Dinas ke Brazil dalam Rangka Undangan Forum ke-XXIV Ibero-American Forum on Guarantee and Financing System For SME Application for Official Travel Permit to Brazil for the invitation of the XXIV Ibero-American Forum on Guarantee and Financing System For SME
25	Surat Penyampaian Submission Letter	12 September 2019 September 12, 2019	Undangan Forum ke-XXIV Ibero-American Forum on Guarantee and Financing System For SME Invitation of the XXIV Ibero-American Forum on Guarantee and Financing System For SME
26	Surat Pemberitahuan Letter of Notification	16 September 2019 September 16, 2019	Penyampaian Kajian Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Submission of the Study on Changes of Corporate Legal Entity
27	Surat Penyampaian Submission Letter	07 Oktober 2019 October 7, 2019	Progress Tindak Lanjut atas LHPF Perum Jamkrindo Tahun 2018 Follow Up Progress on Perum Jamkrindo's LHPF 2018
28	Surat Penyampaian Submission Letter	14 Oktober 2019 October 14, 2019	Permohonan Ijin Dinas ke Colorado Dalam Rangka Menghadiri SRI Conference Application for Official Travel Permit to Colorado for Attending SRI Conference

No.	Bentuk Korespondensi Forms of Correspondence	Tanggal Date	Perihal Subject
29	Surat Penyampaian Submission Letter	21 Oktober 2019 October 21, 2019	Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Perum Jamkrindo Report on the Implementation of Perum Jamkrindo's Overseas Official Travel
30	Surat Penyampaian Submission Letter	23 Oktober 2019 October 23, 2019	Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Perum Jamkrindo Report on the Implementation of Perum Jamkrindo's Overseas Official Travel • penyampaian ARA 2018 Submission of ARA 2018
31	Surat Penyampaian Submission Letter	28 Oktober 2019 October 28, 2019	Permohonan Ijin Dinas Dalam Rangka 11th Global Peter Drucker Forum 2019 "The Power of Ecossystem Managing in A Network World" Application for Official Travel Permit to the 11th Global Peter Drucker Forum 2019 "The Power of Ecosystem Managing in A Network World"
32	Surat Penyampaian Submission Letter	29 Oktober 2019 October 29, 2019	Laporan Kegiatan dan Keuangan Triwulan III Tahun 2019 Activity Report and Financial Statement for 3rd Quarter of 2019 • RKAP Tahun Buku 2020 RKAP for Fiscal Year 2020 • Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN Perum Jamkrindo Tahun 2016 pada Triwulan III Tahun 2019 Report on the Realization of the Use of Additional Government Paid-in Capital of Perum Jamknrindo in 2016 at the 3rd Quarter of 2019
33	Surat Pemberitahuan Letter of Notification	07 November 2019 November 7, 2019	Undangan Pembahasan Rencana Kerja Anggaran PKBL Tahun Buku 2020 Invitation to the Discussion of the PKBL Work Plan and Budget for Fiscal Year 2020
34	Surat Pemberitahuan Letter of Notification	11 November 2019 November 11, 2019	Rapat Pembahasan RKAP Tahun 2020 Perum Jamkrindo Discussion Meeting of Perum Jamkrindo's RKAP 2020
35	Surat Penyampaian Submission Letter	26 November 2019 November 26, 2019	Penyampaian Rencana Bisnis Perum Jamkrindo Submission of Perum Jamkrindo's Business Plan
36	Surat Penyampaian Submission Letter	27 November 2019 November 27, 2019	Tanggapan Permintaan Data Ekspor dan Impor dengan Negara-Negara Uni Eropa Response to Export and Import Data Requests with European Union Countries
37	Surat Penyampaian Submission Letter	06 Desember 2019 December 6, 2019	Laporan Pelaksanaan Dinas Luar Negri Perum Jamkrindo Report on the Implementation of Official Travel Abroad of Perum Jamkrindo
38	Surat Penyampaian Submission Letter	23 Desember 2019 December 23, 2019	Penyampaian Tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Submission of Responses to the Audit Findings Concept of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI)

KORESPONDENSI KEPADA OJK

No.	Bentuk Korespondensi Forms of Correspondence	Tanggal Date	Perihal Subject
1	Surat Penyampaian Submission Letter	08 Januari 2019 January 8, 2019	Laporan Bulanan Unit Usaha Syariah Perum Jamkrindo bulan Desember 2018 Monthly Report of Sharia Business Unit of Jamkrindo Perum in December 2018
2	Surat Penyampaian Submission Letter	30 Januari 2019 January 30, 2019	Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2019 The Corporate Work Plan and Budget Book for Fiscal Year 2019
3	Surat Pemberitahuan Letter of Notification	07 Februari 2019 February 7, 2019	Rekam Jejak Sdr. Untung Heri Sukariyanto Track Record of Mr. Untung Heri Sukariyanto
4	Surat Penyampaian Submission Letter	08 Februari 2019 February 8, 2019	Laporan Kegiatan Penjaminan Bersama (*Co Guarantee*) Co-Guarantee Activities Report
5	Surat Penyampaian Submission Letter	25 Februari 2019 February 28, 2019	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian *Audited* Tahun Buku 2018 Perum Jamkrindo Submission of Perum Jamkrindo's Audited Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2018
6	Surat Pemberitahuan Letter of Notification	11 Maret 2019 March 11, 2019	Permohonan audiensi Hearing Request
7	Surat Penyampaian Submission Letter	18 Maret 2019 March 18, 2019	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian Perum Jamkrindo Tahun 2018 Submission of Perum Jamkrindo's Consolidated Financial Statements 2018
8	Surat Penyampaian Submission Letter	26 Maret 2019 March 26, 2019	Laporan Kegiatan Penjaminan Bersama (*Co-Guarantee*) Co-Guarantee Activity Report
9	Surat Penyampaian Submission Letter	8 April 2019 April 8, 2019	Laporan Bulanan Unit Usaha Syariah Perum Jamkrindo bulan Maret 2019 Monthly Report of Perum Jamkrindo's Sharia Business Unit in March 2019
10	Surat Penyampaian Submission Letter	26 April 2019 April 26, 2019	Penyampaian Laporan *Self Assessment* atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Goverment*) Perum Jamkrindo Tahun 2018 Submission of Self Assessment Report on the Good Corporate Governance Implementation of Perum Jamkrindo 2018
11	Surat Penyampaian Submission Letter	13 Mei 2019 May 13, 2019	• Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Informasi Keuangan Historis Tahunan Report on the Evaluation Results of Perum Jamkrindo's Audit Committee for the Implementation of the Conferment of the Annual Historical Financial Information Audit Services • Penyampaian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perum Jamkrindo Re-Submission of the Consolidated Financial Statement of Perum Jamkrindo

No.	Bentuk Korespondensi Forms of Correspondence	Tanggal Date	Perihal Subject
12	Surat Penyampaian Submission Letter	21 Mei 2019 May 21, 2019	Penyampaian Revisi atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perum Jamkrindo Tahun 2018 Submission of the Revisions of Perum Jamkrindo's Consolidated Financial Statements 2018
13	Surat Pemberitahuan Letter of Notification	27 Mei 2019 May 27, 2019	Progress Tindak Lanjut atas LHPLF Perum Jamkrindo Tahun 2018 Follow Up Progress of Perum Jamkrindo's LHPLF 2018
14	Surat Penyampaian Submission Letter	11 Juni 2019 June 11, 2019	Permohonan Pembatalan Data Fit and Proper pada Aplikasi SIJINGGA Application for Cancellation of the Fit and Proper Test Data on SIJINGGA Application
15	Surat Penyampaian Submission Letter	26 Juni 2019 June 26, 2019	Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada Tahun Buku 2019 Report on the Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to Audit of Annual Historical Financial Information for Fiscal Year 2019
16	Surat Penyampaian Submission Letter	01 Juli 2019 July 1, 2019	Penjelasan Kasus Klaim di Perum Jamkrindo Kantor Cabang Bengkulu Explanation of Claim Cases at Perum Jamkrindo Bengkulu Branch Office
17	Surat Penyampaian Submission Letter	07 Juli 2019 July 7, 2019	Audiensi Rencana Phase Out Unit Usaha Syariah Perum Jamkrindo Hearings of Phase-Out Plan of Sharia Business Unit of Perum Jamkrindo
18	Surat Penyampaian Submission Letter	12 Juli 2019 July 12, 2019	Penyampaian Penjelasan Terkait Pengaduan Konsumen Jasa Keuangan Submission of Explanations Regarding Financial Services Consumer Complaints
19	Surat Pemberitahuan Letter of Notification	24 Juli 2019 July 24, 2019	Progress Tindak Lanjut atas LHPLF Perum Jamkrindo Tahun 2018 Follow Up Progress on Perum Jamkrindo's LHPLF 2018
20	Surat Penyampaian Submission Letter	20 Agustus 2019 August 20, 2019	Penyampaian Laporan Pengangkatan Anggota Dewas Perum Jamkrindo Submission of Report on Appointment of Members of Perum Jamkrindo's Board of Supervisor Council
21	Surat Pemberitahuan Letter of Notification	16 September 2019 September 16, 2019	Progress Tindak Lanjut atas LHPLF Perum Jamkrindo Tahun 2018 Follow Up Progress on Perum Jamkrindo's LHPLF 2018
22	Surat Penyampaian Submission Letter	17 Oktober 2019 October 17, 2019	Penyampaian Perjanjian Kerja Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada Perum Jamkrindo untuk Tahun Buku 2019 Submission of Work Agreement of Public Accountant and/or Public Accounting Firm for Auditing the Perum Jamkrindo's Annual Historical Financial Information for Fiscal Year 2019
23	Surat Penyampaian Submission Letter	23 Oktober 2019 October 23, 2019	penyampaian ARA 2018 Submission of ARA 2018
24	Surat Penyampaian Submission Letter	29 Oktober 2019 October 29, 2019	Penyampaian Tindak Lanjut atas LHPLF Perum Jamkrindo Tahun 2018 Submission of Follow Up on Perum Jamkrindo's LHPLF 2018

No.	Bentuk Korespondensi Forms of Correspondence	Tanggal Date	Perihal Subject
25	Surat Penyampaian Submission Letter	08 November 2019 November 8, 2019	Laporan Bulanan Unit Usaha Syariah Perum Jamkrindo Bulan Oktober 2019 Monthly Report of Perum Jamkrindo's Sharia Business Unit 2019
26	Surat Penyampaian Submission Letter	11 November 2019 November 11, 2019	Penyampaian Penyusunan *Quick Wins* Perum Jamkrindo Submission of Quick Wins Formulation of Perum Jamkrindo
27	Surat Penyampaian Submission Letter	04 Desember 2019 December 4, 2019	Penyampaian Laporan Rencana Bisnis Perum Jamkrindo dalam Hal Pemenuhan POJK 24 Submission of Perum Jamkrindo's Business Plan Report in the POJK 24 Fulfillment
28	Surat Penyampaian Submission Letter	11 Desember 2019 December 11, 2019	Permohonan Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) OJK Tahun 2019 Application for Discussion of FSA's Temporary Direct Audit Result Report (LHPLS) in 2019

SITUS WEB

Situs web memiliki peran yang signifikan dalam tata Kelola keterbukaan informasi. Pengungkapan dan ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan akan memberikan manfaat kepada publik dan pemangku kepentingan, di mana situs web memungkinkan penyampaian informasi yang tidak terbatas yang dapat dilakukan secara cepat, tepat, murah. Perusahaan telah memiliki situs web elektronik resmi dengan alamat www.jamkrindo.co.id. Situs web ini menyediakan konten seputar informasi Perusahaan yang komprehensif dan berguna bagi akses informasi kepada publik dan pemangku kepentingan.

WEBSITE

Websites have a significant role in the governance of information disclosure. Disclosure and availability of information on the Company's website will provide benefits to the public and stakeholders, where the website allows unlimited information delivery that can be done quickly, precisely, and cheaply. The Company has an official website with the address www.jamkrindo.co.id. This website provides comprehensive and useful information about the Company for the public and stakeholders.

HUBUNGAN MEDIA

Untuk dapat menyampaikan informasi secara komprehensif, Perusahaan melakukan hubungan media melalui Rilis Media kepada sejumlah media baik nasional maupun lokal. Selama tahun 2019 terdapat 28 rilis yang diberikan kepada media baik nasional maupun lokal.

MEDIA RELATIONS

To convey information comprehensively, the Company engages in media relations through Media Release to several media, both national and local. In 2019 there were 28 releases given to both national and local media.

No.	Tanggal / Date	Tajuk	Tittle
1	31 Januari 2019 January 31, 2019	Perum Jamkrindo Bantu Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kupang	Perum Jamkrindo Assists Educational Facilities and Infrastructure in Kupang
2	25 Februari 2019 February 25, 2019	Jamkrindo Adakan Program Magang Bersertifikat	Jamkrindo Holds a Certified Internship Program
3	26 Februari 2019 February 26, 2019	Perum Jamkrindo jamin kredit Briguna dari Bank BRI	Perum Jamkrindo guarantees Briguna credit from Bank BRI
4	27 Februari 2019 February 27, 2019	Perum Jamkrindo dan PNM Bekali Pemasaran Digital UMKM Garut	Perum Jamkrindo and PNM Equip Digital Marketing for Micro, Small, Medium Enterprises (UMKM) in Garut
5	5 Maret 2019 March 5, 2019	Perum Jamkrindo Cetak Laba Rp508,3 Miliar	Perum Jamkrindo Gains Profit of Rp. 508.3 Billion

No.	Tanggal / Date	Tajuk	Tittle
6	15 Maret 2019 March 15, 2019	Jamkrindo Sosialisasikan Aplikasi UMKM Layak	Jamkrindo Socializes Eligible MSME Applications
7	24 Maret 2019 March 24, 2019	Perum Jamkrindo Berpartisipasi Saluran KUR Perikanan Rakyat	Perum Jamkrindo Participates in the People's Fishing KUR Channel
8	4 April 2019 April 4, 2019	Perum Jamkrindo Pimpin Kegiatan Padat Karya di Ciamis	Perum Jamkrindo Leads Labor-intensive Activities in Ciamis
9	25 April 2019 April 25, 2019	Jamkrindo Raih Penghargaan BUMN Marketeers Awards 2019	Jamkrindo Wins BUMN Marketeers Awards 2019
10	15 Mei 2019 May 15, 2019	Jamkrindo gelar safari Ramadan di 10 kota	Jamkrindo Holds Ramadan Safari in 10 cities
11	17 Mei 2019 May 17, 2019	Semarakan Mudik Gratis BUMN, Jamkrindo Akan Lepas 1.700 Pemudik	Liven up SOE's Free Homecoming, Jamkrindo Will Release 1,700 Homecoming Participants
12	23 Mei 2019 May 23, 2019	Perum Jamkrindo Bagikan Ribuan Paket Sembako untuk Masyarakat	Perum Jamkrindo Distributes Thousands of Food Packages to the Community
13	29 Mei 2019 May 29, 2019	Jamkrindo berangkatkan 1.700 peserta mudik gratis BUMN	Jamkrindo departs 1,700 SOE's free homecoming participants
14	20 Juni 2019 June 20, 2019	Bantu Sesama, Perum Jamkrindo Selenggarakan Donor Darah	Helping Others, Perum Jamkrindo Organizes Blood Donations
15	21 Juni 2019 June 21, 2019	Perum Jamkrindo Kembali Inisiasi Gerakan Jamkrindo Peduli Pendidikan	Perum Jamkrindo Re-Initiates, the Jamkrindo Movement, Cares for Education
16	1 Juli 2019 July 1, 2019	49 Tahun, Perum Jamkrindo Terus Memperkuat Lini Bisnis	49 Years, Perum Jamkrindo Continues to Strengthen Business Lines
17	31 Juli 2019 July 31, 2019	Lewat Kowajasa, Perum Jamkrindo Gandeng Pegadaian	Through Kowajasa, Perum Jamkrindo Cooperates with Pegadaian
18	12 Agustus 2019 August 12, 2019	Dukung Sektor Properti, Jamkrindo Beri Jaminan KPR untuk MBR	Supporting the Property Sector, Jamkrindo Gives Guarantees for Housing Loans (KPR) for Low-Income Communities (MBR)
19	17 Agustus 2019 August 17, 2019	Tiga BUMN Gelar Kegiatan BHUN di Kaltara	Three SOEs Hold BHUN Activities in North Kalimantan
20	1 Oktober 2019 October 1, 2019	Bantu Korban Gempa di Ambon, Jamkrindo Wujudkan Kepedulian BUMN	Helping Earthquake Victims in Ambon, Jamkrindo Realizes SOE Concern
21	17 Oktober 2010 October 17, 2019	Jamkrindo Raih Global Perfomance Excellence Award 2019	Jamkrindo Wins 2019 Global Performance Excellence Award
22	26 Oktober 2019 October 26, 2019	Perum Jamkrindo mendapatkan penghargaan bergengsi the Best Indonesia SOE dari Majalah *Infobank*.	*Perum Jamkrindo received the prestigious award for the Best Indonesia SOE from Infobank Magazine.*
23	6 November 2019 November 6, 2019	Jamkrindo Konsisten Jalankan PMMB Vokasi Berkualitas	Jamkrindo Consistently Run Quality Vocational Certified Student Internship Program (PMMB)
24	26 November 2019 November 26, 2019	Terus Berinovasi, Perum Jamkrindo Raih Penghargaan di TKPMN	Continue to Innovate, Perum Jamkrindo Wins Award at TKPMN
25	28 November 2019 November 28, 2019	Perum Jamkrindo & Pemkab Sukabumi Teken MoU Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kawasan Ciletuh	Perum Jamkrindo & Government of Sukabumi Regency Sign an MoU for the Improvement of Community Economy in the Ciletuh Region
26	29 November 2019 November 29, 2019	Perum Jamkrindo Buka Gelaran Festival UMKM 2019	Perum Jamkrindo Opens the 2019 UMKM Festival
27	15 Desember 2019 December 15, 2019	Jamkrindo Tanam Ratusan Pohon di Geopark Ciletuh	Jamkrindo Planted Hundreds of Trees in Ciletuh Geopark
28	20 Desember 2019 December 20, 2019	Jamkrindo Penjamin KUR Terbaik 2019	Jamkrindo Best KUR Guarantor 2019

Selain itu, Perusahaan juga melakukan hubungan media melalui *media gathering*, kunjungan media dan *editor lunch meeting*. Perusahaan menjadikan *media gathering* sebagai agenda rutin tahunan perusahaan. Pada tahun 2019 Perusahaan mengundang sebanyak 50 media nasional baik cetak, *online* maupun televisi untuk hadir dalam acara *media gathering* yang diadakan di Royal Tulip, Gunung Geulis, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 30 November - 1 Desember 2019.

Besides, the Company also conducts media relations through media gatherings, media visits, and editors' lunch meetings. The Company makes media gathering as a regular annual corporate agenda. In 2019 the Company invited as many as 50 national media: print, online, and television to attend the media gathering event held at Royal Tulip, Gunung Geulis, Bogor, West Java on November 30 - December 1, 2019.

RAGAM MEDIA KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN

Di bawah ini tabel yang menggambarkan ragam media komunikasi yang digunakan Perusahaan untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, proses usaha dan capaian-capaian kinerja yang telah diraih Perusahaan.

VARIETY OF MEDIA TO STAKEHOLDERS

Below is a table that illustrates the various communication media used by the Company to convey data and information related to operational activities, business processes, and performance achievements the Company has achieved.

Kepada / Target	Bentuk-bentuk Media / Types of Media
Regulator Regulators	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan Quarterly and Annual Report
Pemilik Modal Capital Owners	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan Quarterly and Annual Report
Lembaga Publik Public Institutions	*Press Release*
Konsumen Consumers	*Leaflet, Booklet,* Baliho, Banner, Spanduk, Media Sosial, Video PSA, Mobil Layanan Leaflets, Booklets, Billboards, Banners, Sign Posts, Social Media, PSA Videos, and Car Services
Karyawan/ Employees	Majalah Internal Internal Magazine
Perusahaan Sejenis Lainnya Other Similar Companies	*Leaflet, Booklet*, Baliho, Banner, Spanduk, Media Sosial, Video PSA Leaflets, Booklets, Billboards, Banners, Sign Posts, Social Media, PSA Videos
Mitra Kerja dan Rekanan Business Partners and Partners	Laporan Tahunan, *Leaflet, Booklet* *Annual Report, Leaflet, Booklet*
Organisasi Profesi Professional Organization	Laporan Tahunan, *Leaflet, Booklet* *Annual Report, Leaflet, Booklet*
Masyarakat Umum General Public	*Leaflet, Booklet*, Baliho, *Banner,* Spanduk, Media Sosial, Video PSA, Mobil Layanan Leaflets, Booklets, Billboards, Banners, Sign Posts, Social Media, PSA Videos, and Car Services

* Situs Web Perusahaan tidak termasuk dalam ragam media di atas, karena sifatnya yang terbuka, tidak terbatas dan dapat diakses oleh siapa saja.
The Company's website is not included in the various media above, because it is open, unlimited and can be accessed by anyone.

KODE ETIK
Code of Conduct

Kode Etik atau *Code of Conduct* adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari budaya Perusahaan serta Standar Etika Perusahaan yang membentuk dan mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan budaya dan nilai-nilai Perusahaan. *Code of Conduct* berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama Perusahaan dan entitas anak, serta menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan yang melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan.

Tujuan penerapan Kode Etik dilakukan untuk:

1. Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melaksanakan standar etika usaha dan panduan perilaku bagi seluruh Insan Perum Jamkrindo yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak.
2. Sebagai landasan etis dalam berfikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan Perum Jamkrindo.
3. Sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung lingkungan kerja yang sehat, positif dan menampilkan perilaku-perilaku etis dari seluruh Insan Perum Jamkrindo.
4. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perusahaan dan Insan Perum Jamkrindo terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.

The Code of Conduct is a set of commitments consisting of the Company's culture and the Company's Ethical Standards that shape and direct behavior according to the Company's culture and values. The Code of Conduct applies to all individuals acting on behalf of the Company and subsidiaries and being a reference for all stakeholders who conduct business transactions with the Company.

The purpose of implementing the Code of Conduct is:

1. As a guideline for implementing business ethics standards and behavioral guidelines for all Jamkrindo personnel that must be adhered to in daily interactions with all parties.
2. As an ethical foundation in thinking and making decisions related to Perum Jamkrindo.
3. As a means to create and support a healthy, positive work environment and display all Perum Jamkrindo personnel's ethical behaviors.
4. As a means to increase the sensitivity of the Company and Perum Jamkrindo personnel to the values of business ethics by developing discussions or developing a discourse on ethics.

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN SEBAGAI LANDASAN UTAMA

Penerapan kode etik yang dimiliki Perusahaan merupakan sebuah upaya untuk dapat mensinergikan seluruh organ Perusahaan untuk dapat bersama-sama mengemban visi, misi dan budaya Perusahaan. Sebagai tujuan akan perjalanan Perusahaan di masa yang akan datang, visi berperan penting dalam menempatkan seluruh Insan Perum Jamkrindo untuk dapat mewujudkan visi tersebut melalui misi yang telah ditetapkan, serta internalisasi budaya perusahaan hingga mampu membentuk prilaku setiap Insan Perum Jamkrindo.

VISI

Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian nasional.

MISI

Visi Perusahaan dijabarkan ke dalam misi-misi yang merupakan "Tridharma Jamkrindo" sebagai berikut:

1. Dharma Pertama

   Melakukan kegiatan penjaminan bagi pengembangan bisnis UMKM dan Koperasi.

VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE AS THE MAIN PLATFORM

The implementation of the Company's code of conduct is an effort to synergize all of the Company's organs to be able to jointly carry out the Company's vision, mission, and culture. As the future of Corporate goal, the vision plays an important role in placing all employees of Perum Jamkrindo to realize this vision through a predetermined mission and internalizing the corporate culture to be able to shape the behavior of every Perum Jamkrindo employees.

VISION

To Become the Leading Guarantee Company that Supports National Economic Development

MISSION

The Company's vision is translated into missions called "Tridharma Jamkrindo" and contain the following:

1. First Dharma

   To undertake guarantee activities for MSME and Cooperative business development.

2. Dharma Kedua

   Memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas.

3. Dharma Ketiga

   Memberikan manfaat bagi stakeholders sesuai prinsip bisnis yang sehat.

KREDO PERUSAHAAN

1. Terpercaya dalam melaksanakan usaha penjaminan.
2. Responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis.
3. Unggul dan Profesional dalam pelayanan.
4. Sehat dalam tata kelola perusahaan.
5. Terkemuka dalam memberikan kepuasaan pelanggan.

BUDAYA PERUSAHAAN

"TRUST"

- TERPERCAYA
  Bekerja jujur dengan integritas tinggi
- RESPONSIF
  Tanggap menghadapi kebutuhan mitra usaha dan segenap stakeholder
- UNGGUL
  Selalu meningkatkan profesionalisme demi pencapaian nilai tambah bagi perusahaan
- SEHAT
  Selalu bekerja dengan tekun untuk mendukung tata kelola perusahaan yang sehat
- TERKEMUKA
  Selalu terdepan dalam memberikan pelayanan dan kinerja untuk menjadi pemimpin dalam industri penjaminan

PEDOMAN PERILAKU PERUM JAMKRINDO: PENETAPAN DAN ISI

Perusahaan memiliki komitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas dan independen, sehingga dapat mendukung kebijakan Pemerintah di bidang pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi

(UMKM dan Koperasi). Hal ini tertuang dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/XII/2012-KEP-07/DP JAMKRINDO/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

2. Second Dharma

   To provide extensive and quality services.

3. Third Dharma

   To provide benefits to stakeholders according to sound business principles.

COMPANY CREED

1. Trusted in carrying out a guarantee business.
2. Responsive to changes in the business environment.
3. Excellent and Professional in services.
4. Healthy in corporate governance.
5. Leading in providing customers satisfaction.

CORPORATE CULTURE

"TRUST"

- TRUSTED
  Work honestly with high integrity
- RESPONSIVE
  Responsive to the needs of business partners and all stakeholders
- SUPERIOR
  Always improve professionalism for the achievement of added value for the Company
- HEALTHY
  Always work diligently to support healthy corporate governance
- LEADING
  Always at the forefront in providing services and performance to become a leader in the guarantee industry

PERUM JAMKRINDO'S CODE OF CONDUCT: ESTABLISHMENT AND CONTENT

The Company is committed to implementing Good Corporate Governance by adhering to the principles of transparency, fairness, accountability, and independence principles to support Government policies in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs and Cooperatives).

It was stated in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Supervisor Council of Perum Jamkrindo No. 93 / Kep-Dir / XII / 2012-KEP-07 /DP JAMKRINDO / XII / 2012, December 13, 2012, concerning the Code of Conduct.

Standar perilaku Perusahaan adalah transparansi dan pengungkapan informasi kemandirian, pertanggung jawaban dan kewajaran. Penerapan standar etika usaha tersebut merupakan cara Perusahaan berbisnis dalam rangka mewujudkan komitmen untuk:

1. Menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama.
2. Menerapkan Standar Etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. Senantiasa secara proporsional dalam rangka pemberian jasa yang bermutu tinggi kepada bisnis Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi).
4. Memperlakukan semua stakeholder sebagai mitra.
5. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan pemangku kepentingan dengan baik.

Isi Pedoman Perilaku atau *Code of Conduct* Perusahaan antara lain adalah:

Company behavior standards are transparency and disclosure of information on independence, accountability, and fairness. The application of business ethics standards is the way the Company does business to realize its commitment to:

1. Place customer satisfaction as a top priority.
2. Implement Ethical Standards in all business activities based on the principles of Good Corporate Governance.
3. Always be proportional in the framework of providing high-quality services to Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives (MSMEs and Cooperatives).
4. Treat all stakeholders as partners.
5. Serve and strive to anticipate stakeholders' needs properly.

The contents of the Company's Code of Conduct include:

A. Etika Perusahaan	**Company Ethics**
Etika Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan	**Company Ethics with Stakeholders**
1. Perusahaan harus memperlakukan *stakeholder* secara baik dan adil dengan memenuhi hak-hak *stakeholder*.	The Company must treat stakeholders properly and fairly by fulfilling stakeholders' rights.
2. Perusahaan wajib meningkatkan kinerja dan memelihara citra positif dalam rangka meningkatkan nilai bagi *stakeholder*.	The Company must improve performance and maintain a positive image to increase value for stakeholders.
3. Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data.	The Company must maintain the confidentiality of information and data.
4. Perusahaan harus memastikan pemberian informasi yang tidak menyesatkan kepada *stakeholder*.	The Company must ensure the provision of non-misleading information to stakeholders.
5. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan *stakeholder* dengan baik.	The Company must serve and strive to anticipate the stakeholders' needs properly.
Etika Perusahaan dengan Karyawan	**Company Ethics with Employees**
1. Perusahaan harus mengutamakan kesehatan, keselamatan kerja, peningkatan kualitas dan kesejahteraan Karyawan dengan pemenuhan hak-hak Karyawan secara proporsional sehingga diharapkan Karyawan dapat menunjukkan kinerja secara maksimal.	The Company must prioritize the health and safety of its employees, and improve the quality and welfare of the employees with the fulfillment of employee rights proportionally so that employees are expected to show maximum performance.
2. Perusahaan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada semua Kayawan tanpa memperhatikan latar belakang, etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.	The Company provides equal employment opportunities to all employees regardless of their background, ethnicity, religion, gender, age, disability, or other special circumstances protected by laws and regulations.
3. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan diri Karyawan.	The Company provides equal opportunities for employee self-development.
4. Perusahaan memberikan penghargaan berdasarkan kompetensi dan kinerja Karyawan.	The Company gives rewards based on employee competence and performance.
5. Perusahaan menciptakan lingkungan kerja, komunikasi dan hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja yang kondusif dan produktif.	The Company creates a conducive and productive work environment, communication, and work relations with superiors, subordinates, and co-workers.

6. Perusahaan harus menghargai martabat manusia tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.	The Company must respect human dignity without regard to differences in the background of ethnicity, religion, gender, age, or any disabilities or other special circumstances protected by laws and regulations.
7. Perusahaan harus menjunjung tinggi prinsip umum kemanusiaan, hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	The Company must uphold the general principles of humanity, rights, and obligations based on applicable laws and regulations.
8. Perusahaan mengizinkan Karyawan melakukan kegiatan rangkap di luar Perusahaan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, keanggotaan profesi, asosiasi atau kelompok sejenisnya.	The Company allows employees to carry out their outdoor activities outside the Company for social community activities, professional membership, associations, or similar groups.
Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa	**Company Ethics with Goods and Services Suppliers**
1. Perusahaan memperlakukan penyedia barang atau jasa termasuk proses pengadaan sesuai prinsip bisnis yang sehat, terbuka, tidak memihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.	The Company treats all suppliers of goods or services, including the procurement processes, according to business principles that are sound, open, and impartial based on applicable regulations.
2. Perusahaan harus melakukan proses pengadaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mengacu prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomis.	The Company must conduct procurement processes in a transparent and accountable manner based on applicable regulations regarding the principles of effectiveness, efficiency, and economics.
3. Perusahaan menggunakan penyedia barang dan jasa dilakukan berdasarkan dokumen secara tertulis.	The Company uses a supplier of goods and services based on written documents.
4. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.	The Company must maintain the confidentiality of information and documents for the procurement of goods and services according to applicable laws and regulations.
5. Perusahaan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.	The Company does not commit corruption, collusion, and nepotism in the procurement of goods and services.
Etika Perusahaan dengan Pesaing	**Company Ethics with Competitors**
1. Perusahaan harus melaksanakan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan kualitas layanan.	The Company must implement fair business competition by prioritizing product excellence and service quality.
2. Perusahaan harus menghindari perilaku yang menyesatkan dan atau tindakan yang tidak jujur.	The Company must avoid misleading behavior and or dishonest actions.
3. Perusahaan menentang kesepakatan atau kesepahaman yang bersifat anti kompetisi.	The Company opposes anti-competitive agreements.
4. Perusahaan tidak melakukan kerja sama tanpa alasan yang dapat diterima dan wajar.	The Company does not cooperate without reasons that are acceptable and reasonable.
Etika Perusahaan dengan Pemerintah	**Company Ethics with the Government**
1. Perusahaan wajib mematuhi Peraturan Perundangundangan yang berlaku.	The Company must comply with the prevailing laws and regulations.
2. Perusahaan harus membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah.	The Company must foster good relations and communication with the Government.
3. Perusahaan harus mendukung program-program Pemerintah sesuai dengan peraturan dan undangundang yang berlaku.	The Company must support Government programs according to the applicable laws and regulations.
Etika Perusahaan dengan Masyarakat	**Company Ethics with the Community**
1. Perusahaan memelihara lingkungan yang bersih dan sehat.	The Company maintains a clean and healthy environment.

2. Perusahaan mendukung kegiatan sosial, budaya, tradisi, agama dan hak asasi manusia.	The Company supports social, cultural, traditional, religious, and human rights activities.
3. Perusahaan berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.	The Company participates in the economic empowerment of the surrounding community.
4. Perusahaan mengoptimalkan penyaluran programprogram tanggung jawab sosial Perusahaan kepada masyarakat (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).	The Company optimizes the distribution of corporate social responsibility programs to the community (through the Partnership and Community Development Program).
5. Perusahaan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.	The Company does not take actions that lead to discrimination of the community based on ethnicity, religion, race, and class.
Etika Perusahaan dengan Media Massa	**Company Ethics with Mass Media**
1. Perusahaan harus memberikan informasi yang relevan.	The Company must provide relevant information.
2. Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra dalam menciptakan kerja sama yang kondusif berdasarkan hubungan saling menghormati dan saling menguntungkan.	The Company makes mass media a partner in creating conducive cooperation based on mutual respect and mutual benefits.
3. Perusahaan menerima dan menindaklanjuti secara proporsional terhadap kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa.	The Company receives and follows up proportionally against constructive criticisms conveyed through mass media.
B. Standar Perilaku Insan Jamkrindo	**Standards of Behavior of Jamkrindo Personnel**
Tanggung Jawab Pribadi dan Profesi	**Personal and Professional Responsibilities**
1. Seluruh Insan Perusahaan wajib mematuhi seluruh ketentuan Perusahaan tentang kepegawaian.	All Company Personnel must comply with all Company provisions regarding staffing.
2. Seluruh Insan Perusahaan wajib memahami dan mematuhi seluruh ketentuan baik yang dikeluarkan oleh Perusahaan maupun regulator sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.	All Company Personnel must understand and comply with all provisions, whether issued by the Company or the regulator, in accordance with their duties and responsibilities.
3. Seluruh Insan Perusahaan harus berdedikasi, loyal, giat dan teliti dalam bekerja serta selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.	All Company Personnel must be dedicated, loyal, enterprising, and meticulous in their work and always strive to improve their knowledge and ability to carry out their duties well.
4. Seluruh Insan Perusahaan harus menerapkan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan.	All Company Personnel must put the Company's interests above personal or group interests.
Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif	**Creation of a Conducive Work Environment**
1. Seluruh Insan Perusahaan harus bersikap santun dalam berkomunikasi.	All Company Personnel must be polite in communicating.
2. Seluruh Insan Perusahaan harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja.	All Company Personnel must uphold ethical values in work relationships with superiors, subordinates, and co-workers.
3. Seluruh Insan Perusahaan harus menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan.	All Company Personnel must avoid actions and utterances that contain elements of harassment, humiliation, mocking, slandering, and demeaning.
4. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan perselingkuhan dan tindakan pelecehan seksual secara verbal, visual maupun fisik termasuk pelecehan atas privasi dan status.	All Company Persons are prohibited from engaging in infidelity and verbal, visual, and physical sexual harassment, including harassment of privacy and status.

5. Seluruh Insan Perusahaan dilarang (baik di kantor maupun di luar kantor) : a. Menggunakan, memiliki, mendistribusikan atau menjual narkotika atau obat-obatan terlarang. b. Mengkonsumsi minuman beralkohol. c. Melakukan semua bentuk perjudian, d. Melakukan semua bentuk tindakan kriminal.	All Company Personnel are prohibited (both in the office and outside the office) to: a. Use, own, distribute, or sell narcotics or illegal drugs. b. Consume alcoholic beverages. c. Do all forms of gambling, d. Do all forms of crime.
6. Seluruh Insan Perusahaan wajib memelihara lingkungan yang sehat.	All Company Personnel must maintain a healthy environment.
7. Seluruh Insan Perusahaan agar mengupayakan penggunaan telepon secara efisien dan efektif serta menghindari penggunaan telepon untuk kepentingan pribadi secara berlebihan serta merespon bunyi telepon atau tanda panggilan pada kesempatan pertama.	All Company Personnel must make efficient and effective use of telephones and avoid excessive use of personal telephone and respond to telephone sounds or call alerts at the first opportunity
Menghindari Segala Benturan Kepentingan dan Potensinya yang Memicu Perilaku Tidak Sehat dan Tidak Jujur	**Avoiding All Conflicts of Interest and Their Potentials that Trigger Unhealthy and Dishonest Behavior**
1. Seluruh Insan Perusahaan menggunakan tenaga, pemikiran dan kemampuan kerjanya untuk kepentingan Perusahaan. Pekerjaan atau kegiatan di luar jam kantor dapat dilakukan sepanjang tidak memanfaatkan nama dan kepentingan Perusahaan.	All Company personnel uses their labor, thought, and work capabilities for the benefit of the Company. Work or activities outside office hours can be carried out as long as they do not utilize the name and interests of the Company.
2. Seluruh Insan Perusahaan yang sudah tidak aktif atau telah mengundurkan diri dilarang menggunakan setiap bentuk hak cipta, hak milik intelektual, data dan informasi Perusahaan serta melakukan kegiatan atas nama Perusahaan.	All Company Personnel who have been inactive or have resigned are prohibited from using any form of copyright, intellectual property, Company data and information, and conducting activities on behalf of the Company.
3. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan atas nama pribadi atau golongan.	All Company Personnel may not invest Company funds in personal or group names.
4. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan dengan memperjanjikan keuntungan pribadi dengan pihak lain.	All Company Personnel may not invest Company funds by promising personal benefits with other parties.
5. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh menerima suap atau pembayaran dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan jabatan atau tugasnya.	All Company Personnel may not accept bribes or payments from parties who have a direct or indirect relationship with their positions or duties.
6. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh menerima dan memberikan hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga dapat mempengaruhi keputusan bisnis yang sehat.	All Company Personnel may not accept and give gifts of any kind that are reasonably suspected to influence sound business decisions.
7. Seluruh Insan Perusahaan dilarang menjadi penyedia barang dan jasa yang secara langsung maupun tidak langsung menjual barang, hak atau jasa kepada Perusahaan.	All Company Personnel are prohibited from providing goods and services that directly or indirectly sell goods, rights, or services to the Company.
8. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan mark up harga penjualan atau pembelian baik untuk kepentingan pribadi atau pihak iain.	All Company Personnel are prohibited from marking up sales or purchase prices for personal or other parties' interests.
9. Seluruh Insan Perusahaan dilarang memanfaatkan jabatannya untuk memberikan perlakuan istimewa kepada pihak lain.	All Company Personnel are prohibited from using their positions to give preferential treatment to other parties

Menjaga Aset, Harta dan Informasi demi Kepentingan Perusahaan	Safeguard the Assets, Wealth and Information for the Interest of the Company
1. Seluruh Insan Perusahaan menggunakan aset Perusahaan hanya untuk kepentingan Perusahaan dan tidak diperkenankan untuk kepentingan pribadi atau golongan.	All Company Personnel use Company assets only for the benefit of the Company and are not permitted for personal or group interests.
2. Seluruh Insan Perusahaan harus bertanggung jawab melindungi harta Perusahaan dari pencurian, penggelapan dan penyalahgunaan aset sesuai wewenangnya masing-masing.	All Company Personnel must be responsible for protecting the Company's assets from theft, embezzlement, and misuse of assets according to their respective authorities.
3. Seluruh Insan Perusahaan wajib menjaga data dan informasi beserta perangkatnya sesuai dengan kewenangannya agar tidak disalahgunakan, dirusak, dicuri, atau tidak diakses oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.	All Company Personnel must maintain data and information along with their devices according to their authority so that they are not misused, damaged, stolen or not accessed by other irresponsible parties
4. Seluruh Insan Perusahaan tidak diperkenankan menggunakan nama, logo, hak cipta dan berbagai aksesoris milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi.	All Company Personnel are not permitted to use the Company's name, logo, copyright, and various accessories for personal interest.
5. Seluruh Insan Perusahaan wajib menjaga informasi internal Perusahaan yang bersifat rahasia dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, teman, golongan, atau kelompok apapun dan manapun.	All Company Personnel must maintain Company internal information confidential and does not use it for personal interest, the interests of family, friends, class, or any groups.
6. Seluruh Insan Perusahaan wajib membuat dan memberikan laporan dan data-data dengan benar dan jujur kepada pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	All Company Personnel must write and provide reports and data correctly and honestly to interested parties according to applicable laws and regulations.
Mematuhi Hukum dan Perundang-Undangan	**Compliance with Laws and Regulations**
1. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan kegiatan insider trading guna memperoleh keuntungan pribadi dan tidak bertindak sebagai pialang, pencari atau perantara lain untuk kepentingan pribadi atau golongan dalam transaksi yang dilakukan Perusahaan.	All Company personnel is prohibited from conducting insider trading activities to obtain personal benefits and acting as brokers, seekers, or other intermediaries for personal or group interests in transactions conducted by the Company.
2. Seluruh Insan Perusahaan dilarang terlibat atau melibatkan diri pada investasi dan atau praktik yang bersifat pencucian uang (*money laundering*).	All Company Personnel are prohibited from engaging in investments and/or practices of money laundering.
3. Seluruh Insan Perusahaan dilarang membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan baik langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun, namun Perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh insan Perusahaan untuk menyalurkan aspirasi politiknya dengan syarat : a. Tidak mengatasnamakan Perusahaan, b. Tidak menggunakan aset Perusahaan dalam aktivitas politiknya, c. Tidak memberikan kontribusi apapun atas nama Perusahaan, d. Apabila menduduki jabatan di Partai Politik (parpol) dan menjadi calon/anggota legislatif dianggap mengundurkan diri dari Perusahaan.	All Company Personnel are prohibited from making a notion, engagement, a direct or indirect statement indicating that the Company has an attachment to any political party. The Company gives freedom to all Company Personnel to channel their political aspirations with the following conditions: a. It is not on behalf of the Company, b. They do not use Company assets in their political activities, c. They do not make any contribution on behalf of the Company, d. If an employee holds a position in a Political Party and will soon become a candidate/member of the legislature, he/she is considered resigning from the Company.
4. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).	All Company Personnel are prohibited from carrying out acts of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN).

INTERNALISASI DAN PENEGAKAN CODE OF CONDUCT

Internalisasi *Code of Conduct* memiliki tujuan untuk menciptakan kesepahaman dan komitmen bersama dari segenap jajaran di internal Perusahaan untuk dapat menaati dan menjalankan secara baik pedoman prilaku yang tertuang di dalamnya. Internalisasi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara menyeluruh dengan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi segenap insan Perusahaan dalam memperoleh informasi tersebut.

Mekanisme penegakan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dilakukan dengan cara seluruh insan perusahaan wajib menandatangani surat Pernyataan Komitmen untuk Mematuhi Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), dan seluruh insan Perusahaan wajib mengerti, memahami dan menerapkan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

1. Saluran pengaduan
   a. Apabila ditemui adanya pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Perusahaan, setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk segera melaporkan secara tertulis dengan menyebutkan identitas pelapor kepada Divisi yang menangani bidang Sumber Daya Manusia (SDM).
   b. Permasalahan perilaku Dewan Pengawas dan Direksi, penanganannya dilakukan oleh Menteri.
   c. Permasalahan perilaku pegawai, penanganannya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku.
   d. Pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dalam hubungannya dengan masyarakat, penanganannya tetap mengacu kepada ketentuan kepegawaian yang berlaku dalam Perusahaan.
   e. Divisi yang menangani bidang Sumber Daya Manusia (SDM) berkewajiban untuk merespon dengan segera setiap pertanyaan, pemberitahuan, dan laporan yang diterimanya secara proporsional.
2. Mekanisme Penanganan atas Laporan Pelanggaran Pedoman PErilaku
   a. Atasan langsung atau unit kerja yang ditunjuk untuk mengelola penanganan atas laporan pelanggaran berdasarkan laporan yang diterima melakukan identifikasi permasalahan analisis, mengumpulkan informasi tambahan yang relevan serta merahasiakan identitas pelapor.
   b. Hasil analisis tersebut apabila di pandang perlu dapat dilaporkan kepada Direksi untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

INTERNALIZATION AND ENFORCEMENT OF THE CODE OF CONDUCT

The internalization of the Code of Conduct has the aim of creating mutual understanding and commitment from all levels of the Company to be able to adhere to and carry out well the behavioral guidelines contained in it. The internalization is carried out through dissemination activities carried out thoroughly by providing the widest possible access for all Company personnel to obtain this information.

The enforcement mechanism of the Code of Conduct is carried out by means that all Company personnel is required to sign a Statement of Commitment to Comply with the Code of Conduct, and all Company personnel must understand, comprehend, and apply the Code of Conduct.

1. Complaint channel
   a. Every Company Personnel is obliged to immediately report in writing by stating the whistleblowers' identity to the HR Division if there is a violation of the Code of Conduct in the Company.
   b. Handling is carried out by the Minister for the behavior problem of the Board of Supervisor Council and the Board of Directors.
   c. For problems with employee behavior, the handling is carried out by direct supervisor in stages according to the applicable mechanism.
   d. Handling still refers to the applicable staffing provisions in the Company for the Code of Conduct violation in its relationship with the community.
   e. The Human Resources (HR) Division is obliged to respond immediately to any questions, notifications, and reports received proportionally.
2. Handling Mechanisms for Behavioral Guidelines Violation Reports
   a. The direct supervisor or work unit appointed to manage reports of violations based on reports received by identifying problems of analysis, collecting additional relevant information, and keeping the identity of the whistleblowers confidential.
   b. If needed, the analysis results can be reported to the Board of Directors for further processing according to the applicable mechanism.

3. Penyebarluasan Etika Perusahaan

Upaya sosialisasi dan penyebarluasan Etika Perusahaan secara merata kepada seluruh elemen Perusahaan dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain:

a. Pemberian sosialisasi, *training* dan seminar bagi karyawan
b. Pemasangan banner maupun spanduk
c. Rapat evaluasi kinerja
d. Sosialisasi saat proses perekrutan

Proses sosialisasi juga dilakukan secara individu. Kepada setiap insan Perusahaan diwajibkan untuk membaca Pedoman Perilaku atau *Code of Conduct* Perusahaan, dan menandatangani formulir pernyataan komitmen untuk mematuhi *Code of Conduct*.

3. Socialization of the Company's Code of Conduct

The efforts to evenly disseminate the Company's Code of Conduct to all Company elements are carried out through various strategies, including:

a. Providing socialization, training, and seminars to employees
b. Installation of banners
c. Performance evaluation meeting
d. Socialization during the recruitment process

The socialization process is also carried out individually. Every Company personnel is required to read the Company's Code of Conduct and sign a statement of commitment form to comply with the Code of Conduct.

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
UNTUK MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	:
NPP	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Status Kepegawaian	:

Menyatakan bahwa, saya :

1. Telah menerima Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*);
2. Telah memahami isi dari Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*);
3. Bersedia mematuhi apa yang telah menjadi komitmen Insan Perusahaan dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*);
4. Siap menerima konsekuensi dan sanksi dari Perusahaan apabila melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini;
5. Akan segera mengkonsultasikan dan/atau melaporkan kepada Divisi yang membidangi bagian Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pejabat yang telah ditunjuk untuk memonitor penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, apabila menemui permasalahan dan/atau pelanggaran dalam melaksanakan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jakarta, September 2016

(Nama)

4. Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Etika Perusahaan Adanya sanksi terhadap pelanggaran etika Perusahaan berfungsi untuk menjamin tegaknya aturan yang dibuat demi terciptanya kedisiplinan dan profesionalisme bagi seluruh Insan Perusahaan. penegakan dan pemberian sanksi atas tindakan pelanggaran yang dilakukan berlaku secara menyeluruh tanpa terkecuali. Adapun sanksi yang diberikan berupa surat peringatan.
5. Sanksi Administrasi Setiap karyawan wajib:
   - Mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi Pegawai BUMN;
   - Mentaati semua peraturan perusahaan, baik berupa perintah maupun larangan secara tertulis atau secara lisan dalam batas pengertian yang layak dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan; dan
   - Menunaikan tugas dan kewaiiban dengan sebaikbaiknya sesuai dengan penugasan oleh Direksi dan atasan masing-masing pegawai dengan mementingkan kepentingan Perusahaan.

Pemberian sanksi administrasi bagi karyawan Perum Jamkrindo mengacu pada Peraturan Direksi Nomor : 19/ Per-Dir/III/2006 tentang Disiplin Pegawai. Sanksi administrasi diberikan bagi karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin.

Sebagai realisasi penegakan Pedoman Perilaku, berikut rincian sanksi yang dikenakan terkait penegakan Kode Etik selama 3 (tiga) tahun terakhir:

4. Enforcement and Sanctions for Violating the Company's Code of Conduct. The existence of sanctions against violations of the Company's Code of Conduct serves to ensure the upholding of the rules made for the creation of discipline and professionalism for all Company Personnel. The enforcement and sanctions for violations committed to applying thoroughly without exception. The sanctions given are in the form of warning letters.
5. Administrative Sanctions Every employee must:
   - comply with all provisions and regulations stipulated by the Government for SOEs Employees;
   - obey all Company regulations, either in the form of written or oral orders or prohibitions within the limits of proper understanding and not contrary to the norms of decency; and
   - fulfill the duties and obligations as best as possible according to the assignment by the Board of Directors and the superiors of each employee with an emphasis on the interests of the Company.

The provision of administrative sanctions for employees of Perum Jamkrindo refers to the Board of Directors' Regulation Number: 14/Per-Dir/4/IX/2018 concerning Violation Sanctions of the Company's Provision. Administrative sanctions are given to employees who violate the Company's provisions that do not pose a risk of financial loss.

As a realization of the Code of Conduct's enforcement, the following are the details of sanctions imposed regarding the enforcement of the Code of Conduct for the last 3 (three) years:

Jenis Sanksi Types of Sanctions	2019	2018	2017
Teguran / Oral Reprimand	1	1	-
Peringatan 1 / First Warning Letter	6	3	2
Peringatan 2 / Second Warning Letter	-	2	1
Peringatan 3 / Third Warning Letter	-	-	-
Pengunduran Diri / Resignation	-	1	1
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) / Termination/Fired	-	-	-

PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Gratification Control

Salah satu bentuk komitmen Perusahaan dalam meminimalisir benturan kepentingan serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan, Perusahaan mengupayakan penerapan pengendalian gratifikasi dari pihak lain. Pengelolaan Budaya Kepatuhan Terhadap Gratifikasi telah ditetapkan melalui Peraturan Direksi No. 14/Per-Dir/4/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.

Pentingnya pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan Kode Etik seperti yang telah dijelaskan di atas berhubungan dengan pembatasan secara definitif antara gratifikasi atau hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang diberikan oleh pihak lain, dengan suap yang erat hubungannya dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Perusahaan telah mendefinisikan secara jelas tentang pengkategorian gratifikasi yang terkait kedinasan, gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Melalui kebijakan tersebut, Perusahaan tidak hanya mengupayakan penerapan prinsip GCG berbasis pengelolaan korporasi yang sehat, namun kebijakan tersebut juga memberikan landasan bagi setiap insan Jamkrindo untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dan menjauhkan perilaku insan Jamkrindo dari kecenderungan praktik korupsi

One form of the Company's commitment to minimizing conflicts of interest and abuse of authority and position, the Company implements control of gratification from other parties. Management of Compliance Culture Against Gratification has been established through Directors' Regulation No. 14 / Per-Dir / 4 / VI / 2019 dated June 20, 2019.

The importance of gratification control in the implementation of the Code of Conduct, as explained above, relates to definitive restrictions between gratuities or present or gifts in any form by other parties, with bribes closely related to the abuse of authority and position. The Company Gratification Control Policy has clearly defined gratuities related to official service, gratuities that must be reported, and gratuities that are not required to be reported.

Through this policy, the Company strives for the implementation of GCG principles based on sound company management, and the policy provides a foundation for every Jamkrindo personnel to not abuse their authority and position and keep the behavior of Jamkrindo's personnel from the tendency of corrupt practices.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
Anti-Corruption Policies

Undang-undang Republik Indonesia menetapkan bahwa membayar atau menawarkan pembayaran atau bahkan menerima suap, *kickback* atau pun bentuk pembayaran lain yang korup adalah suatu tindak pidana yang dapat menjadikan Perusahaan maupun para pegawai secara individu dapat dikenai denda dan/atau hukuman penjara.

Undang-undang anti korupsi ini, termasuk Peraturan Praktik Korupsi menjadikan pembayaran, penawaran atau pemberian segala sesuatu yang bernilai kepada pejabat Perusahaan dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan para pejabat sebagai suatu tindak pidana. Tujuan Kebijakan ini adalah untuk memastikan agar semua pegawai, pejabat dan direktur, serta semua anak perusahaan dan afiliasi Perusahaan patuh terhadap Kebijakan Anti Korupsi Perusahaan dan undang-undang anti korupsi terkait.

Kebijakan ini mencakup hal-hal berikut ini:

1. Suap, *Kickback* atau Pembayaran Korup Lain

2. Pembayaran Fasilitasi

3. Hubungan dengan Pihak Ketiga

Kementerian BUMN telah meluncurkan roadmap BUMN Bersih sebagai aksi anti korupsi dilingkungan kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan negara, dan itu juga berlaku di Perum Jamkrindo sebagai salah satu perusahaan negara. Pada tahun 2020 Perusahaan telah menerbitkan Peraturan Direksi Nomor 9/Per-Dir/4/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

The Law of the Republic of Indonesia stipulates that paying or offering payments or even accepting bribes, kickbacks, or other forms of corrupt payments is a criminal offense that can make the Company and individual employees subject to fines and/or prison sentences.

This anti-corruption law, including the Regulations on the Practice of Corruption, makes payments, offers, or acts of giving of anything valuable to Company officials, intending to influence the actions or decisions of the officials a criminal offense. This policy aims to ensure that all employees, officials and directors, and all subsidiaries and Company affiliates comply with the Company's Anti-Corruption Policy and related anti-corruption laws.

This policy includes the following:

1. Bribes, Kickbacks or Other Corrupt Payments

2. Facilitation Payments

3. Relations with Third Parties

The Ministry of SOEs has launched a Clean SOEs roadmap as an anti-corruption action within the Ministry of State-Owned Enterprises and state-owned enterprises, and that also applies at Perum Jamkrindo as one of the state-owned enterprises. In 2020, the Company has published the Board of Directors' Regulation Number 9/Per-Dir/4/VI/2020 dated June 4, 2020, concerning Anti-Corruption Management System Guidelines.

INFORMASI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK
Information on Funding for Political Activities

Perusahaan memiliki kebijakan untuk melarang keterlibatan individu atas nama Perusahaan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik. Secara tegas, Perusahaan tidak mengizinkan insan Jamkrindo menggunakan fasilitas atau sumber daya apapun untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik maupun untuk tujuan partisipasi politik. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Standar Perilaku (*Code of Conduct*) Perusahaan.

The Company has the policy to prohibit the involvement of individuals on behalf of the Company in political activities, including giving donations for political purposes. Strictly speaking, the Company does not allow Jamkrindo personnel to use any facilities or resources for political campaign purposes, political fundraising, or for political participation, as stipulated in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Supervisor Council Number 93/Kep-Dir/XII/2012 – Kep-07/DP-Jamkrindo/XII/2012 concerning Perum Jamkrindo's Code of Conduct.

WHISTLEBLOWING SYSTEM
Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai Tindakan pelanggaran yang diindikasi terjadi di dalam suatu perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan dan niat baik untuk kepentingan perusahaan. Sejak diterbitkannya Peraturan Direksi Whistle Blowing System (WBS) Nomor:04/Per-Dir/IV/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System (WBS) SPI melakukan sosialisasi WBS terhadap auditee bersamaan dengan pelaksanaan general audit. Adapun tujuan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yaitu:

1. Menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif.
2. Menciptakan iklim yang kondusif dengan memperkuat lingkungan pengawasan dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra perusahaan dalam rangka menjaga serta melidungi aset/kepentingan perusahaan.
3. Mempermudah manajemen untuk menangani secara cepat dan efektif dalam penyelesaian laporan-laporan pelanggaran secara internal maupun eksternal melalui jalur hukum (bila dianggap perlu), melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi tersebut.
4. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk perlindungan pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal.
5. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat satu pelanggaran dan mengurangi potensi kerugian bagi perusahaan.
6. Memberikan masukan untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal serta untuk merancang Tindakan perbaikan yang diperlukan.
7. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
8. Meningkatkan budaya kepatuhan bagi semua insan Perum Jamkrindo.
9. Meningkatkan reputasi Perusahaan.
10. Sebagai salah satu upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perusahaan.

The Whistleblowing System is a system that can be used as medium for the whistleblower to convey information relating indicated violations occurring within the Company based on evidence that can be accounted for and good intentions for the benefit of the Company. Since the Board of Director's regulation was issued Number:04/Per-Dir/IV/2018 dated April 10, 2018, concerning Whistleblowing System Management Guidelines of SPI to carry out WBS socialization to the auditee along with general audit implementation. The purpose of the violation reporting system (Whistleblowing System) is:

1. To ensure the implementation of an effective violation complaint settlement mechanism.
2. To create a conducive climate by strengthening the supervision and encouraging reporting on matters that can lead to financial and non-financial losses, which include matters that can damage the Company's image to protect and safeguard the Company's assets/ interests.
3. To facilitate the management to deal quickly and effectively in resolving violation reports internally and externally through legal channels (if deemed necessary), protect the confidentiality of the identity of the whistleblowers, and maintain the confidentiality and security of the information.
4. To build a policy and infrastructure for the protection of whistleblowers from replies of the internal and external parties.
5. To ensure the availability of an early warning system the mechanism for potential problems due to a violation and to reduce the potential loss for the Company.
6. To provide input to have an in-depth look at further critical areas and work processes that have weaknesses in internal controls and to design corrective actions as needed.
7. To ensure the availability of ways of delivering important and critical information to the Company to those who must immediately handle it safely.
8. To improve the culture of compliance for all Perum Jamkrindo personnel.
9. To improve the reputation of the Company.
10. To become one of the efforts in disclosing various problems that is not according to the applicable ethical standards in the Company.

PENETAPAN PEDOMAN WBS PERUSAHAAN

Lingkup pengaduan pelanggaran yang akan ditindaklanjuti oleh Tim WBS adalah:

1. Tindakan kecurangan/*fraud*;
2. Penyalahgunaan jabatan/wewenang untuk kepentingan pribadi atau diluar kepentingan Perusahaan;
3. Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi;
4. Penyelewengan dan/atau penyalahgunaan aset Perusahaan;
5. Benturan kepentingan;
6. Pelanggaran peraturan dan kode etik perusahaan; dan

Perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan Pengelola WBS adalah:

1. Pengelola WBS beranggotakan Kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala Divisi Hukum & Kepatuhan dan Kepala Divisi MSDM yang bersifat *ex-officio*.
2. Kepala Satuan Pengawasan Intern merangkap sebagai Ketua Pengelola WBS.
3. Tugas dan tanggung jawab Pengelola WBS meliputi:
   a. Memproses tindaklanjut pelaporan pelanggaran yang masuk dalam WBS.
   b. Menyampaikan laporan kegiatan WBS secara periodik kepada Direktur Utama.
   c. Melakukan verifikasi terhadap substansi laporan pelanggaran, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan terjadinya pelanggaran.
   d. Melakukan pemantauan atas pemberian perlindungan terhadap Pelapor dengan unit terkait.
   e. Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk.
   f. Melaksanakan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan Perusahaan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan pelapor.
   g. Mengusulkan tindak lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran setelah dilakukan verifikasi atas laporan tersebut sesuai dengan jenis laporan pelanggaran.

THE ESTABLISHMENT OF COMPANY WBS GUIDELINES

The scope of complaints of violations that will be followed up by the WBS Team are:

1. Acts of fraud;
2. Abuse of position/authority for personal interests or outside the interests of the Company;
3. Acceptance and/or providing gratification;
4. Misappropriation and/or misuse of Company assets;
5. Conflict of interest;
6. Violations of Company regulations and Code of Conduct; and

The actions that violate laws and regulations of the WBS Management are:

1. The WBS Management consists of the Head of the Internal Audit Unit, Head of the Legal & Compliance Division and the Ex-Officio
2. Head of HRM Division. The Head of the Internal Audit Unit concurrently as Chairman of WBS Management.
3. The Duties and responsibilities of the WBS Management include:
   a. Process the follow-up of reporting violations included in WBS.
   b. Periodically submit WBS activity reports to the President Director.
   c. Verify the substance of the violation report, to find and collect the evidence needed to ensure the occurrence of violations.
   d. Monitor the provision of protection to the whistleblower with the related unit.
   e. Monitor the settlement handling of the incoming reports.
   f. Carry out a whistleblower protection program according to Company policies, especially on aspects of confidentiality and the guarantee of the whistleblower's security.
   g. Propose follow-up actions on the violation complaints report after verifying the report according to the type of violation report.

SARANA PELAPORAN

1. Perusahaan menyediakan sarana pelaporan untuk menyiapkan pengaduan pelanggaran melalui media di bawah in:
   a. Surat Tertulis : PO BOX 107123 JKP 10610
   b. SMS dan Whatsapp : 08111717123
   c. Email : wbs@jamkrindo.co.id
2. Pelaporan pengaduan pelanggaran sebaiknya dilengkapi informasi awal/bukti/dokumen yang memuat indikasi awal yang dapat dipertanggung jawabkan dan memberikan petunjuk mengenai pelanggaran yang terjadi, sehingga dapat dijadikan bahan tindak lanjut.
3. Laporan pengaduan pelanggaran sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
   a. Identitas pelapor (Tidak wajib);
   b. Bentuk pelanggaran atau penyimpangan;
   c. Kapan dan di mana terjadinya (lokasi, kejadian/ transaksi);
   d. Siapa saja yang diduga terlibat (nama, jabatan/unit kerja);
   e. Kerugian (materil dan non materil) akibat pelanggaran atau penyimpangan; dan
   f. Ada tidaknya pihak yang mengetahui pelanggaran atau penyimpangan tersebut.
4. Pelapor yang menyampaikan laporan pelanggaran dengan sarana yang telah ditetapkan dalam mekanisme WBS dapat memperoleh informasi progres penanganan tindak lanjut atas informasi pelanggaran yang disampaikan dalam WBS.

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN DAN PELAPORAN

1. Pelapor menyampaikan laporan pengaduan pelanggaran melalui sarana WBS yang telah disediakan oleh Perusahaan.
2. Setiap laporan pelanggaran yang masuk WBS akan diverifikasi dan diidentifikasi lebih lanjut yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti awal yang cukup dan memadai.
3. Setiap laporan yang masuk WBS akan dilaporkan secara periodik kepada Direktur Utama, dari hasil laporan tersebut Direktur Utama menetapkan rekomendasi tindakan (langkah-langkah) lebih lanjut.
4. Apabila rekomendasi tersebut pada angka 3 diperlukan audit khusus dan atau investigasi lebih lanjut, akan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern.

REPORTING FACILITIES

1. The Company provides a reporting facility to prepare violation complaints through the media below:
   a. Written Letter: PO BOX 107123 JKP 10610
   b. SMS and Whatsapp: 08111717123
   c. Email: wbs@jamkrindo.co.id
2. Reporting complaints of violations should be accompanied by initial information/evidence/documents that contain initial indications that can be accounted for and provide instructions regarding violations that occur so that they can be used as follow-up material.
3. Reports of violations contain at least the following information:
   a. Identity of the Whistleblower (Not obligatory);
   b. Form of violation or deviation;
   c. The time and place of the violations (location, incident/transaction);
   d. Violation suspects (name, position/work unit);
   e. Material and non-material losses due to violations or deviation; and
   f. Whether or not there are parties who are aware of the violation or deviation.
4. The whistleblower who submits a violation report with the facilities set out in the WBS mechanism can obtain information on the follow-up handling progress of the violation information submitted in the WBS.

THE MECHANISM OF VIOLATION HANDLING AND REPORTING

1. The whistleblower submits a violation complaint report through the WBS facility provided by the Company.
2. Every violation report that enters the WBS will be verified and identified further, aiming to gather sufficient and adequate initial evidence.
3. Every report submitted to the WBS will be reported periodically to the President Director, from the report result, then the President Director sets out recommendations for further actions (steps).
4. If the recommendation in number 3 requires a special audit and/or further investigation, it will be carried out by the Internal Audit Unit.

5. Dalam melakukan investigasi dan/atau audit khusus, Satuan Pengawasan Intern dapat dibantu oleh unit kerja lainnya.

6. Dalam melakukan investigasi Satuan Pengawasan Intern menerapkan prinsip pelaksanaan investigasi sebagai berikut:
   a. Investigasi bertujuan untuk mengumpulkan semua bukti yang ada, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah laporan pelanggaran tersebut benar adanya.
   b. Proses investigasi terbuka terhadap kemungkinan reviu secara administratif, operasional dan yudisial. Rekam jejak investigasi (*audit trail*) harus terdokumentasi sehingga dapat ditinjau ulang terkait dengan sasaran yang ingin dicapai dan juga keputusan-keputusan penting yang diambil selama proses berlangsung.
   c. Pengelolaan proses investigasi harus cukup fleksibel. Komunikasi yang digunakan harus jelas dan tidak mengambang, pendekatan secara multi disiplin kalau perlu harus digunakan. Dalam hal beberapa tahapan prosedur tidak dapat dilaksanakan, mungkin perlu dicari solusi yang kompromistis dan dapat diterima oleh semua pihak, tanpa kehilangan sasaran dan tujuan. Dalam kondisi semacam ini mungkin diperlukan pendapat ahli dari eksternal.

7. Petugas pengelola WBS memastikan semua laporan pelanggaran ditangani dengan baik, serta memastikan laporan pelanggaran sudah ditindaklanjuti.

8. Laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan, Direksi, Dewan Pengawas dan Organ Pendukungnya disampaikan kepada Direktur Utama.

9. Petugas pengelola WBS mendokumentasikan seluruh proses pengelolaan pelanggaran tersebut secara rapi, aman dan rahasia.

10. Petugas pengelola WBS membuat laporan tindak lanjut atas laporan pengaduan.

11. Petugas pengelola WBS membuat catatan penerimaan dan status pengaduan pelanggaran memuat sekurangnya:
    a. Nomor registrasi;
    b. Tanggal penerimaan;
    c. Pihak penerima;
    d. Deskripsi singkat; dan
    e. Status penyelesaian yang disertai penjelasan.

5. In conducting special investigations and/or audits, the Internal Audit Unit can be assisted by other work units.

6. In investigating, the Internal Audit Unit applies the following investigation principles:
   a. The investigation aims to collect all available evidence so that a conclusion can be drawn whether the violation report is true to occur.
   b. The investigation process is open to possible administrative, operational, and judicial reviews. The audit trail must be documented to be reviewed concerning the objectives to be achieved and important decisions taken during the process.
   c. Management of the investigation process must be flexible enough. The communication used must be clear and stable; a multi-disciplinary approach must be used, if necessary. If several stages of the procedure cannot be implemented, it may be necessary to find a compromising solution that can be accepted by all parties, without losing the goals and objectives. In such conditions, external expert opinion may be needed.

7. WBS Management ensures that all violation reports are handled properly and that violations have been followed up.

8. Violation reports committed by employees, Board of Directors, Board of Supervisor Council, and supporting organs are submitted to the President Director.

9. The WBS management officer documents the entire process of managing the violation in a neat, safe, and confidential manner.

10. WBS management officers make follow-up reports on complaints reports.

11. The WBS management officer keeps a record of receipt and status of the violation complaint containing at least:
    a. Registration number;
    b. Receipt date;
    c. Recipient;
    d. Short description; and
    e. Settlement status accompanied by an explanation.

PELANGGARAN, SANKSI DAN PENGHARGAAN

1. Pelanggaran yang diduga mengandung unsur melawan hukum, tindak pidana atau pelanggaran perdata dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang menangani sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
3. Apabila informasi yang disampaikan tidak terbukti setelah dilakukan pemeriksaan maka laporan tersebut dianggap selesai.
4. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan melalui kebijakan Direksi.

VIOLATIONS, SANCTIONS, AND REWARDS

1. Violations that are alleged to contain elements against the law, criminal acts, or civil violations can be forwarded to the party authorized to handle it according to the applicable rules and regulations.
2. The form of sanctions against the Reported Party that has been proven committed a violation will be determined according to the Company's applicable rules and regulations.
3. If the information submitted is not proven after the inspection is carried out, the report is deemed complete.
4. The Company can give a reward to a whistleblower for violations that can be proven through the Board of Directors' policies.

RUANG LINGKUP WBS

Lingkup pengaduan pelanggaran yang akan ditindaklanjuti oleh WBS adalah:

1. Tindakan kecurangan/*fraud*;
2. Penyalahgunaan Jabatan/Wewenang untuk kepentingan pribadi atau di luar kepentingan Perusahaan;
3. Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi;
4. Penyelewengan dan/atau penyalahgunaan asset Perusahaan;
5. Benturan kepentingan;
6. Pelanggaran peraturan dan kode etik Perusahaan; dan
7. Perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan.

THE SCOPE OF WBS

The scope of violation complaints that will be followed up by the WBS are:

1. Acts of Fraud;
2. Abuse of Position/Authority for personal interest or outside the interests of the Company;
3. Acceptance and/or providing gratification;
4. Misappropriation and/or misuse of Company assets;
5. Conflict of interest;
6. Violation of Company regulations and Code of Conduct; and
7. Laws and regulations-violated actions.

KOMITMEN PERUM JAMKRINDO DAN KARYAWAN

Penerapan WBS sebagai perwujudan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten dan berkelanjutan. Penerapan WBS diharapkan akan mendorong budaya keterbukaan dan kejujuran dan mengurangi budaya diam membiarkan terjadinya pelanggaran. Untuk mendukung agar pelaksanaan proses manajemen risiko Perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka Perusahaan akan melakukan pengembangan lingkungan internal yang mendukung penerapan WBS, meliputi antara lain komitmen dan dukungan Manajemen, penetapan kebijakan penerapan WBS, pembentukan fungsi atau unit yang bertugas untuk mengoordinir dan melakukan supervisi atas pengelolaan WBS, pengembagan kompetensi serta pengembangan kebijakankebijakan lain

THE COMMITMENT OF PERUM JAMKRINDO AND EMPLOYEES

The application of the WBS is a manifestation of consistent and sustainable implementation of Good Corporate Governance. The WBS application is expected to encourage the openness and honesty culture and reduce silence culture allowing violations to occur. To support the good implementation of the Company's risk management process, the Company will develop an internal environment that supports the WBS implementation, including, among others, management commitment and support, the determination of WBS implementation policy, establishment of functions or units tasked to coordinate and supervise the WBS management, competencies development, and other supporting policies development. All Perum Jamkrindo personnel have the responsibility and obligation to implement the WBS and

yang mendukung. Seluruh insan Perum Jamkrindo memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menerapkan WBS dan mensosialisasikan kebijakan WBS kepada Karyawan di unit kerja yang dipimpinnya.

socialize the WBS policy to employees in the work units they lead.

SOSIALISASI WBS

Sejak diterbitkannya Peraturan Direksi *Whistleblowing System* (WBS) No: 04/Per-Dir/IV/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* (WBS) SPI melakukan sosialisasi WBS terhadap *auditee* bersamaan dengan pelaksanaan *general* audit, dengan rincian sebagai berikut:

WBS SOCIALIZATION

Since the issuance of the Board of Directors Regulation on Whistleblowing System (WBS) No: 04 / Per-Dir / IV / 2018 dated April 10, 2018, concerning Guidelines for Whistleblowing System (WBS) Management. The Internal Audit Unit socializes the WBS to the auditee and the general audit, with the details as follows:

No	Tempat Sosialisasi Place of Dissemination	Tanggal Sosialisasi Date of Dissemination	Tim Pelaksana Disseminating Team	Rekap Sosialisasi Dissemination Recap
1.	Kanca Purwakarta Branch Office Purwakarta	29 Januari 2019 January 29, 2019	1. Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1/ Region 1 Section Head) 2. Rinjani Yusni Maharjanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
2	Kanca Sukabumi Branch Office Sukabumi		1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Faoziah Ulfah (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Laila Wijayanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. KUR
3	Kanca Tasikmalaya Branch Office Tasikmalaya		1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Keagenan Kargo / Cargo Agency
4	Kanca Cirebon Branch Office Cirebon		1. Kartono (Kabag PSKA/ Head of PSKA) 2. Asep Ginanjar Cahya Gumilar (Kasie SPI/ Internal Audit Unit Section Chief) 3. Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Mul
5	Kanca Madiun Branch Office Madiun	20 Februari 2019 February 20,2019	1. Kartono (Kabag PSKA/ Head of PSKA) 2. Rinjani Yusni Maharjanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
6	Kanca Malang Branch Office Malang		1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI)/ Internal Audit Unit Staff	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
7	Kanwil VI Surabaya Region VI Office Surabaya		1. Irmatati (Kabag Korporasi dan TI / Head of Corporate and IT Division) 2. Muhammad Ilham (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andreas Theodorus M (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*

No	Tempat Sosialisasi Place of Dissemination	Tanggal Sosialisasi Date of Dissemination	Tim Pelaksana Disseminating Team	Rekap Sosialisasi Dissemination Recap
8	Kanca Kudus Branch Office Kudus	18 Maret 2019 March 18, 2019	1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Muhammad Ilham (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
9	Kanca Pare-Pare Branch Office Pare-Pare	13 Maret 2019 March 13, 2019	1. Irmatati (Kabag Korporasi dan TI / Head of Corporate and IT Division) 2. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Aldhy Haryono Fachrial (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
10.	Kanca Batam Branch Office Batam	18 Maret 2019 March 18, 2019	1. Kartono (Kabag PSKA / Head of PSKA) 2. Laurdes Sinurat (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Rinjani Yusni Maharjanti(Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
11.	Kanwil I Medan Region I Office Medan	14 Maret 2019 March 14, 2019	1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee 4. *Surety Bond*
12.	Kanca Balikpapan Branch Office Balikpapan	13 Maret 2019 March 13, 2019	1. Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1/ Region 1 Section Head) 2. Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andreas Theodorus M (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
13.	Kanca Pekalongan Branch Office Pekalongan	22 Maret 2019 March 22, 2019	1. Kartono (Kabag PSKA/ Head of PSKA) 2. Faoziah Ulfah (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Laila Wijayanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
14.	Kanca Kediri Branch Office Kediri	28 Maret 2019 March 28, 2019	1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andik Sugiarto (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. KUR
15.	Kanca Bitung Branch Office Bitung	30 Maret 2019 March 30, 2019	1. Irmatati (Kabag Korporasi dan TI / Head of Corporate and IT Division) 2. Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andreas Theodorus M (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
16.	Kanca Solo Branch Office Solo	1 April 2019 April 1, 2019	1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Muhammad Ilham (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*

No	Tempat Sosialisasi Place of Dissemination	Tanggal Sosialisasi Date of Dissemination	Tim Pelaksana Disseminating Team	Rekap Sosialisasi Dissemination Recap
17.	Kanca Purwokerto Branch Office Purwokerto	26 April 2019 April 26, 2019	1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Rinjani Yusni Maharjanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Laila Wijayanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
18.	Kanca Sumbawa Besar Branch Office Sumbawa Besar	29 April 2019 April 29, 2019	1. Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1/ Region 1 Section Head) 2. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
19.	Kanca Banyuwangi Branch Office Banyuwangi	26 April 2019 April 26, 2019	1. Sinatria Gaza Lovendra (Kabag Prohire/ Head of Prohire) 2. Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andreas Theodorus M (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
20.	Kanca Ambon Branch Office Ambon	30 April 2019 April 30, 2019	1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 2. *Surety Bond*
21.	Kanca Aceh Branch Office Aceh	10 Juli 2019 July 10, 2019	1. Irmatati (Kabag Korporasi dan TI / Head of Corporate and IT Division) 2. Rinjani Yusni Maharjanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Laila Wijayanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
22.	Kanca Mataram Branch Office Mataram	11 Juli 2019 July 11, 2019	1. Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1/ Region 1 Section Head) 2. Laurdes Sinurat (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
23.	Kanca Bandar Lampung Branch Office Bandar Lampung		1. Sinatria Gaza Lovendra (*Prohire*) 2. Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Andik Sugiarto (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kebijakan Akuntansi / the Board of Directors' Accounting Policy
24.	Kanca Palopo Branch Office Palopo	07 Juli 2019 July 07, 2019	1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Andreas Theodorus M (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Aldhy Haryono Fachrial (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
25.	Kanca Tarakan Branch Office Tarakan	12 Juli 2019 July 12, 2019	1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Ilham (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee

No	Tempat Sosialisasi Place of Dissemination	Tanggal Sosialisasi Date of Dissemination	Tim Pelaksana Disseminating Team	Rekap Sosialisasi Dissemination Recap
26.	Kanca Sorong Branch Office Sorong	29 Juli 2019 July 29, 2019	1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
27.	Kanca Balige Branch Office Balige	30 juli 2019 July 30, 2019	1. Irmatati (Kabag Korporasi dan TI / Head of Corporate and IT Division) 2. Asep Ginanjar Cahya Gumilar (Kasie SPI / Internal Audit Unit Section Chief) 3. Andreas Theodorus M (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
28.	Kanca Semarang Branch Office Semarang	02 Agustus 2019 August 02, 2019	1. Kartono (Kabag PSKA / Head of PSKA) 2. Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
29.	Kanca Palu Branch Office Palu		1. Sinatria Gaza Lovendra (*Prohire*) 2. Rinjani Yusni Maharjanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Ilham (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
30.	Kanca Padang Branch Office Padang		1. Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1/ Region 1 Section Head) 2. Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Laurdes Sinurat (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Andik Sugiarto (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
31.	Kanca Gorontalo Branch Office Gorontalo	07 Agustus 2019 August 07, 2019	1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Aldhy Haryono Fachrial (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Laila Wijayanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority
32.	Kanwil II – Palembang Region II Office Palembang	22 Agustus 2019 August 22, 2019	1. Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1/ Region 1 Section Head) 2. Asep Ginanjar Cahya Gumilar (Kasie SPI / Internal Audit Unit Section Chief) 3. Laurdes Sinurat (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
33.	Kanwil VII – Denpasar Region VII Office Denpasar		1. Kartono (Kabag PSKA / Head of PSKA) 2. Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee

No	Tempat Sosialisasi Place of Dissemination	Tanggal Sosialisasi Date of Dissemination	Tim Pelaksana Disseminating Team	Rekap Sosialisasi Dissemination Recap
34.	Kanca Makassar Branch Office Makassar	23 Agustus 2019 August 23, 2019	1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andreas Theodorus M (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Andik Sugiarto (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Pengaturan Komite Penjaminan / Guarantee Committee Arrangements
35.	Kanca Yogyakarta Branch Office Yogyakarta	30 Agustus 2019 August 30, 2019	1. Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1/ Region 1 Section Head) 2. Rinjani Yusni Maharjanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Ilham (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Laila Wijayanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
36.	Kanca Serang Branch Office Serang	12 September 2019 September 12, 2019	1. Kartono (Kabag PSKA / Head of PSKA) 2. Emmerisa (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
37.	Kanca Kendari Branch Office Kendari		1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
38.	Kanca Manado Branch Office Manado	13 September 2019 September 13, 2019	1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andreas Theodorus M (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Laurdes Sinurat (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
39.	Kanca Pangkal Pinang Branch Office Pangkal Pinang	19 September 2019 September 19, 2019	1. Irmatati (Kabag Korporasi dan TI / Head of Corporate and IT Division) 2. Aldhy Haryono Fachrial (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Ilham (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
40.	Kanca Bandung Branch Office Bandung	24 September 2019 September 24, 2019	1. Sinatria Gaza Lovendra (Kabag *Prohire* / Head of Prohire) 2. Rinjani Yusni Maharjanti (Staf SPI) 3. Andik Sugiarto (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Igo Cahyono (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee

No	Tempat Sosialisasi Place of Dissemination	Tanggal Sosialisasi Date of Dissemination	Tim Pelaksana Disseminating Team	Rekap Sosialisasi Dissemination Recap
41.	Kanca Kupang Branch Office Kupang	04 Oktober 2019 October 04, 2019	1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andreas Theodorus M (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan/ the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
42.	Kanca Jayapura Branch Office Jayapura		1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
43.	Kanca Tanjung Pinang Branch Office Tanjung Pinang		1. Irmatati (Kabag Korporasi dan TI / Head of Corporate and IT Division) 2. Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Laurdes Sinurat (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
44.	Kanca Tangerang Branch Office Tangerang	10 Oktober 2019 October 10, 2019	1. Sinatria Gaza Lovendra (Kabag *Prohire* / Head of Prohire) 2. Rinjani Yusni Maharjanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Emmerisa B. Sembiring (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perhitungan Klaim / Claim Calculation
45.	Kanca Manokwari Branch Office Manokwari	12 Oktober 2019 October 12, 2019	1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Aldhy Haryono Fachrial (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Ilham (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. *Surety Bond*
46.	Kanca Surabaya Branch Office Surabaya	18 Oktober 2019 October 18, 2019	1. Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1/ Region 1 Section Head) 2. Andik Sugiarto (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Laila Wijayanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority
47.	Kanca Pekanbaru Branch Office Pekanbaru	25 Oktober 2019 October 25, 2019	1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Laurdes Sinurat (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
48.	Kanca Denpasar Branch Office Denpasar		1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Andreas Theodorus M (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee

No	Tempat Sosialisasi Place of Dissemination	Tanggal Sosialisasi Date of Dissemination	Tim Pelaksana Disseminating Team	Rekap Sosialisasi Dissemination Recap
49.	Kanca Palangkaraya Branch Office Palangkaraya	06 November 2019 November 06, 2019	1. Sinatria Gaza Lovendra (Kabag *Prohire* / Head of Prohire) 2. Rinjani Yusni Maharjanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
50.	Kanca Medan Branch Office Medan	08 November 2019 November 08, 2019	1. Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1/ Region 1 Section Head) 2. Emmerisa B. Sembiring (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Laurdes Sinurat (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
51.	Kanca Samarinda Branch Office Samarinda	08 November 2019 November 08, 2019	1. Irmatati (Kabag Korporasi dan TI / Head of Corporate and IT Division) 2. Asep Ginanjar Cahya Gumilar (Kasie SPI / Internal Audit Unit Section Chief) 3. Andik Sugiarto (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Laila Wijayanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Supply Chain*
52.	Kanca Banjarmasin Branch Office Banjarmasin	15 November 2019 November 15, 2019	1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Arif Syachroni (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority
53.	Kanwil Banjarmasin Region Office Banjarmasin		1. Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ Region 2 Section Head) 2. Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	
54.	Kanca Palembang Branch Office Palembang	22 November 2019 November 22, 2019	1. Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ Region 3 Section Head) 2. Aldhy Haryono Fachrial (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Muhammad Ilham (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Andreas Theodorus M (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee
55.	Kanca Pontianak Branch Office Pontianak	29 November 2019 November 29, 2019	1. Irmatati (Kabag Korporasi dan TI / Head of Corporate and IT Division) 2. Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 4. Laila Wijayanti (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. *Surety Bond*
56.	Kanca Jambi Branch Office Jambi		1. Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1 Region 1 Section Head) 2. Emmerisa B. Sembiring (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Laurdes Sinurat (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority 3. Kontra Bank Garansi / Cons of a Bank Guarantee

No	Tempat Sosialisasi Place of Dissemination	Tanggal Sosialisasi Date of Dissemination	Tim Pelaksana Disseminating Team	Rekap Sosialisasi Dissemination Recap
57.	Kanwil Semarang Region Office Semarang	23 Desember 2019 December 23, 2019	1. Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1 Region 1 Section Head) 2. Aldhy Haryono Fachrial (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Laurdes Sinurat (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority
58.	Kanwil Semarang Region Office Semarang	27 Desember 2019 December 27, 2019	1. Irmatati (Kabag Korporasi dan TI / Head of Corporate and IT Division) 2. Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff) 3. Andik Sugiarto (Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff)	1. WBS 2. Perdir Kewenangan / the Board of Directors' Authority

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Perlindungan kepada pelapor tindak pelanggaran pada prinsipnya adalah pemenuhan hak dan rasa aman kepada pelapor dan atau keluarga pelapor terkait dengan kemungkinan ancaman/tindakan yang dihadapinya akibat penyampaian/pengungkapan laporan pelanggaran. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di Perusahaan.

1. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya
2. Menjamin perlindungan segala bentuk ancaman, intimidasi ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaannya pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
3. Memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan yaitu:
   a. Pemecatan yang tidak adil;
   b. Penundaan kenaikan pangkat atau penurunan jabatan;
   c. Penundaan kenaikan gaji berkala dan atau tunjangan;
   d. Pengenaan sanksi baik langsung maupun tidak langsung;
   e. Tindakan fisik seperti pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
   f. Intimidasi, pemaksaan atau menjadi korban;
   g. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

Perlindungan terhadap pelapor pelanggaran dilaksanakan apabila pelaporan pelanggaran menyampaikan pengungkapan dengan memenuhi kriteria berikut:

1. Beriktikad baik berdasarkan dorongan moral dan etika serta tidak mengharapkan imbalan materi dan atau

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

The protection of whistleblowers, in principle, is the fulfillment of rights and security to the whistleblowers and/or the family of the whistleblowers related to the possibility of the threats/actions they face as a result of submitting/disclosing violation reports. Protection is given by taking into account the confidentiality principle and related provisions that apply to the Company.

1. The confidentiality of the identity of the whistleblowers is guaranteed
2. The Company ensures the protection of all forms of threats, intimidation, or unpleasant actions from any party as long as the whistleblowers keep the violations reported's confidentiality to any party.
3. Protection against adverse treatment, namely:
   a. Unfair dismissal;
   b. Postponement of promotion or demotion;
   c. Postponement of periodic salary increases and/or allowances;
   d. Direct and indirect sanction imposes;
   e. Physical actions such as harassment or all forms of discrimination;
   f. Intimidation, coercion, or being a victim;
   g. An adverse record in his personal data file (personal file record).

Protection against whistleblowers is carried out when violation reporting submits disclosure by meeting the following criteria:

1. Good faith based on moral and ethical encouragement and not expecting material rewards and or popularity;

popularitas;

2. Informasi dan atau pelanggaran yang disampaikan adalah yang telah terjadi dan dapat dipercaya;
3. Hal-hal yang terjadi sesuai dengan informasi dan atau pelanggaran yang disampaikan/dilaporkan dan dapat dipercaya.

Pemberian perlindungan kepada pelapor dapat ditolak atau dihentikan apabila terbukti bahwa pelapor tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas diri dan laporannya serta apabila dikemudian hari terbukti bahwa laporan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor ternyata palsu/fitnah atau mempunyai tujuan yang menyimpang.

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

1. Semua pelanggaran yang dilaporkan dan diversifikasi ditangani dengan baik.
2. Pelanggaran yang berulang dan sistemik dilaporkan kepada pejabat terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan.

2. Information and or violations submitted are those that have occurred and can be trusted;
3. The things that occur are according to the information and/or violations submitted/reported and can be trusted.

Provision of protection to the whistleblowers can be rejected or stopped if it is proven that the whistleblowers do not carry out his/her obligations in maintaining the confidentiality of his identity and report and if it is later proven that the violation report submitted by whistleblowers turns out to be false/defamatory, or has a deviant purpose.

THE MECHANISM FOR THE SUBMISSION OF VIOLATION REPORT

1. All reported violations and diversifications are handled properly.
2. Repeated and systemic violations are reported to relevant officials who have the authority to make improvements.

Bila Pelanggaran dilakukan Oleh: If the violation conducted by	Maka Laporan Pelanggaran diserahkan ke: The violation report submitted to	Penanganan Lebih Lanjut oleh: Follow up handled by
Karyawan / Employees	Direktur Utama President Director	Tim Pengelola WBS WBS Management Team
Personel Tim Pengelola WBS Personnel of WBS Management Team	Direktur Utama President Director	Direksi Investigator Auditor Eksternal yang independent Board of Directors, Investigator, Independent External Auditor
Anggota Direksi Member of Board of Directors	Dewan Pengawas Board of Supervisor Council	Direksi Investigator Auditor Eksternal yang independent Board of Directors, Investigator, Independent External Auditor
Anggota Dewan Pengawas dan organ Pendukungnya Member of Board of Supervisor Council and Suppoting Organs	Direktur Utama President Director	Direksi Investigator Auditor Eksternal yang independent Board of Directors, Investigator, Independent External Auditor
Anggota Dewan Pengawas, Organ Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan Karyawan Member of Board of Supervisor Council, Board of Supervisor Council's Suppoting Organs, Member of Board of Directors and Employees	Tidak dapat diselesaikan secara internal Cannot be resolved internally	Penegak hukum yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau penyidik. Authorized law enforcement agencies such as the Police, Public Prosecution Service, Corruption Eradication Commission (KPK), or investigators.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Dalam rangka mengelola pelaksanaan pelaporan pelanggaran di Perusahaan, Perum Jamkrindo membentuk Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) berdasarkan Keputusan Direksi No: 33/Kep-Dir/III/2015 tanggal 11 Maret 2015. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) sebagai berikut:

1. Tugas:
   a. Mengelola Pelaksanaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).
   b. Mengoordinasikan penanganan tindaklanjut atas penerimaan pelaporan pelanggaran, menyeleksi dan memproses laporan pelanggaran tanpa membuka identitas pelapor.
   c. Melakukan investigasi terhadap substansi laporan pelanggaran, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan terjadinya pelanggaran.
   d. Menyampaikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan kepada Direktur Utama guna mendapat keputusan.
   e. Mengoordinasikan pemberian perlindungan terhadap pelapor dengan unit terkait.
   f. Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk.
   g. Melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap keefektifan pelaksanaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).
2. Tanggung jawab:
   a. Melaksanakan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan Perusahaan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan pelapor.
   b. Memberikan usulan pengelolaan laporan pelanggaran kepada Direktur Utama.
   c. Menetapkan tindak lanjut atas laporan khususnya laporan yang putusan tindak lanjutnya berada pada kewenangannya.
   d. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

THE TEAM THAT MANAGE THE COMPLAINTS

To manage the implementation of violation reporting in the Company, Perum Jamkrindo forms a Whistleblowing System (WBS) Management Team based on the Board of Directors Decree Nor: 33 / Kep-Dir / III / 2015 dated March 11, 2015. The duties and responsibilities of the WBS Management Team are as follow:

1. Duties:
   a. Manage the Whistleblowing System.
   b. Coordinate the handling of follow-up on violation reporting, select and process reports of violations without disclosing the whistleblowers' identity.
   c. Investigate the substance of the violation report, to find and collect the evidence needed to ensure the reported violations occur.
   d. Submit recommendations for sanctions for violations committed to the President Director to make a decision.
   e. Coordinate the provision of protection for the whistleblower with related units.
   f. Monitor the handling of the settlement of incoming reports.
   g. Evaluate and improve actions on the effectiveness of the Whistleblowing System.
2. Responsibilities:
   a. Carry out a whistleblower protection program according to Company policies, especially on aspects of confidentiality and guarantee of the whistleblower's security.
   b. Provide recommendations on violation report management to President Director.
   c. Determine follow-up on reports, especially reports for which follow-up decisions are within its authority.
   d. Perform other actions needed in the context of the Whistleblowing System implementation.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN
THE TEAM THAT MANAGE THE COMPLAINTS

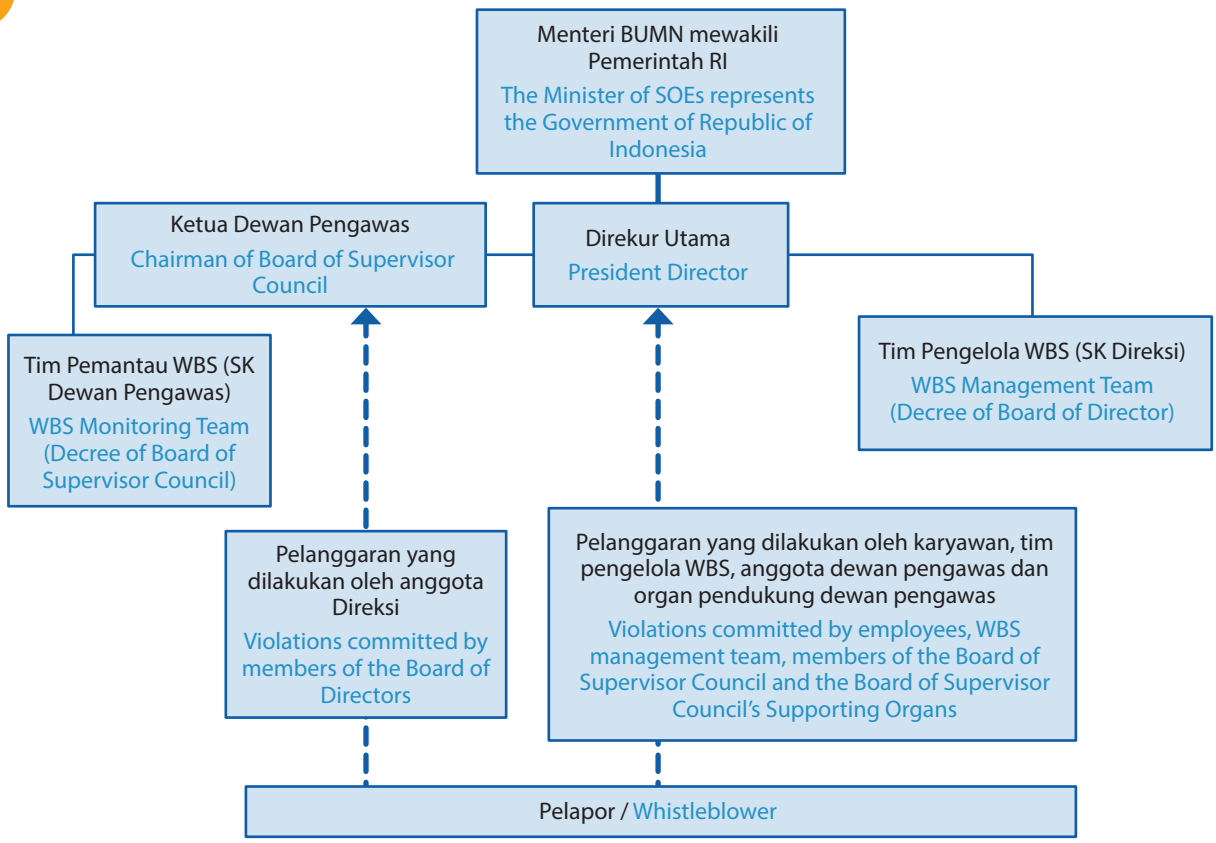

Alamat / Address :
Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia
Gedung Jamkrindo Lt.1 - Jl. Angkasa Blok B-9 Kav 6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Telp. +6221 6540335 | Fax. +6221 6540344, 6540348
Email: timpengelolaWBS.bod@jamkrindo.com timpengelolaWBS.boc@jamkrindo.com

SALURAN PENGADUAN WBS

Perusahaan menyediakan sarana pelaporan untuk menyampaikan pengaduan pelanggaran melalui media dibawa ini:

a. Surat tertulis : PO BOX 107213 JKP 10610
b. SMS dan Whatsapp : +62811 1717 123
c. Email : wbs@jamkrindo.co.id

Pelaporan pengaduan pelanggaran sebaiknya dilengkapi informasi awal/bukti/dokumen yang membuat indikasi awal yang dapat dipertanggung jawabkan dan memberikan petunjuk mengenai pelanggaran yang terjadi sehingga dapat dijadikan bahan tindak lanjut.

Laporan pengaduan pelanggaran sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

a. identitas pelapor (tidak wajib);
b. bentuk pelanggaran atau penyimpangan;

WBS COMPLAINTS CHANNEL

The Company provides a means of reporting to submit complaints of violations through the following media:

a. Written letter: PO BOX 107213 JKP 10610
b. SMS and Whatsapp: +62811 1717 123
c. Email: wbs@jamkrindo.co.id

Reporting of violation complaints should be accompanied by initial information/evidence/documents that provide accountability of the initial indication and provide guidance on violations that occur so that they can be used as follow-up material.

The report on violation complaints contains at least the following information:

a. identity of the whistleblower (not obligatory);
b. form of violation or deviation;

c. kapan dan di mana terjadinya (lokasi, kejadian/transaksi);
d. siapa saja yang diduga (nama, jabatan/unit kerja);
e. kerugian (materil dan non materil) akibat pelanggaran atau penyimpangan; dan
f. ada tidaknya pihak yang mengetahui pelanggaran atas penyimpangan tersebut.

Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran dengan sarana yang telah ditetapkan dalam mekanisme WBS dapat memperoleh informasi progres penanganan tindak lanjut atas informasi pelanggaran yang disampaikan dalam WBS.

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

Mekanisme penanganan pelaporan atau pengaduan melalui sistem WBS adalah seperti skema di bawah ini:

c. the time and place of violations (location, incident/transaction);
d. violation suspects (name, position/work unit);
e. material and non-material loss due to violations or deviation; and
f. whether or not there are parties who know about the violation or deviation.

The whistleblower can submit the violation report with the facilities set out in the WBS mechanism can obtain information on the follow-up handling progress of the violation information submitted in the WBS.

MECHANISM OF HANDLING COMPLAINT

The mechanism for handling reports or complaints through the WBS system can be seen in the scheme below:

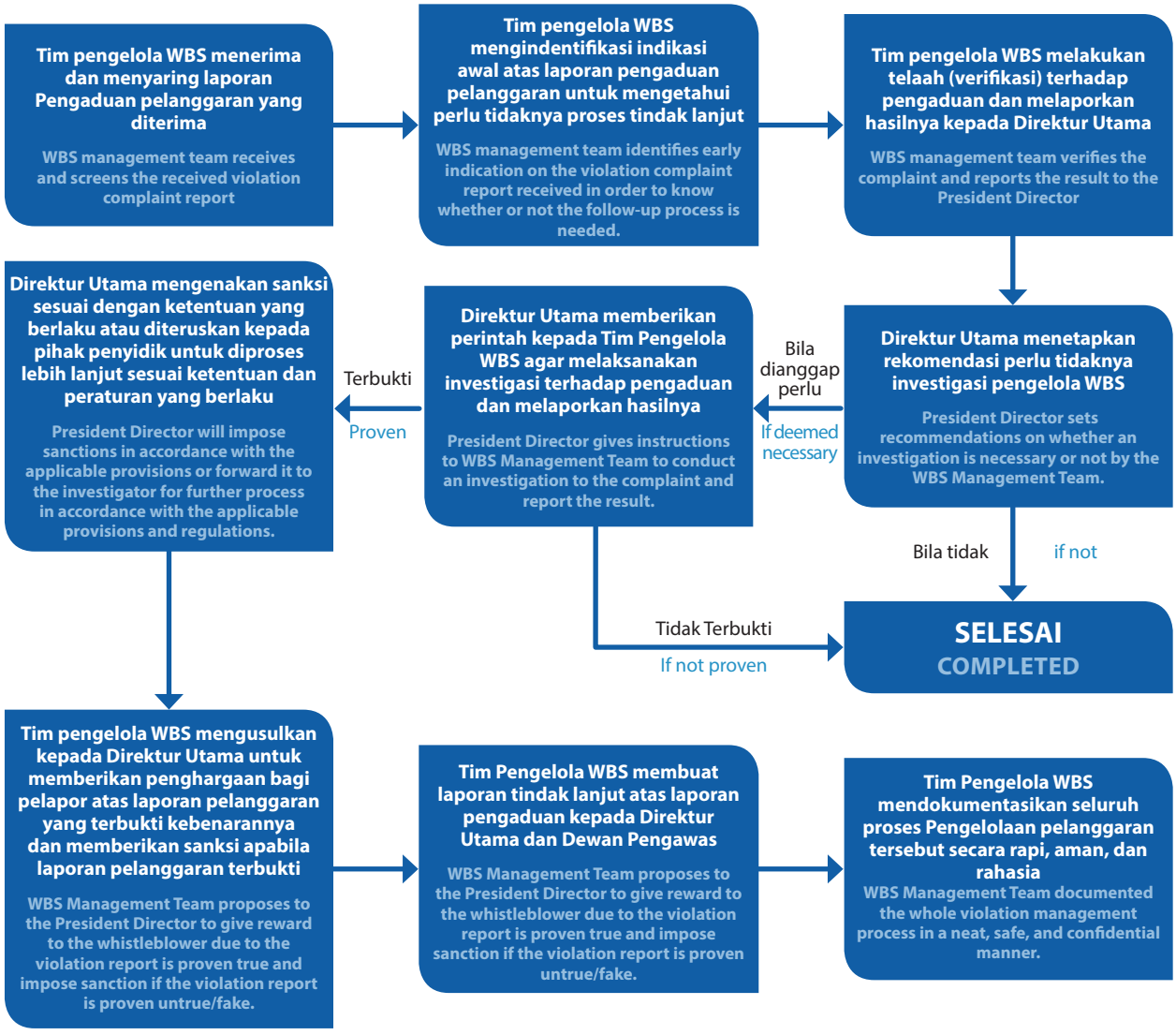

PROSES PENANGANAN DAN DATA PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2018-2019

Berdasarkan laporan pengaduan karyawan Perusahaan kepada Tim Pengelola WBS, terdapat 1 (satu) pengaduan di tahun 2019 dan 2 (dua) pengaduan pelanggaran di tahun 2018

HANDLING PROCESS AND DATA ON VIOLATION REPORT MANAGEMENT IN 2018-2019

Based on reports from the Company's employees to the WBS Management Team, there were 1 (one) complaint in 2019 and 2 (two) complaints in 2018.

Tahun Year	Nomor Register Register Number	Tanggal Penerimaan Laporan Report Receipt Date	Tempat Kejadian/Unit Kerja Place of Incident / Work Unit	Pihak Penerima Laporan Report Recipient	Status Penyelesaian Settlement Status
2018	E01	23 Oktober 2018 October 23, 2018	Kantor Cabang Banjarmasin Banjarmasin Branch Office	TIM WBS WBS TEAM	Selesai Completed
	E02	24 Oktober 2018 October 24, 2018	Kantor Cabang Palu Palu Branch Office		Selesai Completed
2019	E01	28 Oktober 2019 October 28, 2019	Kantor Cabang Makassar Makassar Branch Office		Selesai Completed

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Dunia usaha, khususnya pada bidang penjaminan selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Terlebih bisnis ini merupakan salah satu sektor penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan target pasar Usaha Mikro Kecil Menegah dan Koperasi. Atas dasar tersebut, dibutuhkan beragam kompetensi dan keahlian serta pengalaman di level manajemen Perusahaan khususnya pada Dewan Pengawas maupun Direksi Perusahaan agar senantiasa dapat menjawab tantangan dunia usaha dengan kebijakan-kebijakan strategisnya.

Perusahaan menilai bahwa keberagaman komposisi sangat diperlukan, meskipun regulasi dan Peraturan Perundang-undangan terkait belum mengatur hal tersebut. Keberagaman Komposisi pada Dewan Pengawas dan Direksi yang terdiri dari kualifikasi akademik, keahlian, pengalaman serta gender dapat memberikan berbagai macam sudut pandang terkait strategi pengelolaan Perusahaan agar menjadi lebih baik dan berkualitas.

Oleh karena itu, pelaksanaan tata kelola perusahaan dirancang untuk dapat menciptakan iklim yang mendorong adanya partisipasi konkret seluruh pemangku kepentingan serta adanya keberagaman dalam susunan komposisi Dewan Pengawas maupun Direksi. Keberagaman ini diwujudkan melalui pembentukan komposisi Dewan Pengawas maupun Direksi yang memenuhi berbagai aspek yang diperlukanbaik dari segi kualifikasi akademis, keterampilan, usia serta atas dasar prinsip anti diskriminasi. Berikut keberagaman komposisi yang dimiliki oleh masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan.

DIVERSITY OF THE COMPOSITION OF THE BOARD OF SUPERVISOR COUNCIL AND BOARD OF DIRECTORS

The business world, especially in the guarantee sector, is always experiencing fairly dynamic development. Moreover, this business is an important sector in driving the growth of the national economy with the target market of Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives. On this basis, it requires a variety of competencies and expertise and experience at the Company's management, especially the Board of Supervisor Council and Board of Directors of the Company, so that they can always answer the challenges of the business world with their strategic policies.

The Company considers that the diversity of compositions is necessary, even though it has not been regulated in the related laws and regulations. The diversity of the composition of the Board of Supervisor Council and the Board of Directors consisting of the diversity in academic qualifications, expertise, experience, and gender, which can provide a variety of perspectives related to the Company's management strategy to become better in quality.

Therefore, the corporate governance implementation is designed to create a climate that encourages all stakeholders' concrete participation and the diversity in the Board of Supervisor Council and Board of Director's compositions. This diversity is realized through the formation of a composition of the Supervisory Board and the Board of Directors that meet the various aspects needed both in terms of academic qualifications, skills, age, and based on anti-discrimination principles. The following is the diversity of the composition of each member of the Company's Board of Supervisor Council and Board of Directors.

Nama Name	Jabatan Position	Warganegara Citizen	Kualifikasi Akademik Academic Qualification	Usia Age	*Gender*
Dewan Pengawas / Board of Supervisor Council					
Sri Mulyanto	Ketua Dewan Pengawas merangkap Dewan Pengawas Independen Chairman of Board of Supervisor Council, concurrently Independent Board of Supervisor Council	Indonesia	Magister Kebijakan Ekonomi Master of Economic Policy	62	Laki-laki Male
Ari Wahyuni	Anggota Dewan Pengawas Member of Board of Supervisor Council	Indonesia		54	Perempuan Female
Noor Ida Khomsiyati	Anggota Dewan Pengawas Member of Board of Supervisor Council	Indonesia	Magister Manajemen Master of Management	48	Perempuan Female
Diah Natalisa	Anggota Dewan Pengawas Member of Board of Supervisor Council	Indonesia	Profesor Ilmu Ekonomi Professor of Economis Science	57	Perempuan Female
M. Muchlas Rowi	Dewan Pengawas Independen Independent Board of Supervisor Council	Indonesia		48	Laki-laki Male
Direksi / Board of Directors					
Randi Anto	Direktur Utama President Director	Indonesia	Magister Manajemen Perbankan Master of Banking Management	59	Laki-laki Male
Amin Masudi	Direktur Bisnis Penjaminan Director of Business of Guarantee	Indonesia	Magister Manajemen Agribisnis Master of Agribusiness Management	47	Laki-laki Male
Kadar Wisnuwarman	Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Networking	Indonesia	Magister Manajemen Master of Management	49	Laki-laki Male
Sulis Usdoko	Direktur MSDM, Umum Dan Kepatuhan Director of HRM< General Affairs and Compliance	Indonesia	Magister Ekonomi Manajemen Master of Management Economics	60	Laki-laki Male
I. Rusdonobanu	Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko Director of Finance, Investment, and Risk Management	Indonesia	*Master of Science*	61	Laki-laki Male

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Sebagai BUMN yang dimiliki oleh Negara melalui Pemerintah Indonesia, Perusahaan wajib mentaati peraturan perundangundangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mantaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaanya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

STATE OFFICIALS' WEALTH REPORT

Basic Principles of State Officials Wealth Reports

As an SOE owned by the State through the Government of Indonesia, the Company must comply with the prevailing laws and regulations. One form of legislation that is based on the spirit of eradicating corruption and internal deviations is the obligation of the State Officials Wealth Reports (LHKPN).

LHKPN is a list of all State Officials' Assets outlined in the LHKPN form stipulated by the Corruption Eradication Commission (KPK) as stipulated in KPK Decree No. KEP 07 / KPK / 02/2005 concerning Procedures for Registration, Inspection, and Announcement of State Officials Wealth Reports. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission confirms the Corruption Eradication Commission's authority to implement measures or efforts to prevent corruption, among others, through registration and examination of State Officials Wealth Reports. Besides, Law No. 28 of 1999 concerning State Officials who are Clean and Free of Corruption, Collusion, and Nepotism, mandate that each state officials must report and announce his/her Assets before and after assuming office and are willing to his/her wealth be examined before and after taking office. In the Law No. 28/1999 Article 2 paragraph (7) and its explanation, it is described that the Board of Commissioners, Board of Directors, and other structural officials in State-Owned Enterprises (BUMN) and Regional-Owned Enterprises (BUMD) are included in state officials with strategic functions.

The LHKPN examination submitted to the KPK aims to realize State Officials who adhere to the general principles, free from corruption, collusion, and nepotism, as well as other despicable acts. Each State Official is required to report its wealth through the LHKPN form provided by the KPK to be filled honestly, correctly, and completely, so that the Corruption Eradication Commission can analyze, evaluate, and assess the total amount, type and value of reported wealth, correctly, quickly, precisely, accurately and accountability.

Dasar Hukum dan Peraturan dalam Menerapkan LHKPN di Perusahaan Dalam menerapkan LHKPN, Perusahaan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan. Dasar hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, dan perubahannya.
4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

Transparansi LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2019

Di bawah ini disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perusahaan di tahun 2019:

Legal and Regulatory Basis in Implementing LHKPN in the Company In implementing LHKPN, the Company considers several legal and regulatory bases as a foundation for the perspective of applying LHKPN in the Company's environment. The legal bases are:

1. Law No. 28 of 1999 concerning State Officials who are Clean and Free of Corruption, Collusion, and Nepotism.
2. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.
3. Regulation of the Minister State-Owned Enterprises No. PER-01 / BUMN / 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, and its amendment.
4. Decree of Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16 / S.MBU /2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of GCG Implementation.

Transparency of the Company's State Officials Wealth Report in 2019

Below was the transparency of the submission of the Company's State Officials Wealth Report in 2019:

PENYAMPAIAN LHKPN PEJABAT PERUM JAMKRINDO TAHUN 2019
DISCLOSURE OF SUBMISSION OF STATE OFFICIALS WEALTH REPORT OF OFFICIALS OF PERUM JAMKRINDO IN 2019

Pejabat Officials	Jumlah Wajib Lapor Number of Mandatory Reporters	Jumlah yang Telah Melaporkan Officials	
		Jumlah Total	%
Dewan Pengawas / Board of Supervisor Council	3	3	100
Direksi / Board of Directors	5	5	100
Organ Pendukung Dewan Pengawas Supporting Organs of Board of Supervisor Council	-	-	-
Manajer atau Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi Managers or Officials One Level Under the Board of Directors	93	93	100
JUMLAH / TOTAL	**101**	**101**	**100**

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap Penjaminan Syariah yang diberikan Perusahaan, dan untuk memenuhi ketentuan peraturan mengenai syariah, Perusahaan telah membentuk dan mengangkat Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Keputusan Direksi No. 98/Kep-Dir/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

BOARD OF SHARIA SUPERVISOR COUNCIL

To optimize the supervisory function of the Sharia Guarantee provided by the Company, and to fulfill the regulatory requirements regarding sharia, the Company has established and appointed a Board of Sharia Supervisor Council based on Decree of the Board of Directors No. 98 / Kep-Dir / VII / 2013 dated July 24, 2013, concerning the Appointment of Board of Sharia Supervisor Council of Perum Jamkrindo.

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah berpedoman pada Keputusan Direksi No. 123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 dan Keputusan Direksi No. 124/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Selain melegalisir pengangkatan Dewan Pengawas Syariah, keputusan Direksi tersebut mencakup uraian tentang tugas dan tanggung jawab.

Guidelines of Duties Implementation

The duties implementation of the Board of Sharia Supervisor Council are based on the Decree of the Board of Directors No. 123 / Kep-Dir / X / 2016 dated October 14, 2016, and Decree of the Board of Directors No. 124 / Kep-Dir / X / 2016 dated October 14, 2016, concerning the Appointment of Board of Sharia Supervisor Council of Perum Jamkrindo. In addition to legalizing the Board of Sharia Supervisor Council appointment, the Board of Directors' decision includes a description of the duties and responsibilities.

Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

Susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan di sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Membership Structure of the Board of Sharia Supervisor Council

The composition of the Company's Board of Sharia Supervisor Council throughout 2019 was as follows:

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Awal Jabatan Beginning of Term of Office	Masa Akhir Jabatan End of Term of Office
Ketua Chairman	Hasanudin	Keputusan Direksi No. 123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 Board of Directors Decree No. 123 / Kep-Dir / X / 2016 dated October 14, 2016	1 Juli 2016 July 1, 2016	30 Juni 2019 June 30, 2019
Anggota Member	Muhammad Syakir Sula	Keputusan Direksi No. 123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 Board of Directors Decree No. 123 / Kep-Dir / X / 2016 dated October 14, 2016	1 Juli 2016 July 1, 2016	30 Juni 2019 June 30, 2019

*Profil singkat masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas Syariah, dalam bab Profil Perusahaan
A brief profile of each member of the Board of Sharia Supervisor Council can be seen in the Profile section of the Board of Sharia Supervisor Council, in the Company Profile Chapter

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah atas semua produk, operasional dan kebijakan Perusahaan.
- Memberikan nasehat, saran atau pendapat kepada Direksi mengenai kesesuaian semua produk, operasional dan kebijakan Perusahaan dengan prinsip-prinsip syariah.
- Memastikan semua produk, operasional dan kebijakan Perusahaan telah sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).
- Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan yang berkaitan dengan produk syariah pada Perusahaan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, serta memberikan tembusan kepada Direksi.
- Menghadiri pertemuan yang disepakati antara Dewan Pengawas Syariah dengan Direksi sekurang-kurangnya

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Company's Board of Sharia Supervisor Council are as follows:

- Supervise and ensure the compliance of all Company's products, operations, and policies with sharia principles.
- Provide advice, suggestions, or opinions to the Board of Directors regarding the suitability of all Company's products, operations, and policies with sharia principles.
- Ensure that all Company's products, operations, and policies are according to the fatwas of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (MUI DSN).
- Report business activities and developments relating to the Company's sharia products to the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (MUI DSN), at least once a year, and provide copies to the Board of Directors.
- Attend an agreed meeting between the Board of Sharia Supervisor Council and the Board of Directors at least

sekali dalam 1 (satu) bulan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan di luar jadwal yang sudah ditentukan apabila diminta oleh Direksi.

- Memberikan dukungan secara maksimal demi tercapainya kemajuan Perusahaan khususnya Unit Kerja Penjaminan Syariah.

once a month according to the agreed-upon schedule, and at any time if needed outside the specified schedule if requested by the Board of Directors.

- Provide maximum support for the achievement of the Company's progress, especially the Sharia Guarantee Unit.

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Di sepanjang tahun 2019, Dewan Pengawas Syariah menggelar 7 (tujuh) kali. Berikut disampaikan risalah rapat dan tingkat kehadiran Dewan Pengawas Syariah:

Board of Sharia Supervisor Council

In 2019, the Board of Sharia Supervisor Council held 7 (seven) meetings. The following were the minutes of the meeting and the attendance of the Board of Sharia Supervisor Council:

RISALAH RAPAT INTERNAL DEWAN PENGAWAS SYARIAH
MINUTES OF THE BOARD OF SHARIA SUPERVISOR COUNCIL INTERNAL MEETINGS

Tanggal dan Tempat Date and Place	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Number	Peserta Rapat Number	Dewan Pengawas Syariah yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentee Board of Sharia Supervisor Council, and Reason od Absence
9 Januari 2019 January 9, 2019	B.01/DPS/SYR/PSY/I/2019	Kinerja Desk Bisnis Penjaminan Syariah periode Januari – Desember 2018 Sharia Guarantee Business Desk Performance for January - December 2018	1. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA. 2. Yanti Rachmawati 3. Barlianta Jumhari Sigit 4. Ekaprilo Kabulangga Kusumah	Ir. H M. Syakir Sula (Anggota DPS) – tidak hadir karena harus menghadiri seminar. Ir. H M. Syakir Sula (DPS Member) – did not attend because he had to attend the seminar.
16 April 2019 April 16, 2019	B.02/DPS/SYR/PSY/IV/2019	1. Kinerja Desk Bisnis Penjaminan Syariah TW I 2019. Performance of Sharia Guarantee Business Desk Quarter I of 2019. 2. Rencana Kerja Desk Bisnis Penjaminan Syariah Tahun 2019. Work Plan of Sharia Guarantee Business Desk in 2019. 3. Kesesuaian Unit Usaha Syariah pada POJK 1,2, dan 3 Tahun 2017 Conformity of Sharia Business Unit in POJK 1.2, and 3 in 2017	1. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA. 2. Yanti Rachmawati 3. Barlianta Jumhari Sigit 4. Ekaprilo Kabulangga Kusumah	Ir. H M. Syakir Sula (Anggota DPS) – Tidak hadir karena ada jadwal mengajar. Ir. H M. Syakir Sula (DPS Member) - Did not attend because there was a teaching schedule.
25 Juni 2019 July 25, 2019	-	Uji Petik Dewan Pengawas Syariah Perum Jamkrindo atas Kegiatan Operasional Penjaminan Syariah pada Kantor Wilayah V Semarang dan Kantor Cabang Semarang Spotcheck of Perum Jamkrindo's Board of Sharia Supervisor Council at Sharia Guarantee Operational Activity at Semarang Regional Office V and Semarang Branch Office	1. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA. 2. Ir. H. M. Syakir Sula, AAIJ, FIIS 3. Yanti Rachmawati 4. Febri Nico Aulia 5. Wakhyu Hidayatullah 6. Diki Achadiyat	

Tanggal dan Tempat Date and Place	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Number	Peserta Rapat Number	Dewan Pengawas Syariah yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentee Board of Sharia Supervisor Council, and Reason od Absence
24 Juli 2019 July 24, 2019	-	Pembahasan Penerapan Lembaga Keuangan Syariah di Nangroe Aceh Darussalam Discussion on the Application of Sharia Financial Institutions in Nangroe Aceh Darussalam	1. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA. 2. Ir. H. M. Syakir Sula, AAIJ, FIIS 3. Perwakilan Desk Bisnis Penjaminan Syariah 4. Perwakilan Divisi Teknilk & Administrasi Bisnis 5. Perwakilan Divisi Jaringan & Layanan	-
21 November 2019 November 21, 2019	B.03/DPS/SYR/PSY/XI/2019	1. Kinerja Desk Bisnis Penjaminan Syariah Januari s.d. Oktober 2019 Performance of Sharia Guarantee Business Desk January to October 2019 2. Rencana Kerja Desk Bisnis Penjaminan Syariah Tahun 2020. Sharia Guarantee Business Desk Work Plan for 2020. 3. Kesesuaian Tarif IJK Compliance of the IJK Rates with Sharia principles 4. terhadap prinsip Syariah. 5. Pemberlakuan Qanun Aceh Enforcement of the Aceh Qanun	1. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA. 2. Ir. H. M. Syakir Sula, AAIJ, FIIS 3. Perwakilan Desk Bisnis Penjaminan Syariah 4. Perwakilan Divisi Jaringan & Layanan 5. Perwakilan Divisi Perencanaan Strategis 6. Perwakilan Divisi Hukum & Kepatuhan	-
16 Agustus 2019 August 16, 2019	-	Uji Petik Dewan Pengawas Syariah Perum Jamkrindo atas Kegiatan Operasional Penjaminan Syariah pada Kantor Wilayah IV Bandung dan Kantor Cabang Bandung Spotcheck of Board of Sharia Supervisor Council of Perum Jamkrindo on Sharia Guarantee Operational Activities at Regional Office IV of Bandung and Bandung Branch Office	1. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA. 2. Ir. H. M. Syakir Sula, AAIJ, FIIS 3. Dody Novarianto 4. Andry Septianto 5. Hery Surya 6. Andang Projo 7. Fariz Triwahyanda 8. Ekaprilo Kabulangga Kusumah	
19 Desember 2019 December 19, 2019	-	Uji Petik Dewan Pengawas Syariah Perum Jamkrindo atas Kegiatan Operasional Penjaminan Syariah pada Kantor Wilayah VII Denpasar Spotcheck of Board of Sharia Supervisor Council of Perum Jamkrindo on Sharia Guarantee Operational Activities at Regional Office VII of Denpasar	1. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA. 2. Ir. H. M. Syakir Sula, AAIJ, FIIS 3. Yanti Rachmawati 4. Sugiyono 5. Wirda Madjid 6. Rian Widipratomo	-

REKAPITULASI DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM RAPAT
RECAPITULATION AND ATTENDANCE LEVEL OF BOARD OF SHARIA SUPERVISOR COUNCIL AT THE MEETING

Dewan Pengawas Board of Sharia Supervisor Council	Jumlah Wajib Rapat Number of Required Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Total Absence	% Kehadiran % of Attendance
Hasanudin Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of Board of Supervisor Council	4	7	-	175%
Muhammad Syakir Sula Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of Board of Supervisor Council	4	5	2	125%
Rata-rata / Average	**4**	**6**	**2**	**150%**

Kebijakan Remunerasi

Kepada Dewan Pengawas Syariah, Perusahaan memberikan remunerasi sebagai berikut:

Remuneration Policy

To the Board of Sharia Supervisor Council, the Company provides the following remuneration program:

Uraian Description	Ketua DPS Chairman of Board of Supervisor Council	Anggota DPS Member of Board of Supervisor Council
Honorarium	**12.650.000**	**11.385.000**
Tunjangan Hari Raya per tahun (1x Honorarium) Religious Holiday Allowance per year (1 time of honorarium)	**12.650.000**	**11.385.000**

PRAKTIK *BAD GOVERNANCE*

Perusahaan menyadari bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan tidak terlepas dari interaksi secara langsung atau pun tidak langsung dengan masyarakat sekitar area proyek serta lingkungan. Oleh karena itu, praktik *bad corporate governance* senantiasa mengancam dalam kegiatan operasional Perusahaan. Berikut disampaikan praktik *Bad Governance* sesuai dengan kebutuhan:

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Di sepanjang tahun 2019, Perusahaan tidak mendapati adanya laporan dari pihak lain atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan dan perizinan.

BAD GOVERNANCE PRACTICE

The Company realizes that the business activities that are carried out cannot be separated from direct or indirect interactions with the community around the project area and the environment. Therefore, bad corporate governance practices are always threatening in the Company's operational activities. The following are conveyed the Bad Governance Practices according to the need:

Report on the Company Activities that Pollute the Environment

In 2019, the Company found no reports from other parties of the Company's activities that polluted the environment and licensing.

Pihak yang Berperkara Disputing Parties	Pokok Perkara Case Principal	Status Perkara Case Status	Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Pengaruhnya Terhadap Perusahaan Risk faced by the Company and Its Impact on the Company	Tindak Lanjut Follow-ups
-	-	-	-	-

PENGUNGKAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Sebagai bukti kepatuhan Perusahaan atas kewajibannya terhadap pajak, Perusahaan telah berkontribusi pada negara melalui pajak. Total kewajiban pajak pada tahun 2019 adalah sebesar Rp21.438.461.924, yang terdiri dari Pajak Penghasilan tahun 2019 sebesar Rp19.627.372.048 dan Pajak Pertambahan Nilai Rp1.811.089.876. Perum Jaminan Kredit Indonesia telah memenuhi kewajiban membayar PBB sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterima pada tahun 2018 sebesar Rp 667.548.293. Adapun rincian dari kontribusi Perusahaan pada negara melalui pajak tahun 2018, adalah sebagai berikut:

DISCLOSURE OF FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS

As proof of the Company's compliance with its tax obligations, the Company contributed to the country through taxes. Total Tax Liabilities in 2019 amounted to Rp21,438,461,924, consisted of Income Tax in 2019 of Rp19,627,372,048 and Value Added Tax of Rp1,811,089,876. Perum Jaminan Kredit Indonesian has fulfilled the obligation to pay Land and Building Tax according to the Notification of Tax Due (SPPT) received in 2018, amounting to Rp 667,548,293. The details of the Company's contribution to the country through tax in 2019 were as follows:

Kontribusi Kepada Negara	Contribution to the State	2019 (Rp)
Pajak Penghasilan:	Income Tax:	
Pajak Penghasilan pasal 21	Income Tax article 21	Rp7.163.850.206
Pajak Penghasilan pasal 22	Income Tax article 22	Rp41.055.914
Pajak Penghasilan pasal 23	Income Tax article 23	Rp453.036.047
Pajak Penghasilan pasal 25	Income Tax article 25	0
Pajak Penghasilan pasal 26	Income Tax article 26	Rp35.819.520
Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	Income Tax article 4 (2)	Rp540.755.547
Pajak Penghasilan pasal 29	Income Tax article 29	Rp11.392.854.814
Pajak Pertambahan Nilai	Value Added Tax	Rp1.811.089.876
Pajak Bumi dan Bangunan	Land and Building Tax	-
Jumlah Kontribusi Kepada Negara	**Total Contribution to the State**	Rp21.438.461.924

KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN STANDAR AKUNTASI KEUANGAN (SAK)

Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun 2019 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan yang berlaku. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan PSAK 1 (2009) tentang "Penyajian Laporan Keuangan" dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan, dengan hasil opini bahwa Laporan Keuangan Perusahaan "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material."

INCOMPATIBILITY OF PRESENTATION OF ANNUAL REPORTS AND FINANCIAL STATEMENTS WITH APPLICABLE REGULATIONS AND FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SAK)

The Company's Financial Statements for 2019 have been prepared and presented according to the Financial Accounting Standards in Indonesia which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by The Financial Accounting Standards Board - Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK - IAI) and applicable regulations. The financial statements are prepared according to with PSAK 1 (2009) regarding the "Presentation of Financial Statements" and have been audited by the Hertanto, Grace, and Karunawan Public Accounting Firm, with the unqualified opinion that the Company's financial statements "has been presented fairly, in all material respects."

KASUS TERKAIT DENGAN BURUH DAN KARYAWAN

Di sepanjang tahun 2019, Perusahaan tidak terdapat kasus terkait dengan buruh atau karyawan yang dihadapi oleh Perusahaan.

PENGUNGKAPAN SEGMEN OPERASI PADA LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 tentang Segmen Operasi. Sebagai Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk menerapkan PSAK tersebut.

KESESUAIAN BUKU LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN DIGITAL

Perusahaan menyajikan Laporan Tahunan Digital yang disajikan pada situs web Perusahaan sesuai atau sama dengan Laporan Tahunan dalam bentuk buku.

CASES RELATED TO LABOR AND EMPLOYEES

Throughout 2019, there were no cases related to labor or employees faced by the Company.

DISCLOSURE OF OPERATING SEGMENTS IN FINANCIAL STATEMENTS

The Company's Consolidated Financial Statements for the years ended December 31, 2019, and 2018 have not applied the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 5 regarding Operating Segments. As a Public Corporation (Perum), the Company has no obligation to implement the PSAK.

CONFORMITY TO THE ANNUAL REPORT AND DIGITAL ANNUAL REPORT

The Company presents the Digital Annual Report presented on the Company's website according to or the same as the Annual Report in the form of a book.

Jamkrindo

Jamkrindo

Jaminan Kredit Indonesia



LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT
2019



TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

546 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Corporate Social and Environmental Responsibility

549 Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibility Governance

554 Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup
Corporate Social and Environmental Responsibility in The Scope of Environment

556 Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Bidang Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
Corporate Social and Environmental Responsibility in The Scope of Employment, Occupational Health and Safety

557 Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Terkait Dengan Hak Asasi Manusia
Corporate Social and Environmental Responsibilities in The Scope of Human Rights

558 Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Terkait Dengan Operasi Yang Adil
Corporate Social and Environmental Responsibility in The Scope of Fair Operations

559 Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan
Corporate Social and Environmental Responsibilities in The Scope of Social and Community Development

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Corporate Social and Environmental Responsibility

PRINSIP, KEBIJAKAN DAN KOMITMEN PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Perum Jamkrindo menyadari bahwa kehadirannya dalam industri penjaminan kredit tidak sekadar mencari keuntungan (*profit*) sebagaimana entitas bisnis pada umumnya. Di balik itu, keberadaan Perusahaan melekat kewajiban untuk turut serta mengembangkan dan memajukan masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*) di sekitar perusahaan beroperasi. Untuk itu, Perum Jamkrido berkomitmen untuk menerapkan prinsip keberimbangan antara profit, *people* dan *planet*.

Dalam kerangka itulah, Perusahaan melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pelaksanaan PKBL di lingkungan Perum Jamkrindo pada tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Negara BadanUsaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang diundangkan di Jakarta tanggal 20 Juli 2017. Penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jamkrindo juga mengacu kepada Peraturan Direksi No 15/Per-Dir/1/VII/2019 tentang Pedoman Pendelegasian Kewenangan Administrasi dan Kebijakan Perum Jamkrindo.

Ruang lingkup pelaksanaan program PKBL terbagi atas dua program utama. Pertama, pembinaan oleh Perusahaan BUMN terhadap pelaku usaha mikro dan menengah untuk meningkatkan kualitas usahanya melalui program Kemitraan; kedua, kegiatan bantuan langsung maupun tidak langsung yang bersifat pelestarian lingkungan, sosial kemasyarakatan atau penanggulangan bencana dalam program Bina Lingkungan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kedua program utama tersebut sehingga tepat sasaran dan tepat program, melalui Ketetapan Direksi Perum Jamkrindo Nomor:01/KD/1/V/2018 menjadi bagian dari Sekretaris Perusahaan yang berada di Direktorat Utama. Sejalan dengan spirit pembangunan berkelanjutan yang saat ini digelorakan oleh pemerintah, maka PKBL yang diselenggarakan oleh Perum Jamkrindo tidak terbatas pada kegiatan filantropi, namun meningkat pada level *corporate community development*. Dengan demikian, program-program yang ada semaksimal mungkin bisa memberikan kontribusi terhadap kemandirian

PRINCIPLES, POLICIES, AND COMMITMENT FOR IMPLEMENTING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Perum Jamkrindo realizes that its presence in the credit guarantee industry is not just for profit. The Company's existence is attached to the obligation to participate in developing and advancing the community (people) and the environment (planet) around the Company's area of operation. Thus, Perum Jamkrido is committed to applying the principle of balance between profit, people, and the planet.

Within that framework, the Company implements the Partnership and Community Development Program (PKBL). The implementation of the PKBL within Perum Jamkrindo in 2019 referred to the Regulation of the State Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09 / MBU / 07/2015 concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and Community Development Programs, which last was amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-02 / MBU /7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09 / MBU /07/2015 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program promulgated in Jakarta on July 20, 2017. Distribution of Perum Jamkrindo's Partnership and Community Development Program also refers to the Board of Directors Regulation No. 15 / Per-Dir / 1 / VII / 2019 concerning Guidelines for Delegating Administrative Authority and Policy of Perum Jamkrindo.

The scope of the implementation of the PKBL program is divided into two main programs. First, fostering by State-Owned Enterprises for micro and medium enterprises to improve the quality of their business through the Partnership program, and the second is direct and indirect assistance in the aspects of environment conservation, social-community, or disaster management which are included in the Community Development program.

To optimize the implementation of the two main programs to be on target and appropriate, through the Decree of the Board of Directors of Perum Jamkrindo Number: 01 / KD / 1 / V / 2018, the two programs become part of the Corporate Secretary's in the Main Directorate. In line with the spirit of sustainable development which is currently being spawned by the government, the PKBL organized by Perum Jamkrindo is not limited to philanthropic activities, but increases at the level of corporate community development. With that, the programs that exist, as much as possible, can contribute to the independence of Micro, Small, and Medium Enterprises

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta menopang pemberdayaan kondisi sosial masyarakat.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2019, Perum Jamkrindo telah melaksanakan kegiatan Kemitraan dengan melakukan pembinaan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di seluruh wilayah Indonesia melalui kantor-kantor cabang Perusahaan. Perum Jamkrindo sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penjaminan Kredit Usaha Rakyat memiliki tanggung jawab yang besar dalam melakukan kegiatan tersebut dalam mendukung penguatan UMKM & Koperasi di Indonesia. Dengan kesungguhan dalam melaksanakan kegiatan Kemitraan, Perusahaan dapat menjadikan hal tersebut sebagai *pilot project* bagi pembinaan UMKM & Koperasi yang menjadi nasabah Jamkrindo.

Selain Program Kemitraan, tanggung jawab sosial dan lingkungan Perum Jamkrindo juga diwujudkan melalui pelaksanaan Program Bina Lingkungan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi. Berbeda dengan Program Kemitraan yang sifatnya pinjaman dana dengan jasa administrasi yang sangat ringan, penyaluran dana Program Bina Lingkungan bersifat bantuan, atau kegiatan filantropi. Bantuan antara lain disalurkan untuk korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, sarana ibadah dan bantuan sosial kemasyarakatan. Semua program atau kegiatan PKBL selama tahun pelaporan,kami sampaikan melalui Laporan Keuangan PKBL Perum Jamkrindo 2019, yang sekaligus merupakan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran program PKBL 2019. Laporan meliputi informasi mengenai penanggungjawab program, besaran dana yang dimiliki, rencana program serta realisasi penyaluran dana tersebut.

DASAR KEBIJAKAN PKBL

Dalam menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan,Perum Jamkrindo mendasarkan diripada kebijakan-kebijakanberikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil

and support the empowerment of the social conditions of the community.

As in previous years, in 2019, Perum Jamkrindo has carried out Partnership activities by fostering Micro, Small, and Medium Enterprises in all regions of Indonesia through the Company's branch offices. Perum Jamkrindo, as a company engaged in the People's Business Credit guarantee business, has a great responsibility in carrying out these activities in supporting the strengthening of MSMEs & Cooperatives in Indonesia. With sincerity in implementing Partnership activities, the Company can turn the program into a pilot project for the MSMEs & Cooperatives fostering, which became Jamkrindo's customers.

In addition to the Partnership Program, the social and environmental responsibilities of Perum Jamkrindo are also realized through the implementation of the Community Development Program as a form of concern and attention to the communities around the Company's area of operation. It is different from the Partnership Program. The partnership program is a program in the form of fund lending with very light administrative services, whereas the nature of the distribution of funds for Community Development Programs is in the form of aid or philanthropic activities. Such assistance includes aids to victims of natural disasters, aids for education and/or training, facilities for worship, and social assistance. All PKBL programs or activities during the reporting year were included in the Perum Jamkrindo 2019 PKBL Financial Report since it is also a form of implementation of the principle of accountability in managing the 2019 PKBL program budget. The report includes information about the person in charge of the program, the amount of funds owned, program plans, and realization of distribution of the fund.

BASIS OF PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM POLICY

In running the Partnership and Community Development Program, Perum Jamkrindo bases itself on the following policies:

1. Government Regulation No. 32 of 1998 concerning the Fostering and Development of Small Businesses.
2. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.
3. Law No. 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises.
4. Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-05 / MBU / 2007 of 2007 concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses

dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (Permen BUMN No. 5/2007).

5. Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara.
6. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
7. PER-03/MBU/12/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
8. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/ 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 Juli 2017.
9. Peraturan Direksi Perum Jamkrindo Nomor 29/Per-Dir/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pedoman Akuntansi dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
10. Peraturan Direksi Perum Jamkrindo Nomor 15/Per-Dir/VII/2019 10 Juli 2019 tentang Pedoman Pendelegasian Kewenangan Administrasi dan Kebijakan Perum Jamkrindo.

and the Community Development Program as last amended by the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-08 / MBU / 2013 of 2013 concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-05 / MBU / 2007 Concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and Community Development Programs (Minister of SOEs Regulation No. 5/2007).

5. Circular Letter of the State Minister of SOEs No. SE-02 / MBU / Wk /2012 dated February 23, 2012, concerning the Establishment of Accounting Guidelines for the Partnership and Community Development Program (PKBL) of State-Owned Enterprises.
6. PER-09 / MBU / 07/2015 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program.
7. PER-03 / MBU / 12/2016 concerning Changes to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09 / MBU / 07/2015 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program.
8. PER-02 / MBU / 7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09 / MBU / 07/2015 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program on July 20, 2017.
9. Regulation of the Board of Directors of Perum Jamkrindo Number 29 / Per-Dir / VIII / 2017 dated August 25, 2017, concerning Accounting Guidelines and Partnership and Community Development Program's SOP of Perum Jamkrindo.
10. Regulation of the Board of Directors of Perum Jamkrindo Number 15 / Per-Dir / VII / 2019 July 10, 2019, concerning Guidelines for Delegating Perum Jamkrindo's Administrative Authority and Policy.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
Social and Environmental Responsibility Governance

KEBIJAKAN DAN KOMITMEN

Perum Jamkrindo memiliki tugas moral untuk melaksanakan program dan kegiatan CSR dalam rangka mengembangkan bisnis dan memajukan perekonomian dalam negeri yang berkelanjutan serta senantiasa melayani seluruh Pemangku Kepentingan dengan penuh integritas mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Dalam rangka mewujudkan keharmonisan antara masyarakat dan perusahaan serta wujud kepedulian perusahaan terhadap pengembangan dan kemandirian masyarakat sekitar yang berkelanjutan. Perum Jamkrindo senantiasa melaksanakan Pengembangan Masyarakat sebagai berikut:

1. Memberikan manfaat yang optimal dari bagian laba perusahaan bagi pengembangan masyarakat, sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat umum dan khususnya pada masyarakat sekitar perusahaan, sesuai dengan kemampuan perusahaan, peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.
2. Berkontribusi dan berperan secara aktif dalam pengembangan masyarakat melalui:
   a. Peningkatan kemampuan usaha kecil masyarakat sehingga menjadi tangguh dan mandiri melalui Program Kemitraan, dan
   b. Pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui Program Bina Lingkungan.
3. Melakukan proses peningkatan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sekitar.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan pihak terkait untuk dipahami dan diterapkan secara konsisten, serta ditinjau kesesuaian dan keefektifannya secara berkala.

STRUKTUR ORGANISASI CSR

Pada Tahun Buku 2003, pengelolaan unit PKBL Perum Jaminan Kredit Indonesia masih dilaksanakan oleh Divisi Pembiayaan Usaha sesuai Surat Keputusan Direksi No. 65/ DIR/XII/1998 tanggal 21 Desember 1998 tentang Struktur Organisasi Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, menggantikan Surat Keputusan Direksi No. 43/DIR/I/1998 tanggal 5 Januari 1998 dan No. 31/ KPTS/PKK.2/IX/1995 tanggal 27 September1995 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi.

POLICY AND COMMITMENT

Perum Jamkrindo has a moral duty to carry out CSR programs and activities in the context of developing business and promoting a sustainable domestic economy and always serving all Stakeholders with full integrity in compliance with applicable laws and regulations.

COMMUNITY DEVELOPMENT POLICY

In order to create harmony between the community and the Company as well as a manifestation of the Company's concern for the sustainable development and independence of the surrounding community. Perum Jamkrindo always carries out Community Development as follows:

1. Providing optimal benefits from the Company's profit share for community development as a form of social and environmental responsibility to the general public and especially to the community around the Company, according to the Company's capabilities, laws and regulations, and applicable provisions.
2. Contributing and playing an active role in community development through:
   a. Increasing the capacity of community small businesses so that they become resilient and independent through the Partnership Program and
   b. Empowerment of the community's social conditions through the Community Development Program.
3. Conducting a process of enhancing sustainable community development to improve the welfare and prosperity of the surrounding community.

This policy is communicated to all employees and related parties to be understood and implemented consistently and periodically review its suitability and effectiveness.

CSR ORGANIZATIONAL STRUCTURE

In Fiscal Year 2003, the management of the PKBL unit of Perum Jamkrindo was still carried out by the Business Financing Division according to the Board of Directors' Decree No. 65 / DIR / XII / 1998 dated December 21, 1998, concerning Organizational Structure of Perum Pengembangan Keuangan Koperasi (Public Corporation of Cooperative Financial Development), replacing the Letter of Board of Directors' Decree No. 43 / DIR / I / 1998 dated January 5, 1998, and No. 31 / KPTS / PKK.2 / IX / 1995 dated September 27, 1995, concerning the Organizational Structure of Perum Pengembangan Keuangan Koperasi.

Selanjutnya, menindaklanjuti Peraturan Menteri BUMN No.PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, Direksi Perum Jaminan Kredit Indonesia membentuk unit tersendiri yang khusus menangani unit PKBL sebagaimana termuat dalam Keputusan Direksi No. 36/DIR/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 perihal Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di bawah Direktorat Pengembangan pada Divisi Pengendalian dan di tahun 2010 terjadi perubahan struktur organisasi yang tertuang dalam Keputusan Direksi No. 33/Kep-Dir/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 perihal Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di bawah Direktorat Penjaminan pada Divisi Penjaminan Syariah. Pada tahun 2012 dengan adanya Keputusan Direksi No. 78/Kep-Dir/XI/2012 tanggal 26 November 2012 Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berada di bawah Direktorat Pengembangan.

Selanjutnya diikuti dengan penempatan Pejabat dan Pegawai, Deskripsi Jabatan dan Analisis Jabatan serta *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pelaksanaan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jaminan Kredit Indonesia.

Furthermore, following up on the Minister of SOEs Regulation No. PER-05 / MBU / 2007 dated April 27, 2007, the Board of Directors of Perum Jamkrindo formed a separate unit that specifically handled PKBL units as contained in the Board of Directors Decree No. 36 / DIR / X / 2006 dated October 19, 2006, concerning the Organizational Structure of the Partnership and Community Development Program Unit under the Directorate of Development in the Control Division and in 2010 there was a change in the organizational structure contained in the Board of Directors' Decree No. 33 / Kep-Dir / VII / 2010 dated July 1, 2010, concerning the Organizational Structure of the Partnership and Community Development Program Unit under the Directorate of Guarantee in the Sharia Guarantee Division. In 2012 with the Decree of the Board of Directors No. 78 / Kep-Dir / XI / 2012 dated November 26, 2012, the Partnership and Community Development Program Unit is under the Development Directorate.

Then, followed by the placement of Officials and Employees, Job Description and Job Analysis, as well as the Standard Operating Procedure (SOP) for the implementation of the Partnership and Community Development Program Unit of Perum Jamkrindo.

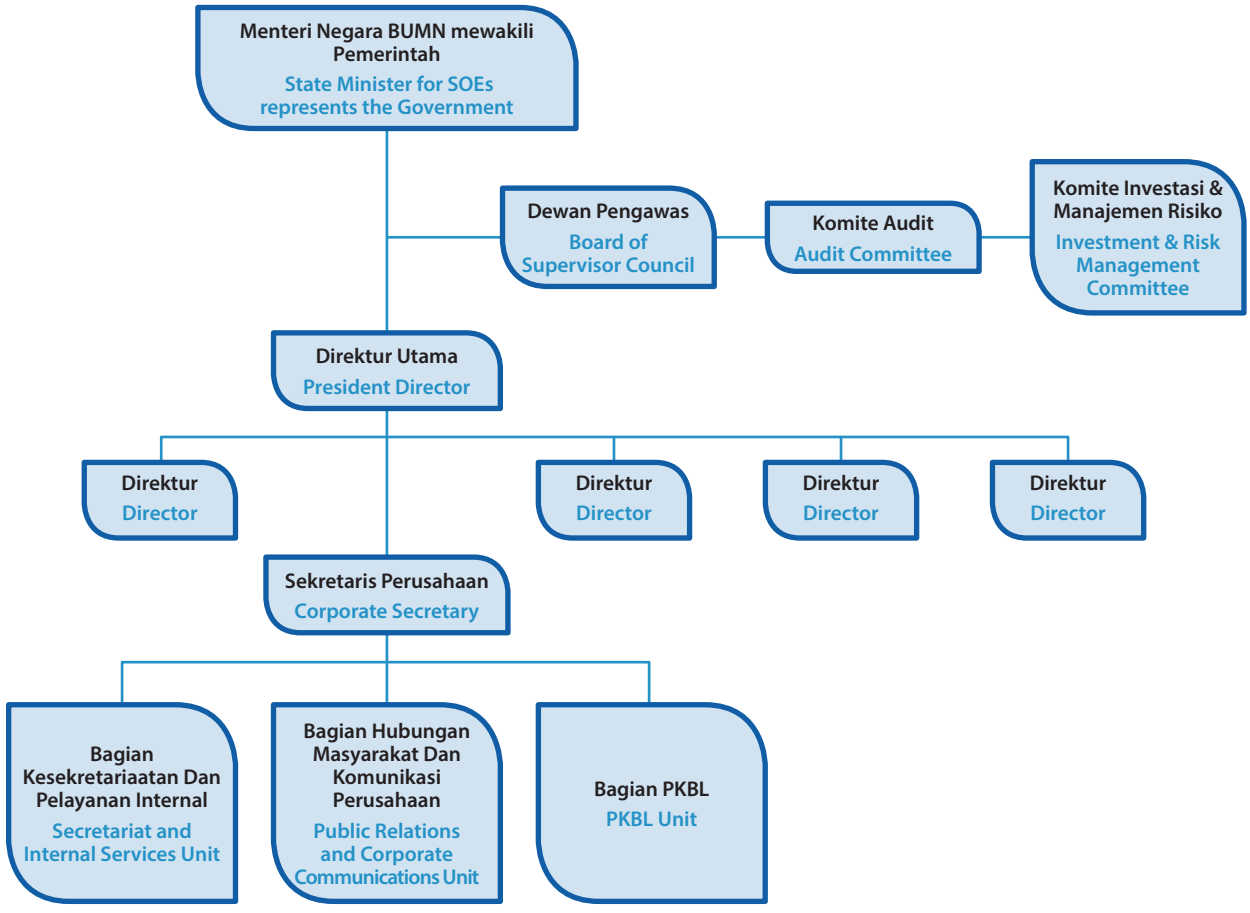

Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Organizational Structure of the Partnership and Community Development Program

Direktur Utama	Randi Anto	President Director
Sekretaris Perusahaan	Abdul Bari	Corporate Secretary
Plt. Kabag	Wildan R Firdaus	Acting Unit Head
Kepala Seksi PK	Irma Hartati	Section Head of Partnership Program
Kepala Seksi BL	Erna Nova	Section Head of Community Development
Staf PKBL	Retno Indriani	PKBL Staff

Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan seperti tersebut di atas mengalami perubahan dibanding struktur per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

The organizational structure of Perum Jamkrindo has changed compare to the structure 2018 as follow:

Direktur Utama	Randi Anto	President Director
Sekretaris Perusahaan	Abdul Bari	Corporate Secretary
Plt. Kabag	Lies Nun Heriyatisyah	Acting Unit Head
Kepala Seksi PK	Erna Nova	Section Head of Partnership Program
Kepala Seksi BL	Irma Hartati	Section Head of Community Development
Staf PKBL	Retno Indriani	PKBL Staff

METODE DAN LINGKUP *DUE DILIGENT*

Penyelenggaraan PKBL oleh Perum Jamkrindo memiliki tujuan yang jelas, yakni memberi dampak positif dan memajukan kondisi sosial masyarakat dan lingkungan yang terhubung, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan melalui pelaksanaan program tepat guna dan berdampak jangka panjang secara bertahap. Kemudian Perusahaan mengembangkan program-program tersebut secara berkesinambungan dengan mengedepankan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Pemahaman program PKBL yang akan dilaksanakan secara komprehensif serta dampak positif yang akan dirasakan, menjadi hal yang utama bagi Perum Jamkrindo dalam mencapai tujuan pelaksanaan PKBL yang ideal, objektif dan tepat sasaran.

METHODS AND SCOPE OF DUE DILIGENT

The implementation of PKBL by Perum Jamkrindo has a clear goal: to have a positive impact and advance the connected social-community and environmental conditions, both directly and indirectly, through the implementation of effective programs and gradual long-term impacts. Then the Company develops these programs on an ongoing basis by prioritizing social, economic, and environmental aspects. Understanding the PKBL program that will be implemented comprehensively and the positive impacts that will be felt become the main thing for Perum Jamkrindo to achieve the ideal, objective, and targeted PKBL implementation goals.

STAKEHOLDERS PENTING YANG TERDAMPAK ATAU BERPENGARUH ATAS KEGIATAN PERUM JAMKRINDO

Perum Jamkrindo dalam menjalankan kegiatan usaha bersentuhan langsung dengan Pemangku Kepentingan. Pemangku Kepentingan yang dimaksud dan dipahami bukan hanya sekedar sekumpulan orang/kelompok yang tinggal di lokasi yang sama dengan wilayah operasional Perusahaan semata, akan tetapi juga mereka yang secara berkesinambungan terlibat dalam proses interaksi bisnis dan sosial Perusahaan. Beberapa stakeholders penting yang terdampak atau berpengaruh atas kegiatan usaha Perum Jamkrindo diantaranya Pemerintah, karyawan, mitra kerja, nasabah, serta masyarakat.

SIGNIFICANT STAKEHOLDERS AFFECTED BY OR AFFECTING PERUM JAMKRINDO'S ACTIVITIES

Perum Jamkrindo in carrying out business activities in direct contact with the Stakeholders who referred to and understood is not just a group of people/groups living in the same location as the Company's operational areas, but also those who are continuously involved in the Company's business and social interaction processes. Some essential stakeholders who are affected by or affecting business activities Perum Jamkrindo includes the Government, employees, business partners, customers, and the community.

PROGRAM DAN KEGIATAN CSR YANG MELEBIHI KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB

Penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perusahaan sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama 2019 seperti Bantuan Korban Bencana Alam, Bantuan Pendidikan dan / atau Pelatihan, Bantuan Peningkatan Kesehatan, Bantuan Pengembangan Prasarana & Sarana Umum, Bantuan Sarana Ibadah, Bantuan Pelestarian Alam, dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan.

SASARAN, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM KERJA TERKAIT ISU-ISU SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

Perum Jamkrindo melalui Departemen PKBL menerapkan strategi dan program kerja dalam bidang PKBL yang meliputi isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan diantaranya dengan melibatkan para Pemangku Kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program PKBL. Disamping itu, Perum Jamkrindo juga melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pelatihan usaha yang berkelanjutan serta berupaya untuk terus meningkatkan kemampuan SDM pengelola PKBL.

PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN PKBL

Dana unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Dana Program Kemitraan, bersumber dari:
   - Dana *revolving* tahun berjalan Program Kemitraan sehingga tidak diambil dari penyisihan laba bersih;

2. Dana Program Bina Lingkungan, bersumber dari:
   - Penyisihan sebagian laba bersih BUMN dengan prosentase sebesar 1,75%;

Penggunaan dana PKBL dibedakan atas:

1. Dana Program Kemitraan, yang diberikan dalam bentuk pinjaman, yaitu:
   a. Pinjaman: diberikan untuk membiayai modal kerja dan (atau) pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
   b. Pinjaman Tambahan: diberikan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam

CSR PROGRAMS AND ACTIVITIES THAT EXCEED OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

The implementation of social and environmental responsibility aims to achieve sustainable economic development to improve the quality of life and the environment that benefits the local community and society in general and the Company itself to establish harmonious, balanced, and appropriate relationships with the environment, values, norms, and culture of the local community.

Activities are undertaken during 2019, for instance, Aid for Victims of Natural Disasters, Education and/or Training Assistance, Health Improvement Assistance, Infrastructure & Public Development Assistance, and Assistance for Worship Facilities, Nature Preservation Assistance, and Social Community Assistance in the Context of Poverty Alleviation.

TARGETS, POLICIES, STRATEGIES AND WORK PROGRAMS RELATED TO SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES

Perum Jamkrindo, through the PKBL Department, implemented strategies and work programs in the field of PKBL covering social, economic, and environmental issues, including involving the Stakeholders in planning and implementing the PKBL program. Besides that, Perum Jamkrindo also conducts community empowerment through sustainable business fostering and training and seeks to continue to improve the HR capabilities of the management of PKBL.

PKBL FINANCING AND BUDGETING

Funds for the Partnership and Community Development Program Unit are as follows:

1. Partnership Program Funds, sourced from:
   - Revolving funds for the Partnership Program's current year so that they are not taken from net profit allowance;

2. Community Development Program Funds, sourced from:
   - Allowance for a portion of SOE's net profit with a percentage of 1.75%;

The use of PKBL funds is divided into:

1. Partnership Program Funds, which are provided in the form of loans, namely:
   a. Loans: provided to finance working capital and (or) purchase fixed assets to increase production and sales.
   b. Additional Loans: provided to finance short-term needs to fulfill orders from business partners of

rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

c. Beban Pembinaan:
   1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
   2) Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
   3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

2. Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

3. Dana Program Bina Lingkungan, digunakan untuk tujuanyang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dalam bentuk sebagai berikut:
   a. Bantuan korban bencana alam;
   b. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
   c. Bantuan peningkatan kesehatan;
   d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
   e. Bantuan sarana ibadah;
   f. Bantuan pelestarian alam; dan/atau
   g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
      1) Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
      2) Penyediaan sarana air bersih;
      3) Penyediaan sarana mandi cuci kakus (MCK);
      4) Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
      5) Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
      6) Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
      7) Bantuan peralatan usaha.

fostered partners.

c. Fostering Expenses:
   1) To finance education, training, apprenticeship, marketing, promotion, and other matters relating to increasing the productivity of the fostered partners and studies/research related to the Partnership Program;
   2) Fostering expenses are in the form of grants and the maximum amount is 20% (twenty percent) of the Partnership Program funds distributed in the current year;
   3) Fostering expenses can only be given to or for the benefit of the fostered partners.

2. The loan amount for each of the fostered partners of the Partnership Program is at most Rp. 200,000,000.00 (two hundred million Rupiah)

3. Community Development Program Funds used to provide benefits to the community in SOE business areas in the following forms:
   a. Aid to Natural Disaster Victims;
   b. Educational assistance, which can be in the form of training, educational infrastructure, and facilities;
   c. Health improvement assistance;
   d. Development of infrastructure and/or public facilities assistance;
   e. Religious facilities assistance;
   f. Nature conservation assistance; and/or
   g. Social assistance in dual poverty alleviation, including to:
      1) Electrification in areas without electricity;
      2) Provision of clean water facilities;
      3) Provision of bathing washing toilet facilities (MCK);
      4) Educational assistance, training, apprenticeship, promotion, and other forms of assistance related to efforts to increase the economic independence of small businesses and the Partnership Program's fostered partners;
      5) Home renovation for disadvantaged people;
      6) Nursery assistance for agriculture, breeding, and fisheries; or
      7) Business equipment assistance.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Corporate Social and Environmental Responsibility in The Scope of Environment

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Perum Jamkrindo menyadari terdapat risiko/dampak yang ditimbulkan dari aktivitas Perusahaan terhadap lingkungan hidup. Untuk itu, Perum Jamkrindo berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait dengan pengelolaan lingkungan, mencegah pencemaran lingkungan, mengupayakan efisiensi energi dan pemberdayaan lingkungan secara berkelanjutan.

RENCANA PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Rencana Program Bina Lingkungan Perum Jamkrindo merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal10 September 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan,yang diperbarui melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/NIBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, diperbarui kembali dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 19 Desember 2016, dan terakhir diperbarui melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 Juli 2017.

Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah Kantor Perum Jamkrindo, yang diselenggarakan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan. Hal ini dilakukan berdasarkan atas kesadaran Perusahaan akan pentingnya keberadaan masyarakat di sekitar Perusahaan, serta Permen BUMN No.PER-02/MBU/7/2017.

Program Bina Lingkungan yang direncanakan Perum Jamkrindo meliputi 7 (tujuh) jenis bantuan sebagai berikut:

1. Bantuan korban bencana alam;
2. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana Pendidikan
3. Bantuan peningkatan kesehatan;

COMMITMENT AND POLICY

Perum Jamkrindo realizes risks/impacts are arising from the Company's activities on the environment. To that end, Perum Jamkrindo is committed to complying with laws and regulations and other environmental management requirements, preventing environmental pollution, and striving for energy efficiency and sustainable environmental empowerment.

COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM PLAN

Perum Jamkrindo Community Development Program Plan refers to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-08 / MBU / 2013 dated September 10, 2013, concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05 / MBU / 2007 concerning the Partnership Program for State-Owned Enterprises with Small Businesses and the Community Development Program, which was updated through the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09 / NIBU / 07/2015 dated July 3, 2015, concerning the Partnership and Community Development Program for State-Owned Enterprises, renewed by the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Regulation No. PER-03 / MBU / 12/2016 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09 / MBU / 07/2015 concerning the Partnership and Community Development Program for State-Owned Enterprises dated December 19, 2016, and most recently updated through the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02 / MBU / 7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09 / MBU / 07/2015 concerning the Partnership Program and the Environmental Development Program for State-Owned Enterprises dated July 20, 2017.

The Community Development Program is a program of empowering the social community conditions around the Perum Jamkrindo Office area, which is carried out through the utilization of the Company's profits. It is done based on the Company's awareness of the importance of the community existence around the Company, as well as regulation of the Minister of SOEs No. PER-02 / MBU / 7/2017.

Community Development Program planned by Perum Jamkrindo covers 7 (seven) types of assistance as follows:

1. Aid for victims of natural disasters;
2. Educational assistance can be in the form of training, educational infrastructure, and facilities
3. Health improvement assistance;

4. Bantuan pengembangan prasarana dan/ atau sarana umum;
5. Bantuan sarana ibadah;
6. Bantuan pelestarian alam; dan/atau
7. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
   a. Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
   b. Penyediaan sarana air bersih;
   c. Penyediaan sarana mandi cuci kakus (MCK);
   d. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
   e. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
   f. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
   g. Bantuan peralatan usaha.

4. Public infrastructure and/or facilities development assistance;
5. Worship facilities assistance;
6. Nature preservation assistance; and/or
7. Social community assistance for poverty alleviation, including:
   a. Electrification in areas without electricity;
   b. Provision of clean water facilities;
   c. Provision of bathing washing toilet facilities (MCK);
   d. Educational assistance, training, apprenticeship, promotion, and other forms of assistance related to efforts to increase the economic independence of small businesses in addition to the Partnership program's fostered partners;
   e. Home renovation for disadvantaged people;
   f. Nursery assistance for agriculture, breeding, and fisheries; or
   g. Business equipment assistance.

No	Uraian Description	2019 Rp	2018 Rp	Kenaikan/ Penurunan % Increase/Decrease in %
		1	2	1-2/2
1	Bantuan Korban Bencana Alam Aid for victims of natural disasters	237.032.782	546.253.091	-56,61%
2	Bantuan Pendidikan dan / atau Pelatihan Educational and/or training assistance	1.001.117.503	4.291.276.793	-76,67%
3	Bantuan Peningkatan Kesehatan Health improvement assistance	233.414.000	112.000.000	108,41%
4	Bantuan Pengembangan Prasarana &Sarana Umum Public infrastructure & facilities development assistance	201.539.566	535.780.000	-62,38%
5	Bantuan Sarana Ibadah Worship facilities assistance	517.951.600	1.169.085.000	-55,70%
6	Bantuan Pelestarian Alam Nature preservation assistance	137.793.333	57.430.000	139,93%
7	Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Social community assistance for poverty alleviation	2.973.553.093	6.731.009.765	-55,82%
	Jumlah/Total	**5.302.401.877**	**13.442.834.649**	**-60,56%**

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
BIDANG PRAKTIK KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Corporate Social and Environmental Responsibility in The Scope of Employment, Occupational Health and Safety

KEBIJAKAN DAN KOMITMEN

Dalam bidang ketenagakerjaan, Perum Jamkrindo memiliki komitmen dan kebijakan untuk menerapkan praktik kepegawaian terbaik sejalan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan dalam bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam seluruh kegiatan.

KEGIATAN YANG DILAKUKAN DAN DAMPAKNYA

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja Perum Jamkrindo senantiasa menjunjung tinggi asas kesetaraan dan kesempatan kerja. Pada akhir tahun 2019, jumlah pegawai Perusahaan sebanyak 1.736 orang yang tersebar di seluruh wilayah operasional Perum Jamkrindo. Dari jumlah pegawai tersebut, sebanyak 1.103 orang merupakan pegawai laki-laki, dan sebanyak 633 orang merupakan pegawai perempuan.

Dalam proses rekrutmen, Perum Jamkrindo menekankan prinsip keterbukaan, kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan menitik beratkan sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas tinggi dan memiliki kompetensi yang unggul serta sesuai dengan kebutuhan usaha. Perusahaan juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai termasuk hak untuk memperoleh promosi pengembangan karir, pendidikan dan hak-hak pegawai lainnya yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN

Dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Sasaran, Perum Jamkrindo telah merancang program pelatihan dan pengembangan bagi pegawai secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan. Setiap pegawai mempunyai kesempatan yang setara dalam meningkatkan kompetensinya sesuai dengan potensi, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.

Untuk mengembangkan kompetensi SDM, Perum Jamkrindo menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan yang dilaksanakan baik secara Intra, *In-house, Public Training, On the Job*, dan *Overseas*. Jenis pelatihan dapat berupa pelatihan kompetensi, keterampilan teknis/fungsional, dan sertifikasi keahlian yang dibutuhkan sesuai tuntutan tugasnya (*mandatory training*), pelatihan manajerial serta berbagai sesi *knowledge sharing*. Selain itu, Perusahaan juga memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan formal pasca sarjana.

REMUNERASI

Perum Jamkrindo senantiasa memberikan imbal jasa yang sesuai dengan atas hasil kerja seluruh pegawai yang sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. Dalam pemberian remunerasi, Perusahaan tidak membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan. Perbedaan hanya terjadi apabila terdapat perbedaan atas kinerja kompetensi atau pengalaman kerja.

POLICY AND COMMITMENT

In employment, Perum Jamkrindo has a commitment and policy to implement best employment practices in line with applicable regulations and provisions. Whereas in Occupational Health and Safety (K3), the Company is committed to always prioritizing occupational health and safety in all activities.

ACTIVITIES UNDERTAKEN AND THE IMPACTS

Gender and Employment Opportunities Equality of Perum Jamkrindo always upholds the principle of equality and employment opportunities. At the end of 2019, the Company had 1,736 employees spread throughout the Perum Jamkrindo operational areas. Of the total number of employees, 1,103 are male employees, and 633 are female employees.

In the recruitment process, Perum Jamkrindo emphasizes the principles of openness, fairness, and equality. The Company focuses on the quality and high integrity of human resources and has superior competence and according to business needs. The Company also provides equal opportunities for all employees, including the right to get promotion of career development, education, and other employee rights listed in the Collective Labor Agreement (PKB) and the applicable laws and regulations.

EDUCATION AND/OR TRAINING

To achieve the Vision, Mission, and Targets, Perum Jamkrindo has designed training and development programs for employees on an ongoing basis. The aim is to improve competence and performance according to Company values. Every employee has an equal opportunity to improve his/her competence according to his/her potential, abilities, and skills.

To develop HR competencies, Perum Jamkrindo organizes various forms of training, carried out in Intra, In-house, Public Training, On the Job, and Overseas. This type of training can be in the form of competency training, technical/functional skills, and certification of expertise required according to the demands of their duties (mandatory training), managerial training, and various knowledge sharing sessions. Besides, the Company also provides scholarships to continue formal postgraduate education.

REMUNERATION

Perum Jamkrindo always provides compensation according to all employees' performance results according to applicable rules and standards. In granting remuneration, the Company does not distinguish between gender, ethnicity, religion, race, and class. Differences only occur if there are differences in the performance of competencies or work experiences.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Corporate Social and Environmental Responsibilities in The Scope of Human Rights

Perum Jamkrindo memiliki kebijakan, rumusan, serta perencanaan kegiatan operasional usaha yang senantiasa menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Bagi Perum Jamkrindo, HAM bersifat inheren, tidak dapat dicabut, universal, tidak terpisahkan dan saling tergantung (inherent, inalienable, universal, indivisible and interdependent). Karena itu, Perum Jamkrindo senantiasa mengedepankan prinsip untuk tidak melanggar hak Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Perum Jamkrindo has policies, formulations, and plans for business operations that always respect human rights. For Perum Jamkrindo, human rights are inherent, inalienable, universal, indivisible, and interdependent. Therefore, Perum Jamkrindo always puts forward the principle of not violating stakeholders' rights according to applicable rules and regulations.

Inisiatif yang dilakukan Perum Jamkrindo dalam rangka menjunjung tinggi aspek HAM diantaranya terlihat dalam proses rekrutmen. Perusahaan memberikan hak kepada putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung dan membangun karir bersama Perum Jamkrindo. Rekrutmen yang dilakukan dilandasi oleh prinsip dan asas kesetaraan tanpa membedakan aspek gender, suku, ras, agama yang sejalan dengan ketentuan yang berlaku baik di internal maupun peraturan-peraturan eksternal. Perum Jamkrindo juga mengimplementasikan prinsip HAM dalam hal pengupahan, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja, kondisi lingkungan kerja, pendidikan dan pelatihan, serta hal terkait lainnya dengan bidang ketenagakerjaan. Perusahaan menjamin bahwa seluruh karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan usaha.

Initiatives undertaken by Perum Jamkrindo in the context of upholding human rights aspects include the recruitment process. The Company gives the nation's best sons and daughters the right to join and build a career with Perum Jamkrindo. Recruiting is based on the principles of equality without distinguishing aspects of gender, ethnicity, race, or religion that are in line with the applicable provisions, both internal and external regulations. Perum Jamkrindo also implements human rights principles in terms of wages, welfare, workforce social security, working environment conditions, education and training, and other matters related to the employment field. The Company guarantees that all employees have the same opportunity to attend education and training programs according to the needs and business development plans.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN OPERASI YANG ADIL

Corporate Social and Environmental Responsibility in The Scope of Fair Operations



Komitmen dan kebijakan Perusahaan dalam pelaksanaan PKBL terkait dengan operasi yang adil tertuang dalam berbagai kebijakan internal yang telah dirumuskan. Praktik operasi yang adil menyangkut perilaku etis dalam hubungan Perum Jamkrindo dengan perusahaan lain, termasuk juga hubungan dengan Lembaga pemerintah, serta mitra bisnis Perum Jamkrindo. Inisiatif praktik operasi yang adil yang dilakukan Perusahaan terlihat pada pelaksanaan sosialisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, independensi dalam proses politik, pengadaan barang dan jasa, kompetisi yang adil *(fair competition)*, perlindungan kepada hak Nasabah, perilaku yang bertanggung jawab secara sosial dan hubungannya dengan perusahaan atau perusahaan lain, serta menghormati hak kekayaan intelektual atau hak cipta.

Perum Jamkrindo menerapkan inisiatif operasi yang adil dalam pelaksanaan kebijakan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Perusahaan mengimplementasikan proses pengadaan barang/jasa secara transparan dan obyektif sehingga semua mitra kerja atau rekanan diperlakukan secara fair dan wajar.

Dalam hal *fair competition*, Perum Jamkrindo secara berkelanjutan terus melakuan inovasi dan efisiensi, dalam rangka mendorong pertumbuhan kinerja. Selain itu, Perusahaan juga menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang konsisten sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta mempromosikan kesadaran karyawan tentang pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku dan persaingan yang adil. Lebih lanjut, Perum Jamkrindo juga senantiasa memperhatikan konteks sosial di mana Perusahaan beroperasi dan tidak memanfaatkan kondisi sosial untuk mencapai keunggulan kompetitif yang tidak adil.

The Company's commitment and policies in implementing PKBL related to fair operations are contained in various internal policies that have been formulated. Fair operating practices involve ethical behavior in the relationship of Perum Jamkrindo with other companies, including relations with government agencies and Perum Jamkrindo's business partners. The Company's fair operation practices initiative is seen in the implementation of socialization on anti-corruption policies and procedures, independence in the political process, procurement of goods and services, fair competition, protection of Customers' rights, socially responsible behavior, and relationships with the Company or other companies, and respect intellectual property rights or copyrights.

Perum Jamkrindo implemented a fair operating initiative in the implementation of goods and services procurement policies. The Company implements the procurement of goods/services transparently and objectively so that all business partners or partners are treated fairly and reasonably.

Perum Jamkrindo continues to carry out innovation and efficiency to encourage performance growth in terms of fair competition. Besides, the Company also conducts business activities consistently according to applicable laws and regulations and promotes employee awareness about the importance of compliance with applicable laws and fair competition. Furthermore, Perum Jamkrindo also always pays attention to the social context in which the Company operates and does not utilize social conditions to achieve unfair competitive advantages.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Corporate Social and Environmental Responsibilities in The Scope of Social and Community Development

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

PROGRAM KEMITRAAN

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Permen No. PER-02/MBU/7/2017.

Tanggung jawab terhadap mitra binaan diwujudkan dalam bentuk pembinaan mitra binaan. Sumber dana untuk pembinaan mitra binaan adalah dana Pembinaan Program Kemitraan, yaitu maksimal sebesar 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan dalam tahun berjalan. Program Kemitraan yang telah dilakukan antara lain meliputi pemberian pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, pemberian bantuan dalam bentuk hibah untuk pembiayaan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

PARTNERSHIP PROGRAM

The SOE Partnership Program with Small Businesses, hereinafter referred to as the Partnership Program, is a program to improve the capacity of small businesses to become resilient and independent through the use of funds from the SOE profit. Small businesses are small-scale economic activities of the people which fulfill the criteria of net worth or annual sales proceeds and ownership as stipulated in Minister Regulation No. PER-02/MBU/7/2017.

The responsibility towards the fostered partners is realized in the form of fostering foster partners. The source of funds for the fostering of fostered partners is the fostering funds of the Partnership Program, which is a maximum of 20% of the Partnership Program funds distributed in the current year. The partnership program that has been carried out includes the provision of loans to finance working capital and or the purchase of fixed assets in the context of increasing production and sales, assisting in the form of grants to finance education, training, apprenticeship, marketing, promotions, and other matters relating to Increased fostered partner productivity.



Kelompok Tani Kopi
Coffee Farmers Group

Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli
Catur Village, Kintamani District, Bangli Regency

"Terima kasih jamkrindo sudah diberi bantuan dana, pengelolaan kopi sehingga produksi kopi meningkat"

Thank you, Jamkrindo, for providing financial assistance, processing coffee so that coffee production increases



Kelompok Tani Kopi
Coffee Farmers Group

Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli
Catur Village, Kintamani District, Bangli Regency

KELOMPOK TANI KOPI

Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali tak hanya menawarkan pemandangan alam yang eksotik, tetapi juga menyajikan produk unggul dan unik. Salah satunya adalah kopi, sangat disayangkan produk tersebut belum dikembangkan dan dikelola secara maksimal. Melihat potensi tersebut Perum Jamkrindo berkomitmen membantu petani kopi di wilayah Kintamani, Bangli, Bali. Melalui sinergi BUMN antara Perum Jamkrindo bekerjasama dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), para petani kopi binaan diberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan agar menghasilkan nilai tambah untuk mengembangkan usaha kopi. Unit Usaha Pengolahan Kopi Catur Paramitha Subak Abian Wanasari Kenjung yang memproduksi kopi khusus yakni Arabika *specialty* dengan merek Jempolan.

Untuk mencapai target, Perum Jamkrindo berkomitmen membantu memberikan edukasi, pelatihan serta pendampingan. Perum Jamkrindo telah merancang dan melaksanakan program Pelatihan *setup* kopi diselenggarakan selama 3 hari dan pelatihan sangrai kopi selama 2 hari.

Di Desa ini, Perum Jamkrindo juga memberikan program kemitraan berupa pinjaman, peningkatan kapasitas usaha, dan memberikan bantuan bina lingkungan. Perum Jamkrindo memberikan pinjaman kemitraan sebesar Rp 500 juta untuk

COFFEE FARMERS GROUP

Catur Village, Kintamani District, Bangli Regency, Bali offers exotic natural scenery and presents superior and unique products. One of them is coffee. Unfortunately, the product has not yet been developed and managed to its full potential. Seeing this potential, Perum Jamkrindo is committed to helping coffee farmers in the Kintamani region, Bangli, Bali. Through the BUMN synergy between Perum Jamkrindo in cooperation with PT Permodalan Nasional Madani (Persero), fostered coffee farmers are given increased knowledge and skills to produce added value to develop coffee businesses. Unit Usaha Pengolahan Kopi Catur Paramitha Subak Abian Wanasari Kenjung (Coffee Processing Business Unit of Catur Paramitha Subak Abian Wanasari Kenjung) which produces specialty coffee, namely Arabica specialty with the brand name Jempolan.

To achieve the target, Perum Jamkrindo is committed to helping provide education, training, and assistance. Perum Jamkrindo has designed and implemented a coffee set up training program held for 3 (three) days and coffee roasting training for 2 (two) days.

In this village, Perum Jamkrindo also provides partnership programs in the form of loans, business capacity building, and community development assistance. Perum Jamkrindo provided a partnership loan of Rp 500 million to 10 members of the Kenjung

10 anggota Kelompok Tani Kenjung Wanasari, yang telah dilunasi di awal tahun 2019. Ketua Kelompok Tani Kopi Gusti Ngurah Rupa (48 tahun) menuturkan, pinjaman kemitraan tersebut sangat membantu para petani dalam memenuhi kebutuhan permodalan. Unit Usaha Pengolahan Kopi Catur Paramitha Subak Abian Wanasari Kenjung telah menjadi Mitra Binaan dari Program Kemitraan Perum Jamkrindo selama 2,5 tahun sejak Desember 2018.

Perum Jamkrindo telah membentuk tim khusus agar para petani kopi tersebut bisa meningkatkan pendapatannya. Sebelum bantuan Jamkrindo diberikan kepada kelompok taninya, panen yang dihasilkan per hektare hanya menghasilkan sekitar 3 sampai 3,5 ton gelondong merah, namun saat ini panen kopinya bisa mencapai 5 ton gelondong merah. Omzet yang didapat dari penjualan kopi tahun 2019 adalah sebesar Rp350 juta dan keuntungan 63juta, meningkat signifikan 787,50%-1005% apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu, hanya 6-8 juta. Produk kopi dijual dikedai-kedai kopi yang berada di Bali, Bogor dan Surabaya, selain itu juga mengekspor kopinya ke Vietnam, Australia, dan Jepang.

Selain itu, pada tanggal 24 Mei 2019 Perum Jamkrindo juga memberi bantuan berupa Peralatan Barista sebesar Rp50.000.000 dalam bentuk 6 manual *brewing*. Kedepannya Kelompok Tani berharap juga diberikan mesin *roasting* yang standar.

PENGRAJIN SILVER

Yogjakarta memiliki banyak potensi, daya tarik dan keunikan tersendiri, sebuah kota dengan sejuta kenangan. Hal tersebut, membuat Yogjakarta menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Satu hal yang tidak boleh dilewatkan oleh wisatawan adalah membeli kerajinan tangan. Salah satu pengrajin perak di Kotagede adalah bapak Nur Purwanto (60 tahun) yang menjalankan usahanya sejak tahun 1985. Kerajinan silver merupakan budaya turun temurun sejak berdirinya keraton di Yogjakarta. Toko ini terletak di Jl. Kemasan No 69 Kotagede, Yogjakarta yang merupakan pusat kerajinan perak terbesar di Jogja.

Produk Silver/plated yang dijual berupa tas, kerang, piring, mangkok, sendok/garpu Makan, bros, cincin, miniatur borobudur, kapal, becak, dan andong, kerjainan tersebut diproduksi rumahan. Produk yang paling diminati adalah cincin nikah dan batu akik. Pak Nur bergabung menjadi Mitra Binaan Perum Jamkrindo pada tahun 2018. Awalnya mengetahui program kemitraan dari Pameran yang diadakan Jamkrindo Pusat pada tahun 2018 yang diadakan di Hotel Inna Garuda di Malioboro. Saat pameran Bapak Nur belum menjadi mitra binaan.

Wanasari Farmer Group, which was repaid in early 2019. Chairman of the Coffee Farmer Group Gusti Ngurah Rupa (48 years old) said the partnership loan was very helpful for farmers in meeting their capital needs. Unit Usaha Pengolahan Kopi Catur Paramitha Subak Abian Wanasari Kenjung (Coffee Processing Business Unit of Catur Paramitha Subak Abian Wanasari Kenjung) has been a Fostered Partner of the Perum Jamkrindo Partnership Program for 2.5 years since December 2018.

Perum Jamkrindo has formed a special team so that coffee farmers can increase their income. Before Jamkrindo's assistance was given to his farmer group, the harvest produced per hectare only produced around 3 to 3.5 tons of Gelondong Merah, but currently, the coffee harvest could reach 5 tons of Gelondong Merah. Turnover obtained from the sale of coffee in 2019 amounted to Rp350 million and a profit of 63 million, a significant increase of 787.50% -1,005% compared to the previous year ie, 6-8 million. Coffee products are sold in coffee shops in Bali, Bogor, and Surabaya, while also exporting coffee to Vietnam, Australia and Japan.

Besides, on May 24, 2019, Perum Jamkrindo also assisted in the form of Barista Equipment, amounting to Rp 50,000,000 in the form of 6 manual brewings. In the future, the Farmer Group hopes that a standard roasting machine will also be provided.

SILVER CRAFTSMAN

Yogjakarta has many potentials, charms, and uniqueness, a city with a million memories. That makes Yogjakarta one of the favorite tourist destinations in Indonesia. One thing that tourists should not miss is buying handicrafts. One of the silver craftsmen in Kotagede is Mr. Nur Purwanto (60 years old), who has been in business since 1985. Silver craft has been a hereditary culture since the establishment of the palace in Yogyakarta. This store is located on Jl. Kemasan No. 69 Kotagede, Yogjakarta, which is the biggest silver craft center in Jogja.

Silver/plated products are sold in bags, shells, plates, bowls, spoons/forks, brooches, rings, Borobudur miniature, ships, rickshaws, and horse carts, the works are produced at home. The most popular products are wedding rings and agate. Mr. Nur joined to become Perum Jamkrindo's Fostered Partners in 2018. Initially learned of the partnership program from the Exhibition held by Jamkrindo Head Office in 2018 at the Inna Garuda Hotel in Malioboro. At the time of the exhibition, Mr. Nur was not yet a fostered partner.

Pak Nur mendapatkan pinjaman sebesar Rp 30 juta untuk menambah modal usaha dalam pembelian bahan baku perak, jangka waktu 2 tahun untuk mengembalikan pinjaman. Omzet yang didapat selama setahun sekitar Rp20 juta. Sejak bergabung dengan program Jamkrindo usaha dapat meningkat berkat penambahan modal untuk membuat produk konsumen.

Ketika Perum Jamkrindo mengadakan berbagai seminar atau pameran di sekitaran Jogja Pak Nur sering dilibatkan. Pak Nur juga berharap bahwa usahanya dapat diajak bergabung kedalam berbagai seminar atau pameran di dalam dan luar negeri. Target pasar yang dituju oleh Pak Nur dalam penjualannya tidak hanya untuk pasar dalam negeri, namun juga luar negeri.

Mr. Nur received Rp 30 million a loan to increase business capital in the purchase of silver raw materials, a period of 2 years to return the loan. Turnover earned during the year around Rp. 20 million. Since joining the Jamkrindo program, businesses can increase thanks to additional capital to make consumer products.

When Perum Jamkrindo held various seminars or exhibitions around Jogja, Pak Nur was often involved. Mr. Nur hopes that his business can be invited to join in various seminars or exhibitions at home and abroad. The target market for Pak Nur in his sales is not only for the domestic market but also abroad.



Nur Purwanto
pengrajin perak
silver craftsmen
Kotagede Yogjakarta

"Sejak bergabung dengan program Jamkrindo usaha toko kami dapat meningkat berkat penambahan modal untuk membuat produk konsumen. Jamkrindo juga sangat membantu dalam keikutsertaan dalam bazaar atau pameran menjadi lebih mudah dan gratis. Selain itu, meningkatkan hubungan bisnis usaha kami dengan pihak pemerintah dan Kementrian Republik Indonesia. Terima kasih banyak Jamkrindo"

"Since joining the Jamkrindo program, our store business has been able to increase thanks to the additional capital to make consumer products. Jamkrindo is also very helpful in participating in the bazaar or exhibition to be easier and free. Besides, improving our business relationships with the government and the Ministry of the Republic of Indonesia. Thank you very much, Jamkrindo."

LAPORAN TAHUNAN 2019 ANNUAL REPORT

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

PERUM JAMKRINDO
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia
T (021) 6540335
F (021) 6540335
E contact@jamkrindo.co.id
W www.jamkrindo.co.id